



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 merupakan pedoman Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan, terencana, dan berkeadilan, diperlukan suatu rencana kerja yang terintegrasi dan komprehensif sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyusunan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Musrenbangda adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
15. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
19. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Belitung Timur.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) Sistematika Penyusunan RKPD Tahun 2025, terdiri atas:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan daerah;
 - f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - g. Penutup.

- (2) Uraian lebih lanjut Sistematika Penyusunan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 3

RKPD disusun dalam rangka menciptakan integrasi, sinkronisasi, sinergitas pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2025 berfungsi sebagai:
 - a. pedoman penyusunan Renja-PD; dan
 - b. pedoman penyusunan KUA, PPAS, dan RAPBD Kabupaten Tahun Anggaran 2025.
- (2) Dalam rangka penyusunan Renja-PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PD menggunakan RKPD Tahun 2025, untuk:
 - a. menyusun Rancangan Akhir Renja-PD; dan
 - b. sebagai bahan untuk penyusunan RKA-PD.

BAB IV
TAHAPAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RKPD

Pasal 5

Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

Pasal 6

Kepala Bappelitbangda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja-PD berkenaan dengan kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra-PD serta tugas pokok dan fungsi PD.

Pasal 7

Kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Kepala PD melakukan pemantauan;
- b. Kepala Bappelitbangda menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing PD;
- c. Kepala PD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya; dan
- d. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

Pasal 8

Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pasal 9

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Prioritas pembangunan Daerah disusun berdasarkan tema pembangunan Tahun 2025 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026.
- (2) Prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

- (3) Rencana program prioritas pembangunan Daerah Tahun 2025, dikelompokkan sesuai dengan prioritas pembangunan Daerah yang secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Setiap Kepala PD mendukung pelaksanaan program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2025.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian kebijakan dilakukan untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah dan program PD yang ditetapkan dalam RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan program strategis nasional;
 - b. pengendalian pelaksanaan dilakukan untuk menjamin prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS sebagai landasan penyusunan RAPBD Tahun 2025; dan
 - c. evaluasi hasil dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2025.
- (3) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2025.
- (4) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025.
- (5) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan secara periodik setiap triwulan pada Tahun 2025.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Juli 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 3 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
ttd

MATHUR NOVIANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 15

Kepala Bagian Hukum Setda
Kab. Belitung Timur,



Amrullah, SH
NIP. 197106022006041005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 15 TAHUN 2024
TANGGAL : 3 JULI 2024
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional serta Regional yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan perencanaan pembangunan pada seluruh wilayah di Indonesia diamanatkan untuk konsisten terhadap setiap aspek pembangunan yang direncanakan dari tingkat Nasional, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota. Rencana Pembangunan tingkat Daerah dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terbagi berdasarkan tujuan yang akan dicapai menurut target waktu tertentu. Dokumen perencanaan tersebut adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan target visi yang akan dicapai dalam tempo 20 tahun, lalu RPJPD dituangkan kembali sebanyak 4 periode pembangunan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang masing-masing berlangsung dalam tempo 5 tahun, selanjutnya dokumen RPJMD dituangkan kembali melalui target tahunan serta skema pencapaian targetnya melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa perencanaan pembangunan memiliki beberapa pendekatan, yakni pendekatan secara Teknokratik, Partisipatif, Politis, *Top Down*, dan *Bottom Up*. Pendekatan Teknokratik adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berfokus pada penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memecahkan masalah pembangunan. Pendekatan ini menekankan pada peran para ahli dan profesional dalam menyusun perencanaan pembangunan. Pendekatan Partisipatif adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan juga masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Pendekatan Politis adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berfokus pada pertimbangan politik dalam penyusunan perencanaan. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya peran pemerintah dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan. Pendekatan *Top Down* adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang dimulai dari pemerintah pusat dan diturunkan ke daerah-daerah. Pendekatan ini menekankan pada peran pemerintah pusat dalam memimpin dan mengarahkan pembangunan. Pendekatan *Bottom Up* adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang dimulai dari daerah dan diusulkan

ke pemerintah pusat. Pendekatan ini menekankan pada peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan.

Melalui seluruh pendekatan perencanaan pembangunan yang telah dijelaskan, diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terkait prinsip yang harus terkandung dalam dokumen perencanaan pembangunan, yakni pembangunan harus diusung secara Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial. Holistik adalah pendekatan yang memandang suatu masalah atau fenomena secara menyeluruh dan tidak terfragmentasi. Dalam konteks perencanaan pembangunan, pendekatan Holistik menekankan pada pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek pembangunan secara bersamaan, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan. Tematik adalah pendekatan yang berfokus pada suatu tema atau isu tertentu. Dalam konteks perencanaan pembangunan, pendekatan Tematik dapat digunakan untuk mengatasi masalah atau isu yang kompleks dan lintas sektoral. Integratif adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya integrasi antar sektor, antar program, dan antar kebijakan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, pendekatan Integratif bertujuan untuk menghindari tumpang tindih dan inefisiensi dalam pelaksanaan pembangunan. Spasial adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya pertimbangan spasial dalam perencanaan pembangunan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, pendekatan Spasial bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan terdistribusi secara merata dan adil di seluruh wilayah.

Dengan mengacu pada seluruh pendekatan juga prinsip perencanaan pembangunan, didapati beberapa hal penting yang akan menjadi fokus utama dalam sekema pembangunan di tahun 2025. Fokus pembangunan di tahun 2025 akan dilatarbelakangi oleh isu penting yang terjadi mulai dari skala Internasional, Nasional, hingga Provinsi dan Kabupaten untuk dapat ditanggulangi dalam dokumen RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 secara komperhensif. Dengan demikian dokumen RKPD ini akan dijadikan acuan utama dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2025.

Pada tahun 2025, Asia Tenggara, khususnya Indonesia, dihadapkan pada sejumlah isu strategis skala internasional yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas dan perkembangan wilayah di Indonesia. Salah satu isu utama adalah ketegangan geopolitik yang mungkin muncul di kawasan tersebut, termasuk persaingan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Selain itu, isu perubahan iklim dan keberlanjutan juga menjadi fokus penting. Indonesia, sebagai negara kepulauan, rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut dan cuaca ekstrem, sebagaimana yang diterangkan oleh World Meteorological Organization (WMO) suhu rata-rata bumi telah meningkat sebesar 1,1 derajat Celcius sejak era pra-industri. Upaya untuk mengatasi perubahan iklim dan mendorong pembangunan berkelanjutan akan menjadi krusial bagi stabilitas ekonomi dan lingkungan di Indonesia, terutama pada wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya,

transformasi teknologi dan keamanan cyber merupakan isu strategis lain yang perlu diatasi. Perkembangan teknologi digital yang cepat membawa tantangan baru terkait keamanan siber, dan Indonesia perlu memperkuat kapasitasnya dalam menghadapi ancaman tersebut sambil tetap mendorong inovasi dan perkembangan ekonomi digital. Ketergantungan pada perdagangan internasional juga menjadi faktor penting. Ketidakpastian dalam hubungan perdagangan global, kebijakan proteksionisme, dan ketidakstabilan ekonomi dunia dapat berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam skala nasional Indonesia masih memiliki beberapa pekerjaan rumah yang harus di selesaikan atas berbagai isu strategis yang belum terselesaikan dalam dekade terakhir. dilansir dari Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin di Indonesia sampai dengan Maret 2023 berada di angka 9,36 persen, dengan rasio gini sebesar 0,388. Sampai dengan bulan Agustus 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia berada di angka 5,32 persen. Indeks Pembangunan Manusia secara agregat di tahun 2023 Indonesia berada di angka 74,39. Isu strategis tersebut terjadi karena beberapa faktor kompleks. Penanganan kemiskinan di Indonesia masih akan menjadi salah satu prioritas untuk diselesaikan. Pada sektor energi, Indonesia masih menjadi negara yang cenderung lambat dalam menggeser produksi energi dari fosil menuju Energi Baru Terbarukan. Peningkatan kapasitas energi terbarukan dan upaya diversifikasi sumber daya energi akan menjadi langkah krusial untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keberlanjutan energi nasional. Selanjutnya, isu lingkungan dan perubahan iklim juga perlu dicermati. Indikator seperti tingkat deforestasi, emisi gas rumah kaca, dan keberlanjutan ekosistem dapat memberikan gambaran tentang dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Indonesia perlu memperkuat kebijakan lingkungan dan melibatkan berbagai pihak untuk memitigasi perubahan iklim dan melindungi keanekaragaman hayati. Ketahanan terhadap bencana alam adalah isu nasional lain yang krusial.

Berdasarkan hasil evaluasi tantangan dan sasaran makro pembangunan, wilayah Sumatera dan Kepulauan Bangka Belitung oleh Bappenas terdapat beberapa kendala yang harus diatasi pada tahun 2025, diantaranya adalah belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan lainnya. Kualitas Sumber Daya manusia di Kepulauan Bangka Belitung mayoritas tenaga kerja didominasi oleh pendidikan menengah kebawah. Selanjutnya kasus degradasi lingkungan karena aktivitas perkebunan kelapa sawit dan pertambangan juga masih terus berlanjut.

Sampai dengan tahun 2023, kondisi Kabupaten Belitung timur dalam angka memiliki Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 70,48 persen dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,41 persen. Indikator TPAK dan TPT mengalami tren positif dibanding tahun 2022 dengan TPAK sebesar 67,36 dan TPT 2,41. Begitu juga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 2022 berada di angka 72,29 naik menjadi 72,86 di tahun 2023. Walaupun demikian sayangnya tren positif tersebut belum berhasil mengatasi masalah

kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur, dimana garis kemiskinan pada tahun 2022 sebesar Rp854.534 naik menjadi Rp899.482 di tahun 2023. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2022 sebesar 6,49 persen naik menjadi 6,73 persen di tahun 2023. Indeks Keparahan Kemiskinan pada tahun 2022 berada di angka 0,19 naik menjadi 0,23 di tahun 2023. Didasari pada beberapa indikator pembangunan dan hasil orientasi yang dilakukan bersama para pemangku kepentingan, didapati beberapa isu strategis daerah yang harus diatasi oleh Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Percepatan Investasi Belum Optimal
2. Sarana dan Prasarana Wilayah Belum Optimal
3. Kualitas Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Masih Rendah
4. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
5. Kualitas Lingkungan Hidup Masih Perlu Ditingkatkan
6. Belum Meratanya Kesejahteraan Masyarakat

RKPD disusun melalui tahapan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD.

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:

- a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan rancangan RKPD.

Rancangan RKPD digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Pada tahap penyusunan rancangan RKPD, aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan RKPD.

a. Perumusan rancangan RKPD

dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengolahan data dan informasi.
- 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah.
- 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah.
- 4) Evaluasi kinerja tahun lalu.
- 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional.
- 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.
- 7) Perumusan permasalahan pembangunan daerah.

- 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah.
 - 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif.
 - 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.
 - 11) Pelaksanaan forum konsultasi publik.
 - 12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.
- b. Penyajian rancangan RKPD.

Rancangan RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan;
- 2) Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- 3) Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- 4) Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- 5) Rencana kerja dan pendanaan Daerah
- 6) Kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
- 7) Penutup

- c. Penyusunan rancangan RKPD.

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Rancangan Renja-PD. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja-PD provinsi sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan RKPD provinsi.

- d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Musrenbang RKPD dilakukan dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD yang mencakup:

- 1) Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota.
- 2) Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi pada Musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan.
- 3) Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi.
- 4) Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.
- 5) Sinergi dengan RKP.

3. Perumusan rancangan akhir RKPD.

Pada perumusan rancangan akhir RKPD, verifikasi terhadap rancangan Renja-PD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.

4. Penetapan RKPD.

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan ditingkat pusat dengan daerah. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah

digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 adalah:

1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pangarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pangarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
36. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 18);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 19);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);
42. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2); dan
43. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pegasutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17).

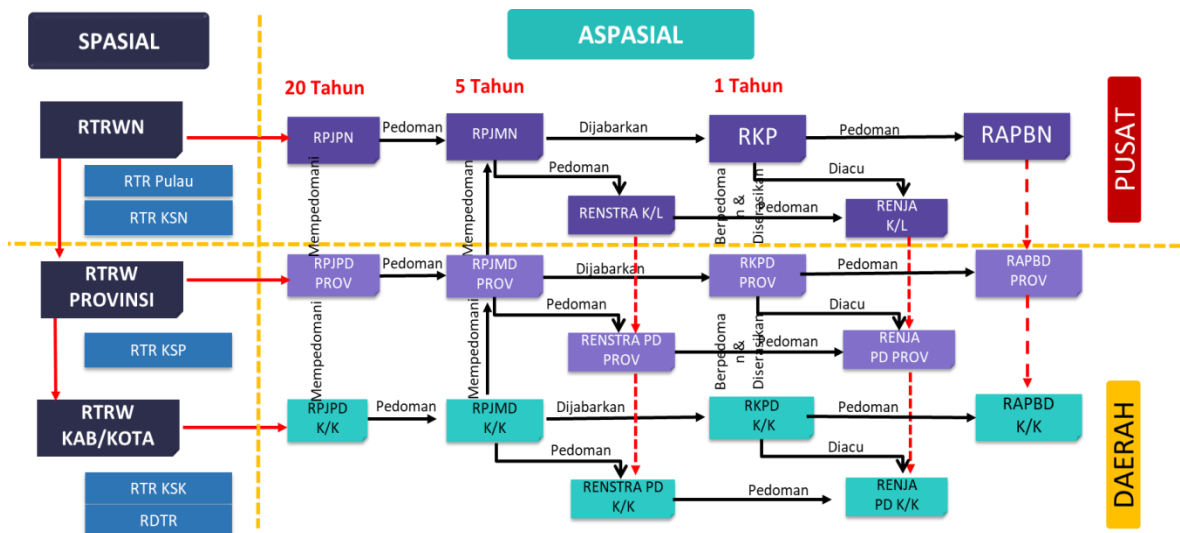
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sebagai sebuah dokumen arahan, RKPD tidak berdiri sendiri namun merupakan dokumen yang memiliki keterpaduan dengan dokumen - dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Hubungan antara RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke 4 (empat) RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
2. RKPD Tahun 2025 merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025, dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2025.
3. Substansi RKPD memuat program dan kegiatan PD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi PD dalam menyempurnakan Renja PD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja PD (Renja PD).

4. Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Belitung Timur sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Belitung Timur.

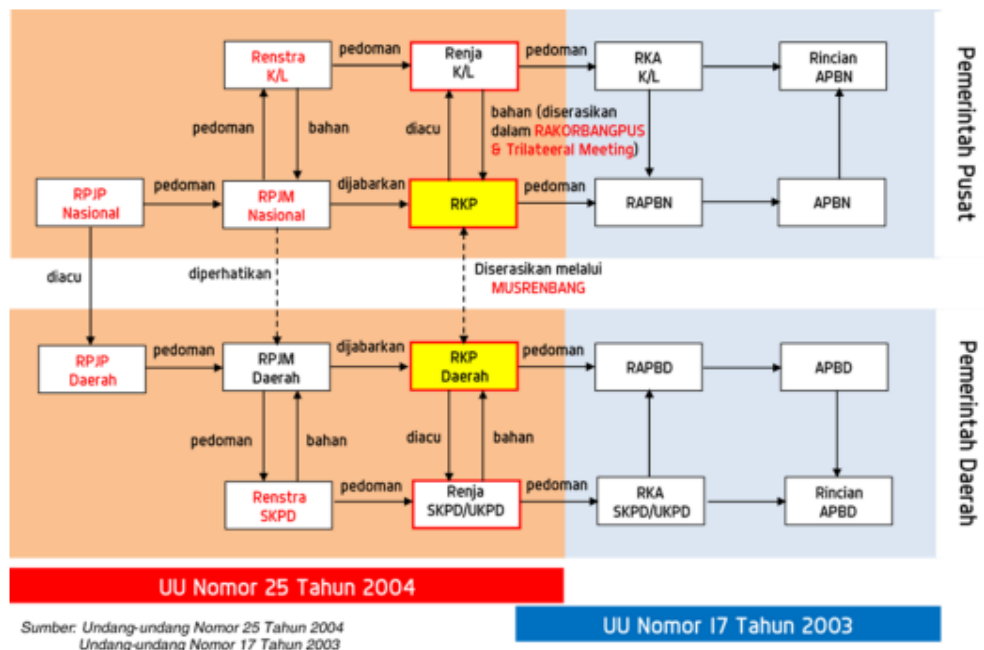
Berdasarkan uraian tersebut diatas keterkaitan hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran baik pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat melalui alur gambar berikut:



Gambar 1. 1 Keterkaitan Antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagaimana diagram alur diatas maka dapat dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Ketiga dokumen nasional diatas menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi dan RKPD Provinsi, dan selanjutnya juga menjadi acuan penyusunan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten dan RKPD Kabupaten. RPJMD dan RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-PD dan Renja-PD serta berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Renstra-PD dan Renja-PD juga akan menjadi bahan dalam penyusunan rancangan awal RPJMD dan RKPD.

Keterkaitan lainnya dari dokumen perencanaan ini adalah hubungannya dengan penganggaran. Bahwa dalam setiap pelaksanaan pembangunan tidak akan terlepas dari anggaran. Perencanaan yang baik akan memberikan hasil penggunaan anggaran yang efektif dan efisien dalam pembangunan. Dalam pengelolaan pemerintahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran dijelaskan pada Pasal 25 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 yang menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman penyusunan RAPBN dan RAPBD.



Gambar 1. 2 Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjamin adanya keterkaitan dan konstistensi antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dalam jangka waktu satu tahun anggaran.
2. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memberikan strategi pembangunan daerah dan program pembangunan daerah serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama periode 1 (satu) tahun.
3. Untuk menjamin optimalisasi penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan.
5. Menyediakan bahan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025;

Tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 adalah:

1. Menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025.
3. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Kerja PD (Renja PD).
4. Tersedianya daftar prioritas kegiatan pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 yang sesuai dengan besaran plafon anggaran yang telah dipilah.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Dengan subbab sebagai berikut:

1.1 Latar Belakang;

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar hukum penyusunan;

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan. Pada subbab ini tidak perlu semua peraturanperundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturanperundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD.

1.3 Hubungan antar dokumen;

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4 Maksud dan Tujuan;

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD.

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada bab ini diuraikan tentang hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025, yang masih memperhatikan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021. Dengan subbab sebagai berikut:

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah;

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini:

- 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah;

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa

mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pada bab ini diuraikan tentang kondisi ekonomi Tahun 2022, 2023 tahun berjalan 2024 dan prakiraan Tahun 2025 dengan subbab sebagai berikut :

3.1 Arah kebijakan Ekonomi Daerah;

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan;

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n).

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada bab ini mengemukakan Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kabupaten Belitung Timur merupakan salah 1 (satu) dari 7 (tujuh) Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 dengan ibukota Manggar dan merupakan satu kesatuan wilayah daratan dengan Kabupaten Belitung yang dipisahkan oleh wilayah daratan dan terletak di Pulau Belitung. Kabupaten Belitung Timur memiliki luas wilayah 17.967,93km² yang terdiri dari luas darat 2.506,90km² dan luas wilayah laut 15.461,03km². Kabupaten Belitung Timur dibagi menjadi 7 (tujuh) kecamatan dengan 39 desa. Selain itu kabupaten ini berada pada posisi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-I) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan. Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Kabupaten Belitung
- Sebelah Timur: Selat Karimata
- Sebelah Selatan: Laut Jawa
- Sebelah Utara : Laut Natuna

Tabel 2. 1 Luas wilayah Kabupaten Belitung Timur

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
1	Manggar	229,00	9,13
2	Damar	236,90	9,45
3	Kelapa Kampit	498,51	19,89
4	Gantung	546,30	21,79
5	Simpang Renggang	390,70	15,58
6	Simpang Pesak	243,30	9,71
7	Dendang	363,20	14,49
TOTAL		2.506,90	100

Sumber: RTRW Kab. Belitung Timur, Tahun 2014-2034

Secara geografis, batas-batas administrasi Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada gambar peta berikut ini:



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Belitung Timur
Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, 2023

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara Geografis Kabupaten Belitung Timur terletak diantara 107°45’-108°18’ Bujur Timur dan 02°30’-03°15’ Lintang Selatan. Posisi geografis Kabupaten Belitung Timur yang berada di jalur Selat Karimata, merupakan salah satu potensi tersendiri yang dimiliki wilayah ini. Sebagian besar wilayah Kabupaten Belitung Timur adalah laut dengan luas mencapai 15.461,03km², hal ini menyebabkan daerah ini kaya dengan pantai, yang mana ada 17 pantai yang indah, antara lain Pantai Nyiur Melambai, Pantai Punai, Pantai Tanjung Keluang, Pantai Burung Mandi, dan lainnya

2.1.1.3 Topografi

Berdasarkan Peta Topografi, keadaan alam Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian antara 0-50 mdpl dengan luas sebesar 248.892,51 Ha, Ketinggian antara 50-200 mdpl sebesar 9.557,08 Ha dan Ketinggian 200-500 mdpl sebesar 913,76 ha. Untuk lebih jelasnya kondisi topografi Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 2 Topografi Kabupaten Belitung Timur

No	Kecamatan	Ketinggian		
		< 50 m	50 - 200 m	200 - 500 m
1	Kelapa Kampit	51688,3 ha	1349,6 ha	66,5 ha
2	Damar	21618,9 ha	1332,1 ha	429,1 ha
3	Simpang Renggang	23872,3 ha	543,3 ha	3,6 ha
4	Manggar	16397,9 ha	223,2 ha	2,5 ha

5	Gantung	59106,8 ha	1346,3 ha	1,6 ha
6	Simpang Pesak	23872,3 ha	543,3 ha	3,4 ha
7	Dendang	39661,1 ha	1939,5 ha	69,3 ha

Sumber: Peta Topografi Kabupaten Belitung Timur



Gambar 2. 2 Peta Topografi Kabupaten Belitung Timur
 Sumber: Peta topografi Kabupaten Belitung Timur

2.1.1.4 Geologi

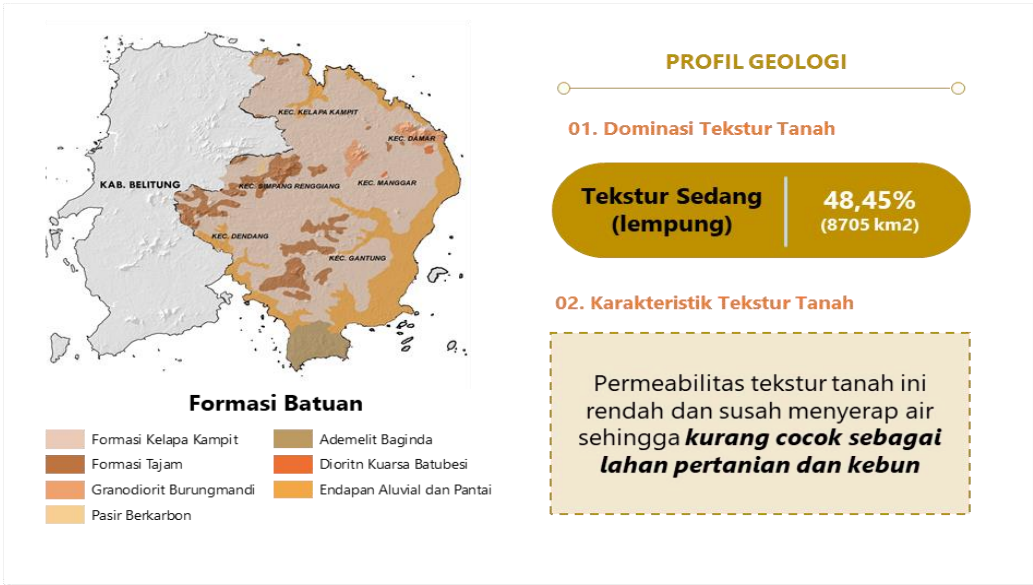
Geologi yang ada di Kabupaten Belitung Timur didominasi formasi Kelapa Kampit, formasi tajam dan Aluvial yang terdapat di hampir setiap kecamatan di Kabupaten Belitung Timur. Sedangkan Adamelit Baginda hanya terdapat di Kecamatan Simpang Pesak dan Endapan Danau hanya terdapat di Kecamatan Kelapa Kampit. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 3 Geologii Kabupaten Belitung Timur

No	Geologi	Kecamatan						
		Kelapa Kampit	Damar	Manggar	Gantung	Simpang Pesak	Dendang	Simpang Renggang
1	Adamelit Baginda					7322,43		
2	Aluvial	3999,97	2222,98	3022,07	13.663,0	909,61	143,89	
3	Batuan Terobosan	6,44		20,22	0,76	12,97		
4	Diorit Kuarsa Batubesi		90,79	123,78				

5	Endapan Danau	6518,68						
6	Formasi Kelapa Kampit	38744,12	16335,25	13213,44	42336,52	11524,63	33214,63	30332,49
7	Formasi Tajam	2929,28	314,35		4449,51	4597,42	8310,91	10076,52
8	Granodiorit Burung Mandi	1337,35	3471,91	1072,71				95,82

Sumber : Peta Geologi, Badan Geologi Kementerian ESDM tahun 2023



Gambar 2. 3 Kondisi Geologi Kabupaten Belitung Timur
 Sumber : Peta Geologi, Badan Geologi Kementerian ESDM tahun 2023

2.1.1.5 Hidrologi

Hidrologi di Kabupaten Belitung Timur terdiri atas sungai, danau, embung, waduk/bendungan, mata air, dan kolong. Kabupaten Belitung Timur memiliki sungai induk dan anak-anak sungai yang berpola pengeringan dendritik, rektangular, dan radial, berstadia sungai dewasa-tua (old-mature river stadium), sungai periodik/permanen dan sungai episodik/intermittent. Menurut Rencana Induk Penyediaan Air Minum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017, potensi air permukaan berupa sungai dan bendungan meliputi:

1. Sungai Buding di Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit memiliki panjang sekitar 10,23 km dan kedalaman 4-5 meter;
2. Sungai Manggar di Kecamatan Manggar, memiliki panjang sekitar 14 km dan kedalaman 4-5 meter;
3. Sungai Lenggang membentang dari barat ke timur meliputi Kecamatan Simpang Renggang, Gantung, Kelapa Kampit. Muara Sungai Lenggang terletak di Kecamatan Gantung. Sungai Lenggang memiliki panjang sekitar 35 km dan kedalaman antara 10 m - 40 m; dan

4. Sungai Pala di Kecamatan Dendang memiliki panjang sekitar 10,57 km dengan lebar 40 meter dan kedalaman sekitar 10 meter.

Daya dukung air di Kabupaten Belitung Timur dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan akan sumber daya air bagi penduduk yang tinggal di KAbupaten Belitung Timur, penentuan status daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA). Bila $SA > DA$, maka nilai daya dukung airnya kan bernilai > 1 dan dinyatakan surplus. Apabila $SA < DA$, maka nilai daya dukung airnya kan bernilai < 1 dan daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui. Dengan membandingkan data ketersediaan air dan kebutuhan air tersebut, dapat dikatakan bahwa status daya dukung air Kabupaten Belitung Timur adalah terlampaui atau defisit dengan nilai koefisien daya dukung airnya adalah 0,74 pada tahun 2022. Untuk Lebih lengkapnya terkait daya dukung air di Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini.

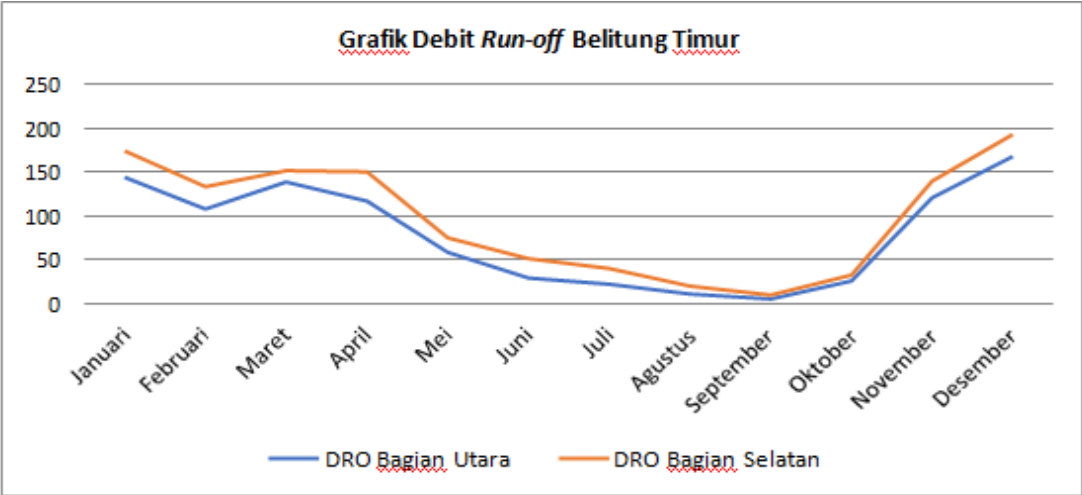
Tabel 2. 4 Perhitungan Daya Dukung Air Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021

No	Penggunaan Lahan	Koefisien Limpasan ('C)	Luas (AI) (HA)	AI.CI
1	Bangunan industri,perdagangan dan perkantoran	0,6	114,9	68,94
2	Bangunan nonpermukiman lain	0,6	76,24	45,74
3	Bangunan permukiman desa (berasosiasi dengan vegetasi pekarangan)	0,4	3091,08	1236,43
4	Bangunan permukiman kota	0,4	1388,87	555,55
5	Danau buatan lainnya	0	424,68	-
6	Hamparan batuan/pasir lain	0,4	127,43	50,97
7	Hamparan pasir pantai non-vulkanik	0,15	99,04	14,86
8	Hutan lahan rendah primer kerapatan sedang	0,18	6,58	1,18
9	Hutan lahan rendah sekunder kerapatan rendah	0,18	269,73	48,55
10	Hutan lahan rendah sekunder kerapatan sedang	0,18	13161,97	2369,16
11	Hutan lahan rendah sekunder kerapatan tinggi	0,18	2566,13	461,9
12	Hutan mangrove primer kerapatan rendah	0,18	42,94	7,73
13	Hutan mangrove primer kerapatan sedang	0,18	588,09	105,86
14	Hutan mangrove primer kerapatan tinggi	0	6510,37	-
15	Hutan mangrove sekunder kerapatan rendah	0,18	231,42	41,66
16	Hutan mangrove sekunder kerapatan sedang	0,18	2422,13	435,98
17	Hutan mangrove sekunder kerapatan tinggi	0	888,89	-
18	Hutan rakyat	0,18	3579,07	644,23
19	Hutan rawa/gambut sekunder kerapatan rendah	0,18	10993,51	1978,83

No	Penggunaan Lahan	Koefisien Limpasan ('C)	Luas (AI) (HA)	AI.CI
20	Hutan rawa/gambut sekunder kerapatan sedang	0,18	7642,92	1375,73
21	Hutan rawa/gambut sekunder kerapatan tinggi	0,18	18754,99	3375,9
22	Kebun campuran	0,3	48506,03	14551,81
23	Kolam air tawar lain	0	88,47	-
24	Lahan terbuka lain	0,4	937,72	375,09
25	Liputan vegetasi alami/semi-alami lain (tidak dirinci)	0,3	643,56	193,07
26	Pelabuhan	0,4	34,74	13,9
27	Penambangan terbuka bukan sirtu	0,4	31860,27	12744,11
28	Penggalian pasir, tanah dan batu (sirtu)	0,4	994,2	397,68
29	Perkebunan karet	0,3	244,81	73,44
30	Perkebunan kelapa	0,3	8,84	2,65
31	Perkebunan kelapa sawit	0,3	58763,98	17629,19
32	Rataan lumpur	0,3	188,02	56,4
33	Rawa pedalaman	0	3667,9	-
34	Rawa pesisir bervegetasi	0,18	5757,34	1036,32
35	Rawa pesisir tak bervegetasi	0,18	551,58	99,28
36	Sawah dengan padi diselingi tanaman lain/bera	0,3	2787,17	836,15
37	Semak belukar	0,35	28116,97	9840,94
38	Sungai	0	790,42	-
39	Tubuh air lain	0	463,69	-
40	Waduk multiguna	0	1976,66	-
Total			259363,347	70669,235
C. Tertimbang				0,28
Curah Hujan Rata-rata Tahunan				218
KEtersediaan Air (SA) (M3/Tahun)				156497,984

Sumber: Hasil Analisa Tim Penyusun RTRW Kab. Belitung Timur, 2021

Kabupaten Belitung Timur memiliki potensi yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan air meliputi kebutuhan air domestik, pertanian, dan perikanan. Hasil olah data menunjukkan bahwa ketersediaan air Kabupaten Belitung Timur adalah 143.804.940 mm³/Tahun sedangkan kebutuhannya mencapai 203.302.400 m³/Tahun.. Dengan membandingkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa status daya dukung air Kabupaten Belitung Timur adalah terlampaui atau defisit dengan nilai koefisien daya dukung airnya adalah 0.71.



Grafik 2. 1 Debit Run-off Belitung Timur Tahun 2019
Sumber: Neraca Sumber Daya Alam Daerah Kab. Belitung Timur, 2019

Grafik diatas menunjukan neraca air bagian utara, terjadi surplus pada bulan Januari – April dan bulan Oktober – Desember. Sedangkan pada bulan Mei – September terjadi defisit. Nilai surplus tertinggi terjadi pada bulan Desember dan Januari sebesar 216 mm dan 181 mm. Sedangkan nilai defisit terbesar terjadipada bulan Agustus sebesar 7 mm. sementara untuk bagian selatan Surplus terjadi pada bulan Januari – April dan Oktober – Desember. Nilai surplus terbesar terjadi pada bulan Desember dan Januari yaitu 247 mm dan 225 mm.

2.1.1.6 Klimatologi

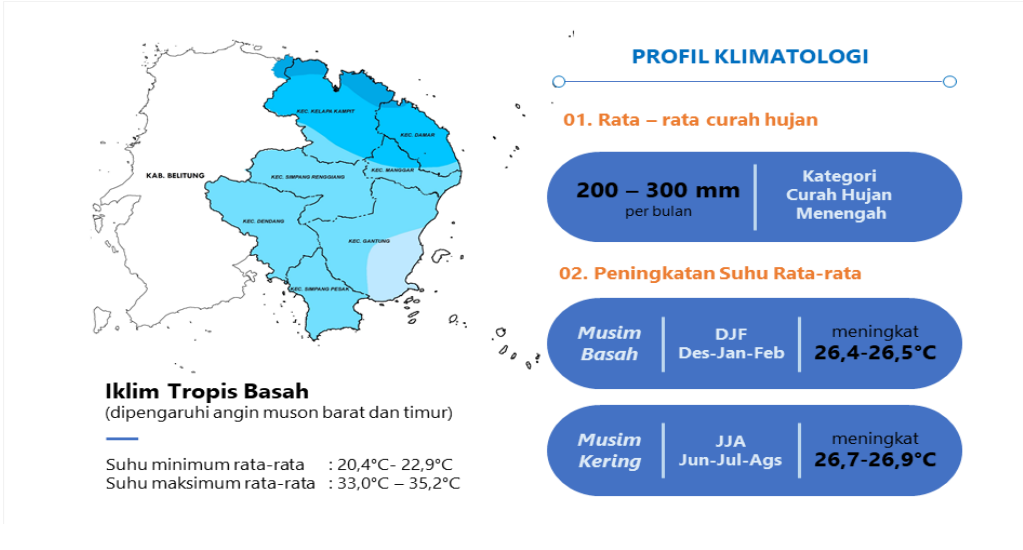
Berdasarkan Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka Tahun 2024 Kabupaten Belitung Timur memiliki iklim tropis yang dipengaruhi angin musim yang mengalami bulan basah dan kering. Pada tahun 2023 Musim hujan di Kabupaten Belitung Timur terjadi di sepanjang bulan dengan rata-rata curah hujan 396,05 mm. Bulan Desember merupakan puncak dari musim penghujan pada tahun 2023 dengan curah hujan sebesar 727,90 mm dan hari hujan 26 hari. suhu udara relative konsisten sepanjang tahun dengan suhu rata-rata 26,8 °C, Kelembaban relatif bulanan rata-rata berubah di kisaran 77-91%. Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun Meteorologi Tanjungpandan mencatat perubahan dari 3-7 m/s dimana pada bulan Februari merupakan yang tertinggi. Untuk Lebih lengkapnya terkait kondisi klimatologi di Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 5 Curah Hujan, Hari Hujan dan Rata-Rata Penyinaran Matahari di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Suhu	Kelembaba n	Kecepatana gin (m/sec)	Tekanan Udara (mb)
				Rata-rata	Rata-rata	Rata-rata	Rata-rata
1	Januari	346,50	27	26,1	88	6	1010.7
2	Februari	178,50	16	26,4	88	7	1010,4

3	Maret	384,1 0	24	26,2	89	4	1011,3
4	April	162,0 0	17	26,9	89	3	1010,3
5	Mei	336,3 0	19	27,5	89	3	1011,2
6	Juni	221,4 0	16	25,9	90	3	1010,5
7	Juli	176,9 0	14	26,9	88	4	1011,7
8	Agustus	5,10	4	27,7	87	6	1012,2
9	September	0,40	4	26,6	88	4	1011,2
10	Oktober	343,6 0	13	27,7	91	4	1012,8
11	November	505,6 0	27	27,0	91	3	1011,1
12	Desember	727,9 0	26	26,8	89	3	1011,2

Sumber : Belitung Timur dalam Angka 2023



Gambar 2. 4 Kondisi Klimatologi Kabupaten Belitung Timur

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

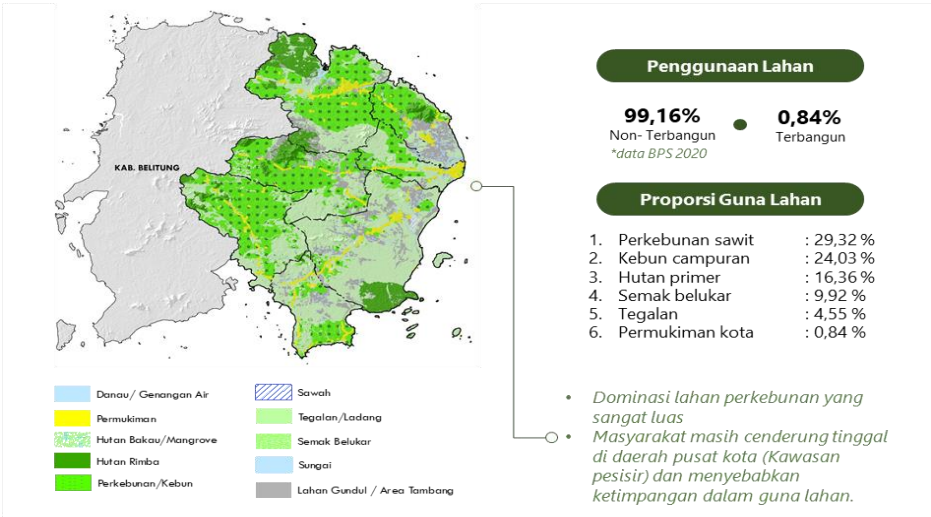
Tabel 2. 6 Penutup/Penggunaan Lahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

No	Klasifikasi Penutup/Penggunaan Lahan	Luas	
		Ha	%
1	Bangunan Industri, perdagangan dan perkantoran	114,69	0,04%
2	Bangunan Non-Permukiman Lain	72,88	0,03%
3	Bangunan Permukiman Desa	3217,94	1,24%
4	Bangunan Permukiman Kota	1320,35	0,51%
5	Danau/telaga alami	19,85	0,01%
6	Hamparan Batuan / Pasir Lain	174,24	0,07%
7	Hamparan Pasir Pantai non-Vulkanik	91,82	0,04%
8	Hutan Lahan Rendah Primer Kerapatan sedang	5,78	0,00%

No	Klasifikasi Penutup/Penggunaan Lahan	Luas	
		Ha	%
9	Hutan Lahan Rendah sekunder Kerapatan rendah	269,16	0,10%
10	Hutan Lahan Rendah sekunder Kerapatan sedang	13145,35	5,08%
11	Hutan Lahan Rendah sekunder Kerapatan tinggi	2560,85	0,99%
12	Hutan Mangrove Primer Kerapatan rendah	52,05	0,02%
13	Hutan Mangrove Primer Kerapatan sedang	576,82	0,22%
14	Hutan Mangrove Primer Kerapatan Tinggi	6416,84	2,48%
15	Hutan Mangrove Sekunder Kerapatan rendah	228,99	0,09%
16	Hutan Mangrove Sekunder Kerapatan sedang	2379,12	0,92%
17	Hutan Mangrove Sekunder Kerapatan Tinggi	905,82	0,35%
18	Hutan Rakyat	3571,05	1,38%
19	Hutan Rawa/gambut Sekunder Kerapatan rendah	11463,74	4,43%
20	Hutan Rawa/gambut Sekunder Kerapatan sedang	7206,58	2,79%
21	Hutan Rawa/gambut Sekunder Kerapatan tinggi	18709,34	7,23%
22	Kebun campuran	48287,02	18,66%
23	Kolam air tawar lain	3473,14	1,34%
24	lahan terbuka lain	1353,11	0,52%
25	Liputan vegetasi alami/semi alami lain	642,45	0,25%
26	Pelabuhan	51,15	0,02%
27	Penambangan terbuka bukan sirtu	30024,13	11,60%
28	Penggalian Pasir tanah dan batu	945,24	0,37%
29	Perkebunan Karet	244,35	0,09%
30	Perkebunan Kelapa sawit	58500,19	22,61%
31	Rataan lumpur	132,87	0,05%
32	rawa pedalaman	1919,34	0,74%
33	Rawa Pedalaman (tidak dirinci)	2733,43	1,06%
34	Rawa pesisir bervegetasi	5459,85	2,11%
35	Rawa pesisir tidak bervegetasi	446,17	0,17%
36	Sawah dengan padi diselingi tanaman lain	2780,22	1,07%
37	Semak belukar	28314,31	10,94%
38	sungai	805,85	0,31%
39	Tambak ikan/udang	25,94	0,01%
40	(blank)	76,68	0,03%

Terdapat empat (4) jenis penutup/ penggunaan lahan terluas pada tahun 2021 yaitu perkebunan kelapa sawit seluas 58.500,19 ha, kebun campuran 48.287,02 ha, semak belukar 28.314,31 ha dan area penambangan terbuka bukan sirtu 30.024,13 ha.

Ditinjau berdasarkan kondisi tutupan lahan menunjukkan bahwa terdapat lima jenis penggunaan lahan terluas yaitu perkebun sawit dengan luas mencapai 76.515,46 Ha atau 30,52 persen dari keseluruhan luas wilayah. Penggunaan lahan terluas kedua juga masih berkaitan dengan perkebunan yaitu kebun campuran seluas 62,708.25 Ha. Lahan terluas berikutnya berturut – turut yaitu hutan primer, semak belukar, dan juga area penambangan terbuka. Sedangkan untuk lahan terbangun yang ada hanya seluas 2,198 Ha.



Gambar 2. 5 Kondisi Penggunaan Lahan Kabupaten Belitung Timur

Disisi lain perubahan lahan terbesar adalah bertambahnya luasan perkebunan sawit sebesar 5.602,02 Ha serta berkurangnya hutan primer dan hutan mangrove masing – masing seluas 3.224 Ha dan 3.117 Ha pada kurun waktu tersebut. Sedangkan untuk permukiman, pertambahannya sangat sedikit yaitu 105,51 Ha pada kurun waktu yang sama.

2.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Belitung Timur dilakukan berdasarkan penataan ruang yang memiliki potensi yang penting untuk dikembangkan dengan beberapa kebijakan, diantaranya:

- a. Pengembangan kawasan-kawasan perdesaan sebagai sentra penghasil komoditas unggulan yang berbasis potensi pariwisata, agropolitan, dan potensi bahari dalam suatu kawasan perdesaan yang terpadu;

- b. Pengembangan kawasan-kawasan perkotaan sebagai sentra pelayanan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa bagi seluruh wilayah secara berjenjang;
- c. Pengembangan kawasan pesisir, pulau-pulau kecil di setiap kecamatan, dan wilayah laut sebagai pusat kegiatan wisata bahari, industri perikanan, serta mempermudah jangkauan pelayanan publik dan penguatan struktur ekonomi bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas dan mampu melayani masyarakat secara optimal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta berperan penting dalam aksesibilitas wilayah; dan
- e. Pembangunan dan pengembangan kawasan Strategis pertumbuhan ekonomi kabupaten secara terpadu yang menjadi andalan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- f. Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mewujudkan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan Kawasan warisan geologi melalui konservasi, edukasi dan pengembangan perekonomian masyarakat berkelanjutan.

Beberapa kawasan yang telah dan berpotensi untuk dikembangkan, antara lain:

- a. Kawasan Perkotaan Manggar di Kecamatan Manggar dan Kecamatan Damar
- b. Kawasan Perkotaan Gantung di Kecamatan Gantung
- c. Kawasan Industri Air Kelik di Kecamatan Damar
- d. Kawasan Budidaya Pertanian Tanaman Pangan di Kecamatan Gantung dan Manggar dengan luas ± 3.402Ha;
- e. Kawasan Pelabuhan Dendang di Kecamatan Dendang;
- f. Kawasan Pariwisata Burung Mandi di Kecamatan Damar;
- g. Kawasan Wisata Kuala Tambak di Kecamatan Damar;
- h. Kawasan Wisata Pantai Punai di Kecamatan Simpang Pesak; dan
- i. Rencana dan peluang investasi perikanan (tambak) di Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Gamtung dan Kecamatan Damar;
- j. Rencana dan peluang investasi pariwisata di Geosite Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 2. 7 Luasan Kawasan Budidaya di Kecamatan Kabupaten Belitung Timur

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Manggar	14.442
2	Damar	17.070
3	Kelapa Kampit	36.212
4	Gantung	50.932
5	Simpang Renggiang	32.388
6	Simpang Pesak	21.859
7	Dendang	39.209
T O T A L		212.112

Sumber: RTRW Kabupaten Belitung Timur, 2014 – 2034

Kawasan budidaya di Kabupaten Belitung Timur meliputi kawasan pertahanan keamanan, kawasan hortikultura, kawasan hutan produksi, kawasan industri, PLTU, kawasan pariwisata, kawasan perikanan laut, kawasan perkebunan, kawasan permukiman, kawasan pertambangan dan kawasan tanaman pangan.

2.1.1.9 Kawasan Rawan Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mendefinisikan bahwa bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam dan atau non alam maupun manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam.

Dalam Dokumen IRBI 2020, untuk multi ancaman dari tahun 2015 sampai tahun 2020 Kabupaten Belitung Timur termasuk kedalam daerah rawan bencana kelas resiko tinggi untuk jenis bencana Gelombang ekstrim dan Abrasi, Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan dan Cuaca ekstrim. Untuk lebih jelasnya terkait indeks resiko bencana di Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 8 Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Belitung Timur

No	Jenis Bencana	Indeks Resiko Bencana	
		Skor	Kelas Resiko
1	Gempa Bumi	10,80	Sedang
2	Tanah Longsor	12,00	Sedang
3	Gelombang ekstrim dan Abrasi	24,00	Tinggi
4	Banjir	36,00	Tinggi
5	Kebakaran hutan dan lahan	36,00	Tinggi
6	Kekeringan	36,00	Tinggi
7	Cuaca Ekstrim	13,60	Tinggi

Sumber : Resiko Bencana Indonesia, BNPB, Tahun 2023

2.1.1.9.1 Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Abrasi

Gelombang pasang dan abrasi di Kabupaten Belitung Timur menimbulkan resiko bahaya bagi masyarakat dan lingkungan pesisir. Tingkat resiko bahaya gelombang pasang dan abrasi diklasifikasikan dengan resiko bencana tinggi, sedang dan rendah. Adapun persebaran luas area resiko gelombang pasang dan abarasi di Kabupaten Belitung Timur dapat ditampilkan dalam tabel berikut

Tabel 2. 9 Luasan Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Abrasi

No	Kecamatan	Resiko Gelombang Pasang dan Abrasi		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Kelapa Kampit		1437	
2	Damar	298	1104	51
3	Manggar		116	128
4	Gantung		2841	
5	Simpang Pesak	261	1066	
6	Dendang		551	

Sumber: Peta Bahaya Gelombang Pasang dan Abrasi Kabupaten Belitung Timur, 2023

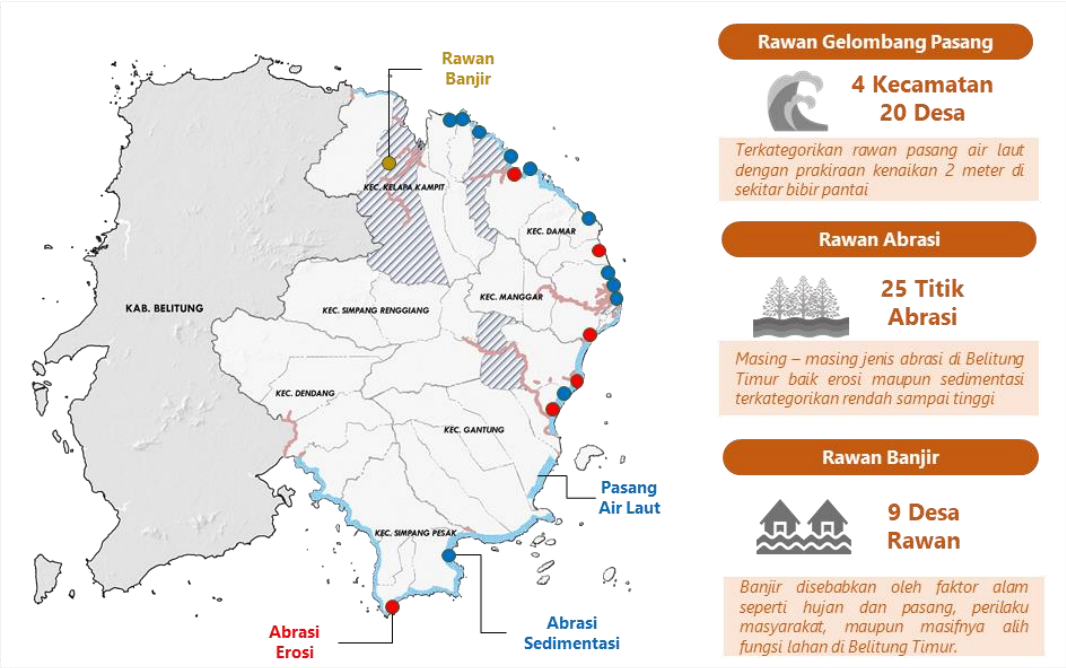
Kawasan pantai di Kabupaten Belitung Timur mempunyai potensi abrasi. Oleh karena itu kawasan pantai harus diproteksi dengan mangrove dan tanaman pantai lainnya sehingga tidak menyebabkan abrasi. Lokasi rawan abrasi tersebar diseluruh pantai di Kabupaten Belitung Timur.

Dalam dokumen pengurangan risiko bencana (PRB) Provinsi Bangka Belitung yang di susun oleh BNPB pada Tahun 2015 menyebutkan bahwa tingkat abrasi yang terjadi di kabupaten Belitung Timur termasuk dalam kategori sedang, seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 10 Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		Total Luas (Ha)	Kelas
1	Bangka	5.152	Sedang
2	Belitung	11.391	Sedang
3	Bangka Barat	5.937	Sedang
4	Bangka Tengah	3.918	Sedang
5	Bangka Selatan	8.303	Sedang
6	Belitung Timur	7.319	Sedang
7	Pangkal Pinang	225	Sedang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		42.245	Sedang

Sumber: Laporan Akhir Identifikasi dan Inventarisasi Kajian Rawan Abrasi Kab. Belitung Timur, 2019



Gambar 2. 6 Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Belitung Timur

2.1.1.9.2 Kawasan Rawan Banjir

Banjir dapat disebabkan oleh kondisi alam yang statis seperti geografis, topografis, dan geometri alur sungai. Peristiwa alam yang dinamis seperti curah hujan yang tinggi, pembendungan dari laut/pasang pada sungai induk, amblesan tanah dan pendangkalan akibat sedimentasi serta aktivitas manusia yang dinamis seperti, mendirikan pemukiman di bantaran sungai, kurangnya prasarana pengendalian banjir, amblesan permukaan tanah, dan kenaikan muka air laut akibat global warming.

Kabupaten Belitung Timur termasuk dalam tingkat kerawanan rendah. Daerah rawan banjir tingkat rendah tersebut tersebar di beberapa titik diantaranya kawasan Desa Baru, Kurnia Jaya, Mekar Jaya, Buding, Mayang, Lenggang, Mempaya, Sukamandi, dan Pembaharuan.

Dari titik lokasi genangan dan banjir diketahui bahwa terdapat di 9 (sembilan) titik kawasan rawan banjir saat hujan turun meliputi: kawasan Desa Baru, Kurnia Jaya, Mekar Jaya, Buding, Mayang, Lenggang, Mempaya, Sukamandi, dan Pembaharuan. Beberapa faktor penyebab terjadinya genangan yang teridentifikasi adalah:

1. Faktor alamiah itu sendiri berupa tingginya gelombang pasang air laut dan ditambah besarnya debit air hujan yang turun sehingga mengakibatkan terjadinya genangan air;
2. Faktor pola perilaku masyarakat yang membuang sampah ke dalam saluran drainase dan pembangunan fisik sehingga menyebabkan penyumbatan dan kerusakan saluran drainase; dan

3. Adanya pengembangan wilayah kota yang mengubah tata guna lahan, mengakibatkan bertambahnya debit air di saluran. Luapan/genangan terjadi karena pertambahan debit tersebut tidak disertai dengan perencanaan ulang saluran drainase eksisting

2.1.1.9.3 Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

Bahaya bencana karhutla atau kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Belitung Timur diklasifikasikan menjadi dua kelas, yaitu: sedang dan tinggi. Luas area dengan klasifikasi bahaya karhutla sedang mencapai 75.464 Ha dengan rincian: Kecamatan Damar 6.400 Ha, Dendang 17.798 Ha, Gantung 9.604 Ha, Kelapa Kampit 20.776 Ha, Manggar 6.333 Ha, Simpang Pesak 2.169 Ha dan Simpang Renggang 12.384 Ha. Sementara luas klasifikasi bahaya karhutla tinggi mencapai 53.285 Ha, dengan rincian: Kecamatan Damar 439 Ha, Dendang 17.798 Ha, Gantung 20.963 Ha, Kelapa Kampit 20.776 Ha, Manggar 1.016 Ha, Simpang Pesak 14.211 Ha dan Simpang Renggang 12.384 Ha. Persebaran area tersebut dapat ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 11 Luasan Kawasan Bahaya Kebakaran Hutan Kabupaten Belitung Timur

No	Kecamatan	Kelas Bahaya (Ha)	
		Sedang	Tinggi
1	Kelapa Kampit	20776	2708
2	Damar	6400	439
3	Manggar	6333	1016
4	Simpang Renggang	12384	7852
5	Gantung	9604	20963
6	Simpang Pesak	2169	14211
7	Dendang	17798	6095

Sumber: Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Belitung Timur, 2023

2.1.1.10 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 sampai dengan semester II (satu) berjumlah 131.927 jiwa dengan 45.994 Kepala Keluarga, terdiri dari 37.818 laki-laki dan 8.176 perempuan, Jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2023 sampai Semester II Terjadi penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya sebanyak 1.397 orang atau 3,13%. Untuk data detail dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2. 12 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Daerah (km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Kepadatan Penduduk
				Laki- laki	Perempuan	Jumlah / Total	
1	Manggar	9	229	20.561	19.753	40.314	176,04
2	Gantung	7	546,3	15.806	14.700	30.506	55,84
3	Dendang	4	243,3	5.637	5.259	10.896	44,78
4	Kelapa Kampit	6	498,5	9.986	9.488	19.474	39,07
5	Damar	5	236,9	6.986	6.720	13.706	57,86
6	Simpang Renggiang	4	390,7	3.964	3.746	7.710	19,73
7	Simpang Pesak	4	362,2	4.458	4.233	8.691	24,00
Jumlah		39	2.506,9	67.398	63.899	131.297	52,37

Sumber : PDAK – Kementrian Dalam Negeri RI Semester II 2023

**Tabel 2. 13 Jumlah Rumah Tangga / Kepala Keluarga
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023**

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Manggar	11.221	2.911	14.132
2	Gantung	8.620	1.833	10.453
3	Dendang	3.326	453	3.779
4	Kelapa Kampit	5.705	1.189	6.894
5	Damar	4.004	873	4.877
6	Simpang Renggiang	2.432	433	2.865
7	Simpang Pesak	2.510	484	2.994
Kab. Belitung Timur		37.818	8.176	45.994

Sumber : PDAK – Kementrian Dalam Negeri RI Semester II 2023

Struktur penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Belitung Timur di dominasi oleh penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) dengan porsi sebesar 69,43% disusul dengan usia muda (0 – 14 tahun) sebesar 23,73% dan usia tua (65+) sebesar 6,84%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2. 14 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023**

Struktur Usia (tahun)	Jumlah Penduduk		
	Laki-Laki	Perempian	Jumlah
0 - 4	4.724	4.488	9.212
5 - 9	5.468	5.084	10.552
10 - 14	5.913	5.482	11.395
15 - 19	5.264	5.100	10.364
20 - 24	5.672	5.301	10.973
25 - 29	4.971	4.725	9.696
30 - 34	4.830	4.495	9.325
35 - 39	5.042	4.684	9.726

40- 44	6.003	5.655	11.658
45 - 49	5.340	4.694	10.034
50 - 54	4.442	3.852	8.294
55 - 59	3.251	2.957	6.208
60 - 64	2.414	2.470	4.884
65 - 69	1.807	2.012	3.819
70 - 74	1.210	1.409	2.619
75 +	1.047	1.491	2.538
Total	67.398	63.899	131.297

Sumber : PDAK – Kementrian Dalam Negeri RI Semester II 2023

Persebaran penduduk menurut kelompok umur dapat diperinci menurut Kecamatan seperti pada tabel Berikut ini :

Tabel 2. 15 Jumlah Penduduk Laki-laki berdasarkan Kecamatan, Desa dan Kelompok Umur Kabupaten Belitung Timur 2023

KECAMATAN	KOD E DESA	NAMA DESA	LAKI - LAKI																
			0-4	5-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	>=75	JUMLAH
MANGGAR	2001	LALANG JAYA	149	171	166	152	143	131	124	142	162	130	134	94	74	62	26	31	1.891
	2002	KURNIA JAYA	180	245	261	247	243	206	180	196	251	244	172	128	94	92	68	39	2.846
	2003	PADANG	282	361	408	333	264	261	271	336	401	313	232	190	147	103	91	56	4.049
	2004	KELUBI	97	113	106	120	137	120	101	99	108	111	102	80	66	35	28	32	1.455
	2006	LALANG	199	190	255	207	235	164	149	182	204	215	196	138	109	80	73	69	2.665
	2007	BARU	369	412	444	368	429	367	362	365	409	311	288	207	176	149	95	77	4.828
	2010	PULAU BUKU LIMAU	33	51	41	37	35	38	30	45	34	27	18	17	7	13	5	8	439
	2012	MEKAR JAYA	77	126	153	128	151	99	81	106	144	136	90	74	65	51	30	41	1.552
	2013	BENTAIAN JAYA	69	65	69	47	62	71	61	51	68	59	76	51	33	27	8	19	836
	JUMLAH		1.455	1.734	1.903	1.639	1.699	1.457	1.359	1.522	1.781	1.546	1.308	979	771	612	424	372	20.561
GANTUNG	2001	GANTUNG	230	308	319	269	248	245	240	243	274	239	218	155	95	76	50	49	3.258
	2002	SELINSING	294	306	376	302	291	274	293	285	301	266	201	144	122	69	37	46	3.607
	2003	JANGKAR ASAM	69	79	99	68	84	78	86	70	78	70	50	30	25	14	10	8	918
	2004	LILANGAN	156	160	170	151	154	159	151	162	177	147	123	88	56	42	31	25	1.952
	2009	LENGGANG	168	218	217	169	186	179	178	193	222	174	159	107	101	85	34	41	2.431
	2010	BATU PENYU	194	228	220	230	229	204	210	226	251	213	171	114	102	91	60	32	2.775
	2011	LIMBONGAN	69	73	67	75	93	65	67	57	69	77	58	35	28	15	13	4	865
	JUMLAH		1.180	1.372	1.468	1.264	1.285	1.204	1.225	1.236	1.372	1.186	980	673	529	392	235	205	15.806
DENDANG	2001	DENDANG	66	73	93	89	76	76	73	95	94	78	83	56	38	21	17	16	1.044
	2002	JANGKANG	128	129	130	133	167	145	131	140	164	157	124	77	53	44	16	16	1.754
	2005	NYURUK	105	122	131	108	140	131	148	134	180	138	111	84	70	33	28	25	1.688

KECAMATAN	KOD E DESA	NAMA DESA	LAKI – LAKI																
			0-4	5-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	>=75	JUMLAH
	2008	BALOK	61	77	97	75	111	97	89	115	107	91	81	62	41	20	13	14	1.151
	JUMLAH		360	401	451	405	494	449	441	484	545	464	399	279	202	118	74	71	5.637
KELAPA KAMPIT	2001	MENTAWAK	133	174	175	158	179	138	118	124	195	180	166	116	69	62	48	39	2.074
	2002	SENYUBUK	128	152	161	179	206	141	129	132	208	203	193	115	69	62	54	44	2.176
	2003	CENDIL	58	67	71	63	80	56	78	59	71	68	68	52	29	23	14	10	867
	2005	BUDING	107	110	126	118	130	119	102	100	139	134	118	88	63	39	33	37	1.563
	2006	MAYANG	126	131	156	134	149	116	117	112	172	150	111	81	63	59	37	23	1.737
	2007	PEMBAHARUAN	102	101	129	140	144	97	105	106	148	123	111	75	63	53	35	37	1.569
	JUMLAH		654	735	818	792	888	667	649	633	933	858	767	527	356	298	221	190	9.986
DAMAR	2001	AIR KELIK	86	95	76	72	99	88	89	71	90	96	73	58	48	31	9	10	1.091
	2002	MEMPAYA	76	89	88	81	103	91	84	74	104	104	96	56	42	24	27	17	1.156
	2003	BURONG MANDI	51	62	67	68	71	49	56	50	74	67	57	40	28	24	15	12	791
	2004	MENGKUBANG	134	154	164	163	143	121	145	133	150	152	107	105	58	54	31	24	1.838
	2005	SUKAMANDI	167	173	184	144	170	152	163	178	185	162	129	104	73	47	44	35	2.110
	JUMLAH		514	573	579	528	586	501	537	506	603	581	462	363	249	180	126	98	6.986
SIMPANG RENGGIANG	2001	SIMPANG TIGA	61	79	66	61	71	82	66	64	73	72	55	37	31	16	16	15	865
	2002	RENGGIANG	67	57	83	72	95	90	48	77	110	92	77	54	37	28	14	25	1.026
	2003	AIK MADU	38	34	50	35	34	50	40	36	62	45	32	33	21	12	10	6	538
	2004	LINTANG	96	110	108	94	136	132	107	128	139	149	99	90	58	43	26	20	1.535
	JUMLAH		262	280	307	262	336	354	261	305	384	358	263	214	147	99	66	66	3.964
SIMPANG PESAK	2001	SIMPANG PESAK	130	171	179	184	173	145	168	158	173	160	123	102	62	48	29	17	2.022
	2002	TANJUNG BATU ITAM	70	79	78	78	79	73	84	76	84	77	54	47	35	25	13	9	961
	2003	TANJUNG KELUMPANG	64	90	87	74	93	91	65	76	92	75	58	47	39	20	15	11	997
	2004	DUKONG	35	33	43	38	39	30	41	46	36	35	28	20	24	15	7	8	478
	JUMLAH		299	373	387	374	384	339	358	356	385	347	263	216	160	108	64	45	4.458

KECAMATAN	KOD E DESA	NAMA DESA	LAKI – LAKI																
			0-4	5-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	>=75	JUMLAH
TOTAL			4.724	5.468	5.913	5.264	5.672	4.971	4.830	5.042	6.003	5.340	4.442	3.251	2.414	1.807	1.210	1.047	67.398

Sumber : PDAK – Kementerian Dalam Negeri RI Semester I 2023

Tabel 2. 16 Jumlah Penduduk Perempuan berdasarkan Kecamatan, Desa dan Kelompok Umur Kabupaten Belitung Timur 2023

KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PEREMPUAN																
			0-4	5-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	>=75	JUMLAH
MANGGAR	2001	LALANG JAYA	122	112	151	145	145	135	127	132	141	135	110	95	76	56	39	41	1.762
	2002	KURNIA JAYA	162	204	270	245	228	181	177	195	247	201	163	118	131	97	69	47	2.735
	2003	PADANG	323	327	379	276	270	246	305	335	369	287	184	168	152	138	85	89	3.933
	2004	KELUBI	70	95	108	83	116	109	99	76	112	111	95	67	49	52	30	43	1.315
	2006	LALANG	158	219	232	178	170	153	169	175	199	173	176	135	114	105	92	93	2.541
	2007	BARU	354	390	386	437	388	333	324	317	388	301	265	212	205	158	107	111	4.676
	2010	PULAU BUKU LIMAU	40	31	40	43	41	32	25	35	40	25	23	15	14	7	13	11	435
	2012	MEKAR JAYA	86	122	133	139	134	99	82	122	135	114	108	71	59	56	65	36	1.561
	2013	BENTAIAN JAYA	57	59	58	61	65	79	52	52	51	76	55	37	31	24	16	22	795
	JUMLAH		1.372	1.559	1.757	1.607	1.557	1.367	1.360	1.439	1.682	1.423	1.179	918	831	693	516	493	19.753
GANTUNG	2001	GANTUNG	254	273	292	255	289	220	229	249	258	213	173	117	97	67	53	56	3.095
	2002	SELINSING	273	303	275	265	281	241	263	273	300	251	182	132	106	73	42	58	3.318
	2003	JANGKAR ASAM	57	73	86	65	57	82	66	62	73	51	46	34	24	25	15	9	825
	2004	LILANGAN	163	156	176	163	164	148	131	141	170	124	86	72	55	43	32	25	1.849
	2009	LENGGANG	162	190	211	187	172	160	180	154	211	155	146	105	91	75	52	80	2.331
	2010	BATU PENYU	170	222	243	189	178	189	193	195	230	165	140	128	108	79	37	59	2.525
	2011	LIMBONGAN	55	52	55	64	83	65	56	49	74	54	44	33	26	18	16	13	757
	JUMLAH		1.134	1.269	1.338	1.188	1.224	1.105	1.118	1.123	1.316	1.013	817	621	507	380	247	300	14.700
DENDANG	2001	DENDANG	58	85	82	82	73	69	60	88	93	71	53	53	38	24	13	24	966

KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PEREMPUAN																JUMLAH
			0-4	5-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	>=75	
	2002	JANGKANG	119	121	118	139	154	135	121	125	175	117	118	68	55	37	24	27	1.653
	2005	NYURUK	95	120	109	112	154	130	113	112	146	124	99	73	58	35	27	46	1.553
	2008	BALOK	83	77	80	86	83	90	75	97	104	101	69	45	46	17	15	19	1.087
	JUMLAH		355	403	389	419	464	424	369	422	518	413	339	239	197	113	79	116	5.259
KELAPA KAMPIT	2001	MENTAWAK	120	144	154	149	194	138	112	137	161	185	131	93	89	78	53	48	1.986
	2002	SENYUBUK	134	163	167	195	179	130	113	127	192	191	159	104	80	79	75	50	2.138
	2003	CENDIL	56	69	64	60	80	57	71	57	71	63	66	35	28	24	9	22	832
	2005	BUDING	108	97	116	90	108	118	91	100	130	109	96	86	49	50	36	38	1.422
	2006	MAYANG	111	124	142	108	151	117	116	116	143	113	109	73	46	68	42	29	1.608
	2007	PEMBAHARUAN	97	105	113	122	113	99	88	103	134	115	90	81	71	72	49	50	1.502
	JUMLAH		626	702	756	724	825	659	591	640	831	776	651	472	363	371	264	237	9.488
DAMAR	2001	AIR KELIK	80	85	73	86	95	92	74	71	88	85	66	58	40	32	22	27	1.074
	2002	MEMPAYA	77	74	88	92	105	89	80	70	96	105	71	51	48	36	27	29	1.138
	2003	BURONG MANDI	37	67	65	58	66	57	53	48	75	43	41	35	32	26	13	27	743
	2004	MENGKUBANG	112	144	151	136	136	125	143	119	150	133	104	87	68	59	45	40	1.752
	2005	SUKAMANDI	140	162	194	169	142	149	149	159	190	121	121	94	78	69	38	38	2.013
	JUMLAH		446	532	571	541	544	512	499	467	599	487	403	325	266	222	145	161	6.720
SIMPANG RENGGIANG	2001	SIMPANG TIGA	48	62	58	53	66	69	60	55	69	69	43	35	24	19	7	19	756
	2002	RENGGIANG	62	69	74	58	85	69	59	76	94	77	63	39	33	21	20	28	927
	2003	AIK MADU	36	39	47	38	50	43	36	44	40	40	26	19	23	21	12	12	526
	2004	LINTANG	105	112	119	124	141	129	110	92	145	105	96	91	62	41	32	33	1.537
	JUMLAH		251	282	298	273	342	310	265	267	348	291	228	184	142	102	71	92	3.746
SIMPANG PESAK	2001	SIMPANG PESAK	136	156	171	143	163	163	141	153	161	135	107	90	66	45	25	37	1.892
	2002	TANJUNG BATU ITAM	57	60	83	70	75	81	60	60	74	67	48	53	36	32	24	23	903
	2003	TANJUNG KELUMPANG	75	79	73	84	72	64	57	77	83	63	59	26	46	35	25	17	935

KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PEREMPUAN																
			0-4	5-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	>=75	JUMLAH
	2004	DUKONG	36	42	46	51	35	40	35	36	43	26	21	29	16	19	13	15	503
	JUMLAH		304	337	373	348	345	348	293	326	361	291	235	198	164	131	87	92	4.233
TOTAL			4.488	5.084	5.482	5.100	5.301	4.725	4.495	4.684	5.655	4.694	3.852	2.957	2.470	2.012	1.409	1.491	63.899

Sumber : PDAK – Kementrian Dalam Negeri RI Semester I 2023

Tabel 2. 17 Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Semester II Tahun 2023

No	Pendidikan Terakhir	Manggar	Gantung	Dendang	Kelapa Kampit	Damar	Simpang Renggang	Simpang Pesak	Total
1	Tidak/ Belum Sekolah	8.336	7.840	2.471	4.189	3.122	1.659	2.361	29.978
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	6.692	4.699	2.345	2.803	1.778	1.335	1.133	20.785
3	Tamat SD/ Sederajat	9.070	7.537	3.666	4.458	3.817	2.569	2.819	33.936
4	SLTP/ Sederajat	5.321	4.176	1.122	2.846	2.060	1.080	1.112	17.717
5	SLTA/ Sederajat	8.009	4.984	1.040	4.077	2.366	872	1.009	22.357
6	Diploma I/ II	276	185	37	138	70	26	34	766
7	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda	782	300	63	262	154	58	49	1.668
8	Diploma IV/ Strata I	1.751	761	148	683	333	109	172	3.957
9	Strata II	75	24	4	18	5	1	2	129
10	Strata III	2	0	0	0	1	1	0	4
Kab. Belitung Timur		40.314	30.506	10.896	19.474	13.706	7.710	8.691	131.297

Sumber : PDAK – Kementerian Dalam Negeri RI Semester II 2023

Tabel 2. 18 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan Kabupaten Belitung Timur Semester II Tahun 2023

No	Jenis Pekerjaan	Manggar	Gantung	Dendang	Kelapa Kampit	Damar	Simpang Renggang	Simpang Pesak	Total
1	Tidak/Belum Bekerja	9.640	8.252	2.615	4.478	3.201	1.742	2.444	32.372
2	Mengurus Rumah Tangga	9.822	7.932	2.924	4.686	3.649	2.141	2.417	33.571
3	Pelajar/Mahasiswa	7.231	4.518	1.507	3.172	2.175	1.001	1.019	20.623
4	Pensiunan	296	134	10	93	44	16	17	610
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1.270	513	83	429	226	57	119	2.697
6	Tentara Nasional Indonesia	10	11	1	6	4	2	0	34
7	Kepolisian RI (Polri)	150	48	7	28	10	4	5	252
8	Perdagangan	210	101	25	97	42	30	35	540
9	Petani/Pekebun	262	776	1.084	187	53	401	381	3.144
10	Peternak	11	2	1	3	3	0	2	22

No	Jenis Pekerjaan	Manggar	Gantung	Dendang	Kelapa Kampit	Damar	Simpang Renggiang	Simpang Pesak	Total
11	Nelayan/Perikanan	1.878	530	80	190	127	19	376	3.200
12	Industri	8	3	0	15	0	2	2	30
13	Konstruksi	13	8	1	9	2	1	5	39
14	Transportasi	16	4	5	1	1	0	5	32
15	Karyawan Swasta	1.066	333	789	1.782	603	478	103	5.154
16	Karyawan BUMD	108	47	2	17	22	3	4	203
17	Karyawan BUMD	8	4	0	1	2	1	1	17
18	Karyawan Honorer	734	216	39	172	155	40	51	1.407
19	Buruh Harian Lepas	5.406	5.756	1.250	3.211	3.041	1.575	1.411	21.650
20	Buruh Tani/Perkebunan	62	76	126	112	21	48	54	499
21	Buruh Nelayan/Perikanan	119	50	18	29	11	0	17	244
22	Buruh Peternakan	5	0	0	0	0	0	1	6
23	Pembantu Rumah Tangga	75	13	0	14	11	0	5	118
25	Tukang Listrik	2	2	0	1	0	0	0	5
26	Tukang Batu	11	1	1	1	2	1	2	19
27	Tukang Kayu	28	13	8	22	1	6	0	78
28	Tukang Sol Sepatu	0	0	0	1	0	0	0	1
29	Tukang Las/Pandai Besi	13	7	1	6	1	1	1	30
30	Tukang Jahit	13	6	2	10	4	0	3	38
31	Tukang Gigi	1	0	0	0	0	0	0	1
32	Penata Rias	4	3	1	0	0	0	0	8
34	Penata Rambut	7	3	0	0	1	0	0	11
35	Mekanik	28	13	1	12	1	3	4	62
36	Seniman	3	2	0	0	1	0	0	6
37	Tabib	0	2	0	0	0	0	0	2
41	Imam Masjid	4	2	0	1	2	0	0	9
42	Pendeta	4	4	0	1	2	0	0	11
44	Wartawan	7	2	0	1	1	0	0	11

No	Jenis Pekerjaan	Manggar	Gantung	Dendang	Kelapa Kampit	Damar	Simpang Renggiang	Simpang Pesak	Total
45	Ustadz/Mubaligh	1	0	0	1	0	0	0	2
46	Juru Masak	2	0	0	3	0	1	0	6
58	Bupati	0	0	0	1	0	0	0	1
59	Wakil Bupati	0	0	0	0	0	0	1	1
62	Anggota DPRD Prop.	1	1	0	1	1	0	0	4
63	Anggota DPRD Kab./Kota	7	6	0	4	3	2	1	23
64	Dosen	5	1	0	1	1	0	0	8
65	Guru	132	62	19	40	18	13	13	297
67	Pengacara	2	0	0	0	0	0	0	2
68	Notaris	1	0	0	0	0	0	0	1
69	Arsitek	1	0	0	0	0	0	0	1
71	Konsultan	1	0	0	1	0	1	1	4
72	Dokter	15	6	2	6	0	1	1	31
73	Bidan	18	17	3	6	3	0	1	48
74	Perawat	19	14	2	10	10	3	0	58
75	Apoteker	6	0	0	0	0	0	0	6
78	Penyiar Radio	2	0	0	0	0	0	0	2
79	Pelaut	20	23	3	0	2	0	0	48
81	Sopir	45	29	48	47	12	14	14	209
84	Pedagang	196	98	16	75	23	13	19	440
85	Perangkat Desa	23	24	12	27	22	15	9	132
86	Kepala Desa	6	3	3	2	2	3	2	21
87	Biarawan/Biarawati	0	0	0	0	0	1	0	1
88	Wiraswasta	1.270	822	205	459	187	68	143	3.154
89	Anggota Lembaga Tinggi Lain	12	11	2	1	2	2	0	30
99	Pekerjaan Lainnya	4	2	0	1	1	1	2	11
Kab. Belitung Timur		40.314	30.506	10.896	19.474	13.706	7.710	8.691	131.297

Sumber : PDAK – Kementerian Dalam Negeri RI Semester II 2023

Tabel 2. 19 Jumlah Penduduk berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran Kabupaten Belitung Timur Semester II Tahun 2023

No	Kecamatan	TIDAK ADA				ADA				JUMLAH PENDUDUK
		LK	PR	JUMLAH	%	LK	PR	JUMLAH	%	
01	Kec. Manggar	1.641	1.520	3.161	7,84	18.920	18.233	37.153	92,16	40.314
2001	Lalang Jaya	83	72	155	8,57	1.808	1.690	3.498	95,76	3.653
2002	Kurnia Jaya	365	352	717	28,90	2.481	2.383	4.864	87,15	5581
2003	Padang	299	294	593	15,81	3.750	3.639	7.389	92,57	7982
2004	Kelubi	38	36	74	5,22	1.417	1.279	2.696	97,33	2770
2006	Lalang	142	118	260	10,31	2.523	2.423	4.946	95,01	5206
2007	Baru	481	418	899	20,68	4.347	4.258	8.605	90,54	9504
2010	Pulau Buku Limau	52	43	95	24,55	387	392	779	89,13	874
2012	Mekar Jaya	161	175	336	24,16	1.391	1.386	2.777	89,21	3113
2013	Bentaian Jaya	20	12	32	3,92	816	783	1.599	98,04	1631
02	Kec. Gantung	1.675	1.457	3.132	10,27	14.131	13.243	27.374	89,73	30506
2001	Gantung	313	294	607	9,55	2.945	2.801	5.746	90,45	6353
2002	Selinsing	307	268	575	8,30	3.300	3.050	6.350	91,70	6925
2003	Jangkar Asam	33	19	52	2,98	885	806	1.691	97,02	1743
2004	Lilangan	274	227	501	13,18	1.678	1.622	3.300	86,82	3801
2009	Lenggang	526	466	992	20,83	1.905	1.865	3.770	79,17	4762
2010	Batu Penyu	194	163	357	6,74	2.581	2.362	4.943	93,26	5300
2011	Limbongan	28	20	48	2,96	837	737	1.574	97,04	1622
03	Kec. Dendang	510	502	1.012	9,29	5.127	4.757	9.884	90,71	10.896
2001	Dendang	113	115	228	11,34	931	851	1.782	88,66	2010
2002	Jangkang	137	138	275	8,07	1.617	1.515	3.132	91,93	3407
2005	Nyuruk	205	204	409	12,62	1.483	1.349	2.832	87,38	3241
2008	Balok	55	45	100	4,47	1.096	1.042	2.138	95,53	2238
04	Kec. Kelapa Kampit	756	696	1.452	7,46	9.230	8.792	18.022	92,54	19.474
2001	Mentawak	93	93	186	4,58	1.981	1.893	3.874	95,42	4.060
2002	Senyubuk	203	195	398	9,23	1.973	1.943	3.916	90,77	4.314

No	Kecamatan	TIDAK ADA				ADA				JUMLAH PENDUDUK
		LK	PR	JUMLAH	%	LK	PR	JUMLAH	%	
2003	Cendil	25	19	44	2,59	842	813	1.655	97,41	1.699
2005	Buding	121	98	219	7,34	1.442	1.324	2.766	92,66	2.985
2006	Mayang	162	153	315	9,42	1.575	1.455	3.030	90,58	3.345
2007	Pembaharuan	152	138	290	9,44	1.417	1.364	2.781	90,56	3.071
05	Kec. Damar	521	530	1.051	7,67	6.465	6.190	12.655	92,33	13.706
2001	Air Kelik	125	118	243	11,22	966	956	1.922	88,78	2.165
2002	Mempaya	106	128	234	10,20	1.050	1.010	2.060	89,80	2.294
2003	Burong Mandi	26	29	55	3,59	765	714	1.479	96,41	1.534
2004	Mengkubang	122	135	257	7,16	1.716	1.617	3.333	92,84	3.590
2005	Sukamandi	142	120	262	6,35	1.968	1.893	3.861	93,65	4.123
06	Kec. Simpang Renggang	337	316	653	8,47	3.627	3.430	7.057	91,53	7.710
2001	Simpang Tiga	53	45	98	6,05	812	711	1.523	93,95	1.621
2002	Renggang	131	117	248	12,70	895	810	1.705	87,30	1.953
2003	Aik Madu	8	2	10	0,94	530	524	1.054	99,06	1.064
2004	Lintang	145	152	297	9,67	1.390	1.385	2.775	90,33	3.072
07	Kec. Simpang Pesak	275	281	556	6,40	4.183	3.952	8.135	93,60	8.691
2001	Simpang Pesak	171	172	343	8,76	1.851	1.720	3.571	91,24	3.914
2002	Tanjung Batu Itam	17	18	35	1,88	944	885	1.829	98,12	1.864
2003	Tanjung Kelumpang	60	54	114	5,90	937	881	1.818	94,10	1.932
2004	Dukong	27	37	64	6,52	451	466	917	93,48	981
Jumlah Penduduk Kabupaten		5.715	5.302	11.017	8,39	61.683	58.597	120.280	91,61	131.297

Sumber : PDAK – Kementrian Dalam Negeri RI Semester II 2023

Tabel 2. 20 Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Timur Berdasarkan Agama Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023

No	Agama	Manggar	Gantung	Dendang	Kelapa Kampit	Damar	Simpang Renggang	Simpang Pesak	Total
1	Islam	37.954	29.316	10.746	18.663	13.045	7.613	8.643	125.980
2	Katholik	185	81	53	47	21	23	4	414
3	Kristen	781	416	89	243	109	73	25	1.736
4	Hindu	1	1	-	-	-	-	-	2
5	Budha	1.301	642	8	521	507	1	19	2.999
6	Konghucu	91	50	-	-	24	-	-	165
7	Kepercayaan	1	-	-	-	-	-	-	1
Kab. Belitung Timur		40.314	30.506	10.896	19.474	13.706	7.710	8.691	131.297

Sumber : PDAK – Kementerian Dalam Negeri RI Semester II Tahun 2023

Tabel 2. 21 Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan Kartu Keluarga Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023

NAMA KEC / DESA	JUMLAH KEPALA KELUARGA (JIWA)			KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA			
	L	P	L + P	SUDAH	%	BELUM	%
KEC. MANGGAR	11.221	2.911	14.132	14.122	99,93	10	0,07
LALANG JAYA	1.036	242	1.278	1.274	99,69	4	0,31
KURNIA JAYA	1.536	418	1.954	1.951	99,85	3	0,15
PADANG	2.237	511	2.748	2.748	100,00	0	0,00
KELUBI	842	168	1.010	1.010	100,00	0	0,00
LALANG	1.451	428	1.879	1.879	100,00	0	0,00
BARU	2.544	742	3.286	3.283	99,91	3	0,09
PULAU BUKU LIMA	233	47	280	280	100,00	0	0,00
MEKAR JAYA	841	264	1.105	1.105	100,00	0	0,00
BENTAIA	501	91	592	592	100,00	0	0,00
KEC. GANTUNG	8.620	1.833	10.453	10.452	99,99	1	0,01
GANTUNG	1.759	402	2.161	2.160	99,95	1	0,05
SELINSING	1.936	425	2.361	2.361	100,00	0	0,00
JANGKAR ASAM	487	92	579	579	100,00	0	0,00
LILANGAN	1.089	164	1.253	1.253	100,00	0	0,00
LENGANG	1.344	375	1.719	1.719	100,00	0	0,00
BATU PENYU	1.524	293	1.817	1.817	100,00	0	0,00
LIMBONGAN	481	82	563	563	100,00	0	0,00
KEC. DENDANG	3.326	453	3.779	3.778	99,97	1	0,03
DENDANG	591	100	691	690	99,86	1	0,14
JANGKANG	1039	131	1.170	1.170	100,00	0	0,00
NYURUK	1010	128	1.138	1.138	100,00	0	0,00
BALOK	686	94	780	780	100,00	0	0,00
KEC. KELAPA KAMPIT	5.705	1.189	6.894	6.890	99,94	4	0,06
MENTAWAK	1.180	233	1.413	1.412	99,93	1	0,07
SENYUBUK	1.253	301	1.554	1.553	99,94	1	0,06
CENDIL	524	83	607	607	100,00	0	0,00
BUDING	905	160	1.065	1.064	99,91	1	0,09
MAYANG	992	190	1.182	1.181	99,92	1	0,08
PEMBAHARUAN	851	222	1.073	1.073	100,00	0	0,00
KEC. DAMAR	4.004	873	4.877	4.877	100,00	0	0,00
AIR KELIK	636	148	784	784	100,00	0	0,00
MEMPAYA	695	138	833	833	100,00	0	0,00
BURONG MANDI	461	87	548	548	100,00	0	0,00
MENGKUBANG	1017	246	1.263	1.263	100,00	0	0,00
SUKAMANDI	1195	254	1.449	1.449	100,00	0	0,00
KEC. SIMPANG RENGANG	2.432	433	2.865	2.860	99,83	5	0,17
SIMPANG TIGA	506	81	587	583	99,32	4	0,68
RENGANG	627	105	732	732	100,00	0	0,00

NAMA KEC / DESA	JUMLAH KEPALA KELUARGA (JIWA)			KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA			
	L	P	L + P	SUDAH	%	BELUM	%
AIK MADU	343	60	403	403	100,00	0	0,00
LINTANG	956	187	1.143	1.142	99,91	1	0,09
KEC. SIMPANG PESAK	2.510	484	2.994	2.992	99,93	2	0,07
SIMPANG PESAK	1.132	183	1.315	1.313	99,85	2	0,15
TANJUNG BATU ITAM	546	125	671	671	100,00	0	0,00
TANJUNG KELUMPANG	554	114	668	668	100,00	0	0,00
DUKONG	278	62	340	340	100,00	0	0,00
KAB. BELITUNG TIMUR	37.818	8.176	45.994	45.971	99,95	23	0,05

Sumber : PDAK – Kementrian Dalam Negeri RI Semester II 2023

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

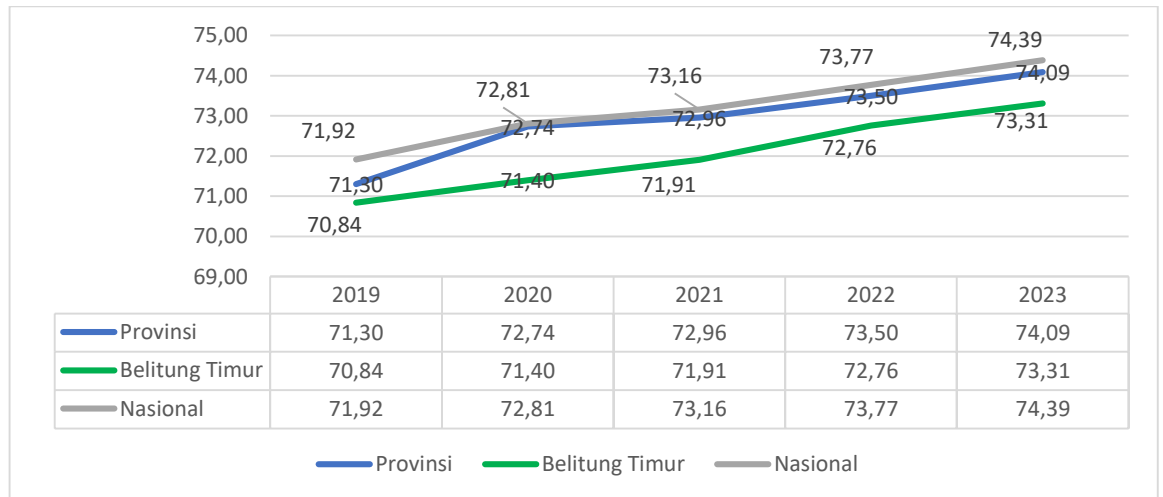
A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator terciptanya pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur mutu modal manusia, United Nations Development Program (UNDP) mengenalkan konsep mutu modal manusia yang diberi nama Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia, yaitu dimensi kesehatan diukur angka usia harapan hidup, dimensi pendidikan diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan rata – rata lama sekolah dan dimensi daya beli yang memiliki standar hidup layak diukur dari paritas daya beli (UNDP,2004).

IPM dapat diukur dengan pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut adalah umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak. Makna dari ketiga dimensi tersebut sangat luas karena terkait dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan dan dimensi hidup layak. Indikator untuk mengetahuinya adalah angka harapan hidup, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, terakhir adalah dengan mengukur kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok, dengan melihat rata-rata besarnya pengeluaran per kapita (BPS, 2023).

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM digunakan sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

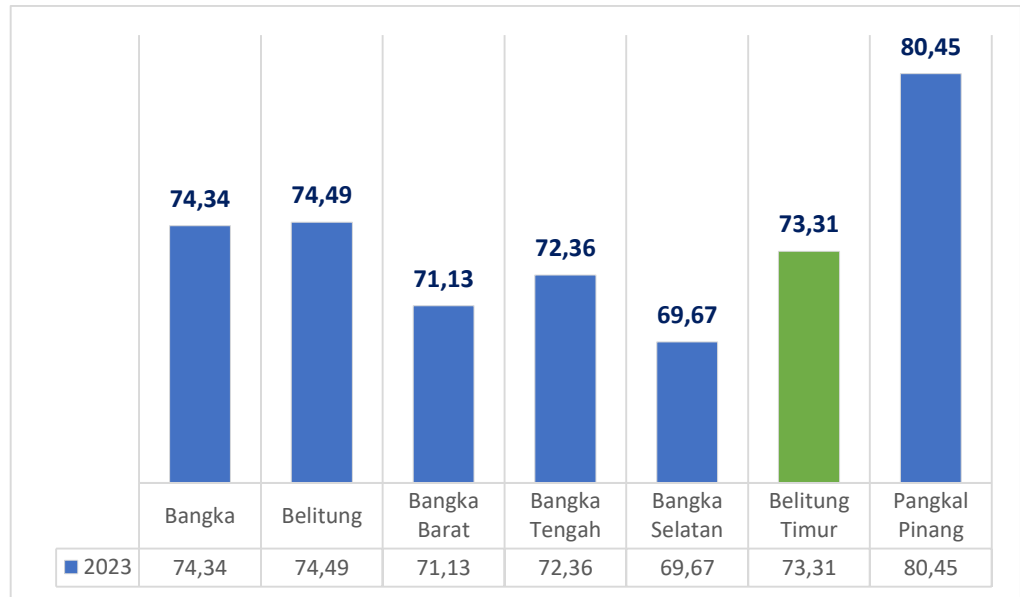
Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (Brata, 2004). Angka IPM Kabupaten Belitung Timur menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 – 2023 seperti pada tabel di bawah ini:



Grafik 2. 2 Perkembangan IPM Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 – 2023

Sumber: BPS, Tahun 2023 (Diolah)

Pertumbuhan IPM Kabupaten Belitung Timur secara rata-rata selama lima tahun terakhir sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 mencapai 0,62 persen. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, IPM Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2023 berada di urutan keempat yaitu di bawah Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Belitung dan kabupaten Bangka, sebagaimana bisa lihat melalui grafik berikut:



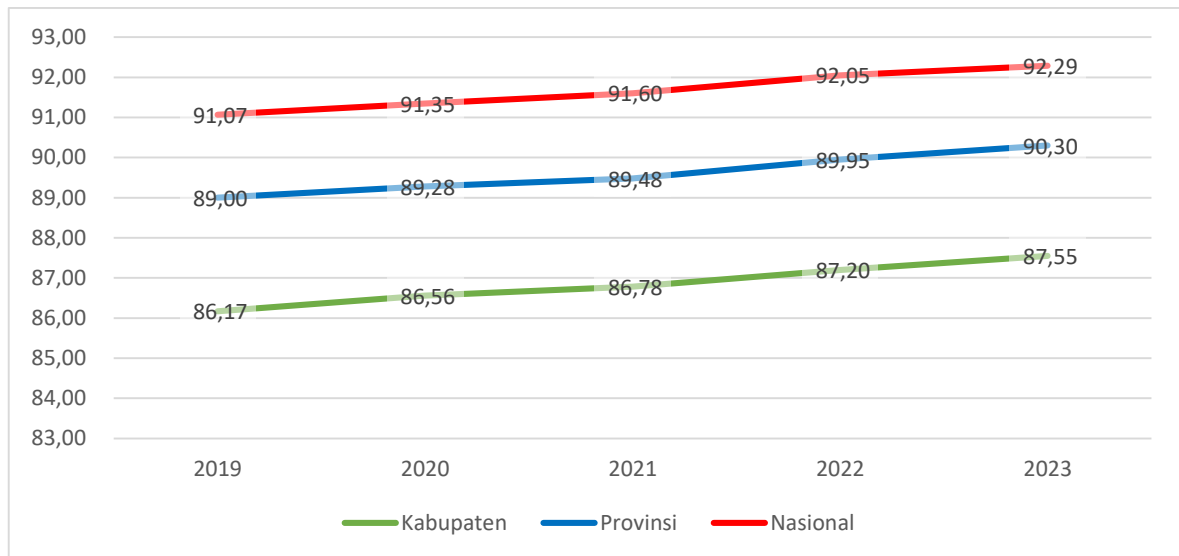
Grafik 2. 3 IPM Tahun 2023 per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: BPS, Tahun 2023 (Diolah)

Sebagai informasi, IPM pada 2020-2023 menggunakan sumber data dari hasil Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020 (LF SP2020) untuk indikator UHH. Pemutakhiran dilakukan salah satunya karena adanya perubahan karakteristik demografi dalam 10 tahun terakhir.

B. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

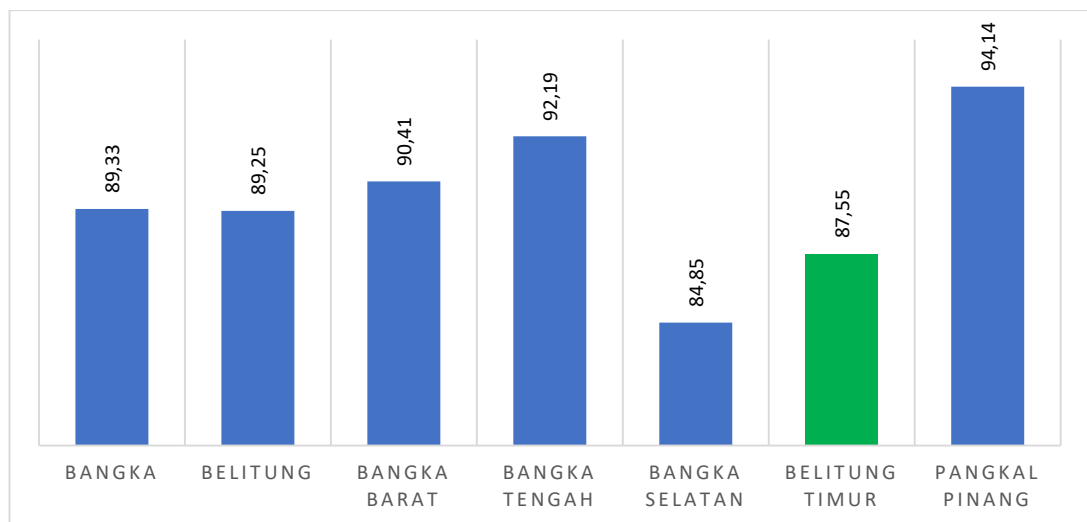
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Pembangunan gender dinilai tidak ada kesenjangan jika nilai IPG sama dengan IPM. Situasi IPG Kabupaten Belitung Timur selama Tahun 2019 – 2023 cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2019 IPG Kabupaten Belitung Timur sebesar 86,17 dan terus meningkat menjadi 87,55 pada tahun 2023. Peningkatan IPG Belitung Timur lima tahun terakhir masih jauh dibawah angka rata-rata provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar 90,30 dan nasional sebesar 92,29.



Grafik 2. 4 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024 (Diolah).

Berdasarkan data diketahui posisi relatif IPG Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 berada di urutan ke-enam terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kep Bangka Belitung. Diatas kabupaten Bangka Selatan.



Grafik 2. 5 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Belitung Timur

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023 (Diolah).

Masih rendahnya angka IPG di Kabupaten Belitung Timur disebabkan masih rendahnya angka harapan lama sekolah dan pengeluaran perkapita perempuan yang masih dibawah rata-rata provinsi sementara angka harapan hidup perempuan dan rata-rata lama sekolah perempuan di Kabupaten Belitung Timur

sudah relatif lebih baik dan diatas angka rata-rata provinsi. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Wilayah Babel	Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan (Tahun) Hasil Long Form SP2020	Harapan Lama Sekolah (HLS) Perempuan (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan (Tahun)	Pengeluaran Perkapita Perempuan (Ribu/Rupiah/Orang/ Tahun)
	2023	2023	2023	2023
Bangka	75.14	13.45	8.16	8.765
Belitung	74.58	12.09	8.65	9.411
Bangka Barat	73.96	12.03	7.42	9.768
Bangka Tengah	75.83	12.76	6.94	10.841
Bangka Selatan	73.55	11.75	6.72	6.681
Belitung Timur	75.87	11.85	8.79	7.426
Kota Pangkalpinang	77.80	13.18	10.08	15.102

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023 (Diolah).

Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

A. PDRB Kabupaten Belitung Timur Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha

- Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Belitung Timur menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018 - 2023

Nilai PDRB Kabupaten Belitung Timur atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 10.561.930,75 juta rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 777.324,53 juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 9.784.606,22 juta rupiah.

Berdasarkan harga konstan, Nilai PDRB Kabupaten Belitung Timur juga mengalami kenaikan, dari 5.931.235,35 juta rupiah pada tahun 2022 menjadi 6.211.049,16 juta rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2023, Belitung Timur mengalami kenaikan sebesar 4,72 persen atau bertambah sebesar 279.813,81 juta rupiah.

Tabel di bawah ini menggambarkan kondisi PDRB Kabupaten Belitung Timur tahun 2018 – 2023 atas dasar harga berlaku:

**Tabel 2. 22 PDRB Kabupaten Belitung Timur Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2018-2023**

Kategori PDRB	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.782.661,00	1.858.687,00	2.028.969,35	2.255.725,06	2.445.629,29	2.707.906,58
Pertambangan dan Penggalian	1.208.209,00	1.158.759,00	1.134.928,95	1.328.727,52	1.306.483,65	1.259.822,01
Industri Pengolahan	1.485.893,00	1.531.059,00	1.586.887,19	1.942.434,58	2.321.835,20	2.465.569,92
Pengadaan Listrik dan Gas	5.190,00	6.493,00	6.748,73	7.572,29	7.500,78	7.806,96
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.535,00	1.673,00	1.685,90	1.788,58	1.905,58	1.983,25
Konstruksi	611.355,00	659.362,00	637.383,30	694.992,72	728.137,53	815.698,07
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	852.419,00	901.403,00	835.148,75	923.782,39	1.110.334,66	1.215.579,96
Transportasi dan Pergudangan	153.525,00	167.955,00	160.989,31	173.011,83	202.378,29	230.373,41
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	173.789,00	191.756,00	195.061,46	217.664,41	254.360,67	289.807,31
Informasi dan Komunikasi	82.768,00	90.933,00	100.000,44	105.724,17	114.976,57	133.397,69
Jasa Keuangan dan Asuransi	35.796,00	37.441,00	38.143,92	43.390,60	50.234,97	59.220,68
Real Estate	220.522,00	236.248,00	244.962,63	255.533,38	278.668,04	305.163,84
Jasa Perusahaan	22.354,00	24.368,00	22.879,10	25.001,70	28.436,27	32.331,99
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	428.456,00	468.957,00	458.581,94	489.935,16	492.870,19	548.729,03
Jasa Pendidikan	196.458,00	214.776,00	216.628,07	232.842,25	243.899,49	270.106,67
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103.397,00	116.429,00	119.022,49	134.797,38	141.718,08	157.609,33
Jasa lainnya	41.532,00	47.470,00	45.717,14	49.557,97	55.236,96	60.824,06
PDRB	7.405.859,00	7.713.767,00	7.833.738,65	8.882.481,99	9.784.606,22	10.561.930,75

Sumber : Belitung Timur Dalam Angka, BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2024

Selanjutnya, tabel di bawah ini menggambarkan perkembangan PDRB Kabupaten Belitung Timur atas dasar harga konstan tahun 2018 – 2023.

**Tabel 2. 23 PDRB Kabupaten Belitung Timur Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2018-2023**

Kategori PDRB	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.281.839,00	1.326.146,00	1.407.550,56	1.426.658,01	1.447.931,63	1.520.082,15
Pertambangan dan Penggalian	982.415,00	974.475,00	959.658,61	996.208,60	994.831,51	977.396,77
Industri Pengolahan	1.060.917,00	1.090.689,00	1.083.659,37	1.163.930,71	1.233.354,36	1.278.768,25
Pengadaan Listrik dan Gas	2.932,00	3.515,00	3.607,48	4.051,34	3.951,39	4.085,44
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	962,00	1.014,00	1.005,59	1.035,37	1.085,23	1.091,07

Kategori PDRB	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Limbah dan Daur Ulang						
Konstruksi	396.340,00	416.599,00	401.227,67	415.430,96	416.063,58	457.273,17
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	565.877,00	578.292,00	527.716,19	565.732,56	634.496,77	665.917,37
Transportasi dan Pergudangan	106.252,00	113.606,00	104.569,20	110.237,17	121.480,78	127.985,15
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	120.850,00	129.456,00	125.326,25	135.400,03	153.105,15	171.173,01
Informasi dan Komunikasi	72.622,00	79.672,00	87.736,05	92.147,98	99.085,01	113.090,81
Jasa Keuangan dan Asuransi	22.829,00	23.583,00	24.012,40	26.036,18	27.762,38	31.754,30
Real Estate	149.815,00	156.511,00	160.246,33	166.393,30	176.178,72	186.129,15
Jasa Perusahaan	15.560,00	16.160,00	14.218,30	15.089,20	16.458,21	17.765,63
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	317.346,00	341.771,00	322.547,50	340.531,36	341.554,95	371.637,79
Jasa Pendidikan	129.854,00	139.121,00	134.747,18	138.742,47	142.216,11	154.797,12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	71.561,00	78.294,00	79.093,86	87.413,04	89.613,15	97.906,30
Jasa lainnya	28.145,00	31.073,00	28.536,91	29.755,92	32.066,42	34.195,70
Jumlah	5.326.116,00	5.499.978,00	5.465.459,44	5.714.794,20	5.931.235,35	6.211.049,16

Sumber : Belitung Timur Dalam Angka, BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2024

- Peranan PDRB menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018 – 2023

Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 dihasilkan oleh kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu mencapai 25,64 persen. Selanjutnya kategori lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 23,34 persen, disusul oleh kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan sebesar 11,93 persen, kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,51 persen, dan kategori Konstruksi sebesar 7,72 persen. Berikut disajikan Peranan PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Belitung Timur.

**Tabel 2. 24 Peranan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(Persen)
Tahun 2018 – 2023**

Kategori PDRB	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,07	24,10	25,90	25,40	24,99	25,64
Pertambangan dan Penggalian	16,31	15,02	14,49	14,96	13,35	11,93
Industri Pengolahan	20,06	19,85	20,26	21,87	23,73	23,34
Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,09	0,09	0,08	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Konstruksi	8,26	8,55	8,14	7,82	7,44	7,72
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,51	11,69	10,66	10,40	11,35	11,51
Transportasi dan Pergudangan	2,07	2,18	2,06	1,95	2,07	2,18
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,35	2,49	2,49	2,45	2,60	2,74
Informasi dan Komunikasi	1,12	1,18	1,28	1,19	1,17	1,26
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,48	0,49	0,49	0,49	0,51	0,56
Real Estate	2,98	3,06	3,13	2,88	2,85	2,89
Jasa Perusahaan	0,30	0,32	0,29	0,28	0,29	0,31
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,79	6,08	5,85	5,52	5,04	5,20
Jasa Pendidikan	2,65	2,78	2,77	2,62	2,49	2,56
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,40	1,51	1,52	1,52	1,45	1,49
Jasa lainnya	0,56	0,62	0,58	0,56	0,56	0,58
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Belitung Timur Dalam Angka, BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2024

Di antara kelima lapangan usaha utama tersebut jika dibandingkan peranannya antara tahun 2022 dan 2023, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, kategori konstruksi dan kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sedangkan untuk kategori pertambangan dan penggalian, dan kategori industri pengolahan mengalami penurunan peran.

Tabel 2. 25 Perbandingan Distribusi PDRB Provinsi Bangka Belitung dan PDRB Kabupaten Belitung Timur ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022

NO	LAPANGAN USAHA	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Kab.	Prov.	Kab.	Prov.	Kab.	Prov.	Kab	Prov	Kab	Prov	Kab	Prov
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	24,07	18,00	24,10	17,93	26,03	20,45	25,40	19,65	24,99	19,18	25,64	19,49
B	Pertambangan & penggalian	16,31	10,61	15,02	9,51	14,49	8,57	14,94	9,55	13,35	8,63	11,93	7,64
C	Industri pengolahan	20,06	20,60	19,85	19,59	20,12	18,76	21,93	20,86	23,73	21,84	23,34	21,15
D	Pengadaan listrik, gas	0,07	0,12	0,08	0,12	0,09	0,13	0,09	0,13	0,08	0,11	0,07	0,11
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	8,26	9,72	8,55	10,37	8,15	10,21	7,82	9,67	7,44	9,09	7,72	9,50
G	Perdagangan besar, eceran, reparasi mobil & sepeda motor	11,51	15,69	11,69	15,80	10,63	15,37	10,38	14,76	11,35	15,74	11,51	15,69
H	Transportasi & pergudangan	2,07	4,24	2,18	4,45	2,05	3,62	1,93	3,60	2,07	4,40	2,18	4,83
I	Penyediaan akomodasi & makan minum	2,35	2,60	2,49	2,91	2,49	3,04	2,45	3,00	2,60	3,08	2,74	3,20
J	informasi & komunikasi	1,08	1,72	1,18	1,88	1,28	2,16	1,19	2,08	1,17	2,09	1,26	2,23
K	jasa keuangan dan asuransi	0,48	1,93	0,49	1,99	0,49	1,86	0,49	1,82	0,51	1,88	0,56	2,02
L	Real estat	2,98	3,44	3,06	3,47	3,12	3,70	2,88	3,50	2,85	3,42	2,89	3,39
M,N	Jasa perusahaan	0,30	0,30	0,32	0,31	0,29	0,28	0,28	0,27	0,29	0,28	0,31	0,30
O	Adminstrasi pemerintahan, pertahanan & jaminan sosial wajib	5,80	6,04	6,08	6,33	5,87	6,40	5,51	5,93	5,04	5,29	5,20	5,27
P	Jasa pendidikan	2,65	2,91	2,78	3,06	2,78	3,16	2,62	2,93	2,49	2,79	2,56	2,91
Q	Jasa kesehatan & kegiatan sosial	1,41	1,24	1,51	1,35	1,52	1,39	1,52	1,42	1,45	1,34	1,49	1,38
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,56	0,82	0,62	0,91	0,58	0,88	0,56	0,81	0,56	0,82	0,58	0,87
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung 2024, BPS Kab.Belitung Timur 2024

Dilihat dari perbandingan distribusi PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PDRB Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 – 2023, selama 5 (lima) tahun kategori pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi yang paling besar pada PDRB Kabupaten Belitung Timur. Sedangkan pada PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kategori industri pengolahan yang lebih mendominasi. Kecuali pada tahun 2020 kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberikan kontribusi paling besar.

2.1.2.1. PDRB Perkapita

2

A. PDRB Per Kapita Kabupaten

- **Perkembangan PDRB Perkapita menurut ADHB dan ADHK (juta rupiah), Tahun 2018 – 2022**

PDRB Per kapita merupakan salah satu indikator sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan serta kemakmuran penduduk di suatu daerah. PDRB per kapita didapatkan dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Belitung Timur atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 PDRB per kapita Kabupaten Belitung Timur tercatat sebesar 61,12 juta rupiah, dan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2023 mencapai 80,45 juta rupiah. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 7,66 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,01 juta rupiah.

PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu Negara. Nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2020 hingga 2023 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 PDRB per kapita atas dasar harga konstan tercatat sebesar 47,31 juta rupiah.

**Tabel 2. 26 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita
Kabupaten Belitung Timur 2019-2023 (Juta Rupiah)**

Indikator	2019	2020	2021'	2022**	2023**
PDRB Perkapita ADHB	61.122,87	61.674,24	69.334,26	75.436,80	80.452,85
PDRB Perkapita ADHK 2010	43.581,10	43.150,52	44.608,15	45.728,30	47.311,10

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024, data diolah

Catatan *) angka sementara

***) angka sangat sementara

Persentase PDRB per kapita didapat dari PDRB per kapita tahun ke-n di kurang PDRB per kapita tahun n-1 dibagi PDRB per kapita tahun n-1 dikali 100% maka didapat persentase PDRB per kapita baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Untuk PDRB perkapita ADHB, mengalami peningkatan sebanyak 6,65 persen pada tahun 2023. Persentase peningkatan PDRB perkapita tertinggi pada tahun 2021 sebesar 12,42 persen. Sedangkan persentase peningkatan PDRB perkapita ADHK tertinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar 3,46 persen.

**Tabel 2. 27 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2019-2023 (persen)**

Indikator	2019	2020	2021	2022*	2023**
PDRB Perkapita ADHB	61,12	0,90%	12,42%	8,80%	6,65%
PDRB Perkapita ADHK 2011	43,58	-0,99%	3,38%	2,51%	3,46%

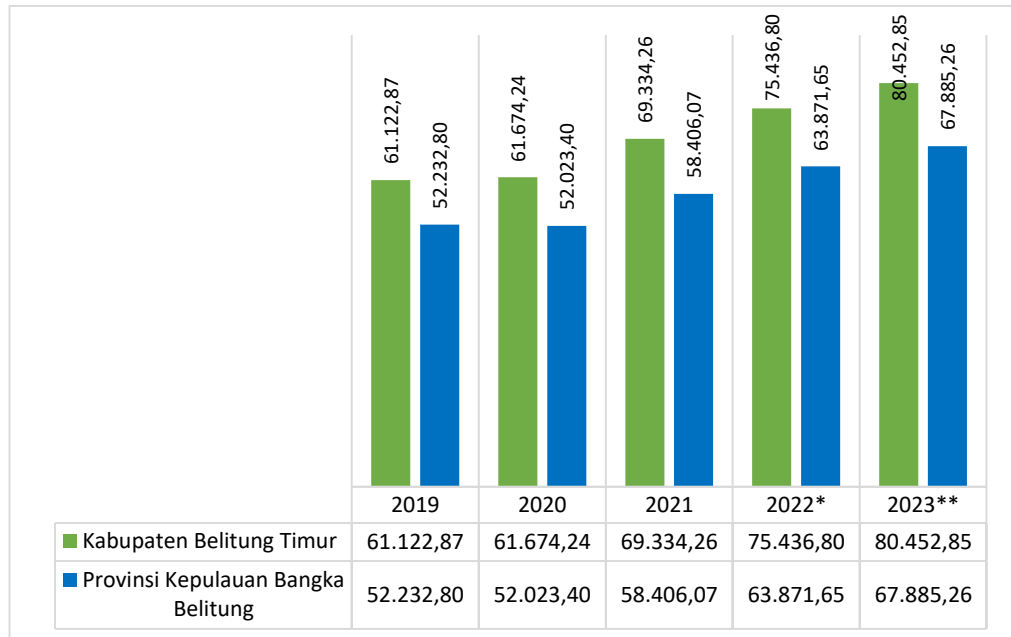
Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2022 (data diolah)

Catatan *) angka sementara

**) angka sangat sementara

- Perbandingan PDRB perkapita Atas Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 s.d Tahun 2023

tahun lebih besar di bandingkan dengan provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berbeda dengan nilai PDRB per kapita Kabupaten Belitung Timur yang terus mengalami peningkatan, nilai PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 52,02 juta rupiah, namun kembali meningkat pada tiga tahun terakhir. Gambaran mengenai perbandingan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur pada periode tahun 2019-2023, diperlihatkan pada grafik berikut:



Grafik 2. 6 Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Harga Berlaku 2019 - 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024 (data diolah)

2.1.2.1.3. Pengeluaran Ril Perkapita

Tabel 2. 28 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Belitung Timur (Ribuan Rupiah/orang/tahun) Tahun 2018 – 2023

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Belitung Timur	11.302	11.831	11.730	11.760	12.357	12.536

Sumber : Belitung Timur Dalam Angka, BPS Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024

Tabel 2. 29 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah) di Belitung Timur, 2018-2023

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Makanan	729.477	822.908	871.257	897.337	998.166	958.718
Bukan Makanan	679.292	855.459	805.002	855.677	924.753	1.007.869
Total	1.408.769	1.678.367	1.676.259	1.753.013	1.922.919	1.966.587

Sumber : Belitung Timur Dalam Angka, BPS Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024

Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Namun data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, sehingga didekati melalui data pengeluaran rumah tangga. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Belitung Timur di tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Pengeluaran per kapita sebulan di tahun 2023 sebesar Rp.1.966.587 , lebih tinggi dibandingkan konsumsi per kapita sebulan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.1.922.919. Kenaikan

pengeluaran per kapita sebulan tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 terjadi untuk jenis pengeluaran bukan makanan.

Dilihat menurut komposisinya, pada tahun 2023 pengeluaran bukan makanan mendominasi pola konsumsi penduduk Kabupaten Belitung Timur. Di mana sebesar 51,25 persen pengeluaran penduduk Kabupaten Belitung Timur digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan, dan sisanya sebesar 48,75 persen digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Sedangkan pada tahun 2022, dimana pengeluaran makanan mendominasi pola konsumsi penduduk Kabupaten Belitung Timur sebesar 51,91 persen, dan pengeluaran bukan makanan sebesar 48,09 persen.

Tabel 2. 30 Perbandingan Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur, 2018 -2023

Jenis Pengeluaran	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Kab.	Prov.	Kab.	Prov.	Prov.	Prov.	Kab.	Prov.	Kab.	Prov.	Kab.	Prov.
Makanan	729.477	710.401	822.908	751.641	871.257	771.121	897.337	783.204	998.116	881.622	958.718	879.797
Bukan Makanan	679.292	709.094	855.459	758.833	805.002	730.723	885.677	748.970	924.753	772.658	1.007.869	847.753
Total	1.408.769	1.419.495	1.678.367	1.510.474	1.676.259	1.501844	1.753.013	1.532.174	1.922.919	1.654.280	1.966.587	1.727.550

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2023, BTDA 2023, BPS Kabupaten Belitung Timur

2.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

4

A. Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Lapangan Usaha (persen)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Setelah mengalami rebound pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 sebesar 3,79 persen, pada tahun 2023 ekonomi kabupaten Belitung Timur Kembali tumbuh sebesar 4,72 persen. 16 dari 17 kategori lapangan usaha tumbuh positif kecuali 1 sektor lainnya yang mengalami kontraksi yaitu pertambangan dan penggalan.

Tabel 2. 31 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2023

Kategori PDRB	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,73	3,48	5,82	1,36	1,49	4,98
Pertambangan dan Penggalan	0,20	-0,67	-1,42	3,81	-0,14	-1,75
Industri Pengolahan	4,16	2,78	-0,49	7,41	5,96	3,68
Pengadaan Listrik dan Gas	5,72	19,88	2,62	12,30	-2,47	3,39
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,93	5,33	-0,83	2,96	4,82	0,54
Konstruksi	4,27	5,11	-3,59	3,54	0,15	9,90
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,69	2,22	-8,78	7,20	12,15	4,95
Transportasi dan Pergudangan	8,15	6,92	-8,36	5,42	10,20	5,35
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,80	7,12	-3,47	8,04	13,08	11,80
Informasi dan Komunikasi	11,51	9,71	10,12	5,03	7,53	14,14
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,64	3,30	1,82	8,43	6,63	14,38
Real Estate	9,06	4,47	2,31	3,84	5,88	5,65
Jasa Perusahaan	11,28	3,86	-12,02	6,13	9,07	7,94
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,24	7,70	-5,62	5,58	0,30	8,81
Jasa Pendidikan	8,63	7,14	-2,81	2,97	2,50	8,85
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,43	9,41	1,02	10,52	2,52	9,25
Jasa lainnya	9,00	10,40	-8,16	4,27	7,76	6,64

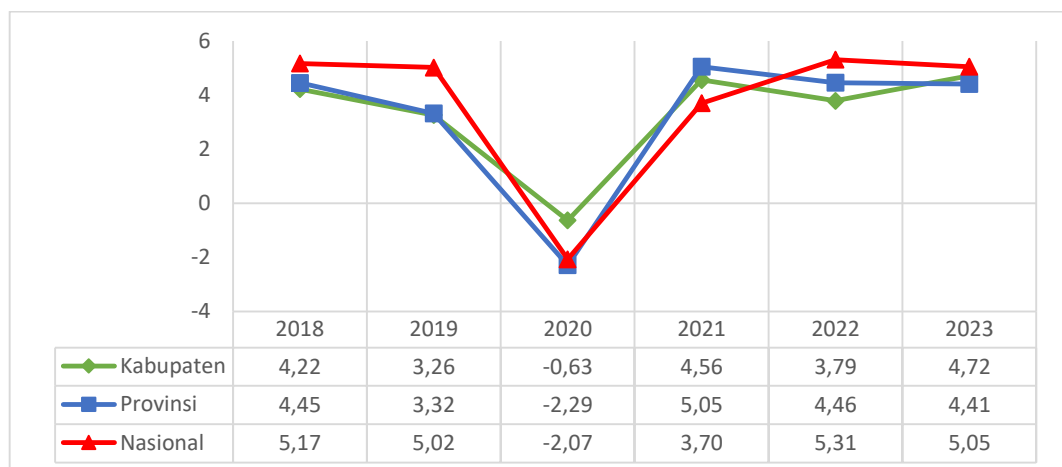
Kategori PDRB	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB	4,22	3,29	-0,66	4,56	3,79	4,72

Sumber : Belitung Timur Dalam Angka 2023, BPS Kabupaten Belitung Timur

B. Perbandingan Pertumbuhan Riil PDB, PDRB Provinsi Bangka Belitung dan PDRB Kabupaten Belitung Timur (dalam persen) Tahun 2016-2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional tumbuh positif di tahun 2023 di angka 4,72 persen, 4,41 persen dan 5,05 persen. Walaupun pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami perlambatan bila dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 5,05 persen di nasional dan 4,41 persen di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sedangkan ekonomi Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 tumbuh sekitar 4,72 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,79 persen.



Grafik 2. 7 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2022

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023, diolah

2.1.2.1. Analisis Location Quotient

5

Teknik *Analisis Location Quotient* ini memiliki asumsi bahwa semua penduduk di suatu daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan nasional (regional). Bahwa produktivitas tiap pekerja di setiap sektor industri di daerah adalah sama dengan produktivitas pekerja dalam industri nasional. Setiap industri menghasilkan barang yang homogen pada setiap sektor, dan bahwa perekonomian bangsa yang bersangkutan adalah

suatu perekonomian tertutup. Teknik LQ dibagi menjadi dua, yaitu LQ statis (*Static Location Quotient*) dan LQ dinamis (*Dynamic Location Quotient*).

a. Statis Location Quotient (SLQ)

SLQ digunakan mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan atau sektor yang sejenis dalam perekonomian nasional. Apabila hasil perhitungannya menunjukkan $LQ > 1$, berarti merupakan sektor basis dan berpotensi untuk ekspor, sedangkan $LQ < 1$, berarti bukan sektor basis (sektor lokal/impor).

Dengan memperhitungkan data yang tersedia, perhitungan analisis LQ didasarkan dengan membandingkan data Kabupaten Belitung Timur dengan data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nilai PDRB yang menjadi dasar perhitungan digunakan nilai PDRB atas dasar harga konstan. Hasil perhitungan nilai LQ yang berupa indeks tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 32 Nilai Indeks SLQ di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

Lapangan Usaha/Sektor	Indeks LQ	Keterangan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,32	basis
Pertambangan dan Penggalian	1,56	basis
Industri Pengolahan	1,10	basis
Pengadaan Listrik dan Gas	0,64	non basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,00	basis
Konstruksi	0,81	non basis
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,73	non basis
Transportasi dan Pergudangan	0,45	non basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,86	non basis
Informasi dan Komunikasi	0,57	non basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,28	non basis
Real Estate	0,85	non basis
Jasa Perusahaan	1,03	basis
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,99	non basis
Jasa Pendidikan	0,88	non basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,08	basis
Jasa lainnya	0,67	non basis

Sumber Bappelitbangda Kab. Belitung Timur, Tahun 2024 (data diolah)

Dari hasil perhitungan SLQ, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 di Kabupaten Belitung Timur sektor apa saja yang merupakan sektor basis maupun non basis. Terdapat 6 sektor basis, yaitu sektor pertanian,

kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor jasa perusahaan; sektor jasa Kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor – sektor tersebut memiliki nilai indeks $LQ > 1$.

Hasil indeks tersebut menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut menjadi sektor andalan dan memiliki kekuatan ekonomi yang cukup baik dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur. Dan sektor-sektor tersebut sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan di daerahnya bahkan berpotensi ekspor.

Sektor yang merupakan bukan basis pada tahun 2023 adalah sektor pengadaan listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa Pendidikan dan sektor jasa lainnya. Kesebelas sektor bukan basis tersebut memiliki indeks $LQ < 1$. Sektor-sektor tersebut dalam memproduksi belum mampu memenuhi kebutuhan dalam Kabupaten Belitung Timur bahkan mengimpor dari luar daerah. Sektor bukan basis ini perlu mendapat perhatian khusus. Dengan bermodalkan 6 sektor basis, diharapkan kesebelas sektor bukan basis dapat dibantu untuk dikembangkan menjadi sektor basis baru.

b. *Dynamic Location Quotient (DLQ)*

Metode *Dynamic Location Quotient (DLQ)* atau LQ dinamis digunakan untuk mengakomodasi perubahan struktur ekonomi wilayah dalam kurun waktu tertentu. Metode ini mempunyai kesamaan dengan metode LQ statis, hanya yang membedakan model LQ dinamis memasukan laju pertumbuhan rata-rata terhadap masing-masing nilai tambah sektoral maupun PDRB untuk kurun waktu antara tahun 0 sampai dengan tahun-t.

Apabila nilai $DLQ > 1$, maka potensi perkembangan sektor usaha di Kabupaten Belitung Timur lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan kata lain masih dapat diharapkan menjadi sektor basis pada masa mendatang. Namun apabila nilai $DLQ < 1$, maka potensi perkembangan sektor usaha di Kabupaten Belitung Timur lebih rendah dibandingkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara

keseluruhan, dengan kata lain tidak dapat diharapkan menjadi sektor basis di masa yang akan datang.

Tabel 2. 33 Nilai Indeks LQ Dinamis (DLQ) di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

Lapangan Usaha/Sektor	Indeks LQ	Keterangan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,32	basis
Pertambangan dan Penggalian	1,46	basis
Industri Pengolahan	1,92	basis
Pengadaan Listrik dan Gas	1,41	basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,83	non basis
Konstruksi	1,11	basis
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,12	basis
Transportasi dan Pergudangan	0,57	non basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,28	basis
Informasi dan Komunikasi	1,02	basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,03	basis
Real Estate	1,36	basis
Jasa Perusahaan	0,90	non basis
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,33	basis
Jasa Pendidikan	0,82	non basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,05	basis
Jasa lainnya	0,61	non basis

Sumber : Bappelitbangda Kab. Belitung Timur, Tahun 2024 (data diolah)

Hasil analisis tabel di atas menunjukkan bahwa sektor yang mengalami peningkatan kinerja sehingga menjadi sektor basis dimasa mendatang, yaitu sektor pertanian,kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran;reparasi mobil dan sepeda motor, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Berdasarkan nilai SLQ dan DLQ dapat ditentukan klasifikasi sektor usaha apakah tergolong sektor unggulan, sektor prospektif, sektor andalan, dan sektor tertinggal.

Tabel 2. 34 Klasifikasi Sektor Berdasarkan Nilai SLQ dan DLQ di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022

Kriteria	SLQ>1	SLQ<1
DLQ>1	Sektor Unggulan • Pertanian, Kehutanan dan Perikanan • Pertambangan dan Penggalian • Industri Pengolahan • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Sektor Andalan • Pengadaan Listrik dan Gas • Konstruksi • Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor • Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum • Informasi dan Komunikasi • Jasa Keuangan dan Asuransi • Real Estate • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
DLQ<1	Sektor Prospektif • Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang • Jasa Perusahaan	Sektor Tertinggal • Jasa Transportasi dan Pergudangan • Jasa Pendidikan • Jasa Lainnya

Sumber : Bepelitbangda Kab. Belitung Timur, Tahun 2022 (data diolah)

Hasil klasifikasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 di Kabupaten Belitung Timur terdapat sektor usaha yang merupakan sektor unggulan, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa Kesehatan dan kegiatan sosial. Sedangkan sektor andalan terdiri dari sektor Listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, jasa real estate, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Di mana sektor-sektor tersebut pada saat ini belum unggul, akan tetapi dalam beberapa waktu kedepan berpotensi unggul.

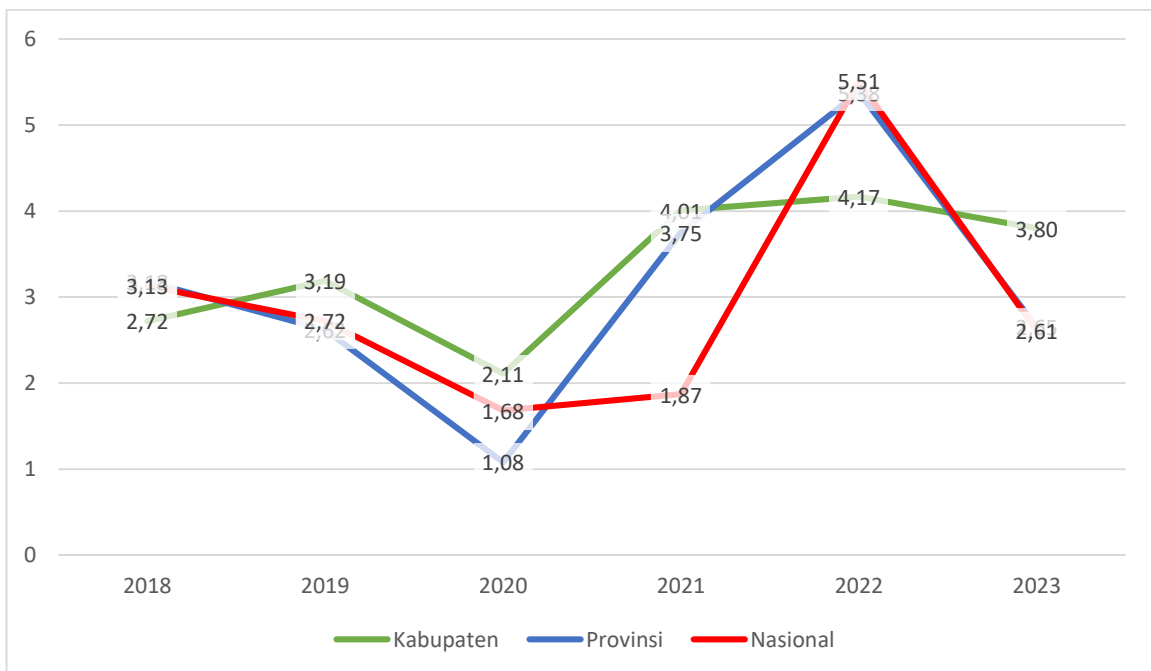
Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, serta sektor jasa perusahaan termasuk dalam klasifikasi sektor prospektif. Seluruh sektor ini merupakan unggulan tetapi tidak berpotensi unggul pada beberapa waktu ke depan.

Dan yang termasuk dalam klasifikasi sektor tertinggal adalah sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa pendidikan dan sektor jasa lainnya. Sektor-sektor ini merupakan sektor yang tidak unggul untuk saat ini dan pada beberapa waktu ke depan pun belum berpotensi untuk menjadi sektor unggulan.

2.1.2.1.6 Laju Inflasi

A. Perkembangan Laju inflasi Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2016 s.d Tahun 2023

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Beberapa faktor yang mempengaruhi inflasi diantaranya meningkatnya konsumsi, daya tarik masyarakat terhadap barang, ketersediaan stok. Pada tahun 2022, angka inflasi provinsi dan nasional masing-masing pada angka 5,38 dan 5,51, sedangkan Belitung Timur yang angka inflasinya menggunakan angka inflasi Kota Tanjungpandan berada pada angka 4,17. Dan di tahun 2023 kota Tanjungpandan mengalami inflasi sebesar 3,80 persen, sedangkan gabungan 2 kota di Bangka Belitung mengalami inflasi sebesar 2,65 persen. Andil inflasi gabungan 2 kota di Bangka Belitung ini utamanya disumbang oleh komoditas bensin, rokok kretek filter, cabai merah, angkutan udara, dan cabai



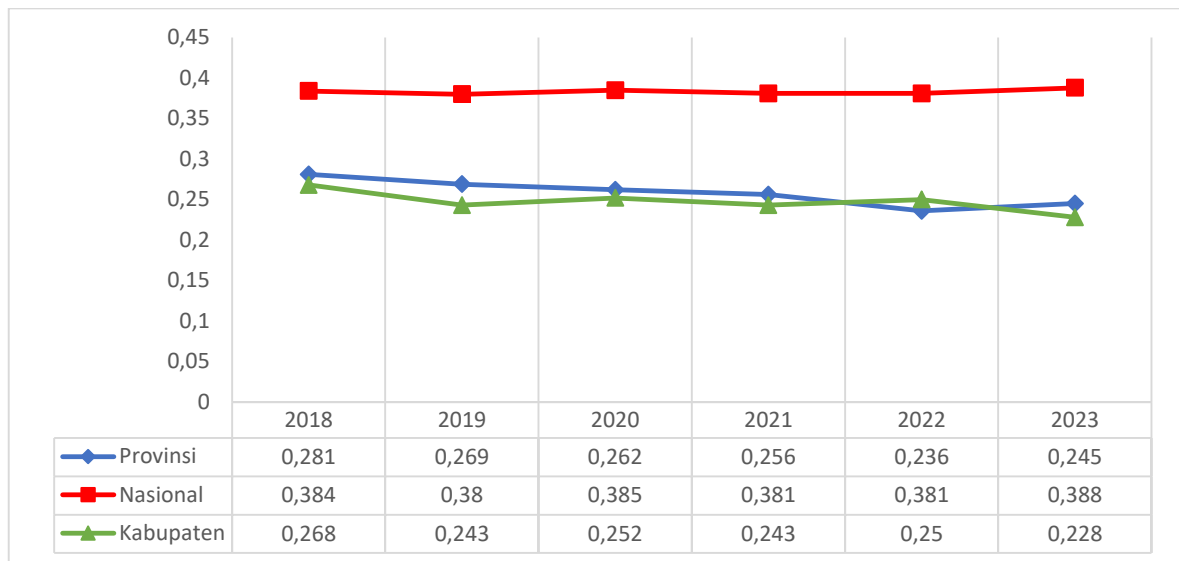
Grafik 2. 8 Perbandingan Laju Inflasi Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik 2021, diolah

2.1.2.1.7 Indeks Gini (Indeks Ketimpangan)

Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Belitung Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,228 lebih rendah dibandingkan dengan provinsi dan nasional. Sedangkan di tahun

sebelumnya yaitu tahun 2022 gini ratio Kabupaten Belitung Timur sebesar 0,250 lebih tinggi dari provinsi namun lebih rendah dari nasional.



Grafik 2. 9 Perbandingan Gini Rasio Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 - 2023

Sumber : BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2024

Menurut Oshima (1976), berikut adalah arti nilai dari besaran Rasio Gini:

- $G < 0,3$ artinya ketimpangan rendah
- $0,3 \leq G \leq 0,5$ artinya ketimpangan sedang
- $G > 0,5$ artinya ketimpangan tinggi

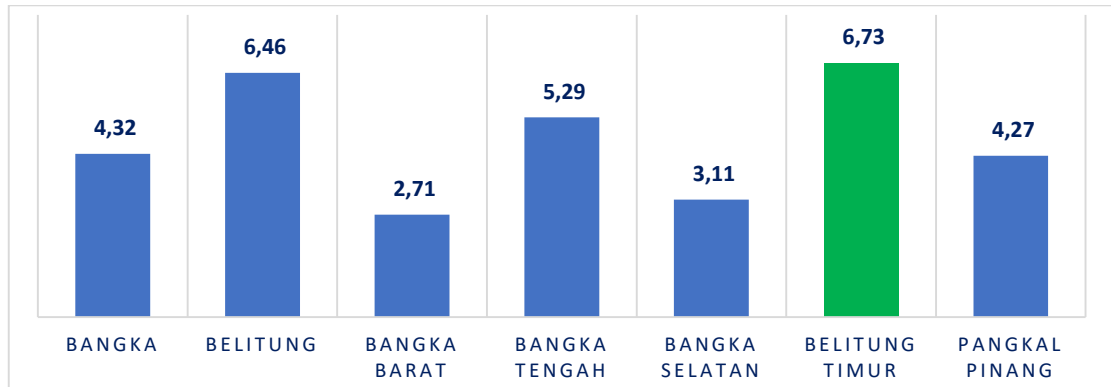
Berdasarkan kriteria tersebut, Kabupaten Belitung Timur yang termasuk dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk dalam kriteria ketimpangan rendah. Semakin tinggi nilai Gini Rasio berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran. Bila gini ratio=0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Dan apabila gini ratio=1, ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu atau satu kelompok saja dan yang lainnya tidak sama sekali.

2.1.2.1.8 Kemiskinan

A. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 sebanyak 8.470 Jiwa, jumlah tersebut menurun di bandingkan tahun sebelumnya yaitu berjumlah 9.290 jiwa atau berkurang sebanyak 820 Jiwa. Jika dilihat dari seluruh Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 sebanyak 8.890 Jiwa, jumlah tersebut meningkat di bandingkan tahun

sebelumnya yaitu berjumlah 8.470 jiwa atau bertambah sebanyak 420 Jiwa. Jika dilihat dari seluruh Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belitung Timur menempati peringkat ke 3 (tiga) diatas Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Selatan.

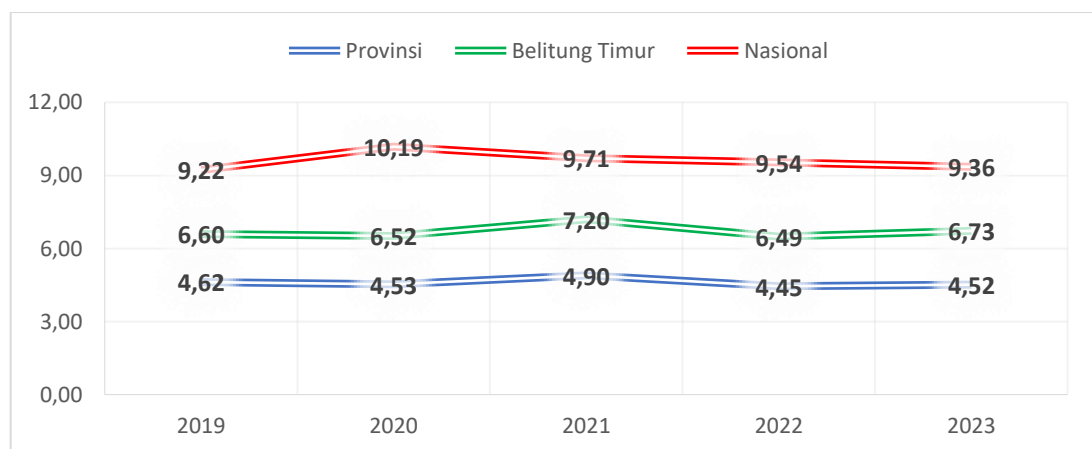


Grafik 2. 10 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

Sumber : BPS Prov. Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2023 (Diolah)

B. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung Timur masih di atas Provinsi Kep.Bangka Belitung, namun di bawah nasional. Posisi relatif persentase penduduk miskin di Belitung Timur terhadap rata-rata provinsi pada tahun 2023 sebesar 6,73 % sementara provinsi sebesar 4,52% dan rata-rata nasional sebesar 9,36%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Belitung Timur masih menempati posisi tertinggi Persentase penduduk miskin dari seluruh kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



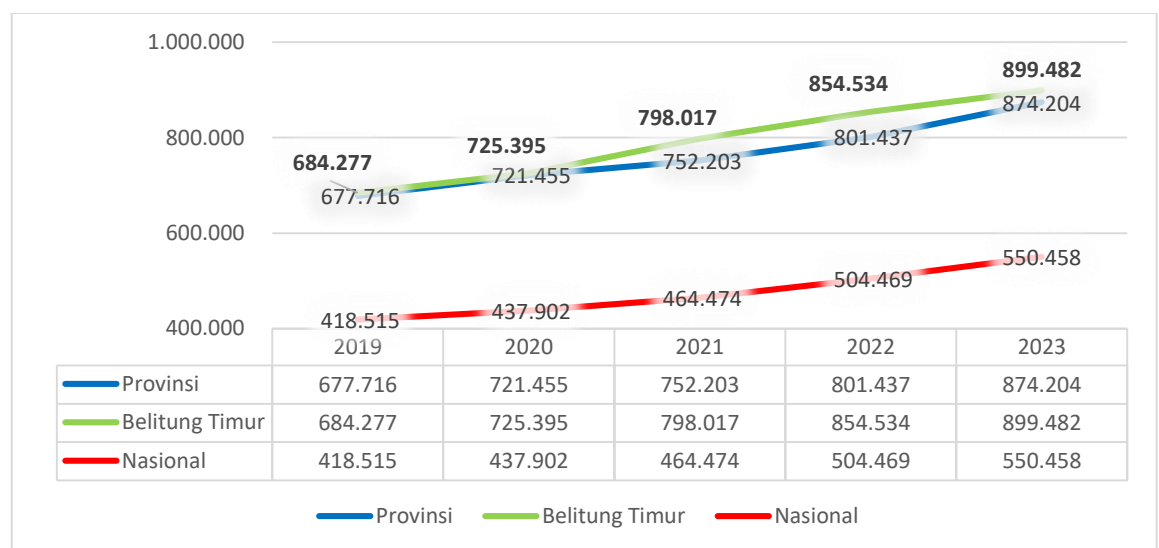
Grafik 2. 11 Persentase Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019-2023

Sumber : BPS Prov. Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2023 (diolah)

C. Perkapita Per Bulan Garis Kemiskinan

Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui penduduk miskin adalah melalui Garis Kemiskinan (GK). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 terus meningkat seperti mengikuti inflasi daerah. Lima tahun terakhir sejak Tahun 2019-2023 Garis Kemiskinan Belitung Timur lebih tinggi dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Garis Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 sebesar Rp.899.482 mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar Rp. 854.534, Garis Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur berada Diatas nasional sebesar Rp.550.458 dan Provinsi sebesar Rp. 874.204, untuk pertama kalinya Garis kemiskinan Kabupaten Belitung Timur tertinggi dari seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



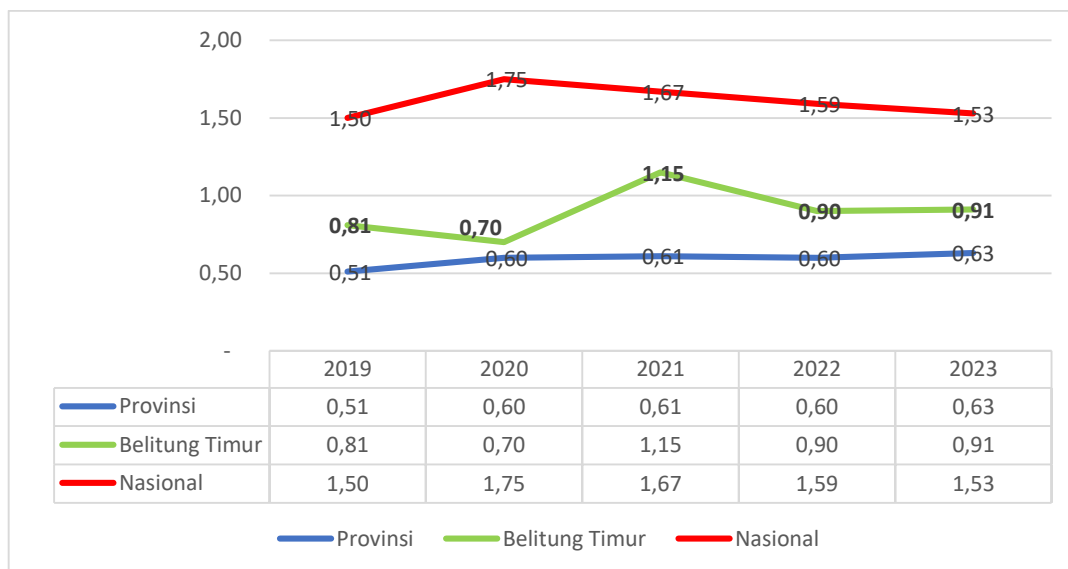
Grafik 2. 12 Posisi relative Garis Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 (Rupiah)

Sumber : BPS Prov. Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2023 (Diolah).

Garis kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur cukup signifikan. Salah satu faktornya dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat yang terus meningkat terhadap beberapa jenis komoditi makanan, Tingginya garis kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan tingginya harga kebutuhan pokok makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan di Kabupaten Belitung Timur.

D. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index – P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 sebesar 0,91 mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 0,90. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur berada dibawah nasional sebesar 1,528 dan berada diatas angka Provinsi sebesar 0,63.



Grafik 2. 13 Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019-2023

Sumber : BPS Prov. Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2023(Diolah).

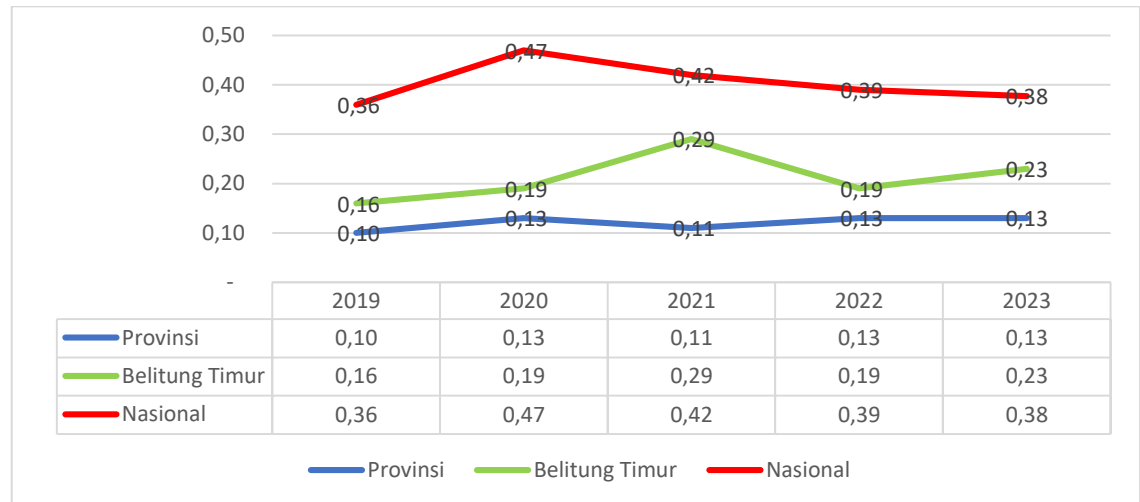
Keberlanjutan upaya menurunkan indeks kedalaman kemiskinan oleh pemerintah kabupaten dapat dilakukan dengan melakukan strategi peningkatan pendapatan, menjamin keberlanjutan usaha mikro kecil dan sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan strategi lintas sektor, lintas program dan lintas pemangku kepentingan kunci dari keberhasilan strategi dimaksud.

E. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index – P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 sebesar 0,23 mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 0,19. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur berada dibawah nasional sebesar 0,377 dan berada diatas angka Provinsi sebesar 0,13.

Menurunnya Indeks Keparahane Kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur menggambarkan Semakin rendahnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.



Grafik 2. 14 Posisi Relatif Keparahane Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019-2023

Sumber : BPS Prov. Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2023 (Diolah)

2.1.2.2.1 Urusan Pendidikan

A. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan persentase penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca serta menulis kalimat sederhana. Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan pada tingkat makro adalah kemampuan baca tulis penduduk. Dengan kata lain, indikator ini menggambarkan mutu sumber daya manusia yang diukur dalam aspek pendidikan. Semakin tinggi indikator ini, semakin tinggi mutu sumber daya suatu masyarakat.

Pada tahun 2023, angka melek huruf di Kabupaten Belitung Timur sebesar 98,58 persen, turun dibandingkan tahun 2022 sebesar 98,93 persen. Dimana untuk kelompok umur 15-19 Tahun mengalami penurunan dari 99,74 persen di tahun 2022 menjadi 99,34 persen di tahun 2023, dan untuk kelompok 50 Tahun keatas juga terjadi penurunan dari 95,55 persen di tahun 2022 menjadi 95,50 persen pada tahun 2023. Selengkapnya perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Belitung Timur tahun 2019 hingga 2023, tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2. 35 Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Melek Huruf Kabupaten Belitung Timur	98,17	99,22	98,60	98,93	98,58

Sumber Data : Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

- Pada tahun 2023 APK SD Kabupaten Belitung Timur sebesar 110,28 persen, artinya persentase penduduk berusia 7-12 tahun di Kabupaten Belitung Timur yang bersekolah di tingkat SD sebanyak 110,28 persen.
- Pada tahun 2022 APK SMP Kabupaten Belitung Timur sebesar 96,60 persen, artinya persentase penduduk berusia 13-15 tahun di Kabupaten Belitung Timur yang bersekolah di tingkat SMP sebanyak 96,60 persen.
- Pada tahun 2022 APK SMA Kabupaten Belitung Timur sebesar 74,34 persen, artinya persentase penduduk berusia 16-18 tahun di Kabupaten Belitung Timur yang bersekolah di tingkat SMA sebanyak 74,34 persen.

Selengkapnya perkembangan angka Partisipasi Kasar Kabupaten Belitung Timur tahun 2019 hingga 2023, tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 36 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018-2022

No	Angka Partisipasi Kasar	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	SD	109,36	109,58	110,34	109,73	110,28
2	SMP	92,75	92,44	93,89	101,37	96,60
3	SMA	72,72	71,96	71,36	74,12	74,36

Sumber Data : Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

C. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 37 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Belitung Timur	11,49	11,51	11,52	11,63	11,65

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa HLS Belitung Timur pada tahun 2022 sebesar 11,65 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 11,65 tahun atau setara dengan SMA kelas 3. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Belitung Timur meningkat setiap tahunnya walaupun masih dibawah rata-rata provinsi kep. Bangka Belitung yaitu 12,18 tahun, hal ini harus menjadi keseriusan pemerintah kabupaten belitung Timur untuk lebih meningkatkan angka harapan lama sekolah agar meningkat lebih pesat pada tahun-tahun berikutnya.

D. Angka Partisipasi Kasar

Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

- Pada tahun 2023 APK SD Kabupaten Belitung Timur sebesar 110,28 persen, artinya persentase penduduk berusia 7-12 tahun di Kabupaten Belitung Timur yang bersekolah di tingkat SD sebanyak 110,28 persen.
- Pada tahun 2023 APK SMP Kabupaten Belitung Timur sebesar 96,60 persen, artinya persentase penduduk berusia 13-15 tahun di Kabupaten Belitung Timur yang bersekolah di tingkat SMP sebanyak 96,60 persen.
- Pada tahun 2023 APK SMA Kabupaten Belitung Timur sebesar 74,34 persen, artinya persentase penduduk berusia 16-18 tahun di Kabupaten Belitung Timur yang bersekolah di tingkat SMA sebanyak 74,34 persen.

Selengkapnya perkembangan angka Partisipasi Kasar Kabupaten Belitung Timur tahun 2019 hingga 2023, tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 2. 38 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2019-2023**

No	Angka Partisipasi Kasar	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	SD	109,36	109,58	110,34	109,73	110,28
2	SMP	92,75	92,44	93,89	101,37	96,60
3	SMA	72,72	71,96	71,36	74,12	74,36

Sumber Data : Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

E. Angka Partisipasi Murni

Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan

Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan

- APM SD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 sebesar 98,70 persen, artinya sekitar 98,70 persen penduduk di Kabupaten Belitung Timur yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SD.
- APM SMP Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 sebesar 76,84 persen, artinya sekitar 76,84 persen penduduk di Kabupaten Belitung Timur yang berusia 13-15 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SMP.
- APM SMA Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 sebesar 53,43 persen, artinya sekitar 53,43 persen penduduk di Kabupaten Belitung Timur yang berusia 16-18 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SMA.

Selengkapnya perkembangan angka Partisipasi Murni Kabupaten Belitung Timur tahun 2019 hingga 2023, tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 39 Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019-2023

No	Angka Partisipasi Kasar	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	SD	98,43	99,22	99,06	98,46	98,70
2	SMP	82,82	82,70	82,98	82,59	76,84
3	SMA	61,18	60,96	61,04	63,07	53,43

Sumber Data : Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

2.1.2.2.2 Urusan Kesehatan

A. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) ini didefinisikan sebagai perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, berdasarkan *Age Specific Rate* atau rata-rata umur spesifik dari kematian, besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu, dan banyaknya penduduk yang dilahirkan hidup dari suatu generasi sampai mencapai umur tertentu. Usia harapan hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi jumlahnya besar, usia harapan hidup akan rendah. Oleh karenanya, biasanya di negara-negara maju harapan hidupnya tinggi karena pada umumnya tingkat kesehatan ibu dan bayinya tinggi. Sebaliknya, di negara berkembang biasanya relatif rendah karena buruknya tingkat kesehatan. Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 mencapai 73,56 tahun. Angka ini didefinisikan sebagai perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir adalah 73,56 tahun. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 menempati posisi ke 2 (dua) di bawah Kota Pangkal Pinang dari seluruh kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selengkapannya perkembangan Usia harapan Hidup Kabupaten Belitung Timur tahun 2018 hingga 2022, tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 40 Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Usia Harapan Hidup	71,90	72,03	73,17	73,36	73,57

Sumber Data : Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

B. Balita Gizi Buruk

Balita Gizi buruk didefinisikan sebagai anak usia di bawah 5 tahun (0 s/d 4 tahun 11 bulan) dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score < -3 (negative tiga) dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor dan marasmus-kwashiorkor). Persentase balita gizi buruk adalah jumlah balita gizi buruk yang ditemukan dibagi dengan jumlah balita yang ditimbang dalam kurun waktu tertentu. Penemuan balita gizi buruk di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 adalah sebesar 0,03% dari

jumlah balita yang ditimbang, menurun dari cakupan penemuan tahun 2022 sebesar 0,07%.

Selengkapnya persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Belitung Timur tahun 2019 hingga 2023, tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 41 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Balita Gizi Buruk	0,04	0,03	0,04	0,07	0,03

Sumber Data : Dinas Kesehatan kab. Belitung Timur, Tahun 2023

C. Angka Kematian Ibu

Kematian ibu adalah kematian yang terjadi pada seorang ibu yang terjadi karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas (dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan) tanpa memandang lamanya kehamilan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau penanganannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan dan terjatuh. Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan status gizi dan tingkat pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu masa nifas. Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2023 sebesar 1,57 per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2023 terdapat perubahan definisi operasional angka kematian ibu dari yang semula per 100.000 kelahiran hidup berubah menjadi 1.000 kelahiran hidup.

Selengkapnya Kondisi angka kematian Ibu Kabupaten Belitung Timur tahun 2019 hingga 2023, tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 42 Angka Kematian Ibu Per 100.000/ 1.000 kelahiran hidup Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	angka kematian Ibu	452,03	189,84	197,34	168,44	1,57

Sumber Data : Dinas Kesehatan kab. Belitung Timur, Tahun 2023

D. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah balita usia 59 bulan (bayi + anak balita) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu per 1.000 jumlah kelahiran hidup di wilayah pada kurun waktu yang sama. Angka Kematian Balita (AKABA) pada tahun 2023 sebesar 10,00 per 1.000 kelahiran hidup, mengalami penurunan dari AKABA tahun 2022 sebesar 13,91 per 1.000 kelahiran hidup. Dan merupakan angka terendah sejak 5 (lima) tahun terakhir. Selengkapnya Kondisi angka kematian balita Kabupaten Belitung Timur tahun 2019 hingga 2023, tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 2. 43 Angka Kematian Balita Per 1.000 kelahiran hidup
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka kematian balita	13,56	14,24	13,32	13,91	10,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Belitung Timur, Tahun 2023

E. Angka Kematian Bayi

Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi pada seorang bayi yang usianya sebelum mencapai satu tahun (usia 0-11 bulan, termasuk neonatal). Angka Kematian Bayi yang terjadi di Kabupaten Belitung Timur sepanjang tahun 2023 sebesar 14,1 per 1.000 kelahiran hidup, mengalami peningkatan dari AKB tahun 2022 sebesar 8,4 per 1.000 kelahiran hidup.

Selengkapnya Kondisi angka kematian Bayi Kabupaten Belitung Timur tahun 2019 hingga 2023, tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 2. 44 Angka Kematian Bayi Per 1.000 kelahiran hidup
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019-2021**

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka kematian bayi	11,55	11,39	9,87	8,4	14,1

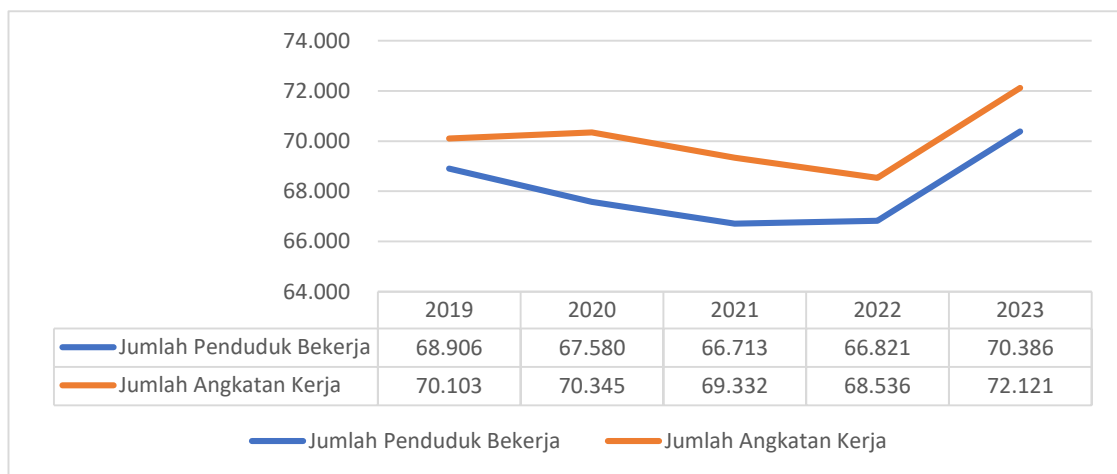
Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Belitung Timur, Tahun 2023

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.2.3. Urusan Tenaga Kerja

A. Jumlah Penduduk Bekerja

Jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Belitung Timur terus bertambah pada tahun 2019 sampai dengan 2023, hal ini seiring dengan pertambahan angkatan kerja yang ada di Belitung Timur. Data menunjukkan Jumlah angkatan kerja selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan dan penduduk yang bekerja pada tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu bertambah sebanyak 3.565 penduduk yang bekerja.



Grafik 2. 15 Angkatan Kerja dan Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023, (Diolah)

B. Perbandingan TPAK, TPT di Kabupaten Belitung Timur

Berdasarkan data dari publikasi BPS (2023) Jumlah pengangguran di Kab Belitung Timur pada tahun 2023 menurun dari Tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak sektor lapangan kerja non formal yang tidak banyak berpengaruh terhadap

Lapangan usaha/pekerjaan masyarakat yang tidak terpengaruh tersebut yaitu pertanian dan perkebunan, pertambangan dan penggalian, dan Perikanan Tangkap (Nelayan) dimana status pekerjaan sebagian besarnya sebagai buruh. Penyebab lainnya adalah faktor cuaca yang cenderung baik, ketika cuaca baik maka menyebabkan mereka bisa bekerja dan memperoleh penghasilan.

Tabel 2. 45 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Tidak Bekerja/Pengangguran Terbuka	1.197	2.765	2.619	1.715	1.197
TPAK (%)	71,37%	71,33%	69,23%	67,36	70,48
TPT (%)	1,71	3.93	3,78%	2,50	2,41

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023, (Diolah)

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.1.2.3.1 Urusan Kebudayaan

Analisis kinerja atas urusan kebudayaan dilakukan terhadap indikator-indikator sebagai berikut yaitu Jumlah Gedung Kesenian/ Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya berupa panggung hiburan dan Jumlah grup atau sanggar seni di Kabupaten Belitung Timur. Jumlah Gedung Kesenian/ Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya berupa panggung hiburan di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 berjumlah 8 sarana, dan tidak mengalami penambahan dari tahun sebelumnya. Selengkapnya Kondisi Jumlah Gedung Kesenian/ Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya berupa panggung hiburan di Kabupaten Belitung Timur tahun 2019 hingga 2023, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 46 Perkembangan Gedung Kesenian/Sarana Penyelenggara Seni dan Budaya Berupa Panggung Hiburan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Gedung Kesenian/ Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya berupa panggung hiburan	8	8	8	8	8

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2023

Jumlah Grup/ Sanggar Kesenian Tradisional di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 berjumlah 60 sanggar namun dari jumlah tersebut sanggar yang aktif berjumlah 36 sanggar atau 60 persen, dan sanggar yang tidak aktif berjumlah 24 sanggar atau 40 persen. Selengkapnya Kondisi Grup/ Sanggar Kesenian Tradisional di Kabupaten Belitung Timur tahun 2023, tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 47 Grup / Sanggar Kesenian Tradisional Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

No	Nama Sanggar/ Kelompok Kesenian	Alamat	Jenis Seni	Ket.
1	ANGGREK	SMA Negeri 1 Manggar, Kec. Manggar	Kreasi Baru	aktif
2	KEMBANG SIMPOR	Desa Lalang Jaya, Kec. Manggar	Umum/ Kreasi Baru	tidak aktif
3	KEMUNING	Desa Lalang Jaya, Kec. Manggar	Kreasi Baru	aktif
4	PINANG DARE	SMK Negeri 1 Manggar, Kec. Manggar	Kreasi Baru	aktif
5	NASYID INSTIFADOH	Desa Padang, Kec. Manggar	Nasyid/ Seni Suara/ Vocal	tidak aktif
6	MAYANG	SMP Negeri 1 Manggar, Kec. Manggar	Kreasi Baru	aktif
7	AKAR BEREBAT	SMK MITRA NUSA BHAKTI, Kec. Manggar	Kreasi Baru	tidak aktif
8	PERENGGU SAKTI	SMK MITRA NUSA BHAKTI, Kec. Manggar	Kreasi Baru	aktif
9	SEKAR LANGIT	Desa Lalang Jaya, Kec. Manggar	Tari Tradisional	tidak aktif
10	AL HIKMAH BENTAIAAN	Desa Kelubi, Kec. Manggar	Seni Musik Tradisional	aktif
11	GROUP HADRA ANNUR	Desa Padang, Kec. Manggar	Seni Musik Tradisional	tidak aktif
12	HADRA MAINDI ANNUR	Desa Lalang, Kec. Manggar	Seni Musik Tradisional	aktif
13	AR RAHMAN	Desa Kurnia Jaya, Kec. Manggar	Seni Musik Tradisional	aktif
14	KECUBUNG	SMP Negeri 4 Manggar, Kec. Manggar	Kreasi Baru	aktif
15	NURUL FATAH	Desa Kurnia Jaya, Kec. Manggar	Seni Suara/ Vocal	aktif
16	BULO KUNING	SMP Negeri 2 Manggar, Kec. Manggar	Kreasi Baru	aktif
17	GROUP ANTU BUBU MANGGAR	Desa Lalang, Kec. Manggar	Tari Tradisional	tidak aktif
18	PINANG GADING	Desa Lalang, Kec. Manggar	Kreasi Baru	aktif
19	GRIYA BAHANA	Desa Lalang, Kec. Manggar	Kreasi Baru	tidak aktif
20	SENIANG GARU	Desa Lalang, Kec. Manggar	Kreasi Baru	tidak aktif
21	SIKAPATAU SIPAKALEBI	Desa Buku Limau, Kec. Manggar	Seni Musik Tradisional	tidak aktif
22	KEMBANG RAMPAL	Desa Kurnia Jaya, Kec. Manggar	Kreasi Baru	aktif
23	ADELA 19	Desa LalangKec. Manggar	Kreasi Baru	tidak aktif
24	BUNGA RANTAN	SMP Negeri 1 Kelapa Kampit, Kec. Kelapa Kampit	Kreasi Baru	aktif
25	CITRA ARTISTIKA	Desa Senyubuk, Kec. Kelapa Kampit	Kreasi Baru	aktif
26	ISTANA YUDHA	Desa Buding, Kec. Kelapa Kampit	Kreasi Baru	aktif
27	PAYONG TARA	Desa Senyubuk, Kec. Kelapa Kampit	Kreasi Baru	aktif
28	PEMANGGAN	Desa Buding, Kelapa Kampit	Kreasi Baru	aktif
29	SELINDANG MAYANG	SMP Negeri 2 Kelapa Kampit, Kec. Kelapa Kampit	Kreasi Baru	aktif

No	Nama Sanggar/ Kelompok Kesenian	Alamat	Jenis Seni	Ket.
30	LESONG PANJANG MAYANG	Desa Mayang, Kec. Kelapa Kampit	Seni Musik Tradisional	tidak aktif
31	MAYAPADA	SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Kec. Kelapa Kampit	Kreasi Baru	aktif
32	NURUL WATON	Desa Mentawak, Kec. Kelapa Kampit	Seni Musik Tradisional	aktif
33	JARANAN KUDA KEPANG	Desa Mayang, Kec. Kelapa Kampit	Seni Musik Tradisional	tidak aktif
34	GENAYUN MERAH	Desa Lenggang, Kec. Gantung	Kreasi Baru	aktif
35	KEMINANG	Desa Lenggang, Kec. Gantung	Kreasi Baru	tidak aktif
36	KUDA LUMPING	Desa Gantung, Kec. Gantung	Tari Tradisional	tidak aktif
37	TERATAI	SMP Negeri 1 Gantung, Kec. Gantung	Kreasi Baru	aktif
38	SERAI WANGI / timbang priame	SMA Negeri 1 Gantung, Kec. Gantung	Kreasi Baru	aktif
39	KEMBANG KUNDOR	Desa Batu Penyu, Kec. Gantung	Kreasi Baru	aktif
40	PITALOKA	Desa Lilangan, Kec. Gantung	Tari Tradisional	tidak aktif
41	CEMPAKA PUTIH	Desa Gantung, Kec. Gantung	Tari Tradisional	aktif
42	KETIMANG BURONG	Desa Gantung, Kec. Gantung	Tari Tradisional	aktif
43	SINAR SEMBULUK	Desa Gantung, Kec. Gantung	Kreasi Baru	aktif
44	KAMPUNG SENI AIRRIA GIRLONG	Desa Lilangan, Kec. Gantung	Seni Musik Tradisional	tidak aktif
45	MUARA 9	Desa Selinsing Kec. Gantung	Kreasi Baru	aktif
46	DELITA	Desa Jangkang, Kec. Dendang	Kreasi Baru	tidak aktif
47	TEMBANG MAER	Desa Jangkang, Kec. Dendang	Kreasi Baru	tidak aktif
48	TEMBANG GONG	Desa Balok, Kec. Dendang	Kreasi Baru	tidak aktif
49	CEMPAKA	SMP Negeri 2 Dendang, Kec. Dendang	Kreasi Baru	aktif
50	GROUP REBANA AZ ZAHRA	Desa Balok, Kec. Dendang	Seni Musik Tradisional	tidak aktif
51	BATU SEMBAHYANG	Desa Burung Mandi, Kec. Damar	Kreasi Baru	aktif
52	PAHAR	Desa Burung Mandi, Kec. Damar	Kreasi Baru	aktif
53	HADERA TARI AL QUDDUS	Desa Mengkubang, Kec. Damar	Seni Musik Tradisional	tidak aktif
54	NURRUL MUQODDIMAH	Desa Mengkubang, Kec. Damar	Seni Musik Tradisional	tidak aktif
55	SENI SMP1DA	SMP Negeri 1 Damar, Kec. Damar	Kreasi Baru	aktif
56	SIMPAY	Desa Mempaya Kec. Damar	Kreasi Baru	aktif
57	BINA KREASI REMAJA	Desa Simpang Pesak, Kec. Simpang Pesak	Kreasi Baru	aktif
58	TREE PANDAWA	Desa Tanjung Kelumpang, Kec. Simpang Pesak	Seni Suara/ Vocal	tidak aktif
59	DUL MULUK	Desa Tanjung Kelumpang, Kec. Simpang Pesak	Seni Teater/ Drama	tidak aktif
60	BETIONG BEGUBANG	Desa Lintang, Kec. Simpang Renggang	Seni Musik Tradisional	aktif

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2023

2.1.2.3.2 Urusan Pemuda dan Olahraga

Analisis kinerja atas urusan Kepemudaan dan Olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator sebagai berikut yaitu jumlah klub dan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Belitung Timur. Jumlah Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 berjumlah 281 klub, dan tidak mengalami penambahan dari tahun 2022. Selengkapnya Kondisi Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Belitung Timur tahun 2019 hingga 2023, tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 48 Perkembangan Jumlah Klub Olahraga Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019-2023

No	Klub Olahraga	Satuan					Satuan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Bola Voli	115	115	115	115	115	Klub
2	Bola Basket	2	2	2	2	2	Klub
3	Sepakbola	75	75	75	75	75	Klub
4	Futsal	23	23	23	23	23	Klub
5	Sepak Takraw	1	1	1	1	1	Klub
6	Tenis	2	2	2	2	2	Klub
7	Tenis Meja	15	15	15	15	15	Klub
8	Bulu Tangkis	29	29	29	29	29	Klub
9	Billiard	3	3	3	3	3	Klub
10	Bowling	0	0	0	0	0	Klub
11	Renang	2	2	2	2	2	Klub
12	Tinju/Beladiri	3	3	3	3	3	Klub
13	Sepeda	0	0	0	0	0	Klub
14	Binaraga	1	1	1	1	1	Klub
15	Panahan	1	1	2	1	2	Klub
16	Klub Olahraga Lainnya	8	8	8	8	8	Klub
	JUMLAH	280	281	281	281	281	

Sumber Data : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Belitung Timur, Tahun 2023

Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 berjumlah 273 unit, dan tidak mengalami penambahan dari tahun 2022. Selengkapnya Kondisi jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Belitung Timur tahun 2019 hingga 2023, tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 49 Perkembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019-2023

No	Nama	Tahun					Satuan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Jumlah Lapangan Bola Voli	123	123	123	123	123	Unit
	1). Manggar	24	24	24	24	24	Unit
	2). Gantung	29	29	29	29	29	Unit
	3). Dendang	14	14	14	14	14	Unit
	4). Kelapa Kampit	21	21	21	21	21	Unit
	5). Damar	7	7	7	7	7	Unit

No	Nama	Tahun					Satuan
		2019	2020	2021	2022	2023	
	6). Simpang Renggang	9	9	9	9	9	Unit
	7). Simpang Pesak	19	19	19	19	19	Unit
2.	Jumlah Lapangan Bola Basket	7	7	7	7	7	Unit
	1). Manggar	2	2	2	2	2	Unit
	2). Gantung	0	0	0	0	0	Unit
	3). Dendang	1	1	1	1	1	Unit
	4). Kelapa Kampit	0	0	0	0	0	Unit
	5). Damar	0	0	0	0	0	Unit
	6). Simpang Renggang	3	3	3	3	3	Unit
	7). Simpang Pesak	1	1	1	1	1	Unit
3	Jumlah Lapangan Tenis	3	3	3	3	3	Unit
	1). Manggar	2	2	2	2	2	Unit
	2). Gantung	0	0	0	0	0	Unit
	3). Dendang	0	0	0	0	0	Unit
	4). Kelapa Kampit	1	1	1	1	1	Unit
	5). Damar	0	0	0	0	0	Unit
	6). Simpang Renggang	0	0	0	0	0	Unit
	7). Simpang Pesak	0	0	0	0	0	Unit
4	Jumlah Lapangan Futsal	8	8	8	8	8	Unit
	1). Manggar	3	3	3	3	3	Unit
	2). Gantung	1	1	1	1	1	Unit
	3). Dendang	0	0	0	0	0	Unit
	4). Kelapa Kampit	2	2	2	2	2	Unit
	5). Damar	1	1	1	1	1	Unit
	6). Simpang Renggang	0	0	0	0	0	Unit
	7). Simpang Pesak	1	1	1	1	1	Unit
5	Jumlah Stadion Sepak Bola	23	23	23	23	23	Unit
	1. Tipe A	0	0	0	0	0	Unit
	2. Tipe B	0	0	0	0	0	Unit
	3. Tipe C	23	23	23	23	23	Unit
6	Jumlah Stadion Atletik	1	1	1	1	1	Unit
	1. Tipe A	0	0	0	0	0	Unit
	2. Tipe B	0	0	0	0	0	Unit
	3. Tipe C	1	1	1	1	1	Unit
7	Jumlah Lapangan Bulu Tangkis**	29	29	29	29	29	Unit
	1. Desa	27	27	27	27	27	Unit
	2. Kota	1	1	1	1	1	Unit
8	Jumlah Gedung Olahraga**	1	1	1	1	1	Unit
	1. Tipe A	0	0	0	0	0	Unit
	2. Tipe B	0	0	0	0	0	Unit
	3. Tipe C	1	1	1	1	1	Unit
9	Jumlah Kolam Renang	4	4	4	4	4	Unit
10	Jumlah Sasana Tinju/Beladiri	1	1	1	1	1	Unit
11	Jumlah Velodrome	0	0	0	0	0	Unit
12	Jumlah Arena Bowling	0	0	0	0	0	Unit
13	Jumlah Rumah Billiard**	6	6	6	6	6	Unit
	1). Manggar	3	3	3	3	3	Unit
	2). Gantung	2	2	2	2	2	Unit
	3). Dendang	0	0	0	0	0	Unit
	4). Kelapa Kampit	0	0	0	0	0	Unit
	5). Damar	0	0	0	0	0	Unit

No	Nama	Tahun					Satuan
		2019	2020	2021	2022	2023	
	6). Simpang Renggang	0	0	0	0	0	Unit
	7). Simpang Pesak	1	1	1	1	1	Unit
14	Jumlah Lapangan Olahraga Terbuka	68	68	68	68	68	Unit
	1). Manggar	27	27	27	27	27	Unit
	2). Gantung	17	17	17	17	17	Unit
	3). Dendang	9	9	9	9	9	Unit
	4). Kelapa Kampit	10	10	10	10	10	Unit
	5). Damar	2	2	2	2	2	Unit
	6). Simpang Renggang	0	0	0	0	0	Unit
	7). Simpang Pesak	3	3	3	3	3	Unit
	JUMLAH	273	273	273	273	273	Unit

Sumber Data : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Belitung Timur, Tahun 2023

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1 Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur bagian kesatu dinyatakan bahwa:” Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur merupakan dinas dengan tipe A sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pendidikan. Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah”.

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas perbantuan dalam bidang pendidikan. Untuk melaksanakan tugas diatas maka Dinas Pendidikan mempunyai fungsi antara lain:

- Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- Pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pendidikan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh seluruh daerah propinsi/kabupaten/kota yang ada di Indonesia termasuk Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Oleh karena itu sudah sepantasnya pemerintah daerah/kota untuk memposisikan urusan pendidikan masuk dalam urusan prioritas dalam pembangunan di daerah.

Urusan Pendidikan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang diampu oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan tahun 2021-2026 dirumuskan tujuan Dinas Pendidikan adalah meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan dengan sasaran: (1) meningkatkan akses dan kualitas Lembaga Pendidikan dasar dengan indikator: APK PAUD, APK SD, APK SMP, Prosentase SD berakreditasi A, dan prosentase SMP berakreditasi A, dan (2) meningkatkan kompetensi guru dengan indikator: prosentase guru bersertifikat pendidik dan prosentase guru berpendidikan DIV/S-1. Capaian dan target indicator sasaran Renstra 2021-226 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 50 Capaian Sasaran Urusan Pendidikan Tahun 2021-2026

No.	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	APK PAUD (Persen)	56,3	82.14	84,56	70.20	74.20	78.20
2	APK SD (Persen)	99,73	100.94	99,05	109.00	112.00	115.00
3	APK SMP (Persen)	92,09	88.02	90,47	96.00	98.00	99.00
4	Prosentase SD Berakreditasi A	13,33	14.42	11,43	26.67	30.48	34.29
5	Prosentase SMP Berakreditasi A	44	33.33	33,33	84.00	92.00	100.00
6	Prosentase Guru Bersertifikat Pendidik	62,47	54.87	47,83	70.06	70.41	70.76
7	Prosentase Guru Berpendidikan DIV/S1	88,82	99.63	87,54	87.23	87.44	87.65

Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2023

Tabel 2. 51 Target dan Capaian Urusan Pendidikan Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	APK PAUD (Persen)	66,2	84,56	127,73
2	APK SD (Persen)	106	99,05	93,44
3	APK SMP (Persen)	94	90,47	96,24

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
4	Prosentase SD Berakreditasi A (Persen)	22,86	11,43	50
5	Prosentase SMP Berakreditasi A (Persen)	72	33,33	46,29
6	Prosentase Guru Bersertifikat Pendidik (Persen)	69,71	47,83	68,61
7	Prosentase Guru Berpendidikan DIV/S1 (Persen)	87,02	87,54	100,6

Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2023

Penjelasan/narasi capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Indikator APK PAUD

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2023 realisasi APK PAUD (84,56%) mengalami peningkatan sebesar 2,42 poin dibanding tahun 2022 (82,14%), berdasarkan data BPS tahun 2023 rata-rata capaian APK PAUD secara nasional baru mencapai 45,87% sedangkan APK rata-rata propinsi Babel baru mencapai 40,14% sehingga dapat dikatakan APK Kabupaten Belitung Timur telah melebihi/diatas capaian rata-rata nasional dan capaian rata-rata propinsi Kep. Babel. Pencapaian ini bisa dimaknai sebagai bentuk optimisme masyarakat terhadap kondisi Pandemi Covid-19 yang hampir mereda, selain itu juga dapat dimaknai bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk memasukkan anaknya ke pendidikan prasekolah sudah mulai tinggi didukung juga tersedianya akses PAUD dimana disetiap desa telah tersedia minimal 1 PAUD desa.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan antara lain: melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui desa, menjalin kerjasama dengan puskesmas setempat dalam bentuk penyelenggaraan PAUD-HI dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 59 tahun 2021 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah diterbitkannya Peraturan Bupati Belitung Timur nomor 68 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan PAUD 1 Tahun Pra Sekolah, dimana bahwa setiap anak usia dini di daerah wajib mengikuti PAUD 1 tahun prasekolah.

2. Indikator APK SD

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2023 realisasi APK SD (99,05%) mengalami penurunan sebesar 1,89 poin dibanding tahun 2022. Jika dibandingkan dengan rata-rata APK Nasional tahun 2023 (100,34%) dan juga rata-rata di level provinsi Kep. Babel (102,91%) Kabupaten Belitung Timur masih dibawah angka rata-rata nasional dan angka rata-rata provinsi Kep. Bangka Belitung.

Berbagai upaya yang telah dilakukan antara lain: memperluas akses Pendidikan baik formal maupun non formal, penyediaan sarpras pendukung di sekolah, melakukan sosialisasi pada berbagai kesempatan, memberikan bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa yang kurang mampu dan rentan sekolah, bekerjasama dengan Satpol PP terkait razia pada jam sekolah dan lain sebagainya.

3. Indikator APK SMP

Tahun 2023 realisasi APK SMP/ sederajat (90,47%) mengalami kenaikan sebesar 2,45 poin dibanding tahun 2022 (88,02%). Angka tersebut masih dibawah capaian rata-rata APK nasional (104,51%) dan juga dibawah rata-rata provinsi Kep. Babel (102,13%)

Berbagai upaya yang telah dilaksanakan Dinas Pendidikan antara lain: perluasan akses Pendidikan baik formal maupun non formal, penyediaan sarpras pendukung di sekolah, melakukan sosialisasi pada berbagai kesempatan, memberikan bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa yang kurang mampu dan rentan sekolah, bekerjasama dengan Satpol PP terkait razia pada jam sekolah dan lain sebagainya.

4. Indikator Prosentase SD berakreditasi A

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2023 terjadi penurunan realisasi indikator prosentase SD berakreditasi A dibanding tahun 2022, hal ini disebabkan adanya 2 sekolah yang mengalami penurunan dari grade A ke B yaitu SDN 4 Gantung dan SDN 2 Dendang, penurunan ini disebabkan antara lain: (1) adanya kenaikan/peningkatan nilai untuk memperoleh grade A yang semula nilainya antara 86 - 100 menjadi 91 - 100 sehingga berdampak pada hasil akreditasi sekolah tersebut., nilai akreditasi SDN 4 Gantung dan SDN 2 Dendang pada tahun 2023 sama-sama memperoleh nilai 89 poin, (2) Penilaian dilakukan bukan hanya melihat administrasi tetapi dilakukan juga penilaian kinerja sekolah berupa mutu lulusan, prestasi sekolah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mutu guru (terkait peningkatan kompetensi/

pengembangan keprofesian), dan kemudian juga (3) kurangnya pembinaan terhadap sekolah yang akan direakreditasi

5. Indikator Prosentase SMP berakreditasi A

Berdasarkan tabel diatas Indikator Prosentase SMP/MTs yang berakreditasi A pada tahun 2023 terrealisasi sebesar 33,33% dari target sebesar 72% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 46,29% Sementara jenjang SMP pada tahun 2023 tidak dilakukan penilaian kembali (reakreditasi) oleh BAN terhadap sekolah-sekolah yang sudah seharusnya direakreditasi sehingga realisasi tahun 2023 tidak mengalami perubahan yaitu 33,33%, hal ini disebabkan oleh : minimnya kouta reaktreditasi pada tahun 2023 oleh BAN, masih kurangnya pembinaan ke sekolah-sekolah dan lain sebagainya.

6. Indikator Prosentase Guru Bersertifikat Pendidik

Berdasarkan tabel pada tahun 2023 realisasi pendidik yang berpendidikan D-4/S-1 sebesar 87,54% telah melebihi target sebesar 87,02%. Capaian tersebut masih dibawah capaian rata-rata nasional yaitu sebesar 96,95%. Capaian tahun 2023 tersebut terjadi penurunan persentase pendidik berpendidikan D-4/S-1 sebesar 12,09 poin dibanding tahun 2022. Jika ditelusuri dari data ternyata banyak guru (tenaga pendidik) PAUD yang belum sesuai kualifikasi Pendidikan D-4/S-1 yaitu sebanyak kurang lebih 48%, Pendidik SD 5,08% dan SMP pendidik sebanyak 0,29%. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak agar tenaga pendidik dapat memenuhi standar kualifikasi Pendidikan minimal D-4/S-1) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan Dinas Pendidikan antara lain adalah: dalam setiap kesempatan memberikan motivasi kepada pendidik agar dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya, membuat/melakukan kesepakatan dengan berbagai Lembaga Pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan kualifikasi pendidik.

7. Indikator Prosentase Guru Berpendidikan D-4/S-1

Berdasarkan tabel diatas persentase guru yang bersertifikat pendidik pada tahun 2023 baru mencapai 47,83% dari target sebesar 69,71% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 68,61% Realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 (54,87%) mengalami penurunan sebesar 7,04 poin.

Penurunan realisasi persentase guru bersertifikat pendidik pada tahun 2023 disebabkan oleh beberapa hal antara lain adalah: (1) bertambahnya jumlah guru / tenaga pendidik ASN maupun guru honor (non ASN) yang belum bersertifikat pendidik, (2) terbatasnya kuota untuk mengikuti PPG bagi guru dalam jabatan, dan juga (3) juga ada tenaga pendidik yang bersertifikat yang telah memasuki masa pensiun ataupun yang meninggal dunia. Adapun hal-hal yang telah dilakukan Dinas Pendidikan antara lain: memberikan motivasi dalam setiap ada kesempatan tentang pentingnya sertifikat pendidik, memberikan pelatihan terkait dengan penguasaan IT kepada tenaga pendidik.

2.1.3.1. Kesehatan

2

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Pelaksanaan penyelenggaraan program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan Indeks Kepuasan Masyarakat dibidang Kesehatan yang dituangkan dalam amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Periode 2021-2026 yang telah ditetapkan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berupaya menyelenggarakan program kesehatan dengan komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja yang berorientasi kepada hasil, baik berupa output maupun outcome sesuai dengan kewenangannya.

Dalam menunjang pelaksanaan pembangunan kesehatan terutama pelayanan kesehatan dasar di Belitung Timur, Dinas Kesehatan memiliki 7 (tujuh) UPT Puskesmas di 7 (tujuh) kecamatan dan 1 (satu) pelayanan kesehatan rujukan yaitu UPT Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Semua ini merupakan sarana serta sumber daya dalam pelaksanaan tugas serta fungsi pelayanan kesehatan.

Secara struktur Dinas Kesehatan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit dan Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

Jumlah anggaran Dinas Kesehatan tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 99.626.653.234,00 (sembilan puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) yang di dalam nya juga termasuk DAK bidang Kesehatan.

Tabel 2. 52 Capaian Sasaran Urusan Kesehatan Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target			
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	Angka Usia Harapan Hidup	72,1	72,33	73,57	72,3	72,4	72,5	72,6
2	Persentase balita gizi buruk	0,05	0,1	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
3	Prevalensi balita gizi kurang	4,48	2,5	3,42	4,5	4,4	4,3	4,2
4	Cakupan Desa Siaga Aktif	-	100	100	100	100	100	100
5	Kabupaten Sehat	-	-	Padapa	Wiwerda	Wiwerda	Wistara	Wistara
6	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	97,8	98,45	98,89	96,8	97	97,5	97,8
7	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	12,33	11,8	14,17	9,7	9,5	9	8,95
8	Angka Kelangsungan hidup bayi	987,67	988,2	985,83	990,3	990,5	991	991,05
9	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	13,32	14,6	14,17	13,5	13,4	13,3	13
10	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	9,87	8,4	12,6	7	6,9	6,7	6,5
11	Angka Kematian Ibu per 1.00.000 kelahiran hidup	197,34	168,44	1,57	130	120	100	49
12	Rasio Posyandu persatuan balita	1,44	1,89	1,81	1,2	1,2	1,15	1,15
13	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	22,8552	22,7	23,25	22,4	22,1	21,8	21,5
14	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,78811	0,78	0,77	0,77	0,76	0,75	0,74
15	Rasio dokter per satuan penduduk	45,71	64,54	51,92	54,9	54,1	53,3	52,5
16	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	45,71	64,54	58,89	61,9	61	60,1	59,2

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target			
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
17	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	94,5	106,96	95,99	96	96	96	96
18	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	91,21	100,73	90,04	98	98	98	98
19	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	94,87	98,2	100	100	100	100	100
20	Cakupan Balita gizi buruk mendapatkan perawatan	100	100	100	100	100	100	100
21	Persentase anak usia 1 tahun yg diimunisasi campak	92,39	97,1	95,85	93	93	94	95
22	Non Polio AFP rate 100.000 penduduk	0	0	0	1,48	1,48	1,48	1,48
23	Cakupan Balita pneumonia yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100
24	Cakupan Penemuan dan penanganan penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	100
25	Penderita diare yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100
26	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,88268	0,9	0,9	1,64	1,62	1,6	1,57
27	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100	100
28	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	84,84	81,52	85,26	100	100	100	100
29	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	91,22	80,69	90,04	100	100	100	100

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target			
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
30	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	94,57	84,57	94,15	100	100	100	100
31	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	96,89	92,45	98,15	100	100	100	100
32	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,89	99,96	98,74	100	100	100	100
33	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	80,16	73	88,49	100	100	100	100
34	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	70,03	80,09	87,07	100	100	100	100
35	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80,08	85,3	78,37	100	100	100	100
36	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90,58	93,8	95,3	100	100	100	100
37	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
38	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	108,64	124,75	64,35	100	100	100	100

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target			
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
39	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	83,1	124	93,81	100	100	100	100
40	Cakupan pelayanan kesehatan esensial	100	100	100	100	100	100	100
41	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100
42	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	100	100	100	100	100	100	100
43	Persentase rumah sakit terakreditasi	100	100	100	100	100	100	100
44	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	97,8	98,45	98,89	96,8	97	97,5	97,8
45	Proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi	100	100	100	67	68	69	70
46	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	85,71	85,71	85,71	100	100	100	100
47	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100	100	100	100	100	100	100
48	Proporsi pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
49	Persentase Penggunaan Obat Rasional	90	95	92	94	95	95	95
50	Persentase tempat pengolahan makanan yang	55	58,81	58,54	55,5	55,7	55,9	56

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target			
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	memenuhi syarat sesuai standar							
51	Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan	97,8	97	97,8	96,7	96,8	96,9	97
52	Cakupan Desa Siaga Aktif	100	100	100	100	100	100	100
53	Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	51,28	66,6	66,67	66,67	76,92	89,74	100
54	Persentase kelurahan/desa yang melaksanakan pembinaan posyandu aktif	99,25	99,25	100	94,87	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2023

Tabel 2. 53 Target dan Capaian Urusan Kesehatan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Angka Usia Harapan Hidup	72,3	73,57	101,76
2	Persentase balita gizi buruk	0,03	0,03	100,00
3	Prevalensi balita gizi kurang	4,5	3,42	76,00
4	Cakupan Desa Siaga Aktif	100	100	100,00
5	Kabupaten Sehat	Wiwerda	Padapa	87,51
6	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	96,8	98,89	102,16
7	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	9,7	14,17	146,08
8	Angka Kelangsungan hidup bayi	990,3	985,83	99,55
9	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	13,5	14,17	104,96
10	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	7	12,6	180,00
11	Angka Kematian Ibu per 1.00.000 kelahiran hidup	1,3	1,57	1,09
12	Rasio Posyandu persatuan balita	1,2	1,81	150,83
13	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	22,4	23,25	103,79
14	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,77	0,77	100,00
15	Rasio dokter per satuan penduduk	54,9	51,92	94,57

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
16	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	61,9	58,89	95,14
17	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	96	95,99	99,99
18	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	98	90,04	91,88
19	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100
20	Cakupan Balita gizi buruk mendapatkan perawatan	100	100	100,00
21	Persentase anak usia 1 tahun yg diimunisasi campak	93	95,85	103,06
22	Non Polio AFP rate 100.000 penduduk	1,48	0	0,00**
23	Cakupan Balita pneumonia yang ditangani	100	100	100
24	Cakupan Penemuan dan penanganan penyakit DBD	100	100	100
25	Penderita diare yang ditangani	100	100	100
26	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1,64	0,9	54,88
27	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	100	100,00
28	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	85,26	85,26
29	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	90,04	90,04
30	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	94,15	94,15
31	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	98,15	98,15
32	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	98,74	98,74
33	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	88,49	88,49
34	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	87,07	87,07
35	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	78,37	78,37
36	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	95,3	95,30
37	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100,00
38	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	64,35	64,35*

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
39	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	93,81	93,81
40	Cakupan pelayanan kesehatan esensial	100	100	100,00
41	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100	100	100,00
42	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	100	100	100,00
43	Persentase rumah sakit terakreditasi	100	100	100,00
44	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	96,8	98,89	102,16
45	Proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi	67	100	120,00
46	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100	85,71	85,71
47	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100	100	100,00
48	Proporsi pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai standar	100	100	100,00
49	Persentase Penggunaan Obat Rasional	94	92	97,87
50	Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat sesuai standar	55,5	58,54	105,5
51	Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan	96,7	97,8	101,1
52	Cakupan Desa Siaga Aktif	100	100	0,00
53	Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	66,67	66,67	100,00
54	Persentase kelurahan/desa yang melaksanakan pembinaan posyandu aktif	94,87	100	105,41

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2023

Penjelasan/narasi capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 mencapai angka 73,57 tahun, meningkat dibandingkan tahun 2022 di angka 73,36 tahun (tahun 2021 di angka 73,17). Usia Harapan Hidup Kab. Belitung Timur tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,21 dari tahun 2022. (Sumber Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur) dan masih lebih tinggi dari UHH Prov. Kep. Bangka Belitung) tahun 2023 di capaian 71,23 tahun.

Sedangkan untuk usia harapan hidup (AHH) penduduk Indonesia menurut BPS sebesar 73,6 pada tahun 2022.

Dari aspek kesehatan, peningkatan angka usia harapan hidup dipengaruhi oleh peningkatan kesehatan ibu dan anak. Hal ini berkaitan erat dengan angka kematian bayi atau balita serta ibu melahirkan. Beberapa faktor pendukungnya antara lain yaitu persentase pelayanan kesehatan ibu hamil yang mencapai (85,26%), Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir (94,15%) dan Persentase pelayanan kesehatan balita (98,15%).

Sedangkan untuk realisasi capaian sasaran tahun berjalan dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada Tahun 2026 sebesar 72,6 tahun sudah melampaui target akhir RPJMD.

2. Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Pada tahun 2021 cakupan persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi di Belitung Timur adalah 80,08%, di tahun 2022 meningkat sebesar 85,30% dan di tahun 2023 tercapai 78,37 dari target 100% atau turun 6,93% dibandingkan tahun 2022. Akan tetapi masih lebih tinggi bila dibandingkan capaian dari Provinsi Kep. Bangka Belitung di tahun 2022 sebesar 77,68%.

Cakupan kunjungan pasien hipertensi mengalami penurunan sehingga belum mencapai target disebabkan antara lain peran serta UKBM belum maksimal serta masih kurangnya kemandirian masyarakat dalam masalah kesehatan.

Untuk meningkatkan persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi perlu dilakukan berbagai yaitu strategi diantaranya meningkatkan peran serta UKBM dalam menjaring penderita hipertensi, meningkatkan program PIS-PK serta berintegrasi dengan program lain seperti Yuk Gi Nyelik Pasien.

3. Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Pada tahun 2021 cakupan persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Belitung Timur adalah 94,57 %, di tahun 2022 adalah sebesar 84,57 % dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 9,58% dibandingkan tahun 2022 atau dengan capaian sebesar 94,15%. Capaian tersebut juga lebih tinggi bila dibandingkan capaian dari Provinsi Kep. Bangka Belitung di tahun 2022 sebesar 93,60%.

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dengan makin maksimalnya peran bidan desa dan petugas puskesmas dalam survei untuk pemeriksaan ibu hamil dan koordinasi dengan praktek swasta.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir diantaranya dengan meningkatkan kualitas tenaga

kesehatan dalam penanganan bayi baru lahir berupa pelatihan, serta memaksimalkan pendataan bagi ibu bersalin diluar wilayah kabupaten.

4. Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis

Pada tahun 2021 cakupan persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis di Belitung Timur adalah 108% dan tahun 2022 adalah sebesar 124,75%. Sedangkan capaian di tahun 2023 hanya 64,35% dari target 100%. Capaian ini mengalami penurunan dikarenakan pada Triwulan ke 2 adan perubahan/ penambahan target dari Direktorat Jenderal kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang hampir 300%. Sementara itu ketersediaan logistik, alokasi tim TB serta anggaran masih berpatokan pada kriteria sasaran tahun sebelumnya.

Untuk meningkatkan cakupan persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis tentunya memerlukan perencanaan kinerja yaitu mulai dari memproyeksikan sekaligus menetapkan sasaran kunci, waktu pelaksanaan kegiatan, melibatkan masyarakat lain seperti PMO, kader maupun perangkat desa, kebutuhan logistik dan integrasi dengan program dan sektor lain.

5. Persentase rumah sakit terakreditasi

Sampai dengan tahun 2022 status Rumah Sakit Kabupaten Belitung Timur telah mendapatkan sertifikat akreditasi Utama dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit yang berlaku hingga 19 Oktober 2026. Tentunya fokus utama dari perangkat daerah adalah meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat.

Upaya-upaya dalam meningkatkan mutu pelayanan yang dilakukan antara lain meningkatkan pelaksanaan standar operasional prosedur, peningkatan bangunan/ ruang perawatan/ renovasi rumah sakit, menambah sumber daya manusia terutama dokter spesialis dan pelatihan tersertifikasi, meningkatkan budaya kerja serta sistem informasi RS yang terintegrasi dan mandiri.

6. Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif

Pada tahun 2021 cakupan persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif di Belitung Timur adalah 80,16 %, sedangkan capaian di tahun 2022 adalah sebesar 73 %. Sedangkan untuk tahun 2023 mengalami peningkatan capaian menjadi 88,49% dari target 100% atau mengalami kenaikan sebesar 15,49% dibandingkan tahun 2022. Pelayanan kesehatan pada usia produktif meningkat dibandingkan tahun sebelumnya merupakan indikasi dari peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kepedulian menjaga kesehatan dalam masalah kesehatan, peningkatan logistik dalam skrining usia produktif serta peran aktif petugas kesehatan di unit pelayanan primer.

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada usia produktif tersebut perlu dilakukan beberapa hal seperti meningkatkan koordinasi lintas sektor, meningkatkan peran serta UKBM dan dukungan dari pemerintah desa serta pelayanan kesehatan yang penyelenggaraannya dapat dilaksanakan di rumah atau tempat kerja.

7. Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar

Pada tahun 2021 persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar adalah 78%, sedangkan capaian di tahun 2022 dan 2023 yaitu sebesar 100% dari target 100%. Peningkatan persentase capaian memperlihatkan upaya yang dilakukan menunjukkan bagaimana upaya mempertahankan bahkan meningkatkan fasilitas terutama dalam akreditasi fasilitas kesehatan.

Untuk meningkatkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar tersebut perlu dilakukan beberapa hal utama seperti meningkatkan standar bangunan/ ruang/ peralatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yaitu pelayanan cepat dan tanggap, pelayanan customer service yang akan mendengar keluhan pelanggan, kesabaran, kesopanan dan solusi yang tepat.

8. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Pada tahun 2021 capaian Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional adalah 97,8%, sedangkan capaian di tahun 2022 adalah sebesar 98,45% dan untuk tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 98,89% dari target 96,% atau naik 0,44% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan persentase capaian memperlihatkan mayoritas masyarakat Belitung Timur sudah tercover secara baik dalam urusan kesehatan. Ini merupakan suatu keberhasilan dalam menurunkan salah satu masalah sosial/ masalah kemanusiaan.

Sedangkan capaian jaminan kesehatan nasional tahun 2023 dibandingkan target akhir RPJMD yaitu 98,45%, maka hasilnya sudah maksimal 100%.

Walaupun mayoritas masyarakat Belitung timur sudah tercover jaminan kesehatan akan tetapi perlu upaya untuk menekan/ membatasi penambahan peserta jaminan kesehatan dengan penerima bantuan Iuran (PBI) serta perlu adanya edukasi bagi masyarakat yang sebetulnya dikategorikan mampu untuk mendaftarkan diri dan keluarganya ke Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

9. Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil

Pada tahun 2021 persentase pelayanan kesehatan ibu hamil adalah 84,84%, sedangkan capaian di tahun 2022 adalah sebesar 81,52%. Dan di tahun 2023 mencapai 85,26% dari target 100% atau meningkat 3,74% dibandingkan

tahun 2022. Akan tetapi capaian ini masih belum melampaui capaian di tingkat provinsi di tahun 2022 yang sebesar 87,10%.

Belum maksimalnya capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dikarenakan pelaksanaan pemantauan wilayah setempat belum maksimal, rendahnya pengetahuan bumil, waktu buka pelayanan antenatal care tidak efisien sehingga banyak ibu hamil yang tidak mencapai pelayanan secara maksimal. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil tersebut perlu dilakukan peningkatan pada Kualitas pelayanan Antenatal Care (ANC), peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan ibu hamil, surveilans pada ibu hamil terutama skrining ibu hamil/ kunjungan rumah serta peningkatan motivasi petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan.

10. Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus

Pada tahun 2021 persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus adalah 89,30%, meningkat di tahun 2022 sebesar 93,80% dan di tahun 2023 mengalami peningkatan lagi 95,30% atau mengalami kenaikan 1,5 % dibandingkan tahun 2022.

Peningkatan persentase capaian dikarenakan meningkatnya peran serta upaya Kesehatan Bersumberdaya masyarakat (UKBM), dukungan dari pemerintah desa dalam memfasilitasi kegiatan dan juga integrasi dengan kegiatan perkesmas lainnya seperti "Yuk Gi Nyelik Pasien".

Untuk menekan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus pada kelompok tersebut upaya utama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan peran serta UKBM dan dukungan dari pemerintahan desa terutama masalah bantuan pengadaan logistik serta penguatan kelompok berisiko/ dengan diabetes .

11. Persentase pelayanan kesehatan balita

Pada tahun 2021 persentase pelayanan kesehatan balita adalah 96,89%, sedangkan capaian di tahun 2022 adalah sebesar 92,45% dan di tahun 2023 menjadi 98,15% dari target 100% atau mengalami peningkatan 5,7% dibandingkan tahun 2022. Bila dibandingkan capaian di tingkat provinsi di tahun 2022 yang sebesar 90,89% capaian ini sudah lebih baik.

Peningkatan persentase capaian belum mencapai 100%, dikarenakan dalam perhitungan estimasi target tahunan berbeda dari kondisi riil dilapangan dan juga masih ditemukan orang tua yang hanya memeriksakan balitanya saat dalam kondisi tidak sehat/ sakit dan tidak memeriksakan anaknya secara rutin lagi sebelum usia 59 bulan.

Untuk tetap meningkatkan kinerja capaian pelayanan pemeriksaan kesehatan balita di puskesmas telah membentuk grup/kelas ibu balita sesuai umur balita dan juga melibatkan kader posyandu melakukan kunjungan rumah secara mandiri untuk mengukur/ memantau perkembangan balita dengan didampingi tenaga kesehatan. Selain itu gedung puskesmas juga telah ditenahi agar ramah anak sehingga menambah kenyamanan untuk orang tua dan balita saat berkunjung ke puskesmas.

12. Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)

Pada tahun 2021 persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV adalah 83,10%, meningkat di tahun 2022 sebesar 124%, akan tetapi menurun di tahun 2023 menjadi 93,81%, akan tetapi lebih baik dibandingkan capaian tingkat provinsi di tahun 2022 sebesar 80,40%.

Penurunan persentase capaian dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat umum dan populasi kunci untuk memeriksakan diri, terbatasnya jumlah kelompok komunitas populasi berisiko yang menjadi sasaran utama pemeriksaan yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran pemeriksaan.

Untuk lebih meningkatkan capaian pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV tersebut yaitu dengan lebih memperbanyak koordinasi di tingkat layanan, kolaborasi antara Program HIV dengan program TB dan HIV serta dengan kesehatan keluarga yaitu pemeriksaan HIV pada ibu hamil sebagai persiapan untuk melahirkan, peningkatan edukasi melalui media elektronik serta mencukupi kebutuhan logistik program.

13. Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Pada tahun 2021 persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut adalah 70,11% meningkat di tahun 2022 sebesar 80,09 % dan Kembali mengalami peningkatan di tahun 2023 sebesar 87,07%. Capaian ini lebih baik dibandingkan angka provinsi sebesar 81,37% di tahun 2022.

Peningkatan persentase capaian dikarenakan kegiatan posyandu lansia yang sudah aktif di tiap puskesmas seperti senam lansia setiap minggu, dilakukannya kunjungan rumah serta melibatkan kader yang sudah terlatih.

Untuk meningkatkan capaian program lansia ini perlu tetap melaksanakan posbindu usila, frekuensi kunjungan rumah perlu ditingkatkan dan ketersediaan logistik yang cepat dan pengadaan yang mencukupi sesuai target sasaran program.

14. Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin

Di tahun 2021 persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah 91,18 %, sempat turun menjadi 80,69% di tahun 2022 dan meningkat lagi menjadi 90,04 di tahun 2023. Capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian tingkat provinsi di tahun 2022 sebesar 93%.

Turun naiknya persentase capaian dikarenakan saat perencanaan dengan menggunakan metode proyeksi, jika dibandingkan dengan jumlah bersalin secara riil terdapat perbandingan/ bias yang cukup tinggi sehingga capaian tentu akan menjadi lebih rendah dan adanya situasi ibu yang melakukan persalinan diluar wilayah kabupaten/ di tempat asal atau dekat dengan orangtua, menyebabkan tidak/ sulit terdata yang berakibat kualitas pelayanan bagi ibu bersalin tidak maksimal.

Adapun upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin yang dapat dilakukan di puskesmas seperti meningkatkan kualitas pelayanan Postnatal Care (PNC), melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan ibu bersalin serta memperbaiki pola pendataan bagi ibu yang bersalin diluar wilayah kabupaten.

15. Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

Untuk persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat dari tahun 2021, tahun 2022 dan di tahun 2023 tercapai 100% sesuai target SPM. Keberhasilan ini tercapai dikarenakan tersedianya fasilitas pendukung, tenaga kesehatan, logistik bahkan kunjungan kerumah yang relatif lancar.

Untuk tetap memaksimalkan capaian pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat tersebut tetap perlu melibatkan peranserta Tim Pelaksanan Kesehatan Jiwa masyarakat (TPKJM) dalam pencegahan penambahan penderita dan pengendalian/ perawatan kesehatan jiwa.

16. Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Target Di tahun 2021 persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar adalah 99,33% kemudian meningkat di tahun 2022 sebesar 99,96% dan sedikit turun di tahun 2023 menjadi 98,74%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi pada tahun 2022 sebesar 98,10%. Persentase capaian pelaksanaan skrining anak sekolah relatif tinggi dikarenakan peran serta aktif pihak sekolah serta pemilihan jadwal yang efektif. Sementara itu turunnya capaian rata rata dikarenakan pindah lokasi/ domisili sekolah siswa.

Upaya yang perlu dilakukan dalam peningkatan capaian target diantaranya sosialisasi ke penyelenggara pendidikan, siswa sekolah serta penjadwalan ulang dan rujukan ke puskesmas bagi anak yang tidak mendapatkan/melewatkan skrining kesehatan.

17. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar

Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar di Belitung Timur tahun 2023 masih sama dengan tahun 2022 yaitu 85,71%. Dan peningkatan pada tahun 2023 ini terkendala pada tidak ada penambahan tenaga dokter gigi.

Untuk meningkatkan jumlah tenaga kesehatan selayaknya dilakukan rekrutmen sumber daya kesehatan berdasarkan dengan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar melalui tenaga kontak daerah, PPPK maupun CPNS.

18. Proporsi Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan tersertifikasi kompetensi

Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 proporsi SDM kesehatan Kabupaten Belitung Timur tersertifikasi kompetensi sudah 100%. Hal ini dikarenakan untuk melakukan pelayanan di fasilitas pelayanan wajib berpendidikan minimal diploma III serta memiliki sertifikasi kompetensi.

Selain mencapai target yang tidak boleh terlupakan adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas serta kualitas dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat salah satunya dengan melakukan evaluasi dan pendataan untuk SDM tersertifikasi.

19. Persentase Penggunaan Obat Rasional (POR)

Persentase penggunaan obat rasional tahun 2022 adalah 92%. Dan untuk tahun 2023 masih sama 92% (terrealisasi 97,87 dari target 94%). Hal ini dapat diketahui melalui metode sampling yang khusus untuk mengamati jenis obat yang digunakan/ diberikan pada pasien infeksi pernapasan, diare serta myalgia. Yang akan dinilai selama 2 (dua) semester dalam satu tahun. Hal ini dapat dihindari bila petugas medis atau paramedik selalu melakukan pemeriksaan sesuai Standar Operasional Prosedur pemberian obat.

Untuk menjaga kualitas dalam POR tentunya harus selalu dilakukan evaluasi berkala serta menginformasikan petugas untuk mematuhi bekerja sesuai SOP.

20. Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat di tahun 2021 persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat adalah 51,28% dan meningkat di tahun 2022 menjadi 66,6 %. Sedangkan capaian di tahun 2023 adalah 69,23% dari target 66,67%.

Peningkatan persentase capaian dikarenakan pada saat ini telah adanya komitmen dari pemerintah desa untuk ikut mensukseskan program germas. Tentunya perlu upaya keras untuk merealisasikan capaian rencana akhir Renstra pada Tahun 2026 yaitu di angka 100% atau semua desa melaksanakan program germas.

Untuk mempercepat pelaksanaan program Germas di masyarakat tentunya yang penting adalah komitmen dari pemerintah desa yang akan menjadi motor penggerak bagi masyarakat, untuk hal itu pelaksana kegiatan harus terus melakukan pembinaan kembali ke desa – desa.

21. Cakupan Desa Siaga Aktif

Sejak tahun 2021, tahun 2022 persentase kelurahan/desa yang berstatus Desa Siaga Aktif sudah 100%, dan untuk 2023 capaian desa siaga aktif juga mencapai 100%.

Sedangkan untuk realisasi capaian sasaran tahun berjalan kalau dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada Tahun 2026 yaitu di angka 100%, tentu sudah tercapai dan mesti dipertahankan status tersebut melalui pembinaan dan pendampingan.

Dalam memperkuat pelaksanaan Desa Siaga Aktif faktor utama yang perlu dilakukan adalah melakukan pembinaan secara rutin serta mengadakan kegiatan-kegiatan pendukung seperti lomba desa siaga melalui ajang kampung sehat dalam rangka memotivasi desa dalam peningkatan strata desa siaga.

2.1.3.1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Secara umum salah satu tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.

Tabel 2. 54 Capaian Sasaran Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target	2025	2026
		2021	2022	2023	2024		
1	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang (Persen)	28,1	28	28	71	82	100

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Persentase capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum (Persen)	14	89,89	91,94	96	98	100
3	Persentase Penanganan Drainase Lingkungan dan Perkotaan (Persen)	87,92	33	43,05	60	80	100
4	Persentase Penanganan Jalan kabupaten (Persen)	58,66	58,64	54	70	70	70
5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir dan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur (Persen)	11	11	48,6	60	80	100
6	Persentase Pengelolaan Irigasi Kewenangan kabupaten (Persen)	30,15	30,15	36,93	60	80	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tahun 2023

Tabel 2. 55 Target dan Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

NO.	INDIKATOR SASARAN	Target	Realisasi	%
1	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang (Persen)	42	28	66,67
2	Persentase capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum (Persen)	94	91,94	97,81
3	Persentase Penanganan Drainase Lingkungan dan Perkotaan (Persen)	40	43,05	107,63
4	Persentase Penanganan Jalan kabupaten (Persen)	70	54	77,14
5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir dan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur (Persen)	40	48,6	121,50
6	Persentase Pengelolaan Irigasi Kewenangan kabupaten (Persen)	40	36,93	92,33

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tahun 2023

Penjelasan capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang

Capaian indikator sasaran ketersediaan dokumen rencana tata ruang adalah 28 % akumulasi dari terealisasinya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gantung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Gantung Tahun 2021-2041 dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Manggar ditetapkan melalui Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Manggar Tahun 2023-2042. Jumlah Persentase Tahun 2023 masih sama dengan Tahun 2022 yaitu 28%, dikarenakan belum ada penetapan Dokumen Rencana Tata Ruang yang terealisasi di Tahun 2023.

2. Persentase capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

Peningkatan Persentase capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum ditentukan akses fasilitas sanitasi yang layak (Jamban) sehat yang telah mencapai 100 %, sehingga dapat dikatakan Open Defecation Free (ODF) karena 100% penduduk telah memiliki akses Buang Air Besar di jamban sehat. Sedangkan untuk pencapaian akses terhadap air minum yang layak masih terkendala baik di kuantitas maupun pemenuhan kualitas.

3. Persentase Penanganan Drainase Lingkungan dan Perkotaan

Indikator capaian sasaran ini menggunakan data realisasi pembangunan yang telah dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 terhadap realisasi dan rencana pembangunan sampai tahun 2026.

Persentase drainase terus mengalami peningkatan karena memiliki Anggaran cukup besar, akan tetapi belum bisa menyelesaikan penanganan drainase di Kabupaten Belitung Timur.

4. Persentase Penangan Jalan Kabupaten

Terjadi Penurunan Kondisi Jalan Kabupaten dari 79,64% di Tahun 2022 menjadi 78,45% di Tahun 2023. Hal ini terjadi dikarenakan total Panjang jalan Kabupate tidak sebanding dengan dana pemeliharaan jalan setiap tahunnya sedangkan Penurunan kondisi jalan bisa terjadi 5 tahun dan harus dilakukan pemeliharaan berkala.

5. Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir dan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur

Untuk indikator Kawasan permukiman rawan banjir dan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur tidak mengalami perubahan karna belum ada perubahan dari variable penghitungannya. Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir dan Rawan Abrasi yang dilindungi oleh infrastruktur masih belum bertambah karena belum adanya Pembangunan pengaman untuk Kawasan tersebut. Sedangkan untuk Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir dan Rawan Abrasi masih belum ada perubahan karena belum ada pendata secara menyeluruh di Kabupaten Belitung Timur

6. Persentase Pengelolaan Irigasi Kewenangan kabupaten

Capaian kinerja indikator Persentase Luas Irigasi kondisi dalam kondisi baik di Kabupaten Belitung Timur mengalami kenaikan dengan adanya Pembangunan di 2 Daerah Irigasi yaitu DI Balok dan DI Air Kelik, serta kegiatan rehabilitasi Jaringan Irigasi di 2 DI yaitu Di Lintang dan DI Nyuruk.

Dinas PUPRP2RK melalui Bidang Sumber Daya Air mulai melakukan upaya utk penelusuran terhadap Daerah Irigasi yang masih Efektif agar dpt dilakukan perbaikan terhadap Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi tersebut

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan urusan wajib pelayanan dasar dengan tujuan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Kegiatan pada Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas perumahan, khususnya bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang bermukim di daerah-daerah perkotaan dan perdesaan antara lain melalui penyediaan rumah-rumah sederhana dengan penggunaan teknologi tepat guna dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaannya. Sasaran pembangunan perumahan dan permukiman diupayakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) merupakan salah satu dinas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga memiliki kewenangan yang meliputi:

1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten;
2. Menyusun rancangan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten;
3. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten;
4. Melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten;
5. Mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR;
6. Menyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi MBR pada tingkat kabupaten;

7. Memfasilitasi kerja sama pada tingkat kabupaten antara pemerintah kabupaten dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
8. Menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten; dan
9. Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten.

Tabel 2. 56 Capaian Sasaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	52,3	38,37		52,50	53,50	54,50
2	Persentase pemukiman yang tertata	99,35	99,35		99,61	99,82	100
3	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	99,35	99,35		100	100	100
4	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	0	0		2,32	1,22	0,12

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tahun 2023

Tabel 2. 57 Target dan Capaian Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	51,50	40,31	78,27
2	Persentase pemukiman yang tertata	99,40	99,35	99,94
3	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100	99,35	99,35
4	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	3,41	4,78	71,33

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tahun 2023

Penjelasan capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni mengalami penyesuaian di tahun 202 sejumlah 14.187 rumah sedangkan tahun 2022 rumah layak huni di Kabupaten Belitung Timur berjumlah 13.413 rumah sehingga mengalami kenaikan 774 rumah. Untuk Jumlah rumah yang ada di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 sebanyak 34.814. Data rumah ini belum sepenuhnya valid karena pendataan lebih terfokus pada rumah kategori agak layak kurang layak dan tidak layak.

2. Persentase pemukiman yang tertata

Untuk perhitungan indikator Persentase permukiman yang tertata, luasan area permukiman tertata sebesar 4.839,7 ha dibanding dengan luas area permukiman keseluruhan yaitu 4.870,93 ha. Belum ada penambahan dari luas area permukiman yang tertata. Penurunan Capaian Kinerja dikarenakan adanya kenaikan target kinerja.

3. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU

Untuk perhitungan Persentase Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang di dukung PSU pada tahun 2023 sebesar 99,35% yang didapat dari perbandingan Permukiman layak huni 4.839,7ha dibagi wilayah permukiman kabupaten 4.870,93 ha.

4. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan

Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan dihitung dengan menghitung rasio luas permukiman kumuh yang telah ditangani terhadap total luas permukiman kumuh di Kab. Belitung Timur. Luas pemukiman kumuh yang tertangani 1,49 ha dari luas kawasan pemukiman kumuh 31,18ha sesuai SK Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-695 Tahun 2020 dengan capaian realisasi 4,78 ha dan capaian kinerja 89,35% sedangkan Tahun 2020 luas kawasan kumuh yang menjadi acuan perhitungan adalah 29,66 ha sesuai dengan SK Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-334 Tahun 2019. Mengacu hal tersebut diatas belum realisasi di tahun 2023 masih sama dengan realisasi tahun 2022.

**2.1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman, menyelenggarakan perlindungan Masyarakat, serta melaksanakan urusan pemadam kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas menyelenggarakan fungsi :

- a). Penyusunan program penegakan peraturan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat, penyelenggaraan Masyarakat serta pemadam kebakaran;
- b). Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat, penyelenggaraan perlindungan Masyarakat serta pemadam kebakaran;

- c). Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan kepala Daerah dan peraturan kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat, penyelenggaraan perlindungan Masyarakat serta pemadam kebakaran; dan
- d). Pengawasan terhadap Masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala Daerah.

Tabel 2. 58 Sasaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100	100	96,42	100	100	100
2	Persentase penanganan kebakaran kurang dari 15 menit	77	53	81	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2024

Tabel 2. 59 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100	96,42	96,42
2	Persentase penanganan kebakaran kurang dari 15 menit	100	81	81

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2024

Penjelasan capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti
Target indikator gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti tahun 2023 dilaksanakan dengan mempertimbangkan jumlah laporan pengaduan Masyarakat terhadap pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum khususnya pelanggaran atas kepatuhan Masyarakat terhadap protocol Kesehatan covid-19, namun sejalan menurunnya wabah covid-19 diikuti pula dengan tren penurunan laporan pengaduan Masyarakat sehingga didapati fakta bahwa capaian tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Persentase penanganan kebakaran kurang dari 15 menit

Belum tercapainya kinerja penanganan kebakaran oleh pemadam kebakaran disebabkan oleh salah satunya karena meningkatnya jumlah kebakaran yang tidak tertangani oleh pemadam kebakaran dan fasilitasnya, sehingga mengakibatkan kendala dan hambatan bagi pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya. Kekurangan personil dan pos pemadam kebakaran yang jauh dari lokasi kebakaran, mengakibatkan waktu tanggap dalam proses penanganan melebihi waktu tanggap 15 menit, sehingga dapat meminimalisir kerugian. Penambahan pos wilayah penanganan kebakaran di masing-masing kecamatan di wilayah kabupaten Belitung Timur serta kompetensi aparaturnya yang perlu ditingkatkan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Evaluasi pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur terhadap hasil pengukuran indikator kinerja sasaran. Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal-hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal-hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik pada masa-masa yang akan datang. Secara rinci persentase capaian indikator sasaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada table sebagai berikut

Tabel 2. 60 Capaian Sasaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Risiko Bencana	168,40	168,40	155,61	168,40	168,40	168,40

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tahun 2023

Tabel 2. 61 Target dan Capaian Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Indeks Risiko Bencana	168,40	155,61	92,40

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tahun 2023

Penjelasan capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Indeks Risiko Bencana

Tingkat resiko Bencana adalah perbandingan antara Tingkat Kerugian dengan kapasitas Daerah untuk memperkecil Tingkat Kerugian dan Tingkat ancaman akibat bencana. Sedangkan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam

dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan.

Untuk menghitung besaran Resiko bencana suatu wilayah, dapat dilakukan dengan rumus seperti berikut :

$$R = H \times V / C$$

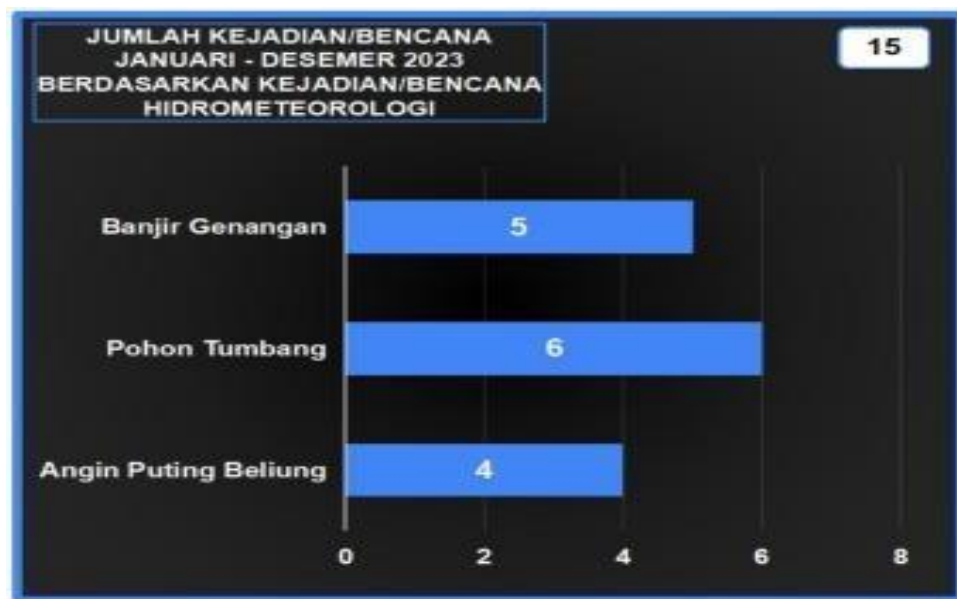
Dimana, —R : Risiko Bencana —H : Ancaman (*Hazard*), adalah suatu kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan, cedera, hilangnya nyawa atau kehilangan harta benda —V : Kerentanan (*Vulnerability*), adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya (baik bahaya alam maupun bahaya buatan) yang terjadi akan dapat menimbulkan bencana (disaster) atau tidak C : Kapasitas (*Capacity*), adalah kapasitas yang tersedia untuk pemulihan kembali setelah terjadi bencana.

Untuk tahun 2022 indikator sasaran di atas dengan target 168.40 untuk realisasi 168 . 40 sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 100% hal ini dikarenakan mengacu pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sedangkan untuk tahun 2023 target tetap mengacu pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan capaian 155.61

Adapun masalah yang terjadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur adalah tidak adanya dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) dan Dokumen KRB (Kajian Resiko Bencana) sehingga informasi IRB diperoleh langsung dari BNPB dari hasil verifikasi nilai IKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan nilai IRB Kabupaten Belitung Timur 155,61 dengan persentase capaian 92,40%. Selama tahun 2023 telah terjadi beberapa bencana di 7 (tujuh) kecamatan, diantaranya:

1. Hidrometeorologi

Bencana Hidrometeorologi berupa suatu fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi atmosfer (meteorologi), air (hidrologi) atau lautan (Oseanografi) atau bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperature, angin dan kelembapan. Selama tahun 2023 bencana hidrometeorologi banyak terjadi bulan Juni dan Desember terdapat 4 kasus dari 7 kecamatan.

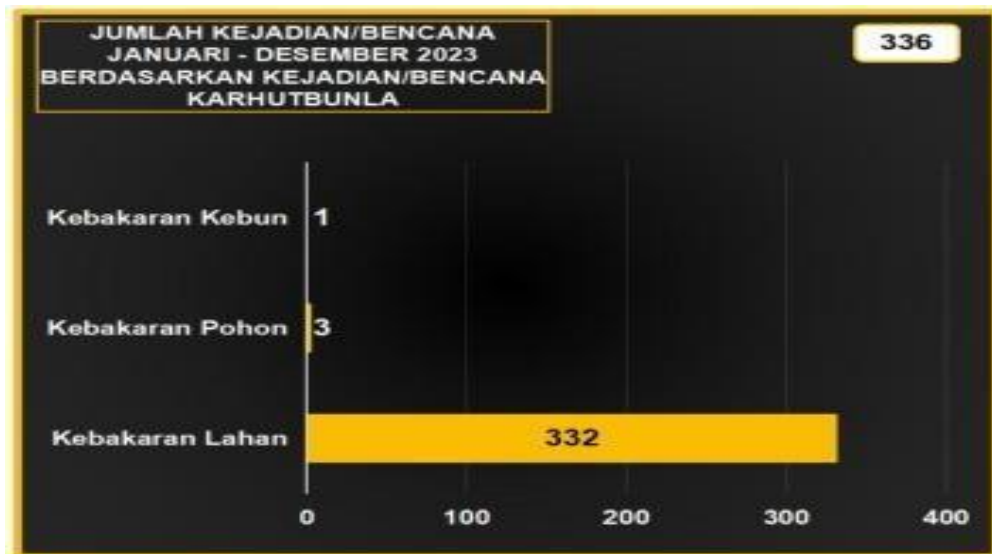


Grafik 2. 16 Kejadian/Bencana Hidrometeorologi Tahun 2023

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tahun 2023

2. Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan

Bencana Hutan, kebun dan lahan yang biasa di singkat dengan Karhutban yang paling banyak kasus. Selama tahun 2023 bulan September yang paling banyak kejadian kebakaran hutan, kebun dan lahan. Hal ini dikarenakan terjadinya kemarau Panjang atau kekeringan. Adapun bencana kebakaran hutan, kebun dan lahan seluas 649.265 hektar.



Grafik 2. 17 Kejadian/Bencana Karhutbunla Tahun 2023
 Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tahun 2023

3. Kebakaran Bangunan

Untuk bencana kebakaran bangunan banyak terjadi pada bulan Juli dan Agustus ada 3 kasus, sedangkan untuk bulan Januari dan Juni ada 2 kasus dan untuk bulan Februari dan September 1 kasus.



Grafik 2. 18 Kejadian/Bencana Kebakaran Bangunan Tahun 2023
 Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tahun 2023

4. Kejadian Lainnya

Yang dikategorikan sebagai bencana kejadian lainnya diantaranya serangan hewan buas, orang tenggelam, evakuasi hewan liar / buas, kebakaran motor atau tabung gas, untuk kejadian lainnya sepanjang

tahun 2023 paling banyak bulan Juni dan bulan Agustus sebanyak 9 kasus, 8 kasus terjadi di bulan Mei, 6 kasus terjadi di bulan September, sedangkan 5kasus terjadi pada bulan Januari, 4 kasus terjadi di bulan April dan Desember dan untuk 3 dan 2 kasus terjadi di bulan Februari, Juli, Oktober dan November.



Grafik 2. 19 Kejadian/Bencana Kejadian Lainnya Tahun 2023

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tahun 2023

Jadi dapat disimpulkan selama bulan Januari sampai Desember telah terjadi 423 kasus kejadian bencana di kabupaten Belitung Timur dengan rincian sebagai berikut :

- Hidrometeorologi 15 kejadian
- Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan 336 kejadian
- Kebakaran Bangunan 12 kejadian
- Kejadian lainnya 60 kejadian

Adapun total terdampak yaitu 45 Kepala Keluarga dan 150 Jiwa dengan korban jiwa 3 orang meninggal dunia dan 1 orang luka ringan. Untuk bangunan terdapat 42 bangunan rumah yang terdampak dengan kondisi 6 rumah rusak ringan, 8 rumah rusak sedang dan 3 rumah rusak berat. Adapun jumlah kejadian perkecamatan: Manggar 198 kejadian, gantung 124 kejadian, Kelapa Kampit 16 kejadian, Damar 72 kejadian, Simpang Pesak 3 Kejadian, Simpang Renggiang 8 Kejadian dan Dendang 2 Kejadian.

2.1.3.1.6 Sosial

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kabupaten Belitung Timur termasuk salah satu perangkat daerah yang terdampak dari perubahan nomenklatur yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur merupakan Dinas dengan Tipe A, sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang mana memiliki 2 urusan yaitu Urusan Sosial, dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Kebijakan Pembangunan pada urusan sosial diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yang berkenaan dengan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan pengembangan sosial dengan pemanfaat perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui :

1. Peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS;
2. Pemberdayaan warga miskin dan PMKS;
3. Peningkatan bantuan dan rehabilitasi sosial korban bencana;
4. Peningkatan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan Organisasi Sosial/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.

Implementasi kebijakan tersebut harus berhadapan dengan semakin kompleksnya permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, seperti kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar pada sebagian besar masyarakat yang diakibatkan oleh menurunnya daya beli, ketidak siapan dalam menerima budaya konsumerisme, dan bencana alam. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, yang antara lain meliputi: Fakir Miskin, Wanita Rawan Ekonomi, Penyandang Cacat dan

masyarakat yang menjadi korban bencana alam dan sosial yang sangat perlu membutuhkan pelayanan dan rehabilitasi.

Tabel 2. 62 Capaian Sasaran Urusan Sosial Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	100	100	100	100	100	100
2	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	95,29	60,05	84,15	97,50	98,00	98,50

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Tahun 2023

Tabel 2. 63 Target dan Capaian Urusan Sosial Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	100	100	100
2	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	97,00	100	103,09

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Tahun 2023

Penjelasan capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Indikator Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan
Indikator Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan terkait ke Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial, dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan adalah tenaga yang diberdayakan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur untuk membantu melaksanakan program-program pemerintah yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial masyarakat. Adapun formulasi pengukuran sebagai berikut:

Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	=	$\frac{\text{Potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan}}{\text{Potensi sumber kesejahteraan sosial yang Tersedia}}$	x	100%	=	$\frac{1.301}{1.301}$	x	100%	=	100%

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

1. Pekerja Sosial Profesional (terdiri dari SDM PKH, Peksos Anak, Pendamping Disabilitas) sebanyak 18 orang;
 2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 40 orang
 3. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebanyak 70 orang;
 4. Karang Taruna sebanyak 1.161 orang;
 5. LK3 sebanyak 5 orang; dan
 6. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 7 orang.
2. Indikator Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Untuk Indikator Sasaran Tahun 2022 dan Tahun 2023 terdapat perbedaan capaian yang sangat signifikan dari 60,05% tahun 2022 ke 103,09% Tahun 2023. Hal ini dilihat pada jumlah bantuan yang di berikan kepada Pemerlu Pelayanan Kesehatan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dikarenakan pada tahun sebelumnya di tahun 2022 kita masih berusaha dalam penanganan pandemi Covid 19 yang prioritasnya untuk membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi tersebut dan di tahun 2023 pandemi sudah mulai mereda sehingga jumlah bantuan juga ikut menurun, sehingga prioritas dialihkan dalam pemulihan ekonomi daerah. Indikator persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar diukur dengan formulasi sebagai berikut :

Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	=	$\frac{\text{PPKS yang menerima Bantuan dalam 1 tahun}}{\text{PPKS yang seharusnya menerima Bantuan dalam 1 tahun}}$	x 100%	=	$\frac{38.63}{8}$	x 100%	=	100 %

PPKS yang menerima bantuan adalah masyarakat Belitung Timur yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menerima bantuan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun Provinsi. Tahun

2023 terdapat ada beberapa bantuan sosial yang diterima masyarakat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM), Peserta Bantuan Iuran (PBI) yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial RI sebanyak 6.294 Bantuan. Bantuan untuk Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Anak dan Lansia baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebanyak 287 Bantuan. Dan untuk data pembanding adalah Jumlah keseluruhan data DTKS sesuai SK DTKS per Desember 2023 sebanyak 38.638 Jiwa.

Dalam pemenuhan Perhitungan Indikator Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, dengan mengambil salah satu 5 kebutuhan dasar yang terpenuhi yaitu dari segi Kesehatan yang dimana kita ketahui Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk mempertahankan kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kebutuhan dasar ini meliputi kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan keamanan, yang dimana Bantuan kesehatan telah diberikan kepada 38.638 Orang melalui Bantuan PBI Kesehatan baik dari dana APBN dan APBD.

Adapun Jumlah PPKS dan bantuan yang didapatkan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 2. 64 Jumlah PPKS dan bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah

No	Program Bantuan	Jumlah PPKS dan Bantuan yang di dapat	Sumber Dana
Bantuan Pangan, Permakanan, Uang			
1	Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem	2.279 Bantuan	APBD Provinsi
2	Bantuan Disabilitas, Lansia, dan Anak Terlantar (Permakanan, Sandang, dan Alat Bantu)	464 Bantuan	APBD
	Jumlah Bantuan	2.743 Bantuan	
Bantuan Kesehatan			
1	Penerima Bantuan Iuran (PBI)	8.869 Orang	APBD
2	Penerima Bantuan Iuran (PBI)	29.769 Orang	APBN
	Total Orang	38.638 Orang	

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Tahun 2023

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah, sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja diperlukan pembangunan ketenagakerjaan, untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam UU ini diatur mengenai: landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan; kesempatan dan perlakuan yang sama dalam hal ketenagakerjaan; perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; pelatihan kerja; penempatan tenaga kerja; perluasan kesempatan kerja; penggunaan tenaga kerja asing; hubungan kerja; perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan; hubungan industrial; pembinaan; pengawasan; penyidikan; dan ketentuan pidana serta sanksi administratif di bidang ketenagakerjaan .

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah setiap tahunnya selalu menyelenggarakan berbagai Pelatihan untuk mempersiapkan calon tenaga kerja yang memiliki kompetensi dibidang kejuruan vokasi tertentu, pelatihan pada tenaga kerja akan menjadikan para tenaga kerja memiliki kecakapan dalam keterampilan sesuai dengan standar ketentuan dan juga dapat sebagai investasi dalam meningkatkan kualitas SDM, proses pembuktian atas keahlian secara umum melalui serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk uji kompetensi yang nantinya para peserta pelatihan akan mendapatkan Sertifikat kompetensi kerja yang merupakan sebuah pengakuan terhadap tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi kerja yang dipersyaratkan .

Capaian kinerja sasaran tersebut selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2. 65 Capaian Sasaran Urusan Tenaga Kerja Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	2,50	2,60	2,37	2,80	2,90	3,00
2	Persentase Peningkatan Wirausaha Baru per Tahun	0,10	0,10	0,13	0,12	0,12	0,12
3	Persentase Tenaga Kerja Formal	49,50	49,55	53,25	49,70	49,80	49,80
4	Proporsi Peserta Jaminan sosial Bidang Ketenagakerjaan	84,80	84,85	79,60	84,95	85,00	85,00
5	Angka sengketa pengusaha – pekerja per Tahun	11	10	5	9	9	8

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Tahun 2023

Tabel 2. 66 Target dan Capaian Urusan Tenaga Kerja Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	2,70	2,37	87,78
2	Persentase Peningkatan Wirausaha Baru per Tahun	0,11	0,13	122,73
3	Persentase Tenaga Kerja Formal	49,60	53,25	107,36
4	Proporsi Peserta Jaminan sosial Bidang Ketenagakerjaan	84,90	79,60	93,70
5	Angka sengketa pengusaha – pekerja per Tahun	10	5	150

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Tahun 2023

Penjelasan capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Indikator Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi

Berikut disajikan data ketenagakerjaan untuk wilayah Kabupaten Belitung Timur

Tabel 2. 67 Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat Kompetensi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2023

No	Nama perusahaan	Tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi Tahun 2021	Tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi Tahun 2022	Tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi Tahun 2023
1	Swasta	377	377	377
2	Pemerintah	1.250	1.326	1.326
3	Masyarakat	-	-	9
	Total	1.627	1.703	1.712

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel data peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2023 , Realisasi indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi tahun 2023 dapat dihitung dengan hasil sebesar 2,37% (*Dua Koma Tiga Puluh Tujuh Persen*), maka capaian kinerja indikator adalah sebesar **87,78%** (*Delapan Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Delapan Persen*) atau interpretasi **tinggi**, sedangkan tahun 2022 yaitu sebesar 2,55% (*Dua Koma Lima Puluh Lima Persen*), maka capaian kinerja indikator adalah sebesar **98,08%** (*Sembilan Puluh Delapan Koma Delapan Persen*) atau interpretasi **sangat tinggi**.

Penurunan capaian kinerja dikarenakan adanya penambahan jumlah penduduk bekerja sebanyak 5.300 orang dimana pada tahun 2023 jumlah penduduk bekerja sebanyak 72.121 dan tahun 2022 sebanyak 66.821 orang, sedangkan jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi penambahan sebanyak 9 orang dimana pada tahun 2023 sebanyak 1.712 orang sedangkan tahun 2022 sebanyak 1.703 orang. Penambahan 9 orang tenaga kerja bersertifikat kompetensi adalah hasil dari program pelatihan pembudidayaan

sayuran hidroponik oleh Dinas tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur melalui dana APBD Tahun Anggaran 2023.

Tabel 2. 68 Ketenagakerjaan Kabupaten Belitung Timur Periode Tahun 2018 - 2023

Kegiatan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Bekerja	95.974	98.221	98.622	66.713	68.536	70.386
Jumlah Angkatan Kerja	69.033	70.103	70.345	69.332	66.821	72.121
Tidak Bekerja / Pengangguran Terbuka	1.035	1.197	2.765	2.619	1.715	1.735
TPAK (%)	71,93	71,37	71,33	69,23	67,36	70,48
TPT (%)	1,50	1,71	3.93	3,78%	2,50	2,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel Data Ketenagakerjaan Belitung Timur Tahun 2018 - 2023 dapat diketahui bahwa TPAK Belitung Timur Tahun 2023 adalah sebesar 70,48 persen Dimana jumlah Angkatan Kerja (AK) sebesar 72.121 jiwa dan Jumlah Penduduk Bekerja sebesar 70.386 jiwa. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022, realisasi tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Tahun 2023 naik sebesar 3,12 persen poin. Dengan naiknya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dapat menggambarkan bahwa tingkat kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja juga mengalami kenaikan.

Penyebab naiknya TPAK adalah golongan bukan angkatan kerja menurun. Penduduk yang masuk kategori bukan angkatan kerja diantaranya adalah sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya . TPAK merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belitung Timur mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 mencapai 1.736 juta orang. Angka tersebut lebih rendah 0,09 persen poin dibandingkan tahun 2022 yang sebanyak 1.715 juta orang. Beberapa faktor penyebab adanya pengangguran terbuka diantaranya Kepadatan penduduk dimana Jumlah penduduk yang tinggi menyebabkan jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja ikut meningkat sehingga persaingan semakin ketat dan lapangan kerja yang terbatas. Rendahnya kualitas SDM

yang berdaya saing juga berpengaruh dimana pengetahuan dan keterampilan yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja masih minim. Faktor lainnya adalah Turunnya perekonomian yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat menyebabkan penumpukkan barang di gudang. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah produksi dan memecat karyawan. Sebaliknya, jika laju perekonomian meningkat, maka lapangan pekerjaan juga ikut meningkat. Perusahaan akan membutuhkan semakin banyak tenaga kerja untuk memenuhi permintaan barang dan jasa yang meningkat.

2. Persentase Peningkatan Wirausaha Baru per Tahun

Tenaga Kerja Mandiri (TKM) adalah salah satu strategi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan produktivitas masyarakat terutama dari kalangan menengah kebawah. Peningkatan wirausaha baru per tahun merupakan tenaga kerja yang dibina melalui kegiatan tenaga kerja mandiri (TKM), penerapan teknologi tepat guna (TTG) dan inkubasi bisnis untuk menjadi wirausaha baru. Peningkatan wirausaha baru per tahun dapat dihitung dari perbandingan jumlah penambahan wirausaha baru dalam satu periode waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah wirausaha baru periode waktu (tahun) sebelumnya.

Tenaga Kerja mandiri yang menjadi wirausaha baru tahun 2020 - 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 69 Tenaga Kerja Mandiri Yang Menjadi Wirausaha Baru Tahun 2020 – 2023

No	Tahun	Tenaga Kerja Mandiri	Tenaga Kerja Mandiri yang menjadi Wirausaha Baru
1	2020	60	29
2	2021	32	32
3	2022	100	37
4	2023	60	42

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Tahun 2023

Tabel 2. 70 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022, Tahun 2023 dan Realisasi Akumulasi Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026 Indikator Persentase peningkatan wirausaha baru per Tahun

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Rencana Sesuai dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Persentase peningkatan	%	0,10	0,156	156	0,11	0,135	122,73	0,12	112,5

n wirausaha baru per Tahun									

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Tahun 2023

Realisasi indikator Persentase Peningkatan wirausaha baru per tahun tahun 2023 dapat dihitung dengan hasil sebesar 0,135 % (*Nol Koma Seratus Tiga Puluh Lima Persen*) dari target 0,11 % (*Nol Koma Sebelas Persen*), maka capaian kinerja indikator adalah sebesar 122,73% (*Seratus Dua Puluh Dua Koma Tujuh Puluh Tiga Persen*) atau interpretasi sangat tinggi. *Dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2022 dapat dihitung dengan hasil sebesar 0,156 % (Nol Koma Seratus Lima Puluh Enam Persen) dari target 0,10 % (Nol Koma Sepuluh Persen), maka capaian kinerja indikator adalah sebesar 156% (Seratus Lima Puluh Enam Persen) atau interpretasi sangat tinggi.*

Penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya pengurangan pelatihan kerja pada tenaga kerja mandiri sehingga berpengaruh pada peningkatan wirausaha baru. Presentase Capaian kinerja pada Peningkatan Wira Usaha Baru per Tahun s.d Tahun 2023 dibandingkan Target Akhir terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] Perubahan Tahun 2021 - 2026 sebesar 112,5 %.

3. Persentase Tenaga Kerja Formal

Persentase tenaga kerja formal adalah Persentase tenaga kerja yang status pekerjaannya buruh/karyawan/pegawai dan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar. dengan cara perhitungannya adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja formal dibagi dengan jumlah tenaga formal ditambah dengan jumlah tenaga kerja informal dikali 100 %. Melansir situs Badan Pusat Statistik (BPS), pekerja formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sisanya termasuk pekerja informal. Contoh pekerja sektor formal adalah pegawai yang bekerja di administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial. Lalu, di jasa pendidikan, jasa kesehatan, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makanan minuman maupun industri pengolahan. Sementara pekerja informal artinya yang berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas di sektor pertanian dan non-pertanian. Contoh pekerja informal antara lain pedagang kaki lima, sopir angkot, dan tukang becak.

Tabel 2. 71 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022, Tahun 2023 dan Realisasi Akumulasi Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026 Indikator Persentase Tenaga Kerja Formal

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Rencana Sesuai dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Persentase Tenaga Kerja Formal	%	49,55	50,49	101,90	49,60	53,25	107,36	49,80	106,93

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Tenaga Kerja Formal Belitung Timur Tahun 2023 adalah sebesar **53,25%** (*Lima Puluh Tiga Koma Dua Puluh Lima Persen*) dengan realisasi Tenaga Kerja Formal sebesar 53,25 dengan capaian kinerja sebesar **107,36%** (*Seratus Tujuh Koma Tiga Puluh Enam Persen*) maka interpretasi indikator adalah **sangat tinggi**. Persentase capaian kinerja realisasi akumulasi capaian indikator dibandingkan dengan tahun akhir renstra adalah sebesar **106,93%** (*Seratus Enam Koma Sembilan Puluh Tiga Persen*).

Meningkatnya capaian kinerja dibandingkan dengan tahun 2023 adalah bertambahnya tenaga kerja formal oleh perusahaan, namun persentase pekerja informal masih besar dikarenakan masih rendahnya tingkat pendidikan di dalam negeri. Selain itu, masih banyak perusahaan kecil menengah yang belum mampu meningkatkan skala ekonominya dan mengembangkan keterampilan pekerjaanya. Lebih lanjut, digitalisasi mendorong banyak anak muda mencari pekerjaan lebih fleksibel.

4. Proporsi Peserta Jaminan sosial Bidang Ketenagakerjaan

Proporsi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan adalah banyaknya pekerja yang telah membayar iuran (pasal 1 angka 8 UU SJSN), yang memiliki jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pension dan jaminan kematian yang cara perhitungannya adalah perbandingan antara jumlah pekerja yang memiliki jaminan sosial bidang ketenaga kerjaan pada periode waktu tertentu dengan jumlah seluruh pekerja pada periode waktu yang sama dikali 100%.

Adapun Proporsi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan tahun 2020-2023 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 72 Pekerja Dan Pekerja Peserta BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020-2023

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	BPJS NAKER	7328	7554	7575	7.610
2	Total Pekerja	8652	7679	9658	9.553

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Tahun 2023

Tabel 2. 73 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022, Tahun 2023 dan Realisasi Akumulasi Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026 Indikator Proporsi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Rencana Sesuai dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Proporsi Peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	%	84,85	78,43	92,43	84,90	79,6	93,7	85,00	93,6

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Tahun 2023

Berdasarkan Data Pekerja dan Pekerja Peserta BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020-2023, dapat diketahui tahun 2023 penambahan pekerja lebih banyak dibandingkan dengan penambahan peserta BPJS Ketenagakerjaan yakni total pekerja tahun 2023 adalah sebanyak 9.553 orang dengan peserta BPJS ketenagakerjaan sebanyak 7.610 orang sedangkan tahun 2022 adalah sebanyak 9.658 orang dengan peserta BPJS ketenagakerjaan sebanyak 7.575 orang. Realisasi indikator Proporsi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan tahun 2023 dapat dihitung dengan hasil sebesar 79,6% (*Tujuh Puluh Sembilan Koma Enam Persen*), maka capaian kinerja indikator adalah sebesar 93,7% (*Sembilan Puluh Tiga Koma Tujuh Persen*) atau interpretasi *sangat tinggi*, dibandingkan dengan tahun 2022 dapat dihitung dengan hasil sebesar 78,43% (*Tujuh Puluh Delapan Koma Empat Puluh Tiga Persen*), maka capaian kinerja indikator adalah sebesar 92,43% (*Sembilan Puluh Dua Koma Empat Puluh Tiga Persen*) atau interpretasi *sangat tinggi*.

5. Angka sengketa pengusaha – pekerja per Tahun

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan

pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Perselisihan dapat timbul akibat dari pelanggaran-pelanggaran norma kerja yang ada seperti soal upah, jam kerja, lembur dan sebagainya yang berpotensi menimbulkan perselisihan. Sehubungan dengan sengketa ketenagakerjaan, tidak hanya fokus pada penanganan perselisihan namun perlu pula dilakukan pembinaan untuk mencegah timbulnya perselisihan hubungan industrial.

Jumlah kasus yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 beserta realisasi indikator Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja per Tahun periode tahun 2018-2023 tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 74 Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Per Tahun Periode Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah sengketa (Kasus)	16	13	9	7	10	5
Jumlah Perusahaan	86	97	97	140	150	158
Angka sengketa (%)	18,6	13,40	9,28	5	6,67	3,16

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Tahun 2023

Tabel 2. 75 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022 dan Realisasi Akumulasi Tahun 2022 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026 Indikator Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja per Tahun

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Rencana Sesuai dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Angka Sengketa Pengusaha - Pekerja per Tahun	%	10	6	140	10	5	150	8	137,5

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Tahun 2023

Realisasi indikator Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja per Tahun untuk tahun 2023 adalah sebesar 5 Kasus dengan capaian kinerja sebesar 150% (*Seratus Dua Puluh Dua Koma Enam Puluh Tujuh Persen*) maka kinerja indikator masuk interpretasi *memuaskan*. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi indikator adalah 6, capaian indikator mengalami penurunan yaitu 140%. Penyebab peningkatan kinerja jumlah perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Belitung Timur yaitu dari 10 kasus menjadi 5 kasus. Persentase capaian kinerja realisasi akumulasi capaian indikator dibandingkan dengan tahun akhir renstra adalah sebesar 137,5% (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Koma Lima Persen*). Meskipun capaian kinerja telah mencapai target akhir renstra, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur akan tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka mencapai target yang telah ditentukan

Meskipun secara umum pencapaian kinerja berjalan sesuai dengan yang direncanakan, tetapi evaluasi mutlak harus dilakukan dalam rangka perbaikan dimasa depan. Perlu dilakukan langkah-langkah *preventif* guna mencegah munculnya permasalahan baik urusan ketenagakerjaan maupun koperasi dan UKM. Fokus perbaikan tidak hanya terhadap indikator-indikator kinerja yang tidak tercapai target kinerja saja, melainkan juga dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja indikator yang telah tercapai targetnya.

2.1.3.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2

Sesuai amanat Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk setiap Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka sesuai Instruksi Gubernur dikeluarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Belitung Timur.

Kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak difokuskan pada tiga hal, yaitu pencegahan, pelayanan dan penanganan masalah yang dihadapi anak. Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, capaian ditandai dengan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya.

Tabel 2. 76 Capaian Sasaran Urusan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia	100	100	100	100	100	100
2	Anugrah Parahita Ekapraya	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Utama
3	Kabupaten Layak Anak	Pratama	Madya	Madya	Madya	Nindya	Utama

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, tahun 2023

Tabel 2. 77 Target dan Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia	100	100	100
2	Anugrah Parahita Ekapraya	Pratama	Pratama	Pratama
3	Kabupaten Layak Anak	Pratama	Madya	Madya

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, tahun 2023

Penjelasan capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Indikator Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia

Indikator tersebut dimaksudkan Sistem data gender yang tersedia saat ini ada 1 sistem yaitu sistem data gender Simfoni (Sistem Informasi Online) yang berasal dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sistem tersebut merujuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk tahun 2023 target indikator masih sama dikarenakan indikator yang digunakan merupakan indikator baru yang mengacu pada Renstra 2021-2026. Pada tahun 2022 dan 2023 kegiatan ini difokuskan dengan pagu anggarannya nol. Walau kegiatan tersebut tidak memiliki anggaran, tidak mempengaruhi dalam pengukuran capaian kinerjanya karena Sistem data gender ini sebagai sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak yang diakses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan tujuan untuk menuju 1 data yaitu data kekerasan nasional. Yang mana di dalamnya mencakup data jumlah anak, jumlah kasus anak dan perempuan serta data jumlah layanan yang diberikan khusus dalam lingkup Kabupaten Belitang Timur. Adapun formulasi pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:

Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia	=	$\frac{\text{Sistem Data Gender dan anak yang dikelola}}{\text{Jumlah Sistem data Gender yang Tersedia}}$	x	100%	=	$\frac{1}{1}$	x	100%	=	100%

2. Indikator Anugerah Parahita Ekapraya

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kementrian/lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG). Untuk Pertama kalinya Belitung Timur mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2021 dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), pelaksanaan penilaian dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali. Dan sekarang untuk yang kedua kalinya Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mendapatkan penghargaan kembali yaitu penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dengan predikat **“Pratama”** Penghargaan ini terkait dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mensinergikan tujuh aspek pembangunan melalui strategi pengarusutamaan gender. Tujuh indikator penilaian yang melatar belakangi diraihnya penghargaan tersebut adalah komitmen berupa perda, kebijakan berupa RPJMD dan Renstra OPD, kelembagaan yaitu pembentukan Pokja, SDM dan anggaran, alat analisis gender, data gender, dan partisipasi masyarakat. Adapun upaya yg dilakukan untuk mendapat penghargaan melalui proses penilaian APE tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan Launching Petunjuk Teknis Penyelenggaraan APE di tingkat Kabupaten;
- b. Bimbingan Teknis APE;
- c. Pelaksanaan Evaluasi (Pembuatan akun oleh Provinsi untuk Kabupaten);
- d. Persiapan APE terdiri dari Rakor Pokja PUG Kabupaten dan Rapat persiapan;
- e. Pengisian E-APE dari KEMENPPPA;
- f. Evaluasi Mandiri (EM) Pengisian E-APE dari Provinsi; dan
- g. Penilaian APE melalui pelaksanaan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) APE Tahun 2023 melalui zoom meeting.

3. Indikator Anugrah Parahita Ekapraya

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Tujuan KLA secara umum adalah untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Secara Khusus tujuan KLA adalah untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota. Penghargaan Kabupaten Layak Anak dibagi beberapa tingkatan, yaitu tingkat Pratama, Madya, Nindya, dan Utama. Tahun 2022, Hasil penilaian KLA berdasarkan Surat Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Nomor B-360/D.PHA1/TK.05/7/2022 tanggal 13 Juli 2022 perihal Undangan Malam Penganugerahan Apresiasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2022, Kabupaten Belitung Timur mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2022 dengan bobot nilai 685,30 dengan kata lain adanya peningkatan dari predikat *Pratama* ke predikat *Madya*. Penganugerahan KLA berdasarkan Surat Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Nomor B-392/D.PHA/TK.05/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal Pengambilan Piagam dan Piala Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2022.

Pada tahun 2023 penghargaan didapat kembali dengan Kategori Madya. Predikat ini masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, yang mana diterima oleh Kabupaten Belitung Timur dalam usaha pembentukan Kabupaten/Kota layak anak.

Adapun upaya yg dilakukan untuk mendapatkan penghargaan melalui proses penilaian KLA sebagai berikut:

- a. Persiapan KLA terdiri dari Rakor Gugus tugas KLA Kabupaten dan Rapat persiapan per kluster;
- b. Pengisian E-KLA dari KEMENPPA;
- c. Evaluasi Pengisian E-KLA dari Provinsi;

- d. Penilaian KLA melalui pelaksanaan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) KLA Tahun 2023

2.1.3.2. Pangan

3

Pembangunan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar. Hal ini memberikan landasan dan peluang kepada daerah untuk mengembangkan sistem ketahanan pangan semaksimal mungkin, antara lain melalui jaminan penyediaan pangan dan memberdayakan masyarakat melalui Program Yuk Ke Ume. Yuk Ke Ume secara harfiah dalam Bahasa Belitung merupakan ajakan untuk pergi ke kebun, sejak dulu masyarakat lokal Belitung Timur memiliki kebun atau bekerja di kebun. Secara filosofis, program Yuk Ke Ume merupakan upaya untuk mengajak masyarakat untuk membantu pencapaian ketahanan pangan baik ketahanan pangan keluarga (bersifat subsisten/pemenuhan kebutuhan sendiri) dan ketahanan pangan daerah (bersifat komersil dan produksi massal). Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur urusan pangan berkontribusi mengolah ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Bentuk pelaksanaan dari inovasi ini di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur adalah melalui kegiatan pekarangan pangan lestari (P2L) dengan Gerakan menanam Pangan di pekarangan (GEMPAR). Dalam rangka mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal guna mewujudkan hidup sehat, aktif dan produktif salah satunya dapat melalui optimalisasi pemanfaatan lahan. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur sampai dengan saat ini telah melaksanakan kegiatan pekarangan pangan lestari (P2L). kegiatan P2L ini dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga dan mendukung program pemerintah penanganan lokasi prioritas intervensi penurunan *stunting*. Kegiatan ini dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, lahan tidur dan lahan kosong yang tidak produktif, sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga, serta berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Sasaran lokasi kegiatan P2L ini adalah di 7 Kecamatan dengan kelompok penerima manfaat yang tersebar di semua desa yang ada di 7 Kecamatan

Kabupaten Belitung Timur dengan calon lokasi dan calon penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Kegiatan P2L ini merupakan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat untuk budidaya tanaman sayuran melalui kegiatan sarana pembibitan, pengembangan demplot, pertanaman, dan penanganan pasca panen. Upaya pencapaian kegiatan tersebut dilakukan melalui pendekatan pengembangan pertanian berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya lokal, pemberdayaan masyarakat dan berorientasi pasar. serta menyediakan sarana dan prasarana sebagai stimulus untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan terwujud bila terpenuhinya kondisi setiap saat tersedia pangan yang cukup (baik jumlah maupun mutu), aman, merata dan terjangkau dan setiap saat rumah tangga mampu mengkonsumsi pangan yang cukup, aman, bergizi dan sesuai pilihannya untuk menjalani hidup sehat dan produktif. Implikasi kebijakan dari konsep pangan ini adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban menjamin akses pangan secara fisik dan ekonomi.

Tabel 2. 78 Capaian Sasaran Urusan Pangan Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Ketersediaan Energi Perkapita (Kkal/Kapita/hari)	2.637	2.549	2.596	2.597	2.623	2.650
2	Ketersediaan Protein Perkapita (Gram/kapita/hari)	130,21	149,38	150,84	72,93	78,58	80,41
3	Penguatan Cadangan Pangan (Ton)	30	40	40	50	60	70
4	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Angka)	82,30	82,70	85,4	85,40	86,50	87,50
5	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Persen)	95,24	97,42	86,43	90	91	92
6	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rentan Rawan Pangan (Persen)	-0,56	0,61	-5,12	0,5	0,5	0,5

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2023

Tabel 2. 79 Target dan Capaian Urusan Pangan Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Ketersediaan Energi Perkapita (Kkal/Kapita/hari)	2.546	2.596	101,96
2	Ketersediaan Protein Perkapita (Gram/kapita/hari)	69,46	150,84	217,16
3	Penguatan Cadangan Pangan (Ton)	40	40	100
4	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Angka)	84,40	85,4	101,18
5	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Persen)	89	86,43	97,11
6	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rentan Rawan Pangan (Persen)	0,5	-5,12	-10,24

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2023

Penjelasan capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1) Ketersediaan Energi Perkapita

Energi merupakan salah satu hasil metabolisme karbohidrat, protein dan lemak. Energi berfungsi sebagai zat tenaga untuk metabolisme, pertumbuhan, pengaturan suhu dan kegiatan fisik. Rata-rata angka kecukupan energi bagi Masyarakat Indonesia sebesar 2.100 kilo kalori per kapita per hari pada Tingkat konsumsi. Energi harus sesuai dengan kebutuhan tubuh untuk mencegah setiap penyakit akibat gangguan metabolisme dan agar tidak terjadi penimbunan energi didalam tubuh dalam bentuk lemak. Sumber energi berkonsentrasi tinggi adalah makanan yang banyak mengandung lemak dan karbohidrat. Keseimbangan energi tercapai apabila energi yang masuk kedalam tubuh melalui makanan sama dengan energi yang dikeluarkan. Tingkat kecukupan energi pada setiap orang berbeda-beda tergantung dengan jenis kelamin, umur dan aktifitasnya. Ketersediaan perkapita adalah sejumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk unsur gizinya.

Setiap manusia memerlukan makanan yang merupakan sumber zat gizi. Setiap komponen zat gizi memiliki peran masing-masing bagi kelangsungan fungsi tubuh yang optimal. Zat gizi adalah adalah zat-zat dari bahan pangan yang bermanfaat bagi kesehatan. Berdasarkan jenisnya zat gizi terbagi menjadi dua yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Energi termasuk ke dalam zat gizi

makro. Energi dalam tubuh manusia berasal dari hasil pembakaran karbohidrat, protein dan lemak. Oleh karena itu untuk mencukupi kebutuhan energinya, pemasukan zat-zat makanan harus tercukupi. Formulasi perhitungan ketersediaan energi perkapita, adalah sebagai berikut:

Ketersediaan Energi Perkapita =	$\frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan Kalori}}{\text{X BDD}}$
	100

Formulasi perhitungan capaian ketersediaan energi perkapita diperoleh dari penyusunan dokumen ketahanan pangan, yaitu dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM). NBM adalah tabel yang menggambarkan penyediaan/pengadaan dan penggunaan/pemanfaatan pangan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, digunakan untuk menyediakan data dan informasi jumlah ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi penduduk dalam bentuk volume (kg per kapita per tahun atau gram per kapita per tahun) maupun zat gizi (energi, protein, dan lemak).

Kinerja instansi pemerintah diukur dengan membandingkan capaian kinerja yang diperoleh tahun ini dengan capaian kinerja dari tahun sebelumnya.

Capaian kinerja sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur pada indikator sasaran ketersediaan energi perkapita apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang memiliki Tingkat capaian 102,12%, maka capaian kinerja sasaran pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,16%, dengan Tingkat capaian kinerja 101,96%.

Selain dengan membandingkan capaian kinerja dari tahun sebelumnya juga dilakukan dengan membandingkan terhadap target nasional. Angka ketersediaan energi perkapita tahun 2023 berasal dari hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan tahun 2022 menunjukkan bahwa kondisi ketersediaan energi perkapita di wilayah Kabupaten Belitung Timur sudah melebihi angka rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 sebesar 2.400 kkal/kapita/hari untuk energi. Perbandingan antara ketersediaan energi di Kabupaten Belitung Timur dengan ketersediaan energi nasional, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 80 Perbandingan Angka Ketersediaan Energi di Kabupaten Belitung Timur dengan Angka Nasional

Ketersediaan Energi Perkapita Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 (kkal/kapita/hari)	Ketersediaan Energi Perkapita Nasional (kkal/kapita/hari)	Persentase Terhadap WNPG
2.596	2.400	108,17%

Sumber: Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG)

Ketersediaan energi jika dibandingkan dengan WNPG sudah melebihi angka anjuran yaitu 108,17%. Hal ini menandakan bahwa Tingkat ketersediaan per kapita energi di Kabupaten Belitung Timur sudah melebihi dari angka anjuran.

Hasil analisis terhadap situasi ketersediaan pangan di Kabupaten Belitung Timur dengan menggunakan data Neraca Bahan Makanan (NBM) terhadap 9 (sembilan) kelompok bahan pangan menunjukkan bahwa ketersediaan pangan dalam bentuk energi di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 sebesar 2.596 kkal/kapita/hari. Ketersediaan energi ini lebih tinggi dibandingkan target kinerja indikator sasaran ketersediaan energi per kapita di tahun 2023 yaitu 2.546 kkal/kapita/hari dengan capaian kinerja sebesar 101,96%.

Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tingkat ketersediaan diketahui jika Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat ketersediaan adalah sebesar 2.400 kkal/kapita/hari. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2023 angka ini sudah melebihi angka anjuran. Ketersediaan energi ini berarti pemenuhan gizi masyarakat di Kabupaten Belitung Timur telah mencukupi untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

Tabel 2. 81 Persentase Ketersediaan Energi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

Ketersediaan	2023 (kkal/kapita/th)	Persentase (%)
Energi	2.596	100,0
- Nabati	1.901	73
- Hewani	694	27

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2023

Ketersediaan energi dapat berasal dari kontribusi pangan nabati dan pangan hewani. Tahun 2023 kontribusi ketersediaan energi di Kabupaten Belitung Timur masih didominasi oleh kelompok bahan pangan sumber nabati yaitu sebesar 1.901 kkal/kapita/hari atau 73%, sedangkan pangan sumber hewani hanya menyumbang 27% atau 694 kkal/kapita/hari. adapun penyumbang

terbesar sumber ketersediaan energi dari pangan sumber nabati adalah kelompok padi-padian khususnya beras.

Tabel 2. 82 Ketersediaan Energi Berdasarkan Kelompok Bahan Makanan Tahun 2023

Kelompok Bahan Makanan	Ketersediaan per kapita	Persentase
	Energi (kkal/hari)	Energi (%)
Padi-padian	1200	46,26
Makanan berpati	51	1,97
Gula	108	4,16
Buah/Biji Berminyak	77	2,97
Buah-Buahan	63	2,43
Sayur-Sayuran	57	2,20
Daging	130	5,01
Telur	49	1,89
Susu	8	0,31
Ikan	505	19,47
Minyak dan Lemak	346	13,34

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2023

Kelompok pangan penyumbang ketersediaan energi terbesar adalah kelompok padi-padian yaitu sebesar 1.200 kkal/kapita/hari atau 46,26%, penyumbang ketersediaan energi terbesar berikutnya adalah kelompok ikan sebesar 505 kkal/kapita/hari atau 19,47%, dan kelompok minyak dan lemak sebesar 346 kkal/kapita/hari atau 13,34%. Sementara itu kelompok pangan yang memberikan kontribusi terkecil adalah pada ketersediaan energi adalah kelompok makanan berpati 51 sebesar kkal/kapita/hari atau 1,97%, kelompok telur 49 kkal/kapita/hari atau 1,89%, dan kelompok susu 8 kkal/kapita/hari atau 0,31%.

Maka diketahui jika jumlah ketersediaan energi di Kabupaten Belitung Timur masih terfokus pada penyediaan energi dari pangan sumber karbohidrat khususnya kelompok padi-padian (beras). Sedangkan pangan sumber karbohidrat lainnya seperti kelompok makanan berpati, gula dan lain-lain tidak terlalu besar kontribusinya sebagai sumber energi. Ketersediaan energi dari pangan sumber protein paling banyak diperoleh dari kelompok ikan dan ketersediaan energi dari pangan sumber lemak paling banyak diperoleh dari kelompok minyak dan lemak.

Meskipun ketersediaan energi per kapita masyarakat Kabupaten Belitung Timur sudah terpenuhi bahkan melebihi dari anjuran WNPg, akan tetapi nilai ketersediaan energi tersebut masih didominasi oleh kelompok padi-padian (beras) sebagai sumber karbohidrat utama. Selain itu, sebagian besar

ketersediaan pangan utama di Kabupaten Belitung Timur masih didatangkan dari luar daerah (impor) atau sekitar 80%. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan produksi dan ketersediaan energi dari kelompok pangan berpati lainnya seperti umbi-umbian dan lain-lain serta kelompok pangan sayur dan buah.

2) Ketersediaan Protein Perkapita

Protein berfungsi sebagai energi, zat pembangun dan zat pengatur di dalam tubuh. Fungsi protein adalah untuk Menyusun struktur jaringan dan sel dalam tubuh. Protein terdiri dari 20 jenis asam amino, baik asam amino esensial maupun asam amino non esensial. Setiap manusia memerlukan makanan yang merupakan sumber zat gizi. Setiap komponen zat gizi memiliki peran masing-masing bagi kelangsungan fungsi tubuh yang optimal. Zat gizi adalah zat-zat dari bahan pangan yang bermanfaat bagi kesehatan. Berdasarkan jenisnya zat gizi terbagi menjadi dua yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Protein termasuk ke dalam zat gizi makro. Protein terdiri dari 2 macam yaitu protein hewani dan protein nabati. Secara umum kualitas protein hewani lebih baik dibandingkan dengan protein nabati dan menurut FAO RAFA, sebaiknya kontribusi energi protein hewani adalah 15% dari total energi. Ketersediaan perkapita adalah sejumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk unsur gizinya. Ketersediaan Protein per kapita adalah ketersediaan bahan makanan per kapita dalam bentuk kandungan nilai gizinya dengan satuan gram protein. Formulasi perhitungan ketersediaan protein perkapita, adalah sebagai berikut:

Ketersediaan Protein Perkapita=	$\frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari}}{\text{BDD}} \times \text{Kandungan Kalori X}$
	100

Formulasi perhitungan capaian ketersediaan protein perkapita diperoleh dari penyusunan dokumen ketahanan pangan, yaitu dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM). NBM adalah tabel yang menggambarkan penyediaan/pengadaan dan penggunaan/pemanfaatan pangan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, digunakan untuk menyediakan data dan informasi jumlah ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi penduduk dalam bentuk volume (kg per kapita per tahun atau gram per kapita per tahun) maupun zat gizi (energi, protein, dan lemak).

Kinerja instansi pemerintah diukur dengan membandingkan capaian kinerja yang diperoleh tahun ini dengan capaian kinerja dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. 83 Perbandingan Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan 2023

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2	Ketersediaan Protein Perkapita	gram/kapita/hari	66,15	149,38	225,82	69,46	150,84	217,16

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2023

Capaian kinerja sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur pada indikator sasaran ketersediaan protein perkapita apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang memiliki tingkat capaian 225,82%, maka capaian kinerja sasaran pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 8,66%, dengan Tingkat capaian kinerja 217,16%.

Selain dengan membandingkan capaian kinerja dari tahun sebelumnya juga dilakukan dengan membandingkan terhadap target nasional. Angka ketersediaan protein perkapita tahun 2023 berasal dari hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan tahun 2022 menunjukkan bahwa kondisi ketersediaan energi perkapita di wilayah Kabupaten Belitung Timur sudah melebihi angka rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 sebesar 63 gram/kapita/hari untuk energi. Perbandingan antara ketersediaan protein di Kabupaten Belitung Timur dengan rekomendasi angka ketersediaan protein secara nasional, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 84 Perbandingan Angka Ketersediaan Protein di Kabupaten Belitung Timur dengan Angka Nasional

Ketersediaan Energi Perkapita Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 (kkal/kapita/hari)	Ketersediaan Energi Perkapita Nasional (kkal/kapita/hari)	Persentase Terhadap WNPG
150,84	63	239,43%

Sumber: Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG)

Ketersediaan protein jika dibandingkan dengan WNPG sudah melebihi angka anjuran yaitu 239,43%. Hal ini menandakan bahwa Tingkat ketersediaan per kapita protein di Kabupaten Belitung Timur sudah melebihi dari angka anjuran.

Protein terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu protein nabati dan hewani, karena Kabupaten Belitung Timur merupakan daerah kepulauan maka tingkat konsumsi pangan hewani khususnya ikan sangat tinggi.

Hasil analisis terhadap situasi ketersediaan pangan di Kabupaten Belitung Timur dengan menggunakan data Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2023 terhadap 9 (sembilan) kelompok bahan pangan menunjukkan bahwa ketersediaan protein sebesar 150,84 Gram/kapita/hari. Ketersediaan protein di Kabupaten Belitung Timur lebih tinggi dibandingkan ketersediaan protein sebagaimana anjuran Widyakarya Pangan Nasional dan Gizi (WNPG) sebesar 63 gram/kapita/hari maupun target kinerja di Tahun 2023 yaitu 69,46 Gram/kapita/hari.

Tabel 2. 85 Kontribusi Ketersediaan Protein Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

Ketersediaan	(gram/kapita/th)	Persentase (%)
Protein	150,84	100,00
- Nabati	40,03	26,54
- Hewani	110,81	73,46

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2023

Adapun kelompok pangan sumber protein hewani berkontribusi sebesar 110,81 gram/kapita/hari atau 73,46% sedangkan kelompok pangan sumber protein nabati berkontribusi sebesar 40,03 gram/kapita/hari atau 26,54%. Sehingga Protein hewani menjadi penyumbang terbesar terhadap tingginya ketersediaan protein di Kabupaten Belitung Timur. Adapun sebaran ketersediaan protein Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 86 Ketersediaan Protein Tahun 2023

Kelompok Bahan Makanan	Ketersediaan per kapita	Persentase
	Protein (gram/hari)	Protein (%)
Padi-padian	29,48	19,55
Makanan berpati	0,30	0,20
Gula	0,06	0,04
Buah/Biji Berminyak	6,79	4,50
Buah-Buahan	0,60	0,40
Sayur-Sayuran	2,78	1,84
Daging	8,30	5,50
Telur	3,90	2,59
Susu	0,40	0,27
Ikan	98,21	65,11
Minyak dan Lemak	0,01	0,01
Total	150,84	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa untuk ketersediaan protein, kelompok pangan penyumbang terbesar adalah kelompok ikan yaitu 98,21 gram/kapita/hari atau 65,11% hal ini dikarenakan ketersediaan produk perikanan di Kabupaten Belitung Timur termasuk melimpah. Selain kelompok

ikan, terdapat kelompok daging 8,30 gram/kapita/hari atau 5,50%, telur 3,90 gram/kapita/hari atau 2,59%, dan susu 0,40 gram/kapita/hari atau 0,27% yang juga merupakan pangan sumber protein hewani namun kontribusinya tidak terlalu besar. Sementara itu, pangan sumber protein nabati yang penyumbang terbesar adalah kelompok padi-padian sebesar 29,48 gram/kapita/hari atau 19,55%, sedangkan kelompok buah/biji berminyak tidak terlalu besar kontribusinya yaitu hanya 6,79 gram/kapita/hari atau 4,5% dari total ketersediaan protein. Angka ini sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan ketersediaan protein pada kelompok telur dan susu. Sehingga dari kedua jenis protein yang ada jenis protein hewani menyumbang kontribusi terbesar terhadap ketersediaan protein di Kabupaten Belitung Timur.

Meskipun ketersediaan protein per kapita masyarakat Kabupaten Belitung Timur sudah terpenuhi bahkan melebihi anjuran WNP, akan tetapi nilai ketersediaan protein tersebut masih didominasi oleh protein hewani. Oleh karena itu, ke depan perlu ditingkatkan ketersediaan protein dari kelompok pangan nabati lainnya seperti kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau dan lain-lain melalui peningkatan produksi maupun pengelolaan stok.

3) Penguatan Cadangan Pangan

Cadangan pangan daerah adalah persediaan pangan sebagai Cadangan pangan pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana, keadaan darurat dan gejolak harga pangan tertentu yang bersifat pokok yang signifikan. Sesuai amanat UU 18/2012 tentang Pangan dan PP 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, serta diperkuat dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka sejak 2010 telah dikembangkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, sebagai langkah strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam/sosial dan kondisi kemanusiaan lainnya. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam mendukung ketahanan pangan di tingkat masyarakat khususnya untuk mengatasi kerawanan pangan yang bersifat transien yang disebabkan oleh bencana alam yang kecenderungannya semakin sering terjadi dan bersifat lokal. Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah juga sebagai upaya antisipasi dalam hal stabilisasi harga serta pelaksanaan bantuan pangan. Sistem cadangan pangan pemerintah daerah memungkinkan pemerintah daerah dapat merespon masalah

ketahanan pangan secara lebih cepat, tanggap dan fleksibel. Formulasi perhitungan penguatan cadangan pangan, adalah sebagai berikut:

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	=	80% x cadangan beras total provinsi x rasio jumlah penduduk kabupaten/kota terhadap jumlah produksi provinsi

Kinerja instansi pemerintah diukur dengan membandingkan capaian kinerja yang diperoleh tahun ini dengan capaian kinerja dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. 87 Perbandingan Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan 2023

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
3	Penguatan Cadangan Pangan	Ton	30	40	133,33	40	40	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2023

Capaian kinerja sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur pada indikator sasaran penguatan cadangan pangan apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang memiliki tingkat capaian 133,33%, maka capaian kinerja sasaran pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 33,33%, dengan Tingkat capaian kinerja 100%.

Berdasarkan Permentan No. 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Cadangan Pangan Kabupaten Belitung Timur dengan jumlah penduduk sebesar 128.254 jiwa adalah sebesar 45 ton yang didistribusikan kedalam target tahunan sebesar 10 ton per tahun. Pada Tahun 2023, tidak ada alokasi anggaran untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, sehingga di Tahun 2023, jumlah pengadaan CPPD masih tetap sama dengan Tahun 2022 yaitu sebesar 40 ton. Dengan tidak adanya alokasi pengadaan CPPD tahun ini, maka realisasi tidak menunjukkan adanya peningkatan maupun penurunan dibandingkan dengan Tahun 2022. Meskipun demikian, jumlah tersebut sudah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pengelolaan CPPD Kabupaten Belitung Timur berpedoman pada Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan tetap memperhatikan peraturan-peraturan terbaru lainnya yang dikeluarkan oleh

pemerintah pusat tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Dalam hal pengelolaan CPPD tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melakukan kerjasama dengan Perum Bulog Cabang Bangka dan KCP Belitung. Dalam pengelolaan CPPD, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur mempercayakan penyimpanan dan pengelolaan cadangan berasnya di gudang Bulog KCP Belitung dan berdasarkan perjanjian kerjasama. Surat perjanjian Kerjasama yang telah disepakati antara Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dengan Perum Bulog KCP Belitung mengatur tentang stock opname cadangan beras. Stock opname atau monitoring Cadangan beras pemerintah dilakukan untuk memastikan jumlah dan kualitas Cadangan beras yang dikelola Perum Bulog KCP Belitung sesuai dengan kesepakatan.

Pada tahun 2023 tidak ada penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, sehingga posisi stok CPPD Kabupaten Belitung Timur di Gudang Bulog KCP Belitung masih sama dengan akhir tahun 2022 yaitu sebesar 35.452 kg. Hal ini yang menjadi salah satu alasan tidak adanya alokasi pengadaan CPPD di tahun 2023, sehingga lebih difokuskan untuk melakukan sosialisasi dan penyaluran stok CPPD yang ada.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Perbadan Pangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan perubahan pada Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan cara penghitungan jumlah CPPD Kabupaten dengan mempertimbangkan persentase prevalensi kerawanan pangan, Indeks Kerawanan Bencana (IRBI), produksi dan konsumsi beras masyarakat di masing-masing daerah. Selain itu juga terdapat penambahan sasaran penyaluran CPPD yaitu tidak hanya untuk mengatasi kerawanan pangan transien akibat bencana, namun juga untuk pemberian bantuan pangan, antisipasi dan stabilisasi harga pangan.

Diharapkan dengan adanya penyesuaian terhadap konteks Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2017 sesuai dengan yang tersebut diatas, maka stok CPPD Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di gudang Bulog KCP Belitung dapat segera tersalurkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

4. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pentingnya pencapaian skor PPH dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan dengan membudayakan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

Untuk menjalani aktivitas fisik secara normal, setiap individu membutuhkan gizi yang seimbang sesuai dengan kebutuhannya. Pemenuhan tersebut harus dilakukan sejak dini karena masalah gizi dapat terjadi sejak dalam kandungan. Salah satu syarat untuk memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang adalah dengan mengonsumsi beranekaragam jenis pangan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

Diversifikasi pangan merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar memvariasikan makanan yang dikonsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis makanan saja. Hal ini bertujuan untuk memperoleh nutrisi dan sumber gizi yang lebih beragam karena manusia memerlukan berbagai jenis makanan untuk dapat memenuhi kecukupan gizinya yaitu sekitar 40 jenis zat gizi yang didapat dari berbagai jenis makanan dan minuman.

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. PPH terdiri atas susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

Pola Pangan Harapan (PPH) dapat digunakan untuk mengetahui pola konsumsi pangan masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas atau mutunya. Volume atau jumlah konsumsi pangan dapat diketahui dari energi aktualnya sedangkan kualitas keberagaman konsumsi pangan dapat dilihat dari skor Pola Pangan Harapan, dimana semakin tinggi skor PPH maka kualitas konsumsi pangan semakin baik karena tingkat keberagaman konsumsi pangan semakin tinggi.

Formulasi perhitungan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH), adalah sebagai berikut:

$\text{Prosentase (\%) AKG} = \frac{\text{Energi masing-masing komoditas}}{\text{Angka Kecukupan Gizi}} \times 100\%$

Formulasi perhitungan capaian pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) tahun 2023 diperoleh dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2023 oleh Badan Pusat Statistik yang kemudian diolah menggunakan aplikasi Harmonisasi Analisis PPH data Susenas, dan survei mandiri oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur terhadap rumah tangga yang sudah disampling secara acak dengan berdasarkan pengelompokkan Tingkat pendapatan rumah tangga. Sejak tahun 2015 sampai saat ini perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih menggunakan data Susenas.

Kinerja instansi pemerintah diukur dengan membandingkan capaian kinerja yang diperoleh tahun ini dengan capaian kinerja dari tahun sebelumnya.

Capaian kinerja sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur pada indikator sasaran pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang memiliki tingkat capaian 99,28%, maka capaian kinerja sasaran pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,9%, dengan tingkat capaian kinerja 101,18%.

Selain dengan membandingkan capaian kinerja dari tahun sebelumnya juga dilakukan dengan membandingkan terhadap target nasional. Angka pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) Tahun 2023 berasal dari hasil perhitungan angka kecukupan energi (AKE) tingkat konsumsi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 sebesar 2.100 kkal/kapita/hari, untuk angka kecukupan gizi (AKG) berdasarkan kuantitas mengikuti hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 sebesar 57 gram/kapita/hari. Kondisi pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) di wilayah Kabupaten Belitung Timur sudah melebihi angka rekomendasi dari Peraturan Menteri Kesehatan dan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012. Perbandingan antara skor pola pangan harapan (PPH) Kabupaten Belitung Timur dengan ketersediaan energi nasional, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2. 88 Perbandingan skor pola pangan harapan (PPH)
Kabupaten Belitung Timur dengan Angka Nasional**

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Kapita/Hari		Standar PPH		Capaian		Konsumsi Energi Per Kapita/Hari (Nasional)
		kcal	%AKE	Bobot	Skor	Skor AKE	Skor PPH	kcal
1	Padi-Padian	1.150,3	54,8	0,5	25,0	27,4	25,0	1.050,0
2	Umbi-Umbian	42,2	2,0	0,5	2,5	1,0	1,0	126,0
3	Pangan Hewani	385,1	18,3	2,0	24,0	36,7	24,0	252,0
4	Minyak dan Lemak	297,3	14,2	0,5	5,0	7,1	5,0	210,0
5	Buah/Biji Berminyak	23,3	1,1	0,5	1,0	0,6	0,6	63,0
6	Kacang-Kacangan	39,8	1,9	2,0	10,0	3,8	3,8	105,0
7	Gula	68,0	3,2	0,5	2,5	1,6	1,6	105,0
8	Sayur dan Buah	102,6	4,9	5,0	30,0	24,4	24,4	126,0
9	Lain-Lain	62,6	3,0			-	-	63,0
	Total	2.171,2	103,4		100	102,5	85,4	2.100,00

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2023

Skor pola Pangan harapan (PPH) jika dibandingkan dengan WNPG sudah melebihi angka anjuran yaitu 85,4 atau 101,18%. Hal ini menandakan bahwa tingkat ketersediaan per kapita energi di Kabupaten Belitung Timur sudah melebihi dari angka anjuran.

Pencapaian skor PPH Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) adalah sebesar 85,4. Jika dibandingkan dengan skor PPH ideal sebesar 100 maka angka ini masih jauh dari ideal. Secara kuantitatif, jumlah konsumsi pangan Masyarakat Belitung timur sudah baik yaitu 2.171 kkal/kapita/hari dan sudah melebihi angka anjuran energi harian yang telah ditetapkan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari. Akan tetapi konsumsi pangan masyarakat belum beragam karena kebutuhan energi harian hanya dipenuhi dari beberapa kelompok pangan saja. Hal ini dapat diketahui dari skor PPH sebesar 85,4 yang masih jauh dari skor PPH ideal sebesar 100. Namun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 84,4 maka skor PPH Kabupaten Belitung Timur lebih tinggi dengan capaian 101,18%

Tabel 2. 89 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Kapita/Hari		Standar PPH		Capaian	
		kcal	%AKE	Bobot	Skor	Skor AKE	Skor PPH
1	Padi-Padian	1.150,3	54,8	0,5	25,0	27,4	25,0
2	Umbi-Umbian	42,2	2,0	0,5	2,5	1,0	1,0
3	Pangan Hewani	385,1	18,3	2,0	24,0	36,7	24,0
4	Minyak dan Lemak	297,3	14,2	0,5	5,0	7,1	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	23,3	1,1	0,5	1,0	0,6	0,6
6	Kacang-Kacangan	39,8	1,9	2,0	10,0	3,8	3,8
7	Gula	68,0	3,2	0,5	2,5	1,6	1,6
8	Sayur dan Buah	102,6	4,9	5,0	30,0	24,4	24,4
9	Lain-Lain	62,6	3,0			-	-
	Total	2.171,2	103,4		100	102,5	85,4

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2023

Jika dilihat dari sisi kuantitas, jumlah konsumsi masyarakat Belitung Timur adalah sebesar 2.171,2 kkal/kapita/hari. Angka ini sudah melebihi angka anjuran energi harian yang telah ditetapkan melalui Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) Tahun 2018 sebesar 2.100 kkal/kapita/hari. Akan tetapi konsumsi pangan masyarakat belum beragam karena kebutuhan energi harian hanya dipenuhi dari beberapa kelompok pangan saja. Hal ini dapat diketahui dari skor PPH yang masih 85,4.

Tabel 2. 90 Selisih/GAP Skor PPH Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

Kelompok Pangan	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH	GAP
Padi-Padian	27,4	25,0	25,0	2,4
Umbi-Umbian	1,0	2,5	1,0	-1,5
Pangan Hewani	36,7	24,0	24,0	12,7
Minyak dan Lemak	7,1	5,0	5,0	2,1
Buah/Biji Berminyak	0,5	1,0	0,5	-0,5
Kacang-Kacangan	3,8	10,0	3,8	-6,2
Gula	1,6	2,5	1,6	-0,9
Sayur dan Buah	24,5	30,0	24,5	-5,5
Lain-Lain				
Total	102,6		85,4	

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terjadi peningkatan skor PPH dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi masih perlu ditingkatkan untuk mencapai skor PPH ideal sebesar 100. Salah satu penyebab skor PPH masih rendah adalah karena konsumsi masyarakat belum beragam, di satu sisi terdapat beberapa kelompok pangan yang sudah

melampaui skor maksimal namun juga terdapat kelompok pangan yang masih jauh dari skor maksimal.

Kelompok pangan yang sudah melampaui skor maksimal adalah kelompok padi-padian, kelompok pangan hewani serta kelompok minyak dan lemak. Hal ini dapat dilihat pada tabel diatas, dimana selisih atau GAP untuk kelompok pangan hewani adalah yang paling tinggi yakni 12,7. Hal ini menandakan bahwa konsumsi kelompok pangan hewani sudah sangat tinggi. Sedangkan untuk kelompok padi-padian dan kelompok minyak dan lemak selisihnya tidak terlalu banyak sehingga kelebihan konsumsi di kedua kelompok pangan tersebut tidak terlalu tinggi. Sementara itu kelompok pangan yang paling rendah selisihnya adalah kelompok kacang-kacangan dan kelompok sayur dan buah. Sehingga kedua kelompok pangan tersebut harus lebih ditingkatkan konsumsinya.

Untuk meningkatkan skor ketiga kelompok pangan yang masih rendah tersebut bisa dilakukan melalui penanaman tanaman sayur, umbi dan kacang-kacangan di pekarangan sesuai dengan konsep kegiatan pekarangan pangan lestari (P2L). Selain itu, konsumsi buah dan sayur harus dibiasakan sejak bayi masih didalam kandungan, sehingga ibu hamil sangat dianjurkan untuk mengonsumsi lebih banyak sayur dan buah selama masa kehamilannya.

Tabel 2. 91 Situasi Pola Konsumsi Energi Masyarakat Belitung Timur

No	Kelompok Pangan	Rata-Rata Konsumsi		Kontribusi Pangan Strategis		
		gram/hari	kkal/hari	Jenis Pangan	kkal/hari	%
1	Padi-Padian	280,9	1.150,0	Beras	897,4	78,0
2	Umbi-Umbian	35,1	42,0	Singkong	28,5	67,9
3	Pangan Hewani	205,3	385,0	Daging Unggas	116,5	30,3
4	Minyak dan Lemak	33,1	297,0	Minyak Lainnya	282,4	95,1
5	Buah/ Biji Berminyak	4,0	23,0	Kemiri	11,7	50,9
6	Kacang-Kacangan	16,8	40,0	Kacang Kedelai	38,2	95,5
7	Gula	18,1	68,0	Gula Pasir	64,8	95,3
8	Sayur dan Buah	184,8	103,0	Buah	55,6	54,0
9	Lain-Lain	79,9	63,0	Minuman	53,6	85,1
	Total		2.171,00			

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2023

Jika dilihat dari konsumsi energi per kelompok pangan, diketahui jika pada kelompok padi-padian jenis pangan yang paling banyak dikonsumsi adalah beras yaitu 897,4 kkal/kapita/hari atau 78% dari total konsumsi ideal di kelompok padi-padian. Selanjutnya di kelompok umbi-umbian adalah

singkong yaitu 28,5 kkal/kapita/hari (67,9%), di kelompok pangan hewani adalah daging unggas sebesar 116,5 kkal/kapita/hari (30,3%), di kelompok minyak dan lemak adalah minyak lainnya yaitu minyak goreng sawit sebanyak 282,4 kkal/kapita/hari atau 95,1%.

Di kelompok buah/biji berminyak konsumsi paling banyak menyumbang energi adalah kemiri yaitu 11,7 kkal/kapita/hari atau 50,9%, di kelompok kacang-kacangan adalah kacang kedelai dengan jumlah konsumsi sebesar 38,2 kkal/kapita/hari (95,5%), di kelompok gula adalah gula pasir yaitu sebesar 64,8 kkal/kapita/hari atau 95,3%, di kelompok sayur dan buah adalah buah dengan jumlah konsumsi 55,6 kkal/kapita/hari (54%) dan di kelompok lain-lain adalah minuman dengan jumlah konsumsi 53,6 kkal/kapita/hari (85,1%).

Tabel 2. 92 Situasi Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Belitung Timur

No	Kelompok Pangan	Rata-Rata Konsumsi		Kontribusi Pangan Strategis		
		gr/hari	kg/Tahun	Jenis Pangan	kg/Tahun	%
1	Padi-Padian	280,9	102,5	Beras	86,3	84,2
2	Umbi-Umbian	35,1	12,8	Singkong	8,5	66,4
3	Pangan Hewani	205,3	74,9	Ikan	41,9	55,9
4	Minyak dan Lemak	33,1	12,1	Minyak Lainnya	11,4	94,2
5	Buah/Biji Berminyak	4,0	1,5	Kelapa	0,8	53,3
6	Kacang-Kacangan	16,8	6,1	Kacang Kedelai	6	98,4
7	Gula	18,1	6,6	Gula Pasir	6,3	95,5
8	Sayur dan Buah	184,8	67,4	Sayur	36,8	54,6
9	Lain-Lain	79,9	29,1	Minuman	23,9	82,1

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2023

Jika pada tabel 3.20 adalah jenis pangan yang paling banyak dikonsumsi berdasarkan energinya sedangkan pada tabel 3.21 adalah jenis pangan yang paling banyak dikonsumsi dari segi jumlahnya. Sehingga jika dibandingkan dari kesembilan kelompok pangan terdapat 2 kelompok pangan yang berbeda jenis pangan yang paling banyak kontribusinya yaitu kelompok pangan hewani dan kelompok sayur dan buah. Dari segi jumlah, jenis pangan yang paling banyak dikonsumsi pada kelompok pangan hewani adalah ikan yaitu 41,9 kg/tahun atau 55,9% dari total konsumsi kelompok pangan hewani, sementara dari segi energinya, daging unggas yang berkontribusi paling tinggi menyumbang energi di kelompok pangan tersebut.

Sementara di kelompok sayur dan buah, jika dilihat dari segi jumlah maka konsumsi sayur lebih banyak dibandingkan konsumsi buah yaitu 36,8 kg/tahun atau 54,6% sedangkan untuk konsumsi energinya adalah buah yaitu menyumbang energi 54% dari total energi di kelompok tersebut.

Untuk itu, dalam mendukung visi dan misi Bupati Belitung Timur yaitu program inovasi “Yuk Ke Ume” telah dilaksanakan melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan skor PPH di Kabupaten Belitung Timur. P2L adalah kegiatan mengusahakan pekarangan rumah dengan ditanami oleh berbagai macam tanaman seperti sayuran, kacang-kacangan, umbi-umbian serta buah. Dengan melibatkan kelompok wanita tani (KWT) atau kelompok tani dan kelompok masyarakat lainnya. Diharapkan kegiatan ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan konsumsi pangan yang lebih beragam, seimbang, bergizi dan aman. Selain itu, konsumsi buah dan sayur harus dibiasakan sejak bayi masih didalam kandungan, sehingga ibu hamil sangat dianjurkan untuk mengonsumsi lebih banyak sayur dan buah selama masa kehamilannya.

Kegiatan P2L ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga di pekarangan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah atau pekarangan dengan bercocok tanam sayuran dan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga dari hasil pemanfaatan pekarangan sehingga dapat meningkatkan gizi keluarga. Pada akhirnya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan skor PPH sehingga diversifikasi pangan di Kabupaten Belitung Timur dapat tercapai.

4) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Aman untuk dikonsumsi adalah pangan tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia.

Pengawasan keamanan pangan segar merupakan salah satu kegiatan untuk menjamin keamanan pangan daerah yang dilakukan dengan pengawasan PSAT di petani/pelaku usaha. Pengawasan PSAT ini dilakukan melalui pengawasan budidaya (*pre market*), pengawasan panen dan pasca panen PSAT (*post market*). Sebagai deteksi dini keamanan pangan dilakukan pengambilan

sampel produk untuk diuji kandungan residu bahan berbahaya yaitu residu pestisida, residu timbal dan residu E-Coli menggunakan *Rapid Test Kit*.
Formulasi perhitungan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan, adalah sebagai berikut:

$$\text{Pangan Aman} = \frac{\sum \text{Sampel pangan yang aman dikonsumsi}}{\sum \text{Total sampel pangan yang diperdagangkan}} \times 100\%$$

Formulasi perhitungan capaian pengawasan dan pembinaan keamanan pangan diperoleh dari penyusunan dokumen ketahanan pangan, yaitu dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM). NBM adalah tabel yang menggambarkan penyediaan/pengadaan dan penggunaan/pemanfaatan pangan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, digunakan untuk menyediakan data dan informasi jumlah ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi penduduk dalam bentuk volume (kg per kapita per tahun atau gram per kapita per tahun) maupun zat gizi (energi, protein, dan lemak).

Pada tahun 2023, capaian persentase keamanan pangan di Kabupaten Belitung Timur sebesar 97,11%. Nilai capaian ini diperoleh dari pengujian terhadap 193 sampel, yang terdiri dari 64 sampel pengujian residu pestisida, 62 sampel pengujian residu Plumbum (Pb), 35 sampel pengujian Residu mikrobiologi E-coli, 10 sampel pengujian residu Sn (Timah), 10 sampel pengujian residu Salmonella, dan 12 sampel pengujian klorin. Dari 193 sampel yang diuji, pengujian logam berat timbal (Pb) dan uji klorin dinyatakan aman seluruhnya. Sedangkan pada pengujian pestisida hanya 48 sampel yang dinyatakan aman (88,89%) dan pada pengujian bakteri E-coli hanya 18 sampel yang aman (58,06%). Jenis sampel PSAT yang diuji adalah produk sayuran, buah, dan beras yang beredar di Kabupaten Belitung Timur.

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi capaian persentase keamanan pangan di Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan. Pada tahun 2022 capaian persentase keamanan pangan Kabupaten Belitung Timur sebesar 110,70%, sedangkan pada 2023 sebesar 97,11%. Penurunan nilai capaian ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya perbedaan jumlah total sampel yang diuji. Pada tahun 2023 jumlah sampel yang diuji lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2022.

Selain faktor diatas, secara teknis hal ini juga disebabkan fenomena Elnino yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia di tahun 2023, tak terkecuali di Kabupaten Belitung Timur. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap tingginya serangan organisme pengganggu tanaman. Sehingga diperlukan upaya pengendalian hama secara intensif dan terpadu oleh petani. Namun berdasarkan pengamatan di lapangan, masih banyak ditemukan petani/pelaku usaha yang terkesan kurang bijak dalam penerapan penggunaan pestisida bagi tanaman. Hal ini menandakan bahwa masih ada petani yang belum memahami bahaya pestisida dan E-coli bagi kesehatan. Tentunya hal ini juga menjadi tantangan bagi Dinas Pertanian dan Pangan dalam memberikan pemahaman kepada petani akan pentingnya penggunaan pestisida secara bijak.

5) Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rentan Rawan Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalance of Undernourishment (PoU)* merupakan proporsi penduduk yang mengalami kekurangan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi minimum untuk dapat hidup sehat dan aktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Individu dikategorikan sebagai kekurangan konsumsi pangan apabila jumlah asupan energi per hari kurang dari kebutuhan minimum untuk hidup sehat dan aktif. Standar minimum yang digunakan untuk perhitungan PoU disesuaikan dengan kebutuhan kalori individu menurut jenis kelamin, umur pada tinggi badan dan berat badan tertentu serta aktivitas yang dilakukan. Pengkategorian persentase PoU dibagi dalam 5 status yaitu sangat rendah bila $PoU < 2,5\%$, rendah nilai PoU $2,5\%$ s.d 4% , sedang nilai PoU 5% s.d 19% , tinggi nilai PoU 20% s.d 34% dan sangat tinggi nilai PoU $> 35\%$. Adapun perhitungan indikator tersebut diperoleh dari data sekunder Susenas BPS dan angkanya dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional Republik Indonesia.

Formulasi perhitungan Persentase penurunan jumlah penduduk rentan rawan pangan, adalah sebagai berikut:

PoU = Proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk presentase. Perhitungan indikator tersebut diperoleh dari data sekunder Susenas BPS.

Tingkat perkembangan penduduk rawan pangan merupakan gambaran situasi tingkat aksesibilitas pangan masyarakat yang dicerminkan oleh tingkat kecukupan gizi masyarakat. Penyusunan Angka Rawan Pangan didasarkan pada Prevalensi Kekurangan Gizi (*Prevalence of Undernourishment/PoU*), yaitu proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi/minimum dietary energy requirement (MDER) yang diukur dengan satuan kilo kalori per hari (kkal/hari). PoU merupakan alat ukur untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi.

Penghitungan PoU merupakan kolaborasi antara Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan oleh BPS. Di dalam Susenas ada data modul konsumsi dan pengeluaran yang digunakan sebagai dasar penghitungan PoU dan merupakan salah satu indikator dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Secara umum terjadi kenaikan angka PoU baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Di tahun 2023, penduduk rentan rawan pangan di Kabupaten Belitung Timur mengalami kenaikan sebesar 5,12%. Salah satu penyebab kenaikan jumlah penduduk rentan rawan pangan adalah adanya kenaikan harga pangan pokok strategis terutama beras yang mengalami kenaikan sebesar 15,36% jika dibandingkan dengan harga di tahun 2022. Karena beras merupakan pangan pokok sehingga kenaikan harganya dapat memicu terjadinya kondisi rentan rawan pangan. Kenaikan harga beras ini dipicu oleh kondisi fenomena El Nino yang melanda di hampir seluruh dunia sehingga menyebabkan produksi menurun akibat kemarau panjang dan kering. Kenaikan jumlah penduduk rentan rawan pangan ini menyebabkan terjadi penurunan capaian kinerja sebesar -10,24% dibandingkan target yang telah ditetapkan.

Pemerintah secara kontinyu melakukan pemberian bantuan pangan yang berasal dari cadangan pangan pemerintah yaitu berupa beras kepada penduduk yang dikategorikan miskin. Selama tahun 2023 terdapat 2 tahap penyaluran bantuan beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 10 kilogram per bulan per KPM. Bantuan tahap I diberikan selama 3 bulan yaitu bulan Maret sampai Mei dan bantuan tahap II diberikan selama

4 bulan yaitu bulan September sampai Desember. Selain pemberian bantuan beras, untuk memenuhi kebutuhan beras dalam daerah, kebijakan untuk meningkatkan produksi beras lokal harus lebih ditingkatkan sehingga daerah tidak selalu tergantung terhadap impor.

2.1.3.2. Pertanian

4

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur bahwa Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur merupakan Dinas dengan Tipe A, sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pertanahan.

Urusan Pertanahan mulai diampuh oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sejak Tahun 2017 pada Bidang Penataan Ruang Seksi Pertanahan. Urusan Pertanahan ini beririsan dengan Instansi vertikal yaitu Badan Pertanahan Negara (BPN) Belitung Timur.

Capaian kinerja urusan pertanahan Tahun 2023 antara lain menyusun Tata Batas Lahan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Sesuai SK Penetapan Lokasi oleh Bupati Belitung Timur. Lokasi tersebut yaitu Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan Kebun Raya Tebat Gadong Desa Padang Kecamatan Manggar

Tabel 2. 93 Capaian Sasaran Urusan Pertanahan Tahun 2021-2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (Persen)	27,29	NA	NA	60	80	100

Sumber:Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tahun 2023

Tabel 2. 94 Target dan Capaian Urusan Pertanahan Tahun 2023

NO.	INDIKATOR SASARAN	Target	Realisasi	%
1	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	40	NA	0

Sumber:Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tahun 2023

Penjelasan capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu

Sampai dengan Tahun 2023 belum ada Insatansi yang mengajukan usulan pengadaantanah untuk Pembangunan untuk kepentingan umum. Hal ini dikarenakan seringkaliterbentur dengan tahapan pengadaan tanah yang sangat panjang dan memakan waktuserta proses ganti rugi yang rumit. Sebagai Dinas Pengampu urusan Pertanahan di Pemerintah Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman berupaya memfasilitasi dan mensosialisasikan kepada Perangkat Daerah maupun Pemerintah Desa yang memerlukan tanah untuk Pembangunan kepentingan umum

2.1.3.2. Lingkungan Hidup

4

Pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat menyebabkan telah terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sebagai upaya agar lingkungan hidup terus mampu mendukung kehidupan manusia, terutama pada pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 terdapat beberapa program yang menunjang upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, yaitu program perencanaan lingkungan Hidup, program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, program pengelolaan keanekaragaman hayati, program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan local dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, program penanganan pengaduan lingkungan hidup dan program pengelolaan persampahan. Pelaksanaan program-program tersebut perlu dilanjutkan sehingga kelestarian lingkungan hidup dapat tetap mendukung program pembangunan

Tabel 2. 95 Capaian Sasaran Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan	10	6	12	16	18	20
2	Indeks Kualitas Air	50,00	67,50	61.56	56,71	56,81	56,91
3	Indeks Kualitas Udara	97,87	95,84	95.23	94,19	94,3	94,41
4	Indeks Kualitas Lahan	57,19	57,30	43.89	51,51	53,54	55,58
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,96	76,74	71,33	70,75	71,28	71,81
6	Cakupan Pelayanan Penanganan Sampah	4	4	5	6	7	7
7	Volume Pengelolaan SAMPAH di TPA	32.158,50	36,753,6	43.173,0	38.152,1	38.706,3	39.260,6

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Tabel 2. 96 Target dan Capaian Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan	14	12	85,71
2	Indeks Kualitas Air	56,61	61.56	100
3	Indeks Kualitas Udara	94,08	95.23	100
4	Indeks Kualitas Lahan	49,49	43.89	88,68
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70.23	71,33	100
6	Cakupan Pelayanan Penanganan Sampah	5	5	100
7	Volume Pengelolaan SAMPAH di TPA	37.597,80	43.173,0	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Penjelasan capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Jumlah Pengaduan yang diselesaikan

Masyarakat mempunyai peran yang cukup besar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hal ini dapat dilihat pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang merumuskan bahwa:

- 1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- 2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan
- 3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. Menumbuhkembangkan ketanggap segerakan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan

Timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dapat berkembang menjadi sengketa lingkungan, apabila salah satu pihak penderita atau korban merasa dirugikan karena adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari suatu kegiatan oleh siapapun baik, dengan sengaja maupun tidak. Berdasarkan Pasal 1 ayat 25 UUPPLH, sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Dengan demikian, sumber sengketa lingkungan adalah peristiwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

Sengketa lingkungan membutuhkan penyelesaian yuridis untuk melindungi kepentingan korban pencemaran-perusakan lingkungan sekaligus menyelamatkan lingkungan melalui pendekatan hukum. Untuk penyelesaian konflik/sengketa lingkungan dalam UU PPLH diatur dalam Bab XIII Bagian Kesatu Pasal 84 yang berbunyi:

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat dilakukan apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (Pasal 85 ayat 2 UU PPLH). Untuk memfasilitasi proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kementerian Lingkungan Hidup telah mengeluarkan pengaturan tentang penyelesaian sengketa lingkungan Hidup yaitu Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Sampai dengan Tahun 2023 pengaduan masyarakat tentang indikasi pencemaran lingkungan yang disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur, Tim Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan berkoordinasi dengan dinas terkait lainnya dalam melakukan pemeriksaan ke lokasi tempat kegiatan yang menjadi objek laporan/pengaduan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kebenaran isi laporan dan mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Selama tahun 2023 telah dilakukan verifikasi dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat sebanyak 12 (Duabelas) kali dari 12 (Dusabelas) pengaduan yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup, meningkat dari tahun 2022 dengan 6 (enam) pengaduan hal ini menunjukkan bahwa terjadi Peningkatan kasus atau permasalahan lingkungan hidup yang terjadi dimasyarakat.

2. Indeks Kualitas Air

Pada tahun 2021 data yang di gunakan untuk Analisa kualtias air adalah data pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan pada tiga sungai di Kabupaten Belitung Timur, yaitu Sungai Manggar, Sungai Lenggang dan Sungai Pala. Pemantauan di lakukan di tiga titik untuk setiap sungai. Satu titik di tempatkan di hulu sungai, area tengah sungai, area hilir sungai. Secara temporal, selama tahun 2021 pemantauan di lakukan dua periode. Analisis kualitas air dilakukan di laboratorium yang meliputi analisis fisik, kimia, dan biologi. Untuk perhitungan IKA, tidak semua nilai parameter dari data pemantauan kualitas air akna dipergunakan. Sesuai dengan persamaan perhitungan IKA, parameter yang akan digunakan untuk menghitung IKA adalah :

- 1) PH (Power of Hydrogen) adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman
- 2) Disssolved Oxygen (DO). Parameter in imenggambarkan jumlah oksigen yang terlarut di dala air.
- 3) Biochemical Oxygen Demand (BOD). Menggambarkan jumlah oxygen yang diperlukan untuk mengurai sebagian bahan organik yang terkandung di dalam air
- 4) Chemical Oxygen Demand (COD). Menggambarkan jumlah oxygen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung di dalam air.

- 5) Total Suspended Solid (TSS). Parameter ini menggambarkan total padatan yang tidak terlarut dalam air, dan tidak dapat mengendap langsung pada dasar larutan.
- 6) Nitrat ($\text{NO}_3\text{-N}$), merupakan ion anorganik alami bagian dari siklus senyawa nitrogen dengan rumus molekul $\text{NO}_3\text{-}$ dan massa molekul 62,0049 g/mol . Kandungan nitrogen di alam banyak ditemukan dengan berbagai macam senyawa organik
- 7) Total Fosfat ($\text{PO}_4\text{-P}$)
- 8) Fecal Coli. Parameter ini mengindikasikan jumlah bakteri coliform yang terkandung di dalam air.

3. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Data yang di gunakan untuk Analisa kualitas udara di Kabupaten Belitung adalah data pemantauan kualitas udara pada tahun 2021 dilakukan di empat lokasi yaitu :

Tabel 2. 97 Lokasi Titik Pemantauan Udara di Kabupaten Belitung Timur

No	Titik Pantau	Peruntukan	Alamat Titik Pantau	Latitude (Y)	Longitude (X)
1	Kawasan Perkantoran	Perkantoran	Perkantoran DLH Kab. Belitung Timur	108,238686	-2,88442
2	Kawasan Pemukiman	Pemukiman	Pemukiman padat penduduk Kampung Baru, manggar	108,295059	-2,851768
3	Kawasan Perkotaan	Transportasi	Jl. Jendral Sudirman Persimpangan Dispensasi, Manggar (depan pos polisi)	108,286529	-2,857372
4	kawasan industri	Industri	Kawasan Perumahan, Perusahaan sawit PT. SWP	108,066353	-2,724195

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Penggunaan nilai rata-rata kondisi udara pada tahun 2023 digunakan sebagai gambaran pada dari Kawasan perkotaan / transportasi, industri, pemukiman, dan perkantoran di Kabupaten Belitung Timur. Pengukuran kualitas udara ambien menggunakan metode passive sampler Analisis kualitas udara dilakukan di laboratorium yang meliputi analisis kandungan Sulfur dioksida (SO_2), dan Nitrogen dioksida (NO_2).

4. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Untuk mengetahui kualitas lahan data yang di butuhkan dala perhitungan IKL berupa data Penggunaan lahan dan data luas wilayah Kabupaten. Data Penggunaan lahan dikategorikan jenis lahan dengan tutupan vegetasi hutan dan vegetasi non hutan. Untuk data penggunaan lahan ini diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur, berupa data Penggunaan Lahan Kabupaten Belitung Timur Kondisi 2023.

5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Pada tahun 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan mengeluarkan peraturan baru tentang tata cara serta indikator dalam penyusunan dan perhitungan nilai IKLH yaitu permen LHK Nomor 27 Tahun 2021. Dalam peraturan tersebut terdapat perubahan bobot persentase dalam perhitungan nilai Indeks KQualitas Air (IKA) dari 30% menjadi 37,6% , bobot Indeks Kualitas Udara (IKU) dari 30% menjadi 40,5% dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang semula 40% menjadi 21,9%. Indikator Sasaran Indeks Kualitas Air , Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan merupakan nilai parameter kunci yang digunakan untuk Penghitungan IKLH Kabupaten dilakukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

IKLH Kabupaten	= (IKA x 0,376) + (IKU x 0,405) + (IKL x 0,219)

Setelah mendapatkan nilai dari masing-masing parameter kunci penyusun IKLH, selanjutnya dilakukan pembobotan setiap parameter untuk menghasilkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Tabel berikut ini merupakan hasil penghitungan IKLH Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2023:

**Tabel 2. 98 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023**

Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks	Bobot	Jumlah
Indeks Kualitas Air	61,56	0,376	23,15
Indeks Kualitas Udara	95,23	0,405	38,57
Indeks Kualitas Lahan	43,89	0,219	9,61
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur			71,33

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2023

RUMUS INDIKATOR (IKA, IKU dan IKL)

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$$

$$IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3}$$

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$$

6. Cakupan Pelayanan Penanganan Sampah & Volume Pengelolaan SAMPAH di TPA

Indikator Volume Pengelolaan SAMPAH di TPA merupakan alat ukur untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Belitung Timur, diperoleh dengan menghitung data Penanganan sampah selama satu tahun per m³. Capaian Indikator pada tahun 2023 sebesar 43.173,0 m³ dan pada tahun 2023 ditargetkan pencapaian sebesar 37.597,80 m³ dikarenakan adanya peningkatan produksi sampah dan penambahan jumlah penduduk yang mencakup pada kawasan pemukiman perkotaan dan pedesaan di wilayah kecamatan Manggar, Gantung, Damar dan Kelapa Kampit dimana semakin padat suatu wilayah maka semakin besar volume timbunan sampah yang dihasilkan, data tersebut didapatkan dengan perhitungan sebagai berikut :

Volume Pengelolaan sampah	= Jumlah Pengelolaan + Jumlah Penanganan Sampah
Volume Pengelolaan sampah	= 36.917,9 m ³ + 6.255,11 m ³
	= 43.173,0 m ³

Sedangkan untuk indikator selanjutnya yaitu terkait Cakupan Pelayanan Penanganan Sampah dihitung dengan berapa kecamatan yang telah dilayani. Dalam pelaksanaannya Dinas lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2023 telah melayani 5 kecamatan pengangkutan sampah yang ada di kabupaten Belitung Timur, namun disetiap kecamatan tidak seluruh desa masuk di dalam pelayanan karena ada sebagian wilayah yang tidak bisa terjangkau.

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023, uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur meliputi: Tugas Membantu Bupati Belitung Timur merumuskan kebijakan teknis, memimpin dan mengoordinasikan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Tabel 2. 99 Capaian Sasaran Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	A>80-90	A>80-90	BB >70-80	A>80-90	A>80-90	A>80-90
2	Indeks kepuasan layanan penunjang	B 76,61-88,30	B 76,61-88,30	B 76,61-88,30	B 76,61-88,30	B 76,61-88,30	B 76,61-88,30
3	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,97	0,99	0,99	1	1	1
4	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	97,14	98,80	99,16	100	100	100
5	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak	72,18	77,17	83,13	100	100	100
6	Rasio bayi berakte kelahiran	0,94	0,99	0,99	1	1	1
7	Rasio pasangan berakte nikah	0,89	0,76	0,92	1	1	1
8	Cakupan penerbitan akta kelahiran	94,41	99,66	91,61	100	100	100
9	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada	ada	ada	ada	ada
10	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	Sudah
11	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama	17,95	52,17	52,17	80	100	100
12	Persentase desa yang melaksanakan pelayanan adminduk secara daring	100	97,4	71,79	100	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2023

Tabel 2. 100 Target dan Capaian Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	A>80-90	BB >70-80	83,3
2	Indeks kepuasan layanan penunjang	B 76,61-88,30	B 76,61-88,30	100

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
3	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	1	0,99	99
4	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100	99,16	99,16
5	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak	100	83,13	83,13
6	Rasio bayi berakte kelahiran	1	0,99	99,00
7	Rasio pasangan berakte nikah	0,96	0,92	95,83
8	Cakupan penerbitan akta kelahiran	97%	91,61	94,44
9	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada	100
10	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	100
11	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama	50%	52,17	104,34
12	Persentase desa yang melaksanakan pelayanan adminduk secara daring	100%	71,79	71,79

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2023

Penjelasan capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah dengan satuan predikat dari mulai AA sampai dengan D dengan rentang nilai seperti berikut:

1. AA >90-100
2. A >80-90
3. BB >70-80
4. B >60-70
5. CC >50-60
6. C >30-50
7. D 0-30

Sesuai Surat Inspektur Kabupaten Belitung Timur Nomor: 700/202/INPTL/LHE/AKIP2022/2023 Tanggal 13 September 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur adalah 70,33 kategori BB, dengan interpretasi **Baik**. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan rincian:

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai sebesar 24,60 atau 82% dari bobot sebesar 30,00;
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar 17,40 atau 58% dari bobot sebesar 30%;
- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai sebesar 11,58 atau 77,17% dari bobot 15%;
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 16,75 atau 67% dari bobot 25%.

2. Indeks kepuasan layanan penunjang

Indeks kepuasan layanan penunjang dengan satuan nilai mulai dari A sampai dengan D, dengan rentang sebagai berikut:

1. 25,00 - 64,99 : D
2. 65,00 - 76,60 : C
3. 76,61 - 88,30 : B
4. 88,31 - 100 : A

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 memperoleh nilai 82,86. Nilai tersebut berada pada rentang 76,61-88,30, dengan demikian nilai yang diperoleh adalah kategori B

3. Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk

Indikator sasaran Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan formulasi sebagai berikut:

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	=	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia > 17 yang ber-KT}}{\text{Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah}}$

Keterangan:

- Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk adalah perbandingan antara banyaknya penduduk usia di atas 17 tahun yang memiliki KTP terhadap banyaknya penduduk usia diatas 17 tahun atau telah menikah;
- Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP adalah banyaknya penduduk usia diatas 17 tahun yang memiliki KTP;

- Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah adalah jumlah penduduk usia diatas 17 tahun atau sudah menikah.

Berikut ini data agregat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk pada tahun 2022 di Kabupaten Belitung Timur :

Tabel 2. 101 Penduduk Ber-KTP Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah Rekam	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
1	Manggar	29,227	29,066	29,015	99.27%
2	Gantung	21,636	21,467	21,410	98.96%
3	Dendang	8,232	8,212	8,184	99.42%
4	Kelapa Kampit	14,591	14,509	14,468	99.16%
5	Damar	10,047	9,991	9,966	99.19%
6	Simpang Renggiang	5,820	5,789	5,776	99.24%
7	Simpang Pesak	6,357	6,309	6,282	98.82%
	Jumlah	95,910	95,343	95,101	99,16%

Sumber: Database Kemendagri Tahun 2023 semester I

Dari sebanyak 95.910 Penduduk > 17 Tahun atau telah menikah terdapat sebanyak 95.343 yang telah mengikuti perekaman akan tetapi baru 95.101 jumlah KTP yang diterbitkan atau sebesar 99,16% dari total Wajib KTP. Realisasi akumulasi penerbitan Kartu Tanda Penduduk sampai dengan tahun 2023 telah mencapai 99,16%, atau telah memenuhi rasio 0,99. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 1 maka capaian ini tergolong predikat “Memuaskan” dengan interval nilai capaian kinerja 99%.

4. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Indikator Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengacu pada peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan formulasi sebagai berikut:

Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	=	$\frac{\text{Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100\%$

Keterangan:

- Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah perbandingan antara jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan terhadap jumlah penduduk wajib KTP dikali dengan seratus persen;
- Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan adalah banyaknya KTP ber-NIK yang diterbitkan;
- Jumlah penduduk wajib KTP adalah banyaknya penduduk yang sudah wajib memiliki KTP.

Berdasarkan data agregat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk pada tahun 2023 di Kabupaten Belitung Timur pada tabel 3.4

Dari sebanyak 95.910 Penduduk wajib KTP terdapat sebanyak 95.343 atau 99,40% yang telah mengikuti perekaman akan tetapi baru 95.101 jiwa yang ber-KTP atau sebesar 99,16% dari total Wajib KTP. Realisasi akumulasi penerbitan Kartu Tanda Penduduk sampai dengan tahun 2023 telah mencapai 99,16%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 100% maka capaian ini tergolong predikat “Memuaskan” dengan interval nilai capaian kinerja 99,16%.

Jika dibandingkan pula dengan pelayanan pada tahun 2022 maka dapat dilihat perbandingan capaian dan data awal yang direncanakan serta target yang ditetapkan pada tahun selanjutnya berdasarkan data kondisi tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 102 Perbandingan Realisasi Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Tahun 2022 dan 2023

Uraian Indikator	Tahun 2022	Tahun 2021
Jlh. Penduduk	127.899	131.297
Jlh. Penduduk Wajib KTP	93.785	95.910
Jlh. Penduduk yang direkam	93.466	95.343
Jlh. Penduduk Ber-KTP	92.663	95.101
Target Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	100%	100%
Realisasi kinerja	98,80%	99,16%
Capaian Kinerja	98,80%	99,16%

5. Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak

Indikator Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak termasuk dalam Indeks Kinerja Kunci untuk evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)} = \frac{\text{Jumlah anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah usia anak 0 – 17 tahun}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah perbandingan antara banyaknya penduduk usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA dengan banyaknya penduduk usia 0-17 tahun dikali dengan seratus persen;
- Jumlah anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA adalah banyaknya penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki KIA;
- Jumlah usia anak 0 – 17 tahun adalah banyaknya penduduk usia 0-17 tahun.

Sampai penghujung tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur telah merealisasikan cetak KIA seperti berikut ini:

Tabel 2. 103 Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah usia anak 0 – 17 tahun kurang 1 (satu) hari	Jumlah anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
1	Manggar	11,125	9,355	84.09%
2	Gantung	8,753	7,294	83.33%
3	Dendang	2,676	2,170	81.09%
4	Kelapa Kampit	4,917	4,163	84.67%
5	Damar	3,625	3,042	83.92%
6	Simpang Renggang	1,886	1,636	86.74%
7	Simpang Pesak	2,359	1,858	78.76%

Jumlah	35,341	29,518	83.52%

Sumber: Database Kemendagri Tahun 2023 semester II

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari target 35.341 usia 0-17 tahun (-1hari), sebanyak 29.518 telah memiliki KIA, dengan demikian cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 adalah sebesar 83,52%.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka pencapaian kepemilikan KIA pada angka 83,52% adalah sebuah peningkatan yang sangat signifikan, dimana rata-rata peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2020 sampai dengan dengan 2023 adalah sebesar 4,09%.

6. Rasio Bayi Berakta Kelahiran

Indikator rasio bayi berakta kelahiran mengacu pada peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan formulasi sebagai berikut:

Rasio Bayi Berakte Kelahiran	=	$\frac{\text{Jumlah bayi berakte kelahiran}}{\text{Jumlah bayi}}$

Keterangan:

- Rasio Bayi Berakte Kelahiran adalah perbandingan antara banyaknya bayi berakte kelahiran dengan banyaknya bayi;
- Jumlah bayi berakte kelahiran adalah banyaknya bayi yang memiliki akta kelahiran;
- Jumlah bayi adalah banyaknya bayi.

Sesuai dengan formulasi tersebut, kelahiran bayi yang dimaksud adalah bayi yang lahir pada tahun 2023 yang dilaporkan dan dicatatkan akta kelahirannya.

Dengan kondisi rumusan tersebut, selama tahun 2023 dari jumlah kelahiran yang dilaporkan sebanyak 1.744 kelahiran terdapat 1.738 yang diterbitkan akta kelahirannya atau sebanyak 99,70% tercatat

kelahirannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rasio bayi yang berakta kelahiran pada tahun 2023 adalah sebesar 0,997.

Berikut Tabel penerbitan akta kelahiran selama tahun 2023 sampai dengan semester II.

Tabel 2. 104 Penerbitan Akta Kelahiran pada Tahun 2023

No	Kecamatan	Kelahiran di tahun 2023 yang dilaporkan	Penerbitan akta kelahiran untuk kelahiran tahun 2023	Rasio
1	Kabupaten Belitung Timur	1.744	1.738	0,997

Sumber data : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Tahun 2023

7. Rasio Pasangan Berakta Nikah

Indikator pasangan berakte nikah mengacu pada peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Rasio pasangan berakte nikah} = \frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakte nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan nikah}}$$

Keterangan:

- Rasio pasangan berakte nikah adalah jumlah pasangan nikah yang memiliki akte nikah dibagi dengan jumlah keseluruhan pasangan nikah;
- Jumlah pasangan nikah yang memiliki akte nikah;
- Jumlah keseluruhan pasangan nikah adalah jumlah keseluruhan pasangan yang menikah.

Jumlah pasangan nikah dalam hal ini diartikan sebagai jumlah kepala keluarga dengan status menikah/kawin yang ada di kabupaten Belitung Timur, sedangkan jumlah pasangan nikah yang memiliki akta nikah adalah jumlah kepala keluarga dengan status menikah/kawin dan memiliki surat nikah/akta perkawinan yang ada di kabupaten Belitung Timur. Sesuai data semester II Tahun 2023 jumlah kepala keluarga dengan status menikah/kawin berjumlah 65.098 kepala keluarga, sedangkan jumlah kepala keluarga dengan status menikah/ kawin dan memiliki surat nikah/

akta perkawinan berjumlah 60.207 kepala keluarga. Dengan demikian rasio pasangan berakte nikah adalah sebesar 0,92.

Ketercapaian dari indikator sasaran rasio pasangan berakte nikah ini sangat tergantung dengan kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan setiap adanya perubahan data dalam keluarga, karena adakalanya dalam database suatu keluarga nomor akta nikah belum terisi sehingga belum terbaca sebagai pasangan yang memiliki akte nikah.

Adapun data kepemilikan akta nikah tersebut dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 105 Tabel Kepemilikan Akta Nikah Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	Belum Memiliki Akta Nikah	Rasio Pasangan Berakte Nikah
1	Manggar	18,946	17,587	1,359	0.93
2	Gantung	14,756	13,395	1,361	0.91
3	Dendang	5,991	5,459	532	0.91
4	Kelapa Kampit	9,882	9,147	735	0.93
5	Damar	6,900	6,586	314	0.95
6	Simpang Renggang	4,165	3,934	231	0.94
7	Simpang Pesak	4,458	4,099	359	0.92
Jumlah		65,098	60,207	4,891	0.92

Sumber: Database Kemendagri Tahun 2023 semester II

8. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Indikator Cakupan penerbitan akta kelahiran mengacu pada peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran} = \frac{\text{jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran adalah jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan dibagi dengan jumlah kelahiran di tahun bersangkutan dikali seratus persen;
- Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan adalah banyaknya jumlah kelahiran dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan;
- Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan adalah banyaknya jumlah kelahiran di tahun bersangkutan.

Sesuai dengan formulasi tersebut, jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan dibandingkan dengan Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan. Dengan kondisi rumusan tersebut, selama tahun 2023 dari jumlah kelahiran yang dilaporkan sebanyak 1.744 kelahiran terdapat 1.738 yang diterbitkan akta kelahirannya atau sebanyak 99,70% tercatat kelahirannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran pada tahun 2023 adalah sebesar 99,70%.

Berikut Tabel penerbitan akta kelahiran selama tahun 2023 sampai dengan semester II.

Tabel 2. 106 Penerbitan Akta Kelahiran pada Tahun 2023

No	Kecamatan	Kelahiran di tahun 2023 yang dilaporkan	Penerbitan akta kelahiran untuk kelahiran tahun 2023	Persentase
1	Kabupaten Belitung Timur	1.744	1.738	99,70%

Sumber data : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Tahun 2023

Sementara bila dibandingkan dengan capaian kepemilikan akta kelahiran secara keseluruhan sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 107 Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2023

No	Kecamatan	Kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
1	Manggar	37,153	40,314	92.16%
2	Gantung	27,374	30,506	89.73%
3	Dendang	9,884	10,896	90.71%
4	Kelapa Kampit	18,022	19,474	92.54%
5	Damar	12,655	13,706	92.33%

6	Simpang Renggang	7,057	7,710	91.53%
7	Simpang Pesak	8,135	8,691	93.60%
Jumlah		120,280	131,297	91.61%

Sumber: Database Kemendagri Tahun 2023 semester II

Dari jumlah penduduk Belitung Timur sebanyak 131.297 jiwa, 1.744 jiwa merupakan bayi yang lahir di tahun 2023 sampai dengan semester 2 tahun 2023 artinya 1,3% dari jumlah penduduk Tahun 2023 merupakan bayi yang lahir di tahun 2023. Dari 1.744 bayi yang lahir di tahun 2023, 1.738 bayi sudah mendapatkan Akta kelahiran, sedangkan sisa yang belum diterbitkan terkait adanya kekurangan data dari pelapor yang belum dilengkapi. Data kelahiran dan penerbitan akta kelahiran bagi bayi pada tahun 2023 yang digunakan adalah data dari Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dari mulai Januari sampai dengan Desember 2023,

Sementara jumlah pelayanan penerbitan Akta Kelahiran tahun 2023 dan dibandingkan dengan jumlah pelayanan penerbitan Akta Kelahiran pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini :

9. Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi

Data kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIADK), sehingga secara otomatis akan membentuk database kependudukan. Saat ini Database kependudukan sudah bersifat terpusat yang artinya database kependudukan tersebut berada di tingkat pusat dan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karena data tersebut sudah terintegrasi di tingkat pusat, maka dapat dengan mudah dilakukan pemilahan data tersebut mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Dan berdasarkan kewenangannya Kementerian Dalam Negeri merilis database kependudukan sebanyak 2 kali dalam setahun. Yaitu data semester I dan semester II.

10. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK mulai diterapkan sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan ketentuan pasal 13 Undang-Undang tersebut, setiap penduduk wajib memiliki NIK yang berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil kepada setiap penduduk. NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

11. Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama

Indikator Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama termasuk dalam Indeks Kinerja Kunci untuk evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan formulasi sebagai berikut:

Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama	=	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$

Keterangan:

- Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama adalah perbandingan jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama terhadap jumlah OPD di Kabupaten Belitung Timur;
- Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama adalah jumlah OPD yang telah memiliki perjanjian kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan telah memanfaatkan data kependudukan sesuai dengan perjanjian kerja sama tersebut;
- Jumlah OPD adalah Jumlah OPD yang ada di Kabupaten Belitung Timur.

Pada tahun 2023 jumlah opd yang sudah mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama adalah sebanyak 12 OPD, sesuai dengan persetujuan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana surat Ditjen Dukcapil nomor 470/11438/Dukcapil tanggal 30 Agustus 2021 ada 7 OPD yang diberikan hak akses dan pemanfaatan kependudukan data sesuai perjanjian kerja sama, OPD tersebut yaitu: Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Badan Penanaman

modal perizinan Terpadu dan Perdagangan. Kemudian sesuai surat kedua nomor 470/19237/Dukcapil tanggal 29 Desember 2021, tentang Persetujuan Permohonan Izin Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan disetujui 4 OPD yaitu Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan demikian dari 12 OPD yang diusulkan, 11 OPD mendapat persetujuan dan mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan. Selanjutnya melalui surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/10553/Dukcapi tanggal 29 Juni 2022 keluar persetujuan hak akses data kependudukan untuk 5 (lima) OPD yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur melalui web portal. Dengan demikian dari 12 OPD yang diusulkan untuk pemanfaatan data semuanya telah disetujui. Adapun jumlah OPD/lembaga yang ber-PKS dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruhnya terdapat 23 OPD. Artinya Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama adalah $12/23 \times 100\%$ yaitu 52,17%.

Sejak Juli tahun 2023 setiap OPD yang telah dan ingin mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan wajib memiliki sertifikat ISO 27001.

12. Persentase desa yang melaksanakan pelayanan adminduk secara daring

Indikator persentase desa yang melaksanakan pelayanan adminduk secara daring mengacu pada indikator kegiatan Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk pada program Tata Kelola Kependudukan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020, dengan formulasi sebagai berikut:

Persentase desa yang melaksanakan pelayanan adminduk secara daring	$= \frac{\text{Jumlah desa yang melayani adminduk secara daring}}{100\% \text{ Jumlah Desa}} \times X$

Keterangan:

- Persentase desa yang melaksanakan pelayanan adminduk secara daring adalah perbandingan jumlah desa yang memberikan pelayanan

administrasi kependudukan secara daring terhadap jumlah desa yang ada di Kabupaten Belitung Timur dikali seratus persen;

- Jumlah desa yang memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara daring;
- Jumlah Desa yang ada di Kabupaten Belitung Timur

Salah satu upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat adalah dengan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan yang membahagiakan masyarakat. masyarakat diberikan kemudahan untuk mengurus dokumen kependudukan salah satunya dengan memanfaatkan Kios Pelayanan Adminduk yang telah dibentuk di Desa. Sesuai Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Jaringan bahwa Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Jaringan atau pelayanan adminduk daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Dalam Jaringan bisa memanfaatkan Kios Pelayanan Adminduk Desa melalui aplikasi SELINA (Sistem Elektronik Pelayanan Administrasi Kependudukan). Dari 39 Desa yang ada di Kabupaten Belitung Timur tercatat 38 Desa yang sudah memanfaatkan Kios Pelayanan Adminduk Desa sejak diterapkan SELINA pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 atau ada 97,4%. Akan tetapi pada tahun 2023 jumlah desa yang masih aktif menggunakan aplikasi SELINA di Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 28 Desa atau 71,79% Desa di Kabupaten Belitung Timur melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring.

2.1.3.2. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

7

Indikator sasaran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur adalah Indikator yang disusun secara teknis dan menjadi Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama yang disusun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara teknis berdasarkan pelaksanaan program kegiatan yang ada. Didalam pelaksanaan urusan pemerintahan yaitu Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Ada 7

Indikator Sasaran yang menjadi dasar Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Belitung Timur.

Tabel 2. 108 Capaian Sasaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	100	100	100	100	100	100
2	Persentase kerjasama antardesa terlaksana dan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2023

Tabel 2. 109 Target dan Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Persentase Desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	100	100	100
2	Persentase kerjasama antardesa terlaksana dan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2023

Penjelasan capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Persentase Desa yang Memenuhi Kelengkapan Administrasi Pemerintahan
 Dalam rangka pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026, berdasarkan hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi oleh Tim pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap variabel Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Aset dan Penyertaan Modal maka disampaikan hasil dari pembinaan, monitoring dan evaluasi oleh Tim pembinaan, monitoring dan evaluasi di 39 (tiga puluh sembilan) Desa, bahwa secara umum seluruh Desa

sudah memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan. Namun masih terdapat beberapa catatan untuk dilakukan perbaikan terhadap beberapa dokumen yang diantaranya Dokumen Perencanaan, Dokumen Penatausahaan, Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa serta Peraturan Desa sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini

2. Persentase Kerjasama Antar Desa Terlaksana dan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat yang Diberdayakan

Indikator Persentase Kerjasama Antar Desa Terlaksana dan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat yang Diberdayakan. Sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan mitra Pemerintah Desa, Lembaga Adat Desa memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan desa dan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa. Masing-masing desa di Kabupaten Belitung Timur memiliki 1 (satu) lembaga adat. Dalam hal ini lembaga adat didominasi oleh para dukun kampung di setiap desa. Adapun lembaga adat tersebut terdiri dari dukun kampung, tokoh agama, tokoh budaya, dan tokoh masyarakat.

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pengendalian Penduduk dan KB. Dalam pelaksanaan urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana didukung dengan ketersediaan 7 (tujuh) UPT Puskesmas di 7 (tujuh) kecamatan dan 1 (satu) pelayanan kesehatan rujukan yaitu UPT Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Dan untuk meningkatkan program pengendalian penduduk serta pelayanan keluarga berencana perangkat daerah juga memiliki 7 (tujuh) balai keluarga berencana yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan serta 23 (dua puluh tiga) petugas penyuluh keluarga berencana yang tersebar di desa-desa. Semua ini merupakan sarana serta sumber daya dalam pelaksanaan tugas serta fungsi pelayanan kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Tabel 2. 110 Capaian Sasaran Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 – 2023 dan Target 2024-2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalance Rate/ mCPR</i>)	100	76,08%	81,93%	100	100	100

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	100	6%	5,5%	8,7	8,9	9,1
3	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (<i>Age Spesific Fertility Rate/ ASFR 15-19</i>)	25	30	31,52	33	31	29
4	Angka Kelahiran total	2,12	1,74	1,99	2,1	2,1	2,1

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2023

Tabel 2. 111 Target dan Capaian Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalance Rate/ mCPR</i>)	69,30%	81,93%	118%
2	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	10,65%	5,5%	52%
3	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (<i>Age Spesific Fertility Rate/ ASFR 15-19</i>)	23	31,52	137%
4	Angka Kelahiran total	2,1	1,99	95%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2023

Penjelasan capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalance Rate/ mCPR*)
Indikator yang dikhususkan pada pemakaian kontrasepsi dengan cara modern. Metode kontrasepsi modern meliputi sterilisasi wanita, sterilisasi pria, pil, IUD, suntik, implan, kondom, dan amenorea laktasi (MAL) (BPS, BKKBN, Kementerian Kesehatan, & ICF International, 2013). Petugas fasilitas kesehatan berperan penting dalam pemberian layanan KB yang berkualitas. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan informasi tentang pilihan kontrasepsi yang tersedia dan menjelaskan kepada para calon pengguna kontrasepsi terkait kemampuan fasilitas kesehatan dalam melayani berbagai pilihan kontrasepsi. Petugas fasilitas kesehatan juga harus memastikan pelayanan yang diberikan memenuhi persyaratan yang diinginkan, tersedia pada waktu yang telah ditentukan, nyaman bagi klien, dan kontrasepsi yang diinginkan pengguna tersedia dalam jumlah yang cukup. Pemberian pelayanan KB yang berkualitas diharapkan dapat mendorong pemakaian kontrasepsi dalam jangka waktu yang lama dan tidak terputus.

Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate)	=	$\frac{\text{Jumlah Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern}}{\text{Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern}} \times 100\%$

2. Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Cakupan PUS Unmeet Need adalah kebutuhan ber-KB pada Pasangan Usia Subur yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi. Tingginya angka unmet need di Indonesia berpeluang terhadap tingginya angka kematian ibu, hal itu dikarenakan akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Rumus perhitungan cakupan PUS Unmeet Need yaitu :

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	=	$\frac{\text{PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$

3. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (*Age Spesific Fertility Rate/ ASFR 15-19*)

Angka Angka kelahiran menurut kelompok umur (ASFR) 15-19 tahun menunjukkan jumlah kelahiran yang dialami oleh wanita kelompok umur tertentu antara 15-19 tahun. Angka ini biasanya dinyatakan dengan jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur tertentu per 1000 wanita pada kelompok umur tersebut. Rumus ASFR adalah sebagai berikut : Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15 – 19 dibagi Jmlah penduduk perempuan kelompok umur 15 – 19 pada pertengahan tahun yang sama, dikali 100.

4. Angka Kelahiran total

Angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) menunjukkan jumlah kelahiran yang dialami oleh wanita dalam usia produktif. Penurunan TFR semakin mendekati level replacement di 2,1%. Ini merupakan level di mana satu individu yang meninggal bisa digantikan oleh individu yang lahir, tanpa adanya migrasi. Adapun formulasi pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:

Angka kelahiran total	=	$\frac{\text{Target Angka Kelahiran Total RPJMN}}{\text{Angka Kelahiran Total Kabupaten}} \times 100\%$

2.1.3.2. Perhubungan

Transportasi merupakan pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu tertentu. Adanya kebutuhan untuk berpergian dari lokasi lain dengan tujuan melakukan suatu kegiatan atau kebutuhan barang untuk dapat digunakan atau dikonsumsi di tempat lain mengakibatkan adanya permintaan angkutan. berdasarkan letak geografis Kabupaten Belitung Timur, alat transportasi sangat diperlukan guna menghubungkan daerah – daerah yang ada di wilayah Kabupaten Belitung Timur baik melalui transportasi darat maupun laut.

Tabel 2. 112 Capaian Sasaran Urusan Perhubungan Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian			Target		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Persen	45,9	49,5	48,5	63,1	71	75,6
2	Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen	0,13	0,03	0,02	0,04	0,04	0,04
3	Persentase pembangunan pelabuhan orang dan barang	Persen	33,33	33,33	33,33	100	100	100
4	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan berlalu lintas	Persen	9,93	14,49	14,77	20	25	30
5	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persen	9,93	25,64	26,75	27	32	35
6	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	15,45	5,54	31,46	24,55	27,27	31,82
7	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pelayaran	Persen	56,79	48,21	58,21	65,43	65,43	66,67
8	Jumlah penumpang yang melalui terminal/dermaga/ pelabuhan	Orang	8.738	20.867	22.890	10.730	10.532	10.701

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2023

Tabel 2. 113 Capaian Sasaran Urusan Perhubungan Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah (%)	55,20	48,5	87,86
2	Persentase Layanan Angkutan Darat (%)	0,03	0,02	66,67
3	Persentase pembangunan pelabuhan orang dan barang (%)	66,67	33,33	50
4	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan berlalu lintas (%)	15,00	14,77	98,46
5	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (%)	25,00	26,75	107
6	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%)	22,73	31,46	138,4
7	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pelayaran (%)	62,96	58,21	92,46
8	Jumlah penumpang yang melalui terminal/dermaga/Pelabuhan (orang)	10.566	22.890	216,64

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2023

Penjelasan capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Rasio Konektivitas Antar Wilayah

Rasio konektivitas dihitung berdasarkan jumlah trayek dan lintasan yang ada di Kabupaten Belitung Timur dengan memperhitungkan bobot angkutan jalan dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Capaian kinerja dengan indikator rasio konektivitas antar wilayah pada tahun 2023 sebesar 0,49 dengan rincian sebagai berikut:

Rasio Konektivitas Kabupaten = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$

$$IK1 = (9 \times 1) / 17 = 0,53$$

$$IK2 = (3 \times 0,5) / 4 = 0,38$$

$$\text{Capaian} = (0,53 \times 70) + (0,38 \times 30)$$

$$= 37,1 + 11,4$$

$$= 48,5 / 100 = 0,49$$

$$\text{Jumlah Trayek} = 9 \text{ Trayek}$$

$$\text{Jumlah Kebutuhan Trayek} = 17 \text{ Trayek}$$

$$\text{Bobot Angkutan Jalan} = 1$$

$$\text{Jumlah Lintasan} = 3 \text{ Lintasan}$$

$$\text{Jumlah Kebutuhan Lintasan} = 4 \text{ Lintasan}$$

$$\text{Bobot Angkutan} = 0,5$$

$$\text{Sungai, Danau dan Penyeberangan}$$

2. Persentase Layanan Angkutan Darat

Indikator Persentase layanan angkutan darat digunakan untuk mengukur tingkat pelayanan angkutan darat dengan cara membandingkan jumlah angkutan dengan jumlah penumpang yang ada guna melihat jumlah kebutuhan sarana transportasi yang ideal dengan jumlah penumpang yang ada. Pada tahun 2023 indikator persentase layanan angkutan darat berjumlah 0,02%.

$$\text{Layanan Angkutan Darat} = \frac{\text{Jumlah Angkutan}}{\text{Jumlah Penumpang}}$$

$$= \frac{15}{69.079}$$

$$= 0,02\%$$

3. Persentase pembangunan pelabuhan orang dan barang

Indikator persentase pembangunan pelabuhan orang atau barang pada tahun 2023 sebesar 33,33% yaitu berdasarkan perbandingan jumlah pelabuhan yang ada dibandingkan dengan target pembangunan pelabuhan.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menargetkan 3 (tiga) pelabuhan yang akan dibangun yaitu:

1. Pelabuhan ASDP Manggar yang saat ini telah digunakan untuk kapal – kapal kecil dengan lintasan Manggar – Ketapang;
2. Relokasi Pelabuhan Penyeberangan Manggar yang berada di pantai menara Manggar untuk konektivitas Cetak Biru Sabuk Tengah (Manggar – Ketapang);
3. Pembangunan Pelabuhan Dendang di Tanjung Rising Kecamatan Dendang yang akan digunakan sebagai pelabuhan pengumpan lokal.

4. Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan berlalu lintas

Indikator persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan dalam berlalu lintas dihitung berdasarkan data fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang dibandingkan dengan kebutuhan perlengkapan jalan yang seharusnya ada di setiap ruas jalan kabupaten dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 14,77%.

Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan berlalu lintas:

$$\frac{\text{Jumlah fasilitas perlengkapan jalan per ruas jalan}}{\text{Kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan per ruas jalan}}$$

$$\frac{27.686}{181.611} = 15,24\%$$

5. Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Indikator pemenuhan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan merupakan perbandingan jumlah sarana dan prasarana yang telah ada dibandingkan dengan kebutuhan dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 26,39%, yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan dalam rangka memberikan kemudahan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah seperti pembangunan terminal, penyediaan fasilitas perlengkapan jalan, angkutan umum serta fasilitas penunjang lainnya.

Tabel 2. 114 Jumlah Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

N o	Uraian	Satuan	Terpasang	Kebutuhan	Persentase
1	Marka	Meter	260.312	1.786.950,00	14,57%
2	Pita Penggaduh	M²	933	5.130	18,18%
3	Rambu	Unit	1.297	7.612	17,04%
4	RPPJ	Unit	85	380	22,35%
5	Guardril	Unit	270	1.157	23,34%
6	Deliniator	Unit	470	5.745	8,18%
7	Cermin Tikungan	Unit	33	185	17,84%
8	APILL	Unit	31	206	15,05%
9	Speedbump	Buah	1.531	3.086	49,62%
10	PJU Konvensional	Unit	3.563	15.252	23,36%
11	PJUTS	Unit	353	1.281	27,55%
12	Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Titik	4	29	13,79%
13	Halte	buah	5	29	17,24%
14	Paku Jalan	Buah	-	8.212	0,00%
15	Separator	Buah	225	250	90,00%
16	Traffic Cone	Buah	70	200	35,00%
17	Mobil Crane	Unit	3	6	50,00%
18	Mobil Operasional LLAJ	Unit	2	3	66,67%
19	Motor Operasional LLAJ	Unit	3	6	50,00%
20	GPS	Buah	2	2	100,00%
21	Peralatan Room Kontrol ATCS	Set		1	0,00%
22	Menara dan Server ATCS	Set		1	0,00%
Jumlah Dokumen Perencanaan					
23	Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	Dokume n	-	1	0,00%
24	Databse Penyelenggaraan Perhubungan	Dokume n	-	1	0,00%
25	Dokumen Perencanaan ATCS	Dokume n	-	1	0,00%
RATA - RATA					26,39%

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2023

6. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Kegiatan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kompleks Perkantoran Terpadu Menggarawan dan KIR

Keliling di kecamatan – kecamatan untuk memudahkan masyarakat melakukan pengujian kendaraan bermotor. Pengujian kendaraan bermotor ini dilakukan selama 2 (dua) kali setahun. Pada tahun 2023 persentase kepemilikan KIR angkutan umum sebesar 31,46% dengan perbandingan jumlah kendaraan yang melakukan pengujian sebanyak 409 kendaraan dan 1300 kendaraan wajib uji.

Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah kendaraan yang melakukan pengujian}}{\text{Jumlah kendaraan yang harus melakukan pengujian}} \\
 & \text{Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum} = \frac{\text{Jumlah kendaraan yang melakukan pengujian}}{\text{Jumlah kendaraan yang harus melakukan pengujian}} \\
 & = \frac{409}{1300} \\
 & = 31,46\%
 \end{aligned}$$

7. Persentase Pemenuhan Insfrastruktur Pelayaran

Indikator pemenuhan infrastruktur pelayaran merupakan perbandingan jumlah sarana dan prasarana pelayaran yang telah ada dibandingkan dengan kebutuhan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan dalam rangka memberikan kemudahan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah khususnya untuk sektor transportasi laut seperti pembangunan pelabuhan, dermaga, penyediaan kapal penumpang, sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) dan fasilitas penunjang lainnya dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 58,21%.

Tabel 2. 115 Jumlah Infrastruktur Pelayaran

Uraian	Jumlah		
	Terpasang	Kebutuhan	Persentase
Kapal Antar Pulau	3	4	75,00
Pelabuhan	1	3	33,33
Lampu Penuntun Alur	16	22	72,73
Rambu	30	50	60,00
Dermaga Apung	1	2	50,00
Rata - Rata			58,21

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2023

8. Jumlah penumpang yang melalui terminal/dermaga/Pelabuhan (orang)

Jumlah penumpang dihitung berdasarkan jumlah penumpang yang naik dan turun yang melalui terminal dan pelabuhan. Pada tahun 2023 jumlah penumpang terminal dan pelabuhan berjumlah 22.890 penumpang. Berikut rekapitulasi data jumlah penumpang yang melalui terminal dan pelabuhan.

Tabel 2. 116 Data Penumpang Terminal Tahun 2023

No	Bulan	Penumpang Naik	Penumpang Turun
1	Januari	894	777
2	Februari	607	633
3	Maret	1130	1143
4	April	1183	1116
5	Mei	997	1160
6	Juni	888	894
7	Juli	813	790
8	Agustus	817	769
9	September	764	733
10	Oktober	900	923
11	November	824	798
12	Desember	1210	1195
Jumlah		11.027	10.931
Total		21.958	

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2023

Tabel 2. 117 Data Penumpang Pelabuhan Tahun 2023

No	Bulan	Kedatangan	Keberangkatan
1	Januari	50	20
2	Februari	26	39
3	Maret	42	14
4	April	33	172
5	Mei	0	0
6	Juni	114	83
7	Juli	96	24
8	Agustus	24	12
9	September	0	6
10	Oktober	Nihil	Nihil
11	November	35	63
12	Desember	30	49
Jumlah		450	482
Total		932	

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2023

2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika guna meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana maka bidang komunikasi dan informatika merancang suatu indikator kinerja. Adapun indikator kinerja bidang komunikasi dan informatika ditunjukan untuk menunjang kegiatan

pemerintahan dan seluruh masyarakat. Untuk lebih lanjut tentang kondisi umum capaian penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika akan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2. 118 Capaian Sasaran Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase digitalisasi layanan administrasi pemerintahan	3,125	6,25	21,21	15	20	25
2	Persentase digitalisasi layanan publik	3,125	6,25	18,18	15	20%	25
3	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	79,90	84,23	86,11	80	83	85

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2023

Tabel 2. 119 Target dan Capaian Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Persentase digitalisasi layanan administrasi pemerintahan	10	21,21%	212,1
2	Persentase digitalisasi layanan publik	10	18,18%	181,8
3	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	75	86,11%	115

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2023

Penjelasan capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pada indikator Persentase digitalisasi layanan administrasi pemerintahan dan Persentase digitalisasi layanan publik, mendapatkan angka capaian sasaran pada tahun 2023 sebesar 196,97% dengan interpretasi *Sangat Memuaskan*. Namun, capaian ini juga menjadi bahan evaluasi selanjutnya dalam menetapkan target kinerja yang lebih tepat dengan mempertimbangkan realisasi sebelumnya.

Transformasi digital merupakan sesuatu yang mutlak pada saat ini, Perubahan menuju ke arah digital atau digitalisasi harus dilakukan oleh pemerintah sendiri baik untuk layanan administrasi pemerintahannya maupun dalam layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Langkah transformasi digital ini pada prinsipnya dilakukan untuk menghadirkan pelayanan yang mampu beradaptasi sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu pemerintah menyadari bahwa pelayanan publik kini tak lagi hanya mengandalkan dari perspektif birokrasi semata, tapi juga harus

memperhatikan kepentingan masyarakat. Pada tahun 2023, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah membantu perangkat daerah dalam mengembangkan beberapa sistem untuk digitalisasi layanan baik untuk administrasi pemerintahan maupun layanan publik, antara lain :

- Pundok UMKM
- Sistem e-Kinerja Non ASN
- SEPAT (Sistem Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Terpadu)
- Dashbord – Cek Bansos (SIBos BelTim)
- Sistem Pengelolaan Retribusi Sampah
- SPBE – Manajemen Pengetahuan
- Dashboard – Realisasi Keuangan
- Teras Layanan APIP
- SIKOK(SI Kesehatan Orang Kampong Kite)

2. Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.

Sedangkan untuk indikator Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah, mendapatkan angka capaian sasaran pada tahun 2022 sebesar 84,23%, dengan interpretasi Sangat Memuaskan. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik tahun 2023 sebesar 86,11% dari target sebesar 75%. Hasil indeks ini didapatkan melalui kegiatan survei kepuasan masyarakat dengan teknik pemberian questioner elektronik yang sudah dipersiapkan kepada pengguna layanan dengan cara pengisian sendiri melalui e-survei selama periode 1 juli 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023. Pencapaian kinerja pada sasaran ini untuk tahun 2023 tercapai 115,83% kategori AA (sangat memuaskan). IKM merupakan hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017. Penilaian IKM terhadap pelayanan informasi publik ini terkait dengan layanan penyediaan data dan informasi publik yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Survei kepuasan masyarakat ini dilakukan secara online melalui link laman website Kabupaten Belitung Timur (belitungtimurkab.go.id) atau di link <https://survei.beltim.go.id/view/SKM2207274439>. Berdasarkan hasil survei, IKM terhadap pelayanan informasi publik sebesar 86,11 % dengan mutu layanan baik.

2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Untuk Meningkatkan tatakelola kelembagaan dan usaha koperasi serta usaha mikro yang berkelanjutan, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menetapkan *sasaran strategis* yang ingin dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan yaitu Persentase koperasi aktif dan Persentase usaha mikro yang naik kelas.

Selama ini kriteria UMKM yang digunakan adalah kenaikan omzet dan aset UMKM sebagaimana diklasifikasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, diharapkan UMKM mampu berkembang dari bisnis yang stagnan berdasarkan omzet, produktivitas, dan jumlah tenaga kerja. Kemudian mampu berubah dari usaha informal menjadi formal dan mampu melakukan inovasi, dalam menentukan UMKM naik kelas perlu diperhatikan hal-hal seperti terwujudnya seluruh variabel yang menjadi amanat PP Nomor 7 Tahun 2021 dan PP Nomor 8 Tahun 2021.

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Salah satu indikator aktif atau tidaknya sebuah Koperasi adalah diselenggarakannya rapat anggota tahunan (RAT) yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur, koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota minimal melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan aktif secara kelembagaan.

Capaian kinerja sasaran tersebut selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2. 120 Capaian Sasaran Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase koperasi aktif	64,84	56,43	56,46	67,70	70,10	72,50
2	Persentase usaha mikro yang naik kelas	0,30	13,19	7,56	2,20	2,30	2,40

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Tahun 2023

Tabel 2. 121 Target dan Capaian Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase koperasi aktif	65,30	56,46	86,46
2	Persentase usaha mikro yang naik kelas	2,10	7,56	360

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Tahun 2023

Penjelasan capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Indikator Persentase koperasi aktif

Persentase Koperasi Aktif adalah perbandingan antara jumlah koperasi yang masih melaksanakan kegiatan usaha terhadap total jumlah koperasi yang memiliki akta pendirian koperasi di Kabupaten Belitung Timur dalam satu tahun, dalam satuan persen. Semakin tinggi persentase koperasi aktif artinya semakin banyak jumlah unit koperasi yang aktif melaksanakan kegiatan usaha pada tahun tertentu terhadap total jumlah unit koperasi yang memiliki akta pendirian koperasi di Kabupaten Belitung Timur pada tahun tersebut.

Capaian kinerja sasaran tersebut selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2. 122 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022, Tahun 2023 dan Realisasi Akumulasi Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026 Indikator Persentase Koperasi Aktif

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Rencana Sesuai dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Persentase Koperasi Aktif	%	63	56,43	89,57	65,30	56,46	86,46	72,50	80

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian indikator tahun 2023 adalah sebesar 56,46,% (*Lima Puluh Enam Koma Empat Puluh Enam Persen*) dengan capaian kinerja indikator adalah sebesar 86,46% (*Delapan Puluh Enam Koma Empat Puluh Enam Persen*) atau interpretasi *tinggi*. Dibanding dengan Tahun 2022 Realisasi capaian indikator 56,43% (*Enam Puluh Empat Koma Delapan Puluh Empat Persen*) dengan capaian kinerja indikator adalah sebesar 89,57% (*Delapan Puluh Sembilan Koma Lima Puluh Tujuh Persen*).

Berdasarkan data tersebut terdapat penurunan indikator dimana realisasi tidak memenuhi target, dapat dinyatakan bahwa koperasi di Kabupaten Belitung Timur belum sepenuhnya mampu menyelesaikan laporan pertanggungjawab yang seharusnya dibuat setiap akhir periode sehingga mengakibatkan koperasi tidak dapat melaksanakan RAT. Tidak terlaksananya kegiatan RAT menunjukkan bahwa koperasi tidak mampu menyelesaikan laporan, selain itu saat ini masih banyak *koperasi* yang

kegiatan *usaha tidak berjalan*. Dan sampai dengan saat ini Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur masih terus melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi, serta bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi

Berdasarkan kelompok usaha yang dikelola, jumlah koperasi aktif dan tidak aktif di Belitung Timur tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 123 Jumlah Koperasi Aktif Berdasarkan Kelompok Usaha yang Dikelola Tahun 2023

No.	Kelompok Usaha	Koperasi Aktif	Koperasi Tidak Aktif	Jumlah
1	Koperasi Unit Desa	3	10	13
2	Koperasi Pertanian	0	2	2
3	Koperasi Perkebunan	53	8	61
4	Koperasi Nelayan	3	2	5
5	Koperasi Karyawan	2	7	9
6	Koperasi Kepolisian	0	1	1
7	Koperasi Serba Usaha	9	20	29
8	Koperasi Simpan Pinjam	3	1	4
9	Koperasi Pegawai Negeri	3	0	3
10	Koperasi Wanita	1	0	1
11	Koperasi Pertambangan	0	7	7
12	Koperasi Lainnya	6	6	12
Total		83	64	147

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Tahun 2023

Pertumbuhan jumlah koperasi di Kabupaten Belitung Timur terus meningkat dari tahun ke tahun, adapun koperasi baru tahun 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 124 Koperasi Baru Tahun 2023

No	Nama	Alamat	No Badan Hukum	Tanggal Badan Hukum
1	Koperasi Jasa Apri Belitung Timur	Manggar	AHU-0000179.AH.01.29.TAHUN 2023	12/01/2023
2	Koperasi Produsen Pengumbutan Maju Jaya	Kelapa Kampit	AHU-0000328.AH.01.29.TAHUN 2023	24/01/2023
3	Koperasi Produsen Kelubi Mitra Sejahtera	Manggar	AHU-0000714.AH.01.29.TAHUN 2023	16/02/2023
4	Koperasi Produsen Libud Agro Jaya	Kelapa Kampit	AHU-0001519.AH.01.29.TAHUN 2023	06/04/2023
5	Koperasi Produsen Plasma Mitra Utama Jaya	Kelapa Kampit	AHU-0002979.AH.01.29.TAHUN 2023	26/07/2023
6	Koperasi Konsumen Mitra Smansa Gantung	Gantung	AHU-0003070.AH.01.29.TAHUN 2023	31/07/2023
7	Koperasi Simpan Pinjam Alghi Jaya Makmur	Kelapa Kampit	AHU-0004592.AH.01.29.TAHUN 2023	01/11/2023

No	Nama	Alamat	No Badan Hukum	Tanggal Badan Hukum
8	Koperasi Jasa Burong Mandi Sejahtera	Damar	AHU-0004662.AH.01.29.TAHUN 2023	06/11/2023

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Tahun 2023

Terkait program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis keempat dengan indikator persentase koperasi aktif adalah terdapatnya alokasi dana DAK non fisik dari Kementerian Koperasi dan UKM RI yang kemudian digunakan dalam rangka pembangunan koperasi di Belitung Timur dengan melaksanakan kegiatan Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2. Indikator Persentase usaha mikro yang naik kelas

Usaha Mikro Naik kelas dapat diartikan dimana usahanya bisa semakin berkembang yang tentu diiringi dengan produktivitas, daya saing meningkat. sehingga berpotensi mencapai lebih tinggi dari sebelumnya. Persentase Peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil adalah perbandingan antara jumlah unit usaha mikro pada tahun t-1 yang mengalami peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil pada tahun t terhadap total jumlah unit usaha mikro pada tahun t-1 x 100 , dalam satuan persen, Semakin tinggi persentase peningkatan usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil artinya semakin banyak jumlah unit usaha mikro pada tahun t-1 yang mengalami peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. Capaian kinerja sasaran tersebut selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 125 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 Tahun 2023 dan Realisasi Akumulasi Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026 Indikator Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Rencana Sesuai dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Persentase Usa Mikro yang Naik Kelas	%	2	13,19	659,5	2,10	7,56	360	2,40	315%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Tahun 2023

Dari tabel data UMKM tahun 2019 - 2023 diatas dapat dihitung realisasi indikator adalah sebesar 7,56% (Tujuh Koma Lima Puluh Enam Persen),

sehingga capaian kinerja indikator adalah sebesar 360% (*Tiga Ratus Enam Puluh Persen*) atau interpretasi *sangat Tinggi*. Capaian kinerja indikator sangat jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Meningkatnya capaian indikator dikarenakan selain melihat pada kriteria berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, namun saat dilakukan pendataan UKM kami juga melihat klasifikasi usaha yang sudah tertera didalam Nomor Induk Berusaha (NIB).

Tabel 2. 126 Data UMKM Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2023

2020			2021			2022			2023		
Mikro	Kecil	Menengah	Mikro	Kecil	Menengah	Mikro	Kecil	Menengah	Mikro	Kecil	Menengah dan besar
12.061	328	21	12.713	329	21	16.098	379	35	18.834	410	36 +31
12.410			13.063			16.512			19.311		

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Tahun 2023

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur sampai saat ini masih melaksanakan pembinaan dan pendampingan secara kontinyu dan berkelanjutan, mendorong peningkatan kreatifitas dan inovasi produk kepada pelaku usaha dengan melaksanakan pelatihan dan pendampingan, meningkatkan akses pemasaran bagi produk UMKM dan pemanfaatan teknologi informasi. Untuk mendukung program dan kegiatan yang mendukung indikator persentase usaha mikro yang naik kelas terdapat Dana DAK non fisik dari Kementerian Koperasi dan UKM RI yang kemudian digunakan dalam rangka pemberdayaan UMKM di Belitung Timur.

2.1.3.2.12 Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur. Urusan Penanaman Modal ini meliputi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus untuk mengurangi kemiskinan, maka salah satu kebijakan yang penting adalah meningkatkan nilai realisasi investasi baik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Guna menarik investasi ke daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menggali segala

potensi yang ada di daerahnya. Pemerintah Daerah harus mempertemukan antara keinginan investor dan keinginan daerah. Bagi investor daya tarik ini tidak hanya berupa sumber daya alam saja yang ada di daerah, tetapi juga variabel yang mendukungnya, seperti regulasi daerah, sumber daya manusia dan sebagainya.

Tabel 2. 127 Capaian Sasaran Urusan Penanaman Modal Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Sedang (79,99)	Kualitas Tinggi (81,50)	Kualitas Tertinggi (94,53)	Sedang	Sedang	Tinggi
2	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	83,33 persen	100 persen	100 persen	69 persen	72 persen	74 persen
3	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	53,06 persen	26 persen	32,80 persen	11,60 persen	11,80 persen	12 persen

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2023

Tabel 2. 128 Target dan Capaian Urusan Penanaman Modal Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Tinggi (81,50)	Kualitas Tertinggi (94,53)	115,99 persen
2	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	100 persen	100 persen	100 persen
3	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	64,84 persen	32,80 persen	50,59 persen

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2023

Penjelasan capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan

Nilai realisasi indikator rata - rata tingkat kepatuhan pelayanan berdasarkan penilaian kepatuhan pelayanan public yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Nilai Realisasi tingkat kepatuhan pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 sebesar 94,53 dengan KATEGORI A; ZONA HIJAU DAN OPINI KUALITAS TERTINGGI, lebih tinggi dari nilai realisasi tingkat kepatuhan tahun 2022 sebesar 81,50 dengan KATEGORI B; ZONA HIJAU DAN OPINI KUALITAS TINGGI. Untuk target tingkat kepatuhan pelayanan public tahun 2023 ditetapkan TINGGI dengan nilai sebesar 81,50, sehingga capaian kinerja tahun 2023 diperoleh angka sebesar 115,99 persen. Target tahun 2023 ditetapkan lebih tinggi dari target yang ada pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur dikarenakan capaian realisasi

pada tahun 2022 sebesar 81,50 dengan kategori Kualitas Tinggi, sedangkan target pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten yaitu opini sedang dengan nilai 55,00 – 79,99.

Peningkatan ini dikarenakan adanya perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan dalam pelayanan publik yang diimplementasikan dalam pemenuhan standar pelayanan, maklumat pelayanan dan pengelolaan pengaduan. Menurut Ombudsman dalam Ringkasan Eksekutif Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2023 secara nasional menunjukkan peningkatan yang sangat baik, terlihat dari meningkatnya angka pada zona hijau dan turunnya angka pada zona kuning dan merah. Pada tahun 2022 secara nasional jumlah entitas zona kepatuhan Hijau berjumlah 272 atau sebesar 46,42 persen. Pada tahun 2023 zona kepatuhan hijau berjumlah 414 atau 70,70 persen.

Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan tidak memiliki standar nasional, namun memiliki data Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten secara Nasional berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 418 Tahun 2023 Tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 pada tanggal 04 Desember 2023. Nilai Kepatuhan Tertinggi Tingkat Kabupaten diperoleh Kabupaten Tuban dengan Nilai sebesar 97,44 berada pada Zona Hijau dengan Opini Kualitas Tertinggi. Sedangkan untuk Kabupaten Belitung Timur berada pada peringkat 40 (empat puluh) dengan nilai 94,35 berada pada Zona Hijau dengan Opini Kualitas Tertinggi.

Berdasarkan data tersebut Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitung Timur diperoleh sebesar 94,53, sedikit lebih tinggi dari nilai yang diperoleh Kabupaten Belitung Timur. Namun apabila dibandingkan dengan nilai Nasional kepatuhan tertinggi Pemerintah Daerah Kabupaten, yaitu Kabupaten Tuban, capaian Nilai Kepatuhan DPMPTSP hanya sebesar 97,01 persen dari nilai kepatuhan nasional kabupaten tertinggi di tahun 2023.

2. Persentase Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi

Data realisasi indikator persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi diambil berdasarkan data dan informasi perizinan

dan non perizinan yang terintegrasi dalam sistem informasi. Dalam hal ini sistem informasi yang dimaksud adalah informasi yang terintegrasi dalam website Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur (<http://dpmptsp.beltim.go.id>).

Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang tersedia dan dijadikan indikator untuk perhitungan realisasi adalah:

1. Jenis Perizinan
2. Persyaratan Izin
3. Standar Operasional Prosedur (SOP)
4. Jumlah Perizinan
5. Data Jumlah Realisasi Investasi
6. Hasil Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target indikator Persentase Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 ditetapkan sebesar 100 persen lebih besar dari target yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur yaitu sebesar 67 persen. Perbedaan ini disebabkan realisasi capaian tahun 2022 yang sudah mencapai 100 persen, sudah melebihi target indikator tahun 2023 pada Renstra.

Perolehan capaian realisasi indikator persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi tahun 2023 diperoleh sebesar 100 persen, seluruh data dan informasi terkait perizinan dan non perizinan sudah terintegrasi melalui laman website <http://dpmptsp.beltim.go.id>. Untuk realisasi tahun 2022 indikator ini capaiannya juga sebesar 100 persen. Tidak ada peningkatan atau penurunan pada capaian realisasi indikator ini.

3. Persentase penambahan investor yang merelisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM

Realisasi indikator persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) diambil berdasarkan data LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023. LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. Investor domestik maupun asing diwajibkan untuk menyampaikan LKPM kepada Kementrian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memotret investasi yang ada di Indonesia.

Target pada indikator ini pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 ditetapkan sebesar 64,84 persen lebih besar dari target yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur yaitu sebesar 11,4 persen. Perbedaan ini dikarenakan pada tahun 2022 target tersebut ditetapkan, berdasarkan data realisasi tahun 2021 sebesar 53,06 persen.

Realisasi capaian indikator Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM tahun 2023 diperoleh sebesar 32,08 persen sehingga capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan sebesar 50,59 persen dengan interpretasi kinerja rendah, sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar 26 persen. Tidak tercapainya target kinerja di tahun 2023 dikarenakan penetapan target yang terlalu tinggi. Namun apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 terjadi peningkatan kinerja sebesar 6,8 persen.

Adapun yang menyebabkan meningkatnya realisasi persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya baik PMDN maupun PMA adalah meningkatnya intensitas pengawasan penanaman modal serta dilaksanakannya bimbingan teknis maupun sosialisasi kepada pelaku usaha, yang berdampak pada meningkatnya pelaku usaha yang melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM, sehingga persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) ikut meningkat.

Tabel 2. 129 Data Penanam Modal yang Melaporkan Kegiatan Investasi Tahun 2016 - 2023

STATUS PERUSAHAAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PMDN	43	48	51	64	88	140	176	237
PMA	8	8	10	10	10	10	13	14
Jumlah Perusahaan	51	56	61	74	98	150	189	251
Bertambah	0	5	5	13	24	52	39	62

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2023

2.1.3.2.1 Kepemudaan dan Olahraga

3

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Belitung Timur harus terlebih dahulu merumuskan visi dan misi tersebut ke dalam bentuk yang lebih nyata dan terarah. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu strategis yang merupakan faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya

sehingga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi lebih rasional.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan tersebut harus konsisten dengan tupoksi yang kemudian akan menjadi arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang akan dicapai kedepan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktifitas/kegiatan. Sejalan dengan kedudukan tugas pokok dan fungsi, maka dirumuskan tujuan yang merupakan tujuan RPJMD Kabupaten Belitung Timur yaitu:

1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan;
2. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja;
3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Dalam mencapai tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur merumuskan Sasaran jangka menengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas daya saing kepemudaan;
2. Meningkatkan kapasitas daya saing kepramukaan;
3. Meningkatkan kapasitas daya saing keolahragaan;
4. Terwujudnya Pelayanan Dan Ketatalaksanaan Perkantoran Yang Efektif dan Efisien.

Tabel 2. 130 Capaian Sasaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	63.64%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Wirausaha Muda	85%	90%	84.44%	2.5%	2.75%	3%
3	Cakupan Pelatih dan wasit olahraga yang bersertifikasi	98.21%	83.84%	83.90%	90%	95%	100%
4	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tingkat Partisipasi Kepramukaan dalam pengembangan kreativitas pemuda	100%	100%	100%	65%	70%	75%

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Tahun 2022

Tabel 2. 131 Target dan Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	100%	100%	100%
2	Persentase Wirausaha Muda	2.25%	1.9%	84.44%
3	Cakupan Pelatih dan wasit olahraga yang bersertifikasi	85%	83.90%	83.90%
4	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	100%	100%	100%
5	Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga	100%	100%	100%
6	Tingkat Partisipasi Kepramukaan dalam pengembangan kreativitas pemuda	55%	55%	100%

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Tahun 2022

Penjelasan/narasi capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Indikator Persentase organisasi pemuda yang aktif

Kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan, dapat menjadi pemicu dan pemacu para generasi muda, serta wadah perkumpulannya, Organisasi Kepemudaan (OKP), untuk menata dan mengembangkan diri, serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki, agar dapat berkiprah dan berperan aktif dalam pembangunan. Peran Ormas sangatlah strategis dalam memfungsikan diri sebagai benteng pertahanan sekaligus arena aktualisasi para anggotanya. Berkenaan dengan Organisasi Kepemudaan, pada tahun 2023 Jumlah Organisasi Kepemudaan yang di Kabupaten Belitung Timur berbeda dengan Tahun 2022 yaitu sebanyak 31 (tiga puluh satu) Organisasi Kepemudaan (OKP), yang mana pada Tahun 2022 masih terdapat 33 (tiga puluh tiga) organisasi pemuda yang masih aktif, sedangkan pada tahun 2023 melalui pembinaan dan koordinasi aktif yang berkelanjutan dari 31 (tiga puluh satu) organisasi yang sebelumnya aktif terdapat 33 (tiga puluh tiga) organisasi yang masih aktif. Pelaksanaan pembinaan organisasi kepemudaan merupakan upaya pemerintah daerah mengoptimalkan peran organisasi agar kehadirannya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak, oleh karena itu pada Tahun 2023 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur melalui bidang Kepemudaan melakukan langkah-langkah pembinaan terhadap 33 Organisasi pemuda yang terdaftar, agar nantinya organisasi kepemudaan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan dan pengembangan kepemudaan di daerah.

2. Indikator Persentase Wirausaha Muda

Melalui Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan

dengan Dunia Usaha, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur berupaya melakukan pengembangan kewirausahaan dengan memfokuskan pada upaya intervensi kelompok pemuda fase pra wirausaha, yang mana pada Tahun 2023 Dinas Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Belitung Timur melatih 147 (seratus empat puluh tujuh) pemuda untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan.

Salah satu bentuk intervensi yang dilakukan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur adalah berupaya menumbuhkan wirausaha pemuda dikalangan pemuda, melalui penumbuhan minat, pembentukan mindset dan pengembangan kompetensi wirausaha, serta memperbaiki lingkungan atau ekosistem pengembangan kewirausahaan pemuda.

3. Indikator Cakupan Pelatih dan wasit olahraga yang bersertifikasi

Indikator Cakupan pelatih dan wasit olahraga yang bersertifikasi adalah merupakan indikator untuk melihat peningkatan jumlah Pelatih dan wasit olahraga yang memiliki kompetensi dan sertifikasi sebagai pelatih dan wasit olahraga.

Pelatih dalam olahraga prestasi mempunyai tugas untuk membantu atlet untuk mencapai prestasi maksimal. Pelatih diakui keberhasilannya dalam melatih bila atlet binaannya bisa meraih kemenangan dan mendapatkan prestasi tinggi. Keberhasilan dan kegagalan atlet dalam suatu pertandingan dipengaruhi program latihan dari pelatih.

4. Indikator Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Cakupan Pembinaan Atlet Muda di Kabupaten Belitung Timur terjadi adanya kenaikan prestasi yang terjadi antar tahun mengindikasikan bahwa adanya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan. Berbagai faktor yang mendukung peningkatan kinerja tersebut antara lain adanya Kegiatan pertandingan cabang- cabang Olahraga di tingkat provinsi dan Kabupaten.

Peningkatan Pembinaan dan pengembangan atlet muda di Kabupaten Belitung Timur dikalangan pelajar dilakukan melalui Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD), dimana pada tahun 2023 jumlah Atlet muda yang mendapatkan pembinaan ada sebanyak 146 orang atlet muda dari 13 Cabang olahraga.

5. Indikator Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga

Cakupan pembinaan olahraga oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Cakupan pembinaan olahraga dapat diketahui melalui Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. Dari program tersebut teridentifikasinya bakat - bakat pelajar dari setiap cabang olahraga yang selanjutnya akan mengikuti perlombaan/kejuaraan tingkat Daerah maupun tingkat Provinsi.

Pembinaan cabang olahraga dilakukan melalui penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah, pengiriman atlet cabang olahraga untuk mengikuti pertandingan / kejuaraan di Luar daerah, serta pembinaan rutin bagi cabang olahraga, baik itu yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur, maupun yang dilakukan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Belitung Timur bekerja sama dengan Pengcab pada masing masing cabang olahraga.

6. Indikator Tingkat Partisipasi Kepramukaan dalam pengembangan kreativitas pemuda

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan akutabilitas kinerja terhadap tingkat partisipasi Kepramukaan dalam Pengembangan Kreatifitas Pemuda, dimana gerakan pramuka menjadi salah satu komponen potensial dalam mendukung pengembangan kreatifitas dan inovasi pemuda dalam setiap kegiatan kepramukaan. Hal itu tentunya untuk menarik minat kaum muda sehingga mau belajar membentuk karakter dan nilai-nilai revolusi mental melalui kegiatan kepramukaan yang mencerminkan partisipasi, bakti, prestasi, prakarsa dan keteladanan. Kegiatan pramuka dinilai sangat penting untuk membentuk karakter generasi muda, pramuka banyak mengajarkan nilai-nilai pendidikan, moral, kedisiplinan yang berpengaruh besar terhadap pengembangan karakter generasi muda.

Tujuan dari gerakan pramuka sebagaimana diamanatkan antara lain a). membentuk kader bangsa dan sekaligus kader pembangunan yang beriman dan bertaqwa serta berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. b) membentuk sikap dan perilaku yang positif, menguasai keterampilan dan kecakapan serta memiliki ketahanan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual dan fisik sehingga dapat menjadi manusia, yang percaya kepada kemampuan sendiri, sanggup dan mampu membangun dirinya sendiri

serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan masyarakat, bangsa dan negara.

2.1.3.2.14 Statistik

Data yang dihasilkan dari penyelenggaraan statistik sangat diperlukan untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, sehingga data statistik yang dihasilkan oleh seluruh pengampu kegiatan statistik harus akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi antar instansi Pusat dan Instansi daerah, semua itu dapat memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019.

Tabel 2. 132 Capaian Sasaran Urusan Statistik Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2023

Tabel 2. 133 Target dan Capaian Urusan Statistik 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi	Ada	Ada	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2023

Penjelasan/narasi capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Untuk indikator sasaran Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi, mendapatkan angka capaian sasaran pada tahun 2023 sebesar 100% dengan interpretasi Sangat Memuaskan. Namun, capaian ini juga menjadi bahan evaluasi selanjutnya dalam menetapkan target kinerja yang lebih tepat dengan mempertimbangkan realisasi sebelumnya.

Sistem data dan statistik yang terintegrasi ini merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dimana sistem tersebut harus diselenggarakan dengan prinsip pengelolaan SDI yaitu:

1. Memenuhi standar data;
2. Memiliki metadata;
3. Memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
4. Menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Sistem integrasi (*integrated system*) adalah sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional. Sistem terintegrasi akan menggabungkan komponen sub-sub sistem ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari sub sistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem.

Pengintegrasian sistem informasi merupakan salah satu konsep kunci dari sistem Informasi Manajemen. Berbagai sistem dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluannya. Aliran informasi diantara sistem sangat bermanfaat bila data dalam file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya, atau output suatu sistem menjadi input bagi sistem lainnya.

Konsep Integrasi sistem adalah suatu konsep sistem yang dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluan. Hal ini sangat bermanfaat bila suatu data dalam file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya atau output suatu sistem menjadi Input sistem lainnya.

Keuntungan dari integrasi sistem ini adalah membaiknya suatu arus informasi. Hal ini merupakan alasan yang kuat untuk mengutamakan (mengunggulkan) sistem informasi terintegrasi karena tujuan utama dari sistem informasi adalah memberikan informasi yang benar pada saat yang tepat. Keuntungan lain dari pengintegrasian sistem adalah sifatnya yang mendorong manajer untuk membagikan (mengkomunikasikan) informasi yang dihasilkan oleh unit kerjanya agar secara rutin mengalir ke sistem lain yang memerlukannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Integrasi dari sebuah sistem diperlukan karena:

1. Adanya kebutuhan konstituen untuk bekerja sama antar Perangkat Daerah dalam suatu pemerintahan.
2. Terjadinya pengolahan data antar sistem informasi tiap OPD yang saling terkait, sehingga untuk melengkapi suatu informasi dibutuhkan proses pertukaran data dengan sistem informasi yang lain.
3. Dapat memungkinkan penyediaan *realtime* pengaksesan data.
4. Mengubah data untuk analisis dan pertukaran data, mengatur penempatan data untuk kinerja.

Realisasi indikator ini diukur dengan rumusan sebagai berikut:

Keberadaan sistem data dan statistik yang terintegrasi [Ada / Tidak Ada]

Sejak tahun 2021, Diskominfo Belitung Timur telah membangun Sistem Data dan Statistik Terintegrasi yang bisa diakses melalui: <https://sdi.beltim.go.id/>. Selanjutnya pada tahun 2022 dilakukan pengembangan sistem lebih lanjut dengan mengakomodasi kegiatan statistik sektoral yang cara pengumpulan datanya dilakukan melalui survei. Sistem survei statistik sektoral terintegrasi ini bisa diakses melalui halaman <https://sdi.beltim.go.id/> menu survei, atau bisa secara langsung melalui <https://survei.beltim.go.id/>. Berikutnya pada tahun 2023 dilakukan pengembangan Sistem Data dan Statistik Terintegrasi dalam format *mobile web application* yang dinamai Mentudong Beltim yang bisa diakses melalui: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mentudong.sdibeltim>

Dalam pencapaian kinerja sasaran tahun 2023, target yang telah ditetapkan sudah tercapai 100% dengan adanya sistem data dan statistik terintegrasi di <https://sdi.beltim.go.id/>, <https://survei.beltim.go.id/>, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mentudong.sdibeltim>

Namun prinsip-prinsip penyelenggaraan SDI pada sistem tersebut belum terlaksana sepenuhnya, terutama dari sisi konten/isi sistem

2.1.3.2.1 Persandian

5

Pada tataran Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tertuang didalam pasal 12 poin (2) huruf o, Persandian merupakan urusan Wajib non Pelayanan Dasar. Selain Pembagian urusan berdasarkan Daerah Kabupaten/Kota dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa urusan persandian merupakan satuperumpunan dengan urusan komunikasi dan informatika serta urusan persandian. Perumpunan ini digunakan bilamana urusan pemerintahan persandian tidak memenuhi isyarat untuk dibentuk sebagai dinas tersendiri.

Untuk mengetahui Indikator sasaran urusan persandian maka digunakan SNI/ISO/IEC 27001 atau disebut juga dengan Indeks Keamanan Informasi (KAMI). Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan

untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi/Perusahaan. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2013.

Berkenaan dengan amanah peraturan perundang-undangan di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur menetapkan sasaran daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur pada urusan persandian yaitu : Meningkatkan keamanan informasi; dengan indikator kinerja sasarannya yaitu: tingkat kematangan keamanan informasi (Level II) dimana untuk penetapan Level tersebut bisa dilakukan secara mandiri, ataupun bisa dilaksanakan melalui stakeholder yang ditunjuk yang bersertifikasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat dalam penetapan nilai Level yang di dapat dari suatu instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Tabel 2. 134 Capaian Sasaran Urusan Persandian Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	Capaian		Target			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	Level II	Level II	Level II	Level III	Level III	Level III

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2022

Tabel 2. 135 Target dan Capaian Urusan Persandian 2022

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	Level II	Level II	35,03

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2022

Penjelasan capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Tingkat Kematangan Keamanan Informasi

Untuk indikator ini mendapatkan angka capaian sasaran pada tahun 2023 sebesar 35,03%, artinya ada penurunan nilai yang didapatkan pada tahun sebelumnya hal ini disebabkan kegiatan ini masih dilakukan penilaian secara mandiri di tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan alat evaluasi yang ada di ISO 27001 akan tetapi masih banyak yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nilai yang layak.

Capaian ini juga menjadi bahan evaluasi selanjutnya dalam menetapkan target kinerja yang lebih tepat dengan mempertimbangkan realisasi sebelumnya.

Pada urusan Persandian, alat evaluasi yang digunakan untuk menentukan nilai Indikator sasaran adalah Indeks KAMI (ISO 27001). Indeks Keamanan Informasi adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi/Perusahaan. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2013.

2.1.3.2.1 Kebudayaan

6

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, fungsi penyelenggaraan urusan kebudayaan adalah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan pemajuan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
- b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah;
- c. Pembinaan tenaga lembaga kebudayaan yang penganutnya dalam daerah;
- d. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
- e. Pembinaan sejarah lokal;
- f. Penetapan cagar budaya peringkat daerah;
- g. Pengelolaan cagar budaya peringkat daerah; dan
- h. Penerbitan izin membawa cagar budaya keluar daerah dalam 1 (satu) provinsi.

berdasarkan fungsi dimaksud dirumuskan indikator sasaran urusan kebudayaan ke dalam rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026. Adapun capaian sasaran urusan kebudayaan Tahun 2021-2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 136 Capaian Sasaran Urusan Kebudayaan Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan (benda/ situs/ kawasan)	1521	1421	1434	150	200	250
2	Jumlah Museum dan Galeri Maritim yang dikelola dengan	2	2	3	3	3	3

	baik (museum/ galeri maritim)						

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2023

Tabel 2. 137 Target dan Capaian Urusan Kebudayaan Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan (benda/ situs/ kawasan)	100	1434	100
2	Jumlah Museum dan Galeri Maritim yang dikelola dengan baik (museum/ galeri maritim)	3	2	66,66

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2023

Penjelasan capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah Cagar Budaya yang dikelola dan dilestariakan

Capaian indikator jumlah cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan merupakan artefak yang sebagian besar berada di Galeri Maritim Belitung Timur dan Museum Buding, jumlah ini merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya, adapun barang cagar budaya selain koleksi Museum, koleksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur juga hibah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Hibah dari masyarakat.

Cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan akan terus ditingkatkan pengelolaannya, perlu adanya upaya penanggulangan serta pemeliharaan agar dapat memperpanjang usia benda cagar budaya dimaksud. Benda cagar budaya yang pada kenyataannya merupakan barang tua yang harus dirawat dengan baik, perlu upaya untuk terus mempertahankan keberadaan cagar budaya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan keberadaan benda cagar budaya.

2. Indikator Jumlah Museum dan Galeri Maritim yang dikelola dengan baik

Capaian indikator jumlah Museum dan Galeri Maritim yang dikelola dengan baik berjumlah 2 unit, pada saat ini fokus pengelolaan Museum bukan pada pembangunan gedung melainkan pada penataan koleksi sesuai kebutuhan dan nuansa kekinian sehingga bisa mendongkrak segmentasi pasar, promosi serta nilai estetika dan ilmiahnya tanpa harus mengganggu fungsi dasar Museum.

Selain itu pengelolaan Museum juga mencuatkan nilai unggul koleksi yang tersimpan dan disajikan kepada publik, Rencana kedepannya akan merevitalisasi sistem pengelolaan Museum agar lebih adaptif dengan

perkembangan zaman serta kompatibel dengan pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif

2.1.3.2.17 Perpustakaan

Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur juga melaksanakan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional, perpustakaan bisa memainkan perannya. Dengan mengoptimalkan perpustakaan sebagai pusat transfer ilmu pengetahuan, masyarakat bisa menjadikan perpustakaan sebagai tempat untuk mengembangkan kemampuan diri. Melalui program tersebut Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur mengedukasi masyarakat dan memberikan solusi bagi warga di desa yang mengalami kesulitan mengakses bacaan. literasi bukan sekadar menghitung angka dan melek huruf. Idealnya, ada empat tingkatan literasi mulai dari kemampuan mengumpulkan sumber bahan bacaan; memahami apa yang tersirat dari yang tersurat; kemampuan mengungkapkan ide, inovasi, teori, dan keterampilan baru; hingga pada level tertinggi adalah kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global. Perpustakaan sebagai pusat layanan literasi dan para pegiat literasi diajak agar menjadi mitra utama kegiatan masyarakat dalam memberikan sumber informasi dan pengetahuan yang memadai serta menggerakkan budaya hidup bersih dan sehat.

Adapun capaian urusan urusan Perpustakaan Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 138 Capaian Sasaran Urusan Perpustakaan Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	68,97	69,01	69,34	74.85	74.90	74.90
2	Indeks Pembagunan Literasi Masyarakat	23,02	23,02	17,44	23.28	23.29	23.29

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2023

Tabel 2. 139 Target dan Capaian Urusan Perpustakaan Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	74.80	69,34	92 %
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	23.27	17,44	98 %

Sumber : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2023*

Penjelasan capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

Dengan kondisi pandemi covid – 19 pada tahun 2021 Layanan Perpustakaan dan Kearsipanyang umumnya dimanfaatkan oleh pemustaka di antaranya layanan sirkulasi dan referensi, biasanya diakses secara langsung dengan mendatangi gedung perpustakaan. Namun pada tahun 2021 layanan Perpustakaan dan Kearsipandi lakukan dengan tatap muka, non tatap muka dan virtual. Pada tahun 2021 nilai TGM dinas Perpustakaan dan Kearsipanbelitung timur mampu mencapai nilai 68,97 dan pada tahun 2023 nilai TGM meningkat menjadi 69,01. Perbandingan untuk kinerja pada tahun 2022 dengan tahun 2023 juga mengalami peningkatan.

2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

IPLM adalah instrumen pengukuran tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat. Karakteristik IPLM lebih memfokuskan pada sisi hulu yakni pengembangan dan penguatan kelembagaan dan infrastruktur perpustakaan. IPLM adalah upaya formulasi kebijakan dalam pengembangan dan pembinaan semua jenis perpustakaan yang berdasarkan pada Standar Nasional Perpustakaan.

Dari hasil perhitungan IPLM pada tahun 2021 dan 2023 mencapai kinerja dengan persentase sebesar 98%. Pencapaian kinerjanya masih sama dengan tahun sebelumnya dengan memperoleh kategori Tinggi.

2.1.3.2.18 Kearsipan

Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang dibuat oleh penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat untuk pembangunan yang menjadi salah satu bahan informasi penting bagi pertanggungjawaban generasi masa lalu dan yang akan datang.

Nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan laporan hasil pengawasan dan hasil monitoring tindaklanjut pengawasan kearsipan eksternal bahwa penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan dimana nilai pada tahun 2017 sebesar (44,98) atau kategori (buruk), nilai tahun 2018 (57,46) atau kategori (kurang), dan pada tahun 2019 memperoleh nilai (73,71) dengan kategori (sangat baik). Sedangkan pada tahun 2020 nilai hasil monitoring pengawasan kearsipan memperoleh nilai 83,42 (Memuaskan) Predikat A dan untuk tahun 2021 disamakan nilai nya dengan tahun 2020. Pada tahun 2023 juga masih memperoleh Predikat A dengan kategori Memuaskan.

Tabel 2. 140 Capaian Sasaran Urusan Kearsipan Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	75,85	76,08	76,07	67	68	69
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	91,90	96,66	100	64	65	66

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2023

Tabel 2. 141 Target dan Capaian Urusan Kearsipan Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	66	76,07	115
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	63	100	158

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2023

Penjelasan capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional
Realisasi capaian indikator Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pada tahun 2023 sebesar 76,07% menurun jika dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 76,07 %. Adapun capaian kinerja tahun 2023 sebesar 115% , dimana target indikator tahun 2023 sebesar 66%
2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
Realisasi capaian indikator Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat pada tahun 2023 sebesar 100% meningkat jika dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 96,66%. Adapun capaian kinerja tahun 2023 sebesar 158% , dimana target indikator tahun 2023 sebesar 63%

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Posisi geografis Kabupaten Belitung Timur yang berada di jalur Selat Karimata, merupakan salah satu potensi perikanan dan kelautan yang dimiliki wilayah ini. Wilayah perairan Belitung Timur merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan. Sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Belitung Timur umumnya digunakan

masyarakat untuk kegiatan penangkapan ikan. Para nelayan melakukan penangkapan terhadap jenis ikan pelagis besar (ikan tongkol, tuna, cakalang, tenggiri dan lain-lain), pelagis kecil (ikan teri, layang, selar dan lain-lain), ikan demersal (kurisi, ekor kuning, kakap merah, kerapu dan lain-lain), hewan berkulit keras (udang, lobster, kepiting dan rajungan) dan binatang lunak (cumi-cumi dan sotong). Nelayan di Kabupaten Belitung Timur masih banyak yang termasuk dalam kategori nelayan kecil karena armada perahu/kapal yang dipakai untuk melakukan aktifitas penangkapan ikan rata-rata masih dibawah 5 GT (*Grosstone*). Perahu/kapal penangkapan ikan Nelayan di Belitung Timur didominasi oleh kapal motor dan setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah armada. Penangkapan ikan di perairan Belitung Timur pada umumnya masih dilakukan dalam usaha skala kecil, belum menggunakan teknologi canggih. Secara umum, bubu merupakan alat tangkap ikan yang dominan di Kabupaten Belitung Timur, diikuti oleh pancing ulur *trammel net* dan jaring insang. Dengan melihat dominasi jenis alat tangkap tersebut, sumberdaya ikan yang ditangkap adalah ikan karang atau terumbu karang, diikuti oleh ikan pelagis. Selain bubu, ikan demersal yang ada juga dapat ditangkap dengan jaring insang dasar (*bottom gillnet*) dan pancing ulur (*hand line*), ikan pelagis dapat ditangkap dengan jaring insang permukaan (*drift gillnet*) dan pancing tonda (*troll line*), sedangkan *trammel net* terutama ditujukan untuk menangkap udang dan beberapa jenis ikan demersal. Penangkapan ikan di perairan Belitung Timur dipengaruhi oleh dua musim yaitu musim barat (bulan Desember–Februari) dan musim timur (Juli–September) pada sepanjang tahun. Potensi perikanan laut terdapat di 6 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Manggar, Damar, Kelapa Kampit, Simpang Pesak Gantung dan Dendang.

Selain kegiatan penangkapan ikan, kegiatan pembudidayaan ikan juga menjadi salah satu sektor perikanan yang sudah dilirik oleh masyarakat Belitung Timur. Perkembangan produksi perikanan budidaya Kabupaten Belitung Timur cenderung terus mengalami peningkatan yang diantaranya dipengaruhi oleh meningkatnya ketersediaan benih, animo masyarakat untuk budidaya dan konsumsi ikan hasil budidaya yang semakin tinggi, maupun fasilitasi sarana dan prasarana budidaya dari pemerintah. Jenis komoditas yang umumnya dikembangkan oleh masyarakat Belitung Timur diantaranya ikan lele (*Clarias sp*),

ikan nila (*Oreochromis niloticus*), ikan patin (*Pangasius pangasius*), ikan kerapu (*Epinephelus* sp), ikan gurame (*Osphronemus goramy*), budidaya ikan arwana (*Scleropages formosus*) dan beberapa jenis ikan hias, serta ikan cempedik (*Osteochilus spilurus*) menjadi ikan khas sungai bernilai ekonomis tinggi di Belitung Timur sebagai ikan konsumsi, hingga terbaru berkembang beberapa investor Udang Vaname (*Litopenaeus vanamei*). Dari sejumlah komoditas yang dikembangkan tersebut, hanya ikan arwana (*Scleropages formosus*) dan ikan cempedik (*Osteochilus spilurus*) yang merupakan ikan lokasi asli Belitung Timur, selebihnya merupakan ikan introduksi dari luar Belitung Timur. Pembangunan sektor perikanan budidaya diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan pada peningkatan pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat khususnya pembudidaya ikan. Sektor perikanan budidaya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi sektor unggulan dalam pembangunan perekonomian daerah Kabupaten Belitung Timur. Secara umum potensi perikanan budidaya dapat dilihat dari luasan potensial yang ada di Kabupaten Belitung Timur dengan luas perairan 16.173,958 ha, perairan payau 264.890,258 ha dan perairan tawar 281,065 ha. Dari luas tersebut baru 22,37 ha yang telah dimanfaatkan untuk perikanan budidaya. Belitung Timur memiliki beberapa perairan yang berpotensi sebagai wilayah pengembangan budidaya air laut. Adapun kawasan peruntukan air laut antara lain terdapat di Kecamatan Gantung, Kelapa Kampit, dan Simpang Pesak. Komoditas budidaya ikan air laut yang masih aktif hingga saat ini adalah ikan kerapu. Media yang digunakan untuk Budidaya ikan kerapu umumnya menggunakan Keramba Jaring Apung (KJA) HDPE. Budidaya yang pernah dilakukan di Belitung Timur adalah tiram mutiara, rumput laut, teripang dan rajungan. Perkembangan budidaya ikan kerapu di Kabupaten Belitung Timur terus mengalami peningkatan karena kebutuhan pasar yang terbuka luas sampai pasar internasional. Kabupaten Belitung Timur secara geografis mempunyai potensi untuk budidaya ikan air payau khususnya budidaya udang *vannamei*. Wilayah yang memiliki beberapa perairan yang berpotensi sebagai area pengembangan budidaya air payau, khususnya udang *vannamei* pada kawasan Selatan Belitung Timur. Adapun area tersebut terdiri dari Desa Tanjung Kelumpang, Desa Dukong.

Muara dari kegiatan produksi perikanan baik tangkapan maupun budidaya adalah produksi olahan hasil perikanan. Pengolahan hasil perikanan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Pengolahan produk memiliki peran yang cukup penting dalam rangka memanfaatkan hasil-hasil perikanan yang telah didapatkan dari sektor penangkapan maupun budidaya perikanan serta meningkatkan nilai ekonomisnya ke arah yang lebih tinggi. Produk olahan ikan merupakan salah satu produk yang diminati masyarakat luas. Dinas Perikanan terus berupaya untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat dengan terus melaksanakan sosialisasi tentang manfaat mengkonsumsi ikan sesuai dengan agenda Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam mencanangkan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) sebagai salah satu langkah untuk membangun kesadaran dan pemahaman manfaat makan ikan agar masyarakat mencintai dan menjadikan ikan sebagai menu utama. Selain itu, Dinas Perikanan terus melakukan pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengolahan bagi UPI untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi ikan masyarakat. Melalui kegiatan diversifikasi produk memberikan banyak pilihan kepada konsumen untuk menikmati berbagai bentuk olahan dengan bahan baku ikan.

Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perikanan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perikanan serta fungsi antara lain: perumusan kebijakan teknis dalam bidang perikanan; pengelolaan urusan-urusan dalam bidang perikanan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur memiliki 3 (tiga) bidang yaitu: Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Wilayah Pesisir (PNKPWP), Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (PUKPPI), dan Bidang Pemberdayaan Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan (PUDPP).

Tabel 2. 142 Capaian Sasaran Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Cakupan Bina Kelompok Pelaku Usaha Perikanan (Persen)	19	27,57	24,53	20	21	22
2	Konsumsi Ikan (Persen)	134	112,44	111,97	106	107	108

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (Persen)	2,25	-2,37	2,57	1	1	1
4	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Persen)	44,2	43,26	649,15	7	8,5	10
5	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Pelaku Usaha (Persen)	45	33,31	32,76	33	34	35

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, Tahun 2023

Tabel 2. 143 Target dan Capaian Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Cakupan Bina Kelompok Pelaku Usaha Perikanan (Persen)	19	24,53	129,10
2	Konsumsi Ikan (Persen)	105	111,97	106,64
3	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (Persen)	1	2,57	257
4	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Persen)	6,5	649,15	9.987
5	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Pelaku Usaha (Persen)	32	32,76	102,37

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, Tahun 2023

1. Indikator Cakupan Bina Kelompok Pelaku Usaha Perikanan

Cakupan Bina Kelompok Pelaku Usaha Perikanan adalah persentase jumlah pelaku usaha perikanan yang mendapatkan bantuan berbanding jumlah pelaku usaha perikanan. Cakupan Bina Kelompok Pelaku Usaha Perikanan merupakan nilai rata-rata Cakupan Bina Kelompok Nelayan, Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya, dan Cakupan Bina Kelompok Pengolah dan Pemasar. Realisasi capaian cakupan bina kelompok pelaku usaha perikanan tahun 2023 sebesar 24,53% dengan target 19%. Capaian tersebut setara dengan 129,10% terhadap target Tahun 2023. Capaian kinerja cakupan bina kelompok pelaku usaha perikanan sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Sehingga capaian kinerja ini dapat dikatakan tercapai, dan memiliki kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi, dan interpretasi atas capaian indikator kinerja sasaran Memuaskan. Nilai ini merupakan hasil rata-rata dari cakupan bina kelompok nelayan sebesar 46,55%, cakupan bina kelompok pembudidaya 24%, dan cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar sebesar 3,03%. Realisasi capaian cakupan bina kelompok pelaku usaha perikanan sudah melebihi target akhir Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur 2021-2026 yakni 22%. Namun, jika dibandingkan dengan Tahun 2022, maka cakupan bina kelompok pelaku usaha perikanan Tahun 2023

mengalami penurunan sebesar 3,04% dibandingkan Tahun 2022 senilai 27,57%. Bantuan sarana dan prasarana untuk pengolah dan pemasar pada Tahun 2023 lebih banyak diberikan kepada perorangan bukan kelompok sehingga nilai cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar mengalami penurunan dan menyebabkan menurunnya nilai cakupan bina kelompok pelaku usaha perikanan di Tahun 2023. Penurunan ini juga dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah kelompok pelaku usaha perikanan yang aktif serta keterbatasan anggaran sehingga tidak semua usulan dari masyarakat bisa diakomodir dengan mempertimbangkan skala prioritas dan keberlanjutan kelompok. Pemberian bantuan tersebut berasal dari dana APBD.

2. Indikator Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg/kapita/tahun. KKP sejak 2004 menggalakkan program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) untuk meningkatkan konsumsi ikan yang kemudian diterapkan pada level kabupaten/kota. Diharapkan dengan peningkatan konsumsi ikan yang menjadi salah satu sumber protein tinggi, kualitas sumber daya manusia (SDM) juga meningkat. Tingkat keberhasilan capaian kinerja dari konsumsi ikan melalui pelaksanaan program kegiatan pendukung guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan diukur dengan menghitung persentase perbandingan capaian angka konsumsi ikan dengan target daerah.

Angka konsumsi ikan di Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 mencapai 67,18 kg/kapita/tahun dengan target daerah 60 kg/kapita/tahun. Capaian realisasi konsumsi Ikan pada tahun 2023 adalah 111,97%. Capaian tersebut setara dengan 106,64% terhadap target tahun 2023 (105%). Sehingga capaian kinerja ini dapat dikatakan tercapai, dan memiliki kriteria penilaian kinerja capaian yang Sangat Tinggi serta interpretasi atas capaian indikator sasaran Memuaskan. Realisasi capaian konsumsi ikan sudah melebihi target akhir Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur 2021-2026 yakni 108%.

Angka konsumsi ikan meningkat 1,27% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang realisasinya 66,34 kg/kapita/tahun, akan tetapi jika dilihat dari persentase perbandingan angka konsumsi ikan dengan target daerah maka konsumsi ikan mengalami penurunan sebesar 0,47% dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2022 angka konsumsi ikan di provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 68,50 kg/kapita/tahun. Angka ini lebih tinggi jika

dibandingkan dengan angka konsumsi ikan di kabupaten Belitung Timur karena angka konsumsi ikan provinsi merupakan rata-rata angka konsumsi ikan di Kabupaten. Akan tetapi jika dibandingkan dengan nasional, angka konsumsi ikan di Kabupaten Belitung Timur lebih tinggi dari angka konsumsi ikan di tingkat nasional tahun 2022 (56,48 kg/kapita/tahun) bahkan angka ini sudah melebihi dari target indikator sasaran Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024 dengan nilai tahun akhir Renstra yaitu 62,05 kg/kapita/tahun.

Faktor keberhasilan dari capaian indikator sasaran ini yaitu dengan adanya kampanye Gemarikan dan penyediaan sarana dan prasarana pemasaran yang sangat mendukung peningkatan angka konsumsi ikan di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan “Fishtival GEMARIKAN” dengan tema Ragam Kreasi Masakan Olahan Ikan untuk Menyehatkan dan Mencerdaskan Generasi Bangsa, Menurunkan Angka *Stunting*, Menuju Masyarakat Belitung Timur yang Sejahtera” merupakan salah satu kegiatan yang mendukung program nasional GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) guna meningkatkan konsumsi makan ikan masyarakat sekaligus mendukung penurunan *stunting* di Daerah.

3. Indikator Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

Produksi Perikanan Tangkap adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan perikanan tangkap pada waktu tertentu. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kenaikan jumlah produksi hasil tangkapan nelayan pada tahun sekarang (n) berbanding dengan tahun sebelumnya (n-1). Produksi perikanan tangkap Tahun 2023 adalah sebesar 41.037,718 ton dengan nilai produksi Rp1.484.868.345.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 40.010 ton, realisasi Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,57% dengan target peningkatan yang ditetapkan sebesar 1%. Capaian tersebut setara dengan 257% terhadap target Tahun 2023. Sehingga capaian kinerja ini dapat dikatakan tercapai, dan memiliki kriteria penilaian kinerja capaian yang Sangat Tinggi dengan interpretasi atas capaian indikator sasaran Memuaskan. Walaupun nilai produksi perikanan tangkap pada Tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, akan tetapi nilai ini belum bisa memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 43.091 ton. Produksi perikanan tangkap nasional Tahun 2022 sebesar 7,99 juta ton. Jika dibandingkan dengan persentase peningkatan produksi

perikanan tangkap Kabupaten Belitung Timur dari Tahun 2021 (40.983 ton) ke Tahun 2022 senilai -2,37% (terjadi penurunan).

Peningkatan produksi perikanan tangkap diintervensi dengan beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan yaitu: pemberian bantuan kepada beberapa kelompok nelayan berupa sarana dan prasarana penangkapan ikan: alat tangkap, kapal perikanan, dan mesin kapal; pemberian rekomendasi dan monitoring ketersediaan dan ketepatan salur BBM jenis tertentu untuk Nelayan, monitoring akses, kebutuhan pokok untuk melaut dan keperluan lainnya untuk Nelayan sehingga operasional melaut dapat terpenuhi dengan baik dan lancar; pembinaan dan pendampingan yang dilaksanakan rutin kepada Nelayan dan Kelompok Usaha Bersama terkait penggunaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan, serta partisipasi aktif melaporkan hasil produksi perikanan tangkap. Kondisi cuaca yang ekstrem pada musim paceklik tangkap harus di minimalisir dengan perencanaan yang baik salah satunya dengan meningkatkan kapasitas nelayan kecil melalui pelatihan pembuatan kapal fiber dan pelatihan pembudidayaan ikan dengan metode Keramba jarring Apung (KJA).

4. Indikator Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya.

Budidaya perikanan didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk memproduksi biota (organisme) akuatik secara terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan (profit). Definisi budidaya perikanan lainnya adalah campur tangan (upaya-upaya) manusia untuk meningkatkan produktivitas perairan. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kenaikan jumlah produksi hasil budidaya ikan pada tahun n berbanding dengan tahun sebelumnya ($n-1$). Produksi perikanan budidaya Tahun 2023 sebesar 2.135,898 ton. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 285,111 ton, realisasi Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 649,15% dengan target peningkatan yang ditetapkan sebesar 6,5%. Sehingga capaian kinerja ini dapat dikatakan tercapai, dan memiliki kriteria penilaian kinerja capaian yang Sangat Tinggi dengan interpretasi atas capaian indikator kinerja sasaran Memuaskan. Produksi perikanan budidaya di nasional di Tahun 2022 mencapai 16,88 juta ton. Capaian indikator kinerja Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya pada Tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan. Capaian

ini sudah melebihi target capaian yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 yakni 10%.

Capaian peningkatan produksi perikanan budidaya mencapai 649,15% dikarenakan perkembangan pesat budidaya tambak udang vanamei di Kabupaten Belitung Timur, adanya produksi yang signifikan dari produksi udang vaname sejalan signifikannya penambahan jumlah perusahaan tambak udang yang ada di Kabupaten Belitung Timur yang mendominasi produksi perikanan budidaya yaitu mencapai 1.993,459 ton, sedangkan jumlah produksi budidaya non udang vaname sebesar 142,439 ton. Suplai benih ikan pun relatif stabil, karena selain produksi benih oleh UPT. Perikanan Budidaya, benih juga diproduksi oleh beberapa Unit Pembenihan Ikan skala rakyat yang ada di kabupaten Belitung Timur dan suplai benih dari luar Kabupaten Belitung Timur. Meningkatnya minat budidaya air tawar dimasyarakat juga turut mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya dengan kemunculan pembudidaya baru dan kembali aktifnya pembudidaya lam, dan Dinas Perikanan pun memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya untuk skala usaha maupun skala Rumah Tangga mendukung intervensi kebijakan ketahanan pangan Daerah.

5. Indikator Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Pelaku Usaha

Realisasi indikator persentase peningkatan kelas kelompok pelaku usaha perikanan pada Tahun 2023 didapatkan dari persentase jumlah kenaikan pelaku usaha perikanan yang naik kelas dibagi jumlah pelaku usaha perikanan. Jumlah pelaku usaha perikanan yang naik kelas merupakan jumlah kelompok pelaku usaha perikanan yang telah mendapatkan sertifikat pengukuhan kelas pemula. Realisasi indikator persentase peningkatan kelas kelompok pelaku usaha perikanan pada Tahun 2023 sebesar 32,76%. Capaian tersebut setara dengan 102,37% terhadap target Tahun 2023 (32%). Sehingga capaian kinerja ini dapat dikatakan tercapai, dan memiliki kriteria penilaian kinerja capaian yang Sangat Tinggi dengan interpretasi atas capaian indikator kinerja sasaran Memuaskan. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 33,31%, realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,55%. Target persentase peningkatan kelas kelompok pelaku usaha perikanan pada tahun akhir Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 sebesar 35%, maka capaian Tahun 2023 sudah mencapai 93,6% terhadap target capaian pada akhir tahun rencana strategis tersebut. Keterbatasan jumlah penyuluh perikanan di Kabupaten

Belitung Timur yang hanya berjumlah tiga orang dengan wilayah kerja tujuh kecamatan turut berpengaruh dalam keberhasilan peningkatan kelas kelompok pelaku usaha perikanan.

2.1.3.3.2 Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, fungsi penyelenggaraan urusan Pariwisata adalah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan daya tarik wisata daerah;
- b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah;
- c. Pengelolaan destinasi pariwisata daerah;
- d. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata daerah;
- e. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berineraksi bagi insan kreatif di dalam daerah; dan
- f. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Berdasarkan fungsi dimaksud dirumuskan indikator sasaran urusan Pariwisata kedalam rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026. Adapun capaian sasaran urusan kebudayaan Tahun 2021-2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 144 Capaian Sasaran Urusan Pariwisata Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (persen)	-49	57	95	15	15	15
2	Lama Tinggal Wisatawan (<i>length of stay</i>) (hari)	1	1	1	2	2	3

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2023

Tabel 2. 145 Target dan Capaian Urusan Pariwisata Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan (persen)	15	95	100%
2	Lama tinggal wisatawan (<i>length of stay</i>) (hari)	2	1	50%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2023

Penjelasan capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Indikator Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan

Capaian indikator laju pertumbuhan kunjungan wisatawan mengalami peningkatan yang *signifikan* terjadi karena adanya pelaksanaan event ekonomi kreatif dan seni budaya telah memicu lonjakan arus wisatawan domestik pada bulan Juni sampai dengan bulan November pada saat pelaksanaan Pemilihan Bujang Dayang Belitung Timur, event Karnaval Kemerdekaan 17 Agustus, event Timor De Belitong, event nasional Jelajah Pesona Jalur Rempah (JPJR), Hari Jadi Kota Manggar, event Pekan Kreasi Pemuda, Festival Kebhinekaan dan Bazar Ramadhan Desa Kurnia Jaya. Sedangkan event dan kegiatan berskala Internasional seperti pertukaran pelajar antar negara telah menyumbang jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Belitung Timur, dan sistem pendataan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Belitung Timur telah menggunakan data *real* yang diterima dari hotel, homestay, pengelola objek wisata serta penghitungan langsung di lokasi penyelenggaraan event.

2. Indikator Lama Tinggal Wisatawan (*legth of stay*)

Capaian indikator Lama Tinggal Wisatawan (*legth of stay*) belum mengalami peningkatan, hal ini disebabkan masih kurangnya fasilitas akomodasi dan amenities pendukung lainnya. Upaya peningkatan masa lama tinggal wisatawan (*length of stay*) kedepannya adalah dengan menerapkan kebijakan strategis diantaranya pengembangan destinasi lokasi tujuan wisata, pengembangan promosi daerah pasar sasaran dan pengelolaan event pariwisata, event budaya dan kesenian yang bertaraf nasional.

2.1.3.3.3 Pertanian

Sejalan dengan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026, dan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mewujudkan program Yuk Ke Ume. Yuk Ke Ume secara harpiyah dalam Bahasa Belitung merupakan ajakan untuk pergi ke kebun, sejak dulu masyarakat lokal Belitung Timur memiliki kebun atau bekerja di kebun. Secara filosofis, program Yuk Ke Ume merupakan upaya untuk mengajak masyarakat untuk membantu pencapaian ketahanan pangan baik ketahanan pangan keluarga (bersifat subsisten/pemenuhan kebutuhan sendiri) dan ketahanan pangan daerah (bersifat komersil dan produksi massal). Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur pada urusan pertanian berkontribusi dalam hal:

- a. Menyediakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
- b. Meningkatkan cakupan penyuluhan pertanian; dan
- c. Meningkatkan pengelolaan hewan ternak.

Tabel 2. 146 Capaian Sasaran Urusan Pertanian Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Produksi Sektor Pertanian (Padi sawah, padi bukan sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar) (ton)	5602,4	3.687,65	2.437,53	11.309,96	11.759,96	12.209,96
2	Produksi Sektor Perkebunan (Lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri, jambu mete) (ton)	9654,5	10.161,22	10.109,32	11.539	12.039	12.539
3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton per hektar)	6,5	5,7	5,7	4,159	4,339	4,519
4	Cakupan Bina Kelompok Tani (Kelompok Tani)	217	427	324	241	261	281
5	Produktivitas hewan ternak dan sejenisnya (ekor)	1.806	1.958	2085	2.181	2.341	2.517

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, Tahun 2023

Tabel 2. 147 Target dan Capaian Urusan Pertanian Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Produksi Sektor Pertanian (Padi sawah, padi bukan sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar) (ton)	10.859,96	2.437,53	22,45
2	Produksi Sektor Perkebunan (Lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri, jambu mete) (ton)	11.039	10.109,32	91,6
3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton per hektar)	3,979	5,7	143,25
4	Cakupan Bina Kelompok Tani (Kelompok Tani)	221	324	146,60
5	Produktivitas hewan ternak dan sejenisnya (ekor)	2.063	2085	101,06

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, Tahun 2023

Penjelasan capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Produksi Sektor Pertanian (padi sawah, padi bukan sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar)

Komoditas-komoditas sektor pertanian dalam pencapaian indikator ini pada komoditas pertanian pangan yang terdiri dari padi sawah, padi bukan sawah, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar. Adapun formulasi perhitungan indikator tersebut:

$$\text{Produksi Sektor Pertanian} = \text{Jumlah produksi komoditas pertanian/ton}$$

Produksi Sektor Pertanian (padi sawah, padi bukan sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar) sebagai indikator kinerja bidang urusan pertanian tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Tabel 2. 148 Perbandingan Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan 2023

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Produksi Sektor Pertanian (Padi Sawah, Padi Bukan Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Ton	10.409,96	3.687,65	35,42	10.859,96	2.437,53	22,45

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja produksi sektor pertanian yaitu produksi untuk komoditi padi sawah, padi bukan sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar. Pada tahun 2023 capaian produksi sektor pertanian sebesar 2.437,53 Ton, dari target yang ditentukan yaitu 10.859,96 Ton. Produksi komoditas sektor pertanian di tahun 2023 secara keseluruhan komoditi mengalami penurunan hingga 33,17% dibandingkan dengan pencapaian produksi tahun

2022 mencapai 3.687,65 ton dan tahun 2023 hanya mencapai 2.437.53 ton. Penurunan produksi paling banyak pada komoditi jagung, yaitu pada tahun 2022 produksi sebanyak 593 ton dan tahun 2023 hanya 254.5 ton mengalami penurunan sekitar 57.08%.

Penurunan produksi komoditas pertanian terutama disebabkan oleh menurunnya luas tambah tanam setiap komoditi pangan setiap tahunnya. Banyaknya lahan sawah dan lahan pertanian yang tidak diolah disebabkan petani yang mengusahakan pertanian beralih mata pencaharian menjadi penambang timah sebagai akibat kenaikan harga komoditas tersebut. Tingginya biaya produksi karena naiknya harga pupuk, obat-obatan dan harga buruh tani juga menjadi salah satu penyebab menurunnya luas tambah tanam komoditi pangan. Serta banyak petani yang beralih mengembangkan tanaman perkebunan karena dianggap teknik budidaya perkebunan lebih mudah dan biaya pemeliharaan lebih murah.

Dampak el nino menjadi salah satu penyebab turunnya produksi karena menyebabkan dampak kekeringan dan berkurangnya ketersediaan air untuk pertanian. Terdapat sekitar 10 Hektar padi sawah yang gagal panen karena kekurangan air saat memasuki fase generative. Terjadi penurunan luas tanam dikarenakan perubahan masa tanam dan penundaan masa tanam karena tidak tersedianya air untuk pertanian. Faktor lain yang juga turut berpengaruh adalah ketersediaan prasarana irigasi yang kurang memadai baik berupa saluran irigasi maupun saluran drainase.

Produktivitas tanaman padi yang semula 5,7 ton perhektar pada tahun 2022 menjadi 4,4 ton/perhektar pada tahun 2023 dikarenakan menggunakan angka rata-rata produktifitas 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Belitung Timur.

Untuk mengatasi kondisi di atas perlu dilakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi pada sektor tanaman pangan;
2. Meningkatkan pendampingan kepada petani agar mereka mampu menerapkan teknik budidaya yang lebih baik;
3. Meningkatkan prasarana pertanian baik yang belum ataupun sudah ada;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk menunjang usaha budidaya yang lebih efisien;

5. Meningkatkan ketersediaan dan penyaluran sarana produksi seperti benih, pupuk dan obat-obatan pertanian;

Pada komoditas ubi kayu juga mengalami penurunan produksi yang cukup signifikan dari 1162.85 Ton tahun 2022 dan hanya 659.75 Ton tahun 2023, mengalami penurunan sekitar 43,26%. Hal ini terutama disebabkan berkurangnya minat petani untuk menanam ubi kayu karena terkendala pemasaran disebabkan tidak lagi beropersinya pabrik pengolahan ubi kayu yang ada.

Adapun rekapitulasi produksi pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 dari 7 (tujuh) Kecamatan, adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 149 Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

No	Jenis Komoditas	Produksi (Ton)	Keterangan
1	Padi Sawah	1.214.18	Gabah Kering Panen (GKP)
2	Padi Bukan Sawah	100.80	Gabah Kering Panen (GKP)
3	Jagung	254.50	Jagung Manis
4	Kacang Tanah	25,10	
5	Ubi Kayu	659.75	
6	Ubi Jalar	183.20	
	Total	2.437.53	

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, Tahun 2023

2. Produksi Sektor Perkebunan (lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri, jambu mete)

Komoditas-komoditas sektor perkebunan dalam pencapaian indikator ini terdiri dari lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri, dan jambu mete. Adapun formulasi perhitungan indikator tersebut:

$$\text{Produksi Sektor Perkebunan} = \text{Jumlah produksi komoditas perkebunan/ton}$$

Produksi Sektor Perkebunan (lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri, jambu mete) sebagai indikator kinerja bidang urusan pertanian tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rancana pembangunan jangka Panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Tabel 2. 150 Perbandingan Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan 2023

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2	Produksi Sektor Perkebunan (Lada, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete)	Ton	10.539	10.161,22	96,42	11.039	10.109,32	91,6

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja produksi sektor perkebunan yaitu untuk komoditas lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri dan jambu mete pada tahun 2023 adalah sebesar 10.109,32 Ton, belum mencapai dari target yang ditentukan yaitu 11.039 Ton. Hal ini disebabkan komoditi yang sudah berproduksi baru sebagian dari komoditi perkebunan yang masuk dalam pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan produktivitas perkebunan hasil produksi. Adapun rekapitulasi produksi perkebunan rakyat di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 151 Rekapitulasi Produksi Perkebunan Rakyat Tanaman Tahunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

No	Jenis Komoditas	Produksi (Ton)	Wujud Produksi
1	Lada	1.271.026	Lada Putih
2	Karet	1.049.150	Karet Kering
3	Kelapa Sawit	7.618.550	CPO
4	Kelapa	168.070	Kopra
5	Kopi	1.540	Berasan
6	Aren	153,20	Gula Merah
7	Kemiri	698	Buah Kering
8	Jambu Mete	131	Gelondong Kering
	Total	10.109,32	

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, Tahun 2023

Upaya Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur untuk meningkatkan produksi yaitu dengan memberikan bantuan pupuk dan pestisida kepada petani, dalam rangka pengendalian OPT tanaman perkebunan, Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur sudah menerapkan inovasi yuk jalankan Gerakan kebersihan kebun “yuk jage kebun” kelompok tani yang membudidayakan komoditi tanaman lada di Poktan Bandung Bersatu Desa

Batu Penyu. Dengan mengaplikasikan pupuk dan pestisida sesuai dosis umur tanaman lada, sehingga tanaman lada yang mengalami serangan OPT bisa dikendalikan. melakukan pengendalian penguatan kelembagaan petani, memberikan penyuluhan Budidaya dan penerapan teknologi pertanian tepat guna. Konversi tanaman karet menjadi tanaman kelapa sawit di beberapa tempat mempengaruhi tingkat produksi tanaman karet.

Produksi perkebunan (lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri, dan jambu mete) harga pasaran mulai membaik namun demikian pada beberapa komoditas masih mengalami kendala, seperti adanya serangan hama dan penyakit pada tanaman perkebunan serta meningkatnya harga pupuk di pasaran, sehingga produksi sektor perkebunan mengalami stagnan disamping itu juga petani banyak tergiur beralih ke mata pencaharian pertambangan pasir timah.

Pada sektor perkebunan selain produksi yang berasal dari perkebunan rakyat/petani, juga ada sektor perkebunan yang dimiliki oleh pihak perusahaan swasta, yaitu untuk komoditi kelapa sawit. Ada 9 (Sembilan) perusahaan perkebunan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang menguasai lahan dengan perijinan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU)/Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan luasan ± 46.901,28 Ha. Dengan jumlah produksi yang bervariasi setiap bulan dan tahunnya dengan wujud produksi/produk berupa Tandan Buah Segar (TBS) dan Crude Palm Oil (CPO).

3. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan, maka diperlukan langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan produktivitas padi sebagai bahan pangan utama lokal di Kabupaten Belitung Timur.

Adapun formulasi perhitungan indikator tersebut:

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	=	$\frac{\text{Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)}}{\text{Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)}} \times 100\%$

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar sebagai indikator kinerja bidang urusan pertanian tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rancana pembangunan jangka Panjang daerah, serta

tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Tabel 2. 152 Perbandingan Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan 2023

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
3	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar	Ton Per Hektar	3,799	5,7	150,39	3,979	5,7	143,25

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, Tahun 2023

Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan, maka diperlukan langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan produktivitas tanaman pangan (padi sawah, padi bukan sawah, jagung, ubi kayu dan ubi jalar) sebagai bahan pangan utama lokal di Kabupaten Belitung Timur.

Pengukuran capaian kinerja produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya per hektar pada tahun 2023 adalah sebesar 5,7 Ton per Hektar, melebihi dari target yang ditentukan yaitu 3,799 Ton per Hektar. Dari segi luas panen terdapat penurunan dari 1096,7 hektar pada tahun 2022 menjadi 663 hektar pada tahun 2023 atau sebesar 60,45%. Penurunan luas panen ini berpengaruh terhadap jumlah produksi pangan dalam memenuhi kebutuhan per kapita per penduduk Kabupaten Belitung Timur. Namun untuk komoditas lainnya dapat menopang pemenuhan pangan pokok, selain itu penurunan ini disebabkan oleh masih banyak serangan hama dan penyakit tanaman seperti hama wereng, walang sangit, burung yang belum mampu sepenuhnya dikendalikan oleh petani. Selanjutnya kenaikan harga pupuk yang sangat signifikan telah menurunkan daya beli petani sehingga pupuk yang diaplikasikan jauh lebih rendah dari dosis yang dianjurkan.

Adapun produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 153 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

No	Jenis Komoditas	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (Ton per Hektar)	Keterangan
1	Padi Sawah	316,30	1391,7 2	4,4	Gabah Kering Panen (GKP)
2	Padi Bukan Sawah	45,10	126,28	2,8	Gabah Kering Panen (GKP)
3	Jagung	118,60	593,00	5,0	Jagung Manis
4	Kacang Tanah	47,80	47,80	1,0	
5	Ubi Kayu	89,45	1162,85	13,0	
6	Ubi Jalar	45,75	366,00	8,0	
	Total	663,00	3687,65	5,7	

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, Tahun 2023

4. Cakupan Bina Kelompok Tani (Kelompok Tani)

Penguatan kelembagaan petani dilakukan dengan cara penumbuhan dan pengembangan poktan dan gapoktan melalui kelas kemampuan kelompok tani, serta dengan peningkatan, pengetahuan dan keterampilan dan sikap kelompok tani dalam mengadopsi teknologi pertanian dan memotivasi para anggota kelompok tani yang berusaha tani di sektor pertanian secara simultan dan terus menerus, dalam rangka menghitung cakupan bina kelompok tani dapat dijelaskan bahwa cakupan petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan) yang telah mendapatkan pelayanan penyuluhan dan pemberian bantuan sarana produksi pertanian di sektor pertanian. Adapun formulasi perhitungan indikator tersebut:

Cakupan Bina Kelompok Tani =	$\frac{\sum \text{Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan PEMDA tahun } n}{\sum \text{Kelompok Tani}}$	X100%

Jumlah Kelompok Tani di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Data Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) sampai dengan Desember tahun 2023 sebanyak 439 Kelompok Tani dengan jumlah anggota sebanyak 7737 petani, dimana dari 439 Kelompok Tani tersebut terdapat 10 Kelompok Tani yang tidak aktif atau kurang lebih 2,34 %. Keberadaan Kelompok Tani di Kabupaten Belitung Timur tersebut tersebar di 39 Desa dalam 7 Kecamatan dengan perincian Sebagai Berikut:

Tabel 2. 154 Keberadaan Kelompok Tani di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Petani
1	Kecamatan Damar	5	40	687
2	Kecamatan Dendang	4	54	1349
3	Kecamatan Gantung	7	108	1570
4	Kecamatan Kelapa kampit	6	55	1020
5	Kecamatan Manggar	9	84	1325
6	Kecamatan Simpang Pesak	4	50	1240
7	Kecamatan Simpang Renggang	4	48	546
	Jumlah	39	439	7737

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, Tahun 2023

Untuk mengoptimalkan pendampingan dan pembinaan kelompok tani oleh penyuluh pertanian maka Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kecamatan yaitu berupa Balai Penyuluhan Pertanian pada masing-masing Wilayah Kecamatan. Sehingga jumlah BPP di Kabupaten Belitung Timur seluruhnya sebanyak 7 unit atau meningkat 133 persen, dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya ada 3 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yaitu BPP Mengkubang, BPP Lintang dan BPP Dendang.

Untuk selanjutnya berdasarkan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, pada tahun 2023 bahwa salah satu indikator yang akan dicapai dalam Pembangunan Pertanian adalah Cakupan Bina Kelompok Tani, dengan target binaan sebanyak 221 kelompok tani. Pengertian Cakupan Bina Kelompok adalah banyaknya kelompok Tani yang mendapat manfaat atau bantuan dari Pemerintah. Apabila demikian maka bantuan atau manfaat yang di berikan oleh Pemerintah kepada Kelompok Tani dapat berupa Pendampingan dan Pembinaan oleh Penyuluh Pertanian serta bantuan Program dan kegiatan yang langsung menyentuh dan bermanfaat bagi Kelompok Tani.

Cakupan Bina Kelompok Tani yang telah dilaksanakan Bidang Penyuluhan Pertanian pada tahun 2023 adalah berupa pendampingan dan Pembinaan kepada Kelompok tani, oleh Penyuluh Pertanian baik kelompok tani yang menerima bantuan maupun yang belum menerima bantuan pemerintah juga

di lakukan pembinaan dan pelatihan kepada Kelompok Tani tersebut. Pada tahun 2023 bidang penyuluhan telah menyelenggarakan Pelatihan Tematik yang melibatkan sebanyak 10 kelompok tani dan Sekolah Lapang dengan komoditas bawang merah sebanyak 4 Kelompok Tani.

Cakupan Bina Kelompok Tani Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura disamping melalui Bantuan Pupuk Subsidi dan penyediaan sarana produksi pertanian lainnya. Jumlah Kelompok Tani yang mendapat bantuan dari Pupuk subsidi tersebut adalah sebanyak 201 Kelompok Tani, sedangkan Bantuan Sarana Produksi Pertanian yang berupa Pupuk, Pestisida dan Bibit/Benih Tanaman sebanyak 23 Kelompok Tani.

Untuk Bidang Ketahanan Pangan melalui program Pemberdayaan masyarakat dalam percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan dilaksanakan melalui Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan sebanyak 25 Kelompok pelaksana kegiatan pekarangan pangan lestari (P2L).

Selanjutnya cakupan bina kelompok yang dilakukan Bidang Perkebunan adalah sebanyak 6 kelompok tani, yang terdiri dari 5 kelompok tani yang mendapatkan bantuan bibit kelapa sawit dan 1 kelompok tani mendapatkan bantuan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (POPT).

Sedangkan Bidang Peternakan Cakupan Bina Kelompok Tani yang telah dilakukan melalui Gerakan Pelayanan Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak sapi sebanyak 2123 Dosis untuk Kurang Lebih 120 Peternak yang tergabung dalam 24 Kelompok Tani. Sedangkan Pelaksanaan Vaksinasi ayam sebanyak 1000 Dosis vaksinasi unggas untuk 68 Peternak.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disampaikan bahwa cakupan Bina Kelompok Tani Tahun Anggaran 2023 yang telah direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Pertanian dan Pangan seluruhnya berjumlah 324 Kelompok Tani atau 161,19 % dari target cakupan cakupan bina kelompok tani yang sudah ditetapkan tahun 2023 sebanyak 221 kelompok tani.

5. Produktivitas hewan ternak dan sejenisnya (Ekor)

Pencapaian produktivitas hewan ternak yang dalam hal ini ternak sapi, sangat dipengaruhi oleh peningkatan populasi sapi. Produktivitas hewan ternak dan sejenisnya pada indikator sasaran Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dimaksudkan untuk menggambarkan

angka populasi ternak sapi di Kabupaten Belitung Timur yang harus dicapai pada tahun 2023.

Adapun formulasi perhitungan indikator tersebut:

$$\text{Produktivitas Sapi} = \frac{\sum \text{Kelahiran Sapi Tahun } n}{\sum \text{Induk Produktif}} \times 100\%$$

Produktivitas hewan ternak dan sejenisnya pada indikator sasaran Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dimaksudkan untuk menggambarkan angka populasi ternak sapi di Kabupaten Belitung Timur yang harus dicapai pada tahun 2023. Realisasi pencapaian produktivitas (angka populasi) ternak sapi pada tahun 2022 sebanyak 1.958 ekor sedangkan tahun 2023 sebanyak 2.085 atau terjadi peningkatan sebanyak 127 ekor atau sebesar 6,091 %.

Produktivitas hewan ternak dan sejenisnya pada indikator sasaran Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur menggambarkan target peningkatan populasi ternak sapi (dalam ekor) yang harus dicapai pada tahun 2023.

Penetapan target ini didasarkan pada realisasi pencapaian populasi ternak sapi tahun 2022 sebanyak 1.958 ekor dan prediksi peningkatan populasi dengan melihat angka kelahiran rata-rata per tahun di atas 250 ekor, angka kematian sebesar 1-3% serta adanya pemotongan sapi lokal sebanyak 6-8% dari total populasi ditetapkan sebesar 2.085 ekor. Realisasi pencapaian produktivitas ternak sapi pada tahun 2023 tersebut sebanyak 2.085 ekor melebihi dari target yang ditetapkan 2.063 ekor atau sebesar 101.06 persen.

Tabel 2. 155 Populasi Ternak Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jantan	Betina	Total
1	Kecamatan Damar	5	128	192	320
2	Kecamatan Dendang	4	131	320	451
3	Kecamatan Gantung	7	192	430	622
4	Kecamatan Kelapa kampit	6	49	73	122
5	Kecamatan Manggar	9	150	241	391
6	Kecamatan Simpang Pesak	4	32	86	118

7	Kecamatan Simpang Renggang	4	26	35	61
Jumlah		39	708	1.377	2.085

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, Tahun 2023

Salah satu tolok ukur utama dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan peternakan adalah melalui evaluasi *peningkatan produktivitas ternak*. *Peningkatan* persentase *produktivitas* peternakan dari komoditas unggulan ternak sapi merupakan target kinerja dari beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan melalui Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan para peternak, Peningkatan penerapan teknologi tepat guna bagi pengembangan peternakan terutama penggunaan alat-alat pengolahan pakan (*Chopper*) dan Peningkatan Penyediaan Hijauan Pakan Ternak yang berkualitas, selain itu juga ditunjang dengan perbaikan pengelolaan kesehatan ternak melalui Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan gangguan reproduksi dengan melaksanakan pengobatan dan vaksinasi ternak.

Dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyakit ternak khususnya penyakit mulut dan kuku (PMK) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur mampu menekan hingga 0% atau tidak ada kasus lagi hingga akhir tahun 2023. Selain tindakan pengobatan terhadap ternak yang terserang PMK, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur juga melaksanakan kegiatan/program vaksinasi PMK diseluruh Kecamatan. Realisasi pelaksanaan vaksinasi PMK di Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 sebanyak 1025 dosis yaitu 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) ekor sapi dan 187 (seratus delapan puluh tujuh) ekor kambing.

Berdasarkan Sumber Badan Pusat Statistik, Hasil Sensus Pertanian 2023, Kabupaten Belitung Timur merupakan salah satu Kabupaten dengan populasi sapi yang meningkat, hal ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap populasi sapi di Indonesia yaitu sebesar 11.318.085 ekor dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 15.392 ekor. Keberhasilan capaian kinerja peningkatan populasi secara nasional untuk Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023, menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah optimis mampu mewujudkan swasembada protein hewani.

2.1.3.3.4 Perdagangan

Merupakan urusan pemerintahan kategori pilihan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan bidang perdagangan terdiri dari beberapa subbidang yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, diantaranya : Perizinan dan pendaftaran perusahaan, Sarana distribusi perdagangan, Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Pengembangan ekspor, dan Standarisasi dan perlindungan konsumen.

Dalam menjalankan urusan perdagangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai kepanjangan tangan pemerintah terutama pemerintah daerah menjalankan perannya sebagai pengawas, yang mengawasi jalannya roda perekonomian dengan menjaga stabilitas harga bahan pokok, menjaga ketersediaan barang dipasar serta menjamin agar kegiatan ekonomi dipasar tidak merugikan salah satu pihak terutama konsumen. Secara terperinci hal yang telah dilakukan urusan perdagangan di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diantaranya:

1. Sub Kegiatan Perizinan Pendaftaran Perusahaan, bidang perdagangan sebagai tim teknis penerbitan Tanda Daftar Gudang.
2. Sub Kegiatan Sarana Distribusi Perdagangan urusan perdagangan sudah melakukan pembangunan lapak pedagang kaki lima.
3. Sub Kegiatan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, hal yang dilakukan berupa melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar, melaksanakan operasi pasar murah bersubsidi khusus untuk masyarakat kurang mampu.
4. Dalam rangka menjaga kestabilan harga menjelang hari besar keagamaan, secara mandiri maupun bersama satgas pangan melakukan pengawasan ke agen bahan pokok strategis yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Terkait pupuk dan pestisida hal yang dilakukan adalah Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi serta kelengkapan legalitas dokumen perizinan ke pengecer pupuk.
5. Sub Kegiatan Pengembangan Ekspor, hal yang dilakukan adalah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang produknya telah memenuhi syarat ekspor dan pelaku usaha yang berminat untuk melakukan ekspor.

6. Sub Kegiatan Standarisasi dan Perlindungan konsumen, hal yang telah dilakukan adalah melaksanakan berupa tera & tera ulang di 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 2. 156 Capaian Sasaran Urusan Perdagangan Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	PDRB sektor Perdagangan (Milyar Rupiah)	565,73	634,50	665,92	571,14	579,71	585,51

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2023

Tabel 2. 157 Target dan Capaian Urusan Perdagangan Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	PDRB Sektor Perdagangan (Milyar Rupiah)	559,94	665,92	118,93

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2023

1. PDRB sektor Perdagangan

Sasaran Strategis ke-5 dari Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026, adalah Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan, dan yang menjadi indikator pengampunya adalah PDRB Sektor Perdagangan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu, Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya, PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya, Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB sektor perdagangan merupakan nilai tambah dari sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda, yang merupakan salah satu dari 17 klasifikasi lapangan usaha pembentuk PDRB keseluruhan. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terdiri dari 2 sub kategori yaitu Perdagangan

mobil dan reparasinya serta kategori perdagangan besar dan eceran. Sub kategori tersebut meliputi penambahan kendaraan baru, reparasi kendaraan dan perdagangan besar dan eceran selain kendaraan. Realisasi PDRB sektor perdagangan tahun 2022 Kabupaten Belitung Timur sebesar 634,50 Miliar Rupiah. Angka ini merupakan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Belitung Timur. Faktor pendukung meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut diantaranya konsumsi rumah tangga mulai tumbuh, daya beli masyarakat terdorong berkat adanya program perlindungan sosial sebagai salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.

Data capaian indikator sasaran PDRB Sektor Perdagangan tahun 2023 sebesar 665,92 milyar rupiah, data capaian indikator sasaran pada tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belitung Timur sebesar 634,5 milyar rupiah.

Tabel 2. 158 Data PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2018 - 2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda motor (milyar Rupiah)	565,88	578,29	527,72	565,73	634,50	665,92

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2023

PDRB sektor perdagangan merupakan nilai tambah dari sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang merupakan salah satu dari 17 klasifikasi lapangan usaha pembentuk PDRB keseluruhan. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terdiri dari 2 sub kategori yaitu Perdagangan mobil dan reparasinya serta kategori perdagangan besar dan eceran. Sub kategori tersebut meliputi penambahan kendaraan baru, reparasi kendaraan dan perdagangan besar dan eceran selain kendaraan.

PDRB sektor perdagangan Tahun 2021 diperoleh senilai 565,73 Miliar Rupiah. Angka ini merupakan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Belitung Timur. Dibandingkan dengan capaian PDRB sektor perdagangan Tahun 2021, PDRB Tahun 2022 sektor perdagangan mengalami peningkatan, PDRB sektor perdagangan Tahun 2022 sebesar 634,50 Miliar Rupiah mengalami peningkatan sebesar 68,77 Miliar Rupiah dari Tahun 2020 atau mengalami pertumbuhan sebesar 12,16 persen.

Untuk Tahun 2022 Berdasarkan berita resmi yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 28 Februari 2023

menyebutkan “Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV-2022 tumbuh 3,80 Persen (Y-on-Y)”. Dari sisi produksi, hampir seluruh lapangan usaha tumbuh positif kecuali lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Konstruksi. Pertumbuhan ini menunjukkan semakin pulihnya aktivitas ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Faktor pendukung meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut diantaranya konsumsi rumah tangga mulai tumbuh, daya beli masyarakat terdorong berkat adanya program perlindungan social sebagai salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.

2.1.3.3.5 Perindustrian

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dilaksanakan oleh Perindustrian dan Perdagangan. Urusan perindustrian yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Industri Kecil dan Menengah, sedangkan Industri dengan modal asing (PMA) dan industri Besar menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Pada Tahun 2023 peran Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai perangkat daerah yang mengurus bidang perindustrian telah melakukan berbagai upaya dalam menjalankan sub bidang perindustrian di Kabupaten Belitung Timur, diantaranya, pelatihan penyuluhan keamanan pangan, pelatihan pengelolaan bisnis dan manajemen wirausaha, pelatihan teknis produksi dan/atau standarisasi produk, penerapan sertifikasi produk dan sistem mutu (pendaftaran merk dan sertifikat halal), penerapan sertifikasi produk dan sistem mutu, dan Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Tabel 2. 159 Capaian Sasaran Urusan Perindustrian Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah sektor Pangan dan Kerajinan (dalam ribu Rupiah)	236.073.515	266.008.176	2.672.217.120	267.557.653	280.843.311	294.791.408

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2023

Tabel 2. 160 Target dan Capaian Urusan Perindustrian Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah sektor Pangan dan Kerajinan (dalam ribu Rupiah)	254.902.923	2.672.217.120	1.048,32

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2023

Penjelasan capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah sektor Pangan dan Kerajinan

Sasaran Strategis ke-4 dari Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026, adalah Meningkatnya produksi industri kecil dan menengah, dan yang menjadi indikator pengampunya adalah **Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah Sektor Pangan dan Kerajinan.**

Industri Kecil Menengah atau yang biasa disebut dengan IKM adalah aktivitas produksi berbagai jenis barang yang digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nilai produksi adalah nilai dari komoditas yang dihasilkan oleh sektor produksi nilai ini didapat dari hasil perkalian dari kuantitas produksi dengan harga per unit komoditas tersebut. Harga per unit dinyatakan pada harga produsen pada saat komoditas tersebut diproduksi. Untuk sector pangan dan kerajinan merupakan klasifikasi usaha Industri kecil dan menengah berdasarkan KBLI. Nilai produksi industri kecil dan menengah sektor pangan dan kerajinan berasal dari Buku Industri Kecil dan Menengah yang setiap tahun selalu dilakukan pengkinian data.

Capaian nilai produksi industri kecil dan menengah sektor pangan dan kerajinan tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah tahun 2023 sebesar Rp.2.672.217.120,00 terdiri dari sektor pangan Rp.2.488.905.120,00 dan sektor kerajinan Rp.183.312.000,00 dengan capaian kinerja sebesar 906,48 persen dengan interpretasi kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan untuk tahun 2022 sektor pangan dan kerajinan sebesar Rp.266.008.176,00 terdiri atas nilai produksi pangan Rp.263.023.212,00, kerajinan dan umum Rp.2.984.964,00. Peningkatan Nilai Produksi ini cukup signifikan dibandingkan tahun 2022 dikarenakan permintaan pasar akan produk IKM selama tahun 2023 meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik.

2.1.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Sehingga perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Rangkaian proses perencanaan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima Pendekatan yakni politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Salah satu pendekatan partisipatif atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) adalah melalui pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja PD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berikut adalah gambaran pencapaian urusan perencanaan pembangunan di kabupaten Belitung Timur :

Tabel 2. 161 Capaian Urusan Perencanaan Tahun 2021-2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Perencanaan (persen)	85,51	89,81	91,77	74	77	80
2	Persentase kualitas dokumen perencanaan dengan nilai baik (persen)	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	Persentase capaian indikator kinerja utama daerah (persen)	89,33	91,43	91,43*	85,46	88,00	90,54

Sumber : Bappelitbangda, Tahun 2023

Catatan *) data sementara menggunakan tahun 2022

Tabel 2. 162 Capaian Sasaran Urusan Perencanaan Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Indeks Perencanaan (persen)	71	91,77	129
2	Persentase kualitas dokumen perencanaan dengan nilai baik (persen)	100	100	100
3	Persentase capaian indikator kinerja utama daerah (persen)	82,93	91,43*	110

Sumber : Bappelitbangda, Tahun 2023

Catatan *) data sementara menggunakan tahun 2022

Penjelasan capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Indeks Perencanaan

Indeks Perencanaan merupakan indikator untuk mengukur kualitas dari perencanaan pembangunan daerah yang terbagi dalam tiga dimensi, yaitu Dimensi Proses, Dimensi Isi dan Dimensi Tindak Lanjut. Besaran nilai pada Dimensi Proses menggambarkan kualitas dari proses perencanaan, yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten. Besaran nilai pada Dimensi Isi menggambarkan kualitas dari dokumen penunjang perencanaan, ketepatan jadwal penyusunan perencanaan, penerjemahan kebutuhan pada dokumen perencanaan, inovasi pelaksanaan rencana, dan instrumen penilaian kinerja. Besaran nilai pada Dimensi Tindak Lanjut menggambarkan kualitas dari konsistensi implementasi program kegiatan antar dokumen dan kinerja dari program serta serapan anggaran.

Analisis terhadap Indeks Perencanaan dengan capaian sebesar 91,77% dari target 71% menunjukkan bahwa pencapaian tersebut jauh melebihi harapan awal. Penting untuk memastikan bahwa pencapaian Indeks Perencanaan sejalan dengan tujuan strategis perangkat daerah untuk memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan tepat untuk mencapai visi dan misi daerah.

2. Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan Dengan Nilai Baik

Capaian kinerja indikator urusan perencanaan terkait ketersediaan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek telah tersedia sebagai penentu arah kebijakan pembangunan daerah agar lebih terarah dan terukur. Indikator sasaran terkait dengan ketersediaan dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2014-2034. Sedangkan terkait capaian indikator konsistensi program yang tertuang dalam RPJMD kedalam RKPD dan APBD telah diselaraskan dengan kebutuhan perangkat daerah dan prioritas pembangunan di Tahun berkenaan.

Pada indikator persentase kualitas dokumen perencanaan dengan nilai baik dengan target kinerja 100% dan realisasi capaian kinerja Tahun 2023 tercapai 100%. Persentase kualitas dokumen perencanaan dengan nilai baik dilihat dari capaian indikator program sebagai berikut:

1) Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu

Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu adalah indikator kinerja yang mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat menyelesaikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Indikator ini mencerminkan tingkat efisiensi dan ketepatan waktu dalam proses perencanaan pembangunan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017.

Pengukuran dan analisis terhadap persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kesesuaian rencana pembangunan dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan.

Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan terkait dengan persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu diantaranya :

- Efektivitas Perencanaan : Tingkat pencapaian ini dapat mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan jadwal;
- Manajemen Waktu : Evaluasi terhadap alasan keterlambatan, apakah karena kendala internal atau eksternal, dapat membantu dalam meningkatkan manajemen waktu;

- Dampak Terhadap Pelaksanaan : Tepat waktu atau tidaknya penyusunan dokumen perencanaan dapat memengaruhi kelancaran implementasi program dan proyek pembangunan;

- 2) Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah tersusun tepat waktu.

Capaian indikator program ini tercapai 100%, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah berupa penyusunan laporan evaluasi hasil RKPD dan laporan kegiatan DAK yang dilaksanakan setiap triwulan disusun tepat waktu, dibawah tanggal 15 pada setiap awal bulan pada triwulan berikutnya.

- 3) Persentase keselarasan program antara dokumen perencanaan (RPJMD dengan RKPD)

Capaian indikator ini merupakan keselarasan program yang ada dalam RKPD dan program yang ada dalam RPJMD pada Tahun berkenaan. Jumlah program yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023 sebanyak 137 program sedangkan jumlah program yang ada dalam RPJMD Tahun berkenaan sejumlah 137 program, artinya program yang ada pada RKPD selaras dengan program yang ada pada RPJMD, atau indikator kinerja program tercapai 100%.

- 4) Persentase keselarasan program antara dokumen Renja dengan RKPD

Capaian indikator ini merupakan keselarasan program yang ada dalam Renja Perangkat Daerah dan program yang ada dalam RKPD pada Tahun berkenaan. Jumlah program yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2023 sebanyak 137 program sedangkan jumlah program yang ada dalam RKPD Tahun berkenaan sejumlah 133 program, artinya program yang ada pada Renja Perangkat Daerah selaras dengan program yang ada pada RKPD Tahun berkenaan, atau indikator kinerja program tercapai 100%.

- 5) Persentase keselarasan program antara dokumen Renja dengan Renstra

Indikator ini mengukur keselarasan program yang tertuang dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dengan program yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Program yang tertuang dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebanyak 137 program dan program yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah sebanyak 137 program, sehingga realisasi pada indikator ini tercapai 100%.

6) Persentase rata-rata capaian program terhadap RKPD

Persentase rata-rata capaian program terhadap RKPD bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun berjalan dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah maupun nasional. Rata-rata capaian program merupakan akumulasi capaian seluruh Perangkat Daerah yang diinput melalui aplikasi *e-monev* dengan realisasi sebesar sebesar 92,00% dan jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya dengan capaian 95,05%, maka terdapat penurunan rata-rata capaian program terhadap RKPD sebesar 3,05%.

7) Persentase partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sudah tentu mutlak adanya, sehingga partisipasi yang diberikan secara tidak langsung memberi peningkatan kapasitas program yang akan dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilakukan dengan melibatkan unsur masyarakat melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pengukuran keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan diukur dengan indikator persentase partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Indikator ini melihat jumlah unsur masyarakat/pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses perencanaan dan dibuktikan dengan penandatanganan berita acara Musrenbang Kabupaten. Pada pelaksanaan Musrenbang kabupaten terdapat 9 unsur yang diundang dan berpartisipasi dalam proses perencanaan meliputi; DPRD, Instansi Vertikal, LSM, BUMD, Pemerintahan Desa, Pemerintahan Kecamatan, Pengusaha/Swasta, Organisasi Masyarakat (Asosiasi-asosiasi yang berada di Belitung Timur, organisasi kepemudaan, keagamaan, profesi, dll) dan Perbankan. Dari seluruh unsur yang menjadi target sasaran capaian kinerja dalam pelaksanaan musrenbang kabupaten Tahun rencana 2023 semua unsur hadir dalam kegiatan tersebut atau terealisasi 100%.

Dari 7 (tujuh) unsur indikator diatas terpenuhi sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kualitas dokumen perencanaan memiliki nilai baik dengan capaian rata-rata indikator 100%.

3. Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah

Komponen pembentuk IKU mencakup berbagai aspek, termasuk kesejahteraan ekonomi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, lingkungan, dan lainnya, tergantung pada tujuan dan prioritas pemerintah daerah. Setiap kabupaten memiliki IKU yang berbeda tergantung pada kebijakan, visi, dan misi pemerintah daerah. Pemilihan IKU yang tepat sangat penting untuk mengukur kemajuan dan memastikan bahwa upaya dan sumber daya diarahkan ke arah yang benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Evaluasi secara berkala terhadap capaian IKU Kabupaten juga penting untuk perbaikan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Persentase target dan capaian indikator persentase capaian indikator kinerja utama daerah dengan target 82,93% dan tercapai 91,47%. Indikator persentase capaian indikator kinerja utama daerah yang diampu oleh Bappelitbangda sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026.

2.1.3.4.2 Keuangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur dijelaskan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur merupakan Badan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan saat ini berpedoman kepada Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Melaksanakan pengelolaan anggaran daerah dan fungsi akuntansi keuangan daerah;
- c. Melaksanakan fungsi akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
- d. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan belanja daerah dan pelaksanaan administrasi perbendaharaan daerah lainnya; dan
- e. Membantu pengelolaan barang milik daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- d. Pelaksanaan urusan penatausahaan kekayaan daerah;
- e. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengelolaan keuangan daerah;
- g. Penerbitan surat perintah pencairan dana dari kas daerah; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tertera diatas, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. Mengesahkan DPA-SKPD;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- h. Menyimpan uang daerah;
- i. Menetapkan SPD;
- j. Menerbitkan SP2D;
- k. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- l. Menguji terhadap dokumen Surat Perintah Membayar berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- m. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
- n. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- o. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- p. Melakukan pengelolaan hutang dan piutang daerah;
- q. Melakukan tagihan piutang daerah;
- r. Menyusun kebijakan , pedoman dan petunjuk teknis akuntansi;
- s. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah;
- t. Melaksanakan tata buku dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- u. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- v. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- w. Melaksanakan administrasi dan pedoman dan pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tugas pokok Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur adalah merumuskan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan operasional di bidang pendapatan, anggaran dan akuntansi, perbendaharaan, dan kekayaan daerah;
- b. Pelaksanaan pembinaan di bidang pendapatan, anggaran dan akuntansi, perbendaharaan, dan kekayaan daerah;
- c. Pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan
- d. Pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan APBD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Tabel 2. 163 Capaian Sasaran Urusan Keuangan Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase temuan pengelolaan keuangan OPD dalam LHP BPK-RI	95	95	95	97	98	99
2	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	100	100	100	100	100	100
3	Indeks sarana dan prasarana aparatur	100	100	95	97	98	99
4	Indeks profesionalisme aparatur	100	100	95	97	98	99
5	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	100	100	90	90	90	90
6	Ketepatan waktu penyampaian APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
7	Ketepatan waktu penyampaian Perubahan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
8	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
9	Persentase Realiasi SP2D Tepat Waktu	95	95	95	95	95	95
10	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	10	10	10	10	10	10
11	Persentase belanja pendidikan	≥ 20	23	26	20	20	20
12	Persentase belanja kesehatan	≥ 10	36	25	10	10	10
13	Bagi hasil Kabupaten/Kota dan Desa	0,8	1	1	0,83	0,87	0,88
14	Rasio belanja urusan pemerintahan umum	85	72,5	85	85	85	85
15	Rasio belanja pegawai diluar Guru dan Tenaga Kesehatan	27	38,58	34	27	27	27
16	Proporsi pajak terhadap total belanja	6,96	7	6	7,56	7,76	8,12

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
17	Kesesuaian Barang Milik Daerah dengan Nilai Aset di Neraca	100	100	100	100	100	100
18	Persentase pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah yang terlaksana	100	100	100	100	100	100
19	Rasio PAD terhadap komponen pendapatan daerah	13	14,03	13	14,17	14,38	14,81
20	Rasio PAD	1	96,35	1	1,40	1,44	1,48
21	Kemadirian keuangan daerah	13,73	13	13	15,00	15,00	15,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Tahun 2023

Tabel 2. 164 Target dan Capaian Urusan Keuangan Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase temuan pengelolaan keuangan OPD dalam LHP BPK-RI	96%	95%	98,96%
2	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	100%	100%	100%
3	Indeks sarana dan prasarana aparatur	95%	95%	100%
4	Indeks profesionalisme aparatur	96%	95%	98,96%
5	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	90%	90%	100%
6	Ketepatan waktu penyampaian APBD	Tepat Waktu	28 November 2023 (Tepat waktu)	100%
7	Ketepatan waktu penyampaian Perubahan APBD	Tepat Waktu	26 September 2023 (Tepat waktu)	100%
8	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)	Tepat Waktu	15 Maret 2023 (Tepat Waktu)	100%
9	Persentase Realiasi SP2D Tepat Waktu	95%	95%	100%
10	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	10%	10%	100%
11	Persentase belanja pendidikan	20%	26%	131,20%
12	Persentase belanja kesehatan	10%	25%	253,30%
13	Bagi hasil Kabupaten/Kota dan Desa	0,81%	1%	123,46%
14	Rasio belanja urusan pemerintahan umum	85%	85%	100%

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
15	Rasio belanja pegawai diluar Guru dan Tenaga Kesehatan	27%	34%	126,07%
16	Proporsi pajak terhadap total belanja	7,43%	6%	82,91%
17	Kesesuaian Barang Milik Daerah dengan Nilai Aset di Neraca	100%	100%	100%
18	Persentase pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%
19	Rasio PAD terhadap komponen pendapatan daerah	14,03%	13%	92,66%
20	Rasio PAD	1,4%	1%	92,14%
21	Kemadirian keuangan daerah	14%	13%	92,66%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Tahun 2023

Penjelasan capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Indikator Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dalam LHP BPK-RI
Capaian kinerja terhadap persentase temuan pengelolaan keuangan OPD dalam LHP BPK-RI pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 adalah 95%.
Persentase temuan pengelolaan keuangan OPD dalam LHP BPK-RI dapat dilakukan dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Laporan Keuangan Daerah sehingga dapat disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengendalian intern yang memadai untuk menghasilkan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan sehingga tidak terdapat lagi temuan atas pengelolaan keuangan OPD.
2. Indikator Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja.
Capaian kinerja terhadap persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur selama tahun 2023 adalah 100% dengan terpenuhinya penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja sesuai dengan penyediaan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja yang direncanakan.
3. Indikator Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur
Capaian kinerja terhadap indeks sarana dan prasarana aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur

pada tahun 2023 adalah 95% dengan terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dan terpeliharanya sarana prasarana aparatur sesuai dengan yang direncanakan.

4. Indeks Profesionalisme Aparatur

Capaian kinerja terhadap indeks profesionalisme aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 adalah 95% yang menggambarkan kualitas profesionalisme aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan aparatur dalam melaksanakan tugas jabatannya.

5. Cakupan Layanan Penunjang yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja terhadap cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 adalah 90% dengan terpenuhinya indikator kinerja program dan kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

6. Ketepatan Waktu Penetapan Raperda APBD

Capaian kinerja terhadap ketepatan waktu penetapan raperda APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur selama periode Renstra Perubahan 2021-2026 adalah *tepat waktu* sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah “Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.”

Pencapaian target ini tidak terlepas dari adanya kerjasama yang saling mendukung dan komitmen disertai koordinasi yang dilakukan secara intensif kepada seluruh pihak terkait antara PPKD, seluruh OPD, Tim TAPD dan pihak legislatif. Walaupun demikian dalam menyusun APBD terdapat tahapan-tahapan lainnya yang perlu menjadi perhatian, yaitu ketepatan waktu penyampaian dan kesepakatan KUA, dan ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD ke DPRD. Dalam upaya memenuhi setiap ketentuan waktu yang ada maka diperlukan strategi khusus dan komitmen bersama karena dalam menyusun KUA dan APBD mengacu pada dokumen perencanaan.

7. Ketepatan Waktu Penetapan Raperda Perubahan APBD

Capaian kinerja terhadap ketepatan waktu penetapan raperda perubahan APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur selama periode Renstra Perubahan 2021-2026 adalah *tepat waktu* sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir. Terhadap capaian target kinerja selama periode Renstra Perubahan 2021-2026 penetapan raperda Perubahan APBD dapat direalisasikan dengan tepat pada waktunya, sehingga telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan terhadap pengelolaan keuangan Daerah dan pencapaian tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh Perangkat Daerah dan pihak legislatif yang saling mendukung dan berkomitmen tercapainya target kinerja tersebut. Walaupun demikian dalam menyusun APBD terdapat tahapan-tahapan lainnya yang perlu menjadi perhatian, yaitu ketepatan waktu penyampaian dan kesepakatan KUA, dan ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD ke DPRD. Dalam upaya memenuhi setiap ketentuan waktu yang ada maka diperlukan strategi khusus dan komitmen bersama karena dalam menyusun KUA dan APBD mengacu pada dokumen perencanaan.

8. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu merupakan amanat Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 2006 disebutkan di dalam Pasal 11 (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Bab VII point (B), bahwa “Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.”

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas dan fungsi sebagai Penyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan didukung oleh seluruh Perangkat Daerah guna menyampaikan laporan keuangan yang akuntabel, sistematis dan berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Tahun 2022 Pemerintah

Belitung Timur kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Atas pencapaian opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut, maka wajib kiranya bagi pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk dapat mempertahankan kembali capaian tersebut, dengan didukung komitmen seluruh OPD/ perangkat daerah, BUMD dan BLUD yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Bersinergi meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Laporan Keuangan Daerah sehingga dapat disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengendalian intern yang memadai untuk menghasilkan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

9. Persentase Realisasi SP2D Tepat Waktu

Pedoman pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pencapaian realisasi SP2D yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah "*tepat waktu*" sampai tanggal 31 Desember 2023.

Realisasi SP2D merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur. Realisasi SP2D tahun 2023 berjumlah 6.592 SP2D atau sebesar 119 % dari target sebesar 5550 SP2D yang terdiri dari 86 SP2D TU-GU Nihil, 440 SP2D GU, 4744 SP2D LS, dan 1.322 SP2D Gaji. Adapun terhadap capaian kinerja masa awal Renstra Perubahan 2021-2026 tersebut karena penerbitan SP2D menyesuaikan dengan penarikan dana pelaksanaan program kegiatan dan Sub Kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah. Terhadap indikator sasaran kinerja realisasi SP2D tepat waktu ini merupakan pengembangan dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan pada tahun 2019 hingga sekarang.

10. Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana

Pedoman pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pencapaian persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar 10%.

Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana merupakan persentase jumlah dari program/kegiatan yang tidak terlaksana terhadap jumlah program/kegiatan dalam APBD.

11. Persentase Belanja Pendidikan

Pedoman pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pencapaian persentase belanja pendidikan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mengalokasikan jumlah belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 26%.

Persentase belanja pendidikan merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang dialokasikan pada APBD tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 275.814.717.246,00 yang terealisasi sebesar Rp. 244.046.042.508,27 atau 88,48%.

12. Persentase Belanja Kesehatan

Pedoman pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pencapaian persentase belanja kesehatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mengalokasikan jumlah belanja untuk fungsi kesehatan sebesar 25%.

Persentase belanja kesehatan merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang dialokasikan pada APBD tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 211.798.490.459,00 yang terealisasi sebesar Rp. 188.980.951.462,00 atau 89,23%.

13. Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa

Pedoman pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pencapaian bagi hasil kabupaten/kota dan desa yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar 1%.

Bagi hasil kabupaten/kota dan desa merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang dialokasikan pada APBD tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 7.172.036.857,00 yang terealisasi sebesar Rp. 5.511.251.457,44 atau 76,84%

14. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum

Pedoman pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pencapaian rasio belanja urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar 85%.

Rasio belanja urusan pemerintahan umum merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang mengukur efisiensi belanja operasi di luar transfer expenditures (hibah, bantuan sosial, subsidi, pembayaran bunga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga) atau rasio belanja operasi dalam APBD di luar transfer expenditures.

15. Rasio Belanja Pegawai Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan

Pedoman pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pencapaian rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar 34%.

Rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang mengukur rasio belanja pegawai (gaji, tunjangan, honorarium) di luar guru dan tenaga kesehatan.

16. Proporsi Pajak Terhadap Total Belanja

Pedoman pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pencapaian proporsi pajak terhadap total belanja yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar 6%.

Proporsi pajak terhadap total belanja merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang dialokasikan pada APBD tahun 2023 dengan realisasi pajak sebesar Rp.55.223.937.728,88 dan total belanja sebesar Rp.929.775.827.818,94.

17. Kesesuaian Barang Milik Daerah Dengan Nilai Aset di Neraca

Selain melaporkan tentang pertanggungjawaban keuangan daerah juga melaporkan pertanggungjawaban harta kekayaan daerah yang terlihat dari pengelolaan aset daerah dan dituangkan dalam bentuk akhirnya itu neraca barang milik daerah. Oleh karena itu, seluruh Perangkat Daerah dalam mengelola aset daerah ini harus memahami dan melaksanakan amanat peraturan yang telah ditetapkan terutama kepada para Pengguna Barang Milik Daerah, Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, dan Pengurus Barang Pengguna di seluruh Perangkat Daerah, meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur selaku Pejabat Penatausahaan Pengelola Barang Daerah.

18. Persentase Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Badan Pegelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur dimulai tahun 2019. Badan Pegelolaan Keuangan Pendapatan Daerah melalui Bidang Kekayaan Daerah melakukan telaah RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan yang dilakukan perangkat daerah. Untuk proses pengadaan BMD, sebelum dilakukan proses pencairan, Badan Pegelolaan Keuangan Pendapatan Daerah melalui Bidang Kekayaan Daerah melakukan verifikasi berkas pengadaan guna menyesuaikan kode rekening pengadaan belanja modal, untuk pengadaan kendaraan dinas, dilakukan pengecekan secara acak Bersama BPK-RI pada pemeriksaan LKPD tahun bersangkutan. Badan Pegelolaan Keuangan Pendapatan Daerah melalui bidang kekayaan daerah melakukan rekonsiliasi asset tetap sebanyak 2(dua) kali dalam satu tahun anggaran.

19. Rasio PAD Terhadap Komponen Pendapatan Daerah

Pedoman pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pencapaian rasio PAD terhadap komponen pendaptan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar 13%.

Rasio PAD terhadap komponen pendapatan daerah merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Badan

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang dialokasikan pada APBD tahun 2023 dengan realisasi PAD sebesar Rp.107.408.045.044,81 terhadap realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.913.345.884.385,81.

20. Rasio PAD

Pedoman pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pencapaian rasio PAD yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar 1%.

Rasio PAD merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang mengukur tax ratio atau kemampuan keuangan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah.

21. Kemandirian Keuangan Daerah

Pedoman pengelolaan keuangan daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemandirian keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar 13%.

Kemandirian keuangan daerah adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan diluar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri.

Kemandirian keuangan daerah merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang dialokasikan pada APBD tahun 2023 dengan realisasi PAD sebesar Rp.107.408.045.044,81 terhadap realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.913.345.884.385,81.

2.1.3.4. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

3

Capaian Sasaran Urusan Kepegawaian pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2016-2021 dan Renstra Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 165 Capaian Sasaran Urusan Kepegawaian Tahun 2021-2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Sistem Merit (Nilai)	102,5	102,5	252	143	163	
2	Indeks Profesionalisme ASN (Skor 1-100)	68,99	52,93	71,53	56	57	

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2023

Tabel 2. 166 Target dan Capaian Urusan Kepegawaian Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Indeks Sistem Merit (Nilai)	122	252	206,56
2	Indeks Profesionalisme ASN (Skor 1-100)	55	71,53	130,05

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2023

Penjelasan Capaian Sasaran Urusan Kepegawaian Tahun 2023 Indikator pada tabel diatas sebagai berikut :

1. Indeks Sistem Merit

Sistem merit secara legal formal diberlakukan pada tahun 2014 melalui Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa kebijakan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan (tanpa diskriminasi). Sistem ini seolah menjadi kritik atas suburnya praktek nepotisme, dan primordialisme di dunia kerja. Oleh karenanya sistem merit menjadi salah satu hasil dari agenda reformasi birokrasi yang dicanangkan Presiden untuk menciptakan birokrasi netral dan mampu melayani kebutuhan publik serta bebas dari KKN.

Dalam menjamin pelaksanaan sistem merit sebagai salah satu prioritas nasional pemerintah Indonesia, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 memiliki peran penting untuk mengawasi penerapan sistem merit di Instansi Pemerintah. KASN telah menyusun instrumen penilaian penerapan sistem merit yang tertuang dalam Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2023, BKPSDM Kabupaten Belitung Timur menargetkan capaian atas Indeks Sistem Merit sebesar 122 atau kategori “Buruk”. Adapun dari hasil penilaian mandiri tahun 2023, dengan menggunakan Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, diperoleh hasil yang terverifikasi KASN sesuai dengan Surat Keputusan KASN Nomor 204/KEP.KASN/C/XI/2023 tanggal 30 November 2023, Indeks Sistem Merit memperoleh capaian sebesar **252** atau mencapai **206,56%** dengan predikat **“Baik”**.

2. Indeks Profesionalisme ASN

Pengukuran Indeks Profesional ASN merupakan report dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Tata Cara Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diatur pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 TAHUN 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Kebijakan umum dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, sedangkan tata cara dan pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh BKN.

Hasil yang terverifikasi BKN sesuai dengan Surat BKN Nomor 221.F/BM.02/SD/C.II/2023 tanggal 10 Oktober 2023, Indeks Profesional ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memperoleh capaian sebesar **71,53** dengan kategori **“Sedang”** atau mencapai **130,05%** jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 55 di tahun 2023.

2.1.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan fungsi penelitian dan pengembangan sebagai salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan inovasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh kelitbangan dapat mendukung percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing tinggi. Hal inilah yang menjadi dasar pentingnya peran kelitbangan

untuk mendukung kemajuan pembangunan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sistem Pengembangan Inovasi dan Teknologi tertuang dalam Peraturan Bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Kementerian Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, dinyatakan bahwa sistem inovasi daerah berkaitan dengan keseluruhan proses pengembangan inovasi antar institusi pemerintah, lembaga penelitian, badan usaha, serta masyarakat yang mengedepankan ilmu pengetahuan, teknologi, serta pengembangan metode baru.

Salah satu upaya untuk memperkuat riset dan inovasi daerah pada tahun 2022 Kabupaten Belitung Timur mendukung operasional pelaksanaan riset dengan topik Pariwisata Berkelanjutan dan Terintegrasi berdasarkan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati di Kepulauan Belitung, Indonesia. Riset ini dilaksanakan oleh Departemen Biologi FMIPA IPB dengan pembiayaan dari United Kingdom-Indonesia Consortium for Interdisciplinary Sciences (UKICIS) untuk masa riset empat tahun yang dimulai dari tahun 2023.

Tabel 2. 167 Capaian Indikator Sasaran Urusan penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2020

No	Indikator Sasaran	Realisasi			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase peningkatan pemanfaatan penelitian dan kajian oleh daerah	40	40	31,25	60	65	70
2	Persentase peningkatan pemanfaatan inovasi dan teknologi oleh daerah	31,25	31,25	43,75	60	65	70

Sumber : Bappelitbangda, Tahun 2023

Tabel 2. 168 Target dan Capaian Sasaran Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023

No	Indikator Sasaran (Renstra PD Tahun 2021-2026)	Target	Realisasi	%
1	Persentase peningkatan pemanfaatan penelitian dan kajian oleh daerah	50	31,25	62,50
2	Persentase peningkatan pemanfaatan inovasi dan teknologi oleh daerah	50	43,75	87,50

Sumber : Bappelitbangda, Tahun 2023

Penjelasan capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Pemanfaatan Penelitian dan Kajian Oleh Daerah

Sejak tahun 2021 telah dilaksanakan kajian sebanyak 6 dokumen yaitu 1) Penyusunan Indeks Potensi Ekonomi Daerah, 2) Kajian Pemanfaatan Hasil Perikanan untuk Ketahanan Pangan, 3) Kajian Kepuasan Layanan Kualitas Infrastruktur Belitung Timur, 4) Kajian Analisis Daya Saing Koperasi dan UMKM, 5) Kajian Analisis Strategi Penguatan Koperasi dan UMKM dan 6) Analisis Strategis Smart City Daerah yang dikerjakan bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dari 6 kajian tersebut kajian 1) Kajian Analisis Daya Saing Koperasi dan UMKM, 2) Kajian Analisis Strategi Penguatan Koperasi dan UMKM dan 3) Analisis Strategis Smart City Daerah yang sering dijadikan rujukan sehingga Persentase peningkatan pemanfaatan penelitian dan kajian daerah bernilai 31,25 persen.

2. Persentase Peningkatan Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi oleh Daerah.

Capaian Indikator program persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah 43,75%. Pada target kinerja ini jumlah perangkat daerah yang difasilitasi tahun 2023 dalam penerapan inovasi daerah sejumlah 14 Perangkat Daerah, dari total Perangkat Daerah yang ada yaitu sejumlah 32 Perangkat Daerah, atau tercapai 43,75%. Capaian ini dibawah capaian yang ditargetkan.

2.1.3.4. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

5

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP) merupakan lembaga yang bertanggung jawab di bidang pembinaan ideologi, politik, dan kebangsaan di Indonesia. Tugas utama BKBP adalah memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kesatuan bangsa, politik, dan ideologi Pancasila.

Dasar hukum pembentukan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Belitung Timur dan dikukuhkannya Pejabat struktural Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Pejabat Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan Peraturan

Bupati Belitung Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Capaian sasaran urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2021-2026 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 169 Capaian Sasaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Tingkat persentase sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tingkat persentase masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan dan pengawasan serta pengendalian narkoba	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tingkat persentase pemahaman masyarakat tentang budaya politik	60%	60%	60%	75%	75%	75%
4	Tingkat persentase penanganan konflik secara damai	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2023

Tabel 2. 170 Target dan Capaian Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Tingkat persentase sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien	100%	100%	100
2	Tingkat persentase masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan dan pengawasan serta pengendalian narkoba	100%	100%	100
3	Tingkat persentase pemahaman masyarakat tentang budaya politik	60%	60%	100
4	Tingkat persentase penanganan konflik secara damai	100%	100%	100

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2023

Penjelasan/narasi capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

8. Tingkat persentase sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien

Indikator ini tidak bersentuhan secara langsung dengan indikator dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik, tetapi indikator ini bermfaat dalam menjaga kesinambungan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Indikator ini menggambarkan kinerja sekretariat sebagai administrator dalam dalam urusan kerumahtanggaan, fasilitator sarana dan prasarana serta ketersediaan sumber daya aparatur demi menjaga kesinambungan kinerja dengan tujuan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, tata hukum, efisien, efektif dan akuntabel dengan melaksanakan 1 (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh sub kegiatan) dengan Total anggaran sebesar Rp. 3.348.942.530.00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.823.960.290,00 atau sebesar 84,32% dengan capaian realisasi indikator sebesar 100% walaupun ada sebahagian pelaksanaan sub kegiatan tidak merealisasikan anggaran karena menggunakan anggaran rutin lainnya tetapi tidak mengurangi capaian realisasi kinerja fisik.

9. Tingkat persentase masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan dan pengawasan serta pengendalian narkoba

Indikator ini bertujuan meningkatkan pemantapan ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan, Ideologi Negara, Hak asasi manusia, Pembangunan Bangsa dan kehidupan antar umat beragama sehingga tidak ada lagi konflik di tengah masyarakat baik secara vertical maupun masyarakat. dengan pelaksanaan kegiatan diantaranya :

A. Paskibraka dan Pendidikan Bela Negara

kegiatan paskibraka merupakan kegiatan baru yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Dalam Negeri, dimana pasukan pengibar bendera merah putih ini dipersiapkan selama satu bulan lebih untuk mengibarkan bendera pada hari kemerdekaan Republik Indonesia. Pelatihan dipusatkan di sejumlah lokasi di wilayah Kecamatan Manggar dengan peserta yang diinapkan dengan tujuan mereka akan lebih fokus mengikuti pelatihan sehingga pada pelaksanaan pengibaran bendera nantinya akan berjalan sesuai harapan.

Selain ini diadakan juga kegiatan pendidikan bela negara untuk para generasi muda supaya selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa sehingga generasi muda dalam mencapai tujuan dan cita-cita sesuai dengan adat aturan serta etika yang berlaku dimasyarakat. Pada kegiatan bela negara dengan sasaran anak muda Karangtaruna sekecamatan Manggar dengan harapan Agar para generasi muda tumbuh memiliki jiwa yang berwawasan kebangsaan dan nasionalisme sesuai dengan landasan Pancasila

B. Kegiatan Festival Pentas Seni dan Budaya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur bekerja sama dengan Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menyelenggarakan kegiatan pentas seni dan budaya untuk memberikan wawasan tentang upaya menciptakan kerukunan umat beragama di kalangan masyarakat yang di hadiri tokoh agama, pemuda, perangkat desa dengan harapan:

- Tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat saling bersinergi menjaga kerukunan dan keharmonisan antar suku, ras dan umat beragama.
- Perlunya kerja sama antar semua pihak untuk menangkal potensi penyebaran paham radikalisme di masyarakat.
- Untuk tokoh agama, pemuka adat, pemuda agar lebih aktif dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat terutama para pelajar agar terhindar dan tidak terpengaruh oleh konflik kesukuan dan agama.

Kegiatan pentas seni dan budaya dilaksanakan di Kecamatan Manggar dengan konsep festival yang menampilkan keberagaman kesenian dari masing-masing suku yang ada di Kabupaten Belitung Timur.

C. Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Penyalahgunaan Narkoba

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bekerja sama dengan BNNK Kabupaten Belitung mengadakan kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Penyalahgunaan Narkoba. Pada kegiatan ini BNNK Kabupaten Belitung dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengambil tema Desa Bersih Narkoba (Bersinar), guna mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Selain itu juga membentuk Tim P4GN yang bertugas melakukan tindakan pencegahan dini dan tangkal dini terhadap potensi-potensi beredar narkoba di wilayah Belitung Timur. Maksud dan

tujuan diadakannya Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Belitung Timur adalah :

- Meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat terutama yang ada dilingkungan Pemerintah Desa akan bahaya narkoba
- Menumbuhkan kesadaran kepada generasi muda khususnya pelajar akan pentingnya hidup sehat tanpa narkoba.

10. Tingkat persentase pemahaman masyarakat tentang budaya politik

Indikator ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik dalam proses demokrasi yang damai dengan terselenggaranya pendidikan dan pembinaan politik kepada masyarakat, pelajar dan perempuan serta partai politik yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan pendidikan dan pembinaan politik melalui 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar :

- a. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, dengan anggaran sebesar Rp. 12.497.816.650,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.417.912.612,00 dengan kata lain capaian realisasi sebesar 99,36% sedangkan capaian kinerja mencapai perkiraan 60%.
- b. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan anggaran sebesar Rp. 184.647.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 168.118.389,00 dengan kata lain capaian realisasi sebesar 91,05% sedangkan capaian kinerja mencapai perkiraan 100%.

Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- Bimbingan teknis pelaporan pertanggungjawaban hibah partai politik

Dilaksanakan pada kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan dihadiri oleh pengurus partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Belitung Timur yaitu sebanyak 10 (sepuluh) partai politik dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang dan narasumbernya dari Kementerian Dalam Negeri RI. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Gues Kecamatan Manggar.

Kegiatan ini bertujuan agar partai politik yang menerima dana hibah dapat memberikan laporan pertanggungjawaban yang lebih akuntable.

- Hibah Pelaksanaan Pemilu 2024

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum melalui kegiatan fasilitasi Lembaga Politik menyiapkan anggaran guna mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai tahapan Pemilu yang dimulai pada bulan November 2023. Adapun pemberian anggaran tersebut melalui mekanisme hibah yang diberikan kepada Penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Belitung Timur, Dimana pemberian bantuan tersebut melalui dua tahap pencairan yang dimulai pada Tahun 2023 sebesar 50% dan Tahun 2024 sebesar 60%.

- Verifikasi hibah bantuan partai politik

Selain memberikan bantuan hibah kepada penyelenggara Pemilu, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang didasarkan jumlah suara sah yang diperoleh oleh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Belitung Timur, sebesar Rp. 15.000,- per suara sah dengan rincian sesuai Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2023.

- Verifikasi Organisasi Masyarakat

Verifikasi dan pendataan organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Belitung Timur sebagai upaya dalam pengawasan dan pencegahan berkembangnya organisasi asing dan organisasi masyarakat terlarang secara peraturan dan perundang-undangan.

Tabel 2. 171 Jumlah Organisasi Kabupaten Belitung Timur s/d Bulan Desember Tahun 2023

No	Kecamatan	Keterangan		
		Terdaftar	Terdata	Jumlah
1	Manggar	8	16	24
2	Kelapa Kampit	3	-	3
3	Simpang Renggang	2	-	2
4	Damar	3	-	3
5	Gantung	7	-	7
6	Dendang	2	-	2
	Jumlah	25	16	41

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2023

Tabel 2. 172 Jumlah Organisasi Terdata dan Terdaftar di Kabupaten Belitung Timur s/d Bulan Desember Tahun 2023

No	Kecamatan	Terdaftar	Terdata	Jumlah
1	Manggar	62	13	75
2	Kelapa Kampit	5	-	5
3	Simpang Renggang	2	-	2
4	Damar	5	2	7
5	Gantung	11	8	19
6	Dendang	2	-	2
	Jumlah	87	23	110

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2023

Pada kedua tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat sebanyak 110 organisasi masyarakat di Kabupaten Belitung Timur dengan sebanyak 41 organisasi masyarakat diantaranya dibentuk di Kabupaten Belitung Timur dengan rincian 25 Organisasi telah terdaftar sedangkan 16 (enam belas) organisasi masih bersifat terdata karena belum mendaftarkannya.

11. Tingkat persentase penanganan konflik secara damai

Indikator ini bertujuan untuk Meningkatkan Pemahaman Terhadap Kewaspadaan Dini Serta Menjaga Kamanan dan Ketertiban Untuk Mencegah Terjadinya Konflik Sosial di Masyarakat dengan pembinaan dan deteksi dini konflik sara di daerah dengan melaksanakan 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan serta 4 (empat) sub kegiatan dengan pagu anggaran mencapai sebesar :

a. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial sebesar Rp. 3.817.273.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.259.091.112,00 atau capaian sebesar 85,38%. Sedangkan realisasi fisiknya mencapai diasumsikan 100% karena tidak adanya gangguan keamanan atau konflik sosial /sara ditengan-tengah masyarakat Kabupaten Belitung Timur dengan berbagai aktifitas atau kegiatan seperti :

- Hibah kepada Kejaksaan Negeri dan TNI AU
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2023 melaksanakan pemberian Hibah Pembangunan lantai dua Gedung Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung Timur yang memang usulan permohonan Pembangunan tersebut telah diusulkan pada Tahun 2022. Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum maka anggaran hibah ini di akomodir didalam dokumen anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, begitu juga dengan Pembangunan Gedung Perwakilan TNI AU yang diusulkan di Tahun 2022 dan dilaksanakan pada Tahun 2023.
- Pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindaklanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-223 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing Tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023 yang melibatkan unsur vertikal dan lintas sektor yang memiliki kewenangan di bidang hukum, keamanan, imigrasi unit penyelenggara pelabuhan sebagai pintu masuk kedatangan.

Tabel 2. 173 Orang Asing atau Tenaga Kerja Asing Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

No.	Nama Perusahaan	Negara Asal	Jumlah
1	PT. Tommy Utama	China	1
2	PT. Steelindo Wahana Perkasa	Malaysia Taiwan	5 1
3	PT. Parit Sembada	Malaysia	2
4	PT. Surya Mas Beltim Indo Makmur	China	4
5	PT. Menara Cipta Mulia	Malaysia	1
6	PT. Damar Mineral Indotama	China	1

No.	Nama Perusahaan	Negara Asal	Jumlah
7	PT. Indo Makmur Alam Raya	China	2
Jumlah			17

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2023

Ada sebanyak 17 orang tenaga kerja asing yang ada di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan data yang ada.

- Forum Kewaspadaan

Pembentukan forum dengan membentuk TIM Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sesuai Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-273 TAHUN 2023 langsung dibawah pengarah dari Bupati Belitung Timur selaku pengarah kegiatan yang melibatkan unsur intelijen vertikal seperti Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Bin Daerah, dll sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk antisipasi dini terhadap potensi-potensi yang mengancam daerah dengan cara melakukan mengawasi, mengumpulkan informasi, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan setiap data dan informasi untuk mendeteksi secara dini terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Kabupaten Belitung Timur yang mengancam stabilitas Nasional.

- Penanganan Konflik Sosial

Pembentukan Tim berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial yang secara teknis langsung dibawah pengarah Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur yang melibatkan instansi vertikal dengan tujuan mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi efektifitas penanganan konflik sosial di Kabupaten Belitung Timur. Tim juga melaksanakan pemetaan, pemantauan, merespon secara cepat dan mengambil Tindakan yang dibutuhkan secara responsif terhadap gejala atau terjadinya gangguan keamanan.

- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang melibatkan unsur pimpinan daerah Kabupaten seperti Ketua DPRD, Kapolres, Dandim,

TNI AU dan AL, Kepala Kejaksaan Negeri. Adapun tugas dan fungsi dibentuknya forum ini sebagaimana tertuang didalam Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-264 Tahun 2023 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Belitung Timur. Pembiayaan kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dimana sebelumnya anggaran tersebut di laksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

2.1.3.4.6 Pengawasan

Seiring tuntutan reformasi yang diinginkan oleh seluruh masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penyempurnaan sistem dan kesederhanaan prosedur birokrasi diantaranya penyederhanaan prosedur birokrasi, pelayanan satu atap dan kemudahan perolehan informasi oleh masyarakat, yang kesemuanya mengarah pada sistem pelayanan masyarakat yang prima. Tujuan dari hal ini adalah kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, hal ini tidak terlepas dari tugas pokok dari pemerintah sebagai pelayanan dan pengayom masyarakat. Dalam rangka menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dilakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah baik melalui kegiatan pengawasan represif, pengawasan fungsional, pengawasan legislatif maupun pengawasan masyarakat.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Tabel 2. 174 Capaian Sasaran Urusan Pengawasan Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	87	89	93,64	93	96	96
2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat	73	75	78	85	90	90
3	Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	Level 2	4	5	5

4	Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	Level 2	4	5	5

Sumber : Inspektorat Daerah, Tahun 2023

Tabel 2. 175 Target dan Capaian Urusan Pengawasan Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	91	93,64	101
2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat	80	78	98
3	Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	100
4	Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	100

Sumber : Inspektorat Daerah, Tahun 2023

Penjelasan capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan (BPK dan Inspektorat) Pada sasaran 1 dan 2 yaitu meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan (BPK dan Inspektorat) dapat dicapai lebih dari target yaitu realisasi tindak lanjut temuan BPK dengan realisasi semester II Tahun 2023 yaitu sebesar 94,57%, dan tindak lanjut temuan Inspektorat dengan realisasi sebesar 80%. Target penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK adalah 92% dengan realisasi 94,57%, dengan rincian perhitungan realisasi tindak lanjut ini adalah Jumlah rekomendasi temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi hasil temuan BPK dikali 100%. Dari jumlah rekomendasi temuan BPK total berjumlah 802 rekomendasi, dapat ditindaklanjuti (sesuai) sebanyak 751 rekomendasi atau sebesar 93,64%. Target penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan Inspektorat adalah 80% dengan realisasi 78,5%, yaitu dengan rincian perhitungan realisasi tindak lanjut ini adalah Jumlah rekomendasi temuan Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi hasil temuan Inspektorat dikali 100 %. Dari jumlah rekomendasi temuan Inspektorat total berjumlah 2278 rekomendasi, dapat ditindaklanjuti (sesuai) sebanyak 1789 rekomendasi atau sebesar 78,5%.
2. Meningkatnya Level Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Capaian Indikator Urusan Pengawasan Tahun 2023 telah disesuaikan dengan indikator pada Renstra Perubahan 2016-2021 Inspektorat yaitu Kapabilitas APIP target level 2, pada Tahun 2023 ada penilaian yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sehingga level Kapabilitas APIP masih sama yaitu Level 2 tapi secara nilai mengalami kenaikan yaitu sebesar 2,71%.

3. Meningkatnya level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
Level Maturitas SPIP Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2023 masih berada pada level 2 dengan nilai 2,81%.
4. Peningkatan pendampingan Perangkat Daerah masih sama seperti tahun sebelumnya 10 Perangkat Daerah Tahun selanjutnya akan dilakukan seluruh Perangkat Daerah untuk pemetaan resiko.

2.1.3.4.7 Fungsi Lainnya

2.1.3.4.7.1 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan

- Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretaris Daerah mempunyai fungsi dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada kepala Daerah.

Tabel 2. 176 Capaian Sasaran Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Nilai LPPD	N/A	Sedang (3,00)	Sedang (3,1724)	ST	ST	ST
2	Persentase Kebijakan dan Pembinaan Keagamaan yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Indeks Kualitas Kebijakan Baik	N/A	N/A	Kurang: 42,08	Baik	Baik	Baik
4	Indeks Reformasi Hukum Baik	Istimewa (AA)	Istimewa (AA)	Istimewa (AA) : 97,57	Baik	Istimewa (AA)	Istimewa (AA)
5	Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	9 Variabel Kematangan UKPBJ	8/9 (88.89%)	8/9 (88.89%)	8/9 (88.89%)	9/9	9/9	9/9
7	Persentase kebijakan pelayanan pimpinan dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	aparatur yg lebih efektif						
8	Persentase kebijakan organisasi dan kelembagaan yang efektif	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur, Tahun 2023

Tabel 2. 177 Target dan Capaian Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Nilai LPPD	Tinggi (T)	Sedang (3,1724)	93,03
2	Persentase Kebijakan dan Pembinaan Keagamaan yang difasilitasi	100%	100%	100%
3	Indeks Kualitas Kebijakan Baik	Baik	Kurang: 42,08	60%
4	Indeks Reformasi Hukum Baik	Baik	Istimewa (AA) : 97,57	100%
5	Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan perekonomian dan pembangunan	100%	100%	100%
6	9 Variabel Kematangan UKPBJ	9/9	8/9 (88.89%)	88.89%
7	Persentase kebijakan pelayanan pimpinan dan aparatur yg lebih efektif	100%	100%	100%
8	Persentase kebijakan organisasi dan kelembagaan yang efektif	100%	100%	100%

Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur, Tahun 2023

Penjelasan capaian indikator dan lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Nilai LPPD

Target nilai EPPD tahun 2023 dengan status kinerja (Tinggi) terealisasi dengan status kinerja (Sedang) dengan skor nilai 3,1724 atau terealisasi 93,03% dengan pendekatan nilai terendah untuk status kinerja Tinggi dengan Nilai 3,41. Nilai realisasi EPPD Tahun 2023 ini berdasarkan LPPD Tahun 2022 yang secara resmi disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 21 Desember 2023. Meskipun EPPD tetap dilaksanakan secara rutin setiap tahun sesuai amanat peraturan perundang-undangan, namun Kementerian Dalam Negeri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak mengumumkan nilai EPPD dan peringkat kinerja pemerintahan daerah secara resmi karena masa transisi dari peraturan lama ke peraturan baru yaitu menggabungkan IKK Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 dan IKK Permendagri Nomor 18 Tahun

2020 sehingga hasil evaluasi kurang dapat menggambarkan kinerja pemerintahan daerah yang sesungguhnya. Nilai EPPD yang tidak disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut meliputi EPPD Tahun 2020 berdasarkan LPPD Tahun 2019 dan EPPD Tahun 2021 berdasarkan LPPD Tahun 2020, sedangkan untuk Nilai EPPD Tahun 2022 berdasarkan LPPD Tahun 2021 Belitung Timur mendapatkan nilai 3,00 (Status Kinerja Sedang) atau terealisasi 87,97% dengan pendekatan nilai untuk status kinerja Tinggi dengan Nilai 3,41, sehingga bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 ada peningkatan nilai capaian pada tahun 2023 yakni sebesar 0,1724.

2. Persentase Kebijakan dan Pembinaan Keagamaan yang difasilitasi

Kebijakan dan Pembinaan Keagamaan yang difasilitasi berupa fasilitasi kegiatan keagamaan yang sebagian besar adalah kegiatan rutin yang teragenda secara nasional, dianggarkan dan dilaksanakan setiap tahun yang terdiri dari :

- Safari Ramadhan Kabupaten Belitung Timur,
- Peningkatan Syiar dan Kesadaran Umat Beragama
- MTQH/STQ Tingkat Kabupaten Belitung Timur
- Penunjang Pelaksanaan Haji Kabupaten Belitung Timur
- Pembinaan TPA, Fardu Kifayah, dan Marbot Masjid Kabupaten Belitung Timur

Kebijakan dan Pembinaan Keagamaan yang difasilitasi dalam bidang keagamaan selanjutnya adalah pemberian hibah kepada badan/organisasi/lembaga keagamaan, berdasarkan peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial. Pemberian hibah tersebut diberikan untuk membantu pemeliharaan dan operasional rumah ibadah dan bantuan operasional Organisasi/Lembaga yang bersifat keagamaan, mengingat masih banyaknya kondisi rumah ibadah yang kurang layak untuk menampung jamaah dalam beribadah (rusak sedang/berat), serta hibah untuk operasional badan/organisasi/lembaga keagamaan guna menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang keagamaan, yang diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Belitung Timur, Lembaga Pengembangan Tilawatil

Quran (LPTQ) Kabupaten Belitung Timur, dan Majelis Ulama Indonesi (MUI) Kabupaten Belitung Timur.

Dalam pelaksanaan indikator Persentase Kebijakan dan Pembinaan Keagamaan yang difasilitasi, terdapat sasaran lainnya sebagaimana tugas pokok dan fungsi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, yaitu melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Bidang Kesejahteraan Sosial melaksanakan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan tidak terduga berupa bantuan berobat pasien yang dirujuk keluar daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

Bidang Kesejahteraan Masyarakat melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Belitung Timur dan bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan kecintaan terhadap Kabupaten Belitung Timur dan meningkatkan kecintaan terhadap NKRI, sebagai perwujudan rasa syukur dan terima kasih atas jasa-jasa para pahlawaan atas kemerdekaan yang dapat dinikmati oleh generasi sampai dengan saat ini. Kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat lainnya adalah pemberian beasiswa permanen dan non permanen bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, yang pemberiannya didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Beasiswa Berprestasi Jenjang Pendidikan Tinggi. Beasiswa tersebut diberikan dalam rangka menciptakan SDM yang berkualitas serta membantu mahasiswa Kabupaten Belitung Timur dalam menempuh pendidikan di Universitas, dan diperuntukan bagi putra-putri daerah yang berprestasi secara akademik dan berasal dari keluarga tidak mampu serta sedang melaksanakan perkuliahan aktif di perguruan tinggi jenjang D3, S1 maupun S2.

Pada tahun 2023 capaian dari indikator Persentase Kebijakan dan Pembinaan Keagamaan yang difasilitasi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat tercapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

3. Indeks Kualitas Kebijakan

Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2023, IKK Kabupaten Belitung Timur berada pada angka 42,08 dengan keterangan *Kurang*. Terdapat beberapa catatan terkait penilaian IKK Tahun 2023 yaitu:

- a) Dalam aspek teknis pengisian tidak dilakukan sampai 100% untuk setiap kebijakan yang menjadi sampel IKK;
- b) Proses kajian dan analisis kebijakan belum dilaksanakan secara optimal dan belum didukung dengan data, informasi dan pengetahuan yang faktual yang relevan dengan kondisi di lapangan;
- c) Pelibatan stakeholder dalam proses kebijakan publik termasuk kelompok stakeholder di luar instansi dan kelompok rentan di lapangan belum dilakukan;
- d) proses dokumentasi pengelolaan kebijakan yang telah dilakukan dari proses pengelolaan wacana publik, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi dampak kebijakan belum optimal; dan
- e) kajian dan analisis kebijakan dalam seluruh proses kebijakan belum dilaksanakan secara optimal.

4. Indeks Reformasi Hukum

Telah dilakukan penilaian atas Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan menggunakan 4 (empat) variabel penilaian. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, telah disimpulkan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 terdapat peningkatan dimana hasil Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 adalah 90.85 dengan kategori AA (Istimewa) dan pada Tahun 2023 adalah 97.57 dengan kategori AA (Istimewa).

5. Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan.

Kebijakan Perekonomian yang difasilitasi berupa Pengendalian dan Distribusi Perekonomian. Kegiatan ini merupakan Kegiatan fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam rangka pengendalian Inflasi yang terjadi di Kabupaten Belitung Timur. Pengendalian inflasi sangat penting menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam mengatasi kondisi ekonomi yang tidak stabil. Pengendalian Inflasi secara umum oleh Pemerintah terbagi melalui Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal. Mengikuti perkembangan regulasi yang ada saat ini Kabupaten Belitung Timur tidak lagi melakukan perhitungan secara mandiri tetapi menggunakan data inflasi *sister city* yaitu

Tanjung Pandan dan data IPH Belitung Timur yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Pusat Statistik. Tahun 2023 ini menjadi tahun persiapan bagi Kabupaten Belitung Timur untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks karena tahun depan Kabupaten Belitung Timur menjadi kota IHK sehingga perlu perhatian khusus. Dalam Kegiatan ini pada Tahun 2023, realisasi keuangan sebesar 83,57% dan realisasi fisik sebesar 92,20% serta target tercapai dengan 4 (empat) laporan. Selain itu, Kabupaten Belitung Timur raih tiga besar dan masuk ke dalam nominasi TPID Kabupaten/Kota Berprestasi Kawasan Sumatera yang berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 304 Tahun 2023.

Fasilitasi Kebijakan perekonomian lainnya berupa Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dari Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD. Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain melalui hasil bagian dari laba BUMD dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Pada Tahun 2023, kegiatan ini realisasi keuangan sebesar 94,66% dan realisasi fisik sebesar 95,44% Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagai pemegang saham mayoritas dalam 2 BUMD yang dimilikinya yaitu Perseroda PT Pembangunan Belitung Timur dan Perumda Pelangi Timur serta 1 BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu mengevaluasi kinerja berdasarkan kepatuhan perusahaan dalam administrasi, rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran berdasarkan Peraturan yang berlaku. Kegiatan ini menghasilkan output sebanyak 4 Dokumen laporan secara Triwulanan. Untuk BLUD RSUD Muhammad Zein saat ini kinerjanya tercapai dengan baik, begitu juga dengan Perumdam Pelangi Timur yang mencatatkan laba. Kendala yang dihadapi saat ini ada pada PT. Pembangunan Belitung Timur yang tidak menyampaikan kewajiban pelaporan selama tahun 2023, namun dari sisi pembinaannya berjalan dengan semestinya.

Kebijakan perekonomian yang difasilitasi selanjutnya adalah berupa Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil. Dalam pelaksanaan kegiatan ini dibentuk Tim Perencanaan, Pengawasan dan Monitoring Ekonomi Mikro Kecil yang bertugas melakukan rencana dan pengawasan terhadap kepengurusan dan pengelolaan ekonomi mikro kecil, melakukan pembinaan terhadap pengembangan dan evaluasi terhadap ekonomi mikro kecil, membantu memberikan data dan informasi mengenai perkembangan ekonomi

mikro kecil serta laporan hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil. Persentase realisasi Tahun 2023 dalam kegiatan ini yaitu Realisasi Keuangan 91,18% dan Realisasi Fisik 100% serta output dari kegiatan ini berupa satu dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.

Kemudian, Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang difasilitasi berupa sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air tahun 2023 dengan Persentase realisasi keuangan 99,09% dan realisasi fisik 99,33%. Untuk output kegiatan ini terdapat 2 Laporan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air. Kendala yang dihadapi saat ini adalah masih adanya warung yang menjual gas LPG 3Kg hal ini juga akan berpengaruh terhadap angka inflasi belitung Timur karena untuk subjek Bahan Bakar Rumah Tangga Perhitungan yang diambil oleh BPS juga menggunakan harga yang ada di warung. Namun dari sisi pembinaan kami telah menjalankan dengan semestinya dan terus melakukan edukasi kepada masyarakat maupun pangkalan.

Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang difasilitasi selanjutnya berupa sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dengan realisasi keuangan 90,40% dan realisasi fisik sebesar 90,81%. Hasil dari kegiatan ini berupa 2 Laporan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2023 kami melakukan uji petik Penerima Manfaat Restribusi Pertanahan, kendala yang kami lihat adalah terkait belum termanfaatkannya tanah yang telah di restribusi oleh pemerintah, untuk itu pada tahun depan diperlukan pendampingan dan pemberian pelatihan baik pertanian maupun perikanan kepada penerima manfaat Restribusi Pertanahan agar lahannya menjadi produktif.

Selanjutnya, Kebijakan Pembangunan yang difasilitasi berupa Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan merupakan kegiatan pengawasan dan evaluasi penyerapan anggaran Kabupaten Belitung Timur. Target penyerapan anggaran Kabupaten sebesar 100% dan yang tercapai hanya 88,16% sehingga itu masih dibawah target dan menjadi catatan penting bagi Tim TEPRA kedepannya untuk dapat meningkatkan capaian realisasi keuangan Kabupaten Belitung Timur. Namun dari sisi outputnya sudah tercapai yaitu 2 Laporan Pengendalian Evaluasi Program dan Pengelolaan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan. Persentase realisasi keuangan dan fisik dari kegiatan ini sebesar 86,50% dan 96,90%.

Kebijakan Pembangunan yang difasilitasi selanjutnya berupa Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini melaksanakan monitoring pembangunan di Kabupaten Belitung Timur melalui aplikasi SIMPOR. SIMPOR ini sudah berjalan dengan baik akan tetapi pada semester 1 tahun 2023 masih terdapat 3 desa yang belum ikut berpartisipasi yaitu Desa Lenggang, Desa Lilangan dan Desa Senyubuk dan pada semester 2 terdapat 1 desa yang belum berpartisipasi yaitu Desa Lenggang dalam pelaporan monitoring dan ini menjadi catatan penting di Tahun 2024 agar semua desa ikut aktif dalam berpartisipasi dalam melaporkan hasil *progress*/perkembangan pembangunan di desa masing-masing. Namun secara persentase realisasi kegiatan ini sudah berjalan baik dengan realisasi keuangan dan realisasi fisik sebesar 94,87% dan 94,83%.

6. Sembilan Variabel Kematangan UKPBJ

Kematangan UKPBJ adalah instrumen pengukuran dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan menjadi acuan bagi UKPBJ dalam upaya meningkatkan kemampuan UKPBJ menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Model kematangan UKPBJ digunakan untuk mengukur kapabilitas UKPBJ digambarkan melalui 5 (lima) tingkatan kematangan yaitu:

1. Inisiasi,
2. Esensi,
3. Proaktif,
4. strategis dan
5. unggul.

Target UKPBJ Belitung Timur sampai dengan Tahun 2026 yaitu mencapai tingkat kematangan level proaktif. Dalam pencapaian target tersebut terdapat 9 (Sembilan) variabel kematangan UKPBJ yang harus terpenuhi yaitu :

1. Variabel Manajemen Pengadaan,
2. Variabel Manajemen Penyedia,
3. Variabel Manajemen Kinerja,
4. Variabel Manajemen Resiko,
5. Variabel Pengorganisasian,
6. Variabel Tugas dan Fungsi,
7. Variabel Perencanaan SDM Pengadaan,
8. Pengembangan SDM Pengadaan,
9. Variabel Sistem Informasi.

Sampai dengan Tahun 2023, tercapai pemenuhan 8 variabel dari target 9 variabel (8/9) sehingga capaian kinerja sebesar 88,89%. Capaian kinerja tersebut tidak mengalami kenaikan dari capaian kinerja tahun sebelumnya. Adapun variabel yang belum tercapai yaitu variabel Manajemen Kinerja, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya bukti dukung yang belum bisa terpenuhi.

7. Persentase kebijakan pelayanan pimpinan dan aparatur yg lebih efektif
Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dilakukan melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat. Dimana pada Tahun 2022 yang merupakan survei tahun kedua berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur 2021-2026 didapat hasil 81,78 dengan mutu layanan Baik. Pada Tahun 2023 kembali dilakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat kepada 110 responden dengan hasil 83,28 dengan mutu layanan bernilai baik. Terdapat peningkatan sebesar 1,5% dari tahun 2022.
8. Persentase kebijakan organisasi dan kelembagaan yang efektif
Ketercapaian kinerja yang mendukung indikator sasaran Persentase kebijakan Organisasi dan Kelembagaan yang Efektif untuk tahun 2023 rata-rata mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022.

Tabel 2. 178 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 20223

Indikator		Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022(%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)			
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai	BB (71)	67,29	94,77	BB (71)	67,58	95,18	95,18	BB (72)	93
2	Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks	3,35	3,36	100	3,50	3,65	104,28	104	3,95	92,40
3	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan	72	78,73	109,4	74	94,35	127,5	127,5	80	117,93
4	Indeks Kelembagaan	Persen	74	100	135,14	76	100	131,57	131,57	80	80

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2023

1) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2023 menunjukkan nilai 67,58 dengan predikat “B” mengalami peningkatan sebesar 0,29 dari perolehan nilai tahun 2022.

Implementasi akuntabilitas kinerja Pemerintah kabupaten Belitung Timur sudah menunjukkan kinerja yang *Baik* namun masih perlu perbaikan dan meningkatkan komitmen dalam manajemen kinerja. Beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka mendukung tercapainya kinerja yang baik diantaranya:

a. Perencanaan Kinerja:

- Masih terdapat rumusan sasaran kinerja secara berjenjang yang belum sesuai dengan permenpan 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja .
- Masih terdapat ketidakselarasan kinerja ditingkat eselon III dengan eselon II selaku atasannya.
- Penjenjangan Kinerja belum sepenuhnya terlihat proses kinerja antar level jabatan secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja daerah.

b. Pengukuran Kinerja:

- Masih terdapat penentuan terget kinerja yang belum dapat terukur
- Pemantauan dan evaluasi capaian kinerja belum efektif.
- Pemantauan dan pengukuran capaian kinerja belum dilakukan secara berjenjang.
- Rencana aksi yang disusun belum memuat pengukuran target breakdown triwulan, seperti pada Satuan Polisi Pamong Praja.

c. Pelaporan Kinerja:

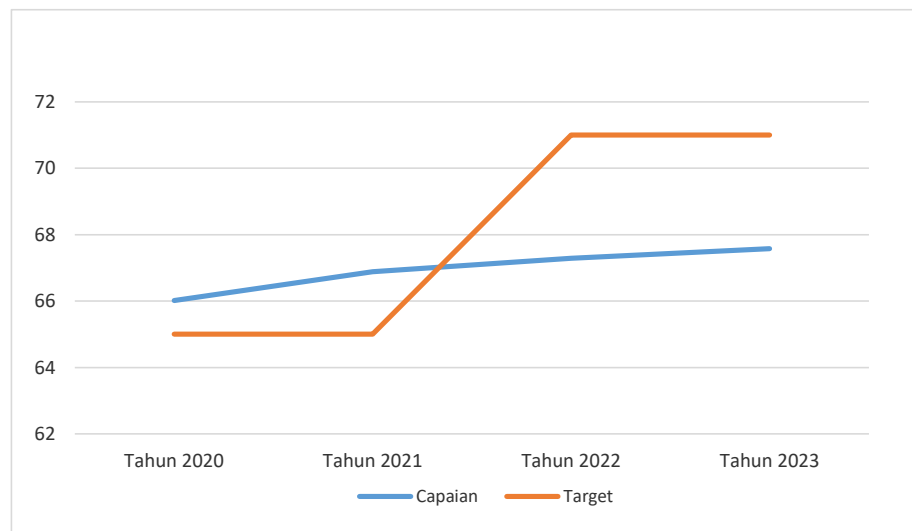
- Masih terdapat Laporan Kinerja pada Perangkat daerah yang belum menjawab Perjanjian Kinerja.
- Belum memperbaiki perencanaan kinerja tahun berikutnya dengan memanfaatkan informasi pada laporan kinerja yang sudah disampaikan dengan memperhatikan target kinerja yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:

- Laporan hasil evaluasi perangkat daerah belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang cukup dan menyasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP terutama pada Sub komponen kualitas pemanfaatan.

- Inspektorat belum melakukan pemantauan atas tindaklanjut hasil evaluasi internal pada perangkat daerah.
- Belum sepenuhnya mendorong peningkatan implementasi SAKIP dengan menerapkan kebijakan reward dan punishment.

Grafik perbandingan perolehan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kabupaten Belitung Timur dari tahun 2020-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2. 20 Target dan Realisasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur, tahun 2023

2) Indeks Pelayanan Publik

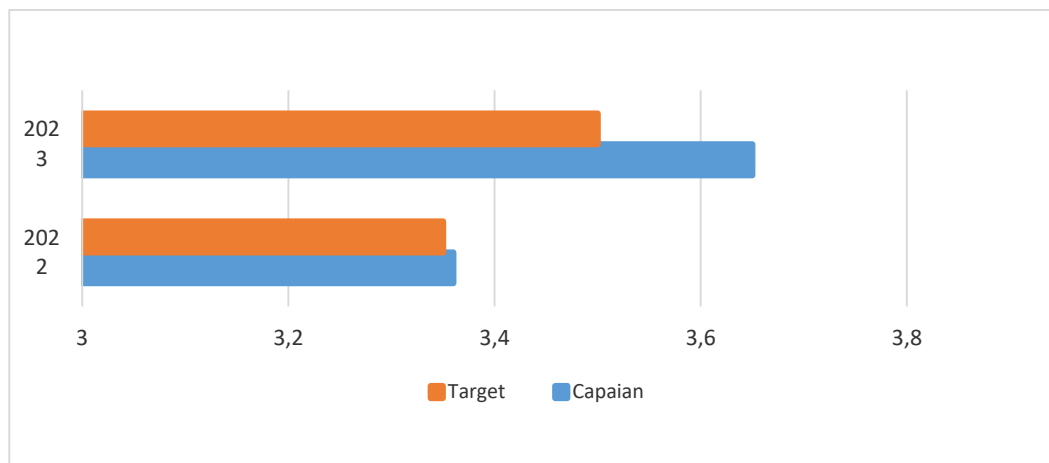
Indeks Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Locus Evaluasi meliputi :

- Layanan Administrasi : Kecamatan Manggar,
- Layanan Barang : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan
- Layanan Jasa : RSUD Muhammad Zein Belitung Timur.

Hasil PEKPPP Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 sebesar **3,65** berkategori

B:

Grafik perbandingan perolehan capaian indeks pelayanan publik Kabupaten Belitung Timur dari tahun 2022-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2. 21 Target dan Realisasi Capaian Indeks Pelayanan Publik

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur, tahun 2023

3) Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Realisasi Indeks Kualitas Pelayanan Publik pada Tahun 2023 yaitu 94,35 dengan Kategori A dan Opini Kualitas Tertinggi. Terjadi peningkatan capaian 16 point dari tahun sebelumnya dengan poin 78,73.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan kualitas Sangat Baik dengan capaian kinerja 127,5 persen pada tahun 2023. Selama tiga tahun terakhir, nilai Indeks Kualitas Pelayanan Publik mulai merangkak naik. Hal ini merupakan hasil kerja sama antar perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.



Grafik 2. 22 Perbandingan Capaian Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021-2023

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur, tahun 2023

Adapun yang menjadi locus penilaiannya telah ditentukan, yaitu:

1. Dinas yang menangani urusan Kesehatan beserta 2 (dua) UPT Puskesmas
2. Dinas yang menangani Urusan Pendidikan

3. Dinas yang menangani Urusan Sosial
 4. Dinas yang menangani Urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 5. Dinas yang menangani Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 4) Indeks Kelembagaan

Penilaian Indeks Kelembagaan dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali, sedangkan realisasi Indeks Kelembagaan pada Tahun 2022 yaitu 100%. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah melaksanakan :

- Evaluasi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah;
- Penyederhanaan birokrasi/kelembagaan perangkat daerah telah dilaksanakan pada tahun 2023 dengan tersedianya 12 dokumen produk hukum terkait dengan penataan kelembagaan Perangkat Daerah dan Informasi Jabatan
- Pembentukan organisasi yang tepat fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tumpang tindih fungsi pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

- Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan fungsi penunjang sebagai pelaksana kebijakan di bidang pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah pada misi ke-1 yaitu membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Tabel 2. 179 Capaian Sasaran Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Sasaran	Capaian			Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase jumlah regulasi daerah melalui persetujuan Raperda (persen)	52	71,43	91,66	60	60	60

2	Indeks Kepuasan DPRD terhadap dukungan dan pelayanan Sekretariat DPRD (skor)	-	85,93	88,61	80	80	80

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur, tahun 2023

Tabel 2. 180 Target dan Capaian Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase jumlah regulasi daerah melalui persetujuan Raperda (persen)	60	91,66	152,77
2	Indeks Kepuasan DPRD terhadap dukungan dan pelayanan Sekretariat DPRD (skor)	80	88,61	110,76

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur, tahun 2023

Penjelasan terhadap capaian indikator disampaikan sebagai berikut :

1. Persentase Jumlah Regulasi Daerah Melalui Persetujuan Raperda

Pada indikator ke-3 ini cara pengukurannya adalah dengan membandingkan jumlah Raperda yang disahkan dengan jumlah Raperda yang dibahas oleh DPRD lalu dikalikan 100 persen. Dari 18 Raperda yang diusulkan pada Promperda Kabupaten Belitung Timur, DPRD Kabupaten Belitung Timur sudah membahas sebanyak 12 Raperda dan mengesahkan 11 Raperda sehingga didapat realisasi sebesar 91,66 persen.

2. Indeks Kepuasan DPRD terhadap dukungan dan pelayanan Sekretariat DPRD

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan survey kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur. Beberapa variabel pengukurnya adalah sebagai berikut :

- Dukungan sumber daya manusia
- Pelayanan Alat Kelengkapan DPRD
- Penyediaan saran dan prasarana
- Pelayanan pemeriksaan kesehatan
- Pelayanan kehumasan dan keprotokolan
- Pelayanan persidangan dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan
- Pelayanan keuangan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

Pada tahun 2023 diperoleh skor 88,61 atau meningkat sebanyak 2,68 persen dibandingkan capaian di tahun 2022 yang sebesar 85,93 persen. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan kualitas pelayananan Sekretariat DPRD terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD.

2.1.3.4.7.2 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. Terdapat perubahan mendasar dari pedoman tersebut yaitu tentang penilaian Reformasi Birokrasi ditetapkan menjadi 2 (dua) penilaian yaitu penilaian Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General dan Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik. RB General adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso sedangkan RB Tematik adalah upaya percepatan pencapaian dampak berbagai agenda prioritas pembangunan nasional dengan mengurai dan menjawab untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) berbagai permasalahan hilir tata kelola yang terkait tema yang sudah ditetapkan oleh tingkat makro. Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi antara lain:

a. Komponen RB General:

- 1) Penyederhanaan Birokrasi
- 2) Pelaksanaan Bekerja Sistem Kerja Baru dan fleksibilitas Bekerja Pegawai ASN
- 3) Pelaksanaan Arsitektur SPBE
- 4) Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 5) Pembangunan Zona Integritas di Unit
- 6) Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- 7) Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
- 8) Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi
- 9) Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik
- 10) Pelaksanaan Pembentukan Peraturan

- 11) Pelaksanaan Arsip Digital
- 12) Pelaksanaan Data Statistik Sektoral
- 13) Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa
- 14) Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
- 15) Penataan Jabatan Fungsional
- 16) Penguatan Manajemen Talenta ASN
- 17) Penguatan Sistem Merit
- 18) Pelaksanaan Core Values ASN
- 19) Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima
- 20) Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital

b. Komponen RB Tematik:

- 1) Penanggulangan Kemiskinan
- 2) Peningkatan Investasi
- 3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Stunting
- 4) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di tahun 2023 adalah 76,44 dengan kategori "BB". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 181 Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
A.	RB General	100	64,20
B.	RB Tematik	20	12,24
C.	Indeks RB	120	76,44
			BB

Hasil evaluasi tahun 2023 “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian signifikan. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tetap perlu meningkatkan

upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi agar mencapai target selanjutnya yaitu indeks RB (>80-90) atau predikat A.

Terdapat hasil lembar kerja evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector* pada tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 182 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	1,13	1,13	1. Terdapat target nasional atas indikator Kegiatan Utama Mandatory yang belum ditetapkan sebagai target instansi Pemerintah; 2. Terdapat target Kegiatan Utama yang belum didasarkan pada baseline tahun sebelumnya dan target nasional (Kepmenpanrb nomor 739 Tahun 2023); 3. Belum terdapat keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; 4. Rencana Aksi belum sepenuhnya relevan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama; 5. Masih terdapat Indikator Output atas Rencana Aksi yang belum cukup menggambarkan Sasaran; 6. Penetapan target atas Output Rencana Aksi belum sepenuhnya didasarkan pada kondisi capaian tahun-tahun sebelumnya; 7. Rencana aksi yang disusun belum berupa intervensi	1. Menetapkan target atas Kegiatan Utama berdasarkan pada baseline tahun sebelumnya dan target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 739 Tahun 2023); 2. Menetapkan indikator Kegiatan Utama Mandatory sesuai dengan target nasional; 3. Menetapkan keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; 4. Memastikan Rencana Aksi relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama; 5. Memastikan seluruh indikator Output atas Rencana Aksi cukup menggambarkan Sasaran; 6. Memastikan target Output atas Rencana Aksi mempertimbangkan baseline tahun sebelumnya; 7. Memastikan Rencana aksi yang disusun merupakan intervensi	Tim Penilai Nasional

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
							terhadap prioritas permasalahan utama; 8. Rencana Aksi belum sepenuhnya didukung dengan anggaran yang memadai.	terhadap prioritas permasalahan utama; 8. Melakukan reviu agar Rencana Aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektifitas serta efisiensi.	
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	77,44	2,04			Tim Penilai Nasional
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	99,49	1,99	Baik	Agar Perkada tentang SOTK mempedomani model penyederhanaan struktur organisasi untuk penyederhanaan birokrasi yang telah ditetapkan oleh MenpanRB sesuai surat MenpanRB Nomor B/467/KT.01/2021 tanggal 27 Mei 2021 Hal Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Tindaklanjuti mekanisme penyederhanaan struktur organisasi saat ini agar berkoordinasi dengan KemenpanRB.	Kementrian Dalam Negri

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	3	1,2		Segera diterapkan squad team	Kementrian PANRB – Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	2,82	2,26	1. Sasaran tidak berorientasi hasil 2. Indikator tidak cukup untuk menggambarkan sasaran 3. Target tidak memperhatikan capaian tahun lalu 4. Pengendalian yang ada belum efektif 5. Struktur MR belum ada/ memadai 6. Pengendalian korupsi belum didukung sumber daya yang memadai * AOI APIP: *1. SDM APIP masin belum memenuhi kebutuhan ideal (formasi kebutuhan) 2. Alokasi anggaran pengawasan belum memenuhi ketentuan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 3. APIP belum melakukan evaluasi atas implementasi MR hingga efektivitas RTP 4. Pengawasan yang dilakukan belum menasar pada program strategis daerah dan belum dilaksanakan secara lintas sektoral 5. Perencanaan pengawasan belum	"1. Menyesuaikan sasaran program dan sasaran kegiatan agar berorientasi pada outcome. 2. Merumuskan sasaran program dan mncantumkan pada dokumen perencanaan 3. Merumuskan sasaran kegiatan dan mncantumkan pada dokumen perencanaan 4. Menyesuaikan indikator kinerja program 5. Metode pengukuran/ formulasi atas indikator kinerja tidak dicantumkan pada dokumen perencanaan OPD. 6. Menyesuaikan target atas indikator kinerja pada dokumen perencanaan Tahun 2024 dengan memperhatikan capaian Tahun 2023 7. Menyesuaikan target atas indikator kinerja pada dokumen perencanaan Tahun 2024 dengan rumusan persentase target diatas	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
							sepenuhnya menggunakan hasil penilaian risiko dari manajemen 6.Rekomendasi atas hasil layanan jasa konsultasi APIP belum menghasilkan rencana aksi dan perbaikan berkelanjutan bagi stakeholders. 7.Penyusunan PPBR belum mengarah pada pemanfaatan nilai kematangan risiko dan evaluasi atas register risiko B Keglatan pengawasan (Audit ketaatan, Audit Kinerja, dan Jasa Konsultansi) yang telah dilaksanakan APIP, belum memanfaatkan profil risiko perangkat daerah/pemerintah daerah dalam menyusun secara optimal, sehingga belum mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat memberikan nilai tambah atas efektivitas pengelolaan risiko dan tata kelola pemerintahan daerah	0% dan satuan target spesifik menggambarkan target yang akan diukur" REKOMEN AOI APIP: "1. Menguatkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui pemberian akses informasi dalam pengawasan intern, pemenuhan kebutuhan SoM, penyediaan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi), penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan operasional pengawasan intern 2. Menguatkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui pemberian akses informasi dalam pengawasan intern, pemenuhan kebutuhan SDM, penyediaan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi), penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan operasional pengawasan Intern 3. APIP agar menyusun dan menetapkan area pengawasan yang menfasar pada sasaran strategis/program prioritas daerah yang bersifat lintas sektoral serta berbasis	

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
								prioritas dan risiko. 4. Menginstruksikan kepada Inspektur Daerah untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui workshop/ birtex/ di klat di bidang pengelolaan risiko, audii Rinena, dan keinvestigasian untuk mendukung kegiatan pengawasan, dan merealisasikan sertifikasi profesi antara lain CRMP ORMO, OFIA, dsb. 5. Mendorong seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengelola kematangan risiko (risiko strategis risiko operasional risiko fraud. dan risiko yang bersifat lintas sektoral/ kemuroan, untuk aelaryuinya dimeniaatkan clen APIR Daerah dalam penyusunan PPBR dan 6. Menginstruksikan kepada Inspektur Daerah untuk melakukan penilaiankematangan risiko atas register risiko/ profil risiko yang disusun oleh seluruh manajemen perangkat daerah di lingkungan pemerintan daerah (risiko strategis, risiko operasional, risiko fraud, dan risiko yang beralfat lintas	

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
								sektoral/kemitraan). 7. APIP agar dapat menyusun rencana aksi atas substansi kegiatan konsultasi yang telah dilaksanakan disertai dengan monitoring terhadap implementasi rencana aksi tersebut dan pemanfaatannya oleh stakeholder terkait 8. APIP agar melakukan optimalisasi pemantauan secara berkala terhadap implementasi QAIP sebagaimana telah diatur dalam pedoman AAPI maupun pedoman QAIP lainnya yang telah diterbitkan oleh BPKP 9. Mendorong komitmen seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerniah Daerah mengoptimalkan pengelolaan manajemen risiko, untuk selanjutnya dimanfastkan oleh APIP Daerah dalam penyusunan PPBR; 10 Menginstruksikan kepada Inspektur Daerah untuk menyusun dan menetapkan area pengawasan berbasis prioritas dan risiko sesuai dengan regulasi/pedoman yang berlaku, yang selanjutnya dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan. 11.Menginstruksikan	

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
								kepada Inspektur Daerah untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui workshop/ bimtek/diklat di bidang pengelolaan risiko, audit kinerja, dan keinvestigasian untuk mendukung kegiatan pengawasan, dan merealisasikan sertifikasi profesi antara lain CRMP, CRMO, CFA, dsb."	
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,5	0,5	0,5	Tingkat keberhasilan Pembangunan ZI sebesar 0% (Cukup) dengan rincian sebagai berikut : Tahun 2021 Jumlah unit kerja yang diusulkan : 0 unit kerja Jumlah unit kerja yang menerima predikat ZI menuju WBK/WBBM : 0 unit kerja Tahun 2022 Jumlah unit kerja yang diusulkan : 1 unit kerja Jumlah unit kerja yang menerima predikat ZI menuju WBK/WBBM : 0 unit kerja Tahun 2023 Jumlah unit kerja yang diusulkan: 0 unit kerja Jumlah unit kerja yang menerima predikat ZI menuju WBK/WBBM: 0 unit kerja Informasi lebih rinci terkait Tahun 2023 Jumlah unit kerja yang diusulkan : 0 unit kerja Jumlah unit kerja yang menerima predikat ZI menuju WBK/WBBM: 0	Kabupaten Belitong Timur agar membangun mengusulkan unit kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM kepada TPN.	Kementrian PAN RB c.q Deputi RB Kunwas

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
							unit kerja Informasi lebih rinci terkait catatan setiap unit kerja dapat dilihat pada LHE ZI Instansi Pemerintahan.		
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	67,58	2,7	1. Masih terdapat ketidakselarasan kinerja antara Kepala Dinas dengan Kepala Bidang, seperti pada kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang indikatornya persentase penanganan jalan kabupaten, namun kinerja Kepala Bidang Bina Marga lebih berorientasi hasil, yaitu proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik; 2. Kabupaten Belitung Timur telah membangun sistem aplikasi E-kinerja untuk pemantauan atas capaian kinerja unit dan SILAGAK yaitu sistem penilaian penghasilan TPP pegawai, namun aplikasi tersebut belum diintegrasikan secara efektif untuk pemantauan dan evaluasi capaian kinerja Bupati, seluruh perangkat daerah hingga individu pegawai; 3. Masih terdapat laporan perangkat daerah yang tidak menjawab perjanjian kinerja kepala dinas serta belum cukup menyampaikan informasi yang memadai, diantaranya tentang perbandingan	1. Menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada perangkat daerah yang belum berorientasi hasil dan indikator kinerja yang belum SMART, terutama pada kepala dinas dan kepala bidang; 2. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi sebagai alat untuk pemantauan pencapaian kinerja Bupati dan perangkat daerah, serta mengaitkan kinerja organisasi dengan kinerja individu; 3 Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada perangkat daerah mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yang memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis	Kementrian PAN RB c.q Deputi RB Kunwas

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
							realisasi kinerja dengan jangka menengah, realisasi kinerja dengan Tahun-tahun sebelumnya, analisis keberhasilan dan kegagalan, seperti pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 4. Laporan hasil evaluasi perangkat daerah belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang cukup can menysasar secara langsung akar permasalahan yang dialami olen perangkat daerah dalam mengimplementasikan SAKIP, terutama pada sub komponen kualitas dan pemanfaatan; 5. Informast hasil evaluasi lebin rinci dapat dilihat pada LHE SAKIP 2023 Instansi Pemerintah	efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja; 4. Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas;implementasikan SAKIP di setiap perangkat daerah; 5. Informasi hasil evaluasi lebih rinci dapat dilihat pada LHE SAKIP 2023 Instansi Pemerintah.	
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,5	1	0,5	Sudah menyusun Arsitektur SPBE as-is dalam SIA	Perlu menyusun Arsitektur SPBE to-be dalam SIA	Kementrian PAN RB c.q Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	88,86	2,22	Penjelasan terkait hasil tingkat digitalisasi arsip dapat dikonfirmasi ke Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi		Arsip Nasional Republik Indonesia
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2,5	3	1,5	Belum Menyampaikan Renaksi	Perlu Menyusun Renaksi dan Melaksanakan Sosialisasi	Kementrian PAN RB c.q Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Kualitas Kebijakan	2,5	42,08	1,05	kebijakan terdapat kejelasan unit kerja/kelompok kerja/tim yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan dan sesuai dengan kebutuhan dan lengkapnya bukti dukung yang diberikan, namun masih ada beberapa data yang tingkat relevansinya masih kurang	Untuk bukti dukung dapat disesuaikan relevansinya dengan pertanyaan dan jawaban yang diberikan	Lembaga Administrasi Negara
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Reformasi Hukum	2,5	97,57	2,44	Pelaksanaan Reformasi Hukum Prima	Pelaksanaan Reformasi Hukum dipertahankan	Kementrian Hukum dan HAM
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,5	1,76	0,88	- Penyelenggaraan statistik Sektoral di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur masih berada pada predikat Kurang. - Pemerintah Kabupaten	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur perlu melakukan sosialisasi dan literasi data statistik kepada pengguna untuk	Badan Pusat Statistik

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
							Belitung Timur telah melakukan seluruh aspek pada domain Proses Bisnis Statistik, namun belum memiliki prosedur baku yang berlaku untuk seluruh produsen data. - Sosialisasi dan Literasi Data Statistik belum dilakukan oleh seluruh produsen data.	memperluas pemanfaatan data statistik yang dihasilkan.	
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	78,88	1,97	Baik	Selamat atas prestasi yang diraih. Tingkatkan pencapaian khususnya untuk keterisian Formasi Jabfung Pengelola PBJ	Lembaga Kebijakan Penadaan Barang/Jasa Pemerintah
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Sistem Merit	4	252	2,46		1) Menyusun dan menetapkan Standar Kompetensi Jabatan untuk tiap level jabatan yang telah diberi persetujuan oleh Kemenpan RB; 2) Menyusun profil pegawai berdasarkan pemetaan kompetensi untuk keseluruhan pegawai di Sistem Informasi; 3) Menyusun talent pool dan rencana suksesi untuk tiap level jabatan; 4) Menyusun strategi pengembangan kompetensi pegawai secara jangka panjang (5 tahun) berdasarkan data kesenjangan kompetensi pegawai; 5) Melaksanakan pengisian Jabatan	Komisi Aparatur Sipil Negara

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
								Administrator dan Jabatan Pengawas dengan mempertimbangkan hasil assessment; 6) Menyusun analisis permasalahan kinerja pegawai dan strategi mengatasinya secara spesifik.	
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Pelayanan Publik	1,5	3,65	1,09			Kementrian PAN RB c.q Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik
17	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	94,35	1,42			Ombudsman Republik Indonesia
18	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	3.56	6,41		Rekomendasi dapat dilihat pada Laporan Hasil Evaluasi yang dapat diakses melalui aplikasi tauval.spbe.go.id	Kementrian PAN RB c.q Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
									Berbasis Elektronik
19	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	2	100	2			Tim Penilai Nasional
20	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Non Makro	8	53,85	2,91			Tim Penilai Nasional
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Opini BPK	5	5	5			Badan Pemeriksa Keuangan
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	90,2	3,61			Badan Pemeriksa Keuangan
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Indeks BerAkhlak	4	60,4	2,42			Kementrian PAN RB c.q Deputi SDMA
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Survei Penilaian Integritas	10	74,83	7,48	Waspada	recom_1: Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, hingga tidak ada lagi perintah atasan yang tidak sesuai aturan, dan pegawai yang bertindak tidak sesuai aturan.; recom 2: Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye kepada seluruh pemangku kepentingan, terkait	Komisi Pemberantasan Korupsi

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
								upaya pencegahan yang telah dilakukan (jika sudah ada), khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut: (1) Kebijakan, regulasi, dan mekanisme pelaporan/ pengelolaan gratifikasi deinstansi (2) Penegakan sanksi/ hukuman penerimaan suap/gratifikasi (3) Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai Pimpinan untuk menciptakan perilaku yang menghindari penyuapan suap/gratifikasi (4) Mekanisme pengaduan tindakan suap/gratifikasi dan tindak lanjutnya, serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal.; recom_3 Intensifikasi, sosialisasi, serta kampanye penegakan aturan mengenai pengelolaan benturan kepentingan serta penyalahgunaan perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.; recom.4: Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan	

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
								barang dan jasa yang sudah dilakukan dan memastikan hal-hal berikut: (1) Implementasi proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Internalisasi terkait dengan peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Penguatan mekanisme probity audit berkala untuk mendeleksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa: (4) Mengintensifkan penggunaan vendor management system. (5) Pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan. (6) Penyesuaian proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disahkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.; recom_5: Intensifikasi, sosialisasi dan kampanye aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh	

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
								tingkat jabatan di instansi.; recom_6: Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, untuk meminimalkan hingga tidak memberikan toleransi bagi pengaruh pihak eksternal dalam menentukan program/kegiatan.; recom_7 : Mempertahankan upaya internalisasi kesadaran dan perilaku untuk melaporkan LHKPN, meskipun sebagian besar responden menganggap tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tinggi.: recom_8: Mempertahankan penyediaan informasi tentang pelaksanaan tugas yang memadai, meskipun sebagian besar responden menganggap penyediaan informasi sudah baik; recom.9 : Perbaiki mendasar terhadap upaya peningkatan prosedur layanan yang sudah dilakukan dengan memastikan berbagai hal berikut: (1) Proses bisnis yang sederhana dan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. (2) Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengambilan	

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
								keputusan terkait dengan layanan yang diberikan. (3) Evaluasi dan memptret sudut pandang pengguna layanan terkait dengan prosedur dan kejelasan layanan.	
25	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Survey Kepuasan Masyarakat	8	87,73	7,02		Mendorong pelaksanaan SKM pada UPP yang belum melaksanakan	Kementrian PAN RB c.q Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat
26	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	0,4	0,22	0,22	1. Belum terdapat keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; 2. Sasaran yang ditetapkan belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang ada; 3. Rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah; 4. Terdapat indikator Sasaran yang belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup; 5. Rencana aksi yang disusun belum menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan (mash cenderung business as usual)	1. Menetapkan keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; 2. Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait; 3. Rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Teratik Instansi Pernerintah; 4. Merastikan seluruh Indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup; 5. Memastikan Rencana aksi menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan dan bukan business as usual.	Tim Penilai Nasional

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
27	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Rencana Aksi)	0,4	0,13	0,13	1. Belum terdapat keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, 2. Sasaran yang ditetapkan belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang ada; 3 Rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik	1. Menetapkan keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; 2. Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait, 3. Rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah; 4. Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup, 5. Memastikan Rencana aksi menunjukkan adanya perbaikan/inovasi	Tim Penilai Nasional
28	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi)	0,4	0,13	0,13	1. Belum terdapat keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; 2 Sasaran yang ditetapkan belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang ada; 3 Rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah; 4.Terdapat indikator Sasaran yang belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup, 5 Rencana aksi yang disusun belum menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab	1. Menetapkan keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; 2. Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait; 3. Rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah; 4. Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup; 5. Memastikan Rencana aksi menunjukkan adanya	Tim Penilai Nasional

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
							permasalahan (masih cenderung business as usual); 6. Rencana aksi tematik yang disusun belum berfokus pada prioritas permasalahan utama/kritis. Intervensi berupa Rencana Aksi belum memuat Unsur digitalisasi pada ternalik (digitalsasi adminstrasi pemerntahan pada penanganan stunting.	perbaikan/inovasi untuk menjawab permasalahan dan bukan business as usual; 6.Memastikan Rencana aksi tematik juga berfokus pada prioritas permasalahan utama/kritis.	
29	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)	0,4	0,4	0,4	Rencana Aksi RB Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri telah menjawab permasalahan yang ada.	Terus meningkatkan penerapan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada pelaksanaan kegiatan di pemerintahan	Tim Penilai Nasional
30	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Rencana Aksi)	0,4	0,28	0,28	1. Belum terdapat keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; 2. Sasaran yang ditetapkan belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang ada; 3.Rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah; 4. Terdapat indikator Sasaran yang belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup; 5.Rencana aksi yang disusun belum menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk menjawab	1. Menetapkan keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; 2. Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait; 3. Rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah; 4. Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup; 5. Memastikan Rencana aksi menunjukkan adanya perbaikan/inovasi untuk	Tim Penilai Nasional

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
							permasalahan (masih cenderung business as usual).	menjawab permasalahan dan bukan business as usual;	
31	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	0,6	54,61	0,18			Tim Penilai Nasional
32	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Output)	0,6					Tim Penilai Nasional
33	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)	0,6	41,45	0,08			Tim Penilai Nasional
34	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	0,6	100	0,2			Tim Penilai Nasional
35	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Output)	0,6	0	0			Tim Penilai Nasional
36	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan(Capaian Dampak)	3	1,5	1,5			Tim Penilai Nasional

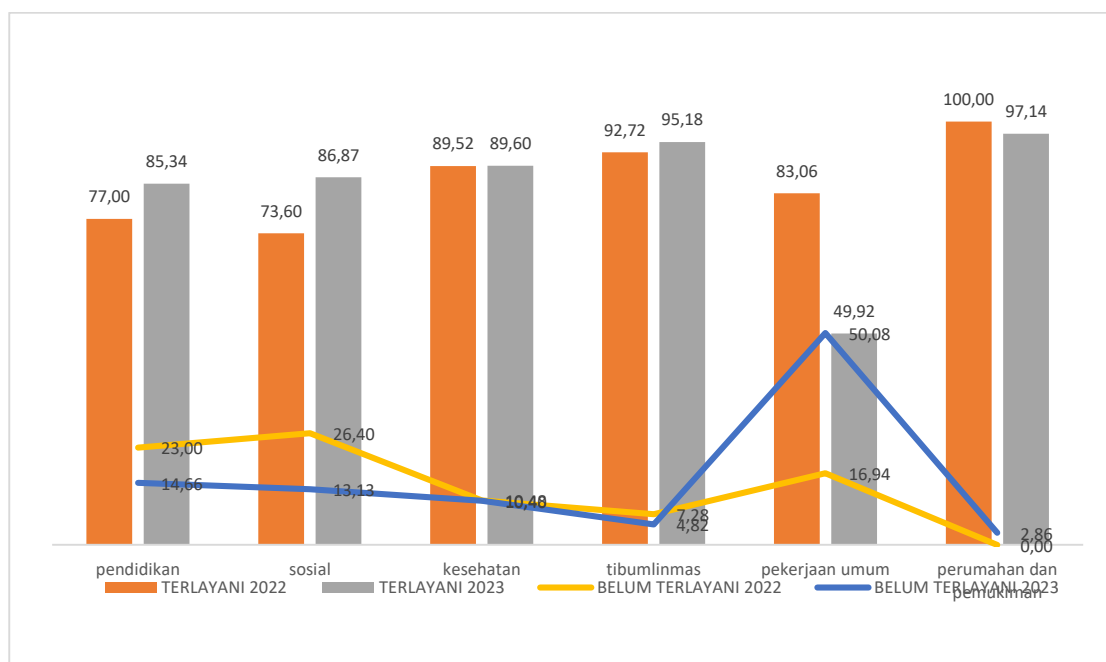
No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
37	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1,5	1,5			Tim Penilai Nasional
38	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	2,25	2,25			Tim Penilai Nasional
39	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2,91	2,91			Tim Penilai Nasional
40	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	2,46	2,46			Tim Penilai Nasional

2.1.3.4.7.3 Kerjasama Daerah

2.1.3.4.8 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM adalah salah satu alat pengendali supaya pelayanan dasar menjadi prioritas oleh Pemerintah daerah. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3), pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi dasar di dalam pelaksanaan SPM, yaitu baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun implementasi SPM itu sendiri. SPM merupakan standar minimal pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Hadirnya SPM ini menjadi sebuah jaminan adanya pelayanan minimal yang berhak diperoleh masyarakat dari pemerintah. Terjamin kuantitas dan kualitas minimal dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga diharapkan akan terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan. Penerapan SPM memiliki nilai yang sangat strategis, baik bagi Pemerintah daerah maupun bagi masyarakat sebagai konsumen. Keberadaan SPM dapat dijadikan acuan kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik. Penerapan SPM yang dilakukan oleh setiap kepala daerah dan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah.

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten Belitung Timur dalam memberikan pelayanan Minimal pada Tahun 2023, disampaikan pada tabel sebagai berikut:



Grafik 2. 23 Capaian SPM Kabupaten Belitung Timur Seluruh Bidang Tahun 2023

Sumber: Web SPM Bangda, Dirjen Bangda Kemendagri, 2024

Sesuai amanat pasal 4 hingga pasal 12 pada Permendagri Nomor 59 tahun 2021, ada empat tahapan penerapan SPM yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang terdiri dari pengumpulan data; tahapan penghitungan kebutuhan; tahapan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; serta tahapan pelaksanaan pemenuhan. Pasal 14 Permendagri Nomor 59 tahun 2021 yang menyebut penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi capaian mutu pelayanan dasar dan capaian penerima pelayanan dasar. Dengan adanya indeks pencapaian ini, memberikan kategori terhadap pencapaian SPM, yaitu: Tuntas Paripurna, Tuntas Utama, Tuntas Madya, Tuntas Pratama, Tuntas Muda dan Belum Tuntas.

Secara umum di Belitung Timur untuk kategori pencapaiannya belum ada bidang yang mencapai predikat tuntas paripurna. Berikut disampaikan kategori capaian SPM per bidang, yaitu:

1. Pendidikan

Indeks pencapaian SPM urusan Pendidikan pada tahun 2023 ada pada kategori Tuntas Madya dengan total pencapaian 85,34 persen, capaian pada tahun 2023 ini mengalami kenaikan dari tahun 2022 yang sebesar 77 persen. Dengan capaian masing-masing indikator urusan ini adalah 85,34 persen untuk Pendidikan dasar usia dini, 95,08 persen Pendidikan dasar dan 77,66 persen untuk layanan Pendidikan kesetaraan. Dari 3 indikator tersebut, layanan Pendidikan kesetaraan paling rendah capaiannya dengan total yang terlayani sejumlah 203 orang dari target 267 orang yang harus dilayani. Kemudian dari aspek pemenuhan mutu minimal layanan dasar, angka partisipasi sekolah dari Pendidikan kesetaraan juga hanya pada angka 32,58 persen yang merupakan angka partisipasi terendah dari pelayanan Pendidikan lainnya seperti Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

2. Kesehatan

Indeks pencapaian SPM urusan Kesehatan pada tahun 2023 adalah tuntas madya, dengan total pencapaian 89,60 persen. Indikator layanan terendah ada pada pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosis yaitu 70,42 persen. Pada indikator ini target jumlah total yang harus dilayani adalah 3.024 orang

dan pada akhir tahun jumlah total yang terlayani adalah 1.964 orang atau hanya tercapai 65 persen.

Indikator dengan capaian tertinggi ada pada indikator pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar yaitu 97,32 persen. Pada indikator ini 99 persen target penerima layanan telah terlayani dari total target 19.684 orang.

3. Pekerjaan umum

Indeks pencapaian SPM urusan Pekerjaan umum pada tahun 2023 masuk kategori belum tuntas, dengan total pencapaian 49,92 persen. Indikator layanan terendah ada pada penyediaan pelayanan Air limbah domestik. Pada indikator ini dari jumlah total penerima layanan dasar yang harus dilayani yaitu 41.751 orang, perangkat daerah pengampu indikator ini hanya mampu melayani 1.723 orang sehingga capaiannya menjadi hanya sebesar 4,13 persen. Dari total 41.751 orang ini, selain dari yang total 1.723 orang yang terlayani langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Kawasan Pemukiman dan Perumahan Rakyat sebagai pengampu indikator ini terdapat 29.878 orang yang menyediakan pelayanan mandiri dan mendapat bantuan dari pihak ketiga (CSR, hibah dan Dana desa).

4. Perumahan Rakyat

Indeks pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat pada tahun 2023 berada pada kategori tuntas utama dengan total pencapaian sebesar 97,14 persen. Urusan SPM Perumahan Rakyat mensyaratkan harus terjadi bencana level daerah dan kegiatan relokasi penduduk akibat program pemerintah daerah. Pada tahun 2023 tidak terjadi bencana dan kegiatan relokasi penduduk, sehingga kegiatan yang dilakukan untuk urusan ini adalah identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program daerah.

5. Trantibumlinmas

Indeks pencapaian SPM urusan Trantibumlinmas ini adalah 95,19 persen, dan masuk pada kategori Tuntas Utama. SPM Trantibumlinmas ini terdiri dari 3 urusan yaitu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban umum, Kebencanaan dan Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran (Damkar). Untuk pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) telah tercapai 92,22 persen dengan kategori adalah tuntas utama, untuk pelayanan kebencanaan telah tercapai 98,33 persen dengan kategori tuntas utama dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (damkar) telah tercapai 95 persen dengan kategori tuntas utama. Pada tahun 2023 ini SPM urusan ketentraman dan ketertiban umum mengalami peningkatan capaian dari

tahun 2022, tiap indikatornya juga mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya, sehingga mencapai kategori tuntas utama.

6. Sosial

Indeks pencapaian SPM bidang sosial adalah 81,06 persen dengan kategori pencapaian adalah tuntas madya. SPM bidang sosial ini terdiri dari 5 indikator, dengan 1 indikator yaitu rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti tidak dilaksanakan karena tidak ditemukan adanya gelandangan dan pengemis di Belitung Timur. Dari 5 indikator SPM bidang sosial, capaian indikator perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana daerah adalah yang paling rendah dengan capaian 80 persen.

Hasil evaluasi penerapan SPM secara umum adalah:

- Kapasitas fiskal daerah masih pada kategori rendah. Porsi anggaran terbesar adalah di pembayaran gaji dan tunjangan (> 50%). Prioritas APBD dalam membiayai SPM terbatas utamanya Sosial. Penganggaran subkegiatan SPM masih harus berbagi dengan subkegiatan urusan non SPM lainnya, sehingga penganggaran subkegiatan SPM menjadi kecil;
- Pembiayaan SPM banyak mengandalkan Dana transfer;
- Beberapa subkegiatan penunjang SPM yang tidak terdapat dalam Renstra Perangkat daerah Kab. Belitung Timur Tahun 2021-2026 sehingga menyulitkan dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk sub kegiatan penunjang SPM;
- Peranan Inspektorat dalam pengawasan SPM belum diintegrasikan dengan pengawasan rutin/ regular;
- Kesulitan mengumpulkan data dan menentukan sasaran penerima layanan;
- Keterbatasan dan kendala distribusi SDM untuk memberikan pelayanan.

2.1.3.4.9 Capaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum PBB pada September 2015. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, indikator TPB memiliki tujuan untuk menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdiri dari 17 tujuan yang dibagi ke dalam pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Tujuan-tujuan ini merupakan hasil kesepakatan global untuk dicapai pada tahun 2045, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimana pun
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumberdaya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan di atas (TPB 1–TPB 17) dibagi ke dalam empat pilar sebagai berikut:

Tabel 2. 183 Pembagian TPB Berdasarkan Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Pilar	Jumlah Indikator	TPB
Sosial	97	TPB 1, TPB 2, TPB 3, TPB 4, TPB 5
Ekonomi	55	TPB 7, TPB 8, TPB 9, TPB 10, TPB 17
Lingkungan	49	TPB 6, TPB 11, TPB 12, TPB 13, TPB 15
Tata Kelola dan Hukum	21	TPB 16

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJPD. 2023

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi kewenangan kabupaten sejumlah 220 indikator dianalisis berdasarkan perbandingan capaian TPB di daerah.. Pencapaian TPB Kabupaten Belitung Timur berdasarkan hasil analisis data dikelompokkan menjadi 6 (enam) kriteria, yaitu :

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS);
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB);
3. Indikator TPB tidak ada target daerah tetapi tercapai (TTC);
4. Indikator TPB tidak ada target daerah dan belum tercapai (TTT);
5. Indikator TPB yang tidak/belum ada data (NA); dan
6. Indikator TPB tidak sesuai dengan kewenangan daerah (TKD).

Pengkategorian hasil capaian bertujuan untuk memetakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Belitung Timur pada periode RPJPD yang telah ditentukan. Isu strategis yang perlu mendapat perhatian utama adalah target-target TPB yang memiliki indikator SB, TTT, dan NA yang menunjukkan banyaknya indikator TPB yang belum dilaksanakan dan sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, serta perlu adanya penyusunan data sebagai baseline penentuan target TPB. Target TPB yang semua indikatornya sudah mencapai target nasional (SS) juga perlu terus dijalankan untuk mempertahankan capaian indikator tersebut.

Rekapitulasi pencapaian TPB berdasarkan tujuannya menggambarkan kondisi pencapaian indikator TPB berdasarkan masing-masing tujuan TPB. Rekapitulasi jumlah indikator pencapaian TPB Kabupaten Belitung Timur berdasarkan klasifikasi kriteria ketercapaian TPB adalah sebagai berikut:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) sejumlah 101 indikator

2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) sejumlah 48 indikator
3. Indikator TPB tidak ada target daerah dan belum tercapai (TTT) sejumlah 24 indikator
4. Indikator TPB yang tidak/belum ada data (NA) sejumlah 36 indikator
5. Indikator TPB yang tidak sesuai dengan karakteristik daerah (TKD) sejumlah 12 indikator

Tabel 2. 184 Pencapaian TPB Berdasarkan Pengelompokan Tujuan

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Tercapai	Belum Tercapai		N/A	TKD
			SS	SB	TTT		
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	24	17	5	2	0	0
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	11	7	3	0	1	0
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	35	19	9	2	4	1
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	13	9	4	0	0	0
5	Mencapai Kestaraan Gender dan memberdayakan Kaum Perempuan	14	4	5	1	4	0
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	18	3	7	4	4	0
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	2	0	0	0	0	2
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	19	7	1	5	6	0
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	13	3	2	2	3	3
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara	11	7	1	1	2	0
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	13	1	4	1	3	4
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	5	1	2	1	1	0
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	2	1	0	0	1	0
15	Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	4	1	1	1	0	1

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Tercapai	Belum Tercapai		N/A	TKD
			SS	SB	TTT		
16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	21	14	3	1	3	0
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan	16	7	1	3	4	1
Jumlah		221	101	48	24	36	12
Persentase		100%	46%	22%	11%	16%	5%

Berdasarkan penilaian capaian indikator pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Belitung Timur terhadap target nasional, diketahui terdapat 3 TPB dengan indikator capaian yang paling banyak dianalisis dan juga memiliki jumlah target tercapai yang paling banyak, yaitu:

1. Tujuan 3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia dengan indikator yang dinilai sebanyak 35 indikator dan sebanyak 19 indikator telah dilaksanakan dan mencapai target nasional.
2. Tujuan 1 yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun dengan total indikator yang dinilai sebanyak 24 indikator dan sebanyak 17 indikator telah dilaksanakan dan mencapai target nasional.
3. Tujuan 16 yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan dengan total indikator yang dinilai sebanyak 21 indikator dan sebanyak 21 indikator telah dilaksanakan dan mencapai target nasional.

Perbandingan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah dibandingkan dengan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional memiliki empat kriteria, yaitu SS, SB, TTT, NA, dan TKD. Rekapitulasi analisis perbandingan antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah berdasarkan pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola ditampilkan pada tabel dibawah berikut.

Tabel 2. 185 Analisis Perbandingan Antara TPB Nasional dan TPB Daerah Berdasarkan Pilar Pembangunan Berkelanjutan

No.	Pilar	Jumlah	Tercapai	Belum Tercapai		N/A	TKD
		Indikator	SS	SB	TTT		
1	Sosial	97	56	26	5	9	1
	Persentase terhadap pilar	100%	58%	27%	5%	9%	1%
2	Ekonomi	61	24	5	11	15	6
	Persentase terhadap pilar	100%	39%	8%	18%	25%	10%
3	Lingkungan	42	7	14	7	9	5
	Persentase terhadap pilar	100%	17%	33%	17%	21%	12%
4	Tata Kelola dan Hukum	21	14	3	1	3	0
	Persentase terhadap pilar	100%	67%	14%	5%	14%	0%

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJPD. 2023

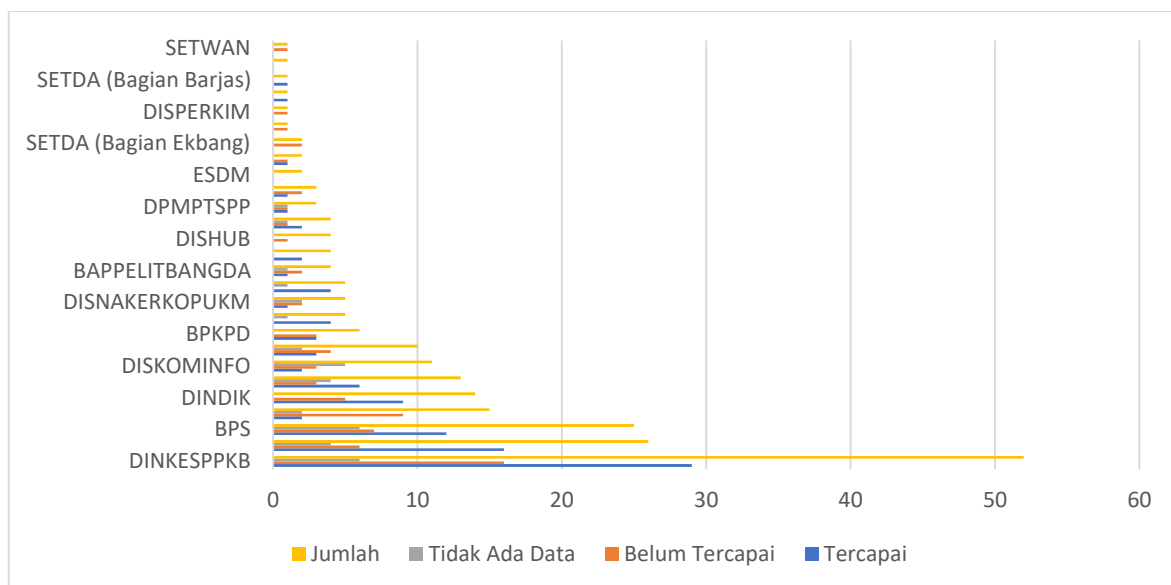
2.1.3.4.9.1 Pencapaian Indikator TPB pada Lembaga Pemerintah

Pencapaian indikator TPB di Kabupaten Belitung Timur yang dilaksanakan oleh lembaga/instansi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 186 Pencapaian Indikator TPB di Lembaga Pemerintah pada Kabupaten Belitung Timur

No.	Lembaga Pemerintah	Tercapai	Belum Tercapai		N/A	TKD	Jumlah
		SS	SB	TTT			
1	BAPPELITBANGDA	1	1	1	1	0	4
2	BPBD	6	2	1	4	0	1
3	BPKPD	3	1	2	0	0	6
4	BPS	1	2	5	6	0	2
5	DINDIK	9	5	0	0	0	1
6	DINKESPPKB	2	1	2	6	1	5
7	DINSOSPMD	1	5	1	4	0	2
8	DISBUDPAR	2	0	0	0	2	4
9	DISDUKCAPIL	4	0	0	1	0	5
1	DISHUB	0	1	0	0	3	4
1	DISKAN	0	1	0	0	0	1
1	DISKOMINFO	2	1	2	5	1	1
1	DISNAKERKOPUKM	1	2	0	2	0	5
1	DISPERKIM	0	1	0	0	0	1
1	DISTANGAN	2	1	0	1	0	4
1	DLH	3	3	1	2	1	1
1	DPMPTSP	1	0	1	1	0	3
1	DPUPR	2	5	4	2	2	1
1	ESDM	0	0	0	0	2	2
2	INSPEKTORAT	1	0	0	0	0	1
2	KESBANGPOL	1	0	1	0	0	2
2	SATPOL PP	4	0	0	1	0	5
2	SETDA (Bagian Barjas)	1	0	0	0	0	1
2	SETDA (Bagian Ekbang)	0	0	2	0	0	2
2	SETDA (Bagian Hukum)	0	0	0	0	1	1
2	SETDA (Bagian Organisasi)	1	2	0	0	0	3
2	SETWAN	0	1	0	0	0	1
Jumla		10	4	2	3	1	22

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD. 2020



Grafik 2. 187 Pencapaian Indikator TPB di Lembaga Pemerintah pada Kabupaten Belitong Timur

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD. 2023 (diolah)

Pencapaian indikator TPB oleh instansi/lembaga terbanyak di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB (DinkesPPKB), Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dan Badan Pusat Statistik. Dalam rangka untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan 17 TPB maka dikelompokkan ke dalam 4 pilar yaitu : pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola.

2.1.3.4.9.2 Pencapaian Indikator TPB pada Pilar Sosial

Pilar Pembangunan Sosial bertujuan untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Di dalam Pilar Pembangunan Sosial terdapat lima tujuan SDGs yaitu 1. tanpa kemiskinan, 2. tanpa kelaparan, 3. kehidupan sehat dan sejahtera, 4. pendidikan berkualitas, dan 5. kesetaraan gender dengan total untuk pilar pembangunan sosial adalah sebanyak 97 indikator. Capaian indikator TPB pilar pembangunan sosial berdasarkan masing-masing lembaga pemerintah di Kabupaten Belitong Timur disajikan pada tabel.

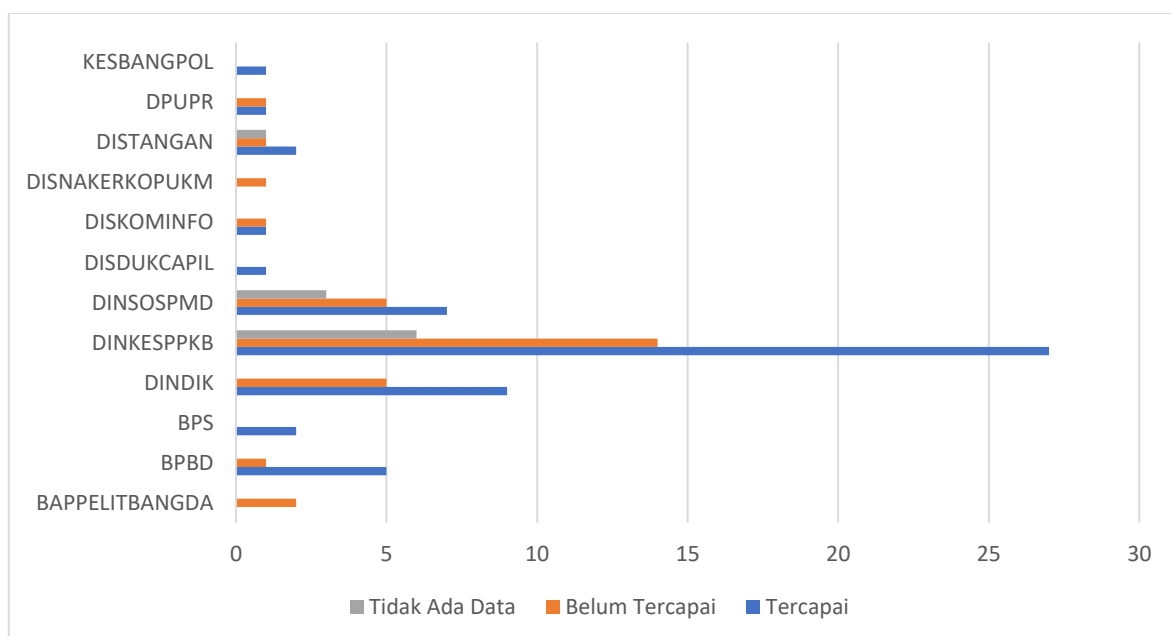
Tabel 2. 188 Pencapaian indikator TPB di Kabupaten Belitong Timur pada Pilar Sosial

No.	Lembaga Pemerintah	Tercapai	Belum Tercapai	Tidak Ada Data	Jumlah
1	BAPPELITBANGDA	0	2	0	2
2	BPBD	5	1	0	6
3	BPS	2	0	0	2
4	DINDIK	9	5	0	14
5	DINKESPPKB	27	14	6	47

No.	Lembaga Pemerintah	Tercapai	Belum Tercapai	Tidak Ada Data	Jumlah
6	DINSOSPMD	7	5	3	15
7	DISDUKCAPIL	1	0	0	1
8	DISKOMINFO	1	1	0	2
9	DISNAKERKOPUKM	0	1	0	1
10	DISTANGAN	2	1	1	4
11	DPUPR	1	1	0	2
12	KESBANGPOL	1	0	0	1
Jumlah		56	31	10	97

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD. 2020

Berdasarkan tabel di atas, ada 12 lembaga pemerintah yang melaksanakan pilar pembangunan sosial. Dari total 97 indikator TPB di pilar pembangunan sosial, terdapat 56 indikator TPB (59%) tercapai, 31 indikator TPB (33%) belum tercapai, 10 indikator TPB (11%) tidak ada data.



Grafik 2. 24 Distribusi Pencapaian TPB pada Pilar Sosial di Kabupaten Belitung Timur

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD. 2020 (diolah)

Dari 13 lembaga pemerintah pengampu pilar pembangunan ekonomi, Badan Pusat Statistik memiliki tanggung jawab indikator TPB paling banyak yaitu sebanyak 22 indikator TPB dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 8 indikator TPB. Indikator TPB tidak tercapai pada pilar pembangunan ekonomi perlu menjadi perhatian untuk mewujudkan ketercapaiannya. Indikator TPB tidak tercapai yang menjadi kewenangan pusat maka perlu langkah koordinasi terhadap instansi terkait dalam rangka pencapaian indikator TPB tersebut.

2.1.3.4.9.3 Pencapaian Indikator TPB pada Pilar Ekonomi

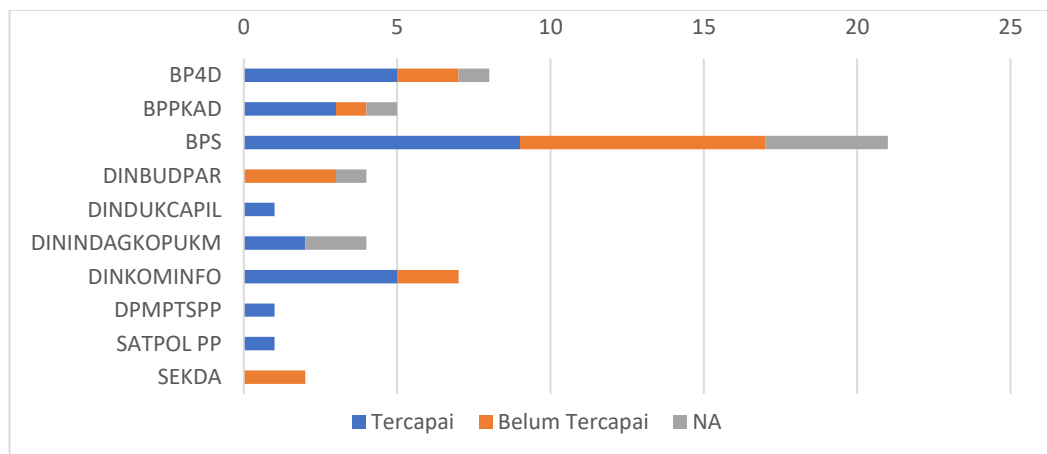
Pilar pembangunan ekonomi mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 7, Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 10, dan Tujuan 17. Total untuk pilar pembangunan ekonomi adalah sebanyak 54 indikator. Capaian indikator TPB pilar pembangunan ekonomi berdasarkan masing-masing lembaga pemerintah di Kabupaten Belitung Timur disajikan pada tabel.

Tabel 2. 189 Pencapaian Indikator TPB di Kabupaten Belitung Timur pada Pilar Pembangunan Ekonomi

No.	Lembaga Pemerintah	Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Ada Data	TOTAL
1	BP4D	5	2	1	8
2	BPPKAD	3	1	1	5
3	BPS	9	8	4	21
4	DINBUDPAR	0	3	1	4
5	DINDUKCAPIL	1	0	0	1
6	DININDAGKOPUKM	2	0	2	4
7	DINKOMINFO	5	2	0	7
8	DPMPTSP	1	0	0	1
9	SATPOL PP	1	0	0	1
10	SEKDA	0	2	0	2
JUMLAH		27	18	9	54

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD. 2020

Berdasarkan tabel di atas, ada 10 lembaga pemerintah yang melaksanakan pilar pembangunan ekonomi. Dari total 54 indikator TPB di pilar pembangunan ekonomi, terdapat 27 indikator TPB (50%) tercapai, 18 indikator TPB (33%) belum tercapai, 9 indikator TPB (17%) tidak memiliki data.



Grafik 2. 25 Distribusi pencapaian TPB pada pilar ekonomi di Kabupaten Belitung Timur

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD. 2020 (diolah)

Dari 10 lembaga pemerintah pengampu pilar pembangunan ekonomi, BPS memiliki tanggung jawab indikator TPB paling banyak yaitu sebanyak 21 indikator TPB dan Dinkominfo sebanyak 7 indikator TPB. Indikator TPB tidak tercapai pada pilar pembangunan ekonomi perlu menjadi perhatian untuk mewujudkan ketercapaiannya. Indikator TPB tidak tercapai yang menjadi kewenangan pusat maka perlu langkah koordinasi terhadap instansi terkait dalam rangka pencapaian indikator TPB tersebut.

2.1.3.4.9.4 Pencapaian Indikator TPB pada Pilar Lingkungan

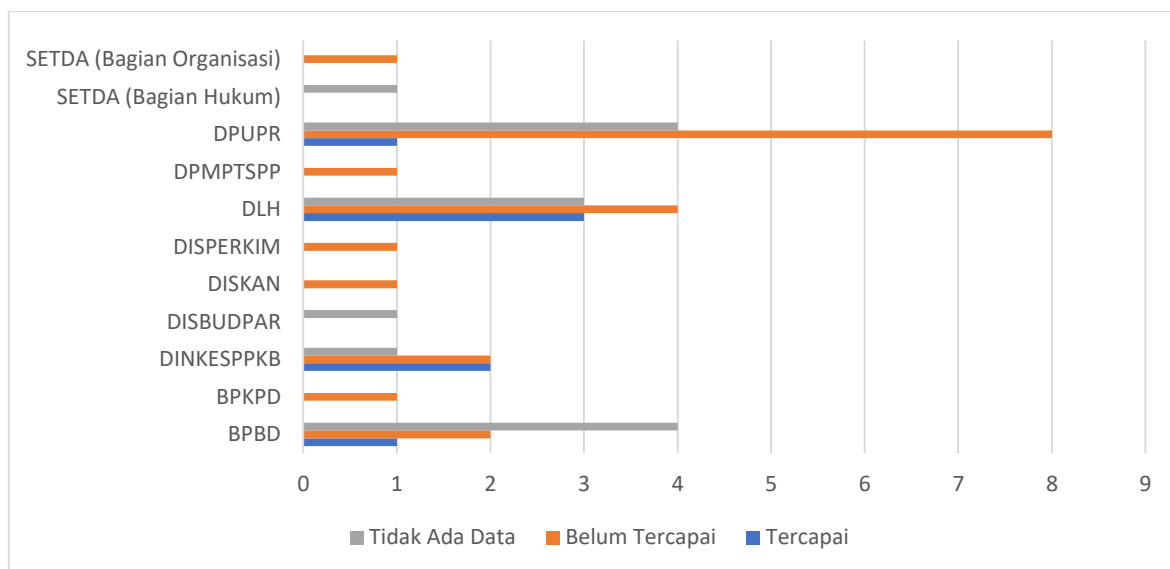
Pilar Pembangunan Lingkungan memiliki tujuan tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Di dalam Pilar Pembangunan Lingkungan terdiri dari enam tujuan SDGs yaitu Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, dan Tujuan 15, yakni air bersih dan sanitasi layak, kota dan pemukiman layak, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, dan ekosistem darat. Total untuk pilar pembangunan lingkungan adalah sebanyak 42 indikator. Capaian indikator TPB pilar pembangunan lingkungan berdasarkan masing-masing lembaga pemerintah di Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 190 Pencapaian indikator TPB di Kabupaten Belitung Timur pada Pilar Pembangunan Lingkungan

No.	Lembaga Pemerintah	Tercapai	Belum Tercapai	Tidak Ada Data	Jumlah
1	BPBD	1	2	4	7
2	BPKPD	0	1	0	1
3	DINKESPPKB	2	2	1	5
4	DISBUDPAR	0	0	1	1
5	DISKAN	0	1	0	1
6	DISPERKIM	0	1	0	1
7	DLH	3	4	3	10
8	DPMPTSP	0	1	0	1
9	DPUPR	1	8	4	13
10	SETDA (Bagian Hukum)	0	0	1	1
11	SETDA (Bagian Organisasi)	0	1	0	1
Jumlah		7	21	14	42

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD. 2020

Berdasarkan tabel di atas, ada 10 lembaga pemerintah yang melaksanakan pilar pembangunan lingkungan. Dari total 42 indikator TPB di pilar pembangunan lingkungan, terdapat 7 indikator TPB (17%) tercapai, 21 indikator TPB (50%) tidak tercapai, dan 14 indikator TPB (33%) tidak memiliki data.



Grafik 2. 26 Kontribusi Lembaga Pemerintah di Kabupaten Belitong Timur dalam Pencapaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Lingkungan

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD. 2023 (diolah)

Dari 10 lembaga pemerintah pengampu pilar pembangunan lingkungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tanggung jawab indikator TPB paling banyak yaitu sebanyak 13 indikator TPB dan Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 10 indikator TPB.

2.1.3.4.9.5 Pencapaian Indikator TPB pada Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola bertujuan agar terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. Di dalam Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola terdapat satu tujuan dalam SDGs yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

Tujuan ini menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan keadilan untuk semua, dan membangun akses kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Dalam tujuan perdamaian, keadilan dan kelembagaan memiliki 12 target yaitu: Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian di mana pun. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. Pada 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di setiap tingkatan. Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.

Pada 2030 memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional. Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan. Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.

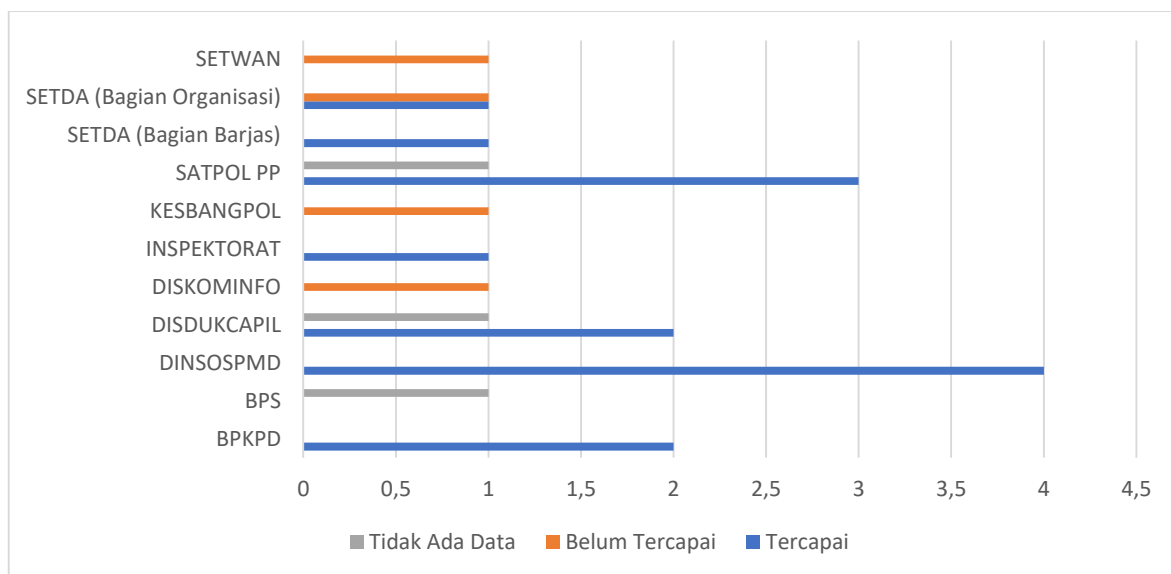
Pilar pembangunan hukum dan tata kelola mencakup satu tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 16. Total untuk pilar pembangunan hukum dan tata kelola adalah sebanyak 21 indikator. Capaian indikator TPB pilar pembangunan hukum dan tata kelola berdasarkan masing-masing lembaga pemerintah di Kabupaten Belitung Timur disajikan pada tabel.

Tabel 2. 191 Pencapaian Indikator TPB di Kabupaten Belitung Timur pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

No.	Lembaga Pemerintah	Tercapai	Belum Tercapai	Tidak Ada Data	Jumlah
1	BPKPD	2	0	0	2
2	BPS	0	0	1	1
3	DINSOSPMD	4	0	0	4
4	DISDUKCAPIL	2	0	1	3
5	DISKOMINFO	0	1	0	1
6	INSPEKTORAT	1	0	0	1
7	KESBANGPOL	0	1	0	1
8	SATPOL PP	3	0	1	4
9	SEKRETARIAT Daerah (Bagian Barang dan Jasa)	1	0	0	1
10	SETDA (Bagian Organisasi)	1	1	0	2
11	SETWAN	0	1	0	1
Jumlah		14	4	3	21

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD. 2023

Berdasarkan tabel di atas, ada 11 lembaga pemerintah yang melaksanakan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Dari total 21 indikator TPB di pilar pembangunan hukum dan tata kelola, terdapat 14 indikator TPB (67%) tercapai, 4 indikator TPB (19%) belum tercapai dan 3 indikator TPB (14%) tidak memiliki data.



Grafik 2. 27 Kontribusi Lembaga Pemerintah dalam Pencapaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Sumber: Laporan Induk KLHS RPJMD. 2023 (diolah)

Dari 11 lembaga pemerintah pengampu pilar pembangunan hukum dan tata kelola, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tanggung jawab indikator TPB paling banyak yaitu masing-masing sebanyak 4 indikator TPB dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 3 indikator TPB.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Kerangka pengukuran IDSD 2022 terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. IDSD 2022 menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing. Penyusunan IDSD 2022 dilaksanakan melalui tujuh tahapan, yaitu menyusun kerangka konseptual, mengidentifikasi indikator, mengumpulkan data, mengolah data, melakukan standardisasi data, pembobotan pilar daya saing, dan menghitung skor akhir dengan agregasi. Pengukuran IDSD 2022 ini mencakup 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan metode penghitungan, IDSD 2022 hanya dapat menampilkan skor untuk daerah yang datanya lengkap pada seluruh indikator. Jumlah indikator yang digunakan sebanyak 62 indikator untuk provinsi dan 48 indikator untuk kabupaten/kota. Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan keamanan; infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas perekonomian; adopsi TIK yang merupakan faktor determinan bagi kemajuan Industri 4.0; dan stabilitas ekonomi makro yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat

konsumsi, kinerja sektoral, perekonomian, serta tingkat biaya hidup. Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan keterampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu pasar produk yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi; pasar tenaga kerja yang mampu menekan pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja; sistem keuangan yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non-perbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah akibat berkembangnya iptek.

Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu dinamisme bisnis yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja serta kapabilitas inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah. IDSD 2022 menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian dan Lembaga.

Data yang digunakan dalam perhitungan IDSD 2022 distandardisasi dengan metode min-max. Adapun setiap pilar daya saing memiliki tingkat kepentingan yang sama terhadap indeks sehingga diberikan bobot yang sama. Untuk menghitung indeks, dilakukan agregasi skor pilar daya saing menggunakan metode rata-rata aritmetika. IDSD Kabupaten Belitung Timur dalam lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Menurut data BRIN. Perbedaan IDSD 2022 dengan IDSD sebelumnya 2017–2021 ialah pada jenis data yang digunakan menggunakan data sekunder, metode pengumpulan data yaitu data dari Kementerian/Lembaga dan Institusi resmi di Pusat, verifikasi dan validasi data oleh Kementerian /Lembaga sebagai produsen data, perspektif menggunakan Entitas bisnis serta adanya proses data *cleaning*.



Grafik 2. 28 Skor IDSD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

Sumber: IDSD BRIN 2022

Tabel 2. 192 Pencapaian Skor IDSD Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

Uraian	KOMPONEN												Skor IDSD
	Lingkungan Pendukung				SDM			Pasar			Ekosistem Inovasi		
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	Rerata
Nasional	4,14	2,91	3,57	3,05	3,76	3,73	2,68	3,73	2,66	1,31	5	2,62	3,26
Prov. Kep. Babel	4,37	2,48	3,93	2,74	3,83	3,43	2,26	4,22	2,21	0,2	5	1,86	3,04
Belitung	4,16	2,66	3,38	2,81	3,92	3,06	1,65	3,66	1,36	0,7	5	0,61	2,75
Bangka Barat	4,15	1,66	3,5	2,31	3,92	2,98	2,37	2,85	2,64	0,44	5	0,36	2,68
Bangka Tengah	4,58	2,15	3,01	2,57	3,85	2,65	1,85	2,61	1,73	0,68	5	0,78	2,62
Bangka Selatan	4,4	1,89	3,17	2,48	3,92	2,73	1,8	3,88	2,08	0,39	5	0,15	2,65
Belitung Timur	4,27	1,85	2,95	2,77	3,69	2,44	1,75	3,15	1,37	0,41	5	0,73	2,53
Pangkal Pinang	4,29	1,68	4,53	3,02	4	3,13	5	2,6	3,18	0,37	5	3,19	3,33
Bangka	4,37	1,67	3,62	2,86	4,08	3,46	2,4	4,05	3,46	0,63	5	1,06	3,05

Sumber: IDSD BRIN 2022

Pada tahun 2022 Kabupaten Belitung Timur mendapatkan skor rata-rata IDSD 2,53 masih terendah yang diharapkan tahun depan dapat meningkat dengan penilaian pilar indikator yang harus dipenuhi seperti Pilar 1 (pertama) ialah Institusi yang bermuara kepada iklim bisnis yang kondusif bagi para pelaku ekonomi dan investasi dibandingkan dengan Provinsi Kep.Babel masih rendah sedikit dan lebih tinggi dibanding dengan Kabupaten Belitung. Pilar 2 (kedua) pembangunan infrastruktur yang merupakan sarana prasarana pendukung aktivitas ekonomi yang memadai seperti Jalan serta Jembatan, listrik dan konektivitas transportasi dibandingkan dengan Provinsi Kep. Babel masih lebih rendah progress pembangunannya.

Pilar 3 (tiga) Adopsi TIK dan sarpras pendukung TIK serta penggunaan TIK di Masyarakat secara optimal dibandingkan Provinsi Kep.Babel masih lebih rendah

disebabkan penetrasi TIK belum merata sampai ke pelosok desa – desa juga pembangunan infrastruktur TIKnya.

Pilar 4 (empat) stabilitas ekonomi makro seperti kepercayaan investor terhadap kondisi keuangan daerah baik lokal nasional dan luar negeri dibandingkan dengan Provinsi Kep.Babel lebih besar sedikit.

Pilar 5 (lima) Kesehatan meliputi penduduk yang sehat secara fisik dan mental serta sarpras pendukung kesehatan serta angka harapan hidup yang tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kep.Babel masih sedikit. Pilar 6 (enam) Keterampilan tenaga kerja serta kompetitif bagi sektor bisnis dibandingkan dengan Provinsi Kep.Babel masih rendah dikarenakan belum banyaknya lapangan kerja dan lulusan sekolah menengah serta Perguruan Tinggi rendah.

Pilar 7 (tujuh) Pasar Produk dimana kemampuan bersaing UMKM terhadap pasar yang terbuka lebih rendah sedikit dibandingkan dengan Provinsi Kep.Babel tapi lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan Kabupaten Belitung. Pilar 8 (delapan) Pasar tenaga kerja dengan keterampilan dan skil serta upah pekerja masih lebih rendah dengan Provinsi Kep.Babel dikarenakan belum banyaknya tenaga terampil yang ditunjang dengan lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi serta investasi padat karya.

Pilar 9 (Sembilan) Sistem keuangan dengan tumbuhnya institusi keuangan baik mikro dan makro dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih rendah pertumbuhannya dikarenakan masih sedikitnya investasi padat modal di Belitung Timur. Pilar 10 (sepuluh) ukuran pasar dengan penguatan industry dan nilai tambah produk daerah dibandingkan dengan Provinsi Kep.Babel lebih tinggi sedikit. Pilar 11 (sebelas) Dinamisme bisnis dengan kemudahan berusaha dan efektif efisien serta inovatif dibandingkan dengan Provinsi Kep.Babel semua Kabupaten Kota sama tingginya. Pilar 12 (dua belas) Kapabilitas inovasi gambaran kualitas dan kuantitas penelitian serta pengembangan institusi formal seperti Perguruan Tinggi dan Lembaga keterampilan lainnya masih rendah karena belum adanya Lembaga Pendidikan tinggi di Kabupaten Belitung Timur.

Terutama pada Pilar 2 (dua) Infrastruktur dan konektivitas yang terus didorong keberadaannya melalui pendanaan pusat dan Provinsi untuk pembangunannya, Pilar 7 (tujuh) meningkatkan daya saing UMKM dengan nilai tambah serta sertifikasi produk dari berbagai Lembaga sertifikasi terpercaya, produk olahan dengan mengikutsertakan produk unggulan umkm bermitra dan dibina oleh perusahaan besar. Pilar 9 (Sembilan) Pertumbuhan institusi keuangan makro dan

mikro sampai ke tingkat desa mencari investor nasional dan internasional untuk mau berinvestasi di Kabupaten Belitung Timur hingga diharapkan tumbuhnya ekonomi di pelosok desa dan menyerap tenaga kerja lokal yang banyak. Pilar 12 (dua belas) Kapabilitas dan kualitas tindak lanjut penelitian serta adanya Perguruan Tinggi secara *de facto* dan *de jure*, serta terus berkolaborasi dengan semua pihak terkait Pendidikan baik masyarakat, pemerintah dan swasta.

Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2022 mengikuti penyelenggaraan Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya yaitu Inovasi Government Award (IGA). Terdapat 13 (tiga Belas) Inovasi daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah diantaranya:

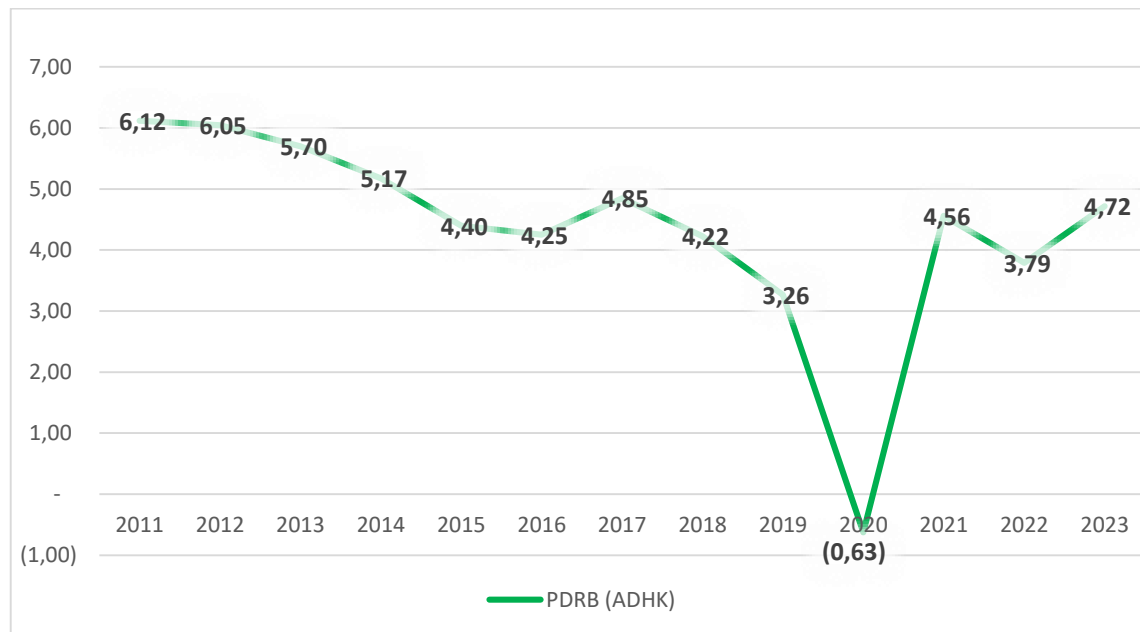
1. GO Bright Aplikasi Penerangan Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan Kab.Belitung Timur.
2. KATETER oleh Puskesmas Simpang Renggang Kab.Belitung Timur.
3. KATIS oleh Puskesmas Mengkubang Kab.Belitung Timur.
4. KLEKAK oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kab.Belitung Timur.
5. LADARSIP Oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab.Belitung Timur.
6. Data Pengamatan dan Pengendalian Tanaman oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kab.Belitung Timur.
7. Promo Produk Olahan Ikan oleh Dinas Perikanan Kab.Belitung Timur.
8. SELINA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Belitung Timur.
9. SIGESITE oleh Puskesmas Mengkubang Kab.Belitung Timur.
10. SIKECE Kepegawaian oleh BKPSDM Kab.Belitung Timur.
11. SIMPOR Evaluasi Pengendalian Pembangunan oleh Kab.Belitung Timur.
12. SIPEDE Kepegawaian oleh BKPSDM Kab.Belitung Timur.
13. SPDB SD oleh Dinas Pendidikan Kab.Belitung Timur.

Dari ke 13 (Tiga Belas) Inovasi tersebut Kabupaten Belitung Timur mendapatkan nilai 54,57 dengan predikat Inovatif. Dimasa mendatang harus bisa ditingkatkan lagi inovasi dari OPD yang ada di Kabupaten Belitung Timur terutama di pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pengembangan Wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan pembangunan berkelanjutan. Tingkat daya saing daerah (competitiveness) merupakan salah satu parameter dalam konsep Kabupaten/kota berkelanjutan semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan kesejahteraan disuatu daerah pada

periode tertentu adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh suatu daerah (Rindang & M.Firdaus, 2009).



Grafik 2. 29 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2023

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2024

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut lapangan usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut pengeluaran/*expenditure*), serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

PDRB menurut Lapangan Usaha adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut Lapangan Usaha menggunakan pendekatan produksi yang merupakan salah satu dari tiga metode perhitungan pendapatan nasional. Melalui pendekatan ini, pendapatan daerah dihitung berdasarkan nilai seluruh produksi setiap sektor suatu negara (industri, agraris, ekstraktif, jasa, niaga) di dalam suatu periode tertentu.

Tabel 2. 193 PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab.Belitung Timur Tahun 2023

Kategori pada PDRB menurut Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)		Distribusi PDRB (persen)	Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHB
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.707.906,58	1.520.082,15	25,64	4,98
Pertambangan dan Penggalian	1.259.822,01	977.396,77	11,93	-1,75
Industri Pengolahan	2.465.569,92	1.278.768,25	23,34	3,68
Pengadaan Listrik dan Gas	7.806,96	4.085,44	0,07	3,39
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.983,25	1.091,07	0,02	0,54
Konstruksi	815.698,07	457.273,17	7,72	9,90
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.215.579,96	665.917,37	11,51	4,95
Transportasi dan Pergudangan	230.373,41	127.985,15	2,18	5,35
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	289.807,31	171.173,01	2,74	11,80
Informasi dan Komunikasi	133.397,69	113.090,81	1,26	14,14
Jasa Keuangan dan Asuransi	59.220,68	31.754,30	0,56	14,38
Real Estate	305.163,84	186.129,15	2,89	5,65
Jasa Perusahaan	32.331,99	17.765,63	0,31	7,94
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	548.729,03	371.637,79	5,20	8,81
Jasa Pendidikan	270.106,67	154.797,12	2,56	8,85
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	157.609,33	97.906,30	1,49	9,25
Jasa lainnya	60.824,06	34.195,70	0,58	6,64
PDRB	10.561.930,75	6.211.049,16	100,00	4,72

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2024

PDRB menurut Pengeluaran adalah keseluruhan output (barang dan jasa) yang dihasilkan dalam suatu perekonomian untuk dipergunakan sebagai konsumsi “akhir” masyarakat. Berdasarkan pendekatan ini maka PDRB dihitung dari jumlah belanja/pengeluaran untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut. Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu

(biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan

Tabel 2. 194 PDRB Menurut Pengeluaran Kab.Belitung Timur Tahun 2023

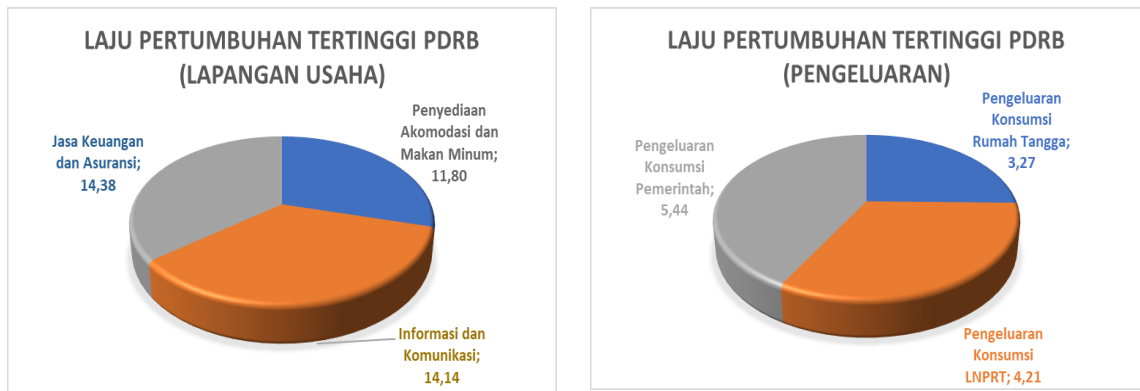
Kategori pada PDRB menurut Pengeluaran	PDRB menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)		Distribusi PDRB (persen)	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5.579.688,87	3.089.068,65	52,83	3,27
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	74.578,42	42.136,99	0,71	4,21
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.188.387,91	671.182,46	11,25	5,44
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	3.064.290,79	1.516.143,56	29,01	3,86
Perubahan Inventori	46.385,21	8.232,13	0,44	
Net Ekspor Barang dan Jasa	608.599,56	884.285,36	5,76	
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	10.561.930,76	6.211.049,15	100,00	4,72

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2024

Fokus kemampuan ekonomi daerah terdiri atas variabel pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran konsumsi non pangan perkapita, dan produktivitas total daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 mengalami pertumbuhan hingga tumbuh sebesar 4,72 persen. Perekonomian Belitung Timur tahun 2023 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 10,56 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai 6,23 triliun rupiah. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 14,38 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 5,44 persen. Laju Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan sistem neraca regional yang dirilis oleh BPS Belitung Timur Pebruari tahun 2024 dalam 9 (sembilan) tahun terakhir mengalami fluktuatif di tahun 2020 terjadi penurunan drastis ke angka minus 0,63 Persen dikarenakan pandemi Covid 19 yang terjadi diseluruh dunia berimbas kepada Kabupaten Belitung Timur. Pasca pandemi Covid 19, laju pertumbuhan ekonomi Belitung Timur tahun 2023 berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 4,41 persen.

Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai

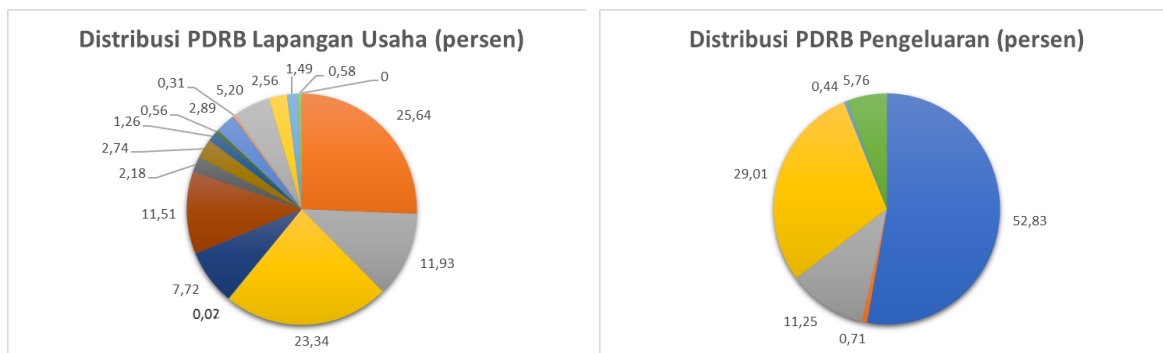
PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.



Grafik 2. 30 Laju Pertumbuhan Tertinggi Tahun 2023

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2024

Pertumbuhan tertinggi PDRB 2023 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Belitung Timur yaitu sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 14,38 persen, di ikuti sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 14,14 persen kemudian pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Air Minum sebesar 11,80 persen. Untuk pertumbuhan tertinggi PDRB menurut Pengeluaran berasal dari komponen 1) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 5,44 persen, 2) pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 4,21 persen dan 3) pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 3,27 persen.



Grafik 2. 31 Distribusi PDRB Tahun 2023

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2024

Untuk kontribusi utama PDRB menurut Lapangan Usaha didominasi oleh Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 25,64 persen, Sektor Industri Pengolahan 23,34 persen, dan Sektor Pertambangan dan Penggalian 11,93 persen. PDRB menurut Pengeluaran didominasi dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga 52,83 persen, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 29,01 persen dan pengeluaran konsumsi pemerintah 11,25 persen.

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT). Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan. (PDRB Belitung Timur menurut lapangan usaha 2018-2023).



Grafik 2. 32 Laju Pertumbuhan PDRB Kab.Belitung Timur 2018-2023

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2024

Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 mengalami kenaikan 0,28 triliun rupiah menjadi sebesar Rp 6,21 triliun lebih tinggi dari kenaikan tahun 2022 yaitu sebesar 0,21 triliun. Sedangkan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 mengalami kenaikan Rp. 0,78 triliun menjadi sebesar Rp 10,56 triliun lebih rendah dari kenaikan tahun 2022 yaitu sebesar Rp.0,9 triliun.

A. Pengeluaran Per Kapita

Tabel 2. 195 PDRB Menurut Pengeluaran Kab.Belitung Timur Tahun 2023

Kelompok Pengeluaran	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kelompok Makanan	822.908	871.257	897.337	998.166	958.718
Kelompok Bukan Makanan	855.459	805.001	855.677	924.753	1.007.869
Jumlah	1.678.367	1.676.258	1.753.014	1.922.919	1.966.587

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2024

Berdasarkan kelompok makan dan bukan makanan untuk pengeluaran dalam 5 (lima) tahun terakhir dalam sebulannya terjadi fluktuatif tetapi tidak terlalu besar. Pada tahun 2023 terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat dimana proporsi konsumsi kelompok bukan makanan menjadi lebih besar yaitu 51,25 persen dibandingkan proporsi konsumsi makanan sebesar 48,75 persen.

Tabel 2. 196 Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Makanan

Komoditas Makanan	Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Makanan (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Padi-padian	4,74	4,99	4,82	4,52	4,83
Umbi-umbian	0,32	0,44	0,46	0,38	0,34
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	6,24	6,92	7,09	7,54	6,24
Daging	1,98	2,29	2,39	3,39	2,47
Telur dan Susu	3,14	3,68	3,13	3,04	2,65
Sayur-sayuran	3,45	4,44	4,7	4,44	3,91
Kacang-kacangan	0,59	0,66	0,63	0,55	0,60
Buah-buahan	2,64	2,39	1,85	2,34	1,86
Minyak dan Kelapa	0,95	1,09	1,06	1,31	1,14
Bahan Minuman	1,4	1,56	1,5	1,28	1,23
Bumbu-bumbuan	1,09	1,3	1,3	1,21	0,97
Konsumsi Lainnya	1,13	1,23	1,34	1,11	1,13
Makanan dan Minuman jadi	13,73	12,64	12,46	12,37	12,95
Rokok	7,64	8,33	8,46	8,43	8,43
Jumlah Makanan	49,04	51,96	51,19	51,91	48,75

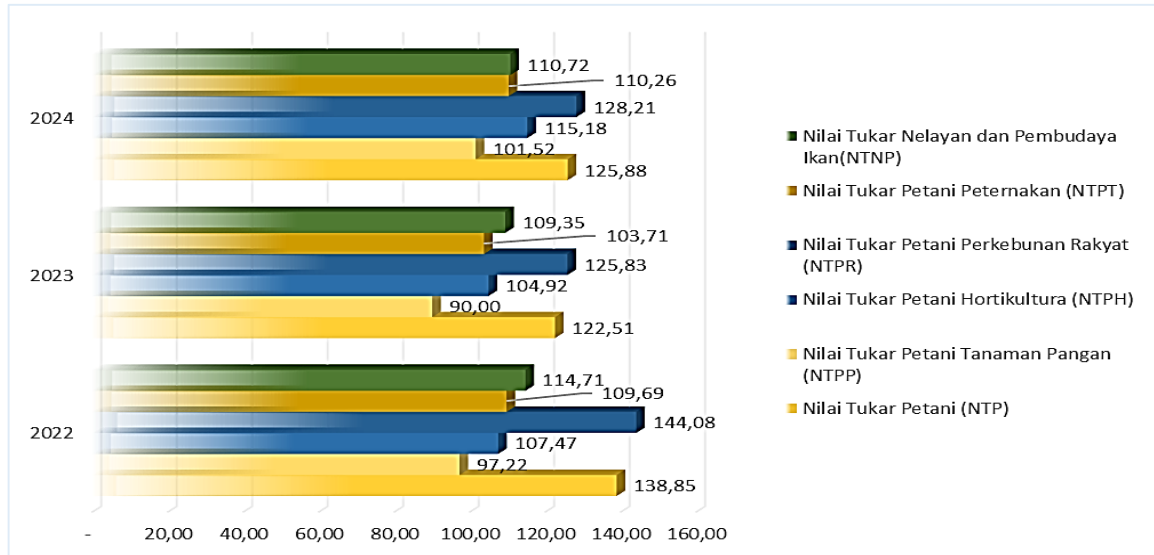
Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2024

Pengeluaran masyarakat di Kabupaten Belitung Timur pada kelompok makanan banyak dihabiskan untuk makanan dan minuman jadi, ikan/udang/cumi/kerang dan padi-padian dikarenakan untuk dikonsumsi setiap hari sehingga untuk kebutuhan sekunder dan tersier tidak menjadi prioritas.

B. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan.

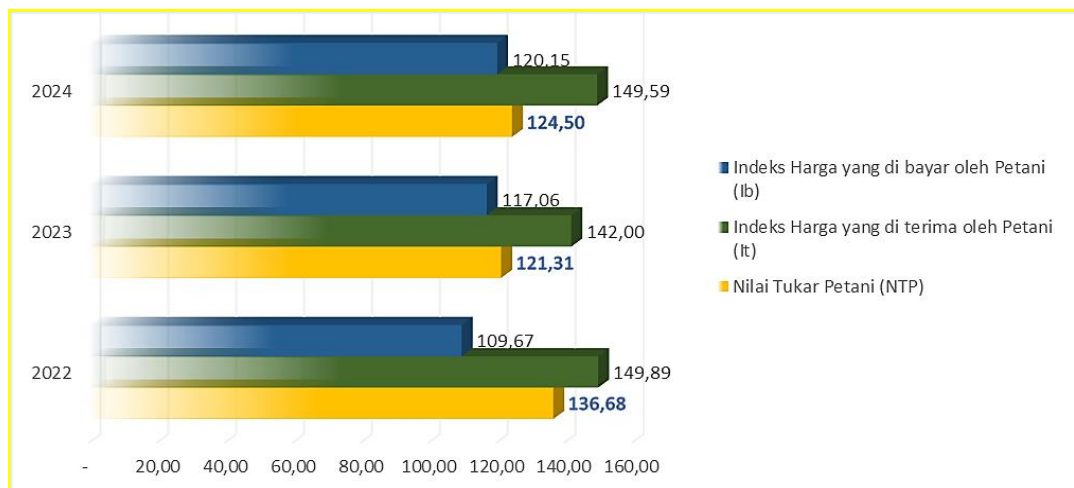
NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP merupakan agregasi dari lima subsektor yang terdiri dari Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP), Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH), Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR), Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) dan Nilai Tukar Nelayan dan Pembudaya Ikan (NTNP).



Grafik 2. 33 Nilai Tukar Petani pada tahun 2022-2024

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2024

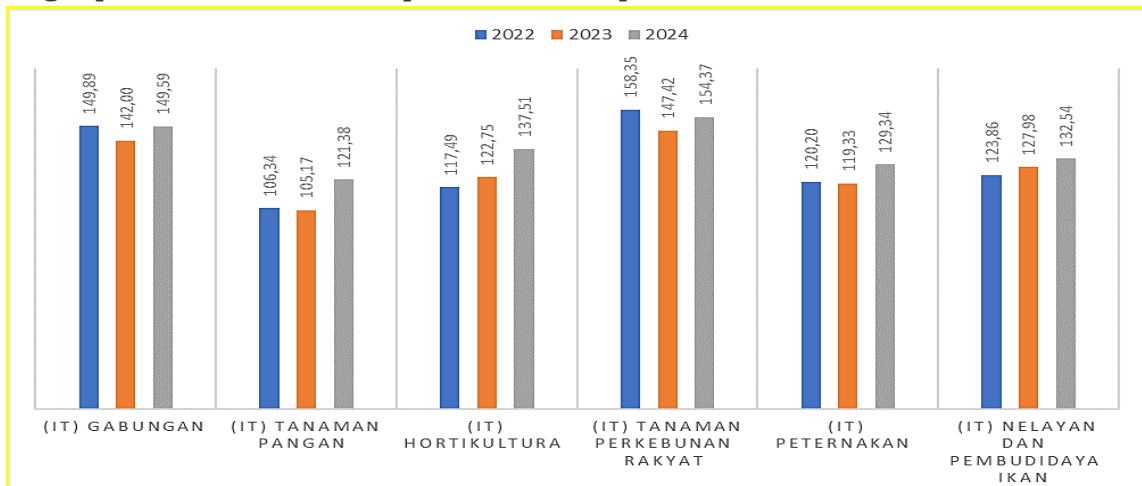
NTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Februari 2024 sebesar 125,88 atau naik 3,37 persen dibanding NTP Februari 2023 (YoY) yang sebesar 122,51 persen. Sub sektor yang mengalami kenaikan tertinggi dengan nilai 11,52 persen adalah Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) yang semula 90,0 persen di tahun 2023 menjadi 101,52 persen di tahun 2024. Kemudian diikuti oleh Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) dengan nilai 104,92 persen di tahun 2023 menjadi 115,18 persen di tahun 2024 dengan kenaikan sebesar 10,26 persen. Sedangkan Nilai Tukar Nelayan dan Pembudaya Ikan (NTNP) mengalami pertumbuhan terkecil sebesar 1,37 persen yang semula 109,35 persen di tahun 2023 menjadi 110,72 persen di tahun 2024.



Grafik 2. 34 NTP, It dan Ib pada tahun 2022-2024

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2024

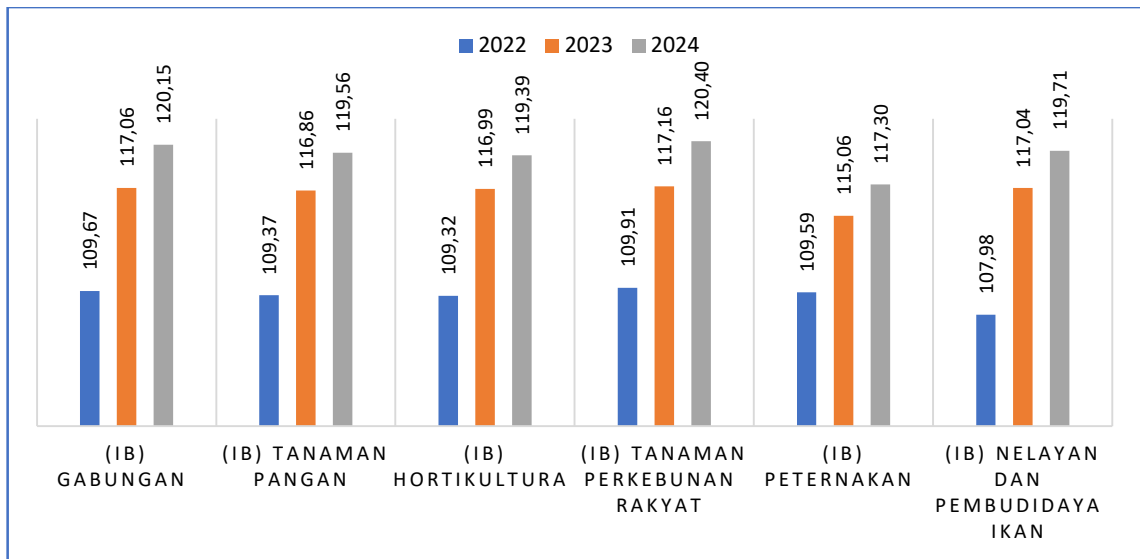
Kenaikan NTP Februari 2024 (YoY) sebesar 3,19 persen terjadi karena Indeks Harga yang di terima oleh Petani (It) naik sebesar 7,59 persen dari 142,00 persen di tahun 2023 menjadi 149,59 persen di tahun 2024. Sedangkan Indeks Harga yang di bayar oleh Petani (Ib) mengalami kenaikan 3,09 persen yang semula 117,06 persen di tahun 2023 menjadi 120,15 persen di tahun 2024. Indeks Harga yang Diterima Petani (It) merupakan indikator yang menunjukkan fluktuasi harga beragam komoditas pertanian yang dihasilkan petani. Melalui Indeks Harga yang di bayar oleh Petani (Ib) dapat dilihat fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat perdesaan, khususnya petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat perdesaan, serta fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian.



Grafik 2. 35 Indeks Harga yang Diterima Petani (It) pada Tahun 2022-2024

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2024

Pada tahun 2024 subsektor pertanian tanaman pangan memperoleh peningkatan penghasilan tertinggi sebesar 16,21 persen dari 105,17 persen di tahun 2023 menjadi 121,38 persen di tahun 2024. Sedangkan subsektor nelayan dan pembudidaya ikan memperoleh peningkatan penghasilan terkecil sebesar 4,56 persen dari 127,98 persen di tahun 2023 menjadi 132,54 persen di tahun 2024. Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat memperoleh penghasilan paling tinggi dibandingkan dengan 5 subsektor lainnya namun demikian memiliki fluktuasi perubahan indeks yang besar. Pada tahun 2022 Indeks Harga yang Diterima Petani (It) Tanaman Perkebunan Rakyat 158,35 persen turun 10,93 persen menjadi 147,42 persen di tahun 2023, selanjutnya mengalami kenaikan 6,95 persen di tahun 2024 menjadi 154,37 persen. Kondisi ini mungkin terjadi karena terdapat fluktuasi harga komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, kelapa, lada, kopi dan kakao yang mengalami penurunan. Subsektor Tanaman Hortikultura dan Subsektor Nelayan dan Pembudidaya Ikan memiliki tren pertumbuhan yang positif pada It dimana masing-masing subsektor tumbuh 5,26 persen dan 4,12 persen di tahun 2023 serta 14,76 persen dan 4,56 di tahun 2024. Dua subsektor ini dapat mempertahankan pertumbuhan yang positif dikarenakan kondisi pasar yang stabil dan bertumbuh.



Grafik 2. 36 Indeks Harga yang di bayar oleh Petani (Ib) pada tahun 2022-2024

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2024

Indeks Harga yang di bayar oleh Petani (Ib) konsisten mengalami kenaikan pada tiap tahunnya dan pada tiap subsektornya sehingga dengan demikian petani harus menghadapi kenaikan biaya hidup dan biaya produksinya pada tiap tahunnya. Kondisi ini sedikit lebih baik di tahun 2024 karena kenaikan Ib pada tahun 2024 sebesar 3,09 persen lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan pada tahun 2023 yang sebesar 7,39 persen. Tingkat inflasi 2023 yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024 merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Indeks Harga yang di bayar oleh Petani (Ib). Selain itu kenaikan harga-harga faktor produksi seperti pupuk dan bahan pakan yang berasal dari luar Pulau Belitung dapat berpengaruh. Indeks Harga yang di bayar oleh Petani (Ib) Tanaman Perkebunan Rakyat mengalami kenaikan tertinggi sebesar 3,24 persen dari 117,16 persen di tahun 2023 menjadi 120,40 persen di tahun 2024. Sedangkan Indeks Harga yang di bayar oleh Petani (Ib) Peternakan merupakan subsektor dengan pertumbuhan terendah sebesar 2,24 persen di tahun 2024 dari semula 115,06 persen di tahun 2023 menjadi 117,3 persen.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Kualitas Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi

Kondisi daya saing daerah dari sisi fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai pendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Fasilitas infrastruktur wilayah menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah diberbagai sektor di daerah dan antar-wilayah semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing.

Kabupaten Belitung Timur sebagai Kabupaten pemekaran terus menggenjot pembangunan fisik diantaranya pembangunan perkantoran terpadu, jalan, jembatan dan irigasi yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian di masyarakat dan semakin dekat dan berkualitasnya pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 2. 197 Kualitas Infrastruktur Jalan, Jembatan, dan Irigasi Kabupaten Belitung Timur 2018-2022

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan	km	480,88	480,88	480,88	480,88	480,88
Panjang Jalan Kondisi Baik	km	218,52	141,48	354,88	343,2	344,87
Panjang Jalan Kondisi Sedang	km	118,60	158,23	28,33	39,97	45,47
Persentase Kondisi mantap jalan kabupaten	km	70,10	62,33	79,67	79,68	81,18
Panjang Jalan Aspal	Km	413,50	418,69	404,19	406,14	419
Panjang Jalan Kerikil	Km	17,43	16,09	49,29	57,34	44,09
Panjang Jalan Tanah	Km	49,95	46,10	27,40	17,4	18,00
Jumlah Jembatan	Unit	34	48	48	67	57
Jumlah Jembatan	Unit	34	48	48	67	57
Jumlah Jembatan dengan Kondisi Baik	Unit	21	45	45	66	50
Panjang Jaringan Irigasi	m					
Panjang Irigasi Primer	m	14.396,40	16.906,89	16.906,89	19,180,7	19.180,7
Panjang Irigasi Sekunder	m	1653	1653	1653	1.653	1653
Luas Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Daerah yang dibangun	ha		70	70	37	412
Panjang Sungai Kewenangan Daerah yang dinormalisasi dan ditingkatkan kapasitas alirannya	km	3,65	-	-	2	0,545

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2022

Berdasarkan survey Bersama P2JN Provinsi Babel dengan Dinas PUPR Kabupaten Belitung Timur data jalan dan jembatan per November 2022 Panjang ruas jalan sesuai SK Jalan total 480,88 km dengan jumlah ruas jalan 43 ruas

jalan. Kondisi jalan yang baik 344,87 km atau 71,72% yang sedang 45,47 km atau 9,46% sedangkan rusak ringan 46,67 km atau 9,70% serta rusak berat 43,87 km atau 9,12%.

Untuk Panjang Jembatan (meter) 581,60 meter dengan jumlah jembatan sebanyak 57 buah kondisi baik ada 3 buah (5,26%) kondisi sedang sebanyak 47 buah (82,46%) kondisi rusak ringan ada 6 buah (10,53%) kondisi rusak berat ada 1 buah (1,75%) dan jembatan runtuh tidak ada atau 0 %. Untuk luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun sebesar 412 ha dan panjang sungai kewenangan daerah yang dinormalisasi sebanyak 545 meter.

B. Kesesuaian Tata Ruang dan Penggunaan Lahan di Kabupaten Belitung Timur

Kondisi aktual pemanfaatan ruang dalam laporan Peninjauan Kembali (PK) ke 1 RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014–2034 Tahun 2019 dilakukan untuk melihat dan membandingkan kondisi aktual pemanfaatan ruang di Kabupaten Belitung Timur sejak penetapan Perda RTRW Kabupaten Belitung Timur sampai dengan saat dilaksanakannya proses peninjauan kembali RTRW tersebut (Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No.6 Tahun 2017 tentang Tata Cara PK RTRW) . Kondisi aktual pemanfaatan ruang minimal meliputi data dan informasi sejak RTRW di tetapkan seperti data program dan penganggaran sektor terkait dalam rangka perwujudan tata ruang, peta – peta kondisi aktual pemanfaatan ruang dilapangan, data data yang menggambarkan kondisi aktual meliputi neraca penatagunaan tanah, hasil pemantauan dan evaluasi tata ruang, serta pelaporan oleh masyarakat.

Kesesuaian realisasi program lima tahunan dengan yang tercantum dalam indikasi program RTRW Kabupaten Belitung Timur berdampak pada perubahan dan pergeseran program dan anggaran ditahap tahap berikutnya. Pemetaan kesesuaian antara rencana struktur dan pola ruang dengan kondisi aktual pemanfaatan ruang.

Hasil tumpang tindih peta memperlihatkan bahwa, peta rencana pola ruang Kabupaten Belitung Timur mempunyai nilai kesesuaian pemfaatan ruang dengan penutupan lahan sekitar 77,44% dari luas wilayah kabupaten, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan penutupan lahan sekitar 0,03% dari luas wilayah kabupaten, rencana pola ruang belum berwujud sekitar 19,18% dari luas wilayah kabupaten, dan pola ruang keliru sekitar 3,35% dari luas wilayah Kabupaten.

Untuk penggunaan lahan masih berlangsungnya revisi RTRW tahun 2021 ini ada kemungkinan berubah maka perlunya diolah kembali data perubahan penggunaannya sambil menunggu finalisasi perubahan revisinya. Secara jelas, hasil tumpang tindih peta diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 198 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang: Rencana Pola Ruang dengan Penutupan Lahan Saat Ini

No	Kesesuaian Pola Ruang dengan Kawasan Hutan	TUTUPAN LAHAN (Ha)								
		Hutan Bakau/ Mangrove	Hutan Rimba	Kuburan / Makam	Permukiman	Sawah	Tegakan/ Ladang	Perkebunan/ Kebun	Semak belukar	Tanah Kosong/ Gundul
1	Hutan Lindung	1.012,56	11.143,16		10,70	-	195,72	7.038,99	18.561,66	5.466,34
	Sesuai	1.012,56	11.143,16	-			195,72	7.038,99	18.561,66	5.466,34
	Pola ruang keliru				10,70					
2	Perlindungan setempat	-	-	-	-	-	-	15,39	76,57	-
	Sesuai							15,39	76,57	
3	Kawasan Lindung Lainnya	293,87	327,78		2,63	-	-	28,68	3.186,99	1,43
	Sesuai	293,87	327,78	-				28,68	3.186,99	1,43
	Pola ruang keliru				2,63					
4	Kawasan Strategis Lingkungan Hidup	-	353,74	-	-	-	11,28	610,55	128,81	10,47
	Pola ruang keliru		353,74				11,28	610,55	128,81	10,47
5	Hutan Produksi	312,01	6.460,05		-	-	1.547,45	11.341,22	31.814,54	4.606,83
	Sesuai	312,01	6.460,05	-			1.547,45	11.341,22	31.814,54	4.606,83
	Pola ruang keliru									
6	Tanaman Pangan	-	-	-	16,67	514,48	32,70	691,44	998,64	665,46
	Belum terwujud					389,11	6,69	448,21	543,33	232,91
	Pola ruang keliru				16,67	125,37	26,01	243,23	455,31	432,55

[illegible]

No	Keseusaian Pola Ruang dengan Kawasan Hutan	TUTUPAN LAHAN (Ha)								
		Hutan Bakau/ Mangrove	Hutan Rimba	Kuburan / Makam	Permukiman	Sawah	Tegakan/ Ladang	Perkebunan/ Kebun	Semak belukar	Tanah Kosong/ Gundul
14	Permukiman	-	39,59	4,68	2.138,15	-	1.984,75	2.880,77	5.414,34	2.095,03
	Sesuai			4,68	2.138,15					
	Tidak sesuai									
	Belum terwujud		39,59				1.984,75	2.880,77	5.414,34	2.095,03
	Pola ruang keliru									
15	Hankam	-	-	-	-	-	-	113,55	136,84	56,37
	Belum terwujud							113,55	136,84	56,37
16	Hankam	-	-	-	-	-	-	-	-	16,27
	Pola ruang keliru									16,27
	Jumlah (Ha)	1.777,99	22.862,59	4,68	2.474,31	514,48	5.952,32	86.930,61	104.573,39	28.224,16
	persentase	0,70	9,03	0,00	0,98	0,20	2,35	34,32	41,28	11,14
	Sesuai	1.676,24	19.147,70	4,68	2.141,21	-	3.681,64	61.797,33	88.792,87	21.655,95

Sumber : Laporan Akhir 2019 Hasil Pengkajian RTRW Kab.Belitung Timur 2014 -2034

Tabel 2. 199 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang: Rencana Pola Ruang dengan Penutupan Lahan Saat Ini (lanjutan)

No	Kesesuaian Pola Ruang dengan Kawasan Hutan	TUTUPAN LAHAN (Ha)							Persen
		Tambak	Rawa	Empang	Danau/ Situ	Waduk	Sungai	Jumlah	
1	Hutan Lindung	-	36,60	-	-	77,52	203,86	43.747,11	16,91
	Sesuai		36,60			77,52	203,86	43.736,41	16,90
	Pola ruang keliru							10,70	0,00
2	Perlindungan setempat	-	-	-	-	-	2,84	94,80	0,04
	Sesuai						2,84	94,80	0,04
3	Kawasan Lindung Lainnya	-	-	-	-	28,88	-	3.870,26	1,50
	Sesuai					28,88		3.867,63	1,49
	Pola ruang keliru							2,63	0,00
4	Kawasan Strategis Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	1.114,85	0,43
	Pola ruang keliru							1.114,85	0,43
5	Hutan Produksi	24,81	32,90	2,09	-	337,89	33,92	56.513,71	21,84
	Sesuai		32,90	2,09		337,89	33,92	56.488,90	21,83
	Pola ruang keliru	24,81						24,81	0,01
6	Tanaman Pangan	-	67,33	2,53	-	47,77	11,79	3.048,81	1,18
	Belum terwujud							1.620,25	0,63
	Pola ruang keliru		67,33	2,53		47,77	11,79	1.428,56	0,55
7	Hortikultura	-	160,53	-	-	259,58	32,20	50.035,66	19,34
	Sesuai							30.383,55	11,74
	Tidak sesuai						32,20	32,20	0,01
	Belum terwujud							18.988,36	7,34
	Pola ruang keliru		160,53			259,58		631,55	0,24
8	Perkebunan	-	2,44	13,05	-	79,54	16,56	44.283,52	17,12
	Sesuai					79,54		40.063,08	15,48
	Belum terwujud							3.986,86	1,54
	Pola ruang keliru		2,44	13,05			16,56	233,58	0,09
9	Perikanan Laut	-	-	-	-	-	-	108,42	0,04
	Belum terwujud							108,42	0,04
10	Perikanan Darat	-	1.925,71	-	-	528,13	512,08	5.121,54	1,98
	Pola ruang keliru		1.925,71			528,13	512,08	5.121,54	1,98

No	Keseusaian Pola Ruang dengan Kawasan Hutan	TUTUPAN LAHAN (Ha)							Persen
		Tambak	Rawa	Empang	Danau/ Situ	Waduk	Sungai	Jumlah	
11	Pertambangan	-	77,06	-	9,00	626,55	20,50	33.732,18	13,04
	Sesuai		49,04			485,98		23.488,42	9,08
	Belum terwujud		28,02			140,57		10.161,24	3,93
	Pola ruang keliru				9,00		20,50	82,52	0,03
12	Industri	-	-	-	-	7,98	5,51	1.531,79	0,59
	Sesuai					7,98		11,04	0,00
	Belum terwujud							1.515,24	0,59
	Pola ruang keliru						5,51	5,51	0,00
13	Pariwisata	-	-	-	-	-	2,15	420,84	0,16
	Belum terwujud							418,69	0,16
	Pola ruang keliru						2,15	2,15	0,00
14	Permukiman	-	57,88	-	-	120,71	43,75	14.779,65	5,71
	Sesuai					89,34		2.232,17	0,86
	Tidak sesuai						43,75	43,75	0,02
	Belum terwujud							12.414,48	4,80
	Pola ruang keliru		57,88			31,37		89,25	0,03
15	Hankam	-	-	-	-	2,49	-	309,25	0,12
	Belum terwujud					2,49		309,25	0,12
16	Hankam	-	-	-	10,89	-	-	27,16	0,01
	Pola ruang keliru				10,89			27,16	0,01
	Jumlah (Ha)	24,81	2.360,47	17,67	19,89	2.117,04	885,18	258.739,55	100,00
	persentase	0,02	2,26	0,02	0,02	2,02	0,85	247,42	0,10
	Sesuai	-	118,54	2,09	-	1.107,13	240,62	200.366,00	77,44

Sumber : Laporan Akhir 2019 Hasil Pengkajian RTR Kab.Belitung Timur 2014 -2034.



Gambar 2. 7 Peta Ketidaksesuaian Lahan Dengan Pola Ruang
Sumber : Laporan Akhir 2019 Hasil Pengkajian RTRW Kab.Belitong Timur 2014 -2034

C. Sarana dan Prasarana Air Bersih

Penyediaan air minum merupakan kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Air bersih menjadi salah satu penentu dalam meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas masyarakat. Masyarakat di Kabupaten Belitong Timur memerlukan air terutama ketersediaan air bersih. Keperluan tersebut baik yang disediakan oleh PDAM atau yang didapat dari sumur bor dan sumur gali milik masyarakat. hal ini sangat terkait dengan kesehatan lingkungan dan masyarakat, karena itu ketersediaannya harus diupayakan. Air minum di Kabupaten Belitong Timur tersedia baik yang dikelola oleh PDAM juga sumur bor dan sumur gali masyarakat. Berikut daerah irigasi di Kabupaten Belitong Timur Tahun 2018 - 2021 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 200 Persentase Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kabupaten Belitong Timur Tahun 2016-2021

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Akses Air Bersih Masyarakat	83,89	86,41	97	92,29	92,29
Akses Air Minum Masyarakat	73,57	77,9	78	78,23	79,78

Sumber: Dinas Kesehatan PP dan KB Kab. Belitong Timur, 2022

Kondisi akses air bersih dan air minum masyarakat berdasarkan data tahun 2020 persentase akses air bersih meningkat sebesar 11 persen dari tahun 2019, peningkatan disebabkan oleh dengan peningkatan gabungan dari persentase

layanan SPAM IKK 9 persen, PDAM 24 persen, SPAM Perdesaan/Pamsimas 5 persen dan Bukan jaringan perpipaan 58 persen. Untuk air minum masyarakat berdasarkan data dari Dinas Kesehatan PP dan KB pada tahun 2020 sebesar 78 persen. Tahun 2021 akses air bersih menurun capaian hanya 92,29 persen disebabkan banyak faktor dan hanya sedikit peningkatan di akses air minum capaiannya 78,23 persen dibandingkan tahun 2020.

Di Tahun 2022 untuk akses air minum masyarakat mengalami peningkatan sebesar 1,55 persen yaitu dari 78,23 persen naik menjadi 79,78 persen, sedangkan untuk air bersih masyarakat masih tetap nilainya yaitu 92,29%.

2.1.4.3 Fokus Iklim Investasi

Untuk menciptakan realisasi investasi yang berkesinambungan diperlukan sebuah iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi yang kondusif dalam perekonomian merupakan harapan bagi masyarakat, investor, pelaku usaha dan pemerintah. Penciptaan iklim investasi yang kondusif tidak hanya berdasarkan faktor ekonomi saja seperti suku bunga, inflasi, Pendapatan Domestik Bruto (PDB), upah minimum, dan nilai tukar. Namun faktor-faktor non-ekonomi lainnya juga sangat berpengaruh, seperti perizinan usaha, kestabilan politik, penegakkan hukum, masalah pertanahan untuk lahan usaha, tingkat kriminalitas dalam masyarakat, demonstrasi buruh, komitmen pemerintahan, komitmen perbankan, perpajakan, dan infrastruktur. Laporan Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) yang dihasilkan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tentang indikator-indikator iklim investasi berdasarkan persepsi pelaku usaha di Kabupaten dan Kota dari 15 provinsi Indonesia menyimpulkan bahwa ada sembilan indikator iklim investasi yang mempengaruhi investasi di Indonesia, yaitu akses lahan usaha dan kepastian usaha, perizinan usaha, interaksi antara pemda dan pelaku usaha, program pengembangan usaha swasta, kapasitas dan integritas Kepala Daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan biaya transaksi lain, kebijakan infrastruktur daerah, keamanan dan penyelesaian konflik, dan kualitas peraturan daerah.

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Bagi pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk menarik para investor guna menanamkan modalnya di daerah, sehingga akan terbuka lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Iklim Investasi di Kabupaten

Belitung Timur selama ini sangat didukung dengan tingkat kriminalitas yang sangat rendah, jumlah demonstrasi yang hampir tidak ada dan pelayanan perizinan yang cepat dengan menggunakan sistem OSS (*one single sistem*) dari BKPM RI. Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang terdaftar bulan desember tahun 2022 di Kabupaten Belitung Timur berjumlah 531 perizinan.

Adapun total nilai realisasi investasi yang tercatat berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitung Timur tahun 2021 diperoleh nilai realisasi investasi sebesar Rp 464.278.618.150,- dengan capaian kinerja sebesar 129,30 persen dari target yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2022 nilai realisasi investasi yang diperoleh sebesar Rp 1.373.350.761.980,- dengan capaian kinerja sebesar 373,82 persen dari target. Investasi masih didominasi oleh investasi di sektor pertanian, pertambangan dan penggalian. Meskipun demikian potensi investasi di bidang kelautan perikanan, pertanian, pariwisata merupakan peluang yang sangat besar untuk para investor menanamkan modalnya di Kabupaten Belitung Timur.

Adapun investasi dalam skala kecil rumah tangga yaitu disektor Air dan Listrik. Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Pelanggan, tahun 2021 di Belitung Timur terdapat 3.502 pelanggan, Air disalurkan 845.181 m³, dengan nilai Rp. 3.109.222.550,-. Sedangkan untuk Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Pelanggan, tahun 2022 di Belitung Timur mengalami peningkatan yakni terdapat 3.666 pelanggan, Air disalurkan 845.181 m³, dengan nilai Rp. 3.171. 171. 025,-. Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya tercatat sebanyak 36.253 pelanggan di tahun 2017 yang kemudian meningkat hingga 44.448 pelanggan di Tahun 2021. Rumah tangga merupakan kategori pelanggan Perumdam terbesar di Kabupaten Belitung Timur yakni sebanyak 3.124 pelanggan atau sebesar 89,21 persen dari total pelanggan. (*BPS: Belitung Timur Dalam Angka 2023*).

Potensi Investasi di Bidang Kelautan Perikanan, Pertanian, Pariwisata merupakan peluang yang sangat besar untuk para investor menanamkan modalnya di Kabupaten Belitung Timur yang selama ini masih mendominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, perkebunan sektor primer, perikanan sektor primer, perdagangan tersier, hotel restoran dan jasa lainnya, konstruksi, industry, kesehatan dan pendidikan. Untuk mengetahui kondisi realisasi investasi di tahun 2019-2022 bisa dilihat pada tabel dibawah.

**Tabel 2. 201 Data Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor
Kabupaten Belitung Timur 2019-2022**

Sektor Perizinan Berusaha	Realisasi Investasi			
	2019	2020	2021	2022
Sektor Pertanian	68.362.111.54 4	324.747.282.11 5	291.959.873.127	723.514.440.604
Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan	0	80.000.000	80.000.000	30.000.000
Sektor Perindustrian	15.650.606.36 1	322.507.173.75 4	89.985.813.023	452.835.989.733
Sektor Perdagangan	1.575.000.000	18.299.636.660	19.329.000.000	6.049.305.825
Sektor Kelautan dan Perikanan	72.866.340	0	0	31.825.753.040
Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	0	0	0
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral/ Pertambangan	72.100.041.97 5	53.508.649.500	51.319.875.000	151.201.759.778
Sektor Ketenaganukliran	0	0	0	0
Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	115.000.000	1.768.125.000	11.604.057.000	3.143.700.000
Sektor Transportasi/Perhubungan	0	0	0	3.547.813.000
Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	0	0	0	0
Sektor Pariwisata	420.552.911	0	0	712.000.000
Sektor Keagamaan	0	0	0	0
Sektor Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem dan Transaksi Elektronik	0	0	0	0
Sektor Pertahanan dan Keamanan	0	0	0	0
Sektor Ketenagakerjaan	0	0	0	0
Jasa Lainnya	0	0	0	490.000.000
Jumlah	158.296.179. 131	720.910.867.0 29	464.278.618.150	1.373.350.761.9 80

Sumber : Dinas PMPTSP Kab.Belitung Timur, Tahun 2022

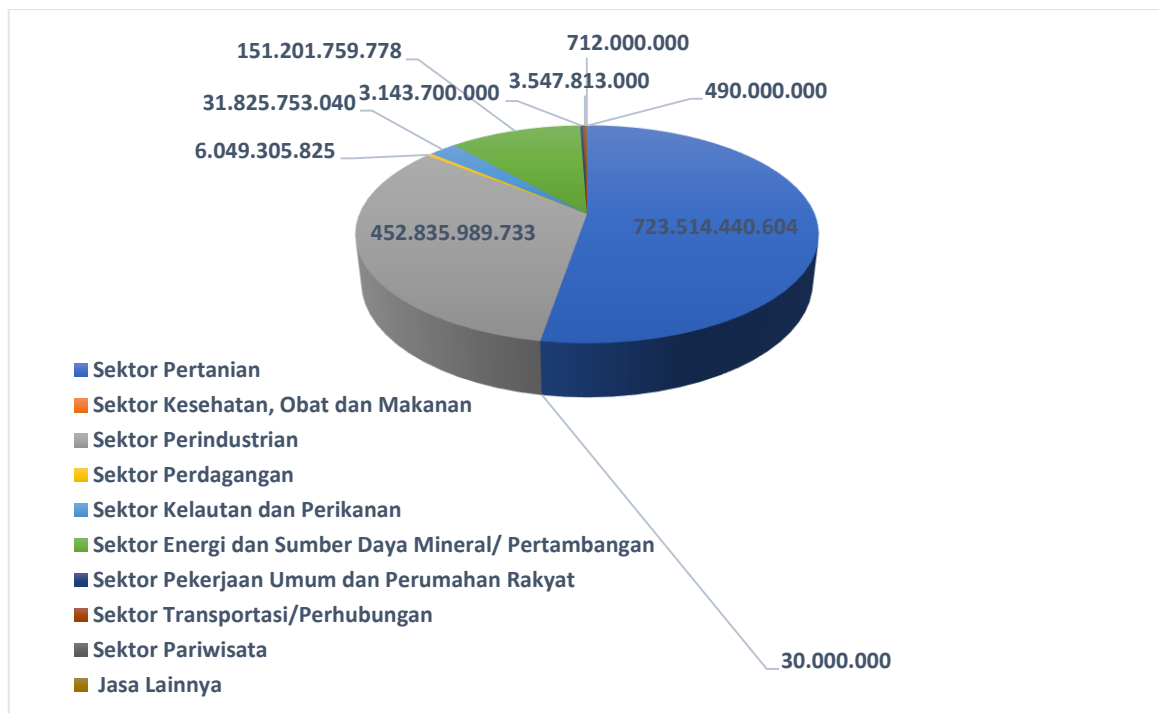
Terjadi peningkatan nilai realisasi investasi tahunan berskala nasional tahun 2022 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 909.072.143.830,-, tahun 2021 diperoleh nilai realisasi investasi sebesar Rp 464.278.618.150,-. Sedangkan pada tahun 2022 nilai realisasi investasi yang diperoleh sebesar Rp 1.373.350.761.980,-. Target nilai realisasi investasi yang ditetapkan dalam RPJMD periode 2021-2026 sebesar Rp 359,057 juta rupiah. Berikut beberapa penyebab yang menyebabkan realisasi nilai investasi daerah meningkat dan melebihi target :

Adanya kegiatan replanting yang di lakukan oleh perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan;

1. Adanya kegiatan *replanting* yang di lakukan oleh perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan;
2. Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM seiring dengan meningkatnya pengawasan pelaksanaan penanaman modal,

dimana pada tahun 2021 bidang Penanaman Modal mendapat dukungan Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk kegiatan penanaman modal;

Untuk peningkatan nilai realisasi investasi tahun 2022, terbesar berada pada sektor pertanian mencapai Rp. 723.514.440.604,-, hal ini disebabkan perusahaan yang bergerak pada bidang usaha ini melakukan replanting atau menanam/mengganti tanaman yang sudah tidak produktif. Penyumbang nilai investasi kedua berada pada sektor perindustrian sebesar Rp. 452.835.989.733,-, kemudian Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral/ Pertambangan sebesar Rp. 151.201.759.778,-. Berikut diagram realisasi investasi berdasarkan sektor Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2022.



Grafik 2. 37 Grafik Realisasi Investasi Tahun 2022

Sumber : Dinas PMPTSP Kab.Belitung Timur, Tahun 2022 (Diolah)

A. Analisa Peningkatan Kinerja

Realisasi indikator investor baru yang berinvestasi tahun 2022 sebesar 37 investor dengan capaian kinerja sebesar 112,12 persen. Sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar 33 investor. Peningkatan jumlah investor baru yang berinvestasi tahun 2022 dibanding tahun 2021 dikarenakan pada tahun 2022 pelaku usaha sudah berani dan optimis melakukan kegiatan usaha barunya didukung oleh iklim usaha di Kabupaten Belitung Timur tahun 2022 sudah semakin membaik dan terkendali dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2022 juga muncul sektor baru dalam berinvestasi yakni sektor perhubungan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 202 Data Investor Baru Tahun 2022

SEKTOR	Jumlah Pelaku Usaha	Rencana Nilai Investasi
Pertambangan/Sektor Primer	4	11.800.000.000
Perkebunan/Sektor Primer	5	2.657.000.000
Perikanan/Sektor Primer	3	10.500.000.000
Perdagangan/Sektor Tersier	10	8.826.500.000
Hotel, Restoran dan Jasa Lainnya/Sektor Tersier	2	1.030.000.000
Konstruksi/Sektor Tersier	5	16.750.516.000
Industri/Sektor Sekunder	7	4.720.500.000
Kesehatan	-	-
Pendidikan	-	-
Perhubungan	-	1.900.000.000
JUMLAH	37	58.184.516.000

Sumber : Data Perizinan diolah (Pelaku usaha $\geq 1M$) Dinas PMPTSP Kab.Belitung Timur

2023

A. Pertanian, Peternakan dan Perikanan

- Pertanian

Luas panen untuk tanaman sayuran adalah luas tanaman yang dipanen sekaligus/habis/dibongkar dan luas tanaman yang dipanen berkali-kali (lebih dari satu kali)/belum habis. Luas panen untuk jenis tanaman bawang daun dan cabai besar mengalami kenaikan pada tahun 2022. Namun untuk luas panen jenis tanaman kacang panjang, kangkung, ketimun, dan tomat mengalami penurunan pada tahun 2022. Adapun beberapa jenis tanaman hortikultura komoditas sayuran mengalami penurunan jumlah produksi antara lain adalah bayam, ketimun, kacang panjang, kangkung. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 203 Luas Panen dan Jumlah Produksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2022

Jenis Tanaman	Tahun					
	2020		2021		2022	
	Ha	Ton	Ha	Ton	Ha	Ton
Bawang Daun	26	870	24	822	28	1.171
Bayam	49	1.997	35	1.925	28	1.190
Buncis	11	104			1	62
Cabai Rawit	66		59	60	54	
Kacang Panjang	59	2.744	42	3.066	27	3.334
Kangkung	66	3.928	58	2.048	43	1.209
Ketimun	65	3.407	45	3.706	35	2.446
Labu Siam		4.741		3.265		1.842
Petsai/Sawi	2					

Jenis Tanaman	Tahun					
	2020		2021		2022	
	Ha	Ton	Ha	Ton	Ha	Ton
Semangka	55	15	48		33	
Terung	9	791	12	1.063	12	850
Tomat	52	794	39	549	26	993
Cabai Besar	10	4103	5	2.235	12	1.462
Cabai Keriting		148	1	217		446

Sumber : (BPS Kabupaten Belitung Timur 2023)

- Perkebunan

Kelapa Sawit merupakan komoditas perkebunan dengan nilai produksi terbesar di Kabupaten Belitung Timur selama Tahun 2022 dengan volume produksi sebesar 7.572,50 ton. Untuk tanaman lada luas area tanamannya dan jumlah produksinya mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Namun untuk tanaman karet hanya mengalami penurunan di luas area tanamannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. 204 Luas Area Tanaman dan Jumlah Produksi Perkebunan di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2022

Uraian	Tahun			
	2021		2022	
	Ha	Ton	Ha	Ton
Kelapa Sawit	5.494,65	5.905,46	5.681,65	7.572,50
Kelapa	193,53	106,18	199,23	167,28
Karet	3.215,71	1.131,32	3.186,21	1.143,81
Kopi	33,37	0,26	62,32	0,3
Lada	3.720,70	1.391,68	3.539,15	1.275,10

Sumber : BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2023

- Peternakan

Terjadi peningkatan populasi hewan ternak jenis sapi potong pada tahun 2022 di Kabupaten Belitung Timur yakni sejumlah 1.679 pada tahun 2021 menjadi 1.806 di tahun 2022. Untuk jumlah populasi kambing mengalami kenaikan pada tahun 2022 namun untuk jumlah produksinya mengalami penurunan. Untuk ayam kampung dan ayam petelur mengalami penurunan jumlah populasi dan jumlah produksinya di tahun 2022. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 205 Jumlah Populasi dan Produksi Ternak dan Unggas di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2022

Uraian	Tahun			
	2021		2022	
	Ekor	Kg	Ekor	Kg
Sapi Perah	3	-	3	-
Sapi Potong	1.806	196.377	1.958	116.406
Kerbau	111	-	108	544
Kuda	3	-	3	-
Kambing	316	9.199	296	6.810
Babi	332	-	313	2.782
Ayam Kampung	325.761	125.838	232.368	116.271
Ayam Petelur	21.854	15.965	14.795	15.270
Ayam Pedaging	71.976	1.683.249	76.666	1.655.251
Itik/Itik Manila	10.055	-	9.503	-

Sumber : BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2023

- Perikanan

Produksi perikanan tangkap terbesar mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 walaupun hanya sebesar Rp. 31.124.878,-. Sedangkan untuk jumlah produksi dan nilai produksi perikanan budidaya juga mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp. 4.173.819,-. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 206 Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2022

Uraian	Satuan	Tahun	
		2021	2022
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	40.983	40.010
Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Ribu (Rupiah)	1.312.501.204	1.343.626.082
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	199.015	285.111
Nilai Produksi Perikanan Budidaya	Ribu (Rupiah)	10.287.025	14.460.844

Sumber : BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2022

C. Pariwisata

Pada Tahun 2022, terdapat 1 Hotel Bintang dan 27 Hotel/Akomodasi Non Bintang untuk mendukung kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Belitung Timur. (Sumber : BPS Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka 2023). Obyek wisata dari Budaya, Bahari, Cagar alam, alam, sejarah, religi, kuliner buatan, sangat beragam dan dikunjungi wisatawan baik domestik dan mancanegara. Tahun 2022 jumlah obyek wisata budaya tetap sama jumlahnya, untuk jumlah obyek wisata bahari, cagar alam, alam, sejarah, buatom mengalami peningkatan. Sedangkan untuk

jumlah obyek wisata religi dan jumlah geosite mengalami penurunan. Adapun untuk jumlah kunjungan wisatawan domestik mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke 2022, namun untuk jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 207 Pariwisata Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018-2021

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Objek Wisata Budaya	Objek	5	5	17	17	17
Jumlah Objek Wisata Bahari	Objek	98	98	23	23	27
Jumlah Objek Wisata Cagar Alam	Objek	2	2	7	7	8
Jumlah Objek Wisata Alam	Objek	114	114	43	46	53
Jumlah Objek Wisata Sejarah	Objek	12	12	3	3	7
Jumlah Objek Wisata Religi	Objek	8	8	8	8	7
Jumlah Objek Wisata Kuliner	Objek	3	3	-	0	1
Jumlah Objek Wisata Buatan	Objek	27	27	19	10	17
Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	Orang	344.098	265.917	67.755	36.802	58.112
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	10.898	13.569	4.655	480	115
Jumlah Geosite	Objek	5	7	7	7	10

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2023

D. Angka Kriminal

Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investasi asing di Indonesia pada umumnya, dan di Kabupaten Belitung Timur pada khususnya. Indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan iklim berinvestasi yang baik salah satunya adalah minimnya jumlah kriminalitas yang terjadi suatu wilayah. Angka kriminalitas mempengaruhi investor yang akan masuk ke suatu wilayah. Semakin rendah kriminalitas, maka semakin tinggi pula ketertarikan investor untuk menanamkan investasi di daerah tersebut. Peristiwa tindak pidana yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian.

Kasus kriminal yang terjadi di Kabupaten Belitung Timur selama 3 (tiga) tahun kondisinya trennya naik turun walaupun dengan jumlah yang cukup sedikit, yang secara umum tergambar diberbagai Kecamatan. Tahun 2021 ada 67 kasus kriminal, pada tahun 2022 meningkat dengan jumlah 79 kasus. Data

lengkap tentang angka kriminalitas di Kabupaten Belitung Timur disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 208 Jumlah tindak pidana menurut Kepolisian Resor di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2022

Unit Kerja	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan		
	2020	2021	2022
Kepolisian Resor Belitung Timur	32	67	79
Kepolisian Sektor Manggar	9	12	5
Kepolisian Sektor Gantung	18	19	10
Kepolisian Sektor Dendang	2	1	9
Kepolisian Sektor Kelapa Kampit	5	5	3

Sumber: Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka, 2023

Jumlah tindak pidana pada tahun 2020-2022 di wilayah hukum polres Belitung Timur mengalami naik turun, sedangkan untuk sektor Manggar, Gantung dan Kelapa Kampit mengalami penurunan sedangkan untuk sektor Dendang mengalami kenaikan. Untuk persentase penyelesaian terhadap tindak pidana menurut kepolisian di Kabupaten Belitung Timur dari tahun 2020-2022 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 209 Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2022

Unit Kerja	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana		
	2020	2021	2022
Kepolisian Resor Belitung Timur	109,38	97,01	97,46
Kepolisian Sektor Manggar	55,55	75	40
Kepolisian Sektor Gantung	94,44	73,68	130
Kepolisian Sektor Dendang	150	100	33,33
Kepolisian Sektor Kelapa Kampit	140	60	0

Sumber: Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka, Tahun 2023

Jumlah tindak pidana di wilayah hukum Polres Belitung Timur tahun 2020 sebanyak 67 kasus meningkat menjadi hanya 79 kasus. Hal ini harus ada pencegahan berupa upaya *preventif* dan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam penjagaan keamanan lingkungan sekitar dari berbagai kejahatan dan penyakit masyarakat lainnya. Selain itu didukung masih berlimpahnya daya dukung sumber daya alam untuk mencari penghasilan atau nafkah bagi para penduduk seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, pertambangan serta sektor jasa lainnya.

E. Kemudahan Perizinan

Pelayanan perizinan di Kabupaten Belitung Timur saat ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan. Dengan metode satu pintu ini diharapkan akan lebih mempermudah pelayanan dan meningkatkan pelayanan melalui *Online Single Submission* (OSS). Investor baru merupakan investor/penanam modal/pelaku usaha yang telah disetujui izin usahanya dan berencana menanamkan modal usahanya dengan dengan nilai izin investasi/modal usaha minimal 1 (Satu) milyar rupiah. Setiap pelaku usaha pada saat mendaftarkan izin usahanya melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) maupun versi *Risk Based Approach* (RBA) untuk mengisi rencana investasinya. Berikut jumlah penerbitan izin di Kabupaten Belitung Timur dari tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 210 Jumlah Penerbitan Izin Tahun 2018-2022

Jenis Perizinan	2018	2019	2020	2021	2022
PerizinanJasa Usaha/Perizinan Usaha	550	622	531	717	527
Perizinan Tertentu/Perizinan Dasar dan Non Perizinan	251	207	342	1.890	1.491
Jumlah	801	829	873	2.607	2.018

Sumber : DPMPSTPP Kabupaten Belitung, Timur 2023

Jumlah penerbitan izin pada tahun 2018 - 2022 mengalami naik turun. Pada tahun 2021 jumlah perizinan dan non perizinan melalui OSS mengalami peningkatan yang sangat tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu berjumlah 2.607 sehingga diharapkan mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Belitung Timur. Namun untuk tahun 2022 jumlah perizinan dan non perizinan mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari jumlah perizinan jasa usaha/perizinan usaha sebesar 527 izin dan jumlah perizinan tertentu/perizinan dasar non perizinan berjumlah 1.491 izin. Pada tahun 2022 jumlah perizinan dasar dan non perizinan berjumlah 191 izin. Sedangkan untuk perizinan usaha (termasuk izin praktik tenaga kesehatan) berjumlah 336 izin. Untuk jumlah izin melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) semester 1 (SMT I) berjumlah 331 izin dan semester 2 (SMT II) berjumlah 1.160 izin. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 211 Rekap Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah Izin
1	Perizinan Dasar dan Non Perizinan	191
2	Perizinan Usaha (Termasuk Izin Praktik Tenaga Kesehatan)	336
3	Data Perizinan melalui OSS SMT I	331
4	Data Perizinan melalui OSS SMT II	1.160
Jumlah		2.018

Sumber : DPMPSTPP Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2023

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah. Manusia merupakan subjek dan objek dalam pembangunan. Oleh karenanya pembangunan SDM harus diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, professional dan mampu memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan daerah. Disamping itu tingkat pendidikan yang ditempuh mempengaruhi cara fikir dan aktivitas suatu masyarakat dalam sebuah wilayah.

A. Kualitas Tenaga Kerja

Berdasarkan data hasil proyeksi penduduk interim 2021-2023 pada kondisi pertengahan tahun, Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Timur sebanyak 130.463 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 106, jika dibandingkan dengan Jumlah Penduduk 2021, jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 1,48 persen. Jumlah penduduk usia 15 Tahun ke atas pada Tahun 2022 berjumlah 101.742 jiwa dengan komposisi 68.536 jiwa merupakan angkatan kerja dan 33.206 jiwa bukan angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2022 sebesar 2,50 persen mengalami penurunan dari kondisi pada tahun 2021 dengan TPT sebesar 3,78 persen. (BPS Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023).

Pendidikan merupakan suatu faktor yang sangat menentukan kualitas tenaga kerja disuatu daerah. Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidaksesuaian keahlian dan ketrampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan memicu rendahnya penyerapan tenaga kerja. Perkembangan jumlah penduduk menurut jenis kegiatan dan pendidikan yang merupakan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja di Kabupaten Belitung Timur serta jumlah penduduk berdasarkan Kecamatan yang dirilis melalui Belitung Timur Dalam Angka oleh BPS Belitung Timur Tahun 2023:

Tabel 2. 212 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas (Angkatan Kerja) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran	Angkatan Kerja	Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
0	29.106	84	29.190	99,71
1	13.294	262	13.556	98,07
2	18.670	1.092	19.762	94,47
3	5.751	277	6.028	95,40
Jumlah Total	66.821	1.715	68.536	97,50

Sumber : BPS Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

Tabel 2. 213 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas (bukan Angkatan Kerja) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bukan Angkatan Kerja			Jumlah	Penduduk Usia Kerja	Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja
	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya			
0	244	12.338	1.990	14.572	43.762	66,70
1	5.319	4.039	80	9.438	22.994	58,95
2	51	6.951	868	7.870	27.632	71,52
3	0	1.326	0	1.326	7.354	81,97
Total	5.614	24.654	2.938	33.206	101.742	67,36

Sumber : BPS Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

Catatan :

0. ≤ Sekolah Dasar (SD)

1. Sekolah Menengah Pertama
2. Sekolah Menengah Atas
3. Perguruan Tinggi

Jumlah angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2021 untuk penduduk yang bekerja berjumlah 66.713 orang dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan berjumlah 66.821 orang. Sedangkan untuk penduduk yang pengangguran pada tahun 2021 berjumlah 2.919 orang dan mengalami penurunan pada tahun 2022 yang berjumlah 1.715 orang. Adapun untuk jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan dan kelamin pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 214 Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun keatas menurut Jenis Kegiatan dan Kelamin di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	45.868	23.668	68.536
Bekerja	43.851	22.970	66.821
Pengangguran Terbuka	1.017	698	1.715
Bukan Angkatan Kerja	7.683	25.523	33.206
Sekolah	2.764	2.850	5.614
Mengurus Rumah Tangga	3.124	21.530	24.654
Lainnya	1.795	1.143	2.938
Jumlah	52.551	49.191	101.742

Sumber : BPS Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

Jumlah angkatan kerja di tahun 2022 sejumlah 68.536 orang menurun sebanyak 793 orang dibandingkan dengan tahun 2021 dengan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 69.332 orang. Hal ini disebabkan banyaknya masyarakat yang berhenti dari perusahaan atau pabrik yang mereka selama ini bekerja dan kemudian mereka bekerja sendiri dengan membuka tambang timah yang dikenal dengan namanya “suntik”. Maraknya tambang timah “suntik” ini membuat masyarakat giat bekerja terutama laki-laki yang pada tahun 2021 jumlah angkatan kerjanya berjumlah 42.556 orang meningkat menjadi 43.851 orang pada tahun 2022. Namun dengan adanya fenomena tersebut pemerintah harus mampu mencari solusi yang terbaik jikalau tambang timah “suntik” milik masyarakat sudah tidak beroperasi lagi. Akan banyaknya pengangguran jikalau

tambang timah “suntik” ini sudah tidak beroperasi atau sumber daya dari timah tersebut habis. Oleh karena itu untuk menampung para angkatan kerja yang menganggur dan belum mendapat pekerjaan pemerintah daerah berperan dalam memberikan solusi seperti membuka peluang usaha melalui menciptakan kewirausahaan yang survival didampingi dan terus dibina agar bisa berkelanjutan dan lain sebagainya.

Jika dilihat dari sisi tenaga kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tertinggi pada tahun 2022 terdapat di Bangka Barat, yaitu 70,23 persen, sedangkan TPAK terendah terdapat pada Belitung yaitu 65,25 persen. Pada tahun 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi berada di Pangkalpinang, yaitu sebesar 5,90 persen sedangkan TPT terendah di Belitung Timur sebesar 2,50 persen. Adapun untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (persen), *Labor Force Participation Rate by Regency/Municipality in Kepulauan Bangka Belitung Province* 2018–2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 215 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (persen) Tahun 2017-2021**

Kabupaten/Kota regency/municipality	2018	2019	2020	2021	2022
Bangka	64,10	64,30	63,93	62,68	68,81
Belitung	70,36	68,74	69,32	66,28	65,25
Bangka Barat	70,47	66,99	65,76	65,98	70,23
Bangka Tengah	70,99	69,65	70,85	66,24	66,47
Bangka Selatan	67,40	68,12	68,86	68,96	66,71
Belitung Timur	71,93	71,37	71,33	69,23	67,36
Pangkal Pinang	63,64	68,35	62,37	65,16	65,78
Kepulauan Bangka Belitung	67,79	67,89	66,89	65,88	67,38

Sumber : BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2023

Kabupaten Belitung Timur dibandingkan dengan 7 Kabupaten/Kota di Tahun 2022 yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk tertinggi angkatan kerja penduduknya disebabkan masih banyaknya usia produktif dan banyaknya pendatang dari luar kabupaten dan pulau Belitung yang bekerja sektor formal dan informal dan yang menjadi penambang Timah

B. Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong maju atau yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting, semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan

tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan Kerja).

Rumusan

Rasio ketergantungan adalah suatu ukuran yang menjelaskan mengenai beban yang harus ditanggung oleh pekerja. Rasio ini menghitung jumlah penduduk non produktif dan membaginya dengan jumlah penduduk produktif. Dari hasil perhitungan ini, didapatkan berapa jumlah penduduk non produktif yang harus ditanggung oleh penduduk produktif. Indikator yang kerap disebut sebagai *rasio ketergantungan* ini berguna untuk mengidentifikasi apakah suatu daerah memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi atau tidak. Jika suatu daerah memiliki angka ketergantungan yang tinggi, maka potensi pertumbuhan ekonominya tidak akan terlalu tinggi. Sedangkan, jika *rasio ketergantungan* suatu wilayah tergolong rendah, maka potensi pertumbuhannya besar karena banyak terdapat masyarakat usia produktif. Adapun rumus dari menghitung total rasio ketergantungan adalah seperti dibawah ini :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 0-14 dan Usia >64 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 15-64}} \times 100$$

Interpretasi

Misalnya rasio ketergantungan adalah sebesar 54,7 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 55 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Tabel 2. 216 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Belitung Timur 2018-2022

Uraian	Tahun					Satuan
	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Penduduk Usia <15 Tahun	29.579	29.605	28.964	28.863	28.852	Jiwa
Jumlah Penduduk usia >64 Tahun	8.224	8.702	7.887	8.409	8.973	Jiwa
Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1)&(2)	37.803	38.307	36.851	37.272	37.825	Jiwa
Jumlah Penduduk Usia Produktif 15-64 Tahun	86.752	87.894	90.167	91.292	92.638	Jiwa
Rasio Ketergantungan (3)/(4)	43,57	43,58	40,87	40,83	40,83	Jiwa

Sumber: BPS Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2023

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 rasio ketergantungan di Kabupaten Belitung Timur sebesar 43,58 artinya 100 orang penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 44 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Sedangkan pada tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 mengalami penurunan rasio ketergantungan yaitu 40,87 artinya 100 orang penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 41 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 DAN REALISASI RPJMD

2.2.1 Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

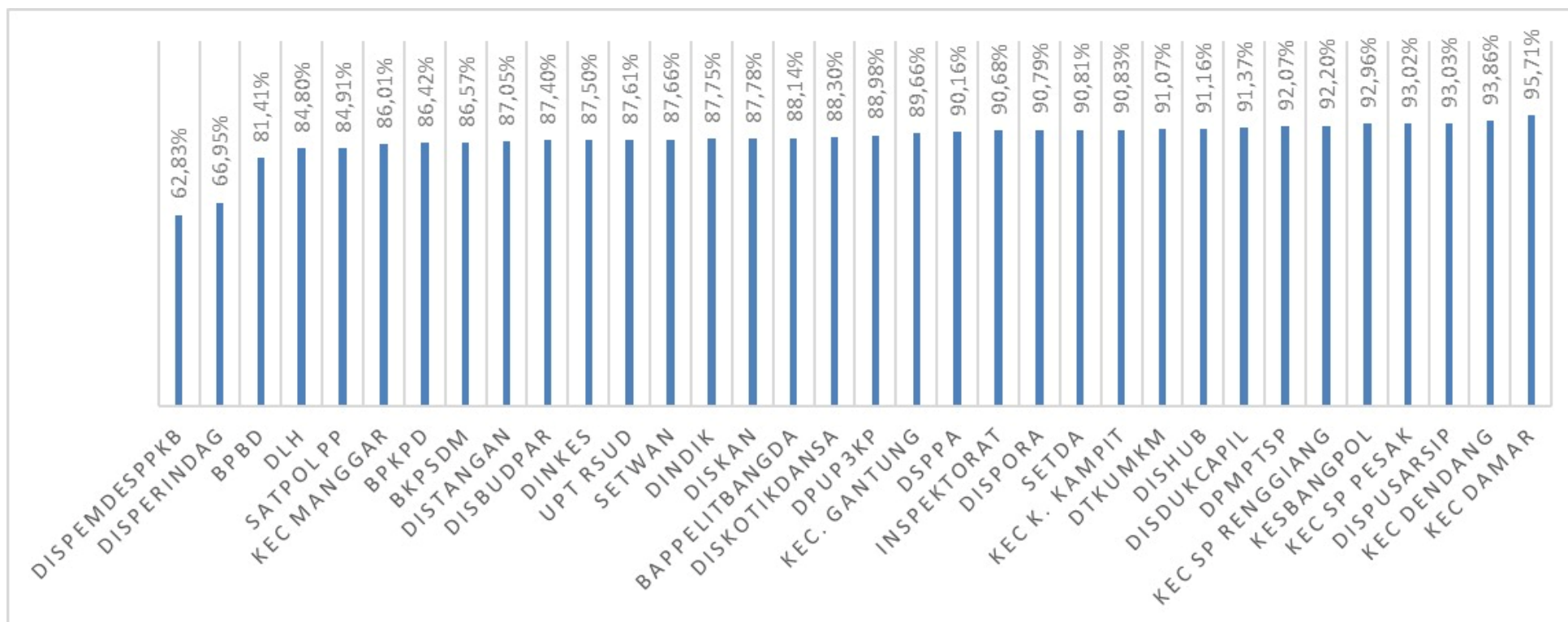
Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 terhadap Penyusunan RKPD Kab Belitung Timur Tahun 2025 bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif telah dipedomani Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS pada Tahun perencanaan selanjutnya di Tahun 2023 sebagai landasan penyusunan RAPBD Tahun 2025. Sedangkan, evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2023 bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2025 dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional Tahun 2025.

Melalui evaluasi ini, dapat digambarkan bahwa capaian rata-rata kinerja Perangkat Daerah sampai dengan pada Triwulan IV sebesar 91,73% mendapatkan predikat Sangat Tinggi.



Grafik 2. 38 Jumlah PD berdasarkan Predikat Kinerja Kabupaten Belitung Timur Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

Sumber : Monev RKPD Triwulan IV, Tahun 2023



Grafik 2. 39 Persentase Realisasi Anggaran, Kegiatan dan Capaian Rata-Rata Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitong Timur Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2023

Sumber : Monev RKPD Triwulan IV, Tahun 2023

Tabel 2. 217 Rincian Target dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan dan Target Kinerja Output Program Berdasarkan PD Kabupaten Belitung Timur Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

OPD	APBD	P-APBD	Realisasi Keuangan				Capaian Kegiatan / Proses		Rata-Rata Capaian Kinerja	
			Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	% Keuangan	Predikat	% Kegiatan	Predikat	% Kinerja	Predikat
Dinas Sosial, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak	12.704.049.622	11.550.279.614	10.414.228.467	1.136.051.147	90,16%	Sangat Tinggi	94,51%	Sangat Tinggi	90,23 %	Sangat Tinggi
Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	3.483.288.754	2.188.559.566	1.294.729.188	62,83%	Rendah	93,26%	Sangat Tinggi	91,43 %	Sangat Tinggi
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.462.966.196	12.093.138.400	11.134.396.152	958.742.248	92,07%	Sangat Tinggi	96,51%	Sangat Tinggi	93,17 %	Sangat Tinggi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	3.034.860.190	2.031.801.544	1.003.058.646	66,95%	Sedang	78,98%	Tinggi	94,93 %	Sangat Tinggi
Dinas Pendidikan	226.901.767.018	244.564.752.812	214.612.010.505	29.952.742.307	87,75%	Tinggi	97,95%	Sangat Tinggi	92,55 %	Sangat Tinggi
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	90.994.588.275	99.849.657.249	86.030.744.274	13.818.912.975	88,98%	Tinggi	98,85%	Sangat Tinggi	97,59 %	Sangat Tinggi

OPD	APBD	P-APBD	Realisasi Keuangan				Capaian Kegiatan / Proses		Rata-Rata Capaian Kinerja	
			Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	% Keuangan	Predikat	% Kegiatan	Predikat	% Kinerja	Predikat
Dinas Lingkungan Hidup	14.446.255.176	16.271.830.464	13.797.764.418	2.474.066.046	84,80%	Tinggi	88,91%	Tinggi	72,33 %	Sedang
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.871.050.192	6.066.359.441	5.542.968.438	523.391.003	91,37%	Sangat Tinggi	97,49%	Sangat Tinggi	96,87 %	Sangat Tinggi
Dinas Perhubungan	18.849.565.543	21.893.679.876	19.958.794.173	1.934.885.703	91,16%	Sangat Tinggi	96,99%	Sangat Tinggi	96,76 %	Sangat Tinggi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10.965.902.882	12.402.791.145	10.951.571.148	1.451.219.997	88,30%	Tinggi	93,55%	Sangat Tinggi	99,36 %	Sangat Tinggi
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	21.233.008.876	25.999.808.862	23.606.426.242	2.393.382.620	90,79%	Sangat Tinggi	90,81%	Sangat Tinggi	99,77 %	Sangat Tinggi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	20.206.586.464	19.505.384.392	17.047.535.734	2.457.848.658	87,40%	Tinggi	98,09%	Sangat Tinggi	92,35 %	Sangat Tinggi
Dinas Perpustakaan	5.256.245.924	5.625.416.312	5.233.511.327	391.904.985	93,03%	Sangat Tinggi	99,21%	Sangat Tinggi	99,76 %	Sangat Tinggi
Dinas Perikanan	12.175.447.517	12.257.133.350	10.759.372.177	1.497.761.173	87,78%	Tinggi	97,44%	Sangat Tinggi	95,81 %	Sangat Tinggi
Sekretariat Daerah	45.564.549.442	49.681.111.740	45.114.263.570	4.566.848.170	90,81%	Sangat Tinggi	99,30%	Sangat Tinggi	95,95 %	Sangat Tinggi
Dinas Kesehatan	113.578.008.852	117.825.895.444	103.102.003.948	14.723.891.496	87,50%	Tinggi	98,13%	Sangat Tinggi	97,95 %	Sangat Tinggi
Sekretariat DPRD	36.394.414.039	38.818.619.357	34.026.995.818	4.791.623.539	87,66%	Tinggi	93,80%	Sangat Tinggi	93,09 %	Sangat Tinggi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	127.357.761.348	140.604.181.436	121.512.857.457	19.091.323.979	86,42%	Tinggi	99,96%	Sangat Tinggi	68,98 %	Sedang
Badan Kepegawaian dan Pengembangan	10.200.036.183	10.372.462.065	8.979.645.455	1.392.816.610	86,57%	Tinggi	89,56%	Tinggi	99,42 %	Sangat Tinggi

OPD	APBD	P-APBD	Realisasi Keuangan				Capaian Kegiatan / Proses		Rata-Rata Capaian Kinerja	
			Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	% Keuangan	Predikat	% Kegiatan	Predikat	% Kinerja	Predikat
n Sumber Daya Manusia										
Inspektorat	9.676.304.584	10.167.519.962	9.220.140.631	947.379.331	90,68%	Sangat Tinggi	97,00%	Sangat Tinggi	97,21 %	Sangat Tinggi
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	11.864.302.380	22.195.397.430	20.631.906.412	1.563.491.018	92,96%	Sangat Tinggi	93,30%	Sangat Tinggi	94,91 %	Sangat Tinggi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.027.328.654	7.151.508.392	5.822.026.323	1.329.482.069	81,41%	Tinggi	90,31%	Sangat Tinggi	99,45 %	Sangat Tinggi
Satuan Polisi Pamong Praja	7.346.545.318	9.459.781.655	8.031.874.828	1.427.906.827	84,91%	Tinggi	99,41%	Sangat Tinggi	97,60 %	Sangat Tinggi
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.455.675.930	10.648.455.978	9.385.489.207	1.262.966.771	88,14%	Tinggi	93,00%	Sangat Tinggi	85,64 %	Tinggi
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.736.613.872	7.443.508.576	6.779.121.096	664.387.480	91,07%	Sangat Tinggi	100,00 %	Sangat Tinggi	99,37 %	Sangat Tinggi
Dinas Pertanian dan Pangan	13.678.861.220	14.567.371.814	12.681.310.755	1.886.061.059	87,05%	Tinggi	99,19%	Sangat Tinggi	94,97 %	Sangat Tinggi
Kecamatan Manggar	3.146.802.818	4.024.958.032	3.461.794.437	563.163.595	86,01%	Tinggi	87,65%	Tinggi	97,89 %	Sangat Tinggi
Kecamatan Gantung	3.602.302.746	3.754.531.846	3.366.188.583	388.343.263	89,66%	Tinggi	90,00%	Tinggi	94,10 %	Sangat Tinggi
Kecamatan Kelapa Kampit	3.625.288.400	3.994.952.493	3.628.598.048	366.354.445	90,83%	Sangat Tinggi	95,68%	Sangat Tinggi	99,06 %	Sangat Tinggi
Kecamatan Simpang Pesak	2.769.407.598	3.080.142.750	2.865.055.501	215.087.249	93,02%	Sangat Tinggi	98,46%	Sangat Tinggi	98,98 %	Sangat Tinggi
Kecamatan Damar	2.852.945.709	3.090.916.531	2.958.290.483	132.626.048	95,71%	Sangat Tinggi	98,38%	Sangat Tinggi	94,86 %	Sangat Tinggi

OPD	APBD	P-APBD	Realisasi Keuangan				Capaian Kegiatan / Proses		Rata-Rata Capaian Kinerja	
			Realisasi Keuangan	Sisa Anggaran	% Keuangan	Predikat	% Kegiatan	Predikat	% Kinerja	Predikat
Kecamatan Simpang Renggang	2.841.703.010	2.904.674.510	2.677.971.895	226.702.615	92,20%	Sangat Tinggi	93,20%	Sangat Tinggi	96,42 %	Sangat Tinggi
Kecamatan Dendang	3.044.169.000	3.338.011.000	3.132.975.538	205.035.462	93,86%	Sangat Tinggi	99,56%	Sangat Tinggi	88,03 %	Tinggi
UPT RSD Kabupaten Belitung Timur	81.278.839.497	92.626.812.315	81.152.264.275	11.474.548.040	87,61%	Tinggi	99,99%	Sangat Tinggi	97,94 %	Sangat Tinggi
	956.109.294.285	1.050.349.194.187	921.840.458.425	128.508.735.762	87,77%	Tinggi	96,93%	Sangat Tinggi	91,73 %	Sangat Tinggi

Sumber : Monev RKPD Triwulan IV, Tahun 2023

Keterangan:

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

2.2.2 Capaian Target Kinerja Tahunan RPJMD 2021-2026

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan membandingkan target, realisasi dan capaian program dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Tahun N terhadap target akhir RPJMD 2021-2026 dengan mencantumkan status capaiannya.

Adapun status capaian digambarkan dalam simbol penanda dengan bentuk dan warna yang berbeda untuk memudahkan evaluasi. Simbol penanda yang digunakan adalah sebagai berikut,

Tabel 2. 218 Kode Capaian beserta Status Capaian Kinerja Tahunan dan Status Capaian Kinerja RPJMD

Status Capaian kinerja Tahunan		Status Capaian Kinerja RPJMD	
Kode Capaian	Kategori	Kode Capaian	Kategori
T	Tinggi (85 - 100)	TT	Telah Tercapai (100)
S	Sedang (50 - 84)	AT	Akan Tercapai (50 - 99)
R	Rendah (< 50)	UK	Upaya Keras (< 50)

Tabel 2. 219 Capaian Target RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGI- ATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian kinerja RKPD tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan			Status Capaian kinerja Tahun n	Target program/ kegiatan RKPD Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Status Capaian kinerja RPJMD	Perangkat Daerah penanggungja- wab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target sampai dengan tahun 2023		
1		2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9	10	11 = 5 + 7	12 = 11/4 x 100%	13	14
	ASPEK PELAYANAN UMUM													
A.	Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar													
1	Pendidikan													
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar TK/PAUD	Persen	78,2	82,14	66,2	84,56	128	T	70,2	84,56	108,13	TT	Dinas Pendidikan
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	Persen	115	100,94	106	99,05	93,44	T	109	99,05	86,13	AT	Dinas Pendidikan
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	Persen	99	88,02	94	90,47	96,24	T	96	90,47	91,38	AT	Dinas Pendidikan
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Pendidikan yang ditamatkan (SMP)	Persen	19,5	14,07	16,5	14,07	85,27	T	17,5	14,07	72,15	AT	Dinas Pendidikan
5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni PAUD	Persen	74,23	52,11	64,14	52,11	81,24	S	67,34	52,11	70,20	AT	Dinas Pendidikan
6	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni SD	Persen	95	88,85	90	88,85	98,72	T	91	88,85	93,53	AT	Dinas Pendidikan
7	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi Murni SMP	Persen	70	45,78	58	45,78	78,93	S	62	45,78	65,40	AT	Dinas Pendidikan
8	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah dikdas	Persen	96	95,92	84	95,92	114,19	T	88	95,92	99,92	AT	Dinas Pendidikan
9	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SD	Persen	0	0,07	0,03	0,07	-33,33	R	0,01	0,07	(33,33)	AT	Dinas Pendidikan
10	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMP	Persen	0,25	2,08	0,86	2,08	-41,86	R	0,66	2,08	12,02	UK	Dinas Pendidikan
11	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Kelulusan SD	Persen	100	100	100	100	100	T	100	100	100	TT	Dinas Pendidikan
12	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Kelulusan SMP	Persen	100	99,55	100	99,55	99,55	T	100	99,55	99,55	AT	Dinas Pendidikan
13	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Melanjutkan SD Ke SMP	Persen	100	93,88	98	93,88	95,80	T	99	93,88	93,88	AT	Dinas Pendidikan

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian kinerja RKPD tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan			Status Capaian kinerja Tahunan	Target program/ kegiatan RKPD Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Status Capaian kinerja RPJMD	Perangkat Daerah penanggungjawab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023 11 = 5 + 7	Tingkat capaian realisasi target sampai dengan tahun 2023 12 = 11/4 x 100%		
1		2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9	10	11 = 5 + 7	12 = 11/4 x 100%	13	14
14	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Melanjutkan SMP Ke SMA	Persen	100	98,77	100	98,77	98,77	T	100	98,77	98,77	AT	Dinas Pendidikan
15	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	Persen	100	86,54	100	86,54	86,54	T	100	86,54	86,54	AT	Dinas Pendidikan
16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	Persen	100	87,5	100	87,5	87,50	T	100	87,50	87,50	AT	Dinas Pendidikan
17	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SD)	Rasio	175	78,31	172	78,31	45,53	R	173	78,31	44,75	UK	Dinas Pendidikan
18	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah (SMP)	Rasio	40,6	39,04	40,3	39,04	96,87	T	40,4	39,04	96,16	AT	Dinas Pendidikan
19	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN	Rasio guru/murid sekolah pendidikan SD per 10.000	Rasio	16	16,62	15	16,62	111	T	15	16,62	100	TT	Dinas Pendidikan
20	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN	Rasio guru/murid sekolah pendidikan SMP per 10.000	Rasio	16	17,5	15	17,5	117	T	16	17,50	100	TT	Dinas Pendidikan
21	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN	Rasio guru /murid per kelas rata-rata sekolah Pendidikan Dasar	Rasio	16	14,38	15	14,38	96	T	15	14,38	89,88	AT	Dinas Pendidikan
22	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Proporsi murid kelas I yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	16	97,06	15	9,7	65	S	16	9,70	100	TT	Dinas Pendidikan
23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	100	100	98	100	102	T	99	100	100	TT	Dinas Pendidikan
24	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	100	100	100	100	100	T	100	100	100	TT	Dinas Pendidikan
25	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	Persen	100	88,82	99	88,82	90	T	100	88,82	100	TT	Dinas Pendidikan
26	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN	Guru yang bersertifikat pendidik	Persen	87,65	62,47	87,02	62,47	71,79	S	87,23	62,47	71,27	AT	Dinas Pendidikan
27	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam	Persen	70,76	88,17	69,71	88,17	126,48	T	70,06	88,17	124,60	TT	Dinas Pendidikan

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian kinerja RKPD tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan			Status Capaian kinerja Tahun n	Target program/ kegiatan RKPD Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Status Capaian kinerja RPJMD	Perangkat Daerah penanggungjawab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target sampai dengan tahun 2023		
1		2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9	10	11 = 5 + 7	12 = 11/4 x 100%	13	14
		pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)												
28	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100	34,98	100	34,98	34,98	R	100	34,98	34,98	UK	Dinas Pendidikan
29	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	100	87,58	100	87,58	87,58	T	100	87,58	87,58	AT	Dinas Pendidikan
30	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM & PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SD/Mi berakreditasi minimal A	Persen	100	13,33	100	13,33	13,33	R	100	13,33	13,33	UK	Dinas Pendidikan
31	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM & PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal A	Persen	34,29	44	22,86	44	192,48	T	26,67	44,00	128,32	TT	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan													
1		Kabupaten Sehat	Predikat	Wistara	-	Wiwirda	Padapa	Padapa		Wiwirda	Padapa	Padapa	AT	Dinkes PPKB
2		Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Persen	97,8	98,45	96,8	98,89	102	T	97	98,89	101	TT	Dinkes PPKB
3		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1.000 KH	8,95	11,8	9,7	14,17	53,92	S	9,5	14,17	63,16	AT	Dinkes PPKB
4		Angka Kelangsungan hidup bayi	Per 1.000 KH	991,05	988,2	990,3	985,83	100	T	990,5	985,83	99,47	AT	Dinkes PPKB
5		Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	Per 1.000 KH	13	14,6	13,5	14,17	95	T	13,4	14,17	91,74	AT	Dinkes PPKB
6		Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	Per 1.000 KH	6,5	8,4	7	12,6	20,00	T	6,9	12,60	51,59	AT	Dinkes PPKB
7		Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 KH	49	168,44	1,3	1,57	79,23	S	120	85,01	57,64	UK	Dinkes PPKB
8		Rasio Posyandu persatuan balita	Per 1.000 balita	1,15	1,89	1,2	1,81	49,17	R	1,2	1,81	63,54	AT	Dinkes PPKB

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian kinerja RKPD tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan			Status Capaian kinerja Tahunan	Target program/ kegiatan RKPD Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Status Capaian kinerja RPJMD	Perangkat Daerah penanggungjawab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023 11 = 5 + 7	Tingkat capaian realisasi target sampai dengan tahun 2023 12 = 11/4 x 100%		
1		2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9	10	11 = 5 + 7	12 = 11/4 x 100%	13	14
9		Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	22,22	22,70	22,9	23,25	98,47	T	22,6	23,25	95,57	AT	Dinkes PPKB
10		Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	0,75	0,78	0,79	0,77	102,53	T	0,78	0,77	97,40	AT	Dinkes PPKB
11		Rasio dokter (umum dan gigi) per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	47,4	64,54	48	51,92	91,83	T	47,6	51,92	91,29	AT	Dinkes PPKB
12		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	62,22	64,54	64	58,89	107,98	T	63,5	58,89	105,65	TT	Dinkes PPKB
13		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	96	106,96	96	95,99	99,99	T	96	95,99	99,99	AT	Dinkes PPKB
14		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	98	100,73	98	90,04	91,88	T	98	90,04	91,88	AT	Dinkes PPKB
15		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	100	98,2	100	100	100	T	100	100	100	TT	Dinkes PPKB
16		Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan	Persen	100	100	100	100	100	T	100	100	100	TT	Dinkes PPKB
17		Persentase anak usia 1 tahun yang dimunisasi campak	Persen	95	97,1	93	95,85	103	T	93	95,85	100	TT	Dinkes PPKB
18		Non Polio AFP rate 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	1,48	0	1,48	0	0		1,48	0,00	0,00		Dinkes PPKB
19		Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	T	100	100	100	TT	Dinkes PPKB
20		Cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	T	100	100	100	TT	Dinkes PPKB
21		Endemita diare yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	T	100	100	100	TT	Dinkes PPKB
22		Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Per 100.000 penduduk	1,57	0,9	1,64	0,9	54,88	S	1,62	0,90	57,32	AT	Dinkes PPKB
23		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	T	100	100	100	TT	Dinkes PPKB

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian kinerja RKPD tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan			Status Capaian kinerja Tahunan	Target program/ kegiatan RKPD Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Status Capaian kinerja RPJMD	Perangkat Daerah penanggungjawab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target sampai dengan tahun 2023		
1		2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9	10	11 = 5 + 7	12 = 11/4 x 100%	13	14
24	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	81,52	100	85,26	85,26	T	100	85,26	85,26	AT	Dinkes PPKB
25	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	80,69	100	90,04	90,04	T	100	90,04	90,04	AT	Dinkes PPKB
26	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	84,57	100	94,15	94,15	T	100	94,15	94,15	AT	Dinkes PPKB
27	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	#VALUE!	100	98,15	98,15	T	100	98,15	100	TT	Dinkes PPKB
28	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	#VALUE!	100	98,74	98,74	T	100	98,74	100	TT	Dinkes PPKB
29	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	#VALUE!	100	88,49	88,49	T	100	88,49	100	TT	Dinkes PPKB
30	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	#VALUE!	100	87,07	87,07	T	100	87,07	100	TT	Dinkes PPKB

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian kinerja RKPD tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan			Status Capaian kinerja Tahunan	Target program/ kegiatan RKPD Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Status Capaian kinerja RPJMD	Perangkat Daerah penanggungjawab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target sampai dengan tahun 2023		
1		2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9	10	11 = 5 + 7	12 = 11/4 x 100%	13	14
31	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	#VALUE!	100	78,37	78,37	S	100	78,37	100	TT	Dinkes PPKB
32	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	#VALUE!	100	95,3	95,30	T	100	95,30	100	TT	Dinkes PPKB
33	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	#VALUE!	100	100	100	T	100	100,00	100	TT	Dinkes PPKB
34	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	#VALUE!	100	64,35	64	s	100	64,35	100	TT	Dinkes PPKB
35	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	#VALUE!	100	93,81	93,81	T	100	93,81	100	TT	Dinkes PPKB
36	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	21,5	22,7	22,4	23,25	96,21	T	22,1	23,25	92,47	AT	Dinkes PPKB
37	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	0,74	0,78	0,77	0,77	100	T	0,76	0,77	96,10	AT	Dinkes PPKB

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian kinerja RKPD tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan			Status Capaian kinerja Tahun n	Target program/ kegiatan RKPD Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Status Capaian kinerja RPJMD	Perangkat Daerah penanggungja wab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target sampai dengan tahun 2023		
1		2	3	4	5	6	7	$8 = 7/6 \times 100\%$	9	10	$11 = 5 + 7$	$12 = 11/4 \times 100\%$	13	14
38	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	52,5	64,54	54,9	51,92	105,43	S	54,1	51,92	101,12	TT	Dinkes PPKB
39	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	59,2	64,54	61,9	58,89	104,86	T	61	58,89	100,53	TT	Dinkes PPKB
40	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan esensial	Persen	100	100	100	100	100	T	100	100	100	TT	Dinkes PPKB
41	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	T	100	100	100	TT	Dinkes PPKB
42	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	T	100	100	100	TT	Dinkes PPKB
43	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rumah sakit terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	T	100	100	100	TT	Dinkes PPKB
44	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	96,5	98,45	96,35	98,89	103	T	96,4	98,89	100	TT	Dinkes PPKB

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian kinerja RKPD tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan			Status Capaian kinerja Tahunan	Target program/ kegiatan RKPD Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Status Capaian kinerja RPJMD	Perangkat Daerah penanggungjawab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target sampai dengan tahun 2023		
1		2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9	10	11 = 5 + 7	12 = 11/4 x 100%	13	14
45	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN	Proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi	Persen	70	100	67	100	149	T	68	100	100	TT	Dinkes PPKB
46	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	100	85,71	100	85,71	85,71	T	100	85,71	85,71	AT	Dinkes PPKB
47	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Persen	100	100	100	100	100	T	100	100	100	TT	Dinkes PPKB
48	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Proporsi pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	T	100	100	100	TT	Dinkes PPKB
49	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase penggunaan obat rasional	Persen	95	95	94	92	98	T	95	92,00	97	AK	Dinkes PPKB
50	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat sesuai standar	Persen	56	58,81	55,5	58,54	105,48	T	55,7	58,54	105	TT	Dinkes PPKB
51	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan	Persen	97	97	96,7	97,8	101	T	96,8	97,80	100	TT	Dinkes PPKB
52	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	100	100	100	100	100	T	100	100	100	TT	Dinkes PPKB
53	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	Persen	100	66,6	66,67	66,67	100	T	76,92	66,67	66,67	AT	Dinkes PPKB
54	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan/desa yang melaksanakan pembinaan posyandu aktif	Persen	100	99,25	94,87	N/A	99,25	T	100	99,25	99,25	AT	Dinkes PPKB
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
1		Indeks Infrastruktur Wilayah	Nilai	74,52	67,79	67,23	72,87	108,39	T	69,59	108,39	100	TT	DFUPR

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian kinerja RKPD tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan			Status Capaian kinerja Tahunan	Target program/ kegiatan RKPD Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Status Capaian kinerja RPJMD	Perangkat Daerah penanggungjawab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target sampai dengan tahun 2023		
1		2	3	4	5	6	7	$8 = 7/6 \times 100\%$	9	10	$11 = 5 + 7$	$12 = 11/4 \times 100\%$	13	14
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai	74,52	64,08	67,23	65,50	97	T	72,02	65,50	87,90	AT	DFUPR
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH													
4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR													
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	Persen	100	89,89	94	91,94	98	T	98	91,94	91,94	AT	DFUPR
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase penanganan drainase lingkungan dan perkotaan	Persen	100	33	40	43,05	108	T	80	43,05	43,05	UK	DFUPR
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase penanganan jalan kabupaten	Persen	62,85	58,64	59,6	54,08	91	T	62,41	54,08	86,05	AT	DFUPR
8	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir dan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur	Persen	100	11	40	48,60	121,50	T	80	49	48,60	UK	DFUPR
9	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase pengelolaan irigasi kewenangan kabupaten	Persen	39,05	30,15	31,14	36,93	119	T	36,58	36,93	94,57	AT	DFUPR
10	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang	Persent	100	28	42	28	67	S	85	28	28,00	AT	DFUPR
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman													
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Nilai	78,04	53,32	73,48	65,37	88,96	T	76,52	65,37	83,76	AT	DFRKP
2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana, utilitas (PSU)	Persen	100	99,35	100	99,35	99	T	100	99,35	99	AT	DFRKP

[illegible]

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian kinerja RKPD tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan			Status Capaian kinerja Tahunan	Target program/ kegiatan RKPD Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Status Capaian kinerja RPJMD	Perangkat Daerah penanggungjawab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023 11 = 5 + 7	Tingkat capaian realisasi target sampai dengan tahun 2023 12 = 11/4 x 100%		
1		2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9	10	11 = 5 + 7	12 = 11/4 x 100%	13	14
1	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	72,7	67,32	72,4	70,48	97,35	T	72,5	70	96,95	AT	DiskopUKM
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Pengangguran Tertutup	Persen	3,3	2,50	3,46	2,41	130,35	T	3,4	2	100	TT	DiskopUKM
3	PROGRAM PELATIHAN KERJADAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	3	2,55	2,7	2,37	87,78	T	2,8	2	79,00	AT	DiskopUKM
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Persen	85	84,85	84,9	79,6	94	T	84,95	80	100	TT	DiskopUKM
5	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Persen	70	69,23	69,25	70,48	102	T	69,5	70	100,69	AT	DiskopUKM
6	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	50	29,17	45	36	80,00	S	45	36	72,00	AT	DiskopUKM
7	PROGRAM PELATIHAN KERJADAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	40	27,27	36	27,27	75,76	R	37	27	68,18	AT	DiskopUKM
8	PROGRAM PELATIHAN KERJADAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	60	51,02	40	51,02	127,55	T	60	51	85,03	AT	DiskopUKM
9	PROGRAM PELATIHAN KERJADAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Formal	Persen	49,8	50,49	49,6	53,25	107,36	T	49,7	53	100	TT	DiskopUKM
10	PROGRAM PELATIHAN KERJADAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian	Persen	7	24,73	5	24,73	494,60	T	6	25	100	TT	DiskopUKM
11	PROGRAM PELATIHAN KERJADAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Setengah Pengangguran	Persen	27	0,47	28	0,47	198,32	T	27,9	0	96,77	AT	DiskopUKM
12	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persen	8	6,7	10	5	50,00	S	9	5	62,50	AT	DiskopUKM
13	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	89,8	60	89,2	100	112,11	T	89,4	100	111,36	TT	DiskopUKM

[illegible]

[illegible]

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian kinerja RKPD tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan			Status Capaian kinerja Tahunan	Target program/ kegiatan RKPD Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Status Capaian kinerja RPJMD	Perangkat Daerah penanggungjawab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target sampai dengan tahun 2023		
1		2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9	10	11 = 5 + 7	12 = 11/4 x 100%	13	14
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase kerjasama antardesa terlaksana dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat yang diberdayakan	Persen	100	100	100	100	100	T	100	100	100	TT	DinsosPMD
2	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	T	100	100	100	TT	DinsosPMD
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
1		Laju pertumbuhan penduduk	Persen	0,46	1,48	0,46	1,48	322	T	0,46	1,48	100	TT	Dinkes PPKB
2		Total Fertility Rate (IFR)	Per perempuan	2,1	1,74	2,19	1,74	79,45	S	2,18	1,74	82,86	AT	Dinkes PPKB
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	Persen	33,3	20,00	30	20,00	67	S	30	20,00	60	AT	Dinkes PPKB
4	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	10	20,00	6,6	20,00	303	T	6,6	20,00	100	TT	Dinkes PPKB
5	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Dokumen	1	1	1	1	100	T	1	1,00	100	TT	Dinkes PPKB
6	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	sektor	2	2	2	2	100	T	2	2,00	100	TT	Dinkes PPKB
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan kependudukan	Lembaga	13	13	13	13	100	T	13	13,00	100	TT	Dinkes PPKB
8		Rata-rata jumlah anak per keluarga		2	1,74	2	1,74	87	T	2	1,74	100	TT	Dinkes PPKB

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian kinerja RKPD tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan			Status Capaian kinerja Tahunan	Target program/ kegiatan RKPD Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Status Capaian kinerja RPJMD	Perangkat Daerah penanggungjawab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target sampai dengan tahun 2023		
1		2	3	4	5	6	7	$8 = 7/6 \times 100\%$	9	10	$11 = 5 + 7$	$12 = 11/4 \times 100\%$	13	14
9		Ratio akseptor KB	Persen	35	82,68	41	82,68	202	T	39	82,68	100	TT	Dinkes PPKB
10		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15–49	Persen	90	82,68	89,8	82,68	92,07	T	89,8	82,68	91,87	AT	Dinkes PPKB
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Per 1.000 Perempuan	29	30,56	35	31,52	109,94	T	33	31,52	91,31	AT	Dinkes PPKB
12	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persen	9,1	12,59	8,5	12,59	148,12	T	8,7	12,59	138,35	TT	Dinkes PPKB
13		Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	17,3	15,18	15,8	15,18	96	T	16,3	15,18	87,75	AT	Dinkes PPKB
14		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	70	76,07	64	76,07	119	T	66	76,07	100	TT	Dinkes PPKB
15		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	69,03	97,44	77,39	97,44	74,09	S	74,6	97,44	100	TT	Dinkes PPKB
16		Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	44,47	85,35	60,02	85,35	57,80	S	54,84	85,35	100	TT	Dinkes PPKB
17		Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	17,37	12,27	37	12,27	166,84	T	30,46	12,27	70,64	AT	Dinkes PPKB
18		Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	Persen	42,85	14,28	42,85	14,28	33	R	42,85	14,28	33,33	UK	Dinkes PPKB
19		Cakupan PKB/PUKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Orang	23	23	23	23	100	T	23	23	100	TT	Dinkes PPKB
20		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	396	108	300	108	36,00	R	332	108	27,27	UK	Dinkes PPKB
21		Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKB) setiap desa/kelurahan	Persen	58,97	58,97	58,97	58,97	100	T	58,97	59	100	TT	Dinkes PPKB

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian kinerja RKPD tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan			Status Capaian kinerja Tahunan	Target program/ kegiatan RKPD Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Status Capaian kinerja RPJMD	Perangkat Daerah penanggungjawab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target sampai dengan tahun 2023		
1		2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9	10	11 = 5 + 7	12 = 11/4 x 100%	13	14
22		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	T	100	100	100	TT	Dinkes PPKB
23		Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	85,71	100	78,57	100	127	T	78,57	100	100	TT	Dinkes PPKB
24		Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	25	21,1	23,5	21,1	90	T	24	21,10	84,40	AT	Dinkes PPKB
25		Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes	Persen	0,4	0,3	0,4	0,3	75	S	0,4	0,30	75	AT	Dinkes PPKB
26		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persentase	89,7	76,08	89,7	76,08	84,82	S	89,7	76,08	84,82	AT	Dinkes PPKB
9	Perhubungan													
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ), PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio konektivitas antar wilayah	Persen	75,6	49,5	55,2	48,5	87,86	T	63,1	48,50	100	TT	Dishub
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	Persen	0,04	0,03	0,03	0,02	66,67	S	0,04	0,02	100	TT	Dishub
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pembangunan pelabuhan orang dan barang	Persen	100	33,33	66,67	33,33	50	S	100	33,33	33,33	UK	Dishub
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan berlalu lintas	Persen	30	14,49	15	14,77	98	T	20	14,77	49,23	UK	Dishub

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian kinerja RKPD tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan			Status Capaian kinerja Tahun n	Target program/ kegiatan RKPD Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Status Capaian kinerja RPJMD	Perangkat Daerah penanggungjawab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target sampai dengan tahun 2023		
1		2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9	10	11 = 5 + 7	12 = 11/4 x 100%	13	14
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pemenuhan infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persen	35	25,64	25	26,39	106	T	27	26,39	75,40	AT	Dishub
6		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	31,82	5,54	22,73	31,46	138	T	24,55	31,46	98,87	AT	Dishub
7	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pemenuhan infrastruktur pelayaran	Persen	66,67	48,21	62,96	60,94	96,79	T	65,43	60,94	91,41	AT	Dishub
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ), PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah penumpang yang melalui terminal/dermaga/pelab uhan	Orang	10701	20867	10566	22.890	217	T	10730	22.890	100	TT	Dishub
10	Komunikasi dan Informatika													
1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka Indeks	3,1	2,7	2,8	3,56	127	T	2,9	3,56	114,84	TT	Diskominfo
2	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase digitalisasi layanan administrasi pemerintahan	Persen	25	6,25	10	21,21	212	T	15	21,21	84,84	AT	Diskominfo
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase digitalisasi layanan publik	Persen	25	6,25	10	18,18	182	T	15	18,18	72,72	AT	Diskominfo
4	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	Persen	85	84,23	75	86,11	115	T	90	86,11	101,31	TT	Diskominfo
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													
1		Persentase koperasi aktif	Persen	64,6	43,57	63,3	56,46	89	S	63,4	56,46	100	TT	Disnakerkop UKM
2		Persentase koperasi sehat	Persen	17,07	12	12,19	0	0	R	14,63	12	70,30	AT	
3		Persentase usahamikro yang naik kelas	Persen	2,4	13,19	2,1	7,56	360	T	2,2	7,56	315,00	TT	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usahamikro yang mempunyai izin usaha	Persen	0,75	0,5	0,55	0,5	91	T	0,6	0,50	66,67	AT	Disnakerkop UKM
5	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah	Persen	100	100	100	56,46	56	S	100	56	56	TT	Disnakerkop UKM

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian kinerja RKPD tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan			Status Capaian kinerja Tahunan	Target program/ kegiatan RKPD Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Status Capaian kinerja RPJMD	Perangkat Daerah penanggungjawab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target sampai dengan tahun 2023		
1		2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{7}{6} \times 100\%$	9	10	$11 = 5 + 7$	$12 = \frac{11}{4} \times 100\%$	13	14
		keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota												
6	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Persen	85	100	78	100	128,21	T	78	100,00	100,00	TT	Disnakerkop UKM
7	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Persen	100	46,43	100	44,9	44,90	R	100	44,90	44,90	UK	Disnakerkop UKM
8	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Persen	2,3	0,66	2,15	0,67	31,16	R	2,2	0,67	29,13	UK	Disnakerkop UKM
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase fasilitasi penerbitan Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Persen	40	20	38,5	19,05	49,48	R	39	19,05	47,63	UK	Disnakerkop UKM
10	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Persen	1,5	3,57	1	3,4	340	T	1,2	3,40	100	TT	Disnakerkop UKM
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	41,5	42	R	100	42	42	UK	Disnakerkop UKM
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan fasilitasi dukungan kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Persen	12	42,14	9	41,5	461	T	10	41,50	100	TT	Disnakerkop UKM

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian kinerja RKPD tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan			Status Capaian kinerja Tahunan	Target program/ kegiatan RKPD Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Status Capaian kinerja RPJMD	Perangkat Daerah penanggungjawab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target sampai dengan tahun 2023		
1		2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9	10	11 = 5 + 7	12 = 11/4 x 100%	13	14
13	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persen	0,12	0,09	0,11	0,14	127	T	0,11	0,14	100	TT	Disnakerkop UKM
14	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun	Persen	0,11	0,09	0,1	0,14	140	T	0,1	0,14	127	AT	Disnakerkop UKM
15	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam system <i>Online Data System (ODS)</i>	Persen	0,06	0,093	0,04	0,14	350	T	0,05	0,14	100	TT	Disnakerkop UKM
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Persen	0,13	0,04	0,11	0,041	37	R	0,12	0,04	31,54	UK	Disnakerkop UKM
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Persen	0,011	0,0074	0,009	0,013	144	S	0,01	0,01	100	TT	Disnakerkop UKM
18	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Persen	0,05	0,075	0,046	0,072	157	T	0,047	0,07	100	TT	Disnakerkop UKM
19	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Persen	0,09	0,05	0,087	0,015	17	r	0,088	0,02	100	TT	Disnakerkop UKM
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendamping	Persen	0,09	0,40	0,09	0,14	156	T	0,09	0,14	100	TT	Disnakerkop UKM
12	Penanaman Modal													
1	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Juta Rupiah	415,704	1.373,50	378,771	616.140	162668,21	T	390,513	616.140,00	100	TT	DPMPISPP
2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata-rata tingkat kepatuhan pelayaran	Tingkat Kepatuhan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	T	Sedang	Tinggi	Tinggi	TT	DPMPISPP
3	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Persen	74	100	67	100	149	T	69	100,00	100	TT	DPMPISPP
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya	Persen	12	22,67	11,4	32,8	288	T	11,6	32,80	100	TT	DPMPISPP

[illegible]

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian kinerja RKPD tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan			Status Capaian kinerja Tahunan	Target program/ kegiatan RKPD Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Status Capaian kinerja RPJMD	Perangkat Daerah penanggungjawab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target sampai dengan tahun 2023		
1		2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9	10	11 = 5 + 7	12 = 11/4 x 100%	13	14
1	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	75,9	69,01	74,75	69,34	92,76	T	74,8	69	91,36	AT	Dispus
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	23,45	23,02	23,26	17,44	74,98	T	23,27	17	74,37	AT	Dispus
18	Kearsipan													
1	PROGRAM PENYEDIAAN INFORMASI, AKSES DAN LAYANAN KEARSIPAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA MELALUI JIKN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	69	76,08	66	76,07	115	T	67	76	100	TT	Dispus
2	PROGRAM PENDATAAN PENYUSUNAN DAFTAR DAN PENILAIAN SERIA PENYERAHAN ATAU PEMUSNAHAN ARSIP BAGI PEMBUBARAN	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	66	96,66	63	100	159	T	64	100	100	TT	Dispus
C.	Fokus Layanan Urusan Pilihan													
01:00	Pariwisata													
1	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	Persen	4,2	13,08	3,6	13,08	363	T	3,8	13,08	100	TT	Disbudpar
2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	15	56	15	95	633,33	T	15	95,00	100	TT	Disbudpar
3	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Lama tinggal wisatawan (length of stay)	Hari	3	1	2	1	50	T	2	1	33,33	UK	Disbudpar
2	Pertanian													
1		Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	4,50	1,51	3,90	1,51	38,72	R	4,10	1,51	33,56	UK	Distangan

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian kinerja RKPD tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan			Status Capaian kinerja Tahunan	Target program/ kegiatan RKPD Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Status Capaian kinerja RPJMD	Perangkat Daerah penanggungjawab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target sampai dengan tahun 2023		
1		2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9	10	11 = 5 + 7	12 = 11/4 x 100%	13	14
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi sektor pertanian (padi sawah, padi bukan sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar)	Ton	12.209,96	3.687,65	10.859,96	2.437,53	22,45	R	11.309,96	2.437,53	19,96	UK	Distangan
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi sektor perkebunan (lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri, jambu mete)	Ton	12.539	10.161,22	11.039	10.109,32	91,58	T	11,539	10.109	80,62	AT	Distangan
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton Per Hektar	4.519	5,7	4,0	5,7	143,25	T	4,159	5,7	100	TT	Distangan
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani	Kelompok Tani	281	427	221	324	147	T	241	324	115,30	TT	Distangan
6	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Produktivitas hewan ternak dan sejenisnya	Ekor	2517	1958	2063	2085	101	T	2181	2.085	82,84	AT	Distangan
3	Perdagangan													
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PDRB Sektor Perdagangan	Milyar Rupiah	585,51	634,50	559,94	665,92	118,93	T	571,14	666	100	TT	DMPTSP
4	Perindustrian													
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	3,69	5,96	3,25	3,68	113	T	3,40	3,68	100	TT	DMPTSP
2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Nilai produksi industri kecil dan menengah sektor pangan dan kerajinan	Rupiah	294.791.408	266.008.176	254.902.923	2.672.217.120	1048	T	267.557.653	2.672.217.120	906,48	TT	DMPTSP
5	Kelautan dan Perikanan													
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Persen	1	-2,37	1	2,57	257	T	1	2,57	257,00	TT	Dinas Perikanan
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen	10	43,26	6,5	649,15	9987	T	7,5	649,15	100	TT	Dinas Perikanan
3	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan	Persen	108	110,57	105	111,97	107	T	106	111,97	100	TT	Dinas Perikanan

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian kinerja RKPD tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan			Status Capaian kinerja Tahunan	Target program/ kegiatan RKPD Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Status Capaian kinerja RPJMD	Perangkat Daerah penanggungjawab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target sampai dengan tahun 2023		
1		2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{7}{6} \times 100\%$	9	10	$11 = 5 + 7$	$12 = \frac{11}{4} \times 100\%$	13	14
4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Cakupan bina kelompok pelaku usaha perikanan	Persen	22	27,57	19	24,53	129	T	20	24,53	100	TT	Dinas Perikanan
5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan kelas kelompok pelaku usaha perikanan	Persen	35	33,31	32	32,76	102	T	33	32,76	100	TT	Dinas Perikanan
D.	Fokus Layanan Urusan Fungsi Penunjang													
1	Perencanaan													
1	MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Perencanaan	Persen	80	89,81	71	91,77	129	T	74	91,77	100	TT	Bappelitbangda
2	MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kualitas dokumen perencanaan dengan nilai baik	Persen	100	100	100	100	100	T	100	100,00	100	TT	Bappelitbangda
3	MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama daerah	Persen	90,54	93,25	82,93	90,56*	#VALUE!	T	85,46	90,56*	100	TT	Bappelitbangda
2	Keuangan													
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	80	68,13	77	68,79	68,46	S	78	68,79	85,99	AT	BKPD
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH	Ketepatan waktu penetapan Raperda APBD	angka (tepat/tidak)	1	1	1	1	100	T	1	1,00	100	TT	BKPD
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH	Ketepatan waktu penetapan Raperda Perubahan APBD	angka (tepat/tidak)	1	1	1	1	100	T	1	1,00	100	TT	BKPD
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH	Persentase realisasi SP2D tepat waktu	Persen	99	95	96	95	99	T	97	95,00	95,96	AT	BKPD

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian kinerja RKPD tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan			Status Capaian kinerja Tahunan	Target program/ kegiatan RKPD Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Status Capaian kinerja RPJMD	Perangkat Daerah penanggungjawab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target sampai dengan tahun 2023		
1		2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9	10	11 = 5 + 7	12 = 11/4 x 100%	13	14
5	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	angka (tepat/tidak)	1	1	1	1	100	T	1	1,00	100	TT	BKPD
6	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kesesuaian barang milik daerah dengan nilai aset di neraca	Persen	100	100	100	100	100	T	100	100	100	TT	BKPD
7	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kemandirian keuangan daerah	Persen	14,81	13	14,03	13	93	T	14,17	13,00	87,78	AT	BKPD
8	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH	Persentase belanja pendidikan	Persen	≥ 20	23	≥ 20	26	100	T	≥ 20	26,00	100	TT	BKPD
9	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH	Persentase belanja kesehatan	Persen	≥ 10	36	≥ 10	25	100	T	≥ 10	25,00	100	TT	BKPD
10	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	44.477	13,15	44.477	13,15	199,97	T	44.477	13,15	100	TT	BKPD
11	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Rasio	27	38,58	27	34	126	T	27	34,00	126	TT	BKPD
12	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH	Persentase bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	0,88	1	0,81	1	123	T	0,83	1,00	113,64	TT	BKPD
13	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH	Rasio belanja urusan pemerintahan umum	Rasio	85	72,5	85	85	100	T	85	85,00	100	AT	BKPD
14	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Assets management	angka (ada/tidak)	1	1	1	1	100	T	1	1	100	TT	BKPD
15	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap komponen pendapatan daerah	Rasio	14,81	13	14,03	13	93	T	14,17	13,00	87,78	AT	BKPD
16	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH	Proporsi pajak terhadap total belanja	Persen	8,12	7	7,43	6	81	T	7,56	6,00	74	AT	BKPD
17		Opini BPK	Kategori	WIP	WIP	WIP	WIP	WIP	T	WIP	WIP	WIP	TT	BKPD
3	Kepegawaian													
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Merit System	Nilai 100-400	184	102,5	122	252	206,56	T	143	122,00	66,30	AT	BKPSDM
4	Pendidikan dan Pelatihan													
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN	Indeks Profesionalisme ASN	Skor 1-100	60	71,49	55	71,53	130,05	T	56	71,53	119,22	TT	BKPSDM

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian kinerja RKPD tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan			Status Capaian kinerja Tahunan	Target program/ kegiatan RKPD Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Status Capaian kinerja RPJMD	Perangkat Daerah penanggungjawab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target sampai dengan tahun 2023		
1		2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9	10	11 = 5 + 7	12 = 11/4 x 100%	13	14
5	Penelitian dan Pengembangan													
		Indeks Daya Saing Daerah	Nilai 1-5	1,65	2,53	1,62	2,68	165	T	1,63	2,68	162,42	TT	
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase peningkatan pemanfaatan penelitian dan kajian oleh daerah	Persen	70	50	55	50	91	T	60	50,00	71,43	AT	Bappelitbangda
2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase peningkatan pemanfaatan inovasi dan teknologi oleh daerah	Persen	70	50	55	50	91	T	60	50,00	71,43	AT	Bappelitbangda
6	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri													
1	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase bantuan partai politik	Persen	75	100	75	100	133	T	75	100	100	TT	Kesbangpol
2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks partisipasi politik	Persen	82	74	75	75	100	T	77	75	91	AT	Kesbangpol
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya peran FPK	Persen	75	35	47	50	106	T	55	50	67	UK	Kesbangpol
4	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya peran intelijen	Persen	80	33	40	60	150	T	50	60,00	75,00	AT	Kesbangpol

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian kinerja RKPD tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan			Status Capaian kinerja Tahunan	Target program/ kegiatan RKPD Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Status Capaian kinerja RPJMD	Perangkat Daerah penanggungjawab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target sampai dengan tahun 2023		
1		2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9	10	11 = 5 + 7	12 = 11/4 x 100%	13	14
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Menurunnya kasus penggunaan obat terlarang	Jumlah	0	2	2	2	100	T	0	2	50,00	AT	Kesbangpol
7	Pengawasan													
1		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	65	58,2	58	76,44	131,79	T	61	76,44	117,60	TT	bag. Organisasi Setda
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Maturitas SPIP	Level	5	2	3	2	66,67	S	4	2	40,00	UK	Inspektorat
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kapabilitas APIP	Level	5	2	3	2	66,67	S	4	2	40,00	UK	Inspektorat
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persen	96	93,04	89	93,04	104,54	T	91	93,04	96,92	AT	Inspektorat
8	Kewilayahan - Kecamatan													
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	81,37	81,33	81,34	81,33	100	T	81,35	81,33	99,95	AT	Kecamatan Manggar
2	PROGRAM KOORDINASI KETENIRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertibian Umum di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	85	100	118	T	90	100	100	TT	Kecamatan Manggar
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	Persen	100	97	100	97	97	T	100	97	97	AT	Kecamatan Manggar
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	87	84,37	84,5	88,72	105	T	85	88,72	101,98	AT	Kecamatan Damar
5	PROGRAM KOORDINASI KETENIRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertibian Umum di wilayah Kecamatan	Persen	100	99,61	100	100	100,00	T	100	100,00	100,00	AT	Kecamatan Damar
6	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	Persen	100	81,91	100	100	100	S	100	100	100	AT	Kecamatan Damar
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	89	83,46	86	87,48	101,72	T	87	87,48	98,29	AT	Kecamatan Kelapa Kampit

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian kinerja RKPD tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan			Status Capaian kinerja Tahunan	Target program/ kegiatan RKPD Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Status Capaian kinerja RPJMD	Perangkat Daerah penanggungjawab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target sampai dengan tahun 2023		
1		2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9	10	11 = 5 + 7	12 = 11/4 x 100%	13	14
8	PROGRAM KOORDINASI KETENIRAMANDAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100	T	100	100	100	TT	Kecamatan Kelapa Kampit
9	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	Persen	100	100	100	100	100	T	100	100	100	TT	Kecamatan Kelapa Kampit
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	85,01	85,58	83,02	83,64	101	T	83,50	83,64	100	TT	Kecamatan Simpang Renggang
11	PROGRAM KOORDINASI KETENIRAMANDAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	T	100	100	100	TT	Kecamatan Simpang Renggang
12	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	Persen	100	100	100	100	100	T	100	100	100	TT	Kecamatan Simpang Renggang
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	88,85	88,34	88,80	88,33	99	T	88,82	88,33	99	AT	Kecamatan Gantung
14	PROGRAM KOORDINASI KETENIRAMANDAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	T	100	100	100	TT	Kecamatan Gantung
15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	Persen	88,00	100	69,00	100	145	T	80,00	100	114	TT	Kecamatan Gantung
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	85,01	85,58	83,02	85,58	103	T	83,50	85,58	100	TT	Kecamatan Simpang Pesak
17	PROGRAM KOORDINASI KETENIRAMANDAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	T	100	100	100	TT	Kecamatan Simpang Pesak
18	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	Persen	100	100	100	100	100	T	100	100	100	TT	Kecamatan Simpang Pesak

NO.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGI ATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Capaian kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian kinerja RKPD tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan			Status Capaian kinerja Tahunan	Target program/ kegiatan RKPD Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan Tahun 2021		Status Capaian kinerja RPJMD	Perangkat Daerah penanggungjawab
						Target RKPD Tahun 2023	Realisasi RKPD s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)			Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target sampai dengan tahun 2023		
1		2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9	10	11 = 5 + 7	12 = 11/4 x 100%	13	14
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	88,5	89,38	87,3	89,38	102	T	87,6	89,38	100	TT	Kecamatan Dendang
20	PROGRAM KOORDINASI KETENIRAMANDAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	Persen	100	99,9	100	99,9	100	T	100	100	100	TT	Kecamatan Dendang
21	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	Persen	100	98,96	100	98,96	99	T	100	99	99	AT	Kecamatan Dendang
E.	Fokus Layanan Urusan Fungsi Pendukung													
1	Unsur Pendukung Sekretariat Daerah													
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KEKEJAHIKRAAN RAKYAT	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPD)	Status	Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (I)	Tinggi (I)	Sedang	Tinggi (I)	T	Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (I)	Tinggi (I)	TT	Setda
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kelembagaan	Persen					132	T		100	125,00	TT	Setda
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan	80	78,73	74	94,35	128	T	76	94	117,94	TT	Setda
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks	3,95	3,36	3,5	3,65	104	T	3,65	4	92,41	AT	Setda/Dukcapil
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai	BB	B	BB	B	B	S	BB	B	B	TT	Setda
2	Unsur Pendukung Sekretariat DPRD													
1		Indeks kepuasan DPRD terhadap Dukungan dan Pelayanan Sekretariat DPRD	Skor	80	85,93	80	88,61	111	T	80	88,61	100	TT	
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase jumlah regulasi daerah melalui persetujuan Raperda	Persen	65	71,43	60	91,66	153	T	55	81,55	125,45	TT	Setwan

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan hasil gambaran umum kondisi daerah dari aspek geografis, demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, serta mendasarkan pada hasil evaluasi RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023. Hasil proses identifikasi permasalahan ini kemudian dikerucutkan menjadi isu strategis daerah. Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta dengan memperhatikan hasil evaluasi RKPD Tahun 2023. Secara umum hasil identifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan urusan dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) berdasarkan prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025. Berikut hasil identifikasi seluruh permasalahan pembangunan yang dihadapi berdasarkan prioritas pembangunan dan urusan pemerintah daerah, yaitu:

2.3.1. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KESETARAAN

2.3.1.1. Urusan Pendidikan

1. Rata-Rata Lama Sekolah Belum Mencapai Standar Wajib Belajar
2. Standar Mutu Pendidikan yang Belum Merata
3. Masih Tingginya Angka Putus Sekolah (Terutama Pada Jenjang SMP)
4. Mutu Tenaga Pendidikan Dasar Belum Mencapai Standar Minimal
5. Belum Meratanya Kesempatan Pendidikan Bagi Anak Inklusi

2.3.2. PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

2.3.2.1. Urusan Kesehatan

1. Sinergitas atau konvergensi program belum berjalan optimal
2. Keterbatasan kapasitas tenaga Kesehatan dan kader kesehatan
3. Ketersediaan infrastruktur & sarana prasarana yang belum memenuhi standar
4. Partisipasi masyarakat dalam membudayakan PHBS belum optimal

2.3.3. PENGENTASAN KEMISKINAN

2.3.3.1. Urusan Sosial

1. Masih Tingginya Angka kemiskinan di Kabupaten Belitung timur.
2. Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi dasar bagi penyandang disabilitas telantar, lanjut usia telantar, anak telantar di luar panti, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti

3. Kurangnya partisipasi masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan dunia usaha dalam pelayanan masalah kesejahteraan sosial
4. Belum tersedianya tempat pelayanan sosial yang representative (shelter/ rumah perlindungan sosial) untuk penampungan sementara penanganan masalah sosial yang memerlukan perlindungan khusus.

2.3.3.1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Kelembagaan yang memfasilitasi pelayanan PPPA masih minim dan pemberdayaan masyarakat terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum maksimal
2. Belum maksimalnya penerapan anggaran responsive gender untuk mendorong pelaksanaan PUG
3. Belum adanya kebijakan di tingkat desa terkait dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak serta perempuan

2.3.3.2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa belum optimal

2.3.3.3. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Tingginya keluarga berisiko stunting

2.3.4. OPTIMALISASI PENINGKATAN DAYA SAING DAN PERCEPATAN INVESTASI

2.3.4.1. Urusan Penanaman Modal

1. Belum tersusunnya dokumen detail investasi yang akan ditawarkan
2. Belum adanya Pusat Data dan Informasi Investasi
3. Belum Maksimal Penggunaan Digital web untuk promosi
4. Masih Sedikit Kegiatan Promosi Investasi Daerah ke Luar Daerah/Luar Negeri
5. Kurangnya Tenaga Penata Perizinan dan Penata Kelola Penanaman Modal yang membidangi Promosi
6. Belum Optimal Pelayanan Perizinan yang terintegrasi dan terpadu
7. Tidak Seluruh Kecamatan memiliki RDTR
8. Revisi Rencana Tata Ruang wilayah yang belum selesai
9. kurangnya Regulasi Pelaksanaan perlakuan Investasi Sampai ke tingkat Desa
10. Belum adanya Regulasi tentang Hilirisasi Produk
11. Belum adanya Infrastruktur Pelabuhan Umum orang dan Barang yang Aktif
12. Belum Termanfaatkannya spasial Khusus Kawasan Industri

2.3.4.2. Urusan Ketenagakerjaan

1. Masih belum optimalnya peserta pelatihan berbasis kompetensi/kemampuan daya saing tenaga kerja
2. Belum adanya balai pelatihan vokasi dan produktifitas/workshop pelatihan kerja
3. Masih belum maksimalnya perluasan kesempatan kerja untuk meningkatkan jumlah wirausaha muda dan memberi akses menjadi tenaga kerja mandiri formal
4. Penyerapan angkatan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, sehingga jumlah pengangguran bertambah
5. Belum terpenuhinya sarana hubungan industrial di perusahaan
6. Perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan
7. Tidak dibuatnya Perjanjian Kerja (PK) antara Pemberi Kerja dan Pekerja

2.3.4.3. Urusan Koperasi dan UMKM

1. Banyaknya Koperasi yang tidak bisa menjalankan usahanya
2. Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. yang Juga Mengatur Tentang Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Menengah belum terimplementasikan dengan optimal

2.3.4.4. Urusan Perikanan

1. Masih rendahnya produktifitas sub sektor perikanan
2. Masih rendahnya kapasitas daya saing dan terbatasnya akses pasar Produk Perikanan
3. Profil perikanan dengan data presisi sampai tingkat desa belum tersedia
4. Tidak beroperasinya Tempat pelelangan Ikan
5. Rencana Pengembangan kawasan perikanan terpadu berbasis desa/ komoditas unggulan masih terbatas
6. Meningkatnya aktifitas IUU Fishing dan penambangan di wilayah perairan Belitung Timur
7. Harga ikan bahan baku produk olahan fluktuatif dan cenderung tinggi
8. Komoditas ikan menjadi penyumbang inflasi Daerah

2.3.4.5. Urusan Pertanian dan Pangan

1. Masih terbatasnya sarana infrastruktur pertanian
2. Belum optimalnya penerapan teknotan dan kegiatan penyuluhan pertanian
3. Tingginya harga sarana produksi pertanian (pupuk, benih, dan obat-obatan pertanian)

4. Terbatasnya akses petani untuk mendapatkan modal usaha
5. Masifnya alih fungsi lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian

2.3.4.6. Urusan Kebudayaan

1. Belum optimalnya upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan
2. Belum optimalnya upaya pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya

2.3.4.7. Urusan Pariwisata

1. Status lahan untuk pengembangan kawasan destinasi wisata;
2. Terbatasnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif terkait pengelolaan destinasi oleh Pokdarwis dan pengembangan produk ekonomi kreatif;
3. Koordinasi lintas sektoral (lembaga/stakeholder) yang mendukung sektor pariwisata kurang sinergis

2.3.4.8. Urusan Perindustrian

1. Masih rendahnya persentase pelaku usaha perdagangan yang memiliki izin sesuai ketentuan
2. Kurang stabilnya harga bahan pokok dan barang penting lainnya
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana perdagangan
4. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya metrologi legal

2.3.4.9. Urusan Perdagangan

1. Kurangnya inovasi IKM untuk mengembangkan produk yang dihasilkan sehingga kurang mampu mengantisipasi perkembangan pasar
2. Banyak pelaku usaha/IKM yg belum update usahanya (NIB) ke izin usaha yang berbasis resiko
3. Belum optimalnya publikasi data informasi dan analisis pelaku usaha industri kecil dan menengah
4. Minimnya jumlah IKM yang telah bersertifikat halal dan TKDN dibandingkan dengan jumlah seluruh IKM

2.3.5. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR

2.3.5.1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Permukiman

1. Penanggulangan Bencana Abrasi di Pantai Burung Mandi
2. Masih rendahnya ketersediaan Air Baku di Kabupaten Belitong Timur

3. Penyelesaian Penyusunan RDTR Damar dan Penetapan Perkada RDTR Dendang
4. Penanganan Jalan Dalam Kecamatan Manggar
5. Masih terdapatnya perumahan dan permukiman kumuh
6. Masih banyaknya ditemukan rumah tidak layak huni

2.3.5.1. Urusan Perhubungan

1. Belum optimalnya fasilitas Perlengkapan Jalan
2. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas
3. Belum optimalnya pelaksanaan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor

2.3.6. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

2.3.6.1. Urusan Lingkungan Hidup

1. Kurang optimalnya Pengkayaan dan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati;
2. Peraturan Daerah untuk Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup sebagai data Pendukung Pengambilan Kebijakan masih kurang;
3. Masih Kurangnya data dasar dan data dukung untuk pengembangan kegiatan Rehabilitasi lahan;
4. Belum Optimalnya Publikasi dan informasi kepada para pelaku usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat terhadap kebijakan Lingkungan Hidup;
5. Belum Optimalnya Pelaksanaan kegiatan aksi, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim;
6. Masih Kurangnya data dasar pendukung untuk perhitungan IKA, IKU dan IKL sebagai data penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah;
7. Belum Optimalnya Ketaatan Pemegang Izin Lingkungan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Masih terbatasnya uji parameter dan ketersediaan alat utama laboratorium yang mampu dilakukan oleh UPT Laboratorium Sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2017 untuk mendukung Optimalisasi Laboratorium Lingkungan;

9. UPT Laboratorium tidak bisa menarik Retribusi Jasa Laboratorium sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Sehingga Potensi Pendapatan Asli Daerah dari Jasa Laboratorium Lingkungan akan berkurang;
10. Belum optimalnya cakupan pelayanan Pengelolaan Persampahan;
11. Optimalisasi Pelaksanaan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup masih kurang.

2.3.7. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

2.3.7.1. Urusan Keuangan Daerah

1. Masih rendahnya kapasitas fiskal daerah
2. Perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh Perangkat Daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan secara riil tingkat kebutuhan yang diperlukan pada tahun anggaran berikutnya
3. Terbitnya regulasi keuangan oleh Pemerintah Pusat di tengah tahun anggaran memberi pengaruh signifikan pada alur keuangan daerah
4. Pengelolaan pendapatan daerah masih belum optimal
5. Pengelolaan penatausahaan keuangan daerah masih belum optimal

2.3.7.2. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

1. Penerapan Sistem Merit dalam manajemen ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Timur belum optimal
2. Nilai Indeks Profesional ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur belum mencapai target
3. Pelayanan administrasi kepegawaian berbasis aplikasi belum optimal
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan kepegawaian dan data kepegawaian belum optimal

2.3.7.3. Urusan Perencanaan

1. Keterbatasan SDM secara kualitas dan kuantitas
2. Kinerja perangkat daerah kurang mendukung pencapaian misi daerah
3. Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi bidang perencanaan pembangunan daerah
4. Masih rendahnya kualitas pengendalian evaluasi pelaksanaan program pembangunan
5. Masih kurangnya keselarasan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah

2.3.7.4. Urusan Penelitian dan Pengembangan Daerah

1. Masih rendahnya pemanfaatan penelitian dan kajian oleh Perangkat Daerah teknis
2. Minimnya inovasi yang memiliki payung regulasi (Perda, Perbub, SK)
3. Belum ada pembinaan inovasi bagi masyarakat dan ASN

2.3.7.5. Urusan Pengawasan

1. Fungsi dan peran Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan, yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong perangkat daerah untuk berinovasi belum berjalan optimal
2. Predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) masih belum mencapai target
3. Kegiatan pendampingan dalam mendorong dan mempertahankan predikat opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) belum berjalan optimal
4. Peningkatan predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) belum optimal
5. Peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) belum optimal
6. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum optimal
7. Peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan BPK belum optimal

2.3.7.6. Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian

1. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Rendahnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Belum optimalnya penyebaran informasi publik serta masih terbatasnya kompetensi SDM;
4. Belum optimalnya transformasi digital birokrasi untuk mendukung pengembangan Kabupaten Cerdas (smart city);
5. Belum optimalnya implementasi SDI (Satu Data Indonesia);
6. Masih lemahnya pengamanan informasi;
7. Belum optimalnya sarana prasarana pendukung pengelolaan informasi komunikasi; dan
8. Belum optimalnya sarana prasarana kantor.

2.3.7.7. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Belum optimalnya Pemanfaatan Data oleh Perangkat Daerah
2. Belum maksimalnya evaluasi pelaksanaan inovasi yang sedang berjalan serta kurang disosialisasikan kepada masyarakat tentang adanya inovasi yang ada di Disdukcapil Kab. Belitong Timur.

3. Belum optimalnya tata kelola arsip kependudukan
4. Masih belum maksimalnya pendataan penduduk non permanen di Kabupaten Belitung Timur
5. Belum tertibnya pelaporan kematian di Kabupaten Belitung Timur
6. Belum maksimalnya pencapaian target kepemilikan dokumen kependudukan Kepemilikan Kartu Identitas Anak
7. Terlambatnya penyajian data kependudukan karena masih harus dilakukan permintaan data ke Dirjen Dukcapil

2.3.7.8. Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Keterbatasan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah
2. Keterbatasan ruang lingkup dengan sinergitas pemantapan urusan kesatuan bangsa dan politik yang belum optimal

2.3.7.9. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

1. Masih rendahnya pertumbuhan peminjam bahan pustaka dan buku yang dipinjam
2. Masih minimnya perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan
3. Belum optimalnya pembinaan perpustakaan yang dilakukan
4. Layanan Perpustakaan digital berbasis TIK belum efektif
5. Keterbatasan kuantitas Naskah Kuno
6. Masih sedikit PD yang menerapkan arsip pola baru
7. Jumlah dan kompetensi arsiparis belum optimal
8. Penyelamatan arsip PD yang Dipisah atau di gabung karena terdampak perubahan SOTK masih belum optimal
9. Manajemen kearsipan (pengelolaan arsip dan digitalisasi arsip) belum optimal
10. Rendahnya pemanfaatan arsip pada PD
11. Penyelamatan arsip Terdampak Bencana Belum Optimal

2.4 ISU STRATEGIS

2.4.1. ISU GLOBAL DAN REGIONAL

Isu global memiliki kemampuan untuk secara signifikan mempengaruhi keadaan regional. Keterkaitan antara negara-negara di dunia saat ini sangat erat melalui berbagai saluran, termasuk perdagangan, investasi, dan aliran informasi. Hal ini berarti bahwa perkembangan di satu wilayah dapat dengan cepat menyebar dan mempengaruhi keadaan di wilayah lainnya. Kepulauan Bangka Belitung dihadapkan beberapa isu internasional yang dapat mempengaruhi keadaan sosial, ekonomi, dan politiknya di tahun 2025 sebagai berikut:

1. Ketidakstabilan Politik dan Ekonomi Global

Perang dagang, krisis ekonomi, dan konflik politik di negara-negara besar dapat mengganggu perdagangan internasional dan stabilitas ekonomi global. Hal ini dapat berimbas pada sektor pertambangan dan industri pengolahan timah di Kepulauan Bangka Belitung. Perang di Ukraina, perang Israel – Palestina, dan krisis energi global dapat menurunkan harga komoditas utama ekspor Indonesia, seperti batubara, timah, dan minyak kelapa sawit. Hal ini dapat berakibat pada penurunan pendapatan negara dan sektor swasta, serta berkurangnya lapangan pekerjaan. Dalam sisi politik Pemilihan Presiden Amerika Serikat di Bulan November 2024 juga tentu saja akan mempengaruhi stabilitas politik dunia (termasuk Indonesia).

2. Krisis Energi dan Pangan

Meningkatnya harga energi dan pangan global akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dapat meningkatkan inflasi dan membebani masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dapat memicu kerawanan sosial dan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Degradasi Lingkungan

Perubahan iklim secara global diprediksi akan meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam, yang dapat mengakibatkan kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, dan korban jiwa. Dalam jangka panjang Kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim dapat mengancam wilayah pesisir di Kepulauan Bangka Belitung, termasuk pulau-pulau kecil. Hal ini dapat menyebabkan abrasi pantai, intrusi air laut, dan tenggelamnya wilayah pesisir.

4. Persaingan Regional

Persaingan antar negara di kawasan Asia Tenggara, terutama dalam hal sumber daya alam dan perdagangan, dapat meningkatkan ketegangan dan memicu konflik. Hal ini dapat berdampak pada keamanan maritim di Kepulauan Bangka Belitung, yang terletak di jalur perdagangan internasional yang strategis.

Pemerintah daerah Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan *stakeholder* perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dan memitigasi dampak dari isu-isu internasional tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama internasional, memperkuat ketahanan ekonomi, dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam.

2.4.2. ISU NASIONAL

Mengacu pada rencana pembangunan nasional tahun 2025, Indonesia mengusung tema ***“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***. Namun dalam mewujudkan hal tersebut Indonesia memiliki beberapa tantangan yang menjadi isu strategis nasional untuk dipecahkan agar target dari rencana pembangunan nasional dapat tercapai. Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan yang bersifat multidimensi yang memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk menanganinya. Adapun beberapa isu strategis nasional tersebut adalah sebagai berikut:

2.4.2.1 Kesehatan

Isu kesehatan nasional di Indonesia masih menjadi perhatian serius. Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih tinggi, mencapai 189 per 100.000 kelahiran, menunjukkan tantangan besar dalam upaya meningkatkan kesehatan maternal. Tingginya tingkat stunting, mencapai 21,6%, menunjukkan masih adanya masalah gizi pada anak-anak yang dapat berdampak pada perkembangan fisik dan kognitif. Prevalensi obesitas yang terus meningkat, mencapai 21,8%, menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam mengatasi masalah pola makan dan gaya hidup. Kasus baru Tuberkulosis (TBC) peringkat ke-2 di dunia, dengan angka 385 per 100.000 penduduk, serta kasus baru Kusta peringkat ke-3 di dunia, dengan 10.976 kasus baru, menegaskan perlunya upaya intensif dalam pencegahan dan pengobatan penyakit menular. Tidak hanya itu, kurangnya ketersediaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang tidak menyediakan sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar, mencapai 43,78%, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C yang belum memiliki tujuh dokter spesialis dasar dan penunjang, mencapai 20,36%, juga menjadi tantangan serius dalam memberikan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Dengan demikian, perlu upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan sistem kesehatan nasional demi mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana untuk Kabupaten Belitung Timur yang termasuk di dalamnya.

2.4.2.2 Perlindungan Sosial

Akurasi Program Bantuan Sosial masih rendah dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Program Sembako: 37,32%;
- (b) Program Keluarga Harapan (PKH): 33,71%;
- (c) Penerima Bantuan Iuran (PBI): 53,76%; dan rata-rata: 41,53%

Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) belum mencapai tingkat optimal dan inklusif yang diharapkan. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 18,48% dari pekerja informal dan 58,5% dari pekerja formal yang tercakup oleh program jaminan sosial (jamsosnaker). Hal ini menandakan bahwa masih ada sejumlah besar pekerja informal yang tidak mendapatkan perlindungan sosial yang memadai, sementara juga terdapat kesenjangan yang cukup besar di antara tingkat perlindungan antara pekerja formal dan informal. Dengan demikian, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan aksesibilitas, keberlanjutan, dan inklusivitas SJSN, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih luas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja informal yang rentan.

2.4.2.3 Pendidikan

- **Kualitas pendidikan masih rendah**
(Skor PISA 2022 Membaca: 359; Matematika: 366; Sains: 383)
- **Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas**
(<50% guru memiliki sertifikat pendidik; kekurangan 679 ribu guru)
- **Kesenjangan partisipasi pendidikan tinggi antarkelompok ekonomi**
(APK PT penduduk termiskin 17,51% dan penduduk terkaya 52,66%)
- **Kualitas lulusan masih rendah**
(hanya 57,99% lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi)
- **Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun**
(1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), dengan pengukuran capaian antara lain melalui Indikator Modal Manusia (IMM)

2.4.2.4 Keluarga dan Gender

- **Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga**, termasuk pengasuhan dan perawatan
- **Tingginya ketimpangan gender**: 0,459

2.4.2.5 Energi

Penyediaan tenaga listrik masih secara dominan mengandalkan penggunaan energi fosil sebagai sumber utamanya. Meskipun terdapat kemajuan dalam pengembangan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga angin, namun penggunaannya masih terbatas dan belum mampu menyaingi kontribusi energi fosil secara signifikan. Hal ini menimbulkan beragam dampak negatif terhadap lingkungan, seperti peningkatan emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama perubahan iklim. Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada energi fosil juga membuat pasokan energi menjadi rentan terhadap fluktuasi harga di pasar global serta risiko terkait pasokan bahan bakar. Hal tersebut secara signifikan mempengaruhi kabupaten Belitung Timur karena pasokan energi baik itu pembangkit listrik maupun hampir keseluruhan penggunaan bahan bakar kendaraan di Kabupaten Belitung Timur masih menggunakan minyak bumi.

2.4.2.6 Ibu Kota Negara

Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memiliki beberapa indikator kinerja kunci yang harus diimplementasikan. Indikator Kinerja Kunci pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diatur pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rencana Induk IKN merupakan pedoman kebijakan dan strategi pembangunan IKN hingga 2045 serta menjadi tolak ukur kemajuan dan keberhasilan pembangunan IKN sesuai dengan visi IKN sebagai kota yang dapat mengakomodir segala urusannya serta kapasitasnya dalam menjadi pusat pemerintahan dari seluruh wilayah di Indonesia (termasuk Kabupaten Belitung Timur).

2.4.2.7 Digitalisasi

- Terdapat desa/kelurahan serta layanan pendidikan dan kesehatan yang belum mendapatkan akses internet (blankspot)
- Penguatan pemerintah digital (SPBE dan SDI) dan Keamanan Siber Nasional

2.4.2.8 Iptek dan Inovasi

Kontribusi Iptek dan Inovasi terhadap Pembangunan Indonesia masih rendah (Peringkat ke-6 di ASEAN Global Innovation Index-GII, WIPO 2023)

2.4.2.9 Agama dan Kebudayaan

Belum kokohnya karakter dan jati diri bangsa (41% pelajar berusia 15 tahun mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam satu bulan).

2.4.3. ISU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2.4.3.1. Pertumbuhan Ekonomi Melambat dan Cenderung Stagnan

Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung pada 2023 tumbuh 4,38 persen, melambat dibanding tahun sebelumnya tumbuh 4,40 persen. Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp102,64 triliun. Penyumbang terbesar adalah lapangan usaha industri pengolahan tumbuh 1,92 persen, namun melambat dibandingkan pertumbuhan 2022 mencapai 5,14 persen. Perlambatan usaha industri pengolahan ini karena adanya kontraksi yang terjadi pada subkategori industri logam dasar sebagai salah satu penyumbang terbesar kategori tersebut. Rendahnya harga logam timah di pasar dunia serta adanya penertiban tata kelola pertimahan berdampak pada pengurangan produksi baik bijih maupun logam timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Total PDRB ADHB Pulau Sumatera pada triwulan III-2023 mencapai Rp1.145 triliun atau sekitar 22,16 persen dari total PDRB 34 Provinsi di Indonesia, sedangkan PDRB ADHK Pulau Sumatera pada triwulan III-2023 mencapai Rp661 triliun. Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera sebesar 1,89 persen (q-to-q), 4,50 persen (y-on-y), dan 4,72 persen (c- to-c). Sementara PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya memberikan kontribusi sebesar 2,28 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera dan 0,51 persen terhadap total PDRB 34 provinsi di Indonesia.

2.4.3.2. Disparitas Pembangunan Antar Wilayah

Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi berbagai kendala, baik kendala geografis yang terdiri dari 470 pulau - pulau kecil, maupun potensi sumber daya alam serta potensi wisata bahari yang belum optimal dimanfaatkan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukungnya. Persebaran penduduk yang tidak merata, serta ketaatan terhadap tata ruang yang masih rendah. Rasio Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 paling rendah secara nasional, yaitu sebesar 0,245 poin yang menunjukkan bahwa tingkat pemerataan distribusi pendapatan di Bangka Belitung sangat baik, namun jumlah penduduk miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2020 yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 40% penduduk dengan status kesejahteraan terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif cukup banyak, yaitu berjumlah 264.262 Jiwa (80.623 KK).

Disamping itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga masih tinggi diatas rata-rata nasional.

2.4.3.3. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Daya Saing Masih Rendah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 mencapai 74,09, meningkat 0,59 poin (0,80 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (73,50). Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 memang menunjukkan peningkatan, namun capaian tersebut masih di bawah angka nasional yaitu sebesar 74,39. Hal ini tak luput dari permasalahan yang kita hadapi diantaranya kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Dari dimensi pendidikan ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah 8,25 tahun atau setara dengan menduduki kelas VIII (delapan) sekolah menengah pertama dan berada dibawah angka nasional yaitu 8,77 tahun. Untuk harapan lama sekolah angka belitung berada pada 12,31 tahun sedangkan nasional diangka 13,15 tahun. Dari dimensi kesehatan, umur harapan hidup (UHH) saat lahir masyarakat bangka belitung adalah 71,23 tahun dan masih dibawah rata-rata nasional 72,13 tahun.

2.4.3.4. Rendahnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 bernilai 76,65 dan berada pada kategori sedang. Pada tahun 2022, Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi memiliki nilai tertinggi dibandingkan aspek lainnya yaitu aspek kebebasan dan aspek kesetaraan. Aspek lembaga demokrasi pada tahun 2022 mencapai nilai 85,05. Aspek kesetaraan mencapai nilai 78,11 sedangkan aspek kebebasan mencapai nilai 66,36. Aspek kebebasan memiliki nilai terendah dibandingkan aspek lainnya. Kategori pada aspek kapasitas lembaga demokrasi berada pada kategori baik, sedangkan aspek kebebasan dan aspek kesetaraan berada pada kategori sedang. Pada tahun 2022, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan 10 terendah di Indonesia.

2.4.3.5. Masih Rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 nilai Indeks Reformasi Birokrasi yaitu 69,53 dengan predikat “B”. Nilai tersebut masih dibawah target di akhir tahun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD 2005–2025) yaitu mencapai target nilai 70,00. Fakta ini menggambarkan bahwa masih terdapat kelemahan dan permasalahan terkait dengan upaya percepatan peningkatan predikat yang lebih baik.

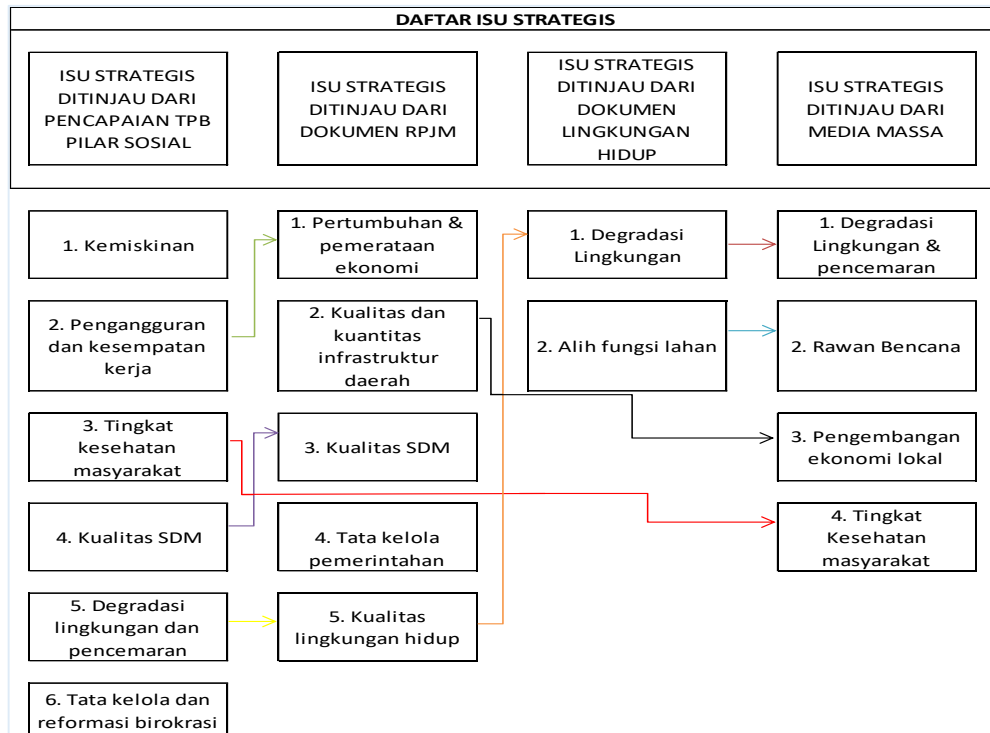
2.4.3.6. Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Sumber Daya Alam

Secara umum indeks kualitas tutupan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2017 – 2020 selalu di bawah rata-rata nasional. Tahun 2020, nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah 39,32 sedangkan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Nasional adalah 43,2. Kondisi ini disebabkan karena kondisi tutupan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang semakin menurun. Kegiatan penambangan timah dan konversi lahan hutan menjadi perkebunan monokultur seperti kelapa sawit, lada dan karet oleh masyarakat dan perusahaan adalah salah satu faktor utama menurunnya tutupan dan kualitas lahan. Selain kondisi tutupan lahan yang sudah banyak rusak tersebut, disebutkan bahwa potensi lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 20.488 ha atau 1,23% dari total luasan darat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BPDASHL Baturusa Cerucuk, Tahun 2018).

Konflik antara masyarakat dengan para penambang timah ilegal hampir setiap tahun terus terjadi di Kepulauan Bangka Belitung. Karena kegiatan penambangan ilegal sudah merusak bentang alam, baik di darat maupun di laut yang menyebabkan masyarakat lokal terganggu kehidupannya. Padahal, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mengatur regulasi terkait tata kelola pemanfaatan sumber daya alam, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K Tahun 2020-2040, yang memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.4.4. ISU STRATEGIS KLHS KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Berdasarkan keterkaitan dari beberapa tinjauan isu dokumen RPJMD kabupaten, Isu dari Dokumen RTRW, Isu dari dokumen Lingkungan Hidup, isu dari Media Massa serta TPB yang tidak tercapai. Seperti ditunjukkan pada bagan dibawah ini.



Gambar 2. 8 Daftar Isu Strategis

Berdasarkan hasil penapisan perumusan daftar isu strategis KLHS Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Kemiskinan;
- 2) Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi;
- 3) Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah;
- 4) Kualitas Sumber Daya Manusia;
- 5) Tingkat Kesehatan Masyarakat;
- 6) Alih Fungsi Lahan;
- 7) Degradasi Lingkungan dan Pencemaran; dan
- 8) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi.
- 9) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*.
- 10) Risiko Bencana*.

Keterangan (*): Isu yang muncul dari hasil FGD uji publik 1 dan indikator TPB tidak tercapai yang perlu diakomodir

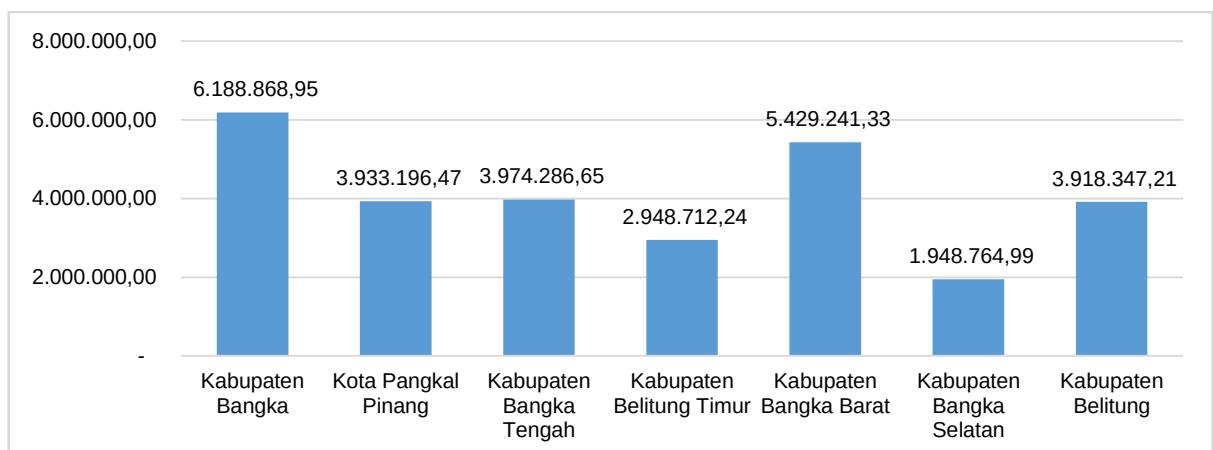
2.4.5. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

2.4.5.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Percepatan Investasi Belum Optimal

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur di tahun 2023 adalah sebesar 4,72 dimana hal tersebut memang sudah melebihi target RPJMD yang besarnya 3,5. Walaupun demikian hal tersebut belum menjawab tantangan dari kesejahteraan masyarakat. Dimana pada tahun 2023 presentase kemiskinan

Kabupaten Belitung Timur meningkat menjadi 6,73 dari tahun 2022 yang hanya sebesar 6,49.

Perekonomian Kabupaten Belitung Timur masih terbilang rentan. Hal tersebut dikarenakan aktivitas ekonomi skala besar Kabupaten Belitung Timur masih bergantung pada bahan mentah dan belum memiliki akar yang kuat pada sektor jasa. 3 besar distributor perekonomian Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 yang pertama adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 25,64%, lalu yang kedua adalah Sektor Industri Pengolahan sebesar 23,34%, dan yang ketiga adalah Sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar 11,93%. Pada ketiga sektor unggulan perekonomian Kabupaten Belitung Timur tersebut, terdapat pertumbuhan negatif pada Sektor Pertambangan dan Penggalan yang pada tahun 2023 memberikan angka sebesar -1,75. Realisasi dari akumulasi investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditunjukkan bahwa dari tahun 2019 sampai dengan 2023, Kabupaten Belitung Timur masih menempati posisi yang rendah sebagaimana grafik berikut:



Grafik 2. 40 Akumulasi Realisasi investasi Seluruh Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023

Sumber: NSWi (2023)

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi dan percepatan investasi menjadi isu strategis Kabupaten Belitung Timur di tahun 2025

2.5.4.2. Sarana dan Prasarana Wilayah Belum Optimal

Sampai dengan tahun 2023 Kabupaten Belitung Timur masih memiliki banyak kendala dengan sarana dan prasarana wilayah. Ketersediaan air baku yang ada di Kabupaten Belitung Timur masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat dalam skala ideal. Sampai dengan akhir tahun 2023 perumahan dan permukiman kumuh serta banyaknya rumah tidak laik huni juga masih menjadi kendala yang belum dapat diselesaikan. Selain itu dalam hal teknologi, transformasi digital birokrasi untuk mendukung pengembangan Kabupaten Cerdas (*smart city*) masih

belum optimal. *Blank spot* pada beberapa lokasi di beberapa kecamatan juga masih menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.

2.5.4.3. Kualitas Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Masih Rendah

Sampai dengan tahun 2023 sekolah tingkat SD dan SMP memiliki capaian yang masih didominasi pada Akreditasi B, dengan demikian, hal tersebut memberi dampak pada kualitas pendidikan yang kurang memadai. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Belitung Timur di tahun 2023 masih mencapai angka sebesar 8,9 Tahun (dibawah standar wajib belajar). Dengan demikian dominasi Angka Putus Sekolah yang cukup besar berada pada jenjang SMP, yakni sebesar 1,96%. Rendahnya kapabilitas pendidikan di Kabupaten Belitung Timur menjadi penyebab dari rendahnya capaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang masih dibawah capaian nasional yakni 72,86 pada Kabupaten Belitung Timur dan 73,55 pada capaian nasional di tahun 2023. Dalam jangka panjang jika isu strategis ini tidak segera diatasi akan memberikan dampak pada kualitas tenaga kerja yang rendah, sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang memadai dan pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat yang akan semakin menurun.

2.5.4.4. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi

Birokrasi

Meskipun pada tahun 2023, Kabupaten Belitung Timur mencatatkan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sebesar 76,44, menunjukkan adanya upaya reformasi yang telah dilakukan, namun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Hasil dari Laporan Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun yang sama juga mengindikasikan bahwa masih ada Perangkat Daerah dengan Kategori C (Tidak Baik) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi terhadap reformasi birokrasi juga menyoroti beberapa kelemahan, seperti belum ditetapkannya target nasional atas indikator kegiatan utama mandatory, kurangnya keabsahan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, dan belum cukupnya dukungan anggaran untuk mewujudkan rencana aksi tersebut. Selain itu, terdapat ketidakrelevanan Rencana Aksi dalam mencapai target sasaran kegiatan utama, serta belum adanya intervensi yang memadai terhadap prioritas permasalahan utama. Oleh karena itu, penting bagi Kabupaten Belitung Timur untuk menjadikan peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi sebagai salah satu prioritas pembangunan di tahun 2025.

2.5.4.5. Kualitas Lingkungan Hidup Masih Perlu Ditingkatkan

Kabupaten Belitung Timur menghadapi tantangan serius terkait kualitas lingkungan hidup, yang telah menjadi fokus penting dalam program pembangunan tahun 2025. Capaian indikator pada tahun 2023 mengungkapkan situasi yang memerlukan perhatian serius. Indeks Kualitas Air sebesar 61,56 menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kontrol pada kualitas air. Begitu pula dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang mencapai 43,89, menandakan perlunya pengelolaan lahan yang lebih berkelanjutan dan efisien. Meskipun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada angka 71,33, masih terdapat ruang untuk peningkatan yang signifikan. Salah satu perhatian utama adalah kurangnya infrastruktur industri pengolahan sampah yang memadai, mengingat volume sampah yang terus meningkat. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis harus diambil untuk memperbaiki kondisi ini, termasuk pengembangan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan ramah lingkungan. Kabupaten Belitung Timur perlu berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari rencana pembangunan masa depannya.

2.5.4.6. Belum Meratanya Kesejahteraan Masyarakat

Kabupaten Belitung Timur menghadapi tantangan yang signifikan terkait kesejahteraan masyarakatnya. Capaian berdasarkan catatan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, data menunjukkan bahwa isu kesejahteraan masih belum merata. Angka kesakitan yang mencapai 10,38 menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Rasio Gini yang mencapai 0,25 menandakan adanya kesenjangan yang cukup besar dalam distribusi pendapatan dan kekayaan di antara penduduk. Persentase penduduk miskin sebesar 6,73 menyoroti ketidaksetaraan dalam kesempatan ekonomi dan akses terhadap sumber daya. Selain itu, indeks kedalaman kemiskinan (P1) yang mencapai 0,91 dan indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,23 menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur masih merupakan masalah yang mendalam dan kompleks. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, perlu adanya fokus dan upaya yang lebih besar dalam mengatasi ketimpangan kesejahteraan ini. Prioritas pembangunan di tahun 2025 haruslah mencakup program-program yang berorientasi pada mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, serta memberikan kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua penduduk Kabupaten Belitung Timur.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026. Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Belitung Timur diarahkan sesuai misi kedua dalam RPJMD yaitu “Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja”. Selain itu juga diarahkan sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 yaitu “Memperkuat Daya Saing Daerah dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kerangka Pendanaan dalam RKPD Tahun 2025 ini memberi gambaran tentang kondisi makro Kabupaten Belitung Timur serta pengaruh regional dan nasional maupun perekonomian global. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber - sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1.1 KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2023, PERKIRAAN TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025

Pemulihan ekonomi global cenderung melambat, tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi global yang tidak merata pada triwulan III tahun 2023, dipengaruhi antara lain oleh ketatnya kondisi keuangan, lemahnya pertumbuhan perdagangan, rendahnya optimism dunia usaha dan konsumen, meningkatnya ketegangan geopolitik pasca perang Rusia-Ukraina, berkembangnya konflik Palestina-Israel, dampak pengetatan kebijakan moneter, serta cuaca ekstrem. Ekonomi Amerika Serikat tumbuh sebesar 2,9 persen (YoY), Tiongkok tumbuh 4,9 persen (YoY), ekonomi Jepang melambat 1,2 persen (YoY), Korea Selatan tumbuh 1,4 persen (YoY), serta Singapura tumbuh 1,1 persen (YoY). Bank Sentral Sebagian besar negara cenderung mempertahankan suku bunganya, sejalan dengan adanya inflasi. Harga komoditas energi berada pada tren positif meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Sementara itu, harga komoditas pertanian masih melandai serta harga logam dasar yang variatif dan harga logam mulia menguat.

Prospek pertumbuhan global diperkirakan masih akan lemah seperti yang disampaikan oleh Lembaga Internasional. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2023 masih lebih rendah dari perkiraan pertumbuhan 2022, yaitu dari 3,1% menjadi 2,1%. Lalu pada 2024 perkiraannya mulai membaik menjadi tumbuh 2,4% dan baru pada 2025 mampu kembali ke posisi 3%. Proyeksi pertumbuhan Bank Dunia untuk 2023 sebetulnya mengalami revisi ke atas sebesar 0,4% dibandingkan proyeksi pada Januari 2023 yang sebesar 1,7%. Kendati begitu, untuk 2024 proyeksi mengalami revisi ke bawah sebesar minus 0,3% karena tekanan dari panjangnya pengaruh suku bunga acuan yang tinggi.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) juga sedikit menaikkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia seiring dengan mulai meredanya inflasi dan pencabutan pembatasan ketat Covid di China. Mereka memperkirakan ekspansi ekonomi tahun 2023 sebesar 2,7% naik dari 2,6% di bulan Maret. Tapi secara keseluruhan proyeksi pertumbuhan global masih rendah dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan pada 2022 sebesar 3,3%.

Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan perekonomian global melambat dari 3,4% pada 2022 menjadi 2,8% pada 2023. Proyeksi ini turun 0,1 poin persentase/pp dibandingkan proyeksi Januari, meskipun selanjutnya membaik ke level 3,0% di 2024 atau turun 0,1 pp dari perkiraan Januari. IMF menganggap gejolak sektor keuangan di Amerika Serikat dan Eropa serta tekanan inflasi yang persisten tinggi menyebabkan momentum penguatan pemulihan yang sempat terjadi di awal tahun kini meredup, membuat prospek pertumbuhan lebih rendah.

3.1.1.2 Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan pada triwulan III tahun 2023 sebesar 4,9 persen (YoY), dipengaruhi oleh faktor musiman dan sedikitnya momen hari besar keagamaan pada triwulan ini. Dari sisi pengeluaran, Sebagian komponen berkontraksi yakni konsumsi pemerintah, ekspor, dan impor. Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan pada sisi pengeluaran. Konsumsi rumah tangga yang tetap tumbuh tinggi ditopang dengan daya beli Masyarakat yang tetap kuat seiring dengan terkendalinya inflasi, tercermin dari meningkatnya pertumbuhan subkomponen makanan dan minuman, selain restoran serta transportasi dan komunikasi. Sementara dari sisi produksi, hampir seluruh sektor tumbuh positif kecuali jasa Pendidikan dan administrasi pemerintahan, dengan sumber pertumbuhan tertinggi masih terjadi pada sektor industri pengolahan.

Perkembangan kondisi fiskal Indonesia tetap terjaga sejalan dengan pendapatan negara yang tumbuh positif, serta belanja negara dan tingkat utang yang terkendali. Pendapatan negara dan hibah tumbuh 3,1 persen (YoY) menjadi sebesar Rp2.035,6 triliun atau mencapai 82,6 persen dari pagu APBN 2023. Kinerja tersebut didorong oleh pendapatan dalam negeri, penerimaan perpajakan, dan PNB yang tetap tumbuh. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp1.967,9 triliun atau tumbuh 2,8 persen (YoY). Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 64,3 persen dari APBN, sementara TKD mencapai 70,0 persen. Realisasi TKD pada triwulan III tahun 2023 meningkat 3,3 persen (YoY) yang didorong oleh tumbuhnya realisasi DAU, DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Keistimewaan DIY. Berdasarkan capaian tersebut, anggaran hingga September 2023 berada pada kondisi surplus sebesar Rp67,7 triliun atau sekitar 0,3 persen terhadap PDB. Dengan perkembangan tersebut, posisi utang pemerintah mencapai Rp7.891,6 triliun atau sebesar 38,0 persen terhadap PDB.

Sepanjang triwulan III tahun 2023, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,75 persen, sebagai langkah untuk mengendalikan ekspektasi inflasi serta menjaga momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas nilai tukar. Sementara itu, likuiditas perekonomian dan perbankan mengalami penurunan namun tetap memadai. Longgarnya likuiditas perekonomian dan perbankan mendukung intermediasi perbankan dan stabilitas sistem keuangan. Rata-rata nilai tukar Rupiah pada triwulan III tahun 2023 sebesar Rp15.216 per USD, melemah 1,95 persen (YoY). Pelemahan nilai tukar Rupiah dipengaruhi oleh tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, penguatan dolar AS, dan pengetatan kebijakan moneter oleh berbagai bank sentral. Sementara itu, inflasi domestik menunjukkan tren penurunan namun masih berada di atas rentang target inflasi nasional 2023.

Neraca Pembayaran Indonesia pada triwulan III tahun 2023 mengalami perbaikan defisit menjadi defisit sebesar USD 1,5 miliar, didorong oleh perbaikan defisit transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial. Defisit transaksi berjalan setara 0,2 persen dari PDB, menurun jauh dibandingkan triwulan sebelumnya. Defisit transaksi berjalan yang membaik dipengaruhi oleh meningkatnya surplus neraca perdagangan nonmigas, perbaikan defisit neraca neraca jasa dan neraca pendapatan primer, serta stabilnya surplus neraca

pendapatan sekunder. Neraca perdagangan barang mengalami surplus USD10,3 miliar yang didorong oleh peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas ditengah peningkatan defisit neraca perdagangan migas. Sementara itu, neraca transaksi modal dan finansial mengalami perbaikan defisit yaitu sebesar USD0,3 miliar, yang ditopang oleh surplus investasi langsung dan investasi lainnya.

Perekonomian Indonesia pada triwulan IV tahun 2023 diperkirakan tetap kuat dan terus berlanjut ditengah prospek penurunan ekonomi global. Perekonomian Indonesia pada triwulan IV Tahun 2023 diperkirakan tumbuh 5,1 persen (YoY) sejalan dengan tetap kuatnya konsumsi masyarakat meskipun sedikit tertahan. Selain itu, dipengaruhi oleh perkiraan peningkatan pertumbuhan konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah dan PMTB sejalan dengan adanya aktivitas partai politik menjelang pemilu, penyerapan anggaran pemerintah pada akhir tahun, serta investasi proyek pemerintah seperti PSN dan IKN. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh sejumlah sektor yang diperkirakan mampu tumbuh tinggi, serta memiliki kontribusi tinggi terhadap pertumbuhan. Industri pengolahan masih menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan tumbuh solid, meskipun berada dibawah pertumbuhan ekonomi.

3.1.1. Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Provinsi

3

Pada triwulan IV 2023, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh 4,00% (yoy), stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,01% (yoy). Pertumbuhan ekonomi utamanya ditopang oleh lapangan usaha (LU) Perdagangan, LU Konstruksi, dan LU Industri Pengolahan. Maraknya ritel modern dan lokal yang diikuti dengan peningkatan mobilitas masyarakat, khususnya pada momentum HBKN Nataru, libur sekolah, dan pelaksanaan berbagai event besar, menjadikan LU Perdagangan sebagai sumber pertumbuhan tertinggi perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan IV 2023 sebesar 1,47%. Dari sisi permintaan, perekonomian ditopang oleh seluruh komponen pengeluaran yang tumbuh positif, kecuali Ekspor serta Impor Barang dan Jasa. Konsumsi Rumah Tangga memberikan andil tertinggi dalam perekonomian sebesar 2,26%. Secara keseluruhan tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat 4,38% (yoy), stabil dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,40% (yoy).

Sampai dengan triwulan IV 2023, realisasi pendapatan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Bangka Belitung mencapai Rp9,71 triliun atau turun 3,78% (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu. Realisasi tersebut setara dengan 97,06% dari total pagu. Sedangkan realisasi belanja APBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp 10,86 triliun atau setara 91,39% total pagu, tumbuh 18,69% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara realisasi belanja APBN Kementerian/Lembaga yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp3,29 triliun atau 98,02% dari pagu 2023.

Pada triwulan IV 2024, gabungan dua kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami inflasi 2,65% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,55% (yoy). Penurunan tekanan inflasi utamanya disebabkan oleh turunnya indeks harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dan kelompok transportasi. Pada triwulan IV 2023, Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 5,11% (yoy) dengan andil inflasi 1,74%. Sementara itu, kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 2,30% (yoy) dengan andil inflasi 0,34%. Inflasi pada periode laporan terjadi pada hampir seluruh kelompok pengeluaran, kecuali kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Secara spasial, Kota Pangkalpinang mengalami inflasi 2,01% (yoy) dan Kota Tanjungpandan mengalami inflasi 3,80% (yoy).

Kondisi stabilitas sistem keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode triwulan IV 2023 menunjukkan penguatan seiring dengan optimisme pelaku usaha dan rumah tangga terhadap pertumbuhan kondisi ekonomi. Pembiayaan korporasi dan rumah tangga dari perbankan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan IV 2023 mengalami peningkatan, sementara kinerja pembiayaan pada sektor UMKM tetap tumbuh positif namun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pada triwulan IV 2023, transaksi nontunai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari nilai nominal transaksi kliring, QRIS, kartu kredit, dan uang elektronik yang tumbuh dibandingkan triwulan sebelumnya. Penetrasi transaksi digital melalui kanal QRIS semakin dalam tercermin dari penambahan jumlah merchant dan pengguna (user) baru dibandingkan pada triwulan IV 2023. Di sisi lain, transaksi tunai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami net outflow, seiring momen perayaan HBKN Natal dan Tahun Baru yang dirayakan secara masif oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga terjadi peningkatan konsumsi dan mobilitas masyarakat.

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Agustus 2023 terus menunjukkan perbaikan. Hal ini tercermin dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang meningkat disertai dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menurun pada periode Agustus 2023. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV 2023 juga mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu dari sisi tingkat pemerataan pendapatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki Gini Ratio terendah dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.

Kinerja perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, didorong oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja perekonomian diperkirakan didorong oleh LU Industri Pengolahan, LU Pertanian, dan LU Perdagangan. Sementara itu, tekanan inflasi pada tahun 2024 diperkirakan berada pada rentang target inflasi 2024 yaitu 2,5+1%.

3.1.1. Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Kabupaten

4

Kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator makro ekonomi suatu daerah. Salah satu indikator ekonomi makro yang sering digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi, yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDRB). Besarnya nilai PDRB yang berhasil dicapai dan perkembangannya merupakan refleksi dari kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB Belitung Timur pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Belitung Timur atas dasar harga konstan, mencapai 6.211.049,16 juta rupiah. Angka tersebut naik dari 5.931.235,35 juta rupiah pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,72 persen.

Pada tahun 2023, dari tujuh belas kategori lapangan usaha yang menyusun perekonomian Kabupaten Belitung Timur, enam belas lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif dan satu lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif. Dari enam belas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif tersebut, terdapat delapan kategori lapangan usaha yang mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2022, sedangkan delapan kategori lainnya mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil pemantauan BPS pada Desember 2023 di Kota Tanjungpandan, terjadi inflasi y-on-y dan y-to-d sebesar 3,80 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 115,54 pada Desember 2022 menjadi 119,93 pada Desember 2023. Secara m-to-m tercatat deflasi sebesar 0,57 persen.

Inflasi y-on-y dan y-to-d terjadi karena adanya peningkatan indeks pada hampir seluruh kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,30 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,16 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,97 persen; kelompok Kesehatan sebesar 2,76 persen; kelompok transportasi sebesar 6,02 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,67 persen; kelompok pendidikan sebesar 6,90 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,87 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,27 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu, kelompok perumahan, air, Listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,06 persen; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,22 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil terhadap inflasi y-on-y dan y-to-d pada Desember 2023 antara lain: beras, angkutan udara, cabai merah, cabai rawit, rokok kretek filter, udang basah, rokok putih, tahu mentah, kangkong, bawang putih. Sebaliknya, komoditas yang memberikan andil deflasi y-on-y dan y-to-d diantaranya adalah: ikan kerisi, ikan kembung, ikan selar, ikan tongkol, dan telur ayam ras.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,245. Angka ini meningkat 0,009 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2022 yang sebesar 0,236. Gini Ratio Kabupaten Belitung Timur 2023 tercatat sebesar 0,228, turun dibanding Gini Ratio tahun 2022 yang sebesar 0,250.

Tabel 3. 1 Kondisi Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2023 dan Proyeksi Tahun 2024-2025

Indikator Makro	Capaian			Proyeksi	
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,55	3,79	4,72	5,1	5,2
Inflasi (%)	4,01	4,17	3,80	3±1	3±1
Gini Rasio	0,256	0,236	0,245	0,245	0,245

**data semester I Tahun 2024*

Sumber: Bappelitbangda Kab. Belitung Timur (data diolah)

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Tahun 2022 sebesar 3,79 persen, dan pada tahun 2023 ekonomi Kabupaten Belitung Timur kembali tumbuh sebesar 4,72 persen. 16 dari 17 kategori lapangan usaha tumbuh positif kecuali 1 sektor lainnya yang mengalami kontraksi yaitu pertambangan dan penggalian. Tahun 2024 diproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,1 persen dan meningkat ke 5,2 persen pada tahun 2025. Proyeksi pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan konsumsi dan investasi, yang akan didukung dengan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), pemilihan umum (pemilu). Namun kondisi ini tidak lepas dari perekonomian dunia yang diperkirakan masih terus dibayangi ketidakpastian global dan mewaspadai tantangan dari dalam negeri/domestik. tantangan tersebut antara lain kenaikan suku bunga dalam negeri, ketahanan pangan nasional, pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi politik dalam negeri.

2. Inflasi

Inflasi y-on-y merupakan gambaran tingkat inflasi selama 1 tahun yang lalu pada bulan berjalan. Pada Desember 2023, inflasi tahun ke tahun atau year on year (y-on-

y) dan tahun kalender atau year to date (y-to-d) memperhitungkan perubahan IHK pada periode yang sama sehingga angkanya juga akan menunjukkan nilai yang sama. Inflasi y-on-y tertinggi di Kota Tanjungpandan sepanjang Desember 2022 hingga Desember 2023 tercatat di Februari 2023 yang mencapai 7,34 persen, dan terendah di Juli 2023 sebesar 2,69 persen. Adapun inflasi y-on-y dan inflasi y-to-d Desember 2023 yang sebesar 3,80 persen utamanya disebabkan oleh komoditas beras, angkutan udara, cabai merah, cabai rawit, rokok kretek filter, udang basah, rokok putih, tahun mentah, kangkung, bawang putih.

3. Gini Rasio

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 sebesar 0,245, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 0,236 dan masuk dalam kriteria ketimpangan rendah. Semakin tinggi nilai Gini Rasio berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran. Bila gini ratio=0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Dan apabila gini ratio=1, ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu atau satu kelompok saja dan yang lainnya tidak sama sekali. Target Rasio Gini Tahun 2024 dan 2025 diproyeksikan sebesar 0,245.

3.1.2 TANTANGAN PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025

Tantangan perekonomian global maupun nasional di tahun 2024 masih diwarnai oleh ketidakpastian ekonomi global, situasi geopolitik yang juga tidak menentu yang bisa memicu krisis keuangan, krisis energi, krisis pangan, dan larinya pada resesi global. Selain konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang terus berlanjut bahkan memanas, kemungkinan konflik Cina dan Amerika Serikat jika terus berlanjut bisa berdampak bagi perekonomian Indonesia. Serta seberapa cepat dunia pulih dari dampak pengetatan kebijakan moneter di 2 tahun terakhir ini karena inflasi yang tinggi.

Pada tahun 2025, tantangan perekonomian Indonesia akan dipengaruhi oleh infrastruktur dan investasi, transformasi digital, ketahanan energi dan sumber daya alam,, ketidakpastian global serta ketimpangan ekonomi dan sosial.

Mempertimbangkan kondisi perekonomian tahun 2024, maka tantangan pokok sehubungan dengan perekonomian daerah yang nantinya akan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2025, yakni :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, merupakan prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatkan daya tarik Belitung Timur sebagai tujuan investasi baik bagi investor asing maupun domestik adalah tantangan penting. Hal ini melibatkan penyederhanaan regulasi dan peningkatan iklim bisnis
3. Mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah;
4. Meningkatkan kemampuan digital usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mereka dapat berkompetisi dalam ekonomi digital
5. Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim;

- 6. Pengendalian inflasi;
- 7. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat;
- 8. Mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja;
- 9. Mendorong investasi pada bidang hilirisasi produk pertanian dan perikanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi;
- 10.Kesiapan masyarakat dan *stakeholders* terkait digitalisasi pelayanan publik.

3.1.3 PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025

Kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator makro ekonomi suatu daerah. Salah satu indikator ekonomi makro yang sering digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi, yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDRB). Besarnya nilai PDRB yang berhasil dicapai dan perkembangannya merupakan refleksi dari kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Kondisi perekonomian Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 kembali tumbuh apabila dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu sebesar 3,79 persen menjadi 4,72 persen dan angka tersebut melebihi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sebesar 4,50%.

Berdasarkan harga konstan 2011, Nilai PDRB Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan, dari 5.931.235,35 juta rupiah pada tahun 2022 menjadi 6.211.049,16 juta rupiah pada tahun 2023.. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2023, Kabupaten Belitung Timur mengalami kenaikan PDRB sebesar 4,71 persen atau bertambah sebesar 279.813,81 juta rupiah.

Tabel 3. 2 PDRB Kabupaten Belitung Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2018-2023

Kategori PDRB	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.326.146,00	1.407.550,56	1.426.658,01	1.447.931,63	1.520.082,15
Pertambangan dan Penggalian	974.475,00	959.658,61	996.208,60	994.831,51	977.396,77
Industri Pengolahan	1.090.689,00	1.083.659,37	1.163.930,71	1.233.354,36	1.278.768,25
Pengadaan Listrik dan Gas	3.515,00	3.607,48	4.051,34	3.951,39	4.085,44
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.014,00	1.005,59	1.035,37	1.085,23	1.091,07
Konstruksi	416.599,00	401.227,67	415.430,96	416.063,58	457.273,17
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	578.292,00	527.716,19	565.732,56	634.496,77	665.917,37

Kategori PDRB	2019	2020	2021	2022	2023
dan Sepeda Motor					
Transportasi dan Pergudangan	113.606,00	104.569,20	110.237,17	121.480,78	127.985,15
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	129.456,00	125.326,25	135.400,03	153.105,15	171.173,01
Informasi dan Komunikasi	79.672,00	87.736,05	92.147,98	99.085,01	113.090,81
Jasa Keuangan dan Asuransi	23.583,00	24.012,40	26.036,18	27.762,38	31.754,30
Real Estate	156.511,00	160.246,33	166.393,30	176.178,72	186.129,15
Jasa Perusahaan	16.160,00	14.218,30	15.089,20	16.458,21	17.765,63
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	341.771,00	322.547,50	340.531,36	341.554,95	371.637,79
Jasa Pendidikan	139.121,00	134.747,18	138.742,47	142.216,11	154.797,12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	78.294,00	79.093,86	87.413,04	89.613,15	97.906,30
Jasa lainnya	31.073,00	28.536,91	29.755,92	32.066,42	34.195,70
Jumlah	5.499.978,00	5.465.459,44	5.714.794,20	5.931.235,35	6.211.049,16

Sumber : BPS Kabupaten Belitung Timur 2024

Kabupaten Belitung Timur angka inflasi menggunakan angka inflasi Kota Tanjungpandan, berdasarkan hasil pemantauan BPS pada desember 2023 di Kota Tanjungpandan, terjadi inflasi y-on-y sebesar 3,80 persen, atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 115,54 pada Desember 2022 menjadi 119,93 pada Desember 2023. Inflasi tahun 2024 dan 2025 diperkirakan berada di kisaran angka 3±1 persen. Proyeksi tersebut masih dilingkupi ketidakpastian, ada sejumlah resiko yang perlu diwaspadai diantaranya dari kesinambungan pasokan distribusi pangan antar daerah dan antar waktu, termasuk menyambut periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Untuk itu, sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan BI melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) guna mengendalikan inflasi sesuai kisaran target.

Mencermati kompleksitas dan skala hambatan dan tantangan yang dihadapi serta strategis pembangunan daerah, maka pencapaian sasaran pembangunan ekonomi Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2025 diarahkan pada intervensi kebijakan ekonomi yang bersifat spesifik terkait dengan pencapaian pembangunan jangka pendek. Intervensi kebijakan yang akan diambil pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Memperkuat sektor kesehatan mulai dari level pemerintahan terkecil.

Penguatan sektor ini dapat dilakukan melalui : i) peningkatan kesadaran masyarakat seperti perilaku sehat dengan penguatan Gerakan Masyarakat

Hidup Sehat (GERMAS) di seluruh lini masyarakat dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media, ii) tetap berkomitmen terhadap perlindungan kesehatan yang mencakup seluruh masyarakat (Universal Health Coverage/ UHC), iii) menurunkan angka prevalensi stunting, iv) peningkatan capaian Standar pelayanan Minimal (SPM) urusan kesehatan, v) mewujudkan Belitung Timur sebagai Kabupaten sehat.

2. Memperkuat sektor Sosial

Penguatan sektor sosial dilakukan melalui : i) percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dengan melibatkan lintas sektor/ lintas program, ii) peningkatan capaian Standar pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial, iii) penyusunan regulasi daerah mengenai sistem Jaring Pengaman Sosial secara terpadu, terarah dan terintegrasi serta regulasi daerah mengenai kriteria kemiskinan daerah.

3. Mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah.

Menurut data Koperasi, Usaha Keci, dan Menengah (KUKM) sampai dengan tahun 2023, jumlah pelaku UMKM sebanyak 19.311 UMKM.

Dari data di atas, Kabupaten Belitung Timur mempunyai potensi basis ekonomi yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak.

Pemerintah dan pelaku usaha harus menaikkan 'kelas' usaha mikro menjadi usaha menengah. Basis usaha ini juga terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Usaha mikro juga mempunyai perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat. Pemerintah menyadari akan potensi UMKM tersebut, oleh sebab itu, beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah Kabupaten mengambil kebijakan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil agar dapat naik kelas menjadi usaha menengah. Mendorong terciptanya kerjasama dengan Bank Konvensional yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam rangka pemberian akses modal kepada UMKM Binaan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

4. Optimalisasi potensi wilayah mulai dari potensi pariwisata, potensi perikanan , potensi pertanian, dan potensi industri pengolahan;
5. Optimalisasi pengembangan sektor pariwisata, sektor perikanan, sektor pertanian, dan sektor industri pengolahan;
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat;
7. Peningkatan kompetensi tenaga kerja masyarakat;
8. Penuhbuhan dan peningkatan semangat kewirausahaan bagi pemuda;
9. Mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan;
- 10.Mendorong investasi hilirisasi produk pertanian dan perikanan;

11. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk pengembangan ekonomi sektor prioritas;
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana;
13. Peningkatan Ketahanan Pangan;
14. Pengendalian Inflasi Daerah;
15. Peningkatan kerjasama dan sinergi pembangunan antar daerah;
16. Peningkatan kualitas layanan perizinan dan penanaman modal;
17. Peningkatan kapasitas layanan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE);
18. Peningkatan inovasi daerah.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pendapatan daerah, belanja daerah, surplus (defisit), pembiayaan daerah maupun Sisa Lebih Pembiayaan Daerah (SILPA). Dalam hal ini kinerja keuangan yang menjadi dasar penilaian adalah kinerja keuangan daerah selama tahun 2019-2023 yang secara umum tergambar dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan berbagai laporan yang memuat data keuangan daerah.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan turunannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terjadi perubahan struktur APBD yang akan disajikan dalam dokumen ini. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain;
3. penerimaan daerah;
4. pengeluaran daerah;
5. kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pelaksanaan APBD setiap tahunnya dilaporkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

untuk dilakukan pemeriksaan dan audit dan untuk mendapatkan opini. Laporan keuangan tahun 2022 yang diaudit pada tahun 2023 merupakan sejarah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur karena telah 4 (empat) kali berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2019 hingga 2022. Diharapkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam periode RPJMD 2021-2026.

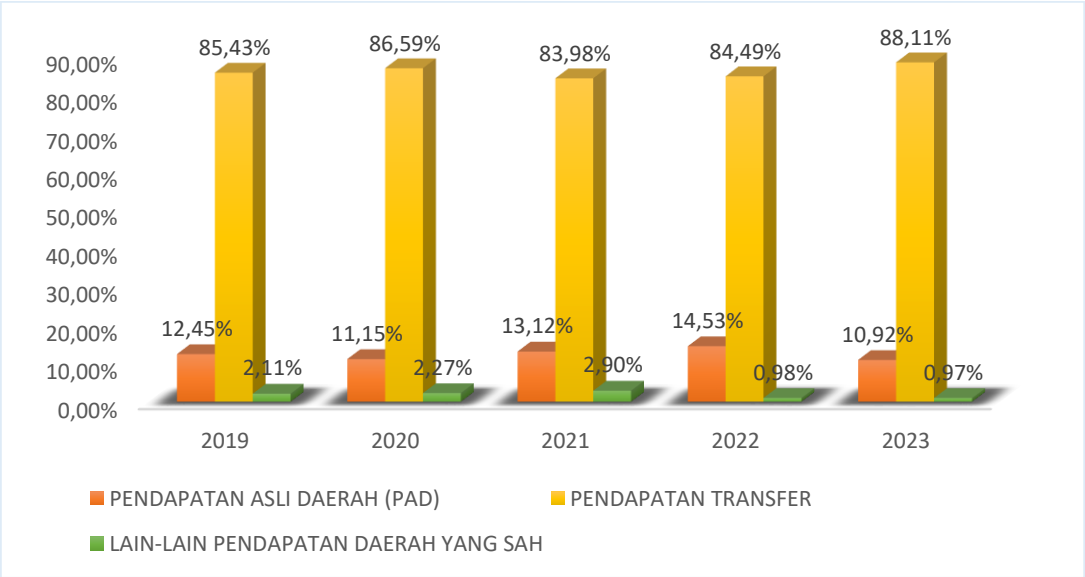
3.2.1 KINERJA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2019-2023

Kinerja pelaksanaan APBD menguraikan analisis terhadap realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2019-2023. Pada periode 2018-2020, pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara itu Tahun Anggaran 2021-2022, menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun dalam bab ini akan disajikan analisis sebagaimana pembukuan akuntansi Akrual.

3.2.1.1 Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk Perubahan Anggaran Tahun 2023, salah satunya diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Belitung Timur disusun dengan beRp.edoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Belitung Timur, Provinsi dan Nasional yang bersifat dinamis serta memperhatikan dinamika perekonomian ekonomi global terkini.

Arah kebijakan perekonomian tahun 2023 juga disusun dengan memperhatikan dokumen RP.JMD Kabupaten Belitung Timur tahun 2021-2026. Dengan harapan ekonomi nasional, regional dan lokal akan tumbuh sampai dengan akhir tahun anggaran 2023, maka diproyeksikan sumber-sumber ekonomi akan membawa dampak dalam mencapai target perencanaan pendapatan daerah. Semakin tinggi penerimaan pemerintah pusat maka akan beRp.engaruh terhadap potensi naiknya penerimaan dana perimbangan/transfer dari pemerintah pusat dan sebaliknya. Semakin tinggi penerimaan provinsi maka akan semakin beRp.engaruh terhadap potensi naiknya dana bagi hasil bagi provinsi. Selanjutnya, semakin tumbuhnya dunia usaha dan semakin membaiknya pelayanan pemerintah daerah diharapkan mampu mendukung tercapainya target Pendapatan Asli Daerah.

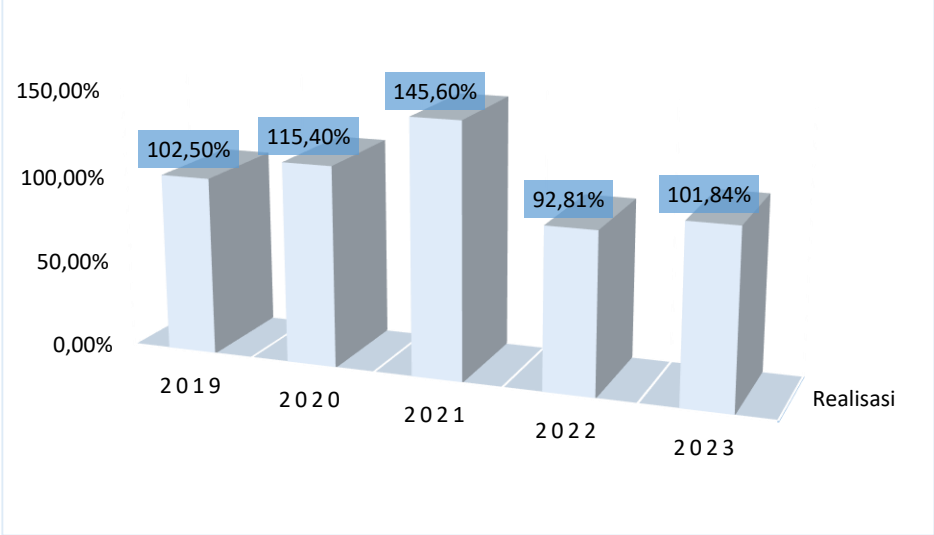


Grafik 3. 1 Proporsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019-2023

Dengan memperhatikan grafik di atas, terlihat bahwa Kabupaten Belitung Timur masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pendapatan transfer, terutama transfer pemerintah Pusat, dimana 88,11% dari komponen Pendapatan Transfer berasal dari pendapatan transfer pusat. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tingkat kemandirian daerah di hitung berdasarkan perbandingan antara PD dengan total pendapatan. Tingkat kemandirian daerah kabupaten Belitung Timur terjadi sedikit fluktuatif dari tahun 2019 hingga 2023, menurun di tahun 2021 yaitu proporsi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah 83,98% dan terus meningkat di 2022 dan 2023 hingga 88,11%.

Tabel 3. 3 Rincian Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDAPATAN TRANSFER	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	TOTAL PENDAPATAN DAERAH
2019	108.496.528.960	744.221.077.914	18.404.400.000	871.122.006.874
2020	88.507.836.791	687.458.507.442	17.987.700.000	793.954.044.233
2021	111.210.150.282	711.767.265.440	24.595.282.437	847.572.698.159
2022	128.256.199.761	746.010.500.214	8.646.848.214	882.913.548.189
2023	97.955.234.467	790.163.206.515	8.695.735.177	896.814.176.159



Grafik 3. 2 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019-2023

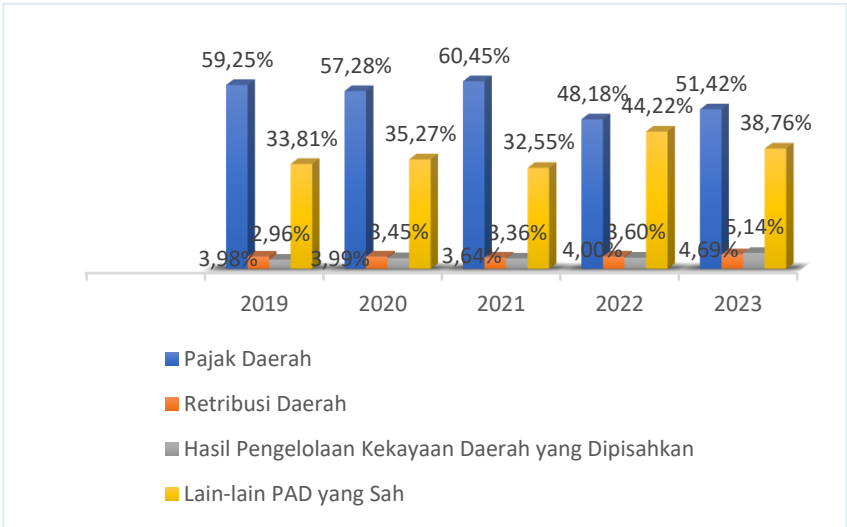
3.2.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berikut rincian kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2019-2023:

Tabel 3. 4 Rincian Anggaran pada Komponen Pendapatan Asli Daerah

TAHUN	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	TOTAL PAD
2019	63.522.158.000	4.288.735.000	3.293.903.357	37.391.732.603	108.496.530.979
2020	47.050.000.000	3.613.348.000	3.528.730.864	34.315.757.927	88.507.838.811
2021	66.020.698.070	4.513.130.833	3.918.728.951	36.757.592.428	111.210.152.303
2022	67.908.354.863	4.827.890.000	4.282.259.902	51.237.694.996	128.256.199.761
2023	51.049.854.537	5.061.802.000	5.523.052.522	36.320.525.407	97.955.234.467

Tabel
pada
Asli



3. 5 Realisasi
Pendapatan
Komponen
Pendapatan
Daerah

TAHUN	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	TOTAL PAD
2019	65.914.998.890,64	4.429.253.111,00	3.293.903.356,97	37.609.647.246,26	111.247.802.604,87
2020	58.519.124.050,59	4.079.465.546,00	3.528.730.864,06	36.032.264.395,39	102.159.584.856,04
2021	70.542.484.276,20	4.248.191.721,00	3.918.728.951,73	37.988.138.760,81	116.697.543.709,74
2022	57.353.157.980,80	4.764.580.048,00	4.282.259.902,25	52.631.339.258,51	119.031.337.189,56
2023	55.223.937.728,88	5.033.957.058,00	5.523.052.522,61	41.627.097.735,32	107.408.045.044,81

Grafik 3. 3 Realisasi Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019-2023

Ket. *) Data realisasi APBD Tahun Anggaran 2023, Unaudited
Sumber Data : BPKPD Beltim, data diolah Kembali

Retribusi Daerah, meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai retribusi daerah. Retribusi Daerah pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 269.377.010,00 dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 4.764.580.048,00 naik menjadi Rp.5.033.957.058,00 ditahun 2023.. Dan selama kurun waktu dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami rata rata kenaikan sebesar 2,58 persen

Lain lain PAD yang sah terdiri dari : hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; hasil kerjasama daerah; jasa giro; hasil pengelolaan dana bergulir; pendapatan bunga, penerimaan atas tututan ganti Kerugian Keuangan Daerah; penerimaan

komisi,potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar,hibah asuransi, dan atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank , penerimaan dari pemanfaatan barang milik daerah, atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing ; pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan; pendapatan denda pajak daerah; pendapatan denda retribusi daerah; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari pengembalian ; pendapatan dari BLUD; pendapatan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan. Dan pada tahun 2021 dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang pendapatan dan pengelolaan Dana Kapitasi, untuk rekening Dana Kapitasi yang semula dianggarkan pada Lain-lain PAD yang sah dialihkan ke Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

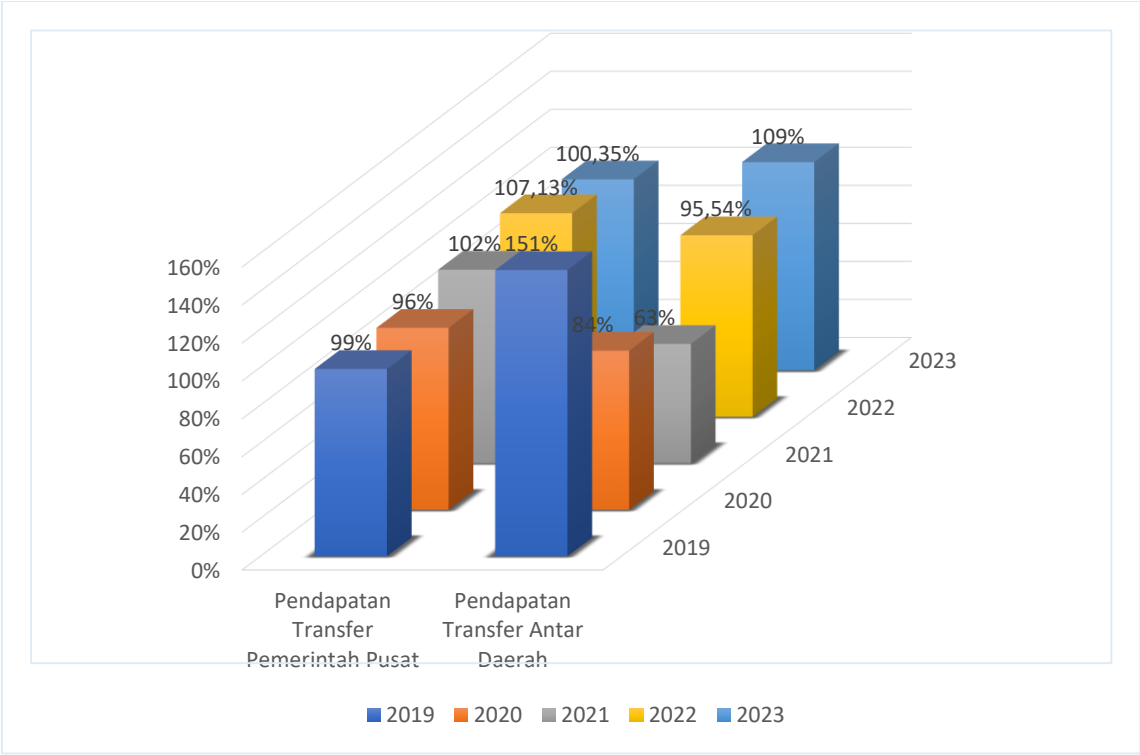
Lain – lain PAD yang sah tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 11.004.241.523,19, yang pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 52.631.339.258,51 menjadi sebesar Rp. 41.627.097.735,32.

3.2.1.1. Pendapatan Transfer
2

Pendapatan Transfer yang diterima Kabupaten Belitung Timur terdiri Dana Perimbangan (DTU dan DAK), Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Sementara Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan transfer disajikan sebagai berikut.

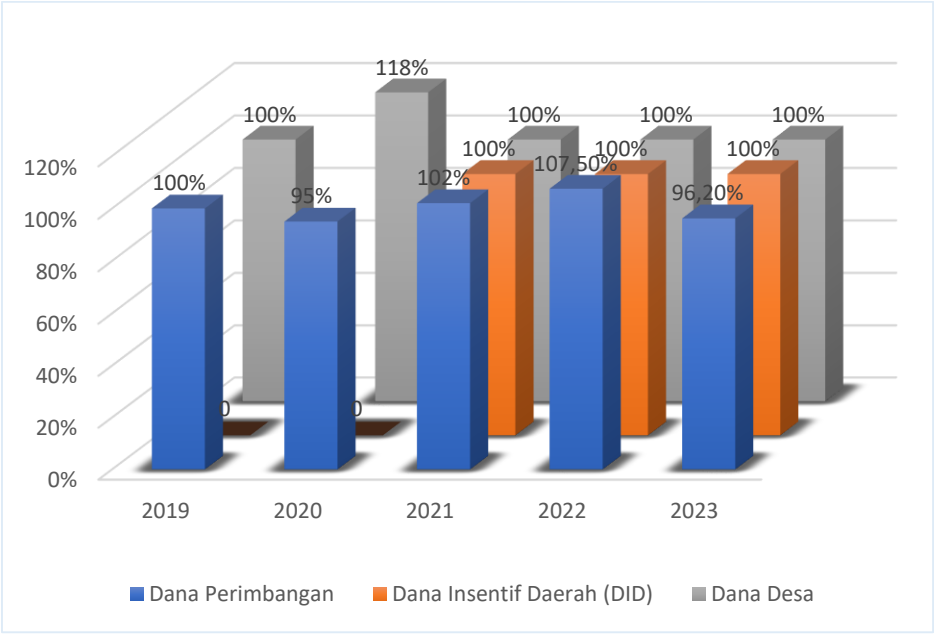
Tabel 3. 6 Rincian Anggaran Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2019-2023

Tahun	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			Pendapatan Transfer Antar Daerah	
	Dana Perimbangan	DID	Dana Desa	Bagi Hasil Pajak	Bantuan Keuangan
2019	668.172.852.514	0	43.155.579.000	30.400.000.000	3.826.000.000
2020	597.808.186.349	0	44.699.097.000	41.823.024.093	3.128.200.000
2021	588.932.463.000	17.102.842.000	47.315.188.000	55.457.572.440	2.959.200.000
2022	653.703.757.250	1.841.413.000	36.364.806.000	49.926.190.631	3.907.933.333
2023	674.167.326.842	26.408.103.000	3.883.640.000	48.015.136.673	2.689.000.000



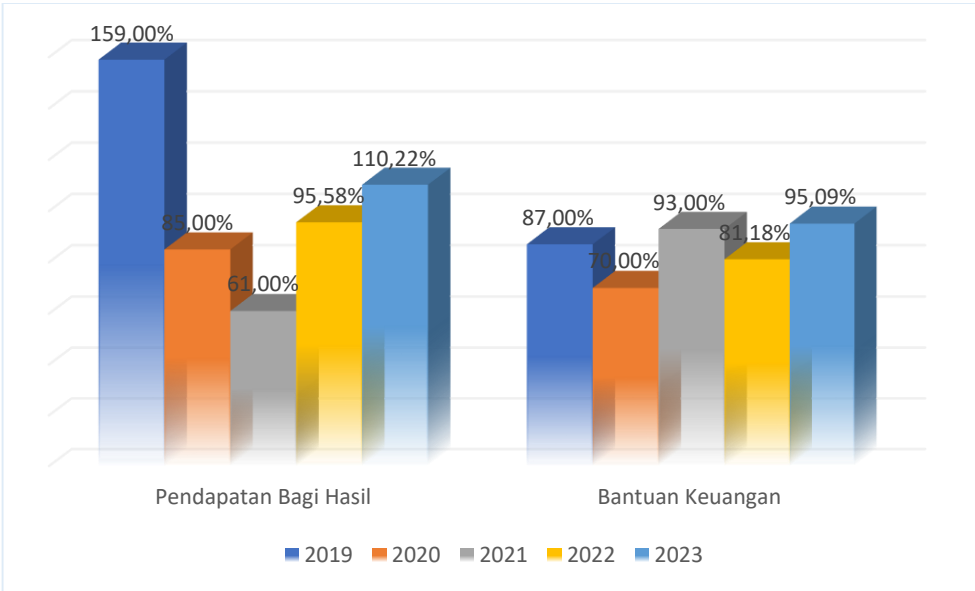
Grafik 3. 4 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019-2023

*Ket. *) Data realisasi APBD Tahun Anggaran 2023, Unaudited
Sumber data : BPKPD Kab.Belitung Timur, data diolah kembali, 2024*



Grafik 3. 5 Realisasi DanaTransfer Pemerintah Pusat

*Ket. *) Data realisasi APBD Tahun Anggaran 2023, Unaudited
Sumber data : BPKPD Kab.Belitung Timur, data diolah kembali, 2024*



Grafik 3. 6 Perbandingan Realisasi Dana Transfer Pusat

*Ket. *) Data realisasi APBD Tahun Anggaran 2023, Unaudited
Sumber data : BPKPD Kab.Belitung Timur, data diolah kembali, 2024*

Berdasarkan realisasi selama 5 tahun ini, terjadi fluktuatif dikarenakan adanya kebijakan keuangan pemerintah pusat, terutama di tahun 2020 dimana Indonesia bersama dengan negara lainnya mengalami pandemi covid-19 yang mengakibatkan beberapa kebijakan keuangan diterbitkan. Salah satu kebijakan keuangan pemerintah pusat yang berimbas ke Kab Belitung Timur adalah adanya rasionalisasi penerimaan Dana Perimbangan sebesar kurang lebih 10%.

Dana perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK), dimana DTU terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, sementara DTK terdiri dari DAK Fisik dan Non Fisik. Anggaran Pendapatan Transfer yang berasal dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi mempedomani mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang rincian APBN tahun bersangkutan dan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Dana Bagi Hasil maupun Bantuan Keuangan kepada Kabupaten. Sementara itu realisasi Pendapatan Transfer mempedomani aturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh kementerian keuangan Republik Indonesia, antara lain dengan mensyaratkan laporan-laporan belanja tertentu secara berkala, dan penerapan sanksi bagi daerah yang belum dapat memenuhi persyaratan tersebut yaitu penundaan bahkan pemotongan anggaran.

Dengan adanya pandemic covid-19 di mulai tahun 2020 yang mana juga mempengaruhi keuangan negara, beberapa kebijakan baik pendapatan maupun belanja yang bersumber dari pemerintah pusat mengalami penyesuaian-penyesuaian dengan menamanatkan refocusing bagi seluruh daerah untuk memprioritaskan ulang belanja daerah. Tahun 2021 Kabupaten Belitung Timur melalui PMK Nomor 17 tahun 2021 mengalami pengurangan alokasi DAU sebesar $\pm 3\%$ hal ini mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur harus melakukan refocusing anggaran.

Dengan diperolehnya opini BPK empat kali berturut-turut terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2022 maka Kabupaten Belitung Timur diproyeksikan akan memperoleh Dana Insentif Fiskal (DIF) di Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah yang sama di Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp. 26.408.103.000. Tentu saja tambahan pendapatan ini dapat

meningkatkan percepatan pembangunan daerah dibidang pendidikan, Kesehatan dan ekonomi daerah.

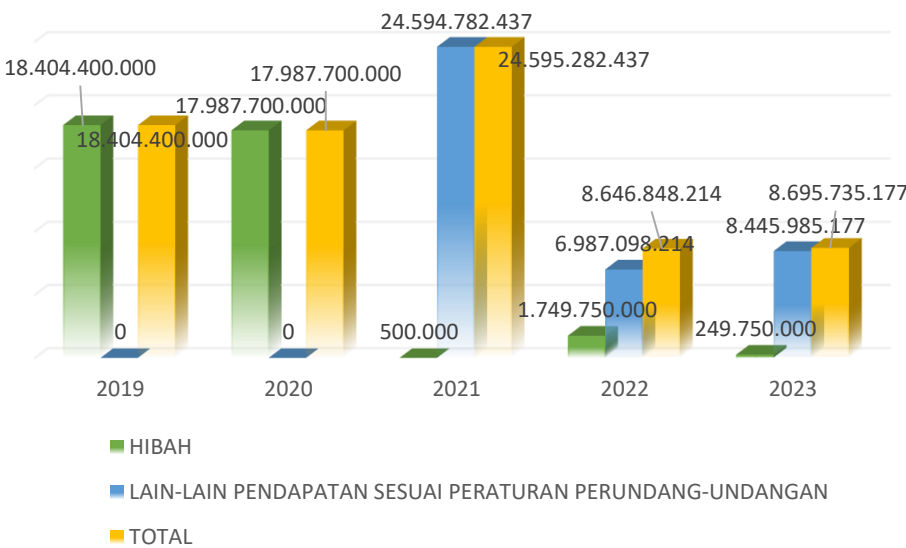
Pendapatan Transfer antar Daerah yang diterima Kabupaten Belitung Timur adalah Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten. Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya berasal dari bagi hasil pajak provinsi seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok dan sebagainya. Sedangkan Dana Bantuan Keuangan yang diterima digunakan sesuai dengan arahan pemerintah provinsi, dimana selama ini dipergunakan antara untuk menganggarakan insentif bagi guru honor, pemuka agama dan pemuka adat.

3.2.1.1. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 meliputi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu Pendapatan atas Pengembalian Hibah dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang ditargetkan sebesar Rp. 8.445.985.177,00 dan terealisasi sebesar Rp.8.412.879.414,00 atau sebesar 99,61% Sebelum penerapan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, penganggaran Hibah BOS masih dianggarkan pada rekening Hibah, namun pada APBD 2022 sudah dianggarkan pada rekening lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di tahun 2022, terdapat pendapatan dana kapitasi KKN pada FKTP dengan sebesar Rp 6.897.098.214 dan realisasi sebesar 5.927.290.870 yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Anggaran Pendapatan Lain-Lain PD yang Sah Tahun 2018-2022

TAHUN	HIBAH	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	TOTAL
2019	18.404.400.000	0	18.404.400.000
2020	17.987.700.000	0	17.987.700.000
2021	500.000	24.594.782.437	24.595.282.437
2022	1.749.750.000	6.987.098.214	8.646.848.214
2023	1.000.000.000	7.445.985.177	8.445.985.177



3.2.1.2 Belanja Daerah

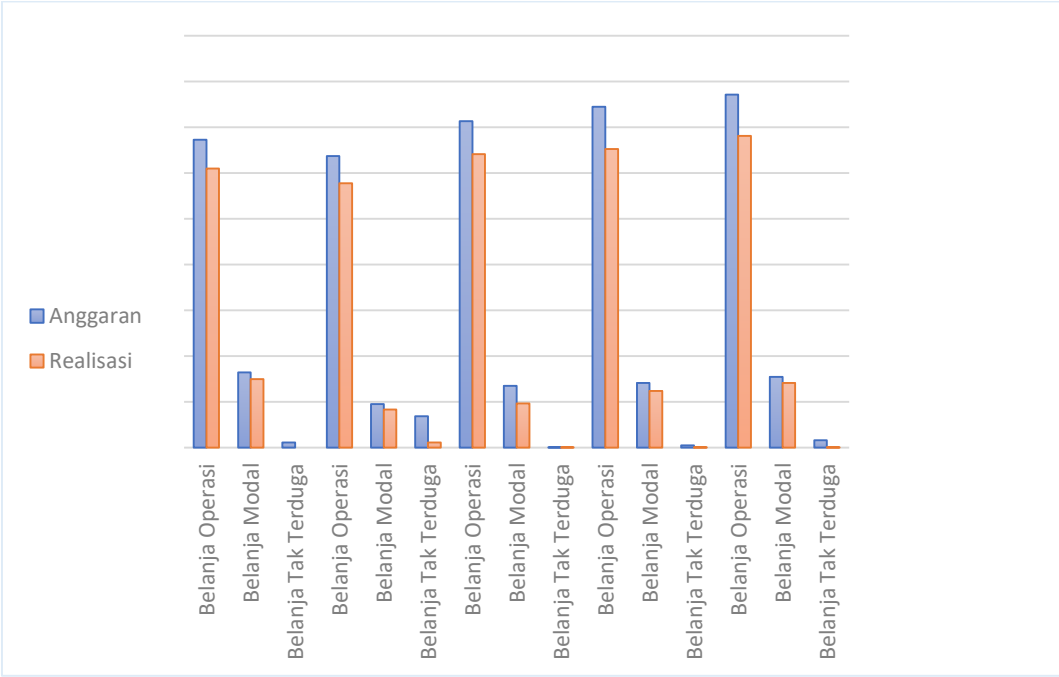
Menurut PP 12 Tahun 2019 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Tabel 3. 8 Anggaran Belanja Kabupaten Belitung Timur TA 2019-2023

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga
2019	672.480.885.822,76	164.389.536.685,00	11.111.498.655,46
2020	636.934.387.413,53	94.917.662.027,27	68.326.958.471,67
2021	713.518.845.576,00	134.827.452.347,00	938.791.769,00
2022	744.770.306.026,00	141.093.496.846,00	4.706.480.080,00
2023	771.338.851.881,00	154.392.050.365,00	16.118.836.845,00

Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Belitung Timur TA 2019-2023

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga
2019	610.108.647.123,88	149.642.796.103,00	0
2020	577.536.945.350,49	83.174.500.800,00	11.380.110.712,00
2021	641.440.914.877,89	96.095.891.289,57	635.975.007,00
2022	652.310.550.764,50	123.645.920.737,09	249.084.207,00
2023	681.366.908.279,00	140.952.247.876,00	627.079.203,00



Grafik 3. 7 Realisasi Belanja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019-2023

Sumber data : BPKPD Kab.Belitung Timur, data diolah Kembali, 2024

3.2.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Belitung Timur terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, Penerimaan Piutang Daerah.

- 2. pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, Pemberian Pinjaman Daerah, Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga, Dana Talangan, Pemberian Pinjaman Dana Bergulir; dan
- 3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Prinsip pembiayaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk dapat diminimalkan sehingga pembiayaan dianggarkan dapat untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus pada tahun anggaran berjalan, maka arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Dalam Kebijakan umum pembiayaan, bahwa penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah,serta pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan kebijakan umum pembiayaan di atas, maka pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan penerimaan sebesar Rp 153.535.018.028 dari target yang direncanakan tersebut telah terealisasi Rp 153.680.929.458,00. Realisasi melebihi target disebabkan tidak adanya realisasi pengeluaran pembiayaan.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada Tabel dibawah ini yang menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/ kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 3. 10 Anggaran Pembiayaan Kabupaten Belitung Timur TA 2019-2023

Tahun	Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	Pembiayaan Netto
2019	80.651.928.247,07	781.124.289,00	79.870.803.958,07
2020	101.622.093.648,43	1.112.723.953,00	100.509.369.695,43
2021	105.285.162.858,00	0	105.285.162.858,00
2022	110.473.654.663,00	500.000.000,00	109.973.654.663,00
2023	154.035.018.028,00	500.000.000,00	153.535.018.028,00

Tabel 3. 11 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Belitung Timur TA 2019-2023

Tahun	Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	Pembiayaan Netto
2018	72.933.763.365,85	1.715.791.819,00	71.217.971.546,85
2019	80.670.920.747,07	671.000.000,00	79.999.920.747,07
2020	101.450.833.948,43	2.599.664,00	101.448.234.284,43
2021	104.150.078.761,00	0	104.150.078.761,00
2022	110.772.619.463,00	0,00	110.772.619.463,00

3.2.2. PROYEKSI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap daerah memiliki otonomi seluas-luasnya untuk mengatur kebutuhan wilayahnya sendiri. Setiap daerah diberikan wewenang untuk mengurus pendapatan dan pengeluaran daerah dalam bentuk APBD. Hal ini dimaksudkan agar terjadi percepatan pertumbuhan daerah dan efisiensi dari setiap kebijakan yang dibuat. Adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah dengan tujuan semakin meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan aktifitas perekonomian daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian keuangan daerah merupakan faktor strategis yang

turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, perencanaan belanja program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2025 ini harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, sehubungan dengan implementasi Undang-Undang No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pelaksanaan Undang-Undang ini berdampak pada meningkatnya biaya administrasi, terutama dalam hal alokasi belanja pegawai baik PNS maupun PPPK sebagai bagian dari penataan tenaga kontrak yang akan dialihkan menjadi ASN dan PPPK.

Adapun kebijakan belanja daerah Tahun 2025 difokuskan untuk mendukung berbagai prioritas Daerah, Nasional dan Provinsi antara lain:

Tabel 3. 12 Integrasi Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Belitung Timur

No	Prioritas Kab. Belitung Timur	Prioritas Provinsi Kep. Bangka Belitung	Prioritas Nasional
	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan; 2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat; 3. Pengentasan Kemiskinan; 4. Optimalisasi Pengembangan Daya Saing Daerah dan Percepatan Investasi; 5. Peningkatan Kualitas Infrastruktur; 6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; dan 7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik	1. Meningkatnya ekonomi daerah 2. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat 3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam 4. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM 5. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi. 6. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi. 7. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	1. Transformasi Sosial Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial 2. Transformasi Ekonomi Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja 3. Transformasi Tata Kelola Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil 4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan kepemimpinan Indonesia Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

3.2.3. PROYEKSI DAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Untuk memberikan panduan dalam perencanaan pembangunan daerah, maka kerangka pendanaan disusun dengan berbagai asumsi yang akan terus dilakukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan, baik faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Beberapa asumsi yang digunakan dalam menetapkan kerangka pendanaan ini diantaranya adalah:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan potensi yang ada dengan didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan organisasi perangkat daerah yang melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang sampai saat ini sedang dilakukan pengkajian untuk dibentuk Satuan Kerja Perangkat Kerja tersendiri yang akan mengelola pendapatan daerah.
2. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi para aparatur, pemenuhan sarana dan prasarana untuk pemungutan dan pelayanan, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, kerja sama dengan berbagai pihak terkait, sosialisasi perpajakan dan retribusi daerah serta peningkatan kesadaran wajib pajak dan penagihan pajak terutang dan berbagai upaya lainnya.
3. Meningkatkan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah, mengoptimalkan pengelolaan kas daerah untuk menghasilkan pendapatan giro dan deposito dan meningkatkan pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya untuk lain-lain PAD yang Sah.

Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam perolehan dana transfer pemerintah pusat dan provinsi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mendapatkan reward berupa insentif bagi pemerintah daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk Tahun 2025, salah satunya masih diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Belitung Timur disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Belitung Timur, Provinsi dan Nasional yang bersifat dinamis serta memperhatikan dinamika perekonomian ekonomi global terkini. Arah kebijakan perekonomian tahun 2024 juga disusun dengan memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Timur tahun 2021-2026. Dengan harapan ekonomi nasional, regional dan lokal akan tumbuh sampai dengan akhir tahun anggaran 2024, maka diproyeksikan sumber-sumber ekonomi akan membawa dampak dalam mencapai target perencanaan pendapatan daerah. Semakin tinggi penerimaan pemerintah pusat maka akan berpengaruh terhadap potensi naiknya penerimaan dana perimbangan/transfer dari pemerintah pusat dan sebaliknya. Semakin tinggi penerimaan provinsi maka akan semakin berpengaruh terhadap potensi naiknya dana bagi hasil bagi provinsi. Selanjutnya, semakin tumbuhnya dunia usaha dan semakin membaiknya pelayanan pemerintah daerah diharapkan mampu mendukung tercapainya target Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, memuat beberapa hal terkait dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut :

1. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah

Dalam melakukan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), beberapa asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi serta pertumbuhan penduduk. Ketiga asumsi tersebut menjadi dasar dalam menentukan besaran pertumbuhan untuk menghitung proyeksi PAD lima tahun yang akan datang. Secara lebih rinci, asumsi dalam menghitung proyeksi PAD dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Pendapatan Asli Daerah

Kode	Uraian	APBD 2024	Proyeksi 2025	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH	832.718.865.833	914.768.476.647	82.049.610.814	9,85%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	103.452.600.833	120.587.716.655	17.135.115.822	16,56%
4.1.1.	Pajak Daerah	52.226.525.125	65.042.000.000	12.815.474.875	24,54%
4.1.2	Retribusi Daerah	3.982.283.342	3.204.262.500	- 778.020.842	-19,54%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.523.052.522	5.523.052.522		0,00%
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	41.720.739.844	46.818.401.633	5.097.661.789	12,22%

2. Proyeksi Pendapatan Transfer

Struktur pendapatan daerah Kabupaten Belitung Timur didominasi pendapatan yang berasal dari Pendapatan transfer pemerintah pusat dengan persentase lebih dari 80 persen. Dalam hal ini banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah yang bersumber pendapatan transfer pemerintah pusat tersebut. Secara umum, beberapa kondisi yang dijadikan sebagai asumsi dasar dalam melakukan perhitungan proyeksi pendapatan transfer seperti adanya penambahan pegawai (ASN) serta perbaikan pelayanan dan kinerja pemerintah daerah diprediksi akan mempengaruhi penerimaan pendapatan transfer ke daerah. Adanya pengadaan atau penambahan pegawai (ASN) diprediksi meningkatkan penerimaan pendapatan transfer khususnya melalui DAU. Selain itu, peningkatan pelayanan dan kinerja yang semakin baik diprediksi dapat mendorong peningkatan penerimaan pendapatan transfer. Terkait dengan hal tersebut, diperlukan adanya sebuah roadmap pengembangan keuangan daerah yang dapat membantu daerah mengelola, meningkatkan serta mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

Asumsi dalam menghitung proyeksi Pendapatan Transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer dari pemerintah daerah lainnya diasumsikan sedikit meningkat dibandingkan APBD TA 2024. Proyeksi ini berdasarkan adanya penambahan tenaga PPPK dalam hal perhitungan formulasi DAU serta Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang hampir dipastikan kembali akan mendapatkan DID atau Dana Insentif Fiskal. Secara rinci dapat djelaskan sebagai berikut:

- a) Dana Tranfer Umum yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU), diproyeksikan akan meningkat dibandingkan APBD TA 2024

- dengan memperhatikan kondisi penambahan tenaga PPPK yang akan masuk dalam perhitungan formulasi DAU dalam rangka implementasi Undang-Undang No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terkait kebijakan penyelesaian pengalihan tenaga kontrak menjadi ASN 2025.
- b) Dana Alokasi Khusus (DAK) diasumsikan sama dengan alokasi di TA 2024.
 - c) Dana Insentif Daerah adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Belitung Timur menerima DID mulai tahun 2021. Walaupun menurun signifikan sebesar $\pm 90\%$ di tahun 2022, tetapi proyeksi di tahun 2025 akan terdapat sedikit kenaikan dikarenakan tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang keempat kali ny`a dengan harapan adanya peningkatan formulasi perhitungan DID/ DIF bagi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
 - d) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa dituangkan dalam peraturan presiden tentang rincian APBN setiap tahun. Perhitungan alokasi dana desa memperhitungkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas desa, indeks kemahalam konstruksi, indeks kesulitan geografis desa.

Tabel 3. 14 Proyeksi Pendapatan Transfer

Kode	Uraian	APBD 2024	Proyeksi 2025	Selisih	%
4.2	Pendapatan Transfer	728.016.515.000	792.931.009.992	64.914.494.992	8,92
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	678.016.515.000	759.181.009.992	81.164.494.992	11,97
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.000.000.000	33.750.000.000	16.250.0000.00	-32,50

3. Proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari komponen penerimaan Dana Hibah, Dana Darurat,dan/atau Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya. Proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada Tahun 2025 diasumsikan sama dengan tahun 2024 yaitu sebesar **Rp. 1.249.750.000,00**

Tabel 3. 15 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Uraian	APBD 2024	Proyeksi 2025	Selisih	%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.249.750.000	1.249.750.000	0	0
Pendapatan Hibah	249.750.000	249.750.000	0	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0

3.2.4. Proyeksi Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil dan menengah;
12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan olahraga;
14. statistik;
15. Persandian
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan.

Sementara itu, urusan pilihan, meliputi:

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. perdagangan;
5. perindustrian; dan
6. transmigrasi

dan Urusan penunjang pemerintahan, meliputi:

1. perencanaan;
2. keuangan;
3. kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. pengawasan;
5. penelitian dan pengembangan; dan
6. fungsi penunjang lainnya.

Belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing

tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, perencanaan belanja program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2025 ini harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Perhitungan proyeksi belanja daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 tetap mengacu pada pencapaian prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah. Namun terdapat beberapa kebijakan belanja yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu :

- a. Alokasi anggaran sedikitnya 20% dari total belanja untuk bidang Pendidikan
- b. Alokasi anggaran sedikitnya 10% dari total belanja untuk bidang Kesehatan setelah dikurangi belanja pegawai
- c. Alokasi sedikitnya 40% dari DTU setelah di kurangi ADD untuk pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur pelayanan publik
- d. Alokasi sebesar 10% untuk Alokasi Dana Desa

Dengan memperhatikan proyeksi pendapatan, maka diperoleh rincian pagu minimal untuk pemenuhan belanja wajib, yaitu:

Tabel 3. 16 Alokasi Pagu Belanja Wajib

Uraian	Mandatory	Pagu
Pendidikan	20%	Rp 210.037.274.746
Kesehatan	10%	Rp 105.018.637.373
Belanja Infrastruktur Publik	40%	Rp 261.664.949.048
ADD	10%	Rp 105.018.637.373
Pengawasan	1%	Rp 10.506.863.737

Selain pemenuhan belanja wajib di atas, beberapa komponen pendapatan bersifat earmarked artinya penggunaannya sudah ditentukan, belanja earmarked yaitu pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik, pendapatan BLUD, Dana Desa, dan Dana Kapitasi. Komponen pendapatan yang termasuk Dana Alokasi Non Fisik adalah Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) dan beberapa pendapatan yang sesuai dengan menu tema DAK Non Fisik. Pendapatan BLUD adalah pendapatan yang diusulkan oleh Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang belanjanya juga diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan di RS. Walaupun telah menyandang status BLUD, pendanaan RSUD juga tetap didukung oleh APBD. Dana Desa adalah bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Kapitasi adalah dana besaran pembayaran per bulan yang di bayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan Kesehatan yang diberikan.

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Penganggaran belanja pegawai dialokasikan dengan memperhitungkan acress sebesar 2,5% untuk mengakomodir kenaikan pangkat pegawai. Belanja pegawai disini terdiri dari anggaran gaji dan tunjangan melekat dan tambahan penghasilan bagi ASN, anggota DPRD, dan Kepala Daerah. Sejak tahun 2022 pemerintah daerah telah mengarah kepada penerapan single salary. Dalam

belanja ini juga dianggarkan belanja pegawai earmarked, yaitu Tunjangan Penghasilan Guru (TPG), Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil), Insentif Pemungut Pajak dan hak-hak pimpinan daerah maupun DPRD.

Belanja Barang dan jasa yang dianggarkan termasuk didalamnya penganggaran gaji untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT), belanja pemeliharaan, beasiswa dan belanja jasa lainnya.

Kebijakan belanja hibah dan Bantuan Sosial di tahun 2025 tetap mengacu pada ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Baik belanja hibah maupun bantuan sosial berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan rusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Dalam menganggarkan Belanja modal harus disinkronkan dengan rencana kebutuhan barang yang disusun setiap tahunnya.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada rekening BTT ini juga termasuk didalamnya penganggaran belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan dimana penganggarnya tidak melebihi anggaran bantuan sosial yang direncanakan. Di tahun 2025 penganggaran BTT sebesar Rp. 1.000.000.000.

D. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Pada jenis belanja ini terdiri dari Belanja Bagi Hasil pajak dan retribusi ke desa dan bantuan keuangan ke desa (Alokasi Dana Desa dan Dana Desa).

Belanja bagi hasil kepada desa wajib dianggarkan oleh pemerintah kabupaten dianggarkan sebesar 10% dari target pajak dan retribusi daerah. Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten yang memiliki desa setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3. 17 Rincian Proyeksi Belanja Tahun 2025

Uraian	APBD 2024	Proyeksi 2025
BELANJA DAERAH	Rp959.352.217.513	Rp1.050.186.373.728
BELANJA OPERASI	Rp750.519.980.532	Rp823.844.125.373
Belanja Pegawai	Rp412.700.220.253	Rp518.678.294.277
Belanja Barang dan Jasa	Rp311.144.007.999	Rp290.531.040.293
Belanja Hibah	Rp24.893.752.280	Rp11.352.790.803
Belanja Bantuan Sosial	Rp1.782.000.000	Rp3.282.000.000
BELANJA MODAL	Rp113.214.442.435	Rp121.423.888.405
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp17.503.708.800	Rp27.621.241.760
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp20.623.077.500	Rp27.581.780.700
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp73.533.159.485	Rp64.437.001.045
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp1.502.775.650	Rp1.675.093.800
Belanja Modal Aset Lainnya	Rp51.721.000	Rp108.771.100
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000
BELANJA TRANSFER	94.617.794.546,00	103.918.359.950,00
Belanja Bagi Hasil	Rp5.641.300.846	Rp6.825.416.750,00
Belanja Bantuan Keuangan	Rp88.976.493.700	Rp97.092.943.200

3.2.5. Proyeksi dan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Penerimaan pembiayaan bersumber dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya) dan penerimaan kembali pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan bersumber dari penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah, pemberian pinjaman daerah dan pembayaran hutang jangka pendek lainnya.

Proyeksi pembiayaan daerah pada RKPD Tahun 2025 didasarkan pada realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan beberapa tahun terakhir, termasuk juga rencana pembiayaan tahun 2024. Perubahan proyeksi pembiayaan ini juga didasarkan atas perencanaan untuk menutup defisit murni sebagai selisih kurang atas pendapatan terhadap belanja. Perhitungan SILPA sebagai komponen terbesar dari penerimaan pembiayaan diproyeksikan secara hati-hati agar nilai riil akhir tahun tidak akan jauh berbeda dengan penganggaran.

Tabel 3. 18 Proyeksi Pembiayaan Tahun 2025

	Uraian	APBD 2024	Proyeksi 2025
6	PEMBIAYAAN DAERAH	Rp126.633.351.680	Rp135.417.897.081
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp130.633.351.680	Rp135.917.897.081
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp130.633.351.680,00	Rp135.417.897.081
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	Rp500.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp4.000.000.000,00	Rp 500.000.000

6. 2. 2	Penyertaan Modal Daerah	Rp4.000.000.000,00	-
6. 2. 4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	Rp 500.000.000
PEMBIAYAAN NETTO		Rp 126.633.351.680,00	Rp135.417.897.081

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Penyusunan RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 ini, merupakan tahun ke 4 (empat) dalam RPJMD di Kabupaten Belitung Timur serta mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran Visi dan Misi kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034, dan memperhatikan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Penentuan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 disusun sejalan dengan prioritas pembangunan Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan menjadi landasan daerah untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional dan Provinsi.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025, **Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 adalah Unggul di bidang industri, jasa, dan pariwisata berbasis kelautan dan pertanian.**

Visi pembangunan jangka panjang di atas diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Belitung Timur dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Belitung Timur. Adapun yang dimaksud dengan visi unggul di bidang industri, jasa, dan pariwisata berbasis kelautan dan pertanian adalah terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan melalui penciptaan ketangguhan di bidang industri, jasa, dan pariwisata berbasis kelautan dan pertanian menuju keunggulan kompetitif di tingkat nasional dan global. Visi Pembangunan Jangka Panjang di atas dapat diwujudkan melalui 6 (enam) Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 sebagai berikut :

1. Menciptakan Kabupaten Belitung Timur unggul di bidang industri, jasa, dan pariwisata berbasis kelautan dan pertanian dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
2. Menciptakan kapabilitas masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang tinggi.
3. Menciptakan pelayanan pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang prima.
4. Menciptakan suasana Kabupaten Belitung Timur yang tertib, aman, damai, adil, dan demokratis.
5. Menciptakan stabilitas pembangunan ekonomi makro daerah yang berkelanjutan.
6. Menciptakan prasarana dan sarana wilayah yang berdaya saing.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Tahun terakhir, dan dimana pada tahun 2025 merupakan tahapan keempat yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 juga berupaya mendorong sinkronisasi pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang memiliki Visi sebagai berikut:

1. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 dalam dokumen RPJMD adalah “ **BELITUNG TIMUR BANGKIT DAN BERDAYA** “.Berdasarkan visi tersebut, diharapkan seluruh elemen masyarakat Belitung Timur (termasuk didalamnya unsur pemerintah daerah) lebih mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan masyarakat Belitung Timur yang bangkit dan berdaya. Makna yang termuat dalam Visi Kabupaten Belitung Timur dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bangkit, menurut KBBI adalah suatu perubahan keadaan yang dapat berarti bangun, timbul/terbit atau mulai.
- b. Berdaya, menurut KBBI adalah suatu perubahan yang dapat berarti berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, atau mempunyai akal.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Belitung Timur di atas, pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan maka ditetapkan misi sebagai bentuk upaya mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut:

1. Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Penjelasana terhadap Misi:

Kebijakan kontemporer tentang daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah sebagai bagian dari institusi publik di level terendah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, dituntut untuk menjalankan peran selaku agen perubahan dalam pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Peran ini tidak akan tercapai, apabila institusi pemerintahan daerah tidak memiliki koridor dan landasan tatanan, baik dari sisi wewenang, kinerja maupun integritas. Untuk itu, penggunaan kekuasaan pemerintahan daerah terhadap warga masyarakat tidak dapat diberlakukan secara sewenang-wenang. Setiap keputusan/tindakan terhadap warga harus sesuai dengan peraturan perundangundangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian, perlakuan terhadap warga serta pemenuhan kebutuhan dan harapan warga harus dillandasi dengan hukum dan ukuran yang jelas yang dipergunakan sebagai standar kepuasan dimana muaranya adalah budaya birokrasi pemerintahan daerah yang berorientasi kepada kepentingan publik.

2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja.

Penjelasan terhadap Misi:

Sulistiyani (2004:bab VI) mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu proses untuk menuju berdaya, atau proses memperoleh daya/kekuatan/ kemampuan dan/atau pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pemberdayaan Ekonomi masyarakat pada dasarnya memperkuat peran serta baik oleh, dari dan untuk masyarakat agar terlibat dalam penciptaan wirausahawan dan perluasan kesempatan kerja. Pemberdayaan masyarakat harus diarahkan pada tiga hal : Pertama, enabling, yakni membantu masyarakat daerah agar mampu mengenal potensi dan kemampuan yang mereka miliki, mampu merumuskan secara baik masalah-masalah yang mereka hadapi, sekaligus mendorong mereka agar memiliki kemampuan merumuskan agenda-agenda penting dan melaksanakannya demi mengembangkan potensi dan menanggulangi permasalahan yang mereka hadapi. Kedua, empowering, yakni memperkuat dan daya yang dimiliki oleh masyarakat daerah dengan berbagai macam masukan (input) maupun pembukaan akses menuju ke berbagai peluang. Penguatan disini meliputi penguatan pada modal manusia, modal alam, modal financial, modal fisik, maupun modal sosial yang mereka miliki. Terakhir, protecting, yakni mendorong terwujudnya tatanan struktural yang mampu melindungi dan mencegah yang lemah agar tidak semakin lemah.

3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan & pengentasan kemiskinan.

Penjelasan terhadap Misi:

Kebijakan pengelolaan kemiskinan selama ini dipahami secara parsial sehingga output yang di hasilkan tidak strategis. Logika pengelolaan kemiskinan kadangkala harus dilihat dari perspektif sebaliknya yaitu persepektif tidak miskin, sehingga ketika memahami kriteria dan indicator kemiskinan maka harus pula dipahami kriteria dan indicator tidak miskin. Ketika harus mengentaskan kemiskinan , maka disaat yang bersamaan harus pula menanggulangi kemiskinan. Karena entas tanpa menaggulangi, akan menjadi sia-sia, atau tanggul tanpa entas tetap tidak akan menyelesaikan masalah. Untuk itu, definisi dan kriteria miskin dan tidak miskin ternyata terkait lurus kemmpuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar (basic needs). Ketika kita mampu memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, maka pada saat itu pengentasan dan penanggulangan telah berjalan seiring.

Misi yang telah ditetapkan dan diturunkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Belitung Timur, dalam pencapaiannya ditetapkan dalam target tahunan di setiap indikator kinerjanya. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4. 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

N O	MISI	TUJUAN		INDIKATO R KINERJA	SATUA N	CAPAIA N RPJMD 2023	TARGE T RPJMD 2025	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIA N RKPD 2023	TARGE T RKPD 2025
1	MEMBENAH MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KETATAPEMERINTAH AN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR	1. 1	Terwujudny a Tata Kelola Yang Baik Dan Pemerintaha n Yang Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	76,44	63,00	1.1. 1	Meningkatnya Kapasitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	Persen	91,77	92,00
									EKPPD	Status	31,17 (Sedang)	ST	
								1.1. 2	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	68,79	70,00
								1.1. 3	Terwujudnya Kinerja Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	B (67,58)	BB
		1. 2	Terwujudny a Pelayanan Publik Yang Efektif Dan Efisien	Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks	3,65	3,80	1.2. 1	Meningkatnya KualitasPenyelenggara an Pelayanan Publik	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuha n	94,35	94,50
								1.2. 2	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Angka Indeks	3,56	3,60
		1. 3	Terwujudny a Kelembagaa n Dan Manajemen Sumber Daya Aparatur Yang Efisien	Indeks Merit System	Nilai	252	163	1.3	Meningkatya Efektifitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Indeks Kelembagaan	Persen	77,71	78,00
									Meningkatnya Profesiolasime Sumber Daya Paratur	Indeks Profesionalis me ASN	Skor 1-100	71,53	72

NO	MISI	TUJUAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIA N RPJMD 2023	TARGET RPJMD 2025	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIA N RKPD 2023	TARGET RKPD 2025
2	PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT UNTUK MENCIPTAKAN WIRAUSAHAHAN	2.1	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	70,48	72,60	2.1.1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi yang terserap	Persen	2,37	2,90

NO	MISI	TUJUAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN RPJMD 2023	TARGET RPJMD 2025	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN RKPDP 2023	TARGET RKPDP 2025
	DAERAH YANG MANDIRI DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,41	3,35			Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun	Persen	0,13	0,14
								2.1.2	Meningkatnya investasi	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Juta Rupiah	616.140	402,814
		2.2	Meningkatnya perekonomian lokal	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	4,72	4,50	2.2.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	3,68	3,70
				PDRB per kapita	Juta Rupiah	80,45	68,29			Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Persen	4,98	5,00
										Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	Persen	11,8	11,90
								2.2.2	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks daya saing daerah	Nilai 1-5	2,85	3,00

NO	MISI	TUJUAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN RPJMD 2023	TARGET RPJMD 2025	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN RKPDP 2023	TARGET RKPDP 2025
3	PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT BELITUNG TIMUR	3.1	Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar bagi	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	72,86	73,33	3.1.1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,66	11,70
										Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,90	8,95
								3.1.2	Meningkatnya akses dan kualitas	Kabupaten Sehat	Predikat	Padapa	Wistara

N O	MISI	TUJUAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN RPJMD 2023	TARGET RPJMD 2025	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIA N RKPD 2023	TARG ET RKPD 2025		
	DAN PENGENTASAN KEMISKINAN		seluruh masyarakat						kesehatan masyarakat						
		3.2	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana	Indeks infrastruktur wilayah	Nilai	72,87	95,00	3.2.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Persen	90,20	98,78		
										Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai	65,50	74,02		
										Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Nilai	65,37	76,52		
				Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Nilai	0,51	0,40	3.2.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai 1-100	71,33	71,40		
										Indeks Risiko Bencana	Angka	155,61	164,40		
				3.3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Angka kemiskinan	Persen	6,73	5,88	3.3.1	Menurunnya tingkat kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka	0,91	0,48
		Indeks Gini	Nilai			0,228	0,260	Indeks Keparahan Kemiskinan	Angka			0,23	0,13		
										3.3.2	Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Persen	98,81	97,50
												Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Persen	79,6	85,00
												Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	98,45	100

Sumber: Bappelitbangda Kab. Belitung Timur (diolah)

Tujuan dan Sasaran RKPD untuk Tahun 2025 tersebut menjadi acuan Perangkat Daerah dalam merumuskan strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta indikator kinerja Perangkat Daerah dalam RKPD Tahun 2025. Prioritas pembangunan RKPD 2025 dirumuskan juga tidak terlepas dari arah kebijakan RPJMD 2021-2026. Bahwa dokumen tahunan RKPD memiliki prioritas pembangunan yang masih dalam kerangka perencanaan lima tahunan yaitu dokumen RPJMD. Adapun strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Tahun rencana disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

MISI 1 : MEMBENAH MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KETATAPEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR AGAR BERJALAN SESUAI DENGAN ASAS UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK				
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2025	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2025
Meningkatnya Kapasitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Mendorong integrasi penelitian dan pengembangan dengan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
			Program penelitian dan pengembangan daerah	Program penelitian dan pengembangan daerah
		Meningkatkan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd
			Program administrasi umum sekretariat dprd kabupaten/kota	Program administrasi umum sekretariat dprd kabupaten/kota
			Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan pendapatan asli daerah	Program pengelolaan keuangan daerah	Program pengelolaan keuangan daerah
			Program pengelolaan pendapatan daerah	Program pengelolaan pendapatan daerah

**MISI 1 : MEMBENAH MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KETATAPEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR AGAR BERJALAN SESUAI DENGAN ASAS UMUM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK**

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2025	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2025
			Program pengelolaan barang milik daerah	Program pengelolaan barang milik daerah
		Meningkatkan kinerja badan usaha daerah	Program perekonomian dan pembangunan	Program perekonomian dan pembangunan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program penyelenggaraan pengawasan	Program penyelenggaraan pengawasan
			Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai standar pelayanan publik	Menyelenggarakan pelayanan publik berdasarkan proses bisnis yang efektif dan efisien	Program pengelolaan izin lokasi	Program pengelolaan izin lokasi
			Program pengelolaan izin membuka tanah	Program pengelolaan izin membuka tanah
			Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Program penyelesaian sengketa tanah garapan
			Program redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Program redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
			Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
			Program pengelolaan tanah kosong	Program pengelolaan tanah kosong
			Program penetapan tanah ulayat	Program penetapan tanah ulayat
			Program pelayanan penanaman modal	Program pelayanan penanaman modal
			Program pengelolaan arsip	Program pengelolaan arsip

**MISI 1 : MEMBENAH MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KETATAPEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR AGAR BERJALAN SESUAI DENGAN ASAS UMUM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK**

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2025	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2025
			Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Program perlindungan dan penyelamatan arsip
			Program perizinan penggunaan arsip	Program perizinan penggunaan arsip
			Program pendaftaran penduduk	Program pendaftaran penduduk
			Program pencatatan sipil	Program pencatatan sipil
			Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam
			Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
			Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi
			Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan
			Program pengendalian izin usaha industri	Program pengendalian izin usaha industri
			Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
			Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
			Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum

**MISI 1 : MEMBENAH MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KETATAPEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR AGAR BERJALAN SESUAI DENGAN ASAS UMUM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK**

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2025	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2025
			Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
			Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
			Program penataan desa	Program penataan desa
			Program peningkatan kerjasama desa	Program peningkatan kerjasama desa
			Program administrasi pemerintahan desa	Program administrasi pemerintahan desa
			Program pengelolaan perbatasan	Program pengelolaan perbatasan
			Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
			Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
			Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
			Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat

**MISI 1 : MEMBENAH MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KETATAPEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR AGAR BERJALAN SESUAI DENGAN ASAS UMUM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK**

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2025	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2025
			Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
			Program pengendalian perizinan pendidikan	Program pengendalian perizinan pendidikan
			Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (mha), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan pplh	Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (mha), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan pplh
			Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)
			Program penataan bangunan gedung	Program penataan bangunan gedung
			Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman
			Program pengembangan jasa konstruksi	Program pengembangan jasa konstruksi
Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Mengembangkan sistem pelayanan elektronik yang terintegrasi	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
			Program pengelolaan profil kependudukan	Program pengelolaan profil kependudukan
			Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik

**MISI 1 : MEMBENAH MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KETATAPEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR AGAR BERJALAN SESUAI DENGAN ASAS UMUM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK**

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2025	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2025
			Program pengelolaan aplikasi informatika	Program pengelolaan aplikasi informatika
			Program penyelenggaraan statistik sektoral	Program penyelenggaraan statistik sektoral
			Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
			Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Program pengelolaan sistem data gender dan anak
			Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional
			Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintah daerah	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Penataan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
			Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
			Program administrasi umum	Program administrasi umum
Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur	Meningkatkan integritas dan profesionalitas aparatur	Melaksanakan <i>assessment center</i> dan penilaian berbasis kinerja setiap aparatur	Program kepegawaian daerah	Program kepegawaian daerah
			Program pengembangan sumber daya manusia	Program pengembangan sumber daya manusia

MISI 2 : PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT UNTUK MENCIPTAKAN WIRAUSAHAWAN DAERAH YANG MANDIRI DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2023	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2023
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Meningkatkan keterampilan tenaga kerja	Mengoptimalkan layanan pembinaan tenaga kerja	Program perencanaan tenaga kerja	Program perencanaan tenaga kerja
		Meningkatkan jaringan tenaga kerja	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
			Program penempatan tenaga kerja	Program penempatan tenaga kerja
Meningkatnya investasi	Meningkatkan kemudahan berinvestasi	Menetapkan dan melaksanakan kebijakan pro investasi	Program pengembangan iklim penanaman modal	Program pengembangan iklim penanaman modal
			Program promosi penanaman modal	Program promosi penanaman modal
			Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
			Program penyelenggaraan penataan ruang	Program penyelenggaraan penataan ruang
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Mengembangkan sektor industri	Mengembangkan kawasan industri	Program perencanaan dan pembangunan industri	Program perencanaan dan pembangunan industri
	Meningkatkan kualitas dan kapasitas produk pertanian dan perikanan	Meningkatkan produktivitas perikanan	Program pengelolaan perikanan tangkap	Program pengelolaan perikanan tangkap
			Program pengelolaan perikanan budidaya	Program pengelolaan perikanan budidaya
			Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
			Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
		Meningkatkan produktivitas pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
			Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian

MISI 2 : PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT UNTUK MENCIPTAKAN WIRSAHAWAN DAERAH YANG MANDIRI DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2023	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2023
			Program perizinan usaha pertanian	Program perizinan usaha pertanian
			Program penyuluhan pertanian	Program penyuluhan pertanian
			Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
			Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
		Meningkatkan ketahanan pangan	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
			Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
			Program penanganan kerawanan pangan	Program penanganan kerawanan pangan
			Program pengawasan keamanan pangan	Program pengawasan keamanan pangan
		Meningkatkan pengelolaan pariwisata daerah dan ekonomi kreatif	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
			Program pemasaran pariwisata	Program pemasaran pariwisata
			Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
	Meningkatkan daya saing pariwisata			

MISI 2 : PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT UNTUK MENCIPTAKAN WIRSAHAWAN DAERAH YANG MANDIRI DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2023	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2023
		Mengembangkan budaya lokal	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
			Program pengembangan kebudayaan	Program pengembangan kebudayaan
			Program pengembangan kesenian tradisional	Program pengembangan kesenian tradisional
			Program pembinaan sejarah	Program pembinaan sejarah
			Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
			Program pengelolaan permuseuman	Program pengelolaan permuseuman
			Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno
Meningkatnya daya saing daerah	Meningkatkan kualitas produk unggulan daerah	Meningkatkan penjaminan mutu produk unggulan daerah	Program pengembangan ekspor	Program pengembangan ekspor
			Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Program standardisasi dan perlindungan konsumen
		Meningkatkan produktivitas UMKM	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)
			Program pengembangan umkm	Program pengembangan umkm
			Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
			Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Program pendidikan dan latihan perkoperasian

MISI 2 : PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT UNTUK MENCIPTAKAN WIRSAHAWAN DAERAH YANG MANDIRI DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA				
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2023	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2023
			Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi

MISI 3 : PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR MELALUI SINERGITAS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN				
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2023	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2023
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan	Program pengelolaan pendidikan	Program pengelolaan pendidikan
			Program pengembangan kurikulum	Program pengembangan kurikulum
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber daya pendidikan	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Program pendidik dan tenaga kependidikan
			Program pengembangan bahasa dan sastra	Program pengembangan bahasa dan sastra
			Program pembinaan perpustakaan	Program pembinaan perpustakaan
			Program pengembangan kapasitas daya saing kepramukaan	Program pengembangan kapasitas daya saing kepramukaan
			Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan

**MISI 3 : PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR MELALUI SINERGITAS
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
DAN PENGENTASAN KEMISKINAN**

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2023	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2023
			Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
			Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
			Program penatagunaan tanah	Program penatagunaan tanah
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Wilayah	Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas	Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman		
			Program pengembangan perumahan	Program pengembangan perumahan
			Program kawasan permukiman	Program kawasan permukiman
			Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
			Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)
			Program pengembangan permukiman	Program pengembangan permukiman
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
			Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase

**MISI 3 : PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR MELALUI SINERGITAS
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
DAN PENGENTASAN KEMISKINAN**

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2023	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2023
	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah	Mengembangkan sistem transportasi yang terpadu	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
			Program penyelenggaraan jalan	Program penyelenggaraan jalan
			Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)
			Program pengelolaan pelayaran	Program pengelolaan pelayaran
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Program perencanaan lingkungan hidup	Program perencanaan lingkungan hidup
			Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
			Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Program pengelolaan sumber daya air (sda)
		Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
			Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
			Program pengelolaan persampahan	Program pengelolaan persampahan
			Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)
			Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat

**MISI 3 : PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR MELALUI SINERGITAS
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
DAN PENGENTASAN KEMISKINAN**

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2023	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2023
			Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
	Meningkatkan ketahanan terhadap bencana	Mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah	Program penanggulangan bencana	Program penanggulangan bencana
Menurunnya tingkat kemiskinan	Menurunkan tingkat kemiskinan	Mengoptimalkan sinergitas kebijakan penurunan kemiskinan	Program pemberdayaan sosial	Program pemberdayaan sosial
			Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)
			Program peningkatan kualitas keluarga	Program peningkatan kualitas keluarga
			Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
			Program pengendalian penduduk	Program pengendalian penduduk
			Program pembinaan keluarga berencana (kb)	Program pembinaan keluarga berencana (kb)
Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Meningkatkan pemerataan perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh penduduk	Menguatkan sistem kelembagaan perlindungan sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial
			Program rehabilitasi sosial	Program rehabilitasi sosial
			Program hubungan industrial	Program hubungan industrial
			Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
			Program penanganan bencana	Program penanganan bencana
			Program pengelolaan taman makam pahlawan	Program pengelolaan taman makam pahlawan

MISI 3 : PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR MELALUI SINERGITAS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN				
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2023	PROGRAM PRIORITAS RKPD 2023
	Melaksanakan pembangunan berbasis keadilan dan kesetaraan gender	Mengoptimalkan perlindungan perempuan dan anak	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
			Program pemenuhan hak anak (pha)	Program pemenuhan hak anak (pha)
			Program perlindungan khusus anak	Program perlindungan khusus anak
		Melaksanakan pemberdayaan masyarakat berbasis gender	Program perlindungan perempuan	Program perlindungan perempuan
			Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan

Sumber: Bappelitbangda Kab. Belitung Timur (diolah)

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional, dimana daerah melaksanakan pembangunan untuk Peningkatan dan Pemerataan anatara lain : Pendapatan masyarakat, Kesempatan Kerja, Lapangan Berusaha, Akses dan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah (Pembangunan Daerah UU Nomor 23 Tahun 2014).

Pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun keempat RPJMD Tahun 2021-2026. RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 berfungsi juga untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada Bab II, telah dirumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan yang merupakan analisis kesenjangan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah hasil evaluasi RKPD, dari permasalahan pembangunan tersebut, dirumuskan isu- isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas pada tahun rencana tentunya dengan mengidentifikasi isu-isu dan permasalahan global. Isu-isu strategis daerah Tahun 2025 adalah

1. Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

2. Kesehatan

- a. Pengurangan angka prevalensi stunting di kabupaten belitung timur sehingga dibawah target nasional;
- b. Penguatan kelembagaan dan 9 (sembilan) indikator tatanan kabupaten/ kota sehat

3. Pendidikan

- a. Peningkatan capaian indikator urusan pendidikan dasar;
- b. Peningkatan capaian indikator urusan pendidikan Kesetaraan.

4. kemiskinan

- a. Pengurangan Angka kemiskinan kabupaten Belitung Timur;

5. Potensi ekonomi dan daya saing

- a. Masih Rendahnya Pertumbuhan Investasi Baru;
- b. Masih rendahnya kunjungan wisatawan;
- c. Masih rendahnya produksi dan produktivitas sektor pertanian;
- d. Masih terbatasnya akses pasar, daya saing, kualitas dan kapasitas produk perikanan;
- e. Masih tingginya fluktuasi harga barang;
- f. Rendahnya Daya saing Koperasi dan UMKM.

6. Infrastruktur

- a. Belum terpenuhinya standar Infrastruktur pelayanan dasar;
- b. Aksesibilitas dan konektivitas wilayah masih perlu ditingkatkan.

7. lingkungan hidup dan sumber daya alam

- a. Peningkatan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan;
- b. Masih rendahnya ketaatan dalam pemanfaatan pola ruang.

RKPD disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya dan berpedoman pada dokumen perencanaan Nasional dan Provinsi, serta RPJMD tahun 2021-2026, maka perumusan baik tema dan sasaran pembangunan tahun 2025 disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan yang ada, dan memperhatikan isu strategis dan masalah mendesak, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2025 dilaksanakan dengan tema **“Memperkuat Daya Saing Daerah dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”**.

Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJMD Tahun 2021-2026, serta berbagai permasalahan pada BAB II dan isu dan tantangan yang harus dipecahkan dan diselesaikan pada tahun 2025, maka prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan;
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Pengentasan Kemiskinan;
4. Optimalisasi Pengembangan Daya Saing Daerah dan Percepatan Investasi;
5. Peningkatan Kualitas Infrastruktur;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; dan
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik.

Keterkaitan antara permasalahan pembangunan dengan isu strategis dan prioritas pembangunan Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 3 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan dengan Isu Sstrategis dan Prioritas Daerah

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan (Utama dan Mendesak)	Prioritas Daerah
1	peningkatan capaian indikator urusan pendidikan dasar	Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah (8,90 Tahun/ usia SMP Kelas 2)	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan
	peningkatan capaian indikator urusan pendidikan Kesetaraan	masih rendahnya angka Partisipasi Kasar (APK) Khususnya pada jenjang SMA dimana ada sebanyak 28,42 persen penduduk usia SMA yang tidak bersekolah lagi.	
2	Pengurangan Angka Prevalensi stunting di Kabupaten Belitung Timur sehingga dibawah target nasional	Angka prevalensi stunting di Kabupaten Belitung Timur masih diatas target nasional	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
	Penguatan kelembagaan dan 9 (Sembilan) Indikator tatanan Kabupaten/ Kota Sehat	Belum Optimalnya capaian indikator Kabupaten Kota Sehat	
3	Pengurangan Angka kemiskinan	Angka kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur	Pengentasan Kemiskinan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan (Utama dan Mendesak)	Prioritas Daerah
	kabupaten Belitung Timur	tertinggi dari Kabupaten/ Kota se- Provinsi Bangka Belitung	
4	Pertumbuhan Ekonomi dan Percepatan Investasi Belum Optimal	Masih Rendahnya Pertumbuhan Investasi Baru Masih rendahnya kunjungan wisatawan Masih rendahnya produksi dan produktivitas sektor pertanian Masih terbatasnya akses pasar, daya saing, kualitas dan kapasitas produk perikanan Masih tingginya fluktuasi harga barang Rendahnya Daya saing Koperasi dan UMKM	Optimalisasi Pengembangan Daya Saing Daerah dan Percepatan Investasi
5	Sarana dan Prasarana Wilayah Belum optimal	Belum optimalnya infrastruktur pelayanan dasar Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah baik darat maupun laut	Peningkatan Kualitas Infrastruktur
6	Kualitas lingkungan Hidup Masih Perlu Ditingkatkan	Belum Optimalnya Pengelolaan Persampahan Degradasi Lingkungan dan Tingginya Resiko Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
7	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Reformasi Birokrasi	Belum Optimalnya Fasilitas, Pembinaan, Pengawasan, Dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sumber: Bappelitbangda Kab. Belitung Timur (diolah)

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis daerah dirumuskan arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tahun 2025 selanjutnya, rumusan Prioritas Pembangunan Belitung Timur tahun 2025 tersebut, diselaraskan dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Belitung Timur Tahun 2021-2026 sehingga menghasilkan arah pembangunan sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Sasaran Pembangunan Dearah (RPJMD) Tahun Rencana

PRIORITAS 1 : PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KESETARAAN					
Masalah utama	Isu strategis	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Program 2025
Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah (8,90 tahun/ usia smp kelas 2)	Peningkatan capaian indikator urusan pendidikan dasar	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Optimalisasi peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar melalui pengembangan inovasi pelayanan publik	Mewujudkan akses dan kualitas pendidikan dasar yang merata bagi semua satuan pendidikan	Program pengelolaan pendidikan
Masih rendahnya angka partisipasi kasar (apk) khususnya pada jenjang sma dimana ada sebanyak 28,42 persen penduduk usia sma yang tidak bersekolah lagi.	Peningkatan capaian indikator urusan pendidikan kesetaraan	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Optimalisasi peningkatan akses dan kualitas pendidikan kesetaraan melalui pengembangan inovasi pelayanan publik	Mewujudkan akses dan kualitas pendidikan kesetaraan yang merata bagi semua masyarakat	Program pendidik dan tenaga kependidikan
					Program pengembangan kurikulum
					Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
					Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
					Program pengembangan kapasitas kepramukaan
					Program pembinaan perpustakaan

PRIORITAS 2 : PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Masalah utama	Isu strategis	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Program 2024
Angka prevalensi stunting di kabupaten belitung timur masih diatas target nasional	Pengurangan angka prevalensi stunting di kabupaten belitung timur sehingga dibawah target nasional	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Optimalisasi konvergensi lintas program dan lintas sektor percepatan penurunan stunting dengan mengembangkan inovasi daerah dari seluruh stakeholder terkait	Konvergensi program lintas sektor untuk percepatan penurunan stunting pada desa lokus stunting	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Belum optimalnya capaian indikator kabupaten kota sehat	Penguatan kelembagaan dan 9 (sembilan) indikator tatanan kabupaten/ kota sehat	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah dengan memperkuat inovasi daerah dari seluruh stakeholder terkait	Konvergensi lintas program dan lintas sektor tatanan kabupaten/ kota sehat	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
					Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
					Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
					Program pengendalian penduduk
					Program pembinaan keluarga berencana (kb)
					Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)

PRIORITAS 3 : PENGENTASAN KEMISKINAN

Masalah utama	Isu strategis	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Program 2024
Angka kemiskinan di kabupaten belitung timur tertinggi dari kabupaten/ kota se-provinsi bangka belitung	Pengurangan angka kemiskinan kabupaten belitung timur	Menurunnya tingkat kemiskinan	Optimalisasi strategi penanggulangan kemiskinan daerah serta penguatan kelembagaan tkpk melalui pengembangan	Konvergensi lintas program dan lintas sektor percepatan penurunan kemiskinan di kabupaten belitung timur	Program pemberdayaan sosial
					Program peningkatan kualitas keluarga
					Program perlindungan dan jaminan sosial
					Program hubungan industrial

Masalah utama	Isu strategis	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Program 2024
			inovasi pelayanan publik		Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan Program rehabilitasi sosial Program penanganan bencana Program pengelolaan taman makam pahlawan Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan Program perlindungan perempuan Program pemenuhan hak anak (pha) Program perlindungan khusus anak

PRIORITAS 4 : OPTIMALISASI PENGEMBANGAN DAYA SAING DAERAH DAN PERCEPATAN INVESTASI

Masalah utama	Isu strategis	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Program 2025
Pengelolaan, pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan yang belum optimal	Pertumbuhan ekonomi dan percepatan investasi belum optimal	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Meningkatkan keterampilan tenaga kerja	Menyusun paket peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas (triple skilling yaitu tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat terampil bagi umkm untuk meningkatkan daya saing)	Program perencanaan tenaga kerja
				Meningkatkan jaringan tenaga kerja	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
Masih rendahnya pertumbuhan investasi baru		Meningkatnya investasi	Meningkatkan kemudahan berinvestasi	Menyusun daftar prioritas investasi daerah	Program pelayanan penanaman modal

Masalah utama	Isu strategis	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Program 2025
					Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
				Menyusun investment project ready to offer (ipro)	Program pengembangan iklim penanaman modal
					Program promosi penanaman modal
			Mengembangkan sektor industri	Menyusun rencana kerja untuk pembangunan kawasan industri aik kelik	Program perencanaan dan pembangunan industri
Masih terbatasnya akses pasar, daya saing, kualitas dan kapasitas produk perikanan		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Meningkatkan kualitas dan kapasitas produk pertanian dan perikanan	Optimalisasi produksi perikanan tangkap dan budidaya	Program pengelolaan perikanan tangkap
					Program pengelolaan perikanan budidaya
					Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
				Optimalisasi akses pasar, daya saing, kualitas dan kapasitas komoditas/produk perikanan	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
				Optimalisasi produksi dan produktivitas pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
					Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
					Program perizinan usaha pertanian
					Program penyuluhan pertanian
					Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
					Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

Masalah utama	Isu strategis	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Program 2025
				Optimalisasi pencapaian ketahanan pangan daerah	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
					Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
					Program penanganan kerawanan pangan
					Program pengawasan keamanan pangan
			Meningkatkan daya saing pariwisata	Optimalisasi pengelolaan pariwisata daerah dan ekonomi kreatif	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
					Program pemasaran pariwisata
					Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
			Mengembangkan budaya lokal		Program pengembangan kebudayaan
					Program pengembangan kesenian tradisional
					Program pembinaan sejarah
					Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
					Program pengelolaan permuseuman
		Meningkatnya daya saing daerah	Meningkatkan kualitas produk unggulan daerah	Meningkatkan penjaminan mutu produk unggulan daerah	Program standarisasi dan perlindungan konsumen
					Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
			Meningkatkan produktivitas umkm	Meningkatkan produktivitas umkm	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)

Masalah utama	Isu strategis	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Program 2025
					Program pengembangan umkm
					Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
					Program pendidikan dan latihan perkoperasian

PRIORITAS 5 : PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR

MASALAH UTAMA	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM 2025
Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah baik darat maupun laut	Sarana dan Prasarana Wilayah Belum optimal	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas Antar Wilayah	Mengembangkan sistem transportasi terpadu yang memenuhi standar keselamatan berlalu lintas	Program Penyelenggaraan Jalan
					Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan halan (LLAJ)
Belum optimalnya infrastruktur pelayanan dasar				Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Program Pengelolaan Pelayaran
					Program Kawasan Permukiman
					Program pengembangan perumahan
					Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
					Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)
					Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
					Program penataan bangunan gedung

MASALAH UTAMA	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM 2025
					Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
					Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
					Program penatagunaan tanah
					Program penyelesaian sengketa tanah garapan
					Program penyelenggaraan penataan ruang

PRIORITAS 6 : PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM

MASALAH UTAMA	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM 2025
Belum Optimalnya Pengelolaan Persampahan	Kualitas lingkungan Hidup Masih Perlu Ditingkatkan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Program perencanaan lingkungan hidup
Degradasi Lingkungan dan Tingginya Resiko Bencana					Program pengelolaan sumber daya air (sda)
					Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
					Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
					Program pengelolaan persampahan
					Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)
					Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat

MASALAH UTAMA	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM 2025
					Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
					Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (mha), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan pplh
					Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)
			Meningkatkan Ketahanan Terhadap Bencana	Mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah	Program penanggulangan bencana

PRIORITAS 7 : PENINGKATAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Masalah utama	Isu strategis	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Program 2025
Belum optimalnya fasilitas, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Mendorong integrasi penelitian dan pengembangan dengan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan meningkatkan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
					Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
					Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
					Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

Masalah utama	Isu strategis	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Program 2025
				Menjadi fasilitator dalam kolaborasi pentahelix (pendidikan, dunia usaha, komunitas sosial, pemerintahan dan media massa) untuk tindak lanjut dan pemanfaatan pengetahuan dan teknologi.	Program penelitian dan pengembangan daerah
			Peningkatan keselarasan data perencanaan pembangunan daerah	Implementasi satu data indonesia secara optimal	Program penyelenggaraan statistik sektoral
		Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah	Perluasan jaringan kerjasama antar pd dalam rangka penyelesaian aset daerah	Program pengelolaan keuangan daerah
					Program pengelolaan barang milik daerah
			Target penyelesaian aset pemda	Optimalisasi pendapatan daerah	Program pengelolaan pendapatan daerah
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan peran, fungsi, serta sinergitas lembaga pengawasan daerah	Program penyelenggaraan pengawasan
				Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara komprehensif	
				Menyusun kebijakan sistem pengaduan masyarakat sehingga penanganan pengaduan masyarakat dapat di implementasikan	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
				Optimalisasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (spip)	
			Mewujudkan penyelenggaraan	Menyelenggarakan pelayanan publik	Program pelayanan penanaman modal

Masalah utama	Isu strategis	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Program 2025
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	pelayanan berbasis standar pelayanan publik	berdasarkan proses bisnis yang efektif dan efisien	Program pendaftaran penduduk
					Program pencatatan sipil
					Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
					Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
					Program administrasi pemerintahan desa
					Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
		Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan sistem keamanan, aplikasi dan infrastruktur yang terintegrasi untuk penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
					Program pengelolaan profil kependudukan
					Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
					Program pengelolaan aplikasi informatika
					Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
					Program pengelolaan sistem informasi industri nasional
					Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
			Meningkatkan efektifitas pelaksanaan		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

Masalah utama	Isu strategis	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Program 2025
		Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintahan daerah	tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Penataan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan	Program administrasi umum (program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sekretaris daerah)
		Meningkatnya profesiolasime sumber daya aparatur	Meningkatkan integritas dan profesionalitas aparatur	Melaksanakan talent manajemen asn secara berkala dan penilaian berbasis kinerja setiap aparatur	Program kepegawaian daerah
				Digitalisasi proses administrasi kepegawaian sebagai pengembangan layanan kepegawaian	Program pengembangan sumber daya manusia
				Pemenuhan target pengembangan kompetensi aparatur	

Berdasarkan keterkaitan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025, dirumuskan kesesuaian sasaran, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam RKPD Belitung Timur tahun 2025. Rumusan Prioritas Pembanguna Belitung Timur tahun 2025 tersebut, diselaraskan dengan sasaran, indikator dan target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Belitung Timur Tahun rencana :

Tabel 4. 5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Sasaran, Indikator dan Target (RPJMD) Tahun Rencana

RKPD 2025							RPJMD TAHUN KE-4 (2025)						PERANGKAT DAERAH
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	
PRIORITAS 1 : PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KESETARAAN													
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	11,68	Program pengelolaan pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	93 Persen	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	11,	Program pengelolaan pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	93 Persen	Dinas Pendidikan
					Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	66 Persen					Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	66 Persen	Dinas Pendidikan
					Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi	70,70 Persen					Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi	70,70 Persen	Dinas Pendidikan

RKPD 2025							RPJMD TAHUN KE-4 (2025)						PERANGKAT DAERAH
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	
					dalam pendidikan PAUD						dalam pendidikan PAUD		
		Rata-Rata Lama Sekolah	8,95	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV jenjang SD/MI	95,00 Persen		Rata-Rata Lama Sekolah	8,58	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV jenjang SD/MI	95,00 Persen	Dinas Pendidikan
					Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV jenjang SMP/MTS	74,00 Persen					Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV jenjang SMP/MTS	74,00 Persen	Dinas Pendidikan
					Persentase guru PAUD, SD, SMP yang bersertifikat pendidik	74,00 Persen					Persentase guru PAUD, SD, SMP yang bersertifikat pendidik	74,00 Persen	Dinas Pendidikan
					Persentase pengawas dan kepala sekolah yang bersertifikat	100,00 Persen					Persentase pengawas dan kepala sekolah yang bersertifikat	100,00 Persen	Dinas Pendidikan
				Program pengembangan kurikulum	Persentase kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan program kesetaraan paket A, B, C	87,5 Persen				Program pengembangan kurikulum	Persentase kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan program kesetaraan paket A, B, C	87,5 Persen	Dinas Pendidikan
					Persentase kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar (SD dan SMP)	71,43 Persen					Persentase kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar (SD dan SMP)	71,43 Persen	Dinas Pendidikan
				Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase pembinaan cabang keolahragaan	100 Persen				Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase pembinaan cabang keolahragaan	100 Persen	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
					Persentase cabang olahraga yang dibina	84 Persen					Persentase cabang olahraga yang dibina	84 Persen	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Program pengembangan kapasitas daya saing kepramukaan	Persentase pelatihan SDM kepramukaan	55 Persen				Program pengembangan kapasitas daya saing kepramukaan	Persentase pelatihan SDM kepramukaan	55 Persen	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Program pembinaan	Rasio perpustakaan	1,43				Program pembinaan	Rasio perpustakaan	1,43	Dinas Perpustakaan

RKPD 2025							RPJMD TAHUN KE-4 (2025)						PERANGKAT DAERAH
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	
				perpustakaan	per satuan penduduk					perpustakaan	per satuan penduduk		
PRIORITAS 2: PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT													
1	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Kabupaten Sehat	WIWERD A	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil	96 Persen	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Kabupaten Sehat	WISTARA	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil	96 Persen	Dinas Kesehatan
					Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	100 Persen					Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	100 Persen	Dinas Kesehatan
					Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 Persen					Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 Persen	Dinas Kesehatan
					Persentase pelayanan kesehatan balita	98 Persen					Persentase pelayanan kesehatan balita	98 Persen	Dinas Kesehatan
					Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100 Persen					Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100 Persen	Dinas Kesehatan
					Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif	100 Persen					Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif	100 Persen	Dinas Kesehatan
					Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100 Persen					Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100 Persen	Dinas Kesehatan
					Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 Persen					Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 Persen	Dinas Kesehatan
					Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100 Persen					Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100 Persen	Dinas Kesehatan
					Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100 Persen					Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100 Persen	Dinas Kesehatan
					Persentase pelayanan kesehatan orang	100 Persen					Persentase pelayanan kesehatan orang	100 Persen	Dinas Kesehatan

RKPD 2025							RPJMD TAHUN KE-4 (2025)						PERANGKAT DAERAH
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	
					terduga tuberkulosis						terduga tuberkulosis		
					Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	90 Persen					Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	90 Persen	
					Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	90 Persen					Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	90 Persen	
					Persentase rumah sakit terakreditasi	100 Persen					Persentase rumah sakit terakreditasi	100 Persen	
					Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	96 Persen					Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	96 Persen	
					Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100 Persen					Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100 Persen	
					Proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi	70 Persen					Proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi	70 Persen	
					Persentase Penggunaan Obat Rasional	95 Persen					Persentase Penggunaan Obat Rasional	95 Persen	
					Cakupan Desa Siaga Aktif	100 Persen					Cakupan Desa Siaga Aktif	100 Persen	
					Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	85 Persen					Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	85 Persen	

RKPD 2025							RPJMD TAHUN KE-4 (2025)						PERANGKAT DAERAH
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	
				Program pengendalian penduduk	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	100 Persen				Program pengendalian penduduk	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	100 Persen	Dinas Pmeberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana
				Program pembinaan keluarga berencana (kb)	Cakupan PUS Unmet Need	5,29				Program pembinaan keluarga berencana (kb)	Cakupan PUS Unmet Need	5,29	Dinas Pmeberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana
				program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	Angka Kelahiran menurut Umur/ Age Specific Fertility Rate, kelompok usia 15-19 tahun	17 Persen				program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	Angka Kelahiran menurut Umur/ Age Specific Fertility Rate, kelompok usia 15-19 tahun	17 Persen	Dinas Pmeberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana
PRIORITAS 3 : PENGENTASAN KEMISKINAN													
1	Menurunnya tingkat kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,534	Program pemberdayaan sosial	Persentase penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan kepada masyarakat yang membutuhkan	100 Persen	Menurunnya tingkat kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,480	Program pemberdayaan sosial	Persentase penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan kepada masyarakat yang membutuhkan	100 Persen	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak
					persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	100 Persen					persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	100 Persen	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak
		Indeks Keparahan Kemiskinan	0,14	Program peningkatan kualitas keluarga	Jumlah Keluarga yang terlayani	50 Keluarga		Indeks Keparahan Kemiskinan	0,13	Program peningkatan kualitas keluarga	Jumlah Keluarga yang terlayani	50 Keluarga	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak

RKPD 2025							RPJMD TAHUN KE-4 (2025)						PERANGKAT DAERAH
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	
2	Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	97,5	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun	100 Persen	Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	97,5	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun	100 Persen	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak
					persentase pemberian bantuan sosial	100 Persen					persentase pemberian bantuan sosial	100 Persen	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak
					Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang menerima program pemberdayaan sosial	100 Persen					Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang menerima program pemberdayaan sosial	100 Persen	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak
		Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	85	Program hubungan industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	89,8 Persen		Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	85	Program hubungan industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	89,60 Persen	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100	Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi	100 Persen		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100	Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi	100 Persen	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak
				Program rehabilitasi sosial	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 Persen				Program rehabilitasi sosial	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 Persen	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak

RKPD 2025							RPJMD TAHUN KE-4 (2025)						PERANGKAT DAERAH
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	
				Program penanganan bencana	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100 Persen				Program penanganan bencana	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100 Persen	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak
				Program pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang terkelola	100 Persen				Program pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang terkelola	100 Persen	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak
				Program pencegahan , penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (kabupaten/kota)					Program pencegahan , penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (kabupaten/kota)		
					Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota						Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota		
				Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	50				Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	50	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak
					Persentase pelaksanaan RAD PUG	80					Persentase pelaksanaan RAD PUG	80	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak
					jumlah IR yang terbina	80					jumlah IR yang terbina	80	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak
				Program perlindungan perempuan	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100 Persen				Program perlindungan perempuan	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100 Persen	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak
				Program pemenuhan hak anak (pha)	Forum anak Desa	9				Program pemenuhan hak anak (pha)	Forum anak Desa	9	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan

RKPD 2025							RPJMD TAHUN KE-4 (2025)						PERANGKAT DAERAH
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	
													perlindungan Anak
					Jumlah peraturan perundangan dan kebijakan PHPA	3					Jumlah peraturan perundangan dan kebijakan PHPA	3	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak
				Program perlindungan khusus anak	Persentase anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus	100 Persen				Program perlindungan khusus anak	Persentase anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus	100 Persen	Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak
PRIORITAS 4: OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DAN DAYA SAING													
1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi yang terserap	2,9	program perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	1,43 Persen	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi yang terserap	2,9	program perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	1,43 Persen	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun	0,14	program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang sertifikasi kompetensi	2,9 Persen		Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun	0,12	program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang sertifikasi kompetensi	2,9 Persen	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				program penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	45 Persen				program penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	45 Persen	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	Meningkatnya investasi	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	402.814	program pengembangan iklim penanaman modal	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan	100 Persen	Meningkatnya investasi	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	402.814	program pengembangan iklim penanaman modal	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan	100 Persen	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				program promosi penanaman modal	Investor baru yang berinvestasi	2 Investor				program promosi penanaman modal	Investor baru yang berinvestasi	2 Investor	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	21 Investor				program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	21 Investor	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

RKPD 2025							RPJMD TAHUN KE-4 (2025)						PERANGKAT DAERAH
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	3,70	program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	5,95 Persen	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	3,54	program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	5,95 Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				program pengembangan ekspor	Produk unggulan yang memenuhi standar ekspor	2 Produk				program pengembangan ekspor	Produk unggulan yang memenuhi standar ekspor	2 Produk	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				program standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase UTPP bertanda terasah yang berlaku	73,5 Persen				program standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase UTPP bertanda terasah yang berlaku	73,5 Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	76 persen					Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	76 persen	
				program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha	0,65 Persen				program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha	0,65 Persen	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				program pengembangan umkm	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	35,55 persen				program pengembangan umkm	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	35,55 persen	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3,19 persen				program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien variasi harga antar waktu	3,19 persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	39,50 Persen				program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	39,50 Persen	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

RKPD 2025							RPJMD TAHUN KE-4 (2025)						PERANGKAT DAERAH
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	
				program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	95,25 Persen				program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	95,25 Persen	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	5,00	program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase Tersedianya dan Berkembangnya Sarana Pertanian	20 Persen		Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	4,3	program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase Tersedianya dan Berkembangnya Sarana Pertanian	20 Persen	Dinas Pertanian dan Pangan
				program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	20 Persen				program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	20 Persen	Dinas Pertanian dan Pangan
				program perizinan usaha pertanian	Meningkatnya Pengetahuan Petani, Terklasifikasinya Kelas Kebun Perusahaan	50 Orang, Perusahaan				program perizinan usaha pertanian	Meningkatnya Pengetahuan Petani, Terklasifikasinya Kelas Kebun Perusahaan	50 Orang, Perusahaan	Dinas Pertanian dan Pangan
				program penyuluhan pertanian	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Penyuluhan Pertanian di Tingkat Kecamatan (BPP) dan Wilayah Binaan (Desa)	4 unit				program penyuluhan pertanian	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Penyuluhan Pertanian di Tingkat Kecamatan (BPP) dan Wilayah Binaan (Desa)	4 unit	Dinas Pertanian dan Pangan
				program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan	20 Persen				program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan	20 Persen	Dinas Pertanian dan Pangan

RKPD 2025							RPJMD TAHUN KE-4 (2025)						PERANGKAT DAERAH
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	
				program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan, Penurunan Jumlah Kasus Gangguan Reproduksi pada Sapi, Penurunan Angka Kematian Pedet, Peningkatan Ketersediaan Obat Hewan dan Sarana Kesehatan Hewan Lainnya, Peningkatan Jumlah Unit Usaha Hasil Ternak yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKP)	20 Persen				program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan, Penurunan Jumlah Kasus Gangguan Reproduksi pada Sapi, Penurunan Angka Kematian Pedet, Peningkatan Ketersediaan Obat Hewan dan Sarana Kesehatan Hewan Lainnya, Peningkatan Jumlah Unit Usaha Hasil Ternak yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKP)	20 Persen	Dinas Pertanian dan Pangan
				program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	43.966 ton				program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	43.966 ton	Dinas Perikanan
				program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	190 ton				program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	190 ton	Dinas Perikanan
				program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Laporan Hasil Pengawasan	4 Dokumen				program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Laporan Hasil Pengawasan	4 Dokumen	Dinas Perikanan
				program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Konsumsi Ikan	62 Kg/Kapita/Tahun				program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Konsumsi Ikan	62 Kg/Kapita/Tahun	Dinas Perikanan
				program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1 Kelompok LPM				program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1 Kelompok LPM	Dinas Pertanian dan Pangan

RKPD 2025							RPJMD TAHUN KE-4 (2025)						PERANGKAT DAERAH
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	
				kemandirian pangan						kemandirian pangan			
				program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat	86,5 Angka				program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat	86,5 Angka	Dinas Pertanian dan Pangan
				program penanganan kerawanan pangan	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan	7 Kecamatan				program penanganan kerawanan pangan	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan	7 Kecamatan	Dinas Pertanian dan Pangan
				program pengawasan keamanan pangan	Nilai Tambah Produk Pertanian/Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan	90 persen				program pengawasan keamanan pangan	Nilai Tambah Produk Pertanian/Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan	90 persen	Dinas Pertanian dan Pangan
		Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi makana dan minuman	11,90	program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Capaian Kinerja Kunjungan Wisata Kabupaten Belitung Timur	15 Persen		Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi makana dan minuman	4,00	program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Capaian Kinerja Kunjungan Wisata Kabupaten Belitung Timur	15 Persen	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				program pemasaran pariwisata	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap Total PAD Daerah	4 Persen				program pemasaran pariwisata	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap Total PAD Daerah	4 Persen	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	30 Persen				program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	30 Persen	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				program pengembangan kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan	65 Persen				program pengembangan kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan	67 Persen	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				program pengembangan kesenian tradisional	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	60 Persen				program pengembangan kesenian tradisional	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	60 Persen	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				program pembinaan sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah	65 Persen				program pembinaan sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah	65 Persen	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

RKPD 2025							RPJMD TAHUN KE-4 (2025)						PERANGKAT DAERAH
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	
				program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	70 Persen				program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	70 Persen	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				program pengelolaan permuseum an	Persentase Pengelolaan Permuseuman	70 Persen				program pengelolaan permuseum an	Persentase Pengelolaan Permuseuman	70 Persen	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3	program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha	0,65	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	1,64	program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha	0,65	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
				program pengembangan umkm	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	35,55				program pengembangan umkm	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	35,55	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
				program pengawasan dan pemeriksaa n koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	38				program pengawasan dan pemeriksaa n koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	38	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
				program hubungan industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	89,6				program hubungan industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	89,6	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
				program pendidikan dan latihan perkoperasi an	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	39,5				program pendidikan dan latihan perkoperasi an	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	39,5	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
PRIORITAS 5 : PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR													
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap	98,78	program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase penyediaan pelayanan air limbah domestik setempat	94,95 Persen	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap	98,78	program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase penyediaan pelayanan air limbah domestik setempat	94,95 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

RKPD 2025							RPJMD TAHUN KE-4 (2025)						PERANGKAT DAERAH
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	
		pelayanan dasar		program penataan bangunan gedung	Jumlah bangunan publik dilengkapi ruang terbuka hijau	80 angka		pelayanan dasar		program penataan bangunan gedung	Jumlah bangunan publik dilengkapi ruang terbuka hijau	80 angka	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	32 persen				program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	32 persen	Dinas Perhubungan
				program pengelolaan pelayaran	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pelayaran	65,43 Persen				program pengelolaan pelayaran	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pelayaran	65,43 Persen	Dinas Perhubungan
				program penatagunaan tanah	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.	0,33 Persen				program penatagunaan tanah	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.	0,33 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				program penataan bangunan dan lingkungannya	Luas Ruang Terbuka Hijau	20 Persen				program penataan bangunan dan lingkungannya	Luas Ruang Terbuka Hijau	20 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100 persen				program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100 persen	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan	79,86 Persen				program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan	79,86 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

RKPD 2025							RPJMD TAHUN KE-4 (2025)						PERANGKAT DAERAH			
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET				
					perpipaan terlindungi						perpipaan terlindungi					
		Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	72,02	program penyelenggaraan jalan	Rasio Panjang Jalan Terhadap Luas Wilayah	0,35 Persen		Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	72,02	program penyelenggaraan jalan	Rasio Panjang Jalan Terhadap Luas Wilayah	0,35 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
				program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	96,85 Persen				program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	96,85 Persen	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
		Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	76,52	program pengembangan perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	53,50 persen		Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	76,52	program pengembangan perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	53,50 persen	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
				program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	0 persen				program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	0 persen	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
				program kawasan permukiman	Persentase permukiman yang tertata	99,82 persen				program kawasan permukiman	Persentase permukiman yang tertata	99,82 persen	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
		PRIORITAS 6 : PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP														
		1	Meningkatnya kualitas	Indeks Kualitas	71,40	program perencanaan		Persentase Dokumen Perencanaan	100 Persen	Meningkatnya kualitas	Indeks Kualitas	71,28	program perencanaan	Persentase Dokumen Perencanaan	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup

RKPD 2025							RPJMD TAHUN KE-4 (2025)						PERANGKAT DAERAH	
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET		
	lingkungan hidup	Lingkungan Hidup		lingkungan hidup	Lingkungan Hidup		lingkungan hidup	Lingkungan Hidup		lingkungan hidup	Lingkungan Hidup		Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				program pengelolaan sumber daya air (sda)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	43 Persen				program pengelolaan sumber daya air (sda)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	43 Persen		
		Indeks Risiko Bencana	168,4	program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara	94,3 Indeks	Indeks Risiko Bencana	168,4	program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara	94,3 Indeks	Dinas Lingkungan Hidup		
					Indeks Kualitas Air	56,81 Indeks				Indeks Kualitas Air	56,81 Indeks			
					Indeks Kualitas Lahan	53,54 Indeks				Indeks Kualitas Lahan	53,54 Indeks			
					program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)				52,5 Persen	program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	52,5 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
					program pengelolaan persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah				90 Persen	program pengelolaan persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah	90 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
					program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase Ketaatan Perusahaan dan/atau Kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3				90 Persen	program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase Ketaatan Perusahaan dan/atau Kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3	90 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
					program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase Peningkatan Pengetahuan Teknis Tentang Lingkungan Hidup Bagi Masyarakat				80 Persen	program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase Peningkatan Pengetahuan Teknis Tentang Lingkungan Hidup Bagi Masyarakat	80 Persen	Dinas Lingkungan Hidup

RKPD 2025							RPJMD TAHUN KE-4 (2025)						PERANGKAT DAERAH
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	
				program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase Capaian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	100 Persen				program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase Capaian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	100 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
PRIORITAS 7 : PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK													
1	Meningkatnya Kapasitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	92	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu	100 Persen	Meningkatnya Kapasitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	77	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu	100 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah tersusun tepat waktu	100 Persen					Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah tersusun tepat waktu	100 Persen	
				Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD	100 Persen				Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD	100 Persen	
					Persentase kesesuaian Program RKPD kedalam APBD	100 Persen					Persentase kesesuaian Program RKPD kedalam APBD	100 Persen	
				Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase implemetasi rencana kelitbangan	100 Persen				Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase implemetasi rencana kelitbangan	100 Persen	
					Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100 Persen					Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100 Persen	
					Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	65 Persen					Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	65 Persen	
		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	ST	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kerjasama daerah yang terfasilitasi	100 Persen		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	ST	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kerjasama daerah yang terfasilitasi	100 Persen	Sekretariat Daerah
					Persentase Kebijakan dan Pembinaan Keagamaan yang difasilitasi	100 Persen					Persentase Kebijakan dan Pembinaan Keagamaan yang difasilitasi	100 Persen	

RKPD 2025							RPJMD TAHUN KE-4 (2025)						PERANGKAT DAERAH
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	
					Persentase Regulasi yang tersusun secara ideal, tepat fungsi dan tepat sasaran	100 Persen					Persentase Regulasi yang tersusun secara ideal, tepat fungsi dan tepat sasaran	100 Persen	
2	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70	Program pengelolaan keuangan daerah	Ketepatan Waktu Penetapan Raperda APBD	1 angka	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79	Program pengelolaan keuangan daerah	Ketepatan Waktu Penetapan Raperda APBD	1 angka	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
					Ketepatan Waktu Penetapan Raperda Perubahan APBD	1 angka					Ketepatan Waktu Penetapan Raperda Perubahan APBD	1 angka	
					Persentase Realisasi SP2D Tepat Waktu	98 Persen					Persentase Realisasi SP2D Tepat Waktu	98 Persen	
					Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	1 angka					Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	1 angka	
					Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	85 Persen					Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	85 Persen	
					Persentase Program/ Kegiatan yang Tidak Terlaksana	10 Persen					Persentase Program/ Kegiatan yang Tidak Terlaksana	10 Persen	
					Persentase Belanja Pendidikan	20 Persen					Persentase Belanja Pendidikan	20 Persen	
					Persentase Belanja Kesehatan	10 Persen					Persentase Belanja Kesehatan	10 Persen	
					Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	0,87 Persen					Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	0,87 Persen	
					Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	27 Persen					Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	27 Persen	
					Proporsi pajak terhadap total belanja	7,76 Persen					Proporsi pajak terhadap total belanja	7,76 Persen	
				Program pengelolaan barang milik daerah	Kesesuaian Barang Milik Daerah dengan Nilai Aset di Neraca	100 Persen				Program pengelolaan barang milik daerah	Kesesuaian Barang Milik Daerah dengan Nilai Aset di Neraca	100 Persen	

RKPD 2025							RPJMD TAHUN KE-4 (2025)						PERANGKAT DAERAH
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	
					Persentase pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah yang terlaksana	100 Persen					Persentase pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah yang terlaksana	100 Persen	
				Program pengelolaan pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap komponen pendapatan daerah	14,38 Persen				Program pengelolaan pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap komponen pendapatan daerah	14,38 Persen	
					Kemandirian Keuangan Daerah	14,38 Persen					Kemandirian Keuangan Daerah	14,38 Persen	
					Rasio PAD	1,44 Persen					Rasio PAD	1,44 Persen	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	BB	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan/rekomen dari hasil pemeriksaan BPK	93 Persen	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	BB	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan/rekomen dari hasil pemeriksaan BPK	93 Persen	Inspektorat
		Kapabilitas APIP	3		Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan/rekomen dari hasil pemeriksaan Inspektorat	85 Persen		Kapabilitas APIP	4		Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan/rekomen dari hasil pemeriksaan Inspektorat	85 Persen	
		Maturitas SPIP	3	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi yang ditindaklanjuti	100 Persen		Maturitas SPIP	4	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi yang ditindaklanjuti	100 Persen	
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	94,50	Program pendaftaran penduduk	Penerbitan KTP ber-NIK per jumlah penduduk wajib KTP	100 persen	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	78	Program pendaftaran penduduk	Penerbitan KTP ber-NIK per jumlah penduduk wajib KTP	100 persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Rasio penduduk ber-KTP	1 Angka					Rasio penduduk ber-KTP	1 Angka	
					Persentase anak usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	100 Persen					Persentase anak usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	100 Persen	
					Rasio pasangan berakate nikah	1 Angka					Rasio pasangan berakate nikah	1 Angka	

RKPD 2025							RPJMD TAHUN KE-4 (2025)						PERANGKAT DAERAH
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	
				Program pencatatan sipil	Penerbitan akta kelahiran per jumlah kelahiran	100 Persen				Program pencatatan sipil	Penerbitan akta kelahiran per jumlah kelahiran	100 Persen	
					Rasio penerbitan akta kematian	1 Angka					Rasio penerbitan akta kematian	1 Angka	
					Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	100 Persen					Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	100 Persen	
				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Persen				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Persen	Kecamatan
				Program administrasi pemerintahan desa	Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	100 Persen				Program administrasi pemerintahan desa	Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen	Kecamatan
				Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase permohonan dokumen dan layanan data Kependudukan yang dapat diproses/dilayani	100 Persen				Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase permohonan dokumen dan layanan data Kependudukan yang dapat diproses/dilayani	100 Persen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase pengelolaan arsip pelayanan adminduk secara digital	40 Persen					Persentase pengelolaan arsip pelayanan adminduk secara digital	40 Persen	
				Program pengelolaan profil kependudukan	Persentase Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten	100 Persen				Program pengelolaan profil kependudukan	Persentase Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten	100 Persen	
5	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,60 Angka Indeks	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase layanan informasi yang bisa diakses	100 Persen	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,00 Angka Indeks	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase layanan informasi yang bisa diakses	100 Persen	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

RKPD 2025							RPJMD TAHUN KE-4 (2025)						PERANGKAT DAERAH
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	
				Program pengelolaan aplikasi informatika	Tingkat kematangan aspek TIK	3 Angka				Program pengelolaan aplikasi informatika	Tingkat kematangan aspek TIK	3 Angka	
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100 Persen				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100 Persen	
6	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Indeks Kelembagaan	78 Persen	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase kerjasama daerah yang terfasilitasi	100 Persen	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Indeks Kelembagaan	80 Persen	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase kerjasama daerah yang terfasilitasi	100 Persen	Sekretariat Daerah
					Persentase Kebijakan dan Pembinaan Keagamaan yang difasilitasi	100 Persen					Persentase Kebijakan dan Pembinaan Keagamaan yang difasilitasi	100 Persen	
					Persentase Regulasi yang tersusun secara ideal, tepat fungsi dan tepat sasaran	100 Persen					Persentase Regulasi yang tersusun secara ideal, tepat fungsi dan tepat sasaran	100 Persen	
				Program perekonomian dan pembangunan	Persentase alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	100 Persen					Program perekonomian dan pembangunan	Persentase alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	100 Persen
					Tingkat Kematangan UKPBJ	9 Level Proaktif						Tingkat Kematangan UKPBJ	9 Level Proaktif
					Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan terkait perekonomian administrasi pembangunan, dan sumber daya alam	100 Persen						Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan terkait perekonomian administrasi pembangunan, dan sumber daya alam	100 Persen

RKPD 2025							RPJMD TAHUN KE-4 (2025)						PERANGKAT DAERAH
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	
7	Meningkatnya Profesionalisme Sumber Daya Aparatur	Indeks Profesionalisme ASN	72	Program kepegawaian daerah	Persentase Pelaksanaan Program Pengadaan, Mutasi, Promosi, Pengembangan Kompetensi dan Evaluasi Kinerja ASN	100 Persen	Meningkatnya Profesionalisme Sumber Daya Aparatur	Indeks Profesionalisme ASN	57,00	Program kepegawaian daerah	Persentase Pelaksanaan Program Pengadaan, Mutasi, Promosi, Pengembangan Kompetensi dan Evaluasi Kinerja ASN	100 Persen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi dasar dan manajerial	100 Persen				Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi dasar dan manajerial	100 Persen	

Sumber: Bappelitbangda Kab. Belitung Timur (diolah)

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Penyusunan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2023, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2025–2029.

RKP 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. “Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan 2025–2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, (sekaligus) menjadi *window opportunity* untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas. Karena itu, RKP 2025 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi,”. RKP 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Dengan memperhatikan mandat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait, dokumen ini menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. RKP 2025 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bagi pemerintah pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RUU APBN. Bagi Pemerintah Daerah, RKP 2025 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD. Arah pembangunan yang termuat dalam RKP dapat menjadi acuan bagi Badan Usaha (BUMN/Swasta) dan *Non-State Actor* untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional.

Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional pada tahun 2025, adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun 2025 yang akan dilaksanakan dengan tema “ Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan “ diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 merupakan tahapan pertama RPJMN Tahun 2025-2029. Sedangkan RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari RPJP Nasional Tahun 2025-2045 yang merupakan tahap perkuatan fondasi transformasi. Adapun transformasi Indonesia dan landasan transformasi untuk tahap pertama RPJPN adalah sebagai berikut :

1. Transformasi Sosial
Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
2. Transformasi Ekonomi
Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
3. Transformasi Tata Kelola
Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan kepemimpinan Indonesia
Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang di dalam Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Prioritas Pembangunan untuk Transformasi Sosial:

a. Kesehatan untuk Semua

Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :

- 1) Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan
- 2) Investasi pelayanan kesehatan primer di Puskesmas, Pustu, dan UKBM
- 3) Penurunan kematian ibu melalui penguatan pelayanan kesehatan maternal dan penurunan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif
- 4) Pengendalian penyakit menular terutama TB dan eliminasi penyakit tropis terabaikan terutama kusta dan Schistosomiasis
- 5) Penguatan pembiayaan kesehatan dan JKN.

b. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :

- 1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
- 2) Restrukturisasi kewenangan pengangkatan dan distribusi guru untuk mendorong pemerataan dan kualitas pendidikan
- 3) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi yang berkualitas
- 4) Peningkatan lulusan pendidikan menengah dan tinggi (STEAM) yang produktif dan berdaya saing

c. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :

- 1) Pemanfaatan data sosial ekonomi penduduk Indonesia melalui satu sistem Regsosek
- 2) Penguatan integrasi perlindungan sosial, bantuan sosial, dan jaminan sosial serta pemberdayaan masyarakat
- 3) Pengembangan ekonomi perawatan (care economy) khususnya untuk kelompok rentan dan perempuan

- 4) Inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan

2. Prioritas Pembangunan untuk Transformasi Ekonomi

- a. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Produktivitas Ekonomi Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :
 - 1) Penguatan hilirisasi industri berbasis SDA (a.1 nikel, tembaga, bauksit, sawit, karet, kelapa, kakao, dan rumput laut)
 - 2) Peningkatan industri padat teknologi dan inovasi (logam dasar; kimia dasar; elektronik dan digital; kimia hilir dan farmasi; alat angkut; serta kedirgantaraan)
 - 3) Pengembangan ekonomi biru indonesia sebagai sumber pertumbuhan baru
 - 4) Pengembangan bioekonomi dan bioteknologi
 - 5) Pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas, regeneratif bali dan klaster pariwisata IKN (a.1 Danau Toba, Borobudur, Lombok Gili Tramen, Manado-likupang, Bangka Belitung, Wakatobi, BTS, Raja Ampat, Morotai, Bali, dan IKN)
 - 6) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual (seni, budaya, dan kerajinan; film, animasi, dan visual arts; kuliner; serta aplikasi dan gim)
 - 7) Pengembangan industrialisasi perikanan dan kelautan
 - 8) Pengembangan koperasi sektor produksi
 - 9) Peningkatan peran UMKM dalam rantai nilai industri
 - 10) Pengembangan wirausaha berorientasi tumbuh
 - 11) Penguatan vokasi sesuai dunia usaha
 - 12) Peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan
 - 13) Penciptaan ekosistem dan peningkatan anggaran iptek serta inovasi
- b. Penerapan Ekonomi Hijau Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :
 - 1) Penerapan ekonomi sirkular
 - 2) Percepatan transisi energi
 - 3) Penerapan transportasi hijau
- c. Transformasi Digital Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :
 - 1) Pengembangan superplatform digital indonesia
 - 2) Peningkatan kualitas infrastruktur TIK
 - 3) Penciptaan enabler transformasi digital
 - 4) Penguatan SDM digital
 - 5) Peningkatan adopsi teknologi digital pada berbagai sektor
- d. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :
 - 1) Penguatan integrasi konektivitas dengan intra dan antar kawasan pertumbuhan ekonomi
 - 2) Penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru
 - 3) Penguatan logistik nasional

- 4) Penguatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara
 - 5) Peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai pasok antardaerah dan dengan global
 - 6) Peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi
 - 7) Peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global
 - 8) Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global
- e. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
- Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :
- 1) Peningkatan kualitas 10 Wilayah Metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, dan Manado)
 - 2) Pembangunan Ibu Kota Nusantara
 - 3) Pengentasan rumah tidak layak huni
 - 4) Pembiayaan perumahan untuk semua
 - 5) Pengentasan permukiman kumuh
 - 6) Penyediaan perumahan publik terjangkau

3. Prioritas Pembangunan untuk Transformasi Tata Kelola

Prioritas pembangunan untuk transformasi Tata Kelola adalah Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif, dengan beberapa intervensi yang menjadi penekanan adalah :

- 1) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi nasional dan penyederhanaan tata kelola regulasi;
- 2) Transformasi digital pelayanan publik yang berbasis transformasi digital layanan pemerintah dan kompetensi digital ASN;
- 3) Penataan proses bisnis dan kelembagaan KL berdasarkan Prioritas Nasional/ shared outcome (manajemen kinerja, manajemen anggaran, Manajemen resiko, dan sistem insentif KL atas pencapaian target);
- 4) Transformasi manajemen ASN (penataan kelembagaan, manajemen talenta, pengembangan kompetensi, dan penerapan sistem GRC/ Governance, Risk and Compliance);
- 5) Penerapan single salary system dan reformasi sistem pensiun;
- 6) Penguatan sistem anti korupsi dengan prioritas pembudayaan anti korupsi, pencegahan korupsi dan penerapan Sistem Integritas Partai Politik

4. Prioritas Pembangunan untuk Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

a. Hukum Berkeadilan, Kemanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial

Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :

- 1) Single prosecution system melalui penguatan kewenangan Kejaksaan, kapasitas jaksa, dan pemenuhan sarana prasarana penanganan perkara

- 2) Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan dalam negeri, keamanan insani, keamanan laut, dan keamanan siber
 - 3) Penguatan kebebasan sipil yang berwawasan Pancasila, penguatan kesetaraan kelompok rentan untuk akses informasi dan keterwakilan politik, serta penguatan kapasitas, fungsi, dan integritas Lembaga demokrasi
- b. Stabilitas Ekonomi Makro
- Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :
- 1) Reformasi perpajakan (penambahan kelembagaan administrasi perpajakan)
 - 2) Reformasi subsidi, terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran
 - 3) Transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal
 - 4) Pengendalian inflasi dengan fokus penyelesaian masalah struktural (pasokan dan distribusi), penguatan data, serta penguatan koordinasi pengendalian inflasi pusat & daerah
 - 5) Peningkatan kontribusi keuangan syariah dan inklusi keuangan
- c. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :
- 1) Peningkatan efektivitas kepemimpinan Indonesia di tingkat regional dan global
 - 2) Penguatan kerja sama pembangunan internasional dan diplomasi ekonomi
 - 3) Pemenuhan infrastruktur penopang kebijakan luar negeri
 - 4) Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan
 - 5) Peningkatan kemampuan pertahanan

5. Prioritas Pembangunan untuk Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- a. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :
- 1) Perlindungan dan pelestarian warisan budaya
 - 2) Pembinaan Ideologi Pancasila, serta penguatan karakter dan jati diri bangsa
 - 3) Menjamin hak berkebudayaan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat
 - 4) Penguatan moderasi beragama
 - 5) Transformasi penjaminan produk halal
 - 6) Pengembangan dana sosial keagamaan produktif
- b. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif
- Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :
- 1) Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya
 - 2) Penguatan institusi keluarga dalam penanaman nilai, moral, etika, integritas, karakter, dan pengembangan psikososial anak
 - 3) Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan

- 4) Pengembangan masyarakat inklusif terhadap anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya

c. Lingkungan Hidup Berkualitas

Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :

- 1) Pencegahan kerusakan dan konservasi ekosistem dan spesies
- 2) Sistem Peringatan Dini *Slow On Set LH* dan peningkatan Kesehatan laut
- 3) Perbaikan kualitas ekosistem dan LH
- 4) Penegakan Hukum Lingkungan
- 5) Pembangunan *Forest* dan *Sponge City* di Ibu Kota Nusantara
- 6) Percepatan Pemenuhan Sanitasi Aman dan Berkelanjutan
- 7) Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi Hulu-Hilir menuju *Circular Economy*

d. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :

- 1) Menjamin ketahanan energi nasional melalui peningkatan ketersediaan, kemudahan akses, keterjangkauan, dan tingkat penerimaan energi
- 2) Meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional (Kawasan Sentra Produksi Pangan, pangan lokal, pangan akuatik/blue foods)
- 3) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan (diversifikasi, keamanan, dan fortifikasi pangan)
- 4) Penguatan tata kelola pangan (susut dan limbah pangan, serta Satu Data Pangan)
- 5) Pembangunan dan revitalisasi tampungan air alami dan buatan
- 6) Penuntasan pemanfaatan air baku, irigasi, dan listrik dari bendungan terbangun
- 7) Penyediaan air baku DKI Jakarta dari wilayah sungai di Banten dan Jawa Barat (Interbasin transfer)
- 8) Rehabilitasi hutan dan lahan
- 9) Pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan yang aman, berkelanjutan, serta berketahanan iklim dan bencana

e. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah :

- 1) Peningkatan ketahanan di pesisir dan laut
- 2) Pencegahaan penyakit menular akibat iklim
- 3) Pertanian ramah iklim
- 4) Pembangunan dan konservasi sumber daya air
- 5) Penurunan emisi di sektor energi, FOLU, IPPU, dan limbah domestik
- 6) Konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan
- 7) Restorasi lahan gambut dan rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove, lamun, dan terumbu karang)
- 8) Peningkatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan sistem peringatan dini terpadu bencana
- 9) Penguatan manajemen tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana

Keseluruhan Prioritas tersebut adalah dalam rangka mencapai sasaran makro tahun 2025 yang terdiri dari:

Tabel 4. 6 Sasaran Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah untuk Tahun 2025

No	Indikator	2022		2023		2024	2025
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,2 – 5,5	5,31	5,3 – 5,9	5,05	5,3 – 5,7	5,3 – 5,6
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0	9,57	7,5 – 8,5	9,36	6,5 – 7,5	7,0 – 8,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,5 – 6,3	5,86	5,3 – 6,0	5,32	5,0 – 5,7	4,5 – 5,0
4	Rasioa Gini (nilai)	0,376 – 0,378	0,381	0,375 – 0,378	0,388	0,375 – 0,377	0,379 – 0,382
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Nilai)	72,67 – 72,69 ^{a)}	72,91	73,31 – 73,49	74,39	73,99 – 74,02	
	Indeks Modal Manusia (Nilai)				0,53		0,56
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	26,87	26,87	27,02	34,09	27,27	38,6
7	Nilai Tukar Petani/NTP (Nilai)	103 - 105	107,33	103 - 105	112,46	105 - 108	
8	Nilai Tukar Nelayan/NTN (Nilai)	104 – 106	106,45	106 - 107		107 - 110	

Sumber: Bappelitbangda Kab. Belitung Timur (diolah)

Pembangunan daerah sebagai penjabaran dari pembangunan nasional, maka kinerja pembangunan nasional merupakan agregat dari kinerja pembangunan seluruh daerah. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional merupakan agregasi dari pencapaian semua provinsi dan pencapaian tujuan di tingkat provinsi merupakan agregasi pencapaian tujuan di tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian, tanggung jawab untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran dalam pembangunan nasional menjadi kewajiban bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Prioritas Pembangunan Daerah merupakan penjabaran tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/ tonggak antara capaian menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan. Penyusunan RKPD Kabupaten perlu memperhatikan kebijakan yang berada di atasnya seperti kebijakan nasional dan kebijakan provinsi. Kesenambungan antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional diperlukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia. Prioritas Daerah tersebut juga diselaraskan dengan prioritas Nasional yang tertuang di dalam Rancangan RKPD 2025 sebagai berikut.

Tabel 4. 7 Interkoneksi Prioritas Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak atas manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
					Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
					Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan
					Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
					Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	Optimalisasi Pengembangan Daya Saing Daerah dan Percepatan Investasi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau , dan ekonomi biru		KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
					Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
				Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
					Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
					Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
					Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
				Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
					Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
					Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
				Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Peningkatan Kualitas Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai
					Pembangunan Kanal Banjir
					Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
					Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
					Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
					Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
					Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Rekonstruksi Jalan
					Pemeliharaan Berkala Jalan
					Pelebaran Jalan Menuju Standar
					Pemeliharaan Rutin Jembatan
					Survey Kondisi Jalan/Jembatan
					Rehabilitasi Jalan
					Pemeliharaan Rutin Jalan
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
					Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
					Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
					Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Optimalisasi Pengembangan Daya Saing Daerah dan Percepatan Investasi	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
					Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
					Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
					Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
					Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
					Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
					Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
4	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan gen z), dan peyandang disabilitas	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesenjangan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
					Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGEMBANGAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pelopori Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota
		Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
					Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
					Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
					Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Optimalisasi Pengembangan Daya Saing Daerah dan Percepatan Investasi	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
					Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
					Pengawasan Penanaman Modal
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan Kemiskinan	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
					Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
					Penyediaan Permakanan
					Penyediaan Sandang
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat Bantu
					Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
					Penyediaan Makanan
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
					Fasilitasi Bantuan Hukum
					Pendokumentasian Produk Hukum dan
					Pengelolaan Informasi Hukum
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
					Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
					Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
					Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
					Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
					Pengawasan Desa
					Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Sumber: Bappelitbangda Kab. Belitung Timur (diolah)

Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 merupakan bagian perencanaan yang sangat penting dikarenakan tahun 2025 merupakan tahapan terakhir dari periode RPJPD Tahun 2005-2025 sekaligus tahapan pertama dari periode RPJPD Tahun 2025-2045. Selain itu, penyusunan RKPD Tahun 2025 juga mengacu pada dokumen perencanaan masa transisi, yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD yang menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka Gubernur menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi (RPD) Tahun 2023-2026 selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Provinsi Tahun 2025.

Pembangunan Daerah Tahun 2025 berdasarkan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 difokuskan pada upaya Peningkatan produktifitas berbasis sektor unggulan meliputi Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan UMKM serta menjaga keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan. Disamping itu RKPD 2025 difokuskan untuk Penyediaan infrastruktur yang terkoneksi dengan kawasan pertumbuhan ekonomi serta Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 adalah merealisasikan Fokus Pembangunan Daerah dengan tema pembangunan **“Penguatan Pondasi Transformasi Sektor Unggulan yang Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah”**. Hubungan antara tujuan-sasaran pembangunan 2023-2026 disajikan pada Tabel 4.8

Tabel 4. 8 Tujuan, Indikator Kerja Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran Perubahan RPD 2023–2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4	5
PRIORITAS UTAMA				
1	Meningkatnya ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB	1. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian	1. Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian
			2. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan	2. Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan
			3. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	3. Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian
			4. Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	4. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
			5. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	5. Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4	5
			6. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	6. Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik
			7. Meningkatnya Ekspor	7. Laju Pertumbuhan Ekspor
			8. Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah	8. Pertumbuhan Investasi
2	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Williamson	1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	1. Persentase Ketersediaan Infrastruktur
			2. Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	2. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang
			3. Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	3. Indeks Kapasitas Daerah
			4. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan	4. Indeks desa membangun
			5. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	5. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1. Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
4	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1. Meningkatnya Pembangunan Manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
PRIORITAS PENDUKUNG				
5	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	1. Meningkatkan Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi	1. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi
6	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	1. Indeks Reformasi Birokrasi
7	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Gini	1. Menurunkan Tingkat Kemiskinan	1. Persentase Angka Kemiskinan
			2. Meningkatkan Kesempatan Kerja	2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Provinsi Bangka Belitung

untuk dapat mencapai 6 (tujuh) tujuan yang ditandai dengan 19 (Sembilan Belas) sasaran. Indikasi keberhasilan dari pelaksanaan Tujuan dapat dilihat dari target capaian indikator sasaran pembangunan. Adapun target sasaran makro pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan target Nasional yang akan dicapai pada Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4. 9 Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

INDIKATOR MAKRO	TARGET		
	Nasional	Pembangunan Per Wilayah	Provinsi
1	2	3	4
Pertumbuhan	5,6% - 6,1%	4,8% - 5,2%	4,46%

INDIKATOR MAKRO	TARGET		
	Nasional	Pembangunan Per Wilayah	Provinsi
1	2	3	4
Ekonomi			
Kemiskinan	6,0% - 7,0%	2,42% - 2,92%	4,10%
Pengangguran	5,0%	3,21% - 3,94%	4,26%
Gini Ratio	0,379-0,382	0,239 – 0,242	0,224
IPM	-	-	79,41

Sumber: RPD Tahun 2023-2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Target tujuan dan sasaran makro tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Berdasarkan RPD Tahun 2023-2026, terdapat 6 (enam) tujuan dan 7 (tujuh) indikator kinerja tujuan tahun 2025 yang akan dicapai, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Target Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	KONDISI AWAL RPD	TARGET	KONDISI AKHIR
			Tahun 2023	2025	Tahun 2026
1	2	3	4	7	10
PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA					
1	Meningkatnya ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB	5,05	4,46	5,78
2	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Williamson	0,19	0,178	0,177
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,05	76,7	77,5
4	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,69	72,35	72,58
PRIORITAS PEMBANGUNAN PENDUKUNG					
5	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	77,79	79,41	81,42
6	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi	66,08	69,75	70,51
7	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Gini	0,247	0,224	0,217

Sumber: RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

Target tujuan tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran-sasaran prioritas daerah tahun 2025 yang akan dicapai, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET	KONDISI AKHIR
			Tahun 2023	2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
PRIORITAS UTAMA					
1	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub	4,03	4,43	4,6
2	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub	-9,76	4,25	4,45
3	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	-9,23	1,75	0,46

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET	KONDISI AKHIR
			Tahun 2023	2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	1,46**	4,5	4,55
5	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub	1,31**	5,5	5,55
6	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	43	2,56	2,5
7	Meningkatnya Ekspor	Laju Pertumbuhan Ekspor	-20,07**	6,99	6,53
8	Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah	Pertumbuhan Investasi	-39,68	30,77	34,12
9	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	39,45	69,85	100
10	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,6	0,75	0,8
11	Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,34	0,38	0,39
12	Percepatan pembangunan kawasan perdesaan	Indeks desa membangun	0,704	0,739	0,748
13	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,93	1,7	1,68
14	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,64	76,7	77,5
15	Meningkatnya Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	74,09	72,35	72,58
PRIORITAS PENDUKUNG					
16	Meningkatkan Kebebasan, Kesenjangan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	77,79	79,41	80,42
17	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	66,08	69,75	70,51
18	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	4,52	4,1	4,01
19	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,56	4,26	4,19

Sumber: RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

Prioritas Daerah tersebut juga diselaraskan dengan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang di dalam Rancangan Akhir RKPD 2025 sebagai berikut.

Tabel 4. 12 Interkoneksi Prioritas Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2025	Program Pembangunan Daerah 2025	Kegiatan Daerah 2025	Sub Kegiatan Daerah 2025
A	Utama							
1	Meningkatnya ekonomi Daerah	Optimalisasi Pengembangan Daya Saing Daerah dan Percepatan Investasi	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi yang terserap	2,9	Program perencanaan tenaga kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
				Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun	0,14	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
								Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
						Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja
			Meningkatnya investasi	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	402.814	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
								Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
								Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
								Pengawasan Penanaman Modal
						Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
							Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2025	Program Pembangunan Daerah 2025	Kegiatan Daerah 2025	Sub Kegiatan Daerah 2025
						Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
						Program perencanaan dan pembangunan industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
								Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
								Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
								Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
								Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
						program pengendalian izin usaha industri	penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin perluasan usaha industri (IPUI), Izin Usaha kawasan industri (IUKI), dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	5,00	Program pengelolaan perikanan tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
								Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
								Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
							Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
							Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2025	Program Pembangunan Daerah 2025	Kegiatan Daerah 2025	Sub Kegiatan Daerah 2025
						Program pengelolaan perikanan budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
								Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
							Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
							Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
								Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
								Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
								Monitoring Kesehatan Ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupten/kota
						Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
								Kapal pengawas perikanan yang dirawat
								pengawasn usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
						Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
							Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko
							Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2025	Program Pembangunan Daerah 2025	Kegiatan Daerah 2025	Sub Kegiatan Daerah 2025
								Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
						Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
							Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
							Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan
							Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
						Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
								Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
						Program perizinan usaha pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian
						Program penyuluhan pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
								Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
								Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
								Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2025	Program Pembangunan Daerah 2025	Kegiatan Daerah 2025	Sub Kegiatan Daerah 2025
								Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani
						Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
						Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
							Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan
						Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
								Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
								Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
							Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
							Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
								Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
						Program penanganan kerawanan pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
							Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2025	Program Pembangunan Daerah 2025	Kegiatan Daerah 2025	Sub Kegiatan Daerah 2025
						Program pengawasan keamanan pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
				Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi makana dan minuman	11,90	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
								Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
								Perencanaan kawasan strategis pariwisata
							Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
								Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
								Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
								Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
							Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota
								Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota
						Program pemasaran pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
								Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
						Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2025	Program Pembangunan Daerah 2025	Kegiatan Daerah 2025	Sub Kegiatan Daerah 2025
								fasilitasi proses kreasi produksi distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif
								fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif
								pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata
								fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata
								monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
							Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
						Program pengembangan kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
							Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
							Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
						Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya
						Program pengelolaan permuseuman	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
				Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	3,70	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
								Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
						Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2025	Program Pembangunan Daerah 2025	Kegiatan Daerah 2025	Sub Kegiatan Daerah 2025
						Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
							Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
							Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
								Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
								Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
								Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
			Meningkatnya daya saing daerah	Indeks daya saing daerah	3,00	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
								Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
						Program pengembangan umkm	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
						Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
						Program hubungan industrial	pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kabupaten/kota	pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2025	Program Pembangunan Daerah 2025	Kegiatan Daerah 2025	Sub Kegiatan Daerah 2025
								penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan
							pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
								penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
								penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi
								pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota
						Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
2	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Peningkatan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	98,78	Program penyelenggaraan jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
								Rekonstruksi Jalan
								Pemeliharaan Berkala Jalan
								Pelebaran Jalan Menuju Standar
								Pemeliharaan Rutin Jembatan
								Survey Kondisi Jalan/Jembatan
								Rehabilitasi Jalan
								Pemeliharaan Rutin Jalan
						Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2025	Program Pembangunan Daerah 2025	Kegiatan Daerah 2025	Sub Kegiatan Daerah 2025
								Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
							Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
							Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
							Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
								Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
							Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
								Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
								Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
								Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
							Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
								Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
							Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2025	Program Pembangunan Daerah 2025	Kegiatan Daerah 2025	Sub Kegiatan Daerah 2025
							Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
								Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
						Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
							Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
								Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
				Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	76,52	Program kawasan permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik
							Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
						Program pengembangan perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
							Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
							Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2025	Program Pembangunan Daerah 2025	Kegiatan Daerah 2025	Sub Kegiatan Daerah 2025
						Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
						Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
								Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
								Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU
								Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang
						Program pengembangan permukiman		
						Program pengembangan jasa konstruksi	penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis
								pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis
							penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	penyediaan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi
								penyediaan data dan informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten/kota
								peningkatan kapasitas pengelola SIPJAKI
						Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
								Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2025	Program Pembangunan Daerah 2025	Kegiatan Daerah 2025	Sub Kegiatan Daerah 2025
								Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
								Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
								Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
				Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	72,02	Program penataan bangunan gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
								Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
						Program penataan bangunan dan lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	penataan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional, dan kawasan strategis lainnya
						Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
								Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
								Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
								Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
						Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
								Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2025	Program Pembangunan Daerah 2025	Kegiatan Daerah 2025	Sub Kegiatan Daerah 2025
						PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
						Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	mediasi penyelesaian kasus pertanahan dalam satu daerah kabupaten/kota
						Program penyelenggaraan penataan ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
								Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
								Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang
							Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Dasar
								Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
								Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
								Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
								Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
								Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan
			Menurunnya tingkat kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,480	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
				Indeks Keparahan Kemiskinan	0,13		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2025	Program Pembangunan Daerah 2025	Kegiatan Daerah 2025	Sub Kegiatan Daerah 2025
								Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
								Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
								Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
						PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
								Penyediaan Sandang
								Penyediaan Alat Bantu
								Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
								Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
							Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan
								Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
								Pemberian Layanan Rujukan
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,40	Program perencanaan lingkungan hidup	Rencana Perlindungan dan Pnegelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
						Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2025	Program Pembangunan Daerah 2025	Kegiatan Daerah 2025	Sub Kegiatan Daerah 2025
								Pembangunan Kanal Banjir
								Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
								Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
							Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
						Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
								Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
								Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
							Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kepada Masyarakat
							Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi
						Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
						Program pengelolaan persampahan	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
								Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
								Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2025	Program Pembangunan Daerah 2025	Kegiatan Daerah 2025	Sub Kegiatan Daerah 2025
								Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
						Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
						Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
								Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
								Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat
						Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
						Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (mha), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan pplh	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
						Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2025	Program Pembangunan Daerah 2025	Kegiatan Daerah 2025	Sub Kegiatan Daerah 2025
								Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
								Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
						Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota
								Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
						Program penanggulangan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
							Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
							Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
								Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
4	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesenjangan	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,70	Program pengelolaan pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				Angka Harapan Lama Sekolah	8,95			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
								Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
								Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
								Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
								Pengadaan Mebel Sekolah

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2025	Program Pembangunan Daerah 2025	Kegiatan Daerah 2025	Sub Kegiatan Daerah 2025
								Pengadaan Perlengkapan Sekolah
								Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
								Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
								Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
								Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
								Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
								Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
								Pengembangan konten digital untuk pendidikan
								Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
								Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
								Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
								Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
								Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
								Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
								Pembangunan Ruang Kelas Baru
								Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
								Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
								Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2025	Program Pembangunan Daerah 2025	Kegiatan Daerah 2025	Sub Kegiatan Daerah 2025
								Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
								Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
							Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
								Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
								Pembangunan Laboratorium
								Pembangunan Fasilitas Parkir
								Pembangunan Kantin Sekolah
								Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
								Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
								Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
								Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
								Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
								Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
								Pengadaan Mebel Sekolah
								Pengadaan Perlengkapan Sekolah
								Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
								Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
								Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2025	Program Pembangunan Daerah 2025	Kegiatan Daerah 2025	Sub Kegiatan Daerah 2025
								Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
								Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
								Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
								Pengembangan konten digital untuk pendidikan
								Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
								Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
								Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
								Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
								Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
								Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
								Pembangunan Ruang Kelas Baru
								Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
								Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
								Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
							Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
								Pengadaan Mebel PAUD
								Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2025	Program Pembangunan Daerah 2025	Kegiatan Daerah 2025	Sub Kegiatan Daerah 2025
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
								Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
								Pengelolaan Dana BOP PAUD
								Pengembangan konten digital untuk pendidikan
								Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
								Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
								Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
								Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
								Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
								Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
								Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
								Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
								Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
								Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
							Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
								Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
								Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2025	Program Pembangunan Daerah 2025	Kegiatan Daerah 2025	Sub Kegiatan Daerah 2025
								Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
								Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
								Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
								Pembangunan Ruang Kelas Baru
								Pengadaan Perlengkapan Sekolah
								Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
								Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
								Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
								Pengadaan Mebel Sekolah
								Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan
						Program pengembangan kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
								Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
								Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
							Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
								Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
						Program pendidik dan tenaga kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
								Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2025	Program Pembangunan Daerah 2025	Kegiatan Daerah 2025	Sub Kegiatan Daerah 2025
						Program pengembangan bahasa dan sastra	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
								Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
B	Pendukung							
1	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	94,50	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
								Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
								Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
								Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
								Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2025	Program Pembangunan Daerah 2025	Kegiatan Daerah 2025	Sub Kegiatan Daerah 2025
2	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kapasitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	92,00	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
								Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
								Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
								Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
							Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
						Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2025	Program Pembangunan Daerah 2025	Kegiatan Daerah 2025	Sub Kegiatan Daerah 2025
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
							Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
							Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2025	Program Pembangunan Daerah 2025	Kegiatan Daerah 2025	Sub Kegiatan Daerah 2025
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
						Program penelitian dan pengembangan daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
							Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
								Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
								Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
				Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah EKPPD	ST	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan
								Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
								Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
							Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
								Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
								Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2025	Program Pembangunan Daerah 2025	Kegiatan Daerah 2025	Sub Kegiatan Daerah 2025
							Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
								Fasilitasi Bantuan Hukum
								Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
							Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
								Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
						Program administrasi umum (Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Sekretaris Daerah)	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
								Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
								Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
								Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
			Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70,00	Program pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
								Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2025	Program Pembangunan Daerah 2025	Kegiatan Daerah 2025	Sub Kegiatan Daerah 2025
								Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
								Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
							Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
								Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
								Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)
								Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
								Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
								Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
								Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
								Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

[illegible]

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja 2025	Program Pembangunan Daerah 2025	Kegiatan Daerah 2025	Sub Kegiatan Daerah 2025
								Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
								Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
			Terwujudnya Kinerja Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel	Nilai SAKIP	BB	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
				Kapabilitas APIP	3			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
								Reviu Laporan Kinerja
								Reviu Laporan Keuangan
								Pengawasan Desa
								Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
							Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
								Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
				Maturitas SPIP	3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan
							Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
							Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Sumber: Bappelitbangda Kab. Belitung Timur (diolah)

Target Pembangunan

Dengan memperhatikan analisa terhadap capaian pembangunan tahun sebelumnya di Kabupaten Belitung Timur dan arah kebijakan pemerintah pusat serta pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 maka target pembangunan Kabupaten Belitung Timur untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi, target pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2025 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. 13 Target Pembangunan Kabupaten Belitung Timur di Tahun 2025

No	Indikator	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,64	4,55	3,79	4,72	5,1	5,2
2	Inflasi (%)	2,11	4,01	4,17	3,80	3±1	3±1
3	Tingkat Kemiskinan (%)	6,52	7,2	6,49	6,73	6,11	5,99
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,93	3,78	2,5	2,41	3,4	2,35
5	Rasio Gini (nilai)	0,262	0,243	0,250	0,228	0,224	0,224
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	70,92	71,42	72,29	73,31	73,33	73,78

Sumber: Bappelitbangda Kab. Belitung Timur (diolah)

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Tahun 2022 sebesar 3,79 persen, dan pada tahun 2023 ekonomi Kabupaten Belitung Timur kembali tumbuh sebesar 4,72 persen. 16 dari 17 kategori lapangan usaha tumbuh positif kecuali 1 sektor lainnya yang mengalami kontraksi yaitu pertambangan dan penggalian. Tahun 2024 diproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,1 persen dan meningkat ke 5,2 persen pada tahun 2025. Proyeksi pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan konsumsi dan investasi, yang akan didukung dengan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), pemilihan umum (pemilu). Namun kondisi ini tidak lepas dari perekonomian dunia yang diperkirakan masih terus dibayangi ketidakpastian global dan mewaspadai tantangan dari dalam negeri/domestik. tantangan tersebut antara lain kenaikan suku bunga dalam negeri, ketahanan pangan nasional, pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi politik dalam negeri.

2. Inflasi

Inflasi y-on-y merupakan gambaran tingkat inflasi selama 1 tahun yang lalu pada bulan berjalan. Pada Desember 2023, inflasi tahun ke tahun atau year on year (y-on-y) dan tahun kalender atau year to date (y-to-d) memperhitungkan perubahan IHK pada periode yang sama sehingga angkanya juga akan menunjukkan nilai yang sama. Inflasi y-on-y tertinggi di Kota Tanjungpandan sepanjang Desember 2022 hingga Desember 2023 tercatat di Februari 2023 yang mencapai 7,34 persen, dan terendah di Juli 2023 sebesar 2,69 persen. Adapun inflasi y-on-y dan inflasi y-to-d Desember 2023 yang sebesar 3,80 persen utamanya disebabkan oleh komoditas beras, angkutan udara, cabai merah, cabai rawit, rokok kretek filter, udang basah, rokok putih, tahun mentah, kangkung, bawang putih.

3. Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung Timur masih di atas Provinsi Kep.Bangka Belitung, namun di bawah nasional. Posisi relatif persentase penduduk miskin di Belitung Timur terhadap rata-rata provinsi pada tahun 2023 sebesar 6,73 % sementara provinsi sebesar 4,52% dan rata-rata nasional sebesar 9,36%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Belitung Timur masih menempati posisi tertinggi Persentase penduduk

miskin dari seluruh kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Belitung Timur dibawah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional. tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 sebesar 2,41%, menurun jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2,50%. Tingkat Pengangguran terbuka di bawah rata-rata provinsi yaitu 4,56% dan dibawah rata-rata nasional yaitu 5,32%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten belitung Timur sudah cukup baik.

5. Rasio Gini

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 sebesar 0,228, lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 0,250 dan masuk dalam kriteria ketimpangan rendah. Target Rasio Gini Tahun 2024 dan 2025 diproyeksikan sebesar 0,224. Nilai tersebut lebih rendah 0,004 dibandingkan capaian tahun 2023 dimana semakin tinggi nilai Gini Rasio berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran. Bila gini ratio=0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Dan apabila gini ratio=1, ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu atau satu kelompok saja dan yang lainnya tidak sama sekali.

6. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM digunakan sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan.

Pertumbuhan IPM Kabupaten Belitung Timur secara rata-rata selama lima tahun terakhir sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 mencapai 0,62 persen. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, IPM Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2023 berada di urutan keempat yaitu di bawah Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Belitung dan kabupaten Bangka

Indeks pembangunan Manusia Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 sebesar 73,31, sementara target RPJMD tahun 2025 sebesar 73,78.

Prioritas dan Fokus Pembangunan Wilayah

Prioritas pembangunan wilayah pada RKPD 2025 dirumuskan juga tidak terlepas dari arah kebijakan RPJMD 2021-2026. Bahwa dokumen tahunan RKPD memiliki prioritas pembangunan yang masih dalam kerangka perencanaan lima tahunan yaitu dokumen RPJMD. Kabupaten Belitung Timur memiliki potensi wilayah yang sangat besar bagi pengembangan pembangunan ekonomi pada sektor prioritas seperti pada sektor perikanan, pertanian, pariwisata, industri pengolahan. Branding Laskar Pelangi dan Belitong UNESCO Global Beopark

(UGGp) serta Letak geografis yang strategis dan kekayaan alam dan daratan maupun lautan diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dalam pencapaian tujuan pembangunan berdasarkan aspek kewilayahan. Adapaun pembangunan kewilayahan akan mencakup kegiatan prioritas pada:

1. Optimalisasi pengembangan sektor pariwisata;

Beberapa intervensi yang dapat dilakukan guna pengembangan sector pariwisata meliputi Peningkatan kualitas 4 A (Atraksi, Aksesibilitas, Aminitas dan Aktivitas), peningkatan pemasaran melalui teknologi digital dan even promosi bersekala nasional, peningkatan kualitas kelembagaan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif.

2. Optimalisasi pengembangan sektor perikanan;

Beberapa intervensi yang dapat dilakukan guna pengembangan sektor perikanan meliputi peningkatan nilai tambah industri produk olahan hasil perikanan, peningkatan perluasan pasar produk olahan hasil perikanan, peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan dan peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sektor perikanan

3. Optimalisasi pengembangan sektor pertanian;

Beberapa intervensi yang dapat dilakukan guna pengembangan sector pertanian meliputi pengendalian dan pengawasan alih fungsi lahan pertanian, peningkatan sarana dan prasaran pertanian, optimalisasi kelembagaan ekonomi masyarakat petani, peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan stabilitas harga hasil pertanian, peningkatan nilai tambah produk pertanian, dan peningkatan cakupan pemasaran produk pertanian

4. Optimalisasi pengembangan sektor industri pengolahan;

Beberapa intervensi yang dapat dilakukan guna pengembangan sektor industry pengolahan meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sektor industri pengolahan berbasis masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana industri pengolahan

5. Peningkatan peran UMKM dalam perekonomian daerah;

Beberapa intervensi yang dapat dilakukan guna meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian daerah meliputi standarisasi produk UMKM, peningkatan Kualitas tata Kelola Koperasi dan UMKM, pengoptimalan Media Promosi berbasis online maupun offline, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan UMKM, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dalam pengembangan UMKM, penguatan modal bagi pelaku UMKM, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan kemitraan usaha antar stakeholder, pendampingan usaha bagi pelaku UMKM, fasilitasi *business matching* bagi pelaku UMKM.

6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat;

Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan melalui Alokasi Anggaran Desa (ADD) melalui APBD yang besarnya terus meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Peningkatan ADD ini digunakan untuk mengintervensi dan mendorong perekonomian desa. ADD diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan

prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya dan lingkungan.

Program pembangunan yang berdasarkan partisipasi masyarakat tentunya bersumber dari kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang memungkinkan program akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk mengatasi lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa maka diperlukan konsep “pemberdayaan” partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena pemberdayaan adalah jalan menuju partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Beberapa intervensi yang dapat dilakukan adalah system padat karya tunai dan pendampingan dan monitoring pembangunan hingga level desa.

7. Peningkatan kompetensi tenaga kerja masyarakat;
Beberapa intervensi yang dapat dilakukan guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja diantaranya yaitu peningkatan jenjang pendidikan tenaga kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja
8. Penumbuhan dan peningkatan semangat kewirausahaan bagi pemuda;
Kewirausahaan dewasa ini menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan suatu daerah. Semakin besar jumlah wirausahawan menunjukkan semakin maju dan mapan suatu daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pemuda sebagai pionir dan pelopor perubahan dapat diikutsertakan dalam menggerakkan sektor perekonomian daerah melalui pengembangan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda yang belum memulai usaha, pelatihan penguatan usaha bagi pemuda yang baru memiliki usaha dan pelatihan pengembangan usaha bagi pemuda yang usahanya telah berkembang.
9. Mendorong investasi hilirisasi produk pertanian dan perikanan;
Pertumbuhan investasi ini memiliki keterkaitan *backward linkage* dan *forward linkage* yang mampu memperbaiki kondisi perekonomian saat ini. Peningkatan investasi pada sektor unggulan akan menciptakan jenis usaha-usaha baru yang mampu memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan menekan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.
10. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk pengembangan ekonomi sektor prioritas;
Ketersediaan infrastruktur yang memadai dalam pengembangan wilayah merupakan hal yang mutlak harus dilakukan. Beberapa intervensi yang perlu dilakukan adalah Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jalan akses menuju kawasan prioritas, pengembangan jalan usaha tani, peningkatan kualitas layanan pelabuhan, peningkatan kualitas layanan tempat pendaratan ikan dan pengembangan sentra industri masyarakat
11. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana;
Beberapa intervensi yang perlu dilakukan guna peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana seperti pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana

12. Rehabilitasi hutan dan lahan dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir
13. Peningkatan Ketahanan Pangan;
Beberapa intervensi yang perlu dilakukan guna peningkatan ketahanan pangan meliputi pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi, penyediaan alat pertanian dan penyuluhan pertanian, penyediaan alat tangkap dan budidaya perikanan, pembangunan/rehabilitasi jalan mendukung kawasan produksi dan pengadaan sarpras alat ekonomi produktif
14. Pengendalian Inflasi Daerah;
Angka inflasi di Kabupaten Belitung Timur merupakan yang tertinggi dalam lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu factor yang memiliki kontribusi besar yaitu distribusi barang dan jasa akibat terbatasnya konektivitas wilayah. Intervensi yang perlu dilakukan adalah peningkatan produksi terhadap produk yang memiliki kontribusi tinggi dalam inflasi daerah dan mempercepat penyediaan pelayanan pelabuhan untuk meningkatkan konektivitas wilayah Kabupaten Belitung Timur
15. Peningkatan kerjasama dan sinergi pembangunan antar daerah;
Hal tersebut perlu dilakukan agar terjadi kolaborasi pembangunan antar wilayah sehingga terjadi saling melengkapi dan tidak saling berkompetisi yang malah merugikan perkembangan wilayah.
16. Peningkatan kapasitas layanan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE);
Perkembangan dan kemudahan teknologi informasi harus dapat dioptimalkan bagi semua pihak, termasuk dalam layanan pemerintah. Pemanfaatan aplikasi dalam pelayanan akan membuat layanan yang efektif, efisien, transparan dan fleksibel
17. Peningkatan inovasi daerah;
Kepeloporan dalam pelayanan berbasis inovasi akan menjadikan suatu wilayah lebih memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif dalam pelayanan kepada masyarakat
18. Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
Dalam fokus peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi ini, hal-hal yang menjadi prioritas adalah: pertama yakni akselerasi reformasi birokrasi pada isu-isu tematik. Kedua, peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan APBD. Ketiga adalah penguatan pengawasan. Keempat penguatan kajian kelembagaan dan tata kelola, pasca-penyederhanaan birokrasi, sangat perlu disusun model organisasi dan sistem kerja baru yang fleksibel dan kolaboratif berbasis fungsional. Kelima, pengembangan dan optimalisasi tata Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendukung satu data dan pembangunan sistem kerja baru yang fleksibel, terukur, dan berbasis digital. Pengembangan dan optimalisasi SPBE akan terus dikembangkan untuk mendukung sistem kerja baru berbasis digital, termasuk mengadopsi artificial intelligence (AI) dan big data dalam penyelenggaraan pemerintahan.
19. Peningkatan Profesionalisme ASN;
Peningkatan profesionalisme ASN, prioritasnya adalah implementasi sistem merit, optimalisasi peningkatan kapasitas SDM ASN secara terbuka,

Pengelolaan SDM aparatur dan pengembangan sistem reward yang diarahkan pada sistem informasi ASN terintegrasi. Hal ini dipandang perlu karena data-data ASN di tiap-tiap OPD saat ini belum terintegrasi. Selain itu, cara pandang pengelolaan ASN yang cenderung kepada pelayanan kepegawaian harus diubah lebih kepada pengelolaan Human Capital ASN. Kebutuhannya bukan hanya data yang bersifat administratif saja, tetapi mendorong pengembangan human capital dengan penguatan Capacity Building ASN diarahkan untuk pembelajaran e-learning yang diharapkan dapat mendorong kebutuhan ASN menjadi lebih baik.

20. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

Konsepsi kebijakan akuntabilitas kinerja tidak dapat berhenti sekedar pada persoalan-persoalan rutin administratif, namun berdampak outcome dan impact yang dirasakan masyarakat, fokus pada hasil/ sasaran pembangunan yang berdampak pada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik, hal-hal yang menjadi prioritas adalah optimalisasi pencapaian standar pelayanan minimal sesuai aturan terkait, transformasi pelayanan publik yang lebih partisipatif dan inklusif yang sejalan dengan tuntutan global dan harapan masyarakat, mendorong penerapan standar pelayanan publik di era kenormalan baru dengan pelayanan publik berbasis elektronik (E-Services) yang Terintegrasi, Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, serta mendorong pelayanan terintegrasi melalui Mal Pelayanan Publik.

Fokus pembangunan daerah disarikan dari permasalahan dan isu strategis serta arah kebijakan yang disesuaikan dengan tema RKPD 2025 Kabupaten Belitung Timur yaitu **“Memperkuat Daya Saing Daerah dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”**. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemeintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 akan fokus pada beberapa hal. Yakni Pemerataan layanan pendidikan berkualitas, Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, Percepatan Penghapusan Kemiskinan, Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Percepatan Investasi, Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah, Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dab Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi. Adapaun fokus pembangunan akan mencakup kegiatan prioritas pada:

Tabel 4. 14 Fokus Daerah Tahun 2025

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	1. Dinas Pendidikan	1. Mewujudkan akses dan kualitas pendidikan dasar yang merata bagi semua satuan pendidikan 2. Mewujudkan akses dan kualitas pendidikan kesetaraan yang merata bagi semua masyarakat	1	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				a	Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				b	Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan kesetaraan			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				c	Meningkatkan Kualitas SDM Bidang Pendidikan			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
				d	Meningkatkan cakupan layanan SPM Bidang Pendidikan			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
				e	Mengurangi Anak Tidak Sekolah (ATS)			Pengadaan Mebel Sekolah
								Pengadaan Perlengkapan Sekolah
								Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
								Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
								Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
								Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
								Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
									Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
									Pembangunan Ruang Kelas Baru
									Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
									Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
									Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
									Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
									Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
								Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
									Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
									Pembangunan Laboratorium
									Pembangunan Fasilitas Parkir
									Pembangunan Kantin Sekolah
									Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
									Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
									Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
									Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
									Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
									Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
									Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
									Pengadaan Mebel Sekolah
									Pengadaan Perlengkapan Sekolah
									Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
									Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
									Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
									Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
									Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
									Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
									Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
									Pengembangan konten digital untuk pendidikan
									Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
									Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
									Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
									Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
									Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
									Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
									Pembangunan Ruang Kelas Baru
									Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
									Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
									Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
									Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
									Pengadaan Mebel PAUD
									Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
									Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
									Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
									Pengelolaan Dana BOP PAUD
									Pengembangan konten digital untuk pendidikan
									Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
									Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
									Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
								Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
									Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembangunan Ruang Kelas Baru Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
									Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
									Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
									Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
									Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
									Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
									Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
									Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
									Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Pembangunan Ruang Kelas Baru
									Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
									Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
									Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
									Pengadaan Mebel Sekolah
									Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan
						PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
								Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
							Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
								Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
								Pengelolaan Surveilans Kesehatan
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
								Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
								Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
								Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
								Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
								Operasional Pelayanan Puskesmas
								Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
								Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
								Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
								Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
								Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
								Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
								Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
								Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
								Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
								Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
						PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
								Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
							Minuman Industri Rumah Tangga	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
							Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
						PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
								Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
								Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana
						Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
								Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
								Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana
								Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
								Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
								Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
						Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
								Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
						Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
								Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
								Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
								Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
						Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
								Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
								Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
								Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
								Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
							Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
								Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
								Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
3	Pengentasan Kemiskinan	1. Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. konvergensi lintas program dan lintas sektor percepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur	1	Percepatan Penghapusan Kemiskinan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
					a Sinergi lintas sektor penanggulangan kemiskinan		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				b	Perluasan cakupan perlindungan dan jaminan sosial		Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
				c	Meningkatkan cakupan layanan SPM Bidang Sosial			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
						PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
						PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
								Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang
								Penyediaan Alat Bantu
							Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
								Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
								Pemberian Layanan Kedaruratan
						PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
								Pemberian Layanan Rujukan
						PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
						PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
						PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
						PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
							Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
						PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
						PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
							Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/
4	Optimalisasi Pengembangan Daya Saing Daerah dan Percepatan Investasi	1. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 2. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 4. Dinas Perikanan. 5. Dinas Pertanian dan Pangan. 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.	1. Menyusun paket peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas (triple skilling yaitu tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat terampil bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing) 2. Meningkatkan Jaringan Tenaga Kerja 3. Menyusun daftar prioritas investasi daerah 4. Menyusun <i>Investment Project Ready to Offer</i> (IPRO) 5. Menyusun Rencana Kerja Untuk Pembangunan Kawasan Industri Aik Kelik 6. Optimalisasi produksi perikanan tangkap dan budidaya 7. Optimalisasi akses pasar, daya saing, kualitas dan kapasitas komoditas/produk perikanan 8. Optimalisasi produksi dan produktivitas pertanian 9. Optimalisasi pencapaian ketahanan pangan daerah 10. Optimalisasi pengelolaan pariwisata daerah dan ekonomi kreatif 11. Mengembangkan budaya lokal	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Percepatan Investasi			
				a	Meningkatkan Pengelolaan, Pengembangan Kapasitas Daya Saing Tenaga Kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
						PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
								Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
						PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja
				b	Mendorong Pertumbuhan Investasi Baru	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
						PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
						PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
						PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Pengawasan Penanaman Modal

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			12. Meningkatkan penjaminan mutu produk unggulan daerah 13. Meningkatkan produktivitas UMKM			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
							Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
								Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
				c	meningkatkan akses pasar, daya saing, kualitas dan kapasitas produk perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
							Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
								Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
								Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
								Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
							Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
							Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
								Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
								Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
								Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
								Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat
								Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
						PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko
							Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
							Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
							Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
							Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
							Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan
							Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				d	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
						PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
						PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
								Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani
						PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan
						PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
							Pengelolaan dan Keseimbangan	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
							Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
							Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
								Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
						PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
						PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
						PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
								Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
								Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
							Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
								Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
								Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
								Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
						Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota
								Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota
						e	Meningkatkan kunjungan wisatawan	

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
								Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
								Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
								Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
								Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
								Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
							Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
						PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
							Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
							Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
						PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya
						PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
						PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
								Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				1		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
							Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
								Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
					f	Mendoorong Pengendalian fluktuasi harga barang	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
								Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
								Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
						PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
								Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
						PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
								Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
						PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
						PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
					g	Meningkatkan Daya saing Koperasi dan UMKM	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
5		1. Dinas Perhubungan.	1. Mengembangkan sistem transportasi	1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah			

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
	Peningkatan Kualitas Infrastruktur	2. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	terpadu yang memenuhi standar keselamatan berlalu lintas 2. Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman		a	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah baik darat maupun laut	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
								Rekonstruksi Jalan	
								Pemeliharaan Berkala Jalan	
								Pelebaran Jalan Menuju Standar	
								Pemeliharaan Rutin Jembatan	
								Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
								Rehabilitasi Jalan	
								Pemeliharaan Rutin Jalan	
								Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
								Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
								Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kabupaten/Kota	
								Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
								Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
								Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
								Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
								Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
								Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
								Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
								Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
							Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
							Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
								Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
				b	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
								Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
						PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik
							Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
						PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
						PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
								Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
							Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
								Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
								Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
								Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
								Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
						PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
								Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
								Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
								Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
								Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
								Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
						PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
								Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
								Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
								Penyusunan Peta Dasar
							Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
								Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
								Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
								Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 2. Mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah	1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			
				a	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
						PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai Pembangunan Kanal Banjir Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
							Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
				b	Pengendalian Degradasi Lingkungan dan Resiko Bencana	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
								Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
								Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
							Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
							Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi
						PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
						PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
								Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
								Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
								Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
						PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
								Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
								Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
						PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
						PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
								Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
						PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
								Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
							Pelayanan Pencegahan dan	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
							Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			
								Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			
								Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			
								Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			
					Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota						
					Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						
					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				
							Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				
				7	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. 3. Inspektorat. 4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 6. Dinas Perpustakaan. 7. Dinas Komunikasi dan Informatika. 8. Sekretariat Daerah 9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan meningkatkan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan 2. Menjadi fasilitator dalam kolaborasi pentahelix (pendidikan, dunia usaha, komunitas sosial, pemerintahan dan media massa) untuk tindak lanjut dan pemanfaatan pengetahuan dan teknologi. 3. Implementasi Satu Data Indonesia Secara Optimal 4. Perluasan jaringan kerjasama antar PD	1	Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Sumber Daya Manusia 10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	dalam rangka penyelesaian aset daerah 5. optimalisasi pendapatan daerah 6. Peningkatan peran, fungsi, serta sinergitas lembaga pengawasan daerah 7. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara komprehensif 8. Menyusun kebijakan sistem pengaduan masyarakat sehingga penanganan pengaduan masyarakat dapat di implementasikan 9. Optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 10. Menyelenggarakan pelayanan publik berdasarkan proses bisnis yang efektif dan efisien 11. Peningkatan sistem keamanan, aplikasi dan Infrastruktur yang terintegrasi untuk penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik 12. Penataan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan 13. Melaksanakan talent manajemen ASN secara berkala dan penilaian berbasis kinerja setiap aparatur 14. Digitalisasi proses administrasi kepegawaian sebagai pengembangan layanan kepegawaian 15. Pemenuhan					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			target pengembangan kompetensi aparatur				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
						PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
								Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
								Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan
								Naskah Akademik
							Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS
								Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
								Pembahasan APBD
								Pembahasan APBD Perubahan
								Pembahasan Laporan Semester
								Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
								Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
								Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
								Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
								Pengawasan Penggunaan Anggaran
								Pembahasan Laporan Keterangan
								Pertanggungjawaban Kepala Daerah
							Peningkatan Kapasitas DPRD	Orientasi DPRD
								Pendalaman Tugas DPRD
								Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
								Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
								Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
								Penyusunan Program Kerja DPRD
								Publikasi dan Dokumentasi DPRD
							Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kunjungan Kerja dalam Daerah
								Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
						Fasilitasi Tugas DPRD		Pelaksanaan Reses
								Koordinasi dan Konsultasi
								Pelaksanaan Tugas DPRD
						Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
								Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
						Pendampingan dan Asistensi		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
								Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
						PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
								Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
							Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
								Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					b	Peningkatan keselarasan data perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
					2	Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah		
					a	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
							Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
								Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
								Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
								Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
								Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
								Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
								Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
								Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
								Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
								Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
							Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Investasi Pemerintah Daerah
								Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
								Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
						PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
								Penyusunan Standar Harga
								Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
								Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
								Penatausahaan Barang Milik Daerah
								Inventarisasi Barang Milik Daerah
								Pengamanan Barang Milik Daerah
				b	Mengoptimalkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	PROGRAM PENGELOLAAN	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						PENDAPATAN DAERAH		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
								Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
								Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
								Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
								Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
								Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
								Penagihan Pajak Daerah
								Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
								Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
				3	Terwujudnya kinerja pemerintahan daerah yang akuntabel			
				a	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
								Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
								Reviu Laporan Kinerja
								Reviu Laporan Keuangan Pengawasan Desa
						PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
								Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
						PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
								Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
								Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
				4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik			
				a	Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan berbasis Standar pelayanan publik	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
							Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
						PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
						PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
								Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil
								Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil
							Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
								Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
							Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
						PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
								Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
								Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
								Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				5	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN PROGRAM PENGELOLAAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
				a	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan			Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
								Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
								Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain
								Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
						INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik
								Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
								Pengelolaan Media Komunikasi Publik
								Penyusunan Konten
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
								Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
								Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
								Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
								Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
								Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
								Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
								Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
								Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
								Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
								Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
								Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
							PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
				6	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah					
				a	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan		
								Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		
								Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		
							Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
								Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		
								Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		
							Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		
								Fasilitasi Bantuan Hukum Pendokumentasian Produk Hukum dan		
							Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Pengelolaan Informasi Hukum Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		
								Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		
				7	Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien serta sumber daya aparatur yang profesional					
				a	Meningkatkan integritas dan profesionalitas aparatur	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		
								Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		
								Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		
								Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN									
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN										
Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Promosi ASN									
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN									
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Assessment Center									
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN									
							Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
							Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai			

NO.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
							PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
								Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga
									Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Sumber: Bappelitbangda Kab. Belitung Timur (diolah)

Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan Pembangunan Lintas Bidang Melalui Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)

4.2.5.1. Program Inovasi Daerah

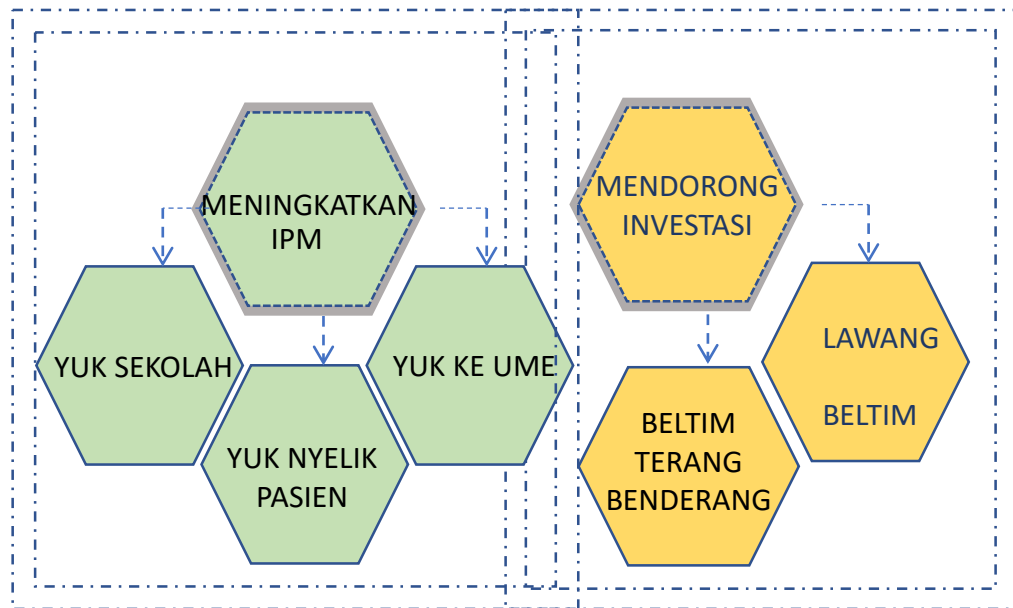
Sebagai percepatan mewujudkan Belitung Timur Bangkit dan Berdaya diperlukan upaya-upaya yang inovatif dan aksi nyata sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi fokus percepatan adalah meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mendorong investasi sebagai indikator-indikator yang dapat diukur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

IPM digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Capaian IPM yang tinggi mengindikasikan bahwa pembangunan di daerah tersebut telah berhasil. IPM terdiri dari tiga komponen penyusun yang terdiri dari aspek **kesehatan**, **pendidikan** dan **ekonomi**. Sesuai dengan hal tersebut, ketiga aspek tersebut turut menjadi perhatian khusus pemerintah daerah untuk mencapai keberhasilan pembangunan daerah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pada aspek ekonomi dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, diperlukan adanya **investasi** yang dapat membuka peluang berbagai kegiatan ekonomi masyarakat dan memperluas lapangan kerja. Investasi adalah salah satu indikator yang cukup vital untuk menjadi salah satu penentu kemajuan pembangunan ekonomi suatu daerah, sehingga dengan berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat membantu para investor maupun calon investor untuk berinvestasi di suatu daerah. Selain itu, investasi memiliki hubungan yang positif terhadap pendapatan daerah. Oleh karena itu kebijakan yang mendukung kemudahan investasi sangat diperlukan, di mana semakin mudah proses investasi masuk ke daerah maka akan semakin banyak pula kegiatan investasi dan semakin tinggi juga pendapatan yang bisa dihasilkan suatu daerah. Selanjutnya investasi juga berpotensi dapat memperbesar kapasitas produksi ekonomi dan daya beli masyarakat lokal melalui penyerapan bahan baku dan tenaga kerja dari wilayah sekitar. Dengan demikian, adanya investasi sangat membantu pemerintah daerah dalam memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam RPJMD 2021-2026 dirumuskan 5 (lima) inovasi daerah melalui pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, Spasial) sebagai berikut :

1. Yuk Sekolah
2. Yuk Nyelik Pasien
3. Yuk Ke Ume
4. Lawang Beltim
5. Beltim Terang Benderang

Dengan fokus target percepatan pada peningkatan IPM dan mendorong investasi seperti ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 4. 1 Inovasi Daerah

1. YUK SEKOLAH

Yuk Sekolah merupakan program yang didesain sebagai upaya untuk menekan angka putus sekolah dengan meningkatkan lama sekolah yang dihabiskan oleh penduduk Belitung Timur. Putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Belitung Timur disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor ekonomi, psikologis, serta lingkungan sosial menjadi pemicu seorang anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Oleh karena itu, melalui pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial) dilaksanakan percepatan peningkatan kualitas akademis masyarakat Kabupaten Belitung Timur dengan program **Yuk Sekolah** untuk memperluas cakupan akses penerimaan layanan pendidikan bagi masyarakat, dengan melakukan berbagai pendekatan agar anak-anak usia sekolah dapat memenuhi haknya untuk menerima pendidikan setinggi-tingginya, dan bagi masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan pendidikan yang layak melalui jalur penyetaraan.

Program **Yuk Sekolah** diharapkan dapat memberi dampak sebagai berikut :

1. Menekan Angka Putus Sekolah (APS);
2. Memperluas cakupan akses layanan pendidikan;
3. Meningkatkan kualitas standar mutu pendidikan;
4. Memperkuat pendidikan karakter;
5. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar dan Murni (APK dan APM) PAUD;
6. Memperluas cakupan akses layanan PAUD, TK, KB dan RA;
7. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar dan Murni (APK dan APM) SD;
8. Meningkatkan Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs;
9. Meningkatkan standar mutu Pendidikan SMP;
10. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar dan Murni (APK dan APM) SMP;
11. Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan;
12. Memperluas cakupan akses layanan PKBM;
13. Memperkuat Gerakan Literasi Sekolah.

Dari sisi perencanaan yang terintegrasi, Program **Yuk Sekolah** merupakan strategi program yang melibatkan berbagai *stakeholders* dan urusan pemerintahan diantaranya:

1. Pendidikan berkontribusi dalam :
 - a. Pendidikan anak usia dini;
 - b. Pendidikan sekolah dasar;
 - c. Pendidikan SMP;
 - d. Pendidikan SMA/SMK;
 - e. Pendidikan Penyetaraan;
 - f. Pendidikan Luar Sekolah;
 - g. Penyediaan sarpras pendidikan;
 - h. Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan;
2. Perpustakaan, berkontribusi dalam :
 - a. Meningkatkan minat baca masyarakat;
 - b. Memperkuat sosialisasi dan edukasi literasi masyarakat;
 - c. Mengembangkan perpustakaan digital;
 - d. Memperluas cakupan layanan perpustakaan.
3. Kebudayaan, berkontribusi dalam :
 - a. Meningkatkan edukasi budaya kepada generasi muda;
 - b. Mengoptimalkan kajian atau literatur budaya;
 - c. Mengembangkan budaya lokal.
4. Kepemudaan dan Olahraga, berkontribusi dalam :
 - a. Meningkatkan prestasi olahraga pelajar;
 - b. Optimalisasi peran organisasi olahraga dalam meningkatkan pemasaran olahraga di tingkat pelajar.
 - c. Meningkatkan partisipasi pemuda pelopor;
 - d. Optimalisasi peran organisasi kepemudaan;
 - e. Meningkatkan kualitas layanan kepemudaan
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat, berkontribusi dalam:
 - a. Penegakan perda dan perbup
 - b. Pembinaan kenakalan remaja dan penyakit masyarakat
6. Perhubungan, berkontribusi dalam penyediaan bus sekolah

2. YUK NYELIK PASIEN

Yuk Nyelik Pasien adalah program yang akan menjadi benang merah dalam rangka mengintegrasikan kebutuhan pelayanan kesehatan pasien atau masyarakat dari rumah sakit ke puskesmas. Secara garis besar, tujuan program **Yuk Nyelik Pasien** adalah meningkatkan jangkauan atau akses pelayanan kesehatan yang diprioritaskan bagi keluarga rentan, yaitu keluarga miskin dan tidak mampu serta memiliki masalah kesehatan melalui tim perawat kesehatan masyarakat dengan kunjungan rumah. Keluarga rentan merupakan keluarga yang berisiko tidak terakses atau mengkases pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya akibat terbatasnya berbagai sumber daya dalam keluarga seperti keterbatasan keuangan, sarana transportasi, pengetahuan dalam perawatan kesehatan, dan sebagainya.

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menjadi prioritas yang harus terus diupayakan sebagai salah satu upaya dalam rangka mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas guna menuju "Belitung Timur Bangkit dan Berdaya." Upaya ini tentunya tidak dapat dilakukan sendiri oleh sektor kesehatan, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama dan bersinergi dengan melibatkan lintas sektor dan yang lebih utama adalah peran serta masyarakat. Oleh karena itu untuk keberhasilan pelaksanaan program **Yuk Nyelik Pasien**, dilakukan melalui pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, Spasial) dengan didukung oleh terbangunnya pemberdayaan masyarakat melalui penggerakkan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan upaya bersumber daya kesehatan masyarakat (UKBM) seperti ambulan desa, bank darah desa, dan sebagainya yang dilakukan oleh masyarakat, serta peningkatan peran kader pendamping keluarga dalam pelaporan kasus, pendampingan dan pemantauan minum obat, dan lain-lain. Dengan adanya sinergi dan integrasi tim tenaga kesehatan dengan peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan akses dan kemandirian keluarga dalam perawatan kesehatan.

Dari sisi perencanaan yang terintegrasi, program **Yuk Nyelik Pasien** merupakan strategi program yang melibatkan berbagai *stakeholders* dan urusan pemerintahan (UP) diantaranya:

1. Kesehatan, berkontribusi dalam:
 - a. Melaksanakan UKP dan UKP dan layanan pendukungnya;
 - b. Menyediakan database pasien dan melakukan klasifikasi pasien sesuai fokus program yang diprioritaskan bagi keluarga rentan, yaitu keluarga miskin dan tidak mampu serta memiliki masalah kesehatan.
2. Sosial, berkontribusi dalam:
 - a. Memperkuat kualitas DTKS sebagai basis intervensi program dan kegiatan;
 - b. Meningkatkan kualitas layanan SLRT;
 - c. Meningkatkan layanan jaminan dan perlindungan sosial.
3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berkontribusi dalam:
 - a. Menurunkan tingkat *unmet need* KB;
 - b. Mendorong penggunaan alat kontrasepsi metode modern;
 - c. Penyediaan *database* Keluarga Sejahtera yang akurat dan sebagai basis intervensi peningkatan kesejahteraan keluarga.
4. UP bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkontribusi dalam peningkatan peran kader pendamping keluarga dan pemantauan perawatan kesehatan keluarga.

Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program **Yuk Nyelik Pasien** ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan cakupan layanan pasca perawatan;
2. Mempercepat penurunan penyakit menular;
3. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta balita;
4. Memperkuat pemulihan kesehatan dalam penanganan Pandemi COVID-19;

5. Meningkatkan kompetensi SDM kesehatan;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan;
7. Meningkatkan kualitas SPM kesehatan;
8. Kemitraan yang baik dengan multi pihak (BPJS & Masyarakat);
9. Pencegahan dan penanganan stunting;
10. Mengembangkan Kabupaten Sehat;
11. Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dan rentan;
12. Memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan pada FKTP dan FKTL.

3. YUK KE UME

Yuk Ke Ume secara harfiah dalam bahasa Belitung merupakan ajakan untuk pergi ke kebun, sejak dulu masyarakat lokal Belitung Timur memiliki kebun atau bekerja di kebun. Sehingga secara filosofis, program **Yuk Ke Ume** merupakan upaya untuk mengajak masyarakat untuk membantu pencapaian ketahanan pangan baik ketahanan pangan keluarga (bersifat subsisten/pemenuhan kebutuhan sendiri) dan ketahanan pangan daerah (bersifat komersil dan produksi massal).

Melalui pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integrative dan Spasial), program **Yuk Ke Ume** didukung oleh beberapa *stakeholders* dan urusan pemerintahan sebagai berikut:

1. Pertanian berkontribusi dalam :
 - a. Menyediakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
 - b. Meningkatkan cakupan penyuluhan pertanian;
 - c. Meningkatkan pengelolaan hewan ternak.
2. Pangan
 - a. Mengelola ketahanan pangan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
3. Perikanan
 - a. Meningkatkan pembinaan perikanan budidaya;
 - b. Meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Program **Yuk Ke Ume** diharapkan dapat memberi dampak meningkatkan produktivitas ekonomi unggulan Belitung Timur.

4. LAWANG BELTIM

Kebutuhan akan tersedianya informasi yang mudah diakses, cepat, tepat dan akurat menjadi salah satu dasar pengembangan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan. Kebutuhan informasi bahkan sudah menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam berbagai aspek kehidupan, karena pada umumnya pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat. **Lawang Beltim** merupakan program inovasi daerah yang dilakukan melalui pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial) sebagai upaya

membuat sebuah portal layanan terpadu berbasis elektronik guna memudahkan pelayanan, komunikasi dan pertukaran data dan informasi antar pemangku kepentingan yang cepat, mudah dan transparan. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memiliki kanal informasi resmi Pemerintah Daerah yang menampilkan secara interaktif jurnal informasi pembangunan daerah, menyosialisasikan kebijakan/program Pemerintah Daerah, menyajikan potensi dan keunggulan daerah serta menyediakan media bagi Pemerintah Daerah untuk mendapatkan *feedback* dari masyarakat dalam rangka upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Lawang Beltim adalah salah satu wujud pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sebagai sarana promosi yang berpengaruh terhadap opini publik, peningkatan kunjungan wisatawan serta keputusan investor dalam berinvestasi. Data-data maupun informasi yang disajikan dalam **Lawang Beltim** diharapkan mampu menjadi acuan atau kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur jangka panjang maupun jangka pendek.

Untuk keberhasilan dan keberlanjutan program **Lawang Beltim**, perlu dukungan lintas sektor untuk berkontribusi dalam pelaksanaan, yaitu sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Komunikasi dan Informatika, berkontribusi dalam:
 - a. Menyediakan infrastruktur jaringan;
 - b. Menyediakan informasi yang akan dijadikan konten dalam **Lawang Beltim**, baik di internal pemerintah daerah maupun eksternal/vertikal;
 - c. Berkolaborasi dalam pengembangan **Lawang Beltim**.
3. Seluruh perangkat daerah berkontribusi dalam menjadikan Lawang Beltim sebagai media promosi dan publikasi berbagai layanan ke seluruh masyarakat.

5. BELTIM TERANG BENDERANG

Merupakan program inovasi daerah yang dilakukan melalui pendekatan THIS (Tematik, Holistik, integrative dan Spasial) sebagai upaya untuk menciptakan Kabupaten Belitung Timur yang semarak dan meningkatkan daya tarik kawasan terutama pada kawasan-kawasan tertentu yang diprioritaskan.

Tujuan program **Beltim Terang Benderang** antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya tarik kawasan yang diharapkan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar kawasan;
2. Mengurangi potensi angka kriminalitas dengan meningkatkan rasa aman bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu rasa amannya akibat kurangnya pencahayaan pada kawasan tertentu.

Untuk keberhasilan program **Beltim Terang Benderang**, perlu dukungan lintas sektor dari beberapa *stakeholders* dan urusan pemerintahan sebagai berikut :

1. Perhubungan berkontribusi dalam pemenuhan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan, dalam hal ini penerangan jalan umum;
2. Lingkungan Hidup berkontribusi dalam penerangan taman-taman (ruang terbuka hijau);
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungannya.

4.2.5.2. Program Pembangunan Daerah

Dalam upaya pencapaian visi misi pembangunan daerah, diperlukan langkah-langkah konkrit dalam bentuk program-program pembangunan yang secara langsung berhubungan dengan pencapaian visi misi daerah. Pemerintah Kabupaten Belitong Timur menetapkan beberapa program pembangunan yang menjadi prioritas (super prioritas) untuk dilaksanakan selama lima tahun mendatang. Program prioritas pembangunan Kabupaten Belitong Timur adalah sebagai berikut:

- 1) **Misi 1 : Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitong Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik**

Pelaksanaan pembangunan pada Misi 1, diprioritaskan pada:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
4. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
6. Program Penyelenggaraan Pengawasan
7. Program Pengelolaan Izin Lokasi
8. Program Pelayanan Penanaman Modal
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
10. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
11. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
12. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
13. Program Administrasi Umum
14. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
15. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

2) **Misi 2 : Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja**

Pelaksanaan pembangunan pada Misi 2, diprioritaskan pada:

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
6. Program Promosi Penanaman Modal
7. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
9. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
10. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
11. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
12. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
13. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
14. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
15. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
16. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
17. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
18. Program Pengembangan Ekspor
19. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
20. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
21. Program Pengembangan UMKM
22. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

3) **Misi 3 : Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitung Timur dan pengentasan kemiskinan**

Pelaksanaan pembangunan pada Misi 3, diprioritaskan pada:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
7. Program Pengembangan Perumahan
8. Program Kawasan Permukiman
9. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
10. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

11. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
12. Program Penyelenggaraan Jalan
13. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
14. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
15. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
16. Program Pengelolaan Persampahan
17. Program Penanggulangan Bencana
18. Program Pemberdayaan Sosial
19. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
20. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
21. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program super prioritas juga mendukung agenda dan prioritas pembangunan baik di level nasional dan provinsi serta inovasi – inovasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitang Timur dengan keterkaitan sebagai berikut :

Tabel 4. 15 Integrasi Program Inovasi dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		INDIKATOR	TARGET 2025
1	"YUK SEKOLAH"	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD	100%
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Konsistensi antar dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan
		Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	93
					Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	66
					Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	70,7
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah sehat SD (Persen)	
					Prosentase sekolah Ramah Anak SD (Persen)	
					Prosentase sekolah Adiwiyata SD (Persen)	
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang
				Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	8 Paket
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	200 Paket

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	900 Peserta Didik
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	310 Orang
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	30 Satuan Pendidikan
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	104 Satuan Pendidikan
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	104 Orang
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	60 Orang
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	20 Konten Digital
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	104 Orang
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	104 Dokumen
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	30 Komunitas

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	60 Kegiatan
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	190 Paket
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	60 Orang
					Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	104 Satuan Pendidikan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Prosentase sekolah sehat SMP (Persen)	
						Prosentase sekolah Ramah Anak SMP (Persen)	
						Prosentase sekolah Adiwiyata SMP (Persen)	
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang
					Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang
					Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit
					Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang
					Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang
					Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit
					Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	6 Paket
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	180 Paket
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	230 Orang
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	90 Orang
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	8 Satuan Pendidikan
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	22 Satuan Pendidikan
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	23 Orang

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	20 Konten Digital
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8 Dokumen
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Dokumen
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas
					Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	12 Kegiatan
					Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	23 Satuan Pendidikan
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	23 Paket
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Prosentase PAUD HI (Persen)	

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10 Unit
					Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	375 Orang
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 Orang
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	30 Satuan Pendidikan
					Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	92 Satuan Pendidikan
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	15 Konten Digital
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	25 Dokumen
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Dokumen
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100 Paket

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	3 Paket
					Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	3000 Satuan Pendidikan
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Persen)	
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25 Orang
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5 Satuan Pendidikan
					Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	5 Satuan Pendidikan
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100 Paket
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit
					Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	3 Paket
					Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	5 Peserta Didik
					Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV jenjang SMP/MTS	
						Persentase guru PAUD, SD, SMP yang bersertifikat pendidik	
						Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV jenjang SD/MI	
						Persentase pengawas dan kepala sekolah yang bersertifikat	
				Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Rasio guru/murid sekolah pendidikan SD per 10.000	
						Rasio guru/murid sekolah pendidikan SMP per 10.000	
					Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Dokumen
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Laporan

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		INDIKATOR	TARGET 2025
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan program kesetaraan paket A, B, C	
					Persentase kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar (SD dan SMP)	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		
				Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	3 Dokumen
				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	30 Orang
				Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4 Dokumen
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		
				Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	3 Dokumen
				Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	3 Dokumen
	Dinas Perpustakaan		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Rasio perpustakaan per satuan penduduk	
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	15 Perpustakaan
				Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	500 Eksemplar

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	150 Eksemplar
					Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
					Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	10 Perpustakaan
					Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	10 Orang
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			Persentase organisasi pemuda yang aktif	
						Persentase wirausaha muda	
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Persentase pemuda yang diberdayakan melalui Kewirausahaan, Kepeloporan dan Kepemimpinan	
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	250 Orang
					Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	15 Orang
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	10 Kegiatan				

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	250 Orang
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Organisasi Kepemudaan yang diberdayakan	
					Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	150 Orang
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Persentase pelatihan SDM kepramukaan		
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		
					Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi
					Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang
					Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	8 Laporan
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Persentase pembinaan cabang keolahragaan		
					Persentase pembinaan cabang keolahragaan		
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi	Persentase pembinaan dan pengembangan olahraga pada jenjang pendidikan		

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		INDIKATOR	TARGET 2025
				Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
				Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	8 Unit
				Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	7 Unit
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1 Dokumen
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Kejuaraan di Daerah berdasarkan cabang olahraga	
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	12 Kegiatan
				Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	251 Orang
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pembinaan cabang keolahragaan	

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	47 Orang
					Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaaan (Sport Science)	116 Pelatda
					Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	40 Orang
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Persentase organisasi olahraga yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	
					Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	2 Dokumen
					Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
					Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	4 Laporan
					Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	2 Laporan
					Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	2 Dokumen

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	5 Lembaga
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			Persentase Pengembangan Kebudayaan	100%
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		persentase seni tradisional yang dilestarikan, jumlah seni media baru yang dilestarikan (persen)	100%
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 Objek
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan
		Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	
						Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	
						Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.		Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.		Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota.		Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			Jumlah keluarga yang terlayani	
				Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender	
				(KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia			
				Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	50 Layanan
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK			Forum Anak Desa	
						Jumlah peraturan perundangan dan kebijakan PHPA	
				Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			Persentase anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus	
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	280 Orang
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
					Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	20 Layanan
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
					Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	40 Orang
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA			Angka Kelahiran menurut Umur/ Age Specific Fertility Rate, kelompok usia 15-19 tahun (kelahiran per 1.000 perempuan)	
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Rata-rata jumlah anak per keluarga	
					Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	25 Unit
					Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	50 Orang
					Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	4 Kelompok
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Rata-rata jumlah anak per keluarga	

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan
		Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			Persentase pemenuhan infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang dan terpelihara	
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	200 Unit
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	500 Unit
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			Persentase ketersediaan fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang tipe C	
				Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)		Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	9 Unit
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Persentase penyediaan angkutan umum yang melayani antarkota dalam kabupaten
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Unit
		2	"YUK NELIK PASIEN"	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Konsistensi antar dokkumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%				

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025	
		Pengembangan Daerah			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	
		Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			Cakupan Desa Siaga Aktif		
						Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat		
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		presentase tatanan sehat yang menyelenggarakan tatanan kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri		
					Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			persentase tatanan sehat yang menyelenggarakan tatanan kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri	
					Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar		
						Proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi		
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan Tingkat Kabupaten			

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0 Dokumen
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	30 Orang
					Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan Tingkat Kabupaten	
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
						Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%
						Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
						Persentase pelayanan kesehatan balita	100%
						Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%
						Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%
						Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%
						Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%
						Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%
						Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%
						Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100%

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		INDIKATOR	TARGET 2025
					Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	100%
					Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	100%
					Persentase rumah sakit terakreditasi	100%
					Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	100%
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (Persen)	
					Cakupan obat yang bermutu, merata dan terjangkau di fasilitas pelayanan kesehatan dasar pemerintah (Persen)	
					Cakupan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Sesuai Standar (Jenis Pelayanan)	
				Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6 Unit
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Unit
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	20 Unit
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	100 Keluarga

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	4 Paket
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan ibu hamil yang dilayani (K1) (Persen)	
						Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan (Persen)	
						Cakupan orang dengan resiko infeksi HIV mendapat skrining sesuai standar (Persen)	
						Cakupan bayi dilakukan pemeriksaan MTBM (Persen)	
						Cakupan balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya (minimal 8 kali) (Persen)	
						Cakupan orang usia 15-59 tahun mendapat skrining sesuai standar (Persen)	
						Cakupan sekolah yang mendapat pembinaan UKS (Persen)	
						Persentase Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga (Persen)	
						Cakupan fasilitas kesehatan mempunyai kapasitas sesuai standar dalam pencegahan dan pengendalian kedaruratan kesehatan masyarakat (Persen)	
						Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peta resiko penyakit infeksi emerging (Persen)	
						Cakupan penderita hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar (Persen)	
						Cakupan penderita DM mendapat pelayanan sesuai standar (Persen)	
						Cakupan ODGJ mendapat pelayanan sesuai standar (Persen)	
						Cakupan terduga TB mendapat pelayanan sesuai standar (Persen)	
						Cakupan puskesmas santun lansia (Persen)	
						Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Surveilans Gizi (Persen)	
						Persentase Tatanan Sehat (Persen)	

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		INDIKATOR	TARGET 2025	
					Persentase Desa STBM (Persen)		
					Persentase Desa ODF (Persen)		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2362 Orang
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2255 Orang
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2148 Orang
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8425 Orang
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19442 Orang
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	86746 Orang
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14254 Orang
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	29805 Orang
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1868 Orang
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	301 Orang
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1999 Orang
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3059 Orang

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 bulan Dokumen
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	3 Laporan Dokumen
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen
					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen
					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Laporan Dokumen
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	300 Orang
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 tahun Dokumen
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen
					Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1010 Paket
					Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan
					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA			Cakupan PUS Unmet Need	
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Rata-Rata Jumlah anak per keluarga	
					Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	7 Laporan
					Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan
					Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen
					Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	3 Organisasi
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Rata-rata jumlah anak per keluarga	
					Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	234 Orang

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	7 Laporan
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Rata-rata jumlah anak per keluarga	
					Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan
					Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	404 Orang
					Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan
					Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Rata-rata jumlah anak per keluarga	
					Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	15 Kampung
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Rata-Rata Jumlah anak per keluarga	
				Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal		Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	1 Satuan Pendidikan
				Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Dokumen
				Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana		Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Kegiatan
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Rata-Rata Jumlah anak per keluarga	
				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	7 Laporan
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	7 Laporan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA			Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	
						Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang ber KB	
						Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB	
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Rata-rata jumlah anak per keluarga	
					Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan
					Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia	25 Unit
					Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	50 Orang

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	4 Kelompok
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Rata-rata jumlah anak per keluarga	
					Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan
					Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	7 laporan

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	7 laporan
		Dinas Kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			Persentase Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi Syarat sesuai standar	
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Persentase Tataan Sehat yang menyelenggarakan tataan kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri	
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Persentase Tataan Sehat yang menyelenggarakan tataan kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri	
					Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	50 Unit
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun	
				Pemeliharaan AnakAnak Terlantar		Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan jaminan sosial selama satu tahu	
					Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		INDIKATOR	TARGET 2025
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	38840 Orang
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Keluarga
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	
				Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang
				Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang
				Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	245 Orang
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial	

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang
					Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			Persentase penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan kepada masyarakat yang membutuhkan	
				Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan kepada masyarakat yang membutuhkan	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	
					Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang
					Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang
					Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Sertifikat
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota (Persen)Persentase Perlindungan sosial Bencana Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (Persen)	

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		INDIKATOR	TARGET 2025
					Persentase Perlindungan sosial Bencana Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (Persen)	
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan sosial Bencana Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (Persen)	
				Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus (Persen)	
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
				Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	280 Orang
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
				Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	20 Layanan
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	40 Orang
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGAPROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			Persentase Keluarga yang terlayani	
				Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	
					Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	40 Orang
		Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	
						Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	
						Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.		Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota.			Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			Jumlah sumber daya aparatur yang terlatih	
						Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	
						Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang terpenuhi	
						Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan penanggulangan bencana	
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
					Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	140 Orang
					Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
					Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	4 Kegiatan
					Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	100 Unit
					Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	500 Orang

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	7 Kawasan
					Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	40 Orang
					Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen
					Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan
					Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen
					Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	7 Kawasan
3	"YUK KEUME"	Dinas Pertanian dan Pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			Persentase tersedianya dan berkembangnya sarana pertanian	
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Ketersediaan pupuk dan obat-obatan pertanian Tersedianya bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura, tersedianya bibit unggul tanaman perkebunan, tersedianya alat mesin pertanian, keikutsertaan event pameran	
					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2 laporan
				Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah bibit sapi yang diadakan Jumlah Nitrogen Cair yang diadakan	

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	13 ekor
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			Persentase ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian	
				Pengembangan Prasarana Pertanian		Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian	
					Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	-
				Pembangunan Prasarana Pertanian		Persentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, pekerbunan dan peternakan	
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	-
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	2 unit
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	5 unit
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	-
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan (BPP) dan wilayah binaan (Desa)	
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Petani	

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 unit
					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	106 unit
				Dinas Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Cakupan bina kelompok pelaku usaha perikanan		
					Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengebangan kapasitas	3 kelompok
					Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Keompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 kelompok
		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Pembudidaya yang memiliki TDPIK Pembudidaya		
			Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rekomendasi perizinan berusaha bagi pembudidayaan ikan kecil yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota	25 rekomendasi	
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			Produksi perikanan kelompok pembudidaya	
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 unit	

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025	
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	700 unit	
					Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	3 dokumen	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			Konsumsi ikan		67 kg/kapita/tahun
				Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		UPI yang memiliki TDUPHP		90 UPI
					Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko		1 dokumen
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Produk Perikanan yang memenuhi standar mutu		150 produk layak uji
					Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		10 unit usaha
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Bahan Baku yang Tersedia		1.675 ton
					Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		4 ton

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	30 pelaku usaha
		Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			1. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 2. Rasio jaringan irigasi 3. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota 4. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur(%) pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	43,00 Persen 30,15 m/ha 80,00 persen 46,00 persen
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Cakupan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Skunder Kewenangan Kabupaten (Persen)	80 persen
					Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1 km
4	"LAWANG BELTIM"	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			
					Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (dokumen)	2 rekomendasi
					Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	48 Konten
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis Komunikasi Publik (Dokumen)	8 Media
					Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	10 Permohonan
					Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	9 Orang

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	5 Komunitas
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			Tingkat kematangan aspek TIK	
				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan Sistem Berbasis Elektronik	
					Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	2 Layanan
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
					Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (dokumen)	4 Promosi
					Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			persentase Koefisien variasi harga antar waktu	
				Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Tingkat kecukupan stok Bapokting (Barang Pokok dan Barang Penting)	
					Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan			Penurunan selisih harga eceran bahan pokok strategis terhadap Harga Rata-rata Nasional (Persen)	

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		INDIKATOR	TARGET 2025
				Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Teintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	15 Laporan
				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Kabupaten / Kota	Rasio penerima pupuk terhadap RDKK	
				Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90 %	4 Laporan
	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Investor baru yang berinvestasi	
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi investasi yang tersedia	
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Cakupan kebijakan daerah terkait penanaman modal yang telah ditetapkan	
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan	
				Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	10 Dokumen
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase informasi investasi yang tersedia	

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Cakupan Pembangunan/pengembangan dan pengelolaan Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan	
					Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit
					Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit
		Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil		Persentase usaha mikro yang naik kelas	
					Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	350 Unit Usaha
						Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja
		5	"BELTIM TERANG BENDERANG"	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang dan terpelihara		
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	200 Unit
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	500 Unit
Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)			
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota		Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	

NO	INOVASI TEMATIK KAB.BELITUNG TIMUR	HOLISTIK (Lintas Instansi dan Lintas Perangkat Daerah)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN			INDIKATOR	TARGET 2025
					Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	10 Unit
		Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			Luas Ruang Terbuka Hijau	
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan RTH (Persen)	
				Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	4 Kawasan

Konsistensi Target Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Dan RPJMD Tahun Pelaksanaan

Tabel 4. 16 Konsistensi Target Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Dan RPJMD Tahun Pelaksanaan

NO.	URUSAN	PROGRAM RRRJMD	KINERJA PROGRAM RRRJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RRRKPD	KINERJA PROGRAM RRRKPD 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	93,00 Persen	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	93,00 Persen	Dinas Pendidikan
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	66,00 Persen		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	66,00 Persen	
			Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	70,70 Persen		Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	70,70 Persen	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV jenjang SD/MI	95,00 Persen	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV jenjang SD/MI	95,00 Persen	Dinas Pendidikan
			Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV jenjang SMP/MTS	74,00 Persen		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV jenjang SMP/MTS	74,00 Persen	
			Persentase guru PAUD, SD, SMP yang bersertifikat pendidik	74,00 Persen		Persentase guru PAUD, SD, SMP yang bersertifikat pendidik	74,00 Persen	
			Persentase pengawas dan kepala sekolah yang bersertifikat	100,00 Persen		Persentase pengawas dan kepala sekolah yang bersertifikat	100,00 Persen	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan program kesetaraan paket A, B, C	87,5 Persen	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan program kesetaraan paket A, B, C	87,5 Persen	Dinas Pendidikan
			Persentase kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar (SD dan SMP)	71,43 Persen		Persentase kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar (SD dan SMP)	71,43 Persen	
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Penyediaan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota	3 Kegiatan	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Penyediaan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota	3 Kegiatan	Dinas Pendidikan
			Pengembangan Koleksi Muatan Lokal dan Budaya Etnis	3 Kegiatan		Pengembangan Koleksi Muatan Lokal dan Budaya Etnis	3 Kegiatan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil	96	Dinas Kesehatan
			Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	100		Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	
			Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100		Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	
			Persentase pelayanan kesehatan balita	98		Persentase pelayanan kesehatan balita	98	
			Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100		Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	
			Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif	100		Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	
			Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100		Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	
			Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100		Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	
			Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100		Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	

NO.	URUSAN	PROGRAM/RR/MD	KINERJA PROGRAM/RR/MD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM/IRKPD	KINERJA PROGRAM/IRKPD 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100		Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	
			Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100	
			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	90		Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	90	
			Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	90		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	90	
			Persentase rumah sakit terakreditasi	100		Persentase rumah sakit terakreditasi	100	
			Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	96		Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	96	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Penggunaan Obat Rasional	95 Persen	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Penggunaan Obat Rasional	95 Persen	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100 Persen	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100 Persen	Dinas Kesehatan
			Proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi	70 Persen		Proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi	70 Persen	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	100 Persen	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	100 Persen	Dinas Kesehatan
Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	85 Persen		Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	85 Persen				
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	80	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Rasio Sampah Terangkut	0,9	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rasio Sampah Terangkut	0,9	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	43	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	43	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	80		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	80		
		Rasio Jaringan Irigasi	30,15		Rasio Jaringan Irigasi	30,15		
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur(Persen) pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	46		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur(Persen) pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	46		

NO.	URUSAN	PROGRAMRRUMD	KINERJAPROGRAMRRUMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAMIRKPD	KINERJAPROGRAMIRKPD 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	96,85	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	96,85	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	85,71	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	85,71	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Penataan Kawasan Permukiman Pendukung Pariwisata Strategis	85,71	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Penataan Kawasan Permukiman Pendukung Pariwisata Strategis	85,71	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Luas Ruang Terbuka Hijau	20	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Luas Ruang Terbuka Hijau	20	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	79,86	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	79,86	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah bangunan publik dilengkapi ruang terbuka hijau	80	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah bangunan publik dilengkapi ruang terbuka hijau	80	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Rasio Panjang Jalan Terhadap Luas Wilayah	0,35		Rasio Panjang Jalan Terhadap Luas Wilayah	0,35	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	90,11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	90,11	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Persentase penyediaan pelayanan air limbah domestik setempat	94,95		Persentase penyediaan pelayanan air limbah domestik setempat	94,95	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase permukiman yang tertata	99,82	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase permukiman yang tertata	99,82	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	53,5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	53,5	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	0	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	0	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO.	URUSAN	PROGRAMRRUMD	KINERJAPROGRAMRRUMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAMRKPD	KINERJAPROGRAMRKPD 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase tersedianya layanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	100	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase tersedianya layanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	100	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	100	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	100	Satuan Polisi Pamong Praja
			Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	100		Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	100	
			Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100		Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah sumber daya aparatur yang terlatih	100	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah sumber daya aparatur yang terlatih	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	
			Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang terpenuhi	100		Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang terpenuhi	100	
			Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan penanggulangan bencana	100		Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan penanggulangan bencana	100	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (kabupaten/kota)	100	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (kabupaten/kota)	100	Satuan Polisi Pamong Praja
			Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	90		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	90	
		6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang terkelola	100 Persen	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang terkelola
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun			100 Persen	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun	100 Persen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	persentase pemberian bantuan sosial			100 Persen		persentase pemberian bantuan sosial	100 Persen	
	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang menerima program pemberdayaan sosial			100 Persen		Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang menerima program pemberdayaan sosial	100 Persen	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti			100 Persen	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 Persen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	URUSAN	PROGRAMRRUMD	KINERJAPROGRAMRRUMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAMRKPD	KINERJAPROGRAMRKPD 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100 Persen	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100 Persen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi	100 Persen	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi	100 Persen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan kepada masyarakat yang membutuhkan	100 Persen	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan kepada masyarakat yang membutuhkan	100 Persen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	100 Persen		persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	100 Persen	
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang sertifikat kompetensi	2,9	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang sertifikat kompetensi	2,9	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	89,8	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	89,6	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	1,43	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	1,43	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	45	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	45	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Forum anak Desa	9	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Forum anak Desa	9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah peraturan perundangan dan kebijakan PHPA	3		Jumlah peraturan perundangan dan kebijakan PHPA	3	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	50	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	50	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Persentase pelaksanaan RAD PUG	80		Persentase pelaksanaan RAD PUG	80	
			jumlah IR yang terbina	80		jumlah IR yang terbina	80	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Keluarga yang terlayani	50 Keluarga	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Keluarga yang terlayani	50 Keluarga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus	100 Persen	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus	100 Persen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100 Persen	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100 Persen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Dokumen data gender yang tersedia	1 Dokumen	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Dokumen data gender yang tersedia	1 Dokumen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	URUSAN	PROGRAMRRUMD	KINERJAPROGRAMRRUMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAMRKPD	KINERJAPROGRAMRKPD 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	0	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan	7	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat	86,5	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat	86,5	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Nilai Tambah Produk Pertanian/Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan	90	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Nilai Tambah Produk Pertanian/Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan	90	Dinas Pertanian dan Pangan
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase proses penetapan subjek dan objek resdistribusi serta ganti rugi tanah yang terlaksana	80	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase proses penetapan subjek dan objek resdistribusi serta ganti rugi tanah yang terlaksana	80	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase izin lokasi yang diberikan	80	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase izin lokasi yang diberikan	80	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	76	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	76	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	20	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	20	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.	0,33	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.	0,33	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	20	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	20	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase izin membuka tanah yang diberikan	80	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase izin membuka tanah yang diberikan	80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	95	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	90%	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	URUSAN	PROGRAMRRUMD	KINERJAPROGRAMRRUMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAMIRKPD	KINERJAPROGRAMIRKPD 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Penetapan hak MHA, hak kearifan lokal dan/atau hak pengetahuan tradisional	905	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Penetapan hak MHA, hak kearifan lokal dan/atau hak pengetahuan tradisional	2 Penetapan Hak	Dinas Lingkungan Hidup
			Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	100		Terfasilitasi Penyediaan sarana/prasarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan	2 Penetapan Hak	
						Terfasilitasi Penyediaan sarana/prasarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan	2 Penetapan Hak	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Ketaatan Perusahaan dan/atau Kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3	90	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Ketaatan Perusahaan dan/atau Kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3	90%	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Capaian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	100	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Capaian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	100%	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Udara	94,3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Udara	95	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Air	56,81		Indeks Kualitas Air	56,81	
			Indeks Kualitas Lahan	53,54		Indeks Kualitas Lahan	53,54	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah	90	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah	85%	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	52,5	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2,00%	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pengetahuan Teknis Tentang Lingkungan Hidup Bagi Masyarakat	80	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pengetahuan Teknis Tentang Lingkungan Hidup Bagi Masyarakat	80%	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Sesuai Peraturan PerUndangan, mekanisme di dalam maupun diluar pengadilan	19	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Sesuai Peraturan PerUndangan, mekanisme di dalam maupun diluar pengadilan	19 BA pengaduan	Dinas Lingkungan Hidup
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase permohonan dokumen dan layanan data Kependudukan yang dapat diproses/dilayani	100	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase permohonan dokumen dan layanan data Kependudukan yang dapat diproses/dilayani	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase pengelolaan arsip pelayanan adminduk secara digital	40		Persentase pengelolaan arsip pelayanan adminduk secara digital	40	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio pasangan berakte nikah	1,00	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio pasangan berakte nikah	1,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penerbitan akta kelahiran per jumlah kelahiran	100		Penerbitan akta kelahiran per jumlah kelahiran	100	
			Rasio penerbitan akta kematian	1,00		Rasio penerbitan akta kematian	1,00	
			Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	100		Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	100	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Penerbitan KTP ber-NIK per jumlah penduduk wajib KTP	100	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Penerbitan KTP ber-NIK per jumlah penduduk wajib KTP	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO.	URUSAN	PROGRAMRRUMD	KINERJAPROGRAMRRUMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAMRKPD	KINERJAPROGRAMRKPD 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Rasio penduduk ber-KTP	1,00		Rasio penduduk ber-KTP	1,00	
			Persentase anak usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	100		Persentase anak usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	100	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten	100	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	100	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan	100	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	100 Persen	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	100 Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran menurut Umur/ Age Specific Fertility Rate, kelompok usia 15-19 tahun	17,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran menurut Umur/ Age Specific Fertility Rate, kelompok usia 15-19 tahun	17,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS Unmet Need	5,29	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS Unmet Need	5,29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	32	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	32	Dinas Perhubungan
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pelayaran	65,43	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pelayaran	65,43	Dinas Perhubungan
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat kematangan aspek TIK	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat kematangan aspek TIK	3	Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan informasi yang bisa diakses		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan informasi yang bisa diakses	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
		ROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Informasi yang bisa diakses	100	ROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Informasi yang bisa diakses	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat	14,63	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat	0	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha	0,65	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha	0,65	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas	38	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas	38	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah

NO.	URUSAN	PROGRAMRRUMD	KINERJAPROGRAMRRUMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAMIRKPD	KINERJAPROGRAMIRKPD 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	95,25	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	39,5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	39,5	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	35,55	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	35,55	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	85	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	85	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor baru yang berinvestasi	2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor baru yang berinvestasi	2	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	81,82	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	81,82	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan	100	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan	100	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	21	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	21	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase wirausaha muda	2,75 Persen	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase wirausaha muda	2,75	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Persentase organisasi pemuda yang aktif	100 Persen		Persentase organisasi pemuda yang aktif	100	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pelatihan SDM kepramukaan	55 Persen	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pelatihan SDM kepramukaan	55 Persen	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pembinaan cabang keolahragaan	100 Persen	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pembinaan cabang keolahragaan	100 Persen	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Persentase cabang olahraga yang dibina	84 Persen		Persentase cabang olahraga yang dibina	84 Persen	
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data statistik sektoral bagi pembangunan daerah	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data statistik sektoral bagi pembangunan daerah	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah	75	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah	75	Dinas Komunikasi dan Informatika
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan	67	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan	67	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO.	URUSAN	PROGRAMRRUMD	KINERJAPROGRAMRRUMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAMRKPD	KINERJAPROGRAMRKPD 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	70	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	70	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	60	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	60	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Sejarah	65	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Sejarah	65	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	70	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	70	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	80	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	80	Dinas Perpustakaan
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	1,43	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	1,43	Dinas Perpustakaan
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase penyelamatan arsip dari bencana yang terlaksana	60	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase penyelamatan arsip dari bencana yang terlaksana	60	Dinas Perpustakaan
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	70	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	70	Dinas Perpustakaan
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase pelayanan izin penggunaan arsip tertutup kota yang diberikan	25	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase pelayanan izin penggunaan arsip tertutup kota yang diberikan	25	Dinas Perpustakaan
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Laporan Hasil Pengawasan	4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Laporan Hasil Pengawasan	4	Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	43966	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	43966	Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi Ikan	62	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi Ikan	67	Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	190	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	1800	Dinas Perikanan
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	30	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	30	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap Total PAD Daerah	4	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap Total PAD Daerah	4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Capaian Kinerja Kunjungan Wisata Kabupaten Belitung Timur	15	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Capaian Kinerja Kunjungan Wisata Kabupaten Belitung Timur	15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO.	URUSAN	PROGRAMRRUMD	KINERJAPROGRAMRRUMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAMIRKPD	KINERJAPROGRAMIRKPD 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	20	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	20	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan, Penurunan Jumlah Kasus Gangguan Reproduksi pada Sapi, Penurunan Angka Kematian Pedet, Peningkatan Ketersediaan Obat Hewan dan Sarana Kesehatan Hewan Lainnya, Peningkatan Jumlah Unit Usaha Hasil Ternak yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKP)	20	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan, Penurunan Jumlah Kasus Gangguan Reproduksi pada Sapi, Penurunan Angka Kematian Pedet, Peningkatan Ketersediaan Obat Hewan dan Sarana Kesehatan Hewan Lainnya, Peningkatan Jumlah Unit Usaha Hasil Ternak yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKP)	20	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Tersedianya dan Berkembangnya Sarana Pertanian	20	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Tersedianya dan Berkembangnya Sarana Pertanian	20	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Penyuluhan Pertanian di Tingkat Kecamatan (BPP) dan Wilayah Binaan (Desa)	4	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Penyuluhan Pertanian di Tingkat Kecamatan (BPP) dan Wilayah Binaan (Desa)	4	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan	20	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan	20	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya Pengetahuan Petani, Terklasifikasinya Kelas Kebun Perusahaan	0	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya Pengetahuan Petani, Terklasifikasinya Kelas Kebun Perusahaan	50	Dinas Pertanian dan Pangan
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga antar waktu	3,1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3,19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	40	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	40	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku	73,5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku	73,5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	76		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	76	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk unggulan yang memenuhi standar ekspor	2	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk unggulan yang memenuhi standar ekspor	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah	5,95	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah	5,95	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data informasi Industri di SIINAS	66,67	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data informasi Industri di SIINAS	66,67	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Industri kecil menengah yang telah memiliki izin usaha	32,5	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Industri kecil menengah yang telah memiliki izin usaha	32,5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO.	URUSAN	PROGRAM RRJMD	KINERJA PROGRAM RRJMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
30	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	100	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	100	Sekretariat Daerah
			Tingkat Kematangan UKPBJ	9,00		Tingkat Kematangan UKPBJ	9,00	
			Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan terkait perekonomian administrasi pembangunan,dan sumber daya alam	100		Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan terkait perekonomian administrasi pembangunan,dan sumber daya alam	100	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kerjasama daerah yang terfasilitasi	100	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kerjasama daerah yang terfasilitasi	100	Sekretariat Daerah
			Persentase Kebijakan dan Pembinaan Keagamaan yang difasilitasi	100		Persentase Kebijakan dan Pembinaan Keagamaan yang difasilitasi	100	
			Persentase Regulasi yang tersusun secara ideal, tepat fungsi dan tepat sasaran	100		Persentase Regulasi yang tersusun secara ideal, tepat fungsi dan tepat sasaran	100	
31	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD) yang tersusun dan terintegrasi	85	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD) yang tersusun dan terintegrasi	85	Sekretariat DPRD
32	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD	100	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program RPJMD kedalam RKPD	100	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Persentase kesesuaian Program RKPD kedalam APBD	100		Persentase kesesuaian Program RKPD kedalam APBD	100	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu	100	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu	100	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah tersusun tepat waktu	100		Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah tersusun tepat waktu	100	
33	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan Waktu Penetapan Raperda APBD	1,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan Waktu Penetapan Raperda APBD	1,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Ketepatan Waktu Penetapan Raperda Perubahan APBD	1,00		Ketepatan Waktu Penetapan Raperda Perubahan APBD	1,00	
			Persentase Realisasi SP2D Tepat Waktu	98,00		Persentase Realisasi SP2D Tepat Waktu	98,00	
			Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	1,00		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	1,00	
			Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	85,00		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	85,00	
			Persentase Program/ Kegiatan yang Tidak Terlaksana	10,00		Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana	10,00	
			Persentase Belanja Pendidikan	20,00		Persentase Belanja Pendidikan	20,00	

NO.	URUSAN	PROGRAMRRUMD	KINERJAPROGRAMRRUMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAMRKPD	KINERJAPROGRAMRKPD 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Persentase Belanja Kesehatan	10,00		Persentase Belanja Kesehatan	10,00	
			Bagi Hasil Kabupaten/ Kota dan Desa	0,87		Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	0,87	
			Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	27,00		Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	27,00	
			Proporsi pajak terhadap total belanja	7,76		Proporsi pajak terhadap total belanja	7,76	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kesesuaian Barang Milik Daerah dengan Nilai Aset di Neraca	100	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kesesuaian Barang Milik Daerah dengan Nilai Aset di Neraca	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Persentase pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah yang terlaksana	100		Persentase pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah yang terlaksana	100	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap komponen pendapatan daerah	14,38	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap komponen pendapatan daerah	14,38	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Kemandirian Keuangan Daerah	14,38		Kemandirian Keuangan Daerah	14,38	
			Rasio PAD	1,44		Rasio PAD	1,44	
34	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Program Pengadaan, Mutasi, Promosi, Pengembangan Kompetensi dan Evaluasi Kinerja ASN	100	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Program Pengadaan, Mutasi, Promosi, Pengembangan Kompetensi dan Evaluasi Kinerja ASN	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
35	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi dasar dan manajerial	100	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi dasar dan manajerial	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
36	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implemetasi rencana kelitbangan	100	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implemetasi rencana kelitbangan	100	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	
			Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	60,00		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	60,00	
37	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan/ rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	93,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	93,00	Inspektorat
			Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan/ rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat	85,00		Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat	85,00	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi yang ditindaklanjuti	100	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi yang ditindaklanjuti	100	Inspektorat
38	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00	Kecamatan Damar
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum	90,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum	90,00	Kecamatan Damar
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	Kecamatan Damar

NO.	URUSAN	PROGRAMRRUMD	KINERJAPROGRAMRRUMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAMIRKPD	KINERJAPROGRAMIRKPD 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	100	Kecamatan Damar
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum	100	Kecamatan Damar
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	100	Kecamatan Simpang Renggang
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,05	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,05	Kecamatan Simpang Renggang
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	100	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	100	Kecamatan Simpang Renggang
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum yang di tindaklanjuti bersama Forkopimcam	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum yang di tindaklanjuti bersama Forkopimcam	100	Kecamatan Simpang Renggang
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	Kecamatan Simpang Renggang
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	Kecamatan Dendang
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum	100	Kecamatan Dendang
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	100	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	100	Kecamatan Dendang
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	Kecamatan Dendang
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	100	Kecamatan Dendang
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	100	Kecamatan Manggar
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,35	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,35	Kecamatan Manggar
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum yang di tindaklanjuti bersama Forkopimcam	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum yang di tindaklanjuti bersama Forkopimcam	100	Kecamatan Manggar
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	100	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	100	Kecamatan Manggar

NO.	URUSAN	PROGRAMRRUMD	KINERJAPROGRAMRRUMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAMIRKPD	KINERJAPROGRAMIRKPD 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	Kecamatan Manggar
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,84	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,84	Kecamatan Gantung
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	100	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	100	Kecamatan Gantung
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	83,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	83,00	Kecamatan Gantung
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	Kecamatan Gantung
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum yang di tindaklanjuti bersama Forkopimcam	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum yang di tindaklanjuti bersama Forkopimcam	100	Kecamatan Gantung
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,00	Kecamatan Kelapa Kampit
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	Kecamatan Kelapa Kampit
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	100	Kecamatan Kelapa Kampit
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum	100	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum	100	Kecamatan Kelapa Kampit
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum	100	Kecamatan Kelapa Kampit
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,00	Kecamatan Simpang Pesak
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum yang di tindaklanjuti bersama Forkopimcam	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum yang di tindaklanjuti bersama Forkopimcam	100	Kecamatan Simpang Pesak
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	100	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	100	Kecamatan Simpang Pesak
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	Kecamatan Simpang Pesak
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	100	Kecamatan Simpang Pesak

NO.	URUSAN	PROGRAMRRUMD	KINERJAPROGRAMRRUMD 2025	TARGET DAN SATUAN	PROGRAMIRKPD	KINERJAPROGRAMIRKPD 2025	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
39	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	persentase tingkat pemahaman dan pengawasan politik yang ada di masyarakat	65,00	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Terwujudnya hubungan yang harmonis antara lembaga perwakilan rakyat partai politik dan masyarakat	65,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase tingkat ketercapaian kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal penyelesaian konflik secara dini dan pasca konflik	65,00	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase tingkat ketercapaian kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal penyelesaian konflik secara dini dan pasca konflik	65,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase tingkat pembinaan kerukunan dan keselarasan di masyarakat	60,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase tingkat pemahaman masyarakat tentang idiologi pancasila dan karakteristik suatu bangsa	60,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	persentase ormas/LSM/OKP yang berstatus terdaftar	60,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase tingkat pemahaman dan pengawasan tentang politik serta budaya politik yang ada di masyarakat	60,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	persentase tingkat pemahaman masyarakat tentang idiologi pancasila dan karakteristik suatu bangsa	60,00	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase tingkat pemahaman masyarakat tentang idiologi pancasila dan karakteristik suatu bangsa	60,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.3 PENYELARASAN RKPD TAHUN 2025 DENGAN RPJPD TAHAP I TAHUN 2025-2029

RKPD 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memiliki posisi strategis dalam siklus pembangunan daerah. Tahun 2025 menandai tahun transisi yang penting karena RKPD 2025 berfungsi sebagai irisan dari berbagai tahapan perencanaan jangka menengah dan panjang.

Pertama, RKPD 2025 adalah bagian dari pelaksanaan RPJMD 2021-2026. RPJMD ini merupakan pedoman strategis pembangunan lima tahun yang disusun untuk mencapai visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih. Sebagai dokumen yang memandu implementasi kebijakan pembangunan pada tahun keempat RPJMD, RKPD 2025 berperan krusial dalam memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan dapat berjalan efektif dan mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Kedua, RKPD 2025 juga merupakan tahun terakhir dari RPJPD 2005-2025. RPJPD ini adalah dokumen perencanaan jangka panjang dua puluh tahun yang mengarahkan pembangunan daerah dengan tujuan mewujudkan visi besar daerah untuk periode 2005-2025. Oleh karena itu, RKPD 2025 harus mampu mengintegrasikan capaian-capaian pembangunan selama dua dekade terakhir dan menutup pelaksanaan RPJPD dengan pencapaian target-target akhir yang telah dirumuskan.

Ketiga, RKPD 2025 menandai awal dari RPJPD 2025-2045, yang merupakan tahapan pembangunan jangka panjang selanjutnya. Sebagai tahun pertama dari RPJPD baru, RKPD 2025 harus memulai langkah-langkah strategis untuk mengarahkan pembangunan daerah ke arah yang sesuai dengan visi dan misi baru untuk dua dekade mendatang. Ini mencakup penyusunan program-program prioritas yang relevan, penguatan institusi, dan penyiapan sumber daya untuk mendukung keberlanjutan pembangunan.

Dengan demikian, RKPD 2025 memiliki peran ganda dan signifikan dalam memastikan kesinambungan pembangunan daerah. Melalui sinergi antara pelaksanaan akhir RPJPD 2005-2025, keberlanjutan program RPJMD 2021-2026, dan inisiasi RPJPD 2025-2045, RKPD 2025 diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan bagi daerah.

Berikut adalah penyandingan indikator-indikator kinerja utama pada RKPD 2025 dengan indikator-indikator utama yang ada pada RPJPD 2025-2045.

Tabel 4. 17 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Sasaran, Indikator, dan Target RPJPD Tahun Pertama Tahap I

RKPD 2025				RPJPD TAHAP 1 2025 - 2029		
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
PRIORITAS 1 : PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KESETARAAN						
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	11.68	Pendidikan Berkualitas Merata dan Terjangkau	Harapan Lama Sekolah	12.45
		Rata-Rata Lama Sekolah	8.95		Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk diatas 15 Tahun	9.71
PRIORITAS 2: PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT						
1	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Kabupaten Sehat	WIWERDA	Kesehatan untuk semua	Usia Harapan Hidup	72.55
					Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	21.37
PRIORITAS 3 : PENGENTASAN KEMISKINAN						
1	Menurunnya tingkat kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0.534	Penanggulangan Kemiskinan dan perlindungan sosial	Tingkat Kemiskinan (%)	5.59
		Indeks Keparahan Kemiskinan	0.14			
2	Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	97.5	Kesehatan untuk semua	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)	98.84
		Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	85	Penanggulangan Kemiskinan dan perlindungan sosial	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	97.38
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100			
PRIORITAS 4: OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DAN DAYA SAING						
1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi yang terserap	2.9	Penanggulangan Kemiskinan dan perlindungan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka	2.51
					Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	3.25

RKPD 2025				RPJPD TAHAP 1 2025 - 2029		
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
		Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun	0.14	Hilirasi sektor ekonomi unggulan	Persentase Pertambahan Industri Kecil dan Menengah (%)	6.31
2	Meningkatnya investasi	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA / PMDN)	402,814	Penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6.33
				Stabilitas harga	Tingkat Inflasi (%)	4.83
				Peningkatan pendapatan perkapita	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0.80
					Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	80,613,576
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	3.70	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan industri	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	27.31
		Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	5.00	Hilirasi sektor ekonomi unggulan (pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan)	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Juta Rupiah)	4,097,311.88
		Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi makana dan minuman	11.90	Hilirasi sektor ekonomi unggulan (pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan)	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	3.06
					Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	95.95
					PRIORITAS 5 : PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR	
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	98.78	Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	61.53
		Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	72.02		Indeks Infrastruktur Wilayah	78.35
		Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	76.52			
		PRIORITAS 6 : PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP				
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71.4	Lingkungan hidup yang lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	79.37
		Indeks Risiko Bencana	168.4	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	151.56

RKPD 2025				RPJPD TAHAP 1 2025 - 2029		
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
PRIORITAS 7 : PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK						
1	Meningkatnya Kapasitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	92	Birokrasi yang bersih, responsif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis digital	Indek Reformasi Birokrasi	79.80
		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	ST			
2	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70			
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	BB			
		Kapabilitas APIP	3			
		Maturitas SPIP	3			
4	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Indeks Kelembagaan	78 Persen		Indeks Merit Sistem	282.75
5	Meningkatnya Profesionalisme Sumber Daya Aparatur	Indeks Profesionalisme ASN	72			
6	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	94.50		Indeks Pelayanan Publik	3.7
7	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,60 Angka Indeks		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4.06

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1.KERANGKA PENDANAAN DAERAH TAHUN 2025

Berdasarkan analisis keuangan pada Bab III (tiga) maka kerangka pendanaan untuk tahun 2025 adalah sebagaimana Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Kerangka Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

Kode	Uraian	APBD 2024 Rp	Proyeksi 2025 Rp	BERTAMBAH/(BERKURAN G)	
				Rp	%
4	PENDAPATAN DAERAH	832.718.865.833	914.768.476.647	82.049.610.814	9,85
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	103.452.600.833	120.587.716.655	17.135.115.822	16,56
4.1.1.	Pajak Daerah	52.226.525.125	65.042.000.000	12.815.474.875	24,54
4.1.2	Retribusi Daerah	3.982.283.342	3.204.262.500	- 778.020.842	-19,54
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.523.052.522	5.523.052.522	-	0,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	41.720.739.844	46.818.401.633	5.097.661.789	12,22
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	728.016.515.000	792.931.009.992	64.914.494.992	8,92
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	678.016.515.000	759.181.009.992	81.164.494.992	11,97
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.000.000.000	33.750.000.000	- 16.250.000.000	-32,50
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.249.750.000	1.249.750.000	-	0,00
4.3.01	Pendapatan hibah	249.750.000	249.750.000	-	0,00
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	1.000.000.000	1.000.000.000	-	0,00
5	BELANJA DAERAH	959.352.217.513	1.050.186.373.728	90.834.156.215	9,47
5 . 1	BELANJA OPERASI	750.519.980.532	823.844.125.373	73.324.144.841	9,77
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	412.700.220.253	518.678.294.277	105.978.074.024	25,68
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	311.144.007.999	290.531.040.293	- 20.612.967.706	-6,62

Kode	Uraian	APBD 2024 Rp	Proyeksi 2025 Rp	BERTAMBAH/(BERKURAN G)	
				Rp	%
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	24.893.752.280	11.352.790.803	- 13.540.961.477	-54,40
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	1.782.000.000	3.282.000.000	1.500.000.000	84,18
5 . 2	BELANJA MODAL	113.214.442.435	121.423.888.405	8.209.445.970	7,25
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.503.708.800	27.621.241.760	10.117.532.960	57,80
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.623.077.500	27.581.780.700	.958.703.200	33,74
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	73.533.159.485	64.437.001.045	- 9.096.158.440	-12,37
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.502.775.650	1.675.093.800	172.318.150	11,47
5 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	51.721.000	108.771.100	57.050.100	110,30
5 . 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	0,00
5 . 3 . 1	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000	-	0,00
5 . 4	BELANJA TRANSFER	94.617.794.546,00	103.918.359.950,00	9.300.565.404	9,83
5 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil	5.641.300.846	6.825.416.750,00	1.184.115.904	20,99
5 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	88.976.493.700	97.092.943.200	8.116.449.500	9,12
	SURPLUS/(DEFISI T)	- 126.633.351.680	- 135.417.897.081	- 8.784.545.401	6,94
6	PEMBIAYAAN DAERAH	126.633.351.680	135.417.897.081	8.784.545.401	6,94
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	130.633.351.680	135.917.897.081	5.284.545.401	4,05
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	130.633.351.680	135.417.897.081	4.784.545.401	3,66
6 . 1 . 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	500.000.000	500.000.000	
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000	500.000.000	- 3.500.000.000	-87,50
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000	-	4.000.000.000	
6 . 2 . 4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	500.000.000	500.000.000	

Kode	Uraian	APBD 2024 Rp	Proyeksi 2025 Rp	BERTAMBAH/(BERKURAN G)	
				Rp	%
TOTAL APBD		959.352.217.513	1.050.686.373.728		0,00

5.1.1 Pendanaan Daerah

5.1.1.1 Pendanaan Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

Gambaran mengenai dukungan pendanaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 terhadap masing-masing prioritas pembangunan Kabupaten Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2
Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	
1	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	1. Dinas Pendidikan	1. Mewujudkan akses dan kualitas pendidikan dasar yang merata bagi semua satuan pendidikan 2. Mewujudkan akses dan kualitas pendidikan kesetaraan yang merata bagi semua masyarakat	1	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
					a			Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	480.000.000
					b			Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	724.285.000
					c			Meningkatkan Kualitas SDM Bidang Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	731.000.000
					d			Meningkatkan cakupan layanan SPM Bidang Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	168.000.000
					e			Mengurangi Anak Tidak Sekolah (ATS)	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	881.880.000
									Pengadaan Mebel Sekolah	408.950.000
									Pengadaan Perlengkapan Sekolah	336.024.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
									Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	662.418.200
									Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	151.068.800
									Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	99.995.400
									Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.000.000
									Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15.626.600.000
									Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	29.992.600
									Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	29.110.000
									Pengembangan konten digital untuk pendidikan	29.999.900
									Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	37.079.200
									Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	29.969.700
									Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	34.315.000
									Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	29.942.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
									Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	29.845.600
									Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	191.660.000
									Pembangunan Ruang Kelas Baru	904.000.000
									Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	605.000.000
									Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	29.949.400
									Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	49.991.400
									Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	3.896.000.000
									Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.000.914.300
								Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	149.328.000
									Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	159.996.000
									Pembangunan Laboratorium	199.700.000
									Pembangunan Fasilitas Parkir	99.798.000
									Pembangunan Kantin Sekolah	149.775.000
									Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	430.055.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
									Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	1.399.877.000
									Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	49.950.100
									Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	149.775.000
									Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium	199.700.000
									Rehabilitasi Sedang/ Berat Kantin Sekolah	1.500.000
									Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	501.002.000
									Pengadaan Mebel Sekolah	239.600.000
									Pengadaan Perlengkapan Sekolah	180.544.000
									Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	615.298.100
									Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	68.200.000
									Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	119.906.000
									Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	19.999.800
									Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	7.235.000.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	19.992.600
								Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	29.994.700
								Pengembangan konten digital untuk pendidikan	29.999.900
								Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	29.999.900
								Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	24.992.800
								Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	19.999.400
								Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.992.600
								Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	30.745.200
								Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	109.994.000
								Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.500.000
								Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	29.999.900
								Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	174.999.900

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	594.193.000
							Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.313.238.000
								Pengadaan Mebel PAUD	68.907.000
								Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	194.390.000
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	79.712.000
								Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	218.378.000
								Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.200.000.000
								Pengembangan konten digital untuk pendidikan	14.980.200
								Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	19.996.200
								Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15.335.600
								Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	16.070.000
								Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	127.210.000
								Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	16.477.800
								Pembangunan Ruang Kelas Baru	600.360.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	24.102.800
								Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	50.130.000
								Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	323.188.400
								Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	548.433.200
								Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	450.000.000
							Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	11.681.200
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	19.729.900
								Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	17.211.600
								Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	795.000.000
								Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	19.816.500
								Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100.006.400
								Pembangunan Ruang Kelas Baru	546.302.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Pengadaan Perlengkapan Sekolah	40.150.200
								Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	73.990.000
								Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	29.859.200
								Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	49.175.600
								Pengadaan Mebel Sekolah	63.921.500
								Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesenjangan	63.921.500
						Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	29.997.000
								Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	44.899.400
								Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	29.997.000
							Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	28.662.200
								Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	20.087.800
						Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	79.549.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
								Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	59.799.800
						Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	30.072.400
								Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	34.986.100
2	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Dinas Kesehatan 2. UPT Puskesmas se kab. Belitung Timur dan RSUD Muhammad Zein	1. Konvergensi program lintas sektor untuk percepatan penurunan stunting pada desa lokus stunting 2. konvergensi lintas program dan lintas sektor tatanan Kabupaten/Kota sehat	1	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Puskesmas	2.523.970.000
					a Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	399.799.000
					b Peningkatan Kualitas SDM bidang Kesehatan			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	719.321.000
					c Peningkatan kualitas sarana dan prasarana			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	161.740.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
					bidang kesehatan				
				d	Percepatan penurunan stunting			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.350.000.000
				e	Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pengendalian Penyakit			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	118.614.000
				f	Meningkatkan cakupan layanan SPM Bidang Kesehatan			Pengembangan Rumah Sakit	5.000.000.000
								Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.860.177.100
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	79.199.000
								Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	71.211.900
							Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	474.886.600

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Daerah Kabupaten / Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	103.954.400
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	114.499.900
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	28.676.300
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	550.160.000
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	822.209.600
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	561.567.300
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	32.532.000
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	561.655.100
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	241.366.500
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	875.174.100
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	183.475.100
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	59.781.600

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	137.255.600
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.148.413.100
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	42.424.000
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	514.837.100
									Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	229.999.780
									Pengelolaan Surveilans Kesehatan	312.001.200
									Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	65.000.000
									Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.218.525.600
									Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20.842.902.600
									Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	64.473.000
									Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	134.311.200
									Operasional Pelayanan Puskesmas	1.224.388.000
									Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	590.381.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	26.520.000
								Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	42.480.000
								Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	15.120.000
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	143.690.000
								Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	638.840.800
							Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	270.805.000
							Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	40.640.000
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	59.998.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	318.500.000
									Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	184.738.400
								Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		999.999.700
							Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4.993.200
								Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	5.999.100

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	64.992.600
								Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	112.669.000
								Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	213.121.000
							Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	23.945.500

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	17.478.000
									Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	140.000.000
								Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	75.967.000
									Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	371.400.000
									Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	37.492.500
							Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	526.000.000
									Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	191.600.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		265.443.400
								Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		102.051.000
							Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		117.000.000
								Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		31.450.000
							Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		22.769.000
								Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		159.903.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14.850.000	
								Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	56.615.600	
								Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000
									Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	107.225.000
							Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	35.555.400
									Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	300.000.300

N O.	PRIORITA S DAERAH	PERANGKA T DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
									Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	35.781.900
									Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	15.034.800
								Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	81.045.300
									Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	327.000.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	359.700.000
3	Pengentasan Kemiskinan	1. Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. konvergensi lintas program dan lintas sektor percepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur	1	Percepatan Penghapusan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4.200.000
					a		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	912.858.300
					b			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	86.281.400
					c			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	23.400.600
						Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	53.039.600
						Program Perlindungan	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	26.959.200

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.996.800
									Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	194.925.300
							Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	72.089.900
									Penyediaan Sandang	58.327.000
									Penyediaan Alat Bantu	55.221.900
									Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	39.910.100
									Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	44.370.200
									Pemberian Layanan Kedaruratan	10.394.400
								Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	20.000.000
									Pemberian Layanan Rujukan	20.134.000
									Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	650.000.000
							Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	9.105.000
							Program Pencegahan, Pengendalian, Penanggulangan, Penyelamatan Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	199.205.000
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	149.944.100
							Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	37.036.400
							Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	84.615.200

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	169.774.000
								Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	44.200.000
							Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	144.163.100
							Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	69.968.000

N O.	PRIORITA S DAERAH	PERANGKA T DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	131.826.000
								Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	88.400.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
4	Optimalisasi Pengembangan Daya Saing Daerah dan Percepatan Investasi	1. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 2. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 4. Dinas Perikanan. 5. Dinas Pertanian dan Pangan. 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.	1. Menyusun paket peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas (triple skilling yaitu tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat terampil bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing) 2. Meningkatkan Jaringan Tenaga Kerja 3. Menyusun daftar prioritas investasi daerah 4. Menyusun <i>Investment Project Ready to Offer</i> (IPRO) 5. Menyusun Rencana Kerja Untuk Pembangunan Kawasan Industri Aik Kelik 6. Optimalisasi	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Percepatan Investasi				

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
			produksi perikanan tangkap dan budidaya 7. Optimalisasi akses pasar, daya saing, kualitas dan kapasitas komoditas/produk perikanan 8. Optimalisasi produksi dan produktivitas pertanian 9. Optimalisasi pencapaian ketahanan pangan daerah 10. Optimalisasi pengelolaan pariwisata daerah dan ekonomi kreatif 11. Mengembangkan budaya lokal 12.	a	Meningkatkan Pengelolaan, Pengembangan Kapasitas Daya Saing Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	32.999.900
						Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	428.300.000
								Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	244.970.800
				b	Mendorong Pertumbuhan Investasi Baru	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	32.379.000
							Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	64.698.000
						Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	189.398.700

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
			Meningkatkan penjaminan mutu produk unggulan daerah 13. Meningkatkan produktivitas U M K M				Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	438.309.600
									Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	30.630.000
							Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	97.618.000
									Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	403.624.100
									Pengawasan Penanaman Modal	185.241.000
							Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	15.946.600
							Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	144.911.700
									Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	199.700.000
									Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.416.434.100

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
					c		Daerah Kabupaten/ Kota		
							Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	223.675.300
								Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	196.815.600
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	19.983.500
							Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	90.005.000
								Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	111.323.000
							Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	30.468.800

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.246.900
									Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	707.138.900
									Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.827.200
									Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.946.283.200
							Program Pengawasan Sumber Daya Perikanan Kelautan Dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	29.217.800
									Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	62.795.600
									Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	20.781.600
							Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	270.165.500
								Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan	128.096.600

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
								Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	237.555.900
									Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	590.280.100
							Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.895.379.500
								Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/ Pakan, Benih/ Bibit Hijauan Pakan Ternak	19.935.400
								Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/ Pakan	24.499.200

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	306.000.000
					d	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	805.493.000
							Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	64.998.200
							Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	100.000.000
							Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	210.000.000
									Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	293.197.200
									Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	42.632.400

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
									Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	70.652.400
									Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	19.999.900
							Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	422.993.300
									Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan
							Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	49.990.600
									Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	25.247.600
									Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	9.953.000
									Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Pangan Kabupaten / Kota		
							Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	9.973.600
								Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	250.000.000
						Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	9.953.000
							Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten / Kota	9.868.000
						Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota	133.312.000
						Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	515.000.000
								Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	1.000.064.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
					e	Meningkatkan kunjungan wisatawan		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	39.998.700
							Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.318.260.000
								Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	699.922.600
								Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	457.410.000
								Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	39.990.500
							Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	59.999.700
								Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	44.000.000
						Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	899.666.000
								Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	450.000.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	150.000.000
									Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	99.999.600
									Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	681.658.800
									Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	100.000.000
									Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50.000.000
								Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	150.000.000
							Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	353.928.000
								Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	253.681.400
								Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	21.191.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							dalam Daerah Kabupaten / Kota		
						Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	Penetapan Cagar Budaya	49.979.100
						Program Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Museum Kabupaten / Kota	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	183.736.300
						Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	147.059.800
								Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	17.496.800
						Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	30.860.000
							Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	37.700.000
								Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	52.589.000
				f	Mendorong Pengendalia		Pengawasan Pupuk dan	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	5.988.800

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
					n fluktuasi harga barang		Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	9.963.900
								Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	9.963.900
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	199.700.000
								Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.587.964.200
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	33.000.000
								Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	240.318.800
						Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	445.130.500

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	69.845.000
					g	Meningkatkan Daya saing Koperasi dan UMKM	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	135.285.100
5	Peningkatan Kualitas Infrastruktur	1. Dinas Perhubungan. 2. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Mengembangkan sistem transportasi terpadu yang memenuhi standar keselamatan berlalu lintas 2. Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah					
					a	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah baik darat maupun laut	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	200.000.000
									Rekonstruksi Jalan	8.499.050.274
									Pemeliharaan Berkala Jalan	4.452.508.941
									Pelebaran Jalan Menuju Standar	1.999.990.758
									Pemeliharaan Rutin Jembatan	199.958.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
									Survey Kondisi Jalan/Jembatan	496.598.460
									Rehabilitasi Jalan	3.499.983.847
									Pemeliharaan Rutin Jalan	3.955.985.600
							Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.119.062.000
									Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4.147.453.700
								Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	120.390.100
								Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	17.151.900
								Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	540.939.200
									Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	121.981.000
								Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	41.483.000
									Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	88.306.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
									Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	211.962.400
									Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	80.201.900
								Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	17.910.000
									Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	506.682.800
								Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	28.245.300
								Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.750.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.506.500
							Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	100.000.000
								Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	100.000.000
									Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	37.570.000
									Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	800.053.200
				b	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar	Program Kawasan Permukiman		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	49.811.600
								Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	311.095.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
							Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	399.435.000
								Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	49.993.200
							Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.609.735.800
							Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	299.973.500
									Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	15.119.386.970
							Program Pengelolaan Dan Pengembangan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	704.603.500

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							n Sistem Penyediaan Air Minum	Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	444.389.000
									Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	519.351.900
									Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400.342.500
									Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	697.780.000
							Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000
									Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	300.000.000
							Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1.198.944.000
									Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	599.504.000
									Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	449.757.000
									Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	6.398.045.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	3.718.800.000
									Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	800.000.000
							Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
							Program Penatagunaan Tanah	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	249.123.000
							Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	100.000.000
									Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	199.320.700
									Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	146.535.000
								Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Dasar	669.225.000
									Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	900.000.000
								Koordinasi dan Sinkronisasi	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	295.886.500

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN						
								Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	144.374.000						
								Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	97.466.100							
								Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	50.000.000							
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	98.663.100						
								Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	100.000.000							
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan	1. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 2. Mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah	1		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup										
											a	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	199.999.900
													Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu)	Normalisasi/Restorasi Sungai	349.972.006
															Pembangunan Kanal Banjir	2.908.671.381
																Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN		
		Kawasan Permukiman						Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	599.484.000		
								Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2.595.551.266		
							b	Pengendalian Degradasi Lingkungan dan Resiko Bencana	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	199.999.800
											Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	49.999.975
											Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	749.999.450
											Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	149.995.600
							Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	89.903.000
							Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6.000.000
									Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	600.000.000
									Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	50.000.000
									Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	3.815.439.800

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	39.999.800
							Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	199.995.000
									Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	99.992.100
									Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	49.997.600
									Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	124.991.100
							Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
							Program Pembinaan Dan	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	29.996.400

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	36.994.800
							Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	49.999.600
							Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	43.213.800
									Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	400.000.000
								Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	49.769.200
									Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	161.437.500

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	38.990.200
								Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	90.513.900
								Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.083.554.200
								Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	27.966.500
							Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	69.373.800
								Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	145.090.000
7	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. 3.	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan meningkatkan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah antara pemerintah	1	Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
					a			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	20.335.200
								Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	205.241.300
								Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	5.520.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
		Inspektorat. 4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 6. Dinas Perpustakaan. 7. Dinas Komunikasi dan Informatika. 8. Sekretariat Daerah 9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	daerah dengan pemangku kepentingan 2. Menjadi fasilitator dalam kolaborasi pentahelix (pendidikan, dunia usaha, komunitas sosial, pemerintahan dan media massa) untuk tindak lanjut dan pemanfaatan pengetahuan dan teknologi. 3. Implementasi Satu Data Indonesia Secara Optimal 4. Perluasan jaringan kerjasama antar PD dalam rangka penyelesaian aset daerah 5. optimalisasi						Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	481.205.700
								Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	179.219.300
							Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	67.510.200
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	44.503.800
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	29.376.500
									Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	91.267.600
									Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	119.363.400

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
			pendapatan daerah 6. Peningkatan peran, fungsi, serta sinergitas lembaga pengawasan daerah 7. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara komprehensif 8. Menyusun kebijakan sistem pengaduan masyarakat sehingga penanganan pengaduan masyarakat dapat di implementasikan 9. Optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	60.744.600
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	35.649.900
									Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	128.399.300
							Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	62.931.800
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	28.956.400
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	35.306.400
									Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	91.464.400

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
			(SPIP) 10. Menyelenggarakan pelayanan publik berdasarkan proses bisnis yang efektif dan efisien 11. Peningkatan sistem keamanan, aplikasi dan Infrastruktur yang terintegrasi untuk penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik 12. Penataan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan 13. Melaksanakan talent manajemen ASN secara berkala dan penilaian berbasis kinerja setiap						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	99.430.500
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	28.956.400
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	39.806.400
									Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	97.172.900
								Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	69.039.600
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	29.856.400
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	39.346.400
									Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	96.372.300

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
			aparatur 14. Digitalisasi proses administrasi kepegawaian sebagai pengembangan layanan kepegawaian 15. Pemenuhan target pengembangan kompetensi aparatur						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55.294.800
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	47.958.200
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	33.718.200
									Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	59.774.000
						Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		2.000.000.000
								Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		50.000.000
								Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik		90.000.000
							Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS		21.000.000
								Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		21.000.000
								Pembahasan APBD		21.000.000
								Pembahasan APBD Perubahan		21.000.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
									Pembahasan Laporan Semester	10.000.000
									Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	11.100.000
								Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3.080.000.000
									Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3.600.000.000
									Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3.050.000.000
									Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	135.000.000
									Pengawasan Penggunaan Anggaran	700.000.000
									Pembahasan Laporan Keterangan	635.000.000
									Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
								Peningkatan Kapasitas DPRD	Orientasi DPRD	20.310.000
									Pendalaman Tugas DPRD	750.000.000
									Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	620.000.000
									Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	270.000.000
									Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	95.700.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Penyusunan Program Kerja DPRD	10.000.000
								Publikasi dan Dokumentasi DPRD	220.000.000
							Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kunjungan Kerja dalam Daerah	12.992.800
								Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	30.000.000
								Pelaksanaan Reses	440.000.000
							Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.710.097.300
								Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	20.000.000
								Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	114.690.000
						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	134.908.000
							Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	120.795.000
								Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	517.523.000
						Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	109.974.400

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	374.019.000
							Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	249.365.000
								Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	545.023.000
								Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	136.241.700
				b	Peningkatan keselarasan data perencanaan pembangunan daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	89.588.000
								Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	172.167.300
								Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	102.439.600
				2	Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah				
					a	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	57.192.100
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	54.823.700
								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	130.673.500
								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	189.588.800

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
									Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	4.654.100
									Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	4.654.100
									Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	112.216.900
									Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	104.082.400
									Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	135.037.400
								Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	270.463.200
									Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	37.171.000
									Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	139.229.400
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan	119.122.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
								Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	33.356.000
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	86.262.000
								Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	42.030.400
								Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	159.999.700
								Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	76.352.900
								Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	78.293.400
								Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	103.855.900

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	30.703.400
							Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	72.472.000
								Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	97.092.943.200
								Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.000.000.000
								Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	6.825.416.750
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	97.148.400
								Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	59.015.200
								Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	67.754.900
								Penatausahaan Barang Milik Daerah	228.522.600
								Inventarisasi Barang Milik Daerah	222.951.400
								Pengamanan Barang Milik Daerah	24.538.700
				b	Mengoptimalkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	331.000.000
								Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	68.699.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
									Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	178.833.200
									Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	274.757.500
									Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	80.860.000
									Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	402.776.000
									Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	26.558.900
									Penagihan Pajak Daerah	58.880.800
									Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	28.092.900
									Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	590.632.700
				3	Terwujudnya kinerja pemerintahan daerah yang akuntabel					
				a	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	66.000.000	
								Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	235.250.000	
								Reviu Laporan Kinerja	234.120.000	
								Reviu Laporan Keuangan	191.700.000	
Pengawasan Desa	187.140.000									

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN		
									Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	193.682.000		
								Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	109.914.000		
									Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	160.230.000		
							Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	134.908.000		
										Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	120.795.000
											Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	517.523.000
				4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik							
				a	Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan berbasis	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	438.309.600			

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
						Standar pelayanan publik		dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	30.630.000
							Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	64.104.000
									Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	14.636.000
									Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	49.717.300
							Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	160.020.700
								Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	17.995.200
									Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	76.956.800
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.000.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
									Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	138.486.700
								Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	6.000.000
									Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.454.700
									Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2.742.500
							Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.168.915.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Budaya Politik	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	250.029.000
									Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	115.815.400
									Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	307.884.200

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
									Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	62.408.000
				5	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik					
				a	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		29.995.400
							Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		24.981.200
						Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		41.652.000
								Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		31.192.000
						Program Pengelolaan Informasi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat		57.490.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Dan Komunikasi Publik	Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	110.000.000
									Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	64.600.000
									Pengelolaan Media Komunikasi Publik	199.998.900
									Penyusunan Konten	249.990.500
							Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49.578.000
									Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	41.135.500
									Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	146.881.800
							Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	30.495.200

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	27.363.650
							Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda		100.000.000
								Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah		49.492.900
								Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		84.000.000
								Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas		405.196.600
								Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		1.147.006.400
								Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE		79.551.000
								Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE		1.092.828.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	15.946.600
				6	Meningkatya Efektifitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah					
				a	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	251.606.200	
								Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	26.166.200	
								Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	29.250.000	
							Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9.186.852.800	
								Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	89.230.000	
								Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.623.000.000	
							Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	157.894.000	
								Fasilitasi Bantuan Hukum	176.020.000	

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	
									Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	226.453.900	
								Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	99.998.300	
									Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	14.994.900	
								7	Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien serta sumber daya aparatur yang profesional		
				a	Meningkatkan integritas dan profesionalitas aparatur	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		9.979.200	
								Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		238.521.800	
								Koordinasi Pelaksanaan Administrasi		15.000.000	
								Pemberhentian			
								Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		40.389.600	
							Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN		24.006.500	
								Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		199.258.700	
								Pengelolaan Promosi ASN		387.813.700	
							Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		94.647.400	

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
									Pengelolaan Assessment Center	356.702.200
									Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	600.000.000
								Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	91.594.900
							Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	40.238.200
								Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	53.711.800
									Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	699.999.300
									Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	990.295.900

Selain dukungan anggaran terhadap masing-masing program prioritas pembangunan, disediakan juga dukungan anggaran terhadap program penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat dilihat pada Tabel 5.3 berikut:

Tabel 5.3
Dukungan Anggaran terhadap Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

NO	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	639.051.674.630
Total		639.051.674.630

5.1.1. Dukungan Pendanaan Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi 2 Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

Selain dukungan terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 juga memberikan porsi dukungan terhadap prioritas pembangunan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025. Gambaran mengenai dukungan anggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 terhadap masing-masing prioritas pembangunan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel 5.4 berikut:

Tabel 5.4
Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan
Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

N o	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
A	Utama					
1	Meningkatnya ekonomi Daerah	Optimalisasi Pengembangan Daya Saing Daerah dan Percepatan Investasi	Program perencanaan tenaga kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	32.999.900
			Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	428.300.000
					Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	244.970.800

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			PROGRAM PENGEMBAN GAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Inse ntif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/K ota	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	32.379.000
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/K ota	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	64.698.000
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggar aan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/K ota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	189.398.700
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	438.309.600
					Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	30.630.000
			PROGRAM PENGENDALI AN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/K ota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	97.618.000
					Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	403.624.100
					Pengawasan Penanaman Modal	185.241.000
			Program perencanaan dan pembangunan industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembanguna n Industri Kabupaten/K ota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	6.773.000

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	78.766.700
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	7.034.000
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	499.591.900
					Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	24.000.000
			program pengendaliaan izin usaha industri	penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin perluasan usaha industri (IPIU), Izin Usaha kawasan industri (IUKI), dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	3.810.700
			Program pengelolaan perikanan tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	144.911.700
					Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	199.700.000
					Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.416.434.100

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				Pemberdayaa n Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/K ota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	223.675.300
					Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	196.815.600
				Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	19.983.500
			Program pengelolaan perikanan budidaya	Pemberdayaa n Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	90.005.000
					Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	111.323.000
				Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.468.800
				Pengelolaan Pembudidaya an Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.246.900
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	707.138.900

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.827.200
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.946.283.200
			Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	29.217.800
					Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	62.795.600
					Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	20.781.600
			Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	270.165.500
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	128.096.600
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	237.555.900
					Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	590.280.100

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN GAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.895.379.500
				Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/K ota	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	19.935.400
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/K ota	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	24.499.200
				Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	306.000.000
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN GAN PRASARANA PERTANIAN	Pembanguna n Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	805.493.000
			PROGRAM PENGENDALI AN DAN PENANGGUL ANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulan gan Bencana Pertanian Kabupaten/K ota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	64.998.200
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	100.000.000

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				Kabupaten/Kota		
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	210.000.000
					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	293.197.200
					Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	42.632.400
					Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	70.652.400
					Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	19.999.900
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	422.993.300
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	55.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	49.990.600

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			PANGAN MASYARAKAT	Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/K ota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	25.247.600
					Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	9.953.000
				Pengelolaan dan Keseimbanga n Cadangan Pangan Kabupaten/K ota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	89.965.000
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Ta hun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	9.973.600
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berkasus Sumber Daya Lokal	250.000.000
			PROGRAM PENANGANA N KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	9.953.000
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/K ota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	9.868.000
			PROGRAM PENGAWASA N KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/K ota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	133.312.000
			PROGRAM PENINGKATA N DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/K ota	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	515.000.000
					Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.000.064.000

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	39.998.700
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.318.260.000
					Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	699.922.600
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	457.410.000
					Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	39.990.500
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	59.999.700
					Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	44.000.000
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	899.666.000
					Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	450.000.000

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			PROGRAM PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	150.000.000
					Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	99.999.600
					Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	681.658.800
					Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	100.000.000
					Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50.000.000
				Pengembanga n Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	150.000.000
			PROGRAM PENGEMBAN GAN KEBUDAYAA N	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/K ota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	353.928.000
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/K ota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	253.681.400
				Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/K ota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	21.191.000
			PROGRAM PELESTARIA N DAN PENGELOLAA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat	Penetapan Cagar Budaya	49.979.100

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			N CAGAR BUDAYA	Kabupaten/K ota		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUM AN	Pengelolaan Museum Kabupaten/K ota	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	183.736.300
			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	147.059.800
					Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	17.496.800
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	30.860.000
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/K ota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	37.700.000
					Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	52.589.000
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	5.988.800
					Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	9.963.900
					Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	9.963.900
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	199.700.000
					Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.587.964.200

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			PROGRAM PEMBERDAY AAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaa n Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	33.000.000
					Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	240.318.800
			PROGRAM PENGEMBAN GAN UMKM	Pengembanga n Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	445.130.500
			PROGRAM PENGAWASA N DAN PEMERIKSAA N KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan nya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	69.845.000
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERAS IAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasia n Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/K ota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	135.285.100
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	11.455.800
					Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	14.635.800

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				dalam satu daerah kabupaten/kota		
				pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.861.600
					Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000
					Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	11.137.800
					Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	61.523.700
2	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Peningkatan Kualitas Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	200.000.000
					Rekonstruksi Jalan	8.499.050.274
					Pemeliharaan Berkala Jalan	4.452.508.941
					Pelebaran Jalan Menuju Standar	1.999.990.758

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Pemeliharaan Rutin Jembatan	199.958.000
					Survey Kondisi Jalan/Jembatan	496.598.460
					Rehabilitasi Jalan	3.499.983.847
					Pemeliharaan Rutin Jalan	3.955.985.600
			Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan halan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.119.062.000
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4.147.453.700
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	120.390.100
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	17.151.900
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	540.939.200
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	121.981.000
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	41.483.000
					Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	88.306.000
					Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	211.962.400

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	80.201.900
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	17.910.000
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	506.682.800
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	28.245.300
				Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.750.000
					Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.506.500
			Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	100.000.000

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				Pembanguna n dan Penerbitan Izin Pembanguna n dan Pengoperasia n Pelabuhan Sungai dan Danau	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	100.000.000
					Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	37.570.000
					Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	800.053.200
			Program Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembanguna n dan Pengembanga n Kawasan Permukiman	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	49.811.600
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	311.095.000
			PROGRAM PENGEMBAN GAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/K ota	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	399.435.000
				Penerbitan Izin Pembanguna n dan Pengembanga n Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	49.993.200

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.609.735.800
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	299.973.500
					Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	15.119.386.970
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	300.000.000
					Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	225.000.000
				penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	275.000.000
					Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	40.000.000
					Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	120.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	704.603.500
					Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	444.389.000
					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	519.351.900
					Optimalisasi Sistem Penyediaan	400.342.500

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	697.780.000
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggar aan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/K ota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000
					Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	300.000.000
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN NYA	Penyelenggar aan Penataan Bangunan dan Lingkungann ya di Daerah Kabupaten/K ota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	619.000.000
			PROGRAM PENGELOLAA N DAN PENGEMBAN GAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/K ota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1.198.944.000
					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	599.504.000
					Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	449.757.000
					Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	6.398.045.000
			PROGRAM PENGELOLAA N DAN PENGEMBAN	Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Air Limbah	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	3.718.800.000

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			GAN SISTEM AIR LIMBAH	Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	800.000.000
			PROGRAM PENYELESAI AN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
			PROGRAM PENATAGUNA AN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	249.123.000
			PROGRAM PENYELENG GARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	100.000.000
					Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	199.320.700
					Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang	146.535.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Dasar	669.225.000
					Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	900.000.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	295.886.500
					Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	144.374.000
					Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	97.466.100
					Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	50.000.000

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	98.663.100
					Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	100.000.000
		Menurunnya tingkat kemiskinan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4.200.000
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	912.858.300
					Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	86.281.400
					Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	23.400.600
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	26.959.200
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.996.800
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	194.925.300
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	
					Penyediaan Permakanan	72089900
					Penyediaan Sandang	58327000
					Penyediaan Alat Bantu	55221900

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	39910100
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	44370200
					Pemberian Layanan Kedaruratan	10394400
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	20000000
					Pemberian Layanan Rujukan	20134000
3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	199.999.900
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Normalisasi/Restorasi Sungai	349.972.006
					Pembangunan Kanal Banjir	2.908.671.381
					Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	7.214.441.207
					Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	599.484.000
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2.595.551.266

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	199.999.800
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	49.999.975
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	749.999.450
				Penanggulan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	49.999.875
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	149.995.600
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	89.903.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6.000.000
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	600.000.000

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	50.000.000
					Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	3.815.439.800
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	39.999.800
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	199.995.000
					Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	99.992.100
					Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat	49.997.600

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	124.991.100
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	29.996.400
					Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	36.994.800
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAA N MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	49.999.600
			PROGRAM PENANGANA N PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	4.205.000
			PROGRAM PENANGGUL ANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	49.769.200
					Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	161.437.500

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	38.990.200
					Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	90.513.900
					Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.083.554.200
					Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	27.966.500
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	69.373.800
					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	145.090.000
				Pengendalian dan Penanggulan gan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	64.998.200
				4	Terpenuhi hanya kapasitas dan kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	724.285.000					
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	731.000.000					
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	168.000.000					
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	881.880.000					
Pengadaan Mebel Sekolah	408.950.000					

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	336.024.000
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	662.418.200
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	151.068.800
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	99.995.400
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.000.000
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15.626.600.000
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	29.992.600
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	29.110.000
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan	29.999.900
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	37.079.200
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	29.969.700
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	34.315.000
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	29.942.000
					Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	29.845.600

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	191.660.000
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	904.000.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	605.000.000
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	29.949.400
					Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	49.991.400
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.896.000.000
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.000.914.300
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	149.328.000
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	159.996.000
					Pembangunan Laboratorium	199.700.000
					Pembangunan Fasilitas Parkir	99.798.000
					Pembangunan Kantin Sekolah	149.775.000
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	430.055.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.399.877.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	49.950.100
					Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	149.775.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	199.700.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	1.500.000

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	501.002.000
					Pengadaan Mebel Sekolah	239.600.000
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	180.544.000
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	615.298.100
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	68.200.000
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	119.906.000
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	19.999.800
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	7.235.000.000
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	19.992.600
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	29.994.700
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan	29.999.900
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	29.999.900
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	24.992.800
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	19.999.400

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.992.600
					Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	30.745.200
					Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	109.994.000
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.500.000
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	29.999.900
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	174.999.900
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	594.193.000
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.313.238.000
					Pengadaan Mebel PAUD	68.907.000
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	194.390.000
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	79.712.000
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	218.378.000
					Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.200.000.000
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan	14.980.200
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	19.996.200
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan	15.335.600

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					di Bidang Pendidikan	
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	16.070.000
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	127.210.000
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	16.477.800
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	600.360.000
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	24.102.800
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	50.130.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	323.188.400
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	548.433.200
					Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	450.000.000
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	11.681.200
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	19.729.900
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	17.211.600
					Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	795.000.000

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	19.816.500
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100.006.400
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	546.302.000
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	40.150.200
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	73.990.000
					Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	29.859.200
					Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	49.175.600
					Pengadaan Mebel Sekolah	63.921.500
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	63.921.500
			PROGRAM PENGEMBAN GAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	29.997.000
					Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	44.899.400
					Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	29.997.000
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	28.662.200
					Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	20.087.800

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	79.549.000
					Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	59.799.800
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	30.072.400
					Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	34.986.100
B	Pendukung					
1	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.168.915.000

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	250.029.000
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	115.815.400
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	307.884.200

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	62.408.000
2	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	20.335.200
					Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	205.241.300
					Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	5.520.000
					Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	481.205.700
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Pengendalian , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	179.219.300
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	67.510.200
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	44.503.800

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Bidang Pemerintahan	
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	29.376.500
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	91.267.600
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	119.363.400
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	60.744.600
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	35.649.900
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	128.399.300

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	62.931.800
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	28.956.400
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	35.306.400
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	91.464.400
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	99.430.500
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	28.956.400
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	39.806.400
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	97.172.900

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Pembangunan Daerah Bidang SDA	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	69.039.600
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	29.856.400
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	39.346.400
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	96.372.300
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55.294.800
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	47.958.200
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	33.718.200

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	59.774.000
			Program penelitian dan pengembang an daerah	Penelitian dan Pengembanga n Bidang Penyelenggar aan Pemerintaha n dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	109.974.400
				Penelitian dan Pengembanga n Bidang Sosial dan Kependuduk an	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	374.019.000
				Pengembanga n Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	249.365.000
					Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	545.023.000
					Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	136.241.700
			Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Administrasi Tata Pemerintaha n	Penataan Administrasi Pemerintahan	251.606.200
					Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	26.166.200
					Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	29.250.000
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraa n Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9.186.852.800
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	89.230.000

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.623.000.000
				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	157.894.000
					Fasilitasi Bantuan Hukum	176.020.000
					Pendokumentasian Produk Hukum dan	226.453.900
					Pengelolaan Informasi Hukum	
					Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	99.998.300
			Program pengelolaan keuangan daerah	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	14.994.900
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	57.192.100
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	54.823.700
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	130.673.500
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	189.588.800
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	4.654.100
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	4.654.100
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	112.216.900

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	104.082.400
					Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	135.037.400
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	270.463.200
					Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	37.171.000
					Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	139.229.400
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	119.122.000
					Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	33.356.000
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan	86.262.000

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				Keuangan Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	42.030.400
					Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	159.999.700
					Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	76.352.900
					Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	78.293.400
					Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	103.855.900
					Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	30.703.400
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	72.472.000
					Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	97.092.943.200
					Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.000.000.000
					Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	6.825.416.750

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			Program pengelolaan barang milik daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	97.148.400
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	59.015.200
					Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	67.754.900
					Penatausahaan Barang Milik Daerah	228.522.600
					Inventarisasi Barang Milik Daerah	222.951.400
					Pengamanan Barang Milik Daerah	24.538.700
			Program pengelolaan pendapatan daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	331.000.000
					Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	68.699.000
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	178.833.200
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	274.757.500
					Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	80.860.000
					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	402.776.000
					Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	26.558.900
					Penagihan Pajak Daerah	58.880.800
					Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	28.092.900
					Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	590.632.700
			Program Penyelenggara an Pengawasan	Penyelenggar aan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	66.000.000
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	235.250.000

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Reviu Laporan Kinerja	234.120.000
					Reviu Laporan Keuangan	191.700.000
					Pengawasan Desa	187.140.000
					Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	193.682.000
				Penyelenggara an Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	109.914.000
					Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	160.230.000
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampinga n Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	134.908.000
				Pendampinga n dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	120.795.000
					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	517.523.000

5.1.1. Dukungan Pendanaan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional 3 Tahun 2025

Selain dukungan terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 juga memberikan porsi dukungan terhadap prioritas pembangunan Nasional Tahun 2025. Gambaran mengenai dukungan anggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 terhadap masing-masing prioritas pembangunan Nasional disajikan pada Tabel 5.5 berikut:

Tabel 5.5
Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2025

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak atas manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	214.613.000
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	158.886.900
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.330.576.600
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	171.685.600

N o	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	41.395.200
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	994.435.203
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan	249.238.400

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	124.005.800
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	306.270.900

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	199.986.400
					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	650.000.000
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	251.606.200
					Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	26.166.200
					Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	29.250.000
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	Optimalisasi Pengembangan Daya Saing Daerah dan Percepatan Investasi	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	49.990.600

N o	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
	g kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau , dan ekonomi biru			Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/ Kota	25.247.600
					Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	9.953.000
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	89.965.000
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	9.973.600
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	250.000.000
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	9.953.000
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi	9.868.000

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Kabupaten/ Kota	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	133.312.000
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	144.911.700
					Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	199.700.000
					Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.416.434.100
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	223.675.300
					Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	196.815.600
				Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	19.983.500

N o	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	90.005.000
					Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	111.323.000
				Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	30.468.800
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	50.246.900
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	707.138.900

N o	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	37.827.200
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.946.283.200
3	Melanjutk an Pengemba gan infrastruk tur dan meningka tkan lapangan kerja yang berkualita s, mendoron g kewirausa haan, mengemb angkan industri kreatif serta mengemb angkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Peningkatan Kualitas Infrastruktur	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Normalisasi/ Restorasi Sungai	349.972.006
					Pembanguna n Kanal Banjir	2.908.671.381
					Pembanguna n Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	7.214.441.207
					Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	599.484.000
				Pengembang an dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di	Pembanguna n Jaringan Irigasi Permukaan	2.595.551.266

N o	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	704.603.500
					Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	444.389.000
					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	519.351.900
					Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400.342.500
					Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	697.780.000
			Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	200.000.000
					Rekonstruksi Jalan	8.499.050.274
					Pemeliharaan Berkala Jalan	4.452.508.941

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Pelebaran Jalan Menuju Standar	1.999.990.758
					Pemeliharaan Rutin Jembatan	199.958.000
					Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	496.598.460
					Rehabilitasi Jalan	3.499.983.847
					Pemeliharaan Rutin Jalan	3.955.985.600
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	2.119.062.000
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4.147.453.700
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	120.390.100
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	17.151.900
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	540.939.200
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian	121.981.000

N o	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Berkala Kendaraan Bermotor	
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	41.483.000
					Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	88.306.000
					Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapa n Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	211.962.40 0
					Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	80.201.900
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	17.910.000
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau	506.682.80 0

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	28.245.300
				Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	29.750.000
					Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	32.506.500
		Optimalisasi Pengembangan Daya Saing Daerah dan Percepatan Investasi	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	32.999.900
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	428.300.000

N o	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
					Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	244.970.800
			Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	11.455.800
					Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	14.635.800
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	55.861.600

N o	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	55.000.000
					Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	11.137.800
					Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	61.523.700
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	69.845.000
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta	135.285.100

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	33.000.000
					Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	240.318.800
			Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	445.130.500
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	150.000.000
					Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	99.999.600
					Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50.000.000

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	150.000.000
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	7.034.000
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	499.591.900
4	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan gen z), dan peyandang disabilitas	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	662.418.200
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	99.995.400
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.000.000
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	29.110.000
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan	29.999.900
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan	29.942.000

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Tenaga Kependidikan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	615.298.100
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	119.906.000
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	19.999.800
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	29.994.700
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan	29.999.900
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.992.600
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	79.712.000
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	218.378.000
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	14.980.200
					Fasilitasi Komunitas	16.477.800

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	19.729.900
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	17.211.600
			Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	29.997.000
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	20.087.800
			Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	30.072.400
					Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	34.986.100

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	115.904.400
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/ Kota	78.190.700
		Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	59.998.000
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	73.500.000
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	245.000.000

N o	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	184.738.400
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	999.999.700
			Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	912.858.300
					Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	86.281.400
					Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	23.400.600
			Program Perlindungan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	44.200.000

N o	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Kabupaten/ Kota	
			Program Perlindungan Khusus Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ kabupaten/	88.400.000
5	Melanjutk an hilirisasi dan mengemb angkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningka tkan nilai tambah di dalam negeri	Optimalisasi Pengembangan Daya Saing Daerah dan Percepatan Investasi	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	78.766.700
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustria n yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota	3.810.700
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Pemutakhira n data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	64.698.000
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem	438.309.60 0

N o	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
					Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	30.630.000
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	97.618.000
					Pengawasan Penanaman Modal	185.241.000
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	15.946.600
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	27.255.600

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota		
			Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	293.197.200
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	44.096.600
			Program Pemberdayaan Sosial	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4.200.000
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	912.858.300
					Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	86.281.400
					Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan	23.400.600

N o	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	n Keluarga (LK3)	
					Penyediaan Permakanan	72.089.900
					Penyediaan Sandang	58.327.000
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Alat Bantu	55.221.900
					Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	5.996.800
			Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	194.925.300
					Penyediaan Makanan	69.456.600
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	157.894.000
					Fasilitasi Bantuan Hukum	176.020.000
					Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan	226.453.900

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
	korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Informasi Hukum	
					Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	107.902.900
					Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	128.744.400
					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	115.223.400
					Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	59.073.900
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	27.383.400
					Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	92.789.200
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	29.983.200
					Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan	24.982.100

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Peraturan Kepala daerah	
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	362.841.800
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	235.250.000
					Pengawasan Desa	187.140.000
					Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	193.682.000
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	517.523.000
8	Memperkuat penyelarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam, dan budaya serta	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak	49.999.600

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
	peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur				MHA Terkait dengan PPLH	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	199.995.000
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	99.992.100
			Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota	4.205.000
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.000.000
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	9.186.852.800
						150.900.000

N o	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Kepercayaan di Daerah	

5.1.1.4 Pendanaan Perangkat Daerah (PD) dalam RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

Pada sub bab ini disampaikan besaran pendanaan dalam bentuk pagu indikatif pada setiap Perangkat Daerah (PD) dan dukungan pendanaan terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur tahun 2025. Seluruh rencana program prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 disediakan pendanaan dalam bentuk pagu indikatif yaitu batasan anggaran yang diberikan kepada masing-masing PD untuk merencanakan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Penentuan pagu indikatif tidak lagi menggunakan pendekatan “*money follow function*”, tetapi menggunakan pendekatan “*money follow priority programme*”. Pagu indikatif masing-masing PD dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 sebagaimana dijelaskan dalam tabel 5.6

Tabel 5.6
Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	KODE SKPD	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	1.01.4.01.0.00.01.0 000	Dinas Pendidikan	4	8	107	48.798.123.900
2	1.02.0.00.0.00.03.0 000	Dinas Kesehatan	4	11	52	48.561.989.480
3	1.03.2.10.1.04.01.0 000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15	22	52	78.272.737.110
4	1.05.0.00.0.00.02.0 000	Satuan Polisi Pamong Praja	2	4	30	1.199.081.700
5	1.05.0.00.0.00.04.0 000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	4	22	2.109.909.100
6	1.06.2.08.0.00.08.0 000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	18	27	3.126.653.000
7	2.07.2.17.0.00.06.0 000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10	11	21	1.839.464.800
8	2.09.3.27.0.00.02.0 000	Dinas Pertanian dan Pangan	10	19	32	4.919.043.300
9	2.11.0.00.0.00.01.0 000	Dinas Lingkungan Hidup	10	12	20	6.597.508.800
10	2.12.0.00.0.00.01.0 000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	6	10	511.250.600

NO	KODE SKPD	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
11	2.13.2.14.0.00.01.0 000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	10	34	5.198.080.600
12	2.15.0.00.0.00.01.0 000	Dinas Perhubungan	2	10	20	9.141.649.000
13	2.16.2.20.2.21.04.0 000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4	6	25	4.269.308.150
14	2.18.0.00.0.00.13.0 000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	6	9	1.457.845.000
15	2.19.0.00.0.00.01.0 000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	3	8	24	8.961.598.005
16	2.22.3.26.0.00.03.0 000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8	13	27	7.618.485.700
17	2.23.2.24.0.00.02.0 000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	9	15	785.450.600
18	3.25.0.00.0.00.01.0 000	Dinas Perikanan	4	12	27	8.513.706.300
19	3.31.3.30.0.00.14.0 000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8	10	21	2.749.757.900
20	4.01.0.00.0.00.01.0 000	Sekretariat Daerah	2	8	21	13.497.568.500
21	4.02.0.00.0.00.01.0 000	Sekretariat DPRD	1	6	28	21.758.890.100
22	5.01.5.05.0.00.02.0 000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	9	35	3.798.345.000

NO	KODE SKPD	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
23	5.02.0.00.0.00.01.0 000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	3	6	41	109.701.616.450
24	5.03.5.04.0.00.01.0 000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	6	18	3.842.159.200
25	6.01.0.00.0.00.01.0 000	Inspektorat	2	4	11	2.151.262.000
26	7.01.0.00.0.00.01.0 000	Kecamatan Manggar	5	6	9	627.029.300
27	7.01.0.00.0.00.02.0 000	Kecamatan Gantung	5	6	6	763.612.700
28	7.01.0.00.0.00.03.0 000	Kecamatan Kelapa Kampit	5	6	12	413.211.400
29	7.01.0.00.0.00.04.0 000	Kecamatan Simpang Pesak	5	6	8	441.274.200
30	7.01.0.00.0.00.05.0 000	Kecamatan Damar	5	6	9	553.850.300
31	7.01.0.00.0.00.06.0 000	Kecamatan Simpang Renggang	5	6	11	606.511.300
32	7.01.0.00.0.00.07.0 000	Kecamatan Dendang	5	8	11	466.643.900
33	8.01.0.00.0.00.01.0 000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	5	23	7.881.081.703
			166	287	818	411.134.699.098

5.2.RUMUSAN USULAN HASIL PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Tabel 5. 7 Rumusan Usulan Hasil Penelahaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
1	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Belum diaspal jalan Tempat Pemakaman Umum Desa Air Madu RT.05 Kecamatan Simpang Renggang	pengaspalan jalan Tempat Pemakaman Umum Desa Air Madu RT.05 Kecamatan Simpang Renggang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Rt 5 05 Desa Air Madu Kec. Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARMINTON	Verifikasi Perangkat Daerah
2	Distribusi barang pokok dan penting (Bapokting) yang masih bergantung pada kabupaten lain membuat variasi harga yang fluktuatif tidak bisa diintervensi,	harga-harga pokok yang terus naik harap distabilkan	harga-harga pokok yang terus naik harap distabilkan pasar LIPAT KAJANG. MANGGAR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	pasar LIPAT KAJANG. MANGGAR, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi TAPD
3	belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam melakukan kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan bagi pemuda	Adanya pelatihan karang taruna di Kecamatan Simpang Pesak.	Adanya pelatihan karang taruna di Kecamatan Simpang Pesak.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Kecamatan Simpang Pesak, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi TAPD
4	Kurang optimalnya pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga,Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan,Kearsi	Adanya pelatihan kepemudaan dalam bidang olahraga di Desa Lilangan	Adanya pelatihan kepemudaan dalam bidang olahraga di Desa Lilangan, Zulkipli, 51 Tahun, Desa Lilangan Kecamatan Gantung	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi usulan tersebut sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Zulkipli, 51 Tahun, Desa Lilangan Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	pan, Trantibum Linmas								
5	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Adanya pengadaan racun binatang buas seperti: racun anjing, kera dan babi.	Adanya pengadaan racun binatang buas seperti: racun anjing, kera dan babi. Dusun Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
6	Optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan yang profesional dan komprehensif	agar pelayanan kesehatan untuk pasien yang di rujuk dari puskesmas ke rumah sakit lebih diperbaiki lagi, menunggu jangan terlalu lama, serta diprioritaskan untuk ibu mau melahirkan	agar pelayanan kesehatan untuk pasien yang di rujuk dari puskesmas ke rumah sakit lebih diperbaiki lagi, menunggu jangan terlalu lama, serta diprioritaskan untuk ibu mau melahirkan kecamatan Dendang	Dinas Kesehatan	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	desa Jangkang, Kecamatan Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi TAPD
7	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan	Bantuan air bersih ketika musim kemarau	Bantuan air bersih ketika musim kemarau Dusun Air Nangka. Desa Balik. Dendang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Air Nangka. Desa Balik. Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa								
8	Kurang optimalnya pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga,Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan,Kearsipan, Trantibum Linmas	Bantuan alat alat kesenian tradisional jawa	Bantuan alat alat kesenian tradisional jawa Dusun Sidorejo simpang Pesak	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Verifikasi usulan tersebut sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Dusun Sidorejo simpang Pesak , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MARWAN	Verifikasi Perangkat Daerah
9	Rendahnya Kualitas prasarana pendukung kegiatan perikanan tangkap (Pemeliharaan Shelter Nelayan)	Bantuan alat untuk menangkap ikan dari laut	Bantuan alat untuk menangkap ikan dari laut Dusun Selindang Desa Senyubuk Kec Kelapa Kampit	Dinas Perikanan	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan	Dusun Selindang Desa Senyubuk Kec Kelapa Kampit , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi TAPD
10	Pembangunan, peningkatan,rehabilitasi, pemeliharaan tanggul/Talud, saluran Pembuangan utama menuju Sungai dan normalisasi pada daerah/Kawasan yang terdampak luapan, Pasang Surut,erosi Sungai	Bantuan bandar di Dusun Sekip Rt.06/02 Desa Lalang	Bantuan bandar di Dusun Sekip Rt.06/02 Desa Lalang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Sekip Rt.06/02 Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	dan pendangkalan sungai/anak Sungai								
11	Rendahnya Kualitas prasarana pendukung kegiatan perikanan tangkap (Pemeliharaan Shelter Nelayan)	Bantuan berupa alat tangkap kepiting/bubu kepiting	Bantuan berupa alat tangkap kepiting/bubu kepiting Dusun Gusong Lantai Desa Tanjung Batu Itam	Dinas Perikanan	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan	Dusun Gusong Lantai Desa Tanjung Batu Itam , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MARWAN	Verifikasi TAPD
12	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Bantuan berupa bibit sawit 500 biji dan pupuk di desa Aik Kelik	Bantuan berupa bibit sawit 500 biji dan pupuk di desa Aik Kelik	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Desa Aik kelik kec. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
13	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Bantuan berupa pupuk dan bibit cabai, kacang tanah, jagung, bawang dan mentimun untuk Sesa mepayak	Bantuan berupa pupuk dan bibit cabai, kacang tanah, jagung, bawang dan mentimun untuk Desa mepayak	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan	Desa Mepayak Kec Damar , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
14	Masih rendahnya kemampuan peternak untuk meningkatkan kapasitas usahanya	Bantuan bibit ayam boiler bagi peternak serta pakan, karena selama ini tidak ada perhatian dari dinas terkait	Bantuan bibit ayam boiler bagi peternak serta pakan, karena selama ini tidak ada perhatian dari dinas terkait Dusun Lintang Desa Lintang kec Simpang Renggang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan	Dusun Lintang Desa Lintang kec Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
15	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Bantuan bibit cabe sebanyak 100 bibit	Bantuan bibit cabe sebanyak 100 bibit A.n Sulastri, Ds Lilangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Sulastri, Ds Lilangan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
16	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	bantuan bibit durian dan bibit sawit untuk petani di Desa Aik Madu	Mohon bantuan bibit durian dan bibit sawit untuk petani di Desa Aik Madu Kec. Simpang Renggang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut	Desa Aik Madu Kec. simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARMINTON	Verifikasi Perangkat Daerah
17	Minimnya Pemanfaatan Lahan Pekarangan, Lahan Kosong, Eks Tambang dan lahan lainnya yang tidak termanfaatkan Mendukung Ketahanan Pangan melalui Budidaya Ikan	Bantuan bibit ikan darat dan bibit ikan laut serta bantuan penambahan sarana prasarana untuk tambak ikan dan fasilitas lainnya	Bantuan bibit ikan darat dan bibit ikan laut serta bantuan penambahan sarana prasarana untuk tambak ikan dan fasilitas lainnya Kelompok budidaya ikan desa tanjung kelumpang	Dinas Perikanan	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan	Kelompok budidaya ikan desa tanjung kelumpang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MARWAN	Verifikasi TAPD
18	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Bantuan Bibit Jagung 100, Kangkung 100	Bantuan Bibit Jagung 100, Kangkung 100 A.n Hayati, 52 Tahun , Dusun Air Madu II Desa Air Madu	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Hayati, 52 Tahun , Dusun Air Madu II Desa Air Madu , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
19	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Bantuan bibit kacang panjang, mentimun serta pupuk	Bantuan bibit kacang panjang, mentimun serta pupuk usun Gusong Lantai Desa Tanjung Batu Itam	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Gusong Lantai Desa Tanjung Batu Itam , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MARWAN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
20	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Bantuan bibit kelapa hibrida dan pestisida	Bantuan bibit kelapa hibrida dan pestisida Dusun Gusong Lantai Desa Tanjung Batu Itam	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Gusong Lantai Desa Tanjung Batu Itam , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MARWAN	Verifikasi Perangkat Daerah
21	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Bantuan Bibit Lada	Bantuan Bibit Lada A.n Syamsidi Jamal, 64 tahun, Petani/Ketua Kelompok Tani Karya Mandiri RT.11 Dusun Libut Desa Sukamandi Kecamatan Damar	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Syamsidi Jamal, 64 tahun, Petani/Ketua Kelompok Tani Karya Mandiri RT.11 Dusun Libut Desa Sukamandi Kecamatan Damar , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
22	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	bantuan bibit sawi 50 bibit, cabe 50 bibit, jagung 50 bibit, terong ungu 50 bibit	bantuan bibit sawi 50 bibit, cabe 50 bibit, jagung 50 bibit, terong ungu 50 bibit Asran, 73 Tahun, Petani, Dusun Air Madu II Desa Air Madu	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Asran, 73 Tahun, Petani, Dusun Air Madu II Desa Air Madu , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
23	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	bantuan bibit sawi 50 bibit, Cabe 50 Bibit, terong ungu 50 bibit	bantuan bibit sawi 50 bibit, Cabe 50 Bibit, terong ungu 50 bibit A.n Hayati, 52 Tahun Dusun Air Madu II Desa Air Madu	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Hayati, 52 Tahun Dusun Air Madu II Desa Air Madu , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
24	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Bantuan bibit sawi sebanyak 100 bibit, kangkung 100 Bibit	Bantuan bibit sawi sebanyak 100 bibit, kangkung 100 Bibit A.n Sulastri, Ds Lilangan Kec gantung	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Sulastri, Ds Lilangan Kec gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
25	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Bantuan Bibit sawi sebanyak 50 bibit, Bibit Jagung 50, Bibit Kangkung 50, Bibit Cabe 50	Bantuan Bibit sawi sebanyak 50 bibit, Bibit Jagung 50, Bibit Kangkung 50, Bibit Cabe 50 A.n Toni, 30 Tahun, Buruh Harian RT.02 Dusun Limbongan, Ds Limbungan	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Toni, 30 Tahun, Buruh Harian RT.02 Dusun Limbongan, Ds Limbongan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
26	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Bantuan bibit sawit sebanyak 50 bibit	Bantuan bibit sawit sebanyak 50 bibit A.n Toni, 30 Tahun, Buruh Harian (RT.02 Dusun Limbongan)	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Toni, 30 Tahun, Buruh Harian (RT.02 Dusun Limbongan), Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
27	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Bantuan bibit sayuran dan pupuk	Bantuan bibit sayuran dan pupuk Dusun Sidorejo Rt.14 Desa Simpang Pesak	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Sidorejo Rt.14 Desa Simpang Pesak, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MARWAN	Verifikasi Perangkat Daerah
28	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Bantuan Bibit Tanaman	Bantuan Bibit Tanaman a.n Agustono, Dsn Sukadamai, Ds Mengkubang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk pembahasan lebih lanjut	Agustono, Dsn Sukadamai, Ds Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
29	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Bantuan Bibit tanaman	Bantuan Bibit tanaman, Samsudin, Dsn Kebun Sayor RT 07, Ds Mengkubang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk pembahasan lebih lanjut	Samsudin, Dsn Kebun Sayor RT 07, Ds Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
30	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	bantuan bibit tanaman untuk petani	bantuan bibit tanaman untuk petani Dusun II RT 06. Desa Dukong. Simpang pesak	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	Dusun II RT 06. Desa Dukong. Simpang pesak, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
31	Masih Belum meratanya distribusi ternak sapi di Kabupaten Belitung Timur dan perlu ditingkatkan	Bantuan bibit ternak sapi di Dusun Ban Motor Desa Lalang Manggar	Bantuan bibit ternak sapi di Dusun Ban Motor Desa Lalang Manggar	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Ban Motor Desa Lalang Manggar , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
32	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Bantuan Bibit Ubi Jalar	Bantuan Bibit Ubi Jalar, Wawa, Dsn Damar Ds Mengkubang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk pembahasan lebih lanjut	Wawa, Dsn Damar Ds Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
33	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	bantuan bibitkopi, kakao, dan sayuran, cabe	bantuan bibit kopi, kakao, dan sayuran, cabe, desa Aik Madu, Simpang Renggang	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	desa Aik Madu, Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi Perangkat Daerah
34	Belum optimalnya pembudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	Bantuan bola volly dan lampu di lapangan volly	Bantuan bola volly dan lampu di lapangan volly Dusun Gusong Lantai Desa Tanjung Batu Itam	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Dusun Gusong Lantai Desa Tanjung Batu Itam , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MARWAN	Verifikasi Perangkat Daerah
35	Rendahnya Kualitas prasarana pendukung kegiatan perikanan tangkap (Pemeliharaan Shelter Nelayan)	Bantuan Bubu Tangkapan Jaring Ikan	Bantuan Bubu Tangkapan Jaring Ikan Desa Air Kelik	Dinas Perikanan	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	Desa Air Kelik, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi TAPD
36	Belum optimalnya pembudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	Bantuan dana ke sanggar seni Cilokak Putra Sasak	Bantuan dana ke sanggar seni Cilokak Putra Sasak Jalan Koperasi. Desa Pembaharuan. Kelapa Kampit	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Jalan Koperasi. Desa Pembaharuan. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	YOHENDRA	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
37	Belum optimalnya pembudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	Bantuan dana untuk kemajuan kesenian Langgeng Budoyo	Bantuan dana untuk kemajuan kesenian Langgeng Budoyo Desa Senyubuk. Kelapa Kampit	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Desa Senyubuk. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	YOHENDRA	Verifikasi TAPD
38	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bantuan jalan setapak Dusun Sawah Rt.04 sepanjang kurleb 90 meter dengan status lahan sudah C&C dan sudah diusulkan 5 tahun berturut turut	Bantuan jalan setapak Dusun Sawah Rt.04 sepanjang kurleb 90 meter dengan status lahan sudah C&C dan sudah diusulkan 5 tahun berturut turut	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Sawah Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
39	Masih rendahnya kemampuan peternak untuk meningkatkan kapasitas usahanya	Bantuan kandang untuk peternakan ayam kampung	Bantuan kandang untuk peternakan ayam kampung Desa Lintang Simpang Renggang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Desa Lintang Simpang Renggang , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
40	belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam melakukan kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan bagi pemuda	Bantuan laptop untuk kegiatan PKBM bina tarun kecamatan Dendang	Bantuan laptop untuk kegiatan PKBM bina tarun kecamatan Dendang	Dinas Pendidikan	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Kecamatan Dendang , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MARWAN	Verifikasi Perangkat Daerah
41	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan standar yang dianjurkan	Bantuan MCK di Desa Lintang sebanyak 1 unit	Bantuan MCK di Desa Lintang sebanyak 1 unit Zukiyati, 60 Tahun, Ibu Rumah Tangga (Desa Lintang)	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Zukiyati, 60 Tahun, Ibu Rumah Tangga (Desa Lintang) , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
42	Rendahnya Kualitas prasarana pendukung kegiatan perikanan tangkap (Pemeliharaan Shelter Nelayan)	Bantuan mesin nelayan dan perahu bagi nelayan kurang mampu	Bantuan mesin nelayan dan perahu bagi nelayan kurang mampu Desa Aik Kelik	Dinas Perikanan	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	Air Kelik, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi TAPD
43	Masih Belum Optimalnya Pengelolaan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM	Bantuan modal usaha untuk pembuatan pabrik rak telur kertas.	Bantuan modal usaha untuk pembuatan pabrik rak telur kertas. Desa Lalang Jaya	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan	Desa Lalang Jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
44	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Bantuan Obat-obatan dan Racun Rumput	Bantuan Obat-obatan dan Racun Rumput a.n Agustono, Dsn Sukadamai, Ds Mengkubang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk pembahasan lebih lanjut	Agustono, Dsn Sukadamai, Ds Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
45	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Bantuan pemasangan Speed bump/polisi tidur di beberapa desa agar orang-orang yang suka naik motor bisa memperlambat laju motornya agar tidak membahayakan orang lain.	Bantuan pemasangan Speed bump/polisi tidur di beberapa desa agar orang-orang yang suka naik motor bisa memperlambat laju motornya agar tidak membahayakan orang lain. Dusun Gunung Desa Lalang Jaya Manggar	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Gunung Desa Lalang Jaya Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi TAPD
46	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Bantuan pembasmian hama seperti racun rumput	Bantuan pembasmian hama seperti racun rumput Desa Mempayak Kec. Damar	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Desa Mempayak Kec. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
47	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Bantuan pembuatan drainase di Dusun Sawah Rt.01 Desa Lalang	Bantuan pembuatan drainase di Dusun Sawah Rt.01 Desa Lalang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Sawah Rt.01 Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
48	Belum optimalnya kebudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	Bantuan pembuatan Gor mini di Desa Mempayak	Bantuan pembuatan Gor mini di Desa Mempayak	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Desa Mempayak Kec. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
49	Pembangunan Jalan dan Jembatan	bantuan pembuatan jalan setapak antara dusun Gunung dengan Dusun Gajah Mada	Pembuatan jalan setapak antara dusun Gunung dengan Dusun Gajah Mada Desa Mekar Jaya Kecamatan Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan Diteruskan ke OPD Teknis	Dusun Gajah mada Desa Mekar Jaya Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah
50	Daerah/Kawasan Permukiman yang Terjadi abrasi(pengikisan tanah pada daerah pesisir pantai yang diakibatkan oleh ombak dan arus laut) atau Rawan akresi akibat sedimentasi dari daratan atau	Bantuan pemecah gelombang di pantai tebing Dusun Ban Motor	Bantuan pemecah gelombang di pantai tebing Dusun Ban Motor	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Ban Motor Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	sungai menuju arah laut								
51	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Bantuan penambahan tower Pamsimas di Dusun Durian Rt.02 yang masih kurang untuk penyaluran ke warga karena alirannya 1 jam ke Rt.01 dan 1 jam kemudian ke Rt.03	Bantuan penambahan tower Pamsimas di Dusun Durian Rt.02 yang masih kurang untuk penyaluran ke warga karena alirannya 1 jam ke Rt.01 dan 1 jam kemudian ke Rt.03	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Durian Rt.02 Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
52	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bantuan pengaspalan jalan dari jalan raya ke sekolah SMPN 1 Manggar yang masih tanah merah	Bantuan pengaspalan jalan dari jalan raya ke sekolah SMPN 1 Manggar yang masih tanah merah	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
53	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bantuan pengaspalan jalan di Rt.03 Dusun Ban Motor (samping rumah bapak Sariman)	Bantuan pengaspalan jalan di Rt.03 Dusun Ban Motor (samping rumah bapak Sariman)	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Ban Motor Rt.03 Desa Lalang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
54	masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang layak di destinasi wisata, perlunya perbaikan sarana dan prasarana yang rusak dan kurang layak di destinasi wisata dan masih perlunya pengembangan objek wisata baru sebagai alternatif pilihan berwisata	Bantuan pennerangan/lampu di pantai desa lalang (pantai nyiur melambai)	Bantuan pennerangan/lampu di pantai desa lalang (pantai nyiur melambai) Desa Lalang MANGGAR	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Desa Lalang MANGGAR , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi TAPD
55	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Bantuan peralatan dan bahan untuk lomba Toga KWT Karya Baru seperti pupuk, pplibek, tanah humus, bibit sayuran	Bantuan peralatan dan bahan untuk lomba Toga KWT Karya Baru seperti pupuk, pplibek, tanah humus, bibit sayuran	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Mempayak 2 Desa Mempayak kec. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYA H, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
56	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Bantuan peralatan pertanian seperti traktor dan arco	Bantuan peralatan pertanian seperti traktor dan arco Desa Mempayak kec. Damar	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Desa Mempayak kec. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYA H, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
57	Belum optimalnya pembudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	Bantuan peralatan untuk olahraga Volly seperti bola, net, seragam/baju club	Bantuan peralatan untuk olahraga Volly seperti bola, net, seragam/baju club	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Desa Mempayak Kec. Damar , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYA H, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
58	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Bantuan perbaikan jalan setapak didusun durian Rt.01 Desa Lalang sepanjang 80 meter dan talut disepanjang jalan tersebut	Bantuan perbaikan jalan setapak didusun durian Rt.01 Desa Lalang sepanjang 80 meter dan talut disepanjang jalan tersebut	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Durian Rt.01 Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
59	Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru Terhadap Rumah Tidak Layak Huni guna Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	bantuan perbaikan rumah	bantuan perbaikan rumah Dusun Baru Utara II, Desa Baru. MANGGAR	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Dusun Baru Utara II, Desa Baru. MANGGAR, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi Perangkat Daerah
60	Data penerima bantuan sosial yang tidak update dan lengkap	bantuan PKH Kartu Merah agar lebih merata dan tepat sasaran	bantuan PKH Kartu Merah agar lebih merata dan tepat sasaran Minapolitan, Desa Kurnia Jaya. Manggar	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Minapolitan, Desa Kurnia Jaya. Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah
61	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Bantuan Pupuk	Bantuan Pupuk, Samsudin, Dsn Kebun Sayor RT 07, Ds Mengkubang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk pembahasan lebih lanjut	Samsudin, Dsn Kebun Sayor RT 07, Ds Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
62	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Bantuan Pupuk	Bantuan Pupuk, Wawan, Dsn Damar, Ds Mengkubang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk pembahasan lebih lanjut	Wawan, Dsn Damar, Ds Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
63	Masih kurangnya ketersediaan pupuk di tingkat petani perkebunan	Bantuan pupuk bersubsidi di Dusun Air Madu Desa Air Madu Kecamatan Simpang Renggang	Bantuan pupuk bersubsidi di Dusun Air Madu Desa Air Madu Kecamatan Simpang Renggang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Asrul, 63 Tahun, Buruh Harian Lepas (RT.01 RW.02 Dusun Air Madu Desa Air Madu), Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
64	Masih kurangnya ketersediaan pupuk di tingkat petani perkebunan	Bantuan pupuk bersubsidi untuk kelompok tani di Dusun Renggang; Kelompok Tani Air Teras.	Bantuan pupuk bersubsidi untuk kelompok tani di Dusun Renggang; Kelompok Tani Air Teras.	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dsn Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
65	Masih kurangnya ketersediaan pupuk di tingkat petani perkebunan	Bantuan pupuk bersubsidi untuk kelompok tani di Dusun Renggang; Kelompok Tani Harapan Tani	Bantuan pupuk bersubsidi untuk kelompok tani di Dusun Renggang; Kelompok Tani Harapan Tani	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
66	Masih kurangnya ketersediaan pupuk di tingkat petani perkebunan	Bantuan pupuk bersubsidi untuk kelompok tani di Dusun Renggang; Kelompok Tani Sejahtera	Bantuan pupuk bersubsidi untuk kelompok tani di Dusun Renggang; Kelompok Tani Sejahtera	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
67	Masih kurangnya ketersediaan pupuk di tingkat petani perkebunan	Bantuan pupuk bersubsidi untuk kelompok tani di Dusun Renggang; Kelompok Tani Sidomulya	Bantuan pupuk bersubsidi untuk kelompok tani di Dusun Renggang; Kelompok Tani Sidomulya	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dsn Renggang, Ds Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
68	Masih kurangnya ketersediaan pupuk di tingkat petani perkebunan	Bantuan pupuk bersubsidi untuk petani lada.	Bantuan pupuk bersubsidi untuk petani lada. Marjono, Buruh Harian (Dusun Semalar Desa Dendang Kecamatan Dendang)	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Marjono, Buruh Harian (Dusun Semalar Desa Dendang Kecamatan Dendang), Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
69	Tidak tersedianya pupuk subsidi untuk komoditi perkebunan	Bantuan pupuk bersubsidi untuk petani yang tidak mampu di Desa Lilangan.	Bantuan pupuk bersubsidi untuk petani yang tidak mampu di Desa Lilangan.	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk dibahas lebih lanjut	Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
70	Masih kurangnya ketersediaan pupuk di tingkat petani perkebunan	Bantuan pupuk bersubsidi untuk petani yang tidak mampu di Dusun Air Selumar Desa Lintang	Bantuan pupuk bersubsidi untuk petani yang tidak mampu di Dusun Air Selumar Desa Lintang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Air Selumar Desa Lintang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
71	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	bantuan pupuk dan bibit kakao, cabe, dan sayuran	bantuan pupuk dan bibit kakao, cabe, dan sayuran Desa Aik Madu, Simpang Renggang	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	Desa Aik Madu, Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi Perangkat Daerah
72	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	bantuan pupuk dan bibit tanaman	Bantuan pupuk dan bibit tanaman Dusun Cemara II, Desa Kurnia Jaya	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	Dusun Cemara II, Desa Kurnia Jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi Perangkat Daerah
73	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Bantuan Pupuk Kimia bagi petani	Bantuan Pupuk Kimia bagi petani, Vopi Ansyah, Dsn Garumedang, Ds Sukamandi	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk pembahasan lebih lanjut	Vopi Ansyah, Dsn Garumedang, Ds Sukamandi, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
74	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Bantuan Pupuk Subsidi	Bantuan Pupuk Subsidi A.n Sudarno, Dsn Libut Ds Sukamandi	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk pembahasan lebih lanjut	Sudarno, Dsn Libut Ds Sukamandi, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
75	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Bantuan pupuk subsidi bagi petani	Bantuan pupuk subsidi bagi petani Dusun Limbongan II, RT.06 .Desa Limbongan	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk pembahasan lebih lanjut	Dusun Limbongan II, RT.06 .Desa Limbongan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah
76	Tidak tersedianya pupuk subsidi untuk komoditi perkebunan	bantuan pupuk subsidi bagi petani kebun sawit	bantuan pupuk subsidi bagi petani kebun sawit Dsn II, RT.06. Desa Dukong. Simpang Pesak	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	Dsn II, RT.06. Desa Dukong. Simpang Pesak, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah
77	Masih kurangnya ketersediaan pupuk di tingkat petani perkebunan	Bantuan pupuk subsidi sebanyak 2 karung	Bantuan pupuk subsidi sebanyak 2 karung A.n Hayati, 52 Tahun (Dusun Air Madu II Desa Air Madu)	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Hayati, 52 Tahun (Dusun Air Madu II Desa Air Madu) , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
78	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Bantuan pupuk subsidi untuk petani tidak mampu. untuk kelompok tani Karya Mandiri	Bantuan pupuk subsidi untuk petani tidak mampu. untuk kelompok tani Karya Mandiri A.n Syamsidi Jamal (Ketua Kelompok Tani Karya Mandiri) , Dsn Libut RT 11 Ds Sukamandi	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, mohon dilengkapi dengan data dukung	Syamsidi Jamal (Ketua Kelompok Tani Karya Mandiri) , Dsn Libut RT 11 Ds Sukamandi, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
79	Tidak tersedianya pupuk subsidi untuk komoditi perkebunan	bantuan pupuk untuk petani kebun sawit, lada dan sayuran	bantuan pupuk untuk petani kebun sawit, lada dan sayuran Desa Limbongan, Gantung	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	Desa Limbongan, Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah
80	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Bantuan racin rumput dan bibit tanaman cabai	Bantuan racun rumput dan bibit tanaman cabai Dusun Gusong Lantai Desa Tanjung Batu Itam	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Gusong Lantai Desa Tanjung Batu Itam , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MARWAN	Verifikasi Perangkat Daerah
81	Masih adanya sarana & prasarana rumah ibadah yang perlu ditingkatkan	Bantuan rehab Mushola	Bantuan rehab Mushola RT. 12 Gunong Nayo. Desa Air Kelik. Damar	Sekretariat Daerah	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta lengkapi proposal usulan	RT. 12 Gunong Nayo. Desa Air Kelik. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARJANTO JOHANNES , SH	Verifikasi TAPD
82	Masih adanya lingkungan hunian dan permukiman yang belum didukung Prasarana, sarana dan utilitas secara memadai	Bantuan sarana prasarana untuk poskamlingdi Rt.02 Dusun Sekip Desa Lalang	Bantuan sarana prasarana untuk poskamlingdi Rt.02 Dusun Sekip Desa Lalang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Sekip Rt.02 Desa Lalang Manggar , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
83	Masih adanya sarana & prasarana PAUD yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Bantuan sarpras sekolah PAUD seperti permainan luar seperti ayunan dll di PAUD Melati Putih	Bantuan sarpras sekolah PAUD seperti permainan luar seperti ayunan dll di PAUD Melati Putih Dusun Mempayak Kec. Damar	Dinas Pendidikan	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Dusun Mempayak Kec. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
84	Masih adanya kelompok tani yang belum mendapatkan sekolah lapang	Bantuan tenaga ahli di bidang pertanian untuk mengelola pupuk organik	Bantuan tenaga ahli di bidang pertanian untuk mengelola pupuk organik Desa Lintang Simpang Renggang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Desa Lintang Simpang Renggang , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
85	Belum Optimalnya Penataan Kelembagaan bagi Koperasi dan UMKM	Bantuan UMKM yang belum tepat sasaran	Bantuan UMKM yang belum tepat sasaran Ketua Rt.06 Dusun Sekip Desa Lalang	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk dibahas lebih lanjut	Ketua Rt.06 Dusun Sekip Desa Lalang , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi TAPD
86	Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru Terhadap Rumah Tidak Layak Huni guna Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Bantuan untuk atap rumah bocor	Bantuan untuk atap rumah bocor Zainal Bin Talip, Jl Air Sepat Dsn Kebun Sayor RT 07 Ds Mengkubang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Zainal Bin Talip, Jl Air Sepat Dsn Kebun Sayor RT 07 Ds Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
87	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Bantuan untuk mengatasi air PAM di Dusun Sekip Rt.02/01 kolam matini ar terasa asin	Bantuan untuk mengatasi air PAM di Dusun Sekip Rt.02/01 kolam matini ar terasa asin	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Sekip Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
88	Rendahnya pengetahuan dan manajemen usaha olahan ikan (Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan dan Pendampingan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan)	Bantuan untuk nelayan mohon disesuaikan dengan kebutuhan tiap nelayan dan untuk pelatihan nelayan di Desa Lalang Jaya mohon untuk digiatkan lagi karena mengingat pentingnya pelatihan agar nelayan bisa bekerja dengan maksimal.	Bantuan untuk nelayan mohon disesuaikan dengan kebutuhan tiap nelayan dan untuk pelatihan nelayan di Desa Lalang Jaya mohon untuk digiatkan lagi karena mengingat pentingnya pelatihan agar nelayan bisa bekerja dengan maksimal. Dusun Gunung Desa Lalang Jaya	Dinas Perikanan	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan	Dusun Gunung Desa Lalang Jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi TAPD
89	Masih Belum Optimalnya SDM dalam kepengurusan koperasi dan pengelolaan UMKM	bantuan usaha, dan pelatihan bagi umkm	bantuan usaha, dan pelatihan bagi umkm desa Dukong, Kec Simpang Pesak	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk pembahasan lebih lanjut	desa Dukong, Kec Simpang Pesak, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi TAPD
90	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan standar yang dianjurkan	bantuan wc umum bagi warga	bantuan wc umum bagi warga RT.04 DUSUN SEBERANG, DESA SELINSING	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	RT.04 DUSUN SEBERANG, DESA SELINSING, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah
91	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Banyak jalan yang sudah rusak di Kec. Simoang Renggiang	Rehabilitasi jalan yang sudah rusak Desa Renggiang, Desa Aik Madu dan Desa Simpang Tige di Kec. Simpang Renggiang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Renggiang, Desa Aik Madu dan Desa Simpang Tige, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	FEZZY UKTOLSEJA, SE, MM	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
92	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Banyak jalan yg rusak di desa Lalang	Mohon perbaikan jalan yang rusak di Desa Lalang Kec. Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa lalang kecamatan Manggar , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	FEZZY UKTOLSEJA, SE, MM	Verifikasi Perangkat Daerah
93	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Banyaknya hama binatang babi dan kera yang merusak tanaman petani-meresahkan para petani.	Banyaknya hama binatang babi dan kera yang merusak tanaman petani-meresahkan para petani. Dusun Sinar Setiong, Kecamatan Gantung	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Sinar Setiong, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
94	Kurang optimalnya pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga,Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan,Kearsipan, Trantibum Linmas	Belum adanya Pelatihan Kepemudaan dalam Bidang Olahraga, karang taruma di Kecamatan Simpang Renggang maka perlu adanya pelatihan dari instansi terkait	Diadakan Pelatihan Kepemudaan dalam Bidang Olahraga, karang taruma di Kecamatan Simpang Renggang	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi usulan tersebut sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Kec. Simpang renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	FEZZY UKTOLSEJA, SE, MM	Verifikasi TAPD
95	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Belum diaspal Jalan Marga Mulya Dusun Marga Mulya Desa Renggang maka perlu ditingkatkan	Belum diaspal Jalan Marga Mulya Dusun Marga Mulya Desa Renggang maka perlu ditingkatkan	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Desa Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	AKHIRUDDIN, A.Md	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
96	Belum optimalnya pembudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	Bantuan peralatan olahraga futsal (jersey dan bola futsal)	Bantuan peralatan olahraga futsal (jersey dan bola futsal) Desa Aik Kelik Kec. Damar	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Desa Aik Kelik Kec. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
97	Belum optimalnya pembudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	Bimbingan kepada pemuda pemudi dibidang olahraga di Dusun Sidorejo	Bimbingan kepada pemuda pemudi dibidang olahraga di Dusun Sidorejo simpang Pesak	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Dusun Sidorejo simpang Pesak, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MARWAN	Verifikasi Perangkat Daerah
98	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Diharapkan adanya pelebaran jalan di Desa Lilangan.	Diharapkan adanya pelebaran jalan di Desa Lilangan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Ds. Lilangan, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
99	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Diharapkan adanya pemasangan lampu jalan di Jalan Bandes I dan Bandes II Desa Cendil Kecamatan Kelapa Kampit.	Diharapkan adanya pemasangan lampu jalan di Jalan Bandes I dan Bandes II Desa Cendil Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, Mohon dilengkapi dengan data pendukung	Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi TAPD
100	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Diharapkan adanya pemasangan lampu jalan di Jalan Bandes I dan Jalan Bandes II Desa Cendil.	Diharapkan adanya pemasangan lampu jalan di Jalan Bandes I dan Jalan Bandes II Desa Cendil.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, Mohon dilengkapi dengan data pendukung	Desa Cendil, Kec. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
101	Optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan yang profesional dan komprehensif	Diharapkan agar adanya bantuan BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.	Diharapkan agar adanya bantuan BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.	Dinas Kesehatan	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi TAPD
102	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Diharapkan agar adanya pemasangan lampu jalan di Jalan Selindang RT.05/02 Dusun Selindang Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit.	Diharapkan agar adanya pemasangan lampu jalan di Jalan Selindang RT.05/02 Dusun Selindang Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, Mohon dilengkapi dengan data pendukung	Jl. Selindang, RT.05/02, Dusun Selindang, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi TAPD
103	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Diharapkan agar adanya pemasangan lampu jalan di RT.04 sampai RT.07 Dusun Selindang Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit.	Diharapkan agar adanya pemasangan lampu jalan di RT.04 sampai RT.07 Dusun Selindang Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, Mohon dilengkapi dengan data pendukung	Dusun Selindang, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi TAPD
104	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Diharapkan agar adanya pemasangan lampu jalan di wilayah TPU Dusun Aik Sambar.	Diharapkan agar adanya pemasangan lampu jalan di wilayah TPU Dusun Aik Sambar. Desa Lilangan, Kecamatan Gantung	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, Mohon dilengkapi dengan data pendukung	Dusun Aik Sambar, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi TAPD
105	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Diharapkan agar adanya pemasangan papan plang/nama jalan "Jl. Bahagia Sekali" di RT.03/02 Dusun Bahagia Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit.	Diharapkan agar adanya pemasangan papan plang/nama jalan "Jl. Bahagia Sekali" di RT.03/02 Dusun Bahagia Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, Mohon dilengkapi dengan data pendukung	Dusun Bahagia, Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
106	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Diharapkan agar adanya pemasangan polisi tidur RT.019/09 Dusun Arab II Desa Kurnia Jaya.	Diharapkan agar adanya pemasangan polisi tidur RT.019/09 Dusun Arab II Desa Kurnia Jaya.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Arab II, Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	FEZZY UKTOLSEJA, SE, MM	Verifikasi TAPD
107	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Diharapkan agar adanya pemasangan Sumur Bor RT.09 Dusun Air Sambar Desa Lilangan.	Diharapkan agar adanya pemasangan Sumur Bor RT.09 Dusun Air Sambar Desa Lilangan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.09, Dusun Air Sambar, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
108	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan standar yang dianjurkan	Diharapkan agar adanya pembuatan MCK di Desa Lilangan RT.09 Dusun Air Sambar.	Diharapkan agar adanya pembuatan MCK di Desa Lilangan RT.09 Dusun Air Sambar.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.09, Dusun Air Sambar, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
109	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan standar yang dianjurkan	Diharapkan agar adanya pembuatan MCK di RT.02, Desa Lilangan.	Diharapkan agar adanya pembuatan MCK di RT.02, Desa Lilangan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Ds. Lilangan, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
110	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Diharapkan agar adanya penerangan jalan raya di ruas jalan Limbongan sampai Tanjung Batu Itam.	Diharapkan agar adanya penerangan jalan raya di ruas jalan Limbongan sampai Tanjung Batu Itam.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, Mohon dilengkapi dengan data pendukung	Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi TAPD
111	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Diharapkan agar adanya pengaspalan jalan di arah permukiman sepanjang 500 meter.	Diharapkan agar adanya pengaspalan jalan di arah permukiman sepanjang 500 meter. RT. 12, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT. 12, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
112	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Diharapkan agar adanya pengaspalan jalan di jalan RT.01 Desa Lilangan.	Diharapkan agar adanya pengaspalan jalan di jalan RT.01 Desa Lilangan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.01, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
113	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Diharapkan agar adanya peningkatan jalan lingkungan RT.17 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan Kecamatan Gantung.	Diharapkan agar adanya peningkatan jalan lingkungan RT.17 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.17, Dusun Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
11 4	Masih Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Pengelolaan Persampahan	Dimohon pada Dinas terkait agar mensosialisasikan dan mengawasi standart prosedur pada pembuangan limbah akhirnya atau IPAL kelaut kepada pengelola pembudidaya udang vaname.	Dimohon pada Dinas terkait agar mensosialisasikan dan mengawasi standart prosedur pada pembuangan limbah akhirnya atau IPAL kelaut kepada pengelola pembudidaya udang vaname. Desa tanjung kelumpang Rt.06 dan Rt.07 Simpang Pesak	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan	Desa tanjung kelumpang Rt.06 dan Rt.07 Simpang Pesak, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MARWAN	Verifikasi TAPD
11 5	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Drainase sekunder sepanjang kurleb 100 meter di Dusun Taruna Mulya Rt.01/01 Desa Lalang	Drainase sekunder sepanjang kurleb 100 meter di Dusun Taruna Mulya Rt.01/01 Desa Lalang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Taruna Mulya Rt.01/01 Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
11 6	Masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan Nelayan untuk mengembangkan usaha perikanan tangkap (Pelatihan Pembuatan Kapal Fiber dan Perbaikan Mesin Kapal)	Industrialisasi kapal fiber	Industrialisasi kapal fiber Jln padat karya kecamatan Gantung	Dinas Perikanan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Jln padat karya kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
117	Masih adanya Kebutuhan Tenaga Kerja atau Lowongan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pencari kerja seperti kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja	informasi dan pelatihan keterampilan sesuai dengan pasar kerja yang dibutuhkan	informasi dan pelatihan keterampilan sesuai dengan pasar kerja yang dibutuhkan Dusun Air Nangka, desa Balok. Dendang	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	Dusun Air Nangka, desa Balok. Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi TAPD
118	Masih adanya Kebutuhan Tenaga Kerja atau Lowongan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pencari kerja seperti kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja	informasi lowongan kerja, dan pelatihan untuk pencari kerja agar sesuai dengan permintaan pasar kerja	informasi lowongan kerja, dan pelatihan untuk pencari kerja Dusun Baru Utara II, Desa Baru Kec Manggar	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	Dusun Baru Utara II, Desa Baru Kec Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi TAPD
119	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jalan kalau musim hujan becek sehingga perlu peningkatan jalan di jalan lapangan bola liring 500 meter.	peningkatan jalan di jalan lapangan bola liring 500 meter, Dsn. Liring Desa Renggiang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Dsn. Liring Desa Renggiang , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARMINTON	Verifikasi Perangkat Daerah
120	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Jalan menuju kebun masih belum diaspal maka perlu pembangunan jalan ke kebun di RT.03 Desa Aik Madu Kecamatan Simpang Renggiang	Pengaspalan Jalan menuju kebun di RT.03 Desa Aik Madu Kecamatan Simpang Renggiang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan, mohon agar usulan dilengkapi dengan data dukung	RT 03 Desa air Madu Kec. Simpang Renggiang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARMINTON	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
12 1	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jalan menuju makam belum diaspal maka Perlunya pengaspalan jalan di jalan TPU Desa Liring	pengaspalan jalan di jalan TPU Desa Liring Desa Renggang Kec. Simpang Renggang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Dsn. Liring Desa Renggang Kec. Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARMINTON	Verifikasi Perangkat Daerah
12 2	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jalan Menuju Makam di Air Madu belum diaspal maka perlu pengaspalan akses jalan Tempat Pemakaman Umum Desa Air Madu	Pengaspalan akses jalan Tempat Pemakaman Umum Desa Air Madu	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Air Madu, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	FEZZY UKTOLSEJA, SE, MM	Verifikasi Perangkat Daerah
12 3	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	jalan umum trans Sidorejo dan jalan kubur mohon diaspal	jalan umum trans Sidorejo dan jalan ke Pemakaman mohon diaspal	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	nadino dusun Sidorejo trans Bira kecamatan simpang pesak, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHARTINI	Verifikasi Perangkat Daerah
12 4	Masih rendahnya kesadaran Nelayan untuk mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan terhadap resiko kecelakaan kerja (Asuransi Nelayan)	jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi nelayan yang belum merata	jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi nelayan yang belum merata, desa Buku Limau kecamatan Manggar	Dinas Perikanan	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	desa Buku Limau kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
125	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jembatan yang berada di ujung Renggang sudah rusak sehingga perlu perbaikan jembatan ujung Desa Renggang ada yang rusak	perlu perbaikan jembatan ujung Desa Renggang ada yang rusak	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	FEZZY UKTOLSEJA, SE, MM	Verifikasi Perangkat Daerah
126	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jika hujan terjadi luapan air di DSn. Terang bulan maka perlu adanya rehab saluran primer ,peringkatan Palat deuker serta peningkatan jalan di RT 01, RT 02,,RT03 dan RT 04 DSn. Terang Bulang Desa Lalang	perlu adanya rehab saluran primer, peringkatan Palat deuker serta peningkatan jalan di RT 01, RT 02,,RT03 dan RT 04 DSn. Terang Bulang Desa Lalang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Dsn. Terang Bulan Desa Lalang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	AKHIRUDDIN, A.Md	Verifikasi Perangkat Daerah
127	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kalau hujan terjadi genagan karena aliran air kurang jalan maka perlu penambahan gorong gorong di Dusun Liring Desa Renggang	perlu penambahan gorong gorong di Dusun Liring Desa Renggang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Dsn. Liring Desa Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARMINTON	Verifikasi Perangkat Daerah
128	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan	Kami sebagai kelompok tani berharap untuk dapat diperbaiki embung/saluran air karena mengalami kerusakan hingga sekarang tidak bisa dimanfaatkan	Mohon perbaikan Embung Dusun Langkang Desa Lintang Simpang Renggang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Langkang Desa Lintang Simpang Renggang , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	lingkungan yang rawan banjir/Genangan								
129	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Kami sebagai kelompok tani berharap untuk dapat diperbaiki embung/saluran air karena mengalami kerusakan hingga sekarang tidak bisa dimanfaatkan.	Kami sebagai kelompok tani berharap untuk dapat diperbaiki embung/saluran air karena mengalami kerusakan hingga sekarang tidak bisa dimanfaatkan. Dusun Langkang Desa Lintang Simpang Renggang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, mohon dilengkapi dengan data dukung	Dusun Langkang Desa Lintang Simpang Renggang , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
130	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Kelompok tani Setia Marga, perbaikan saluran irigasi dan perbaikan embung untuk sawah	Kelompok tani Setia Marga, perbaikan saluran irigasi dan perbaikan embung untuk sawah Desa Jangkang. Dendang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Air Asam. Desa Jangkang. Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah
131	Belum tersedianya kontainer sampah	Kepada dinas terkait untuk pengelolaan sampah perlu ditindaklanjuti secara aktif agar tidak banyak sampah yang berserakan di jalanan khususnya di ujung Jalan Laskar Pelangi.	Kepada dinas terkait untuk pengelolaan sampah perlu ditindaklanjuti secara aktif agar tidak banyak sampah yang berserakan di jalanan khususnya di ujung Jalan Laskar Pelangi.	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. HUSAINI RASYID, M.Si	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
13 2	Distribusi barang pokok dan penting (Bapokting) yang masih bergantung pada kabupaten lain membuat variasi harga yang fluktuatif tidak bisa diintervensi,	ketersediaan gas subsidi, agar di stabilkan, dan kebutuhan bahan pokok sehari-hari agar harganya jangan naik terus	ketersediaan gas subsidi, agar di stabilkan, dan kebutuhan bahan pokok sehari-hari agar harganya jangan naik terus desa Limbongan, Gantung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	desa Limbongan, Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi TAPD
13 3	Kurang optimalnya pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	kurang minatnya anak terhadap literasi maka perlu adanya perpustakaan desa untuk meningkatkan minat baca anak	pembangunan perpustakaan desa untuk meningkatkan minat baca anak pada Desa Aik Madu Kec. SP. Renggiang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta lengkapi proposal usulan	Desa Aik Madu Kec. SP. Renggiang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	AKHIRUDDIN, A.Md	Verifikasi Perangkat Daerah
13 4	Belum optimalnya pembudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	kurangnya apresiasi bagi siswa siswi yang berprestasi dibidang olahraga, misalnya bantuan penyokong kegiatan olahraga yang dilakukan entah berbentuk uang atau barang, seperti sepatu olahraga, baju, botol air minum dan lain lain	kurangnya apresiasi bagi siswa siswi yang berprestasi dibidang olahraga, misalnya bantuan penyokong kegiatan olahraga yang dilakukan entah berbentuk uang atau barang, seperti sepatu olahraga, baju, botol air minum dan lain lain	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi usulan, disesuaikan dengan prioritas daerah	Dusun Gunung Desa Lalang Jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
13 5	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Lampu jalan samping RT.24 Dusun Harapan belum ada supaya diadakan dan lampu jalan di Rawa Purun RT.17.	Lampu jalan samping RT.24 Dusun Harapan belum ada supaya diadakan dan lampu jalan di Rawa Purun RT.17.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, Mohon dilengkapi dengan data pendukung	Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MIRZA SAPUTRA	Verifikasi TAPD
13 6	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Lampu penerangan jalan Gang Sawah RT.04 Damar	Lampu penerangan jalan Gang Sawah RT.04 Ds Mengkubang Damar	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	jalan Gang Sawah RT.04 Damar Ds Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi TAPD
13 7	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Masalah pertanian, bibit yang sudah dicatat dalam anggaran supaya dapat dibagikan kepada petani serta diawasi oleh PPL setempat karena sayur mayur langka di desa	Masalah pertanian, bibit yang sudah dicatat dalam anggaran supaya dapat dibagikan kepada petani serta diawasi oleh PPL setempat karena sayur mayur langka di desa Dusun Lintang Desa Lintang kec Simpang Renggang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan	Dusun Lintang Desa Lintang kec Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
13 8	Data penerima bantuan sosial yang tidak update dan lengkap	masih ada bantuan yang tidak tepat sasaran	masih ada bantuan yang tidak tepat sasaran, dusun Menggarawan, RT 01, Desa Padang. MANGGAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	dusun Menggarawan, RT 01, Desa Padang. MANGGAR, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi Perangkat Daerah
13 9	Belum optimalnya pemenuhan hak anak di kabupaten Belitung Timur	Masih banyak anak yang putus sekolah	Masih tingginya angka putus sekolah	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Dusun Lipat Kajang Desa Baru. Kec Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
140	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Masih Banyak petani yang kekurangan pupuk bersubsidi maka perlu bantuan pupuk bersubsidi untuk masyarakat tidak mampu	Bantuan pupuk bersubsidi untuk masyarakat tidak mampu Dusun Air Madu RT.01/01 Desa Aik Madu	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut	(Dusun Air Madu RT.01/01 Desa Aik Madu), Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARMINTON	Verifikasi Perangkat Daerah
141	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan standar yang dianjurkan	masih BANYAK RUMAH YANG BELUM PUNYA wc YANG STANDART	Bantuan rumah tinggal yang belum mempunyai WC Desa Lalang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	LALANG, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARMINTON	Verifikasi Perangkat Daerah
142	Masih adanya sarana dan prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Masih kurangnya Meubelair sekolah di SDN 19 Manggar maka perlu adanya pengadaan meubelair untuk SD 19 Manggar	Masih kurangnya pengadaan meubelair untuk SD 19 Manggar	Dinas Pendidikan	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	SDN 19 Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	AKHIRUDDIN, A.Md	Verifikasi TAPD
143	masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang layak di destinasi wisata, perlunya perbaikan sarana dan prasarana yang rusak dan kurang layak di destinasi wisata dan masih perlunya pengembangan objek wisata baru sebagai alternatif pilihan berwisata	masih kurangnya tempat pembuangan sampah di tempat wisata, petugas kebersihan, penataan taman dan rumput ditempat wisata	masih kurangnya tempat pembuangan sampah di tempat wisata, petugas kebersihan, penataan taman dan rumput ditempat wisata, pantai nyiur melambai, Lalang Jaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	pantai nyiur melambai, Lalang Jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
14 4	Masih adanya Kebutuhan Tenaga Kerja atau Lowongan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pencari kerja seperti kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja	Mebutuhkan lowongan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran di Belitung Timur	Mebutuhkan lowongan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran di Belitung Timur Desa Aik Kelik Kec Damar	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan	Desa Aik Kelik Kec Damar , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
14 5	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Mengusulkan untuk pemanfaatan pekarangan dibutuhkan pupuk dan bibit tanaman	Mengusulkan untuk pemanfaatan pekarangan dibutuhkan pupuk dan bibit tanaman Dusun Harapan Desa Lalang Jaya	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Harapan Desa Lalang Jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
14 6	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Minta bantuan Pupuk Subsidi	Minta bantuan Pupuk Subsidi, Dusun Mempaya RT.02/11 Desa mempaya Kecamatan Damar	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	Dusun Mempaya RT.02/11 Desa mempaya Kecamatan Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	KOKO HARYANTO, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
14 7	Masih adanya Kebutuhan Tenaga Kerja atau Lowongan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pencari kerja seperti kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja	minta tolong lapangan pekerjaan	minta tolong lapangan pekerjaan Dusun Harapan Jaya Desa Lalang Jaya	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan	Dusun Harapan Jaya Desa Lalang Jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
148	Masih kurangnya upaya fasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam menumbuhkan Wirausaha Muda yang mandiri	Mohon adanya pelatihan untuk ibu rumah tangga dan remaja dalam bidang menjahit dan usaha produktif lainnya.	Mohon adanya pelatihan untuk ibu rumah tangga dan remaja dalam bidang menjahit dan usaha produktif lainnya. (Desa Lintang Kecamatan Simpang Renggang)	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Sulastini, Ibu Rumah Tangga (Desa Lintang Kecamatan Simpang Renggang) , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi TAPD
149	Masih adanya kelompok tani yang belum mendapatkan sekolah lapang	Mohon adanya petugas penyuluh pertanian di Kecamatan Simpang Renggang	Mohon adanya petugas penyuluh pertanian di Kecamatan Simpang Renggang A.n Asran, 73 Tahun, Petani (Dusun Air Madu II Desa Air Madu)	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Asran, 73 Tahun, Petani (Dusun Air Madu II Desa Air Madu) , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
150	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Mohon agar adanya pemasangan lampu jalan di Dusun Gunung Desa Lalang Jaya.	Mohon agar adanya pemasangan lampu jalan di Dusun Gunung Desa Lalang Jaya.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Gunung, Desa Lalang Jaya, Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	FEZZY UKTOLSEJA, SE, MM	Verifikasi TAPD
151	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Mohon agar adanya pemasangan lampu jalan di Jalan Aik Cekedas RT.11.	Mohon agar adanya pemasangan lampu jalan di Jl. Aik Cekedas, RT.11/04, Dusun Bukit Jaya, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, Mohon dilengkapi dengan data pendukung	Jl. Aik Cekedas, RT.11/04, Dusun Bukit Jaya, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
15 2	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Mohon agar adanya pemasangan lampu jalan di Jalan Peramun Jaya Dusun Limau Manis RT.15/06 Desa Buding.	Mohon agar adanya pemasangan lampu jalan di Jalan Peramun Jaya Dusun Limau Manis RT.15/06 Desa Buding.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, Mohon dilengkapi dengan data pendukung	Jl. Peramun Jaya, Dusun Limau Manis, RT.15/06, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi TAPD
15 3	Masih adanya pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang belum optimal dan perlu ditingkatkan (pelatihan petani dan penilaian kelas kelompok tani)	Mohon akan perhatian pemerintah daerah pada petani kecil di Kabupaten Belitung Timur.	Mohon akan perhatian pemerintah daerah pada petani kecil di Kabupaten Belitung Timur.	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk dibahas lebih lanjut	Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSONO SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah
15 4	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	mohon bantuan alat alat pertanian seperti obat obatan,pupuk alat semprot untuk petani di desa lilangan	mohon bantuan alat alat pertanian seperti obat obatan,pupuk alat semprot untuk petani di desa lilangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan, mohon dilengkapi dengan data dukung	suherdoyo desa lilangan kecamatan gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHARTINI	Verifikasi Perangkat Daerah
15 5	Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru Terhadap Rumah Tidak Layak Huni guna Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Mohon bantuan atap seng rumah sebanyak 50 keping	Mohon bantuan atap seng rumah sebanyak 50 keping (Desa Lintang)	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Zukiyati, 60 Tahun, Ibu Rumah Tangga (Desa Lintang) , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
156	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Mohon Bantuan Bibit	Mohon Bantuan Bibit, Dusun mempaya RT. 02/11 Desa Mempaya Kecamatan Damar	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	Dusun mempaya RT. 02/11 Desa Mempaya Kecamatan Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	KOKO HARYANTO, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
157	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	mohon bantuan bibit dan obat obat pertanian	mohon bantuan bibit dan obat obat pertanian a.n Suhendro desa air madu kecamatan simpang renggang	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Suhendro desa air madu kecamatan simpang renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	OMAN ANGGARI, SH, MH	Verifikasi Perangkat Daerah
158	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	mohon bantuan bibit sayuran untuk masyarakat desa lilangan	mohon bantuan bibit sayuran untuk masyarakat desa lilangan A.n suryatin desa lilangan kecamatan gntung	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan, mohon dilengkapi dengan data dukung	suryatin desa lilangan kecamatan gntung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHARTINI	Verifikasi Perangkat Daerah
159	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	mohon bantuan bibit tanaman	mohon bantuan bibit tanaman Desa Aik kelik Kecamatan Damar	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	Desa Aik kelik Kecamatan Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	KOKO HARYANTO, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
160	Masih Belum Optimalnya Pengelolaan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM	Mohon bantuan cetakan batako manual	Mohon bantuan cetakan batako manual Dusun Lintang Desa Lintang kec Simpang Renggang	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan	Dusun Lintang Desa Lintang kec Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
161	Masih Belum Optimalnya SDM dalam kepengurusan koperasi dan pengelolaan UMKM	Mohon bantuan pelatihan kepada dinas terkait berkenaan dengan pelaku UMKM yang kurang mampu.	Mohon bantuan pelatihan kepada dinas terkait berkenaan dengan pelaku UMKM yang kurang mampu.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. HUSAINI RASYID, M.Si	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
16 2	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Mohon bantuan pembangunan jembatan untuk lalu lintas di depan rumah Bpk. Slamet Riyadi dengan alamat Rt.014 Dusun Teratai Desa Lalang Jaya Manggar, dikarenakan jembatan yang lama sudah tidak layak untuk dilalui kendaraan, dan sudah mengalami kerusakan akibat banjir.	Mohon bantuan pembangunan jembatan untuk lalu lintas di depan rumah Bpk. Slamet Riyadi dengan alamat Rt.014 Dusun Teratai Desa Lalang Jaya Manggar,	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Teratai Desa Lalang Jaya Manggar Rt.014, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
16 3	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan standar yang dianjurkan	Mohon Bantuan Pembuatan Sanitasi atau Toilet Umum	Mohon Bantuan Pembuatan Sanitasi atau Toilet Umum Ds.Aik Madu Kecamatan Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Ds.Aik Madu Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MIRZA SAPUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah
16 4	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	mohon bantuan pengaspalan jalan	mohon bantuan pengaspalan jalan, jl.Lintang desa aik kelik kecamatan damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	jl.Lintang desa aik kelik kecamatan damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	KOKO HARYANTO, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
165	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Mohon bantuan perbaikan jalan antara jalan Dusun Teratai dan Dusun Sekip tepatnya dipersimpangan Toko Niko yang sudah berlubang dan sering terjadi kecelakaan.	Mohon bantuan perbaikan jalan antara jalan Dusun Teratai dan Dusun Sekip tepatnya dipersimpangan Toko Niko yang sudah berlubang dan sering terjadi kecelakaan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Sekip Desa Lalang Jaya Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
166	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Mohon bantuan PJU di RT.33/15 Dusun Assalam.	Mohon bantuan PJU di RT.33/15 Dusun Assalam. II, Desa Baru, Kecamatan Manggar	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, Mohon dilengkapi dengan data pendukung	Dusun Assalam II, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MIRZA SAPUTRA	Verifikasi TAPD
167	Masih kurangnya ketersediaan pupuk di tingkat petani perkebunan	Mohon bantuan pupuk bersubsidi untuk petani yang tidak mampu.	Mohon bantuan pupuk bersubsidi untuk petani yang tidak mampu. Rizal Rais, 41 tahun, Petani (RT.14 Dusun Liring Desa Renggiang Kecamatan Simpang Renggiang)	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Rizal Rais, 41 tahun, Petani (RT.14 Dusun Liring Desa Renggiang Kecamatan Simpang Renggiang), Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
168	Masih kurangnya ketersediaan pupuk di tingkat petani perkebunan	Mohon bantuan pupuk bersubsidi untuk petani yang tidak mampu.	Mohon bantuan pupuk bersubsidi untuk petani yang tidak mampu. Mawansi, 41 tahun, Buruh Harian (Dusun Air Madu Desa Air Madu Kecamatan Simpang Renggiang)	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Mawansi, 41 tahun, Buruh Harian (Dusun Air Madu Desa Air Madu Kecamatan Simpang Renggiang), Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
169	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	mohon bantuan pupuk subsidi untuk tani campa mandiri	mohon bantuan pupuk subsidi untuk tani campa mandiri A.n Kamal desa lilangan kecamatan gantung	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan, mohon dilengkapi dengan data dukung	Kamal desa lilangan kecamatan gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHARTINI	Verifikasi Perangkat Daerah
170	Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru Terhadap Rumah Tidak Layak Huni guna Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	mohon bantuan renovasi rumah di karenakan atap bocor dinding papan dan lantai pecah oecah	mohon bantuan RTLH di karenakan atap bocor dinding papan dan lantai pecah oecah a.n Eros Rosiana dusun padang 1 RT 01/01 desa padang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Eros Rosiana dusun padang 1 RT 01/01 desa padang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	OMAN ANGGARI, SH, MH	Verifikasi Perangkat Daerah
171	Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru Terhadap Rumah Tidak Layak Huni guna Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	mohon bantuan rumah di karenakan rumah berdinding papan dan bocor	mohon bantuan RTLH di karenakan rumah berdinding papan dan bocor, A.n fenisya dusun Cemara 1 RT 06/03 desa Kurnia jaya.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	fenisya dusun Cemara 1 RT 06/03 desa Kurnia jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	OMAN ANGGARI, SH, MH	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
17 2	Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru Terhadap Rumah Tidak Layak Huni guna Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	mohon bantuan rumah tinggal kayak huni di karenakan bocor dan tidak layak untuk di tempati	mohon bantuan rumah tinggal kayak huni a.n susilawati RT 005 dusun harapan jaya desa lalang jaya	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	susilawati RT 005 dusun harapan jaya desa lalang jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	OMAN ANGGARI, SH, MH	Verifikasi Perangkat Daerah
17 3	Masih Belum meratanya distribusi ternak sapi di Kabupaten Belitung Timur dan perlu ditingkatkan	mohon bantuan ternak seperti ayam	mohon bantuan ternak seperti ayam A,n roslaini RT 005/006 desa mayang kecamatan kelapa jampit	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	roslaini RT 005/006 desa mayang kecamatan kelapa jampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	BENOS RODIARTO	Verifikasi Perangkat Daerah
17 4	Belum tersedianya koneksi internet dilokasi publik dan tempat wisata	Mohon Bantuan Wifi	Mohon Pemasangan WIFI Dsn.Burung Mandi RT.12/05 Desa Burong Mandi kec.damar	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Dsn.Burung Mandi RT.12/05 Desa Burong Mandi kec.damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	KOKO HARYANTO, S.IP	Verifikasi TAPD
17 5	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	mohon di buatkan drainase di dusun harapan jaya	mohon pembuatan drainase di dusun harapan jaya RT 02/01 desa lalang jaya	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	dusun harapan jaya RT 02/01 desa lalang jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	OMAN ANGGARI, SH, MH	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
176	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	mohon di buat kan drainase di jalan provinsi	di buat kan drainase di jalan provinsi, A.n indah Fitriani Kadus penirukan 1 dusun penirukan 1 RT 006/003 desa mayang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	indah Fitriani Kadus penirukan 1 dusun penirukan 1 RT 006/003 desa mayang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	BENOS RODIARTO	Verifikasi Perangkat Daerah
177	Masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan Nelayan untuk mengembangkan usaha perikanan tangkap (Pelatihan Pembuatan Kapal Fiber dan Perbaikan Mesin Kapal)	Mohon diadakan penyuluhan dan pembinaan serta pelatihan bagi pembudidayaan baik ikan air tawar maupun ikan air lau	Mohon diadakan penyuluhan dan pembinaan serta pelatihan bagi pembudidayaan baik ikan air tawar maupun ikan air laut Kelompok tani desa tanjung kelumpang, desa Dendang Desa Batu Itam	Dinas Perikanan	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan	Kelompok tani desa tanjung kelumpang, desa Dendang Desa Batu Itam, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MARWAN	Verifikasi TAPD
178	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam memberikan pelayanan kesehatan;	mohon dibantu masih kurangnya tenaga SDM di Pustu aik madu	Mohon bantuan Tenaga SDM di Pustu Aik Madu Kec. Simpang Renggang	Dinas Kesehatan	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	mulyino desa air madu kecamatan simpang renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	OMAN ANGGARI, SH, MH	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
179	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	mohon dibuatkan drainase di RT 003,RT 004,dan RT 005 desa mayang	Pembuatan drainase di RT 003,RT 004,dan RT 005 dusun penirukan ddesa mayang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	ardianto dusun penirukan desa mayang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	BENOS RODIARTO	Verifikasi Perangkat Daerah
180	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	mohon dibuatkan sumur gali di RT 05 desa lilangan	mohon dibuatkan sumur gali di RT 05 desa lilangan	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	endang desa lilangan kecamatan gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHARTINI	Verifikasi Perangkat Daerah
181	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Mohon dilakukan kelanjutan pengaspalan jalan menuju ke pantai Gusong Cine, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung.	Mohon dilakukan kelanjutan pengaspalan jalan menuju ke pantai Gusong Cine, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
182	Masih Belum Optimalnya Pengelolaan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM	Mohon dorongan untuk UMKM	Mohon dorongan untuk UMKM Dusun Aik Selumar Desa Lintang Simpang Renggang	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan	Dusun Aik Selumar Desa Lintang Simpang Renggang , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
183	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	mohon pelebaran jalan lintas masyarakat desa lilangan	mohon pelebaran jalan lintas masyarakat desa lilangan A.n sukil desa lilangan kecamatan gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	sukil desa lilangan kecamatan gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHARTINI	Verifikasi Perangkat Daerah
184	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Mohon pemasangan penerangan jalan di RT.19 Desa Lalang Jaya	Mohon pemasangan penerangan jalan di RT.19 Desa Lalang Jaya	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Harapan Rt.19 Desa Lalang Jaya Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi TAPD
185	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	mohon pembuatan drainase	Mohon pembuatan drainase dusun numpang empat RT 004 RW 002 desa mekar jaya	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	dusun numpang empat RT 004 RW 002 desa mekar jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	OMAN ANGGARI, SH, MH	Verifikasi Perangkat Daerah
186	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan	mohon pembuatan drainase di desa lilangan	mohon pembuatan drainase di desa lilangan A.n muklisin desa lilangan kecamatan gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	muklisin desa lilangan kecamatan gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHARTINI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	lingkungan yang rawan banjir/Genangan								
187	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Mohon pembuatan jalan ke arah permukiman penduduk dan ke arah perkebunan di Dusun Bentaian II RT.07 Desa Bentaian, Kecamatan Manggar.	Mohon pembuatan jalan ke arah permukiman penduduk dan ke arah perkebunan di Dusun Bentaian II RT.07 Desa Bentaian, Kecamatan Manggar.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Bentaian, Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MIRZA SAPUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah
188	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	mohon pembuatan sumur bor di dusun penirukan	mohon pembuatan sumur bor di dusun penirukan A.n bustari RT 018 dusun penirukan desa mayang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	bustari RT 018 dusun penirukan desa mayang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	BENOS RODIARTO	Verifikasi Perangkat Daerah
189	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh	mohon pembuatan sumur gali di RT 005/003 sekitar rumah verawati,dulhari herarianti	pembuatan sumur gali di RT 005/003 sekitar rumah verawati,dulhari herarianti	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Verawati RT 005/003 desa mayang kelapa kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	BENOS RODIARTO	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	Kelompok Pengelola maupun Desa								
190	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan tanggul/Talud, saluran Pembuangan utama menuju Sungai dan normalisasi pada daerah/Kawasan yang terdampak luapan, Pasang Surut, erosi Sungai dan pendangkalan sungai/anak Sungai	Mohon Pembuatan Talud	Mohon Pembuatan Talud Dsn. Baru Selatan Ds. Baru Kec. manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Dsn. Baru Selatan Ds. Baru Kec. manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MIRZA SAPUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah
191	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan tanggul/Talud, saluran Pembuangan utama menuju Sungai dan normalisasi pada daerah/Kawasan yang terdampak luapan, Pasang Surut, erosi Sungai dan pendangkalan sungai/anak Sungai	Mohon Pembuatan Talud Pemecah Gelombang	Mohon Pembuatan Talud Pemecah Gelombang, Dsn. Burung mandi RT.12/05 Desa Burong Mandi Kec. damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Dsn. Burung mandi RT.12/05 Desa Burong Mandi Kec. damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	KOKO HARYANTO, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
19 2	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Mohon penimbunan batu split di bibir jalan aspal Air Ruak sampai Bangek supaya pejalan kaki dan motor tidak terpeleset dan jatuh.	Mohon penimbunan batu split di bibir jalan aspal Air Ruak sampai Bangek supaya pejalan kaki dan motor tidak terpeleset dan jatuh.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MIRZA SAPUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah
19 3	Masih adanya Kebutuhan Tenaga Kerja atau Lowongan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pencari kerja seperti kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja	Mohon peningkatan perekonomian dengan membuka lapangan kerja di Desa Lilangan.	Mohon peningkatan perekonomian dengan membuka lapangan kerja di Desa Lilangan.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk dibahas lebih lanjut	Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi TAPD
19 4	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Mohon Perbaikan Akses Jalan	Mohon Perbaikan Akses Jalan, Jln.Pendam Dusun Payak 2 RT.02/12 Desa mempaya Kec.Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Jln.Pendam Dusun Payak 2 RT.02/12 Desa mempaya Kec.Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	KOKO HARYANTO, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
19 5	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang	Mohon perbaikan bandar atau drainase yang rusak di sepanjang jalan di Desa Air Madu	Mohon perbaikan bandar atau drainase yang rusak di sepanjang jalan di Desa Air Madu	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Air Madu, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	rawan banjir/Genangan								
196	masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang layak di destinasi wisata, perlunya perbaikan sarana dan prasarana yang rusak dan kurang layak di destinasi wisata dan masih perlunya pengembangan objek wisata baru sebagai alternatif pilihan berwisata	Mohon Perbaikan Gazebo dikawasan area wisata	Mohon Perbaikan Gazebo dikawasan area wisata Dsn.Burung Mandi RT.12/05 Desa burong Mandi kec.damar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	Dsn.Burung Mandi RT.12/05 Desa burong Mandi kec.damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	KOKO HARYANTO, S.IP	Verifikasi TAPD
197	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	mohon perbaikan jalan dan pelebaran jalan yang ada di desa lilngan	mohon perbaikan jalan dan pelebaran jalan yang ada di desa lilangan	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Suryati desa lilangan kecamatan gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHARTINI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
198	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	mohon perbaikan jalan di depan rumah pak Sofian di karenakan banyak jalan yang berlubang	mohon perbaikan jalan A.n sofian desa lilangan kecamatan gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	sofian desa lilangan kecamatan gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHARTINI	Verifikasi Perangkat Daerah
199	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Mohon perbaikan jalan lingkaran Pantai Menara RT.07/09 sepanjang 1,5 km.	Mohon perbaikan jalan lingkaran Pantai Menara RT.07/09 sepanjang 1,5 km. Desa Baru, Kecamatan Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MIRZA SAPUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah
200	Kurang optimalnya pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Mohon perhatian pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan seni dan budaya Belitung.	Mohon perhatian pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan seni dan budaya Belitung.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
201	Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaan Kesehatan belum optimal	Mohon solusi terkait BPJS, terkait tunggakan pembayaran BPJS Mandiri bagi masyarakat yang tidak mampu	Mohon solusi terkait BPJS, terkait tunggakan pembayaran BPJS Mandiri bagi masyarakat yang tidak mampu Dusun Lintang Desa Lintang kec Simpang Renggang	Dinas Kesehatan	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Dusun Lintang Desa Lintang kec Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
202	Optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan yang profesional dan komprehensif	mohon untuk di perbaiki lagi pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit	Optimalisasi pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit dusun Aik Madu, Simpang Renggang	Dinas Kesehatan	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	dusun Aik Madu, Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi TAPD
203	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan tanggul/Talud, saluran Pembuangan utama menuju Sungai dan normalisasi pada daerah/Kawasan yang terdampak luapan, Pasang Surut,erosi Sungai dan pendangkalan sungai/anak Sungai	Normalisasi sungai dimulai dari Aik Batu, Aik bandung, tembus jembatan Tebat, Desa Batu Penyu.	Normalisasi sungai dimulai dari Aik Batu, Aik bandung, tembus jembatan Tebat, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Aik bandung, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
204	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	peangaspalan jalan	peangaspalan jalan Gang Wali, RT.18 DESA SELINSING	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Gang Wali, RT.18 DESA SELINSING, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah
205	Masih Belum Optimalnya SDM dalam kepengurusan koperasi dan pengelolaan UMKM	pelatihan dan bantuan modal bagi umkm	pelatihan dan bantuan modal bagi UMKM, desa Aik Madu, Kecamatan Simpang Renggang	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	desa Aik Madu, Kecamatan Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi TAPD
206	Masih Belum Optimalnya SDM dalam kepengurusan koperasi dan pengelolaan UMKM	pelatihan dan bantuan usaha untuk umkm	pelatihan dan bantuan usaha untuk UMKM, Dusun Baru Tengah RT. 10 RW 5. Desa Baru Kecamatan Manggar	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	Dusun Baru Tengah RT. 10 RW 5. Desa Baru Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi TAPD
207	Masih Belum Optimalnya SDM dalam kepengurusan koperasi dan pengelolaan UMKM	pelatihan dan modal usaha bagi umkm	mohon adakan pelatihan dan modal usaha bagi UMKM, Dusun Baru utara Selatan RT 18/08 Desa Baru Kec Manggar	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	Dusun Baru utara Selatan RT 18/08 Desa Baru Kec Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi TAPD
208	belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam melakukan kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan bagi pemuda	Pelatihan karang taruna di Desa Lilangan Kecamatan Gantung	Pelatihan karang taruna di Desa Lilangan Kecamatan Gantung	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Desa Lilangan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
209	belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam melakukan kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan bagi pemuda	Pelatihan karang taruna di Desa Limbongan Kecamatan Gantung	Pelatihan karang taruna di Desa Limbongan Kecamatan Gantung	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Ds Limbungan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi TAPD
210	Kurang optimalnya pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga,Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan,Kearsipan, Trantibum Linmas	Pelatihan kepemudaan di Kecamatan Simpang Renggang	Pelatihan kepemudaan di Kecamatan Simpang Renggang	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Desa Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi TAPD
211	Masih kurangnya upaya fasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam menumbuhkan Wirausaha Muda yang mandiri	Pelatihan kerja atau kewirausahaan di Desa Lilangan Kecamatan Gantung	Pelatihan kerja atau kewirausahaan di Desa Lilangan Kecamatan Gantung	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Desa Lilangan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi TAPD
212	Masih kurangnya upaya fasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam menumbuhkan Wirausaha Muda yang mandiri	Pelatihan kursus untuk remaja dan ibu rumah tangga dalam bidang menjahit.	Pelatihan kursus untuk remaja dan ibu rumah tangga dalam bidang menjahit. Dusun Air Sambar RT.10 Desa Lilangan Kec. Gantung	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Haryanti, 50 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Dusun Air Sambar RT.10 Desa Lilangan Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
213	Masih kurangnya upaya fasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam menumbuhkan Wirausaha Muda yang mandiri	Pelatihan menjahit untuk remaja dan ibu rumah tangga di Dusun Langkang Desa Lintang	Pelatihan menjahit untuk remaja dan ibu rumah tangga di Dusun Langkang Desa Lintang	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Elis Tiputri, 24 Tahun, Mahasiswa (Dusun Langkang Desa Lintang) , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi TAPD
214	Masih kurangnya upaya fasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam menumbuhkan Wirausaha Muda yang mandiri	pelatihan untuk anak-anak yang baru tamat SMA agar memiliki keterampilan sesuai dengan dibutuhkan pasar kerja, atau berwirausaha	pelatihan untuk anak-anak yang baru tamat SMA agar memiliki keterampilan sesuai dengan dibutuhkan pasar kerja, atau berwirausaha RT 06, Desa Limbongan. Gantung	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	RT 06, Desa Limbongan. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi TAPD
215	Masih kurangnya upaya fasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam menumbuhkan Wirausaha Muda yang mandiri	Pelatihan untuk peningkatan UMKM dan usaha mandiri bagi masyarakat yang belum mendapat pekerjaan supaya bisa menumbuhkan sektor ekonomi rumah tangga di daerah kami yang mana sangat sulit untuk bisa membangkitkan ekonomi rumah tangga.	Pelatihan untuk peningkatan UMKM dan usaha mandiri bagi masyarakat yang belum mendapat pekerjaan di Desa Limbongan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Desa Limbongan , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MARWAN	Verifikasi Perangkat Daerah
216	Masih adanya kelompok tani yang belum mendapatkan sekolah lapang	Pelatihan untuk petani dalam pengelolaan lahan pertanian	Pelatihan untuk petani dalam pengelolaan lahan pertanian A.n Salimin A., 59 Tahun, Petani (Dusun Air Selumar Desa Lintang)	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Salimin A., 59 Tahun, Petani (Dusun Air Selumar Desa Lintang) , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
217	Masih kurangnya upaya fasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam menumbuhkan Wirausaha Muda yang mandiri	Pelatihan wirausaha untuk remaja yang tidak bekerja.	Pelatihan wirausaha untuk remaja yang tidak bekerja. Hera, 46 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Dusun Air Selumar RT.09 Desa Lilangan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Hera, 46 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Dusun Air Selumar RT.09 Desa Lilangan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi TAPD
218	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pelebaran jalan khususnya di Jalan Laskar Pelangi karena sudah terlalu sering terjadi laka lantas.	Pelebaran jalan khususnya di Jalan Laskar Pelangi karena sudah terlalu sering terjadi laka lantas.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. HUSAINI RASYID, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah
219	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pemasangan batu bata sepanjang drainase primer di olipier	Pemasangan batu bata sepanjang drainase primer di olipier	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Olipier Desa Lalang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
220	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Pemasangan cermin cembung tikungan	Pemasangan cermin cembung tikungan Dusun Balai Selatan Desa Mayang. Kelapa Kampit	Dinas Perhubungan	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Balai Selatan Desa Mayang. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	YOHENDRA	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
221	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Pemasangan jalan belakang di RT.14 Dusun Air Selumar Desa Lintang Kecamatan Simpang Renggang	Pemasangan jalan belakang di RT.14 Dusun Air Selumar Desa Lintang Kecamatan Simpang Renggang	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	di RT.14 Dusun Air Selumar Desa Lintang Kecamatan Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi TAPD
222	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	pemasangan jaringan air bersih untuk warga	pemasangan jaringan air bersih untuk warga Dusun Air Rusa RT.08 dan RT. 03. DESA DUKONG.KEC SIMPANG PESAK	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Air Rusa RT.08 dan RT. 03. DESA DUKONG.KEC SIMPANG PESAK, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah
223	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pemasangan jaringan air PAM	Pemasangan jaringan air SPAM, Desa Kelubi, Kec Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Desa Kelubi, Kec Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah
224	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan	Pemasangan jaringan air SPAM	Pemasangan jaringan air SPAM RT. 03 RW 04 Dendang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	RT. 03 RW 04 Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa								
225	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pemasangan jaringan pipa SPAM	Pemasangan jaringan pipa SPAM Desa Nyuruk. Dendang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Nyuruk. Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah
226	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Pemasangan lampu jalan	Pemasangan lampu jalan Dusun Selindang RT 17 ke arah laut Selindang. Desa Senyubuk. Kelapa Kampit	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Selindang RT 17 ke arah laut Selindang. Desa Senyubuk. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	YOHENDRA	Verifikasi TAPD
227	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Pemasangan lampu jalan	Pemasangan lampu jalan Jalan Desa Simpang Tiga. Simpang Renggang	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Jalan Desa Simpang Tiga. Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
228	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Pemasangan lampu jalan di Jl.Munsing RT.07 RW.04 Dusun Kebun Sayur Desa Mengkubang	Pemasangan lampu jalan di Jl.Munsing RT.07 RW.04 Dusun Kebun Sayur Desa Mengkubang	Dinas Perhubungan	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl.Munsing RT.07 RW.04 Dusun Kebun Sayur Desa Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi TAPD
229	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Pemasangan lampu listrik di perkuburan Air Libut Desa Lilangan.	Pemasangan lampu listrik di perkuburan Air Libut Desa Lilangan.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke Dinas terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	di perkuburan Air Libut Desa Lilangan., Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi TAPD
230	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Pemasangan lampu penerangan jalan	Pemasangan lampu penerangan jalan Sepanjang jalan Desa Air Madu. Simpang Renggang	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Sepanjang jalan Desa Air Madu. Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi TAPD
231	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pemasangan SPAM	Pemasangan SPAM Dusun Seberang. DESA SELINSING	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Seberang. DESA SELINSING, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
23 2	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pemasangan SPAM atau PDAM	Pemasangan SPAM atau PDAM Dusun Garumedang RT.021 Desa Sukamandi	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Dusun Garumedang RT.021 Desa Sukamandi, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
23 3	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pemasangan SPAM atau PDAM dari RT.21 sampai dengan RT.27 Dusun Langkang Desa Lintang.	Pemasangan SPAM atau PDAM dari RT.21 sampai dengan RT.27 Dusun Langkang Desa Lintang.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	dari RT.21 sampai dengan RT.27 Dusun Langkang Desa Lintang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
23 4	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pemasangan SPAM atau PDAM di Dusun Liring Desa Renggang Kecamatan Simpang Renggang	Pemasangan SPAM atau PDAM di Dusun Liring Desa Renggang Kecamatan Simpang Renggang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Liring Desa Renggang Kecamatan Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
235	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pemasangan SPAM atau PDAM di Kecamatan Damar	Pemasangan SPAM atau PDAM di Desa Sukamandi Kecamatan Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Ds Sukamandi, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
236	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pemasangan SPAM atau PDAM di PKBM Bina Taruna Kecamatan Dendang.	Pemasangan SPAM atau PDAM di PKBM Bina Taruna Kecamatan Dendang.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Khairul Anwar, S.Pd.SD, 52 tahun, PNS/Ketua PKBM Bina Taruna Desa Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
237	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pemasangan SPAM atau PDAM di RT.14 Dusun Air Selumar Desa Lintang	Pemasangan SPAM atau PDAM di RT.14 Dusun Air Selumar Desa Lintang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.14 Dusun Air Selumar Desa Lintang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
238	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pemasangan SPAM di Rt 04/02 Dusun Sekip Desa Lalang kerena tidak ada air bersih di setiap rumah warga	Pemasangan SPAM di Rt 04/02 Dusun Sekip Desa Lalang karena tidak ada air bersih di setiap rumah warga	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Sekip Rt.04/02 Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
239	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pemasangan SPAM di RT.4 Dusun Pancur II Desa Padang Kecamatan Manggar	Pemasangan SPAM di RT.4 Dusun Pancur II Desa Padang Kecamatan Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	T.4 Dusun Pancur II Desa Padang Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
240	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/perumahan penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembangunan atau pembuatan drainase bandar saluran air	Pembangunan atau pembuatan drainase Desa Sukamandi RT.04 Kecamatan Damar.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Sukamandi RT.04 Kecamatan Damar. , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
24 1	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pembangunan dan peningkatan jalan permukiman Jl. PLN, RT.001, Desa Batu Penyu.	Pembangunan dan peningkatan jalan permukiman Jl. PLN, RT.001, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. PLN, RT.001, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
24 2	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pembangunan dan peningkatan prasarana jalan di Desa Batu Penyu.	Pembangunan dan peningkatan prasarana jalan di Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
24 3	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	pembangunan drainase	pembangunan drainase RT. 11, DESA SALINSING.GANTUNG	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	RT. 11, DESA SALINSING.GANTUNG, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
244	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	pembangunan drainase	pembangunan drainase Gang Wali, RT.18 DESA SELINSING	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Gang Wali, RT.18 DESA SELINSING, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah
245	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembangunan drainase	Pembangunan drainase RT. 03 RW. 02. Dusun Bahagia. Kelapa Kampit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT. 03 RW. 02. Dusun Bahagia. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	YOHENDRA	Verifikasi Perangkat Daerah
246	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembangunan drainase di Jln. Aik Rengas Dusun Nibong Punggur Desa Mentawak Kec. kelapa Kampit	Pembangunan drainase di Jln. Aik Rengas Dusun Nibong Punggur Desa Mentawak Kec. kelapa Kampit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Nibong Punggur Desa Mentawak Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
247	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembangunan drainase jalan di Rt.11/04 Desa Aik Kelik Kec. Damar	Pembangunan drainase jalan di Rt.11/04 Desa Aik Kelik Kec. Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Aik Kelik Rt.11/04 Kec. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
248	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	pembangunan drainase jalan gang Lintang Dsn Air Kelik	pembangunan drainase jalan gang Lintang Dsn Air Kelik Gg Lintang Desa Air Kelik	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Dsn Air Kelik, Gg Lintang Desa Air Kelik, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
249	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembangunan drainase jalan P2D Dusun Air Selumar	Pembangunan drainase jalan P2D Dusun Air Selumar Dusun Air Selumar, Rt 16/04 Desa Lintang Simpang Renggang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Air Selumar, Rt 16/04 Desa Lintang Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
250	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembangunan drainase primer di Dusun Taruna Mulya Rt05/02 Desa Lalang	Pembangunan drainase primer di Dusun Taruna Mulya Rt05/02 Desa Lalang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Taruna Mulya Rt.05/02 Desa lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
251	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	pembangunan drainase sepanjang jalan kabupaten	pembangunan drainase sepanjang jalan kabupaten desa Selinsing. Kec Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	desa Selinsing. Kec Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah
252	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan jalan di Kampong Gunong Rt.12 Desa Aik Kelik	Pembangunan jalan di Kampong Gunong Rt.12 Desa Aik Kelik	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Kampong Gunong Rt.12 Desa Aik Kelik Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
25 3	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan jalan di Rt.07/02 Dusun Merdeka Desa Senyubuk Kec. Kelapa Kampit	Pembangunan jalan di Rt.07/02 Dusun Merdeka Desa Senyubuk Kec. Kelapa Kampit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Merdeka Rt.07/02 Desa Senyubuk Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYA H, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
25 4	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan jalan menuju dermaga	Pembangunan jalan menuju dermaga, Dsn Air Kelik, Desa Air Kelik	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Dsn Air Kelik, Desa Air Kelik, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
25 5	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan jalan selindang arah ke laut selindang Dusun Selindang Desa Senyubuk	Pembangunan jalan selindang arah ke laut selindang Dusun Selindang Desa Senyubuk	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Selindang Desa Senyubuk Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYA H, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
25 6	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Pembangunan jalan tani di daerah air degong	Pembangunan jalan tani di daerah air degong Dsn Kebun Sayur RT 11, Air Degong,Ds Mengkubang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk pembahasan lebih lanjut	Daroji, Dsn Kebun Sayur RT 11, Air Degong,Ds Mengkubang , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
25 7	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi Husaini, 49 Tahun, Petani (Air Nyeranai Dusun Air Selumar Desa Lintang)	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Husaini, 49 Tahun, Petani (Air Nyeranai Dusun Air Selumar Desa Lintang) , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
258	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	pembangunan sarana air bersih	pembangunan sarana air bersih desa Dendang, yang embungnya terletak di Dusun Semalar RT 09. Desa Dendang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD Teknis	desa Dendang, yang embungnya terletak di Dusun Semalar RT 09. Desa Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah
259	masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang layak di destinasi wisata, perlunya perbaikan sarana dan prasarana yang rusak dan kurang layak di destinasi wisata dan masih perlunya pengembangan objek wisata baru sebagai alternatif pilihan berwisata	Pembangunan sarana prasarana umum di Tebat Rasau.	Pembangunan sarana prasarana umum di Tebat Rasau. Ds Lintang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Tebat Rasau, Ds Lintang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi TAPD
260	Masih adanya sarana dan prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Pembangunan sarana sekolah SDN 9 Simpang Pesak yang belum ada seperti musolla, ruang komputer, gudang dan kantin	Pembangunan sarana sekolah SDN 9 Simpang Pesak yang belum ada seperti musolla, ruang komputer, gudang dan kantin	Dinas Pendidikan	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	SDN 9 Simpang Pesak, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MARWAN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
261	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan standar yang dianjurkan	Pembangunan/pembuat an MCK (WC umum) sebanyak 3 unit di Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung.	Pembangunan/pembuat an MCK (WC umum) sebanyak 3 unit di Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupate n / Kota	SARDIDI, SE	Verifika si Perangk at Daerah
262	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan standar yang dianjurkan	Pembangunan/pembuat an MCK (WC umum) sebanyak 3 unit di Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung.	Pembangunan/pembuat an MCK (WC umum) sebanyak 3 unit di Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Ds. Batu Penyu Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupate n / Kota	SARDIDI, SE	Verifika si Perangk at Daerah
263	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliha ran Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pembuatan akses jalan di RT.18 Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 500 meter	Pembuatan akses jalan di RT.18 Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 500 meter	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.18, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupate n / Kota	SUPARMAN	Verifika si Perangk at Daerah
264	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembuatan akses jalan di RT.18 Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 500 meter.	Pembuatan akses jalan di RT.18 Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 500 meter.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.18, Ds. Lilangan, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupate n / Kota	SUPARMAN	Verifika si Perangk at Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
265	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembuatan akses jalan penghubung antara RT.18 sampai dengan RT.19 di Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan.	Pembuatan akses jalan penghubung antara RT.18 sampai dengan RT.19 di Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
266	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan bandar air atau drainase di RT.16 Desa Lilangan.	Pembuatan bandar air atau drainase di RT.16 Desa Lilangan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.16, Desa Lilangan, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
267	Pembangunan Jalan dan Jembatan	pembuatan dan pengaspalan jln di depan rumah Pak Cahyo alamat Dusun Harapan Rt.09 Desa Lalang Jaya.	pembuatan dan pengaspalan jln di depan rumah Pak Cahyo alamat Dusun Harapan Rt.09 Desa Lalang Jaya.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Harapan Rt.09 Desa Lalang Jaya (depan rumah Pak Cahyo), Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
268	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang	pembuatan drainase	pembangunan saluran drainase, Desa Kelubi, RT 05. RW 01	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Desa Kelubi, RT 05. RW 01, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	rawan banjir/Genangan								
269	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase	Pembuatan drainase Desa Sukamandi RT7/3.Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD Teknis mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dipastikan lahan dalam keadaan CnC	Desa Sukamandi RT7/3.Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARJANTO JOHANNES, SH	Verifikasi Perangkat Daerah
270	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase	Pembuatan drainase Dusun Balik dan Dusun Air Nangka. Dendang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Balik dan Dusun Air Nangka. Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
27 1	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase	Pembuatan drainase Dusun Aik Lanci Desa Aik Kelik. Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data dukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Aik Lanci Desa Aik Kelik. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARJANTO JOHANNES, SH	Verifikasi Perangkat Daerah
27 2	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase atau bandar	Pembuatan drainase atau bandar RT.09 DUSUN SELUMAR, DESA SELINSING	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	RT.09 DUSUN SELUMAR, DESA SELINSING, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah
27 3	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase atau talud di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 1 km.	Pembuatan drainase atau talud di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 1 km.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.16, Dusun Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
274	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase atau talud di RT.18 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 500 meter.	Pembuatan drainase atau talud di RT.18 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 500 meter.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.18, Dusun Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
275	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase atau talud jalan di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang 1 km.	Pembuatan drainase atau talud jalan di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang 1 km.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
276	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase atau talud jalan di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 500 meter.	Pembuatan drainase atau talud jalan di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 500 meter.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.16, Dsn. Sinar Setiong, Ds. Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
277	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase atau talud sepanjang kurang lebih 500 Meter	Pembuatan drainase atau talud sepanjang kurang lebih 500 Meter , Dsn Sinar Setiong RT 19, Ds Lilangan	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dsn Sinar Setiong RT 19, Ds Lilangan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
278	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase dan perbaikan gorong-gorong	Pembuatan drainase dan perbaikan gorong-gorong RT. 15 Dusun Air Lanci. Desa Aik Kelik. Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data dukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	RT. 15 Dusun Air Lanci. Desa Aik Kelik. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARJANTO JOHANNES , SH	Verifikasi Perangkat Daerah
279	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase di Dusun Harapan Jaya Rt.19 Desa Lalang Jaya karena kalau musim hujan sering banjir sementara kami pakai papan tapi kalau hujan tenggelam dan tidak bisa dilewati.	Pembuatan drainase di Dusun Harapan Jaya Rt.19 Desa Lalang Jaya karena kalau musim hujan sering banjir sementara kami pakai papan tapi kalau hujan tenggelam dan tidak bisa dilewati.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Harapan Jaya Rt.19 Desa Lalang Jaya Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
280	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase di Jalan P2D Dusun Lintang sepanjang 600 meter.	Pembuatan drainase di Jalan P2D Dusun Lintang sepanjang 600 meter. A.n Junaidi J., 57 tahun, Kepala Dusun Lintang (Desa Lintang Kecamatan Simpang Renggang)	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Junaidi J., 57 tahun, Kepala Dusun Lintang (Desa Lintang Kecamatan Simpang Renggang), Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
281	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	pembuatan drainase di RT 002/001 dusun pancur 1	Pembuatan drainase di RT 002/001 dusun pancur 1 Desa Padang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	seputaran rumah nek menot RT 002/001 dusun pancur 1 desa padang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	OMAN ANGGARI, SH, MH	Verifikasi Perangkat Daerah
282	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase di RT.05 Dusun Jaya Desa Lenggang Kecamatan Gantung.	Pembuatan drainase di RT.05 Dusun Jaya Desa Lenggang Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.05, Dusun Jaya, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. HUSAINI RASYID, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
283	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase di RT.19 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan kurang lebih 500 meter.	Pembuatan drainase di RT.19 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan kurang lebih 500 meter.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.19, Dusun Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
284	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase jalan raya	Pembuatan drainase jalan raya RT 06. Dusun Balok. Dendang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	RT 06. Dusun Balok. Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah
285	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	pembuatan drainase sepanjang 1 km	pembuatan drainase sepanjang 1 km jalan Rambat RT. 12 RW 03. Dusun Liring Desa Renggiang. Kec Simpang Renggiang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	jalan Rambat RT. 12 RW 03. Dusun Liring Desa Renggiang. Kec Simpang Renggiang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
286	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase sepanjang 150 meter di Dusun Selindang Desa Senyubuk bagian depan perbatasan Rt.05/02 dengan Rt.06/02	Pembuatan drainase sepanjang 150 meter di Dusun Selindang Desa Senyubuk bagian depan perbatasan Rt.05/02 dengan Rt.06/02	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Selindang Desa Senyubuk perbatasan Rt.05/05 dengan Rt.06 Desa Senyubuk Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
287	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase sepanjang 150 meter di Dusun Selindang Rt.06/02 Desa Senyubuk Kec. Kelapa Kampit, bagian dalam arah ke lapangan bola Renoceros.	Pembuatan drainase sepanjang 150 meter di Dusun Selindang Rt.06/02 Desa Senyubuk Kec. Kelapa Kampit, bagian dalam arah ke lapangan bola Renoceros	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Selindang Rt.06/02 Desa senyubuk Kec. Kelapa kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
288	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase sepanjang jalan	Pembuatan drainase sepanjang jalan Dsn Air Madu II, Ds Air Madu	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dsn Air Madu II, Ds Air Madu, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
289	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase, dan gorong-gorong	Pembuatan drainase, dan gorong-gorong, jalan Manggar-Gantung, dusun Menggarawan RT 01 dan RT 02, Desa Padang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	jalan Manggar-Gantung, dusun Menggarawan RT 01 dan RT 02, Desa Padang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi Perangkat Daerah
290	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	pembuatan drianase di sepanjang jalan Kresna	pembuatan Drainase di sepanjang jalan Kresna Dusun Gunung Desa Lalang Jaya, Kec Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Dusun Gunung Desa Lalang Jaya, Kec Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah
291	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan gorong-gorong atau bes jalan masuk SDN 1 Simpang Renggang	Pembuatan gorong-gorong atau bes jalan masuk SDN 1 Simpang Renggang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	SDN 1 Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
29 2	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan gorong-gorong atau drainase di RT.18 sepanjang 500 meter.	Pembuatan gorong-gorong atau drainase di RT.18 sepanjang 500 meter. RT.18, Ds. Lilangan, Kecamatan Gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.18, Ds. Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
29 3	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan gorong-gorong di RT.18 Desa Lilangan.	Pembuatan gorong-gorong di RT.18 Desa Lilangan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.18, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
29 4	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembuatan jalan tembus dari Trans Lilangan I sampai dengan Trans Lilangan II Desa Lilangan.	Pembuatan jalan tembus dari Trans Lilangan I sampai dengan Trans Lilangan II Desa Lilangan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
29 5	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan	Pembuatan MCK di RT.05 Desa Lilangan	Pembuatan MCK di RT.05 Desa Lilangan RT 05, Kec Gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Lilangan RT 05, Kec Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	standar yang dianjurkan			Kawasan Permukiman					
296	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan standar yang dianjurkan	Pembuatan MCK di RT.05 Desa Lilangan	Pembuatan MCK di RT.05 Desa Lilangan RT 05, Ds Lilangan	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dsn Lilangan RT 05, Ds Lilangan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
297	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan standar yang dianjurkan	Pembuatan MCK sebanyak 2 unit di Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan.	Pembuatan MCK sebanyak 2 unit di Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
298	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pembuatan Pamsimas untuk Dusun Kartini Desa Lalang	Pembuatan Pamsimas untuk Dusun Kartini Desa Lalang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Kartini Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
299	Daerah/Kawasan Permukiman yang Terjadi abrasi(pengikisan tanah pada daerah pesisir pantai yang diakibatkan oleh ombak dan arus laut) atau Rawan akresi akibat sedimentasi dari daratan atau sungai menuju arah laut	Pembuatan pemecah gelombang	Pembuatan pemecah gelombang Pesisir Pantai Wisata Burong Mandi	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD Teknis mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dipastikan lahan dalam keadaan CnC	Pesisir Pantai Wisata Burong Mandi, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARJANTO JOHANNES, SH	Verifikasi Perangkat Daerah
300	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan saluran Air	Pembuatan saluran drainase Desa Lenggang RT.05	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Lenggang RT.05, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. HUSAINI RASYID, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah
301	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	pembuatan saluran drainase	pembuatan saluran drainase RT.15 DESA SELINSING.GANTUNG	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	RT.15 DESA SELINSING.GANTUNG, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
30 2	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pembuatan sumber air bersih atau SPAM di Desa Lilangan	Pembuatan sumber air bersih atau SPAM di Desa Lilangan	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Lilangan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
30 3	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pembuatan sumur bor di Desa Lilangan sebanyak 2 unit.	Pembuatan sumur bor di Desa Lilangan sebanyak 2 unit.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Ds. Lilangan, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
30 4	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pembuatan sumur bor sebanyak 2 unit di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan.	Pembuatan sumur bor sebanyak 2 unit di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.16, Dusun Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
305	Masih adanya lingkungan hunian dan permukiman yang belum didukung Prasarana, sarana dan utilitas secara memadai	Pembuatan Sumur umum di Desa Aik Kelik Rt.11/04 kec. Damar	Pembuatan Sumur umum di Desa Aik Kelik Rt.11/04 kec. Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Aik Kelik Rt.11/04 Kec. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
306	Masih adanya lingkungan hunian dan permukiman yang belum didukung Prasarana, sarana dan utilitas secara memadai	Pembuatan sumur umum/perigi di jalan Gunung Nayak Rt.12 Desa Aik Kelik Kec. Damar	Pembuatan sumur umum/perigi di jalan Gunung Nayak Rt.12 Desa Aik Kelik Kec. Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Jln. Gunung Nayak Rt.12 Desa Aik Kelik Kec. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
307	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan tanggul/Talud, saluran Pembuangan utama menuju Sungai dan normalisasi pada daerah/Kawasan yang terdampak luapan, Pasang Surut,erosi Sungai dan pendangkalan sungai/anak Sungai	pembuatan talud	pembuatan talud depan SDN 21, DUSUN MERANTE, DESA SELINSING	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	depan SDN 21, DUSUN MERANTE, DESA SELINSING, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
308	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan tanggul/Talud, saluran Pembuangan utama menuju Sungai dan normalisasi pada daerah/Kawasan yang terdampak luapan, Pasang Surut, erosi Sungai dan pendangkalan sungai/anak Sungai	Pembuatan talud	Pembuatan talud RT. 13. Dusun Libut. Desa Sukamandi. Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT. 13. Dusun Libut. Desa Sukamandi. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	YOHENDRA	Verifikasi Perangkat Daerah
309	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan talud atau drainase dari RT.16 sampai dengan RT.17 Dusun Air Selumar Desa Lintang sepanjang kurang lebih 1 km	Pembuatan talud atau drainase dari RT.16 sampai dengan RT.17 Dusun Air Selumar Desa Lintang sepanjang kurang lebih 1 km	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.16 sampai dengan RT.17 Dusun Air Selumar Desa Lintang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
310	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan talud atau drainase di RT.15 Dusun Air Selumar Desa Lintang.	Pembuatan talud atau drainase di RT.15 Dusun Air Selumar Desa Lintang.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.15 Dusun Air Selumar Desa Lintang., Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
311	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan talud dan bibir jalan dari RT.22 sampai dengan RT.27 Dusun Langkang Desa Lintang sepanjang kurang lebih 2 km.	Pembuatan talud dan bibir jalan dari RT.22 sampai dengan RT.27 Dusun Langkang Desa Lintang sepanjang kurang lebih 2 km.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	dari RT.22 sampai dengan RT.27 Dusun Langkang Desa Lintang , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
312	Pembangunan, peningkatan,rehabilitasi, pemeliharaan tanggul/Talud, saluran Pembangunan utama menuju Sungai dan normalisasi pada daerah/Kawasan yang terdampak luapan, Pasang Surut,erosi Sungai dan pendangkalan sungai/anak Sungai	Pembuatan talud saluran air	Pembuatan talud saluran air RT. 20 RW. 09.Dusun Garumedang. Desa Sukamandi. Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT. 20 RW. 09.Dusun Garumedang. Desa Sukamandi. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	YOHENDRA	Verifikasi Perangkat Daerah
313	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan standar yang dianjurkan	Pembuatan WC	Pembuatan WC Desa Sukamandi. RT 7/3.Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis,	Desa Sukamandi. RT 7/3.Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARJANTO JOHANNES , SH	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
314	Masih adanya lingkungan hunian dan permukiman yang belum didukung Prasarana, sarana dan utilitas secara memadai	Pembuatan WC umum	Pembuatan WC umum, Dusun Ursan Jaya RT 01, RW 01, Desa Padang. Kec Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Dusun Ursan Jaya RT 01, RW 01, Desa Padang. Kec Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah
315	Masih adanya lingkungan hunian dan permukiman yang belum didukung Prasarana, sarana dan utilitas secara memadai	Pembuatan WC umum di Desa Aik Kelik Rt.11/04 Kec. Damar	Pembuatan WC umum di Desa Aik Kelik Rt.11/04 Kec. Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Aik Kelik Rt.11/04 Kec. Damar , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYA H, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
316	Masih adanya lingkungan hunian dan permukiman yang belum didukung Prasarana, sarana dan utilitas secara memadai	Pembuatan WC umum di Jln. Gunong Nayok Desa Aik Kelik Rt.12/04 Kec. Damar	Pembuatan WC umum di Jln. Gunong Nayok Desa Aik Kelik Rt.12/04 Kec. Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Jln. Gunong Nayok Desa Aik Kelik Rt.12/04 Kec. Damar , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYA H, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
317	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pemenuhan kebutuhan air di Dusun Kartini Rt.01/01 Desa lalang	Pemenuhan kebutuhan air di Dusun Kartini Rt.01/01 Desa lalang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Kartini Rt.01/01 Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
318	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Penambahan akses jalan aspal ke sawah Air Nyeranai sepanjang kurang lebih 1 km di Dusun Air Selumar Desa Lintang.	Penambahan akses jalan aspal ke sawah Air Nyeranai sepanjang kurang lebih 1 km di Dusun Air Selumar Desa Lintang.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Husaini, 49 Tahun, Petani (Air Nyeranai Dusun Air Selumar Desa Lintang), Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
319	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Penambahan jaringan air PAM	Penambahan jaringan air PAM Dusun Bahagia. Desa Pembaharuan. Kelapa Kampit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Bahagia. Desa Pembaharuan. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	YOHENDRA	Verifikasi Perangkat Daerah
320	Optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan yang profesional dan komprehensif	Penambahan ruang rawat inap, fasilitas dan tenaga kesehatan	Penambahan ruang rawat inap, fasilitas dan tenaga kesehatan puskesmas Dendang	Dinas Kesehatan	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	puskesmas Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi TAPD
321	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Penerangan lampu jalan	Penerangan lampu jalan RT 18 Dusun Garumedang Desa Sukamandi. Damar	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	RT 18 Dusun Garumedang Desa Sukamandi. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	YOHENDRA	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
32 2	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pengadaan KWH listrik dan pembuatan 2 set sumur bor di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan.	Pengadaan KWH listrik dan pembuatan 2 set sumur bor di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.16, Dsn. Sinar Setiong, Ds. Lilangan, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
32 3	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Pengadaan mesin pengolahan mesin organik	Pengadaan mesin pengolahan mesin organik Desa Lintang Simpang Renggang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Desa Lintang Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
32 4	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pengadaan SPAM atau PDAM di Kecamatan Simpang Renggang	Pengadaan SPAM atau PDAM di Kecamatan Simpang Renggang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
32 5	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	pengasapalan jalan	pengasapalan jalan RT.24 dan RT .25 DUSUN MERANTE. DESA SELINSING	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	RT.24 dan RT .25 DUSUN MERANTE. DESA SELINSING, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
326	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengaspalan akses jalan Desa Lilangan	Pengaspalan akses jalan Dsn Air Sambar RT 10, Ds Lilangan	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dsn Air Sambar RT 10, Ds Lilangan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
327	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengaspalan akses jalan ke TPU Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 500 meter.	Pengaspalan akses jalan ke TPU Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 500 meter.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
328	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengaspalan akses jalan P2D Dusun Air Selumar Desa Lintang sepanjang 2 km	Pengaspalan akses jalan P2D Dusun Air Selumar Desa Lintang sepanjang 2 km	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	jalan P2D Dusun Air Selumar Desa Lintang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
329	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengaspalan akses jalan SDN 1Sp Renggiang sepanjang 200 meter	Pengaspalan akses jalan SDN 1Sp Renggiang sepanjang 200 meter	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	SDN 1Sp Renggiang , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
330	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Pengaspalan atau peningkatan akses jalan ke kebun	Pengaspalan atau peningkatan akses jalan ke kebun Dusun Air Madu II Desa Aik Madu	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Air Madu II Desa Aik Madu, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
331	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengaspalan di jalan TPU di Desa Air Madu Desa Air Madu sepanjang kurang lebih 500 meter.	Pengaspalan di jalan TPU di Desa Air Madu Desa Air Madu sepanjang kurang lebih 500 meter.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	jalan TPU di Desa Air Madu, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
332	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	pengaspalan jalan	pengaspalan jalan Jalan SDN 8 SELINSING. KECAMATAN GANTUNG	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Jalan SDN 8 SELINSING. KECAMATAN GANTUNG, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah
333	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	pengaspalan jalan	pengaspalan jalan jalan eks tambang III, RT.17 DUSUN SELINSING sekitar 200 meter	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	jalan eks tambang III, RT.17 DUSUN SELINSING sekitar 200 meter, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
334	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	pengaspalan jalan	pengaspalan jalan jalan Gang Gelena, belakang BKJM, Desa Selinsing. Gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	jalan Gang Gelena, belakang BKJM, Desa Selinsing. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah
335	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengaspalan jalan	Pengaspalan jalan RT 06-07 Dusun Jaya Bakti. Dendang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	RT 06-07 Dusun Jaya Bakti. Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah
336	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengaspalan jalan	Pengaspalan jalan RT. 07 Dusun Selindang. Desa Senyubuk. Kelapa Kampit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT. 07 Dusun Selindang. Desa Senyubuk. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	YOHENDRA	Verifikasi Perangkat Daerah
337	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pengaspalan jalan di Dusun Taruna Mulya Rt.04/02 Desa Lalang	Pengaspalan jalan di Dusun Taruna Mulya Rt.04/02 Desa Lalang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Taruna Mulya Rt.04/02 Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
338	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengaspalan jalan di samping Kantor Camat untuk perumahan masyarakat	Pengaspalan jalan di samping Kantor Camat untuk perumahan masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	desa Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
339	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Pengaspalan jalan kebun sepanjang kurang lebih 3 km di Dusun Air Madu II Desa Air Madu Kecamatan Simpang Renggang.	Pengaspalan jalan kebun sepanjang kurang lebih 3 km di Dusun Air Madu II Desa Air Madu Kecamatan Simpang Renggang.	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, mohon dilengkapi dengan data dukung	Dusun Air Madu II Desa Air Madu Kecamatan Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
340	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	pengaspalan jalan lanjutan sepanjang 350 m	pengaspalan jalan lanjutan sepanjang 350 m, jalan rambat, RT 12, Dusun Liring Desa Renggang. Kecamatan Simpang Renggang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	jalan rambat, RT 12, Dusun Liring Desa Renggang. Kecamatan Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah
341	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengaspalan jalan lingkaran sepanjang kurang lebih 2 km	Pengaspalan jalan lingkaran sepanjang kurang lebih 2 km Dsn Sinar Setiong RT 15 Ds Lilangan	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dsn Sinar Setiong RT 15 Ds Lilangan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
34 2	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengaspalan Jalan Lingkup Dsn Jangkang	Pengaspalan Jalan Lingkup Dsn Jangkang RT.03 sampai dengan RT.04	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dsn Jangkang RT.03 sampai dengan RT.04, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
34 3	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pengaspalan jalan Pangkapan Damar dengan panjang 3 km	Pengaspalan jalan Pangkapan Damar dengan panjang 3 km Dusun Aik Selumar Desa Lintang Simpang Renggang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Aik Selumar Desa Lintang Simpang Renggang , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
34 4	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	pengaspalan jalan pemukiman di RT 005 desa lilangan	pengaspalan jalan pemukiman di RT 005 desa lilangan	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Tini desa lilangan kecamatan gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHARTINI	Verifikasi Perangkat Daerah
34 5	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengaspalan jalan pemukiman warga di RT.13 sampai dengan RT.11 Dusun Liring Desa Renggang Kecamatan Simpang Renggang.	Pengaspalan jalan pemukiman warga di RT.13 sampai dengan RT.11 Dusun Liring Desa Renggang Kecamatan Simpang Renggang.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.13 sampai dengan RT.11 Dusun Liring Desa Renggang Kecamatan Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
346	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengaspalan jalan sawah	Pengaspalan jalan sawah RT. 10 Dusun Air Nangka Desa Balok. Dendang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Jalan sawah RT. 10 Dusun Air Nangka Desa Balok. Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah
347	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengerasan atau pengaspalan jalan wisata Gunung Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 1 km.	Pengerasan atau pengaspalan jalan wisata Gunung Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 1 km. Jl. Wisata Gunung Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Wisata Gunung Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
348	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengerasan jalan ke makam di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 1 km.	Pengerasan jalan ke makam di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 1 km.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.16, Dusun Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
349	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengerasan jalan sepanjang kurang lebih 500 meter di RT.18 Desa Lilangan	Pengerasan jalan sepanjang kurang lebih 500 meter di RT.18 Dsn Sinar setiong RT 18 Ds Lilangan	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dsn Sinar setiong RT 18 Ds Lilangan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
350	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Peningkatan akses jalan atau pengaspalan akses jalan ke bukit tempat wisata sepanjang kurang lebih 2 km.	Peningkatan akses jalan atau pengaspalan akses jalan ke bukit tempat wisata sepanjang kurang lebih 2 km. Saipil Nazar, 42 Tahun, Buruh Harian (Dusun Renggiang II Desa Renggiang)	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Saipil Nazar, 42 Tahun, Buruh Harian (Dusun Renggiang II Desa Renggiang) , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
351	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Peningkatan akses jalan di Kecamatan Simpang Pesak.	Peningkatan akses jalan di Kecamatan Simpang Pesak. Kecamatan simpang pesak	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Kecamatan simpang pesak, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
352	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Peningkatan akses jalan di RT.15 Desa Lilangan.	Peningkatan akses jalan di RT.15 Desa Lilangan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.15, Ds. Lilangan, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
353	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Peningkatan akses jalan di RT.18 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 500 meter.	Peningkatan akses jalan di RT.18 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 500 meter.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.18, Dusun Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
354	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Peningkatan akses jalan Dusun Lintang Desa Lintang sepanjang kurang lebih 4 km.	Peningkatan akses jalan Dusun Lintang Desa Lintang sepanjang kurang lebih 4 km.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Lintang Desa Lintang , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
355	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Peningkatan akses jalan ekonomi wisata arah ke bukit I Dusun Renggiang II Desa Renggiang.	Peningkatan akses jalan ekonomi wisata arah ke bukit I Dusun Renggiang II Desa Renggiang.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	bukit I Dusun Renggiang II Desa Renggiang., Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
356	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Peningkatan akses jalan sepakbola di Dusun Liring Desa Renggiang Kecamatan Simpang Renggiang	Peningkatan akses jalan sepakbola di Dusun Liring Desa Renggiang Kecamatan Simpang Renggiang Dusun Liring Desa Renggiang Kecamatan Simpang Renggiang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Liring Desa Renggiang Kecamatan Simpang Renggiang , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
357	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Peningkatan akses jalan tani di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 2 km.	Peningkatan akses jalan tani di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 2 km.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.16, Dusun Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
358	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Peningkatan akses jalan tani sepanjang kurang lebih 1 km dari jalan Air Batu sampai dengan jalan Air Nyanduk.	Peningkatan akses jalan tani sepanjang kurang lebih 1 km dari jalan Air Batu sampai dengan jalan Air Nyanduk.	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	dari jalan Air Batu sampai dengan jalan Air Nyanduk, Ds Lintang , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
359	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Peningkatan akses jalan usaha tani di Desa Lilangan.	Peningkatan akses jalan usaha tani di Desa Lilangan.	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk dibahas lebih lanjut, mohon untuk dilengkapi data dukung	Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
360	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Peningkatan akses jalan usaha tani di Desa Simpang Renggang.	Peningkatan akses jalan usaha tani di Desa Simpang Renggang.	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Desa Simpang Renggang., Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
361	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Peningkatan akses jalan usaha tani di Dusun Marga Mulia sepanjang 1 km di Dusun Renggang Desa Renggang.	Peningkatan akses jalan usaha tani di Dusun Marga Mulia sepanjang 1 km di Dusun Renggang Desa Renggang.	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Marga Mulia , Ds Sp Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
362	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Peningkatan akses jalan usaha tani di RT.16 Dusun Sinar Setiong sepanjang 2 km.	Peningkatan akses jalan usaha tani di RT.16 Dusun Sinar Setiong sepanjang 2 km.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.16, Dusun Sinar Setiong, Ds. Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
363	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Peningkatan akses jalan usaha tani di RT.16 Dusun Sinar Setiong sepanjang 2 km.	Peningkatan akses jalan usaha tani di RT.16 Dusun Sinar Setiong sepanjang 2 km.	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	RT.16, Dusun Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
364	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Peningkatan akses jalan usaha tani sawah di Dusun Air Ruak Desa Simpang Tiga	Peningkatan akses jalan usaha tani sawah di Dusun Air Ruak Desa Simpang Tiga	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Air Ruak Desa Simpang Tiga , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
365	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Peningkatan akses jalan usaha tani sepanjang 2 km di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan.	Peningkatan akses jalan usaha tani sepanjang 2 km di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.16, Dsn. Sinar Setiong, Ds. Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
366	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Peningkatan atau pengaspalan akses jalan pariwisata di Trans Lilangan Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 1 km.	Peningkatan atau pengaspalan akses jalan pariwisata di Trans Lilangan Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 1 km.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Trans Lilangan, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
367	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan	Peningkatan atau pengaspalan akses jalan Tebat Rasau sepanjang kurang lebih 1 km	Peningkatan atau pengaspalan akses jalan Tebat Rasau sepanjang kurang lebih 1 km	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	jalan Tebat Rasau Desa Lintang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	Pelebaran Jalan Menuju Standar								
368	masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang layak di destinasi wisata, perlunya perbaikan sarana dan prasarana yang rusak dan kurang layak di destinasi wisata dan masih perlunya pengembangan objek wisata baru sebagai alternatif pilihan berwisata	Peningkatan infrastruktur di area pantai di Belitung Timur agar lebih menarik sehingga dapat menarik wisatawan	Peningkatan infrastruktur di area pantai di Belitung Timur agar lebih menarik sehingga dapat menarik wisatawan Kecamatan Kelapa Kampit	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Kecamatan Kelapa Kampit , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi TAPD
369	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Peningkatan jalan	Peningkatan jalan Jalan sawah RT 10. Dusun Air Nangka. Desa Balok	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Jalan sawah RT 10. Dusun Air Nangka. Desa Balok, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
370	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	peningkatan jalan akses menuju dermaga tambat Tanjung Mudong	peningkatan jalan akses menuju dermaga tambat Tanjung Mudong Desa Selinsing. Kecamatan Gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dermaga, Tanjung Mudong, Desa Selinsing. Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah
371	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Peningkatan Jalan berupa jalan aspal hotmix di Jl. Aik Bandung dan Jl. Buje, Desa Batu Penyu.	Peningkatan Jalan berupa jalan aspal hotmix di Jl. Aik Bandung dan Jl. Buje, Desa Batu Penyu	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Ds. Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
372	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Peningkatan jalan, pengaspalan jalan	Peningkatan jalan, pengaspalan jalan Jalan PPIP(Belakang kuburan Cina) RT.18 DESA SELINSING	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Jalan PPIP(Belakang kuburan Cina) RT.18 DESA SELINSING, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah
373	Optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan yang profesional dan komprehensif	Peningkatan pelayanan kepada pengguna BPJS kesehatan agar tidak diperlambat atau dipersulit pada saat pengobatan	Peningkatan pelayanan kepada pengguna BPJS kesehatan agar tidak diperlambat atau dipersulit pada saat pengobatan Dusun Lintang Desa Lintang kec Simpang Renggang	Dinas Kesehatan	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Dusun Lintang Desa Lintang kec Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
374	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan akses di Desa Limbongan Kecamatan Gantung	Rehabilitasi akses jalan di Desa Limbongan Kecamatan Gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Limbungan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
375	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan akses jalan di Desa Lilangan Kecamatan Gantung	Rehabilitasi akses jalan di Desa Lilangan Kecamatan Gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Lilangan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
376	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan akses jalan di RT.15 Dusun Air Selumar Desa Lintang.	Perbaikan akses jalan di RT.15 Dusun Air Selumar Desa Lintang.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.15 Dusun Air Selumar Desa Lintang., Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
377	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan akses jalan sepanjang kurang lebih 500 meter	Perbaikan akses jalan sepanjang kurang lebih 500 meter, di RT.4 Dusun Pancur II Desa Padang Kecamatan Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	di RT.4 Dusun Pancur II Desa Padang Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
378	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan Akses sepanjang jalan Desa Limbongan Kecamatan Gantung	Rehabilitasi jalan pada Desa Limbongan Kecamatan Gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Limbungan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
379	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Perbaikan atau pengaspalan akses jalan ke kebun Air Nyanduk Desa Lintang	Perbaikan atau pengaspalan akses jalan ke kebun Air Nyanduk Desa Lintang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	akses jalan ke kebun Air Nyanduk Desa Lintang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
380	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan atau peningkatan akses jalan di RT.18 Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 500 meter.	Perbaikan atau peningkatan akses jalan di RT.18 Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 500 meter.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Lilangan, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
381	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Perbaikan bandar talud di sekitar Jalan Laskar Pelangi karena sering terjadi banjir di saat musim hujan.	Perbaikan bandar talud di sekitar Jalan Laskar Pelangi karena sering terjadi banjir di saat musim hujan. Desa Lenggang, Kecamatan Gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. HUSAINI RASYID, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
38 2	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	perbaikan dan pelebaran jalan didusun limbongan kecamatan gantung	perbaikan dan pelebaran jalan didusun limbongan kecamatan gantung A.n darli dusun limbongan kecamatan gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	darli dusun limbongan kecamatan gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHARTINI	Verifikasi Perangkat Daerah
38 3	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Perbaikan drainase	Perbaikan drainase, RT 32 RW 14 Dusun Assalam Desa Baru. kec MANGGAR	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	RT 32 RW 14 Dusun Assalam Desa Baru. kec MANGGAR, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah
38 4	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Perbaikan drainase di Dusun Ban Motor Desa Lalang Rt.01/01 sepanjang kurleb 300 meter	Perbaikan drainase di Dusun Ban Motor Desa Lalang Rt.01/01 sepanjang kurleb 300 meter	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Ban Motor Rt.01/01 Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
385	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Perbaikan drainase di Jalan Lintang Rt.05/04 Desa Aik Kelik Kec. Damar	Perbaikan drainase di Jalan Lintang Rt.05/04 Desa Aik Kelik Kec. Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Jln. Lintang Rt.05/04 Desa Aik Kelik Kec. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
386	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Perbaikan drainase di RT.15 RW.03 Desa Lintang.	Perbaikan drainase di RT.15 RW.03 Desa Lintang.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.15 RW.03 Desa Lintang., Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
387	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Perbaikan drainase Dusun Durian Rt.03/02 sepanjang kurang lebih 150 meter (depan rumah Hendro)	Perbaikan drainase Dusun Durian Rt.03/02 sepanjang kurang lebih 150 meter (depan rumah Hendro)	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Durian Rt.03/02 Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
388	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	perbaikan jalan	perbaikan jalan yang rusak, RT 37, SEBERANG MINAPOLITAN DESA KURNIA JAYA	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	RT 37, SEBERANG MINAPOLITAN DESA KURNIA JAYA, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah
389	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	perbaikan jalan	perbaikan jalan yang rusak di PTU Kematang, Dusun Birah. Desa Kelubi. Kec Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	di PTU Kematang, Dusun Birah. Desa Kelubi. Kec Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah
390	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	perbaikan jalan	perbaikan jalan yang rusak, dusun lipat kajang II, RT 27 RW 12. DESA BARU KECAMATAN MANGGAR	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	dusun lipat kajang II, RT 27 RW 12. DESA BARU KECAMATAN MANGGAR, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi Perangkat Daerah
391	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	perbaikan jalan	perbaikan jalan JALAN PANTAI SENTIGI DESA DUKONG. KEC SIMPANG PESAK	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	JALAN PANTAI SENTIGI DESA DUKONG. KEC SIMPANG PESAK, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
39 2	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan Jalan	Perbaikan Jalan Dsn. Assalam II Ds. Baru	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Dsn. Assalam II Ds. Baru, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MIRZA SAPUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah
39 3	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	perbaikan jalan	perbaikan jalan Dusun Limbongan II, RT. 06, DESA LIMBONGAN	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Limbongan II, RT. 06, DESA LIMBONGAN, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah
39 4	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan Jalan	Rehabilitasi jalan yang rusak Dsn.Aik Ruak Desa Aik Ruak Kecamatan Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Dsn.Aik Ruak Desa Aik Ruak Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MIRZA SAPUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah
39 5	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	perbaikan jalan	perbaikan jalan Jalan PAUD PEMATANG PERMAI, JALAN MERANTI RT 12. DESA SELINSING. GANTUNG	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Jalan PAUD PEMATANG PERMAI, JALAN MERANTI RT 12. DESA SELINSING. GANTUNG, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
396	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan jalan	Perbaikan jalan Jalan tembus RT. 09 ke RT 12.Dusun Balai Selatan. Desa Mayang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jalan tembus RT. 09 ke RT 12.Dusun Balai Selatan. Desa Mayang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	YOHENDRA	Verifikasi Perangkat Daerah
397	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan jalan	Perbaikan jalan RT. 15. Dusun Air Lanci. Desa Aik Kelik. Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	USulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan data dukung dan dipasstikan lahan dalam kondisi CnC	RT. 15. Dusun Air Lanci. Desa aik Kelik. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARJANTO JOHANNES , SH	Verifikasi Perangkat Daerah
398	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan jalan	Perbaikan jalan RT 11.Dusun Aik Lanci Desa Aik Kelik. Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	RT 11.Dusun Aik Lanci Desa Aik Kelik. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARJANTO JOHANNES , SH	Verifikasi Perangkat Daerah
399	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	perbaikan jalan	Perbaikan jalan yang rusak RT .36 SEBERANG MINAPOLITAN, DESA KURNIA JAYA	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	RT .36 SEBERANG MINAPOLITAN, DESA KURNIA JAYA, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
400	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	perbaikan jalan	perbaikan jalan yang rusak Dusun Birah RT 05, RW 01 Desa Kelubi.kec Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Dusun Birah RT 05, RW 01 Desa Kelubi.kec Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah
401	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan jalan	Perbaikan jalan P2 D Kampong Nibong. Dusun Aik Lanci. Desa Aik Kelik. Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data dukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	P2 D Kampong Nibong. Dusun Aik Lanci. Desa Aik Kelik. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARJANTO JOHANNES, SH	Verifikasi Perangkat Daerah
402	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan jalan aspal depan SMPN 4 Manggar yang sampai sekarang belum terlaksana	Perbaikan jalan aspal depan SMPN 4 Manggar yang sampai sekarang belum terlaksana Dusun Teratai Desa Lalang Jaya Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Teratai Desa Lalang Jaya Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
403	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan jalan aspal Dusun Ban Motor Rt.01/01 Desa Lalang	Perbaikan jalan aspal Dusun Ban Motor Rt.01/01 Desa Lalang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Ban Motor Rt.01/01 Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
404	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan jalan dekat Toko Samsidi	Perbaikan jalan dekat Toko Samsidi Dusun Harapan Desa Lalang Jaya Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Harapan Desa Lalang Jaya Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
405	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan jalan di depan di depan SDN 7 Manggar	Perbaikan jalan di depan di depan SDN 7 Manggar Dusun Harapan Desa Lalang Jaya	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Harapan Desa Lalang Jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
406	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan jalan di Dusun Sekip Rt.04/02 Desa Lalang	Perbaikan jalan di Dusun Sekip Rt.04/02 Desa Lalang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Sekip Rt.04/02 Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
407	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan jalan di Dusun Sekip Rt.05/02 perlu diaspal sudah berlobang kurleb 200-300 meter	Perbaikan jalan di Dusun Sekip Rt.05/02 perlu diaspal sudah berlobang kurleb 200-300 meter	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Sekip Rt.05/02 Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
408	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Perbaikan jalan pertanian di kelompok tani air perpat	Perbaikan jalan pertanian di kelompok tani air perpat, Jl Air Terjun Dam, Dsn Tanah Tebok, Ds Burung Mandi	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk pembahasan lebih lanjut	Jl Air Terjun Dam, Dsn Tanah Tebok, Ds Burung Mandi, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
409	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan Jalan rusak di kec Damar	Perbaikan Jalan rusak di Desa Sukamandi kec Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Sukamandi, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
410	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan jalan setapak di Dusun Gunung Desa Lalang Jaya	Perbaikan jalan setapak di Dusun Gunung Desa Lalang Jaya	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Gunung Desa Lalang Jaya Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
411	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan jalan setapak di Dusun Kartini Rt.01/01 Desa Lalang	Perbaikan jalan setapak di Dusun Kartini Rt.01/01 Desa Lalang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Kartini Rt.01/01 Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
41 2	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	perbaikan jalan trans Sidorejo	perbaikan jalan trans Sidorejo A.n untung dusun bira desa simpang pesak kecamatan simpang pesak	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	untung dusun bira desa simpang pesak kecamatan simpang pesak, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHARTINI	Verifikasi Perangkat Daerah
41 3	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan jalan yang rusak dikarenakan terkikis oleh air/abrasi di jalan menuju ke pantai Gusong Cine tepatnya di jembatan pok 2 di pinggir/tepi jalan arah menuju ke RT.18.	Perbaikan jalan yang rusak dikarenakan terkikis oleh air/abrasi di jalan menuju ke pantai Gusong Cine tepatnya di jembatan pok 2 di pinggir/tepi jalan arah menuju ke RT.18.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Gusong Cine, RT. 18, Desa Batu Penyu, kecamatan gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
41 4	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan jalan yang rusak menuju ke laut pering untuk nelayan desa air kelik	Perbaikan jalan yang rusak menuju ke laut pering untuk nelayan desa air kelik	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Air Kelik, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
41 5	Belum optimalnya pembudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	Perbaikan lapangan futsal Desa Aik Kelik Kec. Damar	Perbaikan lapangan futsal Desa Aik Kelik Kec. Damar	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Desa Aik Kelik Kec Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
416	Belum optimalnya pembudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	Perbaikan lapangan Volly, net	Perbaikan lapangan Volly, net A.n Wawan, Dsn Damar RT 1 Ds Mengkubang	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Wawan, Dsn Damar RT 1 Ds Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi TAPD
417	Optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan yang profesional dan komprehensif	Perbaikan Pustu Desa Lilangan Kecamatan Gantung	Perbaikan Pustu Desa Lilangan Kecamatan Gantung	Dinas Kesehatan	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Desa Lilangan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi TAPD
418	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	perbaikan ruas jalan raya gantung simpang pesak	perbaikan ruas jalan raya gantung simpang pesak	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	jalan raya gantung sampai simpang pesak , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHARTINI	Verifikasi Perangkat Daerah
419	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	perbaikan selokan/saluran drainase	Pemeliharaan selokan/saluran drainase yang rusak Dusun Gajah Mada, RT.4 RW 2, Desa mekar Jaya	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Dusun Gajah Mada, RT.4 RW 2, Desa mekar Jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
420	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Perbaikan talud atau jembatan Air Nayun di Desa Lilangan	Perbaikan talud atau jembatan Air Nayun di Desa Lilangan	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Air Nayun Desa Lilangan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
421	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan/rehabilitasi jalan TPU di Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung.	Perbaikan/rehabilitasi jalan TPU di Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Jangkar, Asam Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
422	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikannya jalan laut Subang	Perbaikannya jalan laut Subang Desa Pembaharuan. Kelapa Kampit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jalan Laut Subang. Desa Pembaharuan. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	YOHENDRA	Verifikasi Perangkat Daerah
423	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan	Perbaikannya WC umum	Perbaikannya WC umum Jalan Bahagia RT. 04 RW 02.Desa Pembaharuan. Kelapa Kampit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jalan Bahagia RT. 04 RW 02.Desa Pembaharuan. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	YOHENDRA	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	standar yang dianjurkan								
424	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaiki jalan ekonomi dan pengaspalan jalan demi kelancaran ekonomi	Perbaiki jalan ekonomi dan pengaspalan jalan demi kelancaran ekonomi Dusun lintang Desa Lintang Simpang Renggiang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun lintang Desa Lintang Simpang Renggiang , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
425	Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaan Kesehatan belum optimal	Perlu adanya upaya pencegahan penyakit demam berdarah	Perlu adanya upaya pencegahan penyakit demam berdarah Dusun Air Lanci. Desa Air Kelik. Damar	Dinas Kesehatan	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Dusun Air Lanci. Desa Air Kelik. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARJANTO JOHANNES , SH	Verifikasi TAPD
426	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Perlu bantuan bibit sawit, cabe, kacang panjang, salak dan pupuk di Desa Renggiang	Perlu bantuan bibit sawit, cabe, kacang panjang, salak dan pupuk di Desa Renggiang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Desa Renggiang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	AKHIRUDDIN, A.Md	Verifikasi Perangkat Daerah
427	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang	Perlunya Drainase di Dsn. Arab II RT 19 Desa Kurnia	Pembangunan Drainase di Dsn. Arab II RT 19 Desa Kurnia	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Dsn. Arab II RT 19 Desa Kurnia, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	FEZZY UKTOLSEJA, SE, MM	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	rawan banjir/Genangan								
428	Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga	Perlunya pencegahan dan pengetahuan untuk remaja agar tidak terjerumus kepada seks bebas	Perlunya pencegahan dan pengetahuan untuk remaja agar tidak terjerumus kepada seks bebas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARJANTO JOHANNES, SH	Verifikasi TAPD
429	Masih Belum Optimalnya Pengelolaan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM	Permohonan akan perhatian pemerintah daerah kepada para pelaku pedagang kecil pembuat tempe, dimana harga kacang kedelai dipasaran sangat tinggi. Mohon dengan sangat, harga kacang kedelai dipasaran agar bisa diturunkan demi kesejahteraan para pedagang kecil pembuat tempe.	Permohonan akan perhatian pemerintah daerah kepada para pelaku pedagang kecil pembuat tempe, Dusun Cangu, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Cangu, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi TAPD
430	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Permohonan pemasangan polisi tidur (alat pembatas kecepatan/markah kejut) di area SDN 20 Gantung.	Permohonan pemasangan polisi tidur (alat pembatas kecepatan/markah kejut) di area SDN 20 Gantung.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Desa Limbongan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	FEZZY UKTOLSEJA, SE, MM	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
43 1	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Permohonan pemasangan polisi tidur (alat pembatas kecepatan/markah kejut) di area SMP Negeri 3 Gantung.	Permohonan pemasangan polisi tidur (alat pembatas kecepatan/markah kejut) di area SMP Negeri 3 Gantung.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	FEZZY UKTOLSEJA, SE, MM	Verifikasi TAPD
43 2	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Permohonan pemasangan polisi tidur (alat pembatas kecepatan/markah kejut) di sepanjang Jl. Diponegoro Dusun Cangu Desa Lenggang Kecamatan Gantung.	Permohonan pemasangan polisi tidur (alat pembatas kecepatan/markah kejut) di sepanjang Jl. Diponegoro Dusun Cangu Desa Lenggang Kecamatan Gantung.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, Mohon dilengkapi dengan data pendukung	Jl. Diponegoro, Dusun Cangu, Desa Lenggang, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSONO SULAI	Verifikasi TAPD
43 3	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Permohonan pemasangan polisi tidur (alat pembatas kecepatan/markah kejut) di sepanjang Jl. Diponegoro, Dusun Cangu, Desa Lenggang.	Permohonan pemasangan polisi tidur (alat pembatas kecepatan/markah kejut) di sepanjang Jl. Diponegoro, Dusun Cangu, Desa Lenggang.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, Mohon dilengkapi dengan data pendukung	Jl. Diponegoro, Dusun Cangu, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSONO SULAI	Verifikasi TAPD
43 4	Masih adanya lingkungan hunian dan permukiman yang belum didukung Prasarana, sarana dan utilitas secara memadai	Permohonan pembangunan gedung serba guna di Kecamatan Dendang.	Permohonan pembangunan gedung serba guna di Kecamatan Dendang.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Kecamatan Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
43 5	Masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan Nelayan untuk mengembangkan usaha perikanan tangkap (Pelatihan Pembuatan Kapal Fiber dan Perbaikan Mesin Kapal)	Permohonan akan adanya pelatihan untuk pembuatan perahu fiber di Desa Batu Penyu.	Permohonan akan adanya pelatihan untuk pembuatan perahu fiber di Desa Batu Penyu.	Dinas Perikanan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, mohon dilengkapi dengan data dukung	Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi TAPD
43 6	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan standar yang dianjurkan	Permohonan akan bantuan pembangunan WC.	Permohonan akan bantuan pembangunan WC. Dusun Seberang, Desa Selinsing, Kecamatan Gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Seberang, Desa Selinsing, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah
43 7	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan standar yang dianjurkan	Permohonan akan bantuan pembangunan WC.	Permohonan akan bantuan pembangunan WC. Dusun Batu Belida, Desa Tanjung Kelumpang, Kecamatan Simpang Pesak	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Batu Belida, Desa Tanjung Kelumpang, Kecamatan Simpang Pesak, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah
43 8	Masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan Nelayan untuk mengembangkan usaha perikanan tangkap (Pelatihan Pembuatan Kapal Fiber dan Perbaikan Mesin Kapal)	Permohonan akan bantuan perahu untuk nelayan kecil.	Permohonan akan bantuan perahu untuk nelayan kecil. Kecamatan Gantung	Dinas Perikanan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk dibahas lebih lanjut, mohon untuk dilengkapi data dukung	Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
439	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Permohonan akan bantuan pupuk dan bibit sayuran.	Permohonan akan bantuan pupuk dan bibit sayuran.	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk dibahas lebih lanjut, mohon untuk dilengkapi data dukung	Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSONO SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah
440	Masih kurangnya ketersediaan pupuk di tingkat petani perkebunan	Permohonan akan bantuan pupuk dan bibit sayuran.	Permohonan akan bantuan pupuk dan bibit sayuran Kec. Gantung	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk dibahas lebih lanjut, mohon untuk dilengkapi data dukung	Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSONO SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah
441	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan akan perbaikan jalan aspal dan saluran drainase di sepanjang Jl. Dewi Sartika, Desa Lenggang.	Permohonan akan perbaikan jalan aspal dan saluran drainase di sepanjang Jl. Dewi Sartika, Desa Lenggang.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Dewi Sartika, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSONO SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah
442	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan akan perbaikan jalan aspal dan saluran drainase di sepanjang Jl. Dewi Sartika, Desa Lenggang.	Permohonan akan perbaikan jalan aspal dan saluran drainase di sepanjang Jl. Dewi Sartika, Desa Lenggang.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Dewi Sartika, Ds. Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSONO SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
443	Rendahnya Kualitas prasarana pendukung kegiatan perikanan tangkap (Pemeliharaan Shelter Nelayan)	Permohonan bantuan alat tangkap ikan dan box fiber ikan bagi para nelayan.	Permohonan bantuan alat tangkap ikan dan box fiber ikan bagi para nelayan.	Dinas Perikanan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk pembahasan lebih lanjut, mohon dilengkapi dengan data dukung	Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi TAPD
444	Minimnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan berupa (Kolam Terpal, Waring Budidaya, Pakan dan Benih) untuk Program Budidaya Untuk Ketahanan Pangan (DAUN KETAPANG) dan Program Budidaya Ikan untuk Pembudidayaan Ikan Milenial umur 19-40 tahun (TOMAN).	Permohonan bantuan benih ikan air tawar seperti lele, patin dan gurame di Desa Buding.	Permohonan bantuan benih ikan air tawar seperti lele, patin dan gurame di Dusun Limau Manis, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit	Dinas Perikanan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk dibahas lebih lanjut, mohon untuk dilengkapi data dukung	Dusun Limau Manis, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi TAPD
445	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Permohonan bantuan bibit bersertifikat yaitu bibit kelapa sawit dan bibit tanaman buah-buahan untuk kelompok tani di Desa Batu Penyu.	Permohonan bantuan bibit bersertifikat yaitu bibit kelapa sawit dan bibit tanaman buah-buahan untuk kelompok tani di Desa Batu Penyu.	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
446	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Permohonan bantuan bibit buah-buahan.	Permohonan bantuan bibit buah-buahan, Dusun Limau Manis, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk dibahas lebih lanjut, mohon untuk dilengkapi data dukung	Dusun Limau Manis, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
447	Minimnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan berupa (Kolam Terpal, Waring Budidaya, Pakan dan Benih) untuk Program Budidaya Untuk Ketahanan Pangan (DAUN KETAPANG) dan Program Budidaya Ikan untuk Pembudidayaan Ikan Milenial umur 19-40 tahun (TOMAN).	Permohonan bantuan bibit ikan lele untuk kelompok budidaya di Desa Batu Penyu.	Permohonan bantuan bibit ikan lele untuk kelompok budidaya di Desa Batu Penyu.	Dinas Perikanan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi TAPD
448	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Permohonan bantuan bibit pohon kelapa sawit untuk kelompok budidaya di Desa Batu Penyu.	Permohonan bantuan bibit pohon kelapa sawit untuk kelompok budidaya di Desa Batu Penyu.	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
449	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Permohonan bantuan bibit sawit di Dusun Buding, Desa Buding.	Permohonan bantuan bibit sawit di Dusun Buding, Desa Buding. Kecamatan Kelapa Kampit	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Buding, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
450	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Permohonan bantuan bibit tanaman buah durian, sebanyak 1000 pohon untuk masyarakat Desa Batu Penyu.	Permohonan bantuan bibit tanaman buah durian, sebanyak 1000 pohon untuk masyarakat Desa Batu Penyu.	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Ds. Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
45 1	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Permohonan bantuan bibit tanaman untuk petani kecil.	Permohonan bantuan bibit tanaman untuk petani kecil. Dusun Cendil, Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk pembahasan lebih lanjut, mohon dilengkapi dengan data dukung	Dusun Cendil, Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
45 2	Tidak tersedianya pupuk subsidi untuk komoditi perkebunan	Permohonan bantuan pupuk bersubsidi untuk kelompok tani-petani di Desa Batu Penyu.	Permohonan bantuan pupuk bersubsidi untuk kelompok tani-petani di Desa Batu Penyu.	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
45 3	Tidak tersedianya pupuk subsidi untuk komoditi perkebunan	Permohonan bantuan pupuk subsidi untuk masyarakat dan kelompok tani di Desa Buding.	Permohonan bantuan pupuk subsidi untuk masyarakat dan kelompok tani di Dusun Limau Manis, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Limau Manis, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
45 4	Masih kurangnya ketersediaan pupuk di tingkat petani perkebunan	Permohonan bantuan pupuk untuk petani kecil.	Permohonan bantuan pupuk untuk petani kecil. Dusun Cendil, Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk pembahasan lebih lanjut, mohon dilengkapi dengan data dukung	Dusun Cendil, Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
45 5	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh	Permohonan evaluasi daripada harga air yang dibebankan kepada pelanggan PDAM Kecamatan Gantung-harga air tidak sesuai dengan kualitas air yang kotor.	Permohonan evaluasi daripada harga air yang dibebankan kepada pelanggan PDAM Kecamatan Gantung-harga air tidak sesuai dengan kualitas air yang kotor.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	Kelompok Pengelola maupun Desa								
45 6	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan kelanjutan pengaspalan di ujung Jl. Safie, di sebelah Jembatan baru menuju Jl. Konjim-dengan panjang jalan ± 400 meter.	Permohonan kelanjutan pengaspalan di ujung Jl. Safie, di sebelah Jembatan baru menuju Jl. Konjim-dengan panjang jalan ± 400 meter.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dsn. Kundor, Ds. Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
45 7	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan kelanjutan pengaspalan jalan dari Desa Batu Penyu menuju ke arah pantai Gusong Cine, Desa Batu Penyu.	Permohonan kelanjutan pengaspalan jalan dari Desa Batu Penyu menuju ke arah pantai Gusong Cine, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Ds. Batu Penyu, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
45 8	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Permohonan lampu jalan di depan SDN 7 Manggar	Permohonan lampu jalan di depan SDN 7 Manggar Dusun Harapan Desa Lalang Jaya	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Harapan Desa Lalang Jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
459	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan pelebaran jalan di Jalan Lintang Buding tepatnya ke arah Cendil.	Permohonan pelebaran jalan di Jalan Lintang Buding tepatnya ke arah Cendil.Desa Buding, kecamatan Kelapa Kampit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Buding, kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
460	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan pelebaran jalan di RT.07, Dusun Limbongan II, Desa Limbongan, Kecamatan Gantung.	Permohonan pelebaran jalan di RT.07, Dusun Limbongan II, Desa Limbongan, Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dsn. Limbongan II, Desa Limbongan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSONO SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah
461	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pemabangunan saluran drainase sepanjang 750 m, di Aik Rengas, RT. 02, Dusun Nibung Punggur, Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit.	pembangunan saluran drainase sepanjang 750 m, di Aik Rengas, RT. 02, Dusun Nibung Punggur, Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Aik Rengas, RT. 02, Dusun Nibung Punggur, Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
462	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Permohonan pemasangan lampu penerangan jalan umum di kawasan sekitar TPU Desa Balok Kecamatan Dendang.	Permohonan pemasangan lampu penerangan jalan umum di kawasan sekitar TPU Desa Balok Kecamatan Dendang.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Desa Balok, Kecamatan Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
46 3	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Permohonan pemasangan lampu penerangan jalan umum di permukiman Desa Batu Penyu.	Permohonan pemasangan lampu penerangan jalan umum di permukiman Desa Batu Penyu.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Desa Batu Penyu, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi TAPD
46 4	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Permohonan pemasangan penerangan jalan umum di depan kantor Desa Dendang-menuju ke arah PAUD.	Permohonan pemasangan penerangan jalan umum di depan kantor Desa Dendang-menuju ke arah PAUD.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Dendang, Desa Dendang, Kec. Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi TAPD
46 5	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Permohonan pemasangan polisi tidur (alat pembatas kecepatan/markah kejut) di depan SDN 12 Gantung, SDN 14 Gantung, dan PAUD Harapan Bunda Desa Batu Penyu.	Permohonan pemasangan polisi tidur (alat pembatas kecepatan/markah kejut) di depan SDN 12 Gantung, SDN 14 Gantung, dan PAUD Harapan Bunda Desa Batu Penyu.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Ds. Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi TAPD
46 6	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Permohonan pemasangan polisi tidur (alat pembatas kecepatan/markah kejut) di Jl. Parit Tebu, RT.027, Desa Batu Penyu.	Permohonan pemasangan polisi tidur (alat pembatas kecepatan/markah kejut) di Jl. Parit Tebu, RT.027, Desa Batu Penyu.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Lidun, Desa Batu Penyu, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
467	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan saluran drainase di RT. 04, Dusun Cendil, Desa Cendil.	Permohonan pembangunan saluran drainase di RT. 04, Dusun Cendil, Desa Cendil.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	RT. 04, Dusun Cendil, Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
468	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Permohonan pembangunan dan pemasangan lampu rambu-rambu lalu lintas (traffic light) disetiap persimpangan sekolah yang berada di Desa Batu Penyu.	Permohonan pembangunan dan pemasangan lampu rambu-rambu lalu lintas (traffic light) disetiap persimpangan sekolah yang berada di Desa Batu Penyu.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi TAPD
469	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Permohonan pembangunan jalan di samping toko Bapak Arsi menuju RT. 07 jalan ke TPU, dari RT. 01 hingga RT. 07.	Permohonan pembangunan jalan di samping toko Bapak Arsi menuju RT. 07 jalan ke TPU, dari RT. 01 hingga RT. 07.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Dusun Penirokan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
470	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang	Permohonan pembangunan pasang siring di Jl. Aik Pak Wan, RT.014, Desa Batu Penyu sepanjang ± 250 m.	Permohonan pembangunan pasang siring di Jl. Aik Pak Wan, RT.014, Desa Batu Penyu sepanjang ± 250 m.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Aik Pak Wan, RT.014, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	rawan banjir/Genangan								
47 1	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Permohonan pembangunan plat duiker di Jl. Aik Bandong, RT.009, Desa Batu Penyu.	Permohonan pembangunan plat duiker di Jl. Aik Bandong, RT.009, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Aik Bandong, RT.009, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
47 2	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Permohonan pembangunan plat duiker di RT.15 dan RT.21, Desa Batu Penyu.	Permohonan pembangunan plat duiker di RT.15 dan RT.21, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
47 3	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Permohonan pembangunan plat duiker di simpang Jl. PLN, RT.001, Desa Batu Penyu.	Permohonan pembangunan plat duiker di simpang Jl. PLN, RT.001, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. PLN, RT.001, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
474	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan saluran drainase di Jl. Aik Gurok, arah ke sirkuit RT. 12, Dusun Limau Manis - sepanjang 2000 m.	Permohonan pembangunan saluran drainase di Jl. Aik Gurok, arah ke sirkuit RT. 12, Dusun Limau Manis - sepanjang 2000 m.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Jl. Aik Gurok, RT. 12, Dusun Limau Manis, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
475	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan saluran drainase di Jl. Aik Kabal, RT. 09 RW. 04, Bukit Jaya, Desa Buding.	Permohonan pembangunan saluran drainase di Jl. Aik Kabal, RT. 09 RW. 04, Bukit Jaya, Desa Buding.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Jl. Aik Kabal, RT. 09 RW. 04, Dusun Bukit Jaya, Desa Buding, Kecamatan Buding, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
476	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan saluran drainase di Jl. Cekedas - Simpang SD Negeri 10, Dusun Bukit Jaya, Desa Buding.	Permohonan pembangunan saluran drainase di Jl. Cekedas - Simpang SD Negeri 10, Dusun Bukit Jaya, Desa Buding.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Jl. Cekedas, Dusun Bukit Jaya, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
477	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan saluran drainase di Jl. Sudirman, Dusun Lidun, Desa Batu Penyu.	Permohonan pembangunan saluran drainase di Jl. Sudirman, Dusun Lidun, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Sudirman, Dusun Lidun, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
478	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan saluran drainase di Jl. Tanah Puru sepanjang 750 m, Dusun Nibung Punggur, Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit.	Permohonan pembangunan saluran drainase di Jl. Tanah Puru sepanjang 750 m, Dusun Nibung Punggur, Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Jl. Tanah Puru, Dusun Nibung Punggur, Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
479	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan Pembangunan saluran drainase di RT. 01.	Permohonan Pembangunan saluran drainase di RT. 01 Dusun Penirokan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	RT .01, Dusun Penirokan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
480	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan saluran drainase di RT. 03, Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit.	Permohonan pembangunan saluran drainase di RT. 03, Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	RT. 03, Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
481	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan saluran drainase di RT. 05 RW. 02, Jl. Bandes I, II, dan Jl. Sawah, Desa Cendil.	Permohonan pembangunan saluran drainase di RT. 05 RW. 02, Jl. Bandes I, II, dan Jl. Sawah, Desa Cendil.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
482	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan saluran drainase di RT. 06.	Permohonan pembangunan saluran drainase di Dusun Penirokan, RT.06, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Dusun Penirokan, RT.06, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
483	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan saluran drainase di sepanjang jalan Dusun Padang Sumping, Desa Batu Penyu.	Permohonan pembangunan saluran drainase di sepanjang jalan Dusun Padang Sumping, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Padang Sumping, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSONO SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah
484	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan saluran drainase di sepanjang jalan RT. 05, Desa Buding - ± 500 m.	Permohonan pembangunan saluran drainase di sepanjang jalan RT. 05, Desa Buding - ± 500 m.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	RT. 05, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
485	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan siring pasang di SDN 13 Gantung	Permohonan pembangunan siring pasang di SDN 13 Gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
486	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan siring pasang di sepanjang Jl. Jend. Sudirman, RT.01-RT.02, Desa Batu Penyu.	Permohonan pembangunan siring pasang di sepanjang Jl. Jend. Sudirman, RT.01-RT.02, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Jend. Sudirman, RT.01-RT.02, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
487	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan pembangunan sumur bor di Jl. Air Bata RT. 03 RW. 02, Dusun Rumbai, Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit.	Permohonan pembangunan sumur bor di Jl. Air Bata RT. 03 RW. 02, Dusun Rumbai, Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Jl. Air Bata RT. 03 RW. 02, Dusun Rumbai, Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
488	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan pembangunan sumur bor di Jl. Buje, Desa Batu Penyu.	Permohonan pembangunan sumur bor di Jl. Buje, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Buje, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
489	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan pembangunan sumur bor di Jl. Selindang, RT. 05 RW. 02, Dusun Selindang, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit.	Permohonan pembangunan sumur bor di Jl. Selindang, RT. 05 RW. 02, Dusun Selindang, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Jl. Selindang, RT. 05 RW. 02, Dusun Selindang, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
490	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan pembangunan sumur bor di RT. 02 RW. 01, Dusun Penirukan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit.	Permohonan pembangunan sumur bor di RT. 02 RW. 01, Dusun Penirukan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	RT. 02 RW. 01, Dusun Penirukan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
491	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan pembangunan sumur bor di RT. 04 RW. 02, Dusun Selindang, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit.	Permohonan pembangunan sumur bor di RT. 04 RW. 02, Dusun Selindang, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	RT. 04 RW. 02, Dusun Selindang, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
49 2	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan pembangunan sumur bor di RT. 18 RW. 02, Dusun Penirukan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit.	Permohonan pembangunan sumur bor di RT. 18 RW. 02, Dusun Penirukan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	RT. 18 RW. 02, Dusun Penirukan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
49 3	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan pembangunan sumur bor di RT. 18 RW. 02, Dusun Penirukan, Desa Mayang.	Permohonan pembangunan sumur bor di RT. 18 RW. 02, Dusun Penirukan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	RT. 18 RW. 02, Dusun Penirukan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
49 4	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan pembangunan sumur bor di RT.02, Dusun Sumping, Desa Batu Penyu.	Permohonan pembangunan sumur bor di RT.02, Dusun Sumping, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.02, Dusun Sumping, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
49 5	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan talud atau saluran drainase/gorong-gorong di Jl. Safei, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung.	Permohonan pembangunan talud atau saluran drainase/gorong-gorong di Jl. Safei, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Safei, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
49 6	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan talud atau saluran drainase/gorong-gorong di RT.008 sampai RT.010 Dusun Sumping, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung.	Permohonan pembangunan talud atau saluran drainase/gorong-gorong di RT.008 sampai RT.010 Dusun Sumping, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Sumping, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
49 7	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan talud di sepanjang pesisir pantai Gusong Cine, Desa Batu Penyu.	Permohonan pembangunan talud di sepanjang pesisir pantai Gusong Cine, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
498	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan pembangunan/ pembuatan MCK (WC dan sumur umum) di pantai Gusong Cine Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung.	Permohonan pembangunan/ pembuatan MCK (WC dan sumur umum) di pantai Gusong Cine Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Pantai Gusong Cine, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
499	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan standar yang dianjurkan	Permohonan pembangunan/pembuatan MCK (WC dan sumur umum) di pantai Gusong Cine Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung.	Permohonan pembangunan/pembuatan MCK (WC dan sumur umum) di pantai Gusong Cine Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Pantai Gusong Cine, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
500	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Permohonan pembangunan/penambahan lampu penerangan jalan umum di sepanjang jalan Desa Padang Kecamatan Manggar.	Permohonan pembangunan/penambahan lampu penerangan jalan umum di sepanjang jalan Desa Padang Kecamatan Manggar.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	FEZZY UKTOLSEJA, SE, MM	Verifikasi TAPD
501	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan pembangunan/perbaikan jalan tembus Jangkang-Kembiri.	Permohonan pembangunan/perbaikan jalan tembus Jangkang-Kembiri.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Kecamatan Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
502	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan pembangunan/perbaikan jalan tembus Jangkang-Lidun.	Permohonan pembangunan/perbaikan jalan tembus Jangkang-Lidun.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Kec. Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
503	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan pembangunan-pembuatan sumur bor sebagai sumber air bersih warga di pantai Gusong Cine.	Permohonan pembangunan-pembuatan sumur bor sebagai sumber air bersih warga di pantai Gusong Cine.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Gusong Cine, Ds. Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
504	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembuatan drainase di sepanjang Jl. Aik Rengas, RT.02, Dusun Nibung Punggur, Desa Mentawak.	Permohonan pembuatan drainase di sepanjang Jl. Aik Rengas, RT.02, Dusun Nibung Punggur, Desa Mentawak.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Jl. Aik Rengas, RT.02, Dusun Nibung Punggur, Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
505	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembuatan gorong-gorong di RT.08 Desa Lilangan.	Permohonan pembuatan gorong-gorong di RT.08 Desa Lilangan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.08, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
506	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan pengadaan air bersih untuk masyarakat di Dusun Kundor, Desa Batu Penyu, yaitu pembangunan sumur bor.	Permohonan pengadaan air bersih untuk masyarakat di Dusun Kundor, Desa Batu Penyu, yaitu pembangunan sumur bor.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
507	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan pengadaan air bersih yaitu pembangunan sumur bor di Dusun Sumping, Desa Batu Penyu.	Permohonan pengadaan air bersih yaitu pembangunan sumur bor di Dusun Sumping, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Sumping, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
508	Masih adanya sarana dan prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Permohonan pengadaan meubelair sekolah di SDN 12 Gantung.	Permohonan pengadaan meubelair sekolah di SDN 12 Gantung.	Dinas Pendidikan	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	SDN 12 Gantung, Ds. Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi TAPD
509	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan pengadaan untuk penambahan pipanisasi air bersih berbasis masyarakat yang belum terdistribusikan ke rumah-rumah. perlu diketahui untuk pada-saat ini sudah terbentuk kelompok masyarakat yaitu Pokmas Aik Tanah Mate, namun belum semuanya air bersih terdistribusikan ke masyarakat.	Permohonan pengadaan untuk penambahan pipanisasi air bersih berbasis masyarakat yang belum terdistribusikan ke rumah-rumah. Dusun Kundor, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Kundor, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
510	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan pengaspalan jalan dari RT. 004 - RT. 003, Dusun Cendil, Desa Cendil.	Permohonan pengaspalan jalan dari RT. 004 - RT. 003, Dusun Cendil, Desa Cendil.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Dusun Cendil, Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
511	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan	Permohonan pengaspalan jalan di Dusun Limau Manis, sepanjang 1400 m dengan lebar 3 m.	Permohonan pengaspalan jalan di Dusun Limau Manis, sepanjang 1400 m dengan lebar 3 m. Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Dusun Limau Manis, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	Pelebaran Jalan Menuju Standar								
51 2	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan pengaspalan jalan disebelah GOR, Desa Cendil sampai dengan hutan Kerangas.	Permohonan pengaspalan jalan disebelah GOR, Desa Cendil sampai dengan hutan Kerangas Kecamatan Kelapa Kampit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
51 3	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan pengaspalan jalan ke air PDAM RT. 05, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit.	Permohonan pengaspalan jalan ke air PDAM RT. 05, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	RT. 05, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
51 4	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan pengaspalan jalan menuju ke TPU Al-Barkah, Desa Batu Penyuh.	Permohonan pengaspalan jalan menuju ke TPU Al-Barkah, Desa Batu Penyuh.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Batu Penyuh, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
515	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan pengaspalan Jl. Aik Keluning, RT.23, Dusun Lidun menuju ke arah Jl. Parit, Desa Batu Penyu.	Permohonan pengaspalan Jl. Aik Keluning, RT.23, Dusun Lidun menuju ke arah Jl. Parit, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Lidun, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
516	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan tanggul/Talud, saluran Pembuangan utama menuju Sungai dan normalisasi pada daerah/Kawasan yang terdampak luapan, Pasang Surut,erosi Sungai dan pendangkalan sungai/anak Sungai	Permohonan pengerukan/pembersihan alur air sungai jembatan Stela (RT.02) hingga Aik Pisang, Desa Batu Penyu.	Permohonan pengerukan/pembersihan alur air sungai jembatan Stela (RT.02) hingga Aik Pisang, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
517	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan penimbunan/penambalan jalan yang berlubang di Jl. Aik Keluning (Kampung KB), Desa Batu Penyu.	Permohonan penimbunan/penambalan jalan yang berlubang di Jl. Aik Keluning (Kampung KB), Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Aik Keluning (Kampung KB), Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
518	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan peningkatan jalan aspal di Jl. Sudirman, Dusun Lidun, Desa Batu Penyu.	Permohonan peningkatan jalan aspal di Jl. Sudirman, Dusun Lidun, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Sudirman, Dusun Lidun, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
519	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan peningkatan PAMSIMAS di Dusun Air Asam, Kecamatan Dendang.	Permohonan peningkatan PAMSIMAS di Dusun Air Asam, Kecamatan Dendang.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Air Asam, Kecamatan Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
520	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan peningkatan pelebaran jalan aspal dari RT.13 sampai RT.024 Dusun Lidun, Desa Batu Penyu.	Permohonan peningkatan pelebaran jalan aspal dari RT.13 sampai RT.024 Dusun Lidun, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dsn. Lidun, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
521	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan	Permohonan perbaikan dan pelebaran jalan di sepanjang Jl. Sudirman, Desa Batu Penyu dikarenakan jalan telah rusak berat dan rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.	Permohonan perbaikan dan pelebaran jalan di sepanjang Jl. Sudirman, Desa Batu Penyu dikarenakan jalan telah rusak berat dan rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Sudirman, Dusun Kundor, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	Pelebaran Jalan Menuju Standar								
52 2	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan perbaikan dan pembangunan jalan setapak di Jl. Kenanga RT.06 Desa Lenggang di sebelah lapangan sepak bola PEROL.	Permohonan perbaikan dan pembangunan jalan setapak di Jl. Kenanga RT.06 Desa Lenggang di sebelah lapangan sepak bola PEROL.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Kenanga, RT.06, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah
52 3	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan perbaikan dan pengaspalan jalan pelabuhan nelayan di Dusun Semalar, Desa Dendang, Kecamatan Dendang.	Permohonan perbaikan dan pengaspalan jalan pelabuhan nelayan di Dusun Semalar, Desa Dendang, Kecamatan Dendang.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Semalar, Desa Dendang, Kecamatan Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
52 4	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang	Permohonan perbaikan jalan aspal dan pembangunan saluran drainase di sepanjang jalan Dusun Padang Sumping, Desa Batu Penyu.	pembangunan saluran drainase di sepanjang jalan Dusun Padang Sumping, Desa Batu Penyu. Dusun Padang Sumping, Ds. Batu Penyu, Kecamatan Gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Padang Sumping, Ds. Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	rawan banjir/Genangan								
52 5	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan perbaikan jalan aspal di Jl. Konjim, RT.027, Parit Tebu, Desa Batu Penyu.	Permohonan perbaikan jalan aspal di Jl. Konjim, RT.027, Parit Tebu, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Konjim, RT.027, Parit Tebu, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
52 6	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan perbaikan jalan aspal di sepanjang jalan Dusun Padang Sumping, Desa Batu Penyu.	Permohonan perbaikan jalan aspal di sepanjang jalan Dusun Padang Sumping, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Padang Sumping, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah
52 7	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan perbaikan jalan aspal yang rusak di sepanjang Jl. Air Jenjang, Dusun Sumping, Desa Batu Penyu.	Permohonan perbaikan jalan aspal yang rusak di sepanjang Jl. Air Jenjang, Dusun Sumping, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Air Jenjang, Dusun Sumping, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
528	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan perbaikan jalan di depan toko KKO, RT. 04, Dusun Selindang, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit.	Permohonan perbaikan jalan di depan toko KKO, RT. 04, Dusun Selindang, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Dusun Selindang, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
529	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan perbaikan jalan di jalan RT.05 RW.01, Desa Lilangan.	Permohonan perbaikan jalan di jalan RT.05 RW.01, Desa Lilangan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.05 RW.01, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
530	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan perbaikan jalan di Jl. Air Bata, RT. 03 RW. 02, Dusun Rumbai, Desa Pembaharuan - tepatnya arah menuju ke TPU.	Permohonan perbaikan jalan di Jl. Air Bata, RT. 03 RW. 02, Dusun Rumbai, Desa Pembaharuan - tepatnya arah menuju ke TPU.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Jl. Air Bata, RT. 03 RW. 02, Dusun Rumbai, Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
531	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan perbaikan jalan di RT. 01 RW. 01 (di depan rumah Bapak Tabrani).	Permohonan perbaikan jalan di RT. 01 RW. 01 (di depan rumah Bapak Tabrani). Dusun Penirukan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	RT. 01 RW. 01, Dusun Penirukan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
53 2	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan perbaikan jalan di RT.07, Dusun Limbongan II, Desa Limbongan, Kecamatan Gantung.	Permohonan perbaikan jalan di RT.07, Dusun Limbongan II, Desa Limbongan, Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.07, Dusun Limbongan II, Desa Limbongan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah
53 3	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan perbaikan jalan di sepanjang Jl. Sudirman Desa Batu Penyu di mulai dari RT.06 sampai RT.024 dikarenakan jalan telah mengalami rusak berat.	Rehabilitasi jalan yang rusak di sepanjang Jl. Sudirman Desa Batu Penyu di mulai dari RT.06 sampai RT.024 dikarenakan jalan telah mengalami rusak berat.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Sudirman, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
53 4	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan perbaikan jalan rusak di RT. 02 RW. 01, Dusun Penirukan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit.	Permohonan perbaikan jalan rusak di RT. 02 RW. 01, Dusun Penirukan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	RT. 02 RW. 01, Dusun Penirukan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
53 5	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan perbaikan jalan umum yang rusak di sepanjang Jl. Jend. Sudirman Desa Lenggang, Kecamatan Gantung.	Permohonan perbaikan jalan umum yang rusak di sepanjang Jl. Jend. Sudirman Desa Lenggang, Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Jend. Sudirman Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
536	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan perbaikan jalan yang rusak di Jl. Selindang, RT. 04 RW. 02, Dusun Selindang, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit.	Permohonan perbaikan jalan yang rusak di Jl. Selindang, RT. 04 RW. 02, Dusun Selindang, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Jl. Selindang, RT. 04 RW. 02, Dusun Selindang, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
537	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan perbaikan jembatan Aik Bandung.	Permohonan perbaikan jembatan Aik Bandung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Aik Bandung, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
538	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan perbaikan saluran drainase (talud) di sepanjang Jl. Diponegoro, Dusun Cangu, Desa Lenggang.	Permohonan perbaikan saluran drainase (talud) di sepanjang Jl. Diponegoro, Dusun Cangu, Desa Lenggang.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Diponegoro, Dusun Cangu, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSONO SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
539	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan perbaikan saluran drainase (talud) di sepanjang Jl. Kenanga, Dusun Jaya, Desa Lenggang.	Permohonan perbaikan saluran drainase (talud) di sepanjang Jl. Kenanga, Dusun Jaya, Desa Lenggang.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Kenanga, Dusun Jaya, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSONO SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah
540	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan perbaikan saluran drainase di Jl. Bandes, RT. 02 - sepanjang 400 m.	Permohonan perbaikan saluran drainase di Jl. Bandes, RT. 02 - sepanjang 400 m, Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Jl. Bandes, RT. 02, Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
541	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan perbaikan saluran drainase di Jl. Bandes, RT. 02, Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit.	Permohonan perbaikan saluran drainase di Jl. Bandes, RT. 02, Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Jl. Bandes, RT. 02, Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
54 2	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan perbaikan saluran drainase di sekeliling TK Melati Gantung - dikarenakan saluran drainase sudah rusak. Pada waktu musim penghujan sistem drainase tidak berfungsi dengan baik sehingga menyebabkan air mengalir dan menggenang di halaman TK.	Permohonan perbaikan saluran drainase di sekeliling TK Melati Gantung - dikarenakan saluran drainase sudah rusak. Pada waktu musim penghujan sistem drainase tidak berfungsi dengan baik sehingga menyebabkan air mengalir dan menggenang di halaman TK.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, Mohon dilengkapi dengan data pendukung	Jl. Melati No. C42 Gantung, Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah
54 3	Belum optimalnya pembudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	Permohonan perbaikan tribun lapangan sepak bola PEROL Desa Lenggang, Kecamatan Gantung.	Permohonan perbaikan tribun lapangan sepak bola PEROL Desa Lenggang, Kecamatan Gantung.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi TAPD
54 4	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan perhatian pemerintah daerah akan distribusi ketersediaan air bersih di Kecamatan Gantung di musim kemarau yang terkadang sering mati.	Permohonan perhatian pemerintah daerah akan distribusi ketersediaan air bersih di Kecamatan Gantung di musim kemarau yang terkadang sering mati.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
545	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan perhatian pemerintah daerah akan distribusi ketersediaan air bersih di Kecamatan Gantung di musim kemarau.	Permohonan perhatian pemerintah daerah akan distribusi ketersediaan air bersih di Kecamatan Gantung di musim kemarau.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah
546	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan rehabilitasi jalan di Jl. Pemanggan, Dusun Limau Manis, Desa Buding.	Permohonan rehabilitasi jalan di Jl. Pemanggan, Dusun Limau Manis, Desa Buding.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Jl. Pemanggan, Dusun Limau Manis, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
547	Masih Belum Optimalnya SDM dalam kepengurusan koperasi dan pengelolaan UMKM	Permohonan untuk lebih diperhatikannya UMKM khususnya bagi ibu rumah tangga/perempuan yang mempunyai usaha kecil di Kecamatan Dendang.	Permohonan untuk lebih diperhatikannya UMKM khususnya bagi ibu rumah tangga/perempuan yang mempunyai usaha kecil di Kecamatan Dendang.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Kecamatan Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi TAPD
548	Masih rendahnya kemampuan peternak untuk meningkatkan kapasitas usahanya	Permohonan untuk mengadakan program pelatihan pembuatan pakan ikan (pelet ikan) dan pembudidayaan Bibit ikan air tawar di Desa Aik Madu.	diadakan pelatihan pembuatan pakan ikan (pelet ikan) dan pembudidayaan Bibit ikan air tawar di Desa Aik Madu.	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Desa Air Madu, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	FEZZY UKTOLSEJ A, SE, MM	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
549	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan untuk merevitalisasi SPAM yang berada di Aik Itam, Desa Batu Penyu.	Permohonan untuk merevitalisasi SPAM yang berada di Aik Itam, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Aik Itam, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
550	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan untuk pelebaran jalan protokol dari RT.011 sampai RT.024, Dusun Lidun, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung.	Permohonan untuk pelebaran jalan protokol dari RT.011 sampai RT.024, Dusun Lidun, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Lidun, Desa Batu, Penyu Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
551	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan untuk pembangunan infrastruktur air minum (air bersih) berupa SPAM Desa di Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung.	Permohonan untuk pembangunan infrastruktur air minum (air bersih) berupa SPAM Desa di Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
55 2	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan untuk pembangunan saluran drainase di Jl. Diponegoro Dusun Cangu Desa Lenggang Kecamatan Gantung- tepatnya di belakang permukiman rumah warga.	Permohonan untuk pembangunan saluran drainase di Jl. Diponegoro Dusun Cangu Desa Lenggang Kecamatan Gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Diponegoro, Dsn. Cangu, Ds. Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah
55 3	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan untuk pembangunan saluran drainase gorong-gorong lebih kurang 600 meter di sepanjang jalan di RT.03 Dusun Seberang Desa Selingsing Kecamatan Gantung.	Permohonan untuk pembangunan saluran drainase gorong-gorong lebih kurang 600 meter di sepanjang jalan di RT.03 Dusun Seberang Desa Selingsing Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.03, Dusun Seberang, Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
554	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan untuk pembangunan sumur bor sebagai sumber air bersih di Desa Batu Penyu dipergunakan masyarakat untuk pemakaian dalam skala besar oleh masyarakat, adapun pengajuan permohonan ini dilakukan dikarenakan sumur (sistem tadah hujan) yang lama sudah tidak berfungsi (mengalami kekeringan).	Permohonan untuk pembangunan sumur bor sebagai sumber air bersih di Desa Batu Penyu	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
555	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan untuk pembangunan/peningkatan Jl. Safei sampai dengan Jl. Konjim, dengan ukuran jarak jalan ± 500 m.	Permohonan untuk pembangunan/peningkatan Jl. Safei sampai dengan Jl. Konjim, dengan ukuran jarak jalan ± 500 m.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Safei, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
556	Tidak tersedianya pupuk subsidi untuk komoditi perkebunan	Permohonan untuk pengadaan bantuan pupuk bersubsidi untuk petani lada dan sawit masyarakat berskala kelompok tani, mengingat sekarang harga pupuk non subsidi sudah sangat mahal dan hampir tidak terjangkau bagi kami para petani lada dan sawit skala kecil. Dengan adanya pupuk subsidi tersebut dapat memenuhi kebutuhan pupuk pada tanaman.	Permohonan untuk pengadaan bantuan pupuk bersubsidi untuk petani lada dan sawit masyarakat berskala kelompok tani	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Kundor, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
557	Masih adanya sarana dan prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Permohonan untuk pengadaan meubelair meja dan kursi di SDN 13 Gantung, dan SDN 14 Gantung.	Permohonan untuk pengadaan meubelair meja dan kursi di SDN 13 Gantung, dan SDN 14 Gantung.	Dinas Pendidikan	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Ds. Batu Penyu, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi TAPD
558	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak/Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan untuk pengaspalan jalan yang berada di Jl. Pembangunan menuju Jl. Sudirman, RT.13, Dusun Aik Kundor, Desa Batu Penyu.	Permohonan untuk pengaspalan jalan yang berada di Jl. Pembangunan menuju Jl. Sudirman, RT.13, Dusun Aik Kundor, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Aik Kundor, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
559	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan untuk peningkatan jalan (pengaspalan) di wilayah Dusun Gunong, Desa Jangkar Asam. Rencana pengaspalan dimulai dari RT.09 sampai RT.10, diperkirakan dengan ukuran jarak jalan ± 500 m (proposai terlampir).	Permohonan untuk peningkatan jalan (pengaspalan) di wilayah Dusun Gunong, Desa Jangkar Asam. Rencana pengaspalan dimulai dari RT.09 sampai RT.10, diperkirakan dengan ukuran jarak jalan ± 500 m (proposai terlampir).	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Gunong, Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
560	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan untuk peningkatan jalan (pengerasan jalan) dimulai dari wilayah/tempat Aik Bandung hingga ke jalan PLN dan sekaligus perbaikan jembatan yang berada di wilayah/tempat tersebut.	Permohonan untuk peningkatan jalan (pengerasan jalan) dimulai dari wilayah/tempat Aik Bandung hingga ke jalan PLN dan sekaligus perbaikan jembatan yang berada di wilayah/tempat tersebut.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Aik Bandung, Desa Batu Penyau, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
561	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan untuk peningkatan jalan (pengerasan jalan) dimulai dari jembatan Aik Rayak tembus hingga ke simpang Konjim diperkirakan ukuran panjang jalan ± sepanjang 700 m.	Permohonan untuk peningkatan jalan (pengerasan jalan) dimulai dari jembatan Aik Rayak tembus hingga ke simpang Konjim diperkirakan ukuran panjang jalan ± sepanjang 700 m.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Aik Rayak, Desa Batu Penyau, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
56 2	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan untuk peningkatan jalan (pengerasan jalan) PPIP yang terletak di Dusun Kundor, Simpang Jalan Pak Wan hingga tembus ke RT.018. Diperkirakan ukuran panjang jalan ± 800 m.	Permohonan untuk peningkatan jalan (pengerasan jalan) PPIP yang terletak di Dusun Kundor, Simpang Jalan Pak Wan hingga tembus ke RT.018. Diperkirakan ukuran panjang jalan ± 800 m.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Kundor, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
56 3	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan untuk peningkatan jalan tembus dimulai dari RT.18 sampai dengan RT.12 (Jalan TMMD).	Permohonan untuk peningkatan jalan tembus dimulai dari RT.18 sampai dengan RT.12 (Jalan TMMD).	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.18, Dusun Kundor, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
56 4	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan untuk perbaikan dan pengaspalan Jl. Sudirman dan Jl. Gusong Cine serta jalan-jalan yang berada di wilayah/bertempat di Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung.	Permohonan untuk perbaikan dan pengaspalan Jl. Sudirman dan Jl. Gusong Cine serta jalan-jalan yang berada di wilayah/bertempat di Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Kundor, RT.18, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
56 5	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan untuk perbaikan dan peningkatan Jl. Sudirman, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung.	Permohonan untuk perbaikan dan peningkatan Jl. Sudirman, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Sudirman, Dusun kundor, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
56 6	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan untuk perbaikan jalan aspal penghubung antara jembatan Aik Rayak (Jl. Safie) dengan Jl. Parit Tebu, Desa Batu Penyu.	Permohonan untuk perbaikan jalan aspal penghubung antara jembatan Aik Rayak (Jl. Safie) dengan Jl. Parit Tebu, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Batu Penyu, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
56 7	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan untuk perbaikan Jl. Sudirman dan Jl. Gusong Cine dan jalan yang berada di wilayah/ bertempat di Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung.	Permohonan untuk perbaikan Jl. Sudirman dan Jl. Gusong Cine dan jalan yang berada di wilayah/ bertempat di Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.11, Dusun Kundor, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
56 8	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan tanggul/Talud, saluran Pembuangan utama menuju Sungai dan normalisasi pada daerah/Kawasan yang terdampak	rehab bandar pembangunan akhir menuju kulong teratai di wilayah Rt.13 Dusun Teratai Desa Lalang Jaya dikarenakan kalau hujan akan ada beberapa rumah yang tergenang	rehab bandar pembangunan akhir menuju kulong teratai di wilayah Rt.13 Dusun Teratai Desa Lalang Jaya dikarenakan kalau hujan akan ada beberapa rumah yang tergenang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Teratai Rt.13 Desa Lalang Jaya Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	luapan, Pasang Surut,erosi Sungai dan pendangkalan sungai/anak Sungai								
569	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Rehab drainase sepanjang jalan di Dusun Kartini Desa Lalang kurb 300 meter	Rehab drainase sepanjang jalan di Dusun Kartini Desa Lalang kurb 300 meter Dusun kartini Desa Lalang Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun kartini Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
570	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	rehabilitasi jalan setapak sepanjang 150 m	rehabilitasi jalan yang rusak sepanjang 150 Meter, RT 03-05 RW 02 DUSUN GAJAH MADA DESA MEKAR JAYA	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	RT 03-05 RW 02 DUSUN GAJAH MADA DESA MEKAR JAYA, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah
571	Masih adanya sarana dan prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Rehabilitasi sarana sekolah di SDN 9 Simpang Pesak seperti ruang perpustakaan, UKS, WC, dan ruang kelas	Rehabilitasi sarana sekolah di SDN 9 Simpang Pesak seperti ruang perpustakaan, UKS, WC, dan ruang kelas	Dinas Pendidikan	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	SDN 9 Simpang Pesak , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MARWAN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
57 2	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan tanggul/Talud, saluran Pembuangan utama menuju Sungai dan normalisasi pada daerah/Kawasan yang terdampak luapan, Pasang Surut, erosi Sungai dan pendangkalan sungai/anak Sungai	rehabilitasi talud sepanjang 50 m	rehabilitasi talud sepanjang 50 Meter, RT 03, RT 04, RT 05 RW 02, Dusun Gajah Mada .desa Mekar Jaya	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	RT 03, RT 04, RT 05 RW 02, Dusun Gajah Mada .desa Mekar Jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah
57 3	Masih Belum Optimalnya Pengelolaan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM	Rendahnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha serta kurang modal maka perlu bantuan sertifikasi halal gratis untuk pelaku UMKM dan Bantuan Modal	bantuan sertifikasi halal gratis untuk pelaku UMKM dan Bantuan Modal Desa Aik Madu	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan diteruskan, mohon agar dilengkapi data dukung untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut	Desa Aik Madu, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	AKHIRUDDIN, A.Md	Verifikasi TAPD
57 4	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Revitalisasi sumber mata air, embung-embung yang ada saat ini supaya tidak rusak oleh penambang di luar wilayah IUP dan kesediaan sumber air bersih tetap tersedia kedepannya, prioritas utama yaitu Kolong Cole'k.	Revitalisasi sumber mata air, embung-embung yang ada saat ini supaya tidak rusak oleh penambang di luar wilayah IUP dan kesediaan sumber air bersih tetap tersedia kedepannya, prioritas utama yaitu Kolong Cole'k.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. HUSAINI RASYID, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
575	Belum optimalnya pembudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	sarana dan prasarana olahraga untuk volly dan bola kaki	sarana dan prasarana olahraga untuk volly dan bola kaki RT. 04 DUSUN SEBERANG. DESA SELINSING	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	RT. 04 DUSUN SEBERANG. DESA SELINSING, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi TAPD
576	Masih Belum Optimalnya SDM dalam kepengurusan koperasi dan pengelolaan UMKM	Sulitnya mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian membuat muda mudi sama sekali tidak mendapatkan kesempatan bekeja disuatu instansi hal ini membuat muda mudi beralih ke bidang pertanian ataupun perikanan. seharusnya ada data/perdataan terbaca yang dilakukan setiap tahunnya untuk melihat seberapa banyak pengangguran dan pelaku UMKM terbaca sehingga akan lebih memudahkan dalam menyalurkan bantuan.	Sulitnya mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian membuat muda mudi sama sekali tidak mendapatkan kesempatan bekeja disuatu instansi hal ini membuat muda mudi beralih ke bidang pertanian ataupun perikanan. Dusun Gunung Desa Lalang Jaya	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan	Dusun Gunung Desa Lalang Jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
577	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang	Tidak adanya drainase di desa lilangan yang menyebabkan tergenangnya air, mohon dibuatkan drainase untuk desa lilangan	Tidak adanya drainase di desa lilangan yang menyebabkan tergenangnya air, mohon dibuatkan drainase untuk desa lilangan	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Agus Mulyo desa lilangan kecamatan gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHARTINI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	rawan banjir/Genangan								
578	Masih adanya kelompok tani yang belum mendapatkan sekolah lapang	Untuk ketahanan pangan Dusun Sawah, mohon bantuan pembentukan kelompok tani yang belum berjalan agar cepat berjalan	Untuk ketahanan pangan Dusun Sawah, mohon bantuan pembentukan kelompok tani yang belum berjalan agar cepat berjalan	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun sawah Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
579	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Usulan jalan lanjutan usaha tani sawah Air Tungkup sepanjang 1 km	Usulan jalan lanjutan usaha tani sawah Air Tungkup sepanjang 1 km A.n Edi Sunarta, Wiraswasta, RT.23 Dusun Langkang Desa Lintang	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Edi Sunarta, Wiraswasta, RT.23 Dusun Langkang Desa Lintang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

Sumber: <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/usulan/usulan-pokir/monitor>

5.3. RUMUSAN USULAN HASIL ASPIRASI MASYARAKAT - MUSRENBANG

Tabel 5.8 Rumusan Usulan Hasil Aspirasi Masyarakat-Musrenbang Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025

NO	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
1	Kurang optimalnya Pengelolaan Pembinaan Bina Mental Spiritual dibidang keagamaan dan lembaga keagamaan	melihat di lapangan bagaimana kurangnya kaderisasi di dalam Fardhu Kifayah untuk itulah diperlukan Pelatihan Fardhu Kifayah demi menjaga proses kaderisasi	Desa Lenggang, Kab. Belitung Timur	Lenggang	Gantung	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	FACHRIZAL	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Sekretariat Daerah Kab.Beltim	Pembinaan
2	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita pengga duh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamanan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	tidak adanya penerangan berupa lampu jalan di sepanjang Jl Kenanga s/d Jl. Diponegoro Rt. 11 sehingga menyebabkan rentan kecelakaan terjadi dikarenakan jalan gelap	Jl. Kenanga RT. 06 dan Jl. Diponegoro RT. 09, RT. 10, RT. 11, RT. 12, Kab. Belitung Timur	Lenggang	Gantung	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	FACHRIZAL	Usulan diteruskan ke OPD teknis. Mohon untuk dilengkapi dengan data dukung	Diteruskan ke Dinas Perhubungan Kab.Beltim	di akomodir 2 Titik PJU Konvensional

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
3	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita pengkaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamanan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Tidak adanya Lampu penerangan yang berada di Jl. Kh Dewantara Rt. 19 yang mana menyebabkan rentan terjadi lakalantas	Jl. Kh Dewantara Rt. 19 Dusun Jaya Desa Lenggang, Kab. Belitung Timur	Lenggang	Gantung	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	FACHRIZAL	diteruskan ke OPD Teknis. agar dilengkapi dengan data dukung. status lahan harus CnC	Diteruskan ke Dinas Perhubungan Kab.Beltim	di akomodir 2 titik PJU Konvensional
4	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Kondisi saat ini gedung perpustakaan rusak di beberapa bagian (REHABILITASI GEDUNG PERPUSTAKAAN)	SD NEGERI 2 DENDANG RT.09 , Kab. Belitung Timur	Jangkang	Dendang	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	ROSDIANSY AH	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	-	Diakomodir Rehab Perpustakaan
5	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Kondisi saat ini gedung WC Murid rusak di beberapa bagian (REHAB WC MURID)	SD NEGERI 2 DENDANG RT.09, Kab. Belitung Timur	Jangkang	Dendang	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	ROSDIANSY AH	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	-	Diakomodir Rehab WC

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
6	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Menengah Pertama yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah yg rusak (SEKOLAH MENENGAH PERTAMA), (Rehab Ruang Kelas SMPN 1 Dendang (Kondisi saat ini SMPN 1 Dendang terdapat tiga Gedung/Ruang Kelas Rusak)	SMPN 1 DENDANG, DUSUN AIR ASAM RT.027 RW.04 DESA JANGKANG , Kab. Belitung Timur , Kab. Belitung Timur	Jangkang	Dendang	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	ROSDIANSY AH	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	-	Diakomodir Rehab Ruang Kelas 2 Ruang
7	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Menengah Pertama yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Masih Kurangnya Komputer Lab di SMPN 1 Dendang ,(Komputer Pc Windows SMPN 1 Dendang)	SMPN 1 DENDANG, DUSUN AIR ASAM RT.027 RW.04 DESA JANGKANG , Kab. Belitung Timur , Kab. Belitung Timur	Jangkang	Dendang	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	ROSDIANSY AH	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	-	Diakomodir Pengadaan Komputer
8	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Kondisi saat ini di sekolah belum memiliki LAB Kompuer dan Perangkat komputer Penunjang kegiatan belajar siswa. (Pembangunan ruang LAB Komputer Beserta Perangkat Komputer di SDN 4 Dendang)	SDN 4 Dendang Dsn. Air Asam Rt.04 Rw.01 Desa Jangkang , Kab. Belitung Timur	Jangkang	Dendang	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	ROSDIANSY AH	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	-	Diakomodir Pembangunan Lab. Komputer

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
9	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Ruang Laboratorium telah mengalami kerusakan yang mana harus segera dilakukan Rehabilitasi atas ruang Laboratorium SDN 7 GANTUNG	JL. Melati Rt. 17 Dusun Lenggang Desa Lenggang Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Lenggang	Gantung	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	FACHRIZAL	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Dinas Pendidikan Kab.Beltim	Diakomodir
10	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Adanya sarana dan prasarana yang rusak berat berupa Meja siswa berupa 163 Buah dan Kursi 163 Buah dan harus segera di adakan pengadaan Mobelair sejumlah yang di atas (SDN 7 Gantung)	JL. Melati Rt. 17 Dusun Lenggang Desa Lenggang Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Lenggang	Gantung	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	FACHRIZAL	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Dinas Pendidikan Kab.Beltim	Diakomodir
11	Masih minimnya sarana kegiatan penangkapan ikan yaitu berupa kapal penangkap ikan berukuran <3 GT, Mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan (Bubu kepiting, waring, kawat bubu, Jaring), alat bantu penangkapan ikan (GPS dan Fish Finder), dan Bahan pembuatan kapal fiber	bantuan sarana dan prasarana kelompok nelyan	Desa Air Kelik, Kab. Belitung Timur	Air Kelik	Damar	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	SUHARDI	usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon untuk dilengkapi data dukung	di teruskan ke OPD terkait	Akan diakomodir pada TA. 2025, sudah dilakukan verifikasi lapangan Data Lengkap

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
12	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	perbaikan ruang UKS	SDN 08 DAMAR, Kab. Belitung Timur	Air Kelik	Damar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	SUHARDI	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	-	Diakomodir Rehab UKS
13	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Perlu Rehabilitasi Ruang Kelas 1 Paket dengan Pagu Anggaran Rp 120.000.000,-	SD Negeri 12 Manggar, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	IZHAR	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Proses	Diakomodir
14	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Perlunya Meubiler Kelas sebanyak 1 Paket dengan Pagu Anggaran Rp 50.000.000,00	SD Negeri 20 Manggar, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	IZHAR	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir pada TA 2025

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
15	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita penggaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamananan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Belum adanya lampu lingkungan di sebagian kawasan di wilayah Desa mempaya menyebabkan resiko berkendara tinggi.	Dsn mempaya 1 Rt 4, Dsn Mempaya II Rt 9, Dsn Mempaya III Rt 13, Kab. Belitung Timur	Mempaya	Damar	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	YULI DARTA	Usulan diteruskan ke OPD teknis	di teruskan ke OPD terkait	Diakomodir 2 unit PJUTS
16	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita penggaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamananan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Tidak adanya pembatas kecepatan di sepanjang jalan dekat sekolah PAUD dan TPA mengakibatkan pengendara menjadi tidak hati-hati akan banyaknya anak-anak sekolah.	Dsn Mempaya I RT 5, Dsn Mempaya III Rt 12, Kab. Belitung Timur	Mempaya	Damar	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	YULI DARTA	Usulan diteruskan ke OPD teknis	di teruskan ke OPD terkait	Diakomodir 6 titik speedbump

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
17	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Menengah Pertama yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Meubilair Kelas (Meja dan Kursi) sebanyak 64 Set dengan Pagu Anggaran Rp 75.000.000,00	SMP Negeri 2 Manggar, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	IZHAR	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir Pengadaan Mebel Sekolah
18	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Menengah Pertama yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Rehabilitasi Ruang Kelas 7 dan Ruang Kelas 8 sebanyak 4 Paket dengan Pagu Anggaran Rp 1.400.000.000,00	SMP Negeri 2 Manggar, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	IZHAR	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Proses	Diakomodir Rehab Ruang Kelas 2 Ruang
19	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita pengaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamanan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Masih sangat kurangnya lampu penerangan jalan sebanyak 40 unit di wilayah desa tanjung batu itam	Sedesa Tanjung Batu Itam, Kab. Belitung Timur	Tanjung Batu Itam	Simpang Pesak	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	HASNAN	Diteruskan ke OPD Teknis. Agar dilengkapi dengan data dukung. Status lahan harus CnC	diteruskan ke dinas perhubungan dengan usulan sebanyak 40 unit terbagi dalam 3 dusun, agar desa melampirkan atau menyampaikan data pendukung	di akomodir 2 unit PJUTS, 8 titik PJU Konvensional

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
20	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita pengaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamanan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Dibutuhkannya beberapa titik marka jalan sedesa Tanjung Batu Itam	Sedesa Tanjung Batu Itam, Kab. Belitung Timur	Tanjung Batu Itam	Simpang Pesak	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	HASNAN	Diteruskan ke OPD Teknis. Agar dilengkapi dengan data dukung. Status lahan harus CnC	Usulan diterima dan desa agar menyiapkan data pendukung	di akomodir 2 titik speedbump
21	Belum tersedianya koneksi internet dilokasi publik dan tempat wisata	Dibutuhkannya 2 titik koneksi internet dilokasi Publik	Simpang Tugu Desa (Dsn. Tanjung Batu Itam Rt 004) dan Balai Polmas (Dsn. Tanjung Batu Air RT 009), Kab. Belitung Timur	Tanjung Batu Itam	Simpang Pesak	Dinas Komunikasi, Informatika , Statistik dan Persandian	Verifikasi TAPD	HASNAN	Mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, Usulan diteruskan ke OPD Teknis	Usulan diterima sebanyak 2 titik	tidak diakomodir karena tidak ada anggaran

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
22	Masih rendahnya kesadaran Nelayan untuk mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan terhadap resiko kecelakaan kerja (Asuransi Nelayan)	Dibutuhkannya Bantuan Premi Asuransi Nelayan	Sedesa Tanjung Batu Itam, Kab. Belitung Timur	Tanjung Batu Itam	Simpang Pesak	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	HASNAN	usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon untuk dilengkapi data dukung	Usulan ditolak dikarenakan dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak 200 juta, agar desa menyiapkan data untuk disampaikan ke dinas	Akan diakomodir TA. 2025. Sudah dilakukan verifikasi lapangan. Mohon mengirimkan Daftar Nelayan yang akan diberikan Bantuan Premi Asuransi Nelayan ke Dinas Perikanan
23	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita pengaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamananan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Pengadaan lampu jalan kabupaten	Dusun Air Kelik dan Dusun AirLanci, Kab. Belitung Timur	Air Kelik	Damar	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	SUHARDI	diteruskan ke OPD Teknis. agar dilengkapi dengan data dukung. status lahan harus CnC	di teruskan ke OPD terkait	Diakomodir sebanyak 2 titik PJU Konvensional

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
24	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita pengaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamanan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Pengadaan speedbum	Dusun Air Kelik dan Air Lanci, Kab. Belitung Timur	Air Kelik	Damar	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	SUHARDI	diteruskan ke OPD Teknis. agar dilengkapi dengan data dukung	di teruskan ke OPD terkait	Diakomodir sebanyak 2 titik Speedbump
25	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Menengah Pertama yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	adanya meja dan kursi siswa yang telah rusak sejumlah 136 Buah terdiri dari meja 136 buah dan meja 136 buah dan hal ini harus segera ditindaklanjuti dengan segera SDN 2 Gantung	Jl. Laskar Pelangi Rt. 19 Dusun Teratai Desa Lenggang, Kab. Belitung Timur	Lenggang	Gantung	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	FACHRIZAL	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Dinas Pendidikan Kab.Beltim	Diakomodir

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
26	Masih minimnya sarana kegiatan penangkapan ikan yaitu berupa kapal penangkap ikan berukuran <3 GT, Mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan (Bubu kepiting, waring, kawat bubu, Jaring), alat bantu penangkapan ikan (GPS dan Fish Finder), dan Bahan pembuatan kapal fiber	terkendala dengan harga mesin dan jala yang mahal	desa cendil, Kab. Belitung Timur	Cendil	Kelapa Kampit	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	EDDY	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut	proses	Akan diakomodir TA, 2025. Sudah dilakukan verifikasi lapangan.
27	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Wc yang ada tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada	SD Negeri 3 Gantung, Kab. Belitung Timur	Gantung	Gantung	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	ARIEF KUSMARYA DI	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Dinas Pendidikan Kab.Belitim	Diakomodir Pembangunan WC Baru
28	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Menengah Pertama yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Pemabangunan laboratorium IPA	SMP 02 DAMAR, Kab. Belitung Timur	Air Kelik	Damar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	SUHARDI	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	-	Diakomodir Pembangunan Lab. IPA

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
29	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita penggaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamanan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	belum terpenuhi pasilitas penerangan jalan dan rambu-rambu lalu lintas	Diseluruh Dusun Gajah Mada, Dusun Kalmoa, Dusun Numpang Empat, Dusun Kabung Jaya, Kab. Belitung Timur	Mekar Jaya	Manggar	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	SYAMSUDIN	Usulan diteruskan ke OPD Teknis	Proses	di akomodir 1 unit PJUTS dan 1 titik Speedbump
30	Masih adanya sarana & prasarana rumah ibadah yang perlu ditingkatkan	Perlu dana HIBAH dalam penyelesaian Masjid Al Akbar Melalui yayasan Alakbar Almuttaqin Air Nangka	Rt 12 Masjid Al Akbar, Kab. Belitung Timur	Balok	Dendang	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	SUHANDRA	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	-	Proposal usulan hibah sudah lengkap sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022
31	Masih kurangnya upaya fasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam menumbuhkan Wirausaha Muda yang mandiri	Perlu pelatihan Pertanian Holtikultura	Desa Balok, Kab. Belitung Timur	Balok	Dendang	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	SUHANDRA	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	-	Diakomodir, penyesuaian pada anggaran yang tersedia dan yang akan dilaksanakan kegiatan oleh bidang yang bersangkutan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
32	Masih adanya sarana & prasarana PAUD yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Perlu Pembangunan Mushola	RT.07 TK N PEMBINA, Kab. Belitung Timur	Balok	Dendang	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	SUHANDRA	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	-	Diakomodir Pembangunan Mushola
33	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Perlu Rehab Gudang, R. Kepsek, WC Siswa, rumah Dinas	Rt 10 SD N 03 DDG, Kab. Belitung Timur	Balok	Dendang	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	SUHANDRA	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	-	Diakomodir Rehab Ruang Kepala Sekolah
34	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Perlu rehab wc, rumha dinas, RKB, WC, dan Perpus	Rt 03 SD N 5 DDG, Kab. Belitung Timur	Balok	Dendang	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	SUHANDRA	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	-	Diakomodir rehab ruang kelas 2 ruang
35	masih terbatasnya Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif	Perlu Pelatihan dan Pembinaan Pelaku Wisata	Desa Balok, Kab. Belitung Timur	Balok	Dendang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Verifikasi TAPD	SUHANDRA	usulan akan diteruskan ke dinas terkait	-	usulan diakomodir

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
36	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita penggaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamanan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Perlu penerangan pangkalan nelayan dan jalan	Keramat Sisilan, Pintu masuk TPU, Pangkalan Kik Jupri, Pangkalan Kik Juk & Pangkalan Batu Tiram, Kab. Belitung Timur	Balok	Dendang	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	SUHANDRA	agar dilengkapi dengan data dukung berupa foto dan proposal. status lahan harus CnC.	-	di akomodir sebanyak 1 unit PJUTS
37	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita penggaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamanan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Perlu penerangan lampu jalan	Desa Balok, Kab. Belitung Timur	Balok	Dendang	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	SUHANDRA	agar dilengkapi dengan data dukung berupa foto dan proposal. status lahan harus CnC.	-	di akomodir 1 unit PJUTS

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
38	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita penggaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamanan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Perlu rambu jalan berupa zebra kros dan Polisi Tidur	Desa Balok, TK, SD, SMP, TPA, MASJID, PAUD, BALAI DUSUN dll, Kab. Belitung Timur	Balok	Dendang	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	SUHANDRA	agar dilengkapi dengan data dukung berupa foto dan proposal. status lahan harus CnC.	-	di akomodir 2 titik speedbump
39	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita penggaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamanan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Penerangan Jalan Umum di Dusun Air Rusa masih kurang memadai, untuk itu perlu tambahan Lampu Jalan.	Dusun Air Rusa, Kab. Belitung Timur	Dukong	Simpang Pesak	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	IMANDA PATRIA	Usulan diteruskan ke OPD Teknis	Usulan diterima sebanyak 9 titik dari 12 titik, lokasi di Dsn. Air Rusa Desa Dukong, dan desa agar melengkapi data pendukung	Di akomodir 2 unit PJUTS

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
40	Masih adanya sarana & prasarana PAUD yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Dibutuhkannya Pagar Lanjutan TK N Pedesaan Tanjung Batu Itam	TK N Pedesaan Tanjung Batu Itam, Dsn. Gosong Lantai RT 001, Kab. Belitung Timur	Tanjung Batu Itam	Simpang Pesak	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	HASNAN	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Usulan ditolak, perlu survey	-
41	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita pengaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamanan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Kurangnya penerangan di beberapa ruas jalan	JL. Negeri 1, Jalan Negeri 2 dan Jl. PDM DKE, Kab. Belitung Timur	Gantung	Gantung	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	ARIEF KUSMARYADI	Usulan diteruskan ke OPD Teknis,	Diteruskan ke Dinas Perhubungan Kab.Beltim	di akomodir 7 titik PJU Konvensional
42	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Dibutuhkannya Pembangunan WC Guru	SD N 8 Simpang Pesak, Dsn Tanjung Batu Air, Kab. Belitung Timur	Tanjung Batu Itam	Simpang Pesak	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	HASNAN	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Usulan ditolak, perlu survey	Diakomodir Rehab WC

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
43	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Dibutuhkannya Rehab WC Siswa	SD N 8 Simpang Pesak, Dsn. Tanjung Batu Air RT 010, Kab. Belitung Timur	Tanjung Batu Itam	Simpang Pesak	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	HASNAN	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Usulan ditolak, perlu survey	-
44	Masih adanya sarana & prasarana PAUD yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Pemasangan Kanopi penghubung kelas B1 dan A1, penghubung dari ruang TU ke Aula TK Negeri Pembina Kelapa Kampit	Jalan Beringin II Desa Mentawak, Kab. Belitung Timur	Mentawak	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	AGUNG PERMANA	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir Pembangunan Atap Penghubung
45	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Menengah Pertama yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Perlunya Rehab Ruangan Kelas 8A SMP Negeri 1 Kelapa Kampit	Jalan Beringin II Dusun Padang Rt.006/Rw.003, Kab. Belitung Timur	Mentawak	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	AGUNG PERMANA	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir Rehab Ruang Kelas 2 Ruang
46	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Perlunya Kursi dan meja Belajar Siswa/Siswi Sebanyak 100 buah SD Negeri 3 Kelapa Kampit	Jalan Raya Manggar Dusun Padang, Kab. Belitung Timur	Mentawak	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	AGUNG PERMANA	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir Pengadaan Mebel Sekolah

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
47	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Tidak Layaknya Bangunan Gedung/Ruang Kelas Yang Rusak	Dsun Buding RT.006 RW.003, Kab. Belitung Timur	Buding	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	MARDINI	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir 1 Ruang
48	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Belum Adanya Mushola Yang Memadai	Dusun Limau Manis RT.014 RW.006, Kab. Belitung Timur	Buding	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	MARDINI	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir Rehab Mushola
49	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	REHAP RUANG KELAS SEBANYAK 2 RUANG AGAR LEBIH MEMBERIKAN KEAMANAN BAGI SISWA SISWI SDN 11 KELAPA KAMPIT	JALAN RAYA SIJUK RT 008 RW 003 DUSUN PESARAKAN , Kab. Belitung Timur	Cendil	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	EDDY	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir 2 Ruang
50	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita penggaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamanan jalan, lampu peringatan tenaga	Banyak titik belum ada nya penerangan lampu lingkungan	Desa Pembaharuan , Kab. Belitung Timur	Pembaharuan	Kelapa Kampit	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	PAMRI	Mohon dilengkapi dengan data pendukung (Proposal dan foto)	proses	Diakomodir 4 titik PJU Konvensional

NO	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
	surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten										
51	Rendahnya Kualitas prasarana pendukung kegiatan perikanan tangkap (Pemeliharaan Shelter Nelayan)	KURANNGYA PRASARANA PENUNJANG BAGI NELAYAN SEPERTI MESIN DIESEL 24 PK, GENSET 1500 WATT, PUKAT IKAN 2,5 INC, JARING MILENIUMM 4 INC, FISH FINDER FRUNO FCV 688 BAGI KELOMPOK SUAK MENGGURU,	DESA CENDIL, Kab. Belitung Timur	Cendil	Kelapa Kampit	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	EDDY	usulan diteruskan, agar dilakukan verifikasi data kelengkapan usulan	proses	Akan diakomodir TA, 2025. Sudah dilakukan verifikasi lapangan. Proposal Lengkap
52	masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang layak di destinasi wisata, perlunya perbaikan sarana dan prasarana yang rusak dan kurang layak di destinasi wisata dan masih perlunya pengembangan objek wisata baru	Jembatan pintasan Tebat Rasau telah rusak sehingga wisatawan tidak bisa melintasi area tersebut	Dsn. Lintang Rt.01 Rw.01, Kab. Belitung Timur	Lintang	Simpang Renggang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Verifikasi TAPD	MAHMUDA	Agar verifikasi lapangan dan dipastikan status kepemilikan lahan	Diteruskan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	usulan diakomodir

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
	sebagai alternatif pilihan berwisata										
53	Masih adanya sarana & prasarana PAUD yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Belum Adanya Pagar Sekolah Yang Memadai	Dusun Buding RT.006 RW.003 , Kab. Belitung Timur	Buding	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	MARDINI	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir Pembangunan Pagar
54	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita pengaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamanan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	MINIMNYA PENERANGAN DI AREA PARIWISATA PANTAI BATU PULAS	PANTAI BATU PULAS, Kab. Belitung Timur	Cendil	Kelapa Kampit	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	EDDY	Mohon dilengkapi dengan data pendukung (proposal / foto)	proses	di akomodir 2 unit PJUTS

NO	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
55	masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang layak di destinasi wisata, perlunya perbaikan sarana dan prasarana yang rusak dan kurang layak di destinasi wisata dan masih perlunya pengembangan objek wisata baru sebagai alternatif pilihan berwisata	KURANNGYA GAZBO / PENDOPO UNTUK WISATAWAN BERISTIRAHAT DI PANTAI BATU PULAS	PANTAI BATU PULAS, Kab. Belitung Timur	Cendil	Kelapa Kampit	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Verifikasi TAPD	EDDY	Usulan diteruskan, agar dilakukan verifikasi data kelengkapan usulan dan status lahan	proses	null
56	Masih minimnya sarana kegiatan penangkapan ikan yaitu berupa kapal penangkap ikan berukuran <3 GT, Mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan (Bubu kepiting, waring, kawat bubu, Jaring), alat bantu penangkapan ikan (GPS dan Fish Finder), dan Bahan pembuatan kapal fiber	Masih Minimnya Alat Penangkapan Ikan, Benih dan Pakan Ikan	Dusun Bukit Jaya RT.009 RW.004 (BAROKAH), Kab. Belitung Timur	Buding	Kelapa Kampit	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	MARDINI	usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut	proses	Akan diakomodir TA, 2025. Sudah dilakukan verifikasi lapangan. Proposal Lengkap

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
57	masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang layak di destinasi wisata, perlunya perbaikan sarana dan prasarana yang rusak dan kurang layak di destinasi wisata dan masih perlunya pengembangan objek wisata baru sebagai alternatif pilihan berwisata	KURANGNYA FASILITAS INSTALASI AIR BERSIH DI PANTAI BATU PULAS	PANTAI BATU PULAS, Kab. Belitung Timur	Cendil	Kelapa Kampit	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Verifikasi TAPD	EDDY	Usulan diteruskan, agar dilakukan verifikasi data kelengkapan usulan dan status lahan	proses	usulan diakomodir
58	masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang layak di destinasi wisata, perlunya perbaikan sarana dan prasarana yang rusak dan kurang layak di destinasi wisata dan masih perlunya pengembangan objek wisata baru sebagai alternatif pilihan berwisata	KURANGNYA FASILITAS TOILET UMUM DAN TEMPAT BILAS BAGI WISATAWAN PANTAI BATU PULAS	PANTAI BATU PULAS, Kab. Belitung Timur	Cendil	Kelapa Kampit	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Verifikasi TAPD	EDDY	Usulan diteruskan, agar dilakukan verifikasi data kelengkapan usulan dan status lahan	proses	usulan diakomodir

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
59	Masih minimnya sarana kegiatan penangkapan ikan yaitu berupa kapal penangkap ikan berukuran <3 GT, Mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan (Bubu kepiting, waring, kawat bubu, Jaring), alat bantu penangkapan ikan (GPS dan Fish Finder), dan Bahan pembuatan kapal fiber	Masih Kurangnya Sarana Penangkapan Ikan Yang Memadai	Dusun Buding RT.001 RW.001, Kab. Belitung Timur	Buding	Kelapa Kampit	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	MARDINI	usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut	proses	Akan diakomodir TA, 2025. Sudah dilakukan verifikasi lapangan. Proposal Lengkap
60	Masih minimnya sarana kegiatan penangkapan ikan yaitu berupa kapal penangkap ikan berukuran <3 GT, Mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan (Bubu kepiting, waring, kawat bubu, Jaring), alat bantu penangkapan ikan (GPS dan Fish Finder), dan Bahan pembuatan kapal fiber	Belum Adanya Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Yang Memadai	Dusun Buding RT.008 RW.003, Kab. Belitung Timur	Buding	Kelapa Kampit	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	MARDINI	usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut	proses	Akan diakomodir TA, 2025. Sudah dilakukan verifikasi lapangan. Proposal Lengkap

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
61	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita penggaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamanan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Kendaraan yang lewat tidak mengurangi kecepatan terutama pada jam anak sekolah keluar dan pada saat orang beribadah	Depan Masjid Al Fattah, Depan SDN 5, depan majid Al Hidayah, depan SDn 3 dan jl gang sunda, Kab. Belitung Timur	Gantung	Gantung	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	ARIEF KUSMARYADI	Usulan diteruskan ke OPD Teknis	Diteruskan ke Dinas Perhubungan Kab.Beltim	di akomodir 8 titik Speedbump
62	Masih minimnya sarana kegiatan penangkapan ikan yaitu berupa kapal penangkap ikan berukuran <3 GT, Mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan (Bubu kepiting, waring, kawat bubu, Jaring), alat bantu penangkapan ikan (GPS dan Fish Finder), dan Bahan pembuatan kapal fiber	Pengadaan mesin ketinting untuk nelayan	Desa Air Kelik, Kab. Belitung Timur	Air Kelik	Damar	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	SUHARDI	mohon dilengkapi dengan proposal serta usulan akan diteruskan ke dinas terkait	di teruskan ke OPD terkait	Akan diakomodir TA. 2025. Sudah dilakukan verifikasi lapangan

NO	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
63	Masih minimnya sarana kegiatan penangkapan ikan yaitu berupa kapal penangkap ikan berukuran <3 GT, Mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan (Bubu kepiting, waring, kawat bubu, Jaring), alat bantu penangkapan ikan (GPS dan Fish Finder), dan Bahan pembuatan kapal fiber	Pengadaan gudang nelayan laut asam dan laut pering	Desa Air Kelik, Kab. Belitung Timur	Air Kelik	Damar	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	SUHARDI	mohon dilengkapi dengan proposal serta diperhatikan kembali terkait status lahan. usulan akan diteruskan ke dinas terkait	di teruskan ke OPD terkait	Akan dilakukan verifikasi ke lokasi rencana pembangunan, mohon menyiapkan proposal dan SKT (diserahkan atas nama Sekretaris Daerah Kab. Belitung Timur)
64	Masih minimnya sarana kegiatan penangkapan ikan yaitu berupa kapal penangkap ikan berukuran <3 GT, Mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan (Bubu kepiting, waring, kawat bubu, Jaring), alat bantu penangkapan ikan (GPS dan Fish Finder), dan Bahan pembuatan kapal fiber	URANNGYA PRASARANA PENUNJANG BAGI NELAYAN SEPerti MESIN DIESEL 24 PK, GENSET 1500 WATT, PUKAT IKAN 2,5 INC, JARING MILENIUMM 4 INC, FISH FINDER FRUNO FCV 688 BAGI KELOMPOK SUAK MENGGURU JAYA	desa cendil, Kab. Belitung Timur	Cendil	Kelapa Kampit	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	EDDY	usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut	proses	Akan diakomodir TA, 2025. Sudah dilakukan verifikasi lapangan. Proposal Lengkap
65	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Bangunan WC Murid yang lama sudah rusak dan tidak layak pakai	SD N 6 KELAPA KAMPIT, Kab. Belitung Timur	Mayang	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	GUNA HENDRA JAYA	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan	proses	Diakomodir Rehab WC

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
									keuangan daerah		
66	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	belum tersedianya ruang kepala sekolah, Ruang Kelas yang sudah rusak dan tidak layak pakai, belum tersedianya ruang kantin, ruang guru yang sudah tidak layak pakai dan sarana dan prasarana lain yang belum memadai	SD N 9 KELAPA KAMPIT, Kab. Belitung Timur	Mayang	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifik asi TAPD	GUNA HENDRA JAYA	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir Rehab Ruang Kelas 3 Ruang
67	Masih adanya sarana & prasarana PAUD yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	kurangnya fasilitas yang tersedia di TK Negeri Desa Mayang seperti Papan Nama Sekolah, Bak sampah organik dan non organik, Meja Belajar Murid 20 Buah dan Prosotan Permanent	TK Negeri Desa Mayang , Kab. Belitung Timur	Mayang	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifik asi TAPD	GUNA HENDRA JAYA	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir Pembangunan Papan Nama

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
68	Masih minimnya sarana kegiatan penangkapan ikan yaitu berupa kapal penangkap ikan berukuran <3 GT, Mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan (Bubu kepiting, waring, kawat bubu, Jaring), alat bantu penangkapan ikan (GPS dan Fish Finder), dan Bahan pembuatan kapal fiber	KURANNGYA PRASARANA PENUNJANG BAGI NELAYAN SEPERTI MESIN DIESEL 24 PK, GENSET 1500 WATT, PUKAT IKAN 2,5 INC, JARING MILENIUMM 4 INC, FISH FINDER FRUNO FCV 688 BAGI KELOMPOK TAJOR JAYA	DESA CENDIL, Kab. Belitung Timur	Cendil	Kelapa Kampit	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	EDDY	usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut,	proses	Akan diakomodir TA, 2025. Sudah dilakukan verifikasi lapangan. Proposal Lengkap
69	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Masih adanya sapras sekolah yang harus ditingkatkan berupa Rehabilitasi Laboratorium IPA	Dsn. Air Tangga RT 008 (SDN 2 Simpang Pesak), Kab. Belitung Timur	Simpang Pesak	Simpang Pesak	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	SURYANTO	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Usulan ditolak, perlu survey	Diakomodir Rehab Laboratorium
70	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita pengaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengaman jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL),	Pengadaan lampu penerangan (haimas) sebanyak 3 unit	Dusun Baru Utara, Baru Tengah dan Baru Selatan, Kab. Belitung Timur	Baru	Manggar	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	Husnul Khalik	diteruskan ke OPD Teknis. agar dilengkapi dengan data dukung berupaproposal. status lahan harus CnC.	Proses	di akomodir 1 unit PJUTS, 5 unit speedbump

NO	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
	penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten										
71	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Pembangunan rehab gedung kelas sepaket 3 ruangan	SD 09 Damar, Kab. Belitung Timur	Air Kelik	Damar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	SUHARDI	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	di teruskan ke OPD terkait	Diakomodir Rehab Ruang kelas 3 ruang
72	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Pembangunan wc siswa	SD 09 DAMAR, Kab. Belitung Timur	Air Kelik	Damar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	SUHARDI	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	di teruskan ke OPD terkait	Diakomodir Rehab WC

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
73	Kurang optimalnya pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Pembangunan Sarana Olahraga (Lapangan Bola Voly dan Lapangan Putsal) DiDusun Sinar Setiong	Desa Lilangan Dusun Sinar Setiong, Kab. Belitung Timur	Lilangan	Gantung	Dinas Kepemudaa n dan Olah Raga	Verifik asi TAPD	YOPI ASMORO	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, koordinasikan dengan pihak-pihak terkait lainnya	Diteruskan ke Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kab.Beltim	Akomodir, dengan survey lahan dan persyaratan sesuai dengan perundang-undangan pada pemerintahan, serta penyesuaian pada APBD yang tersedia.
74	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Meubelair (Meja Kursi) Kelas 2 SDN 10 Dendang sudah Tidak layak pakai	Dusun Bentaian RT.03 desa Nyuruk, Kab. Belitung Timur	Nyuruk	Dendang	Dinas Pendidikan	Verifik asi TAPD	GURDI	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	-	Diakomodir Pengadaan Mebel Sekolah
75	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Menengah Pertama yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Pembangunan Ruang UKS SMPN Gantung (1 Kegiatan) di Rt.001 Dusun Lilangan	Dusun Lilangan Rt.001 Desa Lilangan, Kab. Belitung Timur	Lilangan	Gantung	Dinas Pendidikan	Verifik asi TAPD	YOPI ASMORO	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Dinas Pendidikan Kab.Beltim	Diakomodir Pembangunan Ruang UKS
76	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Rehab Ruang Kelas Sekolah SDN 17 Gantung (3 Unit) di Rt.003 Dusun Lilangan	Dusun Lilangan Rt.003 Desa Lilangan, Kab. Belitung Timur	Lilangan	Gantung	Dinas Pendidikan	Verifik asi TAPD	YOPI ASMORO	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan	Diteruskan ke Dinas Pendidikan Kab.Beltim	Diakomodir 1 Ruang

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
									keuangan daerah		
77	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Gedung sekolah rusak berat, sehingga perlu di rehap berat ada 4 lokal kelas.	SDN.4 Simpang Renggang RT /RW 005/001 Dusun Air Madu Desa Aik Madu Kecamatan Simpang Renggang Kab.BELTIM., Kab. Belitung Timur	Aik Madu	Simpang Renggang	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	RIZKI FILARDI	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diakomodir untuk dilanjutkan ke Dinas Pendidikan	Diakomodir rehab ruang kelas 3 ruang
78	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Perpustakaan Sekolah Perlu Direhap Berat Karena Kusen, Platfon dan Atap Rusak Berat	SDN.4 Simpang Renggang RT/RW 005/001 Dusun Air Madu Desa Aik Madu Kecamatan Simpang Renggang Kab.BELTIM, Kab. Belitung Timur	Aik Madu	Simpang Renggang	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	RIZKI FILARDI	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Dinas Pendidikan	Diakomodir Rehab Perpustakaan
79	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Dikarenakan adanya beberapa meubelair sekolah yang rusak dan bertambahnya siswa-siswi yang masuk	SD Negeri 8 Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Simpang Tiga	Simpang Renggang	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	WASNI	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan	Diteruskan ke Dinas Pendidikan	Diakomodir pengadaan mebel sekolah

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
									kemampuan keuangan daerah		
80	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	ruang perpustakaan yang atapnya rusak , plafon yang bocor , jendela dan pintu yang sudah tidak layak sehingga mengganggu para siswa siswi untuk kegiatan membaca dan tempat belajar	SDN 15 Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Senyubuk	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifik asi TAPD	DODY HIDAYAH	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir Rehab Perpustakaan
81	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Masih ada atap berkarat dan plafon yang bocor sehingga ruang UKS tersebut menjadi sarang Kotoran hewan	SDN 15 Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Senyubuk	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifik asi TAPD	DODY HIDAYAH	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir Rehab UKS
82	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	belum adanya Mushollah untuk kegiatan rutin keagamaan di lingkungan sekolah	SDN 17 Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Senyubuk	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifik asi TAPD	DODY HIDAYAH	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir Pembangunan Mushola

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
83	Masih minimnya sarana kegiatan penangkapan ikan yaitu berupa kapal penangkap ikan berukuran <3 GT, Mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan (Bubu kepiting, waring, kawat bubu, Jaring), alat bantu penangkapan ikan (GPS dan Fish Finder), dan Bahan pembuatan kapal fiber	Perlunya Bantuan Peralatan Pembuatan Perahu untuk nelayan yang ada di Desa Mentawak	Desa Mentawak, Kab. Belitung Timur	Mentawak	Kelapa Kampit	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	AGUNG PERMANA	usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut	proses	Akan diakomodir TA, 2025. Sudah dilakukan verifikasi lapangan. Proposal Lengkap
84	Masih Belum Optimalnya Pengelolaan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM	Perlu penerangan jalan Koperasi	RT 07 DS BALOK, Kab. Belitung Timur	Balok	Dendang	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	SUHANDRA	terkait permasalahan perlunya penerangan jalan akan diteruskan ke dinas terkait . mohon dilengkapi dengan proposal	-	di akomodir 1 unit PJUTS
85	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Rehab Ruang Kelas, Rehab ruang guru. Pagu Dana Rp. 280.000.000	Dusun Cemara I RT.06 RW.03 SDN 24 Manggar, Kab. Belitung Timur	Kurnia Jaya	Manggar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	RAHADIAN	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Proses	Diakomodir Rehab Ruang Kelas

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
86	Masih adanya sarana & prasarana PAUD yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	1. Tidak adanya pagar permanen samping yang ramah anak 2. Tidak tersedianya ruang kepala sekolah dan ruang guru 3. Areal sekolah sering becek ketika hujan sehingga menghambat kegiatan sekolah 4. Tidak adanya ruang perpustakaan 5. Tidak adanya Mushola untuk memudahkan tamu dan guru beribadah 6. Perlu pemasangan teralis di setiap ruang untuk menghindari pencurian yg sering kali terjadi di sekolah	Dusun Kelubi 1, RT. 02, Kab. Belitung Timur	Kelubi	Manggar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	ZAMRONI	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Proses	Diakomodir Pembangunan Pagar
87	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Beberapa wc murid mengalami kerusakan berat	SD Negeri 7 Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Simpang Tiga	Simpang Renggang	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	WASNI	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Dinas Pendidikan	Diakomodir Rehab WC

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
88	Minimnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan berupa (Kolam Terpal, Waring Budidaya, Pakan dan Benih) untuk Program Budidaya Untuk Ketahanan Pangan (DAUN KETAPANG) dan Program Budidaya Ikan untuk Pembudidayaan Ikan Milenial umur 19-40 tahun (TOMAN).	1. Minimnya sarpras budidaya ikan air tawar yg ada di kelompok 2. Tersedianya lahan kosong yg kurang di manfaatkan	Dusun Kelubi 1, Kab. Belitung Timur	Kelubi	Manggar	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	ZAMRONI	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut dan dimohon untuk menyiapkan proposal	Proses	Dilakukan Verifikasi Lapangan, untuk segera melengkapi persyaratan permohonan berupa : 1. Proposal Permohonan dilengkapi dengan surat pernyataan Bermaterai 2. Membuat KUSUKA
89	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Menengah Pertama yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Rumah Dinas Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gantung dalam keadaan rusak berat, sehingga perlu dilakukan rehab Rumah Dinas Kepala Sekolah	Dusun Gunong Rt.13, Kab. Belitung Timur	Jangkar Asam	Gantung	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	FAHRIZAL	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Dinas Pendidikan Kab.Beltim	Diakomodir Rehab Rumah Dinas
90	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Menengah Pertama yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Gedung mushola SMP Negeri 2 Gantung dalam keadaan rusak berat, sehingga perlu dilakukan rehab mushola	Dusun Gunong Rt.13, Kab. Belitung Timur	Jangkar Asam	Gantung	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	FAHRIZAL	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Dinas Pendidikan Kab.Beltim	Diakomodir Rehab Mushola

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
91	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Menengah Pertama yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Perlunya Rehabilitasi WC Siswa SMPN 2 Simpang Pesak sebanyak 3 unit, kondisi rusak berat	Dsn. Batu Belida Rt 011, Kab. Belitung Timur	Tanjung Kelumpang	Simpang Pesak	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	MUNZIRI	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Usulan disetujui	Diakomodir Rehab WC
92	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Perlunya rehabilitasi Perpustakaan SDN 4 Simpang Pesak kondisi rusak berat	Dsn. Tg. Belantu, Rt 04, Kab. Belitung Timur	Tanjung Kelumpang	Simpang Pesak	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	MUNZIRI	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Usulan disetujui	Diakomodir Rehab Perpustakaan
93	Masih Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Pengelolaan Persampahan	pelatihan Pengelolaan Persampahan	Desa Sukamandi, Kab. Belitung Timur	Sukamandi	Damar	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi TAPD	IBNU MAJA	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut dan dimohon untuk menyiapkan proposal	di teruskan ke OPD terkait	Usulan Diakomodir
94	Belum optimalnya pembudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	Peningkatan Venue olahraga Tenis Meja dari Outdoor menjadi Indoor, dikarenakan lapangan tidak sesuai standar tenis meja, masih banyak angin yang masuk dan lapangan tergenang air	Dusun Garumedang RT.21 Desa Sukamandi, Kab. Belitung Timur	Sukamandi	Damar	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	IBNU MAJA	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	di teruskan ke OPD terkait	Akomodir, merupakan aset Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
95	belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam melakukan kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan bagi pemuda	Pelatihan Kepemudaan desa sukamandi melibatkan karang taruna desa	Desa Sukamandi, Kab. Belitung Timur	Sukamandi	Damar	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	IBNU MAJA	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	di teruskan ke OPD terkait	Akomodir, menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada APBD TA. 2025
96	Minimnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan berupa (Kolam Terpal, Waring Budidaya, Pakan dan Benih) untuk Program Budidaya Untuk Ketahanan Pangan (DAUN KETAPANG) dan Program Budidaya Ikan untuk Pembudidayaan Ikan Milenial umur 19-40 tahun (TOMAN).	Bantuan Sarana Prasarana Kelompok Budidaya perikanan ibu" kelompok Perikanan Mekar Sari	Desa Sukamandi, Kab. Belitung Timur	Sukamandi	Damar	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	IBNU MAJA	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut dan dimohon untuk menyiapkan proposal	di teruskan ke OPD terkait	Dilakukan Verifikasi Lapangan, untuk segera melengkapi persyaratan permohonan berupa : 1. Proposal Permohonan dilengkapi dengan surat pernyataan Bermaterai 2. Membuat KUSUKA
97	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita pengkaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengaman jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan	Kebutuhab Polisi Tidur. 1. Seringnya warga yang mengendarai sepeda motor dan mobil di luar batas kecepatan 2. Membahayakan pengguna jalan yang lain	Dusun Birah, RT. 02, RT. 03, RT. 05., Kab. Belitung Timur	Kelubi	Manggar	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	ZAMRONI	Usulan diteruskan ke OPD Teknis	Proses	di akomodir 3 titik speedbump

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
	umum dll di ruas jalan Kabupaten										
98	Optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan yang profesional dan komprehensif	Polindes rusak ringan, saat hujan air merembes ke dalam dan lantai menjadi basah serta plafon rusak perlu Rehabilitasi Polindes dengan volume 1 Paket Pagu Rp 200.000.000,00	Polindes Desa Padang Dsn Urisan Jaya Rt. 02, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Dinas Kesehatan	Verifikasi TAPD	IZHAR	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Proses	Perbaikan drainase Polindes Padang akan dilaksanakan oleh Puskesmas Manggar, sedangkan rehabilitasi polindes belum termasuk prioritas TA 2025
99	Optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan yang profesional dan komprehensif	Saat hujan air jadi tergenang dan masuk kedalam ruangan perlu Pembangunan Drainase/saluran air di Polindes Desa Padang volume 50 m Pagu Rp 17.500.000,00	Polindes Desa Padang Dsn Urisan Jaya Rt. 02/01, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Dinas Kesehatan	Verifikasi TAPD	IZHAR	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Proses	Perbaikan drainase akan dilaksanakan oleh Puskesmas Manggar

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
10 0	Masih minimnya sarana kegiatan penangkapan ikan yaitu berupa kapal penangkap ikan berukuran <3 GT, Mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan (Bubu kepiting, waring, kawat bubu, Jaring), alat bantu penangkapan ikan (GPS dan Fish Finder), dan Bahan pembuatan kapal fiber	Lampu petunjuk alur pangkalan air rusa belum di pasang untuk itu dibutuhkan pemasangan lampu petunjuk alur pangkalan air rusa	Dusun Air Rusa Rt 07, Kab. Belitung Timur	Dukong	Simpang Pesak	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	IMANDA PATRIA	usulan merupakan urusan dinas perhubungan, akan diteruskan untuk dinas terkait	Usulan diterima, namun perlu untuk dilaksanakan survey lapangan	Di Akomodir sebanyak 1 Unit
10 1	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	1. Diperlukan Rehab Ruang Kelas 3 dan 4 dengan total luas 49 m, kondisi kelas rusak sedang. 2. Diperlukan Rehab Perpustakaan dengan total luas 56 m, kondisi rusak sedang	SD N 4 Manggar, Dusun Kartini Desa Lalang, Kab. Belitung Timur	Lalang	Manggar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	MUHAMMAD	verifikasi usulan tersebut, disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Proses	Diakomodir Rehab Ruang Kelas
10 2	Minimnya Agen Pemulihan Ekonomi Pembudidaya Ikan Pada Generasi / Kelompok Millenial (Sosialisasi, Pelatihan, dan/atau Pemagangan)	Ikan lokal (cempedik) merupakan ikan musiman dan mulai langka keberadaanya	Desa Gantung, Kab. Belitung Timur	Gantung	Gantung	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	ARIEF KUSMARYADI	usulan diteruskan ke dinas terkait	Diteruskan ke Dinas Perikanan Kab.Beltim	Untuk Kembali Bersurat dengan dinas Perikanan permohonan Pelatihan Budidaya Ikan Cempedik, Teknik Pemijahan ikan Cempedik

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
103	Masih kurangnya upaya fasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam menumbuhkan Wirausaha Muda yang mandiri	Perlu Pelatihan Keset Kaki dari pakaian bekas	Desa Balok, Kab. Belitung Timur	Balok	Dendang	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	SUHANDRA	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	-	Akomodir, menyesuaikan anggaran pada APBD TA. 2025 dan kegiatan akan dilaksanakan pada bidang yang bersangkutan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga
104	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita pengkaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamanan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Adanya beberapa titik jalan lingkungan di desa yang belum memiliki lampu jalan	Jl. Kelenteng RT. 09 Dusun Selumar (5 Titik), Jl. Pelataran Timah RT. 10 Dusun Selumar (5 titik) dan Jl.. Aik Rembudingan RT. 15 Dusun Selinsing (5 titik), Kab. Belitung Timur	Selingsing	Gantung	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	HARIANTO	diteruskan ke OPD Teknis. agar dilengkapi dengan data dukung foto lokasi. status lahan harus CnC.	Diteruskan ke Dinas Perhubungan Kab.Beltim	di akomodir 10 titik PJU Konvensional
105	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	SD N 8 Gantung Mengusulkan Rehab Ruangan Kelas	Jl. Merantik RT. 15 Dusun Selinsing , Kab. Belitung Timur	Selingsing	Gantung	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	HARIANTO	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Dinas Pendidikan Kab.Beltim	Diakomodir Rehab Ruang Kelas

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
106	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	SD N 9 Gantung, Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jl. Prof. Dr. Nugroho Noto Susanto RT. 02 Dusun Seberang , Kab. Belitung Timur	Selingsing	Gantung	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	HARIANTO	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Dinas Pendidikan Kab.Beltim	diakomodir
107	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	SD N 9 Gantung, Rehab Raungan Kelas	Jl. Prof. Dr. Nugroho Noto Susanto RT. 02 Dusun Seberang , Kab. Belitung Timur	Selingsing	Gantung	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	HARIANTO	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Dinas Pendidikan Kab.Beltim	Diakomodir Rehab Ruang Kelas
108	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Menengah Pertama yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	SMP N 4 Gantung, Usulan Pembangunan Ruang Guru (Belum Memiliki Ruang Guru Khusus)	Jl. Pulau Dapor RT. 08 Dusun Selumar , Kab. Belitung Timur	Selingsing	Gantung	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	HARIANTO	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Dinas Pendidikan Kab.Beltim	diakomodir Pembangunan Ruang Guru
109	Masih adanya sarana & prasarana rumah ibadah yang perlu ditingkatkan	Rehab Gereja Persekutuan Kristen selumar	Jl. Lumbung Panjang RT. 9 Dusun Selumar , Kab. Belitung Timur	Selingsing	Gantung	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	HARIANTO	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Sekretariat Daerah Kab.Beltim	Proposal usulan hibah sudah lengkap sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
110	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Perlu adanya rehab WC Murid	SDN 5 Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Senyubuk	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	DODY HIDAYAH	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir Rehab WC
111	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	perlu adanya rehab WC guru, Gudang dan Ruang Sirkulasi	SDN 5 Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Senyubuk	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	DODY HIDAYAH	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir Rehab WC
112	Minimnya Kelompok Pembudidaya ikan dalam berkelompok (Pendampingan Kluster/Kampung perikanan Budidaya potensi pengembangan ikan endemik lokal)	Rendahnya pengetahuan dan permodalan sehingga kelompok pembudidaya harus didukung dengan pendampingan disertai bantuan bibit dan pakan untuk peningkatan hasil produksi.	Jl. Lubuk Tapa RT. 08 Dusun Selumar , Kab. Belitung Timur	Selingsing	Gantung	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	HARIANTO	usulan akan diteruskan ke dinas terkait	Diteruskan ke Dinas Perikanan Kab.Beltim	Dilakukan Verifikasi Lapangan, untuk segera melengkapi persyaratan permohonan berupa : 1. Proposal Permohonan dilengkapi dengan surat pernyataan Bermaterai 2. Membuat KUSUKA
113	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Pagar mengalami kerusakan berat maka diperlukan perbaikan Pagar keliling sekolah. Kondisi RUSAK	SMP Negeri 1 Manggar, Kab. Belitung Timur	Lalang	Manggar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	MUHAMMAD	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan	Proses	Diakomodir Pembangunan Pagar

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
		BERAT, sepanjang 355 meter.							keuangan daerah		
11 4	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	rehab kelas dan mobiler banyak yang rusak	sd negeri 2 kelapa kampit, Kab. Belitung Timur	Pembaharuan	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	PAMRI	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir Pengadaan Mebel Sekolah
11 5	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita pengaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamanan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Perlunya Penambahan lampu Penerangan Jalan umum di Dsn . Air Membalun	Dsn. Air membalun, Rt 012-Rt013, Kab. Belitung Timur	Tanjung Kelumpan g	Simpang Pesak	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	MUNZIRI	Usulan diteruskan ke OPD teknis	Usulan diterima sebanyak 20 titik, namun perlu untuk dilaksanakan survey lapangan	Di akomodir 2 unit PJUTS

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
11 6	Masih adanya sarana & prasarana PAUD yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	sarana dan prasarana TKN Air Kelik -Aula,sumur bor,listrik,tralis,wc anak,wc guru,gudang,conblok,APE Dalam dan luar,ruang UKS,perlengkapan UKS,Rak buku,meja kepala sekolah,meja guru,kursi guru,meja belajar anak dan kursi,kipas angin,tiang bendera rak buku,rak sepatu anak	TKN Desa Air Kelik, Kab. Belitung Timur	Air Kelik	Damar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	SUHARDI	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	di teruskan ke OPD terkait	Diakomodir Pembangunan Area Bermain
11 7	Belum optimalnya pembudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	Perlu pembangunan stadion lap bola mini di Sprot Centre	Rt 18 dsn air nangka, Kab. Belitung Timur	Balok	Dendang	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	SUHANDRA	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	-	Akomodir, dengan survey lahan dan persyaratan sesuai dengan perundang-undangan pada pemerintahan, serta penyesuaian pada APBD yang tersedia.
11 8	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Diperlukannya fasilitas pendukung/mobiler ruangan kelas, dengan volume 3 lokal. Pagu anggaran yang dibutuhkan kurang	SD N 1 Manggar, Desa Lalang, Kab. Belitung Timur	Lalang	Manggar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	MUHAMMAD	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Proses	Diakomodir pada TA 2025

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
		lebih sebesar Rp. 72.000.000									
119	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Diperlukannya fasilitas pendukung/mobiler Lab. TIK dengan volume 1 Lokal. Pagu anggaran yang dibutuhkan kurang lebih sebesar Rp. 14.500.000	SD N 1 Manggar, Desa Lalang, Kab. Belitung Timur	Lalang	Manggar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	MUHAMMAD	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Proses	Diakomodir pada TA 2025
120	Masih minimnya sarana kegiatan penangkapan ikan yaitu berupa kapal penangkap ikan berukuran <3 GT, Mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan (Bubu kepiting, waring, kawat bubu, Jaring), alat bantu penangkapan ikan (GPS dan Fish Finder), dan Bahan pembuatan kapal fiber	Bantuan Bubu Kepiting untuk kelompok nelayan pesisir 1500 unit	Dusun Cemara II RT.12 RW.06, Kab. Belitung Timur	Kurnia Jaya	Manggar	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	RAHADIAN	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut dan dimohon untuk menyiapkan proposal	Proses	Akan diakomodir TA. 2025. Sudah dilakukan verifikasi lapangan. Proposal Lengkap

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
12 1	Masih minimnya sarana kegiatan penangkapan ikan yaitu berupa kapal penangkap ikan berukuran <3 GT, Mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan (Bubu kepiting, waring, kawat bubu, Jaring), alat bantu penangkapan ikan (GPS dan Fish Finder), dan Bahan pembuatan kapal fiber	Bantuan GPS Dispender untuk kelompok nelayan perahu , 5 unit	Dusun Cemara II RT. 12 RW.06, Kab. Belitung Timur	Kurnia Jaya	Manggar	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	RAHADIAN	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut dan dimohon untuk menyiapkan proposal	Proses	Akan diakomodir TA. 2025. Sudah dilakukan verifikasi. Proposal Lengkap. Jumlah unit tergantung ketersediaan anggaran
12 2	Minimnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan berupa (Kolam Terpal, Waring Budidaya, Pakan dan Benih) untuk Program Budidaya Untuk Ketahanan Pangan (DAUN KETAPANG) dan Program Budidaya Ikan untuk Pembudidaya Ikan Milenial umur 19-40 tahun (TOMAN).	Tidak tersedianya benih dan pakan	Simpang tiga, Kab. Belitung Timur, Kab. Belitung Timur	Simpang Tiga	Simpang Renggang	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	WASNI	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut dan dimohon untuk menyiapkan proposal	Diteruskan ke Dinas Perikanan	Dilakukan Verifikasi Lapangan, untuk segera melengkapi persyaratan permohonan berupa : 1. Proposal Permohonan dilengkapi dengan surat pernyataan Bermaterai 2. Membuat KUSUKA
12 3	Terbatasnya kemampuan sumber daya dan sarana prasarana industri khususnya industri kecil dan menengah.	Mesin obras lama sering mengalami kerusakan	(Sahabat Lais) Dusun Air Ruak, Desa Simpang Tiga. Kec. Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Simpang Tiga	Simpang Renggang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi TAPD	WASNI	Usulan diteruskan, mohon dilengkapi dengan proposal dan dilakukan verifikasi data	Diteruskan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Usulan diteruskan ke Perusahaan yang memiliki Program CSR

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
									kelengkapan usulan		
124	Belum Optimalnya Penataan Kelembagaan bagi Koperasi dan UMKM	butuhnya peningkatan management kepengurusan koperasi	Desa Simpang tiga, Kab. Belitung Timur	Simpang Tiga	Simpang Renggang	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Verifikasi TAPD	WASNI	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut dan dimohon untuk menyiapkan proposal	Diteruskan ke Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Menyampaikan data Koperasi yang membutuhkan manajemen Kepengurusan Koperasi Ke disnakerkopuk m
125	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita pengaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengaman jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Pemasangan lampu jalan, 16 unit	Dusun Arab II RT.19 RW.08, RT.20 RW.10, RT21.A RW.10, RT.22 RW.11, RT.23 RW.11, Kab. Belitung Timur	Kurnia Jaya	Manggar	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	RAHADIAN	diteruskan ke OPD Teknis. mohon dilengkapi data dukung berupa proposal/foto. Status lahan harus CnC	Lengkapi data pendukung bila tidak ada dimusrenbang ditolak	di akomodir 1 PJU Konvensional, 1 PJUTS

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
126	Masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan Nelayan untuk mengembangkan usaha perikanan tangkap (Pelatihan Pembuatan Kapal Fiber dan Perbaikan Mesin Kapal)	Perlunya Pelatihan Perbaikan Mesin kapal untuk semua Kelompok Nelayan yang ada Desa Tanjung Kelumpang	Desa Tanjung Kelumpang, Kab. Belitung Timur	Tanjung Kelumpang	Simpang Pesak	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	MUNZIRI	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut dan dimohon untuk menyiapkan proposal	Usulan disetujui di tahun 2025	Diakomodir TA. 2025. Mohon mengirimkan daftar Nelayan yang akan mengikuti pelatihan
127	Masih minimnya sarana kegiatan penangkapan ikan yaitu berupa kapal penangkap ikan berukuran <3 GT, Mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan (Bubu kepiting, waring, kawat bubu, Jaring), alat bantu penangkapan ikan (GPS dan Fish Finder), dan Bahan pembuatan kapal fiber	Dibutuhkannya Waring Sero Nelayan Desa tanjung Batu Itam	Sedesa Tanjung Batu Itam, Kab. Belitung Timur	Tanjung Batu Itam	Simpang Pesak	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	HASNAN	usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut, dimohon untuk menyiapkan proposal	Usulan diterima agar dibuatkan proposal	Akan diakomodir TA. 2025. Sudah dilakukan verifikasi lapangan. Mohon melengkapi persyaratan (Proposal)
128	Minimnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan berupa (Kolam Terpal, Waring Budidaya, Pakan dan Benih) untuk Program Budidaya Untuk Ketahanan Pangan (DAUN KETAPANG) dan Program Budidaya Ikan untuk Pembudidayaan Ikan	belum adanya masyarakat yang mampu membuat pakan ikan	Desa Limbongan, Kab. Belitung Timur	Limbongan	Gantung	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	DEDI SUGIANTO	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut	Diteruskan ke Dinas Perikanan Kab.Belitim	Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan

NO	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
	Milenial umur 19-40 tahun (TOMAN).										
129	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita penggaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamananan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Pemasangan SpeedBump di Desa Mengkubang	Desa Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Mengkubang	Damar	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	PIRMAWAN	diteruskan ke OPD Teknis. mohon dilengkapi data dukung berupa proposal/foto. Status lahan harus CnC	di teruskan ke OPD terkait	Di akomodir 6 titik speedbump

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
130	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita pengaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamananan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Pemasangan Lampu Peringatan di Desa Mengkubang	Desa Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Mengkubang	Damar	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	PIRMAWAN	diteruskan ke OPD Teknis. mohon dilengkapi data dukung berupa proposal/foto. Status lahan harus CnC	di teruskan ke OPD terkait	Di akomodir 1 unit Cermin Tikungan
131	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita pengaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamananan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Perlunya dipasang cermin cekung di Desa Mengkubang	Desa Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Mengkubang	Damar	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	PIRMAWAN	diteruskan ke OPD Teknis. mohon dilengkapi data dukung berupa proposal/foto. Status lahan harus CnC	di teruskan ke OPD terkait	di akomodir 1 unit cermin tikungan

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
132	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita pengaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamanan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Perlunya Pemasangan Lampu Tenaga Surya di Desa Mengkubang	Desa Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Mengkubang	Damar	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	PIRMAWAN	diteruskan ke OPD Teknis. mohon dilengkapi data dukung berupa proposal dan foto lokasi. Status lahan harus CnC	di teruskan ke OPD terkait	Di akomodir 1 unit PJUTS
133	Optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan yang profesional dan komprehensif	Perlunya Peningkatan SarPras Poskesdes Mengkubang	Poskesdes Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Mengkubang	Damar	Dinas Kesehatan	Verifikasi TAPD	PIRMAWAN	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	di teruskan ke OPD terkait	Usulan anggaran akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan review kunjungan lapangan
134	Minimnya Kelompok Pembudidaya ikan dalam berkelompok (Pendampingan Kluster/Kampung perikanan Budidaya potensi pengembangan ikan endemik lokal)	kurangnya benih ikan yang berkualitas	Dusun renggiang II Rt 07, Kab. Belitung Timur	Renggiang	Simpang Renggiang	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	SISKORARIES NUGRAHA	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut dan dimohon untuk menyiapkan proposal	Diteruskan ke Dinas Perikanan	Untuk Membuat Surat Permohonan Fasilitasi Kegiatan Pelatihan

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
135	Minimnya Agen Pemulihan Ekonomi Pembudidaya Ikan Pada Generasi / Kelompok Millenial (Sosialisasi, Pelatihan, dan/atau Pemagangan)	Kurangnya SDM dalam pembudidayaan ikan sehingga perlunya pelatihan dalam pemijahan ikan sebagai bibit berkualitas baik.	RT/RW 004/001 Dsn.Air Madu Desa Aik Madu Kecamatan Simpang Renggang Kab.BELTIM, Kab. Belitung Timur	Aik Madu	Simpang Renggang	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	RIZKI FILARDI	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut dan dimohon untuk menyiapkan proposal	Diteruskan ke Dinas Perikanan	Untuk Membuat Dilakukan Verifikasi Lapangan, untuk segera melengkapi persyaratan permohonan berupa : Proposal Permohonan Fasilitasi kegiatan Pelatihan Pemijahan Ikan, dilengkapi Dokumentasi kegiatan kelompok perikanan budidaya
136	Kurang optimalnya Pengelolaan Pembinaan Bina Mental Spiritual dibidang keagamaan dan lembaga keagamaan	Dikarenakan pembangunan baru masjid menggunakan 2 lantai	Dusun gajan Mada RT.03 mekar jaya, Kab. Belitung Timur	Mekar Jaya	Manggar	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	SYAMSUDIN	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Proses	Proposal usulan hibah sudah lengkap sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022

NO	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
137	Minimnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan berupa (Kolam Terpal, Waring Budidaya, Pakan dan Benih) untuk Program Budidaya Untuk Ketahanan Pangan (DAUN KETAPANG) dan Program Budidaya Ikan untuk Pembudidayaan Ikan Milenial umur 19-40 tahun (TOMAN).	Keterbatasan kolam untuk pembesaran ikan nila dari gangguan predator lainnya, mohon bantuan kolam bioflok uk diameter 3 meter 30 buah beserta bahan material lainnya	POKDAKAN KULONG KERO LESTARI DESA PADANG, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	IZHAR	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut	Proses	Dilakukan Verifikasi Lapangan, untuk segera melengkapi persyaratan permohonan dengan berkoordinasi kembali dengan Dinas Perikanan, Kabupaten Belitung Timur
138	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Menengah Pertama yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Dibutuhkan fasilitas meubeulair portable laboratorium IPA, dengan volume 1 paket dan kondisi meubeulair rusak berat / tidak layak pakai	SMP Negeri 3 Manggar, Desa Lalang, Kab. Belitung Timur	Lalang	Manggar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	MUHAMMAD	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Proses	Diakomodir Pengadaan Mebel Lab IPA
139	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Menengah Pertama yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Dibutuhkan paket meubeulair Portable Perpustakaan dengan volume 1 paket dan kondisi rusak berat / tidak memenuhi standar mutu	SMP N 3 Manggar, Desa Lalang, Kab. Belitung Timur	Lalang	Manggar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	MUHAMMAD	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Proses	Diakomodir Pengadaan Mebel Perpustakaan

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
140	masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang layak di destinasi wisata, perlunya perbaikan sarana dan prasarana yang rusak dan kurang layak di destinasi wisata dan masih perlunya pengembangan objek wisata baru sebagai alternatif pilihan berwisata	Perlunya peningkatan pengelolaan homestay	Desa Baru, Kab. Belitung Timur	Baru	Manggar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Verifikasi TAPD	Husnul Khalik	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut dan untuk menyiapkan proposal	Lengkapi data pendukung bila tidak ada dimusrenbang ditolak	usulan diakomodir
141	Masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan Nelayan untuk mengembangkan usaha perikanan tangkap (Pelatihan Pembuatan Kapal Fiber dan Perbaikan Mesin Kapal)	perlu adanya bantuan bahan untuk pembuatan perahun fiber dengan ukuran panjang 8 meter dan lebar 80 cm	Dsn Selindang , Kab. Belitung Timur	Senyubuk	Kelapa Kampit	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	DODY HIDAYAH	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut	proses	Akan diakomodir TA, 2025. Sudah dilakukan verifikasi lapangan. Proposal Lengkap
142	Masih minimnya sarana kegiatan penangkapan ikan yaitu berupa kapal penangkap ikan berukuran <3 GT, Mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan (Bubu kepiting, waring, kawat bubu, Jaring), alat bantu penangkapan ikan (GPS dan Fish Finder), dan Bahan	minimnya Alat Fish Fender dan GPS Genggam untuk sarana Kelompok Nelayan tersebut	DSN Selindang, Kab. Belitung Timur	Senyubuk	Kelapa Kampit	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	DODY HIDAYAH	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut	proses	Akan diakomodir TA, 2025. Sudah dilakukan verifikasi lapangan. Proposal Lengkap

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
	pembuatan kapal fiber										
14 3	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Atap Plapon Gedung C dan D rusak berat, maka perlu rehabilitasi atap plapon tersebut	Dusun Padang Rt.01 SD Negeri 15 Gantung, Kab. Belitung Timur	Jangkar Asam	Gantung	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	FAHRIZAL	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Dinas Pendidikan Kab.Beltim	Diakomodir
14 4	Rendahnya Kualitas prasarana pendukung kegiatan perikanan tangkap (Pemeliharaan Shelter Nelayan)	Butuhnya Dukungan Perlengkapan Nelayan Mengkubang	Desa Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Mengkubang	Damar	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	PIRMAWAN	usulan akan diteruskan untuk verifikasi lebih lanjut	di teruskan ke OPD terkait	Akan diakomodir TA. 2025, Sudah dilakukan verifikasi lapangan. Mohon mengirimkan Proposal Usulan
14 5	Masih rendahnya kesadaran Nelayan untuk tertib kelaikan Nelayan dan Usaha Penangkapan (Sosialisasi dan Gerai Pelayanan	Perlunya Sosialisasi untuk Nelayan	Desa Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Mengkubang	Damar	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	PIRMAWAN	usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut	di teruskan ke OPD terkait	Akan diakomodir TA. 2025. Mohon untuk mengirimkan surat permohonan sosialisasi ke

NO	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
	KUSUKA, BPKP, Rekom BBM)										Dinas Perikanan
146	Minimnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan berupa (Kolam Terpal, Waring Budidaya, Pakan dan Benih) untuk Program Budidaya Untuk Ketahanan Pangan (DAUN KETAPANG) dan Program Budidaya Ikan untuk Pembudidaya Ikan Milenial umur 19-40 tahun (TOMAN).	Bantuan bibit lele sangkuriang, pembenahan kolam, pakan ikan, biaya perawatan kolam dan mesin pembuat pakan ikan	POKDAKAN KULONG KERO DESA PADANG, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	IZHAR	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut	Proses	Dilakukan Verifikasi Lapangan, untuk segera melengkapi persyaratan permohonan dengan berkoordinasi kembali dengan Dinas Perikanan, Kabupaten Belitung Timur
147	Masih adanya sarana & prasarana rumah ibadah yang perlu ditingkatkan	Perlu Bantuan Hibah Pembangunan Masjid Al Akbar	MASJID AL AKBAR DUSUN AIR NANGKA RT 12 DS BALOK, Kab. Belitung Timur	Balok	Dendang	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	SUHANDRA	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta lengkapi proposal usulan	mohon menjadi perhatian Pemerintah Daerah	Usulan sudah sesuai perbup no 46 tahun 2022

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
148	Sarana pertanian (ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang	Permohonan Bantuan Cultivator sebanyak 1 Unit	Kelompok Tani "Budi Karya" Desa Padang, Provinsi Bangka Belitung	Padang	Manggar	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Verifikasi TAPD	IZHAR	diteruskan ke PD terkait untuk ditelaah dan di tindaklanjuti	-	akan dianggarkan namun volume belum bisa dipastikan masih akan melalui pembahasan terlebih dahulu
149	Sarana pertanian (ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang	Permohonan Bantuan Cultivator sebanyak 1 Unit	Kelompok Tani "Maju Berkah" Desa Padang, Provinsi Bangka Belitung	Padang	Manggar	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Verifikasi TAPD	IZHAR	diteruskan ke PD terkait untuk ditelaah dan di tindaklanjuti	-	akan dianggarkan namun volume belum bisa dipastikan masih akan melalui pembahasan terlebih dahulu
150	Kurang optimalnya Pengelolaan Pembinaan Bina Mental Spiritual dibidang keagamaan dan lembaga keagamaan	belum maksimalnya bantuan kepada masyarakat secara menyeluruh di tujuh kecamatan, karena belum banyak yang membayar zakat infak di badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten belitung timur	komplek perkantoran terpadu pemkab belitung timur, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	baznas kabupaten belitung timur	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta lengkapi proposal usulan	Proses	Usulan sudah sesuai dengan Perbup No 46 Tahun 2022
151	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perlunya perbaikan dan perbaikan Jalan serta pembangunan talud di Wilayah Desa Simpang Pesak karena rusak parah.	Desa Simpang Pesak (Sepanjang Jalan Jend. Sudirman dari Perbatasan Desa Lilangan sampai ke	Simpang Pesak	Simpang Pesak	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN	Verifikasi TAPD	SURYANTO	Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai urusan, kewenangan, dan	-	null

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
			Dusun Birah), Provinsi Bangka Belitung			PERMUKIM AN			ketersediaan anggarannya		
15 2	Masih adanya sarana & prasarana rumah ibadah yang perlu ditingkatkan	Belum adanya Tower Masjid Yang Memadai	Dusun Bukit Jaya RT.010/004 Desa Buding (Masjid Al-Furqon), Kab. Belitung Timur	Buding	Kelapa Kampit	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	Badan Kemakmuran Masjid Al-Furqon	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta lengkapi proposal usulan	Proses sesuai usulan	Usulan sudah sesuai dengan Perbup no 46 Tahun 2022
15 3	Masih adanya sarana & prasarana rumah ibadah yang perlu ditingkatkan	Sarana dan Prasarana Gereja belum terpenuhi	Jl. Wisna Ria II , Kab. Belitung Timur	Kurnia Jaya	Manggar	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	Gereja Kristen Baptist Jakarta (GKBJ) Manggar	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta lengkapi proposal usulan	Proses	Usulan telah sesuai dengan Perbup No 46 Tahun 2022
15 4	Kurang optimalnya Pengelolaan Pembinaan Bina Mental Spiritual dibidang keagamaan dan lembaga keagamaan	Perlu adanya dana operasional kelembagaan pembinaan bina mental spiritual di bidang keagamaan	Jl. Lipat Kajang, Kab. Belitung Timur	Baru	Manggar	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan	Proses	Usulan sudah sesuai dengan Perbup No 46 Tahun 2022

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
									daerah, serta lengkapi proposals usulan		
15 5	Kurang optimalnya Pengelolaan Pembinaan Bina Mental Spiritual dibidang keagamaan dan lembaga keagamaan	Masih kurangnya sarana pelengkap untuk rumah ibadah	Jl. Negeri II, RT. 11, Kab. Belitung Timur	Gantung	Gantung	Sekretariat Daerah	Verifik asi TAPD	Yayasan Al Fattakhul Huda Gantung	Verifikasi Usulan tersebut sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta usulan tersebut dilengkapi denga proposal	Diteruskan ke Sekretariat Daerah	Usulan sudah sesuai dengan Perbup No. 46 Tahun 2022
15 6	Kurang optimalnya Pengelolaan Pembinaan Bina Mental Spiritual dibidang keagamaan dan lembaga keagamaan	Belum Optimalnya pengelolaan operasional kelembagaan IPHI dan masih kurangnya peran IPHI terhadap pembinaan umat	Komplek Perkantoran Terpadu Menggarauan Jl.Raya Manggar Gantung - Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Sekretariat Daerah	Verifik asi TAPD	IPHI kabupaten Belitung Timur	Verifikasi Usulan tersebut sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta usulan tersebut dilengkapi denga proposal	Proses	Usulan sudah sesuai dengan Perbup No 46 Tahun 2022

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
157	Masih adanya sarana & prasarana rumah ibadah yang perlu ditingkatkan	Tempat Parkir dan Toilet yang ada di Masjid Nurul Iman kurang memadai	Dusun Durian RT 03/02, Kab. Belitung Timur	Lalang	Manggar	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	YAYASAN MASJID NURUL IMAN DURIAN	Verifikasi Usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta usulan tersebut dilengkapi dengan proposal	Proses	Usulan sudah sesuai dengan Perbup No 46 Tahun 2022
158	Masih adanya sarana & prasarana rumah ibadah yang perlu ditingkatkan	Perlu bantuan dana hibah pembangunan masjid al akbar air nangka	Masjid al akbar dusun air nangka rt 12, Kab. Belitung Timur	Balok	Dendang	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	Rudi Ismail	Verifikasi Usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta usulan tersebut dilengkapi dengan proposal	diperlukan kebutuhan sekitar Rp 300.000.000 untuk penyelesaian rehabilitasi berat	Usulan sudah sesuai perbup no 46 tahun 2022
159	Kurang optimalnya Pengelolaan Pembinaan Bina Mental Spiritual dibidang keagamaan dan lembaga keagamaan	Perlu Dukungan dana operasional untuk peningkatan bina mental spritual masyarakat organisasi mitra pemerintah.	Jl. Sudirman Desa Baru Manggar Belitung Timur 33513, Kab. Belitung Timur	Baru	Manggar	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	MUI Kab. Belitung Timur	Verifikasi Usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta usulan tersebut dilengkapi dengan proposal	Proses	Usulan sudah sesuai dengan Perbup No 46 Tahun 2022

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
160	Kurang optimalnya Pengelolaan Pembinaan Bina Mental Spiritual dibidang keagamaan dan lembaga keagamaan	Mebutuhkan anggaran untuk pembinaan	Kelapa Kampit - Kabupaten Belitung Timur, Kab. Belitung Timur	Pembaharuan	Kelapa Kampit	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	BAMAG LKKI	Verifikasi Usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta usulan tersebut dilengkapi dengan proposal	proses lebih lanjut	Usulan telah sesuai dengan Perbup No 46 Tahun 2022
161	Masih adanya sarana & prasarana rumah ibadah yang perlu ditingkatkan	Kurangnya dana untuk pembangunan Masjid At Taqwa	Dsn. Gajah Mada Desa Mekar Jaya Rt 03/02 , Kab. Belitung Timur	Mekar Jaya	Manggar	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	Yayasan At Taqwa Mekar Jaya	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Proses	Usulan telah sesuai dengan Perbup No 46 Tahun 2022
162	Kurang optimalnya Pengelolaan Pembinaan Bina Mental Spiritual dibidang keagamaan dan lembaga keagamaan	Biaya Operasional Kegiatan BKMT selama satu tahun	Jalan Assalam Desa Baru Dusun Assalam Desa Baru Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Baru	Manggar	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	Badan Kontak Majelis Taklim (PD BKMT) Kabupaten Belitung Timur	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Proses	Usulan sudah sesuai dengan Perbup No 46 Tahun 2022

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
163	Masih adanya sarana & prasarana rumah ibadah yang perlu ditingkatkan	Tidak dapat menambah bangunan Madrasah baru di tempat yang lama dikarenakan lokasi bangunan yang sempit sedangkan santri di Madrasah sudah semakin banyak yang memerlukan tempat yang cukup untuk kegiatan belajar mengajar.	Jalan M Hasan RT 001 Desa Simpang Pesak, Kab. Belitung Timur	Simpang Pesak	Simpang Pesak	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	Yayasan Thoriqul Jannah Simpang Pesak	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta lengkapi proposal usulan	Usulan diteruskan ke dinas terkait	Usulan sudah sesuai dengan Perbup No 46 Tahun 2022
164	Masih adanya sarana & prasarana rumah ibadah yang perlu ditingkatkan	Keadaan sanitasi dan interior Masjid Al-Falah sudah kurang baik	Dsn Penirukan rt02 rw01 Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur, Kab. Belitung Timur	Mayang	Kelapa Kampit	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	YAYASAN MASJID AL-FALAH PENIROKAN DESA MAYANG	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Proposal sesuai keadaan dan untuk diteruskan ke proses selanjutnya	Usulan sudah sesuai dengan Perbup No 46 Tahun 2022
165	Masih adanya sarana & prasarana rumah ibadah yang perlu ditingkatkan	tidak tersedianya fasilitas penunjang di masjid jamik al istiqomah nibung punggur	Jalan Raya Maanggar-Tanjung Pandan RT 003 RW 002 Dusun Nibung Punggur, Kab. Belitung Timur	Mentawak	Kelapa Kampit	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	Yayasan Masjid Jamik Al Istiqomah Nibung Punggur	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta lengkapi proposal usulan	proses sesuai usulan	Usulan sudah sesuai dengan Perbup No. 46 Tahun 2022

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
16 6	Masih adanya sarana & prasarana rumah ibadah yang perlu ditingkatkan	Permohonan Bantuan Biaya Pembangunan Surau	Dusun Merdeka Rt.002/001 Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur, Kab. Belitung Timur	Senyubuk	Kelapa Kampit	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	Yayasan Babul Jannah Merdeka	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses sesuai usulan	Usulan sudah sesuai dengan Perbup No 46 Tahun 2022
16 7	Masih adanya sarana & prasarana rumah ibadah yang perlu ditingkatkan	Perlunya Renovasi Masjid	Jln. Sumatera Dusun Sukamandi Rt.006/003 Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur, Kab. Belitung Timur	Sukamandi	Damar	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	Yayasan Al Falah Sukamandi Damar	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta lengkapi proposal usulan	Diteruskan ke Bagian Kesra/Dinas terkait	Usulan sudah sesuai dengan Perbup No. 46 Tahun 2022
16 8	Masih adanya sarana & prasarana rumah ibadah yang perlu ditingkatkan	Perlu Dana untuk pembangunan Masjid AT-TAQWA	Dusun Gajah Mada Desa Mekar Jaya RT. 01/01, MANGGAR, Kab. Belitung Timur	Mekar Jaya	Manggar	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	Yayasan At Taqwa Mekar Jaya	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta lengkapi proposal usulan	PROSES	Proposal lengkap

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
169	Belum optimalnya pembudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	Pembinaan Olahraga yang meliputi pembibitan dan pengembangan atlet serta peningkatan kompetensi pelatih beserta perangkat pertandingan yang berkelanjutan yang harus ditingkatkan	Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya Manggar - Gantung, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Verifikasi TAPD	KONI Kabupaten Belitung Timur	Verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	Diakomodir, menyesuaikan dengan anggaran APBD Tahun Anggaran 2025
170	Kurang optimalnya pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Perubahan sosial yang semakin cepat di Kabupaten Belitung Timur membuat orientasi sosial masyarakat yang semula tradisional menjadi masyarakat modern. Dalam hal ini Lembaga Adat Melayu Belitong Timor merasa perlu melakukan intervensi dalam memasyarakatkan dan membina generasi muda melalui kegiatan pelestarian budaya Melayu Belitung Timur, khususnya pada Seni Tradisi Lisan sebagai salah satu kekuatan falsafah budaya melayu	Komplek Perkantoran Terpadu Dusun Manggarawan Jl. Raya Gantung Manggar RT 003/002, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Verifikasi TAPD	Lembaga Adat Melayu Belitong Timor	Verifikasi usulan tersebut sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	ya disetujui

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
171	Belum optimalnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak terkait masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	belum tersedianya fasilitas PMI di daerah	kompleks perkantoran terpadu Pemkab. belitung timur. jl, raya manggar-gantung Ds. Padang Manggarawan kec. manggar Kab. belitung Timur, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Dinas Kesehatan	Verifikasi TAPD	PALANG MERAH INDONESIA 2024	Verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	Pelaksanaan Kegiatan PMI disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada OPD
172	belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam melakukan kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan bagi pemuda	Bantuan Usulan Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Kepada DPD KNPI Kabupaten Belitung Timur	Jl. Sudirman RT.04/RW.02 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manggar - Kabupaten Belitung Timur, Kab. Belitung Timur	Mekar Jaya	Manggar	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	DPD KNPI Belitung Timur	verifikasi usulan proposal, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	Diakomodir, menyesuaikan dengan anggaran APBD Tahun Anggaran 2025
173	Optimalisasi peran organisasi kemasyarakatan dalam membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan sosialisasi moderasi beragama, nilai-nilai toleransi dan kerukunan umat beragama serta mitigasi konflik horizontal.	Masih minimnya dana operasional untuk operasional Organisasi Lintas Agama dalam merawat Kerukunan Umat Beragama.	Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Belitung Timur, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi TAPD	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)	Verifikasi usulan tersebut sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	usulan Hibah FKUB telah diakomodir

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
174	Kurang optimalnya Pengelolaan Pembinaan Bina Mental Spiritual dibidang keagamaan dan lembaga keagamaan	Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki	Jalan Raya Manggar-Gantung Desa Padang Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Belitung Timur	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	Usulan sudah sesuai dengan Perbup No 46 Tahun 2022
175	Belum optimalnya peran partai politik dalam meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat	Pengajuan bantuan Keuangan bagi partai politik tahun anggaran 2025	Jalan Tengah Dusun Pancur II Rt 003 Rw 002 , Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi TAPD	Partai Keadilan Sejahtera	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	Usulan hibah parpol diakomodir
176	Belum optimalnya peran partai politik dalam meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat	pengajuan bantuan keuangan bagi partai politik tahun anggaran 2025	Dsn. Kabung Jaya Rt.005 , Kab. Belitung Timur	Mekar Jaya	Manggar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi TAPD	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) 2024	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	Usulan hibah parpol diakomodir
177	Belum optimalnya peran partai politik dalam meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat	pengajuan bantuan keuangan bagi partai politik tahun anggaran 2025	Jl. Sumatra No. 178 Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur, Kab. Belitung Timur	Sukamandi	Damar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi TAPD	Partai PDIP	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	di teruskan ke OPD terkait	Usulan hibah parpol diakomodir

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
178	Belum optimalnya peran partai politik dalam meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat	Pengajuan bantuan keuangan bagi partai politik tahun anggaran 2025	Dsn Samak A1, Kab. Belitung Timur	Lalang	Manggar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi TAPD	Partai Demokrat	Verifikasi usulan tersebut sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	Usulan hibah parpol diakomodir
179	Belum optimalnya peran partai politik dalam meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat	Pengajuan bantuan keuangan bagi partai politik tahun anggaran 2025	Jl Numpang empat, Kab. Belitung Timur	Mekar Jaya	Manggar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi TAPD	PARTAI PERINDO 2024	Verifikasi usulan tersebut sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	Usulan hibah parpol diakomodir
180	Belum optimalnya peran partai politik dalam meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat	pengajuan bantuan keuangan bagi partai politik tahun anggaran 2025	dusun padang I Rt 001 Desa Padang Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi TAPD	PARTAI NASDEM 2024	Verifikasi usulan tersebut sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	Usulan hibah parpol diakomodir
181	Belum optimalnya peran partai politik dalam meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat	Pengajuan bantuan keuangan bagi partai politik tahun anggaran 2025	jl. Raya Manggar-Gantung Dsn. Padang II Rt. 011/005, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi TAPD	DPC PARTAI GERINDRA BELTIM	Verifikasi usulan tersebut sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	Usulan hibah parpol diakomodir

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
182	Belum optimalnya peran partai politik dalam meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat	Pengajuan bantuan keuangan bagi partai politik tahun anggaran 2025	Jl. Merbabu, Dsn Taruna Mulya, RT.01 RW.01, Desa lalang manggar, Kab. Belitung Timur	Lalang	Manggar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi TAPD	Partai Bulan Bintang	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	Usulan hibah parpol diakomodir
183	Belum optimalnya peran partai politik dalam meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat	Pengajuan bantuan keuangan bagi partai politik tahun anggaran 2025	Jl. Raya Gantung , Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi TAPD	Partai Golongan Karya	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	Usulan hibah parpol diakomodir
184	Belum optimalnya peran partai politik dalam meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat	Pengajuan bantuan keuangan bagi partai politik tahun anggaran 2025	Jl sudirman no 16 RT. 02/ RW. 01 Desa Mekar Jaya, Kab. Belitung Timur	Mekar Jaya	Manggar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi TAPD	DPC PARTAI HANURA	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	Usulan hibah parpol diakomodir
185	Belum optimalnya peran partai politik dalam meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat	pengajuan bantuan keuangan bagi partai politik tahun anggaran 2025	JL. Flamboyen Dsn. Urisan Jaya Rt 005/002 Desa Padang Kecamatan Manggar Kab. Beltim, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi TAPD	Partai Kebangkitan Bangsa	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	Usulan hibah parpol diakomodir

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
18 6	Belum optimalnya peran partai politik dalam meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat	Pengajuan bantuan keuangan bagi partai politik tahun anggaran 2025	Dusun Kabung Jaya RT.02 RW.01 Desa Mekar Jaya Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Mekar Jaya	Manggar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi TAPD	Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	Usulan hibah parpol diakomodir
18 7	Belum optimalnya pembudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	Pengusulan dana bantuan hibah KORMI	jln sumatra, rt/rw. 001/001, Desa sukamandi, Kab. Belitung Timur	Sukamandi	Damar	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	KOMITE OLAHRAGA REKREASI MASYARAKAT INDONESIA (KORMI) KABUPATEN BELITUNG TIMUR	verifikasi usulan, disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	diteruskan ke OPD terkait	Akomodir, penyesuaian dengan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tersedia.

Sumber: <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/usulan/usulan-aspirasi/monitor>

5.4. URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RKPD 2025

Dalam rangka mencapai prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan, maka disusunlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD tahun 2025 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati Belitung Timur yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan program dan kegiatan perlu melihat seluruh potensi pendapatan yang ada baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat, sehingga terjadi sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Tabel 5. 9 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD 2025
Berdasarkan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025

KODE	PERANGKAT DAERAH (PD)
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	Satuan Polisi Pamong Praja
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8	Dinas Pertanian dan Pangan
9	Dinas Lingkungan Hidup
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12	Dinas Perhubungan
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	Dinas Perikanan
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20	Sekretariat Daerah
21	Sekretariat DPRD
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

KODE	PERANGKAT DAERAH (PD)
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25	Inspektorat
26	Kecamatan Manggar
27	Kecamatan Gantung
28	Kecamatan Kelapa Kampit
29	Kecamatan Simpang Pesak
30	Kecamatan Damar
31	Kecamatan Simpang Renggang
32	Kecamatan Dendang
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dipandang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat yang disusun berdasarkan Perangkat Daerah disajikan pada lampiran dalam dokumen ini.

BAB 5

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.5.KERANGKA PENDANAAN DAERAH TAHUN 2025

Berdasarkan analisis keuangan pada Bab III (tiga) maka kerangka pendanaan untuk tahun 2025 adalah sebagaimana Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Kerangka Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

Kode	Uraian	APBD 2024 Rp	Proyeksi 2025 Rp	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				Rp	%
4	PENDAPATAN DAERAH	832.718.865.833	914.768.476.647	82.049.610.814	9,85
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	103.452.600.833	120.587.716.655	17.135.115.822	16,56
4.1.1.	Pajak Daerah	52.226.525.125	65.042.000.000	12.815.474.875	24,54
4.1.2	Retribusi Daerah	3.982.283.342	3.204.262.500	- 778.020.842	-19,54
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.523.052.522	5.523.052.522	-	0,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	41.720.739.844	46.818.401.633	5.097.661.789	12,22
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	728.016.515.000	792.931.009.992	64.914.494.992	8,92
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	678.016.515.000	759.181.009.992	81.164.494.992	11,97
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.000.000.000	33.750.000.000	- 16.250.000.000	-32,50
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.249.750.000	1.249.750.000	-	0,00
4.3.01	Pendapatan hibah	249.750.000	249.750.000	-	0,00
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan	1.000.000.000	1.000.000.000	-	0,00

Kode	Uraian	APBD 2024 Rp	Proyeksi 2025 Rp	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				Rp	%
	perundang-undangan				
5	BELANJA DAERAH	959.352.217.513	1.050.186.373.728	90.834.156.215	9,47
5 . 1	BELANJA OPERASI	750.519.980.532	823.844.125.373	73.324.144.841	9,77
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	412.700.220.253	518.678.294.277	105.978.074.024	25,68
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	311.144.007.999	290.531.040.293	- 20.612.967.706	-6,62
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	24.893.752.280	11.352.790.803	- 13.540.961.477	-54,40
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	1.782.000.000	3.282.000.000	1.500.000.000	84,18
5 . 2	BELANJA MODAL	113.214.442.435	121.423.888.405	8.209.445.970	7,25
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.503.708.800	27.621.241.760	10.117.532.960	57,80
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.623.077.500	27.581.780.700	.958.703.200	33,74
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	73.533.159.485	64.437.001.045	- 9.096.158.440	-12,37
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.502.775.650	1.675.093.800	172.318.150	11,47
5 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	51.721.000	108.771.100	57.050.100	110,30
5 . 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	0,00
5 . 3 . 1	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000	-	0,00
5 . 4	BELANJA TRANSFER	94.617.794.546,00	103.918.359.950,00	9.300.565.404	9,83
5 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil	5.641.300.846	6.825.416.750,00	1.184.115.904	20,99
5 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	88.976.493.700	97.092.943.200	8.116.449.500	9,12
	SURPLUS/(DEFISIT)	- 126.633.351.680	- 135.417.897.081	- 8.784.545.401	6,94
6	PEMBIAYAAN DAERAH	126.633.351.680	135.417.897.081	8.784.545.401	6,94
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	130.633.351.680	135.917.897.081	5.284.545.401	4,05

Kode	Uraian	APBD 2024 Rp	Proyeksi 2025 Rp	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				Rp	%
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	130.633.351.680	135.417.897.081	4.784.545.401	3,66
6 . 1 . 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	500.000.000	500.000.000	
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000	500.000.000	- 3.500.000.000	-87,50
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000	-	4.000.000.000	
6 . 2 . 4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	500.000.000	500.000.000	
TOTAL APBD		959.352.217.513	1.050.686.373.728		0,00

5.1.1 Pendanaan Daerah
5.1.1. Pendanaan Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung
1 Timur Tahun 2025

Gambaran mengenai dukungan pendanaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 terhadap masing-masing prioritas pembangunan Kabupaten Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2
Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	
1	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	1. Dinas Pendidikan	1. Mewujudkan akses dan kualitas pendidikan dasar yang merata bagi semua satuan pendidikan 2. Mewujudkan akses dan kualitas pendidikan kesetaraan yang merata bagi semua masyarakat	1	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
					a			Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	480.000.000
					b			Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	724.285.000
					c			Meningkatkan Kualitas SDM Bidang Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	731.000.000
					d			Meningkatkan cakupan layanan SPM Bidang Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	168.000.000
					e			Mengurangi Anak Tidak Sekolah (ATS)	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	881.880.000
									Pengadaan Mebel Sekolah	408.950.000
									Pengadaan Perlengkapan Sekolah	336.024.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	662.418.200
								Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	151.068.800
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	99.995.400
								Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.000.000
								Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15.626.600.000
								Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	29.992.600
								Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	29.110.000
								Pengembangan konten digital untuk pendidikan	29.999.900
								Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	37.079.200
								Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	29.969.700
								Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	34.315.000
								Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	29.942.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	29.845.600
								Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	191.660.000
								Pembangunan Ruang Kelas Baru	904.000.000
								Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	605.000.000
								Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	29.949.400
								Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	49.991.400
								Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	3.896.000.000
								Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.000.914.300
							Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	149.328.000
								Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	159.996.000
								Pembangunan Laboratorium	199.700.000
								Pembangunan Fasilitas Parkir	99.798.000
								Pembangunan Kantin Sekolah	149.775.000
								Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	430.055.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	1.399.877.000
								Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	49.950.100
								Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	149.775.000
								Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium	199.700.000
								Rehabilitasi Sedang/ Berat Kantin Sekolah	1.500.000
								Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	501.002.000
								Pengadaan Mebel Sekolah	239.600.000
								Pengadaan Perlengkapan Sekolah	180.544.000
								Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	615.298.100
								Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	68.200.000
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	119.906.000
								Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	19.999.800
								Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	7.235.000.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	19.992.600
								Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	29.994.700
								Pengembangan konten digital untuk pendidikan	29.999.900
								Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	29.999.900
								Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	24.992.800
								Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	19.999.400
								Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.992.600
								Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	30.745.200
								Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	109.994.000
								Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.500.000
								Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	29.999.900
								Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	174.999.900

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	594.193.000
							Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.313.238.000
								Pengadaan Mebel PAUD	68.907.000
								Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	194.390.000
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	79.712.000
								Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	218.378.000
								Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.200.000.000
								Pengembangan konten digital untuk pendidikan	14.980.200
								Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	19.996.200
								Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15.335.600
								Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	16.070.000
								Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	127.210.000
								Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	16.477.800
								Pembangunan Ruang Kelas Baru	600.360.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	24.102.800
								Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	50.130.000
								Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	323.188.400
								Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	548.433.200
								Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	450.000.000
							Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	11.681.200
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	19.729.900
								Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	17.211.600
								Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	795.000.000
								Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	19.816.500
								Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100.006.400

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Pembangunan Ruang Kelas Baru	546.302.000
								Pengadaan Perlengkapan Sekolah	40.150.200
								Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	73.990.000
								Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	29.859.200
								Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	49.175.600
								Pengadaan Mebel Sekolah	63.921.500
								Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	63.921.500
						Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	29.997.000
								Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	44.899.400
								Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	29.997.000
							Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	28.662.200
								Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	20.087.800

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
						Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	79.549.000
							Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	59.799.800
						Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota	30.072.400
							Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota	34.986.100
2	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Dinas Kesehatan 2. UPT Puskesmas se kab. Belitung Timur dan RSUD Muhammad Zein	1. Konvergensi program lintas sektor untuk percepatan penurunan stunting pada desa lokus stunting 2. konvergensi lintas program dan lintas sektor tatanan Kabupaten/ Kota sehat	1	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Puskesmas	2.523.970.000
					a Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	399.799.000
					b Peningkatan Kualitas SDM bidang Kesehatan			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	719.321.000
					c Peningkatan kualitas sarana dan			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	161.740.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
					prasarana bidang kesehatan				
				d	Percepatan penurunan stunting			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.350.000.000
				e	Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pengendalian Penyakit			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	118.614.000
				f	Meningkatkan cakupan layanan SPM Bidang Kesehatan			Pengembangan Rumah Sakit	5.000.000.000
								Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.860.177.100
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	79.199.000
								Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	71.211.900
						Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	474.886.600

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Daerah Kabupaten / Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	103.954.400
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	114.499.900
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	28.676.300
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	550.160.000
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	822.209.600
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	561.567.300
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	32.532.000
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	561.655.100
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	241.366.500
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	875.174.100
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	183.475.100
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	59.781.600

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	137.255.600
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.148.413.100
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	42.424.000
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	514.837.100
								Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	229.999.780
								Pengelolaan Surveilans Kesehatan	312.001.200
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	65.000.000
								Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.218.525.600
								Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20.842.902.600
								Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	64.473.000
								Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	134.311.200
								Operasional Pelayanan Puskesmas	1.224.388.000
								Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	590.381.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	26.520.000
								Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	42.480.000
								Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	15.120.000
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	143.690.000
								Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	638.840.800
							Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	270.805.000
							Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	40.640.000
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	59.998.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	318.500.000
								Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	184.738.400
							Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		999.999.700
						Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4.993.200
							Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	5.999.100

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	64.992.600
								Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	112.669.000
								Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	213.121.000
							Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	23.945.500

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	17.478.000
								Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	140.000.000
							Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	75.967.000
								Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	371.400.000
								Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	37.492.500
						Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	526.000.000
								Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	191.600.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		265.443.400
								Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		102.051.000
							Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		117.000.000
								Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		31.450.000
							Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		22.769.000
								Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		159.903.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14.850.000
								Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	56.615.600
							Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000
								Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	107.225.000
						Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	35.555.400
								Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	300.000.300

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	35.781.900
								Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	15.034.800
							Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	81.045.300
								Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	327.000.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	359.700.000
3	Pengentasan Kemiskinan	1. Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. konvergensi lintas program dan lintas sektor percepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur	1	Percepatan Penghapusan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4.200.000
					a		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	912.858.300
					b			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	86.281.400
					c			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	23.400.600
						Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.039.600
						Program Perlindungan	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	26.959.200

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.996.800
									Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	194.925.300
							Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	72.089.900
									Penyediaan Sandang	58.327.000
									Penyediaan Alat Bantu	55.221.900
									Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	39.910.100
									Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	44.370.200
								Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	10.394.400
									Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	20.000.000
									Pemberian Layanan Rujukan	20.134.000
							Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	69.456.600

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	650.000.000
							Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	9.105.000
							Program Pencegahan, Pengendalian, Penanggulangan, Penyelamatan Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	199.205.000
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	149.944.100
							Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	37.036.400
							Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	84.615.200

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	169.774.000
								Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	44.200.000
							Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	144.163.100
							Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	69.968.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	131.826.000
								Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	88.400.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
4	Optimalisasi Pengembangan Daya Saing Daerah dan Percepatan Investasi	1. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 2. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 4. Dinas Perikanan. 5. Dinas Pertanian dan Pangan. 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.	1. Menyusun paket peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas (triple skilling yaitu tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat terampil bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing) 2. Meningkatkan Jaringan Tenaga Kerja 3. Menyusun daftar prioritas investasi daerah 4. Menyusun <i>Investment Project Ready to Offer</i> (IPRO) 5. Menyusun Rencana Kerja Untuk Pembangunan Kawasan Industri Aik Kelik 6. Optimalisasi	1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Percepatan Investasi				

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
			produksi perikanan tangkap dan budidaya 7. Optimalisasi akses pasar, daya saing, kualitas dan kapasitas komoditas/produk perikanan 8. Optimalisasi produksi dan produktivitas pertanian 9. Optimalisasi pencapaian ketahanan pangan daerah 10. Optimalisasi pengelolaan pariwisata daerah dan ekonomi kreatif 11. Mengembangkan budaya lokal 12.	a	Meningkatkan Pengelolaan, Pengembangan Kapasitas Daya Saing Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	32.999.900
						Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	428.300.000
								Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	244.970.800
				b	Mendorong Pertumbuhan Investasi Baru	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	32.379.000
							Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	64.698.000
						Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	189.398.700

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
			Meningkatkan penjaminan mutu produk unggulan daerah 13. Meningkatkan produktivitas U M K M				Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	438.309.600
									Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	30.630.000
							Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	97.618.000
									Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	403.624.100
									Pengawasan Penanaman Modal	185.241.000
							Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	15.946.600
							Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	144.911.700
									Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	199.700.000
									Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.416.434.100

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
							Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	223.675.300
								Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	196.815.600
				c	meningkatkan akses pasar, daya saing, kualitas dan kapasitas produk perikanan		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	19.983.500
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	90.005.000
								Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	111.323.000
							Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	30.468.800

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							(Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
							Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.246.900
								Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	707.138.900
								Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.827.200
								Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.946.283.200
						Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	29.217.800
								Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	62.795.600
								Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	20.781.600
						Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	270.165.500

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								berdasarkan skala usaha dan risiko	
							Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	128.096.600
							Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	237.555.900
								Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	590.280.100
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.895.379.500
							Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	19.935.400

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	24.499.200
								Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	306.000.000
					d	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	805.493.000
							Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	64.998.200
							Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	100.000.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
						Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	210.000.000
								Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	293.197.200
								Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	42.632.400
								Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	70.652.400
								Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	19.999.900
						Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	422.993.300
							Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	55.000.000
						Program Peningkatan Diversifikasi	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	49.990.600

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
						Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	25.247.600
								Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	9.953.000
							Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	89.965.000
							Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	9.973.600
								Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	250.000.000
						Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	9.953.000
							Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	9.868.000
						Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	133.312.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Daerah Kabupaten / Kota		
						Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	515.000.000
							Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	1.000.064.000
									39.998.700
							Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	1.318.260.000
								Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	699.922.600
								Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	457.410.000
								Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	39.990.500
							Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	59.999.700
					e	Meningkatkan kunjungan wisatawan			

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
									Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	44.000.000
							Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	899.666.000
									Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	450.000.000
							Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	150.000.000
									Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	99.999.600
									Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	681.658.800
									Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	100.000.000
									Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50.000.000
								Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	150.000.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
						Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	353.928.000
							Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	253.681.400
							Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	21.191.000
						Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya	49.979.100
						Program Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	183.736.300
						Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	147.059.800
								Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	17.496.800
						Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	30.860.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Barang Penting	di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
								Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	37.700.000
									Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	52.589.000
					f	Mendorong Pengendalian fluktuasi harga barang		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	5.988.800
									Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	9.963.900
									Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	9.963.900
							Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	199.700.000
									Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.587.964.200
							Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	33.000.000
									Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	240.318.800

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
						Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	445.130.500
						Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	69.845.000
					g	Meningkatkan Daya saing Koperasi dan UMKM	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	135.285.100
5	Peningkatan Kualitas Infrastruktur	1. Dinas Perhubungan. 2. Dinas	1. Mengembangkan sistem transportasi	1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah				

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	
		Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	terpadu yang memenuhi standar keselamatan berlalu lintas 2. Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman		a	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah baik darat maupun laut	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	200.000.000
								Rekonstruksi Jalan	8.499.050.274	
								Pemeliharaan Berkala Jalan	4.452.508.941	
								Pelebaran Jalan Menuju Standar	1.999.990.758	
								Pemeliharaan Rutin Jembatan	199.958.000	
								Survey Kondisi Jalan/Jembatan	496.598.460	
								Rehabilitasi Jalan	3.499.983.847	
								Pemeliharaan Rutin Jalan	3.955.985.600	
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.119.062.000	
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4.147.453.700	
							Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	120.390.100	
							Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	17.151.900	

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	540.939.200
								Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	121.981.000
							Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	41.483.000
								Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	88.306.000
								Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	211.962.400
								Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	80.201.900
							Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	17.910.000
								Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	506.682.800

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	28.245.300
							Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.750.000
								Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.506.500
						Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	100.000.000
							Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	100.000.000
								Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	37.570.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Sungai dan Danau	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	800.053.200
					b	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar	Program Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	49.811.600
							Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	311.095.000
						Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	399.435.000
							Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	49.993.200
						Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.609.735.800

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	299.973.500
									Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	15.119.386.970
							Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	704.603.500
									Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	444.389.000
									Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	519.351.900
									Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400.342.500
									Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	697.780.000
							Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000
									Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik,	300.000.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1.198.944.000
								Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	599.504.000
								Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	449.757.000
								Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	6.398.045.000
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	3.718.800.000
								Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	800.000.000
						Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
						Program Penatagunaan Tanah	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	249.123.000
						Program Penyelenggara	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	100.000.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
						aan Penataan Ruang	(RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	199.320.700
								Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	146.535.000
							Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Dasar	669.225.000
								Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	900.000.000
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	295.886.500
								Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	144.374.000
								Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	97.466.100
								Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	50.000.000
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	98.663.100
								Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	100.000.000
6	Peningkatan Kualitas	1. Dinas Lingkungan	1. Optimalisasi	1	Meningkatnya kualitas				

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
	Lingkungan Hidup	Hidup 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 2. Mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah	a	lingkungan hidup				
					Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	199.999.900
						Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	349.972.006
								Pembangunan Kanal Banjir	2.908.671.381
								Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	7.214.441.207
								Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	599.484.000
							Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2.595.551.266
				b	Pengendalian Degradasi Lingkungan dan Resiko Bencana	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	199.999.800

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
						Lingkungan Hidup	Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	49.999.975
								Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	749.999.450
							Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	49.999.875
							Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	149.995.600
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	89.903.000
						Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6.000.000
								Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	600.000.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
									Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	50.000.000
									Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	3.815.439.800
							Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	39.999.800
							Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	199.995.000
									Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	99.992.100
									Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	49.997.600

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	124.991.100
							Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	29.996.400
									Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	36.994.800
							Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	49.999.600
							Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	43.213.800

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	400.000.000
							Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	49.769.200
								Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	161.437.500
								Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	38.990.200
								Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	90.513.900
								Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.083.554.200
								Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	27.966.500
							Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	69.373.800
								Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	145.090.000
7	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan	1. Badan Perencanaan Pembangunan	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian	1	Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi				

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
	Pelayanan Publik	Penelitian dan Pengembangan Daerah. 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. 3. Inspektorat. 4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 6. Dinas Perpustakaan. 7. Dinas Komunikasi dan Informatika. 8. Sekretariat Daerah. 9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan	dan evaluasi pembangunan daerah dan meningkatkan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan 2. Menjadi fasilitator dalam kolaborasi pentahelix (pendidikan, dunia usaha, komunitas sosial, pemerintahan dan media massa) untuk tindak lanjut dan pemanfaatan pengetahuan dan teknologi. 3. Implementasi Satu Data Indonesia Secara	a	pelaksanaan pembangunan daerah Mendorong integrasi penelitian dan pengembangan dengan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	20.335.200
								Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	205.241.300
								Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	5.520.000
								Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	481.205.700
								Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	179.219.300
						Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	67.510.200
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	44.503.800
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	29.376.500

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
		an Sumber Daya Manusia 10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Optimal 4. Perluasan jaringan kerjasama antar PD dalam rangka penyelesaian aset daerah 5. optimalisasi pendapatan daerah 6. Peningkatan peran, fungsi, serta sinergitas lembaga pengawasan daerah 7. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara komprehensif 8. Menyusun kebijakan sistem pengaduan masyarakat sehingga penanganan pengaduan masyarakat						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	91.267.600
									Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	119.363.400
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	60.744.600
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	35.649.900
									Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	128.399.300
							Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	62.931.800
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	28.956.400

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
			dapat di implementasikan 9. Optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 10. Menyelenggarakan pelayanan publik berdasarkan proses bisnis yang efektif dan efisien 11. Peningkatan sistem keamanan, aplikasi dan Infrastruktur yang terintegrasi untuk penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik 12. Penataan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	35.306.400
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	91.464.400
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	99.430.500
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	28.956.400
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	39.806.400
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	97.172.900
							Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	69.039.600
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	29.856.400

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
			an 13. Melaksanakan talent manajemen ASN secara berkala dan penilaian berbasis kinerja setiap aparatur 14. Digitalisasi proses administrasi kepegawaian sebagai pengembangan layanan kepegawaian 15. Pemenuhan target pengembangan kompetensi aparatur						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	39.346.400
									Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	96.372.300
									Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55.294.800
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	47.958.200
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	33.718.200
									Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	59.774.000
							Program Dukungan Pelaksanaan	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.000.000.000
									Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	50.000.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
						Tugas Dan Fungsi DPRD		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	90.000.000
							Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS	21.000.000
								Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	21.000.000
								Pembahasan APBD	21.000.000
								Pembahasan APBD Perubahan	21.000.000
								Pembahasan Laporan Semester	10.000.000
								Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	11.100.000
							Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3.080.000.000
								Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3.600.000.000
								Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3.050.000.000
								Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	135.000.000
								Pengawasan Penggunaan Anggaran	700.000.000
								Pembahasan Laporan Keterangan	635.000.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
							Peningkatan Kapasitas DPRD	Orientasi DPRD	20.310.000
								Pendalaman Tugas DPRD	750.000.000
								Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	620.000.000
								Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	270.000.000
								Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	95.700.000
								Penyusunan Program Kerja DPRD	10.000.000
								Publikasi dan Dokumentasi DPRD	220.000.000
							Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kunjungan Kerja dalam Daerah	12.992.800
								Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	30.000.000
								Pelaksanaan Reses	440.000.000
							Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.710.097.300
								Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	20.000.000
								Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	114.690.000
						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	134.908.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	120.795.000
								Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	517.523.000
						Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	109.974.400
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	374.019.000
							Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	249.365.000
								Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	545.023.000
								Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	136.241.700
					b Peningkatan keselarasan data perencanaan pembangunan daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	89.588.000
								Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	172.167.300
								Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	102.439.600
				2	Meningkatnya kapasitas				

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
					pengelolaan keuangan daerah				
				a	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	57.192.100
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	54.823.700
								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	130.673.500
								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	189.588.800
								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	4.654.100
								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	4.654.100
								Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	112.216.900
								Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	104.082.400
								Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	135.037.400
							Koordinasi dan Pengelolaan	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	270.463.200

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Perbendaharaan Daerah	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	37.171.000
								Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	139.229.400
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	119.122.000
								Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	33.356.000
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	86.262.000
								Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	42.030.400
								Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	159.999.700

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	76.352.900
								Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	78.293.400
								Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	103.855.900
								Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	30.703.400
							Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	72.472.000
								Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	97.092.943.200
								Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.000.000.000
								Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	6.825.416.750
						Program Pengelolaan		Penyusunan Standar Harga	97.148.400

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
						Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	59.015.200
								Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	67.754.900
								Penatausahaan Barang Milik Daerah	228.522.600
								Inventarisasi Barang Milik Daerah	222.951.400
								Pengamanan Barang Milik Daerah	24.538.700
				b	Mengoptimalkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	331.000.000
								Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	68.699.000
								Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	178.833.200
								Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	274.757.500
								Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	80.860.000
								Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	402.776.000
								Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	26.558.900
								Penagihan Pajak Daerah	58.880.800
								Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	28.092.900

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
									Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	590.632.700
				3	Terwujudnya kinerja pemerintahan daerah yang akuntabel					
				a	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	66.000.000	
								Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	235.250.000	
								Reviu Laporan Kinerja	234.120.000	
								Reviu Laporan Keuangan	191.700.000	
								Pengawasan Desa	187.140.000	
								Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	193.682.000	
							Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	109.914.000	
								Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	160.230.000	
						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	134.908.000	

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	
								Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	120.795.000	
									Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	517.523.000	
				4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik						
				a	Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan berbasis Standar pelayanan publik	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	438.309.600		
								Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	30.630.000		
						Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	64.104.000		
								Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	14.636.000		
								Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	49.717.300		
				Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	160.020.700				

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	17.995.200
								Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	76.956.800
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.000.000
								Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	138.486.700
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	6.000.000
								Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.454.700
							Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2.742.500

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.168.915.000
									Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	250.029.000
									Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	115.815.400

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	307.884.200
								Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	62.408.000
				5	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik				
				a	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	29.995.400
							Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	24.981.200

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	41.652.000
									Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	31.192.000
							Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	57.490.000
									Pelayanan Informasi Publik	110.000.000
									Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	64.600.000
									Pengelolaan Media Komunikasi Publik	199.998.900
									Penyusunan Konten	249.990.500
							Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49.578.000
									Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	41.135.500
									Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	146.881.800

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
							Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	30.495.200
							Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	27.363.650
							Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	100.000.000
									Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	49.492.900
									Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	84.000.000
									Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	405.196.600
									Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.147.006.400

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	79.551.000
								Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	1.092.828.000
						Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	15.946.600
				6	Meningkatya Efektifitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah				
					a	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	251.606.200
								Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	26.166.200
								Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	29.250.000
						Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9.186.852.800
								Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	89.230.000
								Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.623.000.000

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	
								Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	157.894.000	
									Fasilitasi Bantuan Hukum	176.020.000	
									Pendokumentasian Produk Hukum dan	Pengelolaan Informasi Hukum	226.453.900
								Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	99.998.300	
									Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	14.994.900	
				7	Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien serta sumber daya aparatur yang profesional						
				a	Meningkatkan integritas dan profesionalitas aparatur	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		9.979.200	
								Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		238.521.800	
								Koordinasi Pelaksanaan Administrasi	Pemberhentian	15.000.000	
								Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		40.389.600	
							Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	24.006.500		
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	199.258.700						

N O.	PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN
								Pengelolaan Promosi ASN	387.813.700
							Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	94.647.400
								Pengelolaan Assessment Center	356.702.200
								Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	600.000.000
								Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	91.594.900
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	40.238.200
							Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	53.711.800
								Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	699.999.300
								Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	990.295.900

Selain dukungan anggaran terhadap masing-masing program prioritas pembangunan, disediakan juga dukungan anggaran terhadap program penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat dilihat pada Tabel 5.3 berikut:

Tabel 5.3
Dukungan Anggaran terhadap Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

NO	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	639.051.674.630
Total		639.051.674.630

5.1.1. Dukungan Pendanaan Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi 2 Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

Selain dukungan terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 juga memberikan porsi dukungan terhadap prioritas pembangunan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025. Gambaran mengenai dukungan anggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 terhadap masing-masing prioritas pembangunan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel 5.4 berikut:

Tabel 5.4
Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan
Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

N o	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
A	Utama					
1	Meningkatnya ekonomi Daerah	Optimalisasi Pengembangan Daya Saing Daerah dan Percepatan Investasi	Program perencanaan tenaga kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	32.999.900
			Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	428.300.000
					Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	244.970.800

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			PROGRAM PENGEMBAN GAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Inse ntif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/K ota	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	32.379.000
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/K ota	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	64.698.000
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggar aan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/K ota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	189.398.700
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	438.309.600
					Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	30.630.000
			PROGRAM PENGENDALI AN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/K ota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	97.618.000
					Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	403.624.100
					Pengawasan Penanaman Modal	185.241.000
			Program perencanaan dan pembangunan industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembanguna n Industri Kabupaten/K ota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	6.773.000

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	78.766.700
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	7.034.000
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	499.591.900
					Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	24.000.000
			program pengendaliaan izin usaha industri	penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin perluasan usaha industri (IPIU), Izin Usaha kawasan industri (IUKI), dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	3.810.700
			Program pengelolaan perikanan tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	144.911.700
					Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	199.700.000
					Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.416.434.100

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				Pemberdayaa n Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/K ota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	223.675.300
					Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	196.815.600
				Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	19.983.500
			Program pengelolaan perikanan budidaya	Pemberdayaa n Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	90.005.000
					Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	111.323.000
				Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.468.800
				Pengelolaan Pembudidaya an Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.246.900
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu)	707.138.900

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Daerah Kabupaten/Kota	
					Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.827.200
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.946.283.200
			Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/K ota	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	29.217.800
					Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	62.795.600
					Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	20.781.600
			Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	270.165.500
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	128.096.600
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	237.555.900

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	590.280.100
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN GAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.895.379.500
				Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/K ota	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	19.935.400
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/K ota	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	24.499.200
				Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	306.000.000
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN GAN PRASARANA PERTANIAN	Pembanguna n Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	805.493.000
			PROGRAM PENGENDALI AN DAN PENANGGUL ANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulan gan Bencana Pertanian Kabupaten/K ota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	64.998.200

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	100.000.000
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	210.000.000
					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	293.197.200
					Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	42.632.400
					Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	70.652.400
					Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	19.999.900
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	422.993.300
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	55.000.000

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	49.990.600
					Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	25.247.600
					Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	9.953.000
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	89.965.000
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	9.973.600
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	250.000.000
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	9.953.000
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	9.868.000
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	133.312.000
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	515.000.000

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			DESTINASI PARIWISATA	Kabupaten/Kota	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.000.064.000
					Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	39.998.700
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.318.260.000
					Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	699.922.600
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	457.410.000
					Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	39.990.500
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	59.999.700
					Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	44.000.000
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	899.666.000

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	450.000.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	150.000.000
					Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	99.999.600
					Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	681.658.800
					Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	100.000.000
					Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50.000.000
					Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	150.000.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	353.928.000
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	253.681.400
				Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	21.191.000

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				Kabupaten/Kota		
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya	49.979.100
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	183.736.300
			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	147.059.800
					Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	17.496.800
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	30.860.000
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	37.700.000
					Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	52.589.000
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	5.988.800
					Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	9.963.900
					Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	9.963.900

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			PROGRAM PENINGKATA N SARANA DISTRIBUSI PERDAGANG AN	Pembanguna n dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	199.700.000
				Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.587.964.200
			PROGRAM PEMBERDAY AAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaa n Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	33.000.000
					Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	240.318.800
			PROGRAM PENGEMBAN GAN UMKM	Pengembanga n Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	445.130.500
			PROGRAM PENGAWASA N DAN PEMERIKSAA N KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan nya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	69.845.000
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERAS IAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasia n Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/K ota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	135.285.100
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	pengesahan peraturan perusahaan dan	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	11.455.800

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kabupaten/kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	14.635.800
				pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.861.600
					Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000
					Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	11.137.800
					Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	61.523.700
2	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan	200.000.000

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
	masyara kat				Jalan dan Jembatan	
					Rekonstruksi Jalan	8.499.050.274
					Pemeliharaan Berkala Jalan	4.452.508.941
					Pelebaran Jalan Menuju Standar	1.999.990.758
					Pemeliharaan Rutin Jembatan	199.958.000
					Survey Kondisi Jalan/Jembatan	496.598.460
					Rehabilitasi Jalan	3.499.983.847
					Pemeliharaan Rutin Jalan	3.955.985.600
			Program Penyelenggara an lalu lintas dan angkutan halan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/K ota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.119.062.000
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4.147.453.700
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	120.390.100
				Penerbitan Izin Penyelenggar aan dan Pembanguna n Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	17.151.900
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	540.939.200
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	121.981.000
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	41.483.000

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				Jalan Kabupaten/K ota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	88.306.000
					Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	211.962.400
					Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	80.201.900
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	17.910.000
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	506.682.800
				Penerbitan Izin Penyelenggar aan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/K ota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	28.245.300
				Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.750.000

N o	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.506.500
			Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	100.000.000
				Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	100.000.000
					Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	37.570.000
					Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	800.053.200
			Program Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	49.811.600
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	311.095.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	399.435.000

N o	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	49.993.200
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.609.735.800
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	299.973.500
					Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	15.119.386.970
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	300.000.000
					Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	225.000.000
				penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	275.000.000
					Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	40.000.000
					Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	120.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	704.603.500

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			PENYEDIAAN AIR MINUM	(SPAM) di Daerah Kabupaten/K ota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	444.389.000
					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	519.351.900
					Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400.342.500
					Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	697.780.000
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggar aan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/K ota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000
					Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	300.000.000
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN NYA	Penyelenggar aan Penataan Bangunan dan Lingkungann ya di Daerah Kabupaten/K ota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	619.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1.198.944.000
					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	599.504.000
					Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	449.757.000

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	6.398.045.000
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	3.718.800.000
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	800.000.000
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
			PROGRAM PENATAGUNAHAN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	249.123.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	100.000.000
					Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	199.320.700
					Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	146.535.000
					Penyusunan Peta Dasar	669.225.000
					Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	900.000.000
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	295.886.500
					Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	144.374.000

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	97.466.100
					Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	50.000.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	98.663.100
					Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	100.000.000
		Menurun nya tingkat kemiskin an	PROGRAM PEMBERDAY AAN SOSIAL	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4.200.000
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	912.858.300
					Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	86.281.400
					Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	23.400.600
			PROGRAM PERLINDUNG AN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	26.959.200
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.996.800
					Fasilitasi Bantuan Sosial	194.925.300

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Kesejahteraan Keluarga	
			PROGRAM REHABILITAS I SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	72089900
					Penyediaan Sandang	58327000
					Penyediaan Alat Bantu	55221900
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	39910100
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	44370200
					Pemberian Layanan Kedaruratan	10394400
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	20000000
					Pemberian Layanan Rujukan	20134000
3	Meningk atnya kualitas lingkung an hidup dan terkelola nya sumber daya alam	Peningka tan Kualitas Lingkung an Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pnegelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/K ota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	199.999.900
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota	Normalisasi/Restor asi Sungai	349.972.006
					Pembangunan Kanal Banjir	2.908.671.381
					Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	7.214.441.207
					Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir,	599.484.000

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Lahar, dan Pengaman Pantai	
				Pengembang an dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2.595.551.266
			PROGRAM PENGENDALI AN PENCEMARA N DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/K ota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	199.999.800
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	49.999.975
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	749.999.450
				Penanggulan gan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/K ota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	49.999.875
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/K ota	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	149.995.600
			PROGRAM PENGELOLAA N KEANEKARA GAMAN	Pengelolaan Keanekaraga man Hayati Kabupaten/K ota	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	89.903.000

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			HAYATI (KEHATI)			
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6.000.000
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	600.000.000
					Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	50.000.000
					Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	3.815.439.800
			PROGRAM PENGENDALI AN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	39.999.800
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN	Penyelenggaran Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	199.995.000
					Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	99.992.100

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			N LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Hidup untuk Lembaga Kemasyaraka tan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komu nitas/kelompok masyarakat	49.997.600
			PROGRAM PENGHARGA AN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantr opi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	124.991.100
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNG AN DAN PENGELOLAA N LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	29.996.400 36.994.800
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAA N MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	49.999.600
			PROGRAM PENANGANA N PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	4.205.000

N o	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	tingkat Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	49.769.200
					Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	161.437.500
					Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	38.990.200
					Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	90.513.900
					Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.083.554.200
					Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	27.966.500
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	69.373.800
					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	145.090.000
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	64.998.200
4	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	480.000.000
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	724.285.000

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
		Kesetara an			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	731.000.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	168.000.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	881.880.000
					Pengadaan Mebel Sekolah	408.950.000
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	336.024.000
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	662.418.200
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	151.068.800
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	99.995.400
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.000.000
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15.626.600.00 0
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	29.992.600
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	29.110.000
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan	29.999.900
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	37.079.200
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	29.969.700

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	34.315.000
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	29.942.000
					Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	29.845.600
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	191.660.000
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	904.000.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	605.000.000
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	29.949.400
					Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	49.991.400
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.896.000.000
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.000.914.300
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	149.328.000
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	159.996.000
					Pembangunan Laboratorium	199.700.000
					Pembangunan Fasilitas Parkir	99.798.000
					Pembangunan Kantin Sekolah	149.775.000
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	430.055.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.399.877.000

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	49.950.100
					Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	149.775.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	199.700.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	1.500.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	501.002.000
					Pengadaan Mebel Sekolah	239.600.000
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	180.544.000
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	615.298.100
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	68.200.000
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	119.906.000
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	19.999.800
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	7.235.000.000
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	19.992.600
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	29.994.700
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan	29.999.900

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	29.999.900
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	24.992.800
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	19.999.400
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.992.600
					Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	30.745.200
					Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	109.994.000
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.500.000
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	29.999.900
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	174.999.900
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	594.193.000
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.313.238.000
					Pengadaan Mebel PAUD	68.907.000
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	194.390.000
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	79.712.000
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	218.378.000

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.200.000.000
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan	14.980.200
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	19.996.200
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15.335.600
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	16.070.000
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	127.210.000
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	16.477.800
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	600.360.000
					Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	24.102.800
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	50.130.000
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	323.188.400
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	548.433.200
					Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	450.000.000
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	11.681.200
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	19.729.900

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Nonformal/Kesetaraan	
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	17.211.600
					Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	795.000.000
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	19.816.500
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100.006.400
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	546.302.000
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	40.150.200
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	73.990.000
					Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	29.859.200
					Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	49.175.600
					Pengadaan Mebel Sekolah	63.921.500
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	63.921.500
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	29.997.000
					Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	44.899.400
					Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	29.997.000

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	28.662.200
					Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	20.087.800
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	79.549.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	59.799.800
					Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	30.072.400
					Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	34.986.100
B	Pendukung					
1	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	1.168.915.000

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	250.029.000
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	115.815.400
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	307.884.200

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	62.408.000
2	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	20.335.200
					Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	205.241.300
					Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	5.520.000
					Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	481.205.700
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	179.219.300

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	67.510.200
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	44.503.800
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	29.376.500
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	91.267.600
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	119.363.400
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	60.744.600
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	35.649.900

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Pembangunan Manusia	
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	128.399.300
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	62.931.800
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	28.956.400
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	35.306.400
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	91.464.400
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	99.430.500
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	28.956.400

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Perangkat Daerah Bidang SDA	
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	39.806.400
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	97.172.900
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	69.039.600
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	29.856.400
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	39.346.400
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	96.372.300
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	55.294.800

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	47.958.200
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	33.718.200
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	59.774.000
			Program penelitian dan pengembangan daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	109.974.400
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	374.019.000
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	249.365.000
					Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	545.023.000
					Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	136.241.700
			Program pemerintahan dan	Administrasi Tata	Penataan Administrasi Pemerintahan	251.606.200

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			kesejahteraan rakyat	Pemerintah an	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	26.166.200
					Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	29.250.000
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9.186.852.800
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	89.230.000
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.623.000.000
				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	157.894.000
					Fasilitasi Bantuan Hukum	176.020.000
					Pendokumentasian Produk Hukum dan	226.453.900
					Pengelolaan Informasi Hukum	
					Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	99.998.300
			Program pengelolaan keuangan daerah	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	14.994.900
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	57.192.100
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	54.823.700
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	130.673.500
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	189.588.800
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	4.654.100

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	4.654.100
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	112.216.900
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	104.082.400
					Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	135.037.400
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	270.463.200
					Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	37.171.000
					Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	139.229.400
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	119.122.000

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	33.356.000
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	86.262.000
					Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	42.030.400
					Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	159.999.700
					Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	76.352.900
					Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	78.293.400
					Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	103.855.900
					Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	30.703.400

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	n Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Analisis Investasi Pemerintah Daerah	72.472.000
					Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	97.092.943.20 0
					Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.000.000.000
					Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	6.825.416.750
			Program pengelolaan barang milik daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	97.148.400
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	59.015.200
					Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	67.754.900
					Penatausahaan Barang Milik Daerah	228.522.600
					Inventarisasi Barang Milik Daerah	222.951.400
					Pengamanan Barang Milik Daerah	24.538.700
			Program pengelolaan pendapatan daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	331.000.000
					Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	68.699.000
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	178.833.200
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	274.757.500
					Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	80.860.000
					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	402.776.000
					Penelitian dan Verifikasi Data	26.558.900

N o	Priorita s Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Pelaporan Pajak Daerah	
					Penagihan Pajak Daerah	58.880.800
					Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	28.092.900
					Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	590.632.700
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	66.000.000
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	235.250.000
					Reviu Laporan Kinerja	234.120.000
					Reviu Laporan Keuangan	191.700.000
					Pengawasan Desa	187.140.000
					Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	193.682.000
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	109.914.000
					Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	160.230.000
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	134.908.000
				Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	120.795.000
					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	517.523.000

5.1.1. Dukungan Pendanaan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional 3 Tahun 2025

Selain dukungan terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 juga memberikan porsi dukungan terhadap prioritas pembangunan Nasional Tahun 2025. Gambaran mengenai dukungan anggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 terhadap masing-masing prioritas pembangunan Nasional disajikan pada Tabel 5.5 berikut:

Tabel 5.5
Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2025

N o	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak atas manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	214.613.000
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	158.886.900
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.330.576.600

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	171.685.600
					Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	41.395.200
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	994.435.203

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	249.238.400
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	124.005.800
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan	306.270.900

N o	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	199.986.400
					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	650.000.000
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	251.606.200
					Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	26.166.200
					Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	29.250.000

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Optimalisasi Pengembangan Daya Saing Daerah dan Percepatan Investasi	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	49.990.600
					Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/ Kota	25.247.600
					Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	9.953.000
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	89.965.000
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	9.973.600
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	250.000.000
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan	9.953.000

N o	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				Pangan Kecamatan	Kerentanan Pangan	
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota	9.868.000
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	133.312.000
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	144.911.700
					Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	199.700.000
					Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.416.434.100
					Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	223.675.300
					Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	196.815.600

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	19.983.500
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	90.005.000
					Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	111.323.000
				Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	30.468.800
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	50.246.900

N o	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Kabupaten/ Kota	
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	707.138.900
					Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	37.827.200
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.946.283.200
3	Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran	Peningkatan Kualitas Infrastruktur	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Normalisasi/ Restorasi Sungai	349.972.006
					Pembangunan Kanal Banjir	2.908.671.381
					Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	7.214.441.207
					Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir,	599.484.000

N o	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
	aktif koperasi				Lahar, dan Pengaman Pantai	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2.595.551.266
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	704.603.500
					Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	444.389.000
					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	519.351.900
					Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	400.342.500
					Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	697.780.000

N o	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	200.000.000
					Rekonstruksi Jalan	8.499.050.274
					Pemeliharaan Berkala Jalan	4.452.508.941
					Pelebaran Jalan Menuju Standar	1.999.990.758
					Pemeliharaan Rutin Jembatan	199.958.000
					Survey Kondisi Jalan/Jembatan	496.598.460
					Rehabilitasi Jalan	3.499.983.847
					Pemeliharaan Rutin Jalan	3.955.985.600
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	2.119.062.000
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4.147.453.700
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	120.390.100
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	17.151.900

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				n Fasilitas Parkir	Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	540.939.200
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	121.981.000
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	41.483.000
					Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	88.306.000
					Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	211.962.400
					Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	80.201.900

N o	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	17.910.000
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	506.682.800
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	28.245.300
				Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	29.750.000

N o	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				Kabupaten/ Kota	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	32.506.500
		Optimalisasi Pengembangan Daya Saing Daerah dan Percepatan Investasi	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	32.999.900
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	428.300.000
					Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	244.970.800
			Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	11.455.800

N o	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	14.635.800
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/B erdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/B erdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	55.861.600
					Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/B erdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	55.000.000
					Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	11.137.800

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	61.523.700
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan nya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan nya Daerah Kabupaten/ Kota	69.845.000
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	135.285.100
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	33.000.000
					Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	240.318.800
			Program Pengembangan Usaha Umkm	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain	445.130.500

N o	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				Menjadi Usaha Kecil	dan Teknologi	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	150.000.000
					Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	99.999.600
					Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50.000.000
				Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	150.000.000
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	7.034.000
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	499.591.900

N o	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
4	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan peyandang disabilitas	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	662.418.200
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	99.995.400
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.000.000
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	29.110.000
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan	29.999.900
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	29.942.000
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	615.298.100
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	119.906.000
					Pembinaan Kelembagaan dan	19.999.800

N o	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Manajemen Sekolah	
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	29.994.700
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan	29.999.900
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.992.600
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	79.712.000
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	218.378.000
					Pengembangan konten digital untuk pendidikan	14.980.200
					Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	16.477.800
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	19.729.900
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	17.211.600

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	29.997.000
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	20.087.800
			Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	30.072.400
					Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	34.986.100
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	115.904.400

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/ Kota	78.190.700
		Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	59.998.000
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	73.500.000
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	245.000.000
					Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	184.738.400
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	999.999.700

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	912.858.300
					Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	86.281.400
					Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	23.400.600
			Program Perlindungan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	44.200.000
			Program Perlindungan Khusus Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ kabupaten/	88.400.000
			Program Perencanaan Dan	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	78.766.700
5	Melanjutkan hilirisasi dan	Optimalisasi Pengembangan Daya Saing Daerah	Program Perencanaan Dan	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	78.766.700

N o	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	dan Percepatan Investasi	Pembangunan Industri	n Industri Kabupaten/ Kota	Pembangunan Sumber Daya Industri	
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota	3.810.700
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	64.698.000
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	438.309.600
					Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	30.630.000
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam	97.618.000

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				Kabupaten/ Kota	merealisasikan Kegiatan Usahanya	
					Pengawasan Penanaman Modal	185.241.000
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	15.946.600
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Pengentasan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	27.255.600
			Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	293.197.200
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	44.096.600

N o	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			Program Pemberdayaan Sosial	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4.200.000
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	912.858.300
					Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	86.281.400
					Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	23.400.600
			Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	72.089.900
					Penyediaan Sandang	58.327.000

N o	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
					Penyediaan Alat Bantu	55.221.900
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	5.996.800
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	194.925.300
			Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Penyediaan Makanan	69.456.600
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	157.894.000
					Fasilitasi Bantuan Hukum	176.020.000
					Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	226.453.900
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	107.902.900
					Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	128.744.400
					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	115.223.400
					Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	59.073.900

No	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	27.383.400
					Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	92.789.200
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	29.983.200
					Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	24.982.100
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	362.841.800

N o	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	235.250.000
					Pengawasan Desa	187.140.000
					Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	193.682.000
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	517.523.000
8	Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	49.999.600
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	199.995.000
					Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	99.992.100
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	4.205.000

N o	Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
				Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Hidup tingkat Kabupaten/ Kota	
			Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	6.000.000
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9.186.852.800
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150.900.000

5.1.1.4 Pendanaan Perangkat Daerah (PD) dalam RKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

Pada sub bab ini disampaikan besaran pendanaan dalam bentuk pagu indikatif pada setiap Perangkat Daerah (PD) dan dukungan pendanaan terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur tahun 2025. Seluruh rencana program prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 disediakan pendanaan dalam bentuk pagu indikatif yaitu batasan anggaran yang diberikan kepada masing-masing PD untuk merencanakan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Penentuan pagu indikatif tidak lagi menggunakan pendekatan “*money follow function*”, tetapi menggunakan pendekatan “*money follow priority programme*”. Pagu indikatif masing-masing PD dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 sebagaimana dijelaskan dalam tabel 5.6

Tabel 5.6
Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	KODE SKPD	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	1.01.4.01.0.00.01.0 000	Dinas Pendidikan	4	8	107	48.798.123.900
2	1.02.0.00.0.00.03.0 000	Dinas Kesehatan	4	11	52	48.561.989.480
3	1.03.2.10.1.04.01.0 000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15	22	52	78.272.737.110
4	1.05.0.00.0.00.02.0 000	Satuan Polisi Pamong Praja	2	4	30	1.199.081.700
5	1.05.0.00.0.00.04.0 000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	4	22	2.109.909.100
6	1.06.2.08.0.00.08.0 000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	18	27	3.126.653.000
7	2.07.2.17.0.00.06.0 000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10	11	21	1.839.464.800
8	2.09.3.27.0.00.02.0 000	Dinas Pertanian dan Pangan	10	19	32	4.919.043.300
9	2.11.0.00.0.00.01.0 000	Dinas Lingkungan Hidup	10	12	20	6.597.508.800
10	2.12.0.00.0.00.01.0 000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	6	10	511.250.600

NO	KODE SKPD	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
11	2.13.2.14.0.00.01.0 000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	10	34	5.198.080.600
12	2.15.0.00.0.00.01.0 000	Dinas Perhubungan	2	10	20	9.141.649.000
13	2.16.2.20.2.21.04.0 000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4	6	25	4.269.308.150
14	2.18.0.00.0.00.13.0 000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	6	9	1.457.845.000
15	2.19.0.00.0.00.01.0 000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	3	8	24	8.961.598.005
16	2.22.3.26.0.00.03.0 000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8	13	27	7.618.485.700
17	2.23.2.24.0.00.02.0 000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	9	15	785.450.600
18	3.25.0.00.0.00.01.0 000	Dinas Perikanan	4	12	27	8.513.706.300
19	3.31.3.30.0.00.14.0 000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8	10	21	2.749.757.900
20	4.01.0.00.0.00.01.0 000	Sekretariat Daerah	2	8	21	13.497.568.500
21	4.02.0.00.0.00.01.0 000	Sekretariat DPRD	1	6	28	21.758.890.100
22	5.01.5.05.0.00.02.0 000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	9	35	3.798.345.000

NO	KODE SKPD	SKPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
23	5.02.0.00.0.00.01.0 000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	3	6	41	109.701.616.450
24	5.03.5.04.0.00.01.0 000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	6	18	3.842.159.200
25	6.01.0.00.0.00.01.0 000	Inspektorat	2	4	11	2.151.262.000
26	7.01.0.00.0.00.01.0 000	Kecamatan Manggar	5	6	9	627.029.300
27	7.01.0.00.0.00.02.0 000	Kecamatan Gantung	5	6	6	763.612.700
28	7.01.0.00.0.00.03.0 000	Kecamatan Kelapa Kampit	5	6	12	413.211.400
29	7.01.0.00.0.00.04.0 000	Kecamatan Simpang Pesak	5	6	8	441.274.200
30	7.01.0.00.0.00.05.0 000	Kecamatan Damar	5	6	9	553.850.300
31	7.01.0.00.0.00.06.0 000	Kecamatan Simpang Renggang	5	6	11	606.511.300
32	7.01.0.00.0.00.07.0 000	Kecamatan Dendang	5	8	11	466.643.900
33	8.01.0.00.0.00.01.0 000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	5	23	7.881.081.703
			166	287	818	411.134.699.098

5.6.RUMUSAN USULAN HASIL PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Tabel 5. 7 Rumusan Usulan Hasil Penelahaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
1	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Belum diaspal jalan Tempat Pemakaman Umum Desa Air Madu RT.05 Kecamatan Simpang Renggang	pengaspalan jalan Tempat Pemakaman Umum Desa Air Madu RT.05 Kecamatan Simpang Renggang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Rt 5 05 Desa Air Madu Kec. Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARMINTON	Verifikasi Perangkat Daerah
2	Distribusi barang pokok dan penting (Bapokting) yang masih bergantung pada kabupaten lain membuat variasi harga yang fluktuatif tidak bisa diintervensi,	harga-harga pokok yang terus naik harap distabilkan	harga-harga pokok yang terus naik harap distabilkan pasar LIPAT KAJANG. MANGGAR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	pasar LIPAT KAJANG. MANGGAR, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi TAPD
3	belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam melakukan kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan bagi pemuda	Adanya pelatihan karang taruna di Kecamatan Simpang Pesak.	Adanya pelatihan karang taruna di Kecamatan Simpang Pesak.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Kecamatan Simpang Pesak, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi TAPD
4	Kurang optimalnya pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga,Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan,Kearsi	Adanya pelatihan kepemudaan dalam bidang olahraga di Desa Lilangan	Adanya pelatihan kepemudaan dalam bidang olahraga di Desa Lilangan, Zulkipli, 51 Tahun, Desa Lilangan Kecamatan Gantung	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi usulan tersebut sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Zulkipli, 51 Tahun, Desa Lilangan Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	pan, Trantibum Linmas								
5	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Adanya pengadaan racun binatang buas seperti: racun anjing, kera dan babi.	Adanya pengadaan racun binatang buas seperti: racun anjing, kera dan babi. Dusun Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
6	Optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan yang profesional dan komprehensif	agar pelayanan kesehatan untuk pasien yang di rujuk dari puskesmas ke rumah sakit lebih diperbaiki lagi, menunggu jangan terlalu lama, serta diprioritaskan untuk ibu mau melahirkan	agar pelayanan kesehatan untuk pasien yang di rujuk dari puskesmas ke rumah sakit lebih diperbaiki lagi, menunggu jangan terlalu lama, serta diprioritaskan untuk ibu mau melahirkan Kecamatan Dendang	Dinas Kesehatan	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	desa Jangkang, Kecamatan Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi TAPD
7	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan	Bantuan air bersih ketika musim kemarau	Bantuan air bersih ketika musim kemarau Dusun Air Nangka. Desa Balik. Dendang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Air Nangka. Desa Balik. Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa								
8	Kurang optimalnya pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga,Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan,Kearsipan, Trantibum Linmas	Bantuan alat alat kesenian tradisional jawa	Bantuan alat alat kesenian tradisional jawa Dusun Sidorejo simpang Pesak	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Verifikasi usulan tersebut sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Dusun Sidorejo simpang Pesak , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MARWAN	Verifikasi Perangkat Daerah
9	Rendahnya Kualitas prasarana pendukung kegiatan perikanan tangkap (Pemeliharaan Shelter Nelayan)	Bantuan alat untuk menangkap ikan dari laut	Bantuan alat untuk menangkap ikan dari laut Dusun Selindang Desa Senyubuk Kec Kelapa Kampit	Dinas Perikanan	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan	Dusun Selindang Desa Senyubuk Kec Kelapa Kampit , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi TAPD
10	Pembangunan, peningkatan,rehabilitasi, pemeliharaan tanggul/Talud, saluran Pembuangan utama menuju Sungai dan normalisasi pada daerah/Kawasan yang terdampak luapan, Pasang Surut,erosi Sungai	Bantuan bandar di Dusun Sekip Rt.06/02 Desa Lalang	Bantuan bandar di Dusun Sekip Rt.06/02 Desa Lalang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Sekip Rt.06/02 Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	dan pendangkalan sungai/anak Sungai								
11	Rendahnya Kualitas prasarana pendukung kegiatan perikanan tangkap (Pemeliharaan Shelter Nelayan)	Bantuan berupa alat tangkap kepiting/bubu kepiting	Bantuan berupa alat tangkap kepiting/bubu kepiting Dusun Gusong Lantai Desa Tanjung Batu Itam	Dinas Perikanan	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan	Dusun Gusong Lantai Desa Tanjung Batu Itam , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MARWAN	Verifikasi TAPD
12	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Bantuan berupa bibit sawit 500 biji dan pupuk di desa Aik Kelik	Bantuan berupa bibit sawit 500 biji dan pupuk di desa Aik Kelik	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Desa Aik kelik kec. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
13	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Bantuan berupa pupuk dan bibit cabai, kacang tanah, jagung, bawang dan mentimun untuk Sesa mepayak	Bantuan berupa pupuk dan bibit cabai, kacang tanah, jagung, bawang dan mentimun untuk Desa mepayak	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan	Desa Mepayak Kec Damar , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
14	Masih rendahnya kemampuan peternak untuk meningkatkan kapasitas usahanya	Bantuan bibit ayam boiler bagi peternak serta pakan, karena selama ini tidak ada perhatian dari dinas terkait	Bantuan bibit ayam boiler bagi peternak serta pakan, karena selama ini tidak ada perhatian dari dinas terkait Dusun Lintang Desa Lintang kec Simpang Renggang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan	Dusun Lintang Desa Lintang kec Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
15	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Bantuan bibit cabe sebanyak 100 bibit	Bantuan bibit cabe sebanyak 100 bibit A.n Sulastri, Ds Lilangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Sulastri, Ds Lilangan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
16	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	bantuan bibit durian dan bibit sawit untuk petani di Desa Aik Madu	Mohon bantuan bibit durian dan bibit sawit untuk petani di Desa Aik Madu Kec. Simpang Renggang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut	Desa Aik Madu Kec. simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARMINTON	Verifikasi Perangkat Daerah
17	Minimnya Pemanfaatan Lahan Pekarangan, Lahan Kosong, Eks Tambang dan lahan lainnya yang tidak termanfaatkan Mendukung Ketahanan Pangan melalui Budidaya Ikan	Bantuan bibit ikan darat dan bibit ikan laut serta bantuan penambahan sarana prasarana untuk tambak ikan dan fasilitas lainnya	Bantuan bibit ikan darat dan bibit ikan laut serta bantuan penambahan sarana prasarana untuk tambak ikan dan fasilitas lainnya Kelompok budidaya ikan desa tanjung kelumpang	Dinas Perikanan	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan	Kelompok budidaya ikan desa tanjung kelumpang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MARWAN	Verifikasi TAPD
18	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Bantuan Bibit Jagung 100, Kangkung 100	Bantuan Bibit Jagung 100, Kangkung 100 A.n Hayati, 52 Tahun , Dusun Air Madu II Desa Air Madu	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Hayati, 52 Tahun , Dusun Air Madu II Desa Air Madu , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
19	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Bantuan bibit kacang panjang, mentimun serta pupuk	Bantuan bibit kacang panjang, mentimun serta pupuk usun Gusong Lantai Desa Tanjung Batu Itam	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Gusong Lantai Desa Tanjung Batu Itam , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MARWAN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
20	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Bantuan bibit kelapa hibrida dan pestisida	Bantuan bibit kelapa hibrida dan pestisida Dusun Gusong Lantai Desa Tanjung Batu Itam	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Gusong Lantai Desa Tanjung Batu Itam , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MARWAN	Verifikasi Perangkat Daerah
21	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Bantuan Bibit Lada	Bantuan Bibit Lada A.n Syamsidi Jamal, 64 tahun, Petani/Ketua Kelompok Tani Karya Mandiri RT.11 Dusun Libut Desa Sukamandi Kecamatan Damar	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Syamsidi Jamal, 64 tahun, Petani/Ketua Kelompok Tani Karya Mandiri RT.11 Dusun Libut Desa Sukamandi Kecamatan Damar , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
22	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	bantuan bibit sawi 50 bibit, cabe 50 bibit, jagung 50 bibit, terong ungu 50 bibit	bantuan bibit sawi 50 bibit, cabe 50 bibit, jagung 50 bibit, terong ungu 50 bibit Asran, 73 Tahun, Petani, Dusun Air Madu II Desa Air Madu	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Asran, 73 Tahun, Petani, Dusun Air Madu II Desa Air Madu , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
23	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	bantuan bibit sawi 50 bibit, Cabe 50 Bibit, terong ungu 50 bibit	bantuan bibit sawi 50 bibit, Cabe 50 Bibit, terong ungu 50 bibit A.n Hayati, 52 Tahun Dusun Air Madu II Desa Air Madu	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Hayati, 52 Tahun Dusun Air Madu II Desa Air Madu , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
24	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Bantuan bibit sawi sebanyak 100 bibit, kangkung 100 Bibit	Bantuan bibit sawi sebanyak 100 bibit, kangkung 100 Bibit A.n Sulastris, Ds Lilangan Kec gantung	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Sulastris, Ds Lilangan Kec gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
25	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Bantuan Bibit sawi sebanyak 50 bibit, Bibit Jagung 50, Bibit Kangkung 50, Bibit Cabe 50	Bantuan Bibit sawi sebanyak 50 bibit, Bibit Jagung 50, Bibit Kangkung 50, Bibit Cabe 50 A.n Toni, 30 Tahun, Buruh Harian RT.02 Dusun Limbongan, Ds Limbungan	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Toni, 30 Tahun, Buruh Harian RT.02 Dusun Limbongan, Ds Limbongan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
26	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Bantuan bibit sawit sebanyak 50 bibit	Bantuan bibit sawit sebanyak 50 bibit A.n Toni, 30 Tahun, Buruh Harian (RT.02 Dusun Limbongan)	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Toni, 30 Tahun, Buruh Harian (RT.02 Dusun Limbongan), Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
27	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Bantuan bibit sayuran dan pupuk	Bantuan bibit sayuran dan pupuk Dusun Sidorejo Rt.14 Desa Simpang Pesak	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Sidorejo Rt.14 Desa Simpang Pesak, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MARWAN	Verifikasi Perangkat Daerah
28	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Bantuan Bibit Tanaman	Bantuan Bibit Tanaman a.n Agustono, Dsn Sukadamai, Ds Mengkubang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk pembahasan lebih lanjut	Agustono, Dsn Sukadamai, Ds Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
29	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Bantuan Bibit tanaman	Bantuan Bibit tanaman, Samsudin, Dsn Kebun Sayor RT 07, Ds Mengkubang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk pembahasan lebih lanjut	Samsudin, Dsn Kebun Sayor RT 07, Ds Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
30	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	bantuan bibit tanaman untuk petani	bantuan bibit tanaman untuk petani Dusun II RT 06. Desa Dukong. Simpang pesak	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	Dusun II RT 06. Desa Dukong. Simpang pesak, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
31	Masih Belum meratanya distribusi ternak sapi di Kabupaten Belitung Timur dan perlu ditingkatkan	Bantuan bibit ternak sapi di Dusun Ban Motor Desa Lalang Manggar	Bantuan bibit ternak sapi di Dusun Ban Motor Desa Lalang Manggar	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Ban Motor Desa Lalang Manggar , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
32	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Bantuan Bibit Ubi Jalar	Bantuan Bibit Ubi Jalar, Wawa, Dsn Damar Ds Mengkubang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk pembahasan lebih lanjut	Wawa, Dsn Damar Ds Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
33	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	bantuan bibitkopi, kakao, dan sayuran, cabe	bantuan bibit kopi, kakao, dan sayuran, cabe, desa Aik Madu, Simpang Renggang	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	desa Aik Madu, Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi Perangkat Daerah
34	Belum optimalnya pembudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	Bantuan bola volly dan lampu di lapangan volly	Bantuan bola volly dan lampu di lapangan volly Dusun Gusong Lantai Desa Tanjung Batu Itam	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Dusun Gusong Lantai Desa Tanjung Batu Itam , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MARWAN	Verifikasi Perangkat Daerah
35	Rendahnya Kualitas prasarana pendukung kegiatan perikanan tangkap (Pemeliharaan Shelter Nelayan)	Bantuan Bubu Tangkapan Jaring Ikan	Bantuan Bubu Tangkapan Jaring Ikan Desa Air Kelik	Dinas Perikanan	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	Desa Air Kelik, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi TAPD
36	Belum optimalnya pembudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	Bantuan dana ke sanggar seni Cilokak Putra Sasak	Bantuan dana ke sanggar seni Cilokak Putra Sasak Jalan Koperasi. Desa Pembaharuan. Kelapa Kampit	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Jalan Koperasi. Desa Pembaharuan. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	YOHENDRA	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
37	Belum optimalnya pembudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	Bantuan dana untuk kemajuan kesenian Langgeng Budoyo	Bantuan dana untuk kemajuan kesenian Langgeng Budoyo Desa Senyubuk. Kelapa Kampit	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Desa Senyubuk. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	YOHENDRA	Verifikasi TAPD
38	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bantuan jalan setapak Dusun Sawah Rt.04 sepanjang kurleb 90 meter dengan status lahan sudah C&C dan sudah diusulkan 5 tahun berturut turut	Bantuan jalan setapak Dusun Sawah Rt.04 sepanjang kurleb 90 meter dengan status lahan sudah C&C dan sudah diusulkan 5 tahun berturut turut	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Sawah Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
39	Masih rendahnya kemampuan peternak untuk meningkatkan kapasitas usahanya	Bantuan kandang untuk peternakan ayam kampung	Bantuan kandang untuk peternakan ayam kampung Desa Lintang Simpang Renggang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Desa Lintang Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
40	belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam melakukan kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan bagi pemuda	Bantuan laptop untuk kegiatan PKBM bina tarun kecamatan Dendang	Bantuan laptop untuk kegiatan PKBM bina tarun kecamatan Dendang	Dinas Pendidikan	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Kecamatan Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MARWAN	Verifikasi Perangkat Daerah
41	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan standar yang dianjurkan	Bantuan MCK di Desa Lintang sebanyak 1 unit	Bantuan MCK di Desa Lintang sebanyak 1 unit Zukiyati, 60 Tahun, Ibu Rumah Tangga (Desa Lintang)	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Zukiyati, 60 Tahun, Ibu Rumah Tangga (Desa Lintang), Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
42	Rendahnya Kualitas prasarana pendukung kegiatan perikanan tangkap (Pemeliharaan Shelter Nelayan)	Bantuan mesin nelayan dan perahu bagi nelayan kurang mampu	Bantuan mesin nelayan dan perahu bagi nelayan kurang mampu Desa Aik Kelik	Dinas Perikanan	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	Air Kelik, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi TAPD
43	Masih Belum Optimalnya Pengelolaan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM	Bantuan modal usaha untuk pembuatan pabrik rak telur kertas.	Bantuan modal usaha untuk pembuatan pabrik rak telur kertas. Desa Lalang Jaya	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan	Desa Lalang Jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
44	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Bantuan Obat-obatan dan Racun Rumput	Bantuan Obat-obatan dan Racun Rumput a.n Agustono, Dsn Sukadamai, Ds Mengkubang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk pembahasan lebih lanjut	Agustono, Dsn Sukadamai, Ds Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
45	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Bantuan pemasangan Speed bump/polisi tidur di beberapa desa agar orang-orang yang suka naik motor bisa memperlambat laju motornya agar tidak membahayakan orang lain.	Bantuan pemasangan Speed bump/polisi tidur di beberapa desa agar orang-orang yang suka naik motor bisa memperlambat laju motornya agar tidak membahayakan orang lain. Dusun Gunung Desa Lalang Jaya Manggar	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Gunung Desa Lalang Jaya Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi TAPD
46	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Bantuan pembasmian hama seperti racun rumput	Bantuan pembasmian hama seperti racun rumput Desa Mempayak Kec. Damar	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Desa Mempayak Kec. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
47	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Bantuan pembuatan drainase di Dusun Sawah Rt.01 Desa Lalang	Bantuan pembuatan drainase di Dusun Sawah Rt.01 Desa Lalang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Sawah Rt.01 Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
48	Belum optimalnya kebudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	Bantuan pembuatan Gor mini di Desa Mempayak	Bantuan pembuatan Gor mini di Desa Mempayak	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Desa Mempayak Kec. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
49	Pembangunan Jalan dan Jembatan	bantuan pembuatan jalan setapak antara dusun Gunung dengan Dusun Gajah Mada	Pembuatan jalan setapak antara dusun Gunung dengan Dusun Gajah Mada Desa Mekar Jaya Kecamatan Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan Diteruskan ke OPD Teknis	Dusun Gajah mada Desa Mekar Jaya Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah
50	Daerah/Kawasan Permukiman yang Terjadi abrasi(pengikisan tanah pada daerah pesisir pantai yang diakibatkan oleh ombak dan arus laut) atau Rawan akresi akibat sedimentasi dari daratan atau	Bantuan pemecah gelombang di pantai tebing Dusun Ban Motor	Bantuan pemecah gelombang di pantai tebing Dusun Ban Motor	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Ban Motor Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	sungai menuju arah laut								
51	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Bantuan penambahan tower Pamsimas di Dusun Durian Rt.02 yang masih kurang untuk penyaluran ke warga karena alirannya 1 jam ke Rt.01 dan 1 jam kemudian ke Rt.03	Bantuan penambahan tower Pamsimas di Dusun Durian Rt.02 yang masih kurang untuk penyaluran ke warga karena alirannya 1 jam ke Rt.01 dan 1 jam kemudian ke Rt.03	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Durian Rt.02 Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
52	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bantuan pengaspalan jalan dari jalan raya ke sekolah SMPN 1 Manggar yang masih tanah merah	Bantuan pengaspalan jalan dari jalan raya ke sekolah SMPN 1 Manggar yang masih tanah merah	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
53	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bantuan pengaspalan jalan di Rt.03 Dusun Ban Motor (samping rumah bapak Sariman)	Bantuan pengaspalan jalan di Rt.03 Dusun Ban Motor (samping rumah bapak Sariman)	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Ban Motor Rt.03 Desa Lalang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
54	masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang layak di destinasi wisata, perlunya perbaikan sarana dan prasarana yang rusak dan kurang layak di destinasi wisata dan masih perlunya pengembangan objek wisata baru sebagai alternatif pilihan berwisata	Bantuan pennerangan/lampu di pantai desa lalang (pantai nyiur melambai)	Bantuan pennerangan/lampu di pantai desa lalang (pantai nyiur melambai) Desa Lalang MANGGAR	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Desa Lalang MANGGAR , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi TAPD
55	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Bantuan peralatan dan bahan untuk lomba Toga KWT Karya Baru seperti pupuk, pplibek, tanah humus, bibit sayuran	Bantuan peralatan dan bahan untuk lomba Toga KWT Karya Baru seperti pupuk, pplibek, tanah humus, bibit sayuran	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Mempayak 2 Desa Mempayak kec. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYA H, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
56	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Bantuan peralatan pertanian seperti traktor dan arco	Bantuan peralatan pertanian seperti traktor dan arco Desa Mempayak kec. Damar	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Desa Mempayak kec. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYA H, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
57	Belum optimalnya pembudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	Bantuan peralatan untuk olahraga Volly seperti bola, net, seragam/baju club	Bantuan peralatan untuk olahraga Volly seperti bola, net, seragam/baju club	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Desa Mempayak Kec. Damar , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYA H, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
58	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Bantuan perbaikan jalan setapak didusun durian Rt.01 Desa Lalang sepanjang 80 meter dan talut disepanjang jalan tersebut	Bantuan perbaikan jalan setapak didusun durian Rt.01 Desa Lalang sepanjang 80 meter dan talut disepanjang jalan tersebut	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Durian Rt.01 Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
59	Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru Terhadap Rumah Tidak Layak Huni guna Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	bantuan perbaikan rumah	bantuan perbaikan rumah Dusun Baru Utara II, Desa Baru. MANGGAR	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Dusun Baru Utara II, Desa Baru. MANGGAR, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi Perangkat Daerah
60	Data penerima bantuan sosial yang tidak update dan lengkap	bantuan PKH Kartu Merah agar lebih merata dan tepat sasaran	bantuan PKH Kartu Merah agar lebih merata dan tepat sasaran Minapolitan, Desa Kurnia Jaya. Manggar	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Minapolitan, Desa Kurnia Jaya. Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah
61	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Bantuan Pupuk	Bantuan Pupuk, Samsudin, Dsn Kebun Sayor RT 07, Ds Mengkubang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk pembahasan lebih lanjut	Samsudin, Dsn Kebun Sayor RT 07, Ds Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
62	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Bantuan Pupuk	Bantuan Pupuk, Wawan, Dsn Damar, Ds Mengkubang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk pembahasan lebih lanjut	Wawan, Dsn Damar, Ds Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
63	Masih kurangnya ketersediaan pupuk di tingkat petani perkebunan	Bantuan pupuk bersubsidi di Dusun Air Madu Desa Air Madu Kecamatan Simpang Renggang	Bantuan pupuk bersubsidi di Dusun Air Madu Desa Air Madu Kecamatan Simpang Renggang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Asrul, 63 Tahun, Buruh Harian Lepas (RT.01 RW.02 Dusun Air Madu Desa Air Madu), Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
64	Masih kurangnya ketersediaan pupuk di tingkat petani perkebunan	Bantuan pupuk bersubsidi untuk kelompok tani di Dusun Renggang; Kelompok Tani Air Teras.	Bantuan pupuk bersubsidi untuk kelompok tani di Dusun Renggang; Kelompok Tani Air Teras.	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dsn Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
65	Masih kurangnya ketersediaan pupuk di tingkat petani perkebunan	Bantuan pupuk bersubsidi untuk kelompok tani di Dusun Renggang; Kelompok Tani Harapan Tani	Bantuan pupuk bersubsidi untuk kelompok tani di Dusun Renggang; Kelompok Tani Harapan Tani	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
66	Masih kurangnya ketersediaan pupuk di tingkat petani perkebunan	Bantuan pupuk bersubsidi untuk kelompok tani di Dusun Renggang; Kelompok Tani Sejahtera	Bantuan pupuk bersubsidi untuk kelompok tani di Dusun Renggang; Kelompok Tani Sejahtera	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
67	Masih kurangnya ketersediaan pupuk di tingkat petani perkebunan	Bantuan pupuk bersubsidi untuk kelompok tani di Dusun Renggang; Kelompok Tani Sidomulya	Bantuan pupuk bersubsidi untuk kelompok tani di Dusun Renggang; Kelompok Tani Sidomulya	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dsn Renggang, Ds Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
68	Masih kurangnya ketersediaan pupuk di tingkat petani perkebunan	Bantuan pupuk bersubsidi untuk petani lada.	Bantuan pupuk bersubsidi untuk petani lada. Marjono, Buruh Harian (Dusun Semalar Desa Dendang Kecamatan Dendang)	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Marjono, Buruh Harian (Dusun Semalar Desa Dendang Kecamatan Dendang), Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
69	Tidak tersedianya pupuk subsidi untuk komoditi perkebunan	Bantuan pupuk bersubsidi untuk petani yang tidak mampu di Desa Lilangan.	Bantuan pupuk bersubsidi untuk petani yang tidak mampu di Desa Lilangan.	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk dibahas lebih lanjut	Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
70	Masih kurangnya ketersediaan pupuk di tingkat petani perkebunan	Bantuan pupuk bersubsidi untuk petani yang tidak mampu di Dusun Air Selumar Desa Lintang	Bantuan pupuk bersubsidi untuk petani yang tidak mampu di Dusun Air Selumar Desa Lintang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Air Selumar Desa Lintang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
71	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	bantuan pupuk dan bibit kakao, cabe, dan sayuran	bantuan pupuk dan bibit kakao, cabe, dan sayuran Desa Aik Madu, Simpang Renggang	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	Desa Aik Madu, Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi Perangkat Daerah
72	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	bantuan pupuk dan bibit tanaman	Bantuan pupuk dan bibit tanaman Dusun Cemara II, Desa Kurnia Jaya	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	Dusun Cemara II, Desa Kurnia Jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi Perangkat Daerah
73	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Bantuan Pupuk Kimia bagi petani	Bantuan Pupuk Kimia bagi petani, Vopi Ansyah, Dsn Garumedang, Ds Sukamandi	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk pembahasan lebih lanjut	Vopi Ansyah, Dsn Garumedang, Ds Sukamandi, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
74	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Bantuan Pupuk Subsidi	Bantuan Pupuk Subsidi A.n Sudarno, Dsn Libut Ds Sukamandi	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk pembahasan lebih lanjut	Sudarno, Dsn Libut Ds Sukamandi, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
75	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Bantuan pupuk subsidi bagi petani	Bantuan pupuk subsidi bagi petani Dusun Limbongan II, RT.06 .Desa Limbongan	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk pembahasan lebih lanjut	Dusun Limbongan II, RT.06 .Desa Limbongan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah
76	Tidak tersedianya pupuk subsidi untuk komoditi perkebunan	bantuan pupuk subsidi bagi petani kebun sawit	bantuan pupuk subsidi bagi petani kebun sawit Dsn II, RT.06. Desa Dukong. Simpang Pesak	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	Dsn II, RT.06. Desa Dukong. Simpang Pesak, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah
77	Masih kurangnya ketersediaan pupuk di tingkat petani perkebunan	Bantuan pupuk subsidi sebanyak 2 karung	Bantuan pupuk subsidi sebanyak 2 karung A.n Hayati, 52 Tahun (Dusun Air Madu II Desa Air Madu)	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Hayati, 52 Tahun (Dusun Air Madu II Desa Air Madu) , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
78	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Bantuan pupuk subsidi untuk petani tidak mampu. untuk kelompok tani Karya Mandiri	Bantuan pupuk subsidi untuk petani tidak mampu. untuk kelompok tani Karya Mandiri A.n Syamsidi Jamal (Ketua Kelompok Tani Karya Mandiri) , Dsn Libut RT 11 Ds Sukamandi	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, mohon dilengkapi dengan data dukung	Syamsidi Jamal (Ketua Kelompok Tani Karya Mandiri) , Dsn Libut RT 11 Ds Sukamandi, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
79	Tidak tersedianya pupuk subsidi untuk komoditi perkebunan	bantuan pupuk untuk petani kebun sawit, lada dan sayuran	bantuan pupuk untuk petani kebun sawit, lada dan sayuran Desa Limbongan, Gantung	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	Desa Limbongan, Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah
80	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Bantuan racin rumput dan bibit tanaman cabai	Bantuan racun rumput dan bibit tanaman cabai Dusun Gusong Lantai Desa Tanjung Batu Itam	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Gusong Lantai Desa Tanjung Batu Itam, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MARWAN	Verifikasi Perangkat Daerah
81	Masih adanya sarana & prasarana rumah ibadah yang perlu ditingkatkan	Bantuan rehab Mushola	Bantuan rehab Mushola RT. 12 Gunong Nayo. Desa Air Kelik. Damar	Sekretariat Daerah	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta lengkapi proposal usulan	RT. 12 Gunong Nayo. Desa Air Kelik. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARJANTO JOHANNES, SH	Verifikasi TAPD
82	Masih adanya lingkungan hunian dan permukiman yang belum didukung Prasarana, sarana dan utilitas secara memadai	Bantuan sarana prasarana untuk poskamlingdi Rt.02 Dusun Sekip Desa Lalang	Bantuan sarana prasarana untuk poskamlingdi Rt.02 Dusun Sekip Desa Lalang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Sekip Rt.02 Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
83	Masih adanya sarana & prasarana PAUD yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Bantuan sarpras sekolah PAUD seperti permainan luar seperti ayunan dll di PAUD Melati Putih	Bantuan sarpras sekolah PAUD seperti permainan luar seperti ayunan dll di PAUD Melati Putih Dusun Mempayak Kec. Damar	Dinas Pendidikan	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Dusun Mempayak Kec. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
84	Masih adanya kelompok tani yang belum mendapatkan sekolah lapang	Bantuan tenaga ahli di bidang pertanian untuk mengelola pupuk organik	Bantuan tenaga ahli di bidang pertanian untuk mengelola pupuk organik Desa Lintang Simpang Renggang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Desa Lintang Simpang Renggang , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
85	Belum Optimalnya Penataan Kelembagaan bagi Koperasi dan UMKM	Bantuan UMKM yang belum tepat sasaran	Bantuan UMKM yang belum tepat sasaran Ketua Rt.06 Dusun Sekip Desa Lalang	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk dibahas lebih lanjut	Ketua Rt.06 Dusun Sekip Desa Lalang , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi TAPD
86	Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru Terhadap Rumah Tidak Layak Huni guna Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Bantuan untuk atap rumah bocor	Bantuan untuk atap rumah bocor Zainal Bin Talip, Jl Air Sepat Dsn Kebun Sayor RT 07 Ds Mengkubang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Zainal Bin Talip, Jl Air Sepat Dsn Kebun Sayor RT 07 Ds Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
87	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Bantuan untuk mengatasi air PAM di Dusun Sekip Rt.02/01 kolam matini ar terasa asin	Bantuan untuk mengatasi air PAM di Dusun Sekip Rt.02/01 kolam matini ar terasa asin	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Sekip Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
88	Rendahnya pengetahuan dan manajemen usaha olahan ikan (Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan dan Pendampingan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan)	Bantuan untuk nelayan mohon disesuaikan dengan kebutuhan tiap nelayan dan untuk pelatihan nelayan di Desa Lalang Jaya mohon untuk digiatkan lagi karena mengingat pentingnya pelatihan agar nelayan bisa bekerja dengan maksimal.	Bantuan untuk nelayan mohon disesuaikan dengan kebutuhan tiap nelayan dan untuk pelatihan nelayan di Desa Lalang Jaya mohon untuk digiatkan lagi karena mengingat pentingnya pelatihan agar nelayan bisa bekerja dengan maksimal. Dusun Gunung Desa Lalang Jaya	Dinas Perikanan	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan	Dusun Gunung Desa Lalang Jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi TAPD
89	Masih Belum Optimalnya SDM dalam kepengurusan koperasi dan pengelolaan UMKM	bantuan usaha, dan pelatihan bagi umkm	bantuan usaha, dan pelatihan bagi umkm desa Dukong, Kec Simpang Pesak	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk pembahasan lebih lanjut	desa Dukong, Kec Simpang Pesak, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi TAPD
90	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan standar yang dianjurkan	bantuan wc umum bagi warga	bantuan wc umum bagi warga RT.04 DUSUN SEBERANG, DESA SELINSING	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	RT.04 DUSUN SEBERANG, DESA SELINSING, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah
91	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Banyak jalan yang sudah rusak di Kec. Simoang Renggiang	Rehabilitasi jalan yang sudah rusak Desa Renggiang, Desa Aik Madu dan Desa Simpang Tige di Kec. Simpang Renggiang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Renggiang, Desa Aik Madu dan Desa Simpang Tige, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	FEZZY UKTOLSEJA, SE, MM	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
92	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Banyak jalan yg rusak di desa Lalang	Mohon perbaikan jalan yang rusak di Desa Lalang Kec. Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa lalang kecamatan Manggar , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	FEZZY UKTOLSEJ A, SE, MM	Verifikasi Perangkat Daerah
93	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Banyaknya hama binatang babi dan kera yang merusak tanaman petani-meresahkan para petani.	Banyaknya hama binatang babi dan kera yang merusak tanaman petani-meresahkan para petani. Dusun Sinar Setiong, Kecamatan Gantung	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Sinar Setiong, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
94	Kurang optimalnya pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga,Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan,Kearsipan, Trantibum Linmas	Belum adanya Pelatihan Kepemudaan dalam Bidang Olahraga, karang taruma di Kecamatan Simpang Renggang maka perlu adanya pelatihan dari instansi terkait	Diadakan Pelatihan Kepemudaan dalam Bidang Olahraga, karang taruma di Kecamatan Simpang Renggang	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi usulan tersebut sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Kec. Simpang renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	FEZZY UKTOLSEJ A, SE, MM	Verifikasi TAPD
95	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Belum diaspal Jalan Marga Mulya Dusun Marga Mulya Desa Renggang maka perlu ditingkatkan	Belum diaspal Jalan Marga Mulya Dusun Marga Mulya Desa Renggang maka perlu ditingkatkan	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Desa Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	AKHIRUDDI N, A.Md	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
96	Belum optimalnya pembudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	Bantuan peralatan olahraga futsal (jersey dan bola futsal)	Bantuan peralatan olahraga futsal (jersey dan bola futsal) Desa Aik Kelik Kec. Damar	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Desa Aik Kelik Kec. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
97	Belum optimalnya pembudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	Bimbingan kepada pemuda pemudi dibidang olahraga di Dusun Sidorejo	Bimbingan kepada pemuda pemudi dibidang olahraga di Dusun Sidorejo simpang Pesak	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Dusun Sidorejo simpang Pesak, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MARWAN	Verifikasi Perangkat Daerah
98	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Diharapkan adanya pelebaran jalan di Desa Lilangan.	Diharapkan adanya pelebaran jalan di Desa Lilangan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Ds. Lilangan, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
99	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Diharapkan adanya pemasangan lampu jalan di Jalan Bandes I dan Bandes II Desa Cendil Kecamatan Kelapa Kampit.	Diharapkan adanya pemasangan lampu jalan di Jalan Bandes I dan Bandes II Desa Cendil Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, Mohon dilengkapi dengan data pendukung	Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi TAPD
100	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Diharapkan adanya pemasangan lampu jalan di Jalan Bandes I dan Jalan Bandes II Desa Cendil.	Diharapkan adanya pemasangan lampu jalan di Jalan Bandes I dan Jalan Bandes II Desa Cendil.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, Mohon dilengkapi dengan data pendukung	Desa Cendil, Kec. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
101	Optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan yang profesional dan komprehensif	Diharapkan agar adanya bantuan BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.	Diharapkan agar adanya bantuan BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.	Dinas Kesehatan	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi TAPD
102	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Diharapkan agar adanya pemasangan lampu jalan di Jalan Selindang RT.05/02 Dusun Selindang Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit.	Diharapkan agar adanya pemasangan lampu jalan di Jalan Selindang RT.05/02 Dusun Selindang Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, Mohon dilengkapi dengan data pendukung	Jl. Selindang, RT.05/02, Dusun Selindang, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi TAPD
103	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Diharapkan agar adanya pemasangan lampu jalan di RT.04 sampai RT.07 Dusun Selindang Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit.	Diharapkan agar adanya pemasangan lampu jalan di RT.04 sampai RT.07 Dusun Selindang Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, Mohon dilengkapi dengan data pendukung	Dusun Selindang, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi TAPD
104	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Diharapkan agar adanya pemasangan lampu jalan di wilayah TPU Dusun Aik Sambar.	Diharapkan agar adanya pemasangan lampu jalan di wilayah TPU Dusun Aik Sambar. Desa Lilangan, Kecamatan Gantung	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, Mohon dilengkapi dengan data pendukung	Dusun Aik Sambar, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi TAPD
105	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Diharapkan agar adanya pemasangan papan plang/nama jalan "Jl. Bahagia Sekali" di RT.03/02 Dusun Bahagia Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit.	Diharapkan agar adanya pemasangan papan plang/nama jalan "Jl. Bahagia Sekali" di RT.03/02 Dusun Bahagia Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, Mohon dilengkapi dengan data pendukung	Dusun Bahagia, Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
106	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Diharapkan agar adanya pemasangan polisi tidur RT.019/09 Dusun Arab II Desa Kurnia Jaya.	Diharapkan agar adanya pemasangan polisi tidur RT.019/09 Dusun Arab II Desa Kurnia Jaya.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Arab II, Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	FEZZY UKTOLSEJA, SE, MM	Verifikasi TAPD
107	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Diharapkan agar adanya pemasangan Sumur Bor RT.09 Dusun Air Sambar Desa Lilangan.	Diharapkan agar adanya pemasangan Sumur Bor RT.09 Dusun Air Sambar Desa Lilangan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.09, Dusun Air Sambar, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
108	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan standar yang dianjurkan	Diharapkan agar adanya pembuatan MCK di Desa Lilangan RT.09 Dusun Air Sambar.	Diharapkan agar adanya pembuatan MCK di Desa Lilangan RT.09 Dusun Air Sambar.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.09, Dusun Air Sambar, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
109	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan standar yang dianjurkan	Diharapkan agar adanya pembuatan MCK di RT.02, Desa Lilangan.	Diharapkan agar adanya pembuatan MCK di RT.02, Desa Lilangan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Ds. Lilangan, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
110	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Diharapkan agar adanya penerangan jalan raya di ruas jalan Limbongan sampai Tanjung Batu Itam.	Diharapkan agar adanya penerangan jalan raya di ruas jalan Limbongan sampai Tanjung Batu Itam.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, Mohon dilengkapi dengan data pendukung	Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi TAPD
111	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Diharapkan agar adanya pengaspalan jalan di arah permukiman sepanjang 500 meter.	Diharapkan agar adanya pengaspalan jalan di arah permukiman sepanjang 500 meter. RT. 12, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT. 12, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
112	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Diharapkan agar adanya pengaspalan jalan di jalan RT.01 Desa Lilangan.	Diharapkan agar adanya pengaspalan jalan di jalan RT.01 Desa Lilangan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.01, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
113	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Diharapkan agar adanya peningkatan jalan lingkungan RT.17 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan Kecamatan Gantung.	Diharapkan agar adanya peningkatan jalan lingkungan RT.17 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.17, Dusun Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
114	Masih Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Pengelolaan Persampahan	Dimohon pada Dinas terkait agar mensosialisasikan dan mengawasi standart prosedur pada pembuangan limbah akhirnya atau IPAL kelaut kepada pengelola pembudidaya udang vaname.	Dimohon pada Dinas terkait agar mensosialisasikan dan mengawasi standart prosedur pada pembuangan limbah akhirnya atau IPAL kelaut kepada pengelola pembudidaya udang vaname. Desa tanjung kelumpang Rt.06 dan Rt.07 Simpang Pesak	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan	Desa tanjung kelumpang Rt.06 dan Rt.07 Simpang Pesak, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MARWAN	Verifikasi TAPD
115	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Drainase sekunder sepanjang kurleb 100 meter di Dusun Taruna Mulya Rt.01/01 Desa Lalang	Drainase sekunder sepanjang kurleb 100 meter di Dusun Taruna Mulya Rt.01/01 Desa Lalang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Taruna Mulya Rt.01/01 Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
116	Masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan Nelayan untuk mengembangkan usaha perikanan tangkap (Pelatihan Pembuatan Kapal Fiber dan Perbaikan Mesin Kapal)	Industrialisasi kapal fiber	Industrialisasi kapal fiber Jln padat karya kecamatan Gantung	Dinas Perikanan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Jln padat karya kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
117	Masih adanya Kebutuhan Tenaga Kerja atau Lowongan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pencari kerja seperti kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja	informasi dan pelatihan keterampilan sesuai dengan pasar kerja yang dibutuhkan	informasi dan pelatihan keterampilan sesuai dengan pasar kerja yang dibutuhkan Dusun Air Nangka, desa Balok. Dendang	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	Dusun Air Nangka, desa Balok. Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi TAPD
118	Masih adanya Kebutuhan Tenaga Kerja atau Lowongan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pencari kerja seperti kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja	informasi lowongan kerja, dan pelatihan untuk pencari kerja agar sesuai dengan permintaan pasar kerja	informasi lowongan kerja, dan pelatihan untuk pencari kerja Dusun Baru Utara II, Desa Baru Kec Manggar	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	Dusun Baru Utara II, Desa Baru Kec Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi TAPD
119	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jalan kalau musim hujan becek sehingga perlu peningkatan jalan di jalan lapangan bola liring 500 meter.	peningkatan jalan di jalan lapangan bola liring 500 meter, Dsn. Liring Desa Renggiang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Dsn. Liring Desa Renggiang , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARMINTON	Verifikasi Perangkat Daerah
120	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Jalan menuju kebun masih belum diaspal maka perlu pembangunan jalan ke kebun di RT.03 Desa Aik Madu Kecamatan Simpang Renggiang	Pengaspalan Jalan menuju kebun di RT.03 Desa Aik Madu Kecamatan Simpang Renggiang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan, mohon agar usulan dilengkapi dengan data dukung	RT 03 Desa air Madu Kec. Simpang Renggiang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARMINTON	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
12 1	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jalan menuju makam belum diaspal maka Perlunya pengaspalan jalan di jalan TPU Desa Liring	pengaspalan jalan di jalan TPU Desa Liring Desa Renggiang Kec. Simpang Renggiang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Dsn. Liring Desa Renggiang Kec. Simpang Renggiang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARMINTON	Verifikasi Perangkat Daerah
12 2	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jalan Menuju Makam di Air Madu belum diaspal maka perlu pengaspalan akses jalan Tempat Pemakaman Umum Desa Air Madu	Pengaspalan akses jalan Tempat Pemakaman Umum Desa Air Madu	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Air Madu, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	FEZZY UKTOLSEJA, SE, MM	Verifikasi Perangkat Daerah
12 3	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	jalan umum trans Sidorejo dan jalan kubur mohon diaspal	jalan umum trans Sidorejo dan jalan ke Pemakaman mohon diaspal	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	nadino dusun Sidorejo trans Bira kecamatan simpang pesak, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHARTINI	Verifikasi Perangkat Daerah
12 4	Masih rendahnya kesadaran Nelayan untuk mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan terhadap resiko kecelakaan kerja (Asuransi Nelayan)	jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi nelayan yang belum merata	jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi nelayan yang belum merata, desa Buku Limau kecamatan Manggar	Dinas Perikanan	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	desa Buku Limau kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
125	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jembatan yang berada di ujung Renggang sudah rusak sehingga perlu perbaikan jembatan ujung Desa Renggang ada yang rusak	perlu perbaikan jembatan ujung Desa Renggang ada yang rusak	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	FEZZY UKTOLSEJA, SE, MM	Verifikasi Perangkat Daerah
126	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jika hujan terjadi luapan air di DSn. Terang bulan maka perlu adanya rehab saluran primer ,peringkatan Palat deuker serta peningkatan jalan di RT 01, RT 02,,RT03 dan RT 04 DSn. Terang Bulang Desa Lalang	perlu adanya rehab saluran primer, peringkatan Palat deuker serta peningkatan jalan di RT 01, RT 02,,RT03 dan RT 04 DSn. Terang Bulang Desa Lalang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Dsn. Terang Bulan Desa Lalang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	AKHIRUDDIN, A.Md	Verifikasi Perangkat Daerah
127	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kalau hujan terjadi genangan karena aliran air kurang jalan maka perlu penambahan gorong gorong di Dusun Liring Desa Renggang	perlu penambahan gorong gorong di Dusun Liring Desa Renggang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Dsn. Liring Desa Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARMINTON	Verifikasi Perangkat Daerah
128	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan	Kami sebagai kelompok tani berharap untuk dapat diperbaiki embung/saluran air karena mengalami kerusakan hingga sekarang tidak bisa dimanfaatkan	Mohon perbaikan Embung Dusun Langkang Desa Lintang Simpang Renggang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Langkang Desa Lintang Simpang Renggang , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	lingkungan yang rawan banjir/Genangan								
129	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Kami sebagai kelompok tani berharap untuk dapat diperbaiki embung/saluran air karena mengalami kerusakan hingga sekarang tidak bisa dimanfaatkan.	Kami sebagai kelompok tani berharap untuk dapat diperbaiki embung/saluran air karena mengalami kerusakan hingga sekarang tidak bisa dimanfaatkan. Dusun Langkang Desa Lintang Simpang Renggang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, mohon dilengkapi dengan data dukung	Dusun Langkang Desa Lintang Simpang Renggang , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
130	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Kelompok tani Setia Marga, perbaikan saluran irigasi dan perbaikan embung untuk sawah	Kelompok tani Setia Marga, perbaikan saluran irigasi dan perbaikan embung untuk sawah Desa Jangkang. Dendang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Air Asam. Desa Jangkang. Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah
131	Belum tersedianya kontainer sampah	Kepada dinas terkait untuk pengelolaan sampah perlu ditindaklanjuti secara aktif agar tidak banyak sampah yang berserakan di jalanan khususnya di ujung Jalan Laskar Pelangi.	Kepada dinas terkait untuk pengelolaan sampah perlu ditindaklanjuti secara aktif agar tidak banyak sampah yang berserakan di jalanan khususnya di ujung Jalan Laskar Pelangi.	Dinas Lingkungan Hidup	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. HUSAINI RASYID, M.Si	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
13 2	Distribusi barang pokok dan penting (Bapokting) yang masih bergantung pada kabupaten lain membuat variasi harga yang fluktuatif tidak bisa diintervensi,	ketersediaan gas subsidi, agar di stabilkan, dan kebutuhan bahan pokok sehari-hari agar harganya jangan naik terus	ketersediaan gas subsidi, agar di stabilkan, dan kebutuhan bahan pokok sehari-hari agar harganya jangan naik terus desa Limbongan, Gantung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	desa Limbongan, Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi TAPD
13 3	Kurang optimalnya pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	kurang minatnya anak terhadap literasi maka perlu adanya perpustakaan desa untuk meningkatkan minat baca anak	pembangunan perpustakaan desa untuk meningkatkan minat baca anak pada Desa Aik Madu Kec. SP. Renggang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta lengkapi proposal usulan	Desa Aik Madu Kec. SP. Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	AKHIRUDDIN, A.Md	Verifikasi Perangkat Daerah
13 4	Belum optimalnya pembudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	kurangnya apresiasi bagi siswa siswi yang berprestasi di bidang olahraga, misalnya bantuan penyokong kegiatan olahraga yang dilakukan entah berbentuk uang atau barang, seperti sepatu olahraga, baju, botol air minum dan lain lain	kurangnya apresiasi bagi siswa siswi yang berprestasi di bidang olahraga, misalnya bantuan penyokong kegiatan olahraga yang dilakukan entah berbentuk uang atau barang, seperti sepatu olahraga, baju, botol air minum dan lain lain	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi usulan, disesuaikan dengan prioritas daerah	Dusun Gunung Desa Lalang Jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
13 5	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Lampu jalan samping RT.24 Dusun Harapan belum ada supaya diadakan dan lampu jalan di Rawa Purun RT.17.	Lampu jalan samping RT.24 Dusun Harapan belum ada supaya diadakan dan lampu jalan di Rawa Purun RT.17.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, Mohon dilengkapi dengan data pendukung	Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MIRZA SAPUTRA	Verifikasi TAPD
13 6	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Lampu penerangan jalan Gang Sawah RT.04 Damar	Lampu penerangan jalan Gang Sawah RT.04 Ds Mengkubang Damar	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	jalan Gang Sawah RT.04 Damar Ds Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi TAPD
13 7	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Masalah pertanian, bibit yang sudah dicatat dalam anggaran supaya dapat dibagikan kepada petani serta diawasi oleh PPL setempat karena sayur mayur langka di desa	Masalah pertanian, bibit yang sudah dicatat dalam anggaran supaya dapat dibagikan kepada petani serta diawasi oleh PPL setempat karena sayur mayur langka di desa Dusun Lintang Desa Lintang kec Simpang Renggang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan	Dusun Lintang Desa Lintang kec Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
13 8	Data penerima bantuan sosial yang tidak update dan lengkap	masih ada bantuan yang tidak tepat sasaran	masih ada bantuan yang tidak tepat sasaran, dusun Menggarawan, RT 01, Desa Padang. MANGGAR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	dusun Menggarawan, RT 01, Desa Padang. MANGGAR, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi Perangkat Daerah
13 9	Belum optimalnya pemenuhan hak anak di kabupaten Belitung Timur	Masih banyak anak yang putus sekolah	Masih tingginya angka putus sekolah	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Dusun Lipat Kajang Desa Baru. Kec Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
140	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Masih Banyak petani yang kekurangan pupuk bersubsidi maka perlu bantuan pupuk bersubsidi untuk masyarakat tidak mampu	Bantuan pupuk bersubsidi untuk masyarakat tidak mampu Dusun Air Madu RT.01/01 Desa Aik Madu	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut	(Dusun Air Madu RT.01/01 Desa Aik Madu), Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARMINTON	Verifikasi Perangkat Daerah
141	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan standar yang dianjurkan	masih BANYAK RUMAH YANG BELUM PUNYA wc YANG STANDART	Bantuan rumah tinggal yang belum mempunyai WC Desa Lalang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	LALANG, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARMINTON	Verifikasi Perangkat Daerah
142	Masih adanya sarana dan prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Masih kurangnya Meubelair sekolah di SDN 19 Manggar maka perlu adanya pengadaan meubelair untuk SD 19 Manggar	Masih kurangnya pengadaan meubelair untuk SD 19 Manggar	Dinas Pendidikan	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	SDN 19 Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	AKHIRUDDIN, A.Md	Verifikasi TAPD
143	masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang layak di destinasi wisata, perlunya perbaikan sarana dan prasarana yang rusak dan kurang layak di destinasi wisata dan masih perlunya pengembangan objek wisata baru sebagai alternatif pilihan berwisata	masih kurangnya tempat pembuangan sampah di tempat wisata, petugas kebersihan, penataan taman dan rumput ditempat wisata	masih kurangnya tempat pembuangan sampah di tempat wisata, petugas kebersihan, penataan taman dan rumput ditempat wisata, pantai nyiur melambai, Lalang Jaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	pantai nyiur melambai, Lalang Jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
144	Masih adanya Kebutuhan Tenaga Kerja atau Lowongan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pencari kerja seperti kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja	Mebutuhkan lowongan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran di Belitung Timur	Mebutuhkan lowongan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran di Belitung Timur Desa Aik Kelik Kec Damar	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan	Desa Aik Kelik Kec Damar , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
145	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Mengusulkan untuk pemanfaatan pekarangan dibutuhkan pupuk dan bibit tanaman	Mengusulkan untuk pemanfaatan pekarangan dibutuhkan pupuk dan bibit tanaman Dusun Harapan Desa Lalang Jaya	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Harapan Desa Lalang Jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
146	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Minta bantuan Pupuk Subsidi	Minta bantuan Pupuk Subsidi, Dusun Mempaya RT.02/11 Desa mempaya Kecamatan Damar	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	Dusun Mempaya RT.02/11 Desa mempaya Kecamatan Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	KOKO HARYANTO, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
147	Masih adanya Kebutuhan Tenaga Kerja atau Lowongan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pencari kerja seperti kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja	minta tolong lapangan pekerjaan	minta tolong lapangan pekerjaan Dusun Harapan Jaya Desa Lalang Jaya	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan	Dusun Harapan Jaya Desa Lalang Jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
148	Masih kurangnya upaya fasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam menumbuhkan Wirausaha Muda yang mandiri	Mohon adanya pelatihan untuk ibu rumah tangga dan remaja dalam bidang menjahit dan usaha produktif lainnya.	Mohon adanya pelatihan untuk ibu rumah tangga dan remaja dalam bidang menjahit dan usaha produktif lainnya. (Desa Lintang Kecamatan Simpang Renggang)	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Sulastini, Ibu Rumah Tangga (Desa Lintang Kecamatan Simpang Renggang), Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi TAPD
149	Masih adanya kelompok tani yang belum mendapatkan sekolah lapang	Mohon adanya petugas penyuluh pertanian di Kecamatan Simpang Renggang	Mohon adanya petugas penyuluh pertanian di Kecamatan Simpang Renggang A.n Asran, 73 Tahun, Petani (Dusun Air Madu II Desa Air Madu)	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Asran, 73 Tahun, Petani (Dusun Air Madu II Desa Air Madu), Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
150	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Mohon agar adanya pemasangan lampu jalan di Dusun Gunung Desa Lalang Jaya.	Mohon agar adanya pemasangan lampu jalan di Dusun Gunung Desa Lalang Jaya.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Gunung, Desa Lalang Jaya, Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	FEZZY UKTOLSEJA, SE, MM	Verifikasi TAPD
151	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Mohon agar adanya pemasangan lampu jalan di Jalan Aik Cekedas RT.11.	Mohon agar adanya pemasangan lampu jalan di Jl. Aik Cekedas, RT.11/04, Dusun Bukit Jaya, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, Mohon dilengkapi dengan data pendukung	Jl. Aik Cekedas, RT.11/04, Dusun Bukit Jaya, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
15 2	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Mohon agar adanya pemasangan lampu jalan di Jalan Peramun Jaya Dusun Limau Manis RT.15/06 Desa Buding.	Mohon agar adanya pemasangan lampu jalan di Jalan Peramun Jaya Dusun Limau Manis RT.15/06 Desa Buding.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, Mohon dilengkapi dengan data pendukung	Jl. Peramun Jaya, Dusun Limau Manis, RT.15/06, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi TAPD
15 3	Masih adanya pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang belum optimal dan perlu ditingkatkan (pelatihan petani dan penilaian kelas kelompok tani)	Mohon akan perhatian pemerintah daerah pada petani kecil di Kabupaten Belitung Timur.	Mohon akan perhatian pemerintah daerah pada petani kecil di Kabupaten Belitung Timur.	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk dibahas lebih lanjut	Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSONO SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah
15 4	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	mohon bantuan alat alat pertanian seperti obat obatan,pupuk alat semprot untuk petani di desa lilangan	mohon bantuan alat alat pertanian seperti obat obatan,pupuk alat semprot untuk petani di desa lilangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan, mohon dilengkapi dengan data dukung	suherdoyo desa lilangan kecamatan gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHARTINI	Verifikasi Perangkat Daerah
15 5	Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru Terhadap Rumah Tidak Layak Huni guna Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Mohon bantuan atap seng rumah sebanyak 50 keping	Mohon bantuan atap seng rumah sebanyak 50 keping (Desa Lintang)	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Zukiyati, 60 Tahun, Ibu Rumah Tangga (Desa Lintang) , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
156	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Mohon Bantuan Bibit	Mohon Bantuan Bibit, Dusun mempaya RT. 02/11 Desa Mempaya Kecamatan Damar	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	Dusun mempaya RT. 02/11 Desa Mempaya Kecamatan Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	KOKO HARYANTO, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
157	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	mohon bantuan bibit dan obat obat pertanian	mohon bantuan bibit dan obat obat pertanian a.n Suhendro desa air madu kecamatan simpang renggang	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Suhendro desa air madu kecamatan simpang renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	OMAN ANGGARI, SH, MH	Verifikasi Perangkat Daerah
158	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	mohon bantuan bibit sayuran untuk masyarakat desa lilangan	mohon bantuan bibit sayuran untuk masyarakat desa lilangan A.n suryatin desa lilangan kecamatan gntung	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan, mohon dilengkapi dengan data dukung	suryatin desa lilangan kecamatan gntung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHARTINI	Verifikasi Perangkat Daerah
159	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	mohon bantuan bibit tanaman	mohon bantuan bibit tanaman Desa Aik kelik Kecamatan Damar	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	Desa Aik kelik Kecamatan Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	KOKO HARYANTO, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
160	Masih Belum Optimalnya Pengelolaan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM	Mohon bantuan cetakan batako manual	Mohon bantuan cetakan batako manual Dusun Lintang Desa Lintang kec Simpang Renggang	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan	Dusun Lintang Desa Lintang kec Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
161	Masih Belum Optimalnya SDM dalam kepengurusan koperasi dan pengelolaan UMKM	Mohon bantuan pelatihan kepada dinas terkait berkenaan dengan pelaku UMKM yang kurang mampu.	Mohon bantuan pelatihan kepada dinas terkait berkenaan dengan pelaku UMKM yang kurang mampu.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. HUSAINI RASYID, M.Si	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
16 2	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Mohon bantuan pembangunan jembatan untuk lalu lintas di depan rumah Bpk. Slamet Riyadi dengan alamat Rt.014 Dusun Teratai Desa Lalang Jaya Manggar, dikarenakan jembatan yang lama sudah tidak layak untuk dilalui kendaraan, dan sudah mengalami kerusakan akibat banjir.	Mohon bantuan pembangunan jembatan untuk lalu lintas di depan rumah Bpk. Slamet Riyadi dengan alamat Rt.014 Dusun Teratai Desa Lalang Jaya Manggar,	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Teratai Desa Lalang Jaya Manggar Rt.014, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
16 3	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan standar yang dianjurkan	Mohon Bantuan Pembuatan Sanitasi atau Toilet Umum	Mohon Bantuan Pembuatan Sanitasi atau Toilet Umum Ds.Aik Madu Kecamatan Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Ds.Aik Madu Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MIRZA SAPUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah
16 4	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	mohon bantuan pengaspalan jalan	mohon bantuan pengaspalan jalan, jl.Lintang desa aik kelik kecamatan damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	jl.Lintang desa aik kelik kecamatan damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	KOKO HARYANTO, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
165	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Mohon bantuan perbaikan jalan antara jalan Dusun Teratai dan Dusun Sekip tepatnya dipersimpangan Toko Niko yang sudah berlubang dan sering terjadi kecelakaan.	Mohon bantuan perbaikan jalan antara jalan Dusun Teratai dan Dusun Sekip tepatnya dipersimpangan Toko Niko yang sudah berlubang dan sering terjadi kecelakaan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Sekip Desa Lalang Jaya Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
166	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Mohon bantuan PJU di RT.33/15 Dusun Assalam.	Mohon bantuan PJU di RT.33/15 Dusun Assalam. II, Desa Baru, Kecamatan Manggar	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, Mohon dilengkapi dengan data pendukung	Dusun Assalam II, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MIRZA SAPUTRA	Verifikasi TAPD
167	Masih kurangnya ketersediaan pupuk di tingkat petani perkebunan	Mohon bantuan pupuk bersubsidi untuk petani yang tidak mampu.	Mohon bantuan pupuk bersubsidi untuk petani yang tidak mampu. Rizal Rais, 41 tahun, Petani (RT.14 Dusun Liring Desa Renggiang Kecamatan Simpang Renggiang)	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Rizal Rais, 41 tahun, Petani (RT.14 Dusun Liring Desa Renggiang Kecamatan Simpang Renggiang), Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
168	Masih kurangnya ketersediaan pupuk di tingkat petani perkebunan	Mohon bantuan pupuk bersubsidi untuk petani yang tidak mampu.	Mohon bantuan pupuk bersubsidi untuk petani yang tidak mampu. Mawansi, 41 tahun, Buruh Harian (Dusun Air Madu Desa Air Madu Kecamatan Simpang Renggiang)	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Mawansi, 41 tahun, Buruh Harian (Dusun Air Madu Desa Air Madu Kecamatan Simpang Renggiang), Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
169	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	mohon bantuan pupuk subsidi untuk tani campa mandiri	mohon bantuan pupuk subsidi untuk tani campa mandiri A.n Kamal desa lilangan kecamatan gantung	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan, mohon dilengkapi dengan data dukung	Kamal desa lilangan kecamatan gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHARTINI	Verifikasi Perangkat Daerah
170	Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru Terhadap Rumah Tidak Layak Huni guna Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	mohon bantuan renovasi rumah di karenakan atap bocor dinding papan dan lantai pecah oecah	mohon bantuan RTLH di karenakan atap bocor dinding papan dan lantai pecah oecah a.n Eros Rosiana dusun padang 1 RT 01/01 desa padang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Eros Rosiana dusun padang 1 RT 01/01 desa padang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	OMAN ANGGARI, SH, MH	Verifikasi Perangkat Daerah
171	Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru Terhadap Rumah Tidak Layak Huni guna Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	mohon bantuan rumah di karenakan rumah berdinding papan dan bocor	mohon bantuan RTLH di karenakan rumah berdinding papan dan bocor, A.n fenisya dusun Cemara 1 RT 06/03 desa Kurnia jaya.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	fenisya dusun Cemara 1 RT 06/03 desa Kurnia jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	OMAN ANGGARI, SH, MH	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
17 2	Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru Terhadap Rumah Tidak Layak Huni guna Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	mohon bantuan rumah tinggal kayak huni di karenakan bocor dan tidak layak untuk di tempati	mohon bantuan rumah tinggal kayak huni a.n susilawati RT 005 dusun harapan jaya desa lalang jaya	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	susilawati RT 005 dusun harapan jaya desa lalang jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	OMAN ANGGARI, SH, MH	Verifikasi Perangkat Daerah
17 3	Masih Belum meratanya distribusi ternak sapi di Kabupaten Belitung Timur dan perlu ditingkatkan	mohon bantuan ternak seperti ayam	mohon bantuan ternak seperti ayam A,n roslaini RT 005/006 desa mayang kecamatan kelapa jampit	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	roslaini RT 005/006 desa mayang kecamatan kelapa jampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	BENOS RODIARTO	Verifikasi Perangkat Daerah
17 4	Belum tersedianya koneksi internet dilokasi publik dan tempat wisata	Mohon Bantuan Wifi	Mohon Pemasangan WIFI Dsn.Burung Mandi RT.12/05 Desa Burong Mandi kec.damar	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Dsn.Burung Mandi RT.12/05 Desa Burong Mandi kec.damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	KOKO HARYANTO, S.IP	Verifikasi TAPD
17 5	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	mohon di buatkan drainase di dusun harapan jaya	mohon pembuatan drainase di dusun harapan jaya RT 02/01 desa lalang jaya	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	dusun harapan jaya RT 02/01 desa lalang jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	OMAN ANGGARI, SH, MH	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
176	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	mohon di buat kan drainase di jalan provinsi	di buat kan drainase di jalan provinsi, A.n indah Fitriani Kadus penirukan 1 dusun penirukan 1 RT 006/003 desa mayang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	indah Fitriani Kadus penirukan 1 dusun penirukan 1 RT 006/003 desa mayang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	BENOS RODIARTO	Verifikasi Perangkat Daerah
177	Masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan Nelayan untuk mengembangkan usaha perikanan tangkap (Pelatihan Pembuatan Kapal Fiber dan Perbaikan Mesin Kapal)	Mohon diadakan penyuluhan dan pembinaan serta pelatihan bagi pembudidayaan baik ikan air tawar maupun ikan air lau	Mohon diadakan penyuluhan dan pembinaan serta pelatihan bagi pembudidayaan baik ikan air tawar maupun ikan air laut Kelompok tani desa tanjung kelumpang, desa Dendang Desa Batu Itam	Dinas Perikanan	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan	Kelompok tani desa tanjung kelumpang, desa Dendang Desa Batu Itam, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MARWAN	Verifikasi TAPD
178	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam memberikan pelayanan kesehatan;	mohon dibantu masih kurangnya tenaga SDM di Pustu aik madu	Mohon bantuan Tenaga SDM di Pustu Aik Madu Kec. Simpang Renggang	Dinas Kesehatan	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	mulyino desa air madu kecamatan simpang renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	OMAN ANGGARI, SH, MH	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
179	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	mohon dibuatkan drainase di RT 003,RT 004,dan RT 005 desa mayang	Pembuatan drainase di RT 003,RT 004,dan RT 005 dusun penirukan ddesa mayang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	ardianto dusun penirukan desa mayang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	BENOS RODIARTO	Verifikasi Perangkat Daerah
180	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	mohon dibuatkan sumur gali di RT 05 desa lilangan	mohon dibuatkan sumur gali di RT 05 desa lilangan	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	endang desa lilangan kecamatan gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHARTINI	Verifikasi Perangkat Daerah
181	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Mohon dilakukan kelanjutan pengaspalan jalan menuju ke pantai Gusong Cine, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung.	Mohon dilakukan kelanjutan pengaspalan jalan menuju ke pantai Gusong Cine, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
182	Masih Belum Optimalnya Pengelolaan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM	Mohon dorongan untuk UMKM	Mohon dorongan untuk UMKM Dusun Aik Selumar Desa Lintang Simpang Renggang	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan	Dusun Aik Selumar Desa Lintang Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
183	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	mohon pelebaran jalan lintas masyarakat desa lilangan	mohon pelebaran jalan lintas masyarakat desa lilangan A.n sukil desa lilangan kecamatan gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	sukil desa lilangan kecamatan gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHARTINI	Verifikasi Perangkat Daerah
184	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Mohon pemasangan penerangan jalan di RT.19 Desa Lalang Jaya	Mohon pemasangan penerangan jalan di RT.19 Desa Lalang Jaya	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Harapan Rt.19 Desa Lalang Jaya Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi TAPD
185	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	mohon pembuatan drainase	Mohon pembuatan drainase dusun numpang empat RT 004 RW 002 desa mekar jaya	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	dusun numpang empat RT 004 RW 002 desa mekar jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	OMAN ANGGARI, SH, MH	Verifikasi Perangkat Daerah
186	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan	mohon pembuatan drainase di desa lilangan	mohon pembuatan drainase di desa lilangan A.n muklisin desa lilangan kecamatan gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	muklisin desa lilangan kecamatan gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHARTINI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	lingkungan yang rawan banjir/Genangan								
187	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Mohon pembuatan jalan ke arah permukiman penduduk dan ke arah perkebunan di Dusun Bentaian II RT.07 Desa Bentaian, Kecamatan Manggar.	Mohon pembuatan jalan ke arah permukiman penduduk dan ke arah perkebunan di Dusun Bentaian II RT.07 Desa Bentaian, Kecamatan Manggar.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Bentaian, Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MIRZA SAPUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah
188	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	mohon pembuatan sumur bor di dusun penirukan	mohon pembuatan sumur bor di dusun penirukan A.n bustari RT 018 dusun penirukan desa mayang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	bustari RT 018 dusun penirukan desa mayang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	BENOS RODIARTO	Verifikasi Perangkat Daerah
189	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh	mohon pembuatan sumur gali di RT 005/003 sekitar rumah verawati,dulhari herarianti	pembuatan sumur gali di RT 005/003 sekitar rumah verawati,dulhari herarianti	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Verawati RT 005/003 desa mayang kelapa kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	BENOS RODIARTO	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	Kelompok Pengelola maupun Desa								
190	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan tanggul/Talud, saluran Pembuangan utama menuju Sungai dan normalisasi pada daerah/Kawasan yang terdampak luapan, Pasang Surut, erosi Sungai dan pendangkalan sungai/anak Sungai	Mohon Pembuatan Talud	Mohon Pembuatan Talud Dsn. Baru Selatan Ds. Baru Kec. manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Dsn. Baru Selatan Ds. Baru Kec. manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MIRZA SAPUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah
191	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan tanggul/Talud, saluran Pembuangan utama menuju Sungai dan normalisasi pada daerah/Kawasan yang terdampak luapan, Pasang Surut, erosi Sungai dan pendangkalan sungai/anak Sungai	Mohon Pembuatan Talud Pemecah Gelombang	Mohon Pembuatan Talud Pemecah Gelombang, Dsn. Burung mandi RT.12/05 Desa Burong Mandi Kec. damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Dsn. Burung mandi RT.12/05 Desa Burong Mandi Kec. damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	KOKO HARYANTO, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
19 2	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Mohon penimbunan batu split di bibir jalan aspal Air Ruak sampai Bangek supaya pejalan kaki dan motor tidak terpeleset dan jatuh.	Mohon penimbunan batu split di bibir jalan aspal Air Ruak sampai Bangek supaya pejalan kaki dan motor tidak terpeleset dan jatuh.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MIRZA SAPUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah
19 3	Masih adanya Kebutuhan Tenaga Kerja atau Lowongan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pencari kerja seperti kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja	Mohon peningkatan perekonomian dengan membuka lapangan kerja di Desa Lilangan.	Mohon peningkatan perekonomian dengan membuka lapangan kerja di Desa Lilangan.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk dibahas lebih lanjut	Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi TAPD
19 4	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Mohon Perbaikan Akses Jalan	Mohon Perbaikan Akses Jalan, Jln.Pendam Dusun Payak 2 RT.02/12 Desa mempaya Kec.Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Jln.Pendam Dusun Payak 2 RT.02/12 Desa mempaya Kec.Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	KOKO HARYANTO, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
19 5	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang	Mohon perbaikan bandar atau drainase yang rusak di sepanjang jalan di Desa Air Madu	Mohon perbaikan bandar atau drainase yang rusak di sepanjang jalan di Desa Air Madu	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Air Madu, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	rawan banjir/Genangan								
196	masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang layak di destinasi wisata, perlunya perbaikan sarana dan prasarana yang rusak dan kurang layak di destinasi wisata dan masih perlunya pengembangan objek wisata baru sebagai alternatif pilihan berwisata	Mohon Perbaikan Gazebo dikawasan area wisata	Mohon Perbaikan Gazebo dikawasan area wisata Dsn.Burung Mandi RT.12/05 Desa burong Mandi kec.damar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	Dsn.Burung Mandi RT.12/05 Desa burong Mandi kec.damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	KOKO HARYANTO, S.IP	Verifikasi TAPD
197	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	mohon perbaikan jalan dan pelebaran jalan yang ada di desa lilngan	mohon perbaikan jalan dan pelebaran jalan yang ada di desa lilangan	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Suryati desa lilangan kecamatan gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHARTINI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
198	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	mohon perbaikan jalan di depan rumah pak Sofian di karenakan banyak jalan yang berlubang	mohon perbaikan jalan A.n sofian desa lilangan kecamatan gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	sofian desa lilangan kecamatan gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHARTINI	Verifikasi Perangkat Daerah
199	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Mohon perbaikan jalan lingkaran Pantai Menara RT.07/09 sepanjang 1,5 km.	Mohon perbaikan jalan lingkaran Pantai Menara RT.07/09 sepanjang 1,5 km. Desa Baru, Kecamatan Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MIRZA SAPUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah
200	Kurang optimalnya pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Mohon perhatian pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan seni dan budaya Belitung.	Mohon perhatian pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan seni dan budaya Belitung.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
201	Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaan Kesehatan belum optimal	Mohon solusi terkait BPJS, terkait tunggakan pembayaran BPJS Mandiri bagi masyarakat yang tidak mampu	Mohon solusi terkait BPJS, terkait tunggakan pembayaran BPJS Mandiri bagi masyarakat yang tidak mampu Dusun Lintang Desa Lintang kec Simpang Renggang	Dinas Kesehatan	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Dusun Lintang Desa Lintang kec Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
202	Optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan yang profesional dan komprehensif	mohon untuk di perbaiki lagi pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit	Optimalisasi pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit dusun Aik Madu, Simpang Renggang	Dinas Kesehatan	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	dusun Aik Madu, Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi TAPD
203	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan tanggul/Talud, saluran Pembuangan utama menuju Sungai dan normalisasi pada daerah/Kawasan yang terdampak luapan, Pasang Surut,erosi Sungai dan pendangkalan sungai/anak Sungai	Normalisasi sungai dimulai dari Aik Batu, Aik bandung, tembus jembatan Tebat, Desa Batu Penyu.	Normalisasi sungai dimulai dari Aik Batu, Aik bandung, tembus jembatan Tebat, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Aik bandung, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
204	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	peangaspalan jalan	peangaspalan jalan Gang Wali, RT.18 DESA SELINSING	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Gang Wali, RT.18 DESA SELINSING, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah
205	Masih Belum Optimalnya SDM dalam kepengurusan koperasi dan pengelolaan UMKM	pelatihan dan bantuan modal bagi umkm	pelatihan dan bantuan modal bagi UMKM, desa Aik Madu, Kecamatan Simpang Renggang	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	desa Aik Madu, Kecamatan Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi TAPD
206	Masih Belum Optimalnya SDM dalam kepengurusan koperasi dan pengelolaan UMKM	pelatihan dan bantuan usaha untuk umkm	pelatihan dan bantuan usaha untuk UMKM, Dusun Baru Tengah RT. 10 RW 5. Desa Baru Kecamatan Manggar	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	Dusun Baru Tengah RT. 10 RW 5. Desa Baru Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi TAPD
207	Masih Belum Optimalnya SDM dalam kepengurusan koperasi dan pengelolaan UMKM	pelatihan dan modal usaha bagi umkm	mohon adakan pelatihan dan modal usaha bagi UMKM, Dusun Baru utara Selatan RT 18/08 Desa Baru Kec Manggar	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	usulan akan diteruskan untuk pembahasan lebih lanjut	Dusun Baru utara Selatan RT 18/08 Desa Baru Kec Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi TAPD
208	belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam melakukan kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan bagi pemuda	Pelatihan karang taruna di Desa Lilangan Kecamatan Gantung	Pelatihan karang taruna di Desa Lilangan Kecamatan Gantung	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Desa Lilangan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
209	belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam melakukan kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan bagi pemuda	Pelatihan karang taruna di Desa Limbongan Kecamatan Gantung	Pelatihan karang taruna di Desa Limbongan Kecamatan Gantung	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Ds Limbungan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi TAPD
210	Kurang optimalnya pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Pelatihan kepemudaan di Kecamatan Simpang Renggang	Pelatihan kepemudaan di Kecamatan Simpang Renggang	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Desa Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi TAPD
211	Masih kurangnya upaya fasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam menumbuhkan Wirausaha Muda yang mandiri	Pelatihan kerja atau kewirausahaan di Desa Lilangan Kecamatan Gantung	Pelatihan kerja atau kewirausahaan di Desa Lilangan Kecamatan Gantung	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Desa Lilangan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi TAPD
212	Masih kurangnya upaya fasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam menumbuhkan Wirausaha Muda yang mandiri	Pelatihan kursus untuk remaja dan ibu rumah tangga dalam bidang menjahit.	Pelatihan kursus untuk remaja dan ibu rumah tangga dalam bidang menjahit. Dusun Air Sambar RT.10 Desa Lilangan Kec. Gantung	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Haryanti, 50 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Dusun Air Sambar RT.10 Desa Lilangan Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
213	Masih kurangnya upaya fasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam menumbuhkan Wirausaha Muda yang mandiri	Pelatihan menjahit untuk remaja dan ibu rumah tangga di Dusun Langkang Desa Lintang	Pelatihan menjahit untuk remaja dan ibu rumah tangga di Dusun Langkang Desa Lintang	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Elis Tiputri, 24 Tahun, Mahasiswa (Dusun Langkang Desa Lintang) , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi TAPD
214	Masih kurangnya upaya fasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam menumbuhkan Wirausaha Muda yang mandiri	pelatihan untuk anak-anak yang baru tamat SMA agar memiliki keterampilan sesuai dengan dibutuhkan pasar kerja, atau berwirausaha	pelatihan untuk anak-anak yang baru tamat SMA agar memiliki keterampilan sesuai dengan dibutuhkan pasar kerja, atau berwirausaha RT 06, Desa Limbongan. Gantung	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	RT 06, Desa Limbongan. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi TAPD
215	Masih kurangnya upaya fasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam menumbuhkan Wirausaha Muda yang mandiri	Pelatihan untuk peningkatan UMKM dan usaha mandiri bagi masyarakat yang belum mendapat pekerjaan supaya bisa menumbuhkan sektor ekonomi rumah tangga di daerah kami yang mana sangat sulit untuk bisa membangkitkan ekonomi rumah tangga.	Pelatihan untuk peningkatan UMKM dan usaha mandiri bagi masyarakat yang belum mendapat pekerjaan di Desa Limbongan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Desa Limbongan , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MARWAN	Verifikasi Perangkat Daerah
216	Masih adanya kelompok tani yang belum mendapatkan sekolah lapang	Pelatihan untuk petani dalam pengelolaan lahan pertanian	Pelatihan untuk petani dalam pengelolaan lahan pertanian A.n Salimin A., 59 Tahun, Petani (Dusun Air Selumar Desa Lintang)	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Salimin A., 59 Tahun, Petani (Dusun Air Selumar Desa Lintang) , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
217	Masih kurangnya upaya fasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam menumbuhkan Wirausaha Muda yang mandiri	Pelatihan wirausaha untuk remaja yang tidak bekerja.	Pelatihan wirausaha untuk remaja yang tidak bekerja. Hera, 46 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Dusun Air Selumar RT.09 Desa Lilangan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Hera, 46 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Dusun Air Selumar RT.09 Desa Lilangan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi TAPD
218	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pelebaran jalan khususnya di Jalan Laskar Pelangi karena sudah terlalu sering terjadi laka lantas.	Pelebaran jalan khususnya di Jalan Laskar Pelangi karena sudah terlalu sering terjadi laka lantas.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. HUSAINI RASYID, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah
219	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pemasangan batu bata sepanjang drainase primer di olipier	Pemasangan batu bata sepanjang drainase primer di olipier	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Olipier Desa Lalang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
220	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Pemasangan cermin cembung tikungan	Pemasangan cermin cembung tikungan Dusun Balai Selatan Desa Mayang. Kelapa Kampit	Dinas Perhubungan	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Balai Selatan Desa Mayang. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	YOHENDRA	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
221	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Pemasangan jalan belakang di RT.14 Dusun Air Selumar Desa Lintang Kecamatan Simpang Renggang	Pemasangan jalan belakang di RT.14 Dusun Air Selumar Desa Lintang Kecamatan Simpang Renggang	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	di RT.14 Dusun Air Selumar Desa Lintang Kecamatan Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi TAPD
222	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	pemasangan jaringan air bersih untuk warga	pemasangan jaringan air bersih untuk warga Dusun Air Rusa RT.08 dan RT. 03. DESA DUKONG.KEC SIMPANG PESAK	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Air Rusa RT.08 dan RT. 03. DESA DUKONG.KEC SIMPANG PESAK, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah
223	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pemasangan jaringan air PAM	Pemasangan jaringan air SPAM, Desa Kelubi, Kec Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Desa Kelubi, Kec Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah
224	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan	Pemasangan jaringan air SPAM	Pemasangan jaringan air SPAM RT. 03 RW 04 Dendang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	RT. 03 RW 04 Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa								
22 5	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pemasangan jaringan pipa SPAM	Pemasangan jaringan pipa SPAM Desa Nyuruk. Dendang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Nyuruk. Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah
22 6	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Pemasangan lampu jalan	Pemasangan lampu jalan Dusun Selindang RT 17 ke arah laut Selindang. Desa Senyubuk. Kelapa Kampit	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Selindang RT 17 ke arah laut Selindang. Desa Senyubuk. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	YOHENDRA	Verifikasi TAPD
22 7	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Pemasangan lampu jalan	Pemasangan lampu jalan Jalan Desa Simpang Tiga. Simpang Renggang	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Jalan Desa Simpang Tiga. Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
228	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Pemasangan lampu jalan di Jl.Munsing RT.07 RW.04 Dusun Kebun Sayur Desa Mengkubang	Pemasangan lampu jalan di Jl.Munsing RT.07 RW.04 Dusun Kebun Sayur Desa Mengkubang	Dinas Perhubungan	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl.Munsing RT.07 RW.04 Dusun Kebun Sayur Desa Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi TAPD
229	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Pemasangan lampu listrik di perkuburan Air Libut Desa Lilangan.	Pemasangan lampu listrik di perkuburan Air Libut Desa Lilangan.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke Dinas terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	di perkuburan Air Libut Desa Lilangan., Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi TAPD
230	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Pemasangan lampu penerangan jalan	Pemasangan lampu penerangan jalan Sepanjang jalan Desa Air Madu. Simpang Renggang	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Sepanjang jalan Desa Air Madu. Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi TAPD
231	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pemasangan SPAM	Pemasangan SPAM Dusun Seberang. DESA SELINSING	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Seberang. DESA SELINSING, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
23 2	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pemasangan SPAM atau PDAM	Pemasangan SPAM atau PDAM Dusun Garumedang RT.021 Desa Sukamandi	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Dusun Garumedang RT.021 Desa Sukamandi, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
23 3	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pemasangan SPAM atau PDAM dari RT.21 sampai dengan RT.27 Dusun Langgang Desa Lintang.	Pemasangan SPAM atau PDAM dari RT.21 sampai dengan RT.27 Dusun Langgang Desa Lintang.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	dari RT.21 sampai dengan RT.27 Dusun Langgang Desa Lintang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
23 4	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pemasangan SPAM atau PDAM di Dusun Liring Desa Renggang Kecamatan Simpang Renggang	Pemasangan SPAM atau PDAM di Dusun Liring Desa Renggang Kecamatan Simpang Renggang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Liring Desa Renggang Kecamatan Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
235	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pemasangan SPAM atau PDAM di Kecamatan Damar	Pemasangan SPAM atau PDAM di Desa Sukamandi Kecamatan Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Ds Sukamandi, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
236	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pemasangan SPAM atau PDAM di PKBM Bina Taruna Kecamatan Dendang.	Pemasangan SPAM atau PDAM di PKBM Bina Taruna Kecamatan Dendang.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Khairul Anwar, S.Pd.SD, 52 tahun, PNS/Ketua PKBM Bina Taruna Desa Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
237	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pemasangan SPAM atau PDAM di RT.14 Dusun Air Selumar Desa Lintang	Pemasangan SPAM atau PDAM di RT.14 Dusun Air Selumar Desa Lintang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.14 Dusun Air Selumar Desa Lintang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
238	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pemasangan SPAM di Rt 04/02 Dusun Sekip Desa Lalang kerana tidak ada air bersih di setiap rumah warga	Pemasangan SPAM di Rt 04/02 Dusun Sekip Desa Lalang karena tidak ada air bersih di setiap rumah warga	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Sekip Rt.04/02 Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
239	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pemasangan SPAM di RT.4 Dusun Pancur II Desa Padang Kecamatan Manggar	Pemasangan SPAM di RT.4 Dusun Pancur II Desa Padang Kecamatan Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	T.4 Dusun Pancur II Desa Padang Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
240	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembangunan atau pembuatan drainase bandar saluran air	Pembangunan atau pembuatan drainase Desa Sukamandi RT.04 Kecamatan Damar.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Sukamandi RT.04 Kecamatan Damar. , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
24 1	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pembangunan dan peningkatan jalan permukiman Jl. PLN, RT.001, Desa Batu Penyu.	Pembangunan dan peningkatan jalan permukiman Jl. PLN, RT.001, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. PLN, RT.001, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
24 2	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pembangunan dan peningkatan prasarana jalan di Desa Batu Penyu.	Pembangunan dan peningkatan prasarana jalan di Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
24 3	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	pembangunan drainase	pembangunan drainase RT. 11, DESA SALINSING.GANTUNG	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	RT. 11, DESA SALINSING.GANTUNG, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
244	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	pembangunan drainase	pembangunan drainase Gang Wali, RT.18 DESA SELINSING	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Gang Wali, RT.18 DESA SELINSING, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah
245	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembangunan drainase	Pembangunan drainase RT. 03 RW. 02. Dusun Bahagia. Kelapa Kampit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT. 03 RW. 02. Dusun Bahagia. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	YOHENDRA	Verifikasi Perangkat Daerah
246	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembangunan drainase di Jln. Aik Rengas Dusun Nibong Punggur Desa Mentawak Kec. kelapa Kampit	Pembangunan drainase di Jln. Aik Rengas Dusun Nibong Punggur Desa Mentawak Kec. kelapa Kampit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Nibong Punggur Desa Mentawak Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
247	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembangunan drainase jalan di Rt.11/04 Desa Aik Kelik Kec. Damar	Pembangunan drainase jalan di Rt.11/04 Desa Aik Kelik Kec. Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Aik Kelik Rt.11/04 Kec. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
248	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	pembangunan drainase jalan gang Lintang Dsn Air Kelik	pembangunan drainase jalan gang Lintang Dsn Air Kelik Gg Lintang Desa Air Kelik	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Dsn Air Kelik, Gg Lintang Desa Air Kelik, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
249	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembangunan drainase jalan P2D Dusun Air Selumar	Pembangunan drainase jalan P2D Dusun Air Selumar Dusun Air Lintang Simpang Renggang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Air Selumar, Rt 16/04 Desa Lintang Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
250	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembangunan drainase primer di Dusun Taruna Mulya Rt05/02 Desa Lalang	Pembangunan drainase primer di Dusun Taruna Mulya Rt05/02 Desa Lalang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Taruna Mulya Rt.05/02 Desa lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
251	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	pembangunan drainase sepanjang jalan kabupaten	pembangunan drainase sepanjang jalan kabupaten desa Selinsing. Kec Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	desa Selinsing. Kec Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah
252	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan jalan di Kampong Gunong Rt.12 Desa Aik Kelik	Pembangunan jalan di Kampong Gunong Rt.12 Desa Aik Kelik	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Kampong Gunong Rt.12 Desa Aik Kelik Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
25 3	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan jalan di Rt.07/02 Dusun Merdeka Desa Senyubuk Kec. Kelapa Kampit	Pembangunan jalan di Rt.07/02 Dusun Merdeka Desa Senyubuk Kec. Kelapa Kampit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Merdeka Rt.07/02 Desa Senyubuk Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYA H, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
25 4	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan jalan menuju dermaga	Pembangunan jalan menuju dermaga, Dsn Air Kelik, Desa Air Kelik	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Dsn Air Kelik, Desa Air Kelik, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
25 5	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan jalan selindang arah ke laut selindang Dusun Selindang Desa Senyubuk	Pembangunan jalan selindang arah ke laut selindang Dusun Selindang Desa Senyubuk	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Selindang Desa Senyubuk Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYA H, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
25 6	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Pembangunan jalan tani di daerah air degong	Pembangunan jalan tani di daerah air degong Dsn Kebun Sayur RT 11, Air Degong,Ds Mengkubang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk pembahasan lebih lanjut	Daroji, Dsn Kebun Sayur RT 11, Air Degong,Ds Mengkubang , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
25 7	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi Husaini, 49 Tahun, Petani (Air Nyeranai Dusun Air Selumar Desa Lintang)	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Husaini, 49 Tahun, Petani (Air Nyeranai Dusun Air Selumar Desa Lintang) , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
258	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	pembangunan sarana air bersih	pembangunan sarana air bersih desa Dendang, yang embungnya terletak di Dusun Semalar RT 09. Desa Dendang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD Teknis	desa Dendang, yang embungnya terletak di Dusun Semalar RT 09. Desa Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah
259	masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang layak di destinasi wisata, perlunya perbaikan sarana dan prasarana yang rusak dan kurang layak di destinasi wisata dan masih perlunya pengembangan objek wisata baru sebagai alternatif pilihan berwisata	Pembangunan sarana prasarana umum di Tebat Rasau.	Pembangunan sarana prasarana umum di Tebat Rasau. Ds Lintang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Tebat Rasau, Ds Lintang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi TAPD
260	Masih adanya sarana dan prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Pembangunan sarana sekolah SDN 9 Simpang Pesak yang belum ada seperti musolla, ruang komputer, gudang dan kantin	Pembangunan sarana sekolah SDN 9 Simpang Pesak yang belum ada seperti musolla, ruang komputer, gudang dan kantin	Dinas Pendidikan	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	SDN 9 Simpang Pesak, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MARWAN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
261	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan standar yang dianjurkan	Pembangunan/pembuatan MCK (WC umum) sebanyak 3 unit di Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung.	Pembangunan/pembuatan MCK (WC umum) sebanyak 3 unit di Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
262	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan standar yang dianjurkan	Pembangunan/pembuatan MCK (WC umum) sebanyak 3 unit di Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung.	Pembangunan/pembuatan MCK (WC umum) sebanyak 3 unit di Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Ds. Batu Penyu Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
263	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pembuatan akses jalan di RT.18 Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 500 meter	Pembuatan akses jalan di RT.18 Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 500 meter	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.18, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
264	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembuatan akses jalan di RT.18 Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 500 meter.	Pembuatan akses jalan di RT.18 Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 500 meter.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.18, Ds. Lilangan, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
265	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembuatan akses jalan penghubung antara RT.18 sampai dengan RT.19 di Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan.	Pembuatan akses jalan penghubung antara RT.18 sampai dengan RT.19 di Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
266	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan bandar air atau drainase di RT.16 Desa Lilangan.	Pembuatan bandar air atau drainase di RT.16 Desa Lilangan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.16, Desa Lilangan, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
267	Pembangunan Jalan dan Jembatan	pembuatan dan pengaspalan jln di depan rumah Pak Cahyo alamat Dusun Harapan Rt.09 Desa Lalang Jaya.	pembuatan dan pengaspalan jln di depan rumah Pak Cahyo alamat Dusun Harapan Rt.09 Desa Lalang Jaya.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Harapan Rt.09 Desa Lalang Jaya (depan rumah Pak Cahyo), Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
268	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang	pembuatan drainase	pembangunan saluran drainase, Desa Kelubi, RT 05. RW 01	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Desa Kelubi, RT 05. RW 01, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	rawan banjir/Genangan								
269	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase	Pembuatan drainase Desa Sukamandi RT7/3.Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD Teknis mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dipastikan lahan dalam keadaan CnC	Desa Sukamandi RT7/3.Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARJANTO JOHANNES, SH	Verifikasi Perangkat Daerah
270	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase	Pembuatan drainase Dusun Balik dan Dusun Air Nangka. Dendang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Balik dan Dusun Air Nangka. Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
27 1	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase	Pembuatan drainase Dusun Aik Lanci Desa Aik Kelik. Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data dukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Aik Lanci Desa Aik Kelik. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARJANTO JOHANNES, SH	Verifikasi Perangkat Daerah
27 2	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase atau bandar	Pembuatan drainase atau bandar RT.09 DUSUN SELUMAR, DESA SELINSING	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	RT.09 DUSUN SELUMAR, DESA SELINSING, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah
27 3	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase atau talud di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 1 km.	Pembuatan drainase atau talud di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 1 km.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.16, Dusun Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
274	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase atau talud di RT.18 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 500 meter.	Pembuatan drainase atau talud di RT.18 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 500 meter.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.18, Dusun Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
275	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase atau talud jalan di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang 1 km.	Pembuatan drainase atau talud jalan di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang 1 km.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
276	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase atau talud jalan di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 500 meter.	Pembuatan drainase atau talud jalan di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 500 meter.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.16, Dsn. Sinar Setiong, Ds. Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
27 7	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase atau talud sepanjang kurang lebih 500 Meter	Pembuatan drainase atau talud sepanjang kurang lebih 500 Meter , Dsn Sinar Setiong RT 19, Ds Lilangan	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dsn Sinar Setiong RT 19, Ds Lilangan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
27 8	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase dan perbaikan gorong-gorong	Pembuatan drainase dan perbaikan gorong-gorong RT. 15 Dusun Air Lanci. Desa Aik Kelik. Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data dukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	RT. 15 Dusun Air Lanci. Desa Aik Kelik. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARJANTO JOHANNES , SH	Verifikasi Perangkat Daerah
27 9	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase di Dusun Harapan Jaya Rt.19 Desa Lalang Jaya karena kalau musim hujan sering banjir sementara kami pakai papan tapi kalau hujan tenggelam dan tidak bisa dilewati.	Pembuatan drainase di Dusun Harapan Jaya Rt.19 Desa Lalang Jaya karena kalau musim hujan sering banjir sementara kami pakai papan tapi kalau hujan tenggelam dan tidak bisa dilewati.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Harapan Jaya Rt.19 Desa Lalang Jaya Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
280	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase di Jalan P2D Dusun Lintang sepanjang 600 meter.	Pembuatan drainase di Jalan P2D Dusun Lintang sepanjang 600 meter. A.n Junaidi J., 57 tahun, Kepala Dusun Lintang (Desa Lintang Kecamatan Simpang Renggang)	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Junaidi J., 57 tahun, Kepala Dusun Lintang (Desa Lintang Kecamatan Simpang Renggang), Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
281	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	pembuatan drainase di RT 002/001 dusun pancur 1	Pembuatan drainase di RT 002/001 dusun pancur 1 Desa Padang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	seputaran rumah nek menot RT 002/001 dusun pancur 1 desa padang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	OMAN ANGGARI, SH, MH	Verifikasi Perangkat Daerah
282	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase di RT.05 Dusun Jaya Desa Lenggang Kecamatan Gantung.	Pembuatan drainase di RT.05 Dusun Jaya Desa Lenggang Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.05, Dusun Jaya, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. HUSAINI RASYID, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
283	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase di RT.19 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan kurang lebih 500 meter.	Pembuatan drainase di RT.19 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan kurang lebih 500 meter.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.19, Dusun Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
284	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase jalan raya	Pembuatan drainase jalan raya RT 06. Dusun Balok. Dendang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	RT 06. Dusun Balok. Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah
285	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	pembuatan drainase sepanjang 1 km	pembuatan drainase sepanjang 1 km jalan Rambat RT. 12 RW 03. Dusun Liring Desa Renggiang. Kec Simpang Renggiang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	jalan Rambat RT. 12 RW 03. Dusun Liring Desa Renggiang. Kec Simpang Renggiang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
286	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase sepanjang 150 meter di Dusun Selindang Desa Senyubuk bagian depan perbatasan Rt.05/02 dengan Rt.06/02	Pembuatan drainase sepanjang 150 meter di Dusun Selindang Desa Senyubuk bagian depan perbatasan Rt.05/02 dengan Rt.06/02	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Selindang Desa Senyubuk perbatasan Rt.05/05 dengan Rt.06 Desa Senyubuk Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
287	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase sepanjang 150 meter di Dusun Selindang Rt.06/02 Desa Senyubuk Kec. Kelapa Kampit, bagian dalam arah ke lapangan bola Renoceros.	Pembuatan drainase sepanjang 150 meter di Dusun Selindang Rt.06/02 Desa Senyubuk Kec. Kelapa Kampit, bagian dalam arah ke lapangan bola Renoceros	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Selindang Rt.06/02 Desa senyubuk Kec. Kelapa kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
288	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase sepanjang jalan	Pembuatan drainase sepanjang jalan Dsn Air Madu II, Ds Air Madu	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dsn Air Madu II, Ds Air Madu, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
289	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan drainase, dan gorong-gorong	Pembuatan drainase, dan gorong-gorong, jalan Manggar-Gantung, dusun Menggarawan RT 01 dan RT 02, Desa Padang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	jalan Manggar-Gantung, dusun Menggarawan RT 01 dan RT 02, Desa Padang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi Perangkat Daerah
290	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	pembuatan drianase di sepanjang jalan Kresna	pembuatan Drainase di sepanjang jalan Kresna Dusun Gunung Desa Lalang Jaya, Kec Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Dusun Gunung Desa Lalang Jaya, Kec Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah
291	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan gorong-gorong atau bes jalan masuk SDN 1 Simpang Renggang	Pembuatan gorong-gorong atau bes jalan masuk SDN 1 Simpang Renggang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	SDN 1 Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
29 2	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan gorong-gorong atau drainase di RT.18 sepanjang 500 meter.	Pembuatan gorong-gorong atau drainase di RT.18 sepanjang 500 meter. RT.18, Ds. Lilangan, Kecamatan Gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.18, Ds. Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
29 3	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan gorong-gorong di RT.18 Desa Lilangan.	Pembuatan gorong-gorong di RT.18 Desa Lilangan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.18, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
29 4	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembuatan jalan tembus dari Trans Lilangan I sampai dengan Trans Lilangan II Desa Lilangan.	Pembuatan jalan tembus dari Trans Lilangan I sampai dengan Trans Lilangan II Desa Lilangan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
29 5	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan	Pembuatan MCK di RT.05 Desa Lilangan	Pembuatan MCK di RT.05 Desa Lilangan RT 05, Kec Gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Lilangan RT 05, Kec Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	standar yang dianjurkan			Kawasan Permukiman					
296	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan standar yang dianjurkan	Pembuatan MCK di RT.05 Desa Lilangan	Pembuatan MCK di RT.05 Desa Lilangan RT 05, Ds Lilangan	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dsn Lilangan RT 05, Ds Lilangan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
297	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan standar yang dianjurkan	Pembuatan MCK sebanyak 2 unit di Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan.	Pembuatan MCK sebanyak 2 unit di Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
298	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pembuatan Pamsimas untuk Dusun Kartini Desa Lalang	Pembuatan Pamsimas untuk Dusun Kartini Desa Lalang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Kartini Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
299	Daerah/Kawasan Permukiman yang Terjadi abrasi(pengikisan tanah pada daerah pesisir pantai yang diakibatkan oleh ombak dan arus laut) atau Rawan akresi akibat sedimentasi dari daratan atau sungai menuju arah laut	Pembuatan pemecah gelombang	Pembuatan pemecah gelombang Pesisir Pantai Wisata Burong Mandi	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD Teknis mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dipastikan lahan dalam keadaan CnC	Pesisir Pantai Wisata Burong Mandi, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARJANTO JOHANNES, SH	Verifikasi Perangkat Daerah
300	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan saluran Air	Pembuatan saluran drainase Desa Lenggang RT.05	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Lenggang RT.05, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. HUSAINI RASYID, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah
301	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	pembuatan saluran drainase	pembuatan saluran drainase RT.15 DESA SELINSING.GANTUNG	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	RT.15 DESA SELINSING.GANTUNG, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
302	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pembuatan sumber air bersih atau SPAM di Desa Lilangan	Pembuatan sumber air bersih atau SPAM di Desa Lilangan	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Lilangan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
303	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pembuatan sumur bor di Desa Lilangan sebanyak 2 unit.	Pembuatan sumur bor di Desa Lilangan sebanyak 2 unit.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Ds. Lilangan, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
304	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pembuatan sumur bor sebanyak 2 unit di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan.	Pembuatan sumur bor sebanyak 2 unit di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.16, Dusun Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
305	Masih adanya lingkungan hunian dan permukiman yang belum didukung Prasarana, sarana dan utilitas secara memadai	Pembuatan Sumur umum di Desa Aik Kelik Rt.11/04 kec. Damar	Pembuatan Sumur umum di Desa Aik Kelik Rt.11/04 kec. Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Aik Kelik Rt.11/04 Kec. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
306	Masih adanya lingkungan hunian dan permukiman yang belum didukung Prasarana, sarana dan utilitas secara memadai	Pembuatan sumur umum/perigi di jalan Gunung Nayak Rt.12 Desa Aik Kelik Kec. Damar	Pembuatan sumur umum/perigi di jalan Gunung Nayak Rt.12 Desa Aik Kelik Kec. Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Jln. Gunung Nayak Rt.12 Desa Aik Kelik Kec. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
307	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan tanggul/Talud, saluran Pembuangan utama menuju Sungai dan normalisasi pada daerah/Kawasan yang terdampak luapan, Pasang Surut,erosi Sungai dan pendangkalan sungai/anak Sungai	pembuatan talud	pembuatan talud depan SDN 21, DUSUN MERANTE, DESA SELINSING	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	depan SDN 21, DUSUN MERANTE, DESA SELINSING, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
308	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan tanggul/Talud, saluran Pembuangan utama menuju Sungai dan normalisasi pada daerah/Kawasan yang terdampak luapan, Pasang Surut, erosi Sungai dan pendangkalan sungai/anak Sungai	Pembuatan talud	Pembuatan talud RT. 13.Dusun Libut. Desa Sukamandi. Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT. 13.Dusun Libut. Desa Sukamandi. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	YOHENDRA	Verifikasi Perangkat Daerah
309	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan talud atau drainase dari RT.16 sampai dengan RT.17 Dusun Air Selumar Desa Lintang sepanjang kurang lebih 1 km	Pembuatan talud atau drainase dari RT.16 sampai dengan RT.17 Dusun Air Selumar Desa Lintang sepanjang kurang lebih 1 km	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.16 sampai dengan RT.17 Dusun Air Selumar Desa Lintang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
310	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan talud atau drainase di RT.15 Dusun Air Selumar Desa Lintang.	Pembuatan talud atau drainase di RT.15 Dusun Air Selumar Desa Lintang.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.15 Dusun Air Selumar Desa Lintang., Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
311	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Pembuatan talud dan bibir jalan dari RT.22 sampai dengan RT.27 Dusun Langkang Desa Lintang sepanjang kurang lebih 2 km.	Pembuatan talud dan bibir jalan dari RT.22 sampai dengan RT.27 Dusun Langkang Desa Lintang sepanjang kurang lebih 2 km.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	dari RT.22 sampai dengan RT.27 Dusun Langkang Desa Lintang , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
312	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan tanggul/Talud, saluran Pembangunan utama menuju Sungai dan normalisasi pada daerah/Kawasan yang terdampak luapan, Pasang Surut,erosi Sungai dan pendangkalan sungai/anak Sungai	Pembuatan talud saluran air	Pembuatan talud saluran air RT. 20 RW. 09.Dusun Garumedang. Desa Sukamandi. Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT. 20 RW. 09.Dusun Garumedang. Desa Sukamandi. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	YOHENDRA	Verifikasi Perangkat Daerah
313	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan standar yang dianjurkan	Pembuatan WC	Pembuatan WC Desa Sukamandi. RT 7/3.Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis,	Desa Sukamandi. RT 7/3.Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARJANTO JOHANNES , SH	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
314	Masih adanya lingkungan hunian dan permukiman yang belum didukung Prasarana, sarana dan utilitas secara memadai	Pembuatan WC umum	Pembuatan WC umum, Dusun Ursan Jaya RT 01, RW 01, Desa Padang. Kec Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Dusun Ursan Jaya RT 01, RW 01, Desa Padang. Kec Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah
315	Masih adanya lingkungan hunian dan permukiman yang belum didukung Prasarana, sarana dan utilitas secara memadai	Pembuatan WC umum di Desa Aik Kelik Rt.11/04 Kec. Damar	Pembuatan WC umum di Desa Aik Kelik Rt.11/04 Kec. Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Aik Kelik Rt.11/04 Kec. Damar , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYA H, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
316	Masih adanya lingkungan hunian dan permukiman yang belum didukung Prasarana, sarana dan utilitas secara memadai	Pembuatan WC umum di Jln. Gunong Nayok Desa Aik Kelik Rt.12/04 Kec. Damar	Pembuatan WC umum di Jln. Gunong Nayok Desa Aik Kelik Rt.12/04 Kec. Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Jln. Gunong Nayok Desa Aik Kelik Rt.12/04 Kec. Damar , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYA H, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
317	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pemenuhan kebutuhan air di Dusun Kartini Rt.01/01 Desa lalang	Pemenuhan kebutuhan air di Dusun Kartini Rt.01/01 Desa lalang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Kartini Rt.01/01 Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
318	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Penambahan akses jalan aspal ke sawah Air Nyeranai sepanjang kurang lebih 1 km di Dusun Air Selumar Desa Lintang.	Penambahan akses jalan aspal ke sawah Air Nyeranai sepanjang kurang lebih 1 km di Dusun Air Selumar Desa Lintang.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Husaini, 49 Tahun, Petani (Air Nyeranai Dusun Air Selumar Desa Lintang), Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
319	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Penambahan jaringan air PAM	Penambahan jaringan air PAM Dusun Bahagia. Desa Pembaharuan. Kelapa Kampit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Bahagia. Desa Pembaharuan. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	YOHENDRA	Verifikasi Perangkat Daerah
320	Optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan yang profesional dan komprehensif	Penambahan ruang rawat inap, fasilitas dan tenaga kesehatan	Penambahan ruang rawat inap, fasilitas dan tenaga kesehatan puskesmas Dendang	Dinas Kesehatan	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	puskesmas Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi TAPD
321	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Penerangan lampu jalan	Penerangan lampu jalan RT 18 Dusun Garumedang Desa Sukamandi. Damar	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	RT 18 Dusun Garumedang Desa Sukamandi. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	YOHENDRA	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
32 2	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pengadaan KWH listrik dan pembuatan 2 set sumur bor di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan.	Pengadaan KWH listrik dan pembuatan 2 set sumur bor di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.16, Dsn. Sinar Setiong, Ds. Lilangan, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
32 3	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Pengadaan mesin pengolahan mesin organik	Pengadaan mesin pengolahan mesin organik Desa Lintang Simpang Renggang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Desa Lintang Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
32 4	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Pengadaan SPAM atau PDAM di Kecamatan Simpang Renggang	Pengadaan SPAM atau PDAM di Kecamatan Simpang Renggang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
32 5	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	pengasapalan jalan	pengasapalan jalan RT.24 dan RT .25 DUSUN MERANTE. DESA SELINSING	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	RT.24 dan RT .25 DUSUN MERANTE. DESA SELINSING, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
326	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengaspalan akses jalan Desa Lilangan	Pengaspalan akses jalan Dsn Air Sambar RT 10, Ds Lilangan	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dsn Air Sambar RT 10, Ds Lilangan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
327	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengaspalan akses jalan ke TPU Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 500 meter.	Pengaspalan akses jalan ke TPU Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 500 meter.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
328	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengaspalan akses jalan P2D Dusun Air Selumar Desa Lintang sepanjang 2 km	Pengaspalan akses jalan P2D Dusun Air Selumar Desa Lintang sepanjang 2 km	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	jalan P2D Dusun Air Selumar Desa Lintang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
329	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengaspalan akses jalan SDN 1Sp Renggiang sepanjang 200 meter	Pengaspalan akses jalan SDN 1Sp Renggiang sepanjang 200 meter	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	SDN 1Sp Renggiang , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
330	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Pengaspalan atau peningkatan akses jalan ke kebun	Pengaspalan atau peningkatan akses jalan ke kebun Dusun Air Madu II Desa Aik Madu	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Air Madu II Desa Aik Madu, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
331	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengaspalan di jalan TPU di Desa Air Madu Desa Air Madu sepanjang kurang lebih 500 meter.	Pengaspalan di jalan TPU di Desa Air Madu Desa Air Madu sepanjang kurang lebih 500 meter.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	jalan TPU di Desa Air Madu, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
332	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	pengaspalan jalan	pengaspalan jalan Jalan SDN 8 SELINSING. KECAMATAN GANTUNG	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Jalan SDN 8 SELINSING. KECAMATAN GANTUNG, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah
333	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	pengaspalan jalan	pengaspalan jalan jalan eks tambang III, RT.17 DUSUN SELINSING sekitar 200 meter	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	jalan eks tambang III, RT.17 DUSUN SELINSING sekitar 200 meter, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
334	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	pengaspalan jalan	pengaspalan jalan jalan Gang Gelena, belakang BKJM, Desa Selinsing. Gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	jalan Gang Gelena, belakang BKJM, Desa Selinsing. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah
335	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengaspalan jalan	Pengaspalan jalan RT 06-07 Dusun Jaya Bakti. Dendang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	RT 06-07 Dusun Jaya Bakti. Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah
336	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengaspalan jalan	Pengaspalan jalan RT. 07 Dusun Selindang. Desa Senyubuk. Kelapa Kampit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT. 07 Dusun Selindang. Desa Senyubuk. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	YOHENDRA	Verifikasi Perangkat Daerah
337	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pengaspalan jalan di Dusun Taruna Mulya Rt.04/02 Desa Lalang	Pengaspalan jalan di Dusun Taruna Mulya Rt.04/02 Desa Lalang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Taruna Mulya Rt.04/02 Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
338	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengaspalan jalan di samping Kantor Camat untuk perumahan masyarakat	Pengaspalan jalan di samping Kantor Camat untuk perumahan masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	desa Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
339	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Pengaspalan jalan kebun sepanjang kurang lebih 3 km di Dusun Air Madu II Desa Air Madu Kecamatan Simpang Renggang.	Pengaspalan jalan kebun sepanjang kurang lebih 3 km di Dusun Air Madu II Desa Air Madu Kecamatan Simpang Renggang.	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, mohon dilengkapi dengan data dukung	Dusun Air Madu II Desa Air Madu Kecamatan Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
340	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	pengaspalan jalan lanjutan sepanjang 350 m	pengaspalan jalan lanjutan sepanjang 350 m, jalan rambat, RT 12, Dusun Liring Desa Renggang. Kecamatan Simpang Renggang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	jalan rambat, RT 12, Dusun Liring Desa Renggang. Kecamatan Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah
341	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengaspalan jalan lingkaran sepanjang kurang lebih 2 km	Pengaspalan jalan lingkaran sepanjang kurang lebih 2 km Dsn Sinar Setiong RT 15 Ds Lilangan	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dsn Sinar Setiong RT 15 Ds Lilangan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
34 2	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengaspalan Jalan Lingkup Dsn Jangkang	Pengaspalan Jalan Lingkup Dsn Jangkang RT.03 sampai dengan RT.04	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dsn Jangkang RT.03 sampai dengan RT.04, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
34 3	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pengaspalan jalan Pangkapan Damar dengan panjang 3 km	Pengaspalan jalan Pangkapan Damar dengan panjang 3 km Dusun Aik Selumar Desa Lintang Simpang Renggang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Aik Selumar Desa Lintang Simpang Renggang , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
34 4	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	pengaspalan jalan pemukiman di RT 005 desa lilangan	pengaspalan jalan pemukiman di RT 005 desa lilangan	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Tini desa lilangan kecamatan gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHARTINI	Verifikasi Perangkat Daerah
34 5	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengaspalan jalan pemukiman warga di RT.13 sampai dengan RT.11 Dusun Liring Desa Renggang Kecamatan Simpang Renggang.	Pengaspalan jalan pemukiman warga di RT.13 sampai dengan RT.11 Dusun Liring Desa Renggang Kecamatan Simpang Renggang.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.13 sampai dengan RT.11 Dusun Liring Desa Renggang Kecamatan Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
346	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengaspalan jalan sawah	Pengaspalan jalan sawah RT. 10 Dusun Air Nangka Desa Balok. Dendang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Jalan sawah RT. 10 Dusun Air Nangka Desa Balok. Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah
347	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengerasan atau pengaspalan jalan wisata Gunung Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 1 km.	Pengerasan atau pengaspalan jalan wisata Gunung Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 1 km. Jl. Wisata Gunung Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Wisata Gunung Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
348	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengerasan jalan ke makam di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 1 km.	Pengerasan jalan ke makam di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 1 km.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.16, Dusun Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
349	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pengerasan jalan sepanjang kurang lebih 500 meter di RT.18 Desa Lilangan	Pengerasan jalan sepanjang kurang lebih 500 meter di RT.18 Dsn Sinar setiong RT 18 Ds Lilangan	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dsn Sinar setiong RT 18 Ds Lilangan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
350	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Peningkatan akses jalan atau pengaspalan akses jalan ke bukit tempat wisata sepanjang kurang lebih 2 km.	Peningkatan akses jalan atau pengaspalan akses jalan ke bukit tempat wisata sepanjang kurang lebih 2 km. Saipil Nazar, 42 Tahun, Buruh Harian (Dusun Renggiang II Desa Renggiang)	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Saipil Nazar, 42 Tahun, Buruh Harian (Dusun Renggiang II Desa Renggiang), Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
351	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Peningkatan akses jalan di Kecamatan Simpang Pesak.	Peningkatan akses jalan di Kecamatan Simpang Pesak. Kecamatan simpang pesak	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Kecamatan simpang pesak, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
352	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Peningkatan akses jalan di RT.15 Desa Lilangan.	Peningkatan akses jalan di RT.15 Desa Lilangan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.15, Ds. Lilangan, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
353	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Peningkatan akses jalan di RT.18 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 500 meter.	Peningkatan akses jalan di RT.18 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 500 meter.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.18, Dusun Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
354	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Peningkatan akses jalan Dusun Lintang Desa Lintang sepanjang kurang lebih 4 km.	Peningkatan akses jalan Dusun Lintang Desa Lintang sepanjang kurang lebih 4 km.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Lintang Desa Lintang , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
355	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Peningkatan akses jalan ekonomi wisata arah ke bukit I Dusun Renggang II Desa Renggang.	Peningkatan akses jalan ekonomi wisata arah ke bukit I Dusun Renggang II Desa Renggang.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	bukit I Dusun Renggang II Desa Renggang., Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
356	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Peningkatan akses jalan sepakbola di Dusun Liring Desa Renggang Kecamatan Simpang Renggang	Peningkatan akses jalan sepakbola di Dusun Liring Desa Renggang Kecamatan Simpang Renggang Dusun Liring Desa Renggang Kecamatan Simpang Renggang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Liring Desa Renggang Kecamatan Simpang Renggang , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
357	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Peningkatan akses jalan tani di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 2 km.	Peningkatan akses jalan tani di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 2 km.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.16, Dusun Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
358	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Peningkatan akses jalan tani sepanjang kurang lebih 1 km dari jalan Air Batu sampai dengan jalan Air Nyanduk.	Peningkatan akses jalan tani sepanjang kurang lebih 1 km dari jalan Air Batu sampai dengan jalan Air Nyanduk.	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	dari jalan Air Batu sampai dengan jalan Air Nyanduk, Ds Lintang , Kab. Belitung Timur	Kabupate n / Kota	SULADI	Verifika si Perangk at Daerah
359	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Peningkatan akses jalan usaha tani di Desa Lilangan.	Peningkatan akses jalan usaha tani di Desa Lilangan.	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk dibahas lebih lanjut, mohon untuk dilengkapi data dukung	Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupate n / Kota	SUPARMAN	Verifika si Perangk at Daerah
360	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Peningkatan akses jalan usaha tani di Desa Simpang Renggang.	Peningkatan akses jalan usaha tani di Desa Simpang Renggang.	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Desa Simpang Renggang., Kab. Belitung Timur	Kabupate n / Kota	SULADI	Verifika si Perangk at Daerah
361	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Peningkatan akses jalan usaha tani di Dusun Marga Mulia sepanjang 1 km di Dusun Renggang Desa Renggang.	Peningkatan akses jalan usaha tani di Dusun Marga Mulia sepanjang 1 km di Dusun Renggang Desa Renggang.	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Marga Mulia , Ds Sp Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupate n / Kota	SULADI	Verifika si Perangk at Daerah
362	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Peningkatan akses jalan usaha tani di RT.16 Dusun Sinar Setiong sepanjang 2 km.	Peningkatan akses jalan usaha tani di RT.16 Dusun Sinar Setiong sepanjang 2 km.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.16, Dusun Sinar Setiong, Ds. Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupate n / Kota	SUPARMAN	Verifika si Perangk at Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
363	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Peningkatan akses jalan usaha tani di RT.16 Dusun Sinar Setiong sepanjang 2 km.	Peningkatan akses jalan usaha tani di RT.16 Dusun Sinar Setiong sepanjang 2 km.	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	RT.16, Dusun Sinar Setiong, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
364	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Peningkatan akses jalan usaha tani sawah di Dusun Air Ruak Desa Simpang Tiga	Peningkatan akses jalan usaha tani sawah di Dusun Air Ruak Desa Simpang Tiga	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Air Ruak Desa Simpang Tiga, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
365	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Peningkatan akses jalan usaha tani sepanjang 2 km di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan.	Peningkatan akses jalan usaha tani sepanjang 2 km di RT.16 Dusun Sinar Setiong Desa Lilangan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.16, Dsn. Sinar Setiong, Ds. Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
366	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Peningkatan atau pengaspalan akses jalan pariwisata di Trans Lilangan Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 1 km.	Peningkatan atau pengaspalan akses jalan pariwisata di Trans Lilangan Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 1 km.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Trans Lilangan, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
367	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan	Peningkatan atau pengaspalan akses jalan Tebat Rasau sepanjang kurang lebih 1 km	Peningkatan atau pengaspalan akses jalan Tebat Rasau sepanjang kurang lebih 1 km	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	jalan Tebat Rasau Desa Lintang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	Pelebaran Jalan Menuju Standar								
368	masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang layak di destinasi wisata, perlunya perbaikan sarana dan prasarana yang rusak dan kurang layak di destinasi wisata dan masih perlunya pengembangan objek wisata baru sebagai alternatif pilihan berwisata	Peningkatan infrastruktur di area pantai di Belitung Timur agar lebih menarik sehingga dapat menarik wisatawan	Peningkatan infrastruktur di area pantai di Belitung Timur agar lebih menarik sehingga dapat menarik wisatawan Kecamatan Kelapa Kampit	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	usulan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Kecamatan Kelapa Kampit , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi TAPD
369	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Peningkatan jalan	Peningkatan jalan Jalan sawah RT 10. Dusun Air Nangka. Desa Balok	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Jalan sawah RT 10. Dusun Air Nangka. Desa Balok, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	DWI NANDA PUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
370	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	peningkatan jalan akses menuju dermaga tambat Tanjung Mudong	peningkatan jalan akses menuju dermaga tambat Tanjung Mudong Desa Selinsing. Kecamatan Gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dermaga, Tanjung Mudong, Desa Selinsing. Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah
371	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Peningkatan Jalan berupa jalan aspal hotmix di Jl. Aik Bandung dan Jl. Buje, Desa Batu Penyu.	Peningkatan Jalan berupa jalan aspal hotmix di Jl. Aik Bandung dan Jl. Buje, Desa Batu Penyu	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Ds. Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
372	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Peningkatan jalan, pengaspalan jalan	Peningkatan jalan, pengaspalan jalan Jalan PPIP(Belakang kuburan Cina) RT.18 DESA SELINSING	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Jalan PPIP(Belakang kuburan Cina) RT.18 DESA SELINSING, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah
373	Optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan yang profesional dan komprehensif	Peningkatan pelayanan kepada pengguna BPJS kesehatan agar tidak diperlambat atau dipersulit pada saat pengobatan	Peningkatan pelayanan kepada pengguna BPJS kesehatan agar tidak diperlambat atau dipersulit pada saat pengobatan Dusun Lintang Desa Lintang kec Simpang Renggang	Dinas Kesehatan	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Dusun Lintang Desa Lintang kec Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
374	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan akses di Desa Limbongan Kecamatan Gantung	Rehabilitasi akses jalan di Desa Limbongan Kecamatan Gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Limbungan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
375	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan akses jalan di Desa Lilangan Kecamatan Gantung	Rehabilitasi akses jalan di Desa Lilangan Kecamatan Gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Lilangan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
376	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan akses jalan di RT.15 Dusun Air Selumar Desa Lintang.	Perbaikan akses jalan di RT.15 Dusun Air Selumar Desa Lintang.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.15 Dusun Air Selumar Desa Lintang., Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
377	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan akses jalan sepanjang kurang lebih 500 meter	Perbaikan akses jalan sepanjang kurang lebih 500 meter, di RT.4 Dusun Pancur II Desa Padang Kecamatan Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	di RT.4 Dusun Pancur II Desa Padang Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
378	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan Akses sepanjang jalan Desa Limbongan Kecamatan Gantung	Rehabilitasi jalan pada Desa Limbongan Kecamatan Gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Limbungan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
379	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Perbaikan atau pengaspalan akses jalan ke kebun Air Nyanduk Desa Lintang	Perbaikan atau pengaspalan akses jalan ke kebun Air Nyanduk Desa Lintang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	akses jalan ke kebun Air Nyanduk Desa Lintang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
380	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan atau peningkatan akses jalan di RT.18 Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 500 meter.	Perbaikan atau peningkatan akses jalan di RT.18 Desa Lilangan sepanjang kurang lebih 500 meter.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Lilangan, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
381	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Perbaikan bandar talud di sekitar Jalan Laskar Pelangi karena sering terjadi banjir di saat musim hujan.	Perbaikan bandar talud di sekitar Jalan Laskar Pelangi karena sering terjadi banjir di saat musim hujan. Desa Lenggang, Kecamatan Gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. HUSAINI RASYID, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
38 2	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	perbaikan dan pelebaran jalan didusun limbongan kecamatan gantung	perbaikan dan pelebaran jalan didusun limbongan kecamatan gantung A.n dari dusun limbongan kecamatan gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	darli dusun limbongan kecamatan gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHARTINI	Verifikasi Perangkat Daerah
38 3	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Perbaikan drainase	Perbaikan drainase, RT 32 RW 14 Dusun Assalam Desa Baru. kec MANGGAR	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	RT 32 RW 14 Dusun Assalam Desa Baru. kec MANGGAR, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah
38 4	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Perbaikan drainase di Dusun Ban Motor Desa Lalang Rt.01/01 sepanjang kurleb 300 meter	Perbaikan drainase di Dusun Ban Motor Desa Lalang Rt.01/01 sepanjang kurleb 300 meter	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Ban Motor Rt.01/01 Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
385	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Perbaikan drainase di Jalan Lintang Rt.05/04 Desa Aik Kelik Kec. Damar	Perbaikan drainase di Jalan Lintang Rt.05/04 Desa Aik Kelik Kec. Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Jln. Lintang Rt.05/04 Desa Aik Kelik Kec. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYAH, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah
386	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Perbaikan drainase di RT.15 RW.03 Desa Lintang.	Perbaikan drainase di RT.15 RW.03 Desa Lintang.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.15 RW.03 Desa Lintang., Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah
387	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Perbaikan drainase Dusun Durian Rt.03/02 sepanjang kurleb 150 meter (depan rumah Hendro)	Perbaikan drainase Dusun Durian Rt.03/02 sepanjang kurleb 150 meter (depan rumah Hendro)	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Durian Rt.03/02 Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
388	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	perbaikan jalan	perbaikan jalan yang rusak, RT 37, SEBERANG MINAPOLITAN DESA KURNIA JAYA	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	RT 37, SEBERANG MINAPOLITAN DESA KURNIA JAYA, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah
389	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	perbaikan jalan	perbaikan jalan yang rusak di PTU Kematang, Dusun Birah. Desa Kelubi. Kec Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	di PTU Kematang, Dusun Birah. Desa Kelubi. Kec Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah
390	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	perbaikan jalan	perbaikan jalan yang rusak, dusun lipat kajang II, RT 27 RW 12. DESA BARU KECAMATAN MANGGAR	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	dusun lipat kajang II, RT 27 RW 12. DESA BARU KECAMATAN MANGGAR, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	JIMMY TJONG	Verifikasi Perangkat Daerah
391	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	perbaikan jalan	perbaikan jalan JALAN PANTAI SENTIGI DESA DUKONG. KEC SIMPANG PESAK	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	JALAN PANTAI SENTIGI DESA DUKONG. KEC SIMPANG PESAK, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
392	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan Jalan	Perbaikan Jalan Dsn. Assalam II Ds. Baru	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Dsn. Assalam II Ds. Baru, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MIRZA SAPUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah
393	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	perbaikan jalan	perbaikan jalan Dusun Limbongan II, RT. 06, DESA LIMBONGAN	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Limbongan II, RT. 06, DESA LIMBONGAN, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah
394	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan Jalan	Rehabilitasi jalan yang rusak Dsn.Aik Ruak Desa Aik Ruak Kecamatan Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Dsn.Aik Ruak Desa Aik Ruak Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MIRZA SAPUTRA	Verifikasi Perangkat Daerah
395	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	perbaikan jalan	perbaikan jalan Jalan PAUD PEMATANG PERMAI, JALAN MERANTI RT 12. DESA SELINSING. GANTUNG	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Jalan PAUD PEMATANG PERMAI, JALAN MERANTI RT 12. DESA SELINSING. GANTUNG, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
396	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan jalan	Perbaikan jalan Jalan tembus RT. 09 ke RT 12.Dusun Balai Selatan. Desa Mayang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jalan tembus RT. 09 ke RT 12.Dusun Balai Selatan. Desa Mayang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	YOHENDRA	Verifikasi Perangkat Daerah
397	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan jalan	Perbaikan jalan RT. 15. Dusun Air Lanci. Desa Aik Kelik. Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	USulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan data dukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	RT. 15. Dusun Air Lanci. Desa aik Kelik. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARJANTO JOHANNES , SH	Verifikasi Perangkat Daerah
398	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan jalan	Perbaikan jalan RT 11.Dusun Aik Lanci Desa Aik Kelik. Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	RT 11.Dusun Aik Lanci Desa Aik Kelik. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARJANTO JOHANNES , SH	Verifikasi Perangkat Daerah
399	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	perbaikan jalan	Perbaikan jalan yang rusak RT .36 SEBERANG MINAPOLITAN, DESA KURNIA JAYA	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	RT .36 SEBERANG MINAPOLITAN, DESA KURNIA JAYA, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
400	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	perbaikan jalan	perbaikan jalan yang rusak Dusun Birah RT 05, RW 01 Desa Kelubi.kec Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Dusun Birah RT 05, RW 01 Desa Kelubi.kec Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah
401	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan jalan	Perbaikan jalan P2 D Kampong Nibong. Dusun Aik Lanci. Desa Aik Kelik. Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data dukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	P2 D Kampong Nibong. Dusun Aik Lanci. Desa Aik Kelik. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARJANTO JOHANNES, SH	Verifikasi Perangkat Daerah
402	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan jalan aspal depan SMPN 4 Manggar yang sampai sekarang belum terlaksana	Perbaikan jalan aspal depan SMPN 4 Manggar yang sampai sekarang belum terlaksana Dusun Teratai Desa Lalang Jaya Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Teratai Desa Lalang Jaya Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
403	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan jalan aspal Dusun Ban Motor Rt.01/01 Desa Lalang	Perbaikan jalan aspal Dusun Ban Motor Rt.01/01 Desa Lalang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Ban Motor Rt.01/01 Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
404	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan jalan dekat Toko Samsidi	Perbaikan jalan dekat Toko Samsidi Dusun Harapan Desa Lalang Jaya Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Harapan Desa Lalang Jaya Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
405	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan jalan di depan di depan SDN 7 Manggar	Perbaikan jalan di depan di depan SDN 7 Manggar Dusun Harapan Desa Lalang Jaya	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Harapan Desa Lalang Jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
406	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan jalan di Dusun Sekip Rt.04/02 Desa Lalang	Perbaikan jalan di Dusun Sekip Rt.04/02 Desa Lalang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Sekip Rt.04/02 Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
407	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan jalan di Dusun Sekip Rt.05/02 perlu diaspal sudah berlobang kurleb 200-300 meter	Perbaikan jalan di Dusun Sekip Rt.05/02 perlu diaspal sudah berlobang kurleb 200-300 meter	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Sekip Rt.05/02 Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
408	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Perbaikan jalan pertanian di kelompok tani air perpat	Perbaikan jalan pertanian di kelompok tani air perpat, Jl Air Terjun Dam, Dsn Tanah Tebok, Ds Burung Mandi	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk pembahasan lebih lanjut	Jl Air Terjun Dam, Dsn Tanah Tebok, Ds Burung Mandi, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
409	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan Jalan rusak di kec Damar	Perbaikan Jalan rusak di Desa Sukamandi kec Damar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Sukamandi, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
410	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan jalan setapak di Dusun Gunung Desa Lalang Jaya	Perbaikan jalan setapak di Dusun Gunung Desa Lalang Jaya	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Gunung Desa Lalang Jaya Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
411	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan jalan setapak di Dusun Kartini Rt.01/01 Desa Lalang	Perbaikan jalan setapak di Dusun Kartini Rt.01/01 Desa Lalang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Kartini Rt.01/01 Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
41 2	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	perbaikan jalan trans Sidorejo	perbaikan jalan trans Sidorejo A.n untung dusun bira desa simpang pesak kecamatan simpang pesak	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	untung dusun bira desa simpang pesak kecamatan simpang pesak, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHARTINI	Verifikasi Perangkat Daerah
41 3	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan jalan yang rusak dikarenakan terkikis oleh air/abrasi di jalan menuju ke pantai Gusong Cine tepatnya di jembatan pok 2 di pinggir/tepi jalan arah menuju ke RT.18.	Perbaikan jalan yang rusak dikarenakan terkikis oleh air/abrasi di jalan menuju ke pantai Gusong Cine tepatnya di jembatan pok 2 di pinggir/tepi jalan arah menuju ke RT.18.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Gusong Cine, RT. 18, Desa Batu Peny, kecamatan gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
41 4	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan jalan yang rusak menuju ke laut pering untuk nelayan desa air kelik	Perbaikan jalan yang rusak menuju ke laut pering untuk nelayan desa air kelik	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Air Kelik, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi Perangkat Daerah
41 5	Belum optimalnya pembudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	Perbaikan lapangan futsal Desa Aik Kelik Kec. Damar	Perbaikan lapangan futsal Desa Aik Kelik Kec. Damar	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Desa Aik Kelik Kec Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ISMANSYA H, S.IP	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
416	Belum optimalnya pembudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	Perbaikan lapangan Volly, net	Perbaikan lapangan Volly, net A.n Wawan, Dsn Damar RT 1 Ds Mengkubang	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Wawan, Dsn Damar RT 1 Ds Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUNARJO	Verifikasi TAPD
417	Optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan yang profesional dan komprehensif	Perbaikan Pustu Desa Lilangan Kecamatan Gantung	Perbaikan Pustu Desa Lilangan Kecamatan Gantung	Dinas Kesehatan	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Desa Lilangan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi TAPD
418	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	perbaikan ruas jalan raya gantung simpang pesak	perbaikan ruas jalan raya gantung simpang pesak	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	jalan raya gantung sampai simpang pesak , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHARTINI	Verifikasi Perangkat Daerah
419	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	perbaikan selokan/saluran drainase	Pemeliharaan selokan/saluran drainase yang rusak Dusun Gajah Mada, RT.4 RW 2, Desa mekar Jaya	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Dusun Gajah Mada, RT.4 RW 2, Desa mekar Jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
420	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Perbaikan talud atau jembatan Air Nayun di Desa Lilangan	Perbaikan talud atau jembatan Air Nayun di Desa Lilangan	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Air Nayun Desa Lilangan, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHANDI	Verifikasi Perangkat Daerah
421	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan/rehabilitasi jalan TPU di Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung.	Perbaikan/rehabilitasi jalan TPU di Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Jangkar, Asam Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
422	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikannya jalan laut Subang	Perbaikannya jalan laut Subang Desa Pembaharuan. Kelapa Kampit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jalan Laut Subang. Desa Pembaharuan. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	YOHENDRA	Verifikasi Perangkat Daerah
423	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan	Perbaikannya WC umum	Perbaikannya WC umum Jalan Bahagia RT. 04 RW 02.Desa Pembaharuan. Kelapa Kampit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jalan Bahagia RT. 04 RW 02.Desa Pembaharuan. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	YOHENDRA	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	standar yang dianjurkan								
424	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaiki jalan ekonomi dan pengaspalan jalan demi kelancaran ekonomi	Perbaiki jalan ekonomi dan pengaspalan jalan demi kelancaran ekonomi Dusun lintang Desa Lintang Simpang Renggiang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	usulan diteruskan ke OPD terkait. mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa Foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun lintang Desa Lintang Simpang Renggiang , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
425	Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaan Kesehatan belum optimal	Perlu adanya upaya pencegahan penyakit demam berdarah	Perlu adanya upaya pencegahan penyakit demam berdarah Dusun Air Lanci. Desa Air Kelik. Damar	Dinas Kesehatan	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Dusun Air Lanci. Desa Air Kelik. Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARJANTO JOHANNES , SH	Verifikasi TAPD
426	Masih adanya sarana dan prasarana produksi pertanian yang belum tercukupi yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian	Perlu bantuan bibit sawit, cabe, kacang panjang, salak dan pupuk di Desa Renggiang	Perlu bantuan bibit sawit, cabe, kacang panjang, salak dan pupuk di Desa Renggiang	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Desa Renggiang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	AKHIRUDDIN, A.Md	Verifikasi Perangkat Daerah
427	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang	Perlunya Drainase di Dsn. Arab II RT 19 Desa Kurnia	Pembangunan Drainase di Dsn. Arab II RT 19 Desa Kurnia	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Dsn. Arab II RT 19 Desa Kurnia, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	FEZZY UKTOLSEJA, SE, MM	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	rawan banjir/Genangan								
428	Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga	Perlunya pencegahan dan pengetahuan untuk remaja agar tidak terjerumus kepada seks bebas	Perlunya pencegahan dan pengetahuan untuk remaja agar tidak terjerumus kepada seks bebas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Damar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	HARJANTO JOHANNES, SH	Verifikasi TAPD
429	Masih Belum Optimalnya Pengelolaan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM	Permohonan akan perhatian pemerintah daerah kepada para pelaku pedagang kecil pembuat tempe, dimana harga kacang kedelai dipasaran sangat tinggi. Mohon dengan sangat, harga kacang kedelai dipasaran agar bisa diturunkan demi kesejahteraan para pedagang kecil pembuat tempe.	Permohonan akan perhatian pemerintah daerah kepada para pelaku pedagang kecil pembuat tempe, Dusun Cangu, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Cangu, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi TAPD
430	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Permohonan pemasangan polisi tidur (alat pembatas kecepatan/markah kejut) di area SDN 20 Gantung.	Permohonan pemasangan polisi tidur (alat pembatas kecepatan/markah kejut) di area SDN 20 Gantung.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Desa Limbongan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	FEZZY UKTOLSEJA, SE, MM	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
43 1	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Permohonan pemasangan polisi tidur (alat pembatas kecepatan/markah kejut) di area SMP Negeri 3 Gantung.	Permohonan pemasangan polisi tidur (alat pembatas kecepatan/markah kejut) di area SMP Negeri 3 Gantung.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	FEZZY UKTOLSEJA, SE, MM	Verifikasi TAPD
43 2	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Permohonan pemasangan polisi tidur (alat pembatas kecepatan/markah kejut) di sepanjang Jl. Diponegoro Dusun Cangu Desa Lenggang Kecamatan Gantung.	Permohonan pemasangan polisi tidur (alat pembatas kecepatan/markah kejut) di sepanjang Jl. Diponegoro Dusun Cangu Desa Lenggang Kecamatan Gantung.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, Mohon dilengkapi dengan data pendukung	Jl. Diponegoro, Dusun Cangu, Desa Lenggang, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSONO SULAI	Verifikasi TAPD
43 3	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Permohonan pemasangan polisi tidur (alat pembatas kecepatan/markah kejut) di sepanjang Jl. Diponegoro, Dusun Cangu, Desa Lenggang.	Permohonan pemasangan polisi tidur (alat pembatas kecepatan/markah kejut) di sepanjang Jl. Diponegoro, Dusun Cangu, Desa Lenggang.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, Mohon dilengkapi dengan data pendukung	Jl. Diponegoro, Dusun Cangu, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSONO SULAI	Verifikasi TAPD
43 4	Masih adanya lingkungan hunian dan permukiman yang belum didukung Prasarana, sarana dan utilitas secara memadai	Permohonan pembangunan gedung serba guna di Kecamatan Dendang.	Permohonan pembangunan gedung serba guna di Kecamatan Dendang.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Kecamatan Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
435	Masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan Nelayan untuk mengembangkan usaha perikanan tangkap (Pelatihan Pembuatan Kapal Fiber dan Perbaikan Mesin Kapal)	Permohonan akan adanya pelatihan untuk pembuatan perahu fiber di Desa Batu Penyu.	Permohonan akan adanya pelatihan untuk pembuatan perahu fiber di Desa Batu Penyu.	Dinas Perikanan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut, mohon dilengkapi dengan data dukung	Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi TAPD
436	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan standar yang dianjurkan	Permohonan akan bantuan pembangunan WC.	Permohonan akan bantuan pembangunan WC. Dusun Seberang, Desa Selinsing, Kecamatan Gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Seberang, Desa Selinsing, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah
437	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan standar yang dianjurkan	Permohonan akan bantuan pembangunan WC.	Permohonan akan bantuan pembangunan WC. Dusun Batu Belida, Desa Tanjung Kelumpang, Kecamatan Simpang Pesak	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Batu Belida, Desa Tanjung Kelumpang, Kecamatan Simpang Pesak, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah
438	Masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan Nelayan untuk mengembangkan usaha perikanan tangkap (Pelatihan Pembuatan Kapal Fiber dan Perbaikan Mesin Kapal)	Permohonan akan bantuan perahu untuk nelayan kecil.	Permohonan akan bantuan perahu untuk nelayan kecil. Kecamatan Gantung	Dinas Perikanan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk dibahas lebih lanjut, mohon untuk dilengkapi data dukung	Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
439	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Permohonan akan bantuan pupuk dan bibit sayuran.	Permohonan akan bantuan pupuk dan bibit sayuran.	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk dibahas lebih lanjut, mohon untuk dilengkapi data dukung	Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah
440	Masih kurangnya ketersediaan pupuk di tingkat petani perkebunan	Permohonan akan bantuan pupuk dan bibit sayuran.	Permohonan akan bantuan pupuk dan bibit sayuran Kec. Gantung	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk dibahas lebih lanjut, mohon untuk dilengkapi data dukung	Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah
441	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan akan perbaikan jalan aspal dan saluran drainase di sepanjang Jl. Dewi Sartika, Desa Lenggang.	Permohonan akan perbaikan jalan aspal dan saluran drainase di sepanjang Jl. Dewi Sartika, Desa Lenggang.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Dewi Sartika, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah
442	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan akan perbaikan jalan aspal dan saluran drainase di sepanjang Jl. Dewi Sartika, Desa Lenggang.	Permohonan akan perbaikan jalan aspal dan saluran drainase di sepanjang Jl. Dewi Sartika, Desa Lenggang.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Dewi Sartika, Ds. Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
443	Rendahnya Kualitas prasarana pendukung kegiatan perikanan tangkap (Pemeliharaan Shelter Nelayan)	Permohonan bantuan alat tangkap ikan dan box fiber ikan bagi para nelayan.	Permohonan bantuan alat tangkap ikan dan box fiber ikan bagi para nelayan.	Dinas Perikanan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk pembahasan lebih lanjut, mohon dilengkapi dengan data dukung	Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi TAPD
444	Minimnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan berupa (Kolam Terpal, Waring Budidaya, Pakan dan Benih) untuk Program Budidaya Untuk Ketahanan Pangan (DAUN KETAPANG) dan Program Budidaya Ikan untuk Pembudidayaan Ikan Milenial umur 19-40 tahun (TOMAN).	Permohonan bantuan benih ikan air tawar seperti lele, patin dan gurame di Desa Buding.	Permohonan bantuan benih ikan air tawar seperti lele, patin dan gurame di Dusun Limau Manis, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit	Dinas Perikanan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk dibahas lebih lanjut, mohon untuk dilengkapi data dukung	Dusun Limau Manis, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi TAPD
445	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Permohonan bantuan bibit bersertifikat yaitu bibit kelapa sawit dan bibit tanaman buah-buahan untuk kelompok tani di Desa Batu Penyu.	Permohonan bantuan bibit bersertifikat yaitu bibit kelapa sawit dan bibit tanaman buah-buahan untuk kelompok tani di Desa Batu Penyu.	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
446	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Permohonan bantuan bibit buah-buahan.	Permohonan bantuan bibit buah-buahan, Dusun Limau Manis, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk dibahas lebih lanjut, mohon untuk dilengkapi data dukung	Dusun Limau Manis, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
447	Minimnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan berupa (Kolam Terpal, Waring Budidaya, Pakan dan Benih) untuk Program Budidaya Untuk Ketahanan Pangan (DAUN KETAPANG) dan Program Budidaya Ikan untuk Pembudidayaan Ikan Milenial umur 19-40 tahun (TOMAN).	Permohonan bantuan bibit ikan lele untuk kelompok budidaya di Desa Batu Penyu.	Permohonan bantuan bibit ikan lele untuk kelompok budidaya di Desa Batu Penyu.	Dinas Perikanan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi TAPD
448	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Permohonan bantuan bibit pohon kelapa sawit untuk kelompok budidaya di Desa Batu Penyu.	Permohonan bantuan bibit pohon kelapa sawit untuk kelompok budidaya di Desa Batu Penyu.	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
449	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Permohonan bantuan bibit sawit di Dusun Buding, Desa Buding.	Permohonan bantuan bibit sawit di Dusun Buding, Desa Buding. Kecamatan Kelapa Kampit	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Buding, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
450	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Permohonan bantuan bibit tanaman buah durian, sebanyak 1000 pohon untuk masyarakat Desa Batu Penyu.	Permohonan bantuan bibit tanaman buah durian, sebanyak 1000 pohon untuk masyarakat Desa Batu Penyu.	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Ds. Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
45 1	Masih adanya kebutuhan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura yang belum tercukupi	Permohonan bantuan bibit tanaman untuk petani kecil.	Permohonan bantuan bibit tanaman untuk petani kecil. Dusun Cendil, Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk pembahasan lebih lanjut, mohon dilengkapi dengan data dukung	Dusun Cendil, Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
45 2	Tidak tersedianya pupuk subsidi untuk komoditi perkebunan	Permohonan bantuan pupuk bersubsidi untuk kelompok tani-petani di Desa Batu Penyu.	Permohonan bantuan pupuk bersubsidi untuk kelompok tani-petani di Desa Batu Penyu.	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
45 3	Tidak tersedianya pupuk subsidi untuk komoditi perkebunan	Permohonan bantuan pupuk subsidi untuk masyarakat dan kelompok tani di Desa Buding.	Permohonan bantuan pupuk subsidi untuk masyarakat dan kelompok tani di Dusun Limau Manis, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Limau Manis, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
45 4	Masih kurangnya ketersediaan pupuk di tingkat petani perkebunan	Permohonan bantuan pupuk untuk petani kecil.	Permohonan bantuan pupuk untuk petani kecil. Dusun Cendil, Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan diteruskan ke OPD terkait untuk pembahasan lebih lanjut, mohon dilengkapi dengan data dukung	Dusun Cendil, Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
45 5	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh	Permohonan evaluasi daripada harga air yang dibebankan kepada pelanggan PDAM Kecamatan Gantung-harga air tidak sesuai dengan kualitas air yang kotor.	Permohonan evaluasi daripada harga air yang dibebankan kepada pelanggan PDAM Kecamatan Gantung-harga air tidak sesuai dengan kualitas air yang kotor.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	Kelompok Pengelola maupun Desa								
45 6	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan kelanjutan pengaspalan di ujung Jl. Safie, di sebelah Jembatan baru menuju Jl. Konjim-dengan panjang jalan ± 400 meter.	Permohonan kelanjutan pengaspalan di ujung Jl. Safie, di sebelah Jembatan baru menuju Jl. Konjim-dengan panjang jalan ± 400 meter.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dsn. Kundor, Ds. Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
45 7	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan kelanjutan pengaspalan jalan dari Desa Batu Penyu menuju ke arah pantai Gusong Cine, Desa Batu Penyu.	Permohonan kelanjutan pengaspalan jalan dari Desa Batu Penyu menuju ke arah pantai Gusong Cine, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Ds. Batu Penyu, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
45 8	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Permohonan lampu jalan di depan SDN 7 Manggar	Permohonan lampu jalan di depan SDN 7 Manggar Dusun Harapan Desa Lalang Jaya	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Harapan Desa Lalang Jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
459	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan pelebaran jalan di Jalan Lintang Buding tepatnya ke arah Cendil.	Permohonan pelebaran jalan di Jalan Lintang Buding tepatnya ke arah Cendil.Desa Buding, kecamatan Kelapa Kampit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Buding, kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
460	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan pelebaran jalan di RT.07, Dusun Limbongan II, Desa Limbongan, Kecamatan Gantung.	Permohonan pelebaran jalan di RT.07, Dusun Limbongan II, Desa Limbongan, Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dsn. Limbongan II, Desa Limbongan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSONO SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah
461	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pemabangunan saluran drainase sepanjang 750 m, di Aik Rengas, RT. 02, Dusun Nibung Punggur, Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit.	pembangunan saluran drainase sepanjang 750 m, di Aik Rengas, RT. 02, Dusun Nibung Punggur, Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Aik Rengas, RT. 02, Dusun Nibung Punggur, Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
462	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Permohonan pemasangan lampu penerangan jalan umum di kawasan sekitar TPU Desa Balok Kecamatan Dendang.	Permohonan pemasangan lampu penerangan jalan umum di kawasan sekitar TPU Desa Balok Kecamatan Dendang.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Desa Balok, Kecamatan Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
46 3	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Permohonan pemasangan lampu penerangan jalan umum di permukiman Desa Batu Penyu.	Permohonan pemasangan lampu penerangan jalan umum di permukiman Desa Batu Penyu.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Desa Batu Penyu, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi TAPD
46 4	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Permohonan pemasangan penerangan jalan umum di depan kantor Desa Dendang-menuju ke arah PAUD.	Permohonan pemasangan penerangan jalan umum di depan kantor Desa Dendang-menuju ke arah PAUD.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Dendang, Desa Dendang, Kec. Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi TAPD
46 5	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Permohonan pemasangan polisi tidur (alat pembatas kecepatan/markah kejut) di depan SDN 12 Gantung, SDN 14 Gantung, dan PAUD Harapan Bunda Desa Batu Penyu.	Permohonan pemasangan polisi tidur (alat pembatas kecepatan/markah kejut) di depan SDN 12 Gantung, SDN 14 Gantung, dan PAUD Harapan Bunda Desa Batu Penyu.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Ds. Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi TAPD
46 6	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Permohonan pemasangan polisi tidur (alat pembatas kecepatan/markah kejut) di Jl. Parit Tebu, RT.027, Desa Batu Penyu.	Permohonan pemasangan polisi tidur (alat pembatas kecepatan/markah kejut) di Jl. Parit Tebu, RT.027, Desa Batu Penyu.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Lidun, Desa Batu Penyu, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi TAPD

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
467	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan saluran drainase di RT. 04, Dusun Cendil, Desa Cendil.	Permohonan pembangunan saluran drainase di RT. 04, Dusun Cendil, Desa Cendil.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	RT. 04, Dusun Cendil, Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
468	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Permohonan pembangunan dan pemasangan lampu rambu-rambu lalu lintas (traffic light) disetiap persimpangan sekolah yang berada di Desa Batu Penyu.	Permohonan pembangunan dan pemasangan lampu rambu-rambu lalu lintas (traffic light) disetiap persimpangan sekolah yang berada di Desa Batu Penyu.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi TAPD
469	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Permohonan pembangunan jalan di samping toko Bapak Arsi menuju RT. 07 jalan ke TPU, dari RT. 01 hingga RT. 07.	Permohonan pembangunan jalan di samping toko Bapak Arsi menuju RT. 07 jalan ke TPU, dari RT. 01 hingga RT. 07.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Dusun Penirokan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
470	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang	Permohonan pembangunan pasang siring di Jl. Aik Pak Wan, RT.014, Desa Batu Penyu sepanjang ± 250 m.	Permohonan pembangunan pasang siring di Jl. Aik Pak Wan, RT.014, Desa Batu Penyu sepanjang ± 250 m.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Aik Pak Wan, RT.014, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	rawan banjir/Genangan								
47 1	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Permohonan pembangunan plat duiker di Jl. Aik Bandong, RT.009, Desa Batu Penyu.	Permohonan pembangunan plat duiker di Jl. Aik Bandong, RT.009, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Aik Bandong, RT.009, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
47 2	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Permohonan pembangunan plat duiker di RT.15 dan RT.21, Desa Batu Penyu.	Permohonan pembangunan plat duiker di RT.15 dan RT.21, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
47 3	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Permohonan pembangunan plat duiker di simpang Jl. PLN, RT.001, Desa Batu Penyu.	Permohonan pembangunan plat duiker di simpang Jl. PLN, RT.001, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. PLN, RT.001, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
474	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan saluran drainase di Jl. Aik Gurok, arah ke sirkuit RT. 12, Dusun Limau Manis - sepanjang 2000 m.	Permohonan pembangunan saluran drainase di Jl. Aik Gurok, arah ke sirkuit RT. 12, Dusun Limau Manis - sepanjang 2000 m.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Jl. Aik Gurok, RT. 12, Dusun Limau Manis, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
475	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan saluran drainase di Jl. Aik Kabal, RT. 09 RW. 04, Bukit Jaya, Desa Buding.	Permohonan pembangunan saluran drainase di Jl. Aik Kabal, RT. 09 RW. 04, Bukit Jaya, Desa Buding.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Jl. Aik Kabal, RT. 09 RW. 04, Dusun Bukit Jaya, Desa Buding, Kecamatan Buding, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
476	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan saluran drainase di Jl. Cekedas - Simpang SD Negeri 10, Dusun Bukit Jaya, Desa Buding.	Permohonan pembangunan saluran drainase di Jl. Cekedas - Simpang SD Negeri 10, Dusun Bukit Jaya, Desa Buding.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Jl. Cekedas, Dusun Bukit Jaya, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
477	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan saluran drainase di Jl. Sudirman, Dusun Lidun, Desa Batu Penyu.	Permohonan pembangunan saluran drainase di Jl. Sudirman, Dusun Lidun, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Sudirman, Dusun Lidun, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
478	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan saluran drainase di Jl. Tanah Puru sepanjang 750 m, Dusun Nibung Punggur, Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit.	Permohonan pembangunan saluran drainase di Jl. Tanah Puru sepanjang 750 m, Dusun Nibung Punggur, Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Jl. Tanah Puru, Dusun Nibung Punggur, Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
479	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan Pembangunan saluran drainase di RT. 01.	Permohonan Pembangunan saluran drainase di RT. 01 Dusun Penirokan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	RT .01, Dusun Penirokan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
480	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan saluran drainase di RT. 03, Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit.	Permohonan pembangunan saluran drainase di RT. 03, Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	RT. 03, Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
481	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan saluran drainase di RT. 05 RW. 02, Jl. Bandes I, II, dan Jl. Sawah, Desa Cendil.	Permohonan pembangunan saluran drainase di RT. 05 RW. 02, Jl. Bandes I, II, dan Jl. Sawah, Desa Cendil.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
482	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan saluran drainase di RT. 06.	Permohonan pembangunan saluran drainase di Dusun Penirokan, RT.06, Desa Mayang, Kecamatan kelapa Kampit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Dusun Penirokan, RT.06, Desa Mayang, Kecamatan kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
483	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan saluran drainase di sepanjang jalan Dusun Padang Sumping, Desa Batu Penyu.	Permohonan pembangunan saluran drainase di sepanjang jalan Dusun Padang Sumping, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Padang Sumping, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah
484	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan saluran drainase di sepanjang jalan RT. 05, Desa Buding - ± 500 m.	Permohonan pembangunan saluran drainase di sepanjang jalan RT. 05, Desa Buding - ± 500 m.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	RT. 05, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
485	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan siring pasang di SDN 13 Gantung	Permohonan pembangunan siring pasang di SDN 13 Gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
486	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan siring pasang di sepanjang Jl. Jend. Sudirman, RT.01-RT.02, Desa Batu Penyu.	Permohonan pembangunan siring pasang di sepanjang Jl. Jend. Sudirman, RT.01-RT.02, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Jend. Sudirman, RT.01-RT.02, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
487	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan pembangunan sumur bor di Jl. Air Bata RT. 03 RW. 02, Dusun Rumbai, Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit.	Permohonan pembangunan sumur bor di Jl. Air Bata RT. 03 RW. 02, Dusun Rumbai, Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Jl. Air Bata RT. 03 RW. 02, Dusun Rumbai, Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
488	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan pembangunan sumur bor di Jl. Buje, Desa Batu Penyu.	Permohonan pembangunan sumur bor di Jl. Buje, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Buje, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
489	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan pembangunan sumur bor di Jl. Selindang, RT. 05 RW. 02, Dusun Selindang, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit.	Permohonan pembangunan sumur bor di Jl. Selindang, RT. 05 RW. 02, Dusun Selindang, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Jl. Selindang, RT. 05 RW. 02, Dusun Selindang, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
490	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan pembangunan sumur bor di RT. 02 RW. 01, Dusun Penirukan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit.	Permohonan pembangunan sumur bor di RT. 02 RW. 01, Dusun Penirukan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	RT. 02 RW. 01, Dusun Penirukan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
491	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan pembangunan sumur bor di RT. 04 RW. 02, Dusun Selindang, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit.	Permohonan pembangunan sumur bor di RT. 04 RW. 02, Dusun Selindang, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	RT. 04 RW. 02, Dusun Selindang, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
49 2	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan pembangunan sumur bor di RT. 18 RW. 02, Dusun Penirukan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit.	Permohonan pembangunan sumur bor di RT. 18 RW. 02, Dusun Penirukan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	RT. 18 RW. 02, Dusun Penirukan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
49 3	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan pembangunan sumur bor di RT. 18 RW. 02, Dusun Penirukan, Desa Mayang.	Permohonan pembangunan sumur bor di RT. 18 RW. 02, Dusun Penirukan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	RT. 18 RW. 02, Dusun Penirukan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
49 4	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan pembangunan sumur bor di RT.02, Dusun Sumping, Desa Batu Penyu.	Permohonan pembangunan sumur bor di RT.02, Dusun Sumping, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.02, Dusun Sumping, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
49 5	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan talud atau saluran drainase/gorong-gorong di Jl. Safei, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung.	Permohonan pembangunan talud atau saluran drainase/gorong-gorong di Jl. Safei, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Safei, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
49 6	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan talud atau saluran drainase/gorong-gorong di RT.008 sampai RT.010 Dusun Sumping, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung.	Permohonan pembangunan talud atau saluran drainase/gorong-gorong di RT.008 sampai RT.010 Dusun Sumping, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Sumping, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
49 7	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembangunan talud di sepanjang pesisir pantai Gusong Cine, Desa Batu Penyu.	Permohonan pembangunan talud di sepanjang pesisir pantai Gusong Cine, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
498	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan pembangunan/ pembuatan MCK (WC dan sumur umum) di pantai Gusong Cine Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung.	Permohonan pembangunan/ pembuatan MCK (WC dan sumur umum) di pantai Gusong Cine Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Pantai Gusong Cine, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
499	Masih terdapat rumah Tinggal yang belum memiliki sarana dan prasarana sanitasi / Tanki Septik Individu yang sesuai dengan standar yang dianjurkan	Permohonan pembangunan/pembuatan MCK (WC dan sumur umum) di pantai Gusong Cine Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung.	Permohonan pembangunan/pembuatan MCK (WC dan sumur umum) di pantai Gusong Cine Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Pantai Gusong Cine, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
500	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan	Permohonan pembangunan/penambahan lampu penerangan jalan umum di sepanjang jalan Desa Padang Kecamatan Manggar.	Permohonan pembangunan/penambahan lampu penerangan jalan umum di sepanjang jalan Desa Padang Kecamatan Manggar.	Dinas Perhubungan	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	FEZZY UKTOLSEJA, SE, MM	Verifikasi TAPD
501	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan pembangunan/perbaikan jalan tembus Jangkang-Kembiri.	Permohonan pembangunan/perbaikan jalan tembus Jangkang-Kembiri.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Kecamatan Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
502	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan pembangunan/perbaikan jalan tembus Jangkang-Lidun.	Permohonan pembangunan/perbaikan jalan tembus Jangkang-Lidun.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Kec. Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
503	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan pembangunan-pembuatan sumur bor sebagai sumber air bersih warga di pantai Gusong Cine.	Permohonan pembangunan-pembuatan sumur bor sebagai sumber air bersih warga di pantai Gusong Cine.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Gusong Cine, Ds. Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
504	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembuatan drainase di sepanjang Jl. Aik Rengas, RT.02, Dusun Nibung Punggur, Desa Mentawak.	Permohonan pembuatan drainase di sepanjang Jl. Aik Rengas, RT.02, Dusun Nibung Punggur, Desa Mentawak.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Jl. Aik Rengas, RT.02, Dusun Nibung Punggur, Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
505	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan pembuatan gorong-gorong di RT.08 Desa Lilangan.	Permohonan pembuatan gorong-gorong di RT.08 Desa Lilangan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.08, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
506	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan pengadaan air bersih untuk masyarakat di Dusun Kundor, Desa Batu Penyu, yaitu pembangunan sumur bor.	Permohonan pengadaan air bersih untuk masyarakat di Dusun Kundor, Desa Batu Penyu, yaitu pembangunan sumur bor.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
507	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan pengadaan air bersih yaitu pembangunan sumur bor di Dusun Sumping, Desa Batu Penyu.	Permohonan pengadaan air bersih yaitu pembangunan sumur bor di Dusun Sumping, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Sumping, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
508	Masih adanya sarana dan prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Permohonan pengadaan meubelair sekolah di SDN 12 Gantung.	Permohonan pengadaan meubelair sekolah di SDN 12 Gantung.	Dinas Pendidikan	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	SDN 12 Gantung, Ds. Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi TAPD
509	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan pengadaan untuk penambahan pipanisasi air bersih berbasis masyarakat yang belum terdistribusikan ke rumah-rumah. perlu diketahui untuk pada saat ini sudah terbentuk kelompok masyarakat yaitu Pokmas Aik Tanah Mate, namun belum semuanya air bersih terdistribusikan ke masyarakat.	Permohonan pengadaan untuk penambahan pipanisasi air bersih berbasis masyarakat yang belum terdistribusikan ke rumah-rumah. Dusun Kundor, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Kundor, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
510	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan pengaspalan jalan dari RT. 004 - RT. 003, Dusun Cendil, Desa Cendil.	Permohonan pengaspalan jalan dari RT. 004 - RT. 003, Dusun Cendil, Desa Cendil.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Dusun Cendil, Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
511	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan	Permohonan pengaspalan jalan di Dusun Limau Manis, sepanjang 1400 m dengan lebar 3 m.	Permohonan pengaspalan jalan di Dusun Limau Manis, sepanjang 1400 m dengan lebar 3 m. Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Dusun Limau Manis, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	Pelebaran Jalan Menuju Standar								
51 2	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan pengaspalan jalan disebelah GOR, Desa Cendil sampai dengan hutan Kerangas.	Permohonan pengaspalan jalan disebelah GOR, Desa Cendil sampai dengan hutan Kerangas Kecamatan Kelapa Kampit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
51 3	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan pengaspalan jalan ke air PDAM RT. 05, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit.	Permohonan pengaspalan jalan ke air PDAM RT. 05, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	RT. 05, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
51 4	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan pengaspalan jalan menuju ke TPU Al-Barkah, Desa Batu Penyau.	Permohonan pengaspalan jalan menuju ke TPU Al-Barkah, Desa Batu Penyau.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Batu Penyau, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
51 5	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan pengaspalan Jl. Aik Keluning, RT.23, Dusun Lidun menuju ke arah Jl. Parit, Desa Batu Penyu.	Permohonan pengaspalan Jl. Aik Keluning, RT.23, Dusun Lidun menuju ke arah Jl. Parit, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Lidun, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
51 6	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan tanggul/Talud, saluran Pembuangan utama menuju Sungai dan normalisasi pada daerah/Kawasan yang terdampak luapan, Pasang Surut,erosi Sungai dan pendangkalan sungai/anak Sungai	Permohonan pengerukan/pembersihan alur air sungai jembatan Stela (RT.02) hingga Aik Pisang, Desa Batu Penyu.	Permohonan pengerukan/pembersihan alur air sungai jembatan Stela (RT.02) hingga Aik Pisang, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
51 7	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan penimbunan/penambalan jalan yang berlubang di Jl. Aik Keluning (Kampung KB), Desa Batu Penyu.	Permohonan penimbunan/penambalan jalan yang berlubang di Jl. Aik Keluning (Kampung KB), Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Aik Keluning (Kampung KB), Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
518	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan peningkatan jalan aspal di Jl. Sudirman, Dusun Lidun, Desa Batu Penyu.	Permohonan peningkatan jalan aspal di Jl. Sudirman, Dusun Lidun, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Sudirman, Dusun Lidun, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
519	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan peningkatan PAMSIMAS di Dusun Air Asam, Kecamatan Dendang.	Permohonan peningkatan PAMSIMAS di Dusun Air Asam, Kecamatan Dendang.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Air Asam, Kecamatan Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
520	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan peningkatan pelebaran jalan aspal dari RT.13 sampai RT.024 Dusun Lidun, Desa Batu Penyu.	Permohonan peningkatan pelebaran jalan aspal dari RT.13 sampai RT.024 Dusun Lidun, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dsn. Lidun, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
521	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan	Permohonan perbaikan dan pelebaran jalan di sepanjang Jl. Sudirman, Desa Batu Penyu dikarenakan jalan telah rusak berat dan rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.	Permohonan perbaikan dan pelebaran jalan di sepanjang Jl. Sudirman, Desa Batu Penyu dikarenakan jalan telah rusak berat dan rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Sudirman, Dusun Kundor, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	Pelebaran Jalan Menuju Standar								
52 2	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan perbaikan dan pembangunan jalan setapak di Jl. Kenanga RT.06 Desa Lenggang di sebelah lapangan sepak bola PEROL.	Permohonan perbaikan dan pembangunan jalan setapak di Jl. Kenanga RT.06 Desa Lenggang di sebelah lapangan sepak bola PEROL.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Kenanga, RT.06, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah
52 3	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan perbaikan dan pengaspalan jalan pelabuhan nelayan di Dusun Semalar, Desa Dendang, Kecamatan Dendang.	Permohonan perbaikan dan pengaspalan jalan pelabuhan nelayan di Dusun Semalar, Desa Dendang, Kecamatan Dendang.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Semalar, Desa Dendang, Kecamatan Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
52 4	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang	Permohonan perbaikan jalan aspal dan pembangunan saluran drainase di sepanjang jalan Dusun Padang Sumping, Desa Batu Penyu.	pembangunan saluran drainase di sepanjang jalan Dusun Padang Sumping, Desa Batu Penyu. Dusun Padang Sumping, Ds. Batu Penyu, Kecamatan Gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Padang Sumping, Ds. Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	rawan banjir/Genangan								
525	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan perbaikan jalan aspal di Jl. Konjim, RT.027, Parit Tebu, Desa Batu Penyu.	Permohonan perbaikan jalan aspal di Jl. Konjim, RT.027, Parit Tebu, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Konjim, RT.027, Parit Tebu, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
526	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan perbaikan jalan aspal di sepanjang jalan Dusun Padang Sumping, Desa Batu Penyu.	Permohonan perbaikan jalan aspal di sepanjang jalan Dusun Padang Sumping, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Padang Sumping, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah
527	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan perbaikan jalan aspal yang rusak di sepanjang Jl. Air Jenjang, Dusun Sumping, Desa Batu Penyu.	Permohonan perbaikan jalan aspal yang rusak di sepanjang Jl. Air Jenjang, Dusun Sumping, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Air Jenjang, Dusun Sumping, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
528	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan perbaikan jalan di depan toko KKO, RT. 04, Dusun Selindang, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit.	Permohonan perbaikan jalan di depan toko KKO, RT. 04, Dusun Selindang, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Dusun Selindang, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
529	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan perbaikan jalan di jalan RT.05 RW.01, Desa Lilangan.	Permohonan perbaikan jalan di jalan RT.05 RW.01, Desa Lilangan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.05 RW.01, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUPARMAN	Verifikasi Perangkat Daerah
530	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan perbaikan jalan di Jl. Air Bata, RT. 03 RW. 02, Dusun Rumbai, Desa Pembaharuan - tepatnya arah menuju ke TPU.	Permohonan perbaikan jalan di Jl. Air Bata, RT. 03 RW. 02, Dusun Rumbai, Desa Pembaharuan - tepatnya arah menuju ke TPU.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Jl. Air Bata, RT. 03 RW. 02, Dusun Rumbai, Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
531	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan perbaikan jalan di RT. 01 RW. 01 (di depan rumah Bapak Tabrani).	Permohonan perbaikan jalan di RT. 01 RW. 01 (di depan rumah Bapak Tabrani). Dusun Penirukan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	RT. 01 RW. 01, Dusun Penirukan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
53 2	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan perbaikan jalan di RT.07, Dusun Limbongan II, Desa Limbongan, Kecamatan Gantung.	Permohonan perbaikan jalan di RT.07, Dusun Limbongan II, Desa Limbongan, Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.07, Dusun Limbongan II, Desa Limbongan, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah
53 3	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan perbaikan jalan di sepanjang Jl. Sudirman Desa Batu Penyu di mulai dari RT.06 sampai RT.024 dikarenakan jalan telah mengalami rusak berat.	Rehabilitasi jalan yang rusak di sepanjang Jl. Sudirman Desa Batu Penyu di mulai dari RT.06 sampai RT.024 dikarenakan jalan telah mengalami rusak berat.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Sudirman, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
53 4	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan perbaikan jalan rusak di RT. 02 RW. 01, Dusun Penirukan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit.	Permohonan perbaikan jalan rusak di RT. 02 RW. 01, Dusun Penirukan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	RT. 02 RW. 01, Dusun Penirukan, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
53 5	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan perbaikan jalan umum yang rusak di sepanjang Jl. Jend. Sudirman Desa Lenggang, Kecamatan Gantung.	Permohonan perbaikan jalan umum yang rusak di sepanjang Jl. Jend. Sudirman Desa Lenggang, Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Jend. Sudirman Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
536	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan perbaikan jalan yang rusak di Jl. Selindang, RT. 04 RW. 02, Dusun Selindang, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit.	Permohonan perbaikan jalan yang rusak di Jl. Selindang, RT. 04 RW. 02, Dusun Selindang, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Jl. Selindang, RT. 04 RW. 02, Dusun Selindang, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
537	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan perbaikan jembatan Aik Bandung.	Permohonan perbaikan jembatan Aik Bandung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Aik Bandung, Desa Batu Penyau, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
538	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan perbaikan saluran drainase (talud) di sepanjang Jl. Diponegoro, Dusun Cangu, Desa Lenggang.	Permohonan perbaikan saluran drainase (talud) di sepanjang Jl. Diponegoro, Dusun Cangu, Desa Lenggang.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Diponegoro, Dusun Cangu, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
539	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan perbaikan saluran drainase (talud) di sepanjang Jl. Kenanga, Dusun Jaya, Desa Lenggang.	Permohonan perbaikan saluran drainase (talud) di sepanjang Jl. Kenanga, Dusun Jaya, Desa Lenggang.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Kenanga, Dusun Jaya, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSONO SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah
540	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan perbaikan saluran drainase di Jl. Bandes, RT. 02 - sepanjang 400 m.	Permohonan perbaikan saluran drainase di Jl. Bandes, RT. 02 - sepanjang 400 m, Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Jl. Bandes, RT. 02, Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
541	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan perbaikan saluran drainase di Jl. Bandes, RT. 02, Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit.	Permohonan perbaikan saluran drainase di Jl. Bandes, RT. 02, Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	Jl. Bandes, RT. 02, Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
54 2	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan perbaikan saluran drainase di sekeliling TK Melati Gantung - dikarenakan saluran drainase sudah rusak. Pada waktu musim penghujan sistem drainase tidak berfungsi dengan baik sehingga menyebabkan air mengalir dan menggenang di halaman TK.	Permohonan perbaikan saluran drainase di sekeliling TK Melati Gantung - dikarenakan saluran drainase sudah rusak. Pada waktu musim penghujan sistem drainase tidak berfungsi dengan baik sehingga menyebabkan air mengalir dan menggenang di halaman TK.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, Mohon dilengkapi dengan data pendukung	Jl. Melati No. C42 Gantung, Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah
54 3	Belum optimalnya pembudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	Permohonan perbaikan tribun lapangan sepak bola PEROL Desa Lenggang, Kecamatan Gantung.	Permohonan perbaikan tribun lapangan sepak bola PEROL Desa Lenggang, Kecamatan Gantung.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi TAPD
54 4	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan perhatian pemerintah daerah akan distribusi ketersediaan air bersih di Kecamatan Gantung di musim kemarau yang terkadang sering mati.	Permohonan perhatian pemerintah daerah akan distribusi ketersediaan air bersih di Kecamatan Gantung di musim kemarau yang terkadang sering mati.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
545	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan perhatian pemerintah daerah akan distribusi ketersediaan air bersih di Kecamatan Gantung di musim kemarau.	Permohonan perhatian pemerintah daerah akan distribusi ketersediaan air bersih di Kecamatan Gantung di musim kemarau.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah
546	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan rehabilitasi jalan di Jl. Pemanggan, Dusun Limau Manis, Desa Buding.	Permohonan rehabilitasi jalan di Jl. Pemanggan, Dusun Limau Manis, Desa Buding.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Jl. Pemanggan, Dusun Limau Manis, Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TOM HARYONO HARUN	Verifikasi Perangkat Daerah
547	Masih Belum Optimalnya SDM dalam kepengurusan koperasi dan pengelolaan UMKM	Permohonan untuk lebih diperhatikannya UMKM khususnya bagi ibu rumah tangga/perempuan yang mempunyai usaha kecil di Kecamatan Dendang.	Permohonan untuk lebih diperhatikannya UMKM khususnya bagi ibu rumah tangga/perempuan yang mempunyai usaha kecil di Kecamatan Dendang.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Kecamatan Dendang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi TAPD
548	Masih rendahnya kemampuan peternak untuk meningkatkan kapasitas usahanya	Permohonan untuk mengadakan program pelatihan pembuatan pakan ikan (pelet ikan) dan pembudidayaan Bibit ikan air tawar di Desa Aik Madu.	diadakan pelatihan pembuatan pakan ikan (pelet ikan) dan pembudidayaan Bibit ikan air tawar di Desa Aik Madu.	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Desa Air Madu, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	FEZZY UKTOLSEJ A, SE, MM	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
549	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan untuk merevitalisasi SPAM yang berada di Aik Itam, Desa Batu Penyu.	Permohonan untuk merevitalisasi SPAM yang berada di Aik Itam, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Aik Itam, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
550	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan untuk pelebaran jalan protokol dari RT.011 sampai RT.024, Dusun Lidun, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung.	Permohonan untuk pelebaran jalan protokol dari RT.011 sampai RT.024, Dusun Lidun, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Lidun, Desa Batu, Penyu Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
551	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan untuk pembangunan infrastruktur air minum (air bersih) berupa SPAM Desa di Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung.	Permohonan untuk pembangunan infrastruktur air minum (air bersih) berupa SPAM Desa di Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
552	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan untuk pembangunan saluran drainase di Jl. Diponegoro Dusun Cangu Desa Lenggang Kecamatan Gantung- tepatnya di belakang permukiman rumah warga.	Permohonan untuk pembangunan saluran drainase di Jl. Diponegoro Dusun Cangu Desa Lenggang Kecamatan Gantung	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Diponegoro, Dsn. Cangu, Ds. Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah
553	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Permohonan untuk pembangunan saluran drainase gorong-gorong lebih kurang 600 meter di sepanjang jalan di RT.03 Dusun Seberang Desa Selingsing Kecamatan Gantung.	Permohonan untuk pembangunan saluran drainase gorong-gorong lebih kurang 600 meter di sepanjang jalan di RT.03 Dusun Seberang Desa Selingsing Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.03, Dusun Seberang, Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUDARSON O SULAI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
554	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Permohonan untuk pembangunan sumur bor sebagai sumber air bersih di Desa Batu Penyu dipergunakan masyarakat untuk pemakaian dalam skala besar oleh masyarakat, adapun pengajuan permohonan ini dilakukan dikarenakan sumur (sistem tadah hujan) yang lama sudah tidak berfungsi (mengalami kekeringan).	Permohonan untuk pembangunan sumur bor sebagai sumber air bersih di Desa Batu Penyu	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi dengan data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan.	Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
555	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan untuk pembangunan/peningkatan Jl. Safei sampai dengan Jl. Konjim, dengan ukuran jarak jalan ± 500 m.	Permohonan untuk pembangunan/peningkatan Jl. Safei sampai dengan Jl. Konjim, dengan ukuran jarak jalan ± 500 m.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Safei, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
556	Tidak tersedianya pupuk subsidi untuk komoditi perkebunan	Permohonan untuk pengadaan bantuan pupuk bersubsidi untuk petani lada dan sawit masyarakat berskala kelompok tani, mengingat sekarang harga pupuk non subsidi sudah sangat mahal dan hampir tidak terjangkau bagi kami para petani lada dan sawit skala kecil. Dengan adanya pupuk subsidi tersebut dapat memenuhi kebutuhan pupuk pada tanaman.	Permohonan untuk pengadaan bantuan pupuk bersubsidi untuk petani lada dan sawit masyarakat berskala kelompok tani	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun Kundor, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
557	Masih adanya sarana dan prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Permohonan untuk pengadaan meubelair meja dan kursi di SDN 13 Gantung, dan SDN 14 Gantung.	Permohonan untuk pengadaan meubelair meja dan kursi di SDN 13 Gantung, dan SDN 14 Gantung.	Dinas Pendidikan	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Ds. Batu Penyu, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi TAPD
558	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan untuk pengaspalan jalan yang berada di Jl. Pembangunan menuju Jl. Sudirman, RT.13, Dusun Aik Kundor, Desa Batu Penyu.	Permohonan untuk pengaspalan jalan yang berada di Jl. Pembangunan menuju Jl. Sudirman, RT.13, Dusun Aik Kundor, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Aik Kundor, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
559	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan untuk peningkatan jalan (pengaspalan) di wilayah Dusun Gunong, Desa Jangkar Asam. Rencana pengaspalan dimulai dari RT.09 sampai RT.10, diperkirakan dengan ukuran jarak jalan ± 500 m (proposai terlampir).	Permohonan untuk peningkatan jalan (pengaspalan) di wilayah Dusun Gunong, Desa Jangkar Asam. Rencana pengaspalan dimulai dari RT.09 sampai RT.10, diperkirakan dengan ukuran jarak jalan ± 500 m (proposai terlampir).	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Gunong, Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
560	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan untuk peningkatan jalan (pengerasan jalan) dimulai dari wilayah/tempat Aik Bandung hingga ke jalan PLN dan sekaligus perbaikan jembatan yang berada di wilayah/tempat tersebut.	Permohonan untuk peningkatan jalan (pengerasan jalan) dimulai dari wilayah/tempat Aik Bandung hingga ke jalan PLN dan sekaligus perbaikan jembatan yang berada di wilayah/tempat tersebut.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Aik Bandung, Desa Batu Penyau, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
561	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan untuk peningkatan jalan (pengerasan jalan) dimulai dari jembatan Aik Rayak tembus hingga ke simpang Konjim diperkirakan ukuran panjang jalan ± sepanjang 700 m.	Permohonan untuk peningkatan jalan (pengerasan jalan) dimulai dari jembatan Aik Rayak tembus hingga ke simpang Konjim diperkirakan ukuran panjang jalan ± sepanjang 700 m.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Aik Rayak, Desa Batu Penyau, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
56 2	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan untuk peningkatan jalan (pengerasan jalan) PPIP yang terletak di Dusun Kundor, Simpang Jalan Pak Wan hingga tembus ke RT.018. Diperkirakan ukuran panjang jalan ± 800 m.	Permohonan untuk peningkatan jalan (pengerasan jalan) PPIP yang terletak di Dusun Kundor, Simpang Jalan Pak Wan hingga tembus ke RT.018. Diperkirakan ukuran panjang jalan ± 800 m.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Kundor, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
56 3	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan untuk peningkatan jalan tembus dimulai dari RT.18 sampai dengan RT.12 (Jalan TMMD).	Permohonan untuk peningkatan jalan tembus dimulai dari RT.18 sampai dengan RT.12 (Jalan TMMD).	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.18, Dusun Kundor, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
56 4	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan untuk perbaikan dan pengaspalan Jl. Sudirman dan Jl. Gusong Cine serta jalan-jalan yang berada di wilayah/bertempat di Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung.	Permohonan untuk perbaikan dan pengaspalan Jl. Sudirman dan Jl. Gusong Cine serta jalan-jalan yang berada di wilayah/bertempat di Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Dusun Kundor, RT.18, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
565	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan untuk perbaikan dan peningkatan Jl. Sudirman, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung.	Permohonan untuk perbaikan dan peningkatan Jl. Sudirman, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Jl. Sudirman, Dusun kundor, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
566	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan untuk perbaikan jalan aspal penghubung antara jembatan Aik Rayak (Jl. Safie) dengan Jl. Parit Tebu, Desa Batu Penyu.	Permohonan untuk perbaikan jalan aspal penghubung antara jembatan Aik Rayak (Jl. Safie) dengan Jl. Parit Tebu, Desa Batu Penyu.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Batu Penyu, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
567	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Permohonan untuk perbaikan Jl. Sudirman dan Jl. Gusong Cine dan jalan yang berada di wilayah/ bertempat di Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung.	Permohonan untuk perbaikan Jl. Sudirman dan Jl. Gusong Cine dan jalan yang berada di wilayah/ bertempat di Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	RT.11, Dusun Kundor, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SARDIDI, SE	Verifikasi Perangkat Daerah
568	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan tanggul/Talud, saluran Pembuangan utama menuju Sungai dan normalisasi pada daerah/Kawasan yang terdampak	rehab bandar pembangunan akhir menuju kulong teratai di wilayah Rt.13 Dusun Teratai Desa Lalang Jaya dikarenakan kalau hujan akan ada beberapa rumah yang tergenang	rehab bandar pembangunan akhir menuju kulong teratai di wilayah Rt.13 Dusun Teratai Desa Lalang Jaya dikarenakan kalau hujan akan ada beberapa rumah yang tergenang	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD Teknis, mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun Teratai Rt.13 Desa Lalang Jaya Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	luapan, Pasang Surut,erosi Sungai dan pendangkalan sungai/anak Sungai								
569	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang rawan banjir/Genangan	Rehab drainase sepanjang jalan di Dusun Kartini Desa Lalang kurb 300 meter	Rehab drainase sepanjang jalan di Dusun Kartini Desa Lalang kurb 300 meter Dusun kartini Desa Lalang Manggar	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon dilengkapi dengan data pendukung dan dipastikan lahan dalam kondisi CnC	Dusun kartini Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
570	Peningkatan jalan/Rehabilitasi jalan yang rusak /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan/pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dan Pelebaran Jalan Menuju Standar	rehabilitasi jalan setapak sepanjang 150 m	rehabilitasi jalan yang rusak sepanjang 150 Meter, RT 03-05 RW 02 DUSUN GAJAH MADA DESA MEKAR JAYA	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	RT 03-05 RW 02 DUSUN GAJAH MADA DESA MEKAR JAYA, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah
571	Masih adanya sarana dan prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Rehabilitasi sarana sekolah di SDN 9 Simpang Pesak seperti ruang perpustakaan, UKS, WC, dan ruang kelas	Rehabilitasi sarana sekolah di SDN 9 Simpang Pesak seperti ruang perpustakaan, UKS, WC, dan ruang kelas	Dinas Pendidikan	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	SDN 9 Simpang Pesak , Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	MARWAN	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
57 2	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan tanggul/Talud, saluran Pembuangan utama menuju Sungai dan normalisasi pada daerah/Kawasan yang terdampak luapan, Pasang Surut, erosi Sungai dan pendangkalan sungai/anak Sungai	rehabilitasi talud sepanjang 50 m	rehabilitasi talud sepanjang 50 Meter, RT 03, RT 04, RT 05 RW 02, Dusun Gajah Mada .desa Mekar Jaya	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mohon dilengkapi dengan data dukung, Usulan akan diteruskan ke OPD Teknis	RT 03, RT 04, RT 05 RW 02, Dusun Gajah Mada .desa Mekar Jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. JAFRI, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah
57 3	Masih Belum Optimalnya Pengelolaan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM	Rendahnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha serta kurang modal maka perlu bantuan sertifikasi halal gratis untuk pelaku UMKM dan Bantuan Modal	bantuan sertifikasi halal gratis untuk pelaku UMKM dan Bantuan Modal Desa Aik Madu	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan diteruskan, mohon agar dilengkapi data dukung untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut	Desa Aik Madu, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	AKHIRUDDIN, A.Md	Verifikasi TAPD
57 4	Belum terpenuhinya akses layanan air minum yang terlindungi yang aman dan berkelanjutan, perbaikan dan pemeliharaan SPAM serta pengelolaan SPAM Pedesaan oleh Kelompok Pengelola maupun Desa	Revitalisasi sumber mata air, embung-embung yang ada saat ini supaya tidak rusak oleh penambang di luar wilayah IUP dan kesediaan sumber air bersih tetap tersedia kedepannya, prioritas utama yaitu Kolong Cole'k.	Revitalisasi sumber mata air, embung-embung yang ada saat ini supaya tidak rusak oleh penambang di luar wilayah IUP dan kesediaan sumber air bersih tetap tersedia kedepannya, prioritas utama yaitu Kolong Cole'k.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	Drs. HUSAINI RASYID, M.Si	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
575	Belum optimalnya pembudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	sarana dan prasarana olahraga untuk volly dan bola kaki	sarana dan prasarana olahraga untuk volly dan bola kaki RT. 04 DUSUN SEBERANG. DESA SELINSING	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	RT. 04 DUSUN SEBERANG. DESA SELINSING, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	TJONG JUNG MIN	Verifikasi TAPD
576	Masih Belum Optimalnya SDM dalam kepengurusan koperasi dan pengelolaan UMKM	Sulitnya mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian membuat muda mudi sama sekali tidak mendapatkan kesempatan bekeja disuatu instansi hal ini membuat muda mudi beralih ke bidang pertanian ataupun perikanan. seharusnya ada data/perdataan terbaca yang dilakukan setiap tahunnya untuk melihat seberapa banyak pengangguran dan pelaku UMKM terbaca sehingga akan lebih memudahkan dalam menyalurkan bantuan.	Sulitnya mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian membuat muda mudi sama sekali tidak mendapatkan kesempatan bekeja disuatu instansi hal ini membuat muda mudi beralih ke bidang pertanian ataupun perikanan. Dusun Gunung Desa Lalang Jaya	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Usulan diteruskan untuk dilakukan pembahasan	Dusun Gunung Desa Lalang Jaya, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
577	Pembangunan saluran drainase dan rehabilitasi, pemeliharaan saluran drainase yang rusak dan yang tidak berfungsi di daerah perkotaan/permukiman penduduk dan lingkungan yang	Tidak adanya drainase di desa lilangan yang menyebabkan tergenangnya air, mohon dibuatkan drainase untuk desa lilangan	Tidak adanya drainase di desa lilangan yang menyebabkan tergenangnya air, mohon dibuatkan drainase untuk desa lilangan	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Diteruskan ke OPD terkait. Mohon kiranya dilengkapi data dukung berupa foto lokasi dan proposal kegiatan	Agus Mulyo desa lilangan kecamatan gantung, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SUHARTINI	Verifikasi Perangkat Daerah

NO	USULAN DPRD				HASIL VERIFIKASI			PENGUSUL	STATUS
	USULAN	MASALAH	REKOMENDASI SEKWAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	ALAMAT LOKASI	USULAN KE		
	rawan banjir/Genangan								
578	Masih adanya kelompok tani yang belum mendapatkan sekolah lapang	Untuk ketahanan pangan Dusun Sawah, mohon bantuan pembentukan kelompok tani yang belum berjalan agar cepat berjalan	Untuk ketahanan pangan Dusun Sawah, mohon bantuan pembentukan kelompok tani yang belum berjalan agar cepat berjalan	Dinas Pertanian dan Pangan	Usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Dusun sawah Desa Lalang Manggar, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	ROHALBA, S.Pt	Verifikasi Perangkat Daerah
579	Masih adanya Prasarana pertanian yang harus di penuhi yaitu pintu air, jalan usaha tani, dan sarana pengairan	Usulan jalan lanjutan usaha tani sawah Air Tungkup sepanjang 1 km	Usulan jalan lanjutan usaha tani sawah Air Tungkup sepanjang 1 km A.n Edi Sunarta, Wiraswasta, RT.23 Dusun Langgang Desa Lintang	Dinas Pertanian dan Pangan	usulan akan diteruskan untuk dibahas lebih lanjut	Edi Sunarta, Wiraswasta, RT.23 Dusun Langgang Desa Lintang, Kab. Belitung Timur	Kabupaten / Kota	SULADI	Verifikasi Perangkat Daerah

Sumber: <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/usulan/usulan-pokir/monitor>

5.7. RUMUSAN USULAN HASIL ASPIRASI MASYARAKAT - MUSRENBANG

Tabel 5.8 Rumusan Usulan Hasil Aspirasi Masyarakat-Musrenbang Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025

NO	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
1	Kurang optimalnya Pengelolaan Pembinaan Bina Mental Spiritual dibidang keagamaan dan lembaga keagamaan	melihat di lapangan bagaimana kurangnya kaderisasi di dalam Fardhu Kifayah untuk itulah diperlukan Pelatihan Fardhu Kifayah demi menjaga proses kaderisasi	Desa Lenggang, Kab. Belitung Timur	Lenggang	Gantung	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	FACHRIZAL	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Sekretariat Daerah Kab.Beltim	Pembinaan
2	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita pengga duh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamanan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	tidak adanya penerangan berupa lampu jalan di sepanjang Jl Kenanga s/d Jl. Diponegoro Rt. 11 sehingga menyebabkan rentan kecelakaan terjadi dikarenakan jalan gelap	Jl. Kenanga RT. 06 dan Jl. Diponegoro RT. 09, RT. 10, RT. 11, RT. 12, Kab. Belitung Timur	Lenggang	Gantung	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	FACHRIZAL	Usulan diteruskan ke OPD teknis. Mohon untuk dilengkapi dengan data dukung	Diteruskan ke Dinas Perhubungan Kab.Beltim	di akomodir 2 Titik PJU Konvensional

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
3	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita pengkaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamanan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Tidak adanya Lampu penerangan yang berada di Jl. Kh Dewantara Rt. 19 yang mana menyebabkan rentan terjadi lakalantas	Jl. Kh Dewantara Rt. 19 Dusun Jaya Desa Lenggang, Kab. Belitung Timur	Lenggang	Gantung	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	FACHRIZAL	diteruskan ke OPD Teknis. agar dilengkapi dengan data dukung. status lahan harus CnC	Diteruskan ke Dinas Perhubungan Kab.Belim	di akomodir 2 titik PJU Konvensional
4	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Kondisi saat ini gedung perpustakaan rusak di beberapa bagian (REHABILITASI GEDUNG PERPUSTAKAAN)	SD NEGERI 2 DENDANG RT.09 , Kab. Belitung Timur	Jangkang	Dendang	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	ROSDIANSY AH	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	-	Diakomodir Rehab Perpustakaan
5	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Kondisi saat ini gedung WC Murid rusak di beberapa bagian (REHAB WC MURID)	SD NEGERI 2 DENDANG RT.09, Kab. Belitung Timur	Jangkang	Dendang	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	ROSDIANSY AH	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	-	Diakomodir Rehab WC

NO	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
6	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Menengah Pertama yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Rehabilitasi sarpras dan utilitas sekolah yg rusak (SEKOLAH MENENGAH PERTAMA), (Rehab Ruang Kelas SMPN 1 Dendang (Kondisi saat ini SMPN 1 Dendang terdapat tiga Gedung/Ruang Kelas Rusak)	SMPN 1 DENDANG, DUSUN AIR ASAM RT.027 RW.04 DESA JANGKANG , Kab. Belitung Timur , Kab. Belitung Timur	Jangkang	Dendang	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	ROSDIANSY AH	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	-	Diakomodir Rehab Ruang Kelas 2 Ruang
7	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Menengah Pertama yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Masih Kurangnya Komputer Lab di SMPN 1 Dendang ,(Komputer Pc Windows SMPN 1 Dendang)	SMPN 1 DENDANG, DUSUN AIR ASAM RT.027 RW.04 DESA JANGKANG , Kab. Belitung Timur , Kab. Belitung Timur	Jangkang	Dendang	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	ROSDIANSY AH	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	-	Diakomodir Pengadaan Komputer
8	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Kondisi saat ini di sekolah belum memiliki LAB Kompuer dan Perangkat komputer Penunjang kegiatan belajar siswa. (Pembangunan ruang LAB Komputer Beserta Perangkat Komputer di SDN 4 Dendang)	SDN 4 Dendang Dsn. Air Asam Rt.04 Rw.01 Desa Jangkang , Kab. Belitung Timur	Jangkang	Dendang	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	ROSDIANSY AH	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	-	Diakomodir Pembangunan Lab. Komputer

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
9	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Ruang Laboratorium telah mengalami kerusakan yang mana harus segera dilakukan Rehabilitasi atas ruang Laboratorium SDN 7 GANTUNG	JL. Melati Rt. 17 Dusun Lenggang Desa Lenggang Kecamatan Gantung, Kab. Belitung Timur	Lenggang	Gantung	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	FACHRIZAL	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Dinas Pendidikan Kab.Beltim	Diakomodir
10	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Adanya sarana dan prasarana yang rusak berat berupa Meja siswa berupa 163 Buah dan Kursi 163 Buah dan harus segera di adakan pengadaan Mobelair sejumlah yang di atas (SDN 7 Gantung)	JL. Melati Rt. 17 Dusun Lenggang Desa Lenggang Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Lenggang	Gantung	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	FACHRIZAL	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Dinas Pendidikan Kab.Beltim	Diakomodir
11	Masih minimnya sarana kegiatan penangkapan ikan yaitu berupa kapal penangkap ikan berukuran <3 GT, Mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan (Bubu kepiting, waring, kawat bubu, Jaring), alat bantu penangkapan ikan (GPS dan Fish Finder), dan Bahan pembuatan kapal fiber	bantuan sarana dan prasarana kelompok nelayan	Desa Air Kelik, Kab. Belitung Timur	Air Kelik	Damar	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	SUHARDI	usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon untuk dilengkapi data dukung	di teruskan ke OPD terkait	Akan diakomodir pada TA. 2025, sudah dilakukan verifikasi lapangan Data Lengkap

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
12	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	perbaikan ruang UKS	SDN 08 DAMAR, Kab. Belitung Timur	Air Kelik	Damar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	SUHARDI	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	-	Diakomodir Rehab UKS
13	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Perlu Rehabilitasi Ruang Kelas 1 Paket dengan Pagu Anggaran Rp 120.000.000,-	SD Negeri 12 Manggar, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	IZHAR	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Proses	Diakomodir
14	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Perlunya Meubiler Kelas sebanyak 1 Paket dengan Pagu Anggaran Rp 50.000.000,00	SD Negeri 20 Manggar, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	IZHAR	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir pada TA 2025

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
15	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita penggaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamanan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Belum adanya lampu lingkungan di sebagian kawasan di wilayah Desa mempaya menyebabkan resiko berkendara tinggi.	Dsn mempaya 1 Rt 4, Dsn Mempaya II Rt 9, Dsn Mempaya III Rt 13, Kab. Belitung Timur	Mempaya	Damar	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	YULI DARTA	Usulan diteruskan ke OPD teknis	di teruskan ke OPD terkait	Diakomodir 2 unit PJUTS
16	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita penggaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamanan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Tidak adanya pembatas kecepatan di sepanjang jalan dekat sekolah PAUD dan TPA mengakibatkan pengendara menjadi tidak hati-hati akan banyaknya anak-anak sekolah.	Dsn Mempaya I RT 5, Dsn Mempaya III Rt 12, Kab. Belitung Timur	Mempaya	Damar	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	YULI DARTA	Usulan diteruskan ke OPD teknis	di teruskan ke OPD terkait	Diakomodir 6 titik speedbump

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
17	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Menengah Pertama yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Meubilair Kelas (Meja dan Kursi) sebanyak 64 Set dengan Pagu Anggaran Rp 75.000.000,00	SMP Negeri 2 Manggar, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	IZHAR	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir Pengadaan Mebel Sekolah
18	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Menengah Pertama yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Rehabilitasi Ruang Kelas 7 dan Ruang Kelas 8 sebanyak 4 Paket dengan Pagu Anggaran Rp 1.400.000.000,00	SMP Negeri 2 Manggar, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	IZHAR	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Proses	Diakomodir Rehab Ruang Kelas 2 Ruang
19	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita pengaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengaman jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Masih sangat kurangnya lampu penerangan jalan sebanyak 40 unit di wilayah desa tanjung batu itam	Sedesa Tanjung Batu Itam, Kab. Belitung Timur	Tanjung Batu Itam	Simpang Pesak	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	HASNAN	Diteruskan ke OPD Teknis. Agar dilengkapi dengan data dukung. Status lahan harus CnC	diteruskan ke dinas perhubungan dengan usulan sebanyak 40 unit terbagi dalam 3 dusun, agar desa melampirkan atau menyampaikan data pendukung	di akomodir 2 unit PJUTS, 8 titik PJU Konvensional

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
20	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita penggaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamanan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Dibutuhkannya beberapa titik marka jalan sedesa Tanjung Batu Itam	Sedesa Tanjung Batu Itam, Kab. Belitung Timur	Tanjung Batu Itam	Simpang Pesak	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	HASNAN	Diteruskan ke OPD Teknis. Agar dilengkapi dengan data dukung. Status lahan harus CnC	Usulan diterima dan desa agar menyiapkan data pendukung	di akomodir 2 titik speedbump
21	Belum tersedianya koneksi internet dilokasi publik dan tempat wisata	Dibutuhkannya 2 titik koneksi internet dilokasi Publik	Simpang Tugu Desa (Dsn. Tanjung Batu Itam Rt 004) dan Balai Polmas (Dsn. Tanjung Batu Air RT 009), Kab. Belitung Timur	Tanjung Batu Itam	Simpang Pesak	Dinas Komunikasi, Informatika , Statistik dan Persandian	Verifikasi TAPD	HASNAN	Mohon dilengkapi dengan dokumen pendukung, Usulan diteruskan ke OPD Teknis	Usulan diterima sebanyak 2 titik	tidak diakomodir karena tidak ada anggaran

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
22	Masih rendahnya kesadaran Nelayan untuk mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan terhadap resiko kecelakaan kerja (Asuransi Nelayan)	Dibutuhkannya Bantuan Premi Asuransi Nelayan	Sedesa Tanjung Batu Itam, Kab. Belitung Timur	Tanjung Batu Itam	Simpang Pesak	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	HASNAN	usulan diteruskan ke OPD teknis, mohon untuk dilengkapi data dukung	Usulan ditolak dikarenakan dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak 200 juta, agar desa menyiapkan data untuk disampaikan ke dinas	Akan diakomodir TA. 2025. Sudah dilakukan verifikasi lapangan. Mohon mengirimkan Daftar Nelayan yang akan diberikan Bantuan Premi Asuransi Nelayan ke Dinas Perikanan
23	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita pengaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamananan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Pengadaan lampu jalan kabupaten	Dusun Air Kelik dan Dusun AirLanci, Kab. Belitung Timur	Air Kelik	Damar	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	SUHARDI	diteruskan ke OPD Teknis. agar dilengkapi dengan data dukung. status lahan harus CnC	di teruskan ke OPD terkait	Diakomodir sebanyak 2 titik PJU Konvensional

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
24	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita pengaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamanan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Pengadaan speedbum	Dusun Air Kelik dan Air Lanci, Kab. Belitung Timur	Air Kelik	Damar	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	SUHARDI	diteruskan ke OPD Teknis. agar dilengkapi dengan data dukung	di teruskan ke OPD terkait	Diakomodir sebanyak 2 titik Speedbump
25	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Menengah Pertama yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	adanya meja dan kursi siswa yang telah rusak sejumlah 136 Buah terdiri dari meja 136 buah dan meja 136 buah dan hal ini harus segera ditindaklanjuti dengan segera SDN 2 Gantung	Jl. Laskar Pelangi Rt. 19 Dusun Teratai Desa Lenggang, Kab. Belitung Timur	Lenggang	Gantung	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	FACHRIZAL	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Dinas Pendidikan Kab.Beltim	Diakomodir

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
26	Masih minimnya sarana kegiatan penangkapan ikan yaitu berupa kapal penangkap ikan berukuran <3 GT, Mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan (Bubu kepiting, waring, kawat bubu, Jaring), alat bantu penangkapan ikan (GPS dan Fish Finder), dan Bahan pembuatan kapal fiber	terkendala dengan harga mesin dan jala yang mahal	desa cendil, Kab. Belitung Timur	Cendil	Kelapa Kampit	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	EDDY	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut	proses	Akan diakomodir TA, 2025. Sudah dilakukan verifikasi lapangan.
27	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Wc yang ada tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada	SD Negeri 3 Gantung, Kab. Belitung Timur	Gantung	Gantung	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	ARIEF KUSMARYA DI	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Dinas Pendidikan Kab.Beltim	Diakomodir Pembangunan WC Baru
28	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Menengah Pertama yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Pemabangunan laboratorium IPA	SMP 02 DAMAR, Kab. Belitung Timur	Air Kelik	Damar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	SUHARDI	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	-	Diakomodir Pembangunan Lab. IPA

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
29	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita penggaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamanan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	belum terpenuhi pasilitas penerangan jalan dan rambu-rambu lalu lintas	Diseluruh Dusun Gajah Mada, Dusun Kalmoa, Dusun Numpang Empat, Dusun Kabung Jaya, Kab. Belitung Timur	Mekar Jaya	Manggar	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	SYAMSUDIN	Usulan diteruskan ke OPD Teknis	Proses	di akomodir 1 unit PJUTS dan 1 titik Speedbump
30	Masih adanya sarana & prasarana rumah ibadah yang perlu ditingkatkan	Perlu dana HIBAH dalam penyelesaian Masjid Al Akbar Melalui yayasan Alakbar Almuttaqin Air Nangka	Rt 12 Masjid Al Akbar, Kab. Belitung Timur	Balok	Dendang	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	SUHANDRA	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	-	Proposal usulan hibah sudah lengkap sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022
31	Masih kurangnya upaya fasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam menumbuhkan Wirausaha Muda yang mandiri	Perlu pelatihan Pertanian Holtikultura	Desa Balok, Kab. Belitung Timur	Balok	Dendang	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	SUHANDRA	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	-	Diakomodir, penyesuaian pada anggaran yang tersedia dan yang akan dilaksanakan kegiatan oleh bidang yang bersangkutan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
32	Masih adanya sarana & prasarana PAUD yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Perlu Pembangunan Mushola	RT.07 TK N PEMBINA, Kab. Belitung Timur	Balok	Dendang	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	SUHANDRA	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	-	Diakomodir Pembangunan Mushola
33	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Perlu Rehab Gudang, R. Kepsek, WC Siswa, rumah Dinas	Rt 10 SD N 03 DDG, Kab. Belitung Timur	Balok	Dendang	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	SUHANDRA	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	-	Diakomodir Rehab Ruang Kepala Sekolah
34	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Perlu rehab wc, rumha dinas, RKB, WC, dan Perpus	Rt 03 SD N 5 DDG, Kab. Belitung Timur	Balok	Dendang	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	SUHANDRA	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	-	Diakomodir rehab ruang kelas 2 ruang
35	masih terbatasnya Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif	Perlu Pelatihan dan Pembinaan Pelaku Wisata	Desa Balok, Kab. Belitung Timur	Balok	Dendang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Verifikasi TAPD	SUHANDRA	usulan akan diteruskan ke dinas terkait	-	usulan diakomodir

NO	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
36	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita penggaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamananan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Perlu penerangan pangkalan nelayan dan jalan	Keramat Sisilan, Pintu masuk TPU, Pangkalan Kik Jupri, Pangkalan Kik Juk & Pangkalan Batu Tiram, Kab. Belitung Timur	Balok	Dendang	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	SUHANDRA	agar dilengkapi dengan data dukung berupa foto dan proposal. status lahan harus CnC.	-	di akomodir sebanyak 1 unit PJUTS
37	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita penggaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamananan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Perlu penerangan lampu jalan	Desa Balok, Kab. Belitung Timur	Balok	Dendang	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	SUHANDRA	agar dilengkapi dengan data dukung berupa foto dan proposal. status lahan harus CnC.	-	di akomodir 1 unit PJUTS

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
38	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita penggaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamananan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Perlu rambu jalan berupa zebra kros dan Polisi Tidur	Desa Balok, TK, SD, SMP, TPA, MASJID, PAUD, BALAI DUSUN dll, Kab. Belitung Timur	Balok	Dendang	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	SUHANDRA	agar dilengkapi dengan data dukung berupa foto dan proposal. status lahan harus CnC.	-	di akomodir 2 titik speedbump
39	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita penggaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamananan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Penerangan Jalan Umum di Dusun Air Rusa masih kurang memadai, untuk itu perlu tambahan Lampu Jalan.	Dusun Air Rusa, Kab. Belitung Timur	Dukong	Simpang Pesak	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	IMANDA PATRIA	Usulan diteruskan ke OPD Teknis	Usulan diterima sebanyak 9 titik dari 12 titik, lokasi di Dsn. Air Rusa Desa Dukong, dan desa agar melengkapi data pendukung	Di akomodir 2 unit PJUTS

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
40	Masih adanya sarana & prasarana PAUD yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Dibutuhkannya Pagar Lanjutan TK N Pedesaan Tanjung Batu Itam	TK N Pedesaan Tanjung Batu Itam, Dsn. Gosong Lantai RT 001, Kab. Belitung Timur	Tanjung Batu Itam	Simpang Pesak	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	HASNAN	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Usulan ditolak, perlu survey	-
41	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita pengaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamanan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Kurangnya penerangan dibeberapa ruas jalan	JL. Negeri 1, Jalan Negeri 2 dan Jl. PDM DKE, Kab. Belitung Timur	Gantung	Gantung	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	ARIEF KUSMARYADI	Usulan diteruskan ke OPD Teknis,	Diteruskan ke Dinas Perhubungan Kab.Beltim	di akomodir 7 titik PJU Konvensional
42	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Dibutuhkannya Pembangunan WC Guru	SD N 8 Simpang Pesak, Dsn Tanjung Batu Air, Kab. Belitung Timur	Tanjung Batu Itam	Simpang Pesak	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	HASNAN	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Usulan ditolak, perlu survey	Diakomodir Rehab WC

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
43	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Dibutuhkannya Rehab WC Siswa	SD N 8 Simpang Pesak, Dsn. Tanjung Batu Air RT 010, Kab. Belitung Timur	Tanjung Batu Itam	Simpang Pesak	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	HASNAN	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Usulan ditolak, perlu survey	-
44	Masih adanya sarana & prasarana PAUD yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Pemasangan Kanopi penghubung kelas B1 dan A1, penghubung dari ruang TU ke Aula TK Negeri Pembina Kelapa Kampit	Jalan Beringin II Desa Mentawak, Kab. Belitung Timur	Mentawak	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	AGUNG PERMANA	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir Pembangunan Atap Penghubung
45	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Menengah Pertama yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Perlunya Rehab Ruangan Kelas 8A SMP Negeri 1 Kelapa Kampit	Jalan Beringin II Dusun Padang Rt.006/Rw.003, Kab. Belitung Timur	Mentawak	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	AGUNG PERMANA	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir Rehab Ruang Kelas 2 Ruang
46	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Perlunya Kursi dan meja Belajar Siswa/Siswi Sebanyak 100 buah SD Negeri 3 Kelapa Kampit	Jalan Raya Manggar Dusun Padang, Kab. Belitung Timur	Mentawak	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	AGUNG PERMANA	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir Pengadaan Mebel Sekolah

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
47	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Tidak Layaknya Bangunan Gedung/Ruang Kelas Yang Rusak	Dsun Buding RT.006 RW.003, Kab. Belitung Timur	Buding	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	MARDINI	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir 1 Ruang
48	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Belum Adanya Mushola Yang Memadai	Dusun Limau Manis RT.014 RW.006, Kab. Belitung Timur	Buding	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	MARDINI	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir Rehab Mushola
49	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	REHAP RUANG KELAS SEBANYAK 2 RUANG AGAR LEBIH MEMBERIKAN KEAMANAN BAGI SISWA SISWI SDN 11 KELAPA KAMPIT	JALAN RAYA SIJUK RT 008 RW 003 DUSUN PESARAKAN , Kab. Belitung Timur	Cendil	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	EDDY	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir 2 Ruang
50	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita penghaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamanan jalan, lampu peringatan tenaga	Banyak titik belum ada nya penerangan lampu lingkungan	Desa Pembaharuan , Kab. Belitung Timur	Pembaharuan	Kelapa Kampit	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	PAMRI	Mohon dilengkapi dengan data pendukung (Proposal dan foto)	proses	Diakomodir 4 titik PJU Konvensional

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
	surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten										
51	Rendahnya Kualitas prasarana pendukung kegiatan perikanan tangkap (Pemeliharaan Shelter Nelayan)	KURANNGYA PRASARANA PENUNJANG BAGI NELAYAN SEPERTI MESIN DIESEL 24 PK, GENSET 1500 WATT, PUKAT IKAN 2,5 INC, JARING MILENIUMM 4 INC, FISH FINDER FRUNO FCV 688 BAGI KELOMPOK SUAK MENGGURU,	DESA CENDIL, Kab. Belitung Timur	Cendil	Kelapa Kampit	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	EDDY	usulan diteruskan, agar dilakukan verifikasi data kelengkapan usulan	proses	Akan diakomodir TA, 2025. Sudah dilakukan verifikasi lapangan. Proposal Lengkap
52	masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang layak di destinasi wisata, perlunya perbaikan sarana dan prasarana yang rusak dan kurang layak di destinasi wisata dan masih perlunya pengembangan objek wisata baru	Jembatan pintasan Tebat Rasau telah rusak sehingga wisatawan tidak bisa melintasi area tersebut	Dsn. Lintang Rt.01 Rw.01, Kab. Belitung Timur	Lintang	Simpang Renggang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Verifikasi TAPD	MAHMUDA	Agar verifikasi lapangan dan dipastikan status kepemilikan lahan	Diteruskan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	usulan diakomodir

NO	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
	sebagai alternatif pilihan berwisata										
53	Masih adanya sarana & prasarana PAUD yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Belum Adanya Pagar Sekolah Yang Memadai	Dusun Buding RT.006 RW.003 , Kab. Belitung Timur	Buding	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	MARDINI	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir Pembangunan Pagar
54	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita pengaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamanan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	MINIMNYA PENERANGAN DI AREA PARIWISATA PANTAI BATU PULAS	PANTAI BATU PULAS, Kab. Belitung Timur	Cendil	Kelapa Kampit	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	EDDY	Mohon dilengkapi dengan data pendukung (proposal / foto)	proses	di akomodir 2 unit PJUTS

NO	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
55	masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang layak di destinasi wisata, perlunya perbaikan sarana dan prasarana yang rusak dan kurang layak di destinasi wisata dan masih perlunya pengembangan objek wisata baru sebagai alternatif pilihan berwisata	KURANNGYA GAZBO / PENDOPO UNTUK WISATAWAN BERISTIRAHAT DI PANTAI BATU PULAS	PANTAI BATU PULAS, Kab. Belitung Timur	Cendil	Kelapa Kampit	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Verifikasi TAPD	EDDY	Usulan diteruskan, agar dilakukan verifikasi data kelengkapan usulan dan status lahan	proses	null
56	Masih minimnya sarana kegiatan penangkapan ikan yaitu berupa kapal penangkap ikan berukuran <3 GT, Mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan (Bubu kepiting, waring, kawat bubu, Jaring), alat bantu penangkapan ikan (GPS dan Fish Finder), dan Bahan pembuatan kapal fiber	Masih Minimnya Alat Penangkapan Ikan, Benih dan Pakan Ikan	Dusun Bukit Jaya RT.009 RW.004 (BAROKAH), Kab. Belitung Timur	Buding	Kelapa Kampit	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	MARDINI	usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut	proses	Akan diakomodir TA, 2025. Sudah dilakukan verifikasi lapangan. Proposal Lengkap

NO	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
57	masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang layak di destinasi wisata, perlunya perbaikan sarana dan prasarana yang rusak dan kurang layak di destinasi wisata dan masih perlunya pengembangan objek wisata baru sebagai alternatif pilihan berwisata	KURANGNYA FASILITAS INSTALASI AIR BERSIH DI PANTAI BATU PULAS	PANTAI BATU PULAS, Kab. Belitung Timur	Cendil	Kelapa Kampit	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Verifikasi TAPD	EDDY	Usulan diteruskan, agar dilakukan verifikasi data kelengkapan usulan dan status lahan	proses	usulan diakomodir
58	masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang layak di destinasi wisata, perlunya perbaikan sarana dan prasarana yang rusak dan kurang layak di destinasi wisata dan masih perlunya pengembangan objek wisata baru sebagai alternatif pilihan berwisata	KURANGNYA FASILITAS TOILET UMUM DAN TEMPAT BILAS BAGI WISATAWAN PANTAI BATU PULAS	PANTAI BATU PULAS, Kab. Belitung Timur	Cendil	Kelapa Kampit	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Verifikasi TAPD	EDDY	Usulan diteruskan, agar dilakukan verifikasi data kelengkapan usulan dan status lahan	proses	usulan diakomodir

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
59	Masih minimnya sarana kegiatan penangkapan ikan yaitu berupa kapal penangkap ikan berukuran <3 GT, Mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan (Bubu kepiting, waring, kawat bubu, Jaring), alat bantu penangkapan ikan (GPS dan Fish Finder), dan Bahan pembuatan kapal fiber	Masih Kurangnya Sarana Penangkapan Ikan Yang Memadai	Dusun Buding RT.001 RW.001, Kab. Belitung Timur	Buding	Kelapa Kampit	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	MARDINI	usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut	proses	Akan diakomodir TA, 2025. Sudah dilakukan verifikasi lapangan. Proposal Lengkap
60	Masih minimnya sarana kegiatan penangkapan ikan yaitu berupa kapal penangkap ikan berukuran <3 GT, Mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan (Bubu kepiting, waring, kawat bubu, Jaring), alat bantu penangkapan ikan (GPS dan Fish Finder), dan Bahan pembuatan kapal fiber	Belum Adanya Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Yang Memadai	Dusun Buding RT.008 RW.003, Kab. Belitung Timur	Buding	Kelapa Kampit	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	MARDINI	usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut	proses	Akan diakomodir TA, 2025. Sudah dilakukan verifikasi lapangan. Proposal Lengkap

NO	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
61	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita penggaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamananan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Kendaraan yang lewat tidak mengurangi kecepatan terutama pada jam anak sekolah keluar dan pada saat orang beribadah	Depan Masjid Al Fattah, Depan SDN 5, depan majid Al Hidayah, depan SDn 3 dan jl gang sunda, Kab. Belitung Timur	Gantung	Gantung	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	ARIEF KUSMARYADI	Usulan diteruskan ke OPD Teknis	Diteruskan ke Dinas Perhubungan Kab.Belitim	di akomodir 8 titik Speedbump
62	Masih minimnya sarana kegiatan penangkapan ikan yaitu berupa kapal penangkap ikan berukuran <3 GT, Mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan (Bubu kepiting, waring, kawat bubu, Jaring), alat bantu penangkapan ikan (GPS dan Fish Finder), dan Bahan pembuatan kapal fiber	Pengadaan mesin ketinting untuk nelayan	Desa Air Kelik, Kab. Belitung Timur	Air Kelik	Damar	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	SUHARDI	mohon dilengkapi dengan proposal serta usulan akan diteruskan ke dinas terkait	di teruskan ke OPD terkait	Akan diakomodir TA. 2025. Sudah dilakukan verifikasi lapangan

NO	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
63	Masih minimnya sarana kegiatan penangkapan ikan yaitu berupa kapal penangkap ikan berukuran <3 GT, Mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan (Bubu kepiting, waring, kawat bubu, Jaring), alat bantu penangkapan ikan (GPS dan Fish Finder), dan Bahan pembuatan kapal fiber	Pengadaan gudang nelayan laut asam dan laut pering	Desa Air Kelik, Kab. Belitung Timur	Air Kelik	Damar	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	SUHARDI	mohon dilengkapi dengan proposal serta diperhatikan kembali terkait status lahan. usulan akan diteruskan ke dinas terkait	di teruskan ke OPD terkait	Akan dilakukan verifikasi ke lokasi rencana pembangunan, mohon menyiapkan proposal dan SKT (diserahkan atas nama Sekretaris Daerah Kab. Belitung Timur)
64	Masih minimnya sarana kegiatan penangkapan ikan yaitu berupa kapal penangkap ikan berukuran <3 GT, Mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan (Bubu kepiting, waring, kawat bubu, Jaring), alat bantu penangkapan ikan (GPS dan Fish Finder), dan Bahan pembuatan kapal fiber	URANNGYA PRASARANA PENUNJANG BAGI NELAYAN SEPERTI MESIN DIESEL 24 PK, GENSET 1500 WATT, PUKAT IKAN 2,5 INC, JARING MILENIUMM 4 INC, FISH FINDER FRUNO FCV 688 BAGI KELOMPOK SUAK MENGGURU JAYA	desa cendil, Kab. Belitung Timur	Cendil	Kelapa Kampit	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	EDDY	usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut	proses	Akan diakomodir TA, 2025. Sudah dilakukan verifikasi lapangan. Proposal Lengkap
65	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Bangunan WC Murid yang lama sudah rusak dan tidak layak pakai	SD N 6 KELAPA KAMPIT, Kab. Belitung Timur	Mayang	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	GUNA HENDRA JAYA	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan	proses	Diakomodir Rehab WC

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
									keuangan daerah		
66	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	belum tersedianya ruang kepala sekolah, Ruang Kelas yang sudah rusak dan tidak layak pakai, belum tersedianya ruang kantin, ruang guru yang sudah tidak layak pakai dan sarana dan prasarana lain yang belum memadai	SD N 9 KELAPA KAMPIT, Kab. Belitung Timur	Mayang	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	GUNA HENDRA JAYA	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir Rehab Ruang Kelas 3 Ruang
67	Masih adanya sarana & prasarana PAUD yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	kurangnya fasilitas yang tersedia di TK Negeri Desa Mayang seperti Papan Nama Sekolah, Bak sampah organik dan non organik, Meja Belajar Murid 20 Buah dan Prosotan Permanent	TK Negeri Desa Mayang, Kab. Belitung Timur	Mayang	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	GUNA HENDRA JAYA	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir Pembangunan Papan Nama

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
68	Masih minimnya sarana kegiatan penangkapan ikan yaitu berupa kapal penangkap ikan berukuran <3 GT, Mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan (Bubu kepiting, waring, kawat bubu, Jaring), alat bantu penangkapan ikan (GPS dan Fish Finder), dan Bahan pembuatan kapal fiber	KURANNGYA PRASARANA PENUNJANG BAGI NELAYAN SEPERTI MESIN DIESEL 24 PK, GENSET 1500 WATT, PUKAT IKAN 2,5 INC, JARING MILENIUM 4 INC, FISH FINDER FRUNO FCV 688 BAGI KELOMPOK TAJOR JAYA	DESA CENDIL, Kab. Belitung Timur	Cendil	Kelapa Kampit	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	EDDY	usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut,	proses	Akan diakomodir TA, 2025. Sudah dilakukan verifikasi lapangan. Proposal Lengkap
69	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Masih adanya sapras sekolah yang harus ditingkatkan berupa Rehabilitasi Laboratorium IPA	Dsn. Air Tangga RT 008 (SDN 2 Simpang Pesak), Kab. Belitung Timur	Simpang Pesak	Simpang Pesak	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	SURYANTO	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Usulan ditolak, perlu survey	Diakomodir Rehab Laboratorium
70	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita pengaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengaman jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL),	Pengadaan lampu penerangan (haimas) sebanyak 3 unit	Dusun Baru Utara, Baru Tengah dan Baru Selatan, Kab. Belitung Timur	Baru	Manggar	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	Husnul Khalik	diteruskan ke OPD Teknis. agar dilengkapi dengan data dukung berupaproposal. status lahan harus CnC.	Proses	di akomodir 1 unit PJUTS, 5 unit speedbump

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
	penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten										
71	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Pembangunan rehab gedung kelas sepaket 3 ruangan	SD 09 Damar, Kab. Belitung Timur	Air Kelik	Damar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	SUHARDI	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	di teruskan ke OPD terkait	Diakomodir Rehab Ruang kelas 3 ruang
72	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Pembangunan wc siswa	SD 09 DAMAR, Kab. Belitung Timur	Air Kelik	Damar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	SUHARDI	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	di teruskan ke OPD terkait	Diakomodir Rehab WC

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
73	Kurang optimalnya pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Pembangunan Sarana Olahraga (Lapangan Bola Voly dan Lapangan Putsal) DiDusun Sinar Setiong	Desa Lilangan Dusun Sinar Setiong, Kab. Belitung Timur	Lilangan	Gantung	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	YOPI ASMORO	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, koordinasikan dengan pihak-pihak terkait lainnya	Diteruskan ke Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kab.Beltim	Akomodir, dengan survey lahan dan persyaratan sesuai dengan perundang-undangan pada pemerintahan, serta penyesuaian pada APBD yang tersedia.
74	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Meubelair (Meja Kursi) Kelas 2 SDN 10 Dendang sudah Tidak layak pakai	Dusun Bentaian RT.03 desa Nyuruk, Kab. Belitung Timur	Nyuruk	Dendang	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	GURDI	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	-	Diakomodir Pengadaan Mebel Sekolah
75	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Menengah Pertama yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Pembangunan Ruang UKS SMPN Gantung (1 Kegiatan) di Rt.001 Dusun Lilangan	Dusun Lilangan Rt.001 Desa Lilangan, Kab. Belitung Timur	Lilangan	Gantung	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	YOPI ASMORO	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Dinas Pendidikan Kab.Beltim	Diakomodir Pembangunan Ruang UKS
76	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Rehab Ruang Kelas Sekolah SDN 17 Gantung (3 Unit) di Rt.003 Dusun Lilangan	Dusun Lilangan Rt.003 Desa Lilangan, Kab. Belitung Timur	Lilangan	Gantung	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	YOPI ASMORO	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan	Diteruskan ke Dinas Pendidikan Kab.Beltim	Diakomodir 1 Ruang

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
									keuangan daerah		
77	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Gedung sekolah rusak berat, sehingga perlu di rehap berat ada 4 lokal kelas.	SDN.4 Simpang Renggang RT /RW 005/001 Dusun Air Madu Desa Aik Madu Kecamatan Simpang Renggang Kab.BELTIM., Kab. Belitung Timur	Aik Madu	Simpang Renggang	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	RIZKI FILARDI	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diakomodir untuk dilanjutkan ke Dinas Pendidikan	Diakomodir rehab ruang kelas 3 ruang
78	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Perpustakaan Sekolah Perlu Direhap Berat Karena Kusen, Platfon dan Atap Rusak Berat	SDN.4 Simpang Renggang RT/RW 005/001 Dusun Air Madu Desa Aik Madu Kecamatan Simpang Renggang Kab.BELTIM, Kab. Belitung Timur	Aik Madu	Simpang Renggang	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	RIZKI FILARDI	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Dinas Pendidikan	Diakomodir Rehab Perpustakaan
79	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Dikarenakan adanya beberapa meubelair sekolah yang rusak dan bertambahnya siswa-siswi yang masuk	SD Negeri 8 Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Simpang Tiga	Simpang Renggang	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	WASNI	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan	Diteruskan ke Dinas Pendidikan	Diakomodir pengadaan mebel sekolah

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
									kemampuan keuangan daerah		
80	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	ruang perpustakaan yang atapnya rusak , plafon yang bocor , jendela dan pintu yang sudah tidak layak sehingga mengganggu para siswa siswi untuk kegiatan membaca dan tempat belajar	SDN 15 Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Senyubuk	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	DODY HIDAYAH	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir Rehab Perpustakaan
81	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Masih ada atap berkarat dan plafon yang bocor sehingga ruang UKS tersebut menjadi sarang Kotoran hewan	SDN 15 Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Senyubuk	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	DODY HIDAYAH	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir Rehab UKS
82	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	belum adanya Mushollah untuk kegiatan rutin keagamaan di lingkungan sekolah	SDN 17 Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Senyubuk	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	DODY HIDAYAH	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir Pembangunan Mushola

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
83	Masih minimnya sarana kegiatan penangkapan ikan yaitu berupa kapal penangkap ikan berukuran <3 GT, Mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan (Bubu kepiting, waring, kawat bubu, Jaring), alat bantu penangkapan ikan (GPS dan Fish Finder), dan Bahan pembuatan kapal fiber	Perlunya Bantuan Peralatan Pembuatan Perahu untuk nelayan yang ada di Desa Mentawak	Desa Mentawak, Kab. Belitung Timur	Mentawak	Kelapa Kampit	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	AGUNG PERMANA	usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut	proses	Akan diakomodir TA, 2025. Sudah dilakukan verifikasi lapangan. Proposal Lengkap
84	Masih Belum Optimalnya Pengelolaan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM	Perlu penerangan jalan Koperasi	RT 07 DS BALOK, Kab. Belitung Timur	Balok	Dendang	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	SUHANDRA	terkait permasalahan perlunya penerangan jalan akan diteruskan ke dinas terkait . mohon dilengkapi dengan proposal	-	di akomodir 1 unit PJUTS
85	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Rehab Ruang Kelas, Rehab ruang guru. Pagu Dana Rp. 280.000.000	Dusun Cemara I RT.06 RW.03 SDN 24 Manggar, Kab. Belitung Timur	Kurnia Jaya	Manggar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	RAHADIAN	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Proses	Diakomodir Rehab Ruang Kelas

NO	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
86	Masih adanya sarana & prasarana PAUD yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	1. Tidak adanya pagar permanen samping yang ramah anak 2. Tidak tersedianya ruang kepala sekolah dan ruang guru 3. Areal sekolah sering becek ketika hujan sehingga menghambat kegiatan sekolah 4. Tidak adanya ruang perpustakaan 5. Tidak adanya Mushola untuk memudahkan tamu dan guru beribadah 6. Perlu pemasangan teralis di setiap ruang untuk menghindari pencurian yg sering kali terjadi di sekolah	Dusun Kelubi 1, RT. 02, Kab. Belitung Timur	Kelubi	Manggar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	ZAMRONI	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Proses	Diakomodir Pembangunan Pagar
87	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Beberapa wc murid mengalami kerusakan berat	SD Negeri 7 Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Simpang Tiga	Simpang Renggang	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	WASNI	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Dinas Pendidikan	Diakomodir Rehab WC

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
88	Minimnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan berupa (Kolam Terpal, Waring Budidaya, Pakan dan Benih) untuk Program Budidaya Untuk Ketahanan Pangan (DAUN KETAPANG) dan Program Budidaya Ikan untuk Pembudidayaan Ikan Milenial umur 19-40 tahun (TOMAN).	1. Minimnya sarpras budidaya ikan air tawar yg ada di kelompok 2. Tersedianya lahan kosong yg kurang di manfaatkan	Dusun Kelubi 1, Kab. Belitung Timur	Kelubi	Manggar	Dinas Perikanan	Verifik asi TAPD	ZAMRONI	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut dan dimohon untuk menyiapkan proposal	Proses	Dilakukan Verifikasi Lapangan, untuk segera melengkapi persyaratan permohonan berupa : 1. Proposal Permohonan dilengkapi dengan surat pernyataan Bermaterai 2. Membuat KUSUKA
89	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Menengah Pertama yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Rumah Dinas Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gantung dalam keadaan rusak berat, sehingga perlu dilakukan rehab Rumah Dinas Kepala Sekolah	Dusun Gunong Rt.13, Kab. Belitung Timur	Jangkar Asam	Gantung	Dinas Pendidikan	Verifik asi TAPD	FAHRIZAL	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Dinas Pendidikan Kab.Beltim	Diakomodir Rehab Rumah Dinas
90	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Menengah Pertama yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Gedung mushola SMP Negeri 2 Gantung dalam keadaan rusak berat, sehingga perlu dilakukan rehab mushola	Dusun Gunong Rt.13, Kab. Belitung Timur	Jangkar Asam	Gantung	Dinas Pendidikan	Verifik asi TAPD	FAHRIZAL	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Dinas Pendidikan Kab.Beltim	Diakomodir Rehab Mushola

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
91	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Menengah Pertama yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Perlunya Rehabilitasi WC Siswa SMPN 2 Simpang Pesak sebanyak 3 unit, kondisi rusak berat	Dsn. Batu Belida Rt 011, Kab. Belitung Timur	Tanjung Kelumpang	Simpang Pesak	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	MUNZIRI	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Usulan disetujui	Diakomodir Rehab WC
92	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Perlunya rehabilitasi Perpustakaan SDN 4 Simpang Pesak kondisi rusak berat	Dsn. Tg. Belantu, Rt 04, Kab. Belitung Timur	Tanjung Kelumpang	Simpang Pesak	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	MUNZIRI	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Usulan disetujui	Diakomodir Rehab Perpustakaan
93	Masih Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Pengelolaan Persampahan	pelatihan Pengelolaan Persampahan	Desa Sukamandi, Kab. Belitung Timur	Sukamandi	Damar	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi TAPD	IBNU MAJA	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut dan dimohon untuk menyiapkan proposal	di teruskan ke OPD terkait	Usulan Diakomodir
94	Belum optimalnya pembudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	Peningkatan Venue olahraga Tenis Meja dari Outdoor menjadi Indoor, dikarenakan lapangan tidak sesuai standar tenis meja, masih banyak angin yang masuk dan lapangan tergenang air	Dusun Garumedang RT.21 Desa Sukamandi, Kab. Belitung Timur	Sukamandi	Damar	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	IBNU MAJA	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	di teruskan ke OPD terkait	Akomodir, merupakan aset Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
95	belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam melakukan kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan bagi pemuda	Pelatihan Kepemudaan desa sukamandi melibatkan karang taruna desa	Desa Sukamandi, Kab. Belitung Timur	Sukamandi	Damar	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	IBNU MAJA	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	di teruskan ke OPD terkait	Akomodir, menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada APBD TA. 2025
96	Minimnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan berupa (Kolam Terpal, Waring Budidaya, Pakan dan Benih) untuk Program Budidaya Untuk Ketahanan Pangan (DAUN KETAPANG) dan Program Budidaya Ikan untuk Pembudidayaan Ikan Milenial umur 19-40 tahun (TOMAN).	Bantuan Sarana Prasarana Kelompok Budidaya perikanan ibu" kelompok Perikanan Mekar Sari	Desa Sukamandi, Kab. Belitung Timur	Sukamandi	Damar	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	IBNU MAJA	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut dan dimohon untuk menyiapkan proposal	di teruskan ke OPD terkait	Dilakukan Verifikasi Lapangan, untuk segera melengkapi persyaratan permohonan berupa : 1. Proposal Permohonan dilengkapi dengan surat pernyataan Bermaterai 2. Membuat KUSUKA
97	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita pengkaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengaman jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan	Kebutuhab Polisi Tidur. 1. Seringnya warga yang mengendarai sepeda motor dan mobil di luar batas kecepatan 2. Membahayakan pengguna jalan yang lain	Dusun Birah, RT. 02, RT. 03, RT. 05., Kab. Belitung Timur	Kelubi	Manggar	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	ZAMRONI	Usulan diteruskan ke OPD Teknis	Proses	di akomodir 3 titik speedbump

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
	umum dll di ruas jalan Kabupaten										
98	Optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan yang profesional dan komprehensif	Polindes rusak ringan, saat hujan air merembes ke dalam dan lantai menjadi basah serta plafon rusak perlu Rehabilitasi Polindes dengan volume 1 Paket Pagu Rp 200.000.000,00	Polindes Desa Padang Dsn Urisan Jaya Rt. 02, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Dinas Kesehatan	Verifikasi TAPD	IZHAR	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Proses	Perbaikan drainase Polindes Padang akan dilaksanakan oleh Puskesmas Manggar, sedangkan rehabilitasi polindes belum termasuk prioritas TA 2025
99	Optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan yang profesional dan komprehensif	Saat hujan air jadi tergenang dan masuk kedalam ruangan perlu Pembangunan Drainase/saluran air di Polindes Desa Padang volume 50 m Pagu Rp 17.500.000,00	Polindes Desa Padang Dsn Urisan Jaya Rt. 02/01, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Dinas Kesehatan	Verifikasi TAPD	IZHAR	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Proses	Perbaikan drainase akan dilaksanakan oleh Puskesmas Manggar

NO	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
100	Masih minimnya sarana kegiatan penangkapan ikan yaitu berupa kapal penangkap ikan berukuran <3 GT, Mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan (Bubu kepiting, waring, kawat bubu, Jaring), alat bantu penangkapan ikan (GPS dan Fish Finder), dan Bahan pembuatan kapal fiber	Lampu petunjuk alur pangkalan air rusa belum di pasang untuk itu dibutuhkan pemasangan lampu petunjuk alur pangkalan air rusa	Dusun Air Rusa Rt 07, Kab. Belitung Timur	Dukong	Simpang Pesak	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	IMANDA PATRIA	usulan merupakan urusan dinas perhubungan, akan diteruskan untuk dinas terkait	Usulan diterima, namun perlu untuk dilaksanakan survey lapangan	Di Akomodir sebanyak 1 Unit
101	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	1. Diperlukan Rehab Ruang Kelas 3 dan 4 dengan total luas 49 m, kondisi kelas rusak sedang. 2. Diperlukan Rehab Perpustakaan dengan total luas 56 m, kondisi rusak sedang	SD N 4 Manggar, Dusun Kartini Desa Lalang, Kab. Belitung Timur	Lalang	Manggar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	MUHAMMAD	verifikasi usulan tersebut, disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Proses	Diakomodir Rehab Ruang Kelas
102	Minimnya Agen Pemulihan Ekonomi Pembudidaya Ikan Pada Generasi / Kelompok Millenial (Sosialisasi, Pelatihan, dan/atau Pemagangan)	Ikan lokal (cempedik) merupakan ikan musiman dan mulai langka keberadaanya	Desa Gantung, Kab. Belitung Timur	Gantung	Gantung	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	ARIEF KUSMARYADI	usulan diteruskan ke dinas terkait	Diteruskan ke Dinas Perikanan Kab.Beltim	Untuk Kembali Bersurat dengan dinas Perikanan permohonan Pelatihan Budidaya Ikan Cempedik, Teknik Pemijahan ikan Cempedik

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
103	Masih kurangnya upaya fasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam menumbuhkan Wirausaha Muda yang mandiri	Perlu Pelatihan Keset Kaki dari pakaian bekas	Desa Balok, Kab. Belitung Timur	Balok	Dendang	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	SUHANDRA	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	-	Akomodir, menyesuaikan anggaran pada APBD TA. 2025 dan kegiatan akan dilaksanakan pada bidang yang bersangkutan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga
104	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita pengkaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamanan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Adanya beberapa titik jalan lingkungan di desa yang belum memiliki lampu jalan	Jl. Kelenteng RT. 09 Dusun Selumar (5 Titik), Jl. Pelataran Timah RT. 10 Dusun Selumar (5 titik) dan Jl.. Aik Rembudingan RT. 15 Dusun Selinsing (5 titik), Kab. Belitung Timur	Selingsing	Gantung	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	HARIANTO	diteruskan ke OPD Teknis. agar dilengkapi dengan data dukung foto lokasi. status lahan harus CnC.	Diteruskan ke Dinas Perhubungan Kab.Beltim	di akomodir 10 titik PJU Konvensional
105	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	SD N 8 Gantung Mengusulkan Rehab Ruang Kelas	Jl. Merantik RT. 15 Dusun Selinsing , Kab. Belitung Timur	Selingsing	Gantung	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	HARIANTO	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Dinas Pendidikan Kab.Beltim	Diakomodir Rehab Ruang Kelas

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
106	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	SD N 9 Gantung, Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jl. Prof. Dr. Nugroho Noto Susanto RT. 02 Dusun Seberang , Kab. Belitung Timur	Selingsing	Gantung	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	HARIANTO	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Dinas Pendidikan Kab.Beltim	diakomodir
107	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	SD N 9 Gantung, Rehab Raungan Kelas	Jl. Prof. Dr. Nugroho Noto Susanto RT. 02 Dusun Seberang , Kab. Belitung Timur	Selingsing	Gantung	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	HARIANTO	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Dinas Pendidikan Kab.Beltim	Diakomodir Rehab Ruang Kelas
108	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Menengah Pertama yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	SMP N 4 Gantung, Usulan Pembangunan Ruang Guru (Belum Memiliki Ruang Guru Khusus)	Jl. Pulau Dapor RT. 08 Dusun Selumar , Kab. Belitung Timur	Selingsing	Gantung	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	HARIANTO	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Dinas Pendidikan Kab.Beltim	diakomodir Pembangunan Ruang Guru
109	Masih adanya sarana & prasarana rumah ibadah yang perlu ditingkatkan	Rehab Gereja Persekutuan Kristen selumar	Jl. Lumbung Panjang RT. 9 Dusun Selumar , Kab. Belitung Timur	Selingsing	Gantung	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	HARIANTO	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Sekretariat Daerah Kab.Beltim	Proposal usulan hibah sudah lengkap sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
110	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Perlu adanya rehab WC Murid	SDN 5 Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Senyubuk	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	DODY HIDAYAH	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir Rehab WC
111	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	perlu adanya rehab WC guru, Gudang dan Ruang Sirkulasi	SDN 5 Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur	Senyubuk	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	DODY HIDAYAH	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir Rehab WC
112	Minimnya Kelompok Pembudidaya ikan dalam berkelompok (Pendampingan Kluster/Kampung perikanan Budidaya potensi pengembangan ikan endemik lokal)	Rendahnya pengetahuan dan permodalan sehingga kelompok pembudidaya harus didukung dengan pendampingan disertai bantuan bibit dan pakan untuk peningkatan hasil produksi.	Jl. Lubuk Tapa RT. 08 Dusun Selumar, Kab. Belitung Timur	Selingsing	Gantung	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	HARIANTO	usulan akan diteruskan ke dinas terkait	Diteruskan ke Dinas Perikanan Kab.Beltim	Dilakukan Verifikasi Lapangan, untuk segera melengkapi persyaratan permohonan berupa : 1. Proposal Permohonan dilengkapi dengan surat pernyataan Bermaterai 2. Membuat KUSUKA
113	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Pagar mengalami kerusakan berat maka diperlukan perbaikan Pagar keliling sekolah. Kondisi RUSAK	SMP Negeri 1 Manggar, Kab. Belitung Timur	Lalang	Manggar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	MUHAMMAD	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan	Proses	Diakomodir Pembangunan Pagar

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
		BERAT, sepanjang 355 meter.							keuangan daerah		
11 4	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	rehab kelas dan mobiler banyak yang rusak	sd negeri 2 kelapa kampit, Kab. Belitung Timur	Pembaharuan	Kelapa Kampit	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	PAMRI	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses	Diakomodir Pengadaan Mebel Sekolah
11 5	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita pengaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamanan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Perlunya Penambahan lampu Penerangan Jalan umum di Dsn . Air Membalun	Dsn. Air membalun, Rt 012-Rt013, Kab. Belitung Timur	Tanjung Kelumpang	Simpang Pesak	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	MUNZIRI	Usulan diteruskan ke OPD teknis	Usulan diterima sebanyak 20 titik, namun perlu untuk dilaksanakan survey lapangan	Di akomodir 2 unit PJUTS

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
116	Masih adanya sarana & prasarana PAUD yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	sarana dan prasarana TKN Air Kelik -Aula,sumur bor,listrik,tralis,wc anak,wc guru,gudang,conblok,APE Dalam dan luar,ruang UKS,perlengkapan UKS,Rak buku,meja kepala sekolah,meja guru,kursi guru,meja belajar anak dan kursi,kipas angin,tiang bendera rak buku,rak sepatu anak	TKN Desa Air Kelik, Kab. Belitung Timur	Air Kelik	Damar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	SUHARDI	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	di teruskan ke OPD terkait	Diakomodir Pembangunan Area Bermain
117	Belum optimalnya pembudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	Perlu pembangunan stadion lap bola mini di Sprot Centre	Rt 18 dsn air nangka, Kab. Belitung Timur	Balok	Dendang	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	SUHANDRA	Segera verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	-	Akomodir, dengan survey lahan dan persyaratan sesuai dengan perundang-undangan pada pemerintahan, serta penyesuaian pada APBD yang tersedia.
118	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Diperlukannya fasilitas pendukung/mobiler ruangan kelas, dengan volume 3 lokal. Pagu anggaran yang dibutuhkan kurang	SD N 1 Manggar, Desa Lalang, Kab. Belitung Timur	Lalang	Manggar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	MUHAMMAD	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Proses	Diakomodir pada TA 2025

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
		lebih sebesar Rp. 72.000.000									
119	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Diperlukannya fasilitas pendukung/mobiler Lab. TIK dengan volume 1 Lokal. Pagu anggaran yang dibutuhkan kurang lebih sebesar Rp. 14.500.000	SD N 1 Manggar, Desa Lalang, Kab. Belitung Timur	Lalang	Manggar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	MUHAMMAD	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Proses	Diakomodir pada TA 2025
120	Masih minimnya sarana kegiatan penangkapan ikan yaitu berupa kapal penangkap ikan berukuran <3 GT, Mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan (Bubu kepiting, waring, kawat bubu, Jaring), alat bantu penangkapan ikan (GPS dan Fish Finder), dan Bahan pembuatan kapal fiber	Bantuan Bubu Kepiting untuk kelompok nelayan pesisir 1500 unit	Dusun Cemara II RT.12 RW.06, Kab. Belitung Timur	Kurnia Jaya	Manggar	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	RAHADIAN	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut dan dimohon untuk menyiapkan proposal	Proses	Akan diakomodir TA. 2025. Sudah dilakukan verifikasi lapangan. Proposal Lengkap

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
12 1	Masih minimnya sarana kegiatan penangkapan ikan yaitu berupa kapal penangkap ikan berukuran <3 GT, Mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan (Bubu kepiting, waring, kawat bubu, Jaring), alat bantu penangkapan ikan (GPS dan Fish Finder), dan Bahan pembuatan kapal fiber	Bantuan GPS Dispender untuk kelompok nelayan perahu , 5 unit	Dusun Cemara II RT. 12 RW.06, Kab. Belitung Timur	Kurnia Jaya	Manggar	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	RAHADIAN	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut dan dimohon untuk menyiapkan proposal	Proses	Akan diakomodir TA. 2025. Sudah dilakukan verifikasi. Proposal Lengkap. Jumlah unit tergantung ketersediaan anggaran
12 2	Minimnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan berupa (Kolam Terpal, Waring Budidaya, Pakan dan Benih) untuk Program Budidaya Untuk Ketahanan Pangan (DAUN KETAPANG) dan Program Budidaya Ikan untuk Pembudidaya Ikan Milenial umur 19-40 tahun (TOMAN).	Tidak tersedianya benih dan pakan	Simpang tiga, Kab. Belitung Timur, Kab. Belitung Timur	Simpang Tiga	Simpang Renggang	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	WASNI	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut dan dimohon untuk menyiapkan proposal	Diteruskan ke Dinas Perikanan	Dilakukan Verifikasi Lapangan, untuk segera melengkapi persyaratan permohonan berupa : 1. Proposal Permohonan dilengkapi dengan surat pernyataan Bermaterai 2. Membuat KUSUKA
12 3	Terbatasnya kemampuan sumber daya dan sarana prasarana industri khususnya industri kecil dan menengah.	Mesin obras lama sering mengalami kerusakan	(Sahabat Lais) Dusun Air Ruak, Desa Simpang Tiga. Kec. Simpang Renggang, Kab. Belitung Timur	Simpang Tiga	Simpang Renggang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Verifikasi TAPD	WASNI	Usulan diteruskan, mohon dilengkapi dengan proposal dan dilakukan verifikasi data	Diteruskan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Usulan diteruskan ke Perusahaan yang memiliki Program CSR

NO	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
									kelengkapan usulan		
124	Belum Optimalnya Penataan Kelembagaan bagi Koperasi dan UMKM	butuhnya peningkatan management kepengurusan koperasi	Desa Simpang tiga, Kab. Belitung Timur	Simpang Tiga	Simpang Renggang	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Verifikasi TAPD	WASNI	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut dan dimohon untuk menyiapkan proposal	Diteruskan ke Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Menyampaikan data Koperasi yang membutuhkan manajemen Kepengurusan Koperasi Ke disnakerkopuk m
125	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita pengaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengaman jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Pemasangan lampu jalan, 16 unit	Dusun Arab II RT.19 RW.08, RT.20 RW.10, RT21.A RW.10, RT.22 RW.11, RT.23 RW.11, Kab. Belitung Timur	Kurnia Jaya	Manggar	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	RAHADIAN	diteruskan ke OPD Teknis. mohon dilengkapi data dukung berupa proposal/foto. Status lahan harus CnC	Lengkapi data pendukung bila tidak ada dimusrenbang ditolak	di akomodir 1 PJU Konvensional, 1 PJUTS

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
126	Masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan Nelayan untuk mengembangkan usaha perikanan tangkap (Pelatihan Pembuatan Kapal Fiber dan Perbaikan Mesin Kapal)	Perlunya Pelatihan Perbaikan Mesin kapal untuk semua Kelompok Nelayan yang ada Desa Tanjung Kelumpang	Desa Tanjung Kelumpang, Kab. Belitung Timur	Tanjung Kelumpang	Simpang Pesak	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	MUNZIRI	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut dan dimohon untuk menyiapkan proposal	Usulan disetujui di tahun 2025	Diakomodir TA. 2025. Mohon mengirimkan daftar Nelayan yang akan mengikuti pelatihan
127	Masih minimnya sarana kegiatan penangkapan ikan yaitu berupa kapal penangkap ikan berukuran <3 GT, Mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan (Bubu kepiting, waring, kawat bubu, Jaring), alat bantu penangkapan ikan (GPS dan Fish Finder), dan Bahan pembuatan kapal fiber	Dibutuhkannya Waring Sero Nelayan Desa tanjung Batu Itam	Sedesa Tanjung Batu Itam, Kab. Belitung Timur	Tanjung Batu Itam	Simpang Pesak	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	HASNAN	usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut, dimohon untuk menyiapkan proposal	Usulan diterima agar dibuatkan proposal	Akan diakomodir TA. 2025. Sudah dilakukan verifikasi lapangan. Mohon melengkapi persyaratan (Proposal)
128	Minimnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan berupa (Kolam Terpal, Waring Budidaya, Pakan dan Benih) untuk Program Budidaya Untuk Ketahanan Pangan (DAUN KETAPANG) dan Program Budidaya Ikan untuk Pembudidayaan Ikan	belum adanya masyarakat yang mampu membuat pakan ikan	Desa Limbongan, Kab. Belitung Timur	Limbongan	Gantung	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	DEDI SUGIANTO	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut	Diteruskan ke Dinas Perikanan Kab.Belitim	Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan

NO	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
	Milenial umur 19-40 tahun (TOMAN).										
129	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita penggaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamananan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Pemasangan SpeedBump di Desa Mengkubang	Desa Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Mengkubang	Damar	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	PIRMAWAN	diteruskan ke OPD Teknis. mohon dilengkapi data dukung berupa proposal/foto. Status lahan harus CnC	di teruskan ke OPD terkait	Di akomodir 6 titik speedbump

NO	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
130	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita pengaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamananan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Pemasangan Lampu Peringatan di Desa Mengkubang	Desa Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Mengkubang	Damar	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	PIRMAWAN	diteruskan ke OPD Teknis. mohon dilengkapi data dukung berupa proposal/foto. Status lahan harus CnC	di teruskan ke OPD terkait	Di akomodir 1 unit Cermin Tikungan
131	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita pengaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamananan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Perlunya dipasang cermin cekung di Desa Mengkubang	Desa Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Mengkubang	Damar	Dinas Perhubungan	Verifikasi TAPD	PIRMAWAN	diteruskan ke OPD Teknis. mohon dilengkapi data dukung berupa proposal/foto. Status lahan harus CnC	di teruskan ke OPD terkait	di akomodir 1 unit cermin tikungan

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
13 2	Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu - rambu lalu lintas, marka jalan, pita penggaduh, alat pembatas kecepatan (Speedbump), RPPJ, cermin tikungan, pagar pengamananan jalan, lampu peringatan tenaga surya (APILL), penerangan jalan umum dll di ruas jalan Kabupaten	Perlunya Pemasangan Lampu Tenaga Surya di Desa Mengkubang	Desa Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Mengkuba ng	Damar	Dinas Perhubung an	Verifik asi TAPD	PIRMAWAN	diteruskan ke OPD Teknis. mohon dilengkapi data dukung berupa proposal dan foto lokasi. Status lahan harus CnC	di teruskan ke OPD terkait	Di akomodir 1 unit PJUTS
13 3	Optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan yang profesional dan komprehensif	Perlunya Peningkatan SarPras Poskesdes Mengkubang	Poskesdes Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Mengkuba ng	Damar	Dinas Kesehatan	Verifik asi TAPD	PIRMAWAN	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	di teruskan ke OPD terkait	Usulan anggaran akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan review kunjungan lapangan
13 4	Minimnya Kelompok Pembudidaya ikan dalam berkelompok (Pendampingan Kluster/Kampung perikanan Budidaya potensi pengembangan ikan endemik lokal)	kurangnya benih ikan yang berkualitas	Dusun renggiang II Rt 07, Kab. Belitung Timur	Renggiang	Simpang Renggiang	Dinas Perikanan	Verifik asi TAPD	SISKORI ARIES NUGRAHA	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut dan dimohon untuk menyiapkan proposal	Diteruskan ke Dinas Perikanan	Untuk Membuat Surat Permohonan Fasilitasi Kegiatan Pelatihan

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
135	Minimnya Agen Pemulihan Ekonomi Pembudidaya Ikan Pada Generasi / Kelompok Millenial (Sosialisasi, Pelatihan, dan/atau Pemagangan)	Kurangnya SDM dalam pembudidayaan ikan sehingga perlunya pelatihan dalam pemijahan ikan sebagai bibit berkualitas baik.	RT/RW 004/001 Dsn.Air Madu Desa Aik Madu Kecamatan Simpang Renggang Kab.BELTIM, Kab. Belitung Timur	Aik Madu	Simpang Renggang	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	RIZKI FILARDI	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut dan dimohon untuk menyiapkan proposal	Diteruskan ke Dinas Perikanan	Untuk Membuat Dilakukan Verifikasi Lapangan, untuk segera melengkapi persyaratan permohonan berupa : Proposal Permohonan Fasilitas kegiatan Pelatihan Pemijahan Ikan, dilengkapi Dokumentasi kegiatan kelompok perikanan budidaya
136	Kurang optimalnya Pengelolaan Pembinaan Bina Mental Spiritual dibidang keagamaan dan lembaga keagamaan	Dikarenakan pembangunan baru masjid menggunakan 2 lantai	Dusun gajan Mada RT.03 mekar jaya, Kab. Belitung Timur	Mekar Jaya	Manggar	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	SYAMSUDIN	Verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Proses	Proposal usulan hibah sudah lengkap sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022

NO	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
137	Minimnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan berupa (Kolam Terpal, Waring Budidaya, Pakan dan Benih) untuk Program Budidaya Untuk Ketahanan Pangan (DAUN KETAPANG) dan Program Budidaya Ikan untuk Pembudidayaan Ikan Milenial umur 19-40 tahun (TOMAN).	Keterbatasan kolam untuk pembesaran ikan nila dari gangguan predator lainnya, mohon bantuan kolam bioflok uk diameter 3 meter 30 buah beserta bahan material lainnya	POKDAKAN KULONG KERO LESTARI DESA PADANG, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	IZHAR	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut	Proses	Dilakukan Verifikasi Lapangan, untuk segera melengkapi persyaratan permohonan dengan berkoordinasi kembali dengan Dinas Perikanan, Kabupaten Belitung Timur
138	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Menengah Pertama yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Dibutuhkan fasilitas meubeulair portable laboratorium IPA, dengan volume 1 paket dan kondisi meubeulair rusak berat / tidak layak pakai	SMP Negeri 3 Manggar, Desa Lalang, Kab. Belitung Timur	Lalang	Manggar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	MUHAMMAD	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Proses	Diakomodir Pengadaan Mebel Lab IPA
139	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Menengah Pertama yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Dibutuhkan paket meubeulair Portable Perpustakaan dengan volume 1 paket dan kondisi rusak berat / tidak memenuhi standar mutu	SMP N 3 Manggar, Desa Lalang, Kab. Belitung Timur	Lalang	Manggar	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	MUHAMMAD	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Proses	Diakomodir Pengadaan Mebel Perpustakaan

NO	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
140	masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang layak di destinasi wisata, perlunya perbaikan sarana dan prasarana yang rusak dan kurang layak di destinasi wisata dan masih perlunya pengembangan objek wisata baru sebagai alternatif pilihan berwisata	Perlunya peningkatan pengelolaan homestay	Desa Baru, Kab. Belitung Timur	Baru	Manggar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Verifikasi TAPD	Husnul Khalik	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut dan untuk menyiapkan proposal	Lengkapi data pendukung bila tidak ada dimusrenbang ditolak	usulan diakomodir
141	Masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan Nelayan untuk mengembangkan usaha perikanan tangkap (Pelatihan Pembuatan Kapal Fiber dan Perbaikan Mesin Kapal)	perlu adanya bantuan bahan untuk pembuatan perahun fiber dengan ukuran panjang 8 meter dan lebar 80 cm	Dsn Selindang, Kab. Belitung Timur	Senyubuk	Kelapa Kampit	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	DODY HIDAYAH	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut	proses	Akan diakomodir TA, 2025. Sudah dilakukan verifikasi lapangan. Proposal Lengkap
142	Masih minimnya sarana kegiatan penangkapan ikan yaitu berupa kapal penangkap ikan berukuran <3 GT, Mesin kapal perikanan, alat penangkapan ikan (Bubu kepiting, waring, kawat bubu, Jaring), alat bantu penangkapan ikan (GPS dan Fish Finder), dan Bahan	minimnya Alat Fish Fender dan GPS Genggam untuk sarana Kelompok Nelayan tersebut	DSN Selindang, Kab. Belitung Timur	Senyubuk	Kelapa Kampit	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	DODY HIDAYAH	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut	proses	Akan diakomodir TA, 2025. Sudah dilakukan verifikasi lapangan. Proposal Lengkap

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
	pembuatan kapal fiber										
143	Masih adanya sarana & prasarana Sekolah Dasar yang belum memadai dan perlu ditingkatkan	Atap Plapon Gedung C dan D rusak berat, maka perlu rehabilitasi atap plapon tersebut	Dusun Padang Rt.01 SD Negeri 15 Gantung, Kab. Belitung Timur	Jangkar Asam	Gantung	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	FAHRIZAL	verifikasi usulan tersebut, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Diteruskan ke Dinas Pendidikan Kab.Beltim	Diakomodir
144	Rendahnya Kualitas prasarana pendukung kegiatan perikanan tangkap (Pemeliharaan Shelter Nelayan)	Butuhnya Dukungan Perlengkapan Nelayan Mengkubang	Desa Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Mengkubang	Damar	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	PIRMAWAN	usulan akan diteruskan untuk verifikasi lebih lanjut	di teruskan ke OPD terkait	Akan diakomodir TA. 2025, Sudah dilakukan verifikasi lapangan. Mohon mengirimkan Proposal Usulan
145	Masih rendahnya kesadaran Nelayan untuk tertib kelaikan Nelayan dan Usaha Penangkapan (Sosialisasi dan Gerai Pelayanan	Perlunya Sosialisasi untuk Nelayan	Desa Mengkubang, Kab. Belitung Timur	Mengkubang	Damar	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	PIRMAWAN	usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut	di teruskan ke OPD terkait	Akan diakomodir TA. 2025. Mohon untuk mengirimkan surat permohonan sosialisasi ke

NO	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
	KUSUKA, BPKP, Rekom BBM)										Dinas Perikanan
146	Minimnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan berupa (Kolam Terpal, Waring Budidaya, Pakan dan Benih) untuk Program Budidaya Untuk Ketahanan Pangan (DAUN KETAPANG) dan Program Budidaya Ikan untuk Pembudidaya Ikan Milenial umur 19-40 tahun (TOMAN).	Bantuan bibit lele sangkuriang, pembenahan kolam, pakan ikan, biaya perawatan kolam dan mesin pembuat pakan ikan	POKDAKAN KULONG KERO DESA PADANG, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Dinas Perikanan	Verifikasi TAPD	IZHAR	Usulan akan diteruskan untuk diverifikasi lebih lanjut	Proses	Dilakukan Verifikasi Lapangan, untuk segera melengkapi persyaratan permohonan dengan berkoordinasi kembali dengan Dinas Perikanan, Kabupaten Belitung Timur
147	Masih adanya sarana & prasarana rumah ibadah yang perlu ditingkatkan	Perlu Bantuan Hibah Pembangunan Masjid Al Akbar	MASJID AL AKBAR DUSUN AIR NANGKA RT 12 DS BALOK, Kab. Belitung Timur	Balok	Dendang	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	SUHANDRA	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta lengkapi proposal usulan	mohon menjadi perhatian Pemerintah Daerah	Usulan sudah sesuai perbup no 46 tahun 2022

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
148	Sarana pertanian (ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang	Permohonan Bantuan Cultivator sebanyak 1 Unit	Kelompok Tani "Budi Karya" Desa Padang, Provinsi Bangka Belitung	Padang	Manggar	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Verifikasi TAPD	IZHAR	diteruskan ke PD terkait untuk ditelaah dan di tindaklanjuti	-	akan dianggarkan namun volume belum bisa dipastikan masih akan melalui pembahasan terlebih dahulu
149	Sarana pertanian (ketersediaan bibit/benih, alsintan, pupuk, pestisida) komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih kurang	Permohonan Bantuan Cultivator sebanyak 1 Unit	Kelompok Tani "Maju Berkah" Desa Padang, Provinsi Bangka Belitung	Padang	Manggar	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Verifikasi TAPD	IZHAR	diteruskan ke PD terkait untuk ditelaah dan di tindaklanjuti	-	akan dianggarkan namun volume belum bisa dipastikan masih akan melalui pembahasan terlebih dahulu
150	Kurang optimalnya Pengelolaan Pembinaan Bina Mental Spiritual dibidang keagamaan dan lembaga keagamaan	belum maksimalnya bantuan kepada masyarakat secara menyeluruh di tujuh kecamatan, karena belum banyak yang membayar zakat infak di badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten belitung timur	komplek perkantoran terpadu pemkab belitung timur, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	baznas kabupaten belitung timur	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta lengkapi proposal usulan	Proses	Usulan sudah sesuai dengan Perbup No 46 Tahun 2022
151	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perlunya perbaikan dan perbaikan Jalan serta pembangunan talud di Wilayah Desa Simpang Pesak karena rusak parah.	Desa Simpang Pesak (Sepanjang Jalan Jend. Sudirman dari Perbatasan Desa Lilangan sampai ke	Simpang Pesak	Simpang Pesak	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN	Verifikasi TAPD	SURYANTO	Diteruskan ke Perangkat Daerah terkait untuk diverifikasi sesuai urusan, kewenangan, dan	-	null

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
			Dusun Birah), Provinsi Bangka Belitung			PERMUKIMAN			ketersediaan anggarannya		
15 2	Masih adanya sarana & prasarana rumah ibadah yang perlu ditingkatkan	Belum adanya Tower Masjid Yang Memadai	Dusun Bukit Jaya RT.010/004 Desa Buding (Masjid Al-Furqon), Kab. Belitung Timur	Buding	Kelapa Kampit	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	Badan Kemakmuran Masjid Al-Furqon	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta lengkapi proposal usulan	Proses sesuai usulan	Usulan sudah sesuai dengan Perbup no 46 Tahun 2022
15 3	Masih adanya sarana & prasarana rumah ibadah yang perlu ditingkatkan	Sarana dan Prasarana Gereja belum terpenuhi	Jl. Wisna Ria II , Kab. Belitung Timur	Kurnia Jaya	Manggar	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	Gereja Kristen Baptist Jakarta (GKBJ) Manggar	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta lengkapi proposal usulan	Proses	Usulan telah sesuai dengan Perbup No 46 Tahun 2022
15 4	Kurang optimalnya Pengelolaan Pembinaan Bina Mental Spiritual dibidang keagamaan dan lembaga keagamaan	Perlu adanya dana operasional kelembagaan pembinaan bina mental spiritual di bidang keagamaan	Jl. Lipat Kajang, Kab. Belitung Timur	Baru	Manggar	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan	Proses	Usulan sudah sesuai dengan Perbup No 46 Tahun 2022

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
									daerah, serta lengkapi proposal usulan		
15 5	Kurang optimalnya Pengelolaan Pembinaan Bina Mental Spiritual dibidang keagamaan dan lembaga keagamaan	Masih kurangnya sarana pelengkap untuk rumah ibadah	Jl. Negeri II, RT. 11, Kab. Belitung Timur	Gantung	Gantung	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	Yayasan Al Fattakhul Huda Gantung	Verifikasi Usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta usulan tersebut dilengkapi dengan proposal	Diteruskan ke Sekretariat Daerah	Usulan sudah sesuai dengan Perbup No. 46 Tahun 2022
15 6	Kurang optimalnya Pengelolaan Pembinaan Bina Mental Spiritual dibidang keagamaan dan lembaga keagamaan	Belum Optimalnya pengelolaan operasional kelembagaan IPHI dan masih kurangnya peran IPHI terhadap pembinaan umat	Komplek Perkantoran Terpadu Menggarauan Jl.Raya Manggar Gantung - Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	IPHI kabupaten Belitung Timur	Verifikasi Usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta usulan tersebut dilengkapi dengan proposal	Proses	Usulan sudah sesuai dengan Perbup No 46 Tahun 2022

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
157	Masih adanya sarana & prasarana rumah ibadah yang perlu ditingkatkan	Tempat Parkir dan Toilet yang ada di Masjid Nurul Iman kurang memadai	Dusun Durian RT 03/02, Kab. Belitung Timur	Lalang	Manggar	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	YAYASAN MASJID NURUL IMAN DURIAN	Verifikasi Usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta usulan tersebut dilengkapi dengan proposal	Proses	Usulan sudah sesuai dengan Perbup No 46 Tahun 2022
158	Masih adanya sarana & prasarana rumah ibadah yang perlu ditingkatkan	Perlu bantuan dana hibah pembangunan masjid al akbar air nangka	Masjid al akbar dusun air nangka rt 12, Kab. Belitung Timur	Balok	Dendang	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	Rudi Ismail	Verifikasi Usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta usulan tersebut dilengkapi dengan proposal	diperlukan kebutuhan sekitar Rp 300.000.000 untuk penyelesaian rehabilitasi berat	Usulan sudah sesuai perbup no 46 tahun 2022
159	Kurang optimalnya Pengelolaan Pembinaan Bina Mental Spiritual dibidang keagamaan dan lembaga keagamaan	Perlu Dukungan dana operasional untuk peningkatan bina mental spritual masyarakat organisasi mitra pemerintah.	Jl. Sudirman Desa Baru Manggar Belitung Timur 33513, Kab. Belitung Timur	Baru	Manggar	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	MUI Kab. Belitung Timur	Verifikasi Usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta usulan tersebut dilengkapi dengan proposal	Proses	Usulan sudah sesuai dengan Perbup No 46 Tahun 2022

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
160	Kurang optimalnya Pengelolaan Pembinaan Bina Mental Spiritual dibidang keagamaan dan lembaga keagamaan	Mebutuhkan anggaran untuk pembinaan	Kelapa Kampit - Kabupaten Belitung Timur, Kab. Belitung Timur	Pembaharuan	Kelapa Kampit	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	BAMAG LKKI	Verifikasi Usulan tersebut sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta usulan tersebut dilengkapi dengan proposal	proses lebih lanjut	Usulan telah sesuai dengan Perbup No 46 Tahun 2022
161	Masih adanya sarana & prasarana rumah ibadah yang perlu ditingkatkan	Kurangnya dana untuk pembangunan Masjid At Taqwa	Dsn. Gajah Mada Desa Mekar Jaya Rt 03/02 , Kab. Belitung Timur	Mekar Jaya	Manggar	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	Yayasan At Taqwa Mekar Jaya	Verifikasi usulan tersebut sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Proses	Usulan telah sesuai dengan Perbup No 46 Tahun 2022
162	Kurang optimalnya Pengelolaan Pembinaan Bina Mental Spiritual dibidang keagamaan dan lembaga keagamaan	Biaya Operasional Kegiatan BKMT selama satu tahun	Jalan Assalam Desa Baru Dusun Assalam Desa Baru Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Baru	Manggar	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	Badan Kontak Majelis Taklim (PD BKMT) Kabupaten Belitung Timur	Verifikasi usulan tersebut sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Proses	Usulan sudah sesuai dengan Perbup No 46 Tahun 2022

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
163	Masih adanya sarana & prasarana rumah ibadah yang perlu ditingkatkan	Tidak dapat menambah bangunan Madrasah baru di tempat yang lama dikarenakan lokasi bangunan yang sempit sedangkan santri di Madrasah sudah semakin banyak yang memerlukan tempat yang cukup untuk kegiatan belajar mengajar.	Jalan M Hasan RT 001 Desa Simpang Pesak, Kab. Belitung Timur	Simpang Pesak	Simpang Pesak	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	Yayasan Thoriqul Jannah Simpang Pesak	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta lengkapi proposal usulan	Usulan diteruskan ke dinas terkait	Usulan sudah sesuai dengan Perbup No 46 Tahun 2022
164	Masih adanya sarana & prasarana rumah ibadah yang perlu ditingkatkan	Keadaan sanitasi dan interior Masjid Al-Falah sudah kurang baik	Dsn Penirukan rt02 rw01 Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur, Kab. Belitung Timur	Mayang	Kelapa Kampit	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	YAYASAN MASJID AL-FALAH PENIROKAN DESA MAYANG	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	Proposal sesuai keadaan dan untuk diteruskan ke proses selanjutnya	Usulan sudah sesuai dengan Perbup No 46 Tahun 2022
165	Masih adanya sarana & prasarana rumah ibadah yang perlu ditingkatkan	tidak tersedianya fasilitas penunjang di masjid jamik al istiqomah nibung punggur	Jalan Raya Maanggar-Tanjung Pandan RT 003 RW 002 Dusun Nibung Punggur, Kab. Belitung Timur	Mentawak	Kelapa Kampit	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	Yayasan Masjid Jamik Al Istiqomah Nibung Punggur	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta lengkapi proposal usulan	proses sesuai usulan	Usulan sudah sesuai dengan Perbup No. 46 Tahun 2022

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMAT AN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDA SI MITRA	REKOMENDA SI KECAMATAN	REKOMENDA SI SKPD
16 6	Masih adanya sarana & prasarana rumah ibadah yang perlu ditingkatkan	Permohonan Bantuan Biaya Pembangunan Surau	Dusun Merdeka Rt.002/001 Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur, Kab. Belitung Timur	Senyubuk	Kelapa Kampit	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	Yayasan Babul Jannah Merdeka	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	proses sesuai usulan	Usulan sudah sesuai dengan Perbup No 46 Tahun 2022
16 7	Masih adanya sarana & prasarana rumah ibadah yang perlu ditingkatkan	Perlunya Renovasi Masjid	Jln. Sumatera Dusun Sukamandi Rt.006/003 Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur, Kab. Belitung Timur	Sukamandi	Damar	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	Yayasan Al Falah Sukamandi Damar	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta lengkapi proposal usulan	Diteruskan ke Bagian Kesra/Dinas terkait	Usulan sudah sesuai dengan Perbup No. 46 Tahun 2022
16 8	Masih adanya sarana & prasarana rumah ibadah yang perlu ditingkatkan	Perlu Dana untuk pembangunan Masjid AT-TAQWA	Dusun Gajah Mada Desa Mekar Jaya RT. 01/01, MANGGAR, Kab. Belitung Timur	Mekar Jaya	Manggar	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	Yayasan At Taqwa Mekar Jaya	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta lengkapi proposal usulan	PROSES	Proposal lengkap

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
169	Belum optimalnya pembudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	Pembinaan Olahraga yang meliputi pembibitan dan pengembangan atlet serta peningkatan kompetensi pelatih beserta perangkat pertandingan yang berkelanjutan yang harus ditingkatkan	Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya Manggar - Gantung, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	KONI Kabupaten Belitung Timur	Verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	Diakomodir, menyesuaikan dengan anggaran APBD Tahun Anggaran 2025
170	Kurang optimalnya pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Perubahan sosial yang semakin cepat di Kabupaten Belitung Timur membuat orientasi sosial masyarakat yang semula tradisional menjadi masyarakat modern. Dalam hal ini Lembaga Adat Melayu Belitong Timor merasa perlu melakukan intervensi dalam memasyarakatkan dan membina generasi muda melalui kegiatan pelestarian budaya Melayu Belitung Timur, khususnya pada Seni Tradisi Lisan sebagai salah satu kekuatan falsafah budaya melayu	Komplek Perkantoran Terpadu Dusun Manggarawan Jl. Raya Gantung Manggar RT 003/002, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Verifikasi TAPD	Lembaga Adat Melayu Belitong Timor	Verifikasi usulan tersebut sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	ya disetujui

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
17 1	Belum optimalnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak terkait masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	belum tersedianya fasilitas PMI di daerah	kompleks perkantoran terpadu Pemkab. belitung timur. jl, raya manggar-gantung Ds. Padang Manggarawan kec. manggar Kab. belitung Timur, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Dinas Kesehatan	Verifikasi TAPD	PALANG MERAH INDONESIA 2024	Verifikasi usulan, sesuaikan dengan prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	Pelaksanaan Kegiatan PMI disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada OPD
17 2	belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam melakukan kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan bagi pemuda	Bantuan Usulan Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Kepada DPD KNPI Kabupaten Belitung Timur	Jl. Sudirman RT.04/RW.02 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manggar - Kabupaten Belitung Timur, Kab. Belitung Timur	Mekar Jaya	Manggar	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	DPD KNPI Belitung Timur	verifikasi usulan proposal, sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	Diakomodir, menyesuaikan dengan anggaran APBD Tahun Anggaran 2025
17 3	Optimalisasi peran organisasi kemasyarakatan dalam membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan sosialisasi moderasi beragama, nilai-nilai toleransi dan kerukunan umat beragama serta mitigasi konflik horizontal.	Masih minimnya dana operasional untuk operasional Organisasi Lintas Agama dalam merawat Kerukunan Umat Beragama.	Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Belitung Timur, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi TAPD	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)	Verifikasi usulan tersebut sesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	usulan Hibah FKUB telah diakomodir

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
174	Kurang optimalnya Pengelolaan Pembinaan Bina Mental Spiritual dibidang keagamaan dan lembaga keagamaan	Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki	Jalan Raya Manggar-Gantung Desa Padang Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Sekretariat Daerah	Verifikasi TAPD	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Belitung Timur	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	Usulan sudah sesuai dengan Perbup No 46 Tahun 2022
175	Belum optimalnya peran partai politik dalam meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat	Pengajuan bantuan Keuangan bagi partai politik tahun anggaran 2025	Jalan Tengah Dusun Pancur II Rt 003 Rw 002 , Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi TAPD	Partai Keadilan Sejahtera	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	Usulan hibah parpol diakomodir
176	Belum optimalnya peran partai politik dalam meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat	pengajuan bantuan keuangan bagi partai politik tahun anggaran 2025	Dsn. Kabung Jaya Rt.005 , Kab. Belitung Timur	Mekar Jaya	Manggar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi TAPD	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) 2024	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	Usulan hibah parpol diakomodir
177	Belum optimalnya peran partai politik dalam meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat	pengajuan bantuan keuangan bagi partai politik tahun anggaran 2025	Jl. Sumatra No. 178 Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur, Kab. Belitung Timur	Sukamandi	Damar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi TAPD	Partai PDIP	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	di teruskan ke OPD terkait	Usulan hibah parpol diakomodir

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
178	Belum optimalnya peran partai politik dalam meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat	Pengajuan bantuan keuangan bagi partai politik tahun anggaran 2025	Dsn Samak A1, Kab. Belitung Timur	Lalang	Manggar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi TAPD	Partai Demokrat	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	Usulan hibah parpol diakomodir
179	Belum optimalnya peran partai politik dalam meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat	Pengajuan bantuan keuangan bagi partai politik tahun anggaran 2025	Jl Numpang empat, Kab. Belitung Timur	Mekar Jaya	Manggar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi TAPD	PARTAI PERINDO 2024	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	Usulan hibah parpol diakomodir
180	Belum optimalnya peran partai politik dalam meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat	pengajuan bantuan keuangan bagi partai politik tahun anggaran 2025	dusun padang I Rt 001 Desa Padang Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi TAPD	PARTAI NASDEM 2024	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	Usulan hibah parpol diakomodir
181	Belum optimalnya peran partai politik dalam meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat	Pengajuan bantuan keuangan bagi partai politik tahun anggaran 2025	jl. Raya Manggar-Gantung Dsn. Padang II Rt. 011/005, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi TAPD	DPC PARTAI GERINDRA BELTIM	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	Usulan hibah parpol diakomodir

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
182	Belum optimalnya peran partai politik dalam meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat	Pengajuan bantuan keuangan bagi partai politik tahun anggaran 2025	Jl. Merbabu, Dsn Taruna Mulya, RT.01 RW.01, Desa lalang manggar, Kab. Belitung Timur	Lalang	Manggar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi TAPD	Partai Bulan Bintang	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	Usulan hibah parpol diakomodir
183	Belum optimalnya peran partai politik dalam meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat	Pengajuan bantuan keuangan bagi partai politik tahun anggaran 2025	Jl. Raya Gantung, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi TAPD	Partai Golongan Karya	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	Usulan hibah parpol diakomodir
184	Belum optimalnya peran partai politik dalam meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat	Pengajuan bantuan keuangan bagi partai politik tahun anggaran 2025	Jl sudirman no 16 RT. 02/ RW. 01 Desa Mekar Jaya, Kab. Belitung Timur	Mekar Jaya	Manggar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi TAPD	DPC PARTAI HANURA	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	Usulan hibah parpol diakomodir
185	Belum optimalnya peran partai politik dalam meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat	pengajuan bantuan keuangan bagi partai politik tahun anggaran 2025	JL. Flamboyan Dsn. Urisan Jaya Rt 005/002 Desa Padang Kecamatan Manggar Kab. Beltim, Kab. Belitung Timur	Padang	Manggar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi TAPD	Partai Kebangkitan Bangsa	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	Usulan hibah parpol diakomodir

N O	USULAN ASPIRASI MASYARKAT - MUSRENBANG								HASIL VERIFIKASI		
	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	DESA	KECAMATAN	OPD TUJUAN AKHIR	STATU S	PENGUSUL	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
186	Belum optimalnya peran partai politik dalam meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat	Pengajuan bantuan keuangan bagi partai politik tahun anggaran 2025	Dusun Kabung Jaya RT.02 RW.01 Desa Mekar Jaya Kecamatan Manggar, Kab. Belitung Timur	Mekar Jaya	Manggar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Verifikasi TAPD	Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan	Verifikasi usulan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	PROSES	Usulan hibah parpol diakomodir
187	Belum optimalnya pembudayaan, pembibitan dan pengembangan olahraga baik olahraga Pendidikan, Prestasi, Rekreasi maupun tradisional	Pengusulan dana bantuan hibah KORMI	jln sumatra, rt/rw. 001/001, Desa sukamandi, Kab. Belitung Timur	Sukamandi	Damar	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Verifikasi TAPD	KOMITE OLAHRAGA REKREASI MASYARAKAT INDONESIA (KORMI) KABUPATEN BELITUNG TIMUR	verifikasi usulan, disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah	diteruskan ke OPD terkait	Akomodir, penyesuaian dengan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tersedia.

Sumber: <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/usulan/usulan-aspirasi/monitor>

5.8. URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RKPD 2025

Dalam rangka mencapai prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan, maka disusunlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD tahun 2025 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati Belitung Timur yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan program dan kegiatan perlu melihat seluruh potensi pendapatan yang ada baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat, sehingga terjadi sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Tabel 5. 9 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD 2025
Berdasarkan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025

KODE	PERANGKAT DAERAH (PD)
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	Satuan Polisi Pamong Praja
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8	Dinas Pertanian dan Pangan
9	Dinas Lingkungan Hidup
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12	Dinas Perhubungan
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	Dinas Perikanan
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20	Sekretariat Daerah
21	Sekretariat DPRD
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25	Inspektorat Daerah

KODE	PERANGKAT DAERAH (PD)
26	Kecamatan Manggar
27	Kecamatan Gantung
28	Kecamatan Kelapa Kampit
29	Kecamatan Simpang Pesak
30	Kecamatan Damar
31	Kecamatan Simpang Renggang
32	Kecamatan Dendang
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dipandang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat yang disusun berdasarkan Perangkat Daerah disajikan pada lampiran dalam dokumen ini.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pada dasarnya keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur dapat diukur melalui indikator kinerja. Indikator kinerja ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator program pembangunan daerah setiap tahun sehingga tercermin pencapaian kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan, maka telah dipilih dan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan harus menjadi subjek penerima terbesar manfaat dari pembangunan yang ada di Kabupaten Belitung Timur, sedangkan untuk penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini bertujuan dalam akumulasi pencapaian indikator program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Berkenaan dengan penerapan akuntabilitas di daerah, ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintahan di daerah diselenggarakan berdasarkan sejumlah asas, dimana salah satunya adalah asas akuntabilitas. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah harus mampu menerapkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, dan berorientasi hasil.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan instansi masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena sering kali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Setiap lembaga atau instansi pemerintah

wajib merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Visi pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 dalam dokumen RPJMD adalah “ **BELITUNG TIMUR BANGKIT DAN BERDAYA** “.Berdasarkan visi tersebut, diharapkan seluruh elemen masyarakat Belitung Timur (termasuk didalamnya unsur pemerintah daerah) lebih mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan masyarakat Belitung Timur yang bangkit dan berdaya.

Untuk mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Belitung Timur di atas, pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan maka ditetapkan misi, yaitu sebagai berikut:

1. Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja;
3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.

Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6. 1 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Belitung Timur

VISI : BELITUNG TIMUR BANGKIT DAN BERDAYA

MISI 1 : MEMBENAH MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KETATAPEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR AGAR BERJALAN SESUAI DENGAN ASAS UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN					TAHUN 2023		TARGET			KONDISI AKHIR RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	2024	2025	2026	
1.1	Terwujudnya Tata Kelola Yang Baik Dan Pemerintahan Yang Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	50,39	51,52	53,12	55,27	58,20	58	76,44	61	63	65	65
1.1.1	Meningkatnya Kapasitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	Persen	NA	NA	NA	85,51	89,81	71	91,77	74	77	80	80
		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Status	ST	T	T	Tinggi (T)	Sedang	T	S	ST	ST	ST	ST
1.1.2	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	NA	NA	NA	58,85	68,13	77	68,79	78	79	80	80
1.1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai	B	B	B	B	B	BB	B	BB	BB	BB	BB
1.2	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Efektif Dan Efisien	Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks	NA	NA	NA	2,98	3,36	3,5	3,65	3,65	3,8	3,95	3,95

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN					TAHUN 2023		TARGET			KONDISI AKHIR RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	2024	2025	2026	
1.2.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan	96,36	NA	NA	70	78,73	74	94,35	76	78	80	80
1.2.2	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka Indeks	2,08	2,55	3,15	2,15	2,70	2,8	3,56	2,9	3	3,1	3,1
1.3	Terwujudnya Kelembagaan Dan Manajemen Sumber Daya Aparatur Yang Efisien	Indeks Merit System	Nilai 100-400	NA	NA	NA	102,50	102,50	122	252	143	163	184	184
1.3.1	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Indeks Kelembagaan	Persentase	NA	NA	NA	72	77,71	76	100	78	80	80	80
1.3.2	Meningkatnya Profesionalisme Sumber Daya Aparatur	Indeks Profesionalisme ASN	Skor 1-100	NA	52,06	NA	68,99	71,49	55	71,53	56	57	60	60

MISI 2 : PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT UNTUK MENCIPTAKAN WIRSAHAWAN DAERAH YANG MANDIRI DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN					TAHUN 2023		TARGET			KONDISI AKHIR RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	TARGET	REALISASI	2024	2025	2026	
2.1	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	71,93	71,37	71,33	69,23	67,36	72,4	70,48	72,5	72,6	72,7	72,7
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,5	1,71	3,93	3,78	2,50	3,46	2,41	3,4	3,35	3,3	3,3
2.1.1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi yang terserap	Persen	NA	0,24	2,43	2,44	2,55	2,7	2,37	2,8	2,9	3	3
		Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun	Persen	NA	NA	NA	0,07	0,156	0,11	0,13	0,11	0,12	0,12	0,12
2.1.2	Meningkatnya investasi	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Juta Rupiah	150,898	165,551	346,571	472,466	1,373,500	378,771	616.140	390,513	402,814	415,704	415,704
2.2	Meningkatnya perekonomian lokal	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	4,21	3,35	-0,66	4,55	3,50	3,5	4,72	4	4,5	5	5
		PDRB per kapita	Juta Rp	58,28	59,57	59,47	59,48	75	65,2	80,45	66,57	68,29	70,39	70,39

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN					TAHUN 2023		TARGET			KONDISI AKHIR RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	TARGET	REALISASI	2024	2025	2026	
2.2.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	4,05	2,67	NA	7,45	5,96	3,25	3,68	3,4	3,54	3,69	3,69
		Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Persen	3.68	3.49	NA	1,38	1,51	3,9	4,98	4,1	4,3	4,5	4,5
		Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi makan dan minuman	Persen	2,8	7,12	-3,47	8,35	13,08	3,6	11,8	3,8	4	4,2	4,2
2.2.2	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks daya saing daerah	Nilai 1-5	NA	4.5	1.58	2,67	2,53	1.62	2,85	1.63	1.64	1.65	1.65

MISI 3 : PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR MELALUI SINERGITAS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN					TAHUN 2023		TARGET			KONDISI AKHIR RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	TARGET	REALISASI	2024	2025	2026	
3.1	Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	70,22	70,84	70,92	71,42	72,29	72,43	72,86	72,88	73,33	73,78	73,78
3.1.1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,49	11,51	11,52	11,63	11,65	11,57	11,66	11,58	11,6	11,61	11,61
		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,14	8,15	8,22	8,47	8,67	8,44	8,9	8,51	8,58	8,64	8,64
3.1.2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Kabupaten Sehat	Predikat	NA	NA	NA	0	0	Wiwerda	Padapa	Wiwerda	Wistara	Wistara	Wistara
3.2	Meningkatnya Pelayanan sarana dan prasarana	Indeks infrastruktur wilayah	Nilai 1-100	NA	NA	NA	63,32	67,79	85	72,87	90	95	100	100
		Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Nilai	NA	NA	0,35	0,36	0,36	0,38	0,51	0,39	0,4	0,41	0,41
3.2.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Persen	NA	NA	NA	52,29	87,19	96,59	90,20	97,68	98,78	99,88	99,88
		Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai	52,4	49,04	61,97	62,78	64,08	67,23	65,50	69,59	72,02	74,52	74,52

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN					TAHUN 2023		TARGET			KONDISI AKHIR RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	TARGET	REALISASI	2024	2025	2026	
		Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Nilai	58,12	63,89	66,17	42,25	53,32	73,48	65,37	75	76.52	78,04	78,04
3.2.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai 1-100	67,39	68,87	68,32	70,96	76,74	70,23	71,33	70,75	71,28	71,81	71,81
		Indeks Risiko Bencana	Angka	168,4	117,88	NA	168,4	168,4	168,4	155,61	168,4	168,4	168,4	168,4
3.3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Angka kemiskinan	Persen	7,06	6,6	6,52	7,20	6,49	6,22	6,73	6,11	5,99	5,88	5,88
		Indeks Gini	Nilai 0-2	0,28	0,27	0,257	0,260	0,256	0,26		0,26	0,26	0,26	0,26
3.3.1	Menurunnya tingkat kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka	1,01	0,81	0,7	1,15	0,90	0,588	0,91	0,534	0,48	0,426	0,426
		Indeks Keparahan Kemiskinan	Angka	0,19	0,16	0,19	0,29	0,19	0,15	0,23	0,14	0,13	0,12	0,12
3.3.2	Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Persen	95,24	96,17	96,2	97,8	98,45	96,8	98,89	97	97,5	97,8	97,8
		Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Persen	83,94	84,08	84,7	98,37	78,43	84,9	79,6	84,95	85	85	85

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN					TAHUN 2023		TARGET			KONDISI AKHIR RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	TARGET	REALISASI	2024	2025	2026	
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	65,94	71,41	100	100	100	100	98,45	100	100	100	100

6.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam membangun daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mensejahterakan masyarakat dapat diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan tersebut harus memberikan manfaat (*benefit*) yang diperoleh dari indikator hasil (*outcome*) yang akan teras setelah beberapa waktu kemudian dan indikator kinerja juga dapat memberikan dampak (*impact*) atau adanya perubahan dari hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penggunaan indikator kinerja yang memberikan *benefit* dan *impact* dijabarkan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ini berdasarkan 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum. Aspek-aspek kinerja tersebut akan menggambarkan keadaan sesungguhnya kondisi daerah apakah berhasil dalam membangun daerah, memberikan layanan yang prima kepada masyarakat dan dapat mensejahterakan masyarakatnya. Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6. 2 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Belitung Timur

[illegible]

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
	PDRB per tenaga kerja											
	- Sektor industri pengolahan	Persen	5,43	6,19	6,86	3,11	7,2	3,11	7,54	7,88	8,22	8,22
	- Sektor pariwisata	Persen	13,6	14,29	12,5	22,96	12,06	22,96	11,75	12,19	15,43	15,43
	- Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	35,32	38,54	44,55	6,72	46,33	4,98	48,11	49,9	51,8	51,8
18	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Persen	71,37	71,33	69	67,36	69,25	97,59	69,5	69,75	70	70
19	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	Persen	33,76	33,04	33,5	41,1	33,75	41,1	34	34,25	34,5	34,5
20	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	83,17	82,23	85,3	83,76	87	84,09	87,3	88,31	89	89
21	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	12,55	13,16	13,73	13	14,03	13	14,17	14,38	14,81	14,81
22	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
23	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	77,6	84,6	83,3	82,7	84,4	85,40	85,4	86,5	87,5	87,5
24	Penguatan cadangan pangan	Ton	0	10	30	40	40	40	50	60	70	70
25	Penanganan daerah rawan pangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
26	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	Persen	3,48	3,82	3,95	NA	4,01	NA	4,12	4,25	4,38	4,38
27	Kontribusi sektor pertanian	Persen	0,48	0,12	3,15	NA	0,09	NA	0,11	0,15	0,23	0,23

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
	(palawija) terhadap PDRB											
28	Produksi sektor pertanian (padi, sawah, padi bukan sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar)	Ton	6.125,80	6.257,59	10.409,96	3.687,65	10.859,96	2437,53	11.309,96	11.759,96	12.209,96	12.209,96
29	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen	3,4	3,7	3,8	NA	3,92	NA	4,01	4,1	4,15	4,15
30	Produksi sektor perkebunan (lada, karet, kelapa sawit, kepala, kopi, aren, kemiri, jambu mete)	Ton	9.879,32	10.039,72	10.539	10.161,22	11.039	10.109,32	11.539	12.039	12.539	12.539
31	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persen	3,48	3,82	3,95	NA	4,01	NA	4,12	4,25	4,38	4,38
32	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	2,48	2,48	2,5	2,6	2,6	2,6	2,7	2,8	2,9	2,7
33	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	10,51	9,66	9,67	10,70**	9,68	10,72	9,69	9,7	9,71	9,71
34	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	19,83	19,83	19,87	20,79**	19,88	20,59	19,89	19,9	20	20
35	Pertumbuhan industri	Persen	9,96	5,73	5,8	5,08	5,85	13,56	5,9	5,95	6	6
II.	ASPEK DAYA SAING DAERAH											
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Juta	20.140.404	20.115.096	22.255.008	22.890.000	23.324.964	22.890.000	24.394.920	25.464.876	26.534.832	26.534.832
2	Nilai Tukar Petani	Persen	80,01	103,94	86,25	125,55	87,37	125,55	90,25	92,31	95,65	95,65

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	Persen	50,97	48,02	48,31	48,09	47,21	48,09	47,64	46,25	45,78	45,78
4	Rasio ekspor + impor terhadap pdb (indikator keterbukaan ekonomi)	Rasio	0,0154	0,0144	0,02	0,0131	0,0152	0,1867	0,0154	0,0156	0,0158	0,0158
5	Rasio ketergantungan	Persen	44,2	43,9	43,36	40,83	43,087	40,83	42,82	42,554	42,29	42,29
6	Angka kriminlitas yang ditangani	Persen	75,5	101,4	100	100	100	100	100	100	100	100
III.	ASPEK PELAYANAN UMUM											
A.	Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar											
1	Pendidikan											
1.1	Angka Partisipasi Kasar TK/PAUD	Persen	61,52	55,42	62,2	62,14	66,2	84,56	70,2	74,2	78,2	78,2
1.2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	Persen	102,3	101,78	103	100,94	106	99,05	109	112	115	115
1.3	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ Paket B	Persen	88,34	90,9	92	88,02	94	90,47	96	98	99	99
1.4	Angka Pendidikan yang ditamatkan (SMP)	Persen	NA	14,44	15,5	14,07	16,5	14,07	17,5	18,5	19,5	19,5
1.5	Angka Partisipasi Murni PAUD	Persen	58,13	55,42	61,09	52,11	64,14	52,11	67,34	70,7	74,23	74,23
1.6	Angka Partisipasi Murni SD	Persen	98,61	88,94	89	88,85	90	88,85	91	93	95	95
1.7	Angka partisipasi Murni SMP	Persen	64,63	46,31	54	45,78	58	45,78	62	66	70	70
1.8	Angka Partisipasi Sekolah dikdas	Persen	NA	75,31	80	95,92	84	95,92	88	92	96	96
1.9	Angka Putus Sekolah SD	Persen	0,3	0,01	0,05	0,07	0,03	0,07	0,01	0	0	0

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
1.10	Angka Putus Sekolah SMP	Persen	1,94	1,26	1,06	2,08	0,86	2,08	0,66	0,46	0,25	0,25
1.11	Angka Kelulusan SD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.12	Angka Kelulusan SMP	Persen	100	100	100	99,55	100	99,55	100	100	100	100
1.13	Angka Melanjutkan SD Ke SMP	Persen	93,74	93,54	96	93,88	98	93,88	99	100	100	100
1.14	Angka Melanjutkan SMP Ke SMA	Persen	95,14	99,94	99	98,77	100	98,77	100	100	100	100
1.15	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	Persen	100	100	100	86,54	100	86,54	100	100	100	100
1.16	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	Persen	100	100	100	87,5	100	87,5	100	100	100	100
1.17	Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SD)	Rasio	NA	170	171	78,31	172	78,31	173	174	175	175
1.18	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah (SMP)	Rasio	NA	39	40,2	39,04	40,3	39,04	40,4	40,5	40,6	40,6
1.19	Rasio guru/murid sekolah pendidikan SD per 10.000	Rasio	NA	14	14	16,62	15	16,62	15	16	16	16
1.20	Rasio guru/murid sekolah pendidikan SMP per 10.000	Rasio	NA	15	15	17,5	15	17,5	16	16	16	16
1.21	Rasio guru /murid per kelas	Rasio	NA	14	14	14,38	15	14,38	15	16	16	16

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
	rata-rata sekolah Pendidikan Dasar											
1.22	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Rasio	NA	15	15	97,06	15	97,06	16	16	16	16
1.23	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki2	Persen	NA	96,5	97	100	98	100	99	100	100	100
1.24	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	99,57	99,9	100	100	100	100	100	100	100	100
1.25	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	Persen	95,35	97,15	98	88,82	99	88,82	100	100	100	100
1.26	Guru yang bersertifikat pendidik	Persen	88,9	85,83	86,81	62,47	87,02	47,83	87,23	87,44	87,65	87,65
1.27	Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Persen	66,89	68,8	69,36	88,17	69,71	88,17	70,06	70,41	70,76	70,76
1.28	Persentase warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	78,95	96,96	100	34,98	100	34,98	100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
1.29	Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	10,32	36,82	100	87,58	100	87,58	100	100	100	100
1.30	Persentase SD/MI berakreditasi minimal A	Persen	61,36	68,94	100	13,33	100	13,33	100	100	100	100
1.31	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal A	Persen	NA	14,15	19,05	44	22,86	44	26,67	30,48	34,29	34,29
2.	Kesehatan											
2.1	Kabupaten Sehat	Predikat	NA	NA	Padapa	0	Wiwerda	Padapa	Wiwerda	Wistara	Wistara	Wistara
2.2	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Persen	96,17	96,2	96,5	98,45	96,8	98,89	97	97,5	97,8	97,8
2.3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1.000 KH	11,55	10,92	10	11,8	9,7	14,17	9,5	9	8,95	8,95
2.4	Angka Kelangsungan hidup bayi	Per 1.000 KH	988,45	989,08	990	988,2	990,3	985,83	990,5	991	991,05	991,05
2.5	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	Per 1.000 KH	13,56	13,76	13,6	14,6	13,5	14,17	13,4	13,3	13	13
2.6	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	Per 1.000 KH	6,53	8,54	7,5	8,4	7	12,6	6,9	6,7	6,5	6,5
2.7	Angka Kematian Ibu per 1.00.000 kelahiran hidup	Per 100.000 KH	452,03	189,84	130	168,44	130	1,57	120	100	49	49
2.8	Rasio Posyandu persatuan balita	Per 1.000 balita	1,43	1,28	1,25	1,89	1,2	1,81	1,2	1,15	1,15	1,15

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
2.9	Rasio Puskesmas, poliklini, pustu per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	24,33	23,89	23,5	22,70	22,9	23,25	22,6	22,5	22,22	22,22
2.10	Rasio Rumah sakit per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	0,81	0,8	0,8	0,78	0,79	0,77	0,78	0.76	0,75	0,75
2.11	Rasio Dokter (umum dan gigi) per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	43,79	50,96	49	64,54	48	51,92	47,6	47,5	47,4	47,4
2.12	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	44,6	66,88	65	64,54	64	58,89	63,5	63	62,22	62,22
2.13	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	111,8	96,08	96	106,96	96	95,99	96	96	96	96
2.14	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	84,36	98,74	98	100,73	98	90,04	98	98	98	98
2.15	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	100	100	100	98,2	100	100	100	100	100	100
2.16	Cakupan Balita gizi buruk mendapatkan perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.17	Persentase anak usia 1 tahun yg diimunisasi campak	Persen	97,75	92,03	92	97,1	93	95,85	93	94	95	95
2.18	Non Polio AFP rate 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	3,23	0	1,48	0	1,48	0	1,48	1,48	1,48	1,48

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
2.19	Cakupan Balita pneumonia yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.20	Cakupan Penemuan dan penanganan penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.21	Penderita diare yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.22	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Per 100.000 penduduk	1,68	1,68	1,66	0,9	1,64	0,9	1,62	1,6	1,57	1,57
2.23	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.24	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	82,03	89,03	100	81,52	100	85,26	100	100	100	100
2.25	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	84,36	98,6	100	80,69	100	90,04	100	100	100	100
2.26	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	98,74	100	100	84,57	100	94,15	100	100	100	100
2.27	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	81,75	100	100	92,45	100	98,15	100	100	100	100
2.28	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	Persen	100	100	100	99,96	100	98,74	100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
	kesehatan sesuai standar											
2.29	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	54,11	75,66	100	73,00	100	88,49	100	100	100	100
2.30	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	71,17	71,3	100	80,09	100	87,07	100	100	100	100
2.31	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	66,84	80,54	100	85,30	100	78,37	100	100	100	100
2.32	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	98,6	99,37	100	93,80	100	95,3	100	100	100	100
2.33	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	98,01	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.34	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	94,67	87,09	100	124,75	100	64,35	100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
2.35	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	64,99	67,01	100	124	100	93,81	100	100	100	100
2.36	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	23,51	23,08	22,7	22,7	22,4	23,25	22,1	21,8	21,5	21,5
2.37	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	0,81	0,8	0,78	0,78	0,77	0,77	0,76	0,75	0,74	0,74
2.38	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	42,98	56,53	55,7	64,54	54,9	51,92	54,1	53,3	52,5	52,5
2.39	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	50,28	63,7	62,8	64,54	61,9	58,89	61	60,1	59,2	59,2
2.40	Cakupan pelayanan kesehatan esensial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.41	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.42	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.43	Persentase rumah sakit terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.44	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	96,17	96,2	96,3	98,45	96,35	98,89	96,4	96,45	96,5	96,5

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
2.45	Proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi	Persen	60	60	66	100	67	100	68	69	70	70
2.46	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	85,71	100	85,71	100	100	100	100
2.47	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.48	Proporsi pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.49	Persentase Penggunaan Obat Rasional	Persen	88	87	92	95	94	92	95	95	95	95
2.50	Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat sesuai standar	Persen	56,7	55,17	55,3	58,81	55,5	58,54	55,7	55,9	56	56
2.51	Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan	Persen	96,17	96,24	96,6	97	96.7	97,8	96,8	96,9	97	97
2.52	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.53	Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	Persen	33,33	38,46	51,28	66,6	66,67	66,67	76,92	89,74	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
2.54	Persentase kelurahan/desa yang melaksanakan pembinaan posyandu aktif	Persen	51,28	66,67	89,74	99,25	94,87	N/A	100	100	100	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
3.1	Indeks Infrastruktur Wilayah	Nilai	49,04	61,97	64,95	67,79	67,23	72,87	69,59	72,02	74,52	74,52
3.2	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai	49,04	61,97	64,95	64,08	67,23	65,50	69,59	72,02	74,52	74,52
3.3	Persentase capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum	Persen	83,23	86	92	89,89	94	91,94	96	98	100	100
3.4	Persentase penanganan drainase lingkungan dan perkotaan	Persen	Na	20	20	33	40	43,05	60	80	100	100
3.5	Persentase penanganan jalan kabupaten	Persen	Na	56,99	58,2	58,64	59,6	54,08	61,09	62,41	62,85	62,85
3.6	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir dan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur	Persen	Na	Na	20	11	40	48,60	60	80	100	100
3.7	Persentase pengelolaan irigasi kewenangan kabupaten	Persen	Na	25,2	28,17	30,15	31,14	36,93	33,61	36,58	39,05	39,05
3.8	Persentase ketersediaan	Persent	Na	Na	14	28	42	28	71	85	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
	dokumen rencana tata ruang											
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman											
4.1	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Nilai	63,89	66,17	71,96	53,32	73,48	65,37	75	76.52	78,04	78,04
4.2	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana,utilitas (PSU)	Persen	NA	100	100	99,35	100	99,35	100	100	100	100
4.3	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Persen	NA	NA	95,57	87,19	96,6	90,20	97,7	98,8	99,9	99,88
4.4	Rasio rumah layak huni	Persen	45,6	46,4	48	52,29	49	40,31	49,5	50,5	51,5	51,5
4.5	Rasio permukiman layak huni	Persen	NA	NA	99,2	99,35	99,4	99,35	99,6	99,8	100	100
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat											
5.1	Indeks Risiko Bencana	Persen	117,88	NA	168,40	168,40	168,40	155,61	168,40	168,40	168,40	168,40
5.2	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	Persen	100	100	100	100	100	74,10	100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
1.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	71,37	71,33	72,3	67,32	72,4	70,48	72,5	72,6	72,7	72,7
1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,71	3,93	3,48	2,50	3,46	2,41	3,4	3,35	3,3	3,3
1.3	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi yang terserap	Persen	0,24	2,43	2,6	2,55	2,7	2,37	2,8	2,9	3	3
1.4	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Persen	84,08	84,7	84,85	84,85	84,9	79,60	84,95	85	85	85
1.6	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Persen	NA	68,52	69	69,23	69,25	70,48	69,5	69,75	70	70
1.7	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	118,8	35	40	29,17	45	36	45	50	50	50
1.8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	97	24,27	35	27,27	36	27,27	37	38	40	40
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	96	29,12	40	51,02	40	51,02	60	60	60	60
1.10	Persentase Tenaga Kerja Formal	Persen	NA	49	49,55	50,49	49,6	53,25	49,7	49,8	49,8	49,8
1.11	Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian	Persen	NA	NA	4	24,73	5	24,73	6	6,5	7	7

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
1.12	Persentase Setengah Pengangguran	Persen	NA	NA	28,2	0,47	28	0,47	27,9	27	27	27
1.13	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun	Persen	13	9	10	6,7	10	5	9	9	8	8
1.14	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	85	88,89	89	60	89,2	100	89,4	89,6	89,8	90
1.15	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	84,08	84,69	85,3	78,43	85,8	77,97	86,4	87	88	88
1.16	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma K3	Perusahaan	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5
1.17	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
2.1	Anugrah Parahita Ekapraya	Predikat	NA	NA	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Utama	Utama
2.2	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Predikat	NA	NA	Pratama	Madya	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Utama	Madya
3	Pangan											
3.1	Ketersediaan Energi perkapita	kkal/kapita/ hari	0	0	2,496	2,549	2,546	2,596	2,597	2,623	2,650	2,650

[illegible]

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
6.1	Perekaman KTP Elektronik	Persen	97,85	99,04	100	99,63	100	98,92	100	100	100	100
6.2	Penerbitan akta perkawinan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.3	Penerbitan akta perceraian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.4	Penerbitan akta kematian	Persen	98,22	96,46	100	89,38	100	100	100	100	100	100
6.5	Penyajian data kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.6	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	64,45	71,23	80	77,14	100	83,14	100	100	100	100
6.7	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	98,71	98,96	99	99,59	100	99,58	100	100	100	100
6.8	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	NA	NA	30	52,17	50	52,17	80	100	100	100
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
7.1	Persentase kerjasama antardesa terlaksana dan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat	Persen	NA	NA	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
	Yang Diberdayakan (%)											
7.2	Persentase Desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan (%)	Persen	NA	NA	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
8.1	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	1,93	0,46	0,46	1,48	0,46	1,45	0,46	0,46	0,46	0,46
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	Per perempuan	2,5	2,22	2,2	1,74	2,19	1,99	2,18	2,15	2,1	2,1
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	26,6	30	30	20,00	30	30	30	33,3	33,3	33,3
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	6,6	6,6	6,6	20,00	6,6	6,6	6,6	10	10	10

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.6	Jumlah sector yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	sector	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan kependudukan	Lembaga	13	0	13	13	13	13	13	13	13	13
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga		2	2	2	1,74	2	2	2	2	2	2
8.9	Ratio Akseptor KB	Persen	67	44	43	82,68	41	82,68	39	37	35	35
8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	Persen	106	113	89,7	82,68	89,8	83,54	89,8	89,9	90	90
8.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 – 19) per 1.000 perempuan usia 15 – 19 tahun (ASFR 15 – 19)	Per 1.000 Perempuan	29,1	39,83	37	30,56	35	31,52	33	31	29	29

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
8.12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	7,8	7,95	8,3	12,59	8,5	5.5	8,7	8,9	9,1	9,1
8.13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	11,37	13,28	15,3	15,18	15,8	13,85	16,3	16,8	17,3	17,3
8.14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	106,1	88,64	62	76,07	64	76,07	66	68	70	70
8.15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	88,53	85,74	80,17	97,44	77,39	72,8	74,6	71,82	69,03	69,03
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	80,76	75,58	65,21	85,35	60,02	50,7	54,84	49,65	44,47	44,47
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	63,18	56,64	43,55	12,27	37	3,31	30,46	23,91	17,37	17,37
8.18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	Persen	42,85	28,57	42,85	14,28	42,85	14.28	42,85	42,85	42,85	42,85
8.19	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Orang	23	23	23	23	23	24	23	23	23	23

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
8.20	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	172	204	268	108	300	43,54	332	364	396	396
8.21	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	58,97	58,97	58,97	58,97	58,97	100	58,97	58,97	58,97	58,97
8.22	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.23	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	57,14	78,57	78,57	100	78,57	86,2	78,57	78,57	85,71	85,71
8.24	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	25	22,59	23	21,1	23,5	19,9	24	24,5	25	25
8.25	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan	Persen	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
	Keluarga melalui APBD dan APBDes											
8.26	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persentase	87,58	89,7	89,7	76,08	89,7	81,93	89,7	89,7	89,7	89,7
9	Perhubungan											
9.1	Rasio konektivitas antar wilayah	Persen	42	45,9	52,2	49,5	55,2	48,5	63,1	71	75,6	75,6
9.2	Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen	0,02	0,13	0,03	0,03	0,03	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04
9.3	Persentase pembangunan pelabuhan orang dan barang	Persen	33,33	33,33	33,33	33,33	66,67	33,33	100	100	100	100
9.4	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan berlalu lintas	Persen	NA	9,93	12	14,49	15	14,77	20	25	30	30
9.5	Persentase Pemenuhan Insfrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persen	NA	9,93	17	25,64	25	26,39	27	32	35	35
9.6	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	47,36	15,45	19,09	5,54	22,73	31,46	24,55	27,27	31,82	31,82
9.7	Persentase Pemenuhan	Persen	NA	56,79	60,49	48,21	62,96	60,94	65,43	65,43	66,67	66,67

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
	Infrastruktur Pelayaran											
9.8	Jumlah penumpang yang melalui Terminal/Dermaga /Pelabuhan	Orang	7084	8738	9861	20867	10566	22.890	10730	10532	10701	10701
10	Komunikasi dan Informatika											
10.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka Indeks	2,55	3,15	2,7	2,7	2,8	3,56	2,9	3	3,1	3,1
10.2	Persentase digitalisasi layanan administrasi pemerintahan	Persen	NA	NA	5%	6,25%	10%	21,21%	15%	20%	25%	25%
10.3	Persentase digitalisasi layanan publik	Persen	NA	NA	5%	6,25%	10%	18,18%	15%	20%	25%	25%
10.4	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	Persen	66%	67%	70%	84,23%	75%	86,11%	80%	83%	85%	85%
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
11.1	Persentase koperasi aktif	Persen	60,68	62,09	63,2	43,57	63,3	56,46	63,4	64,5	64,6	64,6
11.2	Persentase koperasi sehat	Persen	9,76	NA	12,19	12	12,19	0	14,63	14,63	17,07	17,07

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
11.3	Persentase usaha mikro yang naik kelas	Persen	0,029	0,086	2	13,19	2,1	7,56	2,2	2,3	2,4	2,4
11.4	Persentase usaha mikro yang mempunyai izin usaha	Persen	0,034	0,087	0,5	0,5	0,55	0,5	0,6	0,65	0,75	0,75
11.5	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	56,46	100	100	100	100
11.6	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Persen	73,17	NA	73,17	100	78	100	78	85	85	85
11.7	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	46,43	100	44,9	100	100	100	100
11.8	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian dengan wilayah keanggotaan	Persen	2,06	2,06	2,1	0,66	2,15	0,67	2,2	2,25	2,3	2,3

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
	lintas daerah kabupaten/kota											
11.9	Persentase fasilitasi penerbitan Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Persen	40,85	37,66	38,5	20	38,5	19,05	39	39	40	40
11.10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Persen	0,85	NA	1	3,57	1	3,4	1,2	1,2	1,5	1,5
11.11	Persentase koperasi yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	41,5	100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
11.1 2	Persentase koperasi yang diberikan fasilitasi dukungan kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Persen	4,27	6,45	8	42,14	9	41,5	10	11	12	12
11.1 3	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persen	NA	0,087	0,1	0,09	0,11	0,14	0,11	0,12	0,12	0,12
11.1 4	Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun	Persen	NA	NA	0,09	0,09	0,1	0,14	0,1	0,11	0,11	0,11
11.1 5	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput kedalam system <i>Online Data System</i> (ODS)	Persen	NA	0,083	0,04	0,093	0,04	0,14	0,05	0,05	0,06	0,06
11.1 6	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Persen	NA	NA	0,11	0,04	0,11	0,041	0,12	0,12	0,13	0,13
11.1 7	Persentase jumlah usaha mikro yang yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Persen	NA	0,091	0,009	0,0074	0,009	0,013	0,01	0,01	0,011	0,011
11.1 8	Persentase jumlah usaha mikro yang	Persen	NA	0,008	0,045	0,075	0,046	0,072	0,047	0,048	0,05	0,05

[illegible]

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	100	100	100	83,87	100	100	100	100	100	100
13.2	Persentase wirausaha muda	Persen	1.39	2	2	1,8	2.25	84.44	2.5	2.75	3	3
13.3	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	85	85	100	100	100	83.90	100	100	100	100
13.5	Cakupan Pembinaan atlet muda	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Statistik											
14.1	Sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15	Persandian											
15.1	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	Level	Belum ada penilaian	Belum ada penilaian	Level II	Level II	Level II	Level II	Level III	Level III	Level III	Level III
16	Kebudayaan											
16.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan	persen	NA	NA	55	55	60	55	65	70	75	65
16.2	Terwujudnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	benda/situs/ kawasan	628	1647	50	1421	100	1434	150	200	250	150
16.3	Terwujudnya pengelolaan	museum/ galeri maritim	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
	Museum dan Galeri Maritim											
17	Perpustakaan											
17.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	NA	74,67	74,7	69,01	74,75	69,34	74,8	74,85	75,9	75,9
17.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	NA	23,21	23,25	23,02	23,26	17,44	23,27	23,29	23,45	23,45
18	Kearsipan											
18.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawab an nasional	Persen	NA	64,25	65	76,08	66	76,07	67	68	69	69
18.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawab an setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	NA	61,83	62	96,66	63	100	64	65	66	66

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
C.	Fokus Layanan Urusan Pilihan											
1.	Pariwisata											
1.1	Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi makan dan minuman	Persen	7,12	-3,47	3,4	13.08	3,6	13.08	3,8	4	4,2	4
1.2	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	-21,47	-74,09	15	56	15	95	15	15	15	15
1.3	Lama Tinggal Wisatawan (<i>length of stay</i>)	Hari	1	1	1	1	2	1	2	2	3	2
2	Pertanian											
2.1	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	3,46	6,14	3,70	1,51	3,90	1,51	4,10	4,30	4,50	4,50
2.2	Produksi sektor pertanian (padi sawah, padi bukan sawah, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar)	Ton	0,00	0,00	10.409,96	3.687,65	10.859,96	2.437,53	11.309,96	11.759,96	12.209,96	12.209,96
2.3	Produksi sektor perkebunan (lada, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, aren, kemiri, jambu mete)	Ton	0,00	0,00	10,539	10.161,22	11,039	10.109,32	11,539	12,039	12,539	12,539

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
2.4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton Per Hektar	0	0	3,799	5,7	3,979	5,7	4,159	4,339	4,519	4,519
2.5	Cakupan bina kelompok petani	Kelompok Tani	0	0	201	427	221	324	241	261	281	281
2.6	Produktivitas hewan ternak dan sejenisnya	Ekor	0	0	1904	1958	1904	2085	2181	2341	2517	2517
3	Perdagangan											
3.1	PDRB Sektor Perdagangan	Milyar Rupiah	578,29	527,72	548,96	634,50**	559,94	665,92	571,14	579,71	585,51	585,51
4	Perindustrian											
4.1	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	persen	2,81	-0,64	3,11	5,96**	3,25	3,68	3,40	3,54	3,69	3,69
4.2	Nilai produksi industri kecil dan menengah sektor pangan dan kerajinan	Rupiah	NA	231.367.634	##### ###	266.008.176	254.902.923	2.672.217.120	267.557.653	280.843.311	294.791.408	1.340.944.405,00
5	Kelautan dan Perikanan											
5.2	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	2,69	-8,87	1	-2,37	1	2,57	1	1	1	5
5.3	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	81	8,25	5,5	43,26	6,5	649,15	7,5	8,5	10	38

[illegible]

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
2.4	Persentase Realisasi SP2D Tepat Waktu	Persen	100	100	95	95	96	95	97	98	99	99
2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	angka (tepat/tidak)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.6	Kesesuaian Barang Milik Daerah dengan Nilai Aset di Neraca	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.7	Kemandirian keuangan daerah	Persen	12,55	13,16	13,73	13	14,03	13	14,17	14,38	14,81	14,81
2.8	Persentase Belanja Pendidikan	Persen	25	25	≥ 20	23	≥ 20	26	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20
2.9	Persentase Belanja Kesehatan	Persen	17	20	≥ 10	36	≥ 10	25	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 10
2.10	Persentase SiLPA terhadap APBD	Persen	9	13	44.477	13,15	44.477		44.477	44.477	44.477	44.477
2.11	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Rasio	NA	27	27	38,58	27	34	27	27	27	27
2.12	Persentase Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Persen	NA	NA	0,8	1	0,81	1	0,83	0,87	0,88	0,88
2.13	Rasio Belanja urusan Pemerintahan Umum	Rasio	87	81	85	72,5	85	85	85	85	85	85
2.14	Assets Management	angka (ada/tidak)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.15	Rasio PAD terhadap komponen pendapatan daerah	Rasio	12,55	13,16	13,73	13	14,03	13	14,17	14,38	14,81	14,81

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
6.1	Persentase bantuan partai politik	Persen	60	60	70	100	75	100	75	75	75	75
6.2	Indeks partisipasi politik	Persen	71	71	74	74	75	75	77	80	82	82
6.3	Meningkatnya peran FPK	Persen	25	30	40	35	47	50	55	65	75	75
6.4	Meningkatnya peran intelijen	Persen	30	33	35	33	40	60	50	60	80	80
6.5	Menurunnya kasus penggunaan obat terlarang	Jumlah	8	6	2	2	2	2	0	0	0	0
7.	Pengawasan											
7.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	51,52	53,12	55	58,2	58	76,44	61	63	65	65
7.2	Maturitas SPIP	Level	2	2	3	2	3	2	4	4	5	5
7.3	Kapabilitas APIP	Level	2	2	3	2	3	2	4	4	5	5
7.4	Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan/rekomen dari hasil pemeriksaan BPK	Persen	85,91	85,91	87	93,04	89	93,04	91	93	96	96
8.	Kewilayahan - Kecamatan											
	Kecamatan Manggar											
8.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	81,3	81,31	81,33	81,33	81,34	81,33	81,35	81,36	81,37	81,37
8.2	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	Persen	NA	NA	80	100	85	100	90	95	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Capaian Pada Tahun				Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Target) Tahun 2023		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
							Target	Realisasi				
8.3	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	Persen	NA	NA	100	97	100	97	100	100	100	100
	Kecamatan Damar											
8.4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	76,61	76,16	80	84,37	84,5	88,72	85	86	87	87
8.5	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	100	99,61	100	100	100	100	100	100
8.6	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	Persen	100	100	100	81,91	100	100	100	100	100	100
	Kecamatan Kelapa Kampit											
8.7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	83,74	78,13	85	83,46	86	87,48	87	88	89	89
8.8	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.9	Persentase pengendalian dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di tingkat Desa	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Kecamatan Simpang Renggiang											
8.10	Indeks Kepuasan Masvarakat (IKM)	Persen	80,50	82,02	82,75	85,58	83,02	83,64	83,50	84,05	85,01	85,01

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dengan dilaksanakannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan, maka diharapkan akan meningkatkan mutu pelayanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diundangkan pada tanggal 24 Desember 2021 ditetapkan dengan pertimbangan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penerapan standar pelayanan minimal sehingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditambah pula dengan peraturan terkait masing-masing kementerian, maka pemerintah daerah melalui perangkat daerah harus menerapkan SPM secara efektif.

SPM yang ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. SPM digunakan sebagai input/ bahan masukan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah. Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM ke dalam RPJMD dan rencana Strategis OPD. Pemerintah daerah menyusun target tahunan pencapaian SPM ke dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD).

Rencana pencapaian SPM tersebut perlu disinkronkan dan diintegrasikan dalam RPJMD dan renstra OPD. Target tahunan pencapaian SPM dituangkan dalam RKPD, kebijakan umum anggaran (KUA) renja dan anggaran OPD (RKA-OPD) dengan memperhatikan kemampuan daerah. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat, dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik.

Penetapan target SPM Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6. 3 Target Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025

NO.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR		SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2021	CAPAIAN		TARGET TAHUNAN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	RUMUS
					2022	2023	2024	2025	2026		
A.	P E N D I D I K A N										
	1	Pendidikan Anak Usia Dini	persen	87,58	89,1	83,30	100	100	100	100	Jumlah penduduk usia 5 - 6 tahun yang mengikuti PAUD Jumlah seluruh Penduduk usia 5 - 6 tahun
	2	Pendidikan Dasar	persen	88,17	95,09	95,08	100	100	100	100	Jumlah Penduduk Usia 7 - 15 tahun yang mengikuti pendidikan dasar Jumlah seluruh Penduduk usia 7 - 15 tahun
	3	Pendidikan kesetaraan	persen	36,21	46,81	77,66	100	100	100	100	Jumlah Penduduk Usia 7 - 18 tahun yang mengikuti pendidikan kesetaraan Jumlah Penduduk Usia 7 - 18 tahun yang wajib mengikuti pendidikan kesetaraan
B.	S O S I A L										
	1	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	persen	100	94,67	81,06	100	100	100	100	jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapat pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar di luar panti dalam kurun waktu satu tahun jumlah penyandang disabilitas terlantar di kabupaten / kota dalam kurun waktu satu tahun
	2	rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	persen	100	94,67	86	100	100	100	100	jumlah anak terlantar yang mendapat pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti dalam kurun waktu satu tahun jumlah anak terlantar di kabupaten/ kota dalam kurun waktu satu tahun

NO.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR		SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2021	CAPAIAN		TARGET TAHUNAN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	RUMUS
					2022	2023	2024	2025	2026		
	3	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	persen	100	94,67	87,27	100	100	100	100	jumlah lanjut usia terlantar yang mendapat pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti dalam kurun waktu satu tahun jumlah lanjut usia terlantar di kabupaten/ kota dalam kurun waktu satu tahun
	4	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	persen	100	84	80	100	100	100	100	jumlah warga negara yang menjadi korban bencana kabupaten/kota yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota dalam kurun waktu satu tahun jumlah warga negara yang menjadi korban bencana kabupaten/ kota dalam kurun waktu satu tahun
C.	KESEHATAN										
	1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	persen	84,84	84,94	88,21	100	100	100	100	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
	2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	persen	91,22	84,55	92,03	100	100	100	100	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
	3	pelayanan kesehatan bayi baru lahir	persen	94,57	87,65	95,32	100	100	100	100	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun

NO.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR		SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2021	CAPAIAN		TARGET TAHUNAN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	RUMUS
					2022	2023	2024	2025	2026		
	4	pelayanan kesehatan balita	persen	96,89	93,84	93,37	100	100	100	100	Jumlah balita 0–59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah balita 0–59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam
	5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	persen	98,89	100	97,32	100	100	100	100	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran.
	6	pelayanan kesehatan pada usia produktif	persen	80,16	68,67	89,70	100	100	100	100	Jumlah pengunjung usia 15–59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah warga negara usia 15–59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
	7	pelayanan kesehatan pada usia lanjut	persen	70,03	79,48	89,57	100	100	100	100	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan
	8	pelayanan kesehatan penderita hipertensi	persen	80,08	87,82	80,20	100	100	100	100	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan

NO.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR		SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2021	CAPAIAN		TARGET TAHUNAN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	RUMUS
					2022	2023	2024	2025	2026		
	9	pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	persen	92,15	95,32	94,61	100	100	100	100	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama
	10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	persen	87,5	92	91,43	100	100	100	100	Jumlah ODGI berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah ODGI berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
	11	pelayanan orang terduga tuberkulosis	persen	100	100	70,42	100	100	100	100	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama
	12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	persen	75,59	100	93,05	100	100	100	100	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama
D.	TIBUMLINMAS										
	1	Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	persen	100	88,15	92,22	100	100	100	100	Jumlah Warga negara yang mendapatkan pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi Jumlah Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda kabupaten/ kota serta Perkada.

NO.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR		SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2021	CAPAIAN		TARGET TAHUNAN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	RUMUS
					2022	2023	2024	2025	2026		
	2	warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar informasi rawan bencana	persen	92,9	100	95	100	100	100	100	Jumlah warga negara yang mendapat pelayanan Informasi Rawan Bencana di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Jumlah warga negara yang seharusnya mendapat pelayanan informasi rawan bencana di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban
	3	Warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	40	100	100	100	100	100	100	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Warga Negara yang seharusnya memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	4	Warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Warga Negara yang seharusnya memperoleh layanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban bencana
	5	Warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	persen	25	90	95	100	100	100	100	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Warga Negara yang seharusnya memperoleh layanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

NO.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR		SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2021	CAPAIAN		TARGET TAHUNAN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	RUMUS
					2022	2023	2024	2025	2026		
E.	PEKERJAAN UMUM										
	1	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	persen	78,13	79,38	78	78,93	100	100	100	Jumlah Masyarakat yang mendapat pelayanan air minum layak Jumlah masyarakat yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
	2	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	persen	98,2	86,74	91,22	93,09	100	100	100	Jumlah Masyarakat yang mendapat pelayanan pengolahan air limbah domestik Jumlah masyarakat yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
F.	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN										
	1	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	persen	100	20	94,29	100	100	100	100	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang telah Memperoleh Rumah Layak Huni Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni
	2	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	persen	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang seharusnya memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni

Sumber : e-SPM Bangda, Tahun 2024 (diolah)

Prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis dan sasaran pembangunan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026. Selain itu, prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur juga diselaraskan dengan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dijabarkan dalam 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 8 (delapan) Urusan Pemerintahan Pilihan, 5 (lima) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diundangkan pada tanggal 24 Desember 2021 ditetapkan dengan pertimbangan bahwa peraturan menteri dalam negeri nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penerapan standar pelayanan minimal sehingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan dilaksanakannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan, maka diharapkan akan meningkatkan mutu pelayanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar

Pelayanan Minimal ditambah pula dengan peraturan terkait masing-masing kementerian, maka pemerintah daerah melalui perangkat daerah harus menerapkan SPM secara efektif.

SPM yang ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. SPM digunakan sebagai input/ bahan masukan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah. Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM ke dalam RPJMD dan rencana Strategis OPD. Pemerintah daerah menyusun target tahunan pencapaian SPM ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD).

Rencana pencapaian SPM tersebut perlu disinkronkan dan diintegrasikan dalam RPJMD dan renstra OPD. Target tahunan pencapaian SPM dituangkan dalam RKPD, kebijakan umum anggaran (KUA) renja dan anggaran OPD (RKA-OPD) dengan memperhatikan kemampuan daerah. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat, dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik.

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dijabarkan dalam 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 8 (delapan) Urusan Pemerintahan Pilihan, 5 (lima) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.

1. Pendidikan

Rencana Program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten melalui program pengelolaan pendidikan meliputi pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/kesetaraan. Untuk mendukung pencapaian SPM tersebut, beberapa kegiatan yang menjadi prioritas di Tahun 2025 meliputi Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah, Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah, Pengadaan perlengkapan sekolah, Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah, Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar bagi siswa kurang mampu, Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik, Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa, Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan

pendidikan sekolah, Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah, Pengelolaan Dana BOS, Pengadaan alat praktik dan peraga, Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, Pembinaan kelembagaan dan manajemen, serta Pengelolaan dana BOP PAUD.

Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada urusan pendidikan diselenggarakan dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke-3 yaitu Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitung Timur dan pengentasan kemiskinan. Untuk mendukung pencapaian Misi ke-3 RPJMD, selain dengan program prioritas juga diupayakan melalui program inovasi daerah YUK SEKULAH yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Penurunan Angka Putus Sekolah, meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah.

2. Sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Sosial dalam rangka mendukung pencapaian SPM bidang Sosial. Adapun rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Rehabilitasi Sosial. Program ini diarahkan pada:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial melalui penyediaan permakanaan, penyediaan sandang, penyediaan alat bantu, dan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- b. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/ kota melalui sub kegiatan penanganan khusus bagi kelompok rentan.

Program ini dilakukan untuk mendukung pemenuhan SPM Sosial dan pencapaian indikator kinerja persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), keluarga dan masyarakat yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti. Selain itu program tersebut selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi daerah ke-3 yaitu Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitung Timur dan pengentasan kemiskinan.

3. Kesehatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Kesehatan adalah dalam rangka memenuhi SPM Kesehatan adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Untuk optimalisasi penerapan SPM bidang Kesehatan, program ini diarahkan pada penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan

Tingkat daerah kabupaten/ kota. Program ini utamanya ditujukan dalam rangka mencapai indikator kinerja persentase capaian SPM bidang Kesehatan.

Program tersebut selaras dengan visi misi daerah terutama misi ke-3 yaitu Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitung Timur dan pengentasan kemiskinan, selain dengan program prioritas juga diupayakan melalui inovasi daerah YUK NYELIK PASIEN yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Layanan publik dengan bentuk pelayanan layanan lanjutan Kesehatan untuk memudahkan pelayanan publik langsung ke Masyarakat, dimana pasien yang baru pulang dari rumah sakit akan terus mendapatkan pengawasan dan perawatan oleh petugas setempat.

4. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian SPM bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, SPM Pemadam Kebakaran dan SPM Penanggulangan Bencana. Adapun rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini ditujukan untuk mendukung pencapaian indikator Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan), Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Persen). Program ini diarahkan pada:

- 1) penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan.
- 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan sub kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- 3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan pengembangan kapasitas dan karier PPNS

Program diatas selaras dengan misi daerah ke-3 yaitu Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitung Timur dan pengentasan kemiskinan. Selain dengan program prioritas juga diupayakan melalui aplikasi LEPAT (layanan elektronik pengaduan terintegrasi). Aplikasi LEPAT adalah inovasi untuk

menerima aduan masyarakat terkait Trantibum secara online dengan dukungan Tim Respon Cepat (TRC) Polisi Pamong Praja.

B. Program Penanggulangan Bencana

Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator jumlah sumber daya aparatur yang terlatih, Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap, Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang terpenuhi dan Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan penanggulangan bencana. Program ini diarahkan pada:

- 1) pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota melalui sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/Kota (per jenis bencana) dan penyusunan kajian risiko bencana kabupaten/kota
- 2) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/ kota, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/ kota, penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana kabupaten/ kota, penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/ kota, penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten/ kota, pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/ kota
- 3) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana melalui Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/ wabah zoonosis prioritas, Respon Cepat Darurat Bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota, serta penyediaan logistik, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, respon cepat bencana non alam epidemi/ wabah penyakit dan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana.
- 4) Penataan sistem dasar penanggulangan bencana melalui penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten/ kota, kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/ kota, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan dan penguatan kelembagaan bencana kabupaten/ kota

Program diatas selaras dengan misi daerah ke-3 yaitu Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitung Timur dan pengentasan kemiskinan.

C. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota. Program ini diarahkan pada pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota melalui:

- 1) Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota
- 2) Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri

Program diatas selaras dengan misi daerah ke-3 yaitu Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitung Timur dan pengentasan kemiskinan.

5. Pekerjaan Umum

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mendukung pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

A. Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Program ini ditujukan dalam rangka mendukung peningkatan persentase pelayanan air bersih dan pemenuhan SPM air minum yang diukur dengan indikator kinerja persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.

B. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah

Program ini diarahkan pada pengelolaan dan pengembangan system air limbah domestik dalam daerah kabupaten. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung peningkatan persentase pelayanan air limbah domestik dan pemenuhan SPM Pengolahan air limbah domestik yang diukur dengan indikator kinerja peningkatan persentase penyediaan pelayanan air limbah domestik setempat.

Program-program diatas selaras dengan misi daerah ke-3 yaitu Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitung Timur dan pengentasan kemiskinan. Selain dengan program prioritas juga diupayakan melalui inovasi aplikasi

Cempedik (Cepat Memperbaiki Aduan Infrastruktur). Aplikasi Cempedik adalah inovasi untuk menerima aduan masyarakat terkait infrastruktur secara online dengan dukungan Tim Respon Cepat (TRC) sehingga apabila ada laporan bisa cepat ditanggulangi.

6. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman dalam rangka pencapaian SPM Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman adalah Program Pengembangan Perumahan. Untuk pemenuhan SPM program ini diarahkan pada Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten dan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah kabupaten. Program ini untuk mendukung capaian indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni dan pemenuhan SPM Perumahan Rakyat.

Program diatas selaras dengan misi daerah ke-3 yaitu Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitung Timur dan pengentasan kemiskinan. Selain dengan program prioritas juga diupayakan melalui aplikasi PINTU (Portal Informasi Terpadu Perumahan Rakyat). Aplikasi PINTU adalah aplikasi untuk pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, analisa, dan penyajian data dan informasi, dan dilengkapi model *Decison Support System* untuk penanganan perumahan rakyat.

BAB VII PENUTUP

Keberhasilan pembangunan daerah di Kabupaten Belitung Timur harus diiringi oleh kualitas perencanaan yang sangat ditentukan oleh komitmen para pengelola program pembangunan dan partisipasi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mengimplementasikan perencanaan. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang disertai dengan keberlanjutan lingkungan.

RKPD disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya dan berpedoman pada dokumen perencanaan Nasional dan Provinsi, serta RPJMD tahun 2021-2026, maka perumusan baik tema dan sasaran pembangunan tahun 2025 disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan yang ada, dan memperhatikan isu strategis dan masalah mendesak, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2025 dilaksanakan dengan tema **“Memperkuat Daya Saing Daerah dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**

Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJMD Tahun 2021-2026, serta berbagai permasalahan pada BAB II dan isu serta tantangan yang harus dipecahkan dan diselesaikan pada tahun 2025, maka prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
3. Pengentasan Kemiskinan
4. Optimalisasi Peningkatan Daya Saing dan Percepatan Investasi
5. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Dalam rangka terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan konsistensi RKPD tahun 2025 dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur. Dengan harapan akan capaian target pembangunan Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2025, semoga upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, peningkatan daya saing dan investasi, infrastruktur, lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dapat membawa perubahan yang signifikan bagi kesejahteraan dan kemajuan seluruh masyarakat, serta menjadikan Kabupaten Belitung Timur sebagai contoh keberhasilan dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Kepala Bagian Hukum Setda
Kab. Belitung Timur,



Amrullah, SH
NIP. 197106022006041005